

PROSIDING

SEMINAR
HASIL PENELITIAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI ERA DISRUPSI

18 - 20 NOVEMBER 2019

Royal Padjadjaran Hotel, Bogor - Jawa Barat



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

PROSIDING HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN

Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Reviewer

Dr. Muktiono Waspodo, Prof. Dr. Karwono, M.Pd, Prof. Ahmad Sihabuddin,
Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D, Bahrul Hayat, Ph.D, Dr. Ir. Budi Susetyo,
Dr. Syaikhul Usman, Dr. Aos Santosa Hadiwijaya, Drs. Nandang Kosasih Ananda, M.A., Ph.D,
Dr. Ali Akbar, Cahyo Pamungkas, Ph.D, Dr. Wido Supraha,
S.S.T. Wisnu Sasangka, M.Si, Dr. Eka Dewi Nuraeni, S.TP, M.Pd

Penyunting Isi

Nur Berlian VA, M.S.E, Dra. Yendri Wirda, M.Si,
Irsyad Zamjani, Ph.D, Sugih Biantoro, M.Hum

Penyunting Bahasa

Ninawati Syahrul, M.Pd, S.R.H. Sitanggang, M.A,
Fitri Ratna Irmalasari, M.Hum

Panitia Pelaksana

Sugih Biantoro, M.Hum, Asri Joko Surono, S.Ip, Dra. Asri Ika Dwi Martini,
Drs. Agus Amin Sulistiono, M.Pd, Maya Indrya, A.Md, Kaisar Julizar, S.Sos,
Joko Purnama, M.Sc, Relisa, S.S, Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si, Erni Hariyanti, S.Psi,
Genardi Atmadiredja, S.Sn, M.Sn, Fadhilah Darma Sulisty, S.Kom, Sumiyati

Desain Sampul dan Isi

Kaisar Julizar, S.Sos, Anugrah

xi + 614 hlm; 21,0 cm x 29,7 cm

ISBN: 978-602-0792-61-3

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Desember 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

TENTANG SEMINAR

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin berkembang, diperlukan langkah strategis dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode tahun 2015-2019 yakni: membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter berlandaskan semangat gotong royong; peningkatan mutu dan akses pendidikan; serta pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Dunia pendidikan di Indonesia ke depan menghadapi tiga tantangan besar, yakni: Pertama, tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan tetap mempertahankan tren yang baik dalam hal pemerataan akses. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengantisipasi dan memenangkan persaingan dalam era disrupsi digital di mana standar kompetensi berubah semakin cepat dan tidak mudah diprediksi. Ketiga, keragaman pelaku pendidikan yang membutuhkan strategi pengelolaan yang adaptif, memperhatikan keragaman kebutuhan atau keadaan daerah peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi yang luas dari semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan, Puslitjakdikbud pada tahun 2019 telah menyelenggarakan berbagai penelitian dan pengembangan, baik yang terkait dengan akses pendidikan, mutu dan relevansi, tata kelola pendidikan, maupun kebijakan kebudayaan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seminar untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan pemikiran inovatif pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pengambilan keputusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan seminar hasil penelitian merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian. Kegiatan ini sebelumnya telah melewati tahapan seminar internal yang bertujuan untuk mempertajam hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang telah dilakukan oleh para peneliti dan perekayasa Puslitjakdikbud. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan, Puslitjakdikbud selalu berupaya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan ilmiah, terutama dalam diseminasi hasil penelitian. Kegiatan diseminasi ditujukan kepada kelompok atau individu peneliti dan perekayasa terkait agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran dan menerima, hingga akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Hasil penelitian akan memperkuat atau mengesampingkan asumsi-asumsi yang telah ada sebelumnya dengan informasi yang lebih ilmiah. Selain hasil penelitian dari Puslitjakdikbud, juga terdapat hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian lain, baik dari lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang bermitra dengan Puslitjakdikbud. Terselenggaranya seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan akan mendukung perkembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang responsif terhadap tantangan serta kemajuan zaman.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk seminar dengan menampilkan para peneliti dan perekayasa Puslitjakdikbud dan lembaga penelitian mitra untuk memaparkan hasil-hasil penelitian kebijakan

pendidikan dan kebudayaan. Nama kegiatan ini adalah Seminar Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019. Seminar akan diadakan di Hotel Royal Padjajaran, Bogor pada tanggal 18-20 November 2019.

Tujuan

Seminar hasil penelitian ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sudah dilakukan Puslitjakdikbud dan lembaga penelitian mitra.

Topik Kajian

Topik hasil penelitian yang diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Tahun 2019 ini meliputi:

1. Pendanaan Pendidikan yang Bermutu
2. Pengelolaan Satuan Pendidikan
3. Penguatan Kualitas Pembelajaran dan Penilaian
4. Penguatan Pendidikan Karakter
5. Apresiasi, Pelestarian, dan Pemajuan Kebudayaan
6. Tatakelola Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Pengembangan Pendidikan Vokasi
8. Penyediaan Afirmasi Pendidikan

Tempat dan Waktu

Seminar dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 18 s.d 20 November 2019 bertempat di Royal Padjadjaran Hotel, Jalan Raya Padjadjaran No. 12, Bogor-Jawa Barat.

Tema Seminar

Tema seminar hasil penelitian tahun 2019 yaitu “Tantangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Era Disrupsi”.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berbagai pemberian nikmat dan ridho-Nya atas terlaksananya Seminar Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saya menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia penyelenggara Puslitjakdikbud atas terlaksananya seminar ini, sehingga Saya berkesempatan hadir dan bersilaturahmi serta dapat menyampaikan beberapa informasi/pesan dalam rangka peningkatan mutu dan kebermanfaatan seminar khususnya hasil penelitian kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan Seminar menjadi salah satu program unggulan bagi para peneliti/perekayasa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian. Seminar merupakan cara efektif dalam memberikan masukan konstruktif dalam mengemas ide-ide terkini melalui tukar menukar informasi (*sharing*) dalam rangka penyempurnaan hasil-hasil penelitian sehingga lebih berkualitas dan memiliki nilai jual yang juga tinggi. Semoga seminar ini dapat menjadi ruang dialog sehingga hasil penelitian yang disampaikan oleh para pemateri dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Setiap elemen kelembagaan perlu saling bekerja sama dan saling membutuhkan. Seminar memiliki fungsi yang penting sebagai wahana forum ilmiah dan bertukar informasi antara para peneliti, perekayasa, dan analis data dari Puslitjakdikbud, Lembaga Penelitian Mitra, dan Perguruan Tinggi. Untuk itu, hasil penelitian/rekayasa harus berkualitas dan tepat waktu.

Artinya, manakala dibutuhkan maka hasil kerja penelitian/perekayasaan itu juga siap untuk dipergunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti/perekayasa harus berkompeten dalam:

- (1) mengidentifikasi permasalahan yang bermuara ke masa depan, dan
- (2) mampu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan hasilnya.

Peneliti/perekayasa harus berorientasi pada upaya menyumbang atau menyempurnakan kebijakan pendidikan, baik untuk penyempurnaan kebijakan yang sedang dilaksanakan maupun untuk mengantisipasi kebijakan ke depan.

Adanya pola pikir dan paradigma Balitbang harus dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Puslitjakdikbud Balitbang bukan hanya sekedar unit birokrasi yang bertugas sebagai unit pendukung (administrasi), namun harus menjadi "Lembaga yang tahu lebih dahulu" tentang masa depan Pendidikan

dan Kebudayaan di Indonesia yang tentunya berangkat dari kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang didasarkan dari hasil-hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menjawab tantangan itu, peneliti dan perekayasa harus mampu menjadi sumber bagi gagasan-gagasan yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan/memecahkan persoalan-persoalan kebijakan di lingkungan Kemendikbud. Pola pikir lama dalam penelitian harus diganti dengan pola pikir baru yang lebih memadai. Pola kerja Balitbang dalam memikirkan penelitian biasanya terjadi setelah peristiwa atau isu-isu baru bermunculan.

Pola pikir baru yang perlu lahir bahwa Balitbang harus lebih proaktif dan terdepan dalam melakukan penelitian dengan kepekaan terhadap isu-isu terkini. Pola pikir lain, menyangkut identifikasi masalah yang biasanya hanya mengaitkan persoalan dalam lingkup terbatas/internal Balitbang harus diubah dengan cakupan lingkup eksternal dengan memperluas interaksi pada berbagai unit atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaan penelitian, yang hanya dilaksanakan secara individu atau tim Balitbang harus diubah dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Ke depan, bahwa hasil penelitian yang hanya digunakan untuk kepentingan personal atau untuk kepentingan insidental para peneliti/perekayasa perlu lebih dikembangkan bahwa hasil-hasil penelitian itu harus dikomunikasikan dan dipublikasikan. Adanya media informasi dan komunikasi yang canggih dan menggloabal maka hasil-hasil penelitian itu harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Balitbang Kemdikbud merupakan satu dari tujuh unit utama yang berada pada Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas Balitbang adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai salah satu unit di Balitbang yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan penelitian di bidang kebijakan pendidikan dan kebudayaan, diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan isu-isu kritis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai rencana strategis yang telah dicanangkan oleh Kemdikbud.

Hasil-hasil penelitian diharapkan mampu menemukan penyebab utama, dan berbagai perangkat alternatif solusi terhadap permasalahan dengan menggunakan baik metodologi maupun pengetahuan yang sistematis, yang pada akhirnya akan bermuara pada dihasilkannya produk termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan relevan sehingga dapat didayagunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan terutama dilingkungan Kemendikbud.

Seminar ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, namun tentunya saya berharap pada tahun-tahun berikutnya, kegiatan seminar ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada umumnya, dan mampu menghasilkan opsi-opsi kebijakan pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan atau referensi pembuat kebijakan pada khususnya.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi saya berharap agar kegiatan SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019 dengan Tema: "Tantangan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Era Disrupsi" ini dapat melahirkan berbagai inovasi dan

pembaruan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Di samping itu, menjadi atmosfer yang baik untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Muktiono Waspodo

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan

LAPORAN PANITIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME, hanya karena perkenanNya-lah kita dapat hadir bersama dalam Seminar Hasil Penelitian Tahun 2019. Selanjutnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam atas perkenan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk memenuhi permohonan kami menghadiri Seminar ini.

Perkenankan kami melaporkan bahwa dalam Seminar yang akan berlangsung selama 3 hari dan 2 malam di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor ini akan menyajikan berbagai makalah yang merupakan hasil penelitian dari para penyaji internal Puslitjakdikbud, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian mitra. Makalah disajikan dalam tiga sesi, di mana setiap sesi terdiri dari tiga kelompok yang disesuaikan berdasarkan tema penelitian.

Selanjutnya forum ilmiah ini untuk diikuti oleh lebih dari 150 orang yang dapat dikelompokkan menjadi penyaji, moderator, pembahas, dan peserta. Mereka berasal dari Kemdikbud; Jaringan Penelitian (JARLIT); Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian Mitra.

Perkenankan pula kami menyampaikan bahwa, selain menghasilkan prosiding penelitian, seminar ini juga akan menghasilkan usulan-usulan kebijakan yang terkait dengan (i) Pendanaan Pendidikan, (ii) Pengelolaan Satuan Pendidikan, (iii) Penguatan Kualitas Pembelajaran dan Penilaian, (iv) Penguatan Pendidikan Karakter, (v) Apresiasi, Pelestarian, dan Pemajuan Kebudayaan, Tatakelola Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Pendidikan Vokasi, dan Penyediaan Afirmasi Pendidikan.

Terakhir, kami sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kami perbaiki dan atas kekurangan itu kami mohon para hadirin sekalian berkenan untuk memberikan limpahan maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

JADWAL SEMINAR

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Senin, 18 November 2019		
12:00 – 14:00	Registrasi Peserta	Panitia
14.00 – 16.00	Koordinasi Internal Bidang	Masing-masing Bidang
16:00 – 17:00	Penjelasan Teknis Kegiatan Seminar	Koordinator Panitia
17:00 – 19:00	Rehat	
	PEMBUKAAN	Ballroom Padjadjaran
19.00 – 19.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Pembacaan Doa	Panitia
19.15 – 19.30	Laporan Penyelenggaraan Seminar	Kepala Puslitjakdikbud
19.30 – 21.00	Pembukaan dan Pengarahan	Kepala Balitbang Kemendikbud
Selasa, 19 November 2019		
07:45 – 10:00	Paparan Hasil Penelitian Sesi 1	Ruang Padjadjaran 2, 3, dan 4
10.00 – 10.15	Rehat	
10:15 – 12:30	Paparan Hasil Penelitian Sesi 2	Ruang Padjadjaran 2, 3, dan 4
12:30 – 13:15	Rehat	
13:15 – 15:30	Paparan Hasil Penelitian Sesi 3	Ruang Padjadjaran 2, 3, dan 4
15:30 – 15:45	Rehat	
15:45 – 17:45	Paparan Hasil Penelitian Sesi 4	Ruang Padjadjaran 2, 3, dan 4
17:45 – 19:00	Rehat	
19:00 – 20:00	Perumusan Hasil Seminar	Tim Perumus
Rabu , 20 November 2019		
	PENUTUPAN	
08:00 – 09:30	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia
09:30 – 10:00	Penutupan	Kepala Puslitjakdikbud
10:00 – 11:00	Penyelesaian Administrasi	Panitia

DAFTAR ISI

TENTANG SEMINAR	i
SAMBUTAN	iii
LAPORAN PANITIA	vi
JADWAL SEMINAR	vii
DAFTAR ISI	viii
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
MODEL MAGANG GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMK <i>Simon Sili Sabon, Nur Listiawati, Relisa</i>	3
KETERSEDIAAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN <i>Teguh Supriyadi, Idris HM Noor, Kusuma Wijayanti</i>	14
PERAN MGMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMA <i>Idris H.M. Noor, Simon Sili Sabon, Bambang Suwardi Joko, Kusuma Wijayanti</i>	27
DESIGNING A PRINCIPAL PERFORMANCE MONITORING SYSTEM: A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH <i>Niken Rarasati, Arjuni Rahmi Barasa, Prio Sambodho</i>	41
LITERASI DAN PEMBELAJARAN	
ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI DASAR PADA SISWA <i>Uswatun Hasanah, Tarma, Rasha, Prastiti Laras Nugraheni, Mirdat Silitonga, Bambang Suwardi J, Lukman Solihin</i>	62
PENGUATAN PEMBELAJARAN LITERASI DASAR DAN HASIL BELAJAR SISWA <i>Rasita Ekawati Purba, George Adam Sukoco</i>	75
PRAKTIK BAIK PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DASAR SISWA SEKOLAH DASAR PADA KELAS AWAL <i>Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Genardi Atmadiredja, Bakti Utama</i>	84
MODEL PENYUSUNAN INDEKS GERAKAN LITERASI SEKOLAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMETAAN <i>Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Unggul Sudrajat</i>	96
PENDANAAN PENDIDIKAN	
EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI <i>Yunita Murdiyaningrum, Sudiyono, Agus Amin Sulistiono, Novrian Satria Perdana</i>	123

PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL <i>Irsyad Zamjani, Herlinawati, Novrian Satria Perdana, Ferdi Widiputera, Siti Nur Azizah</i>	133
STUDI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP KINERJA SEKOLAH <i>Agus Heruanto Hadna, Triyastuti Setianingrum, Yam'ah Tsalatsa A., Citra Sekarjati</i>	149
BIAYA SATUAN DAN LINIMASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR <i>Irsyad Zamjani, Herlinawati, Novrian Satria Perdana, Ferdi Widiputera, Siti Nur Azizah</i>	159
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN <i>Sabar Budi Raharjo, Yufriawati, Ais Irmawati, Joko Purnama</i>	194
SINKRONISASI PERATURAN TERKAIT SISTEM ZONASI PENDIDIKAN: KETERKAITAN DENGAN PP NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN <i>Yufriawati, Ais Irmawati, Untung Tri Rahmadi, Fadhillah Darma, Iwan Mustari</i>	212
AFIRMASI PENDIDIKAN DI WILAYAH BENCANA: STRATEGI LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK KORBAN BENCANA ALAM <i>Etty Sisdiana, Fransisca Nur Aini, Arie Budi Susanto, Etty Sofyatingrum</i>	227
PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN	
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN HOTS GURU DALAM WADAH MGMP <i>Iskandar Agung, Budiana Setiawan, Irna Trilestari, Linda Efaria, Mega Birlian</i>	250
KAJIAN UMPAN BALIK GURU TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN SISWA <i>Etty Sofyatingrum, Etty Sisdiana, Ikhyia Ulumuddin, Fransisca Nur'Aini</i>	263
DIGITALISASI DAN PEMBELAJARAN BERKUALITAS YANG INKLUSIF: PEMANFAATAN PLATFORM PEMBELAJARAN DIGITAL OLEH GURU DAN SISWA <i>Irsyad Zamjani, Diyan Nur Rakhmah W, Siti Nur Azizah, Hermanto Waruwu, Erni Hariyanti</i>	275
INDUSTRI KREATIF DAN KEBUDAYAAN	
STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA KREATIF DI INDONESIA: PERSPEKTIF PEMAJUAN KEBUDAYAAN <i>Ikhyia Ulumuddin, Sugih Biantoro, Damardjati KM, Khairur Raziqin, Anggoro Yudo Mahendro</i>	301
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERFILMAN INDONESIA <i>Herlinawati, Ikhyia Ulumudin, Siska Fujanita, Ferdi.W.Putra</i>	323
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
MODEL KLINIK PENDAMPINGAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) GURU <i>Anik Ghufon, Suyanta, Pujianto, Esti Swastika Sari, Woro Sri Hastuti</i>	344
EVALUASI PENGELOLAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (Studi Kasus di 5 Kota) <i>C.D. Fajarini, Parwanto, Widodo, Dyah Suryawati</i>	355

MANAJEMEN SEKOLAH AMAN DAN MENYENANGKAN DALAM MENDUKUNG KUALITAS PEMBELAJARAN	
<i>Meni Handayani, Siswantari, Rahmah Astuti, Erni Hariyanti</i>	368
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PEMBELAJARAN	
EVALUASI KURIKULUM MULOK UNTUK PENGUATAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR JAWA TIMUR & KALIMANTAN	
<i>Sa'dun Akbar, Arda Purnama Putra, Titis Angga Rini, Muh. Arafik, Eny Nur Aisyah, Nafi Isbandrianingtyas, Lenita Puspitasari, Dessy Farantika, Nur Fidayat</i>	397
EVALUASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KOTABARU	
<i>Muhammad Rahmattullah, Suratno</i>	406
KESESUAIAN BUKU TEKS SEKOLAH DASAR DENGAN KURIKULUM MATEMATIKA, BAHASA, DAN IPA	
<i>Sri Hidayati, Teguh Supriyadi, Lisna Sulinar Sari</i>	421
PEMAJUAN KEBUDAYAAN	
PENGARUH PENDAFTARAN TIGA GENRE TARI TRADISI BALI KE DALAM DAFTAR ICH UNESCO TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI	
<i>Damardjati Kun Marjanto, Herman Hendrik, Ihya Ulumuddin, Kaisar Julizar, Imelda Widjaja</i>	441
INDEKS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	
<i>Sugih Biantoro, Kaisar Julizar, Imelda Widjaja, Ihya Ulumuddin, Niken Rarasati, Yudi Fajar, Jimmy Daniel B</i>	454
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI	
PENGELOLAAN PENDIDIKAN VOKASI YANG BERMUTU PADA SMK BIDANG PARIWISATA DALAM RANGKA PEREKAYASAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJASAMA INDUSTRI	
<i>Agung Purwadi, Untung Tri Rahmadi, Fadila Dharma</i>	467
KESESUAIAN KURIKULUM SMK DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DUNIA KERJA (TATA BOGA PARIWISATA)	
<i>Subijanto, Darmawan Sumantri, Ika Asri Dwi Martini, Tatik Soroeida, Iwan Mustari</i>	480
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN MUTU SMK SWASTA	
<i>Widodo, Sudiyono, Asri Ika</i>	492
PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN	
KAJIAN MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR	
<i>Siswantari, Darmawan Sumantri, dan Dyah Suryawati</i>	510
PENGUATAN RANAH PSIKOMOTORIK SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR	
<i>Lucia H. Winingsih, Erni Heryanti, dan Lisna Sulinar Sari</i>	527
ANALISIS HUBUNGAN ROMBONGAN BELAJAR DAN SISWA PER ROMBEL DENGAN MUTU LULUSAN	
<i>Novrian Satria Perdana, Meni Handayani, dan Joko Purnama</i>	539

PENDIDIKAN MULTIKULTUR

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Mikka Wildha Nurrochsyam, Genardi Atmadiredja, Irawan Santoso Suryo Basuki **561**

PERJUMPAAN UNTUK MEMPERKUAT IKATAN KEBINEKAAN: STUDI PADA TIGA SMA NEGERI DI JAKARTA

Anggi Afriansyah **574**

SIKAP KEBERAGAMAAN SISWA (GEN Z) DAN GURU: HASIL DUA SURVEI NASIONAL YANG MENCEMASKAN?

Aziz Awaludin, Dani **583**

LITERASI KEAGAMAAN MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI JAWA BARAT DAN BANTEN

Mahmudah Nur, Muhamad Rosadi, Saeful Bahri, dan Eva Dwi Kumala Sari **590**



SESI PANEL

TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MODEL MAGANG GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMK

Simon Sili Sabon, Nur Listiawati, Relisa

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

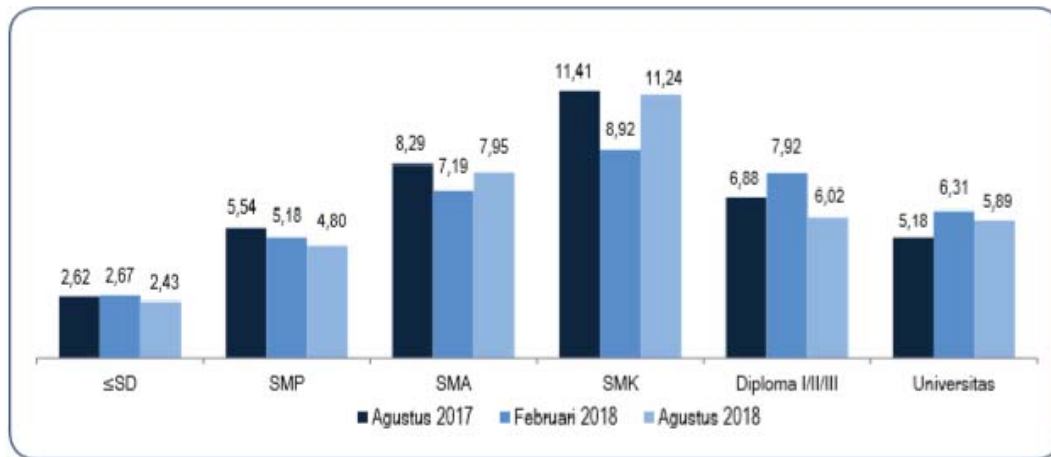
Abstrak. Kajian ini bertujuan: (i) mengidentifikasi model-model magang guru produktif, dan (ii) mengembangkan alternatif model magang peningkatan kemampuan guru produktif. Pendekatan kajian menggunakan model R and D. Pengembangan model menggunakan *Model Reflective Recursive Design and Development*. Hasilnya: berdasarkan literatur ada 3 model magang: (a) magang langsung ke industri, (b) mengundang tenaga ahli ke sekolah, dan (c) belajar dari teman sejawat. Dari diskusi dengan praktisi ditemukan beberapa model yaitu model P4TK, model Pusdiklat Kemenperin, dan model mendatangkan pakar ke sekolah. Kelemahan model pertama terletak pada durasi magang yang hanya lima hari, oleh industri dianggap mengganggu rutinitas. Model kedua menyelenggarakan magang di dalam dan luar negeri. Model ini kurang lebih sama dengan model pertama, namun dari aspek durasi magang model ini lebih lama yaitu minimal dua minggu tergantung keahlian yang hendak dikuasai. Kelemahan model ini terletak pada persyaratan yang kurang ketat pada rekrutmen peserta. Kelemahan lainnya persyaratan magang ke luar negeri tidak berbeda dengan di dalam negeri. Seharusnya magang ke luar negeri diseleksi di antara peserta yang sudah magang di dalam negeri. Model magang ketiga adalah mendatangkan pakar ke sekolah. Pengalaman sekolah-sekolah kenamaan di Jakarta mendatangkan pakar, termasuk dari luar negeri dapat dicontoh. Sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP bekerjasama membiayai pakar sehingga lebih murah. Mengacu pada temuan model magang ini kajian mengembangkan 3 model: (i) *visiting expert program*, (ii) *internship* di dalam negeri, dan (iii) *internship* di luar negeri.

Kata kunci: guru produktif, magang guru, dunia kerja

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Mutu lulusan SMK rendah. Banyak lulusan SMK tidak terserap dunia kerja. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan rendahnya mutu guru. Sebagaimana diketahui umum, SMK dikatakan berhasil apabila lulusannya terserap dunia kerja. Dari Gambar 1 terlihat bahwa persentase lulusan SMK yang menganggur lebih besar daripada lulusan satuan pendidikan lainnya, padahal SMK menyiapkan lulusan untuk masuk dunia kerja, dan keterserapan lulusan merupakan salah satu indikator keberhasilan SMK.



Gambar 1. Tingkat pengangguran terbuka menurut satuan pendidikan (BPS, 2018)

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mutu lulusan SMK rendah? Selanjutnya Valerian (2017) menulis di Nawacitapost bahwa kualitas guru SMK kita rendah. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas lulusan SMK. Banyak lulusan SMK tidak memiliki keahlian. Taslim (2016) mengungkapkan secara gamblang bahwa lulusan SMK memiliki mutu yang rendah karena guru kurang memiliki pengalaman praktik di industri. Dengan demikian maka dirumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana model magang industri guru produktif saat ini?
2. Mengapa model-model magang industri bagi guru produktif yang ada saat ini belum mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja?
3. Model magang guru produktif seperti apa yang paling efektif dalam upaya menghasilkan lulusan SMK yang bermutu?

2. Tujuan

1. Mengidentifikasi model-model magang guru produktif yang ada selama ini yang mampu menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.
2. Mengembangkan model magang guru produktif yang dapat meningkatkan kemampuan guru menghasilkan lulusan yang bermutu.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran ditentukan oleh tiga variabel, yaitu budaya atau kebiasaan sekolah, proses belajar mengajar dan realitas (kenyataan) sekolah sebagaimana dikutip Triastuti (2017). Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan baik oleh guru ataupun peserta didik dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Berhubungan dengan pembelajaran yang berkualitas Triastuti menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran mengandung lima komponen: pembelajaran, kesesuaian, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Mutu pembelajaran berpusat pada kemampuan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Guru dituntut mempunyai kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan pada evaluasi pembelajaran.

2. Magang

Menurut Wardani (2013) magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Program pembelajaran magang biasa disebut dengan istilah *apprenticeship*, *internship*, *learning by doing*, *on-the-job-training/off-the-job-training* dan *built in learning*, dimana program ini

dirancang untuk level keahlian yang lebih tinggi. Lebih lanjut Utami (2015) menyampaikan bahwa untuk menyiapkan guru profesional, salah satunya dilakukan dengan prakondisi dalam bentuk kegiatan magang/*internship* sebagai bagian yang penting dari penyiapan guru berkewenangan ganda yang profesional.

3. Relevansi SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

SMK merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan menengah di Indonesia, yang penyelenggaraan pendidikannya dirancang dengan salah satu tujuannya mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja (Mulyati, 2012). Dewasa ini masih banyak lulusan SMK mengalami kendala dalam memasuki lapangan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas prestasi belajar lulusan SMK.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *Research Based Development* atau pengembangan model magang guru untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan terhadap model magang guru yang ada. Untuk pengembangan model ini dipilih model *Reflective Recursive Design and Development* (R2D2), salah satu dari tujuh macam cara pengembangan model yang disampaikan Syamsul (2017). Dalam model R2D2, fokus pengembangan terdiri atas penetapan (*define*), penentuan desain dan pengembangan (*design and develop*), dan penyebarluasan (*dissemination*). Populasi kajian ini adalah seluruh guru SMK yang mengajar Mapel Produktif. Karena terbatasnya waktu dan sumber daya, maka studi kasus menjadi pilihan utama dalam penelitian ini. Dengan studi kasus peneliti dimungkinkan berkonsentrasi pada situasi tertentu dan berupaya melihat berbagai proses terkait yang berlangsung saat penelitian. Kajian menggunakan data sekunder tentang guru-guru yang melakukan magang industri. Ada dua teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu FGD dan *interview*. Data yang dikumpulkan adalah: (i) model magang seperti apa yang telah diikuti oleh guru, (ii) apa saja kelebihan dan kelemahan dari model magang tersebut, dan (iii) metode apa yang dapat digunakan guru agar dapat mentransfer lptek dan pengalaman yang dimilikinya kepada siswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model-model magang guru yang ada saat ini

Dalam kajian Sunardi dan Sudjimat (2016) disampaikan bahwa magang industri bagi guru SMK sangat membantu dalam meningkatkan relevansi kompetensi profesional dengan perkembangan lptek di dunia kerja sehingga guru dapat membelajarkan kepada siswanya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Magang industri dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara yang utama adalah dengan menugaskan guru Mapel Produktif mengikuti kegiatan magang kerja langsung di industri yang relevan. Di samping itu juga dapat dilakukan dengan cara sekolah mengundang pekerja ahli dari industri untuk memberikan Diklat di sekolah; dan juga melalui *peer-learning* di SMK. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa magang industri merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan profesionalitas Guru. Selanjutnya dari hasil diskusi dengan para narasumber ditemukan beberapa praktik baik yang dapat dimodifikasi untuk menjadi model magang guru yang lebih efektif sebagaimana disajikan berikut:

a. Model magang guru yang dikembangkan P4TK BMTI Bandung.

Garis besar model:

1. Peserta magang adalah guru peserta program PKB.
2. Tujuan magang adalah agar guru mampu mempelajari organisasi, menerapkan, dan membandingkan antara pengetahuan teori maupun praktik sesuai kompetensi keahlian yang diperoleh setelah mengikuti *On Service Training* (*On*), dan setelah mempelajari materi modul kompetensi keahlian pada saat *In Service Training* (*In*) dengan pekerjaan sebenarnya.

3. Waktu magang adalah 5 hari (50 jam pelajaran).
4. Strategi pelaksanaan magang:
 - a. Persiapan dilakukan di P4TK BMTI Bandung, tempat dilaksanakan *In Service Training* (In).
 - b. Orientasi lapangan dimana peserta mendapatkan informasi terkait rencana dan jadwal kegiatan, pembimbing yang mendampingi dan bagaimana menyiapkan format administrasi yang mendukung magang.
 - c. Dalam kegiatan magang, peserta:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai petunjuk/arahan pembimbing
 - 2) menjaga keselamatan kerja
 - 3) mencatat agenda kegiatan harian pada buku jurnal dan diparaf pembimbing
 - 4) merencanakan pembuatan laporan magang
 - d. Monitoring dan evaluasi magang dilaksanakan P4TK BMTI untuk penjaminan mutu magang.
 - e. Pembuatan laporan magang industri.
5. Pembimbingan dilakukan seorang supervisor yang bertugas melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru.
6. Peserta yang memenuhi ketentuan kelayakan mendapat sertifikat.

b. Model magang yang diterapkan di Pusdiklat Kemenperin

Kemenperin menyelenggarakan magang guru di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri Kemenperin menyelenggarakan magang bekerja sama dengan P4TK Medan dan Malang, sedangkan magang di luar negeri diselenggarakan bekerja sama dengan *Institute of Technical Education* (ITE) Singapura. Prosedur rekrutmen guru baik untuk magang di dalam maupun luar negeri adalah sama, yaitu diawali dengan bersurat yang dilengkapi format pendaftaran peserta disebar di grup WA dengan tembusannya ke Dit. PSMK, Ditjen GTK dan dinas pendidikan provinsi. Pendaftaran dilakukan *online* dan guru wajib menyertakan surat rekomendasi keikutsertaan dari kepala sekolah. Persyaratan lain: guru harus berasal dari SMK yang sudah terdaftar dalam program *link and match* (2612 SMK). Mengenai sistem seleksinya, guru yang pertama kali mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterima sebagai peserta sampai dengan quota peserta yang ditetapkan terpenuhi.

1. Magang dalam negeri dilaksanakan antara lain di PT Dirgantara Indonesia, PT Petrokimia Gresik, PT Yoga Presisi Tehnikatama Industri, PT Sritex Indonesia, PT Astra Internasional. Lama magang guru di industri minimal dua minggu dan bervariasi tergantung jenis keahlian yang hendak dikuasai. Peserta pelatihan yang memenuhi kriteria administratif dan akademik diberikan sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan yang lulus Uji Kompetensi Keahlian (UKK) memperoleh sertifikat keahlian dari LSP-Pihak 2 P4TK.
2. Magang di luar negeri
Magang di luar negeri dilaksanakan Pusdiklat Kemenperin bekerja sama dengan ITE Singapura untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan para tenaga pengajar pendidikan vokasi di Indonesia. Diklat di ITE ini berlangsung selama 2 minggu.

c. Model magang guru yang dikembangkan beberapa SMK kenamaan di Jadetabek

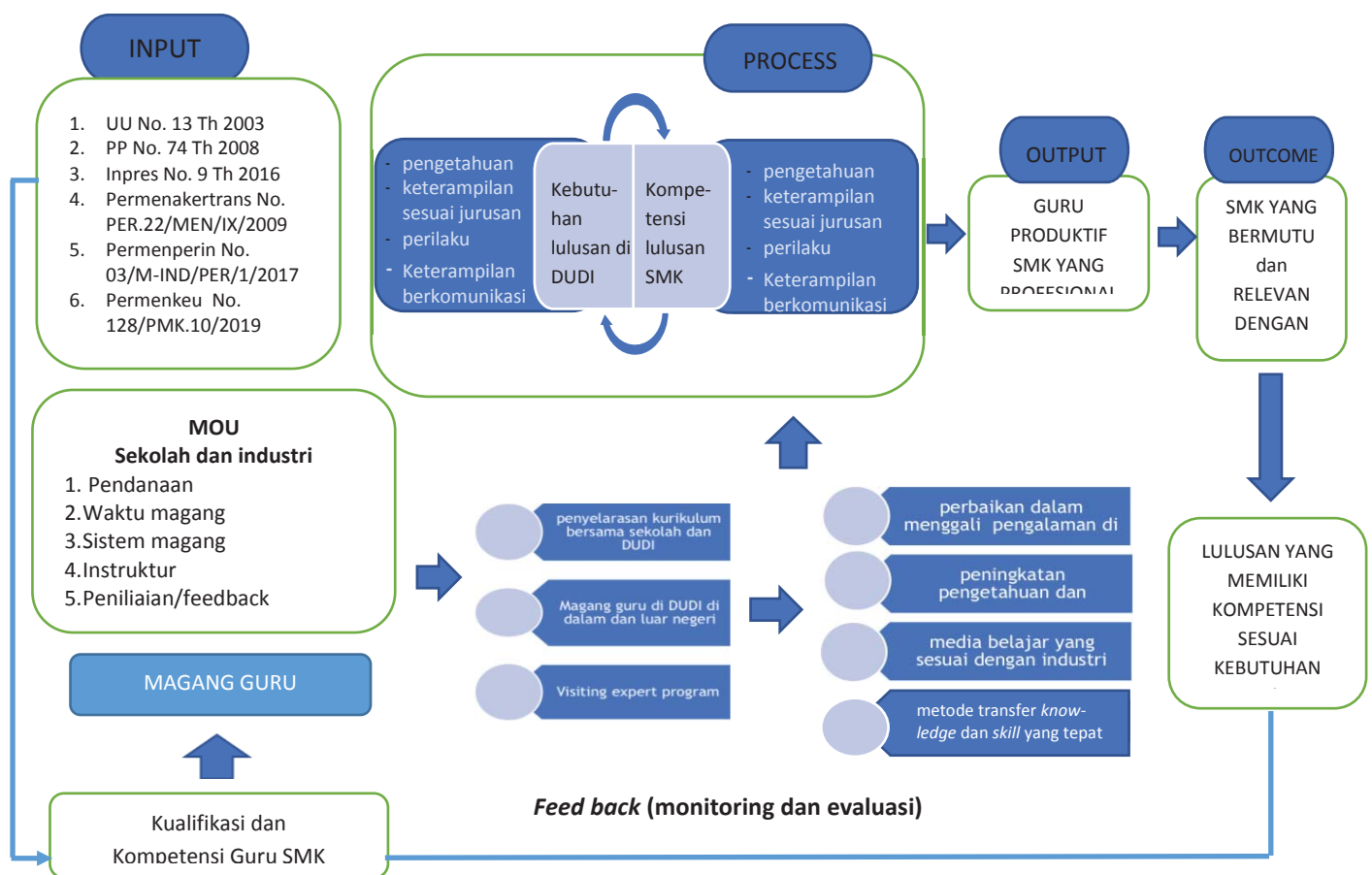
Praktik baik tentang magang guru dari beberapa SMK kenamaan di Jakarta dapat menjadi model magang yang bisa dicontoh di daerah lain. Magang guru diinisiasi oleh kepala sekolah dengan menganalisis kompetensi keahlian yang belum dikuasai guru. Tahap berikutnya pihak sekolah membicarakan dengan pihak industri dengan cara mendatangi industri secara formal maupun informal. Prinsip kerja sama yang dianut adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersepakat untuk bekerja sama. Sebenarnya praktik baik yang dilakukan sekolah-sekolah di Jakarta bukan suatu hal

baru namun kerja sama secara mandiri antara SMK di Jakarta dan industri ini cukup unik dan menarik untuk dicontoh di sekolah atau daerah lain. Uniknya model magang guru ini adalah sebagai berikut.

1. Guru belajar langsung ke industri: dengan industri dibahas waktu pelaksanaan magang yang disesuaikan dengan waktu luang guru yaitu pada Sabtu atau Minggu atau pada hari, di mana guru tidak memiliki jam mengajar. Kalaupun guru harus meninggalkan kelas, maka kepala sekolah akan berupaya mencari guru pengganti yaitu dengan melibatkan alumni yang berhasil atau orangtua peserta didik yang kompeten.
2. Mendatangkan tenaga ahli/pakar atau *expert* baik dari dalam maupun luar negeri. Sekolah-sekolah yang tergabung dalam forum MGMP mendatangkan pakar dengan biayanya ditanggung bersama sehingga menjadi lebih murah. Pengalaman SMKN 57 mendatangkan pakar dari luar negeri ternyata biayanya cukup murah karena hanya memberikan insentif sebesar \$10 US per hari, karena biaya perjalanan dan akomodasi serta biaya terkait lainnya ditanggung oleh negara asal pakar.

2. Model magang guru yang dikembangkan kajian

Berdasarkan model-model magang guru yang ditemukan dalam literatur dan juga melalui diskusi kelompok terpumpun, tim kajian mencoba mengembangkan model induk magang guru yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK (Gambar 2).



Gambar 2. Model Pelaksanaan Magang Guru di Industri dan Tindak Lanjutnya

3. Penjelasan tentang model magang guru yang dikembangkan

a. Pengantar model Magang Guru

Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan. Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena guru yang melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Dengan demikian jika kita ingin meningkatkan mutu lulusan SMK agar mudah terserap oleh dunia kerja, maka kita harus selalu meningkatkan mutu guru SMK khususnya guru produktif. Caranya adalah dengan melaksanakan magang bagi guru produktif.

b. Pelaksanaan Magang

Magang guru merupakan suatu proses belajar yang dilakukan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai suatu kompetensi (keterampilan atau keahlian) tertentu. Kurangnya pengalaman industri guru produktif merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu lulusan SMK sehingga lulusan tidak terserap di DUDI. Dengan demikian maka tujuan magang industri adalah memberi kesempatan kepada guru produktif meng-*upgrade* kompetensinya dengan cara mempelajari, menerapkan, dan membandingkan antara pengetahuan teori maupun praktik dengan pekerjaan sebenarnya yang ada di lingkungan DUDI.

c. Input

Untuk mencapai keberhasilan, pelaksanaan magang guru harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur atau mekanisme tertentu. Pada tahap pertama perlu disosialisasikan regulasi yang mengatur tentang magang kepada DUDI. Pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah (i) Kemenperin, (ii) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berikut perwakilannya di daerah, (iii) Kemnaker, (iv) Kemenpar, (v) Kemendikbud, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK. Regulasi yang perlu disosialisasikan:

1. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 21: Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem magang.

Pasal 22: (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian magang antara peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis; (2) Perjanjian magang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu magang.

2. PP No. 74/2008 tentang Guru:

Pasal 46: Guru memiliki kesempatan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 51: ayat (1) Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan profesi, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh; ayat (4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh guru antara lain untuk: praktik kerja di dunia industri.

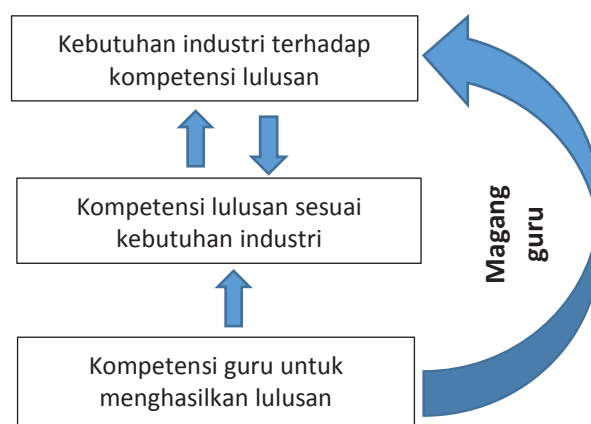
3. Inpres No. 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Dalam Inpres tersebut, diinstruksikan kepada para menteri, gubernur dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

4. Permennaker No. 36/2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri.
Pasal 11: ayat (1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan; dan ayat (2) Perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat: (i) hak dan kewajiban peserta; (ii) hak dan kewajiban penyelenggara program; dan (iii) jenis program dan kejuruan.
5. Permenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri:
Pasal 6 Ayat (1) Peningkatan kompetensi guru bidang studi produktif, dapat dilakukan melalui Pemagangan Industri.
6. Permenkeu No. 128/PMK.10/2019 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.
Pasal 2 ayat (1): Wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Semua regulasi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi kepala sekolah dalam melakukan pendekatan kepada DUDI agar bersedia bergabung menerima guru melaksanakan magang.

d. Proses

Agar pelaksanaan magang lebih lancar maka sekolah dan DUDI perlu duduk bersama melakukan penyelarasan kurikulum. Poin-poin yang perlu diselaraskan sebaiknya berangkat dari kriteria lulusan seperti apa yang dibutuhkan oleh DUDI. Seorang lulusan SMK merupakan bakal calon pegawai atau karyawan perusahaan. Untuk itu maka yang dapat dijadikan acuan dalam hal penyelarasan kurikulum adalah persyaratan-persyaratan yang dituntut dikuasai oleh seseorang bakal calon karyawan/pegawai baru. Terdapat minimal empat poin yang perlu dikuasai yaitu: (i) pengetahuan umum dan khusus, (ii) keterampilan umum dan khusus, (iii) perilaku/sikap, dan (iv) keterampilan berkomunikasi. Berikut ini disajikan bagan bagaimana sekolah mengidentifikasi kebutuhan lulusan yang dibutuhkan industri, peningkatan kompetensi lulusan yang harus dilakukan di sekolah, dan bagaimana guru menghasilkan lulusan tersebut.



Gambar 3. Kompetensi lulusan yang dibutuhkan industri dan kompetensi guru menghasilkan lulusan

Selanjutnya dibahas durasi magang. Perusahaan harus dapat menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguasai kompetensi tertentu. Lama waktu magang tidak selalu harus sama antara guru yang satu dengan guru lainnya. Dalam pelaksanaan magang, guru tidak harus selalu datang dan belajar di perusahaan, karena sangat tergantung kepada materi magang. Jika materinya menuntut guru harus magang langsung di industri maka guru ke industri, namun andaikata materinya tidak memerlukan guru hadir di industri, maka diatur agar instruktur berkunjung ke sekolah dan menyampaikannya kepada guru di sekolah.

Selama pelaksanaan magang pengawasan dan evaluasi harus selalu dilakukan baik oleh perusahaan, pihak sekolah atau dinas pendidikan yang berwenang. Pengawasan dan evaluasi sangat bermanfaat karena jika terjadi masalah dapat langsung terdeteksi dan dapat segera dicarikan solusinya. Selain itu guru harus benar-benar serius menjalankan tugas magang dan harus berani mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Jadi guru harus proaktif, karena keberhasilan program magang sangat ditentukan oleh guru sendiri dengan dibantu oleh pembimbingnya. Pada tahap akhir pelaksanaan program guru harus membuat laporan magang. Laporan tersebut harus dibuat apa adanya sesuai dengan realita di lapangan dan memuat kompetensi apa saja yang sudah dipelajari dan dikuasai oleh guru.

Tujuan akhir dari magang industri adalah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu maka guru yang sudah magang industri diharapkan memiliki kemampuan pedagogis yang mumpuni untuk dapat mentransfer ilmunya kepada siswa. Jangan sampai terkesan program magang hanya bisa membuat guru pintar namun tidak dapat memintarkan siswa.

e. Output

Output program magang adalah menghasilkan guru-guru produktif yang profesional yang menguasai kompetensi yang diperlukan untuk mempersiapkan siswanya yang akan melakukan praktik kerja industri agar sesuai dengan harapan DUDI. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan peluang siswa diterima bekerja di DUDI setelah lulus.

f. Outcome

Outcome kegiatan magang adalah meningkatnya relevansi SMK dengan DUDI. Artinya jumlah lulusan SMK yang terserap oleh DUDI meningkat atau jumlah lulusan SMK yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan orang lain atau berwirausaha (*entrepreneurship*) meningkat. Meningkatnya daya serap lulusan atau meningkatnya jumlah lulusan yang berwirausaha adalah merupakan dampak dari *upgrading* kompetensi guru-guru produktif melalui magang industri. Selain itu untuk meningkatkan mutu lulusan di masa yang akan datang dibutuhkan pula adanya *feedback* dari lulusan SMK. Lulusan SMK diwajibkan minimal ½ tahun setelah lulus memberikan umpan balik kepada SMK yang menjadi almamaternya. Sebaliknya sekolah perlu melacak/mengidentifikasi, dan memetakan lulusannya yang berhasil sesuai kompetensinya, agar bersedia sesekali mengunjungi sekolah dan menjadi guru tamu.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kajian menyimpulkan bahwa rendahnya mutu pembelajaran di SMK saat ini terjadi antara lain karena kurangnya pengalaman industri guru-guru yang mengajar mapel produktif. Kajian menemukan bahwa terdapat tiga cara memberikan pengalaman industri kepada guru produktif:

1. Mengundang tenaga ahli (*Visiting expert program*) baik dari dalam maupun luar negeri
2. Guru magang langsung di industri (*internship*) dalam negeri
3. Guru magang langsung di industri (*internship*) di luar negeri

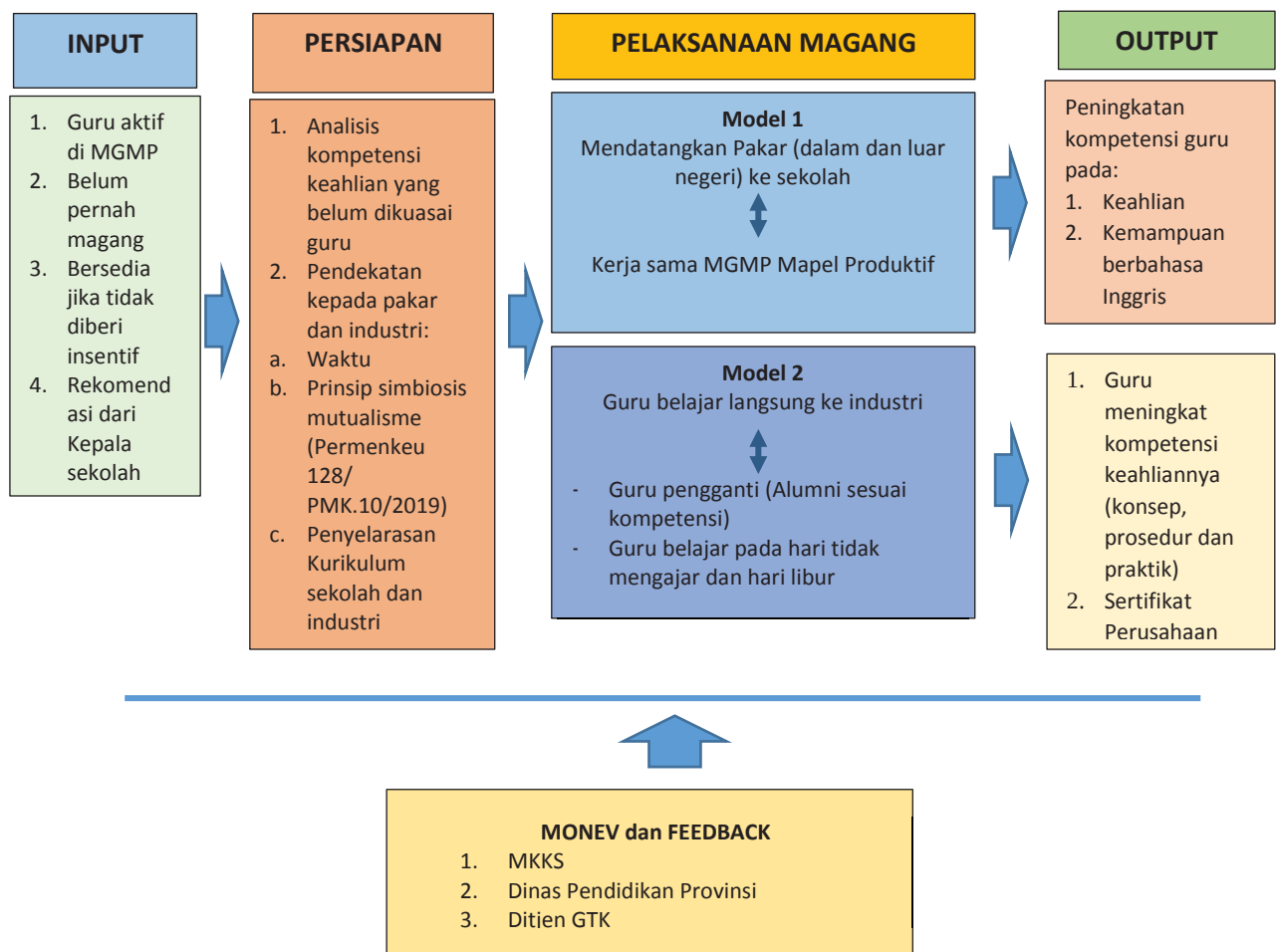
2. Rekomendasi

Kajian merekomendasikan cara untuk meningkatkan kualitas guru produktif sebagai berikut.

a. Visiting Expert Program dan Model Magang Guru Mandiri oleh Sekolah

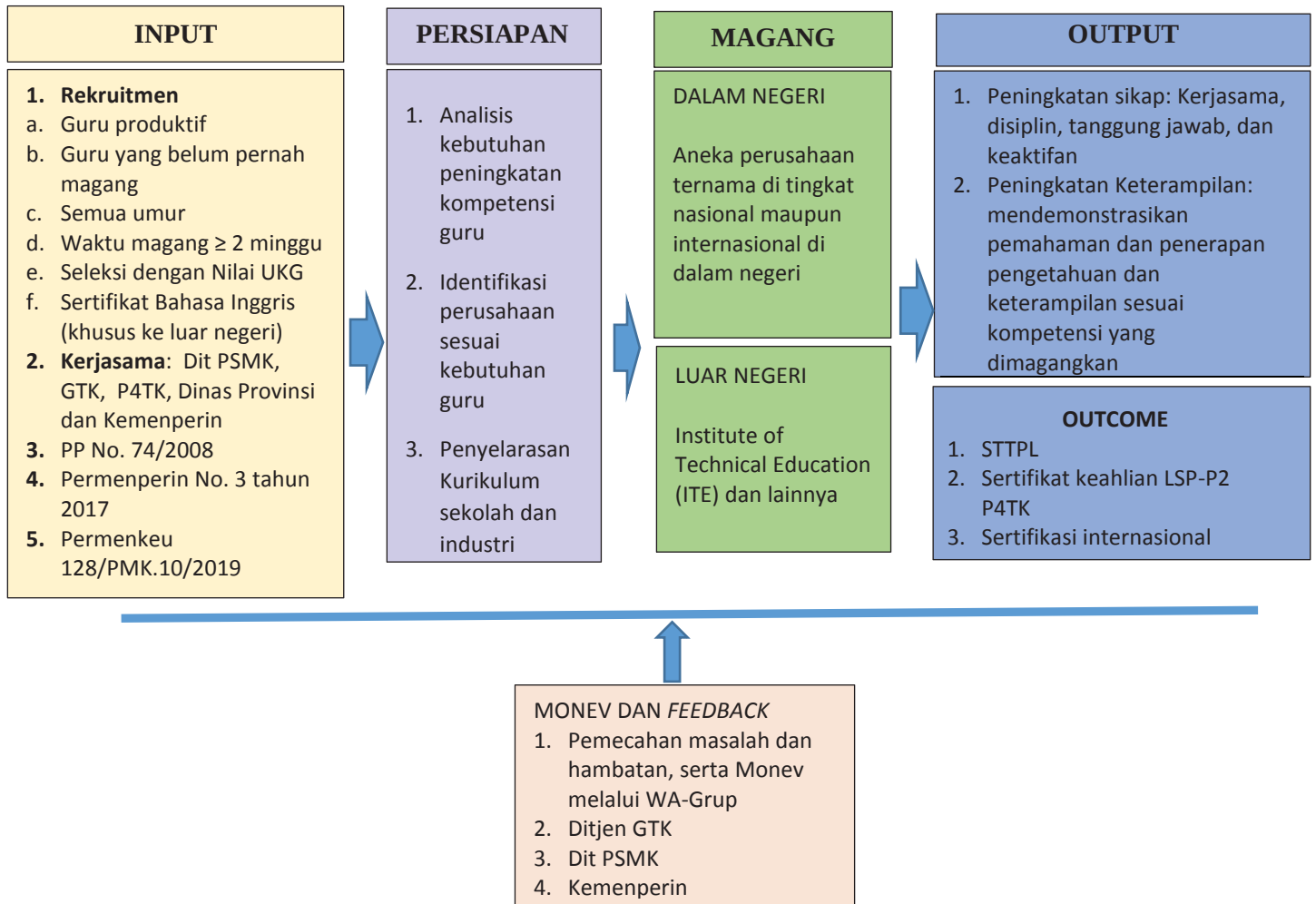
Visiting expert program boleh dilakukan oleh sekolah secara mandiri, namun sebaiknya diselenggarakan melalui forum MGMP dengan bekerja sama dengan MKKS untuk menekan biaya karena ditanggung bersama oleh sekolah-sekolah yang tergabung dalam forum MGMP. Pada langkah pertama diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan guru produktif oleh kepala sekolah baik secara individu sekolah maupun secara berkelompok dalam forum MKKS. Setelah itu dimusyawarahkan dengan pengurus MGMP dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi pakar mana yang perlu diundang. Rencana tersebut lalu disampaikan kepada dinas pendidikan agar dinas dapat mengundang pakar dimaksud.

Magang guru dapat dilakukan secara mandiri di sekolah masing-masing. Kepala sekolah dianggap paling mengetahui kebutuhan gurunya, sehingga dapat langsung melakukan pendekatan ke perusahaan agar guru bisa langsung magang. Sebaiknya model ini sering dilakukan agar guru dapat terus meng-*upgrade* dan meng-*update* ilmunya untuk mempersiapkan siswa mengikuti PKL sesuai harapan industri. Kerja sama seperti ini sebaiknya juga dihargai dengan pemberian sertifikat yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan jenjang karirnya. Kerjasama seperti ini pun lebih menguntungkan karena dapat menyesuaikan dengan waktu luang guru sehingga guru tidak perlu meninggalkan kelas. Kedua model peningkatan kompetensi guru produktif ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Model *visiting expert* dan magang mandiri oleh sekolah

b. Model magang guru produktif oleh lembaga



Gambar 5. Model magang oleh lembaga

Model ini dimodifikasi dari model magang guru yang dikembangkan dan diterapkan oleh P4TK dan Lembaga Pusdiklat Kemenperin. Model ini dikembangkan dengan cara meminimalisir kelemahan dari kedua model tersebut agar dapat diterapkan untuk magang yang lebih efektif. Kelemahan model yang dikembangkan P4TK antara lain: peserta magangnya adalah guru peserta PKB, namun sebaiknya untuk seluruh guru produktif. Lama magang hanya lima hari, padahal menurut pendapat perusahaan magang di industri harus minimal dua minggu sehingga perusahaan merasa mendapat bantuan tenaga, karena prinsip kerjasamanya adalah saling menguntungkan. Lebih lanjut pemberian insentif kepada guru sebaiknya dibatasi, yang terpenting adalah guru dapat melaksanakan amanat UU dan prinsip yang dipegang adalah guru tidak boleh berkurang penghasilannya selama mengikuti kegiatan magang. Kelemahan model magang di Pusdiklat Kemenperin antara lain pesertanya harus berasal dari SMK yang tergabung dalam program *Link and Match* saja, sebaiknya pesertanya diperluas untuk setiap guru produktif yang membutuhkan. Kelemahan lainnya terletak pada rekrutmen peserta. Rekrutmennya kurang ketat, karena mereka yang pertama mendaftar diterima menjadi peserta sampai kuota terpenuhi.

Selain itu kerja sama dengan pihak terkait lainnya juga masih kurang intens dan juga ada persyaratan pembatasan umur peserta. Rekrutmen peserta sebaiknya diperbaharui misalnya membiarkan sebanyak

mungkin pendaftar lalu diseleksi misalnya dengan menggunakan nilai UKG. Kerja sama dengan pihak lain seperti Ditjen GTK dan Dit PSMK dan asosiasi profesi supaya lebih intens sehingga dapat mengoptimalkan pendayagunaan lembaga pelatihan yang ada di bawah Kemendikbud. Persyaratan umur sebaiknya ditiadakan. Kerja sama yang intens juga akan meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap program karena Kemendikbud memiliki kantor-kantor di daerah yang dapat melakukan pengawasan. Selain itu untuk magang ke luar negeri sebaiknya perlu ada persyaratan kepemilikan sertifikat menguasai Bahasa Inggris karena bahasa pengantar yang digunakan dalam magang adalah Bahasa Inggris. Hal ini secara tidak langsung dapat memaksa guru untuk melakukan pengembangan diri. Selain itu sebaiknya magang ke luar negeri diperuntukan bagi mereka yang sudah mengikuti magang dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.
- Mulyati, Y.S. 2012. *Relevansi Program SMK Dengan Kebutuhan Dunia Kerja: Studi Tentang Relevansi Program Keahlian SMK Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Khususnya Melalui Kajian Program Prakerin SMK di Kota Bandung*. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.10/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan SMK Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
- Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Syamsul, A. M. 2017. *Model-Model Penelitian Pengembangan*. <https://syamsulanam42.blogspot.com/2017/09/model-model-penelitian-pengembangan.html>. Diunduh pada 15 Maret 2019.
- Sunardi dan Sudjimat D.A. 2016. "Magang Industri Untuk Meningkatkan Relevansi Kompetensi Profesional Guru Produktif SMK". *Jurnal Teknologi Dan Kejuruan*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Volume 39, Nomor 2, September 2016, halaman 171-182.
- Triastuti, R. 2017. *Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Dengan Menggunakan Model CIPP di TK Kristen 03 Eben Haezer Salatiga*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Utami, B. 2015. *Pelaksanaan Magang Profesi Kependidikan Mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS*. Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS) 2015, halaman 336-343.
- Wardani, P.Y.A. 2013. *Model Pembelajaran Magang (Studi Pada Pengrajin Logam di Sentra Home Industri Logam Kelurahan Kejamboan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KETERSEDIAAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN

Teguh Supriyadi, Idris HM Noor, Kusuma Wijayanti
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini mengkaji 1) ketersediaan guru SMK, 2) mutu pembelajaran SMK, dan 3) keterkaitan ketersediaan guru SMK dan mutu pembelajaran. Penelitian ini menganalisis data sekunder dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil kajian menemukan: 1) guru umum dan kejuruan di SMK tersedia tetapi jumlahnya kurang, masih ada guru SMK yang belum D4/S1, masih ada yang belum bersertifikasi, dan sebagian guru SMK masih ada yang kompetensinya rendah, 2) kompetensi lulusan SMK (teori kejuruan) berada pada kategori kurang dan tidak semua lulusan baru SMK bekerja (lulusan laki-laki yang menganggur 28,02%, sedangkan perempuan 13,67%), 3) SMK negeri dengan kondisi kekurangan guru kejuruan memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan SMK negeri dengan kondisi tidak kekurangan guru kejuruan/tidak kelebihan guru kejuruan maupun dengan kondisi kelebihan guru kejuruan. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah D4/S1 memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan yang belum. Kondisi sebaliknya pada sertifikasi.

Kata kunci: ketersediaan guru, mutu pembelajaran, sekolah menengah kejuruan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia adalah meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini penting karena peran guru sebagai pendidik dalam pembelajaran sangat strategis. Guru memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Ketersediaan guru di SMK harus mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Ketersediaan guru SMK yang cukup merupakan kunci utama bagi keberlangsungan proses pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada mutu pembelajaran. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Wiharna, 2006:64 *dalam* Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan, 2017). Muhson (2004) *dalam* Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Guru, baik secara kuantitas dan kualitas penting dalam membentuk kualitas peserta didik.

Penjelasan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. SMK merupakan salah satu bentuk pendidikan kejuruan. Data keadaan angkatan kerja di Indonesia pada Bulan Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS), menunjukkan bahwa lulusan SMK justru memberikan kontribusi terbesar bagi pengangguran dibandingkan satuan pendidikan lainnya. Di sisi lain, kompetensi lulusan SMK (teori kejuruan) memperlihatkan kecenderungan yang menurun (<https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>, diakses 30 Oktober 2019). Bahkan di tahun ini (2019), nilai kompetensi dalam kategori kurang (nilai UN lebih kecil dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima)).¹ Dengan memperhatikan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2016 yang diduga kuat bahwa ketersediaan guru SMK masih menjadi persoalan karena dampaknya terhadap mutu pembelajaran, baik pada proses maupun output/hasil maka kajian ini perlu dilakukan. Secara umum kajian ini bertujuan mengetahui ketersediaan guru SMK dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun secara khusus tujuan kajian untuk: (1) mengetahui ketersediaan guru SMK, (2) mengetahui mutu pembelajaran SMK, dan (3) mengetahui keterkaitan ketersediaan guru SMK dan mutu pembelajaran.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Guru SMK

Dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa guru Mapel terdiri atas: (1) guru umum pengampu mata pelajaran muatan umum dan muatan adaptif, dan (2) kejuruan pengampu mata pelajaran muatan kejuruan.

2. Ketersediaan Guru

Ketersediaan guru tidak hanya sebatas aspek kuantitas tetapi juga aspek kualitasnya. Kualitas guru diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Ada kecenderungan di SMK baik negeri maupun swasta tersedia guru, namun jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya akan menjadi persoalan. Menurut Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017), kebutuhan guru adalah kesenjangan antara guru yang ada sekarang dan bagaimana hal itu seharusnya atau kesenjangan antara guru yang ada sekarang dengan yang seharusnya diperlukan. Dengan demikian, guru tersedia tidak secara otomatis berarti kebutuhan guru terpenuhi.

3. Mutu Pembelajaran

Mulyasa, 2003 dalam Memorata, A dan Djoko Santoso (tanpa tahun) menyatakan bahwa mutu pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri, sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar.

Menurut Church, C.H. (1988) jaminan mutu seharusnya komprehensif dan menguji tiga hal, yaitu input, proses, dan output. Input seperti faktor-faktor berkaitan dengan peserta didik (kualifikasi, pengalaman

¹ Badan Standar Nasional Pendidikan. (2018). Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019

dan aspirasi, staf pengajar (pengalaman profesi, kualifikasi, pengembangan mengajar staf, dan lainnya), faktor terkait administrasi dan staf teknis, serta faktor terkait fasilitas fisik (lokakarya, laboratorium, ruang kelas dan perpustakaan. Setiap mata pelajaran, tim guru harus mempersiapkan dokumen, metode ajar dan kriteria penilaian. Proses mengajar dan belajar adalah ranah yang esensial untuk dilakukan evaluasi mandiri. Monitoring mata pelajaran dilaksanakan. Budaya dan masalah sumber daya sering kali menjadi penghambat dilakukannya observasi. Kesulitan dan keberhasilan peserta didik, masalah-masalah di data melalui interview dan diskusi personal maupun kelompok. Output meliputi hasil-hasil ujian, perbandingan data nasional lulusan yang bekerja; tempat kerja lulusan; pekerja (alumni) yang sudah berpengalaman satu dan lima tahun.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Data yang dianalisis adalah data ketersediaan guru SMK yang dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitasnya. Dari aspek kuantitas dikaji jumlah guru SMK yang tersedia dan jumlah guru SMK yang ideal. Ketersediaan guru SMK dari aspek kualitasnya dikaji jumlah guru SMK berdasarkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik, dan juga kompetensi gurunya. Data ketersediaan guru SMK, baik secara kuantitas maupun kualitas diperoleh dari Dapodik 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK Kemendikbud), khusus data kompetensi guru SMK diperoleh dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang dilakukan Ditjen GTK Kemendikbud.

Mutu pembelajaran ini dikaji dari sisi output/hasil. Data mutu pembelajaran adalah kompetensi lulusan SMK dan keterserapan lulusan baru SMK di dunia usaha/dunia industri (DUDI). Data kompetensi lulusan SMK (teori kejuruan) diperoleh dari <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id>, sementara data keterserapan lulusan baru SMK di DUDI diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Bulan Februari 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Ketersediaan Guru SMK

1) Ketersediaan Guru SMK Secara Umum

a) Aspek Kuantitas

Pada SMK negeri maupun swasta tersedia guru umum dan kejuruan. Pada SMK swasta masih dijumpai guru umum dan kejuruan yang berstatus PNS. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya¹, baik guru umum maupun kejuruan di SMK negeri maupun swasta mengalami kekurangan guru. Kekurangan guru umum dan kejuruan yang terjadi di SMK swasta lebih besar daripada di SMK negeri (Tabel 1).

¹Kebutuhan guru adalah kesenjangan antara jumlah guru yang tersedia dan jumlah guru yang ideal.

Tabel 1. Jumlah Guru SMK yang Tersedia, Jumlah Guru SMK yang Ideal, Jumlah Guru SMK yang Akan Pensiun, dan Kebutuhan Guru SMK Menurut Jenis Mapel dan Status Sekolah Tahun 2018

A. Status Sekolah: Negeri								
Jenis Mapel	Jumlah Guru yang Tersedia				Jumlah Guru yang Ideal	Jumlah Guru yang Akan Pensiun	Kebutuhan Guru	
	PNS	GTY	GTT	Jumlah			Tanpa GTT	Dengan GTT
Kejuruan	38.411	0	23.694	62.105	88.091	1.178	-50.858	-27.164
Umum	45.855	0	30.395	76.250	115.182	1.425	-70.752	-40.357
Kejuruan dan umum	84.266	0	54.089	138.355	203.273	2.603	-121.610	-67.521
B. Status Sekolah: Swasta								
Jenis Mapel	Jumlah Guru yang Tersedia				Jumlah Guru yang Ideal	Jumlah Guru yang Akan Pensiun	Kebutuhan Guru	
	PNS	GTY	GTT	Jumlah			Tanpa GTT	Dengan GTT
Kejuruan	2.270	40.322	11.646	54.238	119.513	1.103	-78.024	-66.378
Umum	4.127	65.571	16.538	86.236	204.580	2.331	-137.213	-120.675
Kejuruan dan umum	6.397	105.893	28.184	140.474	324.093	3.434	-215.237	-187.053

Sumber Data: Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud)

Keterangan:

PNS= Pegawai Negeri Sipil

GTY= Guru Tetap Yayasan

GTT= Guru Tidak Tetap

(1) Guru Umum

Semua provinsi tersedia guru umum, baik pada SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, semua provinsi mengalami kekurangan guru umum, baik di SMK negeri maupun swasta. Semua kabupaten/kota tersedia guru umum, baik di SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, tidak semua kabupaten/kota mengalami kekurangan guru umum, baik pada SMK negeri maupun swasta. Tidak semua SMK negeri maupun swasta mengalami kekurangan guru umum, tetapi ada juga SMK negeri maupun swasta yang kelebihan guru umum atau tidak kekurangan guru umum/tidak kelebihan guru umum.

Semua Mapel umum di SMK negeri maupun swasta tersedia guru. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, hampir semua Mapel umum di SMK negeri mengalami kekurangan guru, kecuali pada Mapel Penjasorkes justru kelebihan guru. Demikian halnya di SMK swasta. Hampir semua Mapel umum di SMK

swasta mengalami kekurangan guru, kecuali pada Mapel Prakarya dan Kewirausahaan justru kelebihan guru.

(2) Guru Kejuruan

Semua provinsi tersedia guru kejuruan, baik pada SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, semua provinsi mengalami kekurangan guru kejuruan, baik di SMK negeri maupun swasta. Semua kabupaten/kota tersedia guru kejuruan, baik pada SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, tidak semua kabupaten/kota mengalami kekurangan guru kejuruan, baik pada SMK negeri maupun swasta. Tidak semua SMK negeri maupun swasta mengalami kekurangan guru kejuruan tetapi ada juga SMK negeri maupun swasta yang kelebihan guru kejuruan atau tidak kekurangan guru kejuruan/tidak kelebihan guru kejuruan.

Di semua bidang keahlian tersedia guru kejuruan, baik di SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, semua bidang keahlian pada SMK negeri maupun swasta mengalami kekurangan guru kejuruan. Bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen merupakan tiga bidang keahlian yang sangat kekurangan guru kejuruan pada SMK negeri dan swasta. Di semua program keahlian tersedia guru kejuruan, baik pada SMK negeri maupun swasta. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, hampir semua program keahlian pada SMK negeri dan swasta mengalami kekurangan guru kejuruan, kecuali program keahlian Teknik Energi Terbarukan di SMK negeri justru kelebihan guru kejuruan. Semua Mapel kejuruan pada SMK negeri maupun swasta tersedia guru. Jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, hampir semua Mapel kejuruan pada SMK negeri mengalami kekurangan guru.

(b) Aspek Kualitas

(1) Kualifikasi Akademik

Persentase guru Mapel umum dan kejuruan yang sudah D4/S1 baik di SMK negeri maupun swasta telah mencapai target Renstra Kemendikbud 2015-2019 (persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 78,20%).

(a) Kualifikasi Akademik Guru Umum

Semua provinsi mempunyai persentase guru umum yang telah mencapai target kualifikasi, baik pada SMK negeri maupun swasta. Ada satu kabupaten/kota pada SMK negeri yang persentase guru umumnya belum mencapai target kualifikasi, yakni Kabupaten Lanny Jaya. Pada SMK swasta, kabupaten/kota yang belum mencapai target kualifikasi adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Lima Puluh Koto, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Sarolangun. Sekitar 0,54% SMK negeri memiliki persentase guru umum yang belum mencapai target kualifikasi. Pada SMK swasta, jumlahnya sekitar 4,18%. Persentase guru umum tiap Mapel di SMK negeri maupun swasta dengan gelar D4/S1 adalah lebih dari 78,20%.

(b) Kualifikasi Akademik Guru Kejuruan

Ada satu provinsi untuk kelompok SMK swasta yang persentase guru kejuruannya belum mencapai target kualifikasi, yakni Provinsi Maluku. Pada SMK negeri, semua provinsi mempunyai persentase guru kejuruan yang telah mencapai target kualifikasi. Sekitar 2,17% kabupaten/kota untuk kelompok SMK negeri yang persentase guru kejuruannya belum mencapai target kualifikasi. Pada SMK swasta, ada sekitar 14,92% kabupaten/kota. Sekitar 5,48% SMK negeri dengan persentase guru kejuruan belum mencapai target kualifikasi. Pada SMK swasta, ada sekitar 18,95% sekolah.

Persentase guru kejuruan yang sudah D4/S1 pada semua bidang keahlian di SMK negeri adalah lebih dari 78,20%. Di SMK swasta, ada satu bidang keahlian yang memiliki persentase guru kejuruan berpendidikan D4/S1 di bawah 78,20%, yakni bidang keahlian kemaritiman. Tidak semua program keahlian di SMK negeri memiliki persentase guru kejuruan berpendidikan D4/S1 lebih dari 78,20%. Tidak semua Mapel kejuruan di SMK negeri memiliki persentase guru berpendidikan D4/S1 lebih dari 78,20%.

(2) Sertifikasi Pendidik

Persentase guru Mapel umum dan kejuruan yang sudah sertifikasi baik pada SMK negeri maupun swasta belum mencapai target Renstra Kemendikbud 2015–2019 (persentase guru bersertifikat pendidik tahun 2018 sebesar 69,90%).

(a) Sertifikasi Guru Umum

Ada satu provinsi untuk kelompok SMK negeri yang persentase guru umumnya telah mencapai target sertifikasi, yakni Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada SMK swasta, semua provinsi mempunyai persentase guru umum yang belum mencapai target sertifikat. Sekitar 93,11% kabupaten/kota untuk kelompok SMK negeri yang persentase guru umumnya belum mencapai target sertifikat. Pada SMK swasta, ada semua kabupaten/kota belum mencapai target sertifikat. Sekitar 89,58% SMK negeri dengan persentase guru umum yang belum mencapai target sertifikasi. Pada SMK swasta, ada sekitar 93,84% sekolah. Persentase guru umum yang sudah bersertifikasi pada hampir semua Mapel masih di bawah 69,90%, kecuali Mapel Ekomoi di SMK negeri.

(b) Sertifikasi Guru Kejuruan

Ada dua provinsi untuk kelompok SMK negeri yang persentase guru kejuruannya telah mencapai target kualifikasi, yakni Provinsi D.K.I. Jakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada SMK swasta, semua provinsi mempunyai persentase guru kejuruan yang belum mencapai target sertifikasi. Sekitar 87,75% kabupaten/kota untuk kelompok SMK negeri yang persentase guru kejuruannya belum mencapai target sertifikat. Pada SMK swasta, ada sekitar 99,78% kabupaten/kota. Sekitar 83,96% SMK negeri dengan persentase guru kejuruan yang belum mencapai target sertifikasi. Pada SMK swasta, ada sekitar 90,88% sekolah.

Semua bidang keahlian di SMK negeri maupun swasta memiliki persentase guru kejuruan yang belum mencapai target sertifikasi. Tidak semua program keahlian di SMK negeri memiliki persentase guru kejuruan yang sudah sertifikasi di atas 69,90%. Perkecualian pada program keahlian Desain Dan Produk Kreatif Kriya, dan Seni Tari. Pada SMK swasta, tidak ada satu pun program keahlian dengan persentase guru kejuruan yang sudah bersertifikasi di atas 69,90%. Tidak semua Mapel kejuruan di SMK negeri memiliki persentase guru yang sudah bersertifikasi di atas 69,90%.

(3) Kompetensi Guru

Nilai rata-rata UKG SMK negeri adalah 60,33, sedangkan SMK swasta adalah 57,91. Pada SMK negeri, ada 24 provinsi yang nilai UKG-nya di bawah nilai rata-rata UKG SMK negeri, sementara pada SMK swasta ada 27 provinsi. Untuk kabupaten/kota, ada 331 kabupaten/kota yang nilai UKG-nya di bawah nilai rata-rata UKG SMK negeri, sementara pada SMK swasta ada 303 kabupaten/kota.

2) Ketersediaan Guru SMK Secara Prioritas

Pada bagian ini diuraikan ketersediaan guru SMK secara prioritas. Prioritas dalam kajian ini mengacu pada rapat terbatas Revitalisasi Lembaga dan Pendidikan Vokasi pada bulan Juni 2019 di Jakarta. Dalam rapat tersebut ditetapkan 10 provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan) beserta industri unggulan prioritas dan program keahlian prioritasnya.

Berdasarkan Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud), tidak semua program keahlian di 10 provinsi memiliki sekolah, misalnya program keahlian Teknik Instrumentasi Industri di Provinsi Bali, Banten, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, serta Teknik Industri di Provinsi Kepulauan Riau. Guru tersedia di semua program keahlian di 10 provinsi, namun jumlahnya masih kurang. Belum semua guru program keahlian di 10 provinsi memenuhi mutu kualitas, baik D4/S1 maupun sertifikasi.

b. Mutu Pembelajaran SMK

1) Keterserapan lulusan Baru SMK di DUDI

Kegiatan yang banyak dilakukan oleh lulusan baru SMK pada seminggu yang lalu. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh lulusan baru SMK laki-laki dan perempuan pada seminggu yang lalu adalah bekerja. Lulusan baru SMK laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang diterima laki-laki (Rp 1.955.665) lebih besar daripada perempuan (Rp 1.729.150). Jenis pekerjaan/jabatan yang banyak dijabat oleh lulusan baru SMK laki-laki adalah Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar, sedangkan perempuan adalah Tenaga Usaha Penjualan.

2) Kompetensi Lulusan SMK

Hasil capaian nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk mata uji kompetensi (teori kejuruan) dalam kategori kurang, SMK negeri adalah 46,12 dan SMK swasta adalah 42,54. Pada SMK negeri, ada 25 provinsi yang nilai kompetensinya di bawah nilai rata-rata SMK negeri. Pada SMK swasta ada 22 provinsi yang nilai kompetensinya di bawah nilai rata-rata SMK negeri. Ada 372 kabupaten/kota yang nilai kompetensinya di bawah nilai rata-rata SMK negeri, sementara pada SMK swasta ada 292 kabupaten/kota.

c. Keterkaitan Ketersediaan Guru SMK dan Mutu Pembelajaran

Muhson (2004) dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Guru, baik secara kuantitas dan kualitas penting dalam membentuk kualitas peserta didik.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa SMK negeri dengan kondisi kekurangan guru kejuruan memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMK negeri yang tidak kekurangan guru kejuruan/kelebihan guru kejuruan. Ini terjadi baik tanpa GTT maupun dengan GTT. Walaupun kekurangan guru tetapi pembelajaran tetap berlangsung, sehingga siswa tidak ketinggalan materi pelajaran.

Tabel 2. Nilai Rata-rata UN-Kompetensi
Menurut Kondisi Jumlah Guru Kejuruan di SMK Negeri

Kondisi Jumlah Guru	Nilai Rata-rata UN-Kompetensi	
	Tanpa GTT	Dengan GTT
Kekurangan guru kejuruan	58,15	58,29
Tidak kekurangan guru kejuruan/Tidak kelebihan guru kejuruan	58,10	57,80
Kelebihan guru kejuruan	57,30	57,42

SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan berpendidikan D4/S1 memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan yang belum. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah bersertifikasi memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih rendah dibandingkan yang belum (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai Rata-rata UN-Kompetensi
Menurut Kualitas Guru Kejuruan di SMK Negeri

Aspek Kualitas Guru	Nilai Rata-rata UN-kompetensi
• Kualifikasi Akademik	
Semua guru kejuruan berpendidikan D4/S1	43,92
Tidak semua guru kejuruan berpendidikan D4/S1	42,49
• Sertifikasi Pendidik	
Semua guru kejuruan sudah bersertifikasi	41,31
Tidak semua guru kejuruan sudah bersertifikasi	43,48

2. Pembahasan

a. Memenuhi Ketersediaan Guru SMK Sesuai Kebutuhannya

Dalam uraian sebelumnya dinyatakan bahwa tersedia guru umum dan kejuruan di SMK negeri maupun swasta. Namun jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, baik guru umum maupun kejuruan, SMK negeri mengalami kekurangan guru. Demikian halnya SMK swasta juga mengalami kekurangan guru. Kekurangan guru di SMK swasta baik guru umum maupun kejuruan terlihat lebih besar daripada di SMK negeri. Demikian pula menurut provinsi, kabupaten/kota, dan bidang keahlian/program keahlian/Mapel mengalami kekurangan guru. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru. Fakry Gaffar (1989) dalam Kusri, E (2014) menyebutkan beberapa faktor yang diperhitungkan dalam melakukan proyeksi kebutuhan guru sebagai data dasar yang mencakup: (1) *enrollment* sekolah, (2) jumlah jam per minggu yang diterima siswa masing-masing mata pelajaran tertentu maupun seluruh mata pelajaran, (3) beban mengajar penuh guru per minggu, (4) besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, (5) jumlah guru yang ada, (6) jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan, dan (7) jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru.

Banyak peraturan yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan guru SMK, baik guru umum maupun kejuruan adalah sebagai berikut.

- Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di dalam Permendikbud tersebut, selain guru mata pelajaran, ada pula instruktur kejuruan. Instruktur kejuruan adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia

usaha/industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis

- PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

Selain itu, pemerintah daerah provinsi berwenang membuat kebijakan rekrutmen guru, misalnya Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta mengadakan program Kontrak Kerja Individu (KKI) bagi guru. Program ini bertujuan mendapatkan guru yang berkualitas dan meeningkat kesejahteraannya. Demikian halnya sekolah. SMKN 57 Jakarta mengajak alumninya untuk memenuhi kebutuhan gurunya.

b. Meningkatkan Kualitas Guru SMK

Walaupun capaian kualifikasi akademik guru SMK telah mencapai target yang ditetapkan Renstra Kemendikbud 2015–2019, namun masih dijumpai guru SMK yang belum berpendidikan D4/S1. Mengenai sertifikat pendidik, masih banyak guru SMK yang belum bersertifikasi. Hal inilah yang menyebabkan belum tercapainya target sertifikasi guru SMK seperti dinyatakan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019.

Masih adanya guru SMK yang belum berpendidikan D4/S1 dan sertifikasi merupakan persoalan serius. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini (pasal 82 UU Nomor 14 Tahun 2015). Berdasarkan Dapodik per 31 Desember 2018 (diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud) diketahui sekitar 373 guru SMK dalam jabatan berstatus CPNS dan PNS yang harus di-D4/S1-kan oleh pemerintah, sementara sekitar 18.504 guru SMK dalam jabatan berstatus CPNS dan PNS yang harus disertifikasi pemerintah.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2015. Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11 menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini sertifikasi pendidik dilaksanakan melalui Program Pendidikan Guru (PPG).

Tentang kompetensi guru SMK, nilai rata-rata UKG SMK negeri adalah 60,33, sedangkan pada SMK swasta adalah 57,91. Secara teoritis pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan guru dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (1) belajar mandiri (membaca literatur, melakukan pelatihan mandiri dengan memanfaatkan fasilitas belajar disekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan internet), (2) kerja atau diskusi kelompok dengan rekan sejawat dalam bidang yang sama (melalui forum MGMP/KKG), (3) mengikuti pelatihan dari sekolah maupun luar sekolah, (4) supervisi pengajaran, dan (5) melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2017).

c. Meningkatkan Kompetensi Lulusan SMK dan Keterserapan Lulusan Baru SMK di DUDI

Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017–2025 menyatakan bahwa peningkatan kompetensi keahlian lulusan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri dengan cara:

- Perbaikan kurikulum dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta lebih berbasis pada kompetensi kejuruan untuk meningkatkan hands-on-experience para lulusannya
- Peningkatan kualitas dan jumlah guru produktif melalui program keahlian ganda, program guru tamu, dan program silver expert.
- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan pihak industri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Ketersediaan Guru SMK

Di SMK negeri maupun swasta tersedia guru umum dan kejuruan. Namun jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, SMK negeri mengalami kekurangan guru umum maupun kejuruan. Demikian pula SMK swasta. Kekurangan guru di SMK swasta baik guru umum maupun kejuruan terlihat lebih besar daripada di SMK negeri. Terjadi kekurangan guru umum dan kejuruan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta dalam bidang keahlian/program keahlian/Mapel.

Walaupun capaian kualifikasi akademik guru SMK telah mencapai target yang ditetapkan Renstra Kemendikbud 2015–2019, masih terdapat guru SMK yang belum berpendidikan D4/S1. Mengenai sertifikat pendidik, masih dijumpai banyak guru SMK yang belum bersertifikasi. Hal inilah yang menyebabkan belum tercapainya target sertifikasi guru SMK seperti dinyatakan dalam Renstra Kemendikbud 2015–2019. Tentang kompetensi guru SMK, nilai rata-rata UKG SMK negeri tahun 2015 adalah 60,33, sedangkan pada SMK swasta adalah 57,91.

Tidak semua program keahlian di 10 provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan) tersedia di sekolah, seperti program keahlian Teknik Instrumentasi Industri di Provinsi Bali, Banten, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, serta Teknik Industri di Provinsi Kepulauan Riau. Tersedia guru untuk semua program keahlian di 10 provinsi, tetapi jumlahnya masih kurang. Belum semua guru program keahlian di 10 provinsi sudah berpendidikan D4/S1, demikian pula dengan sertifikasi.

b. Mutu Pembelajaran SMK

Kegiatan yang banyak dilakukan oleh lulusan baru SMK laki-laki (55,01%) dan perempuan (65,89%) pada seminggu yang lalu adalah bekerja. Lulusan baru SMK laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang diterima laki-laki (Rp 1.955.665) lebih besar daripada perempuan (Rp 1.729.150). Jenis pekerjaan/jabatan yang banyak dijabat oleh lulusan baru SMK laki-laki adalah Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar, sedangkan perempuan adalah Tenaga Usaha Penjualan.

Hasil capaian nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk mata uji kompetensi (teori kejuruan) dalam kategori kurang, SMK negeri adalah 46,12 dan SMK swasta adalah 42,54.

c. Keterkaitan Ketersediaan Guru SMK dan Mutu Pembelajarannya

SMK negeri dengan kondisi kekurangan guru kejuruan memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMK negeri yang tidak kekurangan guru kejuruan/tidak kelebihan guru kejuruan dan kelebihan guru kejuruan. Ini terjadi baik dengan GTT maupun tanpa GTT. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah D4/S1 memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi

dibandingkan yang belum. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah bersertifikasi memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang belum.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, maka tim peneliti mengemukakan rekomendasi sebagai berikut.

No.	Kesimpulan Hasil Kajian	Rekomendasi								
		Program	Pelaku						Kekuatan	Kelemahan
			1	2	3	4	5	6		
1	Guru umum dan kejuruan tersedia, tetapi jumlahnya kurang	Program redistribusi guru SMK yang berlebih di satu sekolah ke sekolah yang kekurangan guru.	√		√		√		Ada sekitar 4,83% SMK negeri yang kelebihan guru umum dan 14,58 SMK negeri yang kelebihan guru kejuruan.	Ada penolakan dari guru karena dipindahkan.
		Program kerjasama Kemendikbud dengan DUDI dalam pemenuhan kebutuhan guru.	√	√					1. Adanya kebijakan yang mendukung, yakni: • Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 • PP Nomor 45 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019	Perlu ada pelatihan bagi pekerja di DUDI yang akan mengajar, mengingat mereka kurang menguasai kompetensi pedagogik.
		Program pemanfaatan peserta Program Pendidikan Guru (PPG) mengajar.	√			√			• Salah satu kegiatan Program Studi PPG Prajabatan adalah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) • PPL dilakukan di sekolah-sekolah di sekitar lokasi LPTK	Waktu pelaksanaan PPL tidak lama.
2	Masih ada guru SMK yang belum D4/S1	Program bantuan pemerintah (keringanan biaya dan waktu belajar) peningkatan D4/S1 sekaligus sertifikasi bagi guru dalam jabatan (ada sekitar	√	√		√			Meningkatkan kesejahteraan guru karena berpeluang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).	Membutuhkan anggaran besar.

373 guru CPNS dan PNS).							
3	Masih ada guru SMK yang belum sertifikasi	Program bantuan pemerintah (keringanan biaya dan waktu belajar) sertifikasi bagi guru dalam jabatan (ada sekitar 18.504 guru CPNS dan PNS).	√	√	√	Meningkatkan kesejahteraan guru karena berpeluang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).	Membutuhkan anggaran besar.
4	Masih ada guru SMK yang kompetensinya (UKG) rendah	UKG dilakukan secara berkesinambungan	√	√		Perkembangan kompetensi guru terpantau.	Membutuhkan anggaran besar.
		Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap hasil tes kompetensi	√	√		Memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya.	Membutuhkan anggaran besar
5	• Kompetensi lulusan SMK (teori kejuruan) dalam kategori kurang	Program penguatan peran supervisi kepala sekolah dan pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran.	√	√		Pembelajaran menjadi bermutu	Kesibukan kepala sekolah dan pengawas.
	• Tidak semua lulusan baru SMK bekerja (lulusan laki-laki yang menganggur 28,02%, sedangkan perempuan 13,67%),	Program kerjasama Kemendikbud dengan DUDI dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana SMK.	√	√	√	Adanya kebijakan yang mendukung, yakni: • PP Nomor 45 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019	

Keterangan:

1. Kemendikbud
2. Kemenkeu
3. Pemerintah Daerah Provinsi
4. Perguruan Tinggi/LPTK
5. Sekolah
6. DUDI

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, T. M. 2015. *Metode Penelitian Sekunder (Analisis Data Sekunder)*, <https://tatangmanguny.wordpress.com/2015/04/12/metode-penelitian-sekunder-analisis-data-sekunder/>. diakses 14 Juni 2019.

- Church, C.H. 1988. *The Qualities of Validation*, Studies in Higher Education, 13, 1, hlm. 27–44.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2017. *Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016*.
- Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Kusrini, E. 2014. *Proyeksi Kebutuhan Guru Kelompok Produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rumpun Bisnis dan Manajemen (BISMAN) 2014/2015-2023/2024 di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memorata, A. dan Djoko Santoso. (Tanpa Tahun). *Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Hasil Belajar Merakit Personal Komputer Menggunakan Structured Dyadic Methods (Sdm)*. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan. 2017. *Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Batu*. Laporan Penelitian Penelitian PNBK Jurusan. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang November, 2017
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yulius, Muhammad Isran, Mardhianda WP, dan Bangkit Anugerah. 2017. *Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017–2025*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PERAN MGMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SMA

Idris H.M. Noor, Simon Sili Sabon, Bambang Suwardi Joko, Kusuma Wijayanti
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan MGMP dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA agar guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Berdasarkan hasil analisis dokumen, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara kepada narasumber, MGMP yang pengelolaannya baik menunjukkan hasil UKG dan UN siswanya tinggi, sedangkan yang pengelolaannya kurang baik menunjukkan hasil UKG guru dan UN siswanya rendah. MGMP yang baik menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama dalam penyediaan narasumber. MGMP yang kurang baik belum menjalin kerja sama dengan lembaga lain. Oleh sebab itu, pengelolaan MGMP SMA menjadi tolak ukur keberhasilan MGMP dalam membantu guru meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan MGMP SMA adalah program tahunan, kerja sama dengan lembaga lain, keaktifan guru sebagai anggota MGMP dalam mengikuti kegiatan MGMP, baik pelatihan maupun pertemuan rutin. Untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru SMA diperlukan penguatan pengelolaan MGMP dalam melaksanakan K-13 melalui pembelajaran yang baik di kelas.

Kata kunci: MGMP, pengelolaan, Kurikulum 2013, pembelajaran, UN, UKG

A. PENDAHULUAN

Pada dasawarsa terakhir ini peran guru semakin penting dalam menghasikan sumber daya manusia unggul. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru menempatkan guru sebagai unsur kunci dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (K-13) di sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru harus memiliki (i) kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV; (ii) kompetensi sebagai agen pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) sertifikat pendidik (UU Guru No. 14 Tahun 2005) dan harus berkualifikasi akademik minimal strata 1 (S-1) atau Diploma IV (DIV) dan secara terus-menerus harus meningkatkan kompetensinya (PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bab 1, Pasal 1, ayat (6) mengatakan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Peran utama MGMP adalah memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama melakukan tukar pendapat dan pengalaman (*sharing*). Namun, masih banyak guru yang tidak aktif sehingga tidak berkembang dan statis walaupun sudah mengikuti kegiatan MGMP. Selain itu, akibat tidak banyaknya peran yang bisa dilakukan oleh MGMP, kemampuan guru mengajar yang ditunjukkan oleh indikator keberhasilan siswa

masih rendah, seperti peringkat PISA dan hasil UN. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi hasil program yang ditransfer guru hanya 50% (Puslitjak, 2018) Salah satu di antaranya disebabkan oleh kemampuan guru dalam implementasi K-13 (analisis SKL-KI-KD dan perumusan IPK) masih rendah. Pelaksanaan PKB saat ini lebih cenderung membuat guru pintar daripada membuat murid pintar. (GTK, 2019). Data terkait menunjukkan bahwa dari tahun 2000 s.d. 2015, skor siswa Indonesia berkisar antara 370-400, sedangkan skor rata-rata PISA 500. Oleh karena itu, persentase soal penalaran pada UN/USBN 2019 akan ditingkatkan, terutama kemampuan siswa mengerjakan soal HOTS pada UN/USBN, PISA, dan TIMSS yang menuntut siswa untuk berpikir, mengolah informasi, dan membaca teks panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting sekali bagi MGMP sebagai sebuah asosiasi atau perhimpunan guru mata pelajaran membuat strategi untuk memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Hal yang paling penting dilakukan untuk memperkuat kompetensi guru adalah memperkuat kinerja MGMP (*The important thing to do is to strengthen the teachers' competence by empowering the STWG to meet the needs of teacher while in the same time a teacher should also engage and actively participate in STWG activities decided by member of the STWG*) (Noor dan Santosa, 2018). Hal ini penting karena disinyalir bahwa *mind set* guru lebih fokus pada pelaksanaan sumatif dibanding formatif.

Penguatan kompetensi guru melalui MGMP, khususnya di SMA, perlu dilakukan, antara lain karena nilai UKG guru di bidang studi yang terkait UN dan USBN UNBK di bawah nilai rata-rata UKG (standar 6,0). Dengan kompetensi guru yang masih lemah tersebut, penguatan guru untuk bidang studi itu akan memengaruhi prestasi peserta didik. Penguasaan K-2013 guru di kota dan desa atau antara satu sekolah dan lainnya tidak sama sehingga memengaruhi UN atau berpengaruh terhadap nilai evaluasi kemajuan pembelajaran siswa (atau nantinya pengganti UN).

Kajian Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia tahun 2016 menyimpulkan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi mutu belajar siswa di sekolah, yaitu praktik mengajar, guru, siswa, internal sekolah, dan lingkungan eksternal sekolah (INOVASI, 2016). Pada beberapa kajian lainnya, capaian hasil belajar siswa berkorelasi dengan kualitas guru yang menjadi kunci dalam setiap proses belajar-mengajar yang berjalan. Oleh karena itu, selain kompetensi dasar siswa pada tiga bidang yang banyak dirilis oleh lembaga di atas, kualitas guru juga menjadi salah satu indikator dalam menilai mutu belajar siswa.

Persoalan lain adalah akibat kurang maksimalnya peran MGMP dalam membina guru juga terlihat dari rata-rata hasil UKG guru SMA tahun 2015 (59.16; GTK: 2015) di bawah standar (6.0) dalam skala 10—100 walaupun MGMP sudah lama ada. Sharing dan pelatihan tidak banyak pengaruhnya. Secara umum kompetensi guru di 34 provinsi bernilai rendah dalam dua bidang penguasaan, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Hasil UKG tersebut menunjukkan nilai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru masih berada di bawah rata-rata nilai 60. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan MGMP dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA agar guru, khususnya anggota MGMP, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi K-13 tidak terlepas dari peran guru sebagai kunci dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Keberhasilan pelaksanaan K-13 bergantung pada kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas sebagaimana tercantum dalam regulasi No 14 Tahun 2005 Pasal 10, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam hal ini, kompetensi pedagogik dan profesional memegang peranan sangat penting yang membuat guru sukses dalam mengimplementasikan K-13.

Dalam mengimplementasikan K-13 masih banyak guru menemui kesulitan menerapkan pembelajaran terintegrasi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk menjelaskan tujuan belajar memahami isi buku siswa, menganalisis pertanyaan dalam buku siswa, melaksanakan penilaian autentik, melaksanakan instruksi pembelajaran secara saintifik, dan mendesain perencanaan pembelajaran serta melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk memperkuat kompetensi guru dalam melaksanakan K-13, salah satu strategi yang dikembangkan dan diperkuat adalah memberdayakan MGMP sebagai salah satu media dan lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai tempat diskusi dan bertukar pengalaman.

Peran guru dalam melaksanakan K-13 bervariasi, antara lain sebagai narasumber, orang tua, instruktur, pembimbing, teman, dokter, dan evaluator (Wright, 1997). Dalam mendesain materi pembelajaran, contohnya, seorang guru berperan sebagai desainer harus bisa mendesain dan memilih materi ajar yang tepat sesuai dengan tingkat dan kebutuhan siswa dengan metode mengajar yang bervariasi. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk menjadi seorang pelajar yang profesional karena belajar secara profesional mempunyai efek kuat terhadap keterampilan dan pengetahuan. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan keterampilan siswa dalam menyiapkan diri-melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan minat belajar siswa, terutama menyiapkan siswa dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21 (Hammond, Maria, dan Madelyn, 2017). Selain itu, guru juga perlu memahami karakter siswa, memahami manajemen kelas seperti kerja individu, berpasangan, berkelompok, dan secara klasikal. Semua kemampuan ini merupakan kerja profesional dalam menerapkan strategi pembelajaran dalam melaksanakan K-13 sehingga tercipta karier profesional guru.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

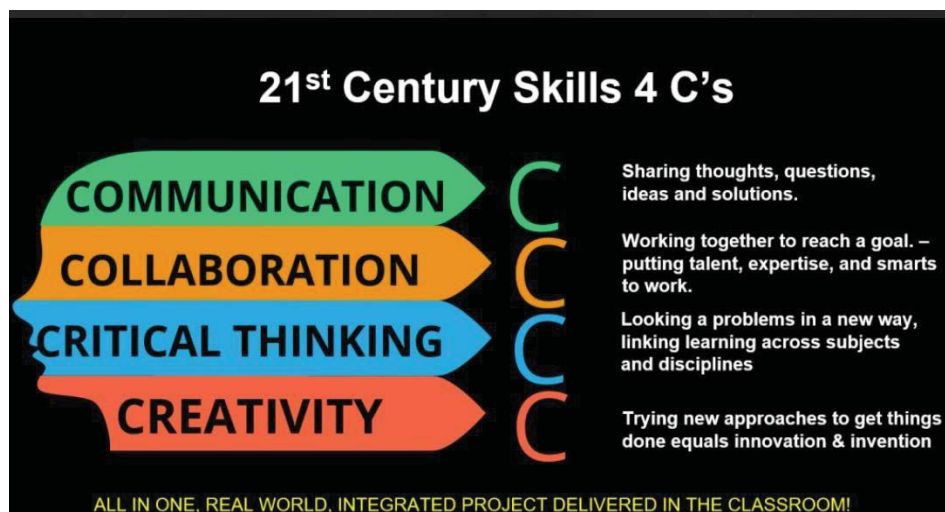
Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa komponen utama yang menjadi fokus perhatian MGMP untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan K-13, yaitu a) memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar; b) memberi kesempatan kepada anggota MGMP SMA untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; c) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaruan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta MGMP ;d) memberdayakan dan membantu anggota MGMP SMA dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah; e) mengubah budaya kerja anggota MGMP SMA untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kinerja organisasi; f) mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru menjadi guru yang profesional melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat MGMP; dan g) meningkatkan mutu proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

3. Mutu Pembelajaran

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa *pembelajaran* adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa agar dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktivitas dan kualitasnya bergantung pada kapabilitas guru dalam membantu siswa pada konteks tertentu (Day, 1999:ix). Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kelangsungan proses belajar guru

dalam konteks mengajar, kebiasaan siswa, dan harapan guru tentang perubahan. Dalam peningkatan mutu pembelajaran, guru harus mampu mengikuti perkembangan, khususnya kegiatan pembelajaran dalam peningkatan keterampilan (*skill*) abad ke-21 sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Keterampilan abad ke-21

Pendidikan abad ke-21 menekankan empat keterampilan yaitu komunikasi, kerja sama, berpikir kritis, dan kreatif yang disingkat dengan 4 C's, yaitu komunikasi, kerja sama, berpikir kritis, dan kreatif. Guru memegang peranan penting dalam pembelajaran, sehingga peningkatan kemampuan guru sangat diperlukan, antara lain melalui belajar mandiri untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki strategi mengajarnya. Belajar mandiri juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai belajar tentang belajar dan mengajar, lebih memahami hubungan antara mengajar dan belajar (Loughran, 2014), serta meningkatkan keterampilan dalam persiapan belajar abad ke-21 (Hammond, Maria, dan Madelyn, 2017).

Proses pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan dan harapan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kecakapan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Untuk itu, ada sepuluh keterampilan yang dibutuhkan, yaitu *complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, emotion intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility*. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran guru memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, terutama dalam memanfaatkan teknologi, seperti komputer untuk menjelaskan materi ajar pada siswa dalam kelas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji data mengenai jenis, jumlah guru SMA secara nasional dan provinsi sampel penelitian, jumlah guru SMA daerah sampel, jumlah guru mata pelajaran (mapel) secara nasional, perbandingan capaian rata-rata UN SMA secara nasional dan daerah sampel penelitian, UKG 2015 secara nasional, provinsi, dan daerah sampel. Verifikasi data dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) dan wawancara. Selain itu, dilakukan juga diskusi mengenai pengelolaan MGMP, seperti program tahunan, jumlah sekolah yang ikut dalam satu jenis MGMP, jumlah anggota yang aktif dan yang tidak aktif, pelatihan yang dilakukan oleh MGMP, narasumber dan biaya pengelolaan setiap MGMP, fungsi, tugas setiap kelompok MGMP, serta rencana/program.

Penelitian ini dilaksanakan di lima daerah, yaitu Kota Padang Panjang (Sumatra Barat), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Yogyakarta (Daerah Khusus Yogyakarta), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kota

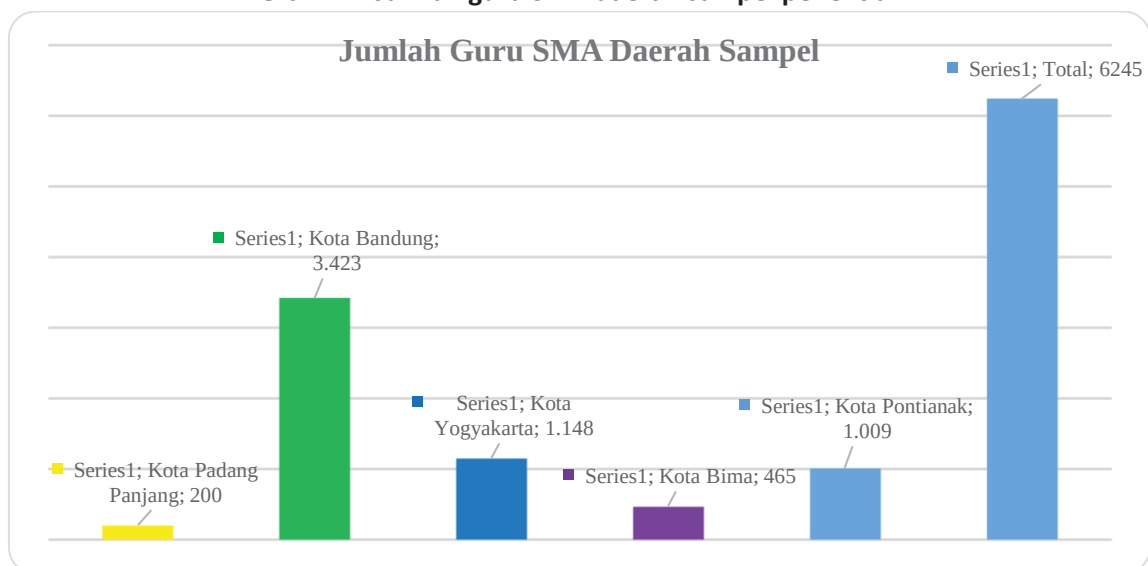
Bima (Nusa Tenggara Barat). Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Menurut Arikunto (2000:352), data persentase yang dinyatakan dalam bilangan merupakan ukuran kuantitati. Data primer yang diperoleh dari narasumber dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara: a) reduksi data, b) triangulasi data, yaitu data di-*cross-check* dengan data dari berbagai sumber, seperti data dokumen dan hasil FGD, c) *Cross-check* data dari narasumber dan c) data yang salah diperbaiki.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut diuraikan mengenai data sekunder, yaitu jumlah guru SMA secara nasional, jumlah guru SMA daerah sampel penelitian, jumlah guru mata pelajaran SMA secara nasional, hasil UKG dan UN siswa di lima daerah sampel penelitian, dan hasil verifikasi data di lima daerah sampel penelitian.

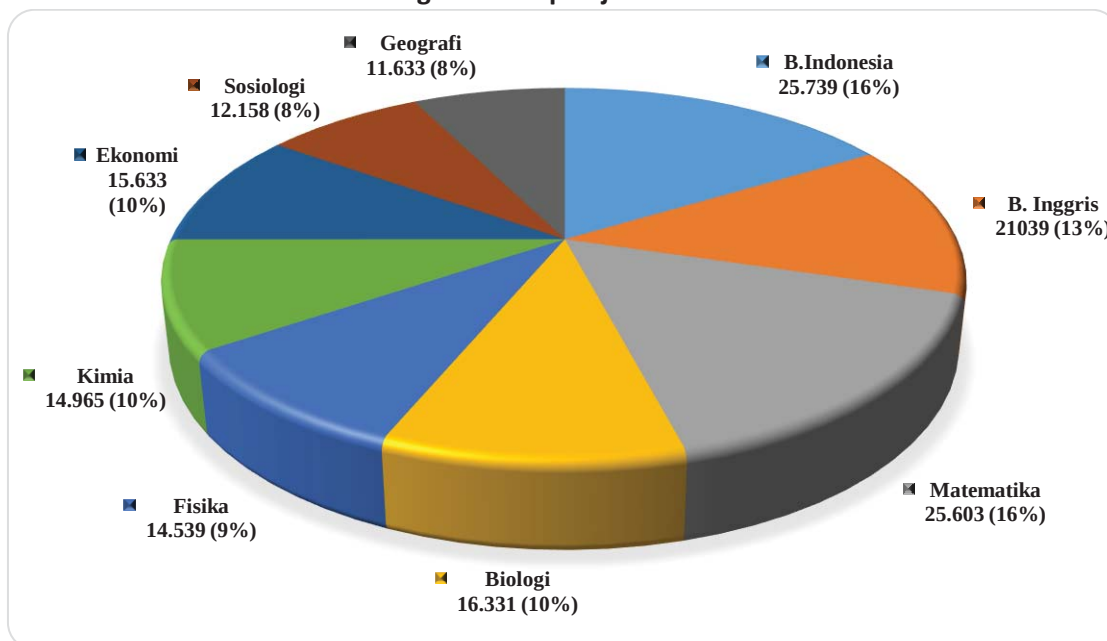
1. Data Sekunder

Grafik 1. Jumlah guru SMA daerah sampel penelitian



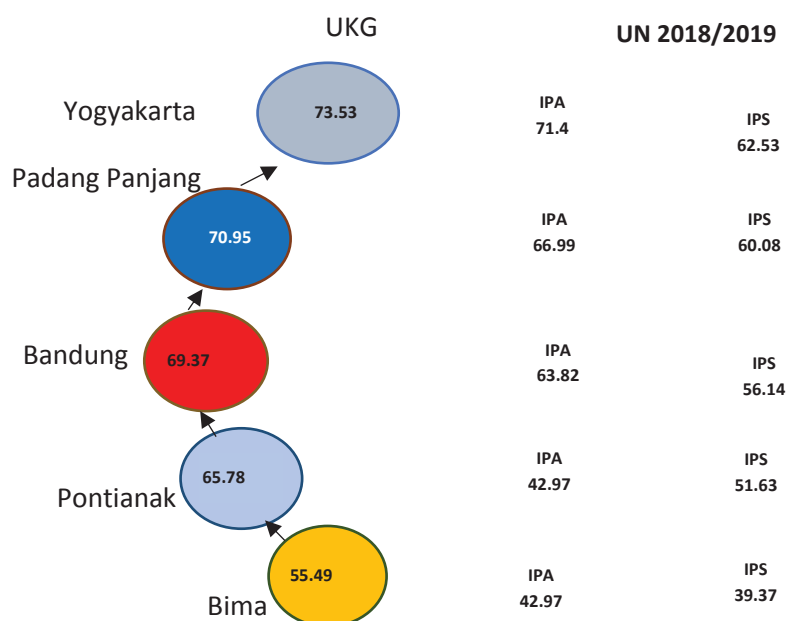
Jumlah guru SMA daerah sampel sebanyak 6.245 orang. Jumlah guru di kabupaten/kota sampel penelitian adalah: Padang Panjang sebanyak 200 orang, Kota Bandung sebanyak 3.423, Kota Yogyakarta sebanyak 1.148, Kota Bima sebanyak 465, dan Kota Pontianak sebanyak 1.009 orang.

Grafik 2. Jumlah guru mata pelajaran SMA secara nasional



Guru yang paling banyak mata pelajarannya di-UN-kan adalah guru Bahasa Indonesia dan guru Matematika masing-masing 16% dari seluruh guru mata pelajaran yang di-UN-kan (16%). Jumlah guru yang paling sedikit mata pelajarannya di-UN-kan adalah guru mata pelajaran Sosiologi dan Fisika masing-masing 8% dan 9%. Mata pelajaran yang menjadi kajian ini hanya mata pelajaran yang di-UN-kan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi. Selanjutnya, data juga menunjukkan bahwa di daerah yang MGMP-nya sudah maju atau yang sudah baik, hasil UKG guru dan hasil ujian nasional siswa cukup tinggi. Sebaliknya, pada daerah yang MGMP-nya kurang baik terlihat hasil UKG dan UN siswanya juga rendah sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3. Hasil UKG dan UN siswa di lima daerah sampel penelitian



Capaian UN dan UKG di lima kabupaten/kota sampel penelitian memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta mendapat nilai tertinggi dalam UN tahun 2018/2019 untuk IPA (71,4) dan IPS (62,53), Kota Padang Panjang, IPA (66,99) dan IPS (60,08), Kota Bandung, IPA (63,82) dan IPS (56,14), Kota Pontianak, IPA (42,97) IPS (51,63) dan terakhir Kota Bima, IPA (42,97) dan IPS (39,37). Selanjutnya, nilai UKG tertinggi adalah Kota Yogyakarta (73,78), Kota Padang Panjang (70,95), Kota Bandung (69,37), Kota Pontianak (65,78), dan Kota Bima (55,49). Hasil diskusi dalam FGD terungkap bahwa MGMP di Kota Yogyakarta dan Kota Bandung aktif bekerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya dalam penyediaan narasumber pada pelatihan, termasuk narasumber pada kegiatan rutin MGMP sehingga guru-guru memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebaliknya, MGMP di Kota Bima dan Pontianak belum melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya dalam mendapatkan narasumber dalam pelatihan atau pertemuan MGMP. Persoalan yang sering dihadapi oleh MGMP adalah kurangnya narasumber yang berkompeten dalam bidang yang dibutuhkan.

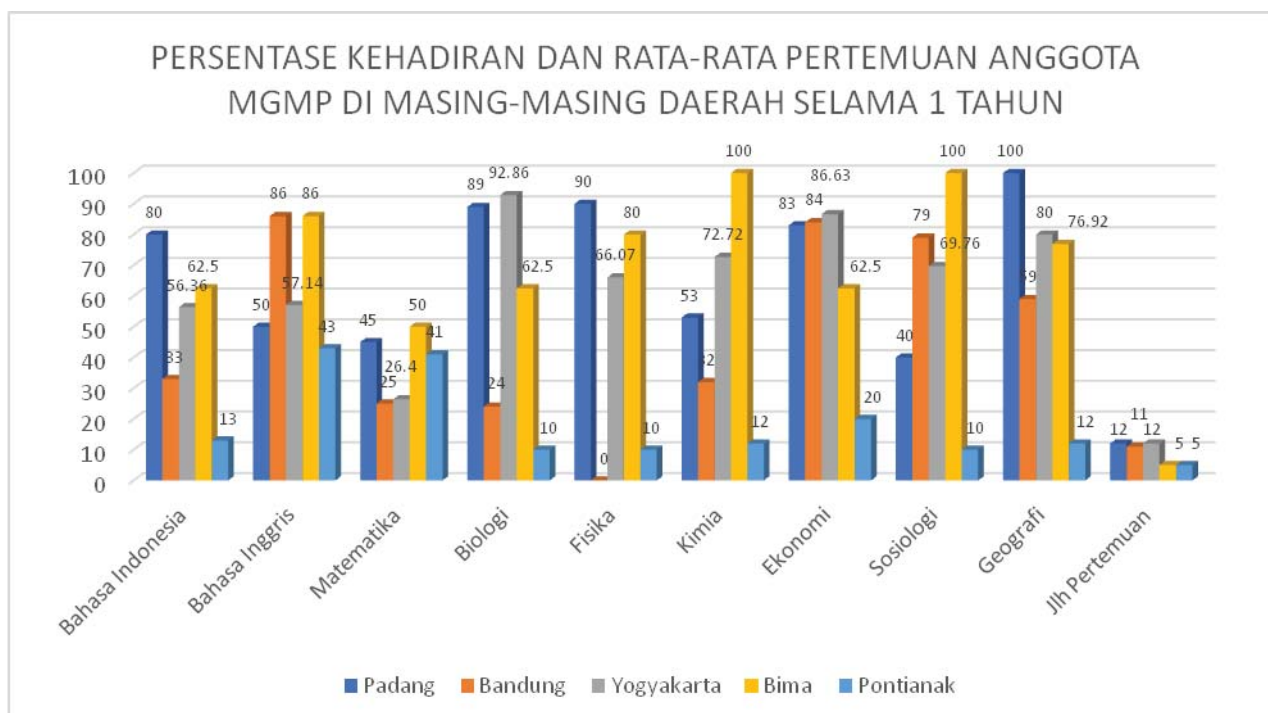
Dari hasil FGD dan data sekunder tersebut terindikasi bahwa pengelolaan MGMP, khususnya dalam menjangking kerja sama dengan pihak di luar MGMP, seperti perguruan tinggi, mampu meningkatkan kompetensi guru sehingga guru-guru mampu mengajar dengan baik. Selain itu, motivasi dan komitmen guru sebagai anggota MGMP ikut menyumbang keberhasilan MGMP dalam membina guru. Indikasi lain adalah bantuan biaya dari GTK untuk MGMP tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan guru MGMP yang dibantu, seperti di Bima, baik nilai UN siswa maupun nilai UKG guru, masih tetap rendah. Sebaliknya, nilai UN siswa dan UKG guru di Kota Padang Panjang yang tidak diberi bantuan oleh GTK nilainya cukup baik.

2. Hasil FGD dan Wawancara dengan Narasumber MGMP di Daerah Sampel

a. Jumlah Sekolah, Jumlah Anggota MGMP, dan Keaktifan Anggota

Berikut diuraikan secara singkat mengenai jumlah sekolah, jumlah anggota MGMP, dan keaktifan anggota di setiap daerah sampel penelitian.

Grafik 4. Rata-rata persentase kehadiran guru atau anggota MGMP SMA selama satu tahun



Persentase kehadiran dan rata-rata pertemuan anggota MGMP di setiap daerah selama satu tahun

No.	Mata Pelajaran	Padang	Bandung	Yogyakarta	Bima	Pontianak
1.	Bahasa Indonesia	80	33	56,36	62,5	13
2.	Bahasa Inggris	50	86	57,14	86	43
3.	Matematika	45	25	26,4	50	41
4.	Biologi	89	24	92,86	62,5	10
5.	Fisika	90	6.4	66,07	80	10
6.	Kimia	53	32	72,72	100	12
7.	Ekonomi	83	84	86,63	62,5	20
8.	Sosiologi	40	79	69,76	100	10
9.	Geografi	100	59	80	76,92	12
	Rata-rata persentase kehadiran anggota MGMP	70	52,75	67,5489	75,6022	19
	Rata-rata jumlah pertemuan MGMP selama satu tahun	12	11	12	5	5

Data rata-rata persentase keaktifan anggota MGMP dalam menghadiri pelatihan atau pertemuan secara berurutan menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota MGMP di Kota Bima paling tinggi, yaitu 75,60 %, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 70 %, Kota Yogyakarta sebesar 67,54 %, Kota Bandung sebesar 52,75 %, dan Kota Pontianak sebesar 19 %. Berdasarkan persentase kehadiran anggota pada pertemuan MGMP atau pada pelatihan yang dilaksanakan maka nampak seharusnya hasil UKG dan UN siswa di Kota Bima lebih tinggi atau berbanding lurus dengan keaktifan guru dalam mengikuti kegiatan MGMP. Namun, hal ini tidak terjadi karena kenyataan bahwa hasil UKG dan UN siswa pada daerah-daerah tersebut berbanding terbalik. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah program yang dibuat dan yang diikuti oleh anggota MGMP berbeda dengan frekuensi kehadiran anggota MGMP pada pertemuan.

b. Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Biaya, dan Kendala dalam MGMP

Pengelolaan MGMP di daerah bervariasi bergantung pada aktivitas pengurus MGMP. Keaktifan dan kreativitas pengurus MGMP merefleksikan secara keseluruhan kegiatan MGMP, sehingga tecermin bahwa MGMP yang pengurusnya aktif dan kreatif mampu memajukan MGMP. Sebaliknya, pengurus yang kurang aktif dan kurang kreatif sulit memajukan MGMP yang dibinanya. Tabel berikut menjelaskan perbandingan MGMP yang sudah maju dan yang belum maju.

MGMP yang Sudah Maju/Baik	MGMP yang Kurang Baik
1. Susunan pengurus lengkap dan kreatif (ketua, sekretaris, dan bendahara, bidang perencanaan, bidang pengembangan organisasi, humas dan kerja sama) yang mempunyai dedikasi tinggi dan kemampuan yang baik 2. Kerja sama dengan lembaga lain di luar MGMP, seperti perguruan tinggi (PT/LPTK), dunia usaha (DUDI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), dan PGRI, terutama dalam menyediakan instruktur dan narasumber berbagai kegiatan pelatihan guru	1. Pengurus hanya (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan kurang aktif 2. Tidak ada kerja sama dengan Lembaga lain di luar MGMP seperti perguruan tinggi (PT/LPTK), dunia usaha (DUDI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), dan PGRI terutama dalam menyediakan instruktur berbagai kegiatan pelatihan guru dan peningkatan profesionalisme guru dan hanya memanfaatkan narasumber dari dalam

MGMP yang Sudah Maju/Baik	MGMP yang Kurang Baik
dan peningkatan profesionalisme guru sangat baik 3. Guru atau anggota MGMP mempunyai motivasi tinggi untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan MGMP 4. Program yang dibuat bersama sesuai dengan kebutuhan guru 5. Biaya operasional MGMP lebih banyak ditanggung sendiri oleh anggota (biaya mandiri) dan bantuan kerja sama dengan PT 6. Pengurus MGMP kurang sangat kreatif dan dalam menyukseskan program yang dibuat	MGMP sendiri dan Guru atau anggota MGMP kurang berminat untuk ikut kegiatan MGMP karena mereka merasa kurang tertarik dengan narasumber internal karena sudah tau kapasitasnya 3. Guru atau anggota MGMP tidak punya motivasi tinggi untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan MGMP 4. Program dibuat bersama, tetapi tidak bisa dilaksanakan semua 5. Hanya mengandalkan biaya dari GTK, dan tidak ada sumbangan dari anggota 6. Sebagian besar pengurus MGMP kurang kreatif dan hanya menunggu kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan atau dari Pusat

Contoh Program Tahunan

Program Tahunan untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran	
Pelatihan	Berbagi Pendapat/Pengalaman
1. Penyusunan soal USBN 2. Pengembangan K-13 3. Pembelajaran abad ke-21 dan berbasis IT dan pembelajaran HOTS, <i>inquiry based learning</i> (IBL), pendalaman materi olimpiade 4. Karya tulis ilmiah (KTI) 5. Pelatihan <i>e-modul</i>, (membuat bahan ajar berbasis android) 6. Pelatihan penelitian tindakan kelas (PTK) 7. Strategi pembelajaran Matematika serta kaitannya dengan UN, HOTS, dan STEM, serta melakukan Seminar Internasional Matematika 8. Pelatihan pembuatan media pembelajaran digital 9. Penyusunan kisi-kisi dan soal USBN serta pendalaman materi statistika dan olimpiade, 10. Pengembangan model pembelajaran berdasarkan perbedaan individual dan pengembangan pendidikan karakter, 11. Pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan videos	1. Bedah SKL, soal UN, dan IT 2. Kesulitan dalam PBM mapel 3. Pembuatan media <i>reading</i> yang menarik peningkatan kompetensi guru melalui PTK 4. Bahan ajar <i>reading comprehension</i> 5. Metode pembelajaran 6. Pembahasan kisi-kisi UN 7. Pembuatan e-modul dan jurnal ilmiah 8. Pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) 9. Lokakarya penyusunan soal USBN penulisan soal HOTS 10. Diklat STEAM 11. Workshop pembelajaran Abad 21 12. <i>Peer teaching</i> 13. Metode pembelajaran (IBL, STEAM) 14. RPP, bahan ajar, TOEFL, debat 15. <i>Teaching sharing</i> 16. Program pembuatan perangkat pembelajaran bersama 17. Menyusun RPP, bahan ajar, TOEFL, debat 18. Pendalaman materi/konten Kimia bekerja sama dengan dosen PT (UPI, ITB, UIN, UNJ) 19. <i>Workshop</i> penulisan kreatif, 20. Penyusunan RPP dengan berbagai variasi

Program Tahunan untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran	
Pelatihan	Berbagi Pendapat/Pengalaman
12. Telaah soal UN 2019, bedah SKL 2020, penyusunan dan perakitan soal uji coba UN, serta penyusunan soal USBN 2020: 13. Pembuatan bank media pembelajaran ekonomi	21. Pengembangan silabus dan RPP 22. Penyusunan media pembelajaran,

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan temuan penelitian mengenai hasil analisis data sekunder tentang jumlah guru SMA secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sampel penelitian, hasil UKG guru, hasil UN siswa, dan hasil verifikasi data mengenai jumlah sekolah, jumlah anggota MGMP, dan keaktifan anggota, pengelolaan MGMP serta program MGMP, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengelolaan MGMP di daerah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kompetensi dan keaktifan pengurus dalam merancang dan melaksanakan kegiatan MGMP serta koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Sebagian besar MGMP, terutama MGMP yang belum maju, hanya dikelola oleh pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara), kepengurusan dalam bidang lain tidak berfungsi atau kurang memberikan kontribusi atau tidak bekerja. Sebaliknya, MGMP yang sudah maju dikelola oleh pengurus yang lengkap: ketua, sekretaris, bendahara, bidang perencanaan, bidang pengembangan, dan lainnya bergantung pada kebutuhan MGMP yang bersangkutan.
- Berdasarkan hasil analisis data sekunder dari hasil UKG guru dan UN siswa pada MGMP di daerah yang kondisi MGMP-nya maju, cenderung tinggi. Hal ini berarti bahwa pengelolaan MGMP di daerah tersebut cukup baik. Sebaliknya, hasil UKG dan nilai UN siswa pada daerah yang MGMP-nya kurang baik cenderung rendah, yang berarti bahwa pengelolaan MGMP-nya kurang baik.
- Pengelolaan MGMP di daerah, di samping dipengaruhi oleh kompetensi pengurus MGMP, juga didukung oleh koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Ketersediaan SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan MGMP, seperti ketersediaan narasumber di daerah dari berbagai institusi, misalnya perguruan tinggi dan dunia usaha.
- Daerah yang mempunyai perguruan tinggi yang baik, seperti Kota Yogyakarta dan Kota Bandung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan kegiatan MGMP, terutama narasumber dalam berbagai kegiatan pelatihan guru dan peningkatan profesionalisme guru. Sebagian MGMP mampu memanfaatkan ketersediaan SDM penunjang melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Model kerja sama tersebut berupa penyediaan narasumber, bahkan dana dari alokasi kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi.
- Terdapat MGMP yang melaksanakan kegiatan mandiri tanpa ada bantuan dari GTK, tetapi lebih berhasil meningkatkan hasil UN siswa. Sebaliknya, ada MGMP yang mendapat bantuan dari GTK, tetapi hasil UN siswanya lebih rendah.
- Hal yang menarik adalah adanya bantuan Ditjen GTK untuk peningkatan kapasitas MGMP. Berdasarkan temuan penelitian, bantuan berupa finansial kepada MGMP tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan tata kelola MGMP dan tidak berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan guru sebagai anggota MGMP. Hal ini terlihat dari daerah yang mendapat bantuan MGMP, hasil UN siswa dan UKG guru di daerah seperti Kota Bima rendah secara nasional dan provinsi. Sebaliknya, MGMP di daerah yang tidak mendapat bantuan dana dari GTK nilai UN siswa dan UKG gurunya tinggi, seperti di Kota Padang Panjang.
- Ada beberapa aspek yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan MGMP, antara lain MGMP masih kurang kerja sama antara MGMP dan perguruan tinggi, khususnya dalam penyediaan

narasumber dan/atau kegiatan lain, padahal perguruan tinggi mempunyai kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu MGMP. Selain itu, sebagian besar pengurus MGMP kurang kreatif dan hanya menunggu kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan atau Pusat.

- h. Beberapa kendala yang dihadapi oleh MGMP dalam pengelolaannya adalah: a) kegiatan MGMP sering bentrok dengan jadwal mengajar guru; b) guru kurang berminat mengikuti kegiatan MGMP karena merasa kurang tertarik pada narasumber internal; c) MGMP belum secara intensif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga lain; d) guru kurang berminat mengikuti kegiatan MGMP karena sudah mengetahui kapasitas narasumber.
- i. Selain pengelolaan MGMP, program MGMP dalam mendukung peningkatan kemampuan guru dan mutu pembelajaran di SMA juga menunjukkan adanya kaitan antara program yang mendukung peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran serta jumlah program dan keikutsertaan anggota MGMP serta dukungan narasumber dalam memberikan pembelajaran pada pelatihan dan pertemuan MGMP. Kaitan antara jumlah program dan aktivitas MGMP memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kemampuan guru. Hal ini dapat dilihat pada hasil UN siswa dan UKG guru di daerah yang MGMP-nya maju dan di daerah yang MGMP-nya kurang maju.
- j. Peningkatan kemampuan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA menunjukan adanya keterkaitan antara program dan aktivitas kegiatan MGMP, seperti pelatihan, *workshop* tentang kurikulum, UN, metode pembelajaran HOTS, penyusunan soal USBN, materi pembelajaran (HOTS dan pembelajaran abad ke-21), diklat matematika, pendalaman materi statistika dan Olimpiade Matematika SMA, pelatihan guru MGMP MIPA, sarasehan ilmiah permasalahan, pelatihan pembuatan media pembelajaran digital, penyusunan kisi-kisi, penyusunan soal HOTS, pengembangan soal USBN, penguatan karakter guru, pengembangan materi pembelajaran berbasis IT, analisis KI/KD K-13, telaah soal UN 2019, bedah SKL 2020, penyusunan dan perakitan soal try out UN, dan penyusunan soal USBN 2020. Semua program tersebut adalah program yang dibuat oleh guru sebagai anggota MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu melaksanakan pembelajaran di kelasnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan mengenai MGMP, baik di Pusat maupun di daerah.

a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud

- 1) Ditjen GTK, Dit SMA Dikdasmen, dan dinas pendidikan secara formal perlu melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penguatan kompetensi profesional dan pedagogik dengan memanfaatkan program Pengabdian Masyarakat PT dan lembaga lain, seperti PT/LPTK Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), dan PGRI.
- 2) GTK dan dinas pendidikan perlu mengevaluasi keberadaan struktur organisasi MGMP secara nasional, termasuk kelengkapan personelnnya.
- 3) GTK perlu bekerja sama dengan Pustekom Dikbud untuk menyediakan bahan ajar dalam bentuk perangkat lunak (*software*), seperti video pembelajaran.
- 4) GTK dan dinas pendidikan provinsi membuat standar minimal pengelolaan MGMP sehingga setiap MGMP di setiap daerah mempunyai aturan baku dalam pengelolaan MGMP, termasuk pedoman penyusunan program MGMP.
- 5) Ditjen GTK hendaknya membuat zonasi MGMP, baik di kota maupun di kabupaten yang berdekatan, sebagai satu gugusan MGMP, sehingga guru dapat saling tukar pengalaman lintas wilayah.
- 6) Zonasi MGMP hendaknya dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus menentukan beberapa daerah uji coba/contoh zonasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara:

- a) menentukan MGMP yang sudah maju;
 - b) menentukan MGMP yang pengelolaannya masih lemah;
 - c) menentukan MGMP yang pernah mendapat bantuan tapi hasil UN dan UKG-nya rendah;
 - d) menentukan MGMP yang UKG dan hasil UN siswanya tinggi walaupun tidak mendapat bantuan dari GTK;
 - e) memberikan rambu-rambu pemanfaatan bantuan biaya untuk MGMP sehingga jelas dan tepat sasaran penggunaannya.
- 7) Bantuan keuangan yang disediakan oleh GTK hendaknya berdasarkan keaktifan MGMP dalam usaha peningkatan pembelajaran di kelas. Bantuan itu tidak secara merata, tetapi harus dilihat kasus per kasus, sehingga tidak dijadikan sebagai proyek, lalu biaya kegiatan MGMP bergantung pada bantuan dari Pusat.
- 8) GTK disarankan untuk membuat kebijakan mengenai induksi pengelolaan MGMP yang sudah maju agar bermitra dengan MGMP yang belum maju. Kerja sama melalui bantuan bagi anggota MGMP yang sudah maju hendaknya bisa menginduksi program kegiatan MGMP yang belum maju.

b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Bantuan Direktorat SMA, Ditdasmen, dalam mendukung program MGMP untuk peningkatan mutu guru hendaknya berupa perangkat lunak pembelajaran. Penentuan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan harus dipilih oleh/dan mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan atas dasar kelengkapan dan ketersediaan fasilitas IT serta keunggulan pembelajaran pada bidang studi MGMP tersebut.

c. Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Dinas pendidikan provinsi dan daerah terlibat aktif sebagai pembina MGMP. Oleh karena itu, perlu disediakan tempat/ruang khusus di kantor dinas pendidikan sebagai *basecamp* anggota MGMP (provinsi/kabupaten/kota). Tujuannya adalah agar program MGMP dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, anggota MGMP yang sudah mendapatkan pengetahuan baru, baik melalui pelatihan maupun kunjungan (studi banding), diwajibkan menyosialisasikannya kepada guru lain yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Anggota MGMP yang tidak bersedia membantu guru/anggota lain akan diberi sanksi oleh dinas pendidikan.
- 2) Dinas pendidikan perlu memberi sanksi kepada MGMP yang anggotanya tidak aktif dalam kegiatan MGMP, yakni sanksi administrasi, baik oleh kepala sekolah maupun dinas pendidikan. Di samping itu, hukuman berupa peringatan juga diberikan kepada MKKS dan kepala sekolah sebagai berikut:
 - a) Penundaan pembayaran sertifikasi dan kenaikan pangkat atau yang bersangkutan dipindahkan ke sekolah lain di daerah yang terpencil.
 - b) Kepala sekolah yang tidak mengizinkan gurunya untuk mengikuti kegiatan MGMP tidak berhak menerbitkan nilai PKG dan SKTP.
 - c) Guru, baik negeri maupun swasta, yang tidak aktif mengikuti kegiatan MGMP tidak diterbitkan SKTP-nya (surat keputusan tunjangan fungsional).
 - d) Guru yang persentase kehadirannya dalam kegiatan MGMP kurang dari 50% dikeluarkan dari SIM PKB (sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian dan berkelanjutan).
 - e) MGMP hendaknya memiliki kebijakan nasional melalui pemberdayaan peran pengurus untuk mengaktifkan anggotanya dengan cara mencatat absensi/ kehadirannya dalam SIM PKB.
 - f) Pengurus MGMP yang aktif diberi kesempatan menjadi calon kepala sekolah sebagai peningkatan kariernya.
 - g) Pelatihan untuk guru dilaksanakan oleh GTK di tempat MGMP yang dilatih, sedangkan pelatihan dalam setiap program MGMP dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.

d. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kepala Sekolah

- 1) MKKS dan kepala sekolah ikut aktif membantu MGMP dengan mengizinkan guru mengikuti setiap kegiatan MGMP.
- 2) Kepala sekolah dan MGMP mengatur jadwal mengajar guru agar tidak bentrok dengan kegiatan MGMP.
- 3) Khususnya sekolah swasta agar memberikan izin kepada gurunya mengikuti kegiatan MGMP.

e. Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Pengawas dituntut melakukan pembinaan langsung dan melekat terkait dengan profesionalisme guru, PPG dalam jabatan dan sertifikasi guru, baik melalui MGMP maupun secara langsung.
- 2) Pengawas sekolah dan dinas pendidikan perlu memonitor pelaksanaan hasil kegiatan MGMP, baik melalui pelatihan maupun diskusi di MGMP, terutama-MGMP yang belum maju.

f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kepala Sekolah

- 1) MKKS dan kepala sekolah ikut aktif dalam membantu MGMP dengan mengizinkan guru untuk terus aktif dalam setiap kegiatan MGMP. Misalnya, MGMP menentukan jadwal kegiatan bersama pada hari tertentu atau pada sore hari walaupun kegiatan tersebut masih juga dirasa berat oleh sebagian anggota.
- 2) Kepala sekolah dan MGMP mengatur jadwal mengajar guru agar tidak bentrok dengan kegiatan MGMP.
- 3) Khususnya sekolah swasta agar memberikan izin kepada guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan MGMP.

g. Musyawarah Guru Mata Pelajaran

- 1) Pengurus MGMP dipilih yang mampu dan kreatif secara akademik, terutama dalam hal bernegosiasi dengan pihak perguruan tinggi atau industri dan lembaga atau organisasi lainnya.
- 2) Perencanaan program kegiatan MGMP perlu dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas.
- 3) MGMP perlu menetapkan iuran bulanan bagi anggota dalam mendukung kegiatan MGMP.
- 4) MGMP perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi mata pelajaran atau asosiasi profesi pendidikan.
- 5) Perlu dilakukan persiapan pembelajaran berorientasi HOTS yang terintegrasi dengan pendekatan scientific dan model pembelajaran pada K-13.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Day, C. 1999. *Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning*. Falmer Press, 325 Chestnut Street, 8th Floor, Philadelphia, PA 19106.
- Hammond, L.D, Maria E.H, dan Madelyn G. 2017. *Effective Teacher Professional Development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Inovasi untuk Anak Sekolah (INOVASI). 2016 “Kajian Sistematis: Intervensi, Praktik, dan Faktor Kontekstual Terkait dengan Hasil Literasi dan Numerasi Siswa Indonesia”.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru Menempatkan Guru sebagai Unsur Kunci dalam Melaksanakan Kurikulum 2013 di Sekolah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang -Guru dan Dosen.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. 2005. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. 2015. Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud.
- 2019. *Desain p\Programa Pengembangan Keprofesian Berkenajutan Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi*. Ditjen GTK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. Peningkatan Profesionalisme Guru Jenjang Dikdasmen Kajian Optimalisasi Pengelolaan MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. 2008. Regulasi pemerintah No 74 Tahun 2008.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010." Standar Prosedur Penyelenggaraan MGMP".
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. 2005 *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan MGMP*. Direktorat Profesi Pendidik, – Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Loughran J. 2014. "Professionally Developing as a Teacher Educator. Journal of Teacher Education American Association of Colleges for Teacher Education" hlm.1--13 © 2014. DOI: 10.1177/0022487114533386 jte.sagepub.com. 28 April 2014.
- Noor, Idris H.M. Agus S. 2018. "Strengthening Teacher's Competence in Implementing 2013 Curriculum Through Empowering the Management of Junior Secondary School (Jss) Subject Teacher Working Group (STWG)". *American Journal of Educational Research*, 2018, Vol. 6, No. 6, 858-868.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin - 1990. *Basic Qualitative Research. Grounded Theory, Procedures and Techniques*. London: Sage Publications, Inc.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- World Bank. 2018. *World Development Report 2018: Learning to Relize Education's Promise*.
- Wright, T 1997. *Roles of Teachers & Learners*. Oxford University Press –



DESIGNING A PRINCIPAL PERFORMANCE MONITORING SYSTEM: A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH

Niken Rarasati, Arjuni Rahmi Barasa, Prio Sambodho

The SMERU Research Institute

A. INTRODUCTION

Way Kanan is a district in Lampung province, Indonesia. It is home to 441,922 inhabitants, 311 elementary schools, 87 junior high schools, 38 high schools, and 24 vocational high schools (BPS-Statistics of Way Kanan Regency, 2018). Over the past five years, Way Kanan has shown improvements in their learning outcomes; its exam scores are approaching the national average and it is in the top 30% performers among other districts in Lampung province (Kemdikbud, 2018). Nonetheless, Way Kanan—as well as Lampung in general—continues to face significant challenges in its learning outcomes. The 2016 Indonesian National Assessment Program (INAP) survey shows that 80.49% of fourth-grade students in Lampung province have very poor comprehension on mathematics, 47.84% are struggling in comprehending reading materials, and only 0.59% of students have a good understanding of science concept.

According to the Local Education Index or NPD (2018) prepared by the Indonesian Ministry of Education (MoEC), Way Kanan Government is committed to addressing this issue by, among others, allocating 20% of their budget for the education sector. The NPD also shows that in terms of education budget allocation outside regional transfers, Way Kanan is ranked 6th out of 15 regencies/cities in Lampung. However, the budget is not fully allocated towards programmes that directly linked to the improvement of learning quality. Instead, the District Education Office put their priorities into programmes such as green school, reciting the Quran, and providing facilities for extracurricular activities. These current practices are at best only tangentially related to the issue of poor learning outcomes. Moreover, those programmes are also not directly related to the vision of the head of the district, which is improving the quality of education by envisioning that Way Kanan will produce graduates that may compete in the labour market; “Way Kanan Competitive 2021”.

With regard to challenges in monitoring and improving quality of learning, Way Kanan represents the case of most remote districts in Indonesia. As will be elaborated in more detail, the geographical problem still poses a serious challenge to education in Way Kanan. The schools are scattered in a wide geographical area with challenging topography, poor connectivity infrastructure, and high incidence of roadside robbery. Consequently, school supervisors find conducting their regular monitoring of the schools become very challenging.

Strong political commitment towards increasing the quality of the District’s graduates, which is shown by substantial budget allocation towards the education sector, can be perceived as an opportunity to make policy intervention that is more focus on improving the quality of learning. Hence, The SMERU Research Institute (SMERU) is interested in conducting research to support the improvement of the District’s achievements in education as well as learning outcomes. The initial step of this three-year research is performing a diagnostic study to map the problems and potentials related to the quality of learning in

Way Kanan. The SMERU research team¹ have conducted the study from 30 July to 8 August 2018. The result of this diagnostic study will be used as a basis for designing policy intervention to be piloted from 2019 to 2020.

B. STAGES OF DIAGNOSTIC AND PARTICIPATORY DESIGN PROCESS

This diagnostic study adopted a problem identification approach called Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA).² The process of extracting problems was carried out in the following ways:

1. Identification of the main obstacles to improving the quality of learning

The FGD was held at the office of Way Kanan District Government on August 1, 2018, for approximately two hours. A number of Way Kanan's stakeholders who attended the discussion were Regional Secretary (the top district administrator), Head of Bappeda (regional development planning board), Head of Education and Culture Office, Secretary of Health Office, Head of PGRI (Indonesian Teachers Association) in Way Kanan who is also the Head of Teacher and Education Staff, Head of Basic Education, Head of Community Welfare Subdivision, and Head of Environmental Management and Capacity Building Section of the Environment Office. Throughout the discussion, participants explored the problems that emerge in the sphere of education, particularly ones that are related to the quality of learning. At the end of the FGD, participants agreed to choose one obstacle that will be further examined by the researchers.

2. Obstacles deconstruction through the identification of its root causes

Purpose: To identify the root causes of the main obstacles to improving the quality of learning in Way Kanan

The researchers interviewed a number of Way Kanan's stakeholders in the education sector to explore the root causes of the main obstacles agreed upon during FGD. Data drawn from the interviews—conducted on 2–5 August 2018—were then mapped using the 5 Whys³ method.

3. Identification of potential area for change

Purpose: To address the main obstacles to improving the quality of learning in Way Kanan

The phase of identifying and mapping the root causes generates a number of potential areas to be addressed. To explore the problems in those areas, while at the same time looking at the potential for change, the researchers carried out two group interviews with key informants on 5–7 August 2018.

C. FINDING FROM DIAGNOSTIC

Identification of the main obstacles to improving the quality of learning

Questions asked to FGD participants:

- a) What are the factors related to the teaching-and-learning process, teachers, and school management that have been hampering the improvement of student learning outcomes?
- b) Which obstacles are the most important, impactful, or urgent to be resolved?

¹ Hereinafter referred to as researchers.

² PDIA methodology is an approach to create solution that focus on solving the root of problem developed Andrews, Pritchett and Woolcock (2015).

³ *whys* is an analytical method used to deconstruct a problem into components that can be solved. In practice, this process is carried out by going deeper into the issue by asking the question “why” (Andrews, Pritchett and Woolcock, 2015).

- c) Which obstacles, if overcome, can solve other problems or at least have positive impacts on others?
- d) What are the causes of these obstacles?
- e) What potentials does Way Kanan District have that can solve these obstacles, or in general have the potential to improve learning outcomes?

The FGD revealed these matters to be considered as obstacles:

In teaching and learning activities

- a) Parental involvement is considered as not ideal. Some parents are reactive and interfere too much in the problems that occurred in schools, threatening and undermining the principal. On the other hand, there are also parents who never interact with the school.
- b) The teaching technique used by the teacher is monotonous and boring.
- c) The number of learning instruments (such as props and additional references) as well as learning facilities (such as laboratories and computer) is very few.

With the teacher

- a) Teachers have low motivation to do self-development. FGD participants were of the opinion that teachers are less initiative to find their own learning resources. New training material or changing curriculum is even considered a burden by teachers rather than as a learning opportunity.
- b) Not all teachers have the appropriate educational qualifications.
- c) Teachers with appropriate qualifications do not necessarily understand the subject matter taught or the teaching techniques (pedagogy).

With the school management

- a) The school principal is considered as incapable to build a partnership with parties outside of school, such as parents or companies that could help with school income.
- b) Teacher deployment between schools, in terms of quantity and quality, is uneven.
- c) Supervision by supervisors and school principals is regarded as not optimal.
- d) The school principal recruitment process is not entirely competency-based or transparent.

At the end of FGD, participants agreed to choose problems related to school principal recruitment process, which is less transparent and not entirely competency-based, as the main obstacle to improving the quality of learning outcomes in Way Kanan. The causes of that particular obstacle are (i) nepotism in the selection process of a school principal and (ii) the number of qualified school principal candidates is lacking. On the other hand, Way Kanan's vision to have competitive human resources, which is supported by 20% of the Regional Budget (APBD) allocation for education, is considered as the potential of this district.

D. OBSTACLES DECONSTRUCTION THROUGH THE IDENTIFICATION OF ITS ROOT CAUSES

After going deeper into the problem, which was conducted in in-depth interviews, the researchers found a number of root causes of the main obstacles to improving the quality of learning in Way Kanan:

1. There is neither an incentive nor disincentive system related to learning outcomes for the school principal.

According to respondents consisting of teachers and school principals, rewards granted to principals with excellent performance and to those of the opposites are identical; let alone rewards that are specifically related to the principal's achievement in promoting the improvement of the quality of learning in the classroom. There are no work targets that specifically focus on learning outcomes. The performance of school principals has also not been systematically monitored or assessed in

relation to their role in guiding teachers to improve the quality of their teaching. The respondents we met did not seem to prioritize programmes that were directly related to improving the quality of teaching-and-learning process in the classroom. Moreover, in the previous district administration, school principals could be transferred to a different school at any time. This caused principals to emphasize more on achievements that were visible and could be realized quickly, such as infrastructure improvements and school's physical development.

2. There is very little information about school performance related to learning outcomes available to parents and communities.

Supervision of the learning process in schools has been carried out by school principals and supervisors on teacher performance. Parents through school committee have not been seen to perform their function in supervising learning process at school. After digging more information from several informants, the researchers found that that happened not because parents are less attentive to the school. In fact, parents have given demands related to the problem of child fights, children who are failing a grade, the use of school operational assistance (BOS) funds, and other problems outside of learning. However, such involvement was considered as not supportive and unproductive because many parents used physical threats, violence, or lawsuits. School principals and teachers often felt burdened with such pressure and demands.

This situation shows that the role of the school committee is not optimal, especially in the discussion of learning issues. There are two causal factors. First, school committees are often only active at the beginning of the school year when the members discuss and oversee the use of BOS funds. Second, not all school committee members have information about school performance, especially in the aspects of learning outcomes.

3. The process of recruiting school principals is neither based on an objective assessment nor transparent.

There is a perception that the current school principal recruitment system is not entirely transparent nor based on competence. This resulted in some teachers having a poor impression on the school principal profession. Many potential teachers are not motivated to become a school principal because they do not want to have this negative impression on them, or feel that they do not have the necessary contacts in order to become a school principal.

In addition, the official recruitment in place has also not used a measurable and comprehensive system. To date, the ranking of prospective school principals is carried out by officials from the education and culture agency. The names of all candidates who in terms of rank/group have fulfilled the requirements and have passed the Training of Prospective School Principals (CAKEP) then collected in a list. Next, the education and culture agency would request deliberation from supervisors and several key people to assess how active the names were during the training and in producing scientific works.

4. School supervisor still focuses on administrative supervision.

The interviewees complained that many school supervisors did not supervise the teaching and learning process. The results of canvassing the problem found several major issues related to supervisors. First, many supervisors are old, and thus physically unable to visit schools in geographically challenging locations. In addition, there are also complaints that elderly school supervisors are not motivated to do self-development, especially in terms of curriculum and teaching techniques.

Second, based on the canvassing process with the interviewees, there are indications that most supervisors do not have a sufficient understanding of their duties and supervisory functions. One of the teachers told of a supervisor who only came and sat in the office while asking for the required documents, without supervising the classroom or supervising the teaching-and-learning activities. On the other hand, there is a perception that the supervisor position is less appealing than the position of a school principal. This makes the quality of prospective supervisors are no better than prospective principals, making it difficult to find quality supervisors.

E. PARTICIPATORY DESIGN PROCESS

The participatory process involved principals, teachers, and district officials. It was started by identifying whether there is any good system or culture that can potentially solve the identified problem and has already been undertaken by several schools. We found one junior high school with an apposite deviant principal who practices strong leadership. He understands what good learning process is and how to support teachers to conduct a good learning process.

We then conduct a design workshop process inviting the positive deviant principal along with other elementary school principals to identify any intervention that can help as well as monitor the performance of principal in support teachers to conduct better learning process. The discussion results in a principal performance monitoring mechanism that will be tied to incentive or disincentive.

We asked the Local Education Agency's staffs, school principals, and teachers to list aspects that they think foundational for learning. Those aspects were then categorised into result and process components that will be reported in the form of a report card. The card will be distributed by the Local Education Agency to the schools every six months. The study will evaluate whether increased principals accountability, by giving them report based on objective score, will affect the school performance in improving student learning outcome.

1. Component of Result

Over the past three decades, studies have shown that the implementation of school management is still far from the fundamental purpose of school, that is to improve student knowledge and skills through learning (Fullan and Watson, 1999). To make that purpose salient for principals and teachers, we will use a standardised learning outcome to measure school performance. This outcome will be tied to a monetary incentive for principals.

At every end of the semester, we will test randomly selected students in each grade using a nationally standardised student learning assessment tool. This test will not only assess the students' knowledge of literacy and numeracy, but also their ability to apply relevant knowledge, and use it to think critically and perform reasoning. The test materials range from numbers and letters recognition for early grade students to assessment of critical thinking and reasoning ability for later grade students.

The schools will then be grouped with other schools with similar test scores. Schools within one group will compete with each other to reach the highest score increase in the next semester. Principals of the most improved schools in each group will receive the monetary incentive.

2. Component of Process

There are three components that principals in Way Kanan believe are essential to conduct good learning, but have not occurred in most schools:

a. Teacher attendance

Some schools in Way Kanan, especially those located in remote areas, are still dealing with the problem of teacher absenteeism. The local education agency has installed fingerprint devices in almost all schools. The machine records teacher attendance offline. To report the data, the principals must download the record and send them manually to the local education agency. This offline mechanism gives a chance for principals to manipulate the data before they send it to the local education agency. To overcome this issue, we will use a mobile application to record photos of teachers at the school every start and end of a school day. The photo will be equipped with a location tag, and the app will send the photo directly to the server without any chance to edit the data. There will be only a few local education agency staff who will have access to the data. The minimum target of attendance for each teacher is 85% of their scheduled teaching days. This method of recording teacher attendance has led to an increase in teacher attendance and subsequently learning outcomes in KIAT Guru, a teacher pay-performance scheme for remote schools that RISE Programme in Indonesia is also involved in evaluating.

b. Student and teacher book ownership

Even though the budget of procuring books for each student and teacher has been allocated in the school operational grant, many teachers still complain that they do not have access to books with the newest curriculum. Managing operational grant for purchasing school facilities, including books, are under principals' responsibility. Hence, one of the achievable targets will be to make every student and teacher has books that suitable for the current curriculum. At the beginning of each semester, principals should submit their book procurement documents to the mobile app. To verify the submitted data, there will be an unannounced spot check every semester.

c. Reflection session between teachers and principals on learning obstacles

To make the monitoring process focuses more on learning, there will be a set of questions to prompt discussion between principals and teachers. The discussion can be held individually or can be a part of the regular principal-teacher meeting. The question will focus on (1) the problems teachers encounter; (2) the ideas that are most probable to solve the problem; and (3) the type of support teachers need from the principals. This discussion must be conducted during the first two months of the semester so that the ideas can be implemented during the rest of the semester. Notes from the discussion will be submitted to the mobile app. At the end of the semester, the mobile app will send a reminder of the planned ideas and asks (1) which ideas the teachers are able or incapable to implement; (2) the challenges that the teachers encounter during the implementation of the idea; and (3) what could have been done better.

Results of monitoring from the mobile app as well as the student test scores will be printed in a poster as a "school report card" and be placed in a strategic spot in the school. Principals who failed to perform at least one of three components of the process would be demoted by the local education agency to be regular teachers.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 1	Panel No: 1
Ruang	: 2	
Waktu	: 07.45 – 10.00 WIB	
Judul Penelitian :	1. Kajian Model Magang Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMK 2. Kajian Guru SMK dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 3. Kajian Peran MGMP dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA 4. Studi Partisipatif Perancangan Sistem Penilaian Kepala Sekolah di Way Kanan	
Penyaji	:	1. Simon Sili Sabon 2. Teguh Supriyadi, S.Si., M.Si. 3. Dr. Idris H.M. Noor, M.Ed. 4. Niken Rarasati.
Pembahas	: Prof. Karwono	
Moderator	: Sugih Biantoro	
Notulis	: Erni Hariyanti	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Simon Sili Sabon Mutu lulusan SMK rendah. Banyak lulusan SMK tidak terserap dunia kerja. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan rendahnya mutu guru. Sebagaimana diketahui umum, SMK dikatakan berhasil apabila lulusannya terserap dunia kerja. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa persentase lulusan SMK yang menganggur lebih besar daripada lulusan SMA atau lulusan pendidikan lainnya, padahal SMK menyiapkan lulusan yang siap masuk dunia kerja, dan keterserapan lulusan merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan SMK. Tujuan a. Mengidentifikasi model-model magang guru produktif yang ada selama ini yang mampu menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja b. Mengembangkan model magang guru produktif yang dapat meningkatkan kemampuan guru menghasilkan lulusan yang bermutu. Tinjauan Pustaka Mutu Pembelajaran Mutu pembelajaran ditentukan oleh tiga variabel, yaitu budaya atau kebiasaan sekolah, proses belajar mengajar dan realitas (kenyataan) sekolah sebagaimana dikutip Triastuti R. (2017). Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan baik oleh guru ataupun peserta didik di sekolah dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Berhubungan dengan pembelajaran

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang berkualitas Triastuti menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran mengandung lima komponen, yaitu pembelajaran, kesesuaian, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Mutu pembelajaran berpusat pada kemampuan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Guru dituntut mempunyai kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan pada evaluasi pembelajaran. Magang Menurut Wardani P.Y.A. (2013) Magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Program pembelajaran magang biasa disebut dengan istilah <i>apprenticeship, internship, learning by doing, on-the-job-training/off-the-job-training</i> dan <i>built in learning</i>, dimana program ini dirancang untuk level keahlian yang lebih tinggi. Lebih lanjut Utami B. (2015) menyampaikan bahwa untuk menyiapkan guru profesional, salah satunya dilakukan dengan prakondisi dalam bentuk kegiatan magang/<i>internship</i> sebagai bagian yang penting dari penyiapan guru berkewenangan ganda yang profesional. Relevansi SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan menengah di Indonesia, yang penyelenggaraannya pendidikannya dirancang dengan salah satu tujuannya mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja (Mulyati, 2012). Dewasa ini masih banyak lulusan SMK mengalami kendala dalam memasuki lapangan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas prestasi belajar lulusan SMK. Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah <i>Research Based Development</i> atau pengembangan model magang guru untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan terhadap model magang guru yang sekarang ada. Untuk pengembangan model magang guru ini dipilih <i>Model Reflective Recursive Design and Development</i> (R2D2) salah satu dari tujuh macam cara pengembangan model yang disampaikan Syamsul (2017). Dalam model R2D2, fokus pengembangan terdiri atas penetapan (<i>define</i>), penentuan desain dan pengembangan (<i>design and develop</i>), dan penyebarluasan (<i>dissemination</i>). Populasi kajian ini adalah seluruh guru SMK yang mengajar Mapel Produktif. Kajian menggunakan data sekunder tentang guru-guru yang melakukan magang industri. Dua teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu FGD dan <i>interview</i>. Data yang dikumpulkan adalah: (i) Model magang seperti apa yang telah diikuti oleh guru, (ii) Apa saja kelebihan dan kelemahan dari model magang industri tersebut, dan (iii) Metode apa yang dapat digunakan guru agar dapat mentransfer lptek dan pengalaman yang dimilikinya kepada siswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Kesimpulan Kajian menyimpulkan bahwa rendahnya mutu pembelajaran di SMK saat ini terjadi antara lain karena kurangnya pengalaman industri guru-guru yang mengajar mapel produktif. Kajian menemukan bahwa terdapat tiga cara memberikan pengalaman industri kepada guru produktif yaitu: Mengundang tenaga ahli (<i>Visiting expert</i> program) baik dari dalam maupun luar negeri Guru magang langsung di industri (<i>internship</i>) di dalam negeri Guru magang langsung di industri (<i>internship</i>) di luar negeri Rekomendasi Kajian merekomendasikan cara untuk meningkatkan kualitas guru produktif sebagai berikut. Visiting expert program dan Model magang guru mandiri oleh sekolah Model magang guru produktif oleh lembaga 2. Teguh Supriyadi, S.Si., M.Si. Ketersediaan guru di SMK harus mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Ketersediaan guru SMK yang cukup merupakan kunci utama bagi keberlangsungan proses pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada <i>output</i>/hasil pembelajaran (Gambar 1). Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Wiharna, 2006:64 dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan, 2017). Muhson (2004) dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Guru, baik secara kuantitas dan kualitas penting dalam membentuk kualitas peserta didik. Tujuan Secara umum kajian ini bertujuan mengetahui ketersediaan guru SMK dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun secara khusus tujuan kajian untuk: (1) mengetahui ketersediaan guru SMK, (2) mengetahui mutu pembelajaran SMK, dan (3) mengetahui keterkaitan ketersediaan guru SMK dan mutu pembelajaran. Kajian Pustaka Guru SMK Dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan: Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa guru Mapel terdiri

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		atas: (1) guru umum pengampu mata pelajaran muatan umum dan muatan adaptif, dan (2) kejuruan pengampu mata pelajaran muatan kejuruan. Ketersediaan Guru Ada kecenderungan di SMK baik negeri maupun swasta tersedia guru, namun jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya akan menjadi persoalan. Menurut Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan (2017), kebutuhan guru adalah kesenjangan antara guru yang ada sekarang dan bagaimana hal itu seharusnya atau kesenjangan antara guru yang ada sekarang dengan yang seharusnya diperlukan. Dengan demikian, guru tersedia tidak secara otomatis bahwa kebutuhan guru terpenuhi. Mutu Pembelajaran Mulyasa, 2003 <i>dalam</i> Memorata, A dan Djoko Santoso (tanpa tahun) menyatakan bahwa mutu pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri, sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar. Menurut Church, C.H. (1988) jaminan mutu seharusnya komprehensif dan menguji tiga hal, yaitu <i>input</i>, proses dan <i>output</i>. <u>Input</u> seperti faktor-faktor berkaitan dengan peserta didik (kualifikasi, pengalaman dan aspirasi, staf pengajar (pengalaman profesi, kualifikasi, pengembangan mengajar staf, dan lainnya), faktor terkait administrasi dan staf teknis, serta faktor terkait fasilitas fisik (lokakarya, laboratorium, ruang kelas dan perpustakaan. <u>Proses</u> mengajar dan belajar adalah ranah yang esensial untuk dilakukan evaluasi mandiri. Monitoring mata pelajaran dilaksanakan (budaya dan masalah sumber daya seringkali menjadi penghambat dilakukannya observasi, kesulitan dan keberhasilan peserta didik, masalah-masalah didata melalui interview dan diskusi personal mau pun kelompok. Output meliputi hasil-hasil ujian, membandingkan data nasional lulusan yang bekerja; tempat kerja lulusan; pekerja (alumni) yang sudah pengalaman satu dan lima tahun. Metode Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Kesimpulan Ketersediaan Guru SMK Di SMK negeri maupun swasta tersedia guru umum dan kejuruan, namun jika dilihat dari aspek kebutuhan gurunya, baik guru umum maupun kejuruan di SMK negeri mengalami kekurangan guru. Demikian halnya di SMK swasta juga

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		mengalami kekurangan guru. Kekurangan guru di SMK swasta baik guru umum maupun kejuruan terlihat lebih besar daripada di SMK negeri. Guru umum maupun kejuruan menurut provinsi, kabupaten/kota, bidang keahlian/program keahlian/Mapel juga kekurangan guru. Walaupun capaian kualifikasi akademik guru SMK telah mencapai target yang ditetapkan Renstra Kemendikbud 2015-2019, namun masih dijumpai guru SMK yang belum D4/S1. Mengenai sertifikat pendidik, masih dijumpai banyak guru SMK yang belum sertifikasi. Hal inilah yang menyebabkan belum tercapainya target sertifikasi guru SMK seperti dinyatakan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019. Tentang kompetensi guru SMK, nilai rata-rata UKG SMK negeri tahun 2015 adalah 60,33, sedangkan SMK swasta adalah 57,91. Mutu Pembelajaran SMK Kegiatan yang banyak dilakukan oleh lulusan baru SMK laki-laki (55,01%) dan perempuan (65,89%) pada seminggu yang lalu adalah bekerja. Lulusan baru SMK laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang terima laki-laki (Rp 1.955.665) lebih besar daripada perempuan (Rp 1.729.150). Jenis pekerjaan/jabatan yang banyak dijabat oleh lulusan baru SMK laki-laki adalah Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar, sedangkan perempuan adalah Tenaga Usaha Penjualan. Hasil capaian nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMK Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk mata uji kompetensi (teori kejuruan) dalam kategori kurang, SMK negeri adalah 46,12 dan SMK swasta adalah 42,54. Keterkaitan Ketersediaan Guru SMK dan Mutu Pembelajarannya SMK negeri dengan kondisi kekurangan guru kejuruan memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMK negeri yang tidak kekurangan guru kejuruan/tidak kelebihan guru kejuruan dan kelebihan guru kejuruan. Ini terjadi baik dengan GTT maupun tanpa GTT. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah D4/S1 memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan yang belum. SMK negeri dengan kondisi semua guru kejuruan sudah sertifikasi memiliki nilai rata-rata UN-kompetensi yang lebih rendah dibandingkan yang belum. Rekomendasi - Program redistribusi guru SMK yang berlebih di satu sekolah ke sekolah yang kekurangan guru - Program kerjasama Kemendikbud dengan DUDI dalam pemenuhan kebutuhan guru - Program pemanfaatan peserta Program Pendidikan Guru (PPG) mengajar - Program bantuan pemerintah (keringanan biaya dan waktu belajar) peningkatan D4/S1 sekaligus sertifikasi bagi guru dalam jabatan (ada sekitar 373 guru CPNS dan PNS) - Program bantuan pemerintah (keringanan biaya dan waktu belajar) sertifikasi bagi guru dalam jabatan (ada sekitar 18.504 guru CPNS dan PNS)

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		f. UKG dilakukan secara berkesinambungan g. Penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap hasil tes kompetensi h. Program penguatan peran supervisi kepala sekolah dan pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran i. Program kerjasama Kemendikbud dengan DUDI dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana SMK 3. Dr. Idris H.M. Noor, M.Ed. Peran utama MGMP adalah memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama melaksanakan tukar (<i>sharing</i>) pendapat dan pengalaman. Namun, masih banyak guru yang tidak aktif sehingga tidak berkembang dan statis walaupun sudah mengikuti kegiatan MGMP. Selain itu, akibat tidak banyaknya peran yang bisa dilakukan oleh MGMP, kemampuan guru mengajar yang ditunjukkan oleh indikator keberhasilan siswa masih rendah seperti peringkat PISA dan hasil UN. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi hasil program yang ditransfer guru hanya 50 persen (Puslitjak, 2018). Hal ini salah satu diantaranya disebabkan oleh kemampuan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 (analisis SKL-KI-KD dan perumusan IPK) masih rendah. Sementara itu, pelaksanaan PKB saat ini lebih cenderung membuat guru pintar daripada membuat murid pintar. (GTK, 2019). Data terkait menunjukkan bahwa dari tahun 2000 s.d. tahun 2015, skor siswa Indonesia berkisar antara 370-400, sementara skor rata-rata PISA 500. Oleh karena itu, Persentase soal penalaran pada UN/USBN 2019 akan ditingkatkan terutama dalam meningkatkan kemampuan siswa mengerjakan soal-soal HOTS pada UN/USBN, PISA, TIMSS yang menuntut siswa untuk berpikir, mengolah informasi, membaca teks panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, penting sekali bagi MGMP sebagai sebuah asosiasi atau perhimpunan guru mata pelajaran membuat strategi untuk memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Hal yang paling penting dilakukan untuk memperkuat kompetensi guru adalah memperkuat kinerja MGMP (<i>The important thing to do is to strengthen the teachers' competence by empowering the STWG to meet the needs of teacher while in the same time a teacher should also engage and actively participate in STWG activities decided by member of the STWG</i>) (Noor dan Santosa, 2018). Hal ini penting karena disinyalir bahwa mind set guru lebih fokus kepada pelaksanaan sumatif dibanding formatif. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Pengelolaan MGMP dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA” agar guru-guru khususnya anggota MGMP mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Metode

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method). Metode yang digunakan adalah metode studi dokumentasi (desk study) dilakukan untuk mengkaji data mengenai jenis, jumlah guru SMA secara nasional dan provinsi sampel penelitian, jumlah guru SMA daerah sampel, jumlah guru Mata Pelajaran (Mapel) secara nasional, perbandingan capaian rerata UN SMA secara nasional dan daerah sampel penelitian, UKG 2015 secara nasional, provinsi, dan daerah sampel. Verifikasi data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di 5 daerah yaitu: Padang Panjang (Sumatera Barat), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Yogyakarta (Daerah Khusus Yogyakarta), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) Kesimpulan Pengelolaan MGMP di daerah, berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kompetensi dan keaktifan pengurus dalam merancang dan melaksanakan kegiatan MGMP serta koordinasi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Sebagian besar MGMP terutama MGMP yang belum maju hanya dikelola oleh pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan bidang-bidang dalam kepengurusan tidak berfungsi atau kurang memberikan kontribusi atau tidak bekerja). Sebaliknya, MGMP yang sudah maju dikelola oleh pengurus yang lengkap (ketua, sekretaris, bendahara, bidang perencanaan, bidang pengembangan, dan lainnya tergantung kebutuhan MGMP yang bersangkutan). Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data sekunder dari hasil UKG guru dan UN siswa pada MGMP di daerah yang kondisi MGMPnya maju cenderung tinggi yang berarti pengelolaan MGMP di daerah tersebut cukup baik. Sebaliknya hasil UKG dan nilai UN siswa pada daerah yang MGMPnya kurang baik cenderung rendah yang berarti pengelolaan MGMPnya kurang baik. Ketersediaan SDM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan MGMP, seperti ketersediaan nara sumber di daerah dari berbagai institusi seperti perguruan tinggi, dan dunia usaha. Daerah yang mempunyai perguruan tinggi yang baik seperti Yogyakarta dan Bandung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan kegiatan MGMP terutama mengenai nara sumber dalam berbagai kegiatan pelatihan guru dan peningkatan profesionalisme guru. Terdapat MGMP yang melaksanakan kegiatan mandiri tanpa ada bantuan dari GTK namun lebih berhasil meningkatkan hasil UN siswa, sebaliknya ada MGMP yang mendapat bantuan dari GTK namun hasil UN siswanya lebih rendah

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Bantuan finansial kepada MGMP tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan tata kelola MGMP dan tidak berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan guru sebagai anggota MGMP. Rekomendasi - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud Ditjen GTK, Dit. SMA Dikdasmen, dan Dinas Pendidikan secara formal membuat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penguatan kompetensi profesional dan pedagogik dengan memanfaatkan program Pengabdian Masyarakat PT dan lembaga lain seperti PT/LPTK Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP), PGRI. - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen PSMA) Dit. SMA Dikdasmen penyediaan sarana dan fasilitas MGMP dan program peningkatan mutu guru dalam bentuk software pembelajaran. - Dinas Pendidikan provinsi Dinas Pendidikan provinsi dan daerah memfasilitasi tempat/ruangan khusus sebagai basecamp anggota MGMP (provinsi/kabupaten/ kota). - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kepala Sekolah Kepala sekolah dan MGMP mengatur jadwal mengajar guru agar tidak bentrok dengan kegiatan MGMP. Khususnya sekolah swasta dapat memberikan izin kepada guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan MGMP. - Pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Pengawas melakukan pembinaan langsung dan melekat terkait dengan profesionalisme guru, PPG dalam jabatan dan sertifikasi guru, baik melalui MGMP maupun langsung. - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Perencanaan program kegiatan MGMP perlu dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas. Misalnya: menganalisis SKL-KI-KD dan perumusan gradasi IPK (Proses Berpikir C1 s.d. C6) berdasarkan UN/USBN mendukung SNP Pengurus (bagian perencanaan perlu aktif dalam menentukan kegiatan yang dibutuhkan oleh anggota sehingga anggota merasa tertarik untuk ikut kegiatan MGMP dan merasa rugi kalau tidak ikut) 4. Niken Rarasati Kajian jangka panjang yang belum selesai dari tahun 2018 – 2021. Salah satu program kajian 5 tahun. System apa yang belum berjalan, system apa yang sudah berjalan Latar belakang utama yang menjadi arahan studi ini adalah grafik yang menunjukkan data bahwa ketika anak ke las 1 SD sampai kelas 12 terdapat penambahan kemampuan matematikanya hanya 11%. Jika dibandingkan data tahun 2011 dan 2014 malah ada penurunan kemampuannya

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Menyelesaikan krisis kualitas pembelajaran lewat perbaikan system pendidikan dasar dari sabang sampai merauke membutuhkan solusi yang kontekstual. Studi etnografi yang dilakukandi beberapa kabupaten kota di Indonesia menemukan bahwa kebijakan solutif dan kontekstual memerlukan 4A, yaitu Acceptane bahwa menerima pendidikan memang ada Awareness, Agency, Ability Sebagai kabupaten yang memiliki wilayah geografis yang luas dengan topografi yang menantang yang tidak disertai akses jalan yang memadai, system pengawasan sekolah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan secara regular. Di sisi lain proses rekrutmen kepala sekolah yang kental dengan intervensi politik berbuah pada tidak terstandarnya kompetensi kepala sekolah yang menjabat. Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan sekolah, khususnya tingkat dasar, agar lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, kami melakukan studi partisipatif untuk perancangan kebijakan daerah. Studi ini diawali dengan diagnosis akar masalah serta analisis situasi politik, ekonomi, dan kapabilitas pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kebijakan. Berfokus pada area yang sudah diprioritaskan, peneliti mengajak beberapa beberapa kepala sekolah untuk mendesain aspek-aspek serta system pengawasan yang sesuai dengan kapabilitas mereka saat ini serta yang memang terbukti berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran. Proses penelitian partisipatif ini dianggap
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Prof. Karwono Rancangan penelitiannya adalah model. Karena kegiatan pengembangan produknya adalah piranti yang bisa dipergunakan. Piranti yang dapat memberikan kontribusi kebijakan di Dikbud. Dari SNP, dari 8 standar hasil penilaian dari BAN skore paling rendah adalah PTK, disusul sarpras dibandingkan yang lain. Yang agak aneh PTK nya rendah tapi SI, standar proses, standar penilaiannya kok tinggi. Ini juga salah satu hasil kajian. Bagaimana pengembangan model magang guru untuk peningkatan mutu. Maka waktu penelitian ini dilakukan, buat rekomendasinya bagaimana. Apakah tidak perlu guru aja, wong standar guru jelek kok standar isi, standar proses dan standar penilaiannya tinggi. Perlu dikaji ulang bagaimana sebenarnya korelasi antara standar terhadap peningkatan mutu. Dari data-data yang ditampilkan, ditawarkan untuk mengembangkan model. Model yang digunakan harus ada desain, langkahnya tidak dijelaskan. Setelah dikembangkan diuji modelnya, efektif efisien baru tuangkan ke kesimpulan, kaitkan dengan rekomendasi penelitian ini ke depan. Tanggapan: Kajian ini adalah studi desk studi, model yang sudah dibuat tidak ada fasilitas diujicoba

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Standar yang diukur mutunya dari apa, kelihatannya dari UN? Kalau dilihat dari 8 standar mutu itu ada pada SKLnya yang jumlahnya sekian? Nanti dijelaskan, karena ketersediaan guru sekolah menengah kaitannya dengan peningkatan mutu. Yang jadi pertanyaan apakah UN sudah sebagai satu gambaran tentang produk mutu pendidikan. Kalau di SNP mutu pendidikan adalah SKL, ini dikaitkan dengan mutu yang diukur maka di sekolah biasanya lulusan saat perpisahan diberikan format isian yang dibagikan dengan pesan kalau sudah mendapat pekerjaan format diisi dan dikembalikan ke sekolah. Bagaimana daya serap lulusan terhadap dunia kerja. ini dapat dipakai gambaran sbg standar mutu Kaitan dengan mutu pembelajaran, dengan UN, hasilnya tidak terlalu signifikan. Guru GTT dan non GTT tidak ada beda signifikan. Indikasi ini sama dengan guru rendah kok hasilnya bagus. Bisa jadi catatan kita bersama. Kaitan temuan kajian dengan rekomendasi mohon diinformasi Tanggapan Menurut literature mutu pembelajaran bisa pada proses dan hasilnya. Dicoba melihat dari sisi hasil belajar. Merumuskan dalam kajian ini dari hasil belajar melihat output, untuk menjelaskan kaitannya dengan ketersediaan guru GTT dan dengan bukan GTT coba memperhatikan kebutuhan guru tanpa mempertimbangkan GTT, ternyata yang tanpa GTT hasilnya lebih tinggi. Mutu pembelajaran apakah identik dengan yang digambarkan pada UKG dan UN. Untuk sampai ke siswa, UN adalah hasil kerja belajar. Pembelajaran adalah komponen eksternal yang ada pada diri pelajar sehingga mengkaitkan seperti ini mungkin masih ada variable antara. Kalau UKG masih bisa dilihat pada guru, kemudian di MGMP. Desain mix, kualitatif kuantitatif, semoga ada kejelasan, mana yang lebih dahulu dilakukan. Factor penyebab organisasi, kerjasama dengan PT, kemudian motivasi anggota mengikuti kegiatan, dan pembiayaan. Ini faktor yang mendukung. Kalau bisa ada penjelasan variabel2 lain, di sini dianulir tidak diteliti, jangan2 variabel lain ini yang sebenarnya malah menjadi pendukung. Sedikit ada penjelasan. Tanggapan: Hasil diverifikasi apakah benar ada kaitan hasil UN dengan MGMP. Intiya motivasi dari dalam lebih bagus daripada motivasi yang dari luar. Jadi meskipun ada bantuan dana/proyek, tidak berpengaruh apalagi setelah bantuan project selesai. Pengelolaan MGMP yang baik menghasilkan MGMP yang baik pula. Resonden penelitian siapa? Desain rancangan penelitian seperti apa? Kaitkan dengan kebijakan. Di Way Kanan tahun lalu (2018) saat dalam penelitian potret mutu, pada 121 sekolah yang diukur memakai standar mutu, ternyata terjadi perbedaan. Semula sekolah yang akreditasinya A dan C, selanjutnya yang banyak

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		akreditasi B. Kemudian A jumlah hanya 7, C sebanyak 43 yang B sebanyak 67. Kurvenya menceng ke kiri. Bagaimana penelitian partisipatif dilaksanakan melalui kepala sekolah. Rancangan penelitian menggunakan apa, Apakah action research atau deskriptif? Kesimpulan manfaat penelitian dalam kebijakan, rekomendasi yang ditawarkan. Tanggapan: Penelitian panjang 2018-2021. Sebenarnya terdiri dari 2 penelitian. Pertama action research metode partisipatif, penelitian kedua evaluation dengan pendekatan social autopsy. Responden semua yang berpartisipasi dari bupati, DPRD, kepala dinas SKPD, pengawas, kepala sekolah, pensiunan kepala sekolah, orang tua, guru dan siswa. Melibatkan semua kepentingan. Variable dependen dari penelitian evaluasinya adalah hasil belajar siswa, hasil observasi di kelas, kompetensi guru, bagaimana supervise kepala sekolah meningkat, bgmn persepsi attitude kepala sekolah mengenai pembelajaran meningkat Indonesia yang luas untuk memperbaiki pendidikan yang beragam dari sabang sampai merauke harus kontekstual, tidak dapat kebijakan one size for all. Ketika kontekstual posisi nasional lebih menjadi fasilitator, memfasilitasi pembuatan kebijakan yang partisipatif daripada membuat regulasi.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Musidah Rahmah FKIP Pakuan LPTK menyiapkan calon pendidik. Tidak dispesifikasi kurikulum untuk guru SMA atau SMK. Hasil penelitian ini mungkin bisa mengarahkan kami mengembangkan kurikulum ke depan, agar dapat menyumbang penyediaan guru-guru SMK yang dibutuhkan Tanggapan: Pengembangan model untuk guru produktif, tidak mengkaji guru adaptif 2. Sabar: Fenomena standar PTK rendah tetapi standar isi, proses dan penilaian kok tinggi. Standar PTK harus dipisah antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena biasanya yang rendah adalah standar tenaga kependidikan yang tidak semua sekolah mempunyainya. Setelah standar pendidik dipisahkan, ternyata hasilnya tinggi. Rendahnya PTK itu bukan semata-mata guru. 3. Kosasih Sarannya terkait dengan sebuah ketersediaan guru SMA. Usulan strategi rekrutmen yang mendukung kebutuhan akan guru. Tanggapan: Rekrutmen guru SMA, ASN, PNS, P3K. Tim mencoba mencari jalan lain, karena guru SMK masih kurang maka menawarkan model distribusi guru yang berlebih ke yang kurang karena faktanya ada daerah yang berlebih dan ada daerah yang kurang. Bekerjasama dengan DUDI untuk menjadi guru.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Memfaatkan peserta PPG untuk mengajar, ada programnya dan ada tuntunannya. 4. Sabar: Fenomena standar PTK rendah tetapi standar isi, proses dan penilaian kok tinggi. Standar PTK harus dipisah antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena biasanya yang rendah adalah standar tenaga kependidikan yang tidak semua sekolah mempunyainya. Setelah standar pendidik dipisahkan, hasilnya tinggi 5. Ali Gufron (UNY) Hati-hati membuat kesimpulan aspek kompetensi dan kinerja guru. Bapak menyarankan bermacam-macam melalui MGMP. Khawatir semacam analog ada kaitan seragam guru dengan mutu hasil belajar anak. Sebenarnya kan tidak ada kaitannya. Wilayah penelitian nya beda, satu MGMP satu lagi kinerja guru di sekolah. Harusnya melihat kinerja MGMP dalam hal memberikan layanan peningkatan profesionalitas guru. Itu juga tidak bisa secara langsung kompetensi dan ketrampilan guru meningkat. Tadi ada indikasi pengelolaan MGMP yang baik karena ada sumber daya dosen yang banyak sehingga bisa dipakai sebagai fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi guru-guru. Kalau begitu narasumber dari perguruan tinggi yang menjadi peningkatan kompetensi guru. Mohon hati-hati dan perlu ada catatan Tanggapan: Hasil analisis data 3 daerah kategori MGMP yang baik ada korelasi dengan MGMP UKG dan UN, sedangkan hasil 2 daerah dengan kategori MGMP kurang baik dalam pengelolaannya, dari segi pengurusnya dan aktivitasnya ada korelasi juga. Peneliti hanya tidak sampai melihat ke sekolah. MGMP yang ada dukungan dari perguruan tinggi, kualitas pertemuan MGMP lebih bagus, ada peningkatan kompetensi guru karena tersedia narasumber yang dibutuhkan. 6. Musidah Rahmah FKIP Pakuan Dari sekian banyak sekolah yang diteliti yang MGMPnya dikatakan bagus apakah itu berlaku untuk semua mapel di satu sekolah, atau kualitasnya relative sama atau hanya mapel tertentu saja. Pernah bekerjasama dengan MGMP Kota Bogor secara kasat mata tanpa penelitian peneliti sudah dapat menilai/mengatakan bahwa MGMP Kota Bogor bagus, meskipun ada beberapa tempat juga ada kategori yang kurang bagus. Apakah pengelolaan MGMP yang baik berkorelasi dengan UKG dan kualitas lulusannya? Tanggapan: Kualitas MGMP tidak tergantung pada bantuan biaya dan fasilitas apapun dari eksternal, tetapi lebih pada motivasi intrinsik Mutu pembelajaran belum sampai ranah sekolah hanya melihat hasil dari dugaan hasil dari UN, belum pada proses seperti apa. 7. Sabar

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Judulnya pengelolaan MGMP untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dari mutu pembelajaran peneliti tidak ke sekolah melihat proses pembelajaran, hanya melihat dugaan hasil dari UN. Tanggapan: Tidak ada waktu ke sekolah. Memang bagus kalau bisa melakukan kunjungan ke sekolah Prof Karwono Penelitian wilayah kebijakan, desain jelas menghasilkan temuan. Kesimpulan selalu deskriptif, mendeskripsikan variable bebasnya. Rekomendasi harusnya lebih preskriptif, rekomendasi yang bisa dilakukan. 8. Ali Gufron (UNY) Ingin merancang penilaian kepala sekolah. Perlu ada pengkajian lebih jauh, model penilaian seperti apa yang akan dikembangkan. Mau membuat model sendiri, silakan. Seberapa itu bisa terjangkau. Karena kinerja kepala sekolah itu banyak ragamnya, terutama kalau harus diawali dengan definisi operasional tentang tupoksi kepala sekolah. Tadi juga dikatakan bahwa pemilihan kepala sekolah ada intervensi pimpinan daerah terkait politis kalau tidak ada bukti yang kuat jangan disampaikan, bisa digugat nanti. Faktanya dalam hal seleksi kepala sekolah ada prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Model penilaian apa dan aspek-aspek apa yang dinilai sehingga bisa langsung merepresentasikan kinerja guru dalam hal peningkatan mutu pembelajaran. Jawaban: Apakah merepresentasikan kepala sekolah yang baik atau belum, memang belum. Target diberikan sesuai kapabilitas Penelitian ini bukan untuk disebarluaskan. Insight bahwa kebijakan bottom up lebih bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah yang berbeda. Kebijakan tidak one size for all, tapi sebaiknya kontekstual. 9. Kosasih Identifikasi permasalahan, kemudian analisis masalah tidak terkait di rekomendasi. Diagnosis akar masalah. Tanggapan: Fenomena ketika ada aturan yang harus diikuti, ketika kebijakan itu diikuti melebihi kapabilitas si pelaku, terjadi yang namanya premature. Akhirnya jadi masalahnya di adminnya, bukan pada programnya. Misalnya harus punya RPP. Sengaja membuat penelitian yang benar-benar bottom up. Diagnosis tidak dari akar masalah tidak ada rekomendasi, menjadi proses role desain. Rekomendasi dibuat sendiri oleh pemangku kepentingan. Targetnya hasil dan target proses. 10. Yufriawati: Untuk mengupas tuntas dari akar permasalahan, jadi apapun juga dari masalah politik social ekonomi budaya harus ada pendekatannya apa. Tidak bisa ditindaklanjuti saja. Koreksian tentang USBN, tidak soal yang dibuat sendiri oleh sekolah. Kerjasama KKG dan dinas pendidikan karena merupakan suatu yang urgent untuk SPM nya pemda. Masalah peran pengawas, karena focus pada kepala sekolah. Ada peran dan fungsi dari ekosistem yang bisa diberdayakan yang bisa dieksplor.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Ini rancangan kualitatif, mulai bagaimana strateginya agar treatment ini dapat terus berjalan saat dilepas tahun 2021 Tanggapan: Setuju bu Fitri. Pilih yang paling lebih mudah diperbaiki yang dapat dilakukan. Akar masalah akan diselesaikan berdasar semua masalah yang ada, tidak dapat dipisahkan. Masalah USBN menemukan ada perbedaan soal antar kecamatan. Butuh tes yang lebih bisa melihat item-item yang menguji skill. Tantangan pengawas adalah geografis yang sulit. Aplikasi android bisa dipergunakan sehingga pengawas tidak harus setiap bulan melakukan kunjungan. Strategi agar berkesenimbangan. Dukungan Pemda disepakati sejak awal. Diluar penganggaran adalah kapabilitas ditingkatkan terus sepanjang kajian berlangsung, diharapkan kapabilitas sdh siap saat program sudah selesai. 4 A dicoba ditingkatkan terus selama program berjalan. 11. Prof. Karwono Penelitian wilayah kebijakan, desain jelas menghasilkan temuan. Kesimpulan selalu deskriptif, mendeskripsikan variable bebasnya. Rekomendasi harusnya lebih preskriptif, rekomendasi yang bisa dilakukan. Penelitian multi years, sebaiknya desain dibuat per tahapan, meskipun akhirnya berupa penelitian evaluative yang dilakukan secara multi years. Untuk menyamakan persepsi, di standar proses di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dalam standar proses ini guru banyak berkecimpung di administrative. Di sini guru memang harus menulis apa yang akan dilakukan, wong sudah ditulis saja belum tentu dikerjakan. Bekerja kan harus disiapkan. Dampak hasil pendidikan baru dapat dilihat 25 tahun yang akan datang, project perubahan perilaku tidak dapat serta merta
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 10.15 WIB.

LITERASI DAN PEMBELAJARAN

ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI DASAR PADA SISWA

Uswatun Hasanah¹, Tarma¹, Rasha¹, Prastiti Laras Nugraheni¹,
Mirdat Silitonga¹, Bambang Suwardi J², Lukman Solihin²

¹Universitas Negeri Jakarta

²Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan efektivitas implementasi gerakan literasi sekolah dalam rangka meningkatkan literasi dasar pada siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan instrumen berbentuk angket. Sebagai instrumen tambahan menggunakan wawancara, observasi, dan tes kemampuan literasi. Responden penelitian ini sebanyak 300 siswa SD, 60 orang guru SD, dan 15 kepala sekolah yang tersebar di Tapanuli Utara (Sumatera Utara), Singkawang (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Malang (Jawa Timur). *Self-directed learning* berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 17,89%. Sarana literasi di sekolah berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 8,7%. Dukungan keuangan sekolah berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 3,3%. Komitmen pendidik berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 10,82%. Peran kepala sekolah berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 22,09%. Partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 16,89%. Literasi keluarga berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 20,16%. Dukungan pemerintah berkontribusi terhadap implementasi GLS sebesar 6,5%. Implementasi GLS berkontribusi terhadap kemampuan literasi siswa sebesar 71,23%. Peran pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan GLS. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam penetapan pelaksanaan tahapan implementasi GLS dan standar ketercapaian kemampuan literasi siswa. Sekolah harus menyediakan sarana literasi seperti, sudut buku kelas, perpustakaan, dan area baca perlu menjadi perhatian sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus kreatif dalam pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Keluarga harus membangun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri anak dalam rangka mendukung minat baca tulis anak.

Kata kunci: baca tulis, faktor determinan literasi, gerakan literasi sekolah

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

"*Literacy for all*" merupakan slogan yang dikumandangkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Slogan ini menegaskan hak setiap manusia untuk menjadi "literate" sebagai modal untuk menyongsong kehidupan. Literasi membuat individu, keluarga, dan masyarakat berdaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih jauh, literasi memiliki *multiplier effect*, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, mengecek pertumbuhan penduduk,

mencapai kesetaraan gender dan menjamin pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan demokrasi (UNESCO, 2014).

UNESCO melakukan survei pada 2014, hasilnya menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius. Indonesia menduduki peringkat terendah kedua, hanya setingkat di atas Botswana di Afrika. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum - WEF) pada 2015 juga mengeluarkan laporan mengenai kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi abad ke-21. Keterampilan itu mencakup literasi, kompetensi, dan karakter. Hasil survei The World's Most Literate Nations (WMLN) 2016 mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Sementara Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia secara berturut-turut menduduki peringkat satu sampai dengan peringkat lima.

Hasil penelitian *PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)* menyatakan bahwa rata-rata skor prestasi literasi membaca siswa kelas IV Indonesia (405) berada signifikan di bawah rata-rata internasional (500). Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara (negara bagian) peserta. Angka UNDP juga mengejutkan bahwa angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen saja. Negara Malaysia sudah 86,4 persen. Rendahnya budaya literasi di Indonesia membuat pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga.

Literasi adalah hal penting dalam konteks menentukan mutu sumber daya manusia untuk modal memajukan bangsa, maka pemerintah fokus mendorong anak memahami materi yang dibacanya dengan membuat kebijakan pendidikan yang mengarah pada kecakapan abad ke-21 (literasi, kompetensi, dan karakter) dan hal tersebut diformulasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi lahirnya Gerakan Indonesia Membaca dan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan Indonesia Membaca melingkupi gerakan literasi di ranah masyarakat dan keluarga serta Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional (GLN) untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait. Kegiatan literasi tersebut mencakup Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Ferguson (2003) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Penelitian ini lebih berfokus pada literasi dasar, khususnya literasi baca tulis di Sekolah Dasar (SD).

Wulandari (2017) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan GLS di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman AL-Hakim Internasional (SDIT LHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang menunjang kebijakan GLS di SDIT LHI adalah *reading group, morning motivation, mini library*. Pengadaan perpustakaan dan kegiatan yang menunjang. Lebih lanjut dalam penelitiannya dipaparkan bahwa terdapat faktor yang menjadi penghambat implementasi literasi sekolah seperti: guru yang masih harus selalu diingatkan terkait Standar Operasional Produk (SOP) kebijakan dan program yang akan dilakukan, sulitnya mendapatkan buku yang kaya akan nilai serta gambar-gambar menarik sulit di Indonesia, perlu adanya pengembangan program agar tidak monoton, serta belum adanya evaluasi dari berbagai program.

Pakpahan (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jati diri, kondisi sosial ekonomi dan budaya, kepemilikan komputer, dan buku-buku merupakan faktor utama yang memengaruhi capaian literasi matematika siswa Indonesia peserta PISA 2012. Sulisty (2017) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, program budaya membaca sangat dibutuhkan siswa di SDN Tenganan. Pada aspek input, program budaya membaca di SDN Tenganan sudah menjawab kebutuhan sekolah dengan ditopang kegiatan, SDM, sarana dan prasarana, dana serta mekanisme kerja yang memadai. Pada aspek pelaksanaan program budaya membaca berjalan lancar meski terdapat beberapa kendala.

Setiap sekolah memiliki aktivitas yang berbeda untuk mendukung gerakan literasi sekolah. Sekolah memiliki otoritas untuk merancang kegiatan literasi dengan sentuhan kreativitas, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan efektivitas kegiatan. Dalam mengimplementasikan gerakan literasi sekolah masih ditemukan faktor-faktor penghambat. Rendahnya minat baca di Indonesia disebabkan masih terdapat faktor-faktor penghambat implementasi gerakan literasi sekolah serta dibutuhkannya analisis lebih lanjut mengenai faktor determinan efektivitas implementasi gerakan literasi sekolah guna meningkatkan literasi dasar pada siswa, khususnya siswa SD. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Analisis Determinan Efektivitas Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Literasi Dasar pada Siswa”**.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Analisis determinan yang memengaruhi efektivitas implementasi GLS dalam meningkatkan literasi dasar pada siswa”. Secara terperinci masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran implementasi GLS di Indonesia?
- 2) Apa saja faktor yang menjadi determinan pencapaian GLS di Indonesia?
- 3) Seberapa besar determinasi setiap faktor terhadap pencapaian GLS di Indonesia?
- 4) Seberapa besar determinasi GLS terhadap kemampuan literasi baca tulis siswa SD di Indonesia.

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang diduga memengaruhi efektivitas implementasi GLS dalam meningkatkan kemampuan literasi dasar pada siswa di sekolah. Tujuan penelitian secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui gambaran implementasi GLS di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi determinan pencapaian GLS di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar determinasi setiap faktor terhadap pencapaian GLS di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar determinasi GLS terhadap kemampuan literasi baca tulis siswa di Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Literasi

Kata literasi berasal dari bahasa Inggris *literacy* yang berarti kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kompetensi utama yang menjadi simbol pendidikan dasar pada abad lampau. Seiring perkembangan zaman, pemahaman terkait literasi juga semakin berkembang. Literasi tidak hanya diartikan sebagai membaca dan menulis saja, mulai banyak ahli yang mendefinisikan literasi.

Untuk pertama kalinya definisi tentang literasi disepakati secara internasional, berasal dari rekomendasi UNESCO tahun 1958 dan terus berkembang hingga tahun 2003. Menurut UNESCO (2004) literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, dan menulis bahan-bahan yang terkait dengan konteks yang berbeda-beda. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara (Kemendikbud, 2016). Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, berkomunikasi, dan menghitung, serta membaca agar dapat mengembangkan diri secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan modern sehingga menjadi pribadi yang berkualitas.

2. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah

Dalam dunia pendidikan, literasi menjadi sarana bagi siswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Pentingnya literasi bagi siswa membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan GLS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Hal ini merupakan upaya pembentukan budaya literasi untuk mengembangkan potensi diri peserta didik.

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik (Kemendikbud, 2016). Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen, yaitu melibatkan siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta orang tua dalam upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik sebagai budaya di lingkungan sekolah (Kemendikbud, 2016),

GLS dikembangkan dengan menasar ekosistem sekolah di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. GLS dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (1) tahap pembiasaan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca, (2) tahap pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, serta (3) tahap pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran (Kemendikbud, 2016).

Gerakan literasi sekolah diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat untuk ikut berupaya menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah; meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat; menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak; dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca (Kemendikbud, 2016). Dengan adanya gerakan literasi ini generasi bangsa diharapkan semakin sadar akan pentingnya budaya literasi di zaman yang semakin modern.

Berdasarkan penelitian Fanani (2017), faktor-faktor yang diukur dalam penilaian implementasi GLS adalah sebagai berikut : faktor internal (siswa, sarana prasarana, ketersediaan dana, pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan terhadap gerakan literasi sekolah), dan faktor eksternal (daya dukung masyarakat, keluarga, pemerintah).

C. METODE PENELITIAN

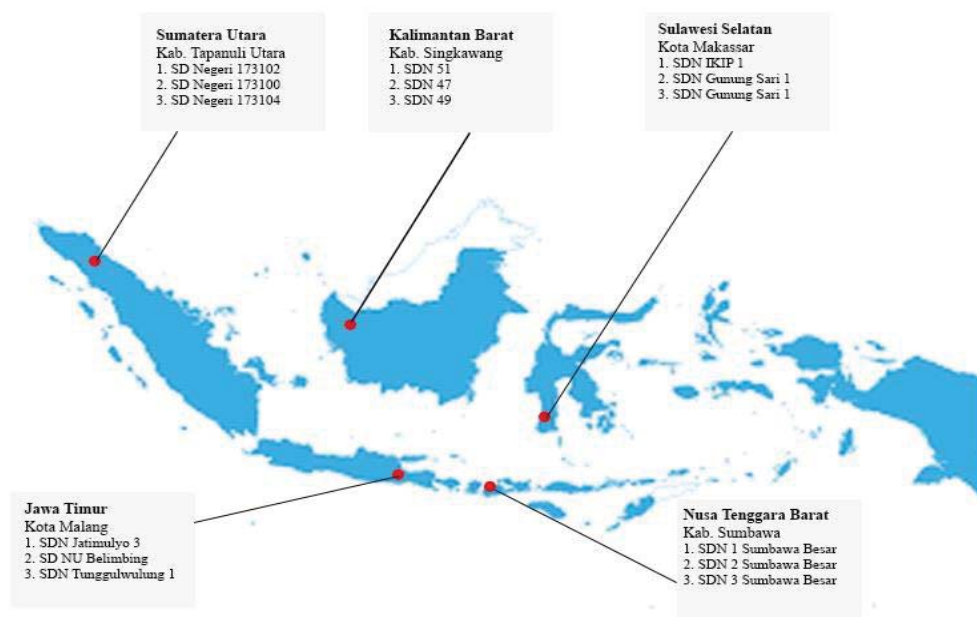
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan faktor determinan apa yang efektif untuk mengimplementasikan gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan literasi dasar pada siswa SD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei.

2. Populasi dan Sampel/ Fokus dan Lokus

Populasi untuk data penelitian ini adalah seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang memiliki kriteria bahwa sekolah tersebut menggunakan kurikulum 13 dan mengikuti GLS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*. Pengambilan sampel dikelompokkan berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian. Berdasarkan populasi tersebut dibagi ke dalam lima pulau di Indonesia sebagai perwakilan/ representasi dari daerah-daerah di Indonesia, adapun lima pulau tersebut, antara lain Nusa Tenggara Barat, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Setiap kota besar mewakili tiga sekolah sebagai sampel penelitian dengan akreditasi A, B, dan C. Adapun sekolah-sekolah yang dipilih terdapat pada Gambar 1 Alasan pemilihan kelima sekolah tersebut adalah karena sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013 dan harus menerapkan GLS. Responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 orang guru SD, 15 kepala sekolah, dan 300 siswa SD tingkat atas.



Gambar 1. Sampel dan Lokasi Penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi GLS di sekolah dasar dan kemampuan literasi dasar pada siswa. Diskusi Kelompok Terpimpin (DKT) digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah yang harus diteliti, mengetahui implementasi GLS di Sekolah Dasar lebih mendalam, dan mengetahui kemampuan literasi siswa SD.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, untuk mendapatkan hasil faktor determinasi mana yang paling tinggi. Data kuantitatif yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan inferensia. Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 16.0 for windows untuk mengetahui *mean*, *median*, *modus*, standar deviasi, *range*, dan faktor determinan yang diteliti.

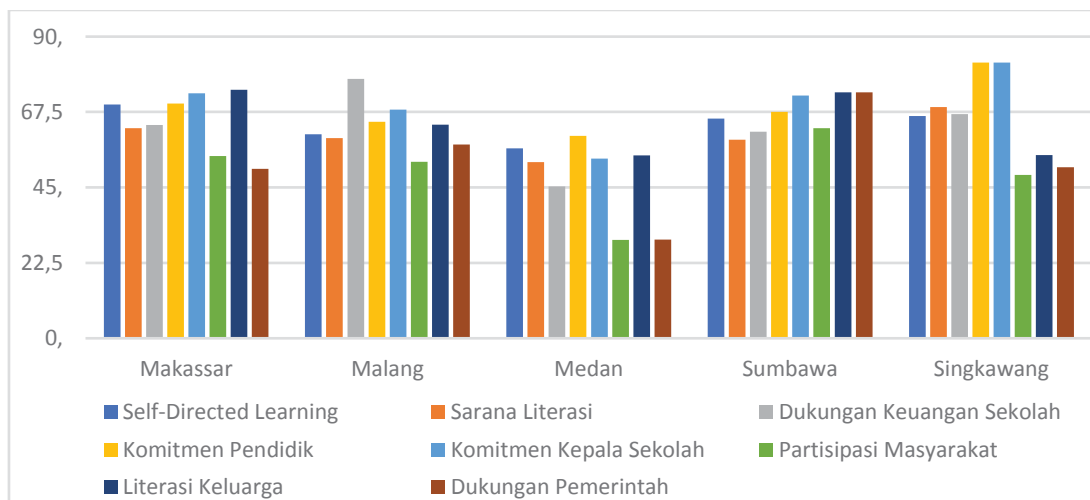
Pengukuran dari setiap jawaban menggunakan pilihan responden menggunakan skala *likert* dengan skor satu sampai lima. Kemudian skor total dari masing-masing variabel ditransformasikan menjadi skor indeks. Hal ini dilakukan agar memperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100. Selain itu, bertujuan untuk menyamakan satuan agar perbandingan kategori data setiap variabel seragam (Puspitawati dan Herawati 2008).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Deskripsi Faktor Determinan GLS

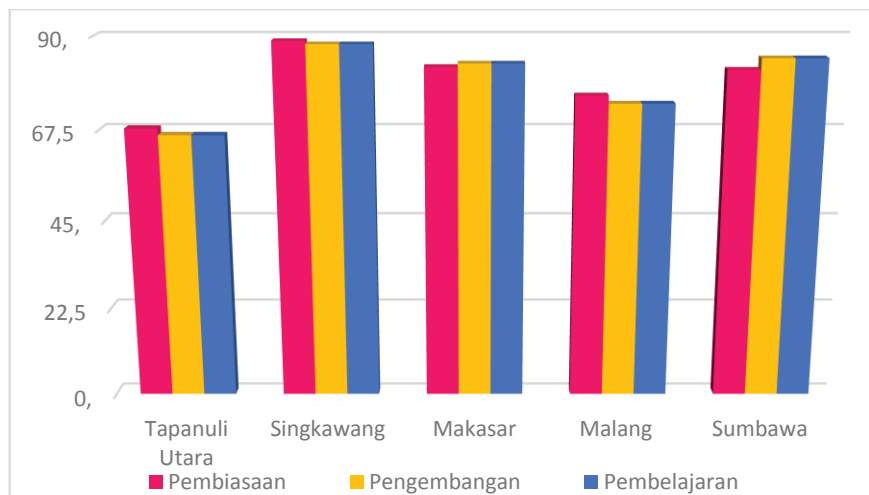
Pada implementasi GLS terdapat 8 faktor yang determinan dengan GLS, yaitu variabel :*self directed learning*, sarana literasi, dukungan keuangan sekolah, komitmen pendidik, peran kepala sekolah, partisipasi masyarakat, literasi keluarga, dan dukungan pemerintah. Dari beberapa variabel yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut, secara umum dapat dilihat rerata variabel per wilayah seperti tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Rerata Variabel per Wilayah

b. Deskripsi Implementasi GLS

Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diketahui 4 sekolah berada pada tahap pembiasaan, dan 11 sekolah telah sampai pada tahap pembelajaran. Rerata dimensi pada tahap implementasi GLS setiap wilayah dapat dilihat pada Gambar 3.



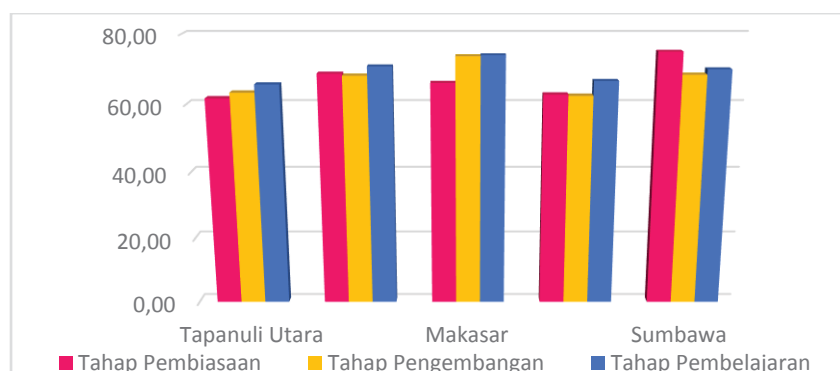
Gambar 3. Rerata Dimensi pada Tahap Implementasi GLS per Wilayah

Jika dilihat perbandingan dimensi pada setiap wilayah (Gambar 3), diketahui bahwa tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran paling tinggi terdapat di SD Singkawang, Kalimantan Barat dengan rerata 88.36 (kategori tinggi). Adapun sekolah dengan implementasi GLS paling rendah terdapat pada siswa SD Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara sebesar 66.72 (kategori rendah). Implementasi GLS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Rendahnya implementasi GLS pada SD Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara sejalan dengan rendahnya seluruh faktor implementasi GLS di Tapanuli Utara.

Perbandingan tahapan implementasi GLS (Gambar 4) diketahui pada tahap pembiasaan dari 15 sekolah dengan rerata 80.38 (kategori tinggi), pada tahap pengembangan dari 11 sekolah dengan rerata 79.2 (kategori tinggi), dan pada tahap pembelajaran dari 11 sekolah memiliki rerata 81.83 (kategori tinggi). Hal ini berarti sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik. Hal tersebut dikarenakan indikator kegiatan GLS pada setiap tahap sudah jelas tertuliskan di panduan GLS, sehingga sekolah dapat mengimplementasikan setiap tahapan sesuai panduan tersebut.

c. Deskripsi Kemampuan Literasi Siswa

Dalam melakukan evaluasi program GLS perlu adanya penilaian ketercapaian implementasi untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Penilaian ketercapaian implementasi GLS dapat diukur melalui kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari GLS. Kemampuan literasi siswa per tahap implementasi GLS di 5 wilayah berbeda dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. Kemampuan literasi siswa per tahap implementasi GLS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan literasi siswa per tahapan implementasi GLS di seluruh wilayah masih dalam kategori sedang ($>50 - < 75$). Artinya hasil yang dicapai dalam implementasi GLS belum tercapai secara maksimal pada seluruh tahapan. Sebagian besar SD selama ini menerapkan tahapan GLS secara bersamaan, namun sebaiknya GLS dilakukan secara bertahap sehingga kemampuan literasi siswa dapat diukur sesuai ketercapaian indikator GLS per tahapan.

Pada penelitian ini kemampuan literasi siswa diukur berdasarkan pada penilaian guru dan dikonfirmasi dengan penilaian siswa itu sendiri. Kemampuan literasi siswa berdasarkan penilaian guru dan siswa dapat dilihat pada Gambar 4. Kemampuan literasi siswa juga dapat diukur dengan tes pemahaman bacaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kemampuan literasi siswa berada dalam kategori sedang dengan rerata sebesar 73.06. Data variabel kemampuan literasi siswa memiliki nilai maksimal sebesar 93.33, nilai minimal sebesar 33.33.

d. Faktor Determinan Implementasi GLS

Berdasarkan hasil uji korelasi, terdapat hubungan yang cukup kuat dan sangat signifikan ($\alpha \leq 0,000$) antara *self-directed learning* dengan ketercapaian program GLS ($r_{hitung} = 0,423$), artinya semakin baik *self-directed learning* siswa, maka semakin baik juga ketercapaian program GLS. Hasil uji korelasi antara sarana literasi di sekolah dengan ketercapaian program GLS menunjukkan adanya hubungan yang positif dan sangat signifikan ($r_{hitung} = 0,295$; $\alpha \leq 0,012$), artinya semakin baik sarana literasi sekolah, maka semakin baik juga ketercapaian program GLS. Berdasarkan hasil uji korelasi antara dukungan keuangan sekolah terhadap ketercapaian program GLS menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan ketercapaian program GLS ($r_{hitung} = 0,183$; $\alpha \leq 0,125$). Berdasarkan hasil uji korelasi antara komitmen pendidik dengan ketercapaian program GLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan sangat signifikan dengan ketercapaian program GLS ($r_{hitung} = 0,329$; $\alpha \leq 0,005$).

Berdasarkan hasil uji korelasi antara Peran Kepala Sekolah dengan ketercapaian program GLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan sangat signifikan, dengan ketercapaian implementasi GLS r_{hitung} sebesar 0,470 ($\alpha \leq 0,000$). Berdasarkan hasil uji korelasi antara partisipasi masyarakat dengan ketercapaian implementasi program GLS menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan ($r_{hitung} = 0,411$; $\alpha \leq 0,000$). Berdasarkan hasil uji korelasi antara literasi keluarga terhadap implementasi program GLS menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan ($r_{hitung} = 0,449$; $\alpha \leq 0,000$) diantara keduanya. Berdasarkan hasil uji korelasi antara dukungan pemerintah dengan ketercapaian implementasi program GLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan ($r_{hitung} = 0,255$; $\alpha \leq 0,031$). Hasil uji korelasi antara ketercapaian implementasi GLS terhadap kemampuan literasi siswa menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan ($r_{hitung} = 0,844$; $\alpha \leq 0,000$).

Tabel 1 Tabel Korelasi

Variable	Koefisien Korelasi									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Self Directed Learning	1									
2. Sarana Literasi	0,458*	1								
3. Keungan Sekolah	0,364*	0,514*	1							
4. Komitmen Pendidik	0,435*	0,557*	0,420*	1						
5. Partisipasi Masyarakat	0,484*	0,273*	0,333*	0,257*	1					
6. Literasi Keluarga	0,352*	0,110	0,153	0,081	0,504*	1				
7. Dukungan Pemerintah	0,304*	0,165	0,333*	0,211	0,567*	0,403**	1			
8. Peran Kepala Sekolah	0,584*	0,626*	0,586*	0,629*	0,524*	0,249*	0,388*	1		
9. Implementasi Gerakan Literasi	0,423*	0,295*	0,183	0,329*	0,411*	0,449**	0,255*	0,470*	1	
10. Kemampuan Literasi Siswa	0,426*	0,342*	0,194	0,362*	0,378*	0,454**	0,220	0,491*	0,844*	1

1. ** significance

p≤ 0,01

*significance at p≤ 0,05

2. Pembahasan

Berdasarkan survei terhadap 15 sekolah dari 5 provinsi, diketahui 4 sekolah berada pada tahap pembiasaan dan 11 sekolah telah sampai pada tahap pembelajaran. Mengenai implementasi GLS di 15 sekolah, diketahui pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran, semua sudah dalam kategori tinggi. Artinya, sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik. Hal tersebut dikarenakan indikator pada kegiatan GLS telah tercantum dalam panduan GLS Sekolah dasar, sehingga sekolah dapat mengimplementasikan setiap tahapan sesuai panduan tersebut. Implementasi tahapan GLS tertinggi terdapat di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Adapun sekolah dengan implementasi GLS paling rendah yaitu siswa SD Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara. Implementasi GLS ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

Dari delapan variabel yang diduga menjadi faktor determinan implementasi GLS, terdapat tujuh faktor memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan implementasi GLS. Sementara terdapat satu variabel yang tidak menunjukkan adanya korelasi dengan implementasi GLS, yaitu dukungan keuangan. Dukungan keuangan hanya berkontribusi 3,3% dengan implementasi GLS. Hal ini menunjukkan dukungan keuangan memiliki pengaruh yang kecil terhadap ketercapaian implementasi GLS. GLS merupakan suatu gerakan yang membutuhkan pegiat literasi yang aktif dalam melaksanakan gerakan-gerakan literasi di sekolah baik dari kepala sekolah, guru, masyarakat, maupun keluarga. Dukungan finansial merupakan komponen penting dalam terlaksana suatu program, namun dukungan finansial yang cukup tidak akan mampu menggerakkan suatu program GLS apabila tidak ada pegiat literasi.

Tujuh faktor determinan pada implementasi GLS adalah *self-directed learning* dengan kontribusi sebesar 17,89%, dukungan sarana literasi dengan kontribusi sebesar 8,7%, komitmen pendidik berkontribusi sebesar 10,82%, peran kepala sekolah berkontribusi sebesar 22,09%, partisipasi masyarakat berkontribusi sebesar 16,89%, literasi keluarga berkontribusi sebesar 20,16% dan dukungan pemerintah berkontribusi sebesar 6,5%.

Peran kepala sekolah menjadi variabel dengan determinan terbesar, yakni 22,09%. Oleh karena itu, implementasi GLS sangat membutuhkan peran kepala sekolah. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sedang melakukan program penguatan kepala sekolah, di mana kepala sekolah berfungsi sebagai manajer sekolah, tidak lagi guru yang merangkap menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu diharapkan kepala sekolah dapat lebih aktif dalam menggerakkan literasi di sekolah dengan menjadi pegiat literasi.

Faktor kedua yang paling determinan dengan implementasi GLS adalah literasi keluarga dengan nilai determinasi 20,16%. Keluarga merupakan wahana utama dan pertama anak dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dibutuhkan dalam implementasi GLS. Literasi keluarga yang baik memberikan pemahaman kepada anak pentingnya kemampuan literasi bagi anak, khususnya literasi baca tulis. Literasi keluarga dapat membantu orang tua untuk memahami dan mengembangkan peran mereka sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka, untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri anak (Harras, 2011). Penelitian yang dilakukan Meilawati (2015) menemukan literasi keluarga yang baik akan berpengaruh terhadap minat baca anak.

Faktor ketiga yang memengaruhi adalah *self-directed learning* dengan nilai determinasi 17,89%. *Self-directed learning* merupakan dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar. Menurut Gibbons (2002), *self-directed learning* merupakan suatu keterampilan di mana seseorang mampu untuk menentukan sendiri dan memilih tujuan yang ingin dicapainya, merencanakan strategi yang akan dilakukan, berusaha untuk memecahkan masalah, mengelola dirinya, serta mengevaluasi pemikiran dan kinerja yang telah dilakukan.

Keterampilan ini akan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan prestasi individu (Gibbons, 2002). *Self-directed learning (SDL)* sangat dibutuhkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Siswa yang mempunyai kebiasaan membaca yang baik merupakan siswa yang tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Mereka akan memiliki inisiatif sendiri untuk terus mencari, menemukan dan memilih apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka, seperti bahan bacaan apa yang dibutuhkan, dan berusaha memenuhi kebutuhan bacaan tersebut. Selain itu, mereka juga terampil dalam mengatur waktu kegiatan membaca atau belajarnya. Hasil penelitian yang dilakukan Hyland & Krantz (2011) mengungkapkan bahwa *self-directed learning* memberi pengaruh positif terhadap performa akademik pada siswa.

Faktor determinan selanjutnya dengan implementasi GLS adalah partisipasi masyarakat. Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah juga dipengaruhi oleh faktor partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Menurut Isbandi (Rizal, 2014), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan Arsah dan Nurrisati (2018) menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap kegiatan literasi pada perpustakaan.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan suatu gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Implementasi GLS berkontribusi terhadap kemampuan literasi siswa sebesar 71,23%. Artinya, implementasi GLS determinan dengan kemampuan literasi siswa sebesar 71,23%. Implementasi GLS di sekolah sangat menentukan kemampuan literasi siswa. Oleh karena itu semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan masyarakat harus kerjasama dalam mengimplementasikan GLS

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi GLS yang dilakukan di 5 wilayah berbeda menunjukkan 15 sekolah telah mengimplementasikan GLS dengan baik pada tahap pembiasaan dan 11 sekolah telah mengimplementasikan GLS dengan baik pada tahap pembelajaran yang ditunjukkan dengan kategori yang tinggi, namun hasil kemampuan literasi siswa masih dalam kategori sedang.

Tujuh faktor determinan pada implementasi GLS adalah *self-directed learning* dengan kontribusi sebesar 17,89%, dukungan sarana literasi dengan kontribusi sebesar 8,7%, komitmen pendidik berkontribusi sebesar 10,82%, peran kepala sekolah berkontribusi sebesar 22,09%, partisipasi masyarakat berkontribusi sebesar 16,89%, literasi keluarga berkontribusi sebesar 20,16%, dan dukungan pemerintah berkontribusi sebesar 6,5%. Sementara dukungan keuangan tidak berkorelasi signifikan dengan implementasi GLS. Implementasi GLS determinan dengan kemampuan literasi baca tulis siswa berkontribusi sebesar 71,23%. Peran kepala sekolah, literasi keluarga, *self-directed learning*, dan partisipasi masyarakat menjadi variabel yang paling menentukan dalam tercapainya implementasi GLS.

2. Rekomendasi

a. Pemerintah

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, peneliti merekomendasikan baik kepada pemerintah pusat dan/atau daerah untuk membuat suatu peraturan yang menjadikan kepala sekolah sebagai pegiat literasi. Pemerintah juga dapat memberikan penghargaan kepada kepala sekolah yang dapat menerapkan GLS sesuai indikator dengan kemampuan literasi siswa yang baik, sehingga sekolah akan lebih bersemangat mengimplementasikan GLS dengan standar yang tinggi. Pemerintah perlu membuat program penguatan

kepala sekolah untuk implementasi GLS mengingat masih ada beberapa kepala ssekolah yang kurang mengetahui program GLS.

Partisipasi masyarakat dan peran keluarga juga harus menjadi konsen pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi gerakan literasi di masyarakat agar masyarakat melek akan pentingnya literasi. Pemerintah perlu mengader orang-orang yang dapat berperan sebagai pegiat literasi. Pemerintah perlu membuat modul atau buku panduan literasi keluarga untuk orangtua dalam mengembangkan literasi keluarga. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam penetapan pelaksanaan tahapan implementasi GLS dan standar ketercapaian kemampuan literasi siswa, di mana standar tersebut menunjukkan tercapainya tujuan dari tahapan tersebut, sehingga apabila standar tersebut telah tercapai, sekolah baru dapat menaikkan tahapan implementasi GLS.

b. Sekolah

Self-directed learning merupakan variabel yang determinan dengan implementasi GLS. Oleh karena itu peran guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan *self-directed learning* pada siswa. Guru harus memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan *self-directed learning*. Baiknya guru secara rutin mengevaluasi peningkatan *self-directed learning* pada siswa.

Sekolah harus menyediakan sarana literasi seperti sudut buku kelas, perpustakaan, dan area baca perlu menjadi perhatian sekolah, selain itu jenis bacaan yang beragam seperti buku cerita bergambar, buku tanpa teks, buku teks sederhana, buku fiksi, buku nonfiksi, buku bergambar kaya akan teks, dan buku novel pemula dalam rangka mengimplementasikan GLS.

Kepala sekolah harus kreatif dalam pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. Kepala sekolah dapat bekerja sama dengan perpustakaan seluruh Indonesia untuk pengadaan buku hasil pemutihan perpustakaan. Kepala sekolah dapat bekerja sama dengan universitas yang memiliki program studi ilmu perpustakaan untuk dapat PKL di sekolah menjadi pustakawan. Sekolah dapat memberikan *reward* kepada guru dan siswa yang berprestasi dalam bidang literasi. Kepala sekolah baiknya membuat tim literasi sekolah dengan membuat SK resmi. Kepala sekolah memastikan berlangsungnya program-program GLS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi internal. Membangun jejaring dengan pihak eksternal termasuk pelibatan publik (penerbit, dunia pers, pengusaha, partner sekolah, masyarakat yang peduli GLS, dsb) dalam menggalang pelaksanaan GLS, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah juga harus aktif dalam pelibatan orang tua/masyarakat dalam berbagai kegiatan implementasi GLS.

c. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial paling dekat dengan anak. Suasana kondisi rumah akan menentukan perilaku anak. Oleh karena itu keluarga harus membangun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri anak, merancang dalam rangka mendukung minat baca tulis anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsah K dan Nurrizati. 2018. Partisipasi Masyarakat Padang Panjang terhadap Kegiatan Literasi di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*. Vol. 7, No. 1. Seri A.
- Fanani, A. 2017. *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di SMP Negeri 2 Trimurjo Tahun Pelajaran 2016/2017* [SKRIPSI]. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Ferguson, B. 2003. Information Literacy. A Primer for Teachers, Librarians, and other Informed People. International Conference of Information Literacy in Prague, Cech. (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf Diakses tanggal 15 Desember 2018).
- Gibbons, M. 2002. *The self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Harras, K. A. (2011). *Mengembangkan Potensi Anak melalui Program Literasi Keluarga*. artikulasi, 144.
- Hyland, N & Kranzow, J. 2011. Faculty And Student Views Of Using Digital Tools To Enhance Self-Directed Learning And Critical Thinking. *International Journal of Self- Directed Learning Volume 8, Number 2*, Diakses pada tanggal 4 Januari 2017 dari : sdlglobal.com/IJSDL/IJSDL8.2.pdf.
- Kemendikbud. 2016. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Media komunikasi dan Inspirasi vol VI/oktober-2016. (online). Diakses tanggal 15 Desember 2018.
- Meilawati, I. (2015). *Pengaruh Literasi Keluarga terhadap Minat Baca dan Kemampuan Literasi Dini Siswa Kelas Awal: penelitian di desa cibolang, kecamatan gunung guruh, kabupaten sukabumi* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- OECD. 2013. *PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science. (Volume 1)*. Paris: PISA- OECD Publishing.
- Pakpahan R. 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Literasi Matematika Siswa Indonesia dalam Pisa 2012. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 1, Nomor 3, Desember 2016.
- Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. 2012a. *Determinants of Learning Outcomes TIMSS 2011: Final Report*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan.
- Puspitawati H, Herawati T. 2008. Metode Penelitian Keluarga. Bogor (ID): IPB Press.
- Rizal, A. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sabutan Kecamatan Sabutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 2 No. 4.
- Sulistyo A. 2017. Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Kelola*. Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017.
- The World's Most Literate Nations (WMLN)*. 2016 <http://www.ccsu.edu/wmln/>. Diakses 17 Desember 2018.
- UNESCO. 2004. *The Plurality Of Literacy And Its Implications For Policies And Programmes*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.(ebook), http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/1362_46e.pdf, diakses 8 Oktober 2018.
- UNESCO. 2014. *Literacy for All*. <http://en.unesco.org/themes/literacy-all>. Diakses 17 Desember 2018.
- Wulandari R. 2017. *Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. No. 3 Vol.VI Tahun 2017.

PENGUATAN PEMBELAJARAN LITERASI DASAR DAN HASIL BELAJAR SISWA

Rasita Ekawati Purba, George Adam Sukoco

MERL INOVASI

Abstrak. Tulisan ini berisikan pembahasan tentang hasil pelatihan guru melalui forum KKG dan penerapannya di kelas terhadap kemampuan literasi siswa kelas awal. Metode yang digunakan adalah perbandingan antara hasil survei awal dan akhir dari pelaksanaan pilot Inovasi yang melibatkan 5.623 siswa di 204 sekolah mitra di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Kemampuan literasi diukur dengan tes literasi dasar dan tes pemahaman. Hasil survei awal menemukan 57% siswa yang menguasai tes literasi dasar. Terdapat kesenjangan signifikan antarprovinsi dengan persentase kelulusan berkisar dari 22% ke 79%. Ditemukan juga rendahnya keterampilan guru untuk mengajarkan literasi kelas awal.

Hasil survei akhir menunjukkan bahwa pilot Inovasi telah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru serta mendorong perubahan praktik mengajar di kelas awal. Guru beralih dari ke pengajaran yang berpusat kepada anak. Guru menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Di sisi lain, siswa mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber bacaan dan kelas literat. Survei juga menunjukkan peningkatan kemampuan literasi siswa, baik literasi dasar maupun pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru yang dilakukan Inovasi melalui forum KKG, peningkatan akses ke buku kelas awal, disertai dengan pendampingan bagi guru dalam penerapan di kelas dan dalam proses refleksi, telah berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa.

Kata kunci: kualitas pembelajaran, literasi, KKG, hasil pembelajaran

A. PENDAHULUAN

Inovasi (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah dasar, untuk aspek literasi dan numerasi. Terdapat tiga fokus perhatian Inovasi, yaitu penguatan pembelajaran di dalam kelas dukungan untuk guru dan mendorong pembelajaran untuk semua (*learning for all*). Makalah ini fokus pada aspek literasi dan membahas bagaimana Inovasi melakukan penguatan pembelajaran di kelas dan memberikan dukungan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mengajar serta mempelajari bagaimana proses-proses yang terjadi di kelas memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengikuti pembelajaran secara maksimal.

Kemampuan literasi dasar merupakan fondasi bagi proses pembelajaran di tahap selanjutnya dan di bidang-bidang lainnya, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran terkait dengan numerasi. Literasi diyakini menjadi kemampuan kunci bagi penguasaan kompetensi lainnya, termasuk untuk menghadapi tantangan pada abad 21.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi. Di antaranya adalah melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai

pihak. Dalam konteks kebijakan, peningkatan kemampuan literasi sudah tercantum dalam sembilan agenda prioritas pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa literasi adalah kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

Statistik membuktikan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan akses ke sekolah, seperti ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah. Di tingkat sekolah dasar dapat dikatakan bahwa hampir semua anak sudah menikmati akses bersekolah. Dibangunnya SD Inpres di berbagai wilayah Indonesia adalah salah satu program pemerintah yang memperluas akses pendidikan, dengan adanya kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Di beberapa daerah, pemerintah daerah justru sudah menerapkan wajib belajar dua belas tahun. Meskipun demikian, kesuksesan Indonesia meningkatkan akses bersekolah, terutama di tingkat sekolah dasar, belum seiring dengan peningkatan hasil pembelajaran. Pengalaman Indonesia ini adalah hal yang banyak dialami oleh negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia di bawah periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo menekankan peningkatan kualitas pembelajaran.

B. KAJIAN PUSTAKA

Meningkatnya akses pendidikan dasar merupakan salah satu prestasi pembangunan yang terjadi di berbagai negara. UNESCO mencatat bahwa pada abad ke-20 banyak negara memastikan bahwa anak-anak terdaftar di sekolah, terutama sekolah dasar. Meskipun demikian, UNESCO juga mencatat bahwa masih terdapat banyak anak yang belum bersekolah, drop out, belajar secara tidak teratur atau sangat sedikit belajar. Bersekolah, tetapi sangat sedikit belajar inilah yang kemudian menjadi perhatian berikutnya pascapencapaian MDGs (Hickey dan Hossain, 2019).

Terbatasnya pembelajaran di sekolah dikenal dengan sebutan krisis pembelajaran (*learning crisis*). Data hasil pembelajaran memberi gambaran seberapa jauh siswa menguasai apa yang dipelajarinya di sekolah. Salah satu tokoh yang menyuarakan krisis pembelajaran ini adalah Lant Pritchett. Pritchett (2013), yang menyatakan bahwa anak-anak bersekolah tetapi belum tentu belajar (*schooling ain't learning*), yang dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar siswa. Hasil PISA 2015, misalnya, menunjukkan kesenjangan yang cukup tajam antara negara OECD dan negara non-OECD terkait dengan hasil belajar siswa, baik di literasi maupun di numerasi. Untuk literasi, di negara OECD terdapat dengan sekitar 19% anak yang mendapatkan hasil di bawah skor 2; sedangkan di negara non-OECD, jumlahnya lebih dari 42% (Kurniati dan Suryadarma, 2019).¹

Di Indonesia fenomena yang sama bisa dipahami dari data yang tersedia terkait dengan hasil belajar siswa. Hasil PISA 2009 menunjukkan bahwa sangat sedikit siswa yang memiliki ketrampilan memadai untuk literasi dan numerasi. Hasil PISA tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, lebih dari 70% siswa masih berada di bawah level 2 untuk matematika dan lebih dari 55% berada di bawah level 2 untuk kemampuan membaca (Kurniasari dan Suryadarma, 2019).

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) kepada siswa kelas 4 SD juga menunjukkan masih rendahnya kemampuan membaca, yang hampir separuh siswa termasuk dalam kategori kurang mampu membaca. Studi ACDP di NTT memperkuat temuan bahwa sekitar 30% siswa di kelas 2 masih mengalami kesulitan untuk membaca.

Inovasi melalui studi awal (*baseline*) kepada lebih dari 9.500 siswa kelas 1--3 di 17 kabupaten/kota di empat provinsi mitra Inovasi menemukan bahwa cukup banyak siswa yang belum berhasil menyelesaikan

¹ Skor 2 adalah batas minimum seorang anak dianggap memiliki kemampuan dasar dan anak diproyeksikan akan mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan selanjutnya.

tes literasi dasar, yaitu pengenalan huruf, suku kata, dan kata. Lebih dari 40% siswa tidak berhasil menyelesaikan tes. Terdapat kesenjangan antarprovinsi dan antarkabupaten. Sebagai contoh, lebih dari 80% siswa di Jawa Timur berhasil menyelesaikan tes literasi dasar, sedangkan di NTT persentasenya tidak lebih dari 20%. Di empat kabupaten di Pulau Sumba terdapat 25% anak kelas 3 yang belum mampu menyelesaikan tes tersebut. Artinya, siswa sudah bersekolah selama tiga tahun, tetapi tidak belajar dengan memadai sehingga –belum menguasai ketrampilan dasar. Hal ini akan memengaruhi kemampuan siswa untuk memahami pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi dan juga –mata pelajaran yang lain.

Berangkat dari permasalahan ini, Inovasi mengujicobakan pendekatan melalui program rintisan atau pilot untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu pilot yang diterapkan adalah pendidikan singkat terkait dengan literasi kelas awal. Pilot ini melatih guru kelas awal di sekolah mitra tentang bagaimana mengajarkan literasi di kelas awal. Pelatihan dilakukan dengan sistem *in on in* dan dilaksanakan melalui forum KKG.

Inovasi merekrut dan melatih para fasilitator daerah untuk menjadi narasumber dan pendamping atau mentor bagi para guru dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dalam pelatihan. Makalah ini membahas kinerja pilot dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

C. METODE PENELITIAN

Inovasi mengembangkan logika perubahan (*theory of change*) untuk menggambarkan bagaimana *input* dan kegiatan menghasilkan *output* dan *output* menghasilkan *outcomes*. Studi ini didasarkan pada *theory of change* di tingkat pilot: pelatihan guru melalui KKG meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan guru dan hal ini mendorong guru untuk mengubah pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih baik yang pada akhirnya berkontribusi pada hasil belajar siswa yang lebih baik. Kinerja ini diukur melalui survei sekolah yang dikembangkan oleh Inovasi, yaitu Survei Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (SIPPI).

Istrumen SIPPI terdiri atas tes literasi dan numerasi untuk siswa di sekolah dasar, wawancara siswa, observasi kegiatan pembelajaran di kelas, wawancara guru, wawancara orang tua siswa terkait dengan wawancara kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta observasi sekolah.

Pilot Inovasi berfokus pada pengajaran di kelas awal, yaitu kelas 1-3. Dengan demikian, survei SIPPI hanya diterapkan kepada siswa dan guru di kelas tersebut. Metode yang digunakan adalah membandingkan hasil survei awal (*baseline*) dan survei akhir (*endline*) dari sejumlah pilot atau program rintisan yang diimplementasikan oleh Inovasi di 17 kabupaten/kota di empat provinsi sebagaimana dijelaskan pada latar belakang. Survei awal dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu sebelum pilot dilaksanakan, dan survei akhir dilakukan pada tahun 2019 setelah pilot selesai. Secara keseluruhan terdapat 204 sekolah dan 575 guru (98 laki-laki dan 477 perempuan), 5.623 siswa (2.903 laki-laki dan 2.720 perempuan) dan 5.614 orang tua/wali. Siswa yang menjadi responden adalah siswa panel x atau siswa yang terlibat pada studi akhir adalah siswa yang juga menjadi responden pada studi awal, demikian juga sekolah serta responden guru.

Tabel Jumlah Responden

	<i>Total</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>
Sekolah	204	NA	NA
Siswa	5.623	239	235
Guru	575	98	477

Inovasi menggunakan *instrument student learning assessment* (SLA) untuk mengetahui hasil belajar siswa. Instrumen SLA mencakup tes Matematika dan Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar. Instrumen ini dikembangkan dengan mengadaptasi instrumen INAP dan *framework* internasional, seperti EGRA, TIMMS, dan PIRLS. Untuk memahami proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru, instrumen SIPPI yang digunakan adalah observasi kelas dan angket guru. Variabel yang dilihat adalah teknik mengajar (aktif/pasif, berpusat pada guru atau siswa), interaksi guru dan siswa, penggunaan media yang sesuai, persepsi guru terkait dengan pengembangan potensi mengajar, dan tingkat ketidakhadiran guru.

Survei akhir dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa untuk literasi dan numerasi. Pada saat survei akhir dilakukan, terdapat siswa yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Untuk itu, tim peneliti melakukan prosedur psikometrik untuk memastikan bahwa hasil studi awal dan studi akhir bisa dibandingkan—karena—instrumen untuk kelas yang berbeda berarti terdapat perbedaan tingkat kesulitan—jumlah soal, struktur domain dan perbedaan *discrimination power* dari item-tes. Prosedur ini menganalisis hasil kerja siswa menggunakan model dua parameter IRT (*item response theory*), yaitu memperhitungkan tingkat kesulitan soal dan *discrimination power*. Model ini memberikan informasi terkait dengan kemampuan siswa berdasar pada dua parameter tersebut. Hasil tes kemudian disetarakan agar hasil survei awal dan survei akhir bisa dibandingkan. Proses ini dilakukan oleh ahli psikometrik. Penyetaraan adalah proses menghubungkan dua atau lebih tes dengan target pengukuran sejenis, tetapi memiliki perbedaan dalam hal parameter struktur, komposisi, dan psikometrik. Rata-rata dan standar deviasi dari kedua tes tersebut bisa jadi tidak sama disebabkan oleh berbagai perbedaan tersebut. Digunakan estimasi terkait dengan parameter item yang menjadi *anchor* sebagai bagian dari proses penyetaraan. Proses penyetaraan ini penting karena terdapat perbedaan kalender akademik pada saat pengambilan data survei awal dan akhir.

Desain studi tersebut tidak menggunakan kelompok kontrol. Untuk itu, dilakukan *robustness check* dengan memperlakukan hasil studi awal (*baseline*) sebagai data dari kelompok pembanding karena data ini dikumpulkan sebelum intervensi dilakukan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pilot memberikan kontribusi terhadap hasil studi akhir. Metode ini membandingkan hasil studi akhir (*endline*) kelas tertentu, misalnya di kelas 1, dengan hasil studi awal di kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 2, dan dihitung selisihnya. Jika hasil *endline* kelas 1 lebih tinggi dari hasil studi awal kelas 2, maka diasumsikan bahwa pilot telah berkontribusi pada peningkatan tersebut. Metode ini diterapkan untuk hasil tes literasi dasar.

Robustness check untuk tes literasi komprehensif dilakukan dengan memperlakukan data awal sebagai data kelompok kontrol serta menggunakan metode analisis *co-variance (g-Ancova)*. Variabel tren peningkatan/penurunan nilai di kelas yang lebih tinggi, kemampuan bawaan (diukur dengan tes *raven*), jenis kelamin, dan latar belakang sosial ekonomi digunakan untuk memprediksi nilai siswa jika tidak diintervensi (kelompok kontrol). Indeks latar belakang sosial ekonomi dikembangkan dari berbagai indikator, seperti kondisi rumah, pengeluaran rumah tangga, ketersediaan toilet di dalam rumah, dan

kepemilikan aset seperti mobil atau sepeda motor. Penggunaan *g-Ancova* memberikan hasil yang lebih akurat untuk penelitian yang menggunakan design *non-randomised* dan *non-equivalent* karena teknik ini mengakomodasi beberapa kelemahan, di antaranya beragamnya data yang mungkin memengaruhi nilai siswa (Widhiarso, 2018).

Untuk mengetahui perubahan dalam proses mengajar diterapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode *the difference-in-differences (DID)* digunakan untuk membuat estimasi dari *net treatment effect* dengan membandingkan hasil pada awal dan akhir intervensi. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui mekanisme monitoring, yaitu *spot check*, interview, dan observasi kelas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot literasi adalah pil ot utama dari program Inovasi, di samping pilot lainnya seperti pilot untuk mendukung pembelajaran inklusif terutama bagi anak dengan kebutuhan khusus, pilot kelas rangkap dan pilot kepemimpinan. Pilot literasi ini terdiri atas dua tahap, yaitu berupa pendidikan/kursus pendek/*short course* tentang bagaimana mengajarkan literasi kepada anak-anak di kelas awal. Kursus literasi tahap 1 terdiri atas tujuh unit pembelajaran, yaitu Unit 1: Apa dan mengapa literasi, Unit 2: Media khusus untuk pembelajaran literasi, yaitu Buku Besar, Unit 3: Kesadaran Fonologis, Unit 4: Membaca kata, Unit 5: Kelancaran membaca, Unit 6: Pemahaman membaca, dan Unit 7: Ketrampilan menulis. Unit-unit dalam kursus pendek literasi pertama ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua semester. Modul literasi pertama kemudian dilanjutkan dengan modul literasi kedua yang terdiri atas lima unit dan diselesaikan dalam satu semester. Unit-unit tersebut adalah Unit 1: Pendahuluan dan penilaian formatif, Unit 2: Penilaian membaca, yaitu *running record*, Unit 3: Pembelajaran berbeda (Unit 4: Membaca terbimbing dan Unit 5: Peningkatan pemahaman (HOTS).

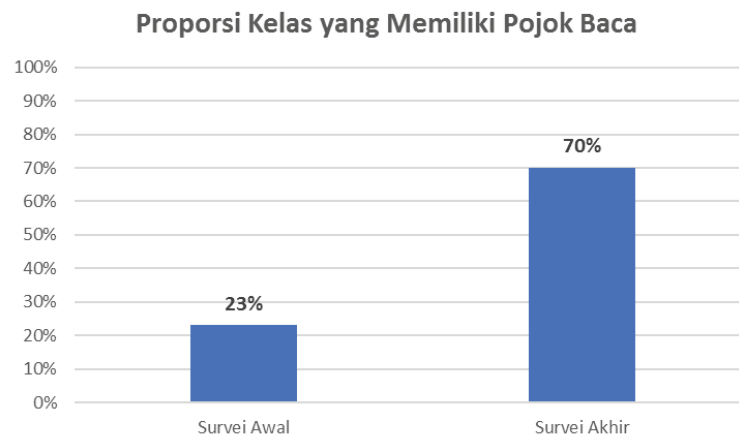
Makalah ini membahas hasil dari kursus pendek literasi tahap pertama. Guru mitra mengikuti pelatihan melalui forum KKG dengan sistem *in on in*. Setelah memperoleh materi, guru menerapkan apa yang dipelajari di dalam kelas mereka dengan pendampingan dari fasilitator daerah. Selain mendapatkan masukan individual dari setiap fasilitator pendamping, para guru juga melakukan proses refleksi bersama melalui pertemuan KKG, untuk membahas pengalaman, tantangan dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya.

Hasil monitoring yang dilakukan melalui proses *pre* dan *post test* terhadap pengetahuan guru menunjukkan adanya peningkatan hasil *post test*. Di antaranya adalah hasil *post test* untuk Unit 1--3 menunjukkan bahwa terdapat 77% sampai 100% guru meningkat pengetahuannya. Namun, nilai rata-rata dari skor *post test* masih rendah, yaitu 52 (dari total nilai 100). *Post test* yang dilakukan kepada 650 guru ini menunjukkan adanya peningkatan, tetapi belum memadai. Hal ini bisa diartikan bahwa guru masih memerlukan dukungan peningkatan kapasitas lanjutan.

Inovasi juga melakukan monitoring dengan metode *spot check*, yaitu observasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Hasil monitoring menunjukkan adanya indikasi perubahan praktik pengajaran dan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembelajaran literasi. Guru menjadi lebih kreatif dalam membuat media yang diutamakan menggunakan bahan lokal untuk memudahkan proses belajar-mengajar. Pojok baca menjadi jauh lebih banyak atau sediaan buku menjadi lebih beragam, terutama buku untuk anak-anak kelas rendah, yaitu buku yang sederhana, bergambar, berwarna, dan menarik.

Pada akhir pelaksanaan pilot Inovasi melakukan studi akhir. Hasil studi akhir memperkuat bukti adanya perubahan pengetahuan, keterampilan, dan cara mengajar guru. Proporsi guru yang menggunakan alat bantu yang sesuai dengan konsep yang diajarkan meningkat dari 40% menjadi 64%. Kelas literat yang

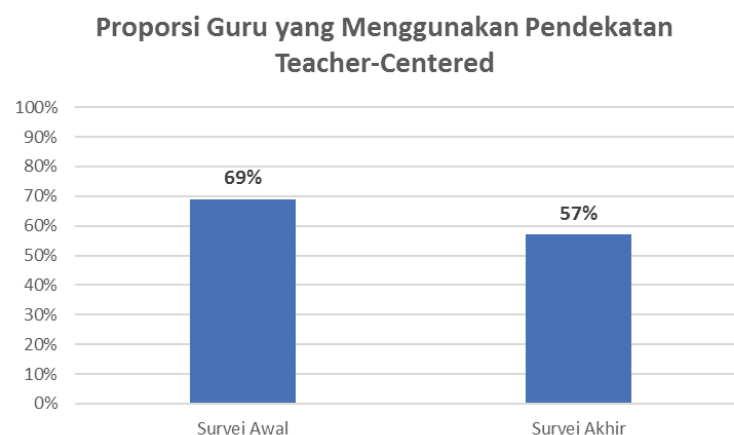
ditunjukkan dengan, salah satunya, pajangan berbagai media belajar di ruang kelas, juga meningkat dari 72% menjadi 85%. Akses bacaan juga meningkat secara tajam seperti ditunjukkan dalam Grafik 1. Pojok baca tersedia di ruang kelas yang berisi tidak hanya buku teks, tetapi juga buku cerita yang disesuaikan dengan jenjang anak.



Grafik 1. Proporsi Kelas yang Memiliki Pojok Baca

Cara mengajar guru juga berubah dan terdapat beberapa indikator, tetapi secara umum bisa digambarkan bahwa lebih sedikit guru yang menerapkan cara mengajar yang berpusat pada guru. Hal ini berarti bahwa guru mendorong agar anak menjadi lebih aktif dalam proses belajar- mengajar. Peningkatan proporsi guru dengan pola pengajaran yang berpusat pada anak bisa dilihat dalam grafik di bawah ini.

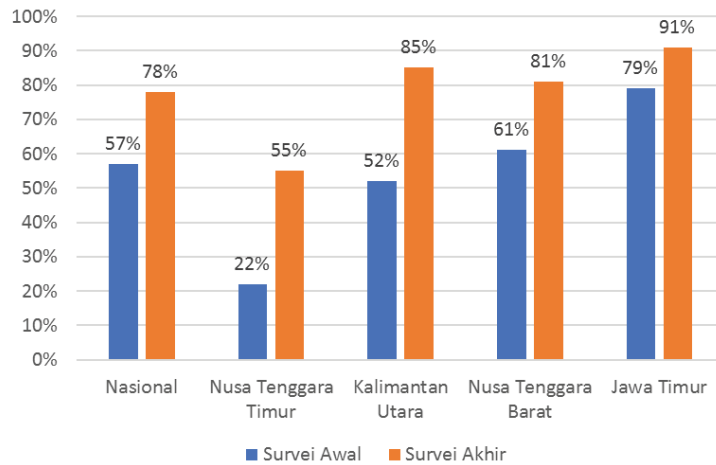
Grafik 2. Proporsi Guru yang Menggunakan Pendekatan *Teacher-Centered*



Sesuai dengan *theory of change* yang telah dipaparkan sebelumnya, Kegiatan intervensi peningkatan kompetensi guru telah menghasilkan peningkatan, baik di aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun praktik mengajar. Pertanyaan berikutnya adalah apakah peningkatan ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Hasil perbandingan antara studi awal dan studi akhir terhadap tes kemampuan literasi siswa menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa di semua provinsi meskipun terdapat keragaman terkait dengan besaran peningkatan.

Persentasi siswa yang berhasil lulus tes literasi dasar secara keseluruhan meningkat 21 poin sebagaimana terlihat pada Grafik 3. Tes literasi dasar ini adalah kemampuan mengenal huruf, suku kata, dan kata.

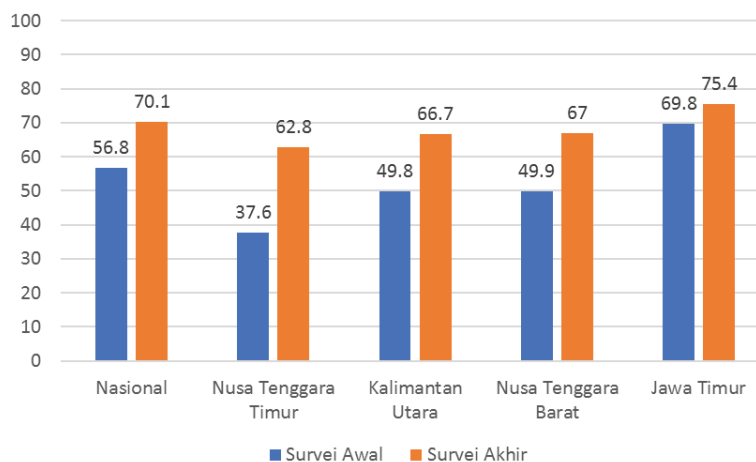
Hasil Tes Literasi Dasar



Grafik 3. Hasil Tes Literasi Dasar

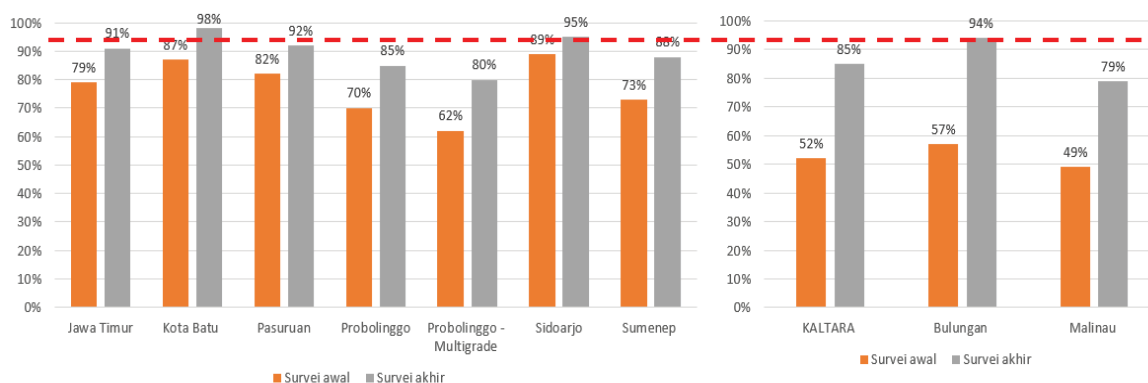
Peningkatan kemampuan literasi juga terjadi pada aspek pemahaman, yaitu peningkatan nilai rata-rata sebesar 13 poin. Grafik 4 di bawah ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi pada tahap awal, tetapi pada studi akhir kesenjangan itu semakin mengecil. Jawa Timur yang nilai rata-ratanya pada studi awal sudah cukup tinggi, yaitu mendekati 70, peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar, hanya sekitar tertinggi 5 poin. Poin peningkatan NTT cukup besar, yaitu lebih dari 20 poin, meskipun skor akhir tetap paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi literasi dasar cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar, tetapi belum memadai untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam hal pemahaman.

Hasil Tes Literasi - Pemahaman



Grafik 4. Hasil Tes Literasi - Pemahaman

Hal menarik lainnya adalah analisis terhadap capaian hasil belajar siswa di Bulungan, Kalimantan Utara, dan di Jawa Timur secara keseluruhan. Grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan yang tajam pada Bulungan terkait dengan persentase siswa yang lulus tes literasi dasar. Di Bulungan peningkatan terjadi lebih dari 30 poin, sedangkan secara keseluruhan di Jawa Timur peningkatan sekitar 10 point. Persentase Bulungan juga lebih tinggi, yaitu 94%, sedangkan di Jawa Timur adalah 91%. Karena jenis pelatihan yang diberikan sama untuk kedua wilayah, bisa disimpulkan bahwa dibutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan peningkatan yang substantial disesuaikan dengan kondisi dan konteks lokal wilayah. Jawa Timur lebih membutuhkan intervensi peningkatan keterampilan pemahaman dibandingkan dengan literasi dasar.



Grafik 5 Persentase Siswa yang lulus tes literasi di Kalimantan Utara dan Jawa Timur

Pembahasan terkait dengan hasil studi akhir terhadap pilot Inovasi di atas menunjukkan bahwa intervensi untuk meningkatkan kompetensi guru telah menghasilkan output seperti yang diharapkan dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa sebagaimana diuraikan dalam *theory of change* Inovasi.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Studi ini menemukan bahwa intervensi pilot Inovasi melalui peningkatan kapasitas guru di dalam mengajarkan membaca bagi kelas awal berkontribusi pada meningkatnya hasil belajar siswa. Temuan studi menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan guru terkait dengan teknik pengajaran literasi dasar telah meningkat dan guru telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Penggunaan media belajar meningkat dibandingkan sebelumnya. Demikian juga ketersediaan pojok baca di kelas meningkat tajam dari 23% ke 70%.

Hasil penelitian ini mengajukan tiga kesimpulan. Pertama, dari hasil studi awal diketahui bahwa kompetensi guru untuk menyampaikan pembelajaran literasi dasar masih perlu ditingkatkan. Guru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai bagaimana mengajarkan literasi di kelas awal. Anak-anak yang terdaftar di sekolah dasar belum memiliki keterampilan membaca dan menulis, sedangkan pelajaran di kelas 1 sudah menggunakan buku teks yang sudah berisi kalimat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kemampuan siswa, kemampuan guru, dan target yang harus dicapai.

Kedua, peningkatan kompetensi yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil studi akhir menunjukkan bahwa persentase siswa yang mampu menyelesaikan tes literasi dasar meningkat dari 57% menjadi 78%. Skor rata-rata untuk tes pemahaman juga meningkat dari 56.8 menjadi 70.1. Penting untuk memastikan bahwa guru mendapatkan

pendampingan ketika menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari training sehingga bisa dipastikan ada tindak lanjut pasca-*training*. Selain itu, pendampingan juga penting untuk memastikan bahwa terjadi proses refleksi, yang dalam hal ini guru juga mendapatkan masukan lanjutan.

Ketiga, pendekatan *one size fit for all* tidak efektif untuk mengatasi kesenjangan kemampuan literasi antarwilayah. Manfaat pilot literasi dasar lebih besar hasilnya di daerah-daerah yang di mana literasi dasarnya memang masih menjadi masalah yang bisa diketahui dari rendahnya hasil survei awal. Peningkatan di survei akhir akan lebih jelas di daerah-daerah ini dibandingkan di daerah-daerah yang hasil survei awalnya sudah tinggi. Sebagai contoh, persentase siswa yang lulus literasi dasar di NTT meningkat 33 poin, sedangkan sementara di Jawa Timur hanya meningkat 11 poin. Namun Meskipun demikian, persentase di NTT masih sangat rendah, yaitu 78%, sedangkan di Jawa Timur persentasenya sudah 91%. Dapat disimpulkan bahwa literasi dasar bukanlah masalah utama untuk Jawa Timur, namun tetapi masih menjadi masalah mendasar untuk NTT. Dengan demikian, sebuah intervensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran harus didasarkan pada pemahaman konteks lokal.

2. Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Pusat. Pertama, Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi guru untuk bisa mengajarkan membaca secara sistematis. Hal tersebut dapat diawali dengan penguatan kemampuan literasi dasar, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan literasi yang mengarah pada HOTS. Kedua, Pemerintah perlu meninjau buku yang digunakan untuk kelas awal agar sesuai dengan kemampuan siswa. Perlu dipertimbangkan agar tidak menerapkan prinsip *one size fit for all* terkait dengan buku sehingga suplai buku juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Ketiga, menyusun panduan kurikulum pelatihan sekolah dasar bagi lembaga yang mencetak calon guru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para calon guru memperoleh pembekalan tentang pengajaran literasi kelas awal. Keempat, meningkatkan kapasitas guru terkait dengan literasi dan numerasi melalui forum KKG sebagai forum resmi pemerintah untuk peningkatan profesi guru. Kelima, memastikan tersedianya akses terhadap buku bacaan yang sesuai dan harus mudah dijangkau oleh para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hickey, S. dan N. Hossain. 2019. *The Politics of Education in Developing Countries. from Schooling to Learning*. Oxford: Oxford University Press
- Kurniati, S. dan D. Suryadarm. 2019. *SMERU Working Paper: The Stock of Highly Skilled Individuals in Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Pritchett, L. *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Washington, DC: Centre for Global Development Book.
- INAP: <https://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/>
- "What Makes a Good Reader: International Findings from PIRLS 2016". TIMSS and PIRLS International Study Centre, Lynch School of Education, Boston College. <http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/pirls/summary/>

PRAKTIK BAIK PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DASAR SISWA SEKOLAH DASAR PADA KELAS AWAL

Indah Pratiwi, Lukman Solihin, Genardi Atmadiredja, Bakti Utama
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia berkaitan dengan proses pembelajaran yang tidak berjalan secara efektif. Salah satu kunci masalahnya adalah rendahnya kualitas pembelajaran kelas awal pada jenjang sekolah dasar yang ditandai dengan kurangnya kemampuan literasi dasar (membaca) di kelas 1, 2, dan 3. Padahal, kemampuan literasi dasar kelas awal sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran tingkat lanjut. Untuk merespons tantangan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Australia di bawah program Inovasi (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) telah melakukan berbagai macam program peningkatan mutu pembelajaran di kelas awal melalui pendidikan literasi dasar. Kajian ini mengambil pelajaran dari program Inovasi fokus: (1) mencermati sistem kerja Inovasi (2) menyusun strategi replikasi, dan (3) menyusun rekomendasi kebijakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut dilakukan penelusuran pustaka terkait dokumen-program Inovasi. Data juga diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan perangkat Inovasi, pemerintah daerah mitra Inovasi, serta observasi di sekolah rintisan, replikasi, dan kontrol. Hasil analisis dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme kerja program Inovasi terbagi dalam lima tahap, yaitu eksplorasi masalah, merancang program, implementasi program, evaluasi, dan advokasi kebijakan. Di beberapa daerah program ini menunjukkan indikasi keberhasilan dilihat dari proses pembelajaran yang menyenangkan, suasana kelas literat, dan respons positif para guru. Oleh karena itu, replikasi penting dilakukan dengan mengadopsi sistem kerja Inovasi. Terakhir, kajian ini merekomendasikan pelunya pengarusutamaan program literasi dasar kelas awal melalui: pemetaan kemampuan literasi dasar siswa kelas awal, penyesuaian kurikulum pembelajaran kelas awal, peningkatan kompetensi guru berbasis KKG, penyediaan buku bacaan berjenjang, serta menciptakan ekosistem sekolah yang literat.

Kata kunci: literasi dasar, kelas awal, sekolah dasar, Inovasi

A. PENDAHULUAN

Peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan angka partisipasi anak dalam pendidikan formal, tetapi belum dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hasil evaluasi program PISA menempatkan Indonesia dalam papan bawah pemeringkatan internasional selama hampir dua puluh tahun berturut-turut. Dengan melihat kondisi ini, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi begitu penting dan mendesak untuk dilakukan.

Permasalahan kualitas pembelajaran di Indonesia secara mendasar terjadi sejak kelas awal jenjang sekolah dasar (SD). Pada jenjang tersebut, masih banyak ditemui peserta didik dengan kemampuan membaca dan menghitung yang rendah. Sebagai gambaran, Studi Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa di kelas 2 SD masih kesulitan membaca (ACDP, 2017). Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia juga

menunjukkan temuan serupa, yakni 46,83 siswa kelas 4 SD tergolong kurang mampu membaca. Rendahnya kemampuan literasi dasar kelas awal SD ini sangat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pembelajaran pada tingkat lanjut.

Menurut Bank Dunia (2018) dalam *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster*, lebih dari 55% murid Indonesia yang menyelesaikan pendidikan SMP masih buta huruf secara fungsional. Artinya, siswa tidak sepenuhnya mampu memahami dan mengambil manfaat dari teks yang mereka baca. Boleh jadi hasil itu merupakan buah dari pembangunan pendidikan yang fokus pada upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi belum diikuti oleh meningkatnya mutu pendidikan. Bank Dunia menyebutkan, semakin banyak siswa bersekolah, tetapi mereka 'tidak belajar' (World Bank, 2018). Dengan mengacu pada permasalahan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Australia di bawah program Inovasi (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) telah melakukan kemitraan strategis dalam rangka mencari solusi yang tepat pada permasalahan pendidikan di tanah air. Salah satu program pada kemitraan ini adalah peningkatan mutu pembelajaran siswa kelas awal melalui pendidikan literasi dasar berbasis pelajaran membaca.

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil pelajaran dari program Inovasi yang memberi perhatian pada peningkatan literasi dasar di kelas awal SD. Untuk itu, lingkup kajian dibatasi pada tiga hal, yaitu:

- (1) mencermati sistem kerja yang dilakukan Inovasi dalam mengatasi persoalan literasi dasar di kelas awal;
- (2) menyusun strategi replikasi untuk mengatasi persoalan serupa di daerah lain; serta
- (3) menyusun rekomendasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran literasi dasar di kelas awal.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pembelajaran Literasi Dasar Kelas Awal

Pembelajaran literasi dasar di kelas awal merupakan bagian yang sangat vital dalam proses pembelajaran di kelas. Literasi bukan hanya berhenti pada upaya membuat siswa "melek aksara", tetapi jauh dari itu pembelajaran literasi juga harus mampu memberikan pembiasaan pada siswa agar senang membaca. Secara sederhana, literasi didefinisikan sebagai kemampuan baca tulis. Namun, literasi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahasa seseorang, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Prioritas.org, 2014).

Pembelajaran membaca di kelas awal berbeda dengan pembelajaran di kelas atas. Di kelas awal siswa masih mulai dikenalkan huruf dan bunyi, padahal tidak semua guru memahami metode tersebut. Sebagian guru, bahkan masih melakukan metode ceramah pada siswa kelas awal. Dengan demikian, hambatan terbesar dalam gagalnya literasi dasar kelas awal adalah besar disebabkan oleh metode mengajar guru yang tidak tepat dalam mengajarkan membaca dan menulis di kelas awal.

Dalam artikel yang berjudul "Early Literacy Research, 2006–2015: A Decade of Measured Progress" sudah ditemukan pola pengajaran yang baik bagi siswa di kelas awal yang belum mengenal huruf, misalnya membaca dengan *phonics* (membaca berdasarkan bunyi tertentu), kesadaran fonologis, memperkaya kosakata, dan menulis berdasarkan bunyi tertentu. Metode yang salah akan membuat siswa kesulitan membedakan jenis huruf dengan bunyi pelafalnya. Ditambah lagi pembelajaran membaca dan menulis permulaan kerap dikemas dengan tidak menarik dan tidak sesuai dengan karakteristik siswa.

2. Problem Driven Iterative Adaptation

PDIA merupakan pendekatan untuk memahami dan memecahkan persoalan melalui persoalan itu sendiri (*problem driven*). Pendekatan itu berbeda dengan cara yang jamak dilakukan, yaitu berbasis solusi (*solution driven*), yang sering kali justru mengabaikan pemetaan masalah secara kontekstual sehingga gagal menyelesaikan masalah (<https://bsc.cid.harvard.edu>). Pendekatan PDIA bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu:

- (1) solusi lokal untuk masalah lokal
- (2) mendorong masalah agar terjadi penyimpangan/perubahan positif
- (3) mencoba, belajar, mengulangi, dan
- (4) meluaskan skala melalui difusi

Ada sebanyak sembilan langkah atau tahap yang dilakukan oleh Inovasi dalam melaksanakan PDIA (Inovasi, 2017). Tahap pertama dilakukan melalui eksplorasi dengan cara melihat konteks masalah di suatu daerah. Eksplorasi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui studi singkat untuk menghasilkan data dan tantangan. Dalam tahap ini Inovasi juga mengadakan pertemuan di tingkat kabupaten untuk mengidentifikasi tema dan prioritas program. Tahap kedua adalah tahap sintesis, yaitu tahap pengumpulan informasi dari hasil eksplorasi serta memvalidasi dan mengidentifikasi potensi peluang untuk digunakan pada proses perancangan.

Tahap selanjutnya adalah perancangan atau desain. Pada tahapan ini yang perlu dipahami adalah bahwa Inovasi tidak selalu mencari gagasan baru, tetapi bisa dengan mengoptimalkan solusi yang sebetulnya sudah tersedia dan dianggap mampu mengatasi masalah dalam konteks lokal tersebut.

Setelah ditemukan desain yang sesuai, gagasan yang sudah ada akan diujicobakan dalam skop yang kecil, yaitu satu sekolah/satu kelas untuk melihat bagaimana potensi gagasan tersebut dijalankan. Setelah uji coba selesai, Inovasi akan melakukan kaji ulang dan iterasi. Hal ini ditujukan untuk merefleksikan kegiatan uji coba gagasan dengan mendokumentasikan tantangan dan solusi serta pelajaran yang dapat dipetik selama proses uji coba. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah melalui program rintisan (*pilot*). Tahap ini merupakan tahap penentuan gagasan dan solusi yang dinyatakan teruji pada langkah “uji coba gagasan”. *Pilot* akan dijalankan dalam waktu yang lebih lama. Setelah langkah perancangan selesai, langkah berikutnya adalah tahap evaluasi.

3. Replikasi Program

Dalam kajian ini pendekatan replikasi program mencakup tiga pengertian, yaitu *scaling up*, *scaling out*, dan *scaling deep*. Secara garis besar, menurut Riddell dan Moore (2015), *scaling out* adalah pendekatan replikasi dengan cara menyebarkan sebuah inovasi pada penerima manfaat lainnya. *Scaling out* dapat diartikan sebagai upaya menyebarluaskan program yang dianggap sukses pada daerah yang tidak diintervensi. Selama proses replikasi, perlu juga mempertimbangkan dampak sosial yang menuntut adanya perubahan pada institusi, kebijakan, dan hukum atau membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari dalam organisasi untuk mengubah aturan main yang sudah ada dalam sistem. Oleh karena itu, Riddell dan Moore mengategorikan hal ini sebagai *scaling up*. Pada pihak lain, *scaling deep* menekankan adanya perubahan pada cara berpikir, budaya kerja, dan nilai-nilai yang tertanam sebelum adanya program serta meningkatkan relasi komunitas terhadap program.

C. METODE PENELITIAN

Pada tahap paling awal dari kajian ini, kami melakukan penelusuran pustaka. Hasil studi *baseline* yang dilakukan Inovasi bersama beberapa lembaga mitra sangat membantu dalam memahami konteks

permasalahan yang melatarbelakangi munculnya berbagai program literasi di kelas awal yang dijalankan oleh Inovasi. Khusus wilayah NTT, hasil studi ACDP 040 yang juga menjadi acuan Inovasi juga menjadi jalan penting bagi kami memahami program Inovasi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur. Penelusuran pustaka juga dilakukan untuk memahami program Inovasi, baik terkait dengan gagasan yang mendasarinya dan mekanisme kerja yang dijalankan. Untuk dua hal terakhir ini, kami terbantu karena adanya beberapa dokumen, seperti “Berita Inovasi”, “Lembar Fakta Inovasi”, dan laporan program Inovasi.

Selanjutnya, juga dilakukan penelusuran data lapangan tiga provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada setiap lokasi tersebut, dilakukan observasi di ruang-ruang kelas, baik pada sekolah rintisan (Pilot) program Inovasi, sekolah pengimbasan (program replikasi oleh pemerintah daerah), dan sekolah kontrol (sekolah yang tidak mendapat program literasi dasar kelas awal dari Inovasi), maupun pemda. Selama observasi tersebut, diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana program ini (pilot dan replikasi) diimplementasikan dalam proses pembelajaran serta perbandingannya dengan sekolah yang tidak diintervensi.

Selama penelusuran data lapangan juga dilakukan wawancara terhadap perangkat Inovasi di daerah mulai dari *level provincial manager* hingga *district fasilitator*, birokrat mulai dari bupati hingga staf di lingkungan dinas pendidikan kabupaten, fasilitator daerah sebagai aktor yang menjembatani gagasan dari Inovasi ke sekolah sasaran, serta guru dan kepala sekolah sebagai representasi dari sekolah mitra/sasaran. Secara umum wawancara dilakukan untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, - untuk memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai implementasi dari program literasi dasar kelas awal yang dijalankan Inovasi, tetapi tidak tertuang dalam pustaka. Kedua, wawancara ini juga sekaligus sebagai langkah triangulasi data yang diperoleh dari sumber yang lain. Selain wawancara di lapangan, triangulasi data juga dilakukan melalui serangkaian diskusi bersama perangkat Inovasi di tingkat Pusat. Dengan berbagai langkah tersebut, diupayakan sedemikian rupa agar benar-benar diperoleh data yang sahih. Tahap pengolahan dan analisis data dimulai dengan melakukan *filtering* untuk mendapatkan data yang dianggap sahih. Data yang sahih tersebut kemudian dipilih berdasarkan tema yang menjadi pokok permasalahan kajian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sketsa Permasalahan Literasi Dasar di Beberapa Provinsi Mitra Inovasi

Penelitian ini dilaksanakan empat kabupaten yang terdapat di tiga provinsi mitra Inovasi. Di Kalimantan Utara penelitian dilakukan di Kabupaten Bulungan. Di Nusa Tenggara Barat, penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Pada setiap daerah mitra tersebut, Inovasi telah melakukan pemetaan masalah literasi dasar. Berikut adalah sketsa permasalahan literasi dasar di setiap daerah tersebut.

a. Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan)

Berdasarkan hasil kajian cepat, melalui *Rapid Participatory Situation Analysis* (RPSA) yang dilakukan oleh Inovasi, terdapat empat permasalahan dalam pembelajaran di kelas awal, yaitu:

- a. Guru kurang terampil mengajar Bahasa Indonesia,
- b. Ketiadaan buku bacaan yang menarik,
- c. Kepala SD tidak cukup melibatkan orang tua,
- d. Kurangnya sinergi dalam kebijakan tentang literasi. Sebetulnya hasil analisis tersebut merupakan pendalaman kajian sebelumnya, yaitu survei AKSI yang dilakukan oleh Kemdikbud yang menyatakan bahwa sebanyak 46,83% pelajar kelas 4 SD kurang mampu membaca.

Selain melakukan pendalaman kualitatif melalui RPSA, Inovasi juga melakukan kajian internal di tingkat provinsi melalui Survei Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (SIPPI) yang menyatakan bahwa terdapat 84,76% siswa merasa menyukai membaca buku. Sayangnya, hal ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Hal ini terbukti di Kabupaten Bulungan pada kajian yang sama menyatakan bahwa dari 4.055 judul buku hanya sebanyak 393 jenis buku yang sesuai untuk dibaca di kelas awal. Dari hasil survei tersebut, ditarik asumsi bahwa budaya senang membaca siswa tidak selaras dengan ketersediaan buku bacaan yang seharusnya mampu membangun imajinasi dan karakter pada anak. Dalam temuan SIPPI juga diperlihatkan profil guru dan kepala sekolah. Secara umum, tingkat pendidikan guru di Kabupaten Bulungan berasal dari D-4/S1 Keguruan (57,69%), SMA/SMK/MA (26,92%), dan D-4/S1 non-keguruan (7,69%). Hampir sebagian besar guru mengikuti Uji Kompetensi Guru, guru yang mendapatkan sertifikasi hanya sekitar 60%. Data SIPPI juga memperlihatkan 46% guru tidak dapat menunjukkan contoh RPP.

b. Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Utara)

Salah satu studi yang digunakan Inovasi untuk memetakan permasalahan literasi dasar di Kabupaten Lombok Utara adalah Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2016. Hasil riset aksi menunjukkan bahwa sebanyak 46,83% siswa SD kelas 4 di Indonesia tergolong kurang terampil membaca. Keterampilan ini didefinisikan sebagai keretampilan dalam hal memaknai teks, menerapkan dan merefleksikan teks, serta mengaitkan isi teks dengan konteks kehidupan sehari-hari. Hasil AKSI tersebut menyatakan bahwa nilai rata-rata provinsi NTB 70-80 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata nasional.

Selain berdasar pada AKSI, Inovasi juga melakukan studi diagnostik atau studi dengan metode kualitatif untuk mengukur masalah pokok dalam pembelajaran. Dari hasil yang studi diagnostik ditemukan bahwa guru adalah akar permasalahan utama. Permasalahan guru dipicu oleh kurangnya pelatihan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Data ini cukup menarik karena pada dasarnya guru memiliki sarana konkret untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui MGMP dan KKG. Namun, hal ini belum dilakukan secara optimal karena terkendala pembiayaan yang masih minim.

c. Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur)

Semua informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa latar belakang pelaksanaan program Inovasi di Sumba dapat ditelusuri dari hasil studi Kemitraan untuk Pengembangan dan Analisis Pendidikan yang bertajuk “Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Dasar di SD di Sumba”. Studi tersebut menemukan bahwa lebih dari 30% siswa kelas dua SD di Sumba belum bisa membaca. Dalam kajian tersebut juga teridentifikasi lima masalah pendidikan dasar di Sumba yang mendesak untuk ditangani. Kelima permasalahan tersebut adalah:

- (1) kualitas guru yang relatif rendah,
- (2) ketersediaan dan distribusi guru yang tidak merata,
- (3) terbatasnya alokasi sumber daya berkelanjutan,
- (4) kualitas pengajaran yang rendah,
- (5) permasalahan terkait dengan kesiapan untuk belajar (ACDP, 2016).

Inovasi juga melakukan studi *baseline* di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Hasil studi *baseline* ini menguatkan temuan studi sebelumnya, terutama terkait dengan permasalahan kualitas dan kuantitas guru tingkat SD di Sumba. Studi *baseline* menemukan bahwa terdapat kekurangan jumlah guru PNS serta distribusi guru yang tidak merata di Sumba. Di beberapa sekolah, bahkan hanya ditemui satu orang pegawai negeri sipil sebagai kepala sekolah, sedangkan guru lainnya adalah guru sementara atau guru kontrak (INOVASI, 2019). Selama ini pemerintah kabupaten telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan

mengangkat guru kontrak. Solusi semacam ini tetap saja tidak dapat menghapus permasalahan rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru serta rendahnya kesejahteraan guru.

Studi *baseline* Sumba juga menyoroti masalah tata kelola sekolah. Dalam permasalahan ini, kepala sekolah dipandang belum dapat berperan optimal dalam menciptakan manajemen efektif di sekolahnya masing-masing. Rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah ini berakibat pada rendahnya pengawasan kepada guru dan siswa, munculnya permasalahan perekrutan guru kontrak, hingga ketidakakuratan data pokok pendidikan. Pada ujungnya pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud.

2. Program Literasi Dasar Kelas Awal oleh Inovasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan literasi dasar di beberapa kabupaten mitra di atas, Inovasi menjalankan beberapa program di setiap kabupaten. Di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) Inovasi menjalankan program penguatan literasi. Di Kabupaten Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat) Inovasi menjalankan program pembelajaran literasi kelas awal (Pelita). Di Kabupaten Sumba Barat Inovasi menjalankan program *Leadership for Learning* dan Penguatan Literasi. Di Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) Inovasi menjalankan program Penguatan Literasi dan Pembelajaran Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMBBI).

Secara umum sistem kerja Inovasi dalam meningkatkan literasi dasar di kelas awal dapat dikategorikan ke dalam lima tahapan kerja: (1) eksplorasi masalah; (2) merancang program; (3) implementasi program; (4) evaluasi; dan (5) advokasi kebijakan dan penganggaran. Kelima peran itu dilakukan secara bertahap untuk menjamin program dapat berjalan baik. Berikut gambaran setiap tahapan kerja yang dilakukan oleh Inovasi tersebut.

a. Eksplorasi Masalah

Tahap eksplorasi masalah merupakan tahap penting untuk memahami persoalan pendidikan di daerah. Program Inovasi berupaya menjalankan program berdasarkan temuan masalah di lapangan (*problem driven*). Hal ini sejalan dengan upaya untuk “memahami masalah dan menemukan solusi lokal” agar program tepat sasaran dan sesuai dengan konteks. Terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk memahami persoalan di lapangan, yaitu studi *baseline* untuk memetakan kemampuan literasi siswa dan pemahaman konten pembelajaran oleh guru melalui SLA ; RPSA, dan SIPPI.

Hasil studi pemetaan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA). Hasil pemetaan menjadi dasar guna mengerucutkan masalah untuk dikupas bersama faktor yang menyebabkan masalah di bidang pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, guru, kepala sekolah, hingga pemerintah daerah. Melalui PDIA pemangku kepentingan di bidang pendidikan duduk bersama untuk memahami masalah sesuai dengan konteks lokal, mengidentifikasi akar persoalan, menemukan solusi, menguji coba, serta merefleksikan hasilnya. Hasil pemetaan melalui studi *baseline*, RPSA, serta SIPPI bermanfaat sebagai bahan awal guna menunjukkan persoalan pendidikan kepada pemangku kepentingan di daerah. Selanjutnya, eksplorasi masalah melalui pendekatan PDIA menjadi dasar untuk menyusun intervensi program yang tepat dan sesuai dengan konteks lokal, menentukan sekolah dan gugus KKG rintisan, serta strategi untuk meluaskan replikasi program (*scale out*).

b. Merancang Program

Tahap merancang program didasarkan pada hasil eksplorasi masalah, sebagaimana digambarkan di atas, yang melibatkan para pemangku kepentingan (dinas pendidikan, bappeda, pengawas, kepala sekolah, dan guru). Dalam hal program untuk meningkatkan hasil pembelajaran literasi dasar di kelas awal, identifikasi masalah umumnya mengarah pada rendahnya kemampuan guru mengajar serta minimnya penguasaan

guru tentang materi pembelajaran. Untuk itu, Inovasi bersama dinas pendidikan menyusun program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran literasi dasar.

Untuk menjamin agar hasil pelatihan dapat dipraktikkan oleh guru di dalam kelas, proses pelatihan dirancang dengan metode *in – on – in*. Dalam hal ini, guru dilatih satu materi, kemudian selama sebulan ke depan guru mempraktikkannya di dalam kelas dengan didampingi oleh fasilitator daerah (fasda). Modul pelatihan terdiri atas tujuh unit pembelajaran literasi ditambah satu unit pelatihan untuk memahami instrumen capaian belajar siswa. Setiap unit dilatihkan dan dijalankan selama satu bulan.

Keberadaan fasda merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Mereka bertugas untuk melatih dan mendampingi guru dalam mempraktikkan pembelajaran di dalam kelas, serta menjadi rekan sejawat dalam mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran dan menemukan solusinya. Untuk itu, dalam merancang program perlu disusun kriteria pemilihan fasda agar mereka dapat – melaksanakan program itu secara maksimal. Kriteria pemilihan fasda mempertimbangkan beberapa hal: (1) komitmen yang besar untuk melaksanakan dan menyukseskan program; (2) keterkaitan program literasi dasar untuk kelas awal dengan pekerjaan sehari-hari mereka; serta (3) calon fasda berasal dari gugus KKG yang akan diintervensi.

Komitmen fasda menjadi syarat utama karena pekerjaan mereka merupakan “kerja tambahan” dari profesi utama mereka, baik sebagai guru kelas awal (kelas 1, 2, dan 3), kepala sekolah, maupun sebagai pengawas. Di luar itu, fasda juga sebaiknya dipilih dari gugus tempat mereka sehari-hari bertugas agar pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan efisien (tidak terkendala jarak) dan program berjalan dengan baik.

c. Implementasi Program

Pelaksanaan program melibatkan para pemangku kepentingan serta memanfaatkan sistem yang sudah ada, yaitu mengoptimalkan peran kelompok kerja guru (KKG). Dalam pelaksanaan program, tahap *pertama* ialah menentukan gugus KKG dan sekolah yang akan menjadi rintisan sasaran program (*pilot*). Gugus KKG dan sekolah rintisan dipilih berdasarkan pertimbangan hasil pemetaan dan eksplorasi masalah serta masukan dari dinas pendidikan. Program rintisan menjadi titik pijak guna pengembangan replikasi program di tahap berikutnya.

Kedua, setelah ditentukan gugus dan sekolah rintisan, langkah selanjutnya ialah merekrut – fasda sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada tahap ini, baik guru kelas awal, kepala sekolah, dan pengawas yang tertarik atau direkomendasikan oleh sekolah maupun dinas pendidikan menyerahkan berkas yang diperlukan berupa kelengkapan administrasi dan *curriculum vitae*. Setelah lolos seleksi administrasi, calon fasda diseleksi melalui wawancara oleh sebuah tim yang anggota berasal dari Inovasi, dinas pendidikan, dan bappeda. Calon juga diharuskan mempraktikkan metode mengajar dalam *micro teaching*.

Ketiga, setelah fasda terpilih, dilakukan ‘pelatihan untuk pelatih’ atau *training of trainers* (ToT) sebagai langkah awal menyiapkan fasda sebagai pelatih di gugus masing-masing. Materi pelatihan terdiri atas tujuh unit pembelajaran literasi dan satu unit instrumen penilaian capaian siswa. Fasda juga dilatih keterampilan eksplorasi masalah dengan pendekatan PDIA agar dapat mempraktikkan dan mendampingi guru mengenali masalah dan menemukan solusi dalam proses pembelajaran. Sebelum terjun untuk melatih dan mendampingi guru, setiap fasda diminta mempraktikkan hasil pelatihan sebagai modal dalam menghadapi persoalan yang mungkin dihadapi ketika melatih dan mendampingi guru.

Keempat, pelatihan guru kelas awal dari sekolah yang menjadi rintisan program oleh para fasda. Pelatihan ini diikuti oleh para guru kelas awal pada sekolah di bawah gugus KKG rintisan. Pelatihan dilakukan dengan

metode *in – on – in*. Dalam hal ini, satu materi diajarkan selama satu hari, kemudian selama sebulan ke depan guru diminta mempraktikkan hasilnya di dalam kelas sekali dalam seminggu sekali.

Kelima, pengawasan dan pendampingan oleh fasda, baik dilakukan secara langsung dengan cara mendampingi dan memberi masukan dalam proses pembelajaran di kelas maupun dengan memanfaatkan media sosial. Pada pendampingan yang memanfaatkan media sosial, guru diminta untuk merekam proses pembelajaran di dalam kelas melalui perangkat video dari telepon pintar, lalu mengirimkan atau mengunggahnya di media sosial. Baik fasda maupun guru lain dapat memberikan komentar, masukan, serta apresiasi. Cara ini cukup efektif, terutama untuk memonitor perkembangan mengajar guru di sekolah pelosok.

Keenam, replikasi atau penyebarluasan program (*scale out*) kepada gugus KKG dan sekolah di luar rintisan. Pada tahap ini Inovasi bersama pemerintah daerah (dinas pendidikan dan bappeda) merancang dan mengimplementasikan perluasan program di luar sekolah rintisan. Program ini ditempuh dengan menggunakan dana APBD. Pada tahap ini Inovasi mendampingi pemda untuk menyusun rencana dan anggaran sesuai dengan kemampuan APBD guna melatih guru sesuai 'dengan standar pelatihan Inovasi'. Inovasi juga mendampingi proses merekrut fasda, pelatihan untuk pelatih (ToT), pelatihan guru kelas awal, serta pendampingan di sekolah.

Sebagai catatan, salah satu upaya yang cukup efektif untuk melakukan *scale-out* secara luas adalah dengan mengoptimalkan peran gugus KKG. Dalam hal ini, setiap KKG diharapkan memiliki fasilitator sendiri sehingga proses pelatihan dan pendampingan guru kelas awal cukup dilakukan di tingkat gugus. Dengan mengoptimalkan gugus KKG, biaya pelatihan dapat ditekan karena pelatih dan pendamping (fasda) berasal dari kalangan mereka sendiri, persoalan lokal dapat juga dipetakan sekaligus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

d. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan suatu program. Dalam menilai hasil intervensi program, Inovasi melakukan dua studi, yaitu studi kualitatif guna melihat perkembangan pembelajaran di dalam kelas, baik melalui observasi maupun wawancara; serta studi kuantitatif sebagai *endline* untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Studi *endline* belum sepenuhnya selesai dilakukan karena program masih berjalan.

e. Advokasi

Peran lain yang tak kalah penting dalam program ini adalah advokasi kebijakan dan penganggaran. Bentuk advokasi, *pertama* dapat dilihat pada perencanaan dan alokasi anggaran dalam APBD, terutama untuk pelatihan guru kelas awal. Sebetulnya Inovasi secara eksplisit dalam perjanjian kerja sama (MoU) telah meminta pemda yang mereka intervensi untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung program. Namun, alokasi dan penggunaan anggaran ini sangat variatif hasilnya dan bergantung pada pendampingan oleh Inovasi serta kecakapan pemda dalam merencanakan dan menjalankan program.

Kedua, Inovasi juga mendorong pemda memiliki kebijakan pendukung selain peningkatan kapasitas guru, seperti aturan untuk mendukung tersedianya buku bacaan berjenjang bagi siswa kelas awal (misalnya dalam petunjuk penggunaan Bosda untuk pembelian buku nonpelajaran); mendorong optimalisasi peran perpustakaan desa dan taman bacaan; serta mendorong dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah.

3. Praktik Baik dan Catatan Kritis

Dalam penelitian ini telah dilakukan kajian lapangan melalui observasi dan wawancara di tiga daerah, yaitu Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Utara), dan Nusa

Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur). Dalam rangka menyusun strategi replikasi yang optimal, kami juga menemukan beberapa catatan kritis terkait dengan penyelenggaraan program Inovasi, mulai dari tahap eksplorasi masalah, perancangan program, implementasi, evaluasi, dan advokasi. Berikut adalah catatan kritis terhadap setiap tahapan kerja yang dilakukan dalam program Inovasi.

Pertama, pada tahap eksplorasi masalah, pendekatan PDIA tidak sepenuhnya dijalankan. PDIA umumnya dijalankan saat pemetaan dan eksplorasi masalah di awal penyelenggaraan program, tetapi pada praktik selanjutnya tidak sepenuhnya dikawal. Selain itu, dalam proses eksplorasi masalah ada kalanya dinas terkait “menyerahkan” sepenuhnya kepada Inovasi. Terdapat “ketidakpercayaan diri” apabila pemda mendefinisikan masalahnya sendiri. Ada juga pandangan bahwa tidak “objektif” apabila mereka mendefinisikan sendiri masalah yang dihadapi.

Proses yang demikian dapat berdampak pada beberapa hal, antara lain (1) dalam proses eksplorasi masalah, transfer pengetahuan tidak sepenuhnya terjadi, dan pemda tidak sepenuhnya menguasai pengetahuan dan keterampilan mendefinisikan masalah; (2) sebagai lanjutan dari yang pertama, “kepemilikan” terhadap masalah boleh jadi bisa berkurang; (3) upaya menemukan solusi lokal dapat terhambat; dan (4) rancangan solusi boleh jadi tidak dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan.

Kedua, pada tahap merancang program ada kalanya penentuan sekolah rintisan dan penentuan fasda tidak berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang diperlukan dalam menyukseskan program.

Ketiga, pada tahap implementasi tampak bahwa terdapat faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Faktor tersebut sejauh ini dapat dipetakan menjadi dua, yakni (1) tim Inovasi di daerah sebagai pelaksana program; dan (2) pemda sebagai penerima dan mitra program. Kondisi tim yang cakap dan solid apabila didukung oleh “penerimaan” Pemda yang akomodatif dan responsif dapat menghasilkan capaian yang maksimal.

Keempat, di tahap evaluasi, terutama untuk program yang berkenaan dengan penguatan literasi dasar di kelas awal, peningkatan hasil belajar tidak terjadi secara signifikan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kajian guna memahami persoalan lain yang mungkin menghambat capaian belajar siswa.

Kelima, sejauh ini advokasi yang dilakukan telah mendorong pemda memiliki perhatian khusus terhadap masalah literasi dasar, ditunjukkan dengan hadirnya perencanaan program dan penganggaran. Meskipun demikian, di tingkat pelaksanaannya belum sepenuhnya terjamin apakah pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana program rintisan yang dilakukan Inovasi. Perlu pendampingan dan pengawasan bersama untuk memaksimalkan pelaksanaan program replikasi (*scale out*) agar berjalan secara optimal.

Di luar lima hal di atas, terdapat persoalan yang lebih krusial, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas SDM para pengambil kebijakan di daerah agar program yang dilakukan Inovasi dapat berlanjut, bahkan dipraktikkan untuk menyelesaikan persoalan lain di bidang pendidikan selain masalah literasi dasar di kelas awal. Kapasitas SDM menjadi kunci agar pemda dapat secara mandiri mengidentifikasi masalah, merancang program, mengimplementasikan program, serta melakukan evaluasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan melihat capaian positif dari penyelenggaraan program Inovasi, upaya replikasi atas program ini penting untuk dilakukan. Replikasi program akan berhasil apabila peran Inovasi, sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) dengan menyesuaikan

kondisi dan karakteristik SDM setempat. Secara teknis, ada tiga tahap yang dapat dilakukan oleh pemda untuk mereplikasi program peningkatan literasi dasar bagi kelas awal ini.

a. Tahap Persiapan

1) Identifikasi Masalah dan Kompatibilitas Program

Pada tahap ini hal utama yang perlu dilakukan ialah melakukan identifikasi masalah dan kompatibilitas program. Identifikasi masalah yang dimaksud berkenaan dengan (1) identifikasi masalah literasi dasar siswa kelas awal; dan (2) identifikasi masalah di lingkup organisasi guna mengukur kesiapan sumber daya. Identifikasi masalah literasi dasar dilakukan melalui kajian pemetaan terhadap kemampuan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Identifikasi masalah di lingkup organisasi dapat dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan pendekatan PDIA guna menemukan akar masalah.

2) Merancang Program

Pada tahap merancang program perlu didefinisikan secara jelas mengenai konsep program, metode dan tahapan pelaksanaan, serta *output* yang ingin dicapai. Rancangan program juga meliputi kriteria penentuan sekolah dan gugus rintisan serta kriteria fasda.

3) Mempersiapkan Tim Pelaksana

Setelah rancangan program disusun, tahap berikutnya ialah melakukan rekrutmen fasda untuk mendampingi setiap gugus KKG rintisan. Rekrutmen fasda didasarkan pada kriteria ideal agar pelaksanaan program berjalan baik. Fasda dilatih PDIA guna membekali keterampilan eksplorasi masalah dan menemukan solusi lokal yang dapat berguna dalam proses pendampingan.

a. Tahap Implementasi

Dalam tahap pelaksanaan program terdapat empat hal yang dilakukan. *Pertama*, menentukan gugus KKG dan sekolah rintisan. Gugus KKG dan sekolah rintisan dipilih sesuai kriteria untuk menjamin ketercapaian program. *Kedua*, pelatihan guru kelas awal yang dilakukan oleh fasda dengan sistem *in – on – in*. *Ketiga*, *monitoring* dan pendampingan oleh fasda untuk memantau praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. *Keempat*, melakukan *scale out* program ke sekolah nonrintisan setelah dilakukan evaluasi pada program rintisan.

b. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dinas pendidikan melakukan asesmen dan penilaian untuk mengetahui keberhasilan program, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aspek kuantitatif yang perlu diperhatikan ialah peningkatan hasil belajar siswa, sedangkan aspek kualitatifnya ialah perubahan dalam proses pembelajaran, meningkatnya motivasi guru dan siswa dalam pembelajaran, serta perubahan suasana kelas menjadi lebih literat.

2. Rekomendasi

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Karena pentingnya upaya peningkatan kemampuan literasi dasar di kelas awal, di tingkat kementerian, kami menyarankan perlu dilakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) program peningkatan kemampuan literasi dasar di kelas awal, dengan cara:

- 1) memetakan kemampuan literasi dasar siswa di kelas awal dan menentukan daerah prioritas untuk intervensi program;
- 2) menyesuaikan kurikulum pembelajaran literasi dasar di kelas awal;
- 3) meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru kelas awal melalui pelatihan berbasis KKG dan memastikan hasil pelatihan dipraktikkan di dalam kelas;

- 4) menjamin tersedianya buku bacaan bejenjang di sekolah melalui petunjuk teknis penggunaan dana BOS;
- 5) menciptakan ekosistem yang literat di sekolah sesuai dengan Panduan Gerakan Literasi Sekolah;
- 6) mendorong pemda untuk menjalankan program peningkatan literasi dasar kelas awal dengan menyusun kebijakan dan melakukan pendampingan.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah perlu mendukung program peningkatan kemampuan literasi dasar di kelas awal, dengan cara:

- 1) melakukan pemetaan dan eksplorasi masalah literasi dasar sesuai dengan konteks lokal;
- 2) melakukan replikasi program peningkatan literasi dasar;
- 3) melakukan pelatihan dan pendampingan kepala sekolah untuk meningkatkan tata kelola yang mendukung pembelajaran di kelas awal;
- 4) meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru kelas awal melalui pelatihan berbasis KKG dan memastikan hasil pelatihan dipraktikkan di kelas;
- 5) menjamin tersedianya buku bacaan bejenjang di sekolah;
- 6) menciptakan ekosistem yang literat di sekolah sesuai dengan Panduan Gerakan Literasi Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- ACDP. 2017. *Strategi Peningkatan Efektifitas Pendidikan Dasar di Sekolah/Madarasah di Sumba, NTT*. Jakarta: Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (ACDP).
- Carter, Becky, et al. 2018. *Scaling Up Inclusive Approaches for Marginalised and Vulnerable People*. London: United Nation University.
- Center for International Development. 2018. *PDIA Toolkit A DIY Approach to Solving Complex Problems*. Harvard University.
- Davies, Kelly Shiell, et al. 2015. "Scaling-Up Innovation. What Works Scotland". Dalam <http://whatworksscotland.ac.uk/wp-content/uploads/2015/06/WWS-EB-evidence-review-Scaling-Up-Innovations-June-2015.pdf> diunduh pada 18 Agustus 2018.
- Hodgins, Steve, et al. 2014. "Scaling Up and Maintaining Effective Large-Scale Community Health Worker Programs". Dalam https://www.mchip.net/sites/default/files/mchipfiles/14_CHW_Scale.pdf diunduh pada 18 Agustus 2019.
- INOVASI. 2016. "Sembilan Tahap Inti Proses PDIA" INOVASI. https://www.inovasi.or.id/wp-content/uploads/2018/01/171002-PDIAflyer-portrait_ID-1.pdf.
- INOVASI. 2017, November 1. "INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia". Diambil kembali dari INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia: <https://www.inovasi.or.id/id/story/guru-baik-sebuah-pemikiran-baru-bagi-guru-guru-di-indonesia/>.
- INOVASI. 2017. *Mengenal INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia*. Jakarta: INOVASI.
- INOVASI. 2019. "Laporan akhir Gema Literasi: Meningkatkan Literasi Siswa Kelas Awal. Jakarta: INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia". Diambil kembali dari <https://www.inovasi.or.id/id/publication/laporan-akhir-gema-literasi-meningkatkan-literasi-siswa-kelas-awal-di-nusa-tenggara-barat-indonesia/>.

- Niklas, Frank, Caroline Cohrsen, and Collette Tayler. 2016. *The Sooner, the Better: Early Reading to Children*. Sage Jurnal.
- SEMERU. 2016. *Laporan Lapangan Smeru Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Inovasi.
- UNESCO. 2018. "Emergent Literacy in Early Childhood" Education. http://www.unesco.org/education/pdf/21_33.pdf.

MODEL PENYUSUNAN INDEKS GERAKAN LITERASI SEKOLAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMETAAN

Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Unggul Sudrajat
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah dilaksanakan sejak 2016. Kemdikbud juga telah menerbitkan Panduan GLS untuk mendorong sekolah menyelenggarakan program literasi. Namun, sampai saat ini belum tersedia instrumen untuk memetakan kondisi penyelenggaraan GLS. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menghasilkan model penyusunan Indeks GLS sebagai instrumen pemetaan. Untuk mencapai tujuan itu, kajian ini berusaha mengkaji dimensi dan indikator yang dianggap representatif, menentukan metode penyusunan indeks yang tepat, serta menghasilkan model penyusunan Indeks GLS. Metode penelitian dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) studi pustaka untuk menyusun dimensi dan indikator indeks; (2) analisis data sekunder guna memahami ketersediaan, validitas, dan reliabilitas data yang tersedia; dan (3) verifikasi lapangan untuk mengonfirmasi dan menjaring masukan terhadap model yang telah disusun. Melalui tiga metode tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, dimensi untuk menyusun Indeks GLS terdiri atas dua, yaitu Dimensi Sumber Daya Pendukung (SDP) dan Dimensi Aktivitas Literasi (AL). Pada dimensi SDP indikatornya ialah sarana dan prasarana literasi dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan dimensi AL terdiri atas indikator pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. *Kedua*, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Kemdikbud belum representatif dan tidak dapat digunakan untuk menyusun indeks. *Ketiga*, hasil verifikasi lapangan memberikan gambaran bahwa sekolah yang dikunjungi belum sepenuhnya menyelenggarakan GLS dengan baik. Oleh karena itu, Kemdikbud perlu mengumpulkan data secara nasional untuk dapat menyusun indeks literasi sekolah, baik melalui Dapodik maupun instrumen Rapor PMP. Selain itu, optimalisasi program GLS sebaiknya berpedoman pada dimensi dan indikator yang telah dihasilkan oleh kajian ini.

Kata kunci: Gerakan Literasi Sekolah (GLS), indeks GLS, indeks literasi.

A. PENDAHULUAN

Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan upaya perluasan akses pendidikan yang cukup signifikan. Angka buta aksara menurun drastis dan angka partisipasi pendidikan meningkat tajam. Meskipun demikian, pembangunan di bidang pendidikan yang telah mampu meluaskan akses ternyata belum sepenuhnya meningkatkan mutu pendidikan. Banyak siswa “bersekolah, tetapi tidak belajar” (World Bank, -2018).

Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari kualitas lulusan. Menurut laporan Bank Dunia yang lain, lebih dari 55 % siswa Indonesia yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMP masih tergolong buta huruf secara fungsional (*functionally illiterate*) (World Bank, – Juni 2018). Artinya, siswa yang telah menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun tidak sepenuhnya mampu memahami dan mengambil manfaat dari teks yang mereka baca.

Kajian mengenai tingkat literasi masyarakat Indonesia juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. *World's Most Literate Nations* yang disusun oleh Central Connecticut State University

memosisikan Indonesia di urutan 60 dari 61 negara, hanya setingkat di atas Botswana. Kajian ini mengurutkan tingkat literasi negara- yang disurvei dengan menggunakan beberapa variabel, seperti hasil PISA, jumlah perpustakaan, sirkulasi surat kabar, sistem pendidikan, dan ketersediaan komputer. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 untuk membaca turun dari 397 menjadi 371, sains juga turun dari 403 menjadi 396, dan skor matematika turun dari 386 menjadi 379. Secara khusus, tes PISA 2018 juga menunjukkan, 7 dari 10 anak usia 15 tahun di Indonesia masih memiliki kompetensi membaca di bawah rata-rata (*Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Hasil PISA 2018*).

Hasil survei di atas sesuai dengan hasil kajian Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tahun 2018 yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud). Kajian ini menyimpulkan bahwa Indeks Alibaca Nasional masuk dalam kategori aktivitas literasi rendah dengan poin 37,32. Apabila dilihat di level provinsi, sebanyak 9 provinsi masuk kategori sedang; 14 provinsi masuk kategori rendah; dan 1 provinsi termasuk sangat rendah. Artinya, sebagian besar provinsi berada pada level aktivitas literasi rendah dan tidak satu pun provinsi termasuk dalam level aktivitas literasi tinggi.

Rendahnya tingkat literasi, sebagaimana ditunjukkan oleh PISA, serta rendahnya aktivitas literasi membaca seperti disimpulkan dalam Indeks Alibaca, menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal itu disebabkan oleh sekolah merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab mewujudkan budaya baca guna meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 ayat (5) secara eksplisit menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”.

Untuk menumbuhkan budaya membaca, Kemdikbud melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti secara khusus menyebutkan bahwa “sekolah hendaknya memfasilitasi secara optimal agar siswa bisa menemukan dan mengembangkan potensinya”, salah satunya dengan “menggunakan lima belas menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran”. Berdasarkan Permendikbud tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah diharapkan dapat mengembangkan kegiatan literasi di sekolah melalui kegiatan membaca buku nonpelajaran selama lima belas menit sebelum memulai jam belajar. Permendikbud 23/2015 tersebut juga menjadi landasan diberlakukannya program GLS.

Sejak resmi diluncurkan pada 2016, GLS belum memiliki alat ukur yang memadai untuk menilai seberapa jauh program tersebut telah dijalankan oleh sekolah dan bagaimana hasilnya. Dengan menimbang pentingnya pemetaan ketercapaian program GLS, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan model penyusunan Indeks GLS sebagai instrumen pemetaan. Untuk mencapai tujuan itu, kajian ini berusaha (1) menentukan dimensi dan indikator yang dianggap representatif melalui kajian pustaka; (2) menelaah ketersediaan, validitas, dan reliabilitas data sekunder yang tersedia di lingkungan Kemendikbud melalui kajian data sekunder; serta (3) melakukan konfirmasi dan menjaring masukan terhadap dimensi dan indikator yang telah disusun melalui verifikasi lapangan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sejak 2016, GLS telah memantik beberapa studi. Lastiningsih, Mutohir, Riyanto, dan Siswono (2017), misalnya, mengkaji pelaksanaan GLS di tingkat SMP di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam publikasi bertajuk “Management of the School Literacy Movement (SLM) Programme in Indonesian Junior Secondary Schools,” disebutkan bahwa implementasi GLS merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi siswa melalui kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

Dari hasil survei yang mereka lakukan di Sidoarjo, Jawa Timur, terhadap 48 sekolah SMP, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 79,2% sekolah belum mempersiapkan sumber bacaan siswa, 62,5% kepala sekolah dan staf administrasi tidak terlibat dalam program GLS, sebanyak 75% guru menjadi *role model* dalam gerakan literasi di sekolah, dan 86,9% sekolah masih kekurangan bahan bacaan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sekolah belum menerapkan program GLS sepenuhnya, terutama pada fase pengembangan dan pembelajaran.

Kajian lain bertajuk “Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah” yang dilakukan oleh Nur Berlian dkk. (2018) menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara penyelenggaraan GLS di sekolah rujukan dan bukan rujukan. Kajian ini dilakukan di empat kabupaten/kota yang dipilih berdasarkan pemetaan hasil INAP/AKSI dan *monitoring* GLS secara *online*, yaitu daerah yang dianggap rendah literasinya, antara lain Kota Palangkaraya dan Kabupaten Lombok Barat, serta daerah yang dianggap memiliki tingkat literasi tinggi, antara lain Kota Padang dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian literasi, pelaksanaan GLS di Sekolah Rujukan dan Sekolah Bukan Rujukan menunjukkan hasil yang berbeda. Pada SD Rujukan rata-rata pelaksanaan GLS mencapai 93 %, SMP Rujukan sebesar 77 %, sedangkan di SD dan SMP Bukan Rujukan rata-rata berada di kisaran 60 %. Dalam kajian itu juga terungkap bahwa pelaksanaan GLS masih banyak mengalami hambatan, terutama berkenaan dengan sumber daya pendukung, seperti kondisi perpustakaan sekolah, ruang baca, dan jumlah buku, terutama buku fiksi dan buku referensi (Nur Berlian dkk., 2018).

K. Laksono dan P. Retnaningdyah (2018) dalam artikel “Literacy Infrastructure, Access to Books and the Implementation of the School Literacy Movement in Primary Schools in Indonesia” secara khusus melihat implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah terkait dengan sarana perpustakaan yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung bagi terlaksananya GLS, serta Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam hal ini, salah satu upaya penumbuhan budi pekerti dilakukan melalui pembiasaan lima belas menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Penelitian mengambil lokus sekolah dasar di Jawa Timur.

Meskipun kebijakan mengenai standar sarana telah diterbitkan sejak 2007, banyak sekolah belum memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan. Dalam hal jumlah buku pengayaan, misalnya, hanya 5% sekolah yang diteliti yang memenuhi standar. Meskipun demikian, pelaksanaan GLS di sekolah tetap berjalan, kendati dengan berbagai kekurangan. Kendala penyelenggaraan GLS, antara lain terletak pada minimnya sarana, yaitu buku bacaan bagi siswa, serta kemampuan dan kreativitas guru dalam melaksanakan program ini. Kurangnya perhatian sekolah terhadap pengadaan buku bacaan dipecahkan melalui anjuran agar siswa membawa buku ke sekolah. Namun, langkah ini dinilai kurang tepat karena sebagian siswa berasal dari keluarga miskin.

Kesuksesan penyelenggaraan GLS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (1) tersedianya bahan bacaan melalui infrastruktur perpustakaan yang memadai dan pojok baca di setiap kelas; (2) komitmen warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf, dan siswa; serta (3) keterlibatan publik, yaitu orang tua siswa dan komunitas.

Sejauh ini upaya pemetaan penyelenggaraan GLS belum dilakukan. Kajian yang ada baru sebatas memahami pelaksanaan GLS di beberapa daerah. Upaya pemetaan dengan cara menyusun Indeks GLS memerlukan data dukung berupa data sekunder secara nasional. Oleh sebab itu, dalam upaya menyusun model Indeks GLS tersebut perlu kajian pustaka terhadap literatur yang relevan serta kajian data sekunder untuk menentukan dimensi dan indikator yang diperlukan.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang berupaya menghasilkan gambaran mengenai model penyusunan Indeks GLS. Guna memenuhi tujuan itu, metode penelitian dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran mengenai dimensi dan indikator yang representatif untuk menyusun model Indeks GLS. Kajian pustaka dilakukan terhadap sumber literatur yang relevan serta buku panduan GLS.

Kedua, analisis data sekunder guna memahami ketersediaan, validitas, dan reliabilitas data sekunder yang tersedia di lingkungan Kemendikbud. Sumber data sekunder tersebut, antara lain dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), instrumen Rapor Penjaminan Mutu Pendidikan (Rapor PMP), dan Badan Akreditasi Nasional – Sekolah Madrasah (BAN – SM). Hasil analisis data sekunder dapat memperlihatkan seberapa jauh data yang telah dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi dimensi dan indikator yang telah ditetapkan.

Ketiga, verifikasi data lapangan untuk mengonfirmasi dan menjaring masukan terhadap dimensi dan indikator yang telah disusun berdasarkan temuan lapangan. Dimensi yang telah ditetapkan berdasarkan kajian pustaka, kemudian dikonfirmasi dengan kondisi di sekolah yang dikunjungi. Melalui cara ini diharapkan diperoleh masukan untuk penyempurnaan dimensi dan indikator yang diperlukan guna menyusun Indeks GLS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

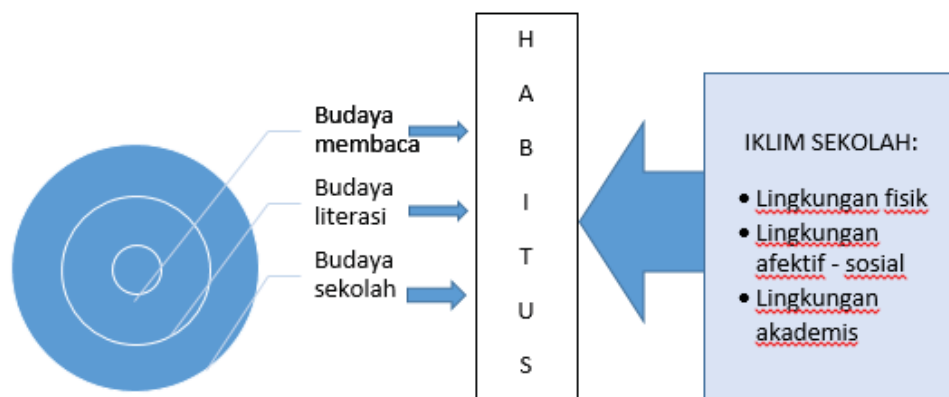
1. Kerangka Dimensi dan Indikator Indeks GLS

Dalam buku *A Principal's Guide to Literacy Instruction* (Carol S. Beers, James W. Beers, dan Jeffrey O. Smith, 2010), menulis satu bab khusus tentang usaha membangun budaya literasi di sekolah (lihat Chapter 2, *Establishing a Literacy Culture in School*). Budaya literasi di sekolah ini merujuk pada suatu kondisi di mana dikatakan bahwa sekolah telah mampu memiliki norma, nilai, bahkan identitas berkenaan dengan kegiatan literasi di sekolah. Dalam buku itu disebutkan bahwa sekolah perlu membangun iklim yang literat agar warga sekolah dapat mempraktikkan dan menghayati budaya literasi.

Ada empat lingkungan yang perlu ada guna menciptakan budaya literasi di sekolah, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial dan afektif, dan lingkungan akademik. *Pertama*, lingkungan fisik seperti bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan dan sebagainya harus ramah dan kondusif untuk belajar. Hal itu, misalnya, terlihat dari kondisi perpustakaan yang ramah anak, tersedianya bacaan sesuai dengan jenjang, baik di perpustakaan maupun di ruang kelas, serta sekolah memajang karya siswa, baik di kelas, lorong, maupun ruang kepala sekolah. *Kedua*, lingkungan sosial dan afektif di sekolah merujuk pada upaya untuk membangun komunikasi dan interaksi yang positif di antara warga sekolah. Hal ini, misalnya, terlihat dari adanya pemberian penghargaan atas prestasi siswa, aktivitas dan perayaan literasi setiap tahun, serta kolaborasi warga sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan literasi. *Ketiga*, lingkungan akademik, bahwa sekolah berupaya menyelaraskan antara kegiatan literasi dan proses pembelajaran, dalam arti kegiatan literasi didukung oleh semua mata pelajaran (Beers, Beers, dan Smith, 2010).

Dalam upaya memahami lebih jauh konsep budaya literasi di atas, Sofie Dewayani mengerucutkannya sebagai upaya membentuk habitus literasi di sekolah. Dalam pengertian Bourdieu, *habitus* merupakan “perilaku, kebiasaan, yang melekat dalam diri seseorang terkait dengan status atau posisi sosial seseorang tersebut dalam kelas masyarakat tertentu.” (Sofie Dewayani, “Penumbuhan Budaya Literasi di Madrasah: Perspektif Teoretik”). Habitus tersebut terbentuk dari interaksi, baik individu dengan keluarga maupun komunitasnya. Dalam hal literasi, sekolah berperan penting dalam membentuk habitus literasi siswa

melalui upaya membangun iklim sekolah yang literat. Berikut gambaran relasi antara habitus dan iklim sekolah sebagaimana uraian Sofie Dewayani.



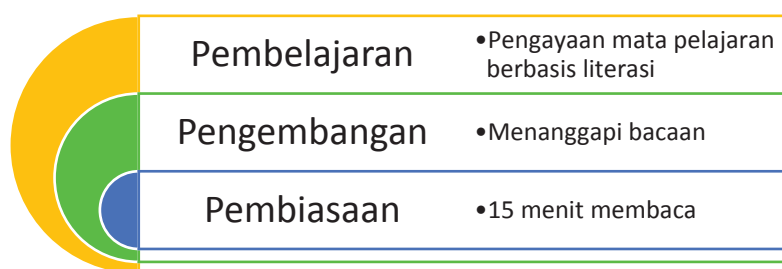
Gambar 1 Relasi Habitus dan Iklim Sekolah.

Sumber: Sofie Dewayani, "Penumbuhan Budaya Literasi di Madrasah: Perspektif Teoretik".

Gambar di atas menunjukkan bahwa budaya membaca merupakan bagian dari budaya literasi, sedangkan budaya literasi merupakan bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan. Upaya untuk membentuk budaya literasi di sekolah perlu dilakukan dengan menciptakan iklim sekolah yang literat, yaitu dengan dukungan lingkungan fisik, lingkungan sosial-afektif, dan lingkungan akademis.

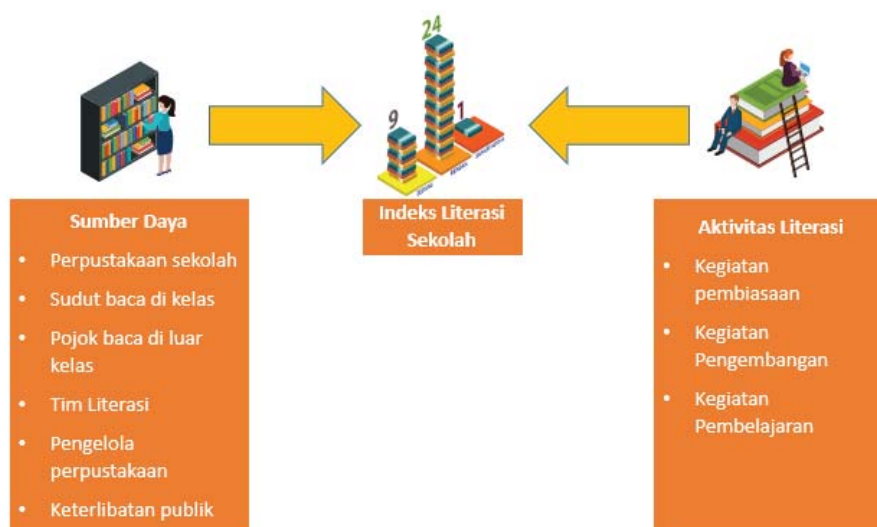
Tiga lingkungan di atas secara umum menjadi rujukan dalam buku *Panduan Gerakan Literasi Sekolah*, baik di SD, SMP, SMA, maupun SMK (2016), serta *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah* (Edisi 2, Oktober 2018) yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. Dalam panduan dan desain induk GLS disebutkan bahwa sekolah diharapkan menciptakan ekosistem sekolah yang literat, antara lain melalui (1) lingkungan fisik yang kaya teks dengan cara mendirikan pojok baca, ruang baca, dan pengembangan perpustakaan sekolah; (2) lingkungan akademik yang memberikan alokasi waktu khusus untuk pembiasaan membaca; (3) serta lingkungan sosial dan afektif berupa pemberian penghargaan kepada peserta didik terkait dengan kegiatan literasi, serta merayakan hari-hari besar/nasional dengan nuansa literasi.

Dalam panduan GLS juga disebutkan, terdapat tiga kegiatan dalam penyelenggaraan program literasi di sekolah, yaitu kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahap pembiasaan dilakukan terutama dengan memanfaatkan waktu lima belas menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Apabila tahap ini telah dijalankan dengan baik, sekolah diharapkan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengembangan. Dalam hal ini, sekolah mulai mendorong siswa untuk menanggapi bacaan, melalui lisan maupun tulisan dalam jurnal membaca. Tahap selanjutnya ialah pembelajaran, yaitu mengembangkan kemampuan kritis dan analitis siswa dengan memanfaatkan bahan bacaan pengayaan sesuai dengan mata pelajaran.



Gambar 2 Kegiatan dalam Program GLS.

Melalui telaah terhadap literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengukur pelaksanaan GLS di sekolah setidaknya harus memenuhi dua dimensi: *pertama*, dimensi sumber daya pendukung yang merupakan ejawantah dari tiga lingkungan yang diperlukan guna mengembangkan budaya literasi; serta *kedua*, dimensi Aktivitas Literasi yang meliputi kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.



Gambar 3 Kerangka Indeks GLS.

Dimensi sumber daya pendukung tersusun dari beberapa indikator, seperti perpustakaan sekolah, sudut baca di dalam kelas, pojok baca di luar kelas, tim literasi sekolah, pengelola perpustakaan, serta keterlibatan publik (orang tua siswa). Dimensi Aktivitas Literasi terdiri atas indikator kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Hasil penentuan dimensi dan indikator ini kemudian menjadi panduan untuk menelaah data sekunder yang diperlukan guna menyusun model Indeks GLS.

2. Kondisi Data Sekunder untuk Penyusunan Indeks

Proses kajian berikutnya ialah menelaah data sekunder yang tersedia di lingkungan Kemendikbud, antara lain data yang dimiliki oleh Dapodik, Rapor PMP, serta BAN-SM. Ketiga sumber data tersebut diasumsikan memiliki data yang diperlukan untuk memenuhi dimensi dan indikator yang telah ditetapkan. Guna memastikan ketersediaan data, tim menelaah instrumen data yang dimiliki oleh Dapodik, Rapor PMP, serta BAN-SM. Hasil telaah terhadap data sekunder tergambar melalui tabel berikut ini.

Tabel 1 Dimensi dan Indikator dari Data Sekunder

Dimensi	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
Sumber Daya Pendukung	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan menurut kondisi	Dapodik
		Sekolah memiliki ruang perpustakaan sesuai dengan ketentuan	BAN-SM
	Akses Internet di Sekolah	Akses Internet & Akses Internet Alternatif	Dapodik
	Penggunaan Bahan Bacaan dalam Pembelajaran	Buku dan Alat	Dapodik
		Sumber belajar cetak: buku, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster	Instrumen PMP

	Pengelola Perpustakaan Sekolah	Pengelola Perpustakaan Sekolah	Dapodik
	Pelibatan Publik dalam Menyediakan Akses Bacaan	Mengumpulkan buku bacaan selain pelajaran dari sumbangan orangtua	Instrumen PMP
Aktivitas Literasi	Kegiatan Pembiasaan	Penggunaan lima belas menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran	Instrumen PMP
		Mengajak siswa membaca buku selain buku mata pelajaran selama lima belas menit setiap hari	Instrumen PMP
		Berkunjung ke perpustakaan	Instrumen PMP
		Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat, meliputi: (1) perencanaan dan penilaian program literasi, (2) waktu yang cukup untuk kegiatan literasi, (3) membaca buku, (4) lomba terkait literasi, (5) memajang karya tulis, (6) Penghargaan berkala untuk siswa, (7) Pelatihan literasi.	BAN-SM
	Kegiatan Pengembangan	Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah	Dapodik
		Ekstrakurikuler jurnalistik	Instrumen PMP
		Membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis	Instrumen PMP
	Kegiatan Pembelajaran	Melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku	Instrumen PMP
		Membuat karya tulis dg deskripsi yang berkesinambungan dan mudah dipahami	Instrumen PMP

Pada Tabel 1 di atas tampak bahwa dari dimensi dan indikator yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi. Pada Dimensi Sumber Daya Pendukung, misalnya, data untuk indikator Pojok Baca di dalam kelas, Sudut Baca di luar kelas, serta Tim Literasi Sekolah tidak tersedia. Begitu pula untuk Dimensi Aktivitas Literasi, pada Indikator Kegiatan Pembiasaan, tidak terdapat data mengenai jurnal membaca siswa, serta keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam kegiatan literasi; pada Indikator Kegiatan Pengembangan, tidak ada data mengenai apresiasi sekolah terhadap capaian literasi siswa, dan tidak ada data mengenai perayaan hari besar/nasional dengan kegiatan literasi; kemudian pada Indikator Kegiatan Pembelajaran belum tersedia data mengenai adanya kegiatan pengayaan pada setiap mata pelajaran.

Apabila ditelaah lebih lanjut terhadap kondisi, validitas, dan reliabilitas data, muncul persoalan lain. *Pertama*, untuk data yang bersumber dari BAN-SM, misalnya, tidak memenuhi kriteria “kesamaan tahun pengumpulan data” sehingga tidak dapat digunakan. BAN-SM melakukan akreditasi sesuai dengan kuota yang tersedia. Dengan kata lain, pelaksanaan akreditasi sekolah tidak serentak dilakukan setiap tahun. *Kedua*, data dari Rapor PMP tidak dapat terjamin keabsahannya setidaknya karena tiga hal: (1) instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat multitafsir, membingungkan, dan tidak merujuk pada jawaban yang pasti; (2) pengisian data bersifat *self assessment* tanpa disertai bukti yang memadai; dan

(3) olah data menunjukkan hasil yang “mencurigakan” karena tidak ada perbedaan mencolok antara satu daerah dengan daerah lain.

Dari kajian data sekunder dapat disimpulkan bahwa data yang tersedia sejauh ini belum bisa digunakan untuk menyusun Indeks GLS. Oleh sebab itu, perlu telaah lebih lanjut mengenai instrumen pengumpulan data yang berisi dimensi dan indikator yang diperlukan guna menyusun indeks. Pada bagian berikutnya akan dideskripsikan hasil verifikasi lapangan terhadap dimensi dan indikator yang diperlukan untuk menyusun Indeks GLS.

3. Hasil Verifikasi Lapangan

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan di lima lokasi: Kota Depok, Kota Batu, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan perbedaan karakteristik wilayah, sedangkan pemilihan sekolah pada setiap daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas pendidikan setempat sebagaimana tergambar pada Tabel 2.

Tabel 2 Lokasi Verifikasi Lapangan

No	Lokasi	SD	SMP	SMA
1.	Kota Depok	SD Anyelir 1	SMP 2 Depok	-
2.	Kota Batu	SD Nganglik 1	SMP 1 Batu	SMA 1 Batu
3.	Kota Yogyakarta	SD Ungaran	SMP 1 Yogyakarta	SMA 3 Yogyakarta
4.	Kota Makassar	SD Inpres BTN Pemda	SMP 7 Makassar	SMA 15 Makassar
5.	Kab. Badung	SD 3 Sempidi	SMP 2 Kuta Utara	SMA 1 Kuta Utara

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan berpedoman pada dimensi dan indikator yang telah disusun berdasarkan hasil kajian pustaka. Verifikasi dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta kemungkinan memunculkan dimensi dan indikator baru. Dalam proses verifikasi lapangan, tim peneliti melakukan diskusi dan wawancara dengan kepala sekolah, tim literasi sekolah, dan pengelola perpustakaan. Untuk melengkapi data yang diperlukan, dilakukan pula observasi terhadap kondisi perpustakaan, sudut baca di kelas, pojok baca di luar kelas, serta fasilitas atau sarana literasi lainnya.

Dari empat belas sekolah yang dikunjungi di lima daerah tersebut, data untuk setiap indikator dan subindikator disimpulkan ke dalam angka persentase yang menggambarkan terpenuhinya kriteria indikator yang diperlukan pada sejumlah sekolah yang dikunjungi. Besar-kecilnya angka persentase menggambarkan jumlah sekolah yang memenuhi kriteria pada setiap indikator dan subindikator. Hasil verifikasi lapangan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Dimensi dan Indikator Hasil Verifikasi Lapangan

No	Indikator	Temuan Lapangan (Persen)	Catatan
Dimensi Sumber Daya			
1.	Perpustakaan Sekolah:		

No	Indikator	Temuan Lapangan (Persen)	Catatan
(a)	Lokasi strategis dan mudah dijangkau	28,57%	Lokasi perpustakaan umumnya tidak strategis: berada di pojok belakang, lantai 2, atau di bagian lain.
(b)	Kondisi perpustakaan nyaman	78,57%	Kenyamanan perpustakaan dilihat dari kondisinya untuk membaca dan berdiskusi
(c)	Jumlah koleksi buku bacaan sesuai dengan standar: buku pengayaan 840 judul, jumlah sesuai dengan rombel (1000 buku untuk 6 rombel, 1.500 buku untuk 7- - 12, dan 2.000 buku untuk 13--24 rombel)	28,57%	Sekolah umumnya belum selesai mendata buku sehingga tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Buku dari dana bantuan pemerintah sebagian besar tidak sesuai dengan jenjang SD.
(d)	Perangkat informasi buku sesuai dengan jenjang/ kemampuan membaca di tingkat SD	40,00%	Dari 5 SD yang dikunjungi, hanya dua yang memuat informasi jenjang buku.
(e)	Rekap kunjungan perpustakaan per bulan	78,57%	Sebagian besar sekolah telah memiliki rekap kunjungan, - tetapi seluruhnya digital.
(f)	Rekap peminjaman buku perpustakaan per bulan	78,57%	Sebagian besar sekolah telah memiliki rekap peminjaman,- tetapi tidak seluruhnya digital
2.	Sudut baca di tiap kelas dengan koleksi buku nonpelajaran	71,43%	Di Batu dan Badung, sekolah-sekolah diberi bantuan rak buku.
3.	Pojok baca di luar kelas dengan koleksi buku nonpelajaran	64,29%	Sebagian besar sekolah memiliki pojok baca di luar kelas, tetapi -sebagai catatan, ada sekolah yang memajang buku tidak sesuai.
4.	Kampanye membaca melalui poster di lingkungan sekolah	64,29%	Terdapat imbauan membaca/gerakan literasi di dinding sekolah, kelas, koridor dan di perpustakaan.
5.	Tim literasi sekolah	78,57%	SD umumnya tidak memiliki tim literasi karena keterbatasan SDM. Namun, di beberapa sekolah program literasi tetap jalan karena komitmen kepala sekolah dan guru.
6.	Pengelola perpustakaan	100,00%	Sekolah yang dikunjungi umumnya memiliki pengelola perpustakaan, tetapi tidak seluruhnya bekerja dengan optimal.
7.	Orang tua/siswa menyumbang buku bacaan	85,71%	Sumbangan biasanya di awal tahun ajaran atau ketika siswa akan lulus.

No	Indikator	Temuan Lapangan (Persen)	Catatan
8.	Sekolah memiliki kerja sama dengan instansi lain untuk pengembangan literasi	42,86%	Misalnya kerja sama dengan dinas perpustakaan, taman bacaan, perusahaan swasta, dll.
Dimensi Aktivitas Literasi			
	Kegiatan Pembiasaan		
9.	Kegiatan lima belas menit membaca	64,29%	Alokasi waktu membaca cenderung “menurun” di jenjang SMP dan SMA.
10.	Wajib kunjungan ke perpustakaan setiap kelas per minggu	35,71%	Wajib kunjungan ke perpustakaan umumnya hanya diterapkan di jenjang SD.
11.	Memiliki jurnal membaca	57,14%	Tidak semua sekolah memiliki jurnal membaca sehingga rekap bacaan tidak tersedia.
12.	Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan terlibat dalam kegiatan membaca buku	14,29%	Tidak diketahui apakah guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan terlibat menjadi teladan membaca.
	Kegiatan Pengembangan		
13.	Kegiatan menanggapi bacaan (<i>resume, sinopsis</i> , dll)	64,29%	Sekolah meminta siswa menulis resume/sinopsis, atau mempersilahkan siswa maju di depan kelas atau di panggung aksi.
14.	Memajang karya siswa di kelas atau lingkungan sekolah	64,29%	Karya siswa dipajang melalui mading maupun dan portofolio di kelas.
15.	Mengapresiasi aktivitas literasi siswa (pemilihan duta literasi, peminjam buku terbanyak, dll)	57,14%	Apresiasi yang dilakukan sangat bervariasi, mulai dari setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun..
16.	Perayaan hari besar/nasional dengan kegiatan literasi (lomba puisi, cerpen, pidato, dll)	85,71%	Lomba puisi, cerpen, pidato dll umumnya dilaksanakan ketika hari besar/nasional.
17.	Kegiatan ekstrakurikuler (mading, jurnalistik, majalah/buletin sekolah, dll)	57,14%	Kegiatan ekstrakurikuler berkenaan dengan literasi umumnya di jenjang SMP dan SMA.
	Pembelajaran		
18.	Membaca buku pengayaan yang digunakan dalam proses pembelajaran di semua mata pelajaran	28,57%	Tidak banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran dengan membaca buku pengayaan.
19.	Kegiatan melatih keterampilan siswa dalam membuat karya akademik	64,29%	Pelatihan keterampilan siswa dilakukan melalui mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.
Dimensi Inovasi			

No	Indikator	Temuan Lapangan (Persen)	Catatan
20.	Inovasi pada aspek sumber daya pendukung	28,57%	Kab. Badung menyediakan laptop dan aplikasi <i>i-badung</i> untuk mendukung program literasi; SD di Yogyakarta dan Makassar membuat panggung aksi.
21.	Inovasi pada aspek aktivitas literasi	35,71%	SD di Makassar mewajibkan siswa memegang buku setiap istirahat.

Hasil verifikasi lapangan sebagaimana tergambar pada Tabel 3 menunjukkan bahwa untuk indikator perpustakaan perlu diturunkan menjadi beberapa subindikator, antar lain subindikator lokasi yang strategis, kondisi kenyamanan, jumlah koleksi buku bacaan, perangkat informasi buku, serta rekap kunjungan dan peminjaman buku. Subindikator tersebut penting mendapat penilaian khusus karena fungsi perpustakaan akan lebih optimal apabila memenuhi kriteria tersebut.

Hasil verifikasi lapangan juga memunculkan satu dimensi tambahan, yaitu Dimensi Inovasi. Dimensi ini terdiri dari dua indikator, yaitu indikator inovasi pada aspek sumber daya pendukung dan aspek aktivitas literasi. Keberadaan dimensi tambahan ini dianggap penting setelah membandingkan keberhasilan pelaksanaan GLS di beberapa sekolah yang dikunjungi yang salah satunya bermuara pada inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim literasi sekolah.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari empat belas sekolah yang dikunjungi, belum seluruhnya memenuhi indikator ideal. Pada dimensi sumber daya pendukung contohnya, pada subindikator perpustakaan, sebagian besar sekolah belum memenuhi kriteria lokasi perpustakaan yang strategis (28,57%), jumlah koleksi buku belum terdata dengan baik (28,57%), serta belum memiliki perangkat informasi buku yang memadai (40,00%). Pada Dimensi Aktivitas Literasi, indikator dengan nilai paling rendah pada kegiatan pembiasaan ialah wajib kunjungan ke perpustakaan yang baru mencapai 35,71%. Pada kegiatan pembelajaran, tidak banyak sekolah yang menerapkan program membaca buku pengayaan pada setiap mata pelajaran (28,57%). Adapun indikator yang sudah cukup baik meliputi pengelola perpustakaan yang mencapai 100%, sumbangan buku dari siswa/orang tua siswa sebesar 85,71%, serta perayaan hari besar/nasional dengan kegiatan literasi mencapai 85,71%.

Hasil penilaian di atas memperlihatkan bahwa pada Dimensi Sumber Daya Pendukung banyak sekolah belum memperhatikan aspek penting dari keberadaan perpustakaan sekolah, seperti lokasi, jumlah buku bacaan, serta perangkat informasi buku. Begitu pula pada Dimensi Aktivitas Literasi, banyak sekolah belum memiliki program wajib kunjung ke perpustakaan dan belum banyak pula yang menerapkan kegiatan membaca buku pengayaan di setiap mata pelajaran. Hasil ini semakin menegaskan pentingnya pemetaan program literasi di sekolah melalui Indeks GLS. Melalui penilaian terhadap dimensi dan indikator GLS, akan kentara pada dimensi dan indikator mana program GLS telah baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Kajian ini setidaknya dapat menyimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, melalui kajian pustaka terhadap literatur yang relevan serta buku panduan GLS, dimensi untuk menyusun Indeks GLS setidaknya terdiri atas dua komponen, yaitu Dimensi Sumber Daya Pendukung (SDP) dan Dimensi Aktivitas Literasi (AL).

Pada dimensi SDP, indikatornya ialah sarana dan infrastruktur literasi dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan pada dimensi AL terdiri atas indikator kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Kerangka indeks berupa dimensi dan indikator ini menjadi panduan untuk tahapan kajian selanjutnya, yaitu analisis data sekunder.

Kedua, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh unit kerja di bawah Kemendikbud belum representatif dan tidak dapat digunakan untuk menyusun indeks. Di satu sisi, data yang ada belum memenuhi indikator minimal yang dibutuhkan, sedangkan di sisi lain sebagian data juga bermasalah dari segi validitas dan reliabilitasnya. Oleh sebab itu, perlu verifikasi lapangan guna memahami apakah dimensi dan indikator yang telah disusun sesuai dengan kondisi penyelenggaraan GLS di sekolah.

Ketiga, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa dimensi dan indikator ideal yang telah disusun belum seluruhnya terpenuhi. Artinya, pada sekolah yang telah dikunjungi yang merupakan rekomendasi dari dinas pendidikan ternyata belum sepenuhnya menyelenggarakan GLS dengan baik. Hasil verifikasi lapangan juga memberikan masukan terhadap rancangan dimensi dan indikator bahwa selain dimensi SDP dan AL, perlu menambahkan Dimensi Inovasi dalam penyelenggaraan GLS.

2. Rekomendasi

- a) Perlu dilakukan pengumpulan data secara nasional untuk penyusunan indeks literasi sekolah, baik melalui Dapodik maupun instrumen Rapor PMP. Dimensi dan indikator yang telah dihasilkan oleh kajian ini dapat menjadi panduan mengenai data apa saja yang diperlukan; dan
- b) Optimalisasi program GLS sebaiknya berpedoman pada dimensi dan indikator yang telah dihasilkan oleh kajian ini. Pada Dimensi Sumber Daya Pendukung perlu upaya serius dalam mewujudkan standardisasi perpustakaan sebagaimana ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah, mendorong semua sekolah memiliki pojok baca, memiliki tim literasi, serta memaksimalkan dukungan publik. Pada dimensi aktivitas literasi perlu dorongan agar setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Beers, Carol S. James W. Beers, dan Jeffrey O. Smith. 2010. *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. New York, London: The Guilford Press.
- Berlian, Nur, dkk. 2018. *Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dewayani, Sofie. TT. "Penumbuhan Budaya Literasi di Madrasah: Perspektif Teoretik". Makalah untuk pelatihan Gerakan Literasi Madrasah. Tidak diterbitkan.
- Ditjen Dikdasmen. 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.
- Ditjen Dikdasmen. 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.
- Ditjen Dikdasmen. 2016. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.
- Kemdikbud. 2017. *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Tim GLN Kemdikbud.

- Kemdikbud. 2018. *Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Laksono, K. dan P. Retnaningdyah. 2018. "Literacy Infrastructure, Access to Books, and the Implementation of the School Literacy Movement in Primary Schools in Indonesia". IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 296 (2018) 012045.
- Lastiningsih, Netti, Toho C. Mutohir, Yatim Riyanto, dan Tatag Y.E. Siswono. 2017. "Management of the School Literacy Movement (SLM) Programme in Indonesian Junior Secondary Schools". *World Transactions on Engineering and Technology Education 2017*, WIETE Vol.15, No.4, 2017.
- Solihin, Lukman. Dkk. 2019. *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- World Bank. 2018. *Learning More, Growing Faster*. Indonesia Economic Quarterly, Juni 2018.
- World Bank. 2018. *Learning to Realize Education's Promise*. World Development Report 2018.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 1	Panel No: 1
Ruang	: Padjajaran 2	
Waktu	: 08.00—10.00 WIB	
Judul Penelitian	:	
	1. Praktik Baik Peningkatan Kemampuan Literasi Dasar SD di Kelas Awal	
	2. Penguatan Pembelajaran Literasi Dasar dan Hasil Belajar Siswa	
	3. Analisis Faktor Determinan Efektivitas Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Meningkatkan Literasi Dasar pada Siswa	
Penyaji	:	
	1. Indah Pratiwi, S.IP.	
	2. Rasita Ekawati Purba, Ph.D.	
	3. Tarma	
Pembahas	: S.S.T. Wisnu Sasangka	
Moderator	: Dr. IGN Made Budiana Setiawan, SS, M.Si.	
Notulis	: Sisca Fujianita, S.Pd.	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Indah Pratiwi, S.IP. Alokasi anggaran meningkat → meningkatkan angka partisipasi anak dalam pendidikan formal → belum meningkatkan mutu pendidikan Indonesia Studi Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa di kelas 2 SD masih kesulitan membaca (ACDP, 2017). Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia juga menunjukkan temuan serupa di mana 46,83 siswa kelas 4 SD tergolong kurang mampu membaca. Laporan Bank Dunia (2018) bertajuk <i>Indonesia Economic Quarterly: Learning more, growing faster</i> disebutkan, terdapat lebih dari 55 persen murid Indonesia yang menyelesaikan pendidikan SMP masih buta huruf secara fungsional. Rumusan Masalah Bagaimana cara kerja INOVASI dalam memecahkan permasalahan pendidikan di kelas awal sekolah dasar dan merancang solusi permasalahan tersebut? Bagaimana program INOVASI dapat menghasilkan <i>output</i> berupa praktik baik dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran kelas awal di wilayah 3T? Bagaimana strategi yang dapat dijalankan oleh Kemendikbud dalam mengadopsi mekanisme dan praktik baik program rintisan INOVASI agar dapat menjawab permasalahan pendidikan di kelas awal di daerah lain? Metode penelitian Penelusuran pustaka Penelusuran data lapangan: wawancara stakeholder, data lapangan di sekolah pilot dan non pilot, sekolah yang melakukan replikasi mandiri, wawancara lapangan. Konsep operasional

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Pembelajaran literasi dasar kelas awal: upaya untuk bukan hanya membuat siswa 'melek aksara' tetapi jauh dari itu pembelajaran literasi juga harus mampu memberikan pembiasaan kepada siswa agar siswa senang membaca. Hasil dan Pembahasan Pembelajaran membaca di kelas awal berbeda dengan pembelajaran di kelas atas. Di kelas awal siswa masih mulai dikenalkan huruf dan bunyi <i>Problem Driven Iterative Adaptation</i> (PDIA): pendekatan untuk memahami dan memecahkan persoalan melalui persoalan itu sendiri (<i>problem driven</i>). Pendekatan PDIA bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu: (1) Solusi lokal untuk masalah lokal (<i>Local Solutions for Local Problems</i>), (2) Mendorong masalah agar terjadi penyimpangan/perubahan positif (<i>Pushing Problem Driven Positive Deviance</i>), (3) Mencoba, belajar, mengulangi, dan mengadaptasi (<i>Try, Learn, Iterate, Adapt</i>), dan (4) Meluaskan skala melalui difusi (<i>Scale through diffusion</i>). Replikasi Program: <i>scaling up, scaling out</i> dan <i>scaling deep</i>. Catatan kritis <i>Pertama</i>, pada tahap eksplorasi masalah, pendekatan PDIA tidak sepenuhnya dijalankan. <i>Kedua</i>, pada tahap merancang program, ada kalanya penentuan sekolah rintisan dan penentuan Fasda tidak berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diperlukan untuk menyukkseskan program. <i>Ketiga</i>, pada tahap implementasi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yakni: (1) Tim INOVASI di daerah sebagai pelaksana program; dan (2) Pemda sebagai penerima dan mitra program. di pihak Pemda, kapasitas SDM sering kali kurang memadai. <i>Keempat</i>, di tahap evaluasi, terutama untuk program yang berkenaan dengan penguatan literasi dasar di kelas awal, peningkatan hasil belajar tidak terjadi secara signifikan <i>Kelima</i>, di tingkat pelaksanaan advokasi, belum sepenuhnya terjamin apakah pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana program rintisan yang dilakukan INOVASI. Kesimpulan Mekanisme kerja program INOVASI terbagi dalam 5 tahap yaitu: eksplorasi masalah, merancang program, implementasi program, evaluasi dan advokasi kebijakan. Di beberapa daerah program ini menunjukkan indikasi-indikasi keberhasilan dilihat dari proses pembelajaran yang menyenangkan, suasana kelas literat, dan respon positif para guru. Oleh karenanya, replikasi penting dilakukan dengan mengadopsi sistem kerja INOVASI. Terakhir, kajian ini merekomendasikan pelunya pengarusutamaan program literasi dasar kelas awal melalui: pemetaan kemampuan literasi dasar siswa kelas awal, penyesuaian kurikulum pembelajaran kelas awal, peningkatan kompetensi guru berbasis KKG, penyediaan buku bacaan berjenjang, serta menciptakan ekosistem sekolah yang literat. 2. Rasita Ekawati Purba, Ph.D. Tujuan membuktikan program literasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Studi Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa di kelas 2 SD masih kesulitan membaca (ACDP, 2017).

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia juga menunjukkan temuan serupa di mana 46,83 siswa kelas 4 SD tergolong kurang mampu membaca. Laporan Bank Dunia (2018) bertajuk <i>Indonesia Economic Quarterly: Learning more, growing faster</i> disebutkan, terdapat lebih dari 55 persen murid Indonesia yang menyelesaikan pendidikan SMP masih buta huruf secara fungsional. Muncul kesadaran belajar. Schooling but not learning". UNESCO mengingatkan bahwa masih banyak anak yang berada diluar sekolah, dropout, sekolah tidak teratur, anak sekolah namun belajarnya sangat sedikit. Tokoh Lan Richard, PDIA → untuk membangun kapasitas Negara. Studi Lan Richard bahwa tingkat partisipasi tidak sejalan dengan peningkatan mutu sekolah. Logika perubahan: penguatan kapasitas guru → peningkatan mutu pembelajaran → peningkatan hasil belajar siswa. Studi baseline inovasi terkait literasi: Kurang dari 60% siswa lulus tes literasi dasar (mengenal huruf, suku kata dan kata), NTT 22%, Jawa Timur 79% → terjadi kesenjangan wilayah yang besar. Nilai rata-rata tes pemahaman (lolos tes dasar sebagai prerequisite): NTT 37,6, Jawa Timur 69,8 terjadi kesenjangan lagi antara NTT dengan Jawa Timur. Literasi merupakan dasar bagi anak untuk menguasai aspek lain. Metodologi SIPPI: survey yang dikembangkan oleh INOVASI Instrumen: interview orangtua 5000an ortu, observasi kelas 600an guru, tes literasi 5623 siswa (students learning assessment) Hasil baseline dan endline Hasil tes literasi dasar: dari survey awal ke survey akhir hasilnya meningkatkan. Ketika di baseline sudah tinggi peningkatan di endlinenya tidak terlalu tinggi. NTT 22% → 55%, Jawa Timur 79% → 91%. Hasil tes pemahaman: NTT 37,6 → 70,1 Jatim 69,8 → 75,4 Berbasis gender: skor anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Intervensi INOVASI dapat memperkecil gap antara skor laki-laki dan perempuan Modul pelatihan literasi dasar berbasis KKG Modul literasi 1: 7 unit. Definisi literasi → keterampilan menulis Modul literasi 2: 5 unit. Tentang penilaian formatif, membaca, pemahaman HOTS, dll. Kesimpulan Kompetensi guru belum memadai untuk menangani anak di kelas awal agar memahami literasi dasar. Peningkatan kompetensi guru yang berfokus pada mutu pembelajaran di kelas mampu meningkatkan hasil belajar siswa Pendekatan one size fit for all tidak efektif untuk mengatasi kesenjangan kemampuan literasi antar wilayah Rekomendasi: Meningkatkan kompetensi guru untuk mengajar membaca secara sistematis Meninjau buku pelajaran kelas awal Menyusun penduan kurikulum pelatihan sekolah dasar Peningkatan kapasitas guru terkait pengajaran literasi dan numerasi melalui KKG Meningkatkan akses ke buku bacaan yang sesuai

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		3. Tarma Literasi dasar fokus pada literasi membaca dan menulis Kemampuan literasi masih rendah, ditunjukkan dari: - UNESCO melakukan survei pada 2014, hasilnya menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius. - Indonesia menduduki peringkat terendah kedua, hanya setingkat di atas Botswana di Afrika. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum - WEF) pada 2015 juga mengeluarkan laporan mengenai kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi abad ke-21. Keterampilan itu mencakup literasi, kompetensi, dan karakter. - Hasil survei The World's Most Literate Nations (WMLN) 2016 mengungkapkan bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. - Hasil penelitian PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) menyatakan bahwa rata-rata skor prestasi literasi membaca siswa kelas IV Indonesia (405) berada signifikan di bawah rata-rata internasional (500). Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara (negara bagian) peserta. - Angka UNDP juga mengejutkan bahwa angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen saja. Kegiatan literasi mencakup Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), literasi keluarga (GLK), dan literasi sekolah (GLS). Ferguson (2003) menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Tahap pelaksanaan GLS: Pembiasaan: menumbuhkan minat baca → pengembangan: menanggapi buku pengayaan → pembelajaran: meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran Faktor determinan implementasi (Fanani, 2017): - Self directed learning - Sarana literasi - Komitmen guru - Dukungan keuangan - Partisipasi masyarakat - Literasi keluarga - Dukungan pemerintah - Peran kepala sekolah Tujuan penelitian - Untuk mengetahui gambaran implementasi GLS di Indonesia. - Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi determinan pencapaian GLS di Indonesia. - Untuk mengetahui seberapa besar determinasi setiap faktor terhadap pencapaian GLS di Indonesia.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		d. Untuk mengetahui seberapa besar determinasi GLS terhadap kemampuan literasi baca tulis siswa di Indonesia Metode Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Populasi untuk data penelitian ini adalah seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang memiliki kriteria bahwa sekolah tersebut menggunakan kurikulum 13 dan mengikuti Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling Responden yang digunakan pada penelitian ini 60 orang guru SD, 15 kepala sekolah dan 300 siswa SD tingkat atas. pengumpulan data menggunakan kuesioner Hasil Dari 15 sekolah yang disurvei dari 5 provinsi, diketahui 4 sekolah berada pada tahap pembiasaan dan 11 sekolah telah sampai pada tahap pembelajaran. Sekolah sudah melakukan implementasi GLS dengan baik, dimana tahap pembiasaan berada pada kategori tinggi Rerata faktor implementasi GLS: yang paling tinggi partisipasi sekolah, paling rendah partisipasi masyarakat. Faktor determinan yang paling besar yaitu peran kepala sekolah 22,09%, kedua literasi keluarga. Kontribusi implementasi GLS dengan kemampuan literasi siswa: Kesimpulan Tujuh faktor determinan pada implementasi GLS adalah self-directed learning dengan kontribusi sebesar 17,89%, dukungan sarana literasi dengan kontribusi sebesar 8,7%, komitmen pendidik berkontribusi sebesar 10,82%, peran kepala sekolah berkontribusi sebesar 22,09%, partisipasi masyarakat berkontribusi sebesar 16,89%, literasi keluarga berkontribusi sebesar 20,16% dan dukungan pemerintah berkontribusi sebesar 6,5%. Dukungan keuangan tidak berkorelasi signifikan dengan implementasi GLS. Implementasi GLS determinan dengan kemampuan literasi baca tulis siswa berkontribusi sebesar 71,23%. Peran kepala sekolah, literasi keluarga, self-directed learning dan partisipasi masyarakat menjadi variabel yang paling menentukan dalam tercapainya implementasi GLS. Rekomendasi a. Pemerintah Pemerintah pusat dan/ atau daerah membuat suatu peraturan menjadikan kepala sekolah menjadi pegiat literasi. b. Sekolah

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Guru harus memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan self-directed learning. Sekolah harus menyediakan sarana literasi. Kepala sekolah harus kreatif dalam pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan. c. Keluarga Keluarga harus membangun lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri anak, merancang dalam rangka mendukung minat baca tulis anak.
2.	Pembahas <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Pembahas: S.S.T. Wisnu Sasangka • Masalah sample: 5 daerah lalu mengeneralisasi, siasati dengan: misal tahun pertama Indonesia timur dulu, lalu Indonesia barat, dst. → penelitian dilakukan lebih dari satu tahun • Bahasa tulis dari penyaji kurang bagus: banyak kalimat yang tidak ada subjek, banyak kalimat yang merupakan anak kalimat. “namun” digunakan di intra kalimat seharusnya untuk antar kalimat. Kata pasangan/padanan kata: baik-maupun bukan baik-ataupun. • “proses pendidikan” → pen-didik-an (imbuhan pe-an artinya proses) • Tidak ada kata “dikarenakan” → disebabkan • Ejaan “koma” → a, b dan c seharusnya a, b, dan c. anak kalimat mendahului kalimat maka diberi koma. • Konjungsi subordinatif (sehingga, karena, dll) tidak didahului tanda koma. • Perpres 23 tahun 2019 terkait penggunaan bahasa Indonesia. Pilot project → proyek percontohan. • Ejaan Yang Disempurnakan sudah direvisi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia • Fuad Hasan: TK (taman kanak-kanak): tidak boleh diajari membaca, maka wajar jika siswa kelas awal belum bisa membaca. • Siswa seharusnya diajari bunyi yang sulit dilafalkan (misal “r”) bukan bunyi bilabial (misal baba, bibi, dll). • Sertifikasi tujuan awalnya adalah untuk guru meningkatkan kompetensinya misal dengan membeli buku, tapi kenyataannya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. • Jangan membuat kalimat “sedangkan” di awal. Kata “namun” bisa di awal kalimat, jangan di awal paragraph. • Metode: teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik: yang digunakan untuk mengumpulkan data • Masalah sample: 5 daerah lalu mengeneralisasi, siasati dengan: misal tahun pertama Indonesia timur dulu, lalu Indonesia barat, dst. → penelitian dilakukan lebih dari satu tahun • Bahasa tulis dari penyaji kurang bagus: banyak kalimat yang tidak ada subjek, banyak kalimat yang merupakan anak kalimat. “namun” digunakan di intra kalimat seharusnya untuk antar kalimat. Kata pasangan/padanan kata: baik-maupun bukan baik-ataupun. • “proses pendidikan” → pen-didik-an (imbuhan pe-an artinya proses) • Tidak ada kata “dikarenakan” → disebabkan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Ejaan “koma” → a, b dan c seharusnya a, b, dan c. anak kalimat mendahului kalimat maka diberi koma. • Konjungsi subordinatif (sehingga, karena, dll) tidak didahului tanda koma. • Perpres 23 tahun 2019 terkait penggunaan bahasa Indonesia. Pilot project → proyek percontohan. • Ejaan Yang Disempurnakan sudah direvisi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia • Fuad Hasan: TK (taman kanak-kanak): tidak boleh diajari membaca, maka wajar jika siswa kelas awal belum bisa membaca. • Siswa seharusnya diajari bunyi yang sulit dilafalkan (misal “r”) bukan bunyi bilabial (misal baba, bibi, dll). • Sertifikasi tujuan awalnya adalah untuk guru meningkatkan kompetensinya misal dengan membeli buku, tapi kenyataannya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. • Jangan membuat kalimat “sedangkan” di awal. Kata “namun” bisa di awal kalimat, jangan di awal paragraph. • Metode: teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik: yang digunakan untuk mengumpulkan data • Di halaman 4 banyak kalimat pengulangan • Dalam makalah disebutkan 4 definisi berbeda tentang GLS, bisa dipilih salah satu definisi yang akan dipakai • Masalah sample: 5 daerah lalu mengeneralisasi, siasati dengan: misal tahun pertama Indonesia timur dulu, lalu Indonesia barat, dst. → penelitian dilakukan lebih dari satu tahun • Bahasa tulis dari penyaji kurang bagus: banyak kalimat yang tidak ada subjek, banyak kalimat yang merupakan anak kalimat. “namun” digunakan di intra kalimat seharusnya untuk antar kalimat. Kata pasangan/padanan kata: baik-maupun bukan baik-ataupun. • “proses pendidikan” → pen-didik-an (imbuhan pe-an artinya proses) • Tidak ada kata “dikarenakan” → disebabkan • Ejaan “koma” → a, b dan c seharusnya a, b, dan c. anak kalimat mendahului kalimat maka diberi koma. • Konjungsi subordinatif (sehingga, karena, dll) tidak didahului tanda koma. • Perpres 23 tahun 2019 terkait penggunaan bahasa Indonesia. Pilot project → proyek percontohan. • Ejaan Yang Disempurnakan sudah direvisi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia • Fuad Hasan: TK (taman kanak-kanak): tidak boleh diajari membaca, maka wajar jika siswa kelas awal belum bisa membaca. • Siswa seharusnya diajari bunyi yang sulit dilafalkan (misal “r”) bukan bunyi bilabial (misal baba, bibi, dll). • Sertifikasi tujuan awalnya adalah untuk guru meningkatkan kompetensinya misal dengan membeli buku, tapi kenyataannya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. • Jangan membuat kalimat “sedangkan” di awal. Kata “namun” bisa di awal kalimat, jangan di awal paragraph. • Metode: teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik: yang digunakan untuk mengumpulkan data

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Hidayati (Puslitjakdikbud) Terkait kurikulum <i>one size fit for all</i>, bagaimana pandangan peneliti, kira-kira pembelajaran dan kurikulum yang seharusnya bentuknya seperti apa? Dari Pusat Kurikulum pernah mencoba membuat kurikulum yang sesuai dengan daerah, ada diversifikasi muatan, namun kesulitan, jadi saat ini dibuat standar minimalnya saja. Jawaban: Anak-anak tidak diberi pelajaran yang sama. Di Sumba: siswa dipetakan. Tema pelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Bukuteks yang dibuat kemdikbud terlalu bias kota. Kami merekomendasikan: untuk 1 semester pertama buku menunggu siswa yang belum bisa membaca, siswa yang sudah bisa membaca dapat menggunakan buku bacaan lain. 2. James Wadouw (Staf Ahli Menteri) Diperjelas konteks daerah seperti apa? Penting karena dalam penerapan di daerah konteks dapat digunakan sebagai determinan. Saya melihat cara guru mengembangkan proses belajar. Berdasarkan standar proses bukan lagi guru memberi tahu, tapi lebih ke anak mencari tahu. Bagaimana mengembangkan literasi dalam anak mencari tahu, apakah hal ini ada dalam praktik baik? Jawaban: Konteks daerah: kelemahan → tidak membuat baseline kajian, prioritas masalah seperti apa dan solusinya seperti apa. Yang dilakukan inovasi sudah baik. Direktorat di Kemdikbud memberikan program ke semua daerah dengan program yang sama rata, padahal bisa diprioritaskan ke yang tertinggal. Jadi seharusnya dilakukan pemetaan terlebih dahulu, lalu dilakukan <i>treatment</i> berbeda sesuai masalah 3. Hidayati (Puslitjakdikbud) Terkait kurikulum <i>one size fit for all</i>, bagaimana pandangan peneliti, kira-kira pembelajaran dan kurikulum yang seharusnya bentuknya seperti apa? Dari Pusat Kurikulum pernah mencoba membuat kurikulum yang sesuai dengan daerah, ada diversifikasi muatan, namun kesulitan, jadi saat ini dibuat standar minimalnya saja. Jawaban: Didorong untuk <i>differentiated learning</i>, guru memahami kemampuan anak berbeda, teknik mengajarnya berbeda. Anak yang belum lancar membaca maka menggunakan teknik membaca terbimbing. Inovasi-puspendik mengembangkan framework aksi: membuat instrument untuk anak kelas 2, 6, 8, 10 --: dimasukkan unsur leveling: bisa jadi anak kelas 1 level pemahamannya kelas 3, dan sebaliknya. Diharapkan ketika hasil AKSI keluar dapat menjadi refleksi terhadap kurikulum 4. James Wadouw (Staf Ahli Menteri) Perlu dilihat bagaimana peran daerah dalam menyelenggarakan literasi. Metode dan teknik dalam literasi apa yang digunakan? Apakah <i>phonic</i>,

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		apakah metode alphabet, atau apa? Dterminan dalam wilayah akan memunculkan metode dan teknik apa yang tepat. Sudah saatnya kita bergeser ke learning. Belum diungkap kemampuan guru berpindah dari schooling ke learning, peran guru seperti apa dalam hal tersebut? Dalam mengembangkan learning. Jawaban: Yang diajarkan kepada guru: bagaimana cara mengajari literasi kelas dasar. Anak SD dituntut sudah bisa membaca, tetapi guru belum punya skiluntuk mengajar hal tersebut. Tekniknya: misal mengajar fonologis, pembelajaran berbeda (differentiated learning) mengajar tema sama dengan tes berbeda, dll Perubahan kemampuan guru: terjadi penurunan guru yang menggunakan metode teacher-centered. Masalah: mengubah teknik mudah namun mengubah mindset sulit. Inovasi juga melatih bagaimana guru menggunakan buku. Terkait comprehension guru (misal HOTS) masih menjadi persoalan. Guru menanggapi siswa salah ketika berbeda dengan buku teks.⁴ 5. Mirdad (UNJ) Tadi disebutkan bahwa anak laki-laki akses lebih tinggi apakah terkait isu gender? Jawaban: Bisa dilihat angka stastistik angka partisipasi. Bahwa angka partisipasi sekolah anak laki-laki lebih tinggi.
4.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 10.00 WIB.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	: Lukman Solihin 1. Latar Belakang Banyak siswa “bersekolah tetapi tidak belajar” (World Bank, <i>Learning To Realize Education’s Promise</i>, 2018). GLS sejak 2016, namun belum ada instrument yang memadai untuk memetakan kondisi penyelenggaraan GLS tersebut. Perlu pemetaan berupa indeks GLS sebagai tolok ukur capaian penyelenggaraan program GLS di sekolah 2. Tujuan Bertujuan untuk menghasilkan model penyusunan Indeks GLS sebagai instrumen pemetaan. Untuk mencapai tujuan itu, maka kajian ini berusaha (1) menentukan dimensi dan indikator yang dianggap representatif melalui kajian pustaka; (2) menelaah ketersediaan, validitas, dan reliabilitas data sekunder yang tersedia di lingkungan Kemendikbud melalui kajian data sekunder; serta (3) melakukan konfirmasi dan menjaring masukan terhadap dimensi dan indikator yang telah disusun melalui verifikasi lapangan. 3. Metode Studi pustaka, analisis data sekunder, dan verifikasi lapangan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		4. Kajian pustaka • <i>A Principal's Guide to Literacy Instruction</i>, Carol S. Beers, James W. Beers, dan Jeffrey O. Smith (2010) menulis satu bab khusus tentang usaha membangun budaya literasi di sekolah (lihat Chapter 2, <i>Establishing a Literacy Culture in School</i>). • Dalam upaya memahami lebih jauh konsep budaya literasi di atas, Sofie Dewayani mengerucutkannya sebagai upaya membentuk habitus literasi di sekolah. Dalam pengertian Bourdieu, 'habitus' merupakan "perilaku, kebiasaan, yang melekat dalam diri seseorang terkait dengan status atau posisi sosial seseorang tersebut dalam kelas masyarakat tertentu." (Sofie Dewayani, "Penumbuhan Budaya Literasi di Madrasah: Perspektif Teoretik"). • budaya membaca merupakan bagian dari budaya literasi, sementara budaya literasi sendiri merupakan bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan. Sedangkan upaya untuk membentuk budaya literasi di sekolah perlu dilakukan dengan menciptakan iklim sekolah yang literat, yaitu dengan dukungan lingkungan fisik, lingkungan sosial-afektif, dan lingkungan akademis. • Aktivitas literasi berdasarkan panduan gerakan literasi: • Pembiasaan: 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Pengembangan: sekolah mulai mendorong siswa untuk menanggapi bacaan melalui lisan maupun tulisan dalam jurnal membaca. Pembelajaran: mengembangkan kemampuan kritis dan analitis siswa dengan memanfaatkan bahan bacaan pengayaan sesuai mata pelajaran 5. Kerangka indeks GLS 6. Hasil analisis data sekunder

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• <i>Pertama</i>, untuk data yang bersumber dari BAN-SM misalnya, tidak memenuhi kriteria “kesamaan tahun pengumpulan data” sehingga tidak dapat digunakan. BAN-SM melakukan akreditasi sesuai dengan kuota yang tersedia. Dengan kata lain, pelaksanaan akreditasi sekolah tidak serentak dilakukan setiap tahun. • <i>Kedua</i>, data dari Rapor PMP tidak dapat terjamin keabsahannya setidaknya karena tiga hal: (1) instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat multitafsir, membingungkan, dan tidak merujuk kepada jawaban yang pasti; (2) pengisian data bersifat “<i>self assessment</i>” tanpa disertai bukti yang memadai; dan (3) olah data menunjukkan hasil yang “mencurigakan” karena tidak ada perbedaan menyolok antara satu daerah dengan daerah lain. 7. Verifikasi data • Indikator perpustakaan perlu diturunkan menjadi beberapa sub-indikator, antar lain sub-indikator lokasi yang strategis, kondisi kenyamanan, jumlah koleksi buku bacaan, perangkat informasi buku, serta rekap kunjungan dan peminjaman buku. Sub-indikator tersebut penting mendapat penilaian khusus karena fungsi perpustakaan akan lebih optimal apabila memenuhi kriteria tersebut. • Memunculkan satu dimensi tambahan, yaitu Dimensi Inovasi. • Dimensi ini terdiri dari dua indikator, yaitu indikator inovasi pada aspek sumber daya pendukung dan aspek aktivitas literasi. • Dari 14 sekolah yang dikunjungi, belum seluruhnya memenuhi indikator ideal. 8. Kesimpulan • Dimensi untuk menyusun Indeks GLS setidaknya terdiri dari dua komponen, yaitu Dimensi Sumber Daya Pendukung (SDP) dan Dimensi Aktivitas Literasi (AL). • data yang dimiliki oleh unit-unit kerja di bawah Kemendikbud belum representatif dan tidak dapat digunakan untuk menyusun indeks. • Dimensi dan indikator ideal yang telah disusun belum seluruhnya terpenuhi. 9. Rekomendasi • Perlu mengumpulkan data secara nasional untuk dapat menyusun indeks literasi sekolah baik melalui Dapodik maupun instrumen Rapor PMP. • Optimalisasi program GLS sebaiknya berpedoman pada dimensi dan indikator yang telah dihasilkan oleh kajian ini.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	- Masalah sample: 5 daerah lalu mengeneralisasi, siasati dengan: misal tahun pertama Indonesia timur dulu, lalu Indonesia barat, dst. → penelitian dilakukan lebih dari satu tahun - Bahasa tulis dari penyaji kurang bagus: banyak kalimat yang tidak ada subjek, banyak kalimat yang merupakan anak kalimat. “namun” digunakan di intra kalimat seharusnya untuk antar kalimat. Kata pasangan/padanan kata: baik-maupun bukan baik-ataupun. “proses pendidikan” → pen-didik-an (imbuhan pe-an artinya proses) - Tidak ada kata “dikarenakan” → disebabkan - Ejaan “koma” → a, b dan c seharusnya a, b, dan c. anak kalimat mendahului kalimat maka diberi koma. - Konjungsi subordinatif (sehingga, karena, dll) tidak didahului tanda koma. - Perpres 23 tahun 2019 terkait penggunaan bahasa Indonesia. Pilot project → proyek percontohan. - Ejaan Yang Disempurnakan sudah direvisi menjadi Ejaan Bahasa Indonesia - Fuad hasan: TK (taman kanak-kanak): tidak boleh diajari membaca, maka wajar jika siswa kelas awal belum bisa membaca. - Siswa seharusnya diajari bunyi yang sulit dilafalkan (misal “r”) bukan bunyi bilabial (misal baba, bibi, dll). - Sertifikasi tujuan awalnya adalah untuk guru meningkatkan kompetensinya misal dengan membeli buku, tapi kenyataannya digunakan untuk emningkatkan taraf hidup. - Jangan membuat kalimat “sedangkan” di awal. Kata “namun” bisa di awal kalimat, jangan di awal paragraph. - Metode: teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik: yang digunakan untuk mengumpulkan data
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat perpoint tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	- James Wadouw (Staf Ahli Menteri) Kita/kementerian bukan institusi teknis yang melaksanakan literasi. kementerian adalah regulator dan fasilitator untuk penyelenggara di daerah. - Mirdad, UNJ Pemetaan literasi zona hijau. Survey seluruh Indonesia membutuhkan dana besar. Jika tidak melakukan survey, apa ada cara lain? Jawaban: Model indeks yang kami lakukan berbasis data sekunder dari dapodik, rapor PMP melalui instrumen PMP. Yang direkomendasikan adalah bagaimana agar data yang dibutuhkan dalam penelitian bisa masuk ke dapodik dan rapor PMP. Jika sudah dikumpulkan maka akan ada data nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur. Indikatornya adalah dimensi/indikator yang kami sudah susun. Nantinya bias kita lihat petanya.dan harapannya kita bisa melihat intervensi yang mana yang diperlukan. Itu yang dibutuhkan oleh

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		kita,karena dapodik dan rapor PMP datanya di sekolah. Bisa leveling ke provinsi atau kab/kota.
4.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 10.00 WIB.

PENDANAAN PENDIDIKAN

EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Yunita Murdiyaningrum, Sudiyono,
Agus Amin Sulistiono, Novrian Satria Perdana
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dana BOP PAUD terkait dengan: 1) pencairan dana BOP; 2) pemanfaatan dana BOP; 3) manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD; 4) kontribusi BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD; dan 5) satuan biaya penyelenggaraa PAUD. Penelitian ini merupakan studi lapangan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, penyebaran kuesioner *online*, dan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Lokasi penelitian di dua belas wilayah kabupaten/kota di Jawa dan luar Jawa. Responden penelitian adalah kepala satuan PAUD yang meliputi TK, TPA, KB, dan SPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOP PAUD memberikan manfaat yang cukup baik terhadap penyelenggaraan PAUD. Namun, terdapat catatan untuk perbaikan: 1) pecairan dana BOP tahun 2019 pada umumnya tidak tepat waktu, antara lain disebabkan oleh perubahan mekanisme penyaluran dana dari satu tahap ke dua tahap, data tidak sesuai, proses administrasi birokrasi, pergantian pejabat di daerah, dan kebijakan daerah terkait dengan hibah dana; 2) persentase pemanfaatan dana BOP belum sesuai dengan petunjuk teknis, terutama untuk kegiatan lainnya mencapai rata-rata 30%, yang melebihi juknis 15%; 3) BOP membantu meningkatkan kegiatan pembelajaran, meringankan beban orang tua, dan meningkatkan jumlah siswa meskipun masih relatif kecil: TK sebesar 4%, KB 6%, SPS 3% , dan TPA 8%; 4) Kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD juga cukup baik untuk TK rata-rata dapat membantu 33% dari seluruh penyelenggaraan: KB 59%, SPS 56%, dan TPA 29%; 5) Rata-rata biaya satuan peyelenggaraan PAUD di dua belas wilayah masing-masing satuan pendidikan PAUD adalah TK Rp1.812.336,00, KB Rp1.009.309,00, SPS= Rp1.050.063,00, dan TPA= Rp2.081.054,00.

Kata kunci: Evaluasi BOP PAUD, evaluasi, BOP, PAUD

A. PENDAHULUAN

Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan PAUD dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga PAUD dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Di samping itu, ketersediaan lembaga PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu diupayakan terus-menerus. Harapan itu perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan PAUD mengingat layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (*the golden age*). Pada jenjang usia inilah titik awal menuju generasi muda bangsa yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan PAUD patut dihargai, pemberian dana stimulus, seperti penguatan kelembagaan, *block grant*, dana rintisan, dan dana stimulan lainnya telah menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk mendirikan PAUD. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan karena akses layanan PAUD akan meningkat. Akan tetapi, hal ini juga akan merugikan apabila izin pendirian PAUD tidak

diperketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang berkompeten. Dengan demikian, masih ada penekanan kualitas dari setiap PAUD yang akan didirikan, tidak semata-mata mengejar kuantitas.

Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan PAUD berkualitas melalui ketersediaan satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam PAUD, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, daerah, serta masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD, terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2017/2018 APK PAUD mencapai 74,28%, sebuah angka yang cukup besar yang menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan anak usia dini.

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas layanan PAUD yang berkualitas, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD. Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu agar memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. BOP diberikan kepada anak melalui lembaga PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan penyelenggaraan BOP PAUD, pada tahun 2019 telah ada mekanisme baru dalam penyelenggaraan BOP PAUD, yang pada tahun sebelumnya menggunakan satu tahap penyaluran dan tahun 2019 menggunakan dua tahap penyaluran. Untuk melihat efektivitas program dana BOP dan apakah dana BOP tersebut sudah tepat sasaran atau masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis dana BOP PAUD, perlu dilakukan evaluasi. Terkait dengan hal tersebut, Puslitjakdikbud melakukan penelitian efektivitas dana alokasi khusus (DAK) nonfisik BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD sehingga diperoleh kebijakan layanan PAUD yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional PAUD.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengevaluasi penerimaan BOP PAUD; 2) mengetahui manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD; 3) mengetahui kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan PAUD; dan 4) mengetahui unit *cost* satuan biaya PAUD ideal sesuai dengan standar. Hasil kajian ini dirumuskan untuk mendapatkan kebijakan anggaran bantuan dana operasional bagi lembaga PAUD secara tepat sasaran dengan besaran dana sesuai dengan kebutuhan lembaga PAUD. Ketepatan dan besaran anggaran dana BOP PAUD diharapkan dapat meningkatkan layanan yang berkualitas dan memenuhi ketentuan Standar Nasional PAUD.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara jasmani maupun rohani, agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (Martinis Yamin & Jamilah, 2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14).

Tujuan PAUD secara khusus adalah (1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; (2) mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan (Trianto, 2011).

Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan raudatul athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis (SPS) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOP PAUD

Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu agar memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Sesuai dengan fokus PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, prioritasnya adalah anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Pentingnya BOP bagi PAUD karena berbagai alasan: a) alasan pendidikan: PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; b) alasan ekonomi: PAUD merupakan investasi yang menguntungkan, baik bagi keluarga maupun pemerintah; c) alasan sosial, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan; dan d) alasan hak/hukum: PAUD merupakan hak setiap sembilan belas anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang (UNESCO dalam Rahayu Nur'aini, 2015).

Dalam petunjuk teknisnya, prinsip pelaksanaan penggunaan DAK nonfisik BOP PAUD meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK nonfisik BOP PAUD;
- d. adil, yaitu semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan anak usia dini;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal.

Sasaran program DAK nonfisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas). Penggunaan DAK nonfisik BOP PAUD mencakup tiga komponen, yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Penggunaan tiga komponen

tersebut telah ditentukan dalam juknis dengan besaran presentasi, yaitu minimal 50% untuk kegiatan pembelajaran dan bermain; maksimal 35 kegiatan pendukung; dan maksimal 15% untuk kegiatan lainnya.

Dana BOP PAUD digulirkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu PAUD. Alasannya mutu pendidikan merupakan suatu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pihak lembaga dalam menciptakan anak didik yang berkualitas (Rahayu, 2015). Sekolah/lembaga dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah/lembaga tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik serta mempunyai lembaga atau badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya.

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah/lembaga dalam menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah/lembaga yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah/lembaga akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang biasa dibawah umur enam tahun. Menurut Muhson (dalam Rahayu, 2015), peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatih dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali.

Evaluasi dana BOP PAUD mengacu pada ketentuan pendanaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan (biaya personalia dan biaya nonpersonalia), biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Data yang digunakan untuk menganalisis kajian efektivitas dana BOP PAUD bersumber dari jumlah anak usia yang terlayani dan jumlah dana BOP PAUD yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengalokasian besaran DAK nonfisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;
- b. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

3. Efektivitas Program

Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi (Gibson et.al dalam Bungkaes, 2013). Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), makin lebih efektif dalam menilai mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial, yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok, dan organisasi.

Efektivitas juga dimaknai sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran (Etzioni dkk. dalam Hamzah, 2013). Dalam pandangan ini, jika dalam suatu program telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan, hal itu sudah dapat dikatakan efektif. Efektivitas juga didefinisikan suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan terlebih dahulu (Komaruddin, 1994). Pada dasarnya dalam memaknai efektivitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam suatu program kegiatan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Emerson).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan dukungan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dilihat secara komprehensif program bantuan DAK nonfisik BOP PAUD, bagaimana program tersebut berjalan mulai dari penerimaan, bagaimana manfaat program tersebut dalam penyelenggaraan lembaga PAUD, dan bagaimana kontribusinya dalam keseluruhan penyelenggaraan PAUD. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data terkait dengan ketepatan dan mekanisme penerimaan BOP PAUD, penggunaan atau pemanfaatan dana BOP PAUD, rata-rata satuan biaya operasional menurut lembaga, kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan lembaga PAUD, serta biaya operasional lembaga per wilayah di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan dan Mekanisme

Pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 di seluruh wilayah sampel secara umum tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain akurasi data siswa tidak sesuai (antara data saat pengajuan dengan data pada masa pencairan dana), proses administrasi dan birokrasi di daerah yang memerlukan banyak pengesahan, pergantian pejabat di daerah, dan peraturan daerah terkait dengan dana hibah. Dari dua belas wilayah sampel daerah yang telah menerima dana BOP sampai dengan Juli 2019 baru tiga daerah yang telah mencairkan dana BOP, yaitu Kota Solo, Kota Batu, dan Kota Banjarbaru. Hal lain yang ikut memengaruhi proses keterlambatan pencairan dana BOP adalah terjadinya perubahan mekanisme penyaluran dana BOP dari satu tahap pada tahun 2018 menjadi dua tahap penyaluran pada tahun 2019.

Adanya keterlambatan pencairan tersebut, menurut diakui oleh satuan PAUD, sangat memengaruhi pembiayaan terhadap penyelenggaraan PAUD. Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan pembelajaran siswa yang seyogianya dianggarkan dari dana BOP harus berjalan dengan dana yang diupayakan secara mandiri oleh satuan PAUD. Akibat dari keterlambatan pencairan dana BOP PAUD juga berdampak terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana BOP yang hanya dua minggu setelah dana BOP cair dan diterima, sehingga hal ini cukup menyulitkan.

2. Jumlah Dana

Besaran dana BOP yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk lembaga PAUD adalah sebesar Rp600.000,00 per siswa setiap tahun. Sasarannya adalah lembaga penyelenggara PAUD dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan PAUD yang memiliki jumlah minimal dua belas peserta didik. Secara umum dana yang diterima oleh lembaga telah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di satuan PAUD. Jika ada perbedaan, hal tersebut dialami oleh sebagian kecil lembaga yang disebabkan oleh data terbaru jumlah peserta didik belum sampai ter-*update* dalam sistem dapodik. Dengan demikian, pada saat *cut off* data sebagai dasar pencairan dana masih menggunakan data lama. Hal ini tidak berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran karena dapat disiasati dengan subsidi silang dari sumber dana lainnya, terutama dari iuran bulanan dari orang tua siswa.

3. Jumlah Siswa

Sebagian besar responden menyatakan bahwa jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang ada di satuan PAUD. Perhitungan pencairan dana BOP didasarkan pada jumlah peserta didik yang dilayani satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang tercatat dalam data pokok pendidikan PAUD per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut, menurut responden, kurang tepat karena rawan menimbulkan ketidaktepatan jumlah penerimaan dana yang diakibatkan terdapatnya selisih jumlah siswa pada suatu satuan PAUD. Dengan demikian, akan lebih akurat jika dasar pemberian dana BOP adalah data jumlah siswa pada awal tahun ajaran yang sedang berlangsung.

4. Manfaat dan Dampak BOP PAUD

a. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Dana BOP sangat membantu kegiatan pembelajaran, melalui dana BOP satuan PAUD yang semula kekurangan sarana pembelajaran dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dalam penyelenggaraan pembelajaran berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi anak dalam belajar. Pada dasarnya pertumbuhan motorik anak akan banyak terstimulus saat bermain. Oleh karena itu, maka seharusnya sarana pembelajaran menjadi utama dalam pembelajaran anak di PAUD sehingga tenaga pendidik dan penyelenggara/pengelola satuan PAUD dapat mengantisipasinya dengan melengkapi kebutuhan anak tersebut dengan sarana belajar yang inovatif yang ada di sekitar anak, melalui berbagai inovasi tidak harus melulu dari bahan pabrikan namun bahan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, maka kelebihan bahan habis pakai dapat dimanfaatkan satuan PAUD untuk penggunaan kegiatan pembelajaran dan bermain lainnya sehingga persentase yang dialokasikan oleh Pemerintah dapat terpenuhi dengan maksimal.

b. Peningkatan Akses Siswa Miskin

Kontribusi BOP terhadap perkembangan jumlah siswa PAUD untuk semua satuan PAUD cukup baik, rata-rata terdapat peningkatan walaupun persentasenya masih kecil. Hal ini dikuatkan oleh dinas pendidikan dalam diskusi kelompok terpusat (DKT) bahwa dengan adanya BOP banyak satuan PAUD baru yang didirikan oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang semula terbatas layanan PAUD-nya saat ini siswanya semakin bertambah. Peningkatan untuk siswa TK sebesar 4%, KB 6%, SPS 3% , dan TPA sebesar 8%. Peningkatan jumlah siswa PAUD untuk TPA tergolong paling tinggi di antara satuan PAUD lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pasangan usia muda yang keduanya sama-sama bekerja dan tidak mempunyai asisten rumah tangga, sehingga menitipkan anaknya di TPA (Grafik 1).

Peningkatan jumlah siswa ini diakui oleh penyelenggara lembaga tidak serta-merta membawa peningkatan terhadap akses siswa miskin, bahkan di Kota Batu diakui bahwa sangat sulit mencari siswa miskin. Pada sebagian besar daerah akses siswa miskin pada satuan PAUD, jumlahnya juga sedikit hanya ada 2--3 siswa per satuan PAUD. Layanan PAUD terhadap siswa kurang mampu di satuan PAUD umumnya memiliki kebijakan subsidi silang dan pemberian keringanan biaya, seperti pemberian potongan iuran bulanan, bantuan seragam dari alumni, dan cicilan pembayaran uang seragam selama satu tahun.

c. Kontribusi BOP dalam Keseluruhan Biaya Penyelenggaraan PAUD

1. Kontribusi BOP PAUD terhadap Penyelenggaraan PAUD

Berdasarkan hasil survei di satuan PAUD, ditemukan bahwa bantuan dana BOP cukup membantu menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD untuk TK rata-rata sebesar 33% dari seluruh penyelenggaraan, KB 59%, SPS 56% , dan TPA 29%. Kontribusi BOP untuk penyelenggaraan operasional di TPA baru 29% persen dari seluruh biaya operasional di TPA, karena biaya di TPA tergolong tinggi jika dibandingkan dengan satuan PAUD lainnya, sehingga TPA

harus memenuhi kekurangan biaya operasional penyelenggaraan TPA sebesar 71%. Kekurangan biaya operasional satuan PAUD umumnya dipenuhi dengan iuran SPP pada orang tua dengan jumlah bervariasi. Untuk TK swasta yang dikelola oleh masyarakat/yayasan memungut uang SPP dengan besaran bervariasi mulai Rp50.000,00 hingga di atas Rp250.000,00. Besarnya pungutan/iuran bulanan ini bergantung pada besar-kecilnya yayasan yang menaungi. Di beberapa wilayah kab/kota ada batasan maksimal besarnya iuran bulanan yang diperbolehkan ditarik dari orangtua, seperti di Kota Batu, besarnya iuran yang diperbolehkan ditarik dari orang tua tidak melebihi Rp150.000,00.

Kekurangan biaya operasional untuk KB dan SPS dipenuhi dengan memungut uang SPP/iuran bulanan pada orang tua anak. Besaran uang SPP bergantung pada kondisi lembaga, mulai Rp10.000,00 sampai Rp50.000,00 per anak per bulan. Perbedaan iuran bulanan yang dibebankan kepada orang tua antara lembaga TK dengan KB dan SPS jelas menunjukkan kondisi status sosial ekonomi peserta didik yang dilayani di masing-masing satuan jenis layanan PAUD. Sebagian besar peserta didik yang terdapat pada lembaga SPS berlatar belakang ekonomi rendah sehingga penyelenggara lembaga tidak bisa membebankan iuran yang terlalu banyak kepada orang tua siswa. Dengan adanya BOP PAUD sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya.

2. Realisasi Penggunaan BOP PAUD Berdasarkan Juknis

Realisasi penggunaan dana BOP PAUD secara umum proporsinya belum sesuai dengan juknis. Penggunaan BOP untuk komponen kegiatan pembelajaran dan bermain di TK sebesar 47%, lebih kecil dibandingkan dengan juknis yang minimal 50%. Dari jumlah itu sebanyak 50% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik 29% dan APE 21%. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 32%, sedangkan pada juknis yaitu sebesar 35%. Untuk kegiatan lain-lain realisasi penggunaan sebesar 21%, sedangkan di juknis 15%

Penggunaan dana BOP untuk kelompok bermain pada komponen pembelajaran sebesar 47%, sedangkan pada juknis minimal 50%. Kegiatan pendukung untuk KB sebesar 33%, di bawah juknis, yaitu 35%. Untuk kegiatan lain-lain dana yang dimanfaatkan sebesar 20% sementara pada juknis 15%, merupakan persentase pemanfaatan dana terbesar dibanding dengan komponen lainnya. Kelompok SPS memanfaatkan dana pembelajaran dan bermain, yakni sebesar 46% sementara pada juknis sebesar 50%. Untuk kegiatan pendukung sebesar 34% dan juknis 35%. Sementara untuk kegiatan lainnya sebesar 20% melebihi juknis yang seharusnya 15%. Proporsi penggunaan dana BOP untuk TPA pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 37% lebih kecil dari juknis yang sebesar minimal 50%. Dari jumlah itu sebanyak 48% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, APE 33% dan penyediaan alat 19%. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 40%, lebih besar dari juknis maksimal 35%. Sementara Untuk kegiatan lain-lain sebesar 23% sementara di juknis maksimal 15%.

d. Sumber Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala PAUD, diketahui bahwa sumber pembiayaan operasional lembaga, selain dari DAK nonfisik BOP PAUD, adalah dari iuran orang tua dan juga dari pemerintah daerah. Pembiayaan yang diperoleh dari iuran orang tua merupakan sumber terbesar yang saat ini diperoleh oleh lembaga. Bagi daerah yang telah mengalokasikan bantuan bahan atau peralatan habis pakai maka tidak diperbolehkan lagi mengalokasikan penggunaan dana BOP PAUD untuk kebutuhan yang sama. Dengan demikian, lembaga sebenarnya dapat mengatur pemanfaatan dana BOP untuk memenuhi kebutuhan terhadap APE yang masih banyak dikeluhkan belum dimiliki oleh lembaga. Namun, dengan temuan ini diketahui bahwa belum semua daerah berkontribusi terhadap penyelenggaraan PAUD. Dengan demikian,

Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagai pemegang kebijakan, harus mengupayakan cara yang tepat untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam untuk penyelenggaraan PAUD.

e. Satuan Biaya Penyelenggaraan PAUD

Satuan biaya operasional PAUD dihitung berdasarkan biaya operasional personalia dan biaya operasional nonpersonalia. Biaya operasional satuan pendidikan, antara lain meliputi honor/insentif/tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, asuransi, dan perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei, biaya operasional pada lembaga TPA sebesar Rp2.081.054,00 untuk setiap anak, dan jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan TK, KB, dan SPS. Sementara untuk biaya operasional TK dalam satu tahun sebesar Rp. 1.812.336,00, kelompok bermain (KB) Rp. 1.009.309, 00 satuan PAUD sejenis (SPS) sebesar 1.050,063.00.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menjadi simpulan penelitian ini.

- a) Pencairan dana BOP di dua belas wilayah sebagian besar tidak tepat waktu, yang pada umumnya disebabkan oleh perbedaan data ketika pendataan dan penyaluran, terkait dengan peraturan daerah tentang dana hibah, birokrasi di daerah, pergantian pejabat di daerah, dan perubahan mekanisme peyaluran dana BOP yang semula satu tahap penyaluran pada tahun 2018 menjadi dua tahap tahun 2019 sehingga banyak satuan PAUD dan pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya.
- b) Dana BOP sangat membantu kegiatan pembelajaran, penyediaan media dan sumber belajar, dan meringankan beban orang tua. BOP juga cukup baik dalam membantu peningkatan mutu pembelajaran di satuan PAUD serta meningkatkan jumlah siswa di semua satuan PAUD karena melalui BOP PAUD biaya pendidikan jadi lebih terjangkau. Peningkatan jumlah siswa masih relatif kecil pada setiap PAUD untuk TK 4%, KB 6%, SPS 3%, dan TPA 8%. Dampak BOP belum terlihat peningkatan akses siswa miskin, bahkan di beberapa wilayah akses siswa miskin terhadap layanan PAUD sangat kecil.
- c) Dana BOP berkontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD, bahkan banyak lembaga yang mengandalkan dana BOP sebagai dana utama karena iuran dari orang tua sangat kecil. Kontribusi dana BOP dalam penyelenggaraan PAUD pada setiap satuan bervariasi. Untuk KB cukup besar 59%, SPS 56%, TK 33% , dan TPA sebesar 29%.
- d) Proporsi penggunaan dana BOP PAUD pada semua jenis satuan PAUD belum sesuai dengan juknis. Rata-rata proporsi penggunaan dana untuk komponen kegiatan pembelajaran lebih rendah dari juknis, sedangkan untuk komponen kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya melebihi juknis.
- e) Sumber pembiayaan operasional penyelenggaraan PAUD adalah dari orang tua, pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dengan porsi terbesar pada saat ini masih bersumber dari iuran orang tua.
- f) Satuan biaya penyelenggaran PAUD pada setiap satuan pendidikan berbeda. Hal ini terkait dengan kegiatan dan aktivitas pembelajaran masing-masing. Hasil perhitungan satuan biaya penyelenggaraan PAUD dalam satu tahun untuk setiap lembaga berdasarkan tingkat kemahalan wilayah adalah TK Rp. 1.812.336,00, KB Rp1.009.309,00, SPS Rp1.050,063,00, dan TPA Rp2.081,054,00.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut.

- a) Diperlukan penyederhanaan mekanisme peyaluran DAK nonfisik BOP PAUD untuk mencegah adanya keterlambatan pencairan dana di daerah.
- b) Perlu dilakukan revisi juknis penggunaan DAK nonfisik BOP PAUD terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana dan penjelasan rincian penggunaan dana pada setiap komponen.
- c) Perlu dinaikkan kontribusi DAK nonfisik BOP PAUD dalam membantu penyelenggaraan PAUD pada saat ini masih relatif kecil sebesar 33% untuk peningkatan layanan PAUD BOP.
- d) Perlu dibedakan besaran BOP berdasarkan aktivitas, khususnya untuk PAUD usia 4--6 tahun untuk persiapan masuk SD.
- e) Perlu dibedakan dana BOP berdasarkan tingkat kemahalan daerah
- f) Perlu dilakukan sinkronisasi untuk membantu dana PAUD dengan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N.W. 2009. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2, Nomor 1, Februari 2009.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Kiyai Burhanuddin. 2013. "Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". *Acta Diurna*, vol. - (-) : 1--23
- Direktorat Pembinaan PAUD. *Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2015/2016*.
- Hamzah, Amriani. 2013. *Perilaku Organisasi*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Hariyanto. 2015. "Analisis Kondisi Paud di Indonesia". <http://hariyanto-hary.blogspot.co.id/2012/05/pendidikan-paud.html> . Diakses 28 November 2015.
- <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/03/ini-bantuan-paud-tahun-2016.html>, diunduh 4 September 2016. "Ini Program Bantuan PAUD Tahun 2016".
- <http://www.volimaniak.com/2016/03/daftar-penerima-bansos-atau-bop-paud.html>. "Daftar Penerima Bansos atau BOP PAUD Tahun 2016". Diunduh 4 September 2016.
- <http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/02/juknis-bop-paud-2016.html> diunduh 4 September 2016. "Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016".
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Martini dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Rahayu, Nur'aini, 2015. "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo". Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana, IAIN Surakarta
- Siagian, Sondang. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Tedjawati, 2012. "Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo". *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 5 (2), hlm. 227-238.
- Tedjawati, 2013. "Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19 (3), hlm. 346-363.
- "Teori Efektivitas Menurut Pendapat Para Pakar Terpercaya". 2015. <http://www.feedsia.com/2015/08/teori-efektifitas-menurut-pendapat-para.html#>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNICEF. 2009. *Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap. (PAUD Holistik untuk Semua" di Indonesia: Mendukung Masyarakat dalam Menjembatani Kesenjangan)*.

PENDANAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Irsyad Zamjani, Herlinawati, Novrian Satria Perdana,
Ferdi Widiputera, Siti Nur Azizah
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan secara umum terbagi atas tiga komponen: (1) biaya operasional yang terdiri atas biaya operasional personalia (BOP) dan biaya operasional nonpersonalia (BONP); (2) biaya investasi; dan (3) biaya pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besaran biaya satuan dari ketiga jenis biaya pendidikan tersebut pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Perkecualian dibuat untuk biaya investasi dan studi ini hanya menganalisis biaya satuan untuk investasi sumber daya manusia (SDM). Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel 441 sekolah dan 4.752 orang tua dan siswa yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian, SLB adalah satuan pendidikan dengan nilai BOP tertinggi, sedangkan SMK menjadi satuan pendidikan dengan nilai kebutuhan paling besar untuk tiga jenis biaya lainnya (BONP, biaya investasi SDM, dan biaya pribadi). Kecuali pada SMK, selisih dari nilai bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap hasil perhitungan BONP relatif kecil. Namun, selisih biaya satuan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap kebutuhan biaya pribadi hasil perhitungan studi ini masih cukup besar. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian besaran biaya satuan BOS dan PIP agar dapat mendekati kebutuhan riil BONP dan biaya pribadi.

Kata kunci: biaya investasi SDM, biaya operasional, biaya pribadi, BOS, PIP

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang membutuhkan biaya. Menurut PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan ditanggung bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara umum terdapat tiga jenis biaya pendidikan yang ditanggung oleh ketiga unsur tersebut, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi. Pemerintah Pusat secara konsisten dan berkelanjutan telah mendanai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah melalui berbagai skema, di antaranya: dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan untuk biaya investasi, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk biaya operasional nonpersonalia, dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk biaya pribadi siswa kurang mampu. Menurut kajian Puslitjaknov (2008), adanya berbagai skema pendanaan Pemerintah, terutama BOS, membuat beban orang tua semakin ringan.

PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan juga mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan harus mengandung tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Untuk menjamin penerapan ketiga prinsip tersebut standar biaya pendidikan perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan indikator ekonomi, dinamika kebutuhan, dan target capaian pendidikan itu sendiri. Hal ini terutama berlaku untuk biaya yang rutin dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu biaya

operasional dan personal. Menurut hasil kajian dari BPK pada 2018, besaran biaya operasional dan personal yang selama ini dibelanjakan oleh Pemerintah untuk mendanai pendidikan tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, studi pendanaan pendidikan yang akan dilakukan harus mempertimbangkan antara dinamika kebutuhan dan variasi antarwilayah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah berapa besaran biaya satuan operasional, biaya satuan investasi SDM, dan biaya satuan pribadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menghitung besaran biaya satuan operasional, biaya satuan investasi SDM, dan biaya satuan pribadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Biaya Pendidikan

Teori tentang biaya pendidikan cukup beragam. Supriadi (2004) mendefinisikan biaya pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Dari segi jenis, Fattah (2000) membagi biaya pendidikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang secara langsung terkait dengan pendidikan, seperti alat tulis dan seragam. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak terkait secara langsung dengan sekolah, tetapi mendukung aktivitas sekolah, seperti biaya kesehatan dan foregone earning. Dari segi sumber biaya, Bray (1996) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah keseluruhan yang dapat diperoleh dari Pemerintah, keluarga, masyarakat, dan agen lain yang relevan.

Untuk konteks Indonesia, konsep biaya pendidikan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut dinyatakan secara garis besar ada tiga jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Terkait dengan biaya satuan pendidikan, mencakup empat ragam yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan juga terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya operasional dalam kedua jenis biaya itu terdiri atas biaya operasional personalia (BOP) dan nonpersonalia. Dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dari biaya pendidikan mencakup biaya investasi, operasional, dan pribadi. Mengenai sumber pendanaan pendidikan, Pasal 51 peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tiga unsur, yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat pula Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non-Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah dan Madrasah. Peraturan yang terakhir ini mengatur secara terperinci besaran biaya hingga indeks kemahalan pendidikan untuk setiap kabupaten/kota. Ini salah satunya menjadi dasar apakah besaran bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah telah memenuhi standar atau belum. Sayangnya, peraturan ini telah berumur lama untuk sebuah regulasi yang mengatur soal besaran biaya yang rentan berubah sesuai dengan perubahan indikator ekonomi. Besaran standar biaya tersebut belum diperbarui hingga saat ini.

2. Perhitungan Biaya Satuan

Menurut Fattah (2000), biaya satuan merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa di sekolah. Dengan demikian, biaya satuan pendidikan dapat dihitung dengan cara membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa sekolah. Dalam bentuk persamaan, biaya satuan pendidikan itu dapat ditulis sebagai:

$$S_b(s,t) = f(K(s,t) \text{ dan } M(s,t))$$

Keterangan:

S_b = biaya satuan per siswa per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah siswa

S = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

Untuk menghitung biaya satuan pribadi dilakukan penjumlahan dari seluruh pengeluaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya selama satu tahun, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dari telaah sejumlah literatur, seperti Ghazali dkk. (2003) dan Supriadi (2004), ada variasi komponen biaya pendidikan untuk tiap jenis biaya. Tidak semua komponen tersebut relevan dengan kondisi kebijakan saat ini. Ghazali dkk., misalnya, memasukkan komponen forgone earning dalam biaya pribadi. Ini adalah potensi penghasilan keluarga yang hilang karena anak bersekolah. Dalam konteks kebijakan sistem jaminan sosial yang cukup ekspansif saat ini, konsep tersebut kurang relevan. Oleh karena itu, secara ringkas dapat ditentukan jenis dan komponen biaya pendidikan yang dianalisis dalam penelitian ini.

3. Beberapa Penelitian Terdahulu

a. Biaya Satuan pada Satuan Pendidikan Reguler

Penghitungan biaya pendidikan telah dilakukan oleh sejumlah penelitian. Pada tahun 2003 Balitbang, Kemendikbud, telah melakukan survei untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan dasar dan menengah. Survei tersebut dilakukan di 56 kabupaten/kota dari 15 provinsi di seluruh Indonesia yang melibatkan sekolah pada setiap jenjang dan status, dalam hal ini termasuk satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan biaya satuan dari satuan pendidikan formal di bawah kewenangan Kemendikbud.

Tabel 1 Biaya Satuan Pendidikan Menurut Jenjang

Jenis Biaya	SD (Rp 000)		SMP (Rp 000)		SMA (Rp 000)		SMK (Rp 000)	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1. Operasional	1.150	903	1.715	1.374	2.005	1.787	2.676	1.495
2. Investasi	713	660	1.056	1.024	1.067	1.170	2.061	3.001
3. Personal	5.967	7.506	7.528	7.862	9.508	9.158	11.154	10.325
Total	7.830	9.069	10.299	10.260	12.580	12.115	15.891	14.821
Negeri & Swasta	8.450		10.280		12.348		15.356	

Sumber: Diolah dari Ghazali dkk. (2003)

Jenis biaya pendidikan yang dihitung mencakup biaya operasional (personalia dan nonpersonalia), biaya investasi, dan biaya personal. Hasil studi tersebut menjadi dasar dari penetapan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang mulai digulirkan pada tahun 2005. Dari survei tersebut diperoleh angka biaya pendidikan sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Kajian Balitbang, Kemendikbud, secara ketat membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Ada hal yang menarik untuk dicatat bahwa biaya operasional sekolah negeri umumnya lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh sekolah negeri pada umumnya memiliki kapasitas lebih besar sehingga membutuhkan dana besar. Pada masa lalu, sekolah swasta besar belum banyak berkembang. Untuk biaya investasi, sekolah negeri lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta pada jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK biaya sekolah swasta lebih tinggi. Hal itu sebaliknya terjadi untuk biaya personal, yang dalam hal ini, sekolah negeri lebih rendah pada jenjang pendidikan dasar dan lebih tinggi pada jenjang menengah. Dengan menelaah Tabel 1 di atas, rata-rata total biaya satuan pendidikan untuk SD sebesar Rp8.450.000,00, untuk SMP sebesar Rp 10.280.000,00, untuk SMA sebesar Rp 12.348.000,00, dan untuk SMK sebesar Rp 15.356.000,00. Ini adalah rata-rata yang kami hitung dari besaran total sekolah negeri dan swasta.

Tabel 2 Biaya Satuan Operasional Menurut Jenjang dan Status

Jenis Biaya	SD		SMP		SMA		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1. Operasional Personalia	932	677	1.407	1.003	1.684	1.304	2.194	1.121
2. Operasional Nonpersonalia	219	226	309	371	321	482	482	374
Total Biaya Operasional	1.150	903	1.715	1.374	2.005	1.787	2.676	1.495

Sumber: Diolah dari Ghazali dkk. (2003)

Untuk biaya operasional, porsi terbesar diperuntukkan bagi kebutuhan operasional personalia, yaitu 81% berbanding 19% untuk biaya operasional nonpersonalia. Biaya operasional personalia terutama diperuntukkan bagi gaji dan honor guru. Yang perlu dicatat dari perincian biaya operasional ini adalah perbandingan sekolah negeri dan swasta. Untuk BOP, besaran sekolah negeri jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta untuk semua jenjang. Hal ini wajar karena sekolah negeri memiliki guru dengan jenjang karier dan struktur gaji yang lebih mapan dibandingkan sekolah swasta. Sebaliknya, biaya operasional nonpersonalia lebih besar pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, kecuali pada jenjang SMK. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sekolah swasta lebih sedikit memiliki siswa sehingga pembagiannya lebih kecil.

Dalam hal biaya pribadi pendidikan, terdapat pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi biayanya. Jika dicermati per komponen, kebutuhan konsumsi menyumbang porsi terbesar pada semua jenjang. Konsumsi di sini dihitung dari biaya makan sehari para siswa agar dapat bersekolah dengan baik. Selain konsumsi, biaya lain yang besar adalah akomodasi dan uang saku. Biaya konsumsi dan akomodasi ini muncul karena survei juga menyasar sekolah berasrama sebagai responden penelitian. Untuk sekolah swasta, komponen iuran sekolah juga menjadi komponen biaya pribadi yang cukup besar, terutama pada jenjang menengah.

Tabel 3 Biaya Satuan Pribadi Menurut Jenjang dan Komponen

Komponen Biaya	Jenjang dan Jenis Pendidikan (Rp 000)							
	SD		SMP		SMA		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1. Buku dan ATS	226	265	263	265	379	316	290	303
2. Pak. & Perl. Sek.	321	375	361	332	478	425	424	427
3. Akomodasi	716	815	725	829	828	849	759	730
4. Transportasi	257	406	376	372	557	495	557	465
5. Konsumsi	2.280	2.646	2.361	2.262	2.561	2.644	2.850	2.529
6. Kesehatan	290	412	248	291	288	314	382	365
7. Karyawisata	44	66	74	55	113	84	116	93
8. Uang Saku	460	525	663	629	942	814	885	813
9. Kursus	118	188	204	85	302	194	178	117
10. Iuran Sekolah	156	479	348	655	604	707	878	1.017
Total	4.867	6.178	5.624	5.774	7.054	6.842	7.318	6.860
Negeri & Swasta	5.523		5.699		6.948		7.089	

Sumber: Diolah dari Ghozali dkk. (2003)

Kajian biaya pribadi ini juga pernah dilakukan oleh Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, pada tahun 2019. Kajian ini disusun untuk menghitung kebutuhan biaya satuan Program Indonesia Pintar (PIP). Berbeda dari kajian sebelumnya yang menggunakan survei berbasis satuan pendidikan, kajian ini menggunakan data dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berbasis survei rumah tangga.

Salah satu kelemahan dari survei ini adalah tidak adanya pemisahan antara SMA dan SMK. Keduanya disatukan dalam kategori sekolah menengah. Komponen yang diperoleh dari hasil Susenas juga sedikit berbeda dari kajian Balitbang, Kemendikbud. Pada pembahasan ini disajikan data yang belum diolah dan dianalisis untuk kepentingan penghitungan kebutuhan biaya satuan PIP. Berdasarkan perhitungan dari hasil Susenas MSBP, komponen biaya pribadi paling tinggi adalah uang saku. Selanjutnya, komponen terbesarnya bervariasi menurut jenjang dan status satuan pendidikan (lihat Tabel 4).

Tabel 4 Biaya Satuan Pribadi Pendidikan Menurut Jenjang dan Status Sekolah

Jenis Pengeluaran	SD/MI/PAKET A/SDLB			SMP/MTS/PAKET B/SMPLB			SMA/MA/PAKET C/SMLB/SMK/MAK		
	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta
1. Uang pendaftaran	44.628	433.427	128.522	185.669	607.540	307.422	264.058	1.020.804	523.577
2. SPP	48.386	929.710	238.555	162.550	924.670	382.500	651.476	1.921.753	1.087.106
3. Komite Sekolah	21.801	58.647	29.752	71.439	93.153	77.706	92.204	167.206	117.925
4. Ekstrakurikuler	11.197	38.931	17.181	17.021	38.974	23.357	20.024	53.237	31.414
5. Pakaian	244.000	291.230	254.191	334.290	354.310	340.068	310.726	361.026	327.976
6. Buku	37.921	141.648	60.303	61.043	105.345	73.828	111.265	150.839	124.836
7. Bahan belajar	32.470	62.931	39.043	49.035	76.129	56.854	45.351	85.962	59.278
8. Alat tulis	75.183	94.050	79.254	91.453	103.177	94.836	93.856	120.808	103.099
9. Praktikum	5.336	10.514	6.453	14.964	23.238	17.352	56.418	103.153	72.445
10. Kursus	7.384	25.888	11.377	10.272	13.969	11.339	10.925	21.775	14.646

Jenis Pengeluaran	SD/MI/PAKET A/SDLB			SMP/MTS/PAKET B/SMPLB			SMA/MA/PAKET C/SMLB/SMK/MAK		
	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta	Negeri	Swasta	Negeri + Swasta
11. Ujian	2.769	19.351	6.347	6.802	42.998	17.248	11.941	89.105	38.403
12. Study Tour	8.132	22.407	11.212	43.171	53.303	46.095	51.910	99.454	68.215
13. Uang saku	1.171.863	1.371.136	1.214.862	1.919.610	2.194.681	1.998.997	2.463.541	3.213.321	2.720.671
14. Transportasi	234.094	447.671	280.179	729.583	754.661	736.821	1.116.961	1.341.629	1.194.009
15. Lainnya	16.347	69.199	27.751	34.903	73.414	46.017	28.231	80.779	46.252
Rata-Rata Biaya Total	1.961.511	4.016.741	2.404.982	3.731.804	5.459.563	4.230.439	5.328.888	8.830.850	6.529.853

Sumber: Susenas MSBP 2018

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara besaran biaya hasil perhitungan Susenas MSBP tahun 2018 dan perhitungan Balitbang tahun 2003. Hal yang menarik, perhitungan Susenas yang muncul 15 tahun di belakang justru lebih kecil dibandingkan perhitungan Balitbang. Semestinya, indikator ekonomi, seperti inflasi yang meningkat membuat besaran biaya justru naik bukan turun. Hal ini disebabkan oleh faktor teoretis, terutama metodologis. Secara teoritis, konsep tentang komponen pembentuk biaya pribadi berbeda antara Susenas dan Balitbang. Balitbang memasukkan komponen konsumsi, akomodasi, dan kesehatan yang berbiaya tinggi, sedangkan Susenas tidak. Selain itu, faktor metodologis dalam pengolahan data juga berpengaruh. Susenas tampaknya memperlakukan sama setiap responden, baik yang mengeluarkan biaya maupun tidak, sehingga rata-ratanya lebih kecil. Balitbang hanya menghitung dari rata-rata yang mengeluarkan biaya. Penelitian yang kami lakukan tahun 2019 ini memadukan antara keduanya. Secara teoretis, penelitian ini lebih mirip dengan komponen Susenas, tetapi secara metodologi penghitungan akan tetap menggunakan pendekatan yang sama dengan Balitbang.

b. Biaya Satuan pada Satuan Pendidikan Luar Biasa

Sebagian besar penelitian tentang biaya satuan pendidikan, sebagaimana telah diuraikan di atas, menitikberatkan satuan pendidikan reguler. Dalam hal tersebut, biaya pendidikan untuk sekolah luar biasa (SLB) dimasukkan di dalamnya dan kebutuhannya dianggap sama dengan sekolah reguler. Padahal, tidak demikian halnya. SLB memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari sekolah reguler, baik dari sisi input siswa, guru, maupun sarana dan prasarannya.

Salah satu kajian biaya pendidikan yang mengkhususkan diri pada SLB dilakukan oleh tim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (MIPA IPB), pada tahun 2015. Kajian ini menghitung biaya satuan operasional nonpersonalia pada SLB untuk setiap jenjang dan kekhususan. Kajian ini dilakukan dengan metode diskusi kelompok terpumpun dan pengisian angket yang melibatkan 49 SLB di 16 provinsi. Hasilnya sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 5 Biaya Satuan Operasional Nonpersonalia SLB
Menurut Jenjang dan Jenis Kekhususan**

No	Jenis Kekhususan	Biaya Satuan (Rp)		
		SD	SMP	SMA
1	Tunalaras	4.386.000	5.677.000	6.107.000
2	Tunadaksa	4.431.000	5.938.000	6.328.000
3	Tunagrahita	4.446.000	5.847.000	6.290.000
4	Tunarungu	4.490.000	5.932.000	6.340.000
5	Tunanetra	4.834.000	6.422.000	7.214.000

No	Jenis Kekhususan	Biaya Satuan (Rp)		
		SD	SMP	SMA
	Rata-rata	4.517.400	5.963.200	6.455.800

Sumber: diolah dari FMIPA IPB, 2015

Kajian tersebut merekomendasikan variasi biaya satuan yang berbeda antarpeserta didik berdasarkan jenis kekhususan dan jenjang pendidikan. Dari temuan itu diperoleh gambaran, misalnya, bahwa tunanetra adalah jenis kekhususan yang berbiaya paling tinggi di antara yang lain. Hal ini terlihat dari konsistensi besaran biaya yang lebih besar pada tiap jenjang. Sementara jenis kekhususan yang lain bervariasi berdasarkan jenjang. Sayangnya, kajian ini tidak mencakup jenis kekhususan yang lain, seperti autisme yang, menurut laporannya, secara metode sudah dirancang, tetapi tidak memperoleh responden yang sesuai. Jika dibuat rata-rata, biaya satuan operasional untuk SLB pada jenjang SD sebesar Rp 4,5 juta; SMP sebesar Rp 5,9 juta; dan SMA sebesar Rp 6,4 juta. Kajian FMIPA IPB ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian ini karena secara metodologis juga menjangkau SLB sebagai bagian dari sampel penelitian.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pemilihan didasarkan pada pembagian kategori indeks kemahalan konstruksi (IKK), yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang diorganisasi oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen Dikdasmen. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka oleh tim surveyor yang direkrut di daerah. Tim surveyor dipimpin oleh koordinator di setiap kabupaten/kota. Untuk mengendalikan kualitas pelaksanaan survei dan validitas data, setiap koordinator melakukan uji petik secara acak terhadap 10% sekolah yang berada di bawah kendalinya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh satuan pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, yang ada di bawah sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri atas SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Adapun populasi satuan pendidikan per 1 Februari 2019 adalah 219.121 lembaga (Kemdikbud, 2019).

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat wilayah, provinsi, hingga kabupaten/kota. Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah, yaitu (1) Jawa; (2) Sumatra; (3) Sulawesi; (4) Kalimantan; (5) Bali-Nusa Tenggara, dan (6) Maluku-Papua. Setiap wilayah akan dipilih satu provinsi dengan kriteria jumlah sekolah yang paling banyak di setiap kategori pulau yang sudah ditentukan. Untuk kepentingan penarikan sampel di setiap provinsi akan dipilih tiga kabupaten/kota di antaranya berdasarkan frame kelompok peringkat indeks kemahalan konstruksi (IKK): tinggi, rendah, dan sedang. IKK yang digunakan dalam penarikan sampling adalah data IKK yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2018). Penentuan kelompok peringkat IKK dilakukan dengan teknik kategorisasi berdasarkan nilai kuartil. Teknik penghitungan kuartil ini digunakan untuk data yang tidak terdistribusi normal (Anas, 2008). Tiga klasifikasi peringkat IKK adalah rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi Interval:

Tinggi : $X > K_3$; Sengah: $K_1 \leq x \leq K_3$; Rendah: $X < K_1$

Dalam hal ini, K_1 adalah kuartil 1 dan K_3 adalah kuartil 3.

Langkah berikutnya dari setiap provinsi akan dipilih lagi tiga kabupaten/kota. Pemilihan provinsi di setiap wilayah didasarkan pada pilihan ibu kota provinsi, kecuali untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Kupang. Pemilihan Kabupaten Kupang didasarkan pada variasi wilayah Nusa Tenggara yang terbagi menjadi beberapa pulau. Wilayah sampel terpilih adalah (1) Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Dairi, Kota Medan; (2) Provinsi Jawa Barat, yaitu Kab. Majalengka, Kota Cirebon, Kota Bandung; (3) Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak; (4) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kab. Kupang, Kab. Manggarai Barat, dan Kab. Sumba; (5) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kab. Bone, Kab. Tana Toraja, dan Kota Makassar; dan (6) Provinsi Papua, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, dan Kota Jayapura.

3. Pemilihan Sampel Sekolah

Penentuan jumlah sekolah dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan status sekolah, yaitu negeri dan swasta. Setiap kabupaten/kota akan dipilih 25 sekolah dari seluruh jenjang dengan pembagian status negeri dan swasta. Jumlah sampel untuk setiap jenjang dibedakan berdasarkan proporsi. Dengan mengikuti skema ini, dari sekolah negeri diambil 15 sampel dan dari sekolah swasta 10 sampel. Jika dihitung, jumlah sampel sekolah dalam studi ini hampir mencapai 441 lembaga.

Pemilihan sekolah sampel untuk SD, SMP, dan SMA dilakukan dengan kriteria sekolah dengan kurikulum nasional yang dibagi berdasarkan peringkat akreditasi (A, B, C). Dalam hal ini, SMK dipilih sekolah yang termasuk ke dalam kategori sekolah revitalisasi dengan jumlah siswa diambil paling banyak, tetapi tetap mempertimbangkan akreditasi sekolah. SLB tidak dikategorisasi tetapi dipilih berdasarkan cakupan sekolah. Pemilihan sampel SLB diutamakan untuk lembaga yang jumlah siswa di wilayah sampel tersebut paling banyak. Skema pemilihan sekolah dengan kriteria akreditasi disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah, sehingga proporsi pada setiap kriteria bisa jadi tidak sama antardaerah, bahkan dengan peringkat IKK yang sejenis.

4. Pemilihan Sampel Orang Tua

Responden orang tua/siswa dibutuhkan untuk mengetahui biaya pribadi peserta didik tingkat SD, SMP, dan SLB. Sampel yang diambil adalah orang tua siswa, sedangkan untuk SMA dan SMK yang menjadi responden bisa dari orang tua atau siswa secara langsung. Sampel siswa/orang tua siswa ini dipilih dari tingkat kedua ke atas pada setiap jenjang. Setiap kelas di tiap sekolah diambil tiga orang responden dengan kriteria memiliki tingkat kemampuan ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biaya Operasional dan Biaya Investasi SDM

Biaya satuan operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan sumber daya yang habis dipakai atau dikeluarkan dalam waktu satu tahun atau kurang per siswa per tahun. Biaya satuan operasional terdiri atas biaya satuan operasional personalia dan biaya satuan operasional nonpersonalia. Biaya satuan operasional personalia adalah biaya satuan yang dikeluarkan untuk kesejahteraan per tahun per siswa. Sumber daya manusia di sekolah terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PNS, guru tetap yayasan (khusus untuk sekolah swasta), guru honorer, guru diperbantukan (dpk), pegawai tata usaha, tenaga laboratorium/bengkel, dan pegawai perpustakaan.

Biaya satuan operasional nonpersonalia adalah biaya satuan yang dikeluarkan untuk pengadaan segala bahan dan alat yang dibutuhkan untuk proses belajar-mengajar atau mengadakan berbagai kegiatan yang menunjang proses belajar-mengajar dalam satu tahun per siswa. Termasuk dalam biaya satuan operasional non personel adalah alat tulis sekolah; daya dan jasa (listrik, telepon, gas, dll.); pemeliharaan dan perbaikan ringan untuk gedung, peralatan, perabot, dan mebel; pembinaan siswa; pendidikan

sistem ganda (khusus untuk SMK); pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan; peralatan olahraga; bahan-bahan praktikum; rapat pengurus sekolah; kegiatan komite sekolah; dan lain-lain.

Biaya satuan investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis dipakai atau dikeluarkan dalam waktu lebih dari satu tahun, yang kemudian dibagi menjadi per tahun dan per siswa. Biaya investasi pada penelitian ini hanya terbatas pada biaya investasi SDM. Komponen biaya investasi SDM mencakup pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah, seminar, workshop, dan sebagainya.

2. Besaran dan Proporsi Biaya Operasional dan Investasi SDM

Besaran dan proporsi biaya operasional dan investasi SDM pada setiap masing-masing jenjang pendidikan merupakan total biaya di tingkat sekolah. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Besaran dan Proporsi Biaya Operasional dan Investasi SDM

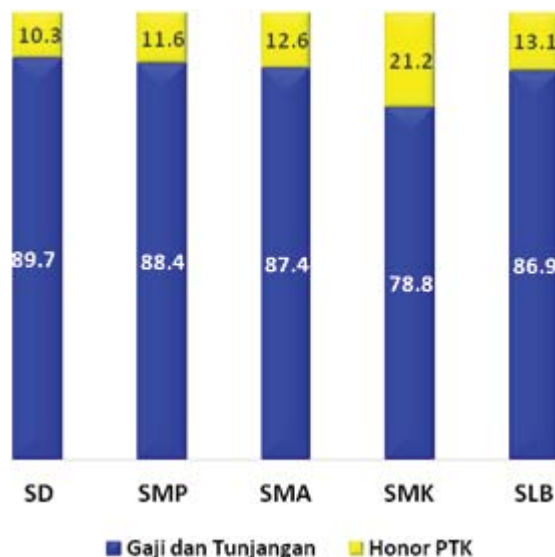
No.	Komponen	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1.	BOP	2.126.975	2.479.755	2.944.210	3.422.833	7.454.654
		67,0%	60,7%	62,7%	48,5%	72,1%
2.	BONP	995.972	1.538.713	1.651.400	3.348.669	2.651.609
		31,4%	37,7%	35,2%	47,4%	25,6%
3.	BI- SDM	52.16	66.285	97.204	291.193	237.362
		1,6%	1,6%	2,1%	4,1%	2,3%
	Jumlah	3.175.106	4.084.752	4.692.814	7.062.696	10.343.625

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

Pada semua jenjang, komponen pengeluaran paling besar ada di komponen biaya satuan operasional personalia dengan rentang 48%--75%. Biaya satuan operasional personalia di jenjang SMK memiliki persentase sebesar 48,5%, yang dalam hal ini diduga SMK lebih banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional nonpersonalia dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Biaya investasi SDM merupakan biaya investasi SDM yang hanya dikeluarkan oleh sekolah saja, sehingga biaya yang dikeluarkan sekolah untuk investasi SDM nilainya kecil dibandingkan dengan komponen yang lain.

a. Proporsi Biaya Operasional Personalia

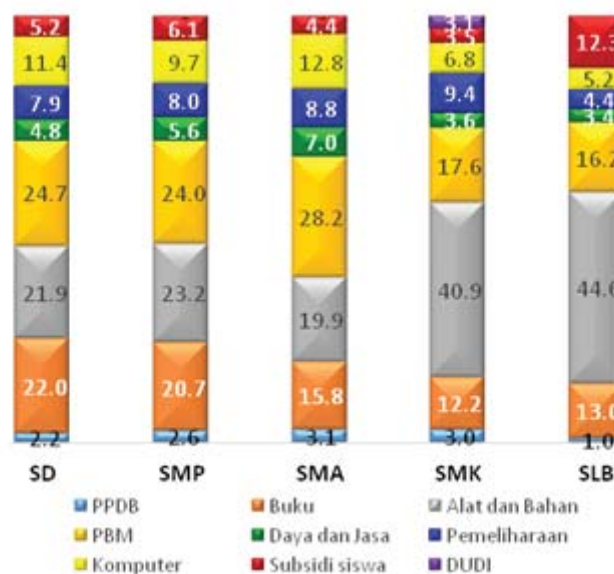
Sebaran kebutuhan BOP pada di setiap jenjang dapat dilihat pada Gambar 1. Proporsi biaya satuan operasional personalia yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PTK berkisar 78,8% -- 89,7%, sedangkan untuk honor PTK berkisar 10,3% - 21,2%. Kondisi ini juga menegaskan, meskipun ada kebijakan untuk membatasi pengangkatan guru dan pegawai honor, masih banyak sekolah yang mempekerjakan guru honor untuk menutupi kekurangan guru.



Gambar 1 Proporsi Biaya Operasional Personalia
Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

b. Proporsi Biaya Operasional Nonpersonalia

Jika dikaitkan dengan ketentuan penggunaan dana yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS tahun 2018, tampak jelas bahwa jenis komponen pengeluaran BONP sudah sesuai.



Gambar 2 Proporsi Biaya Operasional Nonpersonalia
Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

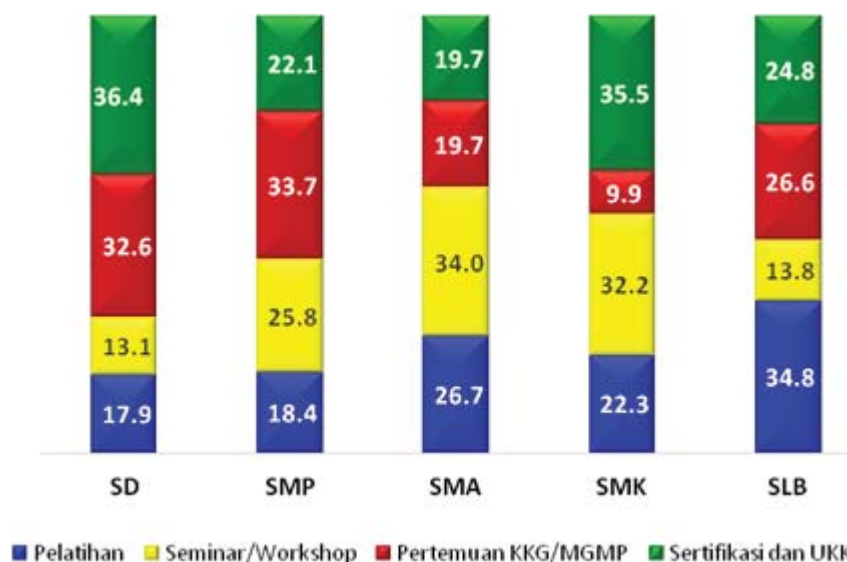
Biaya untuk komponen alat dan bahan paling besar untuk jenjang SMK dan SLB. Biaya paling besar untuk jenjang SD sampai SMA adalah untuk PBM. Pengeluaran untuk pembelian buku teks atau buku pedoman guru paling besar 22,0% di SD dan 13,0% di SLB. Hal ini sudah cukup sesuai dengan ketentuan BOS yang memberikan batas toleransi pengadaan buku sampai 20% dari dana BOS yang diterima.

Pengeluaran subsidi siswa tidak mampu terkecil terjadi di SMK sebesar 3,5%, sedangkan terbesar di SLB. Hal ini berbeda dengan anggapan selama ini bahwa siswa SMK lebih banyak berasal dari keluarga tidak

mampu dibandingkan dengan siswa SMA. Lebih besar subsidi siswa tidak mampu di SLB karena pada umumnya pengeluaran orang tua di SLB jauh lebih besar dibandingkan siswa pada umumnya.

c. Proporsi Biaya Investasi SDM

Proporsi biaya satuan investasi SDM terbesar pada komponen sertifikasi dan UKK, yaitu 35,5% di jenjang SMK dan 36,4% pada jenjang SD.



Gambar 3 Proporsi Biaya Investasi SDM

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

Meskipun proporsi biaya ini ada yang mencapai 30%, tidak berarti penggunaan biaya untuk pengembangan SDM ini sudah besar. Hal ini disebabkan oleh biaya investasi SDM ini merupakan komponen biaya yang paling kecil dikeluarkan oleh sekolah selama satu tahun. Hal ini menandakan bahwa masih minimnya kesempatan guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensinya.

d. Biaya Operasional dan Investasi SDM: Variasi Wilayah IKK

Perhitungan variasi biaya operasional dan investasi SDM dilakukan menggunakan pendekatan indeks kemalahan konstruksi (IKK). Sebelumnya, IKK sudah dikategorisasi menjadi tiga level, yaitu level rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 7 Biaya Operasional dan Investasi SDM Berdasarkan Variasi Wilayah IKK (Rp)

Jenjang Pendidikan	Komponen	Kategori IKK		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1. SD	BOP	1.861.298	2.009.952	2.600.693
	BNOP	871.566	941.1.75	1.217.794
	BI-SDM	45.645	49.290	63.770
2. SMP	BOP	2.170.013	2.343.322	3.032.044
	BNOP	1.346.515	1.454.055	1.881.414
	BI-SDM	58.005	62.638	81.048
3. SMA	BOP	2.576.453	2.782.224	3.599.942
	BNOP	1.445.126	1.560.542	2.019.198
	BI-SDM	85.062	91.856	118.853
4. SMK	BOP	2.995.293	3.234.514	4.185.164

Jenjang Pendidikan	Komponen	Kategori IKK		
		Rendah	Sedang	Tinggi
5. SLB	BNOP	2.930.392	3.164.430	4.094.482
	BI-SDM	254.821	275.172	356.047
	BOP	6.523.505	7.044.510	9.114.949
	BNOP	2.320.400	2.505.721	3.242.173
	BI-SDM	207.713	224.303	290.227

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

BOP dan investasi SDM yang selama ini juga ditanggung oleh dana BOS memiliki tren naik untuk setiap jenjangnya, begitu pula jika dilihat berdasarkan setiap kategori IKK. Hal ini disebabkan oleh wilayah kategori rendah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari juga tergolong rendah. Untuk wilayah kategori tinggi biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari tergolong tinggi. Artinya, besarnya pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan berbanding lurus dengan kategori IKK di suatu wilayah. Hal tersebut menandakan bahwa bantuan yang selama ini diberikan Pemerintah, seperti halnya BOS, saat ini belum bisa menutupi kebutuhan sekolah secara merata. Hal itu disebabkan oleh bantuan yang selama ini diberikan belum mempertimbangkan adanya pengategorian wilayah berdasarkan IKK. Dengan adanya pengelompokan biaya berdasarkan IKK, BOS yang diberikan untuk wilayah IKK rendah akan lebih kecil dibandingkan daerah yang kategori IKK-nya berada pada level sedang atau tinggi (lihat Tabel 7).

e. Biaya Pribadi dan Variasi Biaya Berdasarkan Indeks UMP

Dalam menghitung biaya satuan pribadi pada penelitian ini berfokus pada komponen pengeluaran yang umumnya dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk menunjang proses pembelajaran anaknya di sekolah, antara lain alat tulis sekolah (ATS), pakaian seragam, alat dan bahan, transportasi, kursus, karya wisata, dan iuran sekolah (Lihat Tabel 8).

Tabel 8 Biaya Pribadi Peserta Didik (Rp)

No.	Komponen	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1.	Buku dan ATS	304.972	368.735	445.703	346.919	210.027
2.	Seragam	886.496	1.102.820	1.230.409	1.348.756	800.562
3.	Bahan Penunjang	192.998	272.018	305.244	304.697	433.423
4.	Transportasi Siswa	2.546.160	2.628.472	2.798.658	2.967.050	4.423.736
5.	Kursus	1.375.588	1.513.659	2.174.931	1.169.725	1.627.007
6.	Karya Wisata	396.47	368.499	307.074	479.829	182.524
7.	Iuran ke Sekolah	1.440.554	1.159.155	3.439.753	3.741.993	1.963.092
8.	Uang saku	1.598.966	2.124.071	2.790.271	3.045.080	2.809.159
9.	Biaya Lainnya	752.125	1.296.736	1.890.525	2.219.533	2.902.293
Total biaya riil		3.146.791	4.245.027	7.457.218	7.935.895	3.890.667

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh besaran biaya satuan pribadi untuk setiap jenjang, yaitu Rp 3,1 juta (SD), Rp 4,2 juta (SMP), Rp 7,5 juta (SMA), Rp 7,9 juta, (SMK) dan Rp 3,9 juta (SLB). Semakin tinggi jenjang semakin tinggi kebutuhan biaya pribadi pendidikan. Komponen biaya pribadi yang paling besar pada jenjang SD dan SMP adalah uang saku dan transportasi. Pada SMA dan SMK komponen pengeluaran terbesar adalah iuran sekolah. Para peserta didik pada jenjang SD dan SMP negeri masih mengeluarkan

biaya untuk iuran sekolah sebesar rata-rata Rp 142 ribu (SDN) dan Rp 753 ribu (SMPN). Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS belum sepenuhnya dapat menghilangkan kontribusi dari orang tua.

Tabel 9 Biaya Pribadi Peserta didik Berdasarkan Indeks UMP (Rp)

Kategori UMP	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1. Rendah	2.356.717	3.179.216	5.584.914	5.943.408	2.913.826
2. Sedang	3.152.671	4.252.959	7.471.152	7.950.723	3.897.937
3. Tinggi	3.926.411	5.296.736	9.304.751	9.902.020	4.854.583

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

Pada dasarnya kebutuhan pribadi tidak dapat berlaku sama untuk seluruh wilayah. Tingkat kemahalan satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini juga menghitung variasi besaran biaya satuan pribadi. Acuan yang relevan dalam kaitan dengan kebutuhan pribadi adalah indeks upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019. Kami mengelompokkan tingkat kemahalan berdasarkan tiga kategori UMP: rendah, sedang, dan tinggi. Indeks UMP tiap provinsi dihitung berdasarkan nilai UMP di satu provinsi dibagi dengan rata-rata nilai UMP secara nasional.

Kategorisasi tingkat kemahalan wilayah berdasarkan indeks UMP menghasilkan variasi biaya satuan pribadi pendidikan. Nilai ini adalah rata-rata besaran biaya dari setiap kategori. Hasilnya untuk SD, misalnya, wilayah dengan kategori rendah biaya satuan pribadinya adalah Rp 2,3 juta, kategori sedang Rp 3,1 juta, dan tinggi Rp 3,9 juta (lihat Tabel 9).

E. PENUTUP

1. Simpulan

Besaran BOP untuk SD Rp 2,2 juta; SMP Rp 2,5 juta; SMA Rp 2,9 juta; SMK Rp 3,4 juta; dan SLB Rp 7,4 juta. Angka BOP pada SD sebesar Rp 995 ribu, SMP Rp 1,5 juta; SMA Rp 1,6 juta; SMK Rp 3,3 juta; dan SLB Rp 2,6 juta.

- Selisih besaran biaya operasional nonpersonalia dengan biaya satuan BOS pada semua jenjang, selain SMK, tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh dana BOS telah menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan di sekolah seiring dengan semakin ketatnya pembatasan pungutan dari orang tua. Pembiayaan kebutuhan operasional nonpersonalia sebagian besar diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran.
- Biaya satuan investasi SDM SD sebesar Rp 52 ribu; SMP Rp 66 ribu; SMA Rp 97 ribu; SMK Rp 291 ribu; dan SLB Rp 237 ribu. Proporsi biaya ini adalah yang paling kecil yang dibelanjakan sekolah. Biaya investasi SDM ini semestinya dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional, baik personalia maupun nonpersonalia.
- Biaya satuan pribadi untuk setiap jenjang: Rp 3,1 juta (SD), Rp 4,2 juta (SMP), Rp 7,5 juta (SMA), Rp 7,9 juta (SMK), dan Rp 3,9 juta (SLB). Komponen biaya pribadi yang paling besar pada jenjang SD dan SMP adalah uang saku dan transportasi. Pada jenjang SMA dan SMK komponen pengeluaran terbesar adalah iuran sekolah. Para peserta didik pada jenjang SD dan SMP negeri masih mengeluarkan biaya untuk iuran sekolah sebesar rata-rata Rp 142 ribu (SDN) dan Rp 753 ribu (SMPN). Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS belum sepenuhnya dapat menghilangkan kontribusi dari orang tua.

2. Rekomendasi

- Besaran biaya satuan BOS secara nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional

nonpersonalia. Kebutuhan BOS untuk SMK perlu lebih diperhatikan karena terdapat selisih yang sangat tinggi dengan kebutuhan biaya operasional nonpersonalia secara faktual.

Tabel 10 Selisih Besaran Biaya Operasional Nonpersonalia dan BOS (Rp)

Jenjang	Biaya Satuan BOS 2019	Biaya Operasional Nonpersonalia 2019 (Pembulatan)	Selisih
1. SD	800.000	996.000	196.000
2. SMP	1.000.000	1.540.000	540.000
3. SMA	1.400.000	1.650.000	250.000
4. SMK	1.600.000	3.350.000	1.750.000
5. SLB	2.000.000	2.650.000	650.000

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

- b) Besaran biaya satuan BOS perlu dibuat variasi antarwilayah untuk mengatasi keragaman tingkat kemahalan setiap wilayah. Pendekatan yang dapat digunakan adalah indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks biaya pendidikan (IBP). Adapun variasi biaya satuan BOS berdasarkan IKK dan IBP dapat diperinci sebagai berikut.

Tabel 11 Variasi Besaran Biaya Operasional Nonpersonalia Berdasarkan Tingkat Kemahalan Daerah (Rp)

Jenjang	IKK Rendah	IKK Sedang	IKK Tinggi	IBP Rendah	IBP Sedang	IBP Tinggi
1. SD	871.566	941.175	1.217.794	874.023	959.613	1.182.558
2. SMP	1.346.515	1.454.055	1.881.414	1.350.310	1.482.541	1.826.977
3. SMA	1.445.126	1.560.542	2.019.198	1.449.200	1.591.114	1.960.774
4. SMK	2.930.392	3.164.430	4.094.482	2.938.653	3.226.423	3.976.012
5. SLB	2.320.400	2.505.721	3.242.173	2.326.941	2.554.809	3.148.364

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

- c) Dana BOS sebaiknya tidak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Alokasi untuk kebutuhan ini sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD, khususnya untuk SD dan SMP.
- d) Biaya satuan personal yang dihasilkan dari kajian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan besaran bantuan Pemerintah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan biaya pribadi peserta didik, yaitu Program Indonesia Pintar. Namun, penentuan besarnya dilakukan dengan *mengeluarkan komponen iuran sekolah* karena seharusnya keperluan yang ditanggung oleh iuran tersebut dapat dipenuhi melalui skema bantuan lain, seperti BOS dan dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, besaran biaya satuan personal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk program seperti PIP dapat diperinci sebagai berikut.

Tabel 12 Selisih Besaran Biaya Satuan Pribadi dan PIP (Rp)

Jenjang	Biaya Satuan PIP	Biaya Satuan Pribadi (Pembulatan)	Selisih
1.SD	450.000	1.700.000	1.250.000
2.SMP	750.000	3.100.000	2.350.000
3.SMA	1.000.000	4.000.000	3.000.000
4.SMK	1.000.000	4.200.000	3.200.000

Sumber: Data diolah Puslitjakdikbud (2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. "Hasil Susenas Modul SosialBudaya dan Pendidikan 2018."
- Bray, Mark. 1996. *Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of Education in East Asia*. Washington DC: The World Bank
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- FMIPA IPB. 2015. "Perhitungan Biaya Operasional bagi Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus." Bogor: Institut Pertanian Bogor. Laporan Akhir.
- Ghozali, Abbas. 2003. "Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. Laporan Penelitian
- Kemendikbud. 2019. "Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah: Data Sekolah." Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses pada 4 Februari 2019 dari: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp>.
- Kemendiknas. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non-Personalia untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Sekolah dan Madrasah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- McMillan, James H. dan Sally Schumacher. 2010. *Research in Education: Evidence-Based Inquiry*. New Jersey: Pearson.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Penelitian Kebijakan. 2012. "Kajian Mekanisme Pendanaan Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud.
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2008. *Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar*. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas.
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. "Pengkajian Pendanaan Pendidikan secara Masal: Studi Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas.

- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. "Laporan Kajian Penghitungan Unit Cost dan *Timeline* Pengelolaan Program Indonesia Pintar." Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Penelitian.
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

STUDI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP KINERJA SEKOLAH

Agus Heruanto Hadna, Triyastuti Setianingrum,
Yam'ah Tsalatsa A., Citra Sekarjati
Universitas Gadjah Mada

Abstrak. Studi bertujuan mengkaji efektivitas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 terhadap kinerja sekolah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Sasaran studi adalah SD dan SMP negeri di lima kabupaten/kota. Responden adalah guru dan siswa, informan wawancara adalah dinas pendidikan dan tim BOS sekolah. Temuan studi yaitu (a) RKAS adalah dokumen perencanaan tunggal untuk pengajuan dana BOS, (b) terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, (c) orang tua tidak terlibat dalam tim BOS, (d) perbedaan perencanaan awal dengan penggunaan, (e) monitoring oleh dinas lebih kepada pemeriksaan kesesuaian perencanaan dan realisasi, serta (f) belum ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Implikasi pengelolaan dana BOS terhadap kinerja sekolah adalah (1) program BOS tidak membuat perencanaan sekolah menjadi lebih baik dan sekolah masih kekurangan tenaga kependidikan; (2) terpenuhinya kebutuhan buku siswa dan guru, kegiatan ekstrakurikuler bervariasi, tugas utama guru yang menjadi pengelola BOS terganggu, dan (3) sarana prasarana pendukung KBM menjadi lebih baik. Faktor determinan pengelolaan dana BOS terhadap kinerja sekolah, adalah (a) kepemimpinan kepala sekolah; (b) kapasitas pelaksana dana BOS; (c) regulasi/kebijakan; (d) komitmen daerah, dan (e) *local governance*.

Kata kunci: BOS, efektivitas, pengelolaan

A. PENDAHULUAN

Studi bertujuan mengkaji efektivitas pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) tahun anggaran (TA) 2018 terhadap kinerja sekolah. Implementasi pengelolaan dana BOS tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS).

Evaluasi terhadap program BOS dilakukan sejak awal pencanangan. Beberapa hasil studi yang telah dilakukan sejak 2006 hingga 2018 menilai masih ditemui persoalan implementasi program BOS di tingkat sekolah, namun pada sisi lain, program BOS secara signifikan memberikan pengaruh bagi kinerja sekolah.

Secara khusus, studi ini bertujuan mengetahui efektivitas implementasi pengelolaan dana BOS TA 2018 dan melihat sejauh mana pengelolaan memberikan pengaruh terhadap kinerja sekolah. Berdasarkan kedua hal tersebut, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan pengelolaan dana BOS dalam rangka peningkatan kinerja sekolah.

B. KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA PIKIR

Pendapat Cleaves, Mazmanian dan Sebastier, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun

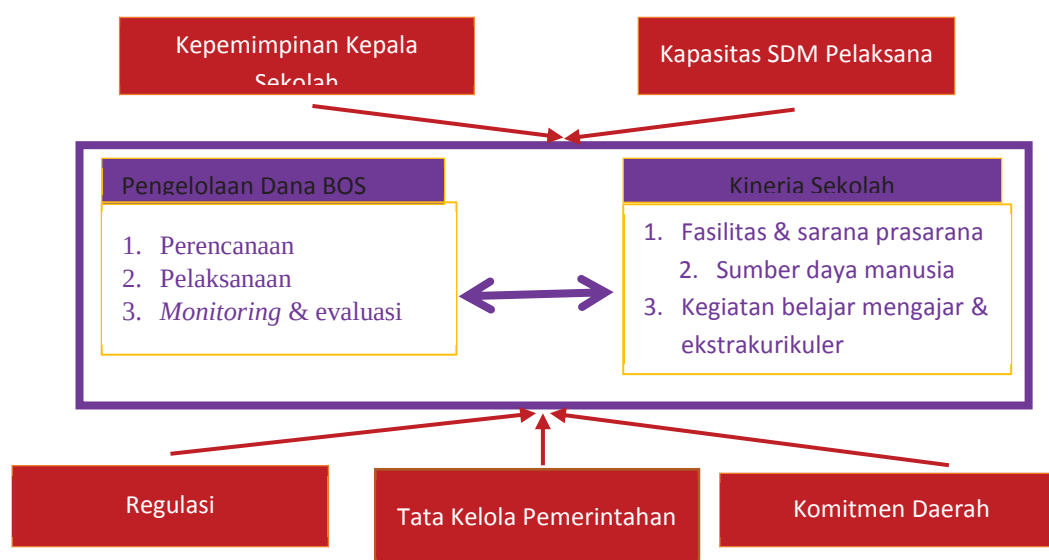
kelompok/organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui cara administratif maupun politik. Sedangkan efektivitas menunjuk pada kemampuan atau kapasitas lembaga untuk mencapai tujuan serta *output* yang terukur (Handyaningrat, 1994; Pasolong, 2007; Cornali, 2012).

Efektivitas dilihat menggunakan pendekatan siklus *input-proses-output*, dan juga hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya (Rukmana dan Suryana, 2006; Fathullah, 2018). Mengacu Milstein dan Wetterhall (2018) indikator untuk menilai efektivitas yaitu kapasitas pelaksana, keterlibatan *stakeholder*, dan dampaknya pada kelompok sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, McDavid dan Hawthorn (2006) mengemukakan efektivitas terkait dengan kebutuhan, relevansi, kesesuaian, serta pencapaian tujuan.

Komponen yang dikaji untuk melihat efektivitas implementasi adalah pada proses dan *output*. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif *top-down (compliance)*, yakni melihat keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan juknis; sekaligus diperkuat dengan perspektif *bottom up (what's going on)*, yakni melihat para pelaksana (*street level bureaucrats*) memahami program dan menerjemahkannya dalam kegiatan operasional sekolah.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi dari sejumlah variabel (Grindle, Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, 2009). Pertama, lingkungan organisasi yaitu komitmen dan tata kelola pemerintahan daerah (*local governance*). Kedua, kebijakan yang jelas dan terukur, yaitu regulasi. Ketiga, kapasitas implementor, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dan kapasitas SDM pelaksana.

Dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), terdapat tiga standar kinerja sekolah yang relevan dengan konteks penelitian ini, yaitu keefektifan sekolah, kinerja sekolah, dan kapasitas daya tampung sekolah. Kerangka pikir studi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Studi

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Sasaran studi adalah SD dan SMP negeri di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten (Klaten, Karanganyar, dan Timor Tengah Utara/TTU) dan Kota (Semarang dan Kupang). Di masing-masing kabupaten/kota, dipilih satu kecamatan ibukota

kabupaten/kota. Di setiap kecamatan diambil 3 SD negeri dan 3 SMP negeri melalui pertimbangan variasi akreditasi sekolah dan jumlah siswa. Dengan demikian, terdapat 15 SD dan 15 SMP negeri.

Studi ini menggunakan teknik (1) Survei yang berbasis CAPI (computer assisted personal interviewing). Responden survei adalah siswa dan guru. (2) Wawancara mendalam kepada pengelola BOS, kepala sekolah (kepsek), komite sekolah, orangtua panitia BOS, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. (3) Observasi aktivitas KBM serta fasilitas sekolah. (4) Kajian data sekunder (RKAS, form K7A penggunaan dana BOS TA 2018, laporan pertanggungjawaban sekolah TA 2018, dan data inventaris buku untuk TA 2018). Data kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana BOS

a. Perencanaan

Sebagai persyaratan penyaluran dana BOS, setiap sekolah harus menyusun RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Pada proses perencanaan di tingkat SD, hasil survei menunjukkan tiga sekolah tidak menyusun RKJM. Sementara itu, seluruh SMP menyusun dokumen RKJM. Artinya, ada atau tidaknya dokumen RKJM tidak terlalu memengaruhi penerimaan dana BOS. Selain RKJM, sekolah juga wajib menyusun RKAS dan laporan realisasi anggaran. Berbeda dengan dokumen RKJM, hasil survei menunjukkan bahwa semua sekolah, baik SD maupun SMP, setiap tahun menyusun RKAS dan laporan realisasi anggaran.

Pada aspek perencanaan, terkait pembentukan tim BOS sekolah. Hampir di semua SD yang diteliti, posisi bendahara dan operator BOS diisi oleh guru. Sedangkan di beberapa SMP yang diteliti, terdapat tenaga khusus yang menangani dana BOS, baik sebagai bendahara maupun operator. Keterwakilan unsur orang tua di dalam tim BOS sekolah diisi oleh ketua atau anggota komite sekolah. Hanya terdapat enam sekolah yang memiliki unsur orang tua di luar komite sekolah yang menjadi anggota tim BOS sekolah.

b. Pelaksanaan

Terkait dengan proses penyaluran dana BOS TA 2018, masih terjadi keterlambatan salur di setiap triwulannya, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dari 30 sekolah yang diteliti (SD dan SMP), sebanyak 93,3 persen sekolah mengalami keterlambatan salur pada triwulan pertama. Sebanyak 87,7 persen mengalami keterlambatan salur pada triwulan 2 dan 4. Pada triwulan 3, sebanyak 86,7 persen SD dan 80,0 SMP persen yang mengalami terlambat salur. Langkah yang paling sering diambil oleh pihak sekolah untuk menyalurkan keterlambatan ini adalah dengan cara berhutang kepada pihak penyedia ("bon"), meminjam uang dari kepala sekolah/bendahara sekolah/guru ("nomboki"), sehingga operasionalisasi sekolah maupun kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dapat berjalan lancar.

Hasil studi terkait pengalokasian biaya menemukan bahwa sekolah berupaya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, baik dari komponen kegiatan maupun besaran dana. Meskipun sekolah masih mengalami kesulitan, terutama untuk memastikan agar satu kegiatan tidak didanai oleh sumber yang lain, seperti BOS Daerah (BOSDA).

Dalam hal pembelanjaan, beberapa fenomena yang terjadi yaitu. (1) perubahan harga pada saat pembelanjaan, sehingga sekolah harus menyesuaikan dengan cara membeli barang di bawah standar atau pengurangan jumlah barang yang dibeli. (2) beberapa komponen dalam perencanaan yang tidak dibelanjakan, sehingga anggaran tersebut dijadikan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk tahun anggaran berikutnya. (3) kebutuhan operasional sekolah yang tidak dicakup oleh BOS TA 2018, sehingga sekolah harus mencari alternatif sumber dana lainnya atau kebutuhan tersebut tidak dibiayai. (4)

perubahan komponen biaya selama tahun anggaran berjalan, sehingga sekolah beberapa kali melakukan revisi. (5) Di beberapa daerah yang memiliki program BOSDA menuntut kecermatan tim BOS sekolah karena perbedaan aturan di antara kedua program tersebut. (6) Adanya dukungan anggaran di beberapa daerah yang sangat membantu sekolah dalam mengatasi kesulitan pembiayaan operasional sekolah, seperti BOSDA dan anggaran daerah untuk tenaga honorer di sekolah. (7) Perubahan aplikasi pelaporan yang seringkali terjadi selama tahun anggaran berjalan sangat menyulitkan para pengelola BOS.

c. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota lebih berfokus pada pemeriksaan administratif, yaitu pelaporan. Dinas Pendidikan di Kota Semarang berinisiatif memberikan pendampingan secara intensif kepada sekolah. Sedangkan proses pemantauan oleh pihak internal sekolah dilakukan oleh komite sekolah, meskipun belum berjalan secara optimal.

Mekanisme pertanggungjawaban sekolah kepada dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pelaporan rutin, terutama sebagai persyaratan dalam penurunan dana. Terkait dengan pertanggungjawaban kepada publik, belum semua sekolah memiliki mekanisme akuntabilitas yang transparan, meskipun beberapa sekolah telah menampilkan laporan realisasi penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah.

2. Kinerja Sekolah

a. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Terkait ketercukupan fasilitas di sekolah, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas-fasilitas tersebut. Sebanyak lima belas SD yang diteliti tidak memiliki ruang khusus untuk BK/BP dan kesenian/ketrampilan. Hal ini berbeda dengan di SMP, di mana beberapa sekolah memiliki ruang khusus untuk BK/BP dan kesenian/ketrampilan. Sedangkan ruang ekstrakurikuler hanya tersedia di sebagian kecil sekolah baik SD maupun SMP. Fasilitas yang tersedia di seluruh sekolah yang disurvei, baik SD maupun SMP, adalah ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi guru, meja/kursi siswa dan guru, computer, dan printer. Data hasil studi menunjukkan bahwa ketersediaan di tahun 2018 dengan 2019 relatif sama.

Berdasarkan pendapat guru dan murid, maka fasilitas di lingkup SD yang perlu diperhatikan ketersediaannya adalah toilet, gedung sekolah, ruang guru, ruang kelas, dan alat peraga. Sedangkan untuk di SMP, ketersediaan fasilitas yang perlu diperhatikan adalah toilet dan gudang.

Pada aspek fasilitas, penggunaan dana BOS tidak untuk pembangunan ruang atau gedung baru, tetapi lebih pada perbaikan ruang atau fasilitas yang ada. Melalui dana BOS 2018, diharapkan bahwa kondisi fasilitas tersebut menjadi lebih baik. Menurut pendapat sebagian besar guru SD, fasilitas yang dinilai kondisinya semakin baik adalah gedung sekolah, ruang ibadah, buku pelajaran, dan ruang kelas. Sedangkan menurut siswa adalah aula, ruang kelas, ruang guru, dan ruang tata usaha. Menurut pendapat guru dan siswa SMP, fasilitas yang kondisinya semakin baik adalah gedung sekolah, ruang kelas, dan buku pelajaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penilaian terhadap SDM meliputi aspek ketercukupan SDM dan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar. Data hasil studi memperlihatkan kalau sebagian besar guru SD maupun guru SMP, menilai program BOS dapat meningkatkan mutu guru. Pendapat ini dikarenakan program BOS dilakukan untuk meningkatkan kapasitas guru (melalui pelatihan, *in house training*, bimtek), memberikan pendanaan bagi operasional sekolah, penyediaan fasilitas penunjang KBM (alat peraga/buku), dan lain-lain. Guru SD maupun SMP, yang menilai program BOS belum dapat meningkatkan mutu guru, karena belum memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kapasitas mereka. Hasil studi memperlihatkan guru SD yang

berpendapat program BOS memberikan kesempatan yang sama dalam peningkatan kapasitas sebesar 84,3 persen sedangkan guru SMP sebesar 78,7 persen.

c. Kegiatan Belajar Mengajar dan Ekstrakurikuler

Data studi memperlihatkan pendapat guru SD dan SMP bahwa sebagian besar siswa menggunakan buku pegangan (buku tematik dan mata pelajaran) dari sekolah untuk TA 2018/2019. Namun tidak semua buku pelajaran dibeli pada awal tahun ajaran. Ketercukupan jumlah buku pegangan secara umum dinilai cukup. Sumber pembiayaan untuk pembelian buku sebagian besar dari dana BOS. Selain itu juga dari BOSDA, hibah/DAK, dan sumber lainnya (di SMP diambil dari dana siswa).

Alat peraga dan alat multimedia yang disediakan oleh sekolah dipergunakan oleh guru SD dan SMP, meskipun ada juga yang disediakan sendiri oleh guru. Guru yang menggunakan alat peraga di SD lebih banyak dibandingkan guru SMP. Namun penggunaan alat peraga dan alat multimedia belum optimal, masih ada guru yang tidak menggunakan. Persentase guru SD yang menggunakan alat multimedia tidak sebanyak guru SMP. Keberadaan alat peraga pendidikan dan alat multimedia dinilai semua guru dan murid membantu dalam proses KBM.

Sekolah memberikan tambahan pelajaran pengayaan kepada siswa, ada yang berimplikasi biaya dan tidak. Ketika ada implikasi biaya, diambil dari dana BOS serta sumber dana lainnya (dana Komite, dana siswa, dan dana BOSDA). Guru-guru dilibatkan dalam mengajar pelajaran tambahan tersebut, tambahan pelajaran dinilai membantu siswa. Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, sebagian guru SD dan SMP menjadi pengajar kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler yang diampu guru SMP adalah kepramukaan, seni Budaya, keagamaan, bimbingan mapel (IPA, matematika, Bahasa Inggris), dan pendamping lomba. Untuk SD ditambah dengan olahraga, UKS, dan karya ilmiah.

d. Evaluasi Pembelajaran

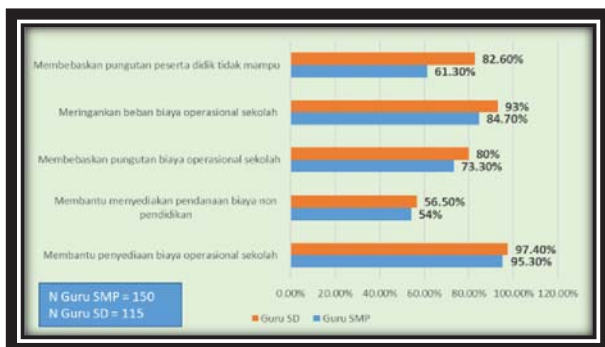
Evaluasi pembelajaran dilakukan sebagian besar guru SD dan SMP terhadap hasil belajar siswa. Penilaian evaluasi melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, selain itu juga melalui pekerjaan rumah/tugas rumah, dan berbagai tugas sekolah lainnya. Guru juga melakukan penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN dan MGMP. Sumber pembiayaan diambilkan dari dana BOS dan dinas pendidikan terkait.

e. Kompetensi Guru

Hasil studi memperlihatkan guru SMP sebanyak 63,3 persen dan 61,7 persen guru SD mengikuti pelatihan/seminar/kursus. Frekuensi mengikuti pelatihan antara 1-3 pelatihan pertahun. Materi pelatihan seperti penerapan RPP, pengembangan/penerapan program penilaian kepada siswa, penyusunan soal USBN, pengembangan sekolah hijau, penulisan artikel ilmiah, pengembangan profesi guru, dan tentang bidang studi. Beberapa biaya pelatihan yang ditanggung sekolah meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan akomodasi. Beberapa sekolah tidak menanggung biaya-biaya tersebut karena sudah ditanggung oleh dinas pendidikan terkait.

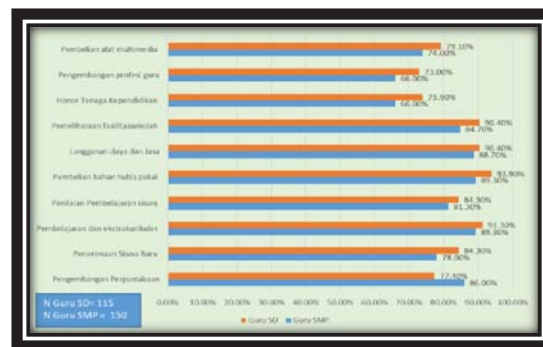
3. Pendapat tentang Program BOS

Hasil studi memperlihatkan pendapat guru SD dan SMP hampir sama terkait tujuan program BOS sesuai juknis BOS dan komponen pembiayaan dana BOS (lihat Grafik 1 dan 2).



Grafik 1. Pendapat Guru Terhadap Tujuan Program BOS 2018

Sumber: Studi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS, Kerjasama Puslitjakdikbud dan PSKK UGM, 2019



Grafik 2. Komponen yang dibiayai Dana BOS

Sumber: Studi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS, Kerjasama Puslitjakdikbud dan PSKK UGM, 2019

Program BOS dinilai meningkatkan tingkat kemanfaatan bagi sekolah dan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan kualitas siswa belajar di rumah dan prestasi belajar siswa, dan meringankan biaya sekolah.

Secara umum program BOS dinilai berhasil (menurut pendapat lebih kurang 90 persen responden guru SD dan SMP). Hal ini karena beberapa alasan, seperti alokasi anggaran sesuai pos yang ditentukan, memperlancar program KBM di sekolah, peningkatan fasilitas, dan dapat membiayai operasional sekolah. Sedangkan yang menilai tidak berhasil karena keterlambatan turunnya dana BOS, kebutuhan operasional sekolah tidak tercover oleh dana BOS, kekurangan dana harus dipenuhi dari dana iuran guru, tidak transparan dalam aspek pengelolaan, dan kegiatan insidental tidak tercover dana BOS. Meskipun dinilai berhasil, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan BOS (Tabel 1).

Tabel 1. Kendala Pelaksanaan BOS 2018 Menurut SD dan SMP

NO	Kendala Pelaksanaan BOS	Guru SD (%)	Guru SMP (%)
1	Ketidakjelasan regulasi	44,0	36,5
2	Rumitnya prosedur penyaluran	50,7	46,1
3	Tidak berfungsinya tim BOS	14,7	13,0
4	Kurangnya kapasitas pengelola	22,7	27,8
5	Kurangnya monitoring dari pihak berwenang	16,7	17,4
6	Pengelolaan BOS tidak transparan dan akuntabel	22,7	20,0
7	Perbedaan pemahaman di antara tenaga kependidikan	42,0	32,2
8	Rumitnya pelaporan	42,7	51,3

Sumber: Studi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS, Kerjasama Puslitjakdikbud dan PSKK UGM, 2019

Keterangan :

N Guru SD = 115

N guru SMP = 150

Beberapa masukan sekolah terkait pelaksanaan program BOS ke depannya, yaitu mencermati tingkat ketercukupan dana BOS, ketepatan waktu pencairan, sosialisasi BOS ke berbagai kalangan, transparansi pelaksanaan BOS, penyederhanaan dan memperjelas regulasi, dan monev pelaksanaan BOS secara berkala.

4. Faktor Determinan

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Karena kedudukan dan posisinya, kepala sekolah (kepsek) memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pengelolaan dana BOS, sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu, faktor kepemimpinan kepsek cukup penting. Hal ini dilihat dari aspek inovasi, keberanian mengambil risiko (risk taking), serta penguasaan wawasan yang komprehensif.

Salah satu inovasi adalah pembentukan tim khusus oleh kepsek SMP di Kabupaten Karanganyar pada tahap perencanaan, yang memudahkan proses perencanaan dan menghasilkan perencanaan sesuai kebutuhan sekolah. Namun belum banyak kepsek yang melakukan inovasi untuk mengatasi keterbatasan biaya operasional sekolah, sekolah lebih menyesuaikan dana yang masuk. Temuan pada aspek risk taking adalah keberanian hampir semua kepsek untuk memutuskan berhutang dulu kepada penyedia atau membayari terlebih dulu dengan meminjam uang kepada beberapa pihak pada saat terjadi keterlambatan salur, padahal langkah tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor penguasaan wawasan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menentukan prioritas penggunaan dana secara tepat dan mampu memberikan solusi pada saat terjadi kesulitan.

b. Kapasitas SDM Pelaksana Dana BOS

Kapasitas SDM mencakup komitmen, pengetahuan, dan kapasitas teknis. Komitmen berkaitan dengan kesediaan tenaga untuk mengelola dana BOS. Salah satu kesulitan terbesar adalah tidak tersedianya tenaga khusus pengelola BOS di SD. Selama ini, pengelola BOS diampu oleh guru sehingga komitmennya tidak dapat optimal. Dari aspek pengetahuan dan ketrampilan teknis juga masih perlu ditingkatkan. Tidak jarang pengelola BOS masih mengalami kebingungan terhadap aturan yang ada, juga keterbatasan ilmu keuangan atau akuntansi, yang diperlukan dalam pengelolaan dana BOS.

c. Regulasi/Kebijakan

Berkaitan dengan regulasi Juknis BOS 2018, masih terjadi perubahan aturan dalam juknis dan aplikasi pelaporan selama pelaksanaan program. Di samping itu, keterlambatan penyaluran dana BOS masih cukup dominan di tahun 2018. Hal ini berpengaruh pada operasionalisasi sekolah dan KBM serta pembelanjaan. Upaya yang paling sering dilakukan sekolah adalah berhutang kepada pihak penyedia ("bon dulu") atau pihak sekolah membayar terlebih dulu ("nomboki dulu").

Aspek yang lain adalah perbedaan sistem penganggaran keuangan dengan sistem tahun ajaran pendidikan. Meskipun sudah terbiasa, namun seringkali masih membingungkan pihak sekolah, khususnya dalam menyusun perencanaan anggaran BOS, karena adanya perbedaan periodisasi waktu.

d. Komitmen Daerah

Komitmen daerah menyangkut tiga hal. **Pertama**, komitmen anggaran daerah dalam bentuk BOSDA dan pembiayaan bagi GTT dan PTT dari APBD. Dukungan anggaran daerah ini sangat membantu biaya operasional sekolah, dan harus disertai juknis yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran administratif. **Kedua**, inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana BOS, yang ditemukan di Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang membentuk semacam *consultation desk* yang memberikan pendampingan intensif dan bantuan secara cepat bagi sekolah yang mengalami kesulitan.

Ketiga, interpretasi pemda terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang tampak dalam regulasi di daerah. Di Kota Kupang, walikota mengeluarkan regulasi yang melarang penarikan iuran dari masyarakat. Sementara di Kabupaten TTU, tidak ada kebijakan daerah yang melarang menarik iuran dana komite sehingga sekolah menarik dana komite. Seluruh informan sekolah menyatakan

bahwa dana komite sangat membantu kekurangan biaya operasional, khususnya kebutuhan yang tidak dicakup oleh BOS.

e. Tata kelola pemerintahan daerah (*local governance*)

Aspek *local governance* meliputi pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Dari unsur pemerintah, studi ini menemukan bahwa pendidikan gratis seringkali menjadi sarana kepentingan politik kepala daerah, khususnya pada saat kampanye, namun tidak diwujudkan melalui kebijakan anggaran pendidikan, terutama bagi sekolah negeri.

Elemen kedua adalah dari unsur LSM. Studi ini menemukan LSM memanfaatkan isu BOS untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri. LSM yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi BOS tidak berjalan baik. Elemen ketiga adalah peran swasta yang cukup positif melalui dana CSR bagi sekolah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Studi ini melihat dari perspektif top-down dan bottom-up, dengan mengacu pada Juknis BOS 2018 sekaligus memotret dinamika para street level bureaucrats. Berikut kesimpulan dari studi.

1) Kinerja pengelolaan dana BOS menunjukkan kinerja yang sudah sesuai dengan (tujuan) Juknis BOS 2108, terutama untuk membebaskan pungutan biaya dari siswa. Kepatuhan yang tinggi terhadap juknis membantu sekolah mengelola dana BOS secara lebih mudah. Namun, ada beberapa catatan dalam pelaksanaannya.

a. Tahap perencanaan

- i. terdapat variasi pola di masing-masing sekolah (level SD maupun SMP) dalam merencanakan RKAS sebagai dasar pengajuan dana BOS. Di samping itu, banyak sekolah, terutama SD, yang belum menyusun RKJM sebagai salah satu persyaratan dalam pendanaan BOS. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah di dalam menetapkan juknis persyaratan penyaluran dana BOS.
- ii. Unsur orang tua di luar komite belum terpenuhi dalam struktur tim BOS sekolah.
- iii. Kepala sekolah adalah pengambil keputusan utama dalam penentuan komponen biaya pendidikan yang didanai BOS.

b. Tahap pelaksanaan

- i. Hampir semua sekolah yang diteliti mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana BOS setiap triwulannya. Berhutang atau *nomboki* dulu menjadi strategi utama sekolah mengatasi keterlambatan salur ini.
- ii. Permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembelanjaan dana BOS, yaitu perubahan harga, adanya komponen yang tidak dibelanjakan, beberapa kebutuhan operasional tidak tercakup dalam BOS 2018, perubahan komponen biaya dan aplikasi pelaporan. Sehingga sekolah sering sekali melakukan revisi RKAS.
- iii. Adanya dukungan anggaran daerah bagi sekolah sangat membantu mengatasi kekurangan biaya operasional.
- iv. Kebutuhan biaya operasional sekolah tidak linear dengan jumlah siswa.

c. Tahap monitoring dan evaluasi

- i. Pemantauan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota lebih berfokus pada pemeriksaan administratif, yaitu memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan target dan realisasinya.
- ii. Belum banyak sekolah yang membuat mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada publik secara transparan, khususnya orang tua siswa.

2) Terdapat pola hubungan yang saling memengaruhi antara kinerja pengelolaan dana BOS dengan kinerja sekolah.

- a. Dana BOS banyak digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana belajar mengajar, seperti buku pegangan untuk siswa dan guru, alat peraga dan alat multimedia, dan renovasi prasarana pendukung sekolah.
- b. Dana BOS belum sepenuhnya memberikan kesempatan untuk membantu guru dan personil pendukung lainnya di sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan mereka.
- c. Kinerja sekolah dalam praktiknya turut memengaruhi pengelolaan dana BOS.

3) Hubungan saling memengaruhi antara kinerja pengelolaan dana BOS dengan kinerja sekolah ditentukan oleh beberapa faktor determinan, yaitu kepemimpinan kepala sekolah, kapasitas SDM pelaksana dana BOS, regulasi/kebijakan, komitmen daerah, dan aspek *local governance*.

4) Dengan mengacu pada tujuan BOS 2018, maka dana BOS TA 2018 mampu meringankan beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan dasar dan juga membebaskan pungutan; meskipun di beberapa sekolah masih menarik iuran dari orang tua atau dana komite. Namun demikian, dana BOS TA 2018 belum terlalu signifikan memengaruhi peningkatan kinerja sekolah.

2. Rekomendasi

Rekomendasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai berikut.

1. Meninjau kembali tujuan BOS untuk tahun berikutnya agar tidak hanya meringankan beban orang tua dalam pembiayaan, tetapi juga meningkatkan mutu dan turut menyelesaikan permasalahan di sekolah.
2. Meninjau kembali besaran dana BOS. Selain mempertimbangkan variasi karakteristik daerah, variasi jumlah siswa di setiap daerah juga penting. Aspek kecukupan dan *fairness* dalam perhitungan alokasi dana BOS dapat menciptakan rasa keadilan antarsekolah dan antardaerah.
3. Meninjau kembali sistem penyaluran dana secara triwulan yang sering menghambat sekolah dalam mengeksekusi langsung kebutuhan dan kegiatan sekolah.

Rekomendasi lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemendikbud dan Kementerian Keuangan diharapkan menyatukan sistem tahun anggaran dengan tahun ajaran.
2. Pemerintah pusat membuat sistem pelaporan keuangan pelaksanaan dana BOS yang lebih sederhana dan fleksibel, tanpa mengabaikan persyaratan akuntabilitas.
3. Kemendikbud dan dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan diskresi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengalokasian anggaran untuk mendorong munculnya inovasi pengelolaan di level sekolah tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas keuangan.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk turut bertanggungjawab dalam pembiayaan bantuan operasional sekolah.
5. Harus ada keputusan kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang seimbang antara anggaran untuk kegiatan fisik dengan anggaran kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM guru dan siswa, terutama dalam merespon perubahan lingkungan yang didorong oleh revolusi industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Cornali, F. (2012). Effectiveness and Efficiency of Educational Measures: Evaluation Practices, Indicators and Rhetoric. *Sociology Mind*, 2, 255-260

- Fathullah. (2018). Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin. *Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2)
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Masagung
- Milstein, B. & Wetterhall, S. (2018). *Framework for Program Evaluation: A Gateway to Tools*. Kansas: Community Tool Box
- McDavid, J. C., & Hawthorn, L. R. L. (2006). *Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rukmana, A. & Suryana, A. (2006). *Pengelolaan Kelas*. Bandung: UPI PRESS.
- Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

BIAYA SATUAN DAN LINIMASA PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Irsyad Zamjani, Herlinawati, Novrian Satria Perdana,
Ferdi Widiputera, Siti Nur Azizah
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan membantu peserta didik dari keluarga miskin memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan. Berbagai studi mengindikasikan bahwa penetapan biaya satuan dan tahapan pengelolaan PIP belum memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Studi ini bertujuan menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) PIP untuk peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan, merumuskan formula pendanaan PIP, dan menganalisis permasalahan terkait ketidakteraturan linimasa pengelolaan sehingga dana PIP tidak diterima saat dibutuhkan. Studi dilakukan dengan metode analisis data hasil survei sosial ekonomi nasional modul sosial budaya dan pendidikan (Susenas MSBP), studi literatur, dan wawancara. Kajian ini menghasilkan: (a) besaran biaya satuan PIP secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah; (b) formula pendanaan biaya satuan dengan prinsip berbagi tanggung jawab pembiayaan (*cost sharing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah; dan (c) fakta bahwa dana PIP tidak diterima saat dibutuhkan terutama karena pengelolaan PIP terlalu mengikuti kerangka kerja tahun anggaran (Januari-Desember) dan mengabaikan tahun ajaran (Juli-Juni). Studi ini merekomendasikan peyesuaian besaran biaya satuan PIP berdasarkan variasi wilayah; pendanaan PIP dengan prinsip *cost sharing*; dan strategi pengelolaan PIP yang mengombinasikan kerangka kerja tahun ajaran dan tahun anggaran.

Kata kunci: *biaya satuan, cost sharing, linimasa, PIP, tahun ajaran*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program Indonesia Pintar (PIP) telah dimulai sejak tahun 2015 dan telah menjadi salah satu program andalan Pemerintah di bidang pendidikan. Para penerima PIP ditetapkan dari basis data terpadu (BDT), yaitu data penduduk 40% terbawah secara sosial ekonomi yang dikategorikan sebagai kelompok miskin dan rentan miskin. Pada 2019 terdapat 17,9 juta penerima PIP atau 43% dari total populasi siswa seluruh jenjang. Meskipun telah berlangsung sejak tahun 2014, besaran dana yang diterima oleh penerima PIP tidak pernah berubah (lihat tabel 1). Bahkan, belum berubah sejak masih bernama Bantuan Siswa Miskin (Suprastowo, 2014). Menurut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (2018), besaran ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil para penerima, baik dari sisi nilai maupun variasinya.

Tabel 1. Besaran Bantuan PIP per Siswa per Tahun, 2014-2019

No.	Jenjang	Besaran Dana (Rp)
1	SD/ sederajat	450.000
2	SMP/ sederajat	750.000
3	SMA/ sederajat	1.000.000

Sumber: Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

Selain itu, tahapan pengelolaan PIP secara umum juga menyisakan sejumlah persoalan. Karena dana PIP diharapkan dapat membantu penerimanya memenuhi kebutuhan pribadi yang menunjang kegiatan bersekolah, idealnya dana tersebut dapat diterima oleh peserta didik sebelum atau setidaknya bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru. Namun, pada praktiknya seringkali dana tersebut tersalurkan pada tengah atau akhir semester. Bahkan, banyak siswa yang menerimanya setelah mereka lulus sekolah (Herlinawati dkk., 2017; Zamjani, 2018) .

2. Rumusan Masalah

Sebagai bagian dari tata kelola pendanaan pendidikan, pengelolaan PIP harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pemenuhan biaya pribadi ini akan memiliki manfaat lebih maksimal jika besarnya mendekati kebutuhan riil peserta didik baik dari sisi nilai maupun variasinya serta disalurkan pada saat yang tepat. Permasalahan di atas dapat dirumuskan melalui tiga pertanyaan berikut:

1. Berapa besaran biaya satuan (*unit cost*) PIP untuk peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan yang dapat mencukupi kebutuhan standar biaya pribadi pendidikan di masing-masing wilayah?
2. Bagaimana merumuskan formula pendanaan PIP yang adil dan sesuai kemampuan fiskal pemerintah?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan ketidakteraturan linimasa pengelolaan PIP sehingga dana bantuan tidak diterima saat dibutuhkan?

3. Tujuan

Dari rumusan permasalahan penelitian di atas, disusunlah tujuan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Menghitung besaran biaya satuan (*unit cost*) PIP untuk peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan yang dapat mencukupi kebutuhan standar biaya pribadi pendidikan di masing-masing wilayah
2. Merumuskan formula pendanaan PIP yang adil dan sesuai kemampuan fiskal pemerintah
3. Menganalisis permasalahan terkait ketidakteraturan linimasa pengelolaan sehingga dana PIP tidak diterima saat dibutuhkan

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Terdahulu tentang Biaya Pribadi Pendidikan

Konsep biaya pendidikan memiliki beragam makna. Supriadi (2004), mendefinisikan biaya pendidikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Menyangkut jenisnya, Fattah (2000) membagi biaya pendidikan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menyangkut sumber biaya, Bray (1996) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah keseluruhan input yang dapat diperoleh dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan agen-agen lain yang relevan.

Untuk konteks Indonesia, karakteristik biaya pendidikan sendiri telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut dinyatakan secara garis besar terdapat tiga jenis biaya pendidikan, yaitu: biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi. Mengenai sumber pendanaan pendidikan, Pasal 51 dari peraturan tersebut juga menyebutkan adanya tiga unsur, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Program Indonesia Pintar merupakan bentuk bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pribadi peserta didik. Beberapa kajian seperti Suryadi (1999), Ghazali dkk. (2003), dan Supriadi (2004) memiliki komponen biaya yang berbeda-beda. Namun, lembaga yang rutin menghitung biaya satuan pribadi ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) modul sosial budaya dan pendidikan (MSBP). BPS memasukkan 16 komponen pengeluaran pendidikan yang meliputi: uang pendaftaran, SPP, Komite sekolah, ekstrakurikuler, baju sekolah dan perlengkapan, tutup kepala dan alas kaki, buku pelajaran, bahan belajar, alat tulis dan perlengkapan, praktikum dan penunjang, kursus di sekolah, evaluasi/ujian, kunjungan edukatif, biaya lainnya, uang saku, dan uang transport (BPS, 2018).

Dalam menganalisis biaya pribadi, Supriadi (2004) dan Ghazali dkk. (2003) menggunakan satuan pendidikan sebagai kerangka sampel, sementara BPS menggunakan rumah tangga. Jika dicermati, selain faktor kerangka sampel, angka biaya satuan yang berbeda yang muncul dari ketiga kajian tersebut disebabkan karena komponen yang berbeda dan juga tahun studi yang berlainan. Ketiga hasil studi tersebut menunjukkan proporsi yang berbeda-beda dari masing-masing komponen. Studi Ghazali dkk. menunjukkan bahwa biaya konsumsi menyumbang proporsi terbesar di antara seluruh komponen biaya yang ada. Sedangkan BPS dan Supriadi menunjukkan uang saku menyumbang proporsi terbesar dari seluruh komponen.

Meskipun demikian, penentuan komponen biaya pribadi sangat terkait dengan kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah tentang pendanaan pendidikan. Sejak diperkenalkannya BOS pada tahun 2005, orang tua peserta didik pada jenjang dasar (SD dan SMP) pada sekolah negeri dibebaskan dari kewajiban membayar SPP. Hal ini karena besaran dana BOS yang diberikan telah sesuai dengan standar biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada jenjang menengah (SMA dan SMK), BOS juga diberikan namun hanya separuh dari standar biaya operasional, sehingga orang tua masih perlu membayar SPP untuk menanggung sisa kebutuhan biaya operasional. Dengan demikian, komponen SPP boleh jadi relevan untuk jenjang menengah namun tidak untuk jenjang dasar meskipun pada praktiknya beberapa sekolah negeri masih memungut.

2. Kajian Terdahulu Mengenai PIP

Petunjuk pelaksanaan PIP menyatakan terdapat 4 tahapan pengelolaan PIP, yaitu: penetapan, penyaluran dana, pemberitahuan dan penyampaian SK, dan aktivasi rekening dan penarikan dana. Kajian-kajian pengelolaan PIP selama ini lebih banyak pada tahapan kedua hingga keempat, sedangkan tahapan pertama tidak banyak mendapatkan perhatian. Kajian-kajian Puslitjakdikbud tentang PIP yang dilakukan sejak tahun 2016 lebih banyak menyoroti aspek sosialisasi program, pelayanan oleh sekolah, pelayanan oleh lembaga penyalur, pencairan dana, hingga pemanfaatan dana (Herlinawati dkk., 2017 dan 2018; Zamjani, 2018). Fokus yang sama juga termuat dalam kajian Ahmad (2018) dan beberapa kajian lain yang bersifat kasuistik kewilayahan atau satuan pendidikan (misalnya, Wulansari, 2017; Saraswati, 2017; dan Lusiana, 2018). Dari keempat tahapan tersebut, tahapan keempat, yaitu aktivasi rekening dan penarikan dana adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian. Menurut beberapa kajian, pencairan dana yang lambat terkait dengan faktor jarak rumah ke bank, literasi administrasi orang tua, dan pelayanan di bank.

Aspek lain yang cukup banyak disinggung dalam kajian adalah ketepatan sasaran. Kajian Puslitjakdikbud pada 2017 juga merekam berbagai keresahan sekolah terkait banyaknya penerima PIP yang pada dasarnya tidak layak. Di Kabupaten Banyumas, misalnya, terdapat laporan adanya anak dokter spesialis dan beberapa anak orang berada yang memperoleh PIP (Zamjani, 2018). Pada tahun 2018, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melakukan survei exclusion error di 4 kabupaten/kota yang menghitung seberapa besar keluarga miskin yang anak-anaknya tidak memperoleh PIP. Kajian tersebut menemukan bahwa 42,9% warga miskin di wilayah tersebut tidak terdaftar sebagai penerima PIP (ICW, 2018). Kajian Saraswati (2017) dan Lusiana (2018) mensinyalir rendahnya kualitas data dasar PIP sebagai penyebab adanya ketidaktepatan sasaran penerima.

Dapat dikatakan kajian-kajian sebelumnya hanya menyoroti hilirnya dan tidak menganalisis permasalahan yang ada di hulunya. Padahal, keempat tahapan tersebut saling terkait dan kualitas pelaksanaan salah satu tahapan akan mempengaruhi tahapan yang lain. Bahkan, dapat dikatakan tahap pertama sangat krusial dan paling penting. Baik masalah ketepatan sasaran maupun ketidaktepatan waktu tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang ada pada tahapan awal ini.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini secara umum menggunakan perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Fokus kajian ada tiga hal yaitu, penghitungan biaya satuan pribadi, formula pendanaan PIP, dan manajemen linimasa PIP. Untuk penghitungan biaya satuan dan formula pendanaan, digunakan perpaduan antara teknik kuantitatif dan kualitatif berupa analisis data statistik, studi literatur, dan wawancara. Sementara itu, analisis timeline PIP lebih mengandalkan perangkat kualitatif dari studi literatur dan wawancara. Sejumlah data sekunder yang menjadi sumber data kajian untuk dianalisis di antaranya adalah dataset hasil Susenas MSBP 2018, Juknis BOS, Juknis PIP, data penerima PIP, Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, data upah minimum provinsi, Sedangkan wawancara yang dilakukan melibatkan informan dari Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial BPS, dan sejumlah akademisi yang memiliki kepakaran dalam pendanaan pendidikan. Penghitungan biaya satuan dilakukan dengan tahapan penetapan basis data, analisis komponen biaya, penjumlahan komponen biaya, proyeksi inflasi pendidikan, proyeksi biaya satuan, dan penyesuaian biaya satuan dengan tingkat kemahalan masing-masing wilayah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penghitungan Biaya Satuan PIP

a. Biaya Satuan Pribadi yang dapat Didanai PIP, 2018

Kajian ini menggunakan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2018 sebagai basis data utama. Dari data Susenas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan selama setahun secara nasional adalah Rp 2,4 juta (SD), Rp 4,2 juta (SMP), dan Rp 6,5 juta (SMA/SMK). Pengeluaran ini dapat dinyatakan sebagai biaya satuan pribadi. Namun, angka rata-rata total ini tidak dapat digunakan sebagai acuan biaya satuan PIP karena pada dasarnya sasaran PIP adalah kelompok pengeluaran 40% terbawah (gabungan kuintil 1 dan 2) yang pengeluarannya secara konsisten lebih rendah daripada rata-rata total (lihat, tabel 2).

Tabel 2. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi Pendidikan menurut Kelompok Pengeluaran (Rp)

Kelompok Sosek	SD	SMP	SMA
K1	1.377.702	2.692.479	3.998.724
K2	1.804.056	3.387.709	4.882.794
K3	2.254.059	3.964.758	5.589.948
K4	2.661.474	4.716.180	6.532.828
K5	4.933.749	7.132.987	10.409.722
Total	2.404.982	4.230.439	6.529.853

Sumber: Susenas MSBP 2018, diolah

Data Susenas mencakup pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan yang dirinci menurut komponen biaya. Untuk menetapkan biaya pribadi yang dapat didanai melalui skema PIP, kajian ini mengeluarkan komponen yang seharusnya dibiayai oleh BOS sesuai Permendikbud No. 3/2019 tentang Juknis BOS. Hal ini agar tidak ada pembiayaan ganda oleh Pemerintah. Setelah dilakukan telaah, dari 11 komponen BOS, terdapat 6 komponen yang merupakan komponen biaya operasional yang sepenuhnya tidak memiliki irisan dengan biaya pribadi sebagaimana terekam dari Susenas, sehingga biaya satuan pribadi yang dapat didanai oleh PIP pada tahun 2018 adalah Rp 1,4 juta (SD) dan Rp 2,5 juta (SMP). Sedangkan untuk SMA/SMK ada dua opsi. Jika kebijakan BOS SMA/SMK masih seperti saat ini, maka besaran biaya satuan PIP adalah sebesar Rp 4,1 juta, namun jika BOS mengamanatkan pembebasan dari semua pungutan, maka yang dapat didanai PIP adalah Rp 3,4 juta (SMA/SMK) (Tabel 3). Dari tabel 3 tersebut juga tampak bahwa masyarakat miskin masih mengeluarkan dana untuk membiayai kebutuhan yang semestinya telah dibiayai oleh BOS.

**Tabel 3. Perbandingan Komponen Dibiayai BOS dan Dibiayai PIP (Rp)
(Rata-rata Total Kelompok 40% Terbawah Nasional)**

No	Komponen Biaya	SD		SMP		SMA/SMK		SMA/SMK	
		BOS	PIP	BOS	PIP	BOS (-SPP)	PIP	BOS (+SPP)	PIP
1	Pendaftaran	37.144	0	155.183	0	202.048		202.048	0
2	SPP	67.077	0	196.457	0	0	619.660	619.660	0
3	Komite Sekolah	18.522	0	58.653	0	0	90.850	90.850	0
4	Ekstrakurikuler	7.369	0	12.138	0	15.104		15.104	0
5	Pakaian	0	199.661	0	275.579	0	263.020	0	263.020
6	Buku pelajaran/panduan/diklat	27.530	0	48.194	0	76.539	0	76.539	0
7	Bahan Belajar	0	29.024	0	45.913	0	45.474	0	45.474
8	Alat tulis dan perlengkapan lainnya	0	61.402	0	77.011	0	80.448	0	80.448
9	Praktikum dan bahan penunjang	3.291	0	14.165		54.645		54.645	
10	Kursus	0	2.878	0	4.126	0	3.717	0	3.717
11	Evaluasi/ujian	3.244	0	10.200	0	23.698	0	23.698	
12	Kunjungan edukatif (study tour)	0	6.758	0	30.461	0	41.560	0	41.560
13	Uang Saku	0	949.224	0	1.527.120	0	2.015.842	0	2.015.842
14	Transportasi	0	156.153	0	561.495	0	931.674	0	931.674
15	Lainnya	14.506	0	30.166	0	26.324	0	26.324	0
Total Biaya Satuan		178.685	1.405.101	525.155	2.521.705	398.357	4.092.245	1.108.867	3.381.736
		1.583.786		3.046.860		4.490.603		4.490.603	

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019, diolah

b. Proyeksi Biaya Satuan PIP 2019-2020

Berdasarkan hasil Susenas MSBP 2018, kami memproyeksikan besaran biaya satuan PIP untuk 2019 dan 2020. Proyeksi ini dilakukan dengan menggunakan data inflasi pendidikan yang dirilis oleh BPS dan proyeksi inflasi pendidikan 2019-2020. Prosedur dalam melakukan proyeksi biaya satuan pribadi adalah sebagai berikut.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Proyeksi biaya satuan} & & \text{Biaya satuan pribadi} & & \text{Proyeksi inflasi} & & \text{Proyeksi inflasi} \\
 \text{pribadi menurut komponen} & & \text{menurut komponen} & & \text{pendidikan} & & \text{pendidikan} \\
 \text{(tahun X)} & = & \text{(tahun ke X-1 tahun)} & \times & \text{(tahun ke X-1} & \times & \text{(tahun ke X)} \\
 & & & & \text{tahun)} & &
 \end{array}$$

Dari perhitungan tersebut didapati pada tahun 2020, misalnya, besaran biaya satuan untuk SD adalah Rp 1.590.509; untuk SMP Rp 2.854.452; dan untuk SMA/SMK adalah Rp 4.632.232 secara nasional (selengkapnya lihat tabel 4).

Tabel 4. Rata-rata Biaya Satuan PIP per Komponen (Proyeksi 2019-2020) (Rp)

No	Komponen Biaya	SD (Rp)		SMP (Rp)		SMA/SMK (Rp)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	SPP/Sumbangan Komite	-	-	-	-	756.226	804.264
2	Pakaian Sekolah	212.508	226.007	293.311	311.943	279.944	297.727
3	Bahan Belajar	30.892	32.854	48.867	51.972	48.400	51.474
4	Alat Tulis	65.353	69.504	81.966	87.172	85.624	91.063
5	Kursus	3.063	3.258	4.391	4.670	3.957	4.208
6	Study Tour	7.193	7.650	32.421	34.480	44.234	47.044
7	Uang Saku	1.010.300	1.074.477	1.625.380	1.728.629	2.145.548	2.281.840
8	Uang Transportasi	166.201	176.758	597.623	635.586	991.620	1.054.611
	Total	1.495.510	1.590.509	2.683.959	2.854.452	4.355.553	4.632.231

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019, diolah

Dari keseluruhan komponen, uang saku menjadi komponen berbiaya tertinggi untuk semua jenjang. Komponen kedua tertinggi bervariasi pada masing-masing jenjang. Untuk SD, komponen berbiaya tertinggi kedua adalah pakaian sekolah, sementara pada SMP dan SMA/SMK adalah transportasi. Hal ini wajar karena kecenderungannya semakin tinggi jenjang, semakin jauh jarak sekolah dari rumah.

c. Variasi Biaya Satuan PIP antar Wilayah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Kebutuhan biaya pendidikan antar wilayah, dengan demikian, tidak dapat diseragamkan. Terdapat dua cara menetapkan variasi biaya satuan antar wilayah: menggunakan pendekatan konfirmatif berdasarkan pengeluaran murni seperti yang terekam dari Susenas dan menggunakan pendekatan afirmatif melalui indeks kemahalan.

Dengan cara pertama, kajian ini menemukan kesenjangan besaran biaya satuan yang cukup lebar antara yang tertinggi dan terendah. Pada jenjang SD, misalnya, rentangnya antara Rp 644 ribu (NTT) hingga Rp 3,2 juta (DKI Jakarta). Demikian halnya tingkat SMP dan SMA/SMK. NTT, Maluku dan Sulawesi Barat menjadi yang terendah (lihat tabel 5). Saat dicermati lebih jauh, ketiga daerah dengan biaya satuan terendah tersebut memiliki proporsi yang rendah pada komponen transportasi, terutama pada jenjang SMP (9%-17%) dan SMA/SMK (15% - 19%). Ini lebih rendah daripada rata-rata nasional (23%). BPS (2015) mencatat bahwa di NTT dan Maluku anak-anak SMP (78% dan 76%) dan SMA (52% dan 37%) pergi ke sekolah dengan berjalan kaki.

**Tabel 5. Variasi Biaya Satuan Per Provinsi Berdasarkan Rata-rata Pengeluaran,
Proyeksi 2020 (Rp)**

No.	PROVINSI	SD	PROVINSI	SMP	PROVINSI	SMA/SMK
1	DKI Jakarta	3.212.362	DKI Jakarta	5.495.624	DKI Jakarta	7.812.432
2	Kepulauan Riau	2.940.553	Kepulauan Riau	4.816.713	Kepulauan Riau	6.689.789
3	Kalimantan Timur	2.316.369	Kalimantan Timur	3.682.326	Jawa Barat	6.208.505
4	Banten	2.051.473	Jawa Barat	3.535.844	Bali	6.027.692
5	Jawa Barat	2.007.277	Banten	3.437.766	DI Yogyakarta	5.569.575
6	DI Yogyakarta	1.950.453	Sumatera Barat	3.405.005	Banten	5.184.789
7	Jambi	1.933.220	DI Yogyakarta	3.390.801	Jawa Tengah	5.161.381
8	Kalimantan Selatan	1.927.155	Bali	3.265.278	Kalimantan Timur	4.980.672
9	Bali	1.922.809	Kalimantan Selatan	3.238.885	Sumatera Barat	4.805.566
10	Kepulauan Bangka Belitung	1.881.604	Jawa Tengah	3.197.065	Jawa Timur	4.687.604
11	Riau	1.825.757	Kepulauan Bangka Belitung	3.125.892	Nusa Tenggara Barat	4.506.153
12	Sumatera Barat	1.793.300	Papua Barat	3.058.791	Jambi	4.479.762
13	Papua Barat	1.690.932	Sulawesi Utara	2.934.207	Sulawesi Utara	4.383.838
14	Kalimantan Tengah	1.664.872	Jambi	2.928.550	Kalimantan Selatan	4.269.059
15	Sulawesi Utara	1.662.495	Riau	2.914.634	Papua Barat	4.258.303
16	Jawa Tengah	1.618.208	Jawa Timur	2.898.375	Kepulauan Bangka Belitung	4.128.879
17	Jawa Timur	1.589.480	Sumatera Selatan	2.810.813	Bengkulu	4.022.423
18	Gorontalo	1.579.725	Bengkulu	2.772.230	Riau	3.969.671
19	Sumatera Selatan	1.538.345	Lampung	2.721.123	Sumatera Selatan	3.943.032
20	Aceh	1.470.112	Kalimantan Tengah	2.612.641	Sulawesi Selatan	3.823.222
21	Bengkulu	1.405.066	Sulawesi Selatan	2.374.803	Lampung	3.721.674
22	Kalimantan Utara	1.402.518	Nusa Tenggara Barat	2.313.679	Kalimantan Barat	3.578.374
23	Nusa Tenggara Barat	1.355.006	Kalimantan Barat	2.206.390	Kalimantan Tengah	3.565.481
24	Lampung	1.291.424	Sumatera Utara	2.194.107	Sumatera Utara	3.559.098
25	Sulawesi Selatan	1.251.003	Papua	2.162.747	Kalimantan Utara	3.309.798
26	Papua	1.250.425	Kalimantan Utara	2.160.602	Aceh	3.292.342
27	Maluku Utara	1.235.731	Aceh	2.134.587	Sulawesi Tenggara	3.209.314
28	Sumatera Utara	1.233.392	Sulawesi Tengah	2.016.759	Papua	3.202.934
29	Kalimantan Barat	1.201.272	Gorontalo	1.954.650	Gorontalo	3.158.171
30	Sulawesi Tengah	1.169.343	Sulawesi Tenggara	1.701.740	Sulawesi Tengah	3.130.069
31	Sulawesi Tenggara	1.014.994	Maluku Utara	1.681.309	Maluku Utara	3.095.731
32	Sulawesi Barat	903.762	Sulawesi Barat	1.621.769	Nusa Tenggara Timur	2.515.988
33	Maluku	814.941	Maluku	1.429.068	Maluku	2.428.137
34	Nusa Tenggara Timur	644.264	Nusa Tenggara Timur	1.127.404	Sulawesi Barat	2.355.887

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019, diolah

Cara kedua adalah dengan mengombinasikan dengan indeks kemahalan, dalam hal ini indeks upah minimum provinsi (UMP). Indeks UMP dianggap relevan karena mempertimbangkan tingkat kemahalan berdasarkan biaya konsumsi kebutuhan sehari-hari dan indeks kelayakan hidup. Penghitungan biaya satuan perprovinsi berdasarkan UMP dilakukan dengan formula sebagai berikut:

Biaya Satuan Provinsi =

UMP/Rata-rata UMP Seluruh Provinsi*Rata-rata Biaya Satuan Kelompok 40% Terbawah Nasional

Dengan mempertimbangkan indeks kemahalan ini hasilnya sedikit berbeda. Kesenjangan besaran biaya satuan antar wilayah tertinggi dan terendah tidak selebar hasil perhitungan pertama. Selain itu, DKI Jakarta tetap menduduki urutan teratas, namun provinsi-provinsi lain di Jawa menduduki empat posisi terbawah. Sedangkan wilayah luar Jawa yang selama ini dikenal berbiaya mahal menduduki kelompok urutan atas (lihat tabel 6).

Tabel 6. Variasi Biaya Satuan Per Provinsi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020

No	Provinsi	UMP (Rp) (Proyeksi 2020)	Indeks UMP	Unit Cost Per Jenjang (Rp)		
				SD	SMP	SMA/SMK
1	DKI Jakarta	4.233.476	1,59	2.535.682	4.550.734	7.384.973
2	Papua	3.510.653	1,32	2.102.740	3.773.742	6.124.064
3	Sulawesi Utara	3.277.530	1,23	1.963.109	3.523.149	5.717.399
4	Sulawesi Barat	3.199.833	1,21	1.916.572	3.439.629	5.581.862
5	Kepulauan Bangka Belitung	3.197.639	1,20	1.915.258	3.437.271	5.578.036
6	Papua Barat	3.187.333	1,20	1.909.085	3.426.193	5.560.058
7	Aceh	3.128.330	1,18	1.873.744	3.362.768	5.457.131
8	Sulawesi Selatan	3.072.682	1,16	1.840.413	3.302.950	5.360.057
9	Sumatera Selatan	3.012.602	1,13	1.804.428	3.238.368	5.255.253
10	Kepulauan Riau	2.975.233	1,12	1.782.045	3.198.198	5.190.065
11	Kalimantan Utara	2.970.718	1,12	1.779.341	3.193.345	5.182.190
12	Kalimantan Timur	2.951.488	1,11	1.767.823	3.172.673	5.148.644
13	Kalimantan Tengah	2.873.477	1,08	1.721.098	3.088.817	5.012.560
14	Riau	2.859.603	1,08	1.712.788	3.073.903	4.988.358
15	Kalimantan Selatan	2.849.932	1,07	1.706.995	3.063.507	4.971.487
16	Maluku	2.658.292	1,00	1.592.210	2.857.505	4.637.186
17	Jambi	2.603.793	0,98	1.559.567	2.798.922	4.542.116
18	Gorontalo	2.560.964	0,96	1.533.915	2.752.884	4.467.406
19	Sulawesi Tenggara	2.526.427	0,95	1.513.229	2.715.759	4.407.158
20	Maluku Utara	2.491.577	0,94	1.492.355	2.678.296	4.346.364
21	Sumatera Utara	2.474.364	0,93	1.482.045	2.659.794	4.316.338
22	Bali	2.468.524	0,93	1.478.547	2.653.516	4.306.150
23	Sumatera Barat	2.459.137	0,93	1.472.925	2.643.426	4.289.776
24	Banten	2.436.295	0,92	1.459.243	2.618.872	4.249.930
25	Lampung	2.406.788	0,91	1.441.569	2.587.153	4.198.456
26	Kalimantan Barat	2.375.388	0,89	1.422.762	2.553.401	4.143.682
27	Sulawesi Tengah	2.280.614	0,86	1.365.996	2.451.524	3.978.356
28	Nusa Tenggara Barat	2.204.317	0,83	1.320.297	2.369.509	3.845.261
29	Bengkulu	2.191.306	0,83	1.312.504	2.355.523	3.822.564
30	Nusa Tenggara Timur	1.927.724	0,73	1.154.629	2.072.188	3.362.766
31	Jawa Barat	1.792.200	0,67	1.073.456	1.926.508	3.126.355
32	Jawa Tengah	1.724.550	0,65	1.032.936	1.853.788	3.008.344
33	Jawa Timur	1.715.043	0,65	1.027.242	1.843.569	2.991.761
34	DI Yogyakarta	1.687.517	0,64	1.010.755	1.813.981	2.943.744
	Rata-rata Nasional	2.655.451	1,00	1.590.509	2.854.452	4.632.231

Sumber: UMP 2019 dan Susenas MSBP 2018, diolah

Menetapkan variasi besaran dengan indeks kemahalan ini dapat menjadi langkah afirmatif untuk mengatasi kesenjangan antara peserta didik yang tinggal di wilayah-wilayah di Jawa yang relatif penuh dengan fasilitas dan yang bersekolah di wilayah-wilayah di luar Jawa terutama kawasan timur yang masih mengalami berbagai keterbatasan.

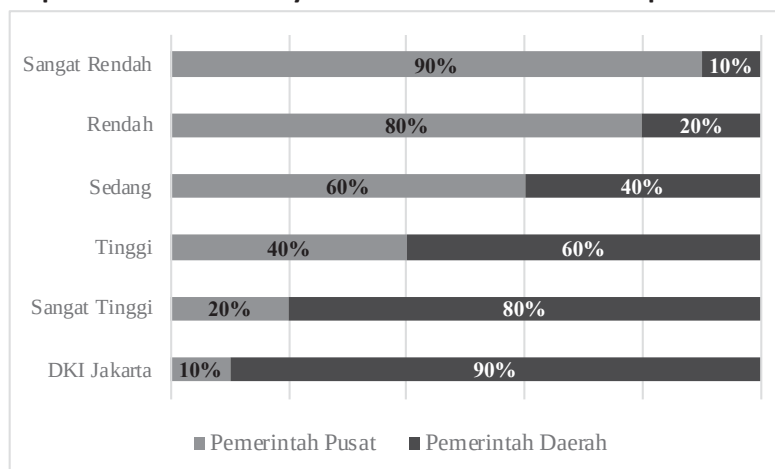
2. Formula Pendanaan PIP

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan merupakan kewajiban bersama yang ditanggung Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendanaan PIP Pemerintah perlu berbagi dengan pemerintah daerah. Untuk menyiasati variasi kemampuan pemerintah daerah, diperlukan pendekatan afirmatif dalam membagi proporsi pendanaan. Instrumen yang digunakan adalah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

IKFD dibagi ke dalam 5 kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Jumlah kategori ini digunakan sebagai pembagi proporsi tanggung jawab pendanaan. Semakin tinggi IKFD semakin rendah kontribusi Pemerintah Pusat. Karena terdapat 5 kategori, maka didapatkan kelipatan 20% untuk membuat peringkat proporsi. Dalam hal ini ditetapkan bahwa kategori sangat tinggi memperoleh proporsi bantuan

terendah (20%), kategori tinggi 40%, kategori sedang 60%, kategori rendah 80%, dan kategori sangat rendah 90%. Kekhususan berlaku pada Provinsi DKI yang IKFD-nya jauh di atas rata-rata daerah dalam satu kategori, sehingga proporsinya diberikan 10% untuk kontribusi Pemerintah Pusat.

Grafik 1. Proporsi Pendanaan Biaya PIP berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah



Membagi proporsi tanggung jawab pendanaan ini bermanfaat untuk mendorong partisipasi daerah, memperkuat daerah-daerah berkapasitas rendah, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Meski demikian, penghitungan pendanaan dengan proporsi berdasarkan IKF perlu dilakukan lebih jauh dengan mempertimbangkan IKF pada level kabupaten/kota. Hal ini karena IKF provinsi yang merujuk pada kapasitas APBD Provinsi hanya relevan untuk pendanaan jenjang menengah (SMA dan SMK). Sementara untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berada di bawah wewenang Kabupaten/Kota, proporsi pendanaan idealnya dihitung berdasarkan IKF Kabupaten/Kota.

3. Linimasa Pengelolaan PIP

Pengelolaan PIP dilakukan dalam empat tahapan, yaitu penetapan penerima, penyaluran dana, penyampaian SK, dan pencairan dana. Namun, keempat tahapan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun tanpa penetapan jadwal yang terpola. Akibatnya, dana bantuan tidak diterima pada saat dibutuhkan. Pada bagian ini akan dianalisis berbagai permasalahan yang terjadi sehingga pengelolaan PIP tidak optimal.

Grafik 2. Linimasa Pelaksanaan PIP Tahun 2018



a. Pendataan Sasaran Penerima PIP

Pangkal utama dari berbagai permasalahan PIP adalah data. Sasaran utama penerima PIP adalah penduduk usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai, penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan data yang terintegrasi yang dikelola oleh kementerian yang menangani urusan sosial. Data yang dimaksud bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh tim pokja yang terdiri dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 7. Proporsi Penerima PIP Menurut Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Penerima PIP 2016-2018 (Semua Jenjang)	2015-2016		2016-2017		2017-2018	
			Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)	Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)	Total Siswa	Siswa Penerima PIP (%)
1	Nusa Tenggara Barat	557.936	856.077	65,2	865.875	64,4	864.466	64,5
2	Aceh	547.797	861.048	63,6	870.639	62,9	874.898	62,6
3	Nusa Tenggara Timur	853.068	1.352.988	63,1	1.367.624	62,4	1.366.894	62,4
4	Sulawesi Tengah	365.950	594.415	61,6	599.033	61,1	589.386	62,1
5	Gorontalo	123.589	225.771	54,7	224.754	55,0	219.142	56,4
6	DI Yogyakarta	298.868	553.838	54,0	565.550	52,8	570.222	52,4
7	Sulawesi Tenggara	298.956	575.523	51,9	580.519	51,5	572.368	52,2
8	Sulawesi Barat	141.270	279.921	50,5	282.456	50,0	278.144	50,8
9	Jawa Tengah	2.566.118	5.187.236	49,5	5.238.196	49,0	5.221.468	49,1
10	Papua	318.537	610.552	52,2	626.351	50,9	653.883	48,7
11	Lampung	653.119	1.416.992	46,1	1.440.894	45,3	1.446.928	45,1
12	Sulawesi Selatan	742.149	1.702.470	43,6	1.699.604	43,7	1.672.336	44,4
13	Bengkulu	160.924	377.069	42,7	381.321	42,2	379.462	42,4
14	Sumatera Barat	460.782	1.081.252	42,6	1.092.433	42,2	1.090.510	42,3
15	Maluku	172.786	410.635	42,1	415.564	41,6	415.150	41,6
16	Papua Barat	86.942	209.837	41,4	214.911	40,5	222.381	39,1
17	Sumatera Utara	1.168.863	3.041.808	38,4	3.068.583	38,1	3.054.612	38,3
18	Sumatera Selatan	610.833	1.625.385	37,6	1.595.762	38,3	1.599.741	38,2
19	Jawa Timur	2.027.040	5.331.786	38,0	5.371.261	37,7	5.364.879	37,8
20	Sulawesi Utara	169.188	473.920	35,7	477.969	35,4	470.147	36,0
21	Jawa Barat	2.875.365	7.819.983	36,8	7.955.423	36,1	8.036.944	35,8
22	Kalimantan Barat	361.875	991.943	36,5	1.007.724	35,9	1.011.915	35,8
23	Jambi	225.318	629.607	35,8	639.018	35,3	640.423	35,2
24	Kalimantan Utara	41.324	130.805	31,6	134.459	30,7	134.085	30,8
25	Kalimantan Selatan	183.210	602.331	30,4	618.214	29,6	621.308	29,5
26	Maluku Utara	80.791	270.903	29,8	273.769	29,5	275.192	29,4
27	Riau	370.014	1.268.444	29,2	1.291.113	28,7	1.299.161	28,5
28	Banten	555.517	2.010.496	27,6	2.046.860	27,1	2.049.300	27,1
29	Bali	208.001	768.437	27,1	776.094	26,8	776.664	26,8
30	Kalimantan Tengah	126.301	478.521	26,4	481.770	26,2	484.825	26,1
31	Kepulauan Riau	94.653	360.077	26,3	374.520	25,3	384.746	24,6
32	Kalimantan Timur	172.857	698.358	24,8	711.804	24,3	714.677	24,2
33	Kepulauan Bangka Belitung	51.981	258.086	20,1	264.584	19,6	270.101	19,2
34	DKI Jakarta	177.587	1.571.461	11,3	1.567.107	11,3	1.566.543	11,3
Indonesia		17.849.507	44.627.975	40,0	45.121.758	39,6	45.192.901	39,7

Sumber: Dapodikdasmen 2019 dan pip.kemdikbud.go.id, diolah (data realisasi 2016-2018)

BDT adalah data 40% penduduk yang terbawah secara status sosial ekonomi, dalam hal ini adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Data BDT dimutakhirkan setahun dua kali dan dirilis pada bulan Mei dan November. Jumlah kuota penerima PIP sendiri secara konsisten juga mengikuti alur ini. Kuota PIP sebesar 17,9 juta siswa ditetapkan sejak 2017 dan tidak berubah hingga 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi siswa pada periode tahun ajaran yang sama, proporsinya secara konsisten berada pada kisaran 40% (lihat tabel 7). Hal menunjukkan bahwa pada dasarnya sasaran PIP telah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Selain itu, proporsi penerima PIP dari masing-masing wilayah juga berbeda sesuai dengan variasi tingkat kemiskinan masing-masing.

Namun, jika mencermati data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, proporsi penduduk rentan miskin dan miskin secara nasional kurang dari 40%. Dalam kaitan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang

berada di bawah garis kemiskinan dan rentan miskin adalah mereka yang berada pada 1,5x garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dari kemampuan pengeluaran per-kapita per bulan untuk makanan dan non-makanan. Pengeluaran minimum makanan disetarakan dengan pemenuhan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, pengeluaran non-makanan mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2019).

Tabel 8. Proporsi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin per Provinsi, 2017

No	Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/bulan)	Batas Maksimal Rentan Miskin (Rp/bulan)	Penduduk Miskin (%)	Penduduk Rentan Miskin (%)	Total (%)
1	Nusa Tenggara Timur	369.259	553.889	21,38	25,2	46,6
2	Maluku	452.559	678.838	18,29	23,7	42,0
4	Bengkulu	470.166	705.249	15,59	25,7	41,3
6	Aceh	461.371	692.056	15,92	24,6	40,5
5	Papua	477.699	716.548	27,76	12,5	40,3
3	Papua Barat	511.234	766.850	23,12	14,9	38,0
7	Sulawesi Tengah	415.684	623.525	14,22	23,4	37,6
8	Lampung	402.061	603.091	13,04	23,9	36,9
9	Sumatera Selatan	386.924	580.386	13,10	23,2	36,3
13	Nusa Tenggara Barat	353.542	530.313	15,05	19,3	34,4
17	Jambi	415.635	623.452	7,90	25,9	33,8
11	Sulawesi Barat	316.757	475.135	11,18	22,3	33,5
12	DI Yogyakarta	383.246	574.869	12,36	20,8	33,2
10	Sumatera Utara	423.026	634.538	9,28	23,8	33,1
15	Jawa Tengah	338.675	508.012	12,23	20,6	32,8
16	Gorontalo	308.642	462.963	17,14	14,9	32,0
14	Jawa Timur	360.291	540.437	11,20	20,6	31,8
19	Sumatera Barat	458.390	687.585	6,75	21,6	28,4
18	Kalimantan Barat	397.951	596.926	7,86	20,4	28,3
20	Maluku Utara	402.356	603.533	6,44	21,7	28,1
22	Sulawesi Tenggara	302.060	453.090	11,97	15,2	27,2
21	Kalimantan Utara	575.175	862.763	6,96	19,9	26,9
23	Riau	465.997	698.996	7,41	19,3	26,7
27	Kepulauan Bangka Belitung	609.071	913.607	5,30	20,9	26,2
24	Jawa Barat	353.985	530.977	7,83	17,5	25,3
25	Sulawesi Selatan	295.811	443.717	9,48	15,0	24,5
28	Kalimantan Timur	559.649	839.474	6,08	18,3	24,4
26	Kepulauan Riau	523.929	785.893	6,13	17,1	23,2
29	Kalimantan Selatan	421.087	631.630	4,70	17,7	22,4
30	Sulawesi Utara	336.039	504.058	7,90	14,4	22,3
31	Banten	397.088	595.632	5,59	15,3	20,9
32	DKI Jakarta	578.247	867.371	3,78	15,2	19,0
34	Kalimantan Tengah	398.586	597.879	5,26	13,6	18,9
33	Bali	360.972	541.458	4,14	13,4	17,5
	Nasional	420.093	630.139	11,0	19,5	30,4

Sumber: Diolah dari Susenas 2017

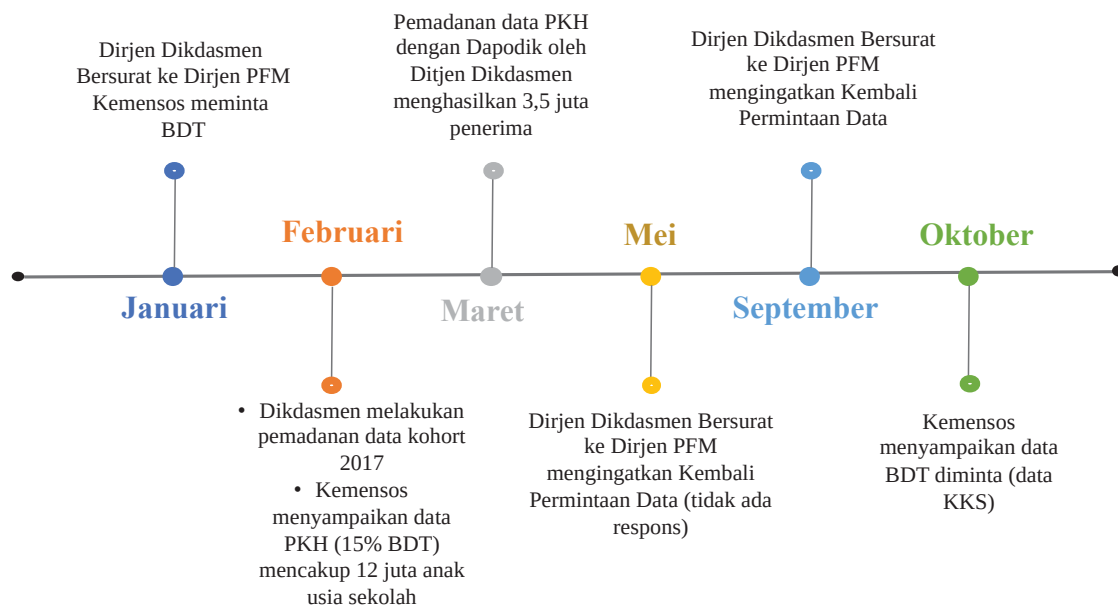
Dari data Susenas 2017, rata-rata garis kemiskinan per kapita secara nasional adalah sebesar Rp 420.093. Jika dihitung secara nasional, proporsi penduduk miskin dan rentan miskin pada tahun tersebut adalah sebesar 30,4%. Hal ini berarti penetapan proporsi 40% untuk sasaran penerima PIP secara nasional dapat dikatakan kurang relevan. Selain itu, masing-masing provinsi memiliki angka kemiskinan yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak dapat digeneralisasikan secara nasional. Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (46,6%) dan terendah di Provinsi Bali (17,5%). Penetapan sasaran PIP semestinya mempertimbangkan variasi angka kemiskinan antar wilayah ini.

Meskipun, idealnya angka kemiskinan yang perlu dicermati adalah angka kemiskinan penduduk usia 6-21 tahun yang menjadi sasaran PIP, bukan angka kemiskinan total seluruh penduduk.

b. Pemutakhiran BDT

Terlepas dari persoalan yang ada dalam pendataan di atas, proses pemerolehan data BDT pun menyisakan berbagai masalah yang sangat berpengaruh pada ketidakpastian jadwal pengelolaan. Pasalnya, data BDT tersebut masih perlu dipadankan dengan Dapodik untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdaftar dalam BDT benar-benar berada di sekolah sehingga dapat menjadi penerima PIP.

Grafik 3. Timeline Pemerolehan BDT dari Kemensos Tahun 2018



Secara teknis BDT ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Dalam proses pemerolehan data tersebut, Ditjen Dikdasmen Kemendikbud berkirim surat kepada Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos yang selanjutnya akan memintakan data kepada Pusdatin. Menurut Juklak PIP, proses pendataan ini dilakukan pada awal tahun anggaran dan Kemendikbud telah melakukannya sesuai jadwal. Sayangnya, juklak memang tidak menyebutkan berapa lama proses pendataan ini seharusnya berlangsung. Berdasarkan penelusuran pelaksanaan PIP 2018, proses ini berlarut-larut sehingga Kemendikbud baru memperoleh data yang diminta menjelang bulan akhir 2018. Ditjen Dikdasmen berkirim surat ke Ditjen PFM pada 31 Januari 2018 untuk meminta data BDT, namun Ditjen PFM memberikan data Program Keluarga Harapan (PKH) pada 15 Februari 2018. Data PKH adalah subset dari BDT dan bersifat terbatas karena program PKH tidak dilaksanakan di seluruh provinsi. Data PKH yang diberikan saat itu berjumlah sebesar 12.710.141 anak usia sekolah. Namun, setelah disandingkan dengan Dapodik, hanya 3,5 juta di antaranya yang berhasil dipadankan. Data ini tentu masih jauh dari kuota PIP sebesar 17 juta, sehingga Ditjen Dikdasmen perlu mencari penerima PIP dari data lain selain BDT. Pada 24 Mei 2018, Ditjen Dikdasmen bersurat kembali ke Ditjen PFM mengingatkan tentang permintaan data dan hingga September 2018 tidak menerima respon. Pada 24 September Ditjen Dikdasmen mengirimkan surat kembali kepada Ditjen PFM mengingatkan tentang permintaan data tersebut dan baru pada Oktober 2018 data yang diminta tersebut diperoleh oleh Kemendikbud (lihat grafik 3).

Lambatnya proses pendataan ini membuat seluruh tahapan pengelolaan PIP mundur. Direktorat teknis sendiri membutuhkan waktu selama dua minggu untuk melakukan pemadanan data dengan Dapodik. Hal ini karena data BDT yang diperoleh masih sangat kasar. Variabel yang dibutuhkan untuk BDT tersebut

antara lain: nama ibu dan bapak kandung; NIK anak, ibu dan bapak; tempat dan tanggal lahir anak; pekerjaan orang tua dan penghasilan rata-rata orang tua perbulan; serta jumlah keluarga dalam satu KK. Salah satu hal umum yang menjadi perhatian dalam proses pemadanan adalah nama. Banyak nama yang tertera dalam BDT bukan nama lengkap, salah ketik, dan oleh karenanya mirip antara satu dengan yang lain. Hal ini berbeda dari nama yang tertera di Dapodik yang merupakan nama lengkap dan legal. Akibatnya, pihak Kemendikbud harus bekerja ekstra keras mencocokkan nama-nama tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dengan urusan perbankan saat mereka menerima dana nantinya. Data BDT rilis terbaru digunakan untuk penetapan sasaran penerima.

Mengenai proses permintaan data yang berlarut-larut tersebut, pihak Kemensos mengatakan seharusnya tidak ada permasalahan yang berarti terkait dengan permintaan data BDT/PKH/KKS. Berlarut-larutnya proses permintaan data ini terkait dengan prosedur birokrasi yang cukup panjang. Kemendikbud tidak dapat meminta secara langsung ke Pusdatin sebagai pengelola BDT, namun harus melewati Ditjen FKM dan Setjen Kemensos. Selain itu, sebagaimana disampaikan pihak Kemensos, kesiapan BDT juga menjadi faktor. BDT yang seharusnya dirilis bulan November 2018 sampai saat laporan ini ditulis pada bulan April 2019 belum dirilis karena adanya berbagai kendala pendataan di lapangan. Kesiapan data BDT sangat tergantung pada komitmen para pemangku kepentingan di daerah dan kondisi geografis wilayah. Petugas seringkali tidak bisa melakukan kegiatan verifikasi yang telah direncanakan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

c. Tahun Ajaran vs. Tahun Anggaran

Faktor yang tidak kalah penting yang membuat linimasa pengelolaan PIP tidak terstruktur adalah penggunaan kerangka kerja tahun anggaran. Padahal, dana PIP diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi biaya pendidikan mereka selama bersekolah. Satu tahun akademik sekolah dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Sedangkan PIP dikelola mengikuti logika tahun anggaran (Januari-Desember). Karena sangat terpaku pada skema tahun anggaran ini, maka peserta didik dapat menerima dana ketika dana tersebut belum atau tidak lagi dibutuhkan. Peserta didik dapat menerima dana pada semester genap maupun ganjil dan pada awal maupun akhir masing-masing semester. Bahkan banyak peserta didik yang menerima dana saat mereka sudah lulus sekolah (Zamjani, 2018).

Selain itu, besaran dana yang diterima oleh peserta didik tidak sama, terutama pada kelas awal dan akhir. Peserta didik kelas akhir pada masing-masing jenjang yang ditetapkan sebagai penerima pada semester genap tahun ajaran (Januari-Juni) hanya dapat menerima separuh dana sebagaimana halnya peserta didik kelas awal yang menerima pada semester ganjil. Selain tidak adil, pembagian dana semacam ini juga dapat mengancam keberlangsungan sekolah siswa pada tahun ajaran tersebut karena mereka hanya menerima biaya pendidikan untuk 1 semester. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemberian bantuan PIP itu sendiri.

Tabel 9. Besaran Dana PIP yang Diterima Menurut Kelas

Jenjang	Semester Genap (Januari-Juni)	Semester Ganjil (Juli-Desember)
SD/ Paket A	Rp225.000,- Kelas 6 Rp450.000,- Kelas 1 – 5	Rp225.000,- Kelas 1 Rp450.000,- Kelas 2 – 6
SMP/ Paket B	Rp375.000,- Kelas 9 Rp750.000,- Kelas 7 & 8	Rp375.000,- Kelas 7 Rp750.000,- Kelas 8 & 9
SMA/ Paket C	Rp500.000,- Kelas 12 Rp1.000.000,- Kelas 10 & 11	Rp500.000,- Kelas 10 Rp1.000.000,- Kelas 11 & 12
SMK	Rp500.000,- Kelas 12 Rp1.000.000,- Kelas 10 & 11	Rp500.000,- Kelas 10 Rp1.000.000,- Kelas 11 & 12

Sumber: Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Biaya Satuan PIP

Secara umum kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penghitungan kebutuhan biaya pribadi yang dapat dibiayai oleh PIP, biaya satuan PIP yang berlaku saat ini masih jauh dari kebutuhan aktual.

Tabel 10. Selisih Biaya Satuan PIP Saat Ini terhadap Kebutuhan Aktual (Rp)

Jenjang	Biaya Saat Ini (2015-2019)	Biaya Dibutuhkan (Proyeksi 2020)	Selisih
SD	450.000	1.590.509	1.140.509
SMP	750.000	2.854.452	2.104.452
SMA/SMK	1.000.000	4.632.231	3.632.231

Sumber: Juknis PIP 2018 dan Susenas MSBP 2018 diolah

Selain menghitung biaya berdasarkan rata-rata kebutuhan individu baik secara nasional maupun provinsi, kajian ini juga menawarkan pendekatan afirmatif dalam hal alokasi besaran bantuan dan formula pendanaan. Pendekatan ini menganut dua prinsip: pertama, peserta didik yang tinggal di daerah dengan kebutuhan hidup mahal semestinya memperoleh bantuan lebih besar, begitupun sebaliknya; kedua, tanggung jawab pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan cara memberikan kontribusi bantuan lebih besar kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan, sebaliknya, memberi lebih rendah kepada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi.

b. Pengelolaan PIP

Hasil kajian mendapatkan bahwa penyaluran dan pencairan dana PIP selalu mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun. Akibatnya, dana PIP tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik penerimanya pada saat dibutuhkan. Penyebab keterlambatan tersebut adalah pendataan penerima yang tidak memperhatikan indikator makro kemiskinan, pemerolehan data BDT yang selalu terlambat, dan tidak adanya sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran.

2. Rekomendasi

a. Besaran Biaya Satuan PIP

Untuk memenuhi aspek **keadilan** dan **kecukupan**, perlu dilakukan variasi besaran biaya satuan PIP. Terdapat dua alternatif skema besaran biaya yang diusulkan oleh kajian ini. Keempat alternatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Biaya satuan PIP berlaku sama untuk seluruh wilayah (*flat*) berdasarkan perhitungan rata-rata kelompok 40% terbawah nasional

Ini adalah skema yang saat ini diadopsi dalam penentuan skema bantuan Pemerintah seperti BOS dan PIP. Skema ini paling sederhana dan mudah karena biaya satuan diberlakukan flat atau seragam pada tiap jenjang. Artinya, variasi hanya berlaku antar jenjang pendidikan saja. Dasar skema diambilkan dari perhitungan total rata-rata 40% terbawah nasional. Ini untuk menyelaraskan dengan kelompok sasaran PIP yang juga berasal dari penduduk kelompok sosial ekonomi 40% terbawah yang terdata dalam Basis Data Terpadu. Namun, skema ini tidak cukup memenuhi prinsip keadilan dan kecukupan karena menyeragamkan asumsi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda antar wilayah

Tabel 11. Besaran Biaya Satuan PIP Opsi 1, Proyeksi 2020 (Rp)

Jenjang	Unit Cost (Proyeksi 2020)
SD	1.590.509
SMP	2.854.452
SMA/SMK	4.632.231

2) Variasi besaran berdasarkan tingkat kemahalan daerah

Melalui skema ini biaya satuan dibedakan berdasarkan tingkat kemahalan daerah. Menggunakan indeks kemahalan dapat menjadi acuan yang konstan karena dikeluarkan secara rutin sehingga dinamikanya dapat dipantau setiap tahun tanpa perlu melakukan survei berkala untuk memantau kebutuhan biaya yang bervariasi antar daerah. Selain itu, dengan menggunakan indeks, maka akan diperoleh peringkat yang konsisten antar daerah untuk setiap jenjang. Dalam hal pemenuhan prinsip keadilan dan kecukupan, skema ini lebih baik daripada skema yang berlaku saat ini. Namun, hal ini akan sedikit kompleks karena Pemerintah harus mengalokasikan 34 jenis besaran satuan biaya untuk masing-masing jenjang. Jika dihitung seluruhnya, terdapat 136 variasi biaya untuk keseluruhan jenjang. Secara penganggaran hal ini akan sedikit merepotkan bagi Pemerintah. Dalam hal ini, indeks kemahalan yang dapat digunakan adalah indeks UMP. Variasi unit cost menurut Indeks UMP adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Besaran Biaya Satuan PIP Opsi 2: Variasi Berdasarkan Indeks UMP, Proyeksi 2020 (Rp)

No	Provinsi	UMP	Indeks UMP	Unit Cost Per Jenjang (Rp)		
				SD	SMP	SM
1	DKI Jakarta	3.940.973	1,60	2.544.557	4.566.660	7.410.818
2	Papua	3.240.900	1,32	2.092.543	3.755.440	6.094.363
3	Sulawesi Utara	3.051.076	1,24	1.969.980	3.535.479	5.737.408
4	Kepulauan Bangka Belitung	2.976.705	1,21	1.921.961	3.449.301	5.597.557
5	Papua Barat	2.934.500	1,19	1.894.710	3.400.395	5.518.192
6	Aceh	2.916.810	1,18	1.883.288	3.379.896	5.484.927
7	Sulawesi Barat	2.860.382	1,16	1.846.855	3.314.510	5.378.817
8	Sulawesi Selatan	2.860.382	1,16	1.846.855	3.314.510	5.378.817
9	Sumatera Selatan	2.804.453	1,14	1.810.743	3.249.701	5.273.645
10	Kepulauan Riau	2.769.683	1,12	1.788.293	3.209.411	5.208.261
11	Kalimantan Utara	2.765.463	1,12	1.785.569	3.204.521	5.200.326
12	Kalimantan Timur	2.747.561	1,12	1.774.010	3.183.777	5.166.662
13	Kalimantan Tengah	2.663.435	1,08	1.719.693	3.086.294	5.008.467
14	Riau	2.662.025	1,08	1.718.782	3.084.660	5.005.815
15	Kalimantan Selatan	2.652.781	1,08	1.712.814	3.073.949	4.988.432
16	Jambi	2.423.889	0,98	1.565.026	2.808.717	4.558.012
17	Maluku	2.400.664	0,97	1.550.030	2.781.805	4.514.338
18	Gorontalo	2.384.020	0,97	1.539.283	2.762.518	4.483.040
19	Sulawesi Tenggara	2.351.870	0,95	1.518.525	2.725.264	4.422.583
20	Maluku Utara	2.319.427	0,94	1.497.578	2.687.670	4.361.576
21	Sumatera Utara	2.303.403	0,94	1.487.232	2.669.102	4.331.443
22	Bali	2.297.967	0,93	1.483.722	2.662.803	4.321.221
23	Sumatera Barat	2.289.228	0,93	1.478.079	2.652.676	4.304.788
24	Banten	2.267.965	0,92	1.464.351	2.628.038	4.264.804
25	Lampung	2.240.646	0,91	1.446.712	2.596.381	4.213.432
26	Kalimantan Barat	2.211.266	0,90	1.427.742	2.562.337	4.158.184
27	Sulawesi Tengah	2.123.040	0,86	1.370.777	2.460.104	3.992.279
28	Bengkulu	2.040.000	0,83	1.317.161	2.363.880	3.836.126
29	NTB	2.012.610	0,82	1.299.476	2.332.141	3.784.620
30	NTT	1.793.293	0,73	1.157.870	2.078.005	3.372.205
31	Jawa Barat	1.668.372	0,68	1.077.213	1.933.251	3.137.297
32	Jawa Tengah	1.605.396	0,65	1.036.551	1.860.276	3.018.873
33	Jawa Timur	1.603.059	0,65	1.035.043	1.857.568	3.014.479
34	DIY	1.570.922	0,64	1.014.293	1.820.329	2.954.046
	Rata-rata Nasional	2.463.358	1	1.590.509	2.854.452	4.632.231

b. Formula Pendanaan PIP dengan Mekanisme Cost Sharing

Sebagaimana amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, tanggung jawab pendanaan pendidikan ditanggung bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam hal bahwa PIP merupakan bantuan Pemerintah dalam memenuhi biaya pribadi peserta didik dari keluarga miskin, tanggung jawab pendanaan semestinya dapat juga dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Sharing pendanaan ini dilakukan dengan mengacu pada indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD): semakin tinggi IKFD semakin rendah kontribusi Pemerintah Pusat. Simulasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP berdasarkan IKF dan Rata-rata Nasional

KATEGORI IKF DAERAH	Proporsi Kontribusi Pusat	Kontribusi Daerah	SD (Unit Cost = Rp 1.590.509)		SMP (Unit Cost = Rp 2.854.452)		SMA/SMK (Unit Cost = Rp 4.632.231)	
			Kontribusi Pusat	Kontribusi Daerah	Kontribusi Pusat	Kontribusi Daerah	Kontribusi Pusat	Kontribusi Daerah
DKI Jakarta	10%	90%	159.051	1.431.458	285.445	2.569.007	463.223	4.169.008
Sangat Tinggi	20%	80%	318.102	1.272.407	570.890	2.283.562	926.446	3.705.785
Tinggi	40%	60%	636.204	954.306	1.141.781	1.712.671	1.852.892	2.779.339
Sedang	60%	40%	954.306	636.204	1.712.671	1.141.781	2.779.339	1.852.892
Rendah	80%	20%	1.272.407	318.102	2.283.562	570.890	3.705.785	926.446
Sangat Rendah	90%	10%	1.431.458	159.051	2.569.007	285.445	4.169.008	463.223

Sumber: Susenas MSBP 2018 dan PMK 107/PMK.07/2018 diolah

Selain itu, pendekatan afirmatif ini juga dapat menggabungkan antara IKF dan variasi provinsi baik yang berasal dari hasil Susenas murni dan Susenas yang disesuaikan dengan UMP. Prinsip pembagian kontribusinya tetap sama: daerah dengan IKF tinggi berkontribusi lebih tinggi dan daerah dengan IKF rendah berkontribusi lebih sedikit.

Pendanaan unit cost dengan pendekatan afirmatif ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhatikan kebutuhan riil masing-masing daerah sebagaimana terekam dalam survei Susenas. Beberapa daerah dengan IKF tinggi memiliki kebutuhan biaya pribadi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih rendah. Meskipun demikian, formula pendanaan ini mewakili variasi kebutuhan dan kapasitas anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah, terutama dengan IKF tinggi atau sangat tinggi, dapat merujuk pada jumlah kebutuhan biaya masing-masing provinsi jika ingin menambahkan kontribusi yang diberikan.

c. Linimasa Pengelolaan PIP

Untuk memaksimalkan pengelolaan PIP yang memenuhi prinsip-prinsip kecukupan, keadilan, dan keberlanjutan, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kuota penerima PIP perlu mempertimbangkan perubahan angka kemiskinan setiap tahunnya, baik secara nasional maupun secara kewilayahan. Mengingat tingkat kemiskinan pada masing-masing wilayah berbeda-beda, penetapan kuota penerima PIP juga harus selaras dengan proporsi kemiskinan penduduk usia sekolah yang menjadi sasaran PIP pada setiap wilayah.
- 2) Mendorong upaya agar Kemendikbud sebagai pengelola PIP dapat mengakses data BDT sehingga dapat dipadankan secara simultan dengan Dapodik. Untuk hal itu, perlu dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendikbud dan Kemensos. Dokumen tersebut di antaranya memuat ketentuan bahwa variabel data yang dapat diakses oleh Kemendikbud akan secara otomatis dimutakhirkan setiap kali pemutakhiran BDT dirilis, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Jika hasil pemutakhiran BDT rilis tidak diterima oleh Kemendikbud karena sebab yang muncul dari pengelola data, dalam hal ini Kemensos, maka Kemendikbud dapat menggunakan data lama dan/atau data non-BDT demi ketepatan waktu pelaksanaan PIP.
- 3) Mengembangkan prosedur operasi standar (POS) mengenai pengusulan data yang bersumber dari pemangku kepentingan agar lebih terstruktur dan dapat dikendalikan. POS tersebut hendaknya memuat ruang lingkup pemangku kepentingan, data acuan yang digunakan dalam pengusulan, batas waktu pengusulan, dan konsekuensi tidak diperhatikannya usulan jika dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan.
- 4) Agar penerima PIP dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan, selain BDT perlu juga dilakukan pendataan melalui data kohort. Penggunaan data kohort dilakukan untuk peserta didik yang sudah memperoleh KIP sebelumnya, sedangkan data non-kohort yang bersumber dari BDT maupun pemangku kepentingan digunakan untuk peserta didik yang memperoleh KIP pertama kali. Namun, data BDT juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah peserta didik yang sedang memperoleh KIP masih layak atau tidak. Ilustrasi mengenai penggunaan data kohort dapat dilihat dalam tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Ilustrasi Pendataan Penerima PIP berdasarkan Data Kohort

Jenjang	Kelas	Kohort	Tahun Ajaran											
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
SD	I	1	1.701.790											
	II	2	1.653.575	1.656.882										
	III	3	1.650.365	1.637.815	1.641.091									
	IV	4	1.659.452	1.629.466	1.617.075	1.620.309								
	V	5	1.669.578	1.646.752	1.616.995	1.604.698	1.607.908							
	VI	6	1.646.860	1.620.601	1.598.444	1.569.560	1.557.624	1.560.739						
SMP	VII	1	1.350.568	1.364.574	1.378.726	1.393.024	1.407.471	1.422.067	1.436.815					
	VIII	2	1.326.733	1.340.492	1.354.394	1.368.440	1.382.631	1.396.970	1.411.458	1.426.096				
	IX	3	1.267.292	1.255.337	1.268.355	1.281.509	1.294.799	1.308.227	1.321.794	1.335.502	1.349.353			
SM	X	1	1.414.437	1.453.958	1.494.585	1.536.348	1.579.279	1.623.410	1.668.776	1.715.410	1.763.349	1.812.629		
	XI	2	1.373.489	1.411.865	1.451.315	1.491.867	1.533.554	1.576.406	1.620.457	1.665.740	1.712.290	1.760.141	1.809.331	
	XII	3	1.233.965	1.275.245	1.310.914	1.347.582	1.385.276	1.424.026	1.463.861	1.504.811	1.546.907	1.590.182	1.634.668	1.680.401

Ket: Jenjang SD Jenjang SMP Jenjang SM Siswa akan Lulus

Ilustrasi pada tabel 14 menggambarkan bahwa setiap siswa penerima PIP akan mendapatkan dana PIP setiap awal tahun pelajaran sampai siswa tersebut lulus. Angka yang tertera pada setiap baris adalah jumlah penerima PIP yaitu data 40% dari jumlah siswa setiap jenjang dan di setiap tahun ajaran. Data siswa tersebut diperoleh dari metode proyeksi siswa dengan menggunakan metode kohort siswa (Hermawan, 2017). Basis data yang digunakan melakukan proyeksi adalah data pertumbuhan, naik tingkat, dan kelulusan siswa SD hingga SMK yang dirilis oleh PDSPK tahun 2013 – 2018. Dengan cara di atas, berkebalikan dengan kebijakan yang ada selama ini, dana PIP akan diberikan dalam jumlah yang utuh bagi setiap penerima untuk keperluan bersekolah selama satu tahun ajaran penuh (lihat tabel 15).

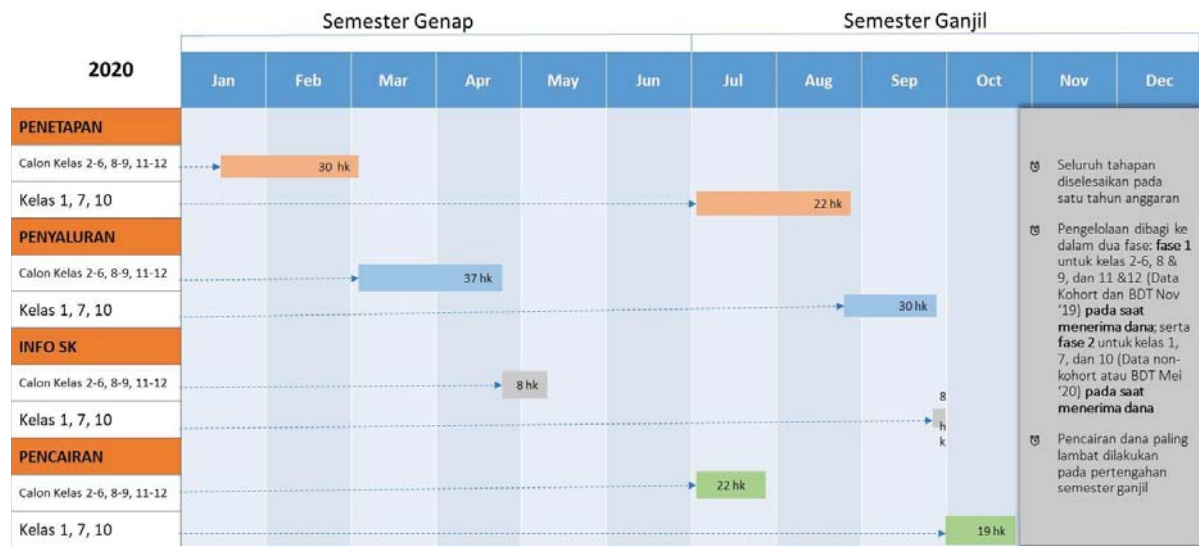
**Tabel 15. Waktu dan Besaran Dana yang Diberikan kepada Penerima PIP
(Asumsi Unit Cost Lama)**

Jenjang	Kelas	Waktu dan Besaran Dana diberikan pada Semester Ganjil (Rp)	
		Awal	Tengah
SD/ Paket A	1		450.000
	2-6	450.000	
SMP/ Paket B	7		750.000
	8-9	750.000	
SMA/ Paket C	10		1.000.000
	11-12	1.000.000	
SMK	10		1.000.000
	11-12	1.000.000	

- 5) Agar dana PIP dapat diterima secara penuh untuk membiayai kebutuhan peserta didik selama satu tahun ajaran, tahapan pengelolaan PIP perlu dipisahkan antara peserta didik yang akan duduk pada kelas awal dan kelas lanjutan saat semester ganjil. Untuk calon siswa kelas 2-6, 8-9, dan 11-12 tahapan penetapan, penyaluran, dan pemberitahuan SK dilakukan pada saat semester genap atau saat mereka duduk di kelas sebelumnya. Tahap pencairan akan dilakukan saat tahun ajaran baru atau semester ganjil. Sedangkan untuk siswa kelas awal (1, 7, dan 10), seluruh empat tahapan dilakukan saat semester ganjil atau saat mereka memulai sekolah. Pemisahan ini sekaligus merupakan upaya sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran. Meskipun dana PIP dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan selama satu tahun ajaran (Juli-Juni),

namun seluruh tahapan pelaksanaan PIP ini tetap harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran (Januari sd. Desember) (ilustrasinya lihat pada tabel 16).

Tabel 16. Ilustrasi Linimasa Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan PIP



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survei pada 6 Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1): 532-534
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. "Laporan Audit Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja atas Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun." Jakarta: BPK RI. Tidak diterbitkan
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Penunjang Pendidikan: Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. "Pengolahan Data Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018." Tidak diterbitkan
- Bray, Mark. 1996. *Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of Education in East Asia*. Washington DC: The World Bank
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Abbas. dkk. 2003. "Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: Laporan Penelitian." Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
- Greatbatch, David and Sue Tate. 2017. *Funding and Expenditure in Post-16 Education: An International Review*. London: Departemen for Education UK
- Herlinawati, Bambang Indriyanto, Catur Dyah Fajarini, & Sudiyono. 2017. *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

- Herlinawati, Philip Suprastowo, & Ponco Waluyo. 2018. *Evaluasi Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 dengan Fasilitas KIP ATM pada Kunjungan Kerja Presiden RI*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Hermawan, Ida Kintamani Dewi. 2017. *Metode Menyusun Proyeksi Siswa dalam Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Indonesia Corruption Watch. 2018. *Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi-JK*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch
- Kemendikbud. 2013. *Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen
- Kemendikbud. 2016. "Kemendikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun melalui PIP," dalam <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip> (diakses 4 Februari 2019)
- Kemendikbud. 2018a. "Penyaluran Dana PIP 2018 Per Satuan Pendidikan" dalam <https://pip.kemdikbud.go.id/pendidikan/data2018> (diakses 17 Januari 2019)
- Kemendikbud. 2018b. *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Maretsya, A., & Eddy Soegiarto K, H. 2015. "Analisis Strategi Pembiayaan (Finance) Dalam Upaya Merebut Pangsa." *Ekonomia*, 4(2): 185-191
- Kemendikbud. 2019. "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional" dalam <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diakses 28 Maret 2019)
- Lusiana, L. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005
- Menteri Ketenagakerjaan. 2018. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Menteri Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Menteri Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Pendidikan Nasional. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69/2009 tentang Standar Biaya Operasi non-Personalia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

- McMillan, James H., dan Sally Schumacher. 2010. *Research in Education: Evidence-Based Inquiry*. New Jersey: Pearson
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Presiden RI. 2017. *Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial non-Tunai*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Pusat Penelitian Kebijakan. 2012. "Kajian Mekanisme Pendanaan Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2008. *Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar*. Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. "Pengkajian Pendanaan Pendidikan secara Masal: Studi Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Pendidikan: Laporan Penelitian." Jakarta: Puslitjaknov, Balitbang, Depdiknas
- Saraswati, L.N. 2017. Impelementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 5 (4), 6737-6750.
- Suprastowo, Philip. 2014. "Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20 (2): 149-172
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Zamjani, Irsyad. 2018. "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Kebijakan*, 11(2): 64-82

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 1	Panel No: 1, 2, 3, 4
Ruang	: Padjadjaran 4	
Waktu	: 08.00 – 10.15 WIB	
Judul Penelitian :	1. Kajian Biaya Satuan dan Linimasa Pengelolaan Program Indonesia Pintar 2. Efektifitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Kinerja Sekolah 3. Kajian Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Satuan Pendidikan Formal 4. Kajian Efektifitas DAK Non Fisik BOP PAUD	
Penyaji	:	1. Irsyad Zamjani Ph.D 2. Dr. soc.pol Agus Heruanto Hadna, M.Si 3. Siti Nur Azizah, S. Stat 4. Sudiyono, M. Pd
Pembahas	: Dr. Aos Santosa Hadiwijaya	
Moderator	: Ikhya Ulumudin, S. Pd., M.Pd	
Notulis	: Arie Budi Susanto	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Irsyad Zamjani, Ph.D Sejak 2014 belum pernah dilakukan perubahan terhadap kuota penerima dan besaran biaya satuan PIP; Besaran biaya satuan PIP sama untuk seluruh daerah ; Kebutuhan aktual tidak selalu didukung kapasitas fiskal yang memadai; Linimasa pengelolaan PIP tidak selaras dengan tahun ajaran sekolah sehingga dana tidak diterima saat dibutuhkan Tujuan penelitian: a. Menghitung besaran biaya satuan (unit cost) PIP untuk peserta didik dari masing-masing jenjang pendidikan yang sesuai kebutuhan biaya pribadi pendidikan b. Merumuskan formula pendanaan PIP yang adil dan sesuai kemampuan fiskal pemerintah c. Menganalisis permasalahan terkait ketidakteraturan linimasa pengelolaan yang membuat dana PIP tidak diterima saat dibutuhkan Metode a. Metode pengumpulan data: studi dokumen, FGD, dan wawancara b. Studi dokumen: data susenas BPS (2015 dan 2018), laporan audit BPK tentang PIP (2018), laporan penghitungan unit cost PIP oleh TNP2K (2016), Laporan Monev PIP Ditjen Dikdasmen (2017 dan 2018), laporan studi pendanaan pendidikan Balitbang (2004). c. Informan: Ditjen Dikdasmen, Ditjen PFM Kemensos, Direktorat Statistik Kesra BPS, Puslit Ekonomi LIPI, dan SMERU Research Institute Metode analisis: a. Penghitungan biaya satuan: statistik deskriptif, proyeksi tahun 2020 berdasarkan Susenas 2018 dan inflasi pendidikan b. Analisis linimasa: analisis kualitatif deskriptif Beberapa Penelitian Terdahulu tentang Biaya Satuan Pribadi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Studi Supriadi dan Ghozali dilakukan sebelum program BOS berlaku tahun 2005, sehingga nilai biaya pribadi cukup besar untuk ukuran masanya. Hasil perhitungan Ghozali bahkan sangat besar karena memasukkan sekolah berasrama sebagai sampel; Studi komponen biaya Ghozali, 2005 ; Studi Jenis Biaya Pendidikan BPS, 2018 Temuan: Tahapan analisis yang kita lakukan berdasarkan kita analisis data Susenas modul sosial budaya dan pendidikan itu ada pengeluaran orang tua dan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan masing-masing anak SD, SMP, SMA/SMK. Sayangnya jenjang SMA dan SMK disatukan. Dari komponen-komponen biaya itu kita identifikasi mana yang sudah di kover oleh BOS mana yang dikover oleh orang tua. Untuk SD masih 178 ribu an, SMP 525 ribu an dan SMA/SMK 398 ribu an. Dari data yang seharusnya di kover BOS dan ditanggung oleh orang tua kita proyeksikan 2019/2020 menurut tingkat inflasi. Yang terbesar uang saku, transportasi dan pakaian sekolah. Kita melakukan analisis berdasarkan pendekatan wilayah secara konfirmatif dan afirmatif. Pendekatan konfirmatif Provinsi-provinsi di luar Jawa yang terasosiasi sebagai “wilayah tertinggal” umumnya berada pada kelompok biaya rendah. Sementara, provinsi-provinsi di Jawa berada pada kelompok tinggi atau menengah) Pendekatan afirmatif Berkebalikan dengan sebelumnya, provinsi-provinsi di Jawa selain Jakarta berada pada kelompok biaya satuan rendah, bahkan empat di antaranya terendah. Sedangkan provinsi-provinsi di wilayah Timur menduduki kelompok biaya satuan tinggi) Formula Pendanaan Biaya Satuan PIP Mekanisme cost sharing sesuai PP 48/2008 Pasal 27 (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya” Pembagian proporsi cost sharing dapat mengacu pada kemampuan masing-masing daerah sesuai indeks kapasitas fiskal daerah yang diatur dalam PMK No. 107/PMK.07/2018 Prinsip pembagian proporsi: semakin tinggi IKFD semakin besar proporsi yang dibebankan pada Pemda dan semakin kecil proporsi yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Begitupun sebaliknya Permasalahan dalam pengelolaan PIP Penetapan jumlah penerima PIP tidak sinkron dengan data kemiskinan yang terus turun; Proses penerimaan BDT dari Kemensos yang berlarut larut ; Penerimaan data usulan pemangku kepentingan yang waktunya bervariasi dan ; Pengelolaan PIP lebih mengikuti kerangka kerja tahun anggaran. Jumlah penerima tidak sinkron dengan data kemiskinan ◦ Jumlah kuota PIP empat tahun terakhir tidak selaras dengan kecenderungan angka kemiskinan yang menurun ◦ Jika dihitung secara kasar, data BDT semestinya hanya mencakup 30% penduduk miskin dan rentan miskin Permasalahan lainnya : Pemerolehan BDT yang berlarut-larut, Pengelolaan PIP mengikuti kerangka tahun anggaran

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Kesimpulan - Terdapat selisih cukup signifikan antara biaya satuan PIP yang berlaku dan kebutuhan biaya ideal - Masalah utama dari manajemen PIP adalah kualitas data dan tidak adanya sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran Rekomendasi - Opsi-opsi penetapan biaya satuan PIP - Biaya satuan PIP berlaku sama untuk seluruh wilayah (flat) (lebih sederhana) - Biaya satuan bervariasi berdasarkan tingkat kemahalan daerah (lebih rumit tapi adil) - Pendanaan PIP dapat menggunakan mekanisme cost sharing Pusat dan Pemda berdasarkan kapasitas fiskal - Rekomendasi untuk perbaikan tata kelola - Kuota penerima PIP perlu mempertimbangkan perubahan angka kemiskinan setiap tahunnya, baik secara nasional ataupun kewilayahan - Agar lebih tepat sasaran dan efisien, penerima PIP lebih difokuskan pada penduduk miskin (20% terbawah) - Kemendikbud perlu memiliki akses langsung terhadap BDT sehingga dapat dipadankan secara simultan dengan Dapodik - Untuk menjamin keberlanjutan penerimaan PIP, pendataan PIP dapat menggunakan data kohort - Perlu dilakukan sinkronisasi antara tahun ajaran dan tahun anggaran dalam pengelolaan PIP 2. Dr. soc.pol Agus Heruanto Hadna, M.Si Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kinerja pemerintah dalam aspek pendidikan dilihat dari kemampuannya menyediakan akses pendidikan yang memadai bagi warga negara usia 7 sampai 15 tahun (usia siswa SD dan SMP). Adanya Dana BOS bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan, membebaskan pungutan biaya operasi sekolah, meringankan biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan bagi siswa yang tidak mampu Regulasi: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tujuan penelitian: Melihat efektivitas pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 terhadap kinerja sekolah - Mengetahui implementasi pengelolaan dana BOS TA 2018 - Mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS memberikan pengaruh terhadap kinerja sekolah - Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan pengelolaan dana BOS dalam rangka peningkatan kinerja sekolah Jenis dan Pendekatan : Kuantitatif dan Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data: Survei, wawancara, observasi, kajian data sekunder Responden: Siswa 300 siswa SD (kelas 5,6) dan 300 siswa SMP (kelas 8,9)

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Guru: 115 guru SD dan 150 guru SMP Lokasi: Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kota Semarang, Kab. TTU, Kota Kupang Temuan: Pada perencanaan RKAS adalah satu-satunya dokumen perencanaan untuk pengajuan dana BOS; RKJM tidak menjadi pertimbangan ; Komponen tim BOS tidak sesuai dengan Juknis BOS, khususnya dari unsur orang tua ; Perencanaan tidak melibatkan semua unsur tim BOS ; Kepala sekolah memegang peranan penting dalam penentuan prioritas alokasi dana BOS ; alokasi dana BOS sepenuhnya sesuai dengan Juknis BOS 2018 dan sering mengabaikan masalah dan kebutuhan real Pengelolaan Dana Bos Tidak ada tenaga khusus pengelola BOS di SD, diserahkan ke guru ; Adanya kebijakan anggaran daerah untuk menutupi kurangnya dana BOS ; Besaran dana yang ditransfer Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah(NPH) BOS sehingga jarang terjadi cut off di Tri Wulan (TW) 3 Pelaksanaan Keterlambatan penyaluran dana BOS -TW 1 : SD 91,7% ; SMP 93,3% -TW 2,3,4 : SD 83,3% ; SMP 86,7% SILPA dalam pengalokasian dana BOS dan Kekurangan dana operasional khususnya pada tingkat pendidikan SD Monitoring dan Evaluasi Kesulitan memahami juknis/aplikasi yang seringkali berubah ; Belum semua sekolah memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada publik dalam pengelolaan BOS ; Monitoring oleh dinas lebih pada pemeriksaan administratif yakni kesesuaian target dan realisasi ; Belum transparansinya pengelolaan dana BOS melalui publikasi laporan realisasi penggunaan dana BOS. Kendala Pengelolaan BOS Rumitnya pelaporan penggunaan dana BOS TAHUN ANGGARAN 2018 ; kurangnya kapasitas pengelola BOS sekolah ; Rumitnya prosedur penyaluran dana BOS TAHUN ANGGARAN 2018 ; Ketidakjelasan regulasi tentang BOS TAHUN ANGGARAN 2018 ; Pencairan dana terlambat ; Pemahaman yang tidak sama di antara tenaga kependidikan tentang BOS ; Tidak berfungsinya Tim BOS sekolah ; Pengelolaan BOS tidak transparan dan akuntabel dan Kurangnya monitoring pengelolaan BOS dari pihak yang berwenang Kinerja Sekolah SDM: Proses belajar mengajar terbantu dengan ketersediaan buku, alat peraga, RPP. Kegiatan ekstrakurikuler belum berkembang Dana BOS tidak cukup untuk membiayai kekurangan SDM, sehingga di beberapa wilayah terjadi “rasionalisasi” gaji dan jumlah SDM ; Dana BOS 2018 memberikan kesempatan pada guru untuk meningkatkan kapasitas, namun hal ini bergantung pada kebijakan sekolah Fasilitas: Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana mencukupi, khususnya buku dan alat peraga dan Kondisi fasilitas dan sarana prasarana dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. KBM & Ekstrakurikuler: Di beberapa sekolah, kegiatan ekstrakurikuler menjadi terbatas karena anggaran terbatas, dana BOS mendukung peningkatan mutu guru

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Ketersediaan buku perpustakaan, buku pelajaran dan non pelajaran, buku pegangan guru, dan alat peraga mendukung proses KBM Simpulan : Terdapat 3 pola variasi perencanaan RKAS di Sekolah. Perencanaan berdasarkan incremental policy, sehingga inovasi sekolah masih minim terjadi ; Kepala Sekolah adalah pengambil keputusan utama dalam usulan kegiatan dana BOS ; hampir semua sekolah yang diteliti mengaku selalu terjadi keterlambatan sehingga memaksa sekolah untuk berstrategi ; Besaran dana BOS masih menimbulkan masalah terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit ; Cenderung membuat SILPA ketimbang mengubah anggaran yang telah direncanakan meskipun tidak lagi relevan ; Dokumen pelaporan dana BOS relatif banyak dan rumit; tidak semua sekolah mempunyai SDM yang kompeten ; Belum banyak sekolah yang memiliki sistem pertanggungjawaban dana BOS kepada Publik Rekomendasi : Kebijakan Strategis - Meninjau kembali indikator penentu besaran dana BOS yang diberikan untuk setiap sekolah - Meninjau kembali sistem penyaluran anggaran triwulan yang menghambat sekolah dalam eksekusi kegiatan - Pemerintah pusat membuat sistem pelaporan yang sederhana dan fleksibel - Perlu adanya diskresi yang lebih besar untuk mendorong munculnya inovasi - Mendorong komitmen anggaran daerah untuk sekolah - Menyatukan sistem Tahun Anggaran dan Tahun Ajaran - Adanya keputusan kebijakan yang jelas dalam mengalokasikan anggaran yang seimbang antara kegiatan fisik dan peningkatan kapasitas SDM Kebijakan Operasional - Merekrut tenaga khusus untuk membuat pelaporan dana BOS yang dialokasikan dari dana BOS atau Pemda - Mengaktifkan peran orang tua siswa dan komite sebagai pengawas sekaligus dalam membentengi sekolah dari intervensi negatif pihak luar - Mengalokasikan dana BOS untuk membuat sistem transparansi kepada publik dalam penggunaan dana BOS - Memberikan pelatihan secara khusus kepada kepala sekolah dalam melakukan inovasi kebijakan, program dan kegiatan dengan teknik analisis kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan - Menyederhanakan persyaratan dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam penerimaan dana BOS 3. Siti Nur Azizah, S.Stat Kajian ini berdasar pada PP No 48 tahun 2008 bahwa sumber pendanaan pendidikan terdiri dari unsur biaya Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Masyarakat dan terbagi menjadi 3 yaitu : biaya operasional (personalia dan non personalia), biaya investasi, dan biaya pribadi. PP no 48 mempunyai 3 prinsip utama yaitu keadilan, keberpihakan dan ketercukupan. Berdasarkan temuan BPK pada tahun 2018 biaya personalia dan non personalia tidak lagi relevan dengan bagi kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan variasi wilayah di Indonesia.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Tujuan penelitian: - Menghitung besaran biaya satuan operasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah. - Menghitung besaran biaya satuan investasi SDM pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah. - Menghitung besaran biaya satuan pribadi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan berdasarkan variasi wilayah. Terdapat penelitian terdahulu dari Balitbang (2003) dan biaya satuan jenjang SLB dan menghitung biaya satuan PIP. Penelitian ini dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan purposif sampling secara nasional menggunakan variasi wilayah dengan indeks kemahalan konstruksi yang kita bagi menjadi daerah kategori rendah, sedang dan tinggi. Penelitian dilakukan di 6 Provinsi dan 18 kab/kota. Jadi setiap provinsi kita ambil 3 kab/kota. Skema pembagian sampel dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah kita membagi 6 pulau besar Indonesia kemudian kita tentukan 6 provinsi berdasarkan jumlah sekolah terbanyak kemudian masing-masing setiap provinsi ditentukan kab/kota nya dengan IKK sedang, rendah dan tinggi. Setiap provinsi terdapat 3 kab/kota. Setelah mendapatkan 18 kab/kota di masing kab/kota kita pilih sekolah SD sd SMA/ sederajat. Total sekolah ada 15 negeri dan 10 swasta di masing-masing kab/kota. Sampel SD, SMP dan SMA kita pilih secara acak sedangkan pemilihan SMK berdasarkan SMK revitalisasi yang memiliki keragaman kompetensi terbanyak. SLB kita pilih jumlah siswa terbanyak di kab/kota tersebut dengan harapan kita memiliki banyak variasi dari SLB. Total sampel terdapat 441 sekolah dengan 4752 siswa. Kuesioner siswa ini untuk menyebar kuesioner sekolah. Kuesioner orang tua ini untuk melihat pribadi peserta didik. Temuan: Terlihat Biaya Satuan Operasional Personalia dari SD sd SLB terlihat tren kenaikannya cenderung naik (sekitar 7.4 juta). Biaya Satuan Operasional Non Personalia terbesar adalah jenjang SMK. Untuk biaya investasi SDM yang terbesar adalah SMK. Dari ketiganya didapatkan bahwa biaya investasi SDM proporsi paling kecil tidak sampai 5 %. Berikut variasi wilayah menggunakan IKK yang sebelumnya terbagi menjadi kategori rendah, sedang dan tinggi. Pembagian kategori rendah, sedang dan tinggi menggunakan metode kuartil. Kemudian didapatkan hasil bahwa untuk masing-masing jenjang semakin tinggi kategori IKK nya maka biaya yang diperlukan akan juga semakin tinggi. Yang kedua kita mengadakan analisis perhitungan indeks biaya pendidikan berdasarkan permendikbud no 9 tahun 2009 yang hasilnya tidak jauh berbeda seperti saat kita menggunakan IKK. Dari operasional satuan personalia, proporsinya didapatkan adalah biaya sebagian dipakai untuk gaji dan kesejahteraan guru. Kemudian operasional non personalia proporsinya lebih banyak digunakan untuk buku, alat dan bahan serta PBM. Kemudian untuk investasi SDM itu proporsi terbesar ada pada komponen sertifikasi dan UKK yaitu pada jenjang SD dan SMK. Ini Y satuan pribadi menurut jenjang pendidikannya bahwa didapatkan total biaya SD itu 3.1 juta, SMP itu 4.4 juta dan SMA 7.4 juta dan SMK 7.9 juta serta SLB 3.8 juta.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sedangkan kategori berdasarkan UMP kita juga bagi menjadi 3 (rendah, sedang dan tinggi) didapatkan hasil seperti ini. Simpulan : - Besaran biaya operasional personalia untuk SD Rp 2,2 juta; SMP Rp 2,5 juta; SMA Rp 2,9 juta; SMK Rp 3,4 juta; dan SLB Rp 7,4 juta. - Besaran biaya operasional non personalia pada SD sebesar Rp 995 ribu, SMP Rp 1,5 juta; SMA Rp 1,6 juta; SMK Rp 3,3 juta; dan SLB Rp 2,6 juta. - Proporsi terkecil adalah biaya investasi SDM. Biaya investasi SDM ini semestinya dapat dimasukkan dalam komponen biaya operasional baik personalia ataupun non-personalia. Biaya satuan investasi SDM SD sebesar Rp 52 ribu; SMP Rp 66 ribu; SMA Rp 97 ribu; SMK Rp 291 ribu; dan SLB Rp 237 ribu. - Biaya satuan pribadi Rp 3,1 juta (SD), Rp 4,2 juta (SMP), Rp 7,5 juta (SMA), Rp 7,9 juta (SMK) dan Rp 3,9 juta (SLB). Komponen biaya paling besar pada jenjang SD dan SMP adalah uang saku dan transportasi. Sementara pada SMA dan SMK, komponen pengeluaran terbesar adalah iuran sekolah. Para peserta didik pada jenjang SD dan SMP negeri masih mengeluarkan biaya untuk iuran sekolah sebesar rata-rata Rp 142 ribu (SDN) dan Rp 753 ribu (SMPN). Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS belum sepenuhnya dapat menghilangkan kontribusi dari orang tua. Rekomendasi : - Besaran biaya satuan BOS secara nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional non-personalia. Kekurangan biaya satuan BOS untuk masing-masing jenjang adalah SD= Rp. 196.000,-; SMP= Rp. 540.000,-; SMA= Rp. 250.000,-; SMK= Rp. 1.750.000,-; dan SLB= Rp. 650.000,-. - Besaran biaya satuan BOS perlu dibuat variasi antar wilayah untuk mengatasi keragaman tingkat kemahalan masing-masing wilayah. - Dana BOS sebaiknya tidak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Alokasi untuk kebutuhan ini sebaiknya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui APBD, khususnya untuk SD dan SMP. - Biaya satuan pribadi yang dihasilkan dari kajian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan besaran bantuan Program Indonesian Pintar. Adapun selisih biaya untuk jenjang SD= Rp. 1.250.000,-; SMP=Rp. 2.350.000,-; SMA= Rp. 3.000.000,-; dan SMK= Rp. 3.200.000,-. 4. Sudiyo, M.Pd. Pemanfaatan dana BOP tidak sesuai dengan juknis ; (ii) Banyak lembaga yang membutuhkan bantuan ttp belum menerima BOP PAUD karena jumlah minimal peserta didik tidak memenuhi persyaratan dan (iii) Besaran jumlah dana BOP per siswa/tahun/ perlembaga antar wilayah di Indonesia sama, sedangkan tingkat kemahalan berbeda. Tujuan penelitian: - Mengevaluasi ketepatan dan mekanisme penerimaan BOP PAUD - Mengetahui manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD - Mengetahui kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan PAUD - Menganalisa satuan biaya BOP PAUD antar jenis lembaga PAUD dan antar daerah Kab/kota.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Survey dengan alat berupa kuesioner yang disebarakan menggunakan <i>google form (online)</i> & Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Temuan: Status akreditasi TK, terakreditasi A (9%), terakreditasi B (46%), terakreditasi C (12%) dan tidak terakreditasi (33%). Jadi Akreditasi TK terbanyak B 46% (266 lembaga) Status akreditasi KB, terakreditasi A (3%), terakreditasi B (22%), terakreditasi C (16%) dan tidak terakreditasi (59%). Jadi KB tidak terakreditasi 59% (255 lembaga), SPS terbanyak tidak terakreditasi 47% (30 lembaga) dan TPA terbanyak adalah tidak terakreditasi 53% (17 lembaga). Jumlah Jam KBM per Hari per Lembaga Jumlah jam KBM terlama adalah TPA yaitu selama 5 jam/hari. Karena banyak orangtua yang menitipkan anaknya sepanjang hari disaat mereka bekerja. Selanjutnya jam KBM untuk TK dan KB sama yaitu selama 4 jam/hari, dan untuk SPS selama 3 jam/hari. Ketepatan dan Mekanisme Penerimaan BOP PAUD a. Waktu Pencairan Dana BOP PAUD Hampir seluruh kab/kota di Indonesia waktu pencairannya tepat, kecuali kab/kota Solo, Batu, Bogor, Tangerang Selatan, Gorontalo, Makassar, Lombok Timur, Kupang, Banjarbaru, Medan, Pekanbaru dan Palembang. b. Jumlah Dana Seluruh responden menyatakan bahwa jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada lembaga c. Jumlah Siswa Kenaikan jumlah siswa terbesar TPA sebesar 8% dan yang terkecil adalah SPS sebesar 3%. Manfaat BOP dalam Penyelenggaraan PAUD a. Peningkatan Mutu Pembelajaran b. Peningkatan Akses Siswa Miskin Biaya Operasional Menurut Lembaga Biaya operasional tertinggi PAUD adalah TPA sebesar Rp 2.081.054, TK sebesar Rp 1.812.336, KB sebesar Rp 1.009.309, dan SPS sebesar Rp 1.050.063. Kontribusi BOP dalam Keseluruhan Biaya Penyelenggaraan PAUD Kontribusi BOP terhadap biaya operasional PAUD, tertinggi di KB yaitu sebesar 59%, SPS 56%, TK sebesar 33%, dan TPA terendah sebesar 29%. Penggunaan Dana BOP TK a. Kegiatan pembelajaran terbanyak digunakan untuk bahan pembelajaran tematik 50% b. Kegiatan pendung pemberian untuk transport guru 30%. c. Kegiatan lainnya terbanyak digunakan untuk perawatan sarpras 43% Penggunaan Dana BOP KB a. Kegiatan pembelajaran terbanyak digunakan untuk bahan pembelajaran tematik 40% b. Kegiatan pendung pemberian untuk transport guru 35%. c. Kegiatan lainnya terbanyak digunakan untuk perawatan sarpras 35% Penggunaan Dana BOP SPS

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		a. Kegiatan pembelajaran terbanyak digunakan untuk bahan pembelajaran tematik 51% b. Kegiatan pendukung pemberian untuk transport guru 37%. c. Kegiatan lainnya terbanyak digunakan untuk perawatan sarpras 30% Penggunaan BOP TPA a. Kegiatan pembelajaran terbanyak digunakan untuk bahan pembelajaran tematik 48% b. Kegiatan pendukung pemberian untuk transport guru 50 %. c. Kegiatan lainnya terbanyak digunakan untuk langganan Listrik, telp, air dan internet 30% Biaya Operasional per-Lembaga Menurut Wilayah Indonesia Biaya operasional per-lembaga di wilayah Indonesia Timur lebih besar daripada wilayah lainnya. Selanjutnya diantara keempat jenis layanan pendidikan tersebut, yang paling besar biaya operasionalnya adalah TPA. Kesimpulan : a. BOP cukup efektif dalam meningkatkan akses PAUD, kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban ortu dalam pembiayaan. b. Besaran BOP dalam membantu biaya operasional PAUD sebesar 33%. c. Terdapat perbedaan biaya operasional PAUD antara TK, KB, SPS, dan TPA. d. Pencairan BOP sering terlambat, disebabkan oleh al. perbedaan data, terkendala dg perda, birokrasi di daerah, dan kesiapan disdik e. Proporsi penggunaan dana per-komponen di masing-masing lembaga belum sesuai juknis BOP. f. Rincian penggunaan dana pada juknis disetiap komponen kurang dipahami. g. Komponen keg. pendukung berupa transport pendidik merupakan komponen terbanyak yang dialokasikan dalam penggunaan dana BOP. Rekomendasi : a. Diperlukan adanya penyederhanaan mekanisme peyaluran DAK nonfisik BOP PAUD untuk mencegah adanya keterlambatan pencairan dana di daerah. b. Revisi juknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD perlu dilakukan terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana dan penjelasan tambahan terkait rincian penggunaan dana pada setiap komponen. c. Kontribusi DAK Nonfisik BOP PAUD BOP dalam membantu penyelenggaraan PAUD saat ini sebesar 33%, untuk peningkatan layanan PAUD BOP perlu dinaikkan. d. Perlu dibedakan besaran DAK nonfisik BOP PAUD berdasarkan aktivitas kegiatan lembaga dan tingkat kemahalan wilayah.
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Dr. Aos Santosa Hadiwijaya • Untuk PIP ini juga mensinergikan dengan PKH dari Kemensos dan komponennya untuk anak sekolah. Berbagai komponen bisa mendukung satu tujuan untuk lebih efektif karena problemnya salah satunya adalah dana. Di Balitbang semua data sudah ada. Paling besar perhatian pada pakaian seragam karena di beberapa sekolah ada 4 seragam ; seragam sekolah, seragam olahraga, seragam batik dan seragam pramuka. Biaya transisi menjadi mahal. Hal ini perlu penataan karena menjadi beban siswa pada tahun ajaran baru termasuk atribut-atribut sekolah. Problem lainnya tidak sinkronnya tahun anggaran dan tahun ajaran baru. Jadi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		tergantung perencanaan sekolah, bisa memproyeksikan kebutuhan siswa dengan perencanaan dengan n-1 dengan proyeksi ke depan. Sehingga anak yang kelas satu menjadi korban karena tidak mendapat PIP belu di data dapat dikurangi sehingga siswa menjadi matang. Memang proyeksi tidak 100% tapi minimal mendekati. Seharusnya sekolah pada BOS sudah tau apa yang dibelanjakan untuk tahun depan. RKJM 4 tahun, RKSA mulai dari semester genap ke ganjil jadi tinggal dibalik program saja. • Kalo ditanya apakah dana BOS itu efektif atau tidak. Saya jawab efektif karena tujuan dana BOS mengurangi beban orang tua dan membantu sekolah. Tidak ada tujuannya meningkatkan mutu. Seharusnya sekarang tujuan BOS meningkatkan mutu hasil pembelajaran. Bila dibuat matrik antara 8 SNP. Kalupun ada belanja pembelajaran ekstrakurikuler pembelian alat olahraga, lomba-lomba tapi peningkatan mutu proses pembelajaran relatif minim. Pada panduan BOS buku itu boleh 20% bahkan lebih. Di Pendidikan mutu itu merupakan proses tergantung dari kualitas proses. Perpustakaan bisa sampai 20%. Yang signifikan berpengaruh 20% adalah pelaksanaan proses PBM Mutu sekarang merupakan tujuan utama. Belanja komponen BOS tidak menyelesaikan masalah riil di lapangan. Kami pernah menganalisis RKJM dan RKAS dikaitkan dengan rapor mutu penjaminan mutu internal (PMI) yang dikembangkan oleh LPMP itu ada 8 SNP dan beberapa komponen di dalamnya. Ternyata apa yang disampaikan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi tetap pada rutinitas. Komponen RKJM inline dengan disdik juga tidak nyambung. Bahkan ditanya kepek penggunaan komponen ini itu, kepek tidak tahu. Sekolah tidak menyusun itu untuk perencanaan sekolah. Kalo dulu menggunakan EDS sekarang pakai PMI. Jadi seharusnya urutan perencanaannya RKJM-RKP-RKAS. Data juga perlu divalidasi, sehingga terlihat alur logis RKAS tapi tidak semata-mata satu sumber dana BOS. Ada BOSDA di beberapa kab/kota untuk guru honor biaya dari APBD. Ini variasi-variasi untuk mengurangi biaya operasional sekolah. Saat ini ada BOS afirmatif, BOS kinerja dan BOS reguler dapat mengukur kebutuhan siswa. Kalo lihat UN di SMP nilai 4,5 sekian tapi didongkrak oleh ujian sekolah. • Bagaimana dengan pendanaan dikdasmen. Apakah yang sekarang efektif bila dikaitkan dengan BOS. Di Susenas 2018 terdapat 4,2 juta anak dari 55 juta anak sekolah usia 7-12 tahun, sekitar 7,6 % Anak tidak sekolah (ATS) padahal sumber pembiayaan sudah ada PIP, BOS dll tapi masih saja ATS itu. Salah satu komponen yang tidak dibiayai adalah tidak terkovernnya biaya transisi dari SD ke SMP dan SMP ke SMA. Perlu dipertimbangkan dana transisi jauh lebih mahal dari dana personal siswa. Apakah pembiayaan itu sudah dikaitkan dengan SPM misal pemenuhan buku tulis dll. BOS akan dinaikkan 48 T menjadi 52 T. Kenapa pembiayaan tidak dikaitkan • Alokasi dana desa ada untuk peruntukan Paud, jadi bagaimana mensinergikan BOP Paud dan alokasi dana desa (ADD) dan APBD kab/kota sehingga dana menjadi sangat besar. Angka mengulang kelas terutama dikelas awal. Salah satu faktornya adalah kesiapan belajar siswa terbatas.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Dana Paud fokus BOP nya untuk kesiapan belajar, misal usia 4-6 tahun. Berdampak pada inefisiensi dana. Paud berbayar sedang SD gratis. BOP Paud = 33% jadi membagi sama rata. Pembiayaan pendidikan ada investasi. biaya personal itu perlu Apakah dana Paud untuk kesiapan belajar untuk Tanggapan Irsyad : Yang terkait dengan PKH kita merumuskan rekomendasi seperti apa dan di level yang lebih tinggi yaitu presiden. Yang terkait dengan pakaian seragam itu sudah ada di instrumen Susenas jadi bukan hanya satu seragam pada komponen itu. Itu sekitar 200 itu biaya yang dikeluarkan untuk seragam. Jadi sekolah ada 4 seragam jadi masukan pertimbangan tim kita mungkin jadi pembatasan jumlah seragam. Untuk sinkronisasi tahun ajaran dan tahun anggaran muncul dari diskusi kita dengan dikdasmen karena adanya tahun anggaran, makanya kita tawarkan formula data kohort untuk proyeksi bagi penerima PIP masing-masing jenjang sampai dengan tahun 2031. Nanti akan kita exercise lagi. Kita mengacu dari tahapan-tahapan baku yang mengacu dari pendataan, penyaluran, pemberitahuan SK dan pencairan. Nanti mungkin bisa langsung dari pendataan bisa langsung ke penyaluran ke pencairan yang serba digital selebihnya bisa buat masukan. Tanggapan Agus : Pak Aos sangat komprehensif dan kritis. Terkait dengan BOS kecukupan hampir semua bilang dana BOS tidak cukup dari SD sd SMA. Kepatuhan nya sangat menurun jadi berproses seperti adanya. Wilayah 3 T kita fokuskan. Keadilan Ekuiti dana BOS. Dana desa, PIP, BOS kalo bisa disatukan di level politik yaitu presiden. Saat ini menjadi ego sektoral masing-masing direktorat. Goal kita sama pendidikan yang berkualitas. Studi kita untuk mengurangi beban orang tua agak gampang kita pakai outcome. Apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah itu dalam memenuhi biaya operasional. Alokasi lebih banyak program fisik di sekolah. Kepala sekolah harus didorong agar inovatif dalam mengelola dana Tanggapan Azizah : Untuk kajian pendanaan pendidikan saat ini hanya terfokus pada 3 komponen itu. Jadi kita belum mengakomodir mengenai biaya transisi. Kemudian apakah dikaitkan dengan SPM juga sepertinya belum. Kita fokus pada perhitungannya saja. Untuk variasi jumlah siswa sebenarnya kami sudah memperhitungkan tentang rombongan belajar tapi belum kami tindaklanjuti lagi. Tapi nanti bisa kami exercise lagi rombongan belajar berdasarkan jumlah siswa. Lainnya akan kami tindaklanjuti untuk perbaikan juga. Tanggapan Pak Sudiyono : Pertama terkait perlunya sinergi dana desa dan BOP dimana di dana desa yang sangat penting yang terdapat komponen peruntukan PAUD di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya terkait dana Desa dari 12 daerah yang kami kunjungi penggunaan dana desa terhadap Paud dampaknya kecil. Sinergi itu bisa melalui Pemda bisa dikoordinasikan lagi seperti di Lombok satuan Paud sangat banyak Dana Paud diperuntukkan untuk kesiapan belajar. Mungkin ada satuan Paud seperti SPS yang belum jelas mungkin hanya pada kelompok bermain dan TK mungkin itu yang membantu kesiapan belajar. Kemudian terkait dengan biaya

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		personal mungkin dalam hitungan kami sudah kami masukkan biaya personal tapi belum disebutkan biayanya. Paud itu biaya personal masih rendah dibanding SD dan SMP. Nanti saran bapak Aos kami tampung dan tambahkan di kajian kami. Ketika FGD mengundang Kepsek dan guru sekolah. Kami meminta data tambahan dari sekolah ybs selain dari data Dapodik. Data di lapangan dan data Dapodik memang tidak selalu cocok. Namun memang menggambarkan angka mengulang dan putus sekolah yang tinggi. Kami memang memiliki keterbatasan untuk mengundang orangtua murid. Kami akan mempelajari kembali masukannya untuk perbaikan laporan kami. <i>Closing Statement Pembahas:</i> Ke depan Balitbang melakukan kajian sistem perencanaan sekolah yang pro terhadap kebutuhan-kebutuhan sekolah ke depan. Biaya satuan, PIP dan BOS bila disatukan menjadi kajian besar karena saling berhubungan. Mengetahui akses pendidikan. Membuat risalah kebijakan yang lebih besar. Perlu dibangun agar lebih sinergi. Perlunya penggunaan dana BOS afirmatif dan BOS kinerja tepat sasaran. Sehingga perlu harus ada penelitian lanjutan tahun depan terkait BOS reguler, BOS afirmatif dan BOS kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan meningkatkan mutu pembelajaran sebagai indikator AKSI kemampuan membaca lancar dan science Studi pendanaan ini bisa menjadi kajian besar dengan menempatkan akses dan dapat membuat risalah kebijakan secara komprehensif dan lebih besar di satukan di tiap-tiap satuan pendidikan sehingga akan berdampak besar Perlunya sinergi antara dana desa dan BOP Paud
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	Pak Subianto : • Untuk ke 4 penyaji coba tambahkan dalam laporan dicantumkan terkait kajian pustaka sesuai topiknya atau konsep berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan • Ditambahkan novelty/kebaharuan dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu • Sejauhmana optimalisasi peran pengawas • Mohon saran kebijakan ditujukan ke siapa • Untuk Pak Irsyad biaya SMA dan SMK harusnya dipisah karena paketnya berbeda Tanggapan Irsyad • Karena data yang diperoleh oleh BPS disatukan/menggabungkan data SMA/SMK, kami coba dipisah tapi data tidak representatif. Survei BPS sasaran rumah tangga bukan satuan pendidikan sehingga tidak tangible memisahkan SMA dan SMK. Untuk survei yang disampaikan Azizah tadi sasarannya satuan pendidikan sehingga kita bisa memisahkan data SMA dan SMK. Karena ini hasil penelitian miri-mirip juga dapat melengkapi kajian kita nantinya. Di data Susenas mengelompokkan sampai kelompok pengeluaran kelompok sosial

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		ekonomi yang rendah sampai tinggi. Data yang kita olah untuk PIP data pengelompokkan rata-rata kelompok 40% terbawah. Heru : • Kenapa acuan memakai IKK, kenapa tidak memakai IHK karena menggambarkan daya beli masyarakat secara riil, • IHK bisa melihat kondisi inflasi sehingga bisa melihat laju peningkatan pendanaan pendidikan. Tanggapan Azizah : • Pertama karena data IHK kita tidak sampai pada level daerah karena perhitungan tidak bisa sesuai yang kita inginkan • Kita belum sampai melihat kondisi inflasi
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 10.30 WIB.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

Sabar Budi Raharjo, Yufriawati, Ais Irmawati, Joko Purnama
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penyelenggaraan pendidikan berbasis zonasi dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Salah satu kebijakan pemerintah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perlu dilakukan evaluasi melalui kajian evaluasi implementasi kebijakan zonasi pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk 1) penerapan zonasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 2) ketersediaan guru dalam implementasi zonasi pendidikan; 3) ketersediaan sarana prasarana yang tersedia (ruang kelas rombel, perpustakaan, dan laboratorium), dan 4) dampak implementasi zonasi pendidikan. Metode kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta studi dokumen terkait pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Hasil kajian dapat sebagai berikut: 1) Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang telah dilaksanakan pada umumnya telah berjalan sesuai peraturan, walaupun masih ada daerah yang belum sesuai dengan peraturan dan sebagian masyarakat merasa sosialisasi masih kurang; 2) Ketersediaan guru masih bervariasi. Di sebagian daerah, keberadaan guru honor masih banyak, guru belum semua tersertifikasi, dan masih ada guru yang tidak layak; 3) Ketersediaan sarana pendidikan (ruang kelas rombel, perpustakaan, dan laboratorium) di sebagian daerah kondisinya bervariasi. Belum semua sekolah memiliki sarana tersebut secara memadai; 4) Dampak PPDB berbasis zonasi sudah mendekatkan peserta didik antara domisili dan sekolah. Kelas sudah berisi peserta didik yang heterogen dari latar belakang sosial, ekonomi, dan kemampuan akademis. Stigma sekolah favorit di masyarakat sudah berkurang karena peserta didik sudah diisi oleh peserta didik yang berlatar belakang berbeda.

Kata kunci: PPDB berbasis zonasi, kebijakan zonasi pendidikan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua warga negara. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5, bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, namun usaha tersebut masih belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan akses dan pemerataan adalah kebijakan terkait dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB berbasis zonasi sebenarnya sudah dimulai pada 2017 dan 2018, tetapi masih belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh sekolah yang ada. Pada 2019 melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2019, kebijakan PPDB berbasis zonasi diterbitkan. Kebijakan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada warga usia sekolah yang dekat dengan sekolah untuk mendapatkan sekolah tanpa mempertimbangkan nilai akademik atau prestasi anak.

Dengan diberlakukan zonasi pendidikan, label sekolah favorit dalam satu zonasi dapat dihilangkan, karena zonasi pendidikan menurut Caterina, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara sosialisasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, di Medan, tanggal 29 Maret 2019, kebijakan pendidikan terkait penentuan zonasi pada dasarnya adalah untuk 1) berpihak kepada anak tidak mampu; 2) menghapus

diskriminasi dan ketidakadilan; 3) pintu masuk bagi terwujudnya pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru; 4) sekolah menjadi tempat belajar menyenangkan dan penguatan pendidikan karakter; dan 5) membantu Pemda dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Oleh karena itu, kebijakan PPDB berbasis zonasi yang diterapkan di Indonesia sangat penting untuk dievaluasi sebagai langkah awal memperkuat kebijakan zonasi pendidikan secara luas. Kegiatan ini akan memberikan gambaran dan pertimbangan Pemerintah dalam memperkuat tata kelola pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan.

Tujuan penelitian ini secara rinci adalah untuk mengetahui 1) penerapan zonasi pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 2) kondisi ketersediaan guru dalam implementasi zonasi pendidikan; 3) kondisi ketersediaan sarana prasarana yang tersedia (ruang kelas rombel, perpustakaan, dan laboratorium); 4) dampak implementasi zonasi pendidikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kebijakan publik sebagai disiplin ilmu atau kebijakan publik sebagai produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, sebagai disiplin ilmu, kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner yang berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial (Simon, 2005). Kedua, sebagai produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan publik umumnya diwujudkan melalui pengaturan yang dituangkan melalui produk hukum yang memiliki susunan hierarki maupun dalam bentuk program kerja kegiatan yang dilaksanakan oleh sumber daya pemerintah. Pada perspektif yang kedua, kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat, karena itulah kebijakan publik yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat meliputi proses memilih dan memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. (Dwiyanto, 2012).

Kebijakan publik seringkali dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Dye (2002) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu menekankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang antara apa yang menjadi harapan pembuat kebijakan dan apa yang dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan. Kebijakan publik tidak pernah muncul di ruang khusus, tidak dibuat dalam keadaan vakum, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang juga dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan norma nasional serta norma budaya lokal didasarkan pada suatu waktu (Nugroho, 2014). Oleh karena itu, sesungguhnya kebijakan publik juga merupakan produk sosial yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat sebagai cerminan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan pemerintah dalam penerapan zonasi pendidikan. Zonasi pendidikan pada dasarnya untuk mencari solusi dalam pemerataan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut akan memengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

Dengan demikian, zonasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan dan merata kepada setiap warga negara. Zonasi pendidikan juga memberikan layanan pendidikan yang mendekatkan peserta didik dengan sekolah.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian siklus kebijakan publik yang berada antara tahap formulasi dan tahap evaluasi. Oleh sebab itu, keberadaannya begitu sangat penting karena dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja/hasil kebijakan. Pada tahap implementasi akan dibuktikan sejauh mana formulasi dibuat, apakah bisa memecahkan masalah atau justru menambah masalah yang lebih rumit lagi. Edwards mengemukakan suatu kebijakan tidak tepat

atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun telah direncanakan dengan baik. Sebaliknya, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Mengkaji implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu kebijakan bisa berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan membicarakan empat faktor/variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu 1) komunikasi; 2) sumber-sumber; 3) kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku; dan 4) struktur birokrasi. (Edward, 1980).

Grindle dalam Nugroho (2003) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan yang mencakup 1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; 2) jenis manfaat yang dihasilkan; 3) derajat perubahan yang diinginkan; 4) kedudukan pembuat kebijakan; 5) siapa pelaksana program; dan 6) sumber daya yang digerakkan. Dukungan yang cukup dari aspek kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dalam arti yang luas dapat dikatakan sebagai proses administrasi dan hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan metode/teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan seringkali dihambat oleh empat faktor. Pertama, isi kebijakan. Implementasi kebijakan gagal karena samarnya isi kebijakan, apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci. Kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan serta kekurangan-kekurangan yang terkait konsep maupun yang menyangkut sumber daya pendukung, waktu, dan biaya/dana juga dapat menimbulkan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Kedua, informasi. Para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Ketiga, dukungan pelaksanaan. Keempat, pembagian potensi/pelaku yang terlibat dalam implementasi (Sunggono, 1994). Hal senada juga dikemukakan Alfatih (2010) yang mengutip pendapat Ripley and Franklin (1986) dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureacracy* bahwa ada tiga ukuran keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu 1) memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*); 2) adanya kelancaran rutinitas fungsi; dan 3) adanya dampak yang diinginkan. Dalam konsep tiga komponen tersebut tidak kontradiktif satu dengan yang lain, bahkan saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih holistik.

Memperhatikan uraian tersebut maka keberhasilan implementasi kebijakan zonasi pendidikan sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang menjadi kebijakan, berfungsinya komponen-komponen kebijakan sehingga berjalan lancar, dan kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak yang bermanfaat dalam peningkatan pemerataan mutu pendidikan.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah siklus kebijakan publik. Dye (2002) mengatakan bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan proses pemeriksaan yang dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dibandingkan dengan targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sebuah siklus, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila suatu kebijakan publik tidak tercapai sesuai dengan tujuannya karena mengalami resistensi, maka perlu dievaluasi untuk melihat penyebabnya dan solusi

yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus dihentikan (terminasi) atau dilakukan reformulasi untuk menghasilkan kebijakan baru.

Perspektif evaluasi kebijakan disebut oleh Nugroho (2017) dengan istilah pengendalian kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam tataran pengawasan berupa pemantauan untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dipahami sebagai *on going evaluation* atau *formative evaluation*. Pada ranah ini, evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Evaluasi kebijakan disarankan dilaksanakan dengan cara komparasi, dengan beberapa pilihan: 1) komparasi dengan tujuan; 2) komparasi dengan historikal; dan 3) komparasi dengan *best practices*. Menurut waktu evaluasi, evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga, yaitu 1) sebelum dilaksanakan; 2) pada waktu dilaksanakan disebut juga evaluasi proses; dan 3) setelah dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi *sumatif*.

Parsons (2008) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan mengandung dua aspek yang saling terkait, yaitu kandungan programnya dan evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan. Sementara itu, Letser dan Stewart (2000) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Pertama, menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan. Hal ini dilaksanakan dengan berusaha melihat apakah program kebijakan mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Bila tidak, faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya. Kedua, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jones (1975) mengemukakan suatu evaluasi kebijakan harus meliputi empat kegiatan sebagai berikut, yaitu 1) pengkhususan (*specification*), meliputi identifikasi tujuan atau kriteria bagaimana program kegiatan tersebut akan dievaluasi; 2) pengukuran (*measurement*), menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan dengan objek evaluasi; 3) analisis, meliputi pengolahan dan penggunaan; dan 4) rekomendasi. Selain itu, terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik, seperti yang dikatakan Winarno (2012), yaitu 1) mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi; 2) menganalisis masalah; 3) menyusun deskripsi dan standarisasi kegiatan; 4) melakukan pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; 5) menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan 6) menetapkan beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dunn (2003) menyebutkan dalam melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan publik diperlukan enam kriteria, yaitu 1) efektivitas, melihat hasil guna atau hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai; 2) efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu; 3) kecukupan, melihat tujuan yang telah dicapai apakah sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal; 4) pemerataan, melihat keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik; 5) responsivitas, sebagai respon dari suatu aktivitas, berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan; dan 6) ketepatan, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran serta mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi kebijakan terkait dengan penerapan zonasi pendidikan dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, responsif, dan memiliki manfaat dalam tata kelola pendidikan.

4. Zonasi Sekolah

Zonasi sekolah sudah sejak lama dijadikan sebagai mekanisme dalam mengelola pendidikan di suatu negara, atau di suatu wilayah/daerah. Zonasi sekolah di beberapa negara yang sudah menerapkannya, utamanya di sekolah-sekolah umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekolah umum tersebut tidak hanya untuk sekolah yang seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah, namun juga untuk sekolah yang masih menerapkan partisipasi pembayaran/sumbangan dari orangtua/keluarga siswa. Hal ini bergantung pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut.

McCulloch dan Crook (2013), menyatakan bahwa zonasi sekolah merupakan proses mengidentifikasi wilayah geografis untuk tujuan penempatan anak usia sekolah yang tinggal di daerah itu (daerah sekitar lokasi sekolah) ke sekolah umum untuk beberapa tujuan sosial yang didukung kekuatan elit dan politik. Dari pernyataan ini, zonasi sekolah dimaknai sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi kondisi sosial tertentu supaya seperti yang diharapkan oleh elit yang sedang berkuasa. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan zonasi sekolah merupakan pilihan politik untuk mengatur anak usia sekolah yang tinggal di suatu wilayah agar harus dan dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Pendekatan administratif kewilayahan dikemukakan oleh Stroub dan Richards (2013) dalam menjelaskan zonasi sekolah. Zonasi sekolah dapat juga disebut sebagai zona penangkapan sekolah yang mengacu pada batas-batas administratif melalui pembagian wilayah-wilayah sekolah umum, Hal ini merupakan cara untuk menempatkan siswa sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Pandangan ini lebih mengedepankan keaktifan dan peran pemegang kekuasaan secara politis di suatu wilayah administratif untuk menyusun penempatan siswa pada sekolah-sekolah yang tersedia di wilayah tersebut.

Abidin dan Asrori (2018) mengungkapkan dari hasil penelitiannya di SMPN 15 Kedung Cowek, Surabaya, bahwa penerapan sistem zonasi telah memberikan kemudahan bagi siswa-siswa dalam memilih sekolah berdasarkan tempat tinggal mereka. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi orang tua/wali siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit tetapi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, penerapan sistem zonasi di sekolah yang menjadi objek penelitian juga berdampak baik bagi sekolah yang berada dalam satu wilayah, karena dapat dijadikan sekolah percontohan.

Dengan demikian, zonasi sekolah merupakan pilihan politik untuk mengatur anak usia sekolah yang tinggal di suatu wilayah agar dapat bersekolah di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian. Data dan informasi tata cara sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di peroleh dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, LPMP, pengawas sekolah satuan pendidikan dan perwakilan orang tua murid baru. Data tersebut dapat digunakan sebagai analisis evaluasi pelaksanaan sistem zonasi terkait persyaratan, seleksi, sistem zonasi yang diterapkan pada suatu daerah. Data terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan guru dapat dianalisis dari data sekunder yang tersedia pada data pusat. Analisis tersebut akan dapat memberikan gambaran ketersediaan guru pada daerah sampel sebagai dasar

pebentukan zonasi pendidikan. Data terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana (ruang kelas, rombel, laboratorium dan perpustakaan), dianalisis dari data sekunder yang tersedia pada data pusat. Analisis tersebut akan dapat memberikan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana pada daerah sampel sebagai dasar pebentukan zonasi pendidikan. Data terkait dengan dampak implementasi kebijakan zonasi pendidikan dapat diperoleh melalui diskusi terpumpun atau *Focus Group Discstion* (FGD). Data tersebut untuk memberikan informasi terhadap respon kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan.

Lokasi yang menjadi sampel penelitian ini ada lima (5) provinsi/kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Bandung, Kota Serang, dan Kota Pontianak) yang merupakan sampel lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah daerah yang telah melaksanakan kebijakan zonasi pendidikan selama tiga tahun ini melalui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Adapun sekolah yang dipilih sebagai unit analisis di setiap sampel lokasi didasarkan pada pertimbangan 1) kategori luas zona dan radius yaitu kategori rendah dan sedang (PDSP; 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Zonasi Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo Peremendikbud No. 20 Tahun 2019 telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Demikian juga pada tingkat dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada tingkat implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi pemerintah daerah pada prinsipnya telah melaksanakan kebijakan tersebut, namun masih bervariasi dalam menyikapi kebijakan dari pusat. Sebagian daerah telah menerima kebijakan tersebut, secara penuh, tetapi ada juga yang belum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur pada PPDB SMA dan melalui peraturan walikota pada PPDB SMP, pada prinsipnya semua daerah sudah membuat juknis PPDB yang didasarkan pada peraturan kepala daerah tersebut. Juknis yang disusun sudah mencantumkan ketentuan jalur PPDB dengan kuota pada tiap-tiap jalur. Sebagian besar provinsi dan kota tidak melakukan penyesuaian ketentuan kuota di setiap jalur PPDB setelah terbitnya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Ketentuan jalur dan proporsi kuota pada setiap jalur PPDB pada peraturan kepala daerah yang dijabarkan ke dalam juknis PPDB sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Kesesuaian yang dimaksud, yaitu 1) kuota jalur zonasi 90% (diubah menjadi 80%); 2) kuota jalur prestasi maksimal 5% (diubah menjadi maksimal 15%); dan 3) kuota jalur perpindahan tugas orangtua maksimal 5%. Ketidaksesuaian dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 maupun perubahannya (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019) terletak pada adanya penambahan pengaturan sistem seleksi pada jalur zonasi. Pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 maupun Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 diatur bahwa sistem seleksi pada jalur zonasi didasarkan pada jarak tempat tinggal/domisili terdekat dengan sekolah dan apabila memiliki jarak yang sama maka dilihat dari waktu daftar lebih awal, namun di beberapa daerah menambahkan sistem seleksi berdasarkan nilai UN/USBN. Akibat pemahaman orangtua jika jarak yang sama waktu daftar lebih awal yang diterima orangtua banyak melakukan antrean panjang bahkan sejak pagi-pagi sudah membuat antrean.

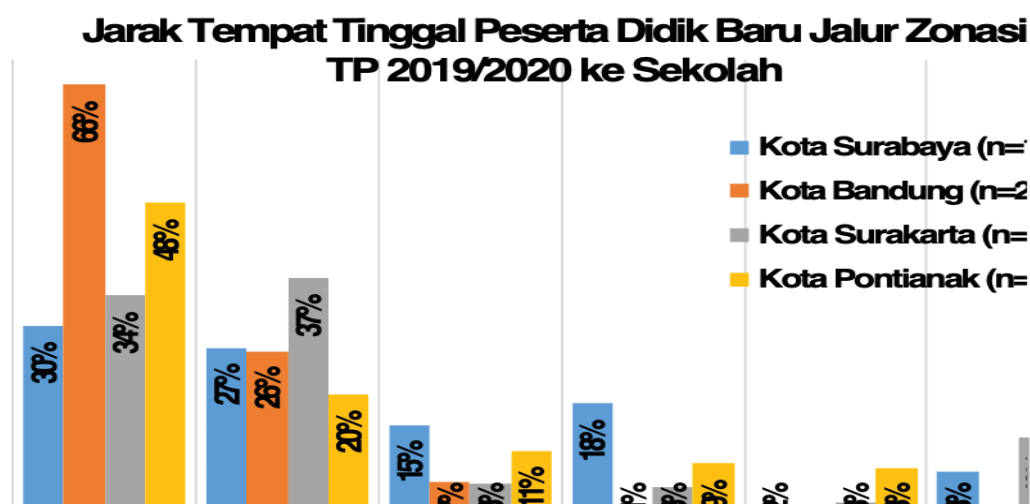
Ketidaksesuaian sistem seleksi pada jalur zonasi terjadi pada juknis PPDB SMA di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat yang sama-sama memasukkan seleksi berdasarkan nilai UN. Ketidaksesuaian pada juknis PPDB SMP terdapat pada Kota Surabaya dan Kota Bandung. Pada Kota Surabaya, dalam jalur zonasi

ditambahkan beberapa kategori jalur yang salah satunya menggunakan sistem seleksi berdasarkan nilai USBN dan hasil TPA, sedangkan ketidaksesuaian pada juknis PPDB di Kota Bandung karena adanya penambahan jalur zonasi kombinasi pada jalur zonasi, yang sistem seleksinya menggunakan kombinasi antara jarak tempat tinggal dengan nilai USBN.

Terkait sosialisasi, sebagian kecil daerah menyatakan masih kurang sosialisasi terutama kepada masyarakat atau orangtua dari calon peserta didik baru. Sebagian orangtua masih belum paham dengan sistem PPDB berbasis zonasi. Oleh karena itu, sebagian mengusulkan waktu sosialisasi sebaiknya jauh sebelum pelaksanaan PPDB.

Dalam proses pelaksanaan PPDB, Disdik menyatakan adanya hambatan, contohnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap sistem PPDB zonasi. Aplikasi google map dalam menentukan jarak belum tentu sesuai dengan jarak sebenarnya. Akibat dari tidak akuratnya sistem aplikasi tersebut membuat ketidaknyamanan calon orangtua peserta didik baru sehingga beberapa dari mereka protes ke Disdik.

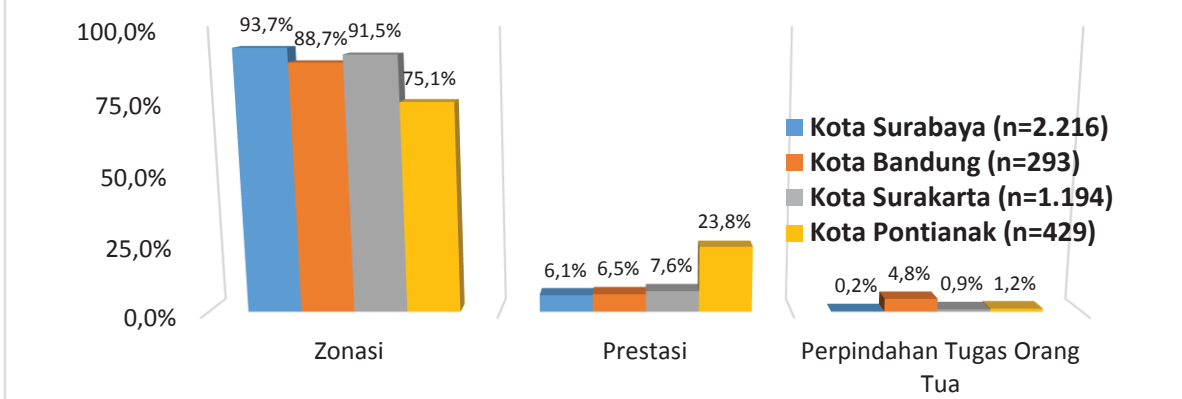
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa menurut hasil pelaksanaan PPDB berbasis zonasi pada 2019, kondisi jarak tempat tinggal dengan sekolah sudah menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMP yang berlokasi kurang dari 3 km dekat dengan sekolah, seperti pada grafik di bawah.



Grafik 1. Jarak Tempat Tinggal Siswa SMP dengan Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa satuan pendidikan dalam menerima peserta didik baru SMP sudah melalui jalur zonasi seperti pada grafik berikut ini.

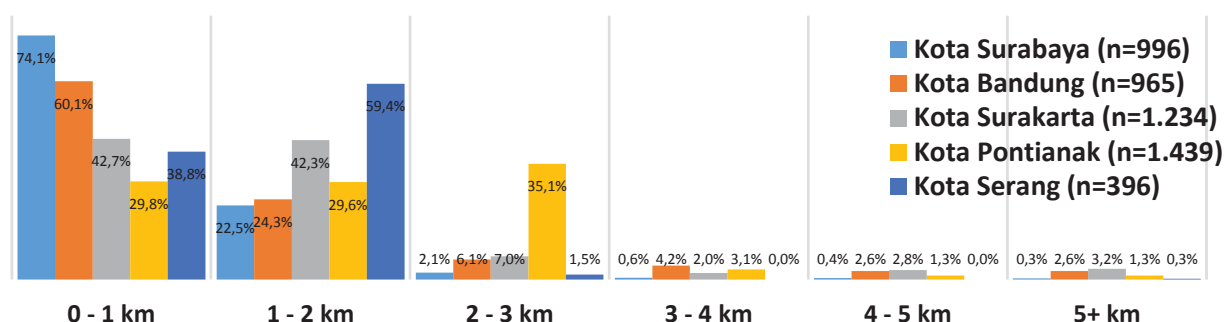
Jalur Masuk Peserta Didik Baru TP 2019/2020



Grafik 2. Jalur Masuk Peserta Didik Baru SMP

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa menurut hasil pelaksanaan PPDB berbasis zonasi pada 2019, kondisi jarak tempat tinggal dengan sekolah sudah menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA berlokasi kurang dari 3 km dekat dengan sekolah, seperti pada grafik di bawah.

Jarak Tempat Tinggal Peserta Didik Baru Jalur Zonasi TP 2019/2020 dengan Sekolah



Grafik 3. Jarak Tempat Tinggal Siswa SMA dengan Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa satuan pendidikan dalam menerima peserta didik baru SMA sudah melalui jalur zonasi seperti pada grafik berikut.

Grafik 4. Jalur Masuk Peserta Didik Baru SMA



Perbandingan Daya Tampung SMP dan SMA dengan Lulusan SD dan SMP

Kota	Lulusan SD Kelas VI	Daya Tampung g Kelas SMP N VII	%	Lulusan SMP N kelas IX	Daya Tampung g SMA N Kelas X	%
Bandung	38.587	16.896	44%	34.976	19.440	56%
Serang	12.621	6.624	52%	8.921	7.344	82%
Surakarta	10.501	6.368	61%	10.594	8.172	77%
Surabaya	41.484	19.136	46%	37.387	14.490	40%
Pontianak	10.285	5.952	58%	9.371	6.552	70%

Apabila seluruh siswa kelas 6 SD atau kelas 9 SMP lulus dan menjadikan SMP Negeri atau SMA Negeri sebagai pilihan melanjutkan maka kompetisi untuk masuk sangat tinggi. Persentase daya tampung SMP negeri terhadap seluruh lulusan SD hanya berkisar 44 s.d. 61 persen. Sedangkan persentase daya tampung SMA Negeri terhadap seluruh lulusan SMP hanya berkisar 40 s.d. 82 persen. Belum lagi ditambah limpahan lulusan dari madrasah (MI atau MTs). Dalam kondisi tersebut maka ke depannya masih akan terjadi perebutan kursi pada sekolah negeri.

Berdasarkan persepsi siswa SMP terdapat 90% siswa yang tidak setuju kalau dengan sistem zonasi siswa tidak harus belajar keras. Dan 83% siswa SMP tidak setuju jika dikatakan bahwa belajar menjadi sangat santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Demikian juga persepsi siswa SMA, sebanyak 80% tidak setuju jika dengan sistem zonasi, siswa tidak harus belajar keras. Dan 80% siswa SMA tidak setuju kalau belajar menjadi sangat santai karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Artinya bahwa tidak benar jika PPDB berbasis zonasi mengakibatkan motivasi belajar siswa menurun.

2. Ketersediaan dan Ketercukupan Guru

Pada bagian ini dibahas tentang kondisi guru dalam implementasi zonasi pendidikan. Sesuai dengan tujuan penelitian maka guru yang dibahas adalah guru SMP dan guru SMA. Sesuai dengan sampel maka guru dibahas menurut lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Barat. Sumber data guru SMP dan SMA berasal dari PDSPK pada semester 1 bulan Desember 2018. Untuk guru SMP dan SMA, ada empat hal yang dibahas, yaitu ketersediaan guru, guru layak, guru sertifikasi, dan rasio guru per sekolah.

Dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, pertimbangan ketersediaan dan ketercukupan guru sangat penting. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar maka keberadaanya tidak bisa digantikan dengan lainnya. Terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan guru berdasarkan data dan informasi dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama guru SMP di lima kota terdapat status guru honor antara 6,7% sampai dengan 37,8%. Kota dengan jumlah guru honor paling rendah adalah Kota Surakarta dan Kota dengan jumlah guru honor paling tinggi adalah Kota Serang. Guru SMA di lima kota yang berstatus guru honor berkisar antara 8,6% sampai 31%. Kota dengan jumlah guru honor paling rendah adalah Kota Surakarta dan kota dengan jumlah guru honor paling tinggi adalah Kota Serang. Kedua, rata-rata guru layak mengajar berdasarkan sampel jumlahnya sekitar 94,7% sampai dengan 99%, jadi masih ada sekitar 5,3% guru yang tidak layak. Ketiga, jumlah ketersediaan guru yang memiliki sertifikat berdasarkan data di SMA Negeri adalah 61% hingga 89%. Kota dengan jumlah guru tersertifikasi

paling rendah adalah Kota Serang dan kota dengan jumlah guru tersertifikasi paling tinggi adalah Kota Surakarta. Keempat, mengenai rasio guru dan siswa secara keseluruhan, rasio guru siswa SMA antara 12 hingga 16, Kota Surakarta merupakan pemilik rasio rasio guru-siswa paling rendah dan Kota Surabaya adalah yang paling tinggi. Tidak terpenuhinya ketentuan minimum (20) rasio guru-siswa sebatas mengindikasikan adanya kelebihan guru.

3. Ketersediaan dan Kondisi Prasarana Sekolah

Secara umum pemenuhan standar sarana dan prasarana bukan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang layak untuk sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan untuk sekolah swasta merupakan tanggung jawab yayasan. Namun, dinas pendidikan juga tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah swasta sesuai dengan standar. Dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, sekurang-kurangnya ada lima hal yang dapat disampaikan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, jumlah rombel yang melebihi standar sebaiknya dilarang/dibatasi oleh dinas pendidikan provinsi agar sekolah dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik oleh kepala sekolah. Sementara itu, di daerah yang sama masih terdapat sekolah yang memiliki rombel yang sedikit, seluruh anak usia SMA dapat ditampung di sekolah lain.

Kedua, jumlah siswa dalam satu rombel yang melebihi standar sebaiknya juga dilarang/dibatasi oleh dinas pendidikan provinsi, karena pada dasarnya pembatasan jumlah siswa per rombel dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa maupun interaksi antarsiswa dapat berlangsung dengan baik. *Ketiga*, sanitasi khususnya jumlah WC (jamban) yang memadai untuk siswa harus segera diupayakan. Jumlah minimal jamban yang harus disediakan sekolah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar dimaksudkan untuk memfasilitasi kesehatan siswa. Kesehatan fisik siswa sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kompetensi lulusan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Keempat*, meskipun secara umum SMA telah memiliki perpustakaan, tetapi upaya perbaikan perpustakaan perlu dilakukan, yakni perbaikan ringan, perbaikan sedang, dan perbaikan berat, sesuai tingkat kerusakan masing-masing perpustakaan. Di samping itu, perlu dipastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang lengkap serta dikelola dengan baik untuk mendukung pembelajaran siswa. *Kelima*, perlu segera menambah jumlah laboratorium IPA agar setiap hal yang dipelajari siswa secara teoretis dan memerlukan praktik atau percobaan dapat dilakukan di laboratorium IPA dan dapat terlaksana dengan baik. Perlu juga dipastikan bahwa jumlah laboratorium IPA di setiap sekolah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh rombel yang ada di sekolah tersebut.

4. Dampak kebijakan PPDB berbasis zonasi

Dengan dilaksanakan PPDB berbasis zonasi, dampak yang dapat dirasakan bagi peserta didik baru adalah tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Jarak tempat tinggal peserta didik sebagian besar kurang dari tiga kilometer. Hal ini memberikan kemudahan akses peserta didik untuk bersekolah. Sekolah sudah mulai mengakomodasikan hak peserta didik untuk tertampung di sekolah terdekat dengan tempat tinggal, yang mengakibatkan menurunnya biaya pengeluaran orang tua dan memudahkan sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan mutu.

PPDB berbasis zonasi juga berdampak pada kesiapan belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan informasi dari guru bahwa dengan dilaksanakan PPDB berbasis zonasi, karakteristik peserta didik baru menjadi heterogen. Sebagian besar peserta didik baru merasa akrab satu sama lain karena mereka merupakan teman bermain yang sudah saling kenal. Kemampuan akademis bervariasi dalam satu kelas. Ada yang

memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Motivasi belajar juga beragam karena peserta didik baru berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pendidik (guru) dan kepala sekolah dalam proses belajar-mengajar dan pengelolaan sekolah. Guru dituntut untuk sabar dan ulet dalam melaksanakan proses belajar yang kreatif.

Kebijakan PPDB berbasis zonasi selain dapat mengurangi stigma sekolah favorit, juga menjadi tantangan bagi guru karena harus siap mengajar peserta didik baru yang latar belakang sosial, ekonomi, dan kemampuan akademisnya beragam. Dengan kondisi karakteristik peserta didik yang heterogen tentunya guru akan menyiapkan strategi pembelajaran yang dapat diterima peserta didik dengan baik.

Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru SMP dalam proses belajar-mengajar dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) sebagian besar guru tidak membedakan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan; 2) guru mengelompokkan siswa yang berkemampuan menengah. Untuk itu diperlukan ketangguhan guru dalam menghadapi peserta didik yang bervariasi dari segi kemampuan akademis. Hanya sedikit guru SMP yang melakukan pengelompokan kemampuan akademis dalam proses pembelajaran.

Terdapat dua strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA dalam menghadapi proses belajar kelas X SMA, yaitu membedakan dan tidak membedakan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Kesulitan yang dialami dalam pembelajaran, antara lain kebiasaan siswa yang cenderung diam/tidak aktif, motivasi/minat belajar siswa berkemampuan sedang, perlunya waktu yang lebih lama untuk transfer ilmu kepada siswa karena menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Penyampaian materi secara berulang-ulang menghambat penyelesaian KD silabus/ketuntasan belajar. Guru perlu melakukan pemilihan metode yang sesuai dengan kemampuan berbagai ragam peserta didik baru.

Hasil pelaksanaan kebijakan PPDB berbasis zonasi dapat dirasakan oleh sekolah favorit. Stigma sekolah favorit/unggulan di masyarakat saat ini telah mulai berkurang. Saat ini tidak hanya siswa yang bernilai (UN) tinggi yang dapat masuk di sekolah favorit, tetapi peserta didik yang memiliki nilai rendah pun apabila tempat tinggalnya dekat dengan sekolah dapat masuk sebagai peserta didik baru sehingga sekolah favorit kini memiliki siswa yang karakteristiknya heterogen.

PPDB berbasis zonasi menghilangkan stigma sekolah unggulan dan non-unggulan. Pemerataan kondisi peserta didik sesuai sistem zonasi memberi kesempatan masuk bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang ekonomi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penerapan Zonasi Pendidikan

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Demikian juga pada tingkat disdik provinsi dan kabupaten/kota. Pada prinsipnya, kebijakan PPDB berbasis zonasi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi masih bervariasi dalam menyikapi kebijakan dari pusat. Terkait penerimaan kebijakan tersebut terdapat dua kategori: yang telah menerima secara penuh kebijakan tersebut dan yang belum.

Ketidaksesuaian sistem seleksi pada jalur zonasi terjadi pada juknis PPDB SMA daerah. Masih ada yang menyertakan seleksi berdasarkan nilai UN. Ketidaksesuaian pada juknis PPDB SMP dalam jalur zonasi berupa penambahan beberapa kategori jalur yang salah satunya menggunakan sistem seleksi berdasarkan

nilai kombinasi antara jarak tempat tinggal dan nilai UN. Masyarakat menginformasikan bahwa masih kurang sosialisasi terkait dengan PPDB berbasis zonasi.

Dampak pelaksanaan PPDB berbasis zonasi terhadap peserta didik baru adalah tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Jarak tempat tinggal peserta didik sebagian besar kurang dari tiga kilometer. Kebijakan PPDB berbasis zonasi selain dapat mengurangi stigma sekolah favorit, juga menjadi tantangan bagi guru karena harus siap mengajar peserta didik baru dengan beragam latar belakang secara sosial, ekonomi, dan kemampuan akademis.

b. Kondisi Ketersediaan Guru

Dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, pertimbangan ketersediaan dan ketercukupan guru sangat penting. Guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan dengan lainnya. Terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan guru berdasarkan data dan informasi, dapat disampaikan empat hal. Pertama, bahwa jumlah guru honor dan guru tidak tetap di sekolah negeri menurut data saat ini berkisar antara 13,28 % hingga 60,16%, sementara jumlah guru dengan status PNS di sekolah swasta sebanyak 11,72%. Kedua, jumlah rata-rata guru layak mengajar berdasarkan sampel sekitar 10,94%. Ketiga, jumlah guru yang memiliki sertifikat berdasarkan data di sekolah negeri adalah sekitar 50–80%, sebanyak 59,38% di kabupaten/kota. Selanjutnya, jumlah guru tersertifikasi di sekolah swasta pada rentang tersebut terdapat sebanyak 8,59% kabupaten/kota. Keempat, rasio guru dan siswa secara keseluruhan, rerata kabupaten/kota di keseluruhan provinsi, memiliki rasio guru-siswa 16. Jumlah ini masih di bawah ketentuan minimum 20 yang ditetapkan pemerintah.

c. Kondisi Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana dapat disampaikan empat hal. Pertama, secara umum daya tampung siswa pada kelas awal di SMP dan SMA pada daerah sampel masih kurang. Persentase daya tampung SMP negeri terhadap seluruh lulusan SD hanya berkisar 44% hingga 61%. Sedangkan persentase daya tampung SMA Negeri terhadap seluruh lulusan SMP hanya berkisar 40% hingga 82%. Belum lagi ditambah limpahan lulusan dari madrasah (MI atau MTs). Dalam kondisi seperti itu, masih akan terjadi perebutan kursi pada sekolah negeri pada waktu mendatang. Kedua, ketersediaan sanitasi (WC) siswa SMA di lima kota sampel kurang dari 50% dari standar yang ditentukan. Ketiga, belum semua SMA pada kota sampel memiliki perpustakaan. SMA dengan perpustakaan besar paling banyak ditemukan di Kota Surabaya, yaitu sebesar 138 sekolah (97,9%) dan yang paling sedikit ditemukan di Kota Serang sebesar 44 sekolah (80,6%), Kota Bandung sebesar 130 sekolah (94,2%), Kota Pontianak sebesar 44 sekolah (89,8%), dan Kota Surakarta 34 sekolah (97,1%). Keempat, ternyata belum semua SMA di lima kota sampel memiliki laboratorium IPA yang lengkap. Apabila dibagi menjadi dua kategori, yakni kondisi baik dan kondisi rusak maka jumlah laboratorium IPA berkategori baik berturut-turut adalah sebagai berikut: Kota Surakarta sebesar 71,9%, Kota Surabaya sebesar 65,9%, Kota Pontianak sebesar 56,8%, Kota Bandung sebesar 51,6%, dan Kota Serang sebesar 34,0%. Kelima, ternyata hanya sedikit SMA di lima kota sampel yang memiliki laboratorium bahasa. Jumlah SMA yang memiliki laboratorium bahasa sesuai standar sarana dan prasarana, sebanyak 52 sekolah (37,7%) di Kota Bandung, 10 sekolah (20,4%) di Kota Pontianak, 8 sekolah (25,8%) di Kota Serang, 85 sekolah (60,3%) di Kota Surabaya, dan 19 sekolah (54,3%) di Kota Surakarta. Hal ini berarti bahwa laboratorium bahasa yang paling banyak tersedia di Kota Surabaya (60,3%) dan terkecil di Kota Pontianak (20,4%).

d. Dampak Pelaksanaan PPDB Berbasis Zonasi

Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi memiliki dampak yang dapat disampaikan terkait dengan tujuh hal berikut. Pertama, peserta didik, jarak antara domisili dan sekolah menjadi dekat dan kelas menjadi heterogen dengan latar belakang sosial, ekonomi dan akademis yang beragam. Kedua, terhadap pembelajaran peserta didik baru, adanya penerapan strategi pembelajaran yang dikelompokkan menurut kemampuan akademis, penyiapan materi ajar serta proses belajar dengan pendekatan yang berbeda. Ketiga, terhadap satuan pendidikan, stigma sekolah favorit sudah mulai menurun. Sekolah yang dipersepsikan favorit sudah menerima peserta didik dari latar belakang sosial, ekonomi dan akademik yang bervariasi. Keempat, adanya distribusi guru yang belum merata antarsekolah. Kelima, pemerintah daerah melakukan pemetaan untuk penyediaan sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki SMP maupun SMA. Keenam, perlu ada penyempurnaan Permendikbud No. 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan terkait pasal 18, 26, 29, dan 32 dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Ketujuh, untuk pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, perlu ditetapkan zonasi pendidikan sebagai wadah dalam intervensi kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan.

2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan simpulan dan saran yang dihasilkan, kajian ini dapat merekomendasikan beberapa hal terkait dengan implementasi kebijakan zonasi pendidikan. Rekomendasi ini ditujukan kepada pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Biro Hukum dan Organisasi

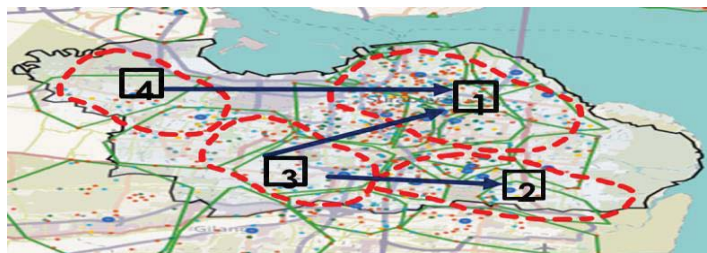
Penyempurnaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 perlu dilakukan dalam penyempurnaan Permendikbud. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan peserta FGD, beberapa hal dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 perlu direkomendasikan untuk ditinjau kembali karena kurang sesuai dengan situasi di lapangan. Beberapa pasal yang diusulkan untuk ditinjau kembali di antaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (3). Ayat ini sebaiknya dihapus. Ayat ini memberikan peluang wali murid untuk melakukan pelanggaran perekayasaan surat keterangan domisili.
2. Pasal 26 ayat (2). Menambahkan nilai UN/prestasi calon siswa baru dalam sistem seleksi PPDB jalur zonasi pada jenjang SMP, sehingga redaksinya diganti menjadi “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, **maka yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang memiliki nilai UN/ prestasi yang tertinggi**”. Jika memprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal, orang tua/calon siswa akan melakukan antrian pendaftaran.
3. Pasal 29 ayat (2). Menambahkan nilai UN/prestasi calon siswa baru dalam sistem seleksi PPDB jalur zonasi pada jenjang SMA, sehingga redaksinya diganti menjadi “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, **maka yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang memiliki nilai UN/ prestasi yang tertinggi**”. Jika memprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal, orang tua/calon siswa akan melakukan antrian pendaftaran..
4. Pasal 32 ayat (1). Menambahkan satu ayat yang berbunyi “Jika ada peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang maka sekolah dapat melakukan pemanggilan peserta didik pada urutan terakhir yang tidak diterima, dipanggil kembali sebagai pengganti”. Ada daerah yang tidak berani menerima peserta didik baru untuk mengisi peserta didik yang tidak daftar ulang.

b. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

1) Implementasi PPDB berbasis zonasi

Dalam implementasi PPDB berbasis zonasi maka beberapa komponen utama yang diperlukan, yaitu 1) Permendikbud tentang PPDB dan juknis PPDB, 2) peta zonasi pendidikan, 3) sistem penentuan jarak dari domisi ke sekolah, 4) jaringan internet dipastikan tidak bermasalah, dan 5) cukup waktu untuk sosialisasi. Komponen tersebut menjadi komponen utama yang menjadi dasar penentuan peserta didik melakukan pendaftaran pada sekolah yang dituju. Kondisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu kondisi wilayah. Kondisi wilayah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu: wilayah yang padat sekolah dan wilayah yang memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali.



Gambar 1. Pola Penempatan Siswa Baru pada PPDB Berbasis Zonasi

Jika suatu wilayah memiliki sedikit jumlah sekolah, wilayah yang memiliki banyak jumlah sekolah dapat menjadi tempat rujukan atau tujuan siswa untuk bersekolah. Misalnya, jika jumlah sekolah di zonasi 4 sangat jarang, maka warga di zonasi 4 dapat mendaftar di zonasi 1 yang jumlah sekolahnya jauh lebih banyak. Hal yang sama berlaku terhadap zonasi lainnya yang memiliki jumlah sekolah sedikit. Siswa di zonasi tersebut dapat mendaftar di zonasi yang memiliki banyak sekolah. Persentase kuota jalur (Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang tua) masih dapat mengacu Permendikbud No. 20 Tahun 2019.

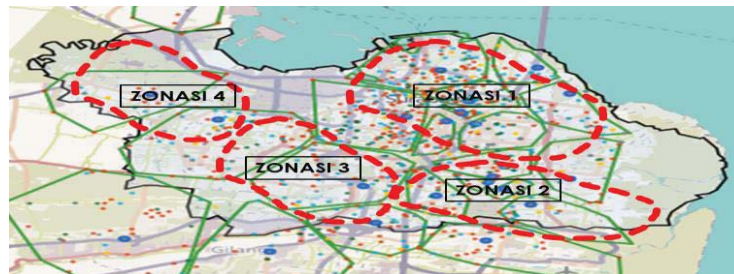
2) Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan zonasi pendidikan, komponen yang juga penting adalah ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana pendidikan. Komponen tersebut sangat mendukung dalam keberhasilan PPDB berbasis zonasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan minimal untuk layanan pendidikan berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: Pertama, kekurangan sanitasi, khususnya WC (jamban) untuk siswa yang masih kurang harus segera diupayakan untuk dilengkapi. Jumlah minimal jamban yang harus disediakan sekolah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar, dimaksudkan untuk memfasilitasi kesehatan siswa. Kesehatan fisik siswa sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kompetensi lulusan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, meskipun secara umum SMP/SMA telah memiliki perpustakaan, namun perlu dilakukan upaya perbaikan perpustakaan, yakni perbaikan ringan, perbaikan sedang, dan perbaikan berat, sesuai tingkat kerusakan masing-masing perpustakaan. Di samping itu, perlu dipastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang lengkap serta dikelola dengan baik untuk mendukung pembelajaran siswa. Ketiga, kekurangan laboratorium IPA perlu segera dipenuhi, agar setiap hal yang dipelajari siswa secara teoretis dan memerlukan praktik dan percobaan dapat dilakukan di laboratorium IPA sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perlu juga dipastikan bahwa jumlah laboratorium IPA di setiap sekolah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut. Demikian juga untuk mendukung siswa mengikuti perkembangan teknologi di bidang media diperlukan laboratorium multimedia. Keempat, kekurangan laboratorium bahasa perlu segera dipenuhi, mengingat semua siswa SMP/SMA membutuhkan sarana yang mendukung keterampilan berbahasa yang baik, terutama keterampilan berbahasa asing. Data penelitian ini menunjukkan bahwa sangat sedikit SMP/SMA yang memiliki laboratorium bahasa. Kelima, agar

diupayakan untuk menyediakan/membangun laboratorium komputer terutama di SMP/SMA yang masih belum memiliki laboratorium. Jumlah laboratorium komputer di setiap sekolah disesuaikan dengan jumlah rombel, sehingga cukup untuk memfasilitasi seluruh siswa di sekolah tersebut. Strategi untuk memenuhi sarana pada satuan pendidikan adalah dengan memprioritaskan sekolah yang sudah memasukkan datanya dengan lengkap pada Dapodik Dikdasmen.

3) Model zonasi pendidikan

Zonasi pendidikan dapat dibentuk berdasarkan wilayahnya, yaitu pada tingkat kabupaten atau kota. Penyusunan zonasi pendidikan dibagi sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah. Zonasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota ditentukan sekurang-kurangnya dibagi menjadi tiga zonasi. Wilayah zonasi dapat terdiri dari satu kecamatan dengan kategori padat sekolah atau penggabungan dari beberapa kecamatan yang jumlah sekolahnya sedikit. Zonasi pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan tiga kriteria, yaitu 1) zonasi pendidikan kategori sangat baik, 2) zonasi pendidikan kategori baik; dan 3) zonasi pendidikan kategori kurang. Zonasi pendidikan akan mewadahi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta sekolah nonformal.



Gambar 2. Pola Zonasi Pendidikan

Misalnya, Zonasi 1, terdiri dari satu wilayah kecamatan yang memiliki kategori padat sekolah. Zonasi 2 terdiri dari dua kecamatan dengan kategori kepadatan sedang. Zonasi 3 terdiri tiga kecamatan dengan kategori kepadatan jarang. Zonasi 4 juga dalam kategori jarang.

c. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Dalam melaksanakan zonasi pendidikan, yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan dan ketercukupan guru serta kompetensi guru dalam menjalankan tugas dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil temuan kajian, berikut disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait dengan kebutuhan guru, baik di jenjang SMP maupun SMA.

1) Pemenuhan Guru Sesuai Kualifikasi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa sebagai besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kekurangan guru PNS untuk jenjang SMP dan Pemerintah Daerah Provinsi kekurangan guru PNS untuk jenjang SMA. Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan guru sesuai dengan standar yang ditetapkan menjadi suatu prioritas yang perlu dilakukan. Untuk pemenuhan kebutuhan guru tersebut, setiap daerah perlu menyusun formasi kebutuhan guru yang dibutuhkan.

Dalam pemenuhan kebutuhan/ketersediaan guru sebagaimana dimaksud Butir 1 di atas, perlu ditetapkan formula yang tepat, dengan mempertimbangkan/memasukkan faktor-faktor berikut:

1. Kelayakan
2. Jenis bidang ilmu yang dibutuhkan
3. Rasio guru siswa
4. Status kepegawaian guru, negeri atau honorer/Guru Tidak Tetap

5. Kepemilikan sertifikat profesi guru

2) Pemeratan Guru Antarsekolah

Pemda Kabupaten/Kota dan Pemda Provinsi

Sesuai dengan kewenangannya, Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemda Provinsi, melaksanakan pemutasian guru secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan/pemerataan guru. Pengecekan kecukupan guru agar dilakukan setiap tahun bersamaan dengan masa PPDB, mengingat sangat berpeluang terjadi perubahan kuota siswa yang diterima sekolah terhadap kebutuhan guru. Dalam melakukan pemutasian guru dinas pendidikan, perlu dilibatkan badan kepegawain daerah (BKD) supaya titik-titik konsentrasi guru pada sekolah tertentu dapat terpantau.

Untuk menjamin kelayakan jumlah guru di setiap sekolah, selain dilakukan dengan cara memindahkan/merotasi guru dari sekolah yang jumlah gurunya berlebih ke sekolah yang kekurangan/membutuhkan guru, juga dapat dilakukan dengan cara (i) mengangkat/menaikkan status guru dari guru honorer dan guru tidak tetap menjadi guru berstatus PNS sesuai peraturan yang berlaku; (ii) apabila melalui cara pada Butir (i) kelayakan jumlah guru belum terpenuhi, maka dilakukan rekrutmen guru PNS baru.

d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi pada tingkat daerah, peran dinas pendidikan sangat strategis dalam keberhasilan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu direkomendasikan kepada dinas pendidikan terkait adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan (bagian perencanaan dan program) perlu mengembangkan zonasi pendidikan berdasarkan peta zonasi PPDB yang telah ditetapkan dan diperkaya dengan komponen pendidikan lainnya seperti komponen guru, sarana prasarana, anggaran pendidikan.
2. Dinas Pendidikan perlu menyusun zonasi pendidikan secara akurat dan komprehensif berdasarkan data persekolahan (data pendidikan) terbaru, data kependudukan, kondisi infrastruktur (jalan), dan akses transportasi. Dalam penerapannya, peta zonasi pendidikan dapat berubah berdasarkan perkembangan data persekolahan dan data pendukung lainnya.
3. Penerapan zonasi pendidikan perlu melibatkan beberapa SKPD yang terkait dengan pendidikan seperti Bappeda, BKD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar SKPD tersebut, di mana selanjutnya hasil penerapan zonasi ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
4. Zonasi pendidikan perlu menjadi rujukan bagi setiap zona (daerah) dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk jangka waktu tertentu (misal lima tahun ke depan) yang dilakukan secara terintegrasi.
5. Jumlah rombongan belajar yang melebihi standar sebaiknya dilarang/dibatasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, agar sekolah dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik oleh kepala sekolah. Sementara itu, di daerah yang sama masih terdapat sekolah yang memiliki rombongan belajar yang sedikit, dengan demikian seluruh anak usia SMA dapat ditampung di sekolah lain. Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar yang melebihi standar sebaiknya juga dilarang/dibatasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, karena pada dasarnya pembatasan jumlah siswa per rombongan belajar dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, dan interaksi antarsiswa dapat berlangsung dengan baik.
6. Pemerintah daerah perlu merencanakan untuk membangun unit sekolah baru pada jenjang SMP atau SMA di suatu wilayah kecamatan yang belum memiliki SMP dan SMA Negeri. Dengan

keberadaan SMP/SMA Negeri di suatu wilayah kecamatan, calon peserta didik baru tidak perlu mencari sekolah yang jauh dari tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadiroğlu, A. & Sönmez, T. 2003. *School Choice: A Mechanism Design Approach*. Discussion Paper No.: 0203-18, Department of Economics, Columbia University. New York.
- Abidin, M. Zainal dan Asrori. 2018. Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7, No. 1, 2018.
- Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gadjahmada University Press.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. Michigan. Prentice Hall.
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. Congressional Quarterly, Inc.
- Jones, Charles O. 1975. *Clean Air*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51, Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta. ok
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta. ok
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24, Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Jakarta.
- Kompas.com, 2018 "Mendikbud: Semua Penanganan Pendidikan Akan Berbasis Zonasi", <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/18/11291621/mendikbud-semua-penanganan-pendidikan-akan-berbasis-zonasi>.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- . 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2017. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 13, Tahun 2005 sebagai telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Simon, Herbert A. 2005. *Public Administration: Third Printing*, New Brunswick and London. Transaction Publishers.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Rubinfeldt, D. L. 1978. *Suburban Employment and Zoning: A General Equilibrium Analysis*.

Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Dorsey Pr.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. APK/APM SD, SMP dan SM sederajat tiap Provinsi, Jakarta.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS). ok

SINKRONISASI PERATURAN TERKAIT SISTEM ZONASI PENDIDIKAN: KETERKAITAN DENGAN PP NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Yufriidawati, Ais Irmawati, Untung Tri Rahmadi,

Fadhillah Darma, Iwan Mustari

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Sejak 2017 telah dicanangkan kebijakan zonasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yaitu melalui penerimaan siswa baru. Setelah 2017, pengelolaan dalam komponen pendidikan lainnya juga dirancang berbasis zonasi pendidikan. Dalam mencapai tujuannya, kebijakan zonasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010. Mengingat dalam PP ini terdapat beberapa pasal yang kurang selaras dengan kebijakan zonasi, maka tujuan kajian ini adalah mengevaluasi dan menganalisis materi muatan PP No.17/2010 yang terkait dengan sistem zonasi sebagai bahan masukan perubahan PP. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Kajian ini melibatkan stakeholder pendidikan sesuai substansi PP sebagai sumber data. Kajian didukung data sekunder yang diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian ini adalah: (i) Dinamika pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya perubahan pembagian kewenangan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sementara perkembangan penyelenggaraan pendidikan telah melahirkan strategi zonasi pendidikan dalam mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; (ii) Dalam mengevaluasi PP No. 17/2010 ditemukan beberapa ketidakselarasan materi muatan dengan perubahan jaman, dinamika masyarakat, perkembangan kebijakan dan produk hukum lainnya, khususnya UN sebagai syarat utama dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; (iii) Dalam menganalisis materi muatan sebagai bahan masukan perubahan PP No. 17/2010 terkait zonasi pendidikan, diperlukan adanya penyesuaian ketentuan diantaranya: (a) pembagian kewenangan bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota; (b) penerimaan peserta didik, diantaranya UN yang menjadi syarat utama dalam seleksi penerimaan peserta didik; azas/prinsip dan jadwal penerimaan peserta didik.

Kata kunci: *pengelolaan, penyelenggaraan, zonasi, pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya, nampak pada tiga tahun terakhir meningkat. Namun perubahan kenaikan IPM cenderung menurun (BPS, IPM Tahun 2016-2018). Kondisi ini terkait dengan angka partisipasi sekolah (APS) yang menunjukkan sebagian besar anak usia sekolah telah mengakses pendidikan sesuai kelompok umurnya. Namun semakin tinggi kelompok umur (jenjang pendidikan) mereka, tingkat APS cenderung menurun (BPS, APS Tahun 2016-2018). APS meningkat, tidak dapat dimaknai meningkatnya pemerataan anak usia sekolah dalam mengenyam pendidikan. Oleh karena itu pemerataan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan, salah satu caranya melalui sistem zonasi pendidikan.

Sistem zonasi pendidikan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diharapkan dapat menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona, dan memastikan terpenuhinya tenaga pendidik yang kompeten, serta

didukung sarana prasarana pendidikan yang memadai di setiap satuan pendidikan pada masing-masing wilayah, agar terwujud pemerataan pendidikan berkualitas dan berkeadilan.

Kebijakan zonasi yang diterapkan dalam PPDB sejak tahun 2017 memberikan perubahan pengelolaan pendidikan, khususnya pada aspek kesiswaan, tenaga pendidik (guru) dan sarana prasarana pendidikan di daerah. Penetapan zonasi PPDB ini, telah menyadarkan pihak daerah untuk memenuhi ketersediaan, ketercukupan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, kebijakan zonasi pendidikan telah mengingatkan pemerintah dalam pemenuhan jumlah dan kualitas guru, karena guru merupakan salah satu subjek yang berkewajiban menjadikan peserta didik berilmu pengetahuan dan berkarakter baik.

Sebelum adanya sistem zonasi pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memperluas kesempatan bagi anak usia sekolah untuk bersekolah dan mendorong pemerataan layanan pendidikan yang bermutu melalui program-program pendidikan, antara lain program wajib belajar untuk meningkatkan jumlah anak bersekolah; program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi peningkatan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi siswa; program bantuan pemerintah dalam pengadaan ruang laboratorium ataupun perpustakaan. Namun program-program tersebut belum memberikan hasil yang maksimal, seperti program wajib belajar yang salah satu keberhasilannya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk bersekolah. Bila dilihat dari jumlah anak usia sekolah yang bersekolah, khususnya di atas jenjang SD/ sederajat, terlihat APK pada jenjang SMP/ sederajat baru sebesar 91,52 persen dan SM/ sederajat sebesar 80,68 persen (BPS, 2018). Artinya masih terdapat anak usia sekolah yang belum bersekolah, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Guna mengatasi permasalahan yang ada, kebijakan zonasi perlu diterapkan dengan dukungan peraturan perundang-undangan (legalitas), agar sasaran strategis Kemendikbud dan pembangunan nasional tercapai serta sesuai perkembangan dan perubahan zaman, dinamika masyarakat maupun tuntutan global dalam kehidupan bernegara, serta demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Salah satu peraturan yang perlu ditelaah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 mengingat PP ini berbicara tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis materi muatan PP Nomor 17 Tahun 2010 yang terkait dengan sistem zonasi pendidikan sebagai dasar ilmiah dan bahan/masukan perubahan yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi) PP tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep yang termuat dalam kajian ini terdiri dari pengelolaan, penyelenggaraan dan zonasi pendidikan. Pengelolaan pendidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana dan prasarana, serta sistem tata kelola untuk mencapai tujuan pendidikan (Sobri, 2009). Pengelolaan pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan atau dimaknai sebagai manajemen. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan pendidikan adalah pemeliharaan, proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal,

pendidikan nonformal, dan pendidikan informal berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Selanjutnya sistem zonasi pendidikan merupakan salah satu kebijakan pendidikan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional (Mendikbud; 2018). Sistem zonasi ini telah diterapkan dalam bentuk zonasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2017. Arah kebijakan zonasi pendidikan ini terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mana selama ini belum maksimal, sehingga perlu dibenahi.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 secara umum sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Namun berselang jalannya waktu terdapat beberapa fakta empiris terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang nampak kurang mendorong pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu yakni:

a. Ketimpangan atau kesenjangan kualitas pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 60 ayat (1), dinyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Namun sekolah sebagai satuan pemberi layanan pendidikan masih banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Kemendikbud (2019) bahwa dari 215.869 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK), ternyata baru 60.353 atau 27,96% sekolah yang memenuhi SNP. Berdasarkan capaian SNP ini, mengindikasikan masih rendahnya kualitas satuan pendidikan. Namun semakin tinggi jenjang satuan pendidikan, terlihat jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP semakin berkurang. Dalam hal ini, jumlah sekolah yang paling sedikit memenuhi SNP adalah SMK (12,2%). Selain itu, berdasarkan hasil dari Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (2017), diperoleh informasi bahwa baru 70 persen sekolah yang telah memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar.

Dalam capaian sekolah yang memenuhi SNP antar provinsi juga ditemui adanya ketimpangan, misalnya SD, di D.I Yogyakarta berada di capaian 86,1 persen memenuhi SNP berbeda dengan SD di Papua dan Maluku Utara yang hanya mencapai 1,3 persen dan 0,7 persen. Capaian SNP ini juga berpengaruh terhadap tingkat akreditasi sekolah, di mana nampak masih adanya sekolah yang belum terakreditasi yakni sebanyak 8,2 persen (SD), 15 persen (SMP), 14,6 persen (SMA) dan 27,5 persen (SMK).

b. Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Guru pada Setiap Sekolah

Menurut hasil penelitian 2018 Puslitjakdikbud tentang “Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan”, capaian akreditasi jenjang SD pada tahun 2017 menunjukkan berturut turut tiga standar yang rerata capaiannya paling rendah yakni standar Sarana dan Prasarana (79,2), Standar Pendidik dan Kependidikan (81,9), dan Standar Kompetensi Lulusan (84,6). Sedangkan tiga komponen Standar Nasional Pendidikan yang rerata capaiannya paling rendah di SMP adalah standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Kependidikan, dan Standar Kompetensi Lulusan. Di antara ke tiga standar tersebut, standar yang rata-rata capaiannya paling rendah adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (79,5). Ini berarti, para pendidik di SMP belum dapat mencapai peringkat baik. Begitu juga di SMA, rata-rata capaian standar yang paling rendah adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (82,2), walaupun standar tersebut telah memenuhi kriteria baik.

Pada semua jenjang pendidikan, standar yang capaiannya paling rendah adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (82,2), dan Standar Sarana dan Prasarana (82,9). Hal ini menggambarkan bahwa masih adanya persoalan sarana prasarana maupun pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan data pokok pendidikan (2018) yang menunjukkan terdapat 125.950 ruang kelas yang

mengalami rusak berat, dan jumlah pendidik (guru) yang belum tersertifikasi sebanyak 56,4% di SD, 52,5% di SMP, 52,6% di SMA dan 66,1% di SMK.

c. Keterbatasan Akses di Daerah Tertinggal

Kebijakan pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan guna merespon permasalahan daerah tertinggal. Khususnya terkait dengan keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana wilayah yang menghambat peningkatan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi di daerah tertinggal.

Pengurangan kesenjangan antar wilayah salah satunya dilakukan dengan mengentaskan daerah tertinggal minimal di 80 kabupaten pada tahun 2019 dengan target: (i) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (ii) Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (iii) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.

Dalam rangka peningkatan nilai IPM di daerah tertinggal, dilakukan beberapa intervensi antara lain: (i) Penempatan Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) sebanyak 13.092 orang hingga tahun 2015 dan sebanyak 2.296 orang di tahun 2016; (ii) Penempatan Guru Garis Depan (GGD) sebanyak 798 guru di tahun 2015 dan 6.296 guru yang lolos seleksi di tahun 2016; (iii) Pengadaan alat kesehatan di puskesmas di delapan kabupaten; (iv) Pembangunan ruang kelas baru di delapan kabupaten; (v) Pengadaan alat peraga pendidikan di 15 kabupaten; dan (vi) Pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya di 37 kabupaten dalam rangka peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal.

Namun upaya pembangunan daerah tertinggal masih menghadapi berbagai kendala, sehingga belum menunjukkan hasil pembangunan yang diharapkan. Permasalahan dalam pencapaian pembangunan daerah tertinggal antara lain, pertama, penurunan persentase kemiskinan di daerah tertinggal masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh: (i) Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial; (ii) Masih belum berkembangnya kelembagaan permodalan bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal untuk mengembangkan usahanya; dan (iii) Ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan yang belum memadai.

Kedua, IPM yang belum mencapai target kenaikan per tahun yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Penyebab belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal adalah: (i) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal yang distribusinya secara umum belum merata ke seluruh desa melainkan terkonsentrasi di ibu kota kecamatan; (ii) Masih minimnya akses terhadap pelayanan dasar; dan (iii) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah (Bappenas; 2017).

d. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas

Periode usia dini dalam tumbuh kembang seorang anak menempati posisi yang sangat penting. Periode ini merupakan fundamen bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa pada masa usia dini, seorang anak memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk mengembangkan potensi dirinya lebih jauh di kemudian hari. Laporan yang dirilis oleh America's Edge menyebutkan bahwa 85 persen perkembangan otak terjadi sebelum anak berusia 5 tahun. Laporan lain menyebutkan bahwa sejak lahir hingga usia tiga tahun, seorang anak mampu mengembangkan lebih dari 1000 trilyun koneksi sinaptik (Field, 2014).

Studi Schweinhart dkk menegaskan, bahwa setiap investasi US\$1 dalam program pendidikan anak usia dini, dalam jangka panjang akan mampu menghemat US\$7 sampai dengan US\$16 anggaran keuangan pemerintah lokal maupun nasional dengan cara mengurangi biaya mengulang sekolah, kriminalitas, dan biaya sosial lainnya (Schweinhart, 2005). Oleh karenanya, menimbang arti penting periode tersebut, dikenal istilah *golden age* atau usia emas bagi anak dalam masa usia dini, yang menjadi periode sangat strategis dalam upaya pendidikan bagi sebuah generasi.

Beberapa hasil laporan di atas menjadi gambaran betapa pentingnya masa usia dini dalam kaitannya dengan upaya peletakan kerangka pembangunan potensi anak di masa depan. Oleh karenanya, menyusul temuan-temuan mutakhir dari penelitian tentang perkembangan otak, di mana banyak di antara pihak, baik yang mewakili organisasi pemerintahan maupun para pegiat pendidikan anak usia dini di berbagai negara, yang menggalakkan pelayanan pendidikan pada jenjang ini.

Secara empirik, PAUD masih memiliki banyak kelemahan di antaranya adalah jumlah anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD masih cukup signifikan. Dari data yang disampaikan Harris Iskandar pada acara Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018, menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 34,84 persen yang belum mendapat pelayanan PAUD. Beliau menyebutkan, saat ini terdapat 190.225 PAUD dan 600 ribu guru PAUD yang mengajar bagi 6 juta anak usia dini. Sementara itu, berdasarkan data desa, terdapat 23.737 desa yang belum mempunyai layanan PAUD.

Oleh karena itu dalam tujuan ke 4.2 pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai PBB, disebutkan bahwa pada tahun 2030 setiap negara anggota harus memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas, sehingga mereka akan memiliki kesiapan guna mengikuti pendidikan dasar. Gagasan untuk mewajibkan pelayanan pendidikan usia dini bagi setiap anak, sempat mengemuka sehingga muncul wacana wajib PAUD 1 tahun sebelum SD. Mengenai hal ini, penelitian dari Puslitjakdikbud ikut memperkuat pentingnya penyiapan program PAUD 1 tahun sebelum Sekolah Dasar melalui hasil kajiannya (Puslitjakdikbud, 2016) yang menunjukkan PAUD bermanfaat besar dalam mempersiapkan anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

C. METODE PENELITIAN

Metode kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, baik dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis datanya. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari beberapa pakar/ ahli dibidangnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni melalui studi literatur, dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD).

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut berupa analisis tekstual (analisis isi) dari hasil transkrip atau telaah dokumen (literatur). Analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data/informasi yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu catatan diskusi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, penyusunan domain, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam hal ini dilihat secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis nilai, karena adanya inkonsistensi antara nilai-nilai yang disosialisasikan suatu pranata sosial dengan pranata sosial lainnya. Untuk itu pandangan

filosofi pendidikan nasional perlu dikembalikan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan dan membangun kembali kesadaran kolektif bangsa Indonesia.

Hakikat pendidikan secara filosofis merupakan hak asasi manusia yang dibutuhkan untuk membantu memberdayakan dan memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada orang lain, dan mampu membangun kehidupan yang mandiri. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 pada pasal 31 yang menyebutkan bahwa, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah telah menjamin hak individu dalam mengembangkan diri dan kompetensi yang telah dan akan ia miliki melalui UUD RI 1945, yang antara lain terdapat pada pasal 28 C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya dalam upaya warga negara mendapatkan hak pengembangan diri, pemerintah sebagai pengelola dan penyelenggara telah menjejawantahkannya ke dalam berbagai regulasi yang mengatur urusan pendidikan.

Pemerintah dalam pasal 31 UUD RI 1945 bertanggungjawab untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dalam satu Sistem Pendidikan Nasional. Sampai saat ini masih ditemui adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu suatu peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dapat seiring dan sejalan dengan kebutuhan zaman, cita-cita pembangunan nasional. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang ada perlu diselaraskan. Acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selama ini didasarkan pada PP No. 17 Tahun 2010.

Dalam penerapannya, PP ini menemui adanya ketidaksinkronan/ permasalahan, khususnya terkait dengan aspek yuridis (hukum) sehingga perlu disesuaikan. *Pertama*, pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) pada alinea keempat mencantumkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan karenanya wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu, pemerintah wajib merumuskan sebuah sistem pendidikan nasional yang dapat mewujudkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Sebagai tindaklanjut dari UUD 1945 di bidang pendidikan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pembaharuan ini dilakukan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini menunjang pemenuhan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1). Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini

disebutkan bahwa pemenuhan hak yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi atas layanan dan kemudahan serta jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tersebut menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3). Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia dituangkan dalam visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan demikian, pemerintah perlu untuk mendorong akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas secara merata dan berkeadilan maupun meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas, sehingga diperlukan regulasi yang didasarkan pada suatu sistem yang mengacu pada pemerataan akses layanan dan mutu pendidikan.

Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal yang mengatur RSBI/ SBI di sekolah-sekolah pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan MK tersebut telah membatalkan pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensi dari putusan MK ini berimplikasi terhadap produk/peraturan turunannya yang terdapat dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Ketiga, dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan pembagian kewenangan antara pusat dan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota dalam mengelola urusan pendidikan. Pada UU ini, pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal diserahkan urusannya kepada pemerintahan kabupaten/ kota, sedangkan untuk urusan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus diberikan kepada pemerintahan provinsi. Sementara dalam PP No. 17/2010 belum diuraikan secara rinci.

Berikutnya dalam PP No. 17/2010 terdapat muatan materi (pengertian) tentang standar pelayanan minimal (SPM) yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian SPM yang ada dalam PP No. 17/2010 sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, perlunya penyesuaian PP ini dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian secara konstitusional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam satu sistem pendidikan yang efektif dan efisien guna menunjang terwujudnya cita-cita nasional. Pendidikan merupakan upaya bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas dan bermartabat dalam pergaulan kehidupan global yang demokratis dan berkesetaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Secara sosiologis, sebagai pranata sosial, pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu melaksanakan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya

sesuai tuntutan keberagaman dan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Beberapa pertimbangan dalam rangka perubahan peraturan ini terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu:

Pertama, disparitas pendidikan di daerah masih cukup tinggi. Target pendidikan yang berkualitas tak akan dapat tercapai jika masih terdapat disparitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didorong agar lebih fokus membenahi ketimpangan tersebut yakni antara lain dengan menegakkan aturan zonasi, pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan, serta pemenuhan dan redistribusi guru.

Adanya ketimpangan input peserta didik selama ini disebabkan karena masyarakat selalu mempersepsikan adanya sekolah unggulan atau favorit, dan tidak favorit. Sekolah favorit biasanya diisi oleh peserta didik yang berprestasi, umumnya berlatar belakang dari keluarga dengan status sosial ekonomi baik, sebaliknya bagi sekolah kurang favorit. keberadaan sekolah favorit ini telah menimbulkan kastanisasi di persekolahan. Hal ini terjadi karena penerimaan peserta didik sebelumnya dilakukan dengan sistem rayonisasi yang lebih mengutamakan akademik melalui hasil ujian nasional (UN). Dengan capaian akademik ini, menimbulkan fenomena hilangnya hak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah negeri yang terdekat dari rumahnya. Hal tersebut dinilai tidak benar dan tidak tepat berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena sekolah negeri merupakan layanan publik yang harus memiliki tiga aspek (tidak rivalisasi, tidak eksklusif dan tidak diskriminatif.), sehingga tidak boleh dikompertisikan, dieklusifkan secara berlebihan untuk kelompok tertentu dan tidak boleh ada praktik diskriminasi.

Ketimpangan komponen pendidik dan sarana prasarana pendidikan, ditunjukkan dengan jumlah guru di daerah kota lebih banyak dibandingkan di daerah terpencil. Akibatnya sejumlah sekolah yang terdapat di daerah terpencil kekurangan guru. Selain itu, penyebaran guru juga terlihat belum merata secara kualitas, di mana terdapat sekolah yang sebagian besar diisi oleh guru-guru PNS dan bersertifikat, sementara sekolah lain hanya diisi guru honorer tidak tetap dan belum bersertifikat. Dalam hal ini pemerintah daerah harus memiliki kemauan untuk melakukan redistribusi dan pembinaan guru. Setelah dilakukan penataan guru, maka perlu intervensi peningkatan pemerataan sarana-prasarana pendidikan di sekolah berbasis zonasi mengingat masih banyaknya sekolah di daerah yang sarana prasarananya kurang memadai dan kurang layak.

Sistem zonasi ditempuh sebagai salah satu kebijakan (strategi) yang utuh dan terintegrasi guna mewujudkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Dalam pemerataan akses layanan pendidikan, zonasi diterapkan untuk mewujudkan ruang dan memberi keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Sedangkan dalam pemerataan kualitas pendidikan, zonasi diterapkan guna mencegah penumpukan sumber daya (tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana pendidikan) yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, sistem ini juga mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Disamping juga, agar pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memberikan bantuan lebih tepat sasaran.

Kedua, otonomi daerah yang dijalankan menurut peraturan pada tahun 2004, dipahami hanya sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah tersebut adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi, agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan merata di daerah.

Di beberapa daerah ditemui adanya kegagalan penerapan otonomi daerah yang tercermin dari ketiadaan *political equality*, *local responsiveness* dan *local accountability*. Selain itu, terlihat banyaknya urusan yang diserahkan kepada kabupaten/ kota tidak diikuti dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia

(SDM) aparatur yang tersedia. Terbatasnya kualitas dan jumlah SDM aparatur merupakan masalah utama yang dihadapi kabupaten/ kota sangat dirasakan dalam pelayanan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pusat pun tidak berjalan efektif, sehingga SDM aparatur tidak dapat didistribusikan secara merata ke kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.

Dalam peraturan otonomi daerah, terdapat pula implementasi standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi acuan pokok penyelenggaraan pendidikan guna mengukur pelayanan pemerintah kepada publik. SPM merupakan salah satu alat pengendali agar pelayanan dasar dipedulikan, diperhatikan dan diprioritaskan oleh pemerintah daerah. SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/ kota. Hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, yang dibedakan atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan Pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dasar agar hak setiap warga negara secara minimal terpenuhi. Penerapan SPM dinilai sampai saat ini belum optimal dan hanya berorientasi pada input. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah di berbagai daerah yang belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Masalah SPM yang terbesar adalah pada sarana prasarana sekolah yang masih kurang layak serta ketersediaan guru yang masih kurang maupun kualitas kompetensi guru yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan data terdapat sekitar 30 persen sekolah dan madrasah yang belum memenuhi SPM pendidikan dasar (Ditjen Dikdasmen; 2017).

Akibatnya terdapat daerah yang tidak memiliki sekolah dengan kualitas mumpuni, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Walaupun ada sekolah bagus, maka biayanya akan mahal. Kekurangan yang menonjol tak hanya terlihat dari aspek fisik sekolah, namun juga di berbagai aspek lainnya, seperti supervisi, perencanaan belajar dan penilaian peserta didik. Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya para pemangku kepentingan mendorong SPM pendidikan ke arah proses, agar dapat menggapai mutu yang lebih baik, sehingga anak didik dapat hidup lebih baik dan cerdas sebagaimana amanah konstitusi.

Ketiga, peniadaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI/ SBI) pada sekolah-sekolah pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 5/PUU-X/2012 Tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sekolah Bertaraf Internasional telah mengesampingkan hakikat Pendidikan Nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya kontroversi terhadap penyelenggaraan RSBI dari berbagai kalangan, mengingat RSBI/ SBI rentan akan penyelewengan dana, menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi pendidikan, serta mahal biaya pendidikan RSBI.

Dalam hal ini, RSBI/ SBI di sekolah pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, menimbulkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan adanya diskriminasi pendidikan, perbedaan antara RSBI/ SBI dengan non RSBI/ SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Sekolah eks RSBI/SBI tersebut pada saat ini menjadi sekolah yang dianggap "favorit" oleh masyarakat sehingga selalu diminati dan diserbu pada saat penerimaan siswa baru.

2. Evaluasi Terhadap PP Nomor 17 Tahun 2010 Terkait Zonasi Pendidikan

Terdapat beberapa muatan materi dalam PP No. 17/2010 yang terkait dengan sistem zonasi pendidikan yang perlu dievaluasi. Dalam mengevaluasi muatan materi tersebut dilakukan melalui telaah dokumen PP dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang berhubungan dengan zonasi pendidikan. Oleh karena kebijakan zonasi pendidikan sampai sejauh ini baru diterapkan melalui

pelaksanaan PPDB, maka Peraturan PPDB yang diacu adalah Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2019.

Muatan materi yang dievaluasi tersebut terkait dengan: (i) azas/prinsip penerimaan peserta didik; (ii) dasar seleksi penerimaan peserta didik baru; (iii) jadwal penyelenggaraan penerimaan siswa baru. Secara lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

No	Materi Muatan	PP No. 17/2010	Permendikbud No 51/2018 jo Permendikbud No 20/2019
1	Prinsip/azas penerimaan peserta didik	Pasal 64 (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel	Pasal 2 (1) PPDB dilakukan berdasarkan: a. nondiskriminatif; b. objektif; c. transparan; d. akuntabel; dan e. berkeadilan
		Pasal 74 (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.	
		Pasal 82 (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.	
2	Dasar seleksi penerimaan peserta didik baru	Pasal 74	Pasal 26
		(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6).	(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
			(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
			Pasal 27
			(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan

No	Materi Muatan	PP No. 17/2010	Permendikbud No 51/2018 jo Permendikbud No 20/2019
			dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.
		Pasal 82	Pasal 29
		(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).	(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
			(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
			Pasal 30
			(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.
			Pasal 31
			(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
			(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN

No	Materi Muatan	PP No. 17/2010	Permendikbud No 51/2018 jo Permendikbud No 20/2019
			(3) Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
			(4) Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
3	Jadwal penyelenggaraan penerimaan siswa baru	(6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.	Pasal 4 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.

3. Analisis Materi Muatan PP Nomor 17 Tahun 2010 Terkait Zonasi Pendidikan

Di bawah ini diuraikan aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan sistem zonasi. Aspek pengelolaan lebih kepada pembagian kewenangan dalam urusan pendidikan, sedangkan penyelenggaraan lebih kepada pelaksanaan komponen pendidikan, termasuk penerimaan peserta didik (siswa).

a. Pengelolaan Pendidikan

Pengertian pengelolaan pendidikan yang tertera dalam PP No. 17/2010 mendefinisikan sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam perkembangannya, pengelolaan pendidikan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dikelola oleh pemerintah provinsi. Sementara kabupaten/kota berwenang dalam

mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. Hal ini selaras dengan jenis layanan dasar yang harus dilakukan Gubernur dan Bupati/Walikota. Berdasarkan pasal 5 dalam PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Sementara pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan pendidikan yang tertera dalam PP 17/2010 tidak diuraikan per jenjang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintahan provinsi (pasal 17) dan kabupaten/kota (pasal 28) bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional yang ada di wilayahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing. Hal ini tidak selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018.

Selain itu pengertian SPM perlu diperbaiki sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Oleh karena itu, SPM harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, sekurang-kurangnya satuan pendidikan tersebut telah terakreditasi C. Termasuk pendirian satuan pendidikan, juga harus memenuhi kualitas layanan satuan pendidikan setara dengan yang berakreditasi C.

b. Penyelenggaraan Pendidikan

Definisi penyelenggaraan pendidikan dalam PP No. 17/2010 adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan (sekolah) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau seleksi masuk pada jenjang berikutnya.

Pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan menengah (SMA), hasil Ujian Nasional (UN) kurang tepat digunakan sebagai syarat utama dalam seleksi masuk pada jenjang pendidikan berikutnya (kecuali masuk SMK) karena dapat menyebabkan adanya favoritisme di persekolahan dan kastanisasi di kalangan peserta didik. Jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka dapat menyebabkan ketidakmerataan akses pendidikan (khususnya bagi peserta didik yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus) maupun mutu sekolah.

Terkait dengan UN, karena selama ini penggunaan UN digunakan sebagai dasar (syarat utama) kriteria seleksi peserta didik baru, sehingga bagi calon peserta didik baru yang memiliki UN “baik” akan cenderung diterima di sekolah-sekolah “baik”. Fenomena ini mengakibatkan lahirnya sekolah favorit dan kastanisasi di persekolahan. Dengan kondisi tersebut, maka diharapkan UN tidak dijadikan sebagai syarat utama dalam menyeleksi calon peserta didik baru. Dalam hal ini, bukan berarti hasil capaian UN tidak dihargai, UN tetap diperlukan dan dapat digunakan untuk:

- a) *Placement test* untuk mengatur / membagi peserta didik sesuai jumlah daya tampung (kelas) dan karakteristik peserta didik (yang heterogen)
- b) Tolok ukur guru dalam menyiapkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kemampuan peserta didik baru (yang heterogen)
- c) Tolok ukur utama dalam proses akreditasi satuan pendidikan (sekolah)
- d) Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam memajukan bidang pendidikan di wilayahnya, yang implikasinya dapat pada pemberian tunjangan daerah (tunjangan kinerja di daerah tersebut)

- e) Penilaian kinerja satuan pendidikan (sekolah) sebagai pertimbangan dinas pendidikan dalam memberikan bantuan pemerintah. Khususnya memprioritaskan sekolah yang mempunyai hasil UN kurang dari rerata nasional.

Konsekuensi dengan tidak menggunakan UN sebagai syarat utama dalam kriteria seleksi masuk peserta didik baru, maka pemerintah/pemda perlu:

- a) Memberdayakan sekolah swasta agar dapat menampung peserta didik baru yang kurang mampu antara lain dengan cara memberikan bantuan beasiswa;
- b) Meningkatkan standar sarana prasarana dan tenaga pendidik (guru) sekolah swasta yang kurang bermutu dengan cara memberikan bantuan pemerintah sesuai standar pendidikan (SPM atau SNP).

Saat ini, sistem zonasi pendidikan baru diterapkan melalui pelaksanaan PPDB, yakni didasarkan pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju dalam zonasinya. Walau demikian, penggunaan hasil UN dalam kebijakan PPDB saat ini tetap digunakan untuk menentukan daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang sama memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam menentukan calon peserta didik tersebut diprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.

Ada hal lain terkait dengan penyelenggaraan penerimaan siswa era zonasi pendidikan yakni diperlukan adanya azas non diskriminatif dan berkeadilan. Mengingat kedua azas ini sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Hal lain adalah penjadwalan PPDB yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun menjelang tahun ajaran baru (Mei-Juni), karena sistem kredit semester tidak diberlakukan lagi pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (kecuali untuk pendidikan tinggi).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berikut ini beberapa simpulan yang terkait dengan sinkronisasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem zonasi pendidikan:

- a) Dinamika pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya perubahan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Sementara perkembangan penyelenggaraan pendidikan telah melahirkan strategi/kebijakan zonasi pendidikan guna mencapai pemerataan pendidikan berkualitas dan berkeadilan;
- b) Dalam mengevaluasi PP No. 17/2010 ditemukan beberapa ketidakselarasan materi muatan dengan perubahan jaman, dinamika masyarakat, perkembangan kebijakan dan produk hukum lainnya, khususnya UN sebagai dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya;
- c) Dalam menganalisis materi muatan sebagai bahan perubahan PP No. 17/2010 terkait zonasi pendidikan, diperlukan adanya penyesuaian/penambahan ketentuan diantaranya dalam: (a) pembagian kewenangan bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota; (b) penerimaan peserta didik, diantaranya UN yang menjadi syarat utama dalam seleksi penerimaan peserta didik; azas/prinsip dan jadwal penerimaan peserta didik.

2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebelumnya dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Perlu penyesuaian peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selaras dengan kebijakan yang berkembang saat ini, yakni sistem zonasi pendidikan guna mewujudkan pemerataan

- akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh tingkat pendidikan setinggi-tingginya;
- b) Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap sinkronisasi PP No. 17/2010 dengan sistem zonasi pendidikan, maka PP No.17/2010 perlu dikaji ulang agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat dilakukan secara terintegrasi antara urusan kesiswaan, pendidik, sarana prasarana pendidikan maupun komponen lainnya;
 - c) Dalam rangka penerapan zonasi pendidikan, perlu dipertimbangkan adanya ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang membutuhkan penjelasan substansi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti pengelolaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2017. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019. Jakarta: Kementerian PPN (Bappenas).
- Budi Raharjo, Sabar, M.Pd. 2018. Evaluasi Implementasi dan Restrukturisasi Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Puslitjakdikbud.
- Kemendikbud. 2019. Bahan Paparan Mendikbud: *Kebijakan Zonasi Pendidikan* pada tanggal 26 Juni 2019.
- Field, Frank. "The Foundation Years: Preventing Poor Children Becoming Poor Adults." The report of the Independent Review on Poverty and Life Chances for Her Majesty's Government, December 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah menengah Kejuruan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2017/2018. Jakarta: Kemendikbud.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2018/2019. Jakarta: Kemendikbud.
- Schweinhart, Lawrence, Jeanne Montie, Zongping Xiang, William S. Barnett, Clive Belfield and Milagros Nores. 2005. Lifetime Effects: The High/ Scope Perry Preschool Study through Age 40. High/Scope Press, Ypsilanti, MI.
- Sobri. 2009. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

AFIRMASI PENDIDIKAN DI WILAYAH BENCANA: STRATEGI LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK KORBAN BENCANA ALAM

Etty Sisdiana, Fransisca Nur Aini, Arie Budi Susanto, Etty Sofyatingrum
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kajian bertujuan menghasilkan rekomendasi berupa strategi pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik korban bencana alam (pdkba) berdasarkan penelaahan tentang peran pemerintah dan pemerintah daerah (pemda), pelaksanaan layanan pendidikan pdkba di satuan pendidikan, faktor pendukung dan kendala. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis data dituliskan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan di provinsi: 1) Bali, mengalami bencana alam dengan peserta didik berpindah kota, 2) NTB mengalami bencana alam dengan peserta didik tidak berpindah ke kota lain, dan 3) Sulawesi Selatan, tidak mengalami bencana tetapi menerima pdkba. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara dan FGD dengan nara sumber meliputi: pimpinan dinas pendidikan provinsi, pimpinan dinas pendidikan kota, LPMP, BPBD, kepala sekolah dan guru. Temuan kajian yakni: 1) ada peran pemerintah dan pemda dalam pemberian layanan pendidikan kepada pdkba, 2) satuan pendidikan memberikan layanan kepada PDKBA sesuai dengan kebutuhan, 3) pendataan pdkba secara lengkap, kepedulian pemda serta keberterimaan pdkba oleh sekolah merupakan faktor pendukung pelaksanaan layanan bagi pdkba secara optimal, dan 4) kurangnya pemahaman tentang kebencanaan serta rehabilitasi sekolah yang tidak utuh menyebabkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah menjadi terhambat. Rekomendasi: 1) pembentukan struktur organisasi kebencanaan di Kemendikbud, 2) rehabilitasi sekolah sesuai kebutuhan, 3) sosialisasi terstruktur tentang kebencanaan, 4) layanan bagi PDKBA secara tersistem.

Kata kunci: bencana, bencana alam, peserta didik korban bencana alam, layanan pendidikan

A. PENDAHULUAN

Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Berbagai jenis dan bentuk pendidikan telah dikembangkan untuk menjamin tidak ada lagi anak di usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Berbagai kondisi, salah satunya bencana membuat anak usia sekolah rentan atas kemungkinan tidak bersekolah.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik yang berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Sepanjang tahun 2018, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia. Bencana alam yang dimaksud, yaitu: 1) longsor di Brebes Jawa Tengah pada 22 Februari 2018, 2) gempa bumi di Lombok pada 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018, 3) gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu Donggala tanggal 28 September 2018, 4) Banjir bandang di Mandailing Natal tanggal 12 Oktober 2018, dan 5) Tsunami di Selat Sunda tanggal 22 Desember 2018 (BBC Indonesia, 2018). Sejumlah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api hingga fenomena likuifaksi telah meluluhlantakkan wilayah terdampak dan menelan banyak korban (BBC Indonesia, 2018). Bencana yang dahsyat ini menyebabkan sejumlah anak usia sekolah kehilangan tempat tinggal dan tempat untuk menuntut ilmu. Data menunjukkan bahwa

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986 di dalam <https://www.bnpb.go.id> unduh tanggal 12 Maret 2019).

Di dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana dikelompokkan menjadi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial (Perka BNPB No. 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan). Dari ketiga jenis bencana ini, bencana alam merupakan jenis bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia dan yang berdampak paling banyak terhadap kerusakan fasilitas pendidikan. Setidaknya terdapat kurang lebih total 250 ribu sekolah atau 75% dari seluruh sekolah di Indonesia yang rawan tertimpa bencana seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung merapi, tsunami, dan tanah longsor (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Kerusakan bangunan sekolah, dapat menyebabkan peserta didik terhambat mengikuti pendidikan di sekolah.

Berkeaan dengan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah korban bencana, di dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimuat bahwa pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dengan demikian, upaya pemberian layanan bagi peserta didik korban bencana alam (pdkba) sudah memiliki payung hukum untuk pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini dapat melaksanakan berbagai program pendidikan layanan khusus bagi PdkBA.

Berkeaan dengan upaya penanganan PdkBA, telah dilakukan langkah pelayanan pemenuhan standar dan acuan bagi guru dan/atau fasilitator dalam menyebarkan pengetahuan dan penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana seperti Fasilitas Sekolah Aman, Manajemen Bencana di Satuan Pendidikan dan Manajemen Bencana di Satuan Pendidikan. Ketiga hal tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat PSMA ke beberapa SMA di NTB yang rawan bencana meskipun masih bersifat sporadis dan penyuluhannya langsung dilakukan ke sekolah tanpa melalui dinas pendidikan setempat. Akibatnya, diseminasi pengetahuan kebencanaan belum tersebar secara masif, bahkan BPBD di NTB belum bergerak aktif dalam menyosialisasikan bencana alam. Kondisi demikian menggambarkan belum adanya koordinasi mengenai prabencana yang sudah diupayakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud.

Peristiwa bencana alam juga berdampak pada rusaknya bangunan sekolah baik rusak ringan, sedang maupun berat, misalnya 2.736 bangunan sekolah yang rusak pada saat gempa Palu (Kompas, 2018). Kerusakan bangunan sekolah akibat bencana alam bisa menyebabkan PdkBA tidak dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Peristiwa bencana alam, selain menghancurkan bangunan, juga menyebabkan banyak guru yang gugur atau menjadi cacat yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru. Keberadaan guru di daerah bencana menuntut kesegeraan untuk mendukung PdkBA mengikuti aktivitas pembelajaran. Selain berdampak kepada guru, bencana alam juga berdampak kepada peserta didik. Dalam hal ini selain banyaknya yang gugur, terdapat pula peserta didik yang menjadi cacat (Dit. Pendidikan Khusus, 2019) atau tidak memiliki orangtua karena gugur. Peserta didik yang tidak cacat pun, masih ada yang mengalami trauma berkepanjangan. Peristiwa bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi yang dirasakan oleh peserta didik dapat membuat mereka mengalami trauma yang mendalam apalagi bagi peserta didik yang kehilangan sanak saudaranya. Trauma pada peserta didik ini

harus segera ditangani untuk menghindarkan mereka dari dampak buruk bagi perkembangannya sampai dewasa. Peserta didik yang demikian, tentunya memerlukan layanan pendidikan secara khusus.

Berbagai kondisi sebagai akibat bencana alam terutama yang berhubungan dengan kesempatan bagi PdKBA untuk mendapatkan layanan pendidikan, harus dicarikan jalan keluar. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemda harus melakukan berbagai upaya agar anak usia sekolah yang terdampak oleh bencana alam tersebut tetap bisa bersekolah. Hal tersebut mengingat bahwa aspek pendidikan belum merupakan salah satu bagian yang menjadi prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimuat di dalam PP. NO 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berkenaan dengan gedung sekolah di wilayah bencana, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membangun atau merehabilitasi bangunan sekolah. Berbagai peristiwa bencana alam yang dahsyat seperti saat gempa tsunami di Aceh dan gempa di Palu dan Donggala menyebabkan tidak dapat dilakukan pembangunan gedung sekolah di tempatnya semula karena wilayah yang rusak berat. Dengan kondisi yang demikian, pembangunan sekolah dapat dilakukan pada lokasi yang berbeda. Di sisi lain, rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dapat dilakukan di lokasi yang sama dengan lokasi awal terutama bagi sekolah yang berada di wilayah yang tidak rusak berat secara geografis. Sementara itu, kekurangan guru akibat bencana alam, dapat diatasi melalui berbagai model pengadaan guru, antara lain program: guru relawan, guru kunjung, guru keahlian ganda, dan/atau guru multigrade. Program ini bisa bersifat temporer sampai lokasi tersebut pulih secara umum dan penyediaan guru sudah dapat teratasi. Sementara itu, PdKBA yang menderita cacat maupun yang mengalami trauma, sedapat mungkin tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada PdKBA yang cacat, yaitu di SLB maupun di sekolah reguler sebagai peserta didik pendidikan inklusif.

Berkenaan dengan berbagai uraian yang sudah disampaikan terdahulu, rumusan masalah kajian ini adalah strategi layanan pendidikan yang bagaimanakah yang dapat memberikan layanan pendidikan kepada PdKBA sesuai dengan kondisi peserta didik?.

Tujuan kajian ini yakni menghasilkan model strategi layanan pendidikan bagi peserta didik korban bencana alam (PdKBA) berdasarkan hasil analisis tentang: 1) Peran pemerintah pusat dan pemda pada program layanan pendidikan bagi PdKBA, 2) Pelaksanaan layanan pendidikan bagi PdKBA, 3) Faktor pendukung layanan pendidikan di wilayah bencana, dan 4) Faktor penghambat layanan pendidikan di wilayah bencana. Sasaran kajian ini yakni pelaksanaan pemberian layanan pendidikan bagi PdKBA. Sedangkan ruang lingkup kajian ini yakni: lingkup pendidikan dasar dan menengah, lingkup wilayah yang mengalami bencana dan lingkup wilayah yang tidak mengalami bencana tetapi menerima PdKBA.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Peristiwa Bencana Alam di Indonesia

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis longsor (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana juga dapat diartikan sebagai peristiwa yang tidak menguntungkan yang waktunya tidak terduga dengan akibat yang sangat merusak ([University of Missouri System](#), diunduh 9 Juni 2019). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Indonesia yang berlokasi di Cincin Api

Pasifik akan terus menghadapi resiko letusan gunung api, gempa bumi, banjir dan tsunami. Akibat pergerakan lempeng ini membuat wilayah Indonesia hampir setiap tahun selalu terkena bencana gempa bumi. Daerah yang rawan gempa bumi tsunami serta rawan letusan gunung api terjadi di sepanjang "Ring of Fire" mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku (Indonesia Investment, 2018). Berbagai kondisi merupakan penyebab Indonesia menjadi negara dengan peristiwa bencana alam yang tinggi yakni: 1) keberadaan 127 gunung api aktif dimana beberapa di antaranya merupakan letusan terkuat di dunia, 2) dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik, 3) memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang menyebabkan rawan terlanda tsunami, dan 4) iklim tropis di Indonesia menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta abrasi dan gelombang ekstrim (Pendidikan Tangguh Bencana, Kemendikbud, 2017).

Berbagai peristiwa bencana selama 20 tahun terakhir menyebabkan Indonesia menjadi sumber berita yang besar di berbagai media di dunia karena banyaknya bencana alam yang mengerikan yang menyebabkan kematian sekaligus menghancurkan wilayah daratan termasuk bangunan sekolah.

2. Dampak Bencana Alam terhadap Layanan Pendidikan di Indonesia

Berbagai jenis bencana alam melanda Indonesia, yakni gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan gelombang pasang atau abrasi. Keseluruhan bencana alam ini berdampak pada gedung sekolah yang berakibat pada terhambatnya PdKBA mengikuti aktivitas pembelajaran. Tabel 1 memberikan informasi tentang berbagai kejadian bencana alam di Indonesia lima tahun terakhir berikut bangunan sekolah yang rusak.

Tabel 1 Jenis Bencana Alam dan Fasilitas Pendidikan yang Rusak

Jenis Bencana Alam		Jumlah Fasilitas Pendidikan yang Rusak (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banjir	224	1.137	1.049	443	368
2	Tanah Longsor	11	31	54	30	29
3	Banjir dan tanah longsor	0	0	0	0	1
4	Gelombang pasang/Abrasi	0	1	2	2	0
5	Puting beliung	46	61	88	138	58
6	Kekeringan	0	0	0	0	0
7	Kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	3	0
8	Gempa bumi	28	254	133	1.066	60
9	Tsunami	0	0	0	3	0
10	Gempa bumi dan tsunami	0	0	0	1.299	0
11	Letusan gunung api	0	0	0	0	0

Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/tabel1b>, unduh 18 Mei 2019

Merujuk pada Tabel 1, dapat diduga bahwa sejumlah anak usia sekolah akan kehilangan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan kalau tidak ada upaya untuk mengatasinya. Diperlukan berbagai upaya agar rusaknya bangunan sekolah tidak menyebabkan PdKBA terhambat kesempatan mendapatkan

layanan pendidikan. Hal tersebut mengingat bahwa aspek pendidikan belum merupakan salah satu bagian yang menjadi prioritas bagi pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimuat di dalam PP. No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Selain bangunan sekolah, pada peristiwa bencana alam, terdapat guru yang meninggal dunia. Pada peristiwa gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terdapat 22 orang tenaga pengajar yang meninggal dunia (Katadata, 2018).

Pada peristiwa bencana alam, adakalanya menyebabkan PdKBA melakukan eksodus bersama keluarga atau lainnya. Eksodus yang dilakukan oleh PdKBA ini antara lain karena peserta didik merasa kurang aman di tempat tinggalnya yang lama yang terkena gempa. Pada peristiwa gempa bumi di Palu Sulawesi Tengah, tercatat sekitar 300 siswa melakukan eksodus ke Makasar (Merdeka.com, 2018). BNPB mencatat sebanyak 8.110 warga melakukan eksodus keluar kota Palu untuk menumpang ke sanak keluarga yang mereka anggap aman. Cacat secara fisik dan/atau mental PdKBA merupakan dampak dari peristiwa bencana alam mereka alami. PdKBA ini memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya, antara lain di satuan pendidikan khusus (SLB) yang tersedia di lokasi baru atau di sekolah regular penyelenggara pendidikan inklusif. PdKBA ini tentunya memerlukan layanan pendidikan yang kondusif sesuai dengan kondisinya.

3. Penelitian Sejenis

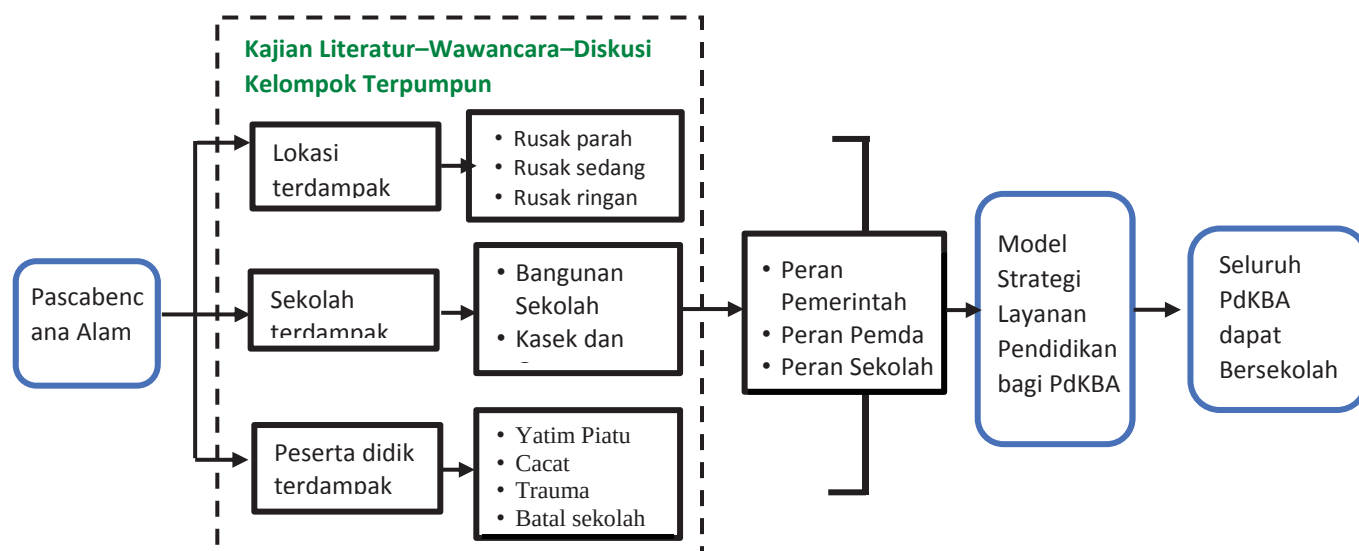
Rentetan bencana alam melanda Indonesia. Bencana alam terbesar dua puluh tahun belakangan adalah tsunami di Nangroe Aceh Darussalam yang menelan ribuan korban jiwa, meluluhlantakkan wilayah, sebagian besar infrastruktur, pemukiman, bangunan di antaranya gedung sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak karena secara fisik dan mental mereka masih dalam pertumbuhan dan masih bergantung kepada orang tua dan/atau orang dewasa lainnya. Anak-anak harus mendapatkan pertolongan agar dapat terus melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Berbagai penelitian atau kajian berkenaan dengan layanan pendidikan pascabencana alam telah dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulil Absor (Penanganan Anak dalam Masa Tanggap Darurat di dalam Jurnal Dakwah, 2011) menemukan bahwa pada bencana tsunami yang melanda NAD, berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dari unsur pemerintah, pemda, lembaga swadaya masyarakat lokal maupun internasional, perusahaan dan organisasi massa dan masyarakat telah ikut mengambil peran dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak-anak korban bencana alam. Penelitian ini juga menemukan bahwa begitu banyaknya bantuan yang mengalir namun kurang terkelola dengan baik menyebabkan tidak meratanya distribusi dan kurang tepatnya jenis bantuan yang pada akhirnya bantuan tersebut menjadi kurang efektif. Selanjutnya Ulil Absor mengungkapkan bahwa dalam situasi pascabencana aktivitas pembelajaran PdKBA secara reguler akan terhenti akibat rusaknya sarana-prasarana pendidikan, prasarana perhubungan, dan terganggunya perekonomian. Dalam kondisi demikian, program pendidikan alternatif, sekolah darurat, program menggambar, dan taman pendidikan Al Qur'an merupakan program yang sering dilaksanakan agar PdKBA terhindar dari ancaman putus sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anif Yulin Kurniati (Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Pasca-Erupsi Merapi, di dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.9, No.2 Juli 2014) menemukan bahwa erupsi Merapi yang terjadi pada bulan Oktober 2010 mengakibatkan aktivitas pembelajaran berhenti karena semua siswa yang rumahnya terletak di wilayah rawan bencana lahar dingin, mengungsi. Dengan kondisi yang demikian, menurut penelitian ini, siswa melaksanakan pembelajaran dengan fasilitas seadanya di pengungsian. Waktu pembelajaran kurang efektif karena di awal erupsi gunung merapi, sekolah sering

memulangkan siswa lebih awal dan ketika erupsi, banyak material gunung yang masuk ke dalam kelas sehingga waktu pembelajaran digunakan untuk membersihkan kelas. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa erupsi gunung Merapi pada 2010 mengakibatkan sebagian besar siswa trauma, terutama mereka yang tinggal di Kabupaten Magelang yang rawan bencana. Sebagian besar siswa mengalami trauma karena rumah mereka terendam pasir bahkan sebagian dari mereka kehilangan rumah. Di lokasi yang rawan terdampak oleh erupsi gunung Merapi, sekolah dipindah ke lokasi yang baru agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

4. Kerangka Berpikir



C. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik wawancara, diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan studi literatur. Sumber data dan informasi pada kajian ini mencakup data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan teknik wawancara yang ditujukan kepada unsur pimpinan direktorat terkait pada Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP, dan BPBD serta DKT yang melibatkan unsur sekolah sasaran yaitu SMPN 1 Denpasar, SMPN 3 Denpasar, SMAN 7 Denpasar, SDN 5 Mataram, SMPN 6 Mataram, SMAN 1 Gunung Sari Lombok Barat, SMAN 1 Pemenang Lombok Utara, SMKN 1 Pemenang Lombok Utara, SDN Inpres Tamalanrea Makasar, SMPN 6 Makasar, dan SMAN5 Makasar. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur termasuk data sekunder yang berhubungan dengan kajian ini.

Pengumpulan data dilakukan di tiga kabupaten/kota. Lokasi pengumpulan data ditetapkan berdasarkan kabupaten/kota yang pernah terkena bencana alam yang menyebabkan sejumlah sekolah rusak sedang dan berat dan kabupaten/kota yang tidak mengalami bencana alam tetapi menerima PdKBA. Berdasarkan ketentuan ini, lokasi pengumpulan data dilakukan di 1) Kota Denpasar, sebagai wilayah yang menerima peserta didik korban bencana gunung Agung meletus; 2) Kota Mataram, sebagai wilayah yang mengalami bencana alam gempa bumi; dan 3) Kota Makasar, sebagai wilayah yang menerima peserta didik korban bencana gempa bumi di Palu. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk diskripsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara diskripsi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah

Sebagaimana sudah disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah dan variasi yang besar. Peristiwa bencana alam juga berdampak sangat besar yang sampai berakibat pada hancurnya wilayah dan rusaknya bangunan sekolah. Beberapa peristiwa bencana alam menyebabkan PdkBA rawan putus sekolah akibat kondisi sekolah, kondisi siswa, kondisi sosial-ekonomi keluarga, maupun kondisi transportasinya. Pada kondisi pascabencana, sudah selayaknya pemerintah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung atas keberlangsungan layanan pendidikan bagi PdkBA. Pentingnya peran pemerintah pada pembangunan fisik salah satunya adalah sekolah, dimuat di dalam *Post-disaster community infrastructure rehabilitation and (re)construction guidelines* (International Federation Red Cross and Red Cross Societies, Geneva, 2012) memuat bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana harus dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah melalui kementerian terkait untuk berperan dan bertanggung jawab. Demikian pula berkenaan dengan peran pemerintah terkait dengan peristiwa bencana alam, Elizabeth Ferris di dalam *Natural Disasters, Human Rights, and the Role of National Human Rights Institutions* (2008), menyatakan antara lain bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana alam memiliki hak untuk meminta dan menerima perlindungan dan bantuan dari pemerintah.

Berkenaan dengan peran pemerintah pada pelaksanaan pemberian layanan pendidikan kepada PdkBA, pada DKT unsur dari pemerintah maupun pemda ditemukan bahwa pemerintah menunjukkan perannya pada setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Peran pemerintah tersebut berbentuk kebijakan, panduan, tindakan atau bantuan langsung maupun tindakan atau bantuan tidak langsung kepada daerah yang terkena bencana. Peran pemerintah dalam bentuk kebijakan yakni: 1) pembentukan Tim Satuan Istimewa Siaga Pendidikan melalui SK Dirjendikdasmen Tahun 2017, 2) pembentukan Sekretariat Nasional Penanggulangan Bencana Kemendikbud (Kep. Mendikbud RI NO. 234/P/2018), 3) pemberian akses seluas-luasnya kepada PDKBA untuk bersekolah di mana pun tanpa persyaratan ketat (Surat Edaran Mendikbud No 8 tahun 2018 tentang Penerimaan PdkBA).

Sementara itu, peran pemerintah dalam bentuk panduan diwujudkan pada: 1) Buku Pendidikan Tangguh Bencana (Kemendikbud, 2017) dan 2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat (Kemendikbud, 2018).

Menurut nara sumber, bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah yang terkena bencana terutama pada sekolah-sekolah terdampak bencana adalah tenda yang dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat ruang belajar sementara. Berkenaan dengan pemenuhan ruang belajar, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sekolah yang rusak sedang dan rusak berat serta merehabilitasi sekolah yang rusak ringan.

Selain bantuan terhadap penyediaan ruang kelas, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk program pengurangan trauma psikososial PdkBA. Pada program ini, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus memberikan pelatihan tentang dukungan psikososial kepada guru-guru di wilayah bencana. Tujuan pelatihan ini adalah agar guru-guru dapat memberikan dukungan psikososial kepada PdkBA pascabencana dan guru dapat melaksanakan pembelajaran dalam situasi darurat. Aktivitas untuk mengurangi trauma pascabencana alam ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui LPMP yang bekerja sama dengan program inovatif, seperti di Provinsi NTB.

Meskipun layanan pendidikan diperlukan bagi PdkBA, tetapi menurut narasumber dari Dit. Pendidikan Khusus, layanan pendidikan akan dilaksanakan setelah layanan dasar PdkBA dapat dipenuhi. Layanan

dasar dalam hal ini mencakup: makan, minum, dan tempat tinggal. Salah satu alasan bahwa layanan pendidikan bukan hal utama yang harus ditangani pascabencana adalah karena aktivitas pendidikan tetap dapat berjalan meskipun tidak dilaksanakan di ruang kelas. Demikian pula, kekurangan GTK dapat diatasi melalui relawan yang ‘terpilih’ meskipun bersifat temporer.

Pemerintah berperan dalam bentuk pemberian tunjangan khusus bagi guru yang terdampak oleh bencana alam di NTB dan Sulawesi Tengah. Guru yang menerima tunjangan khusus adalah guru yang tempat tinggalnya rusak atau hancur. Tunjangan ini diberikan selama enam bulan dengan besaran 1–2 juta setiap bulannya.

Peran pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan tidak langsung merupakan bantuan yang dampaknya tidak langsung dirasakan oleh komponen sekolah. Bantuan dimaksud misalnya, 1) pendataan sekolah, guru, pendidik dan peserta didik yang terdampak bencana; 2) pendirian posko di lokasi bencana; dan 3) kerjasama Kemendikbud dengan berbagai organisasi dan perguruan tinggi guna mengatasi permasalahan pascabencana alam.

2. Peran Pemerintah Daerah

Kualitas pemda antara lain dapat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pemda memberikan respon atas suatu peristiwa, salah satunya adalah bencana alam (Krisna Puji Rahmawati, *Public Service Delivery in a Conflict and Natural Disaster Region*, *International Journal of Administrative Science & Organization*, January 2018). Peristiwa bencana alam antara lain yang terjadi di Palu, Lombok, dan Bali membutuhkan reaksi cepat dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, gubernur maupun walikota/bupati yang memiliki kekuatan (*power*) dapat melakukan langkah-langkah inovatif dalam upaya menyelamatkan penduduk dari kehancuran akibat bencana alam. Respons dimaksud bisa dalam bentuk kebijakan maupun aksi. Berbagai bantuan yang datangnya dari luar wilayah bencana dapat berjalan secara efektif apabila dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota (Sopho Andghuladze dan Sandro Stazhadze, *Risk Management during Natural Disasters and Inclusive Education Save the children*, Georgia Country Office, tanpa tahun). Dalam hal ini, gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat daerah kabupaten/kota merupakan penguasa di daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat bencana (Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).

Dalam kaitannya dengan pendidikan, dibutuhkan peran pemda agar PdKBA dapat kembali bersekolah secepat mungkin dan kembali dapat melakukan aktivitas dengan nyaman dan rasa aman. Hal tersebut mengingat bahwa membawa PdKBA kembali ke sekolah sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka pasca-bencana alam (Billy Briggs, *Safe School: getting children back into education after disaster strikes*, <https://theirworld.org/>, 2018).

Berkenaan dengan peran pemda pada pemberian layanan bagi PdKBA, seluruh nara sumber yang diwawancarai maupun peserta DKT menyatakan bahwa peran umum yang dilakukan oleh pemda adalah memberikan kesempatan kepada PdKBA untuk bersekolah sesuai pilihannya tanpa adanya persyaratan administrasi. Kemudahan penerimaan PdKBA ini menurut narasumber karena memiliki dasar hukum yang kuat yakni Surat Edaran Mendikbud No. 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Korban Bencana Alam. Selain itu, dikatakan oleh narasumber bahwa pemda membagikan tenda darurat terutama di lokasi yang terkena bencana dan memberikan layanan *trauma healing* kepada PdKBA. Dalam hal pemberian layanan *trauma healing* ini, dikatakan oleh peserta DKT dan narasumber yang diwawancarai bahwa pemda mengadakan kerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga relawannya. Kerja sama yang dilakukan pemda yang terdampak bencana alam, bukan hanya dengan

perguruan tinggi saja. Salah satu narasumber menyatakan bahwa pemda juga menjalin kerjasama dengan LSM, pihak swasta dan lainnya seperti Perkumpulan Motor Gede (MOGE) untuk menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan.

Peran yang terlihat menonjol karena dinyatakan dalam bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan adalah peran provinsi Bali, yaitu: 1) SE gubernur Bali mewajibkan seluruh satuan pendidikan di Bali menerima peserta didik korban letusan Gunung Agung; 2) Penetapan kebijakan *zero death* pada peristiwa meletusnya Gunung Agung; 3) Pendampingan pelaksanaan pemberian layanan pendidikan; 4) Penyediaan alat transportasi bagi peserta didik korban gunung Agung yang besekolah jauh; dan 5) Pembentukan Pokja yang melibatkan seluruh UPT Prov Bali. Pemda lainnya, yakni NTB, menyediakan kelas darurat dan membangun ruang kelas sementara menggunakan dana APBD.

Berbagai bencana alam bisa terjadi secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan situasi yang penuh kekacauan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemda dalam mempersiapkan peraturan yang merupakan langkah antisipasi untuk menghindari situasi kacau pada peristiwa bencana alam. Beberapa peraturan daerah di antaranya: 1) Pergub DI Yogyakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Perda Kabupaten Sikka No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; 3) Peraturan Bupati Rembang No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 4) Peraturan Bupati Pidie Jaya No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.

3. Pelaksanaan Pemberian Layanan Pendidikan bagi PdKBA

Pemberian layanan pendidikan bagi PdKBA dilaksanakan di wilayah yang terdampak bencana dan di wilayah yang tidak terdampak bencana.

Mataram adalah lokasi yang terdampak bencana. Di sini terdapat sekolah dengan kondisi rusak berat dan rusak sedang sehingga tidak digunakan pada pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di sini dilaksanakan di tenda darurat, halaman sekolah, dan ruang kelas belajar sementara (RKBS). Pembelajaran di tenda darurat tidak dapat berlangsung lama karena tenda mudah rusak. Pembelajaran di halaman sekolah tidak dapat sepanjang hari terutama pada cuaca yang kurang baik. Pembelajaran di RKBS relatif lebih lama dan pada observasi di lokasi terlihat masih ada RKBS yang masih digunakan, karena sekolah dalam keadaan rusak berat dan belum dibangun kembali. Pembelajaran bagi siswa SMK mengalami kendala karena peralatan untuk mata pelajaran produktif, misalnya pada program keahlian memasak rusak berat sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, sesuai disampaikan oleh peserta DKT, UNDP akan membangun kembali SMK secara lengkap. Pemerintah melalui LPMP melakukan berbagai aktivitas pendidikan bagi PdKBA secara temporer. Guru yang mengajar di sekolah yang terdampak bencana adalah guru sekolah asal. Aktivitas yang selalu dilakukan kepada PdKBA adalah *trauma healing* setiap hari. Aktivitas trauma healing ini dinyatakan oleh peserta DKT kurang bermakna bagi pdkba bahkan cenderung membuat PdKBA bosan karena tidak bervariasi.

Denpasar dan Makassar adalah wilayah yang tidak terdampak bencana tetapi menerima PdKBA. Keterlaksanaan layanan pendidikan bagi PdKBA di dua kota ini didukung oleh kebijakan walikota tentang keharusan sekolah menerima PdKBA tanpa persyaratan. Di dua kota ini seluruh sekolah yang menerima PdKBA melakukan pendataan atas masing-masing siswa menggunakan antara lain DAPODIK sebagai sumber informasi. Di dua lokasi ini, PdKBA diberi kebebasan memilih sekolah termasuk kebebasan memilih bersifat tetap atau sementara sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Pada pelaksanaannya, tidak dijumpai kendala dalam hal pendanaan. Di dua lokasi ini, seluruh PdKBA mendapatkan layanan psikososial oleh guru atau relawan yang datang ke sekolah. Salah satu sekolah di Makassar, melalui

program Pusat Informasi dan Konseling Remaja, menolong menghilangkan trauma PdKBA. Baik di Denpasar maupun di Makasar, ada sekolah yang memberikan layanan pendidikan inklusif. Di Denpasar, pemberian layanan pendidikan inklusif terutama karena adanya PdKBA yang berasal dari sekolah yang menggunakan K-2006. Di Makasar, layanan pendidikan inklusif diberikan kepada seluruh PdKBA karena umumnya mereka mengalami trauma pascabencana di Palu.

4. Faktor Pendukung Pemberian Layanan Pendidikan bagi PdKBA

Pemberian layanan pendidikan kepada PdKBA dapat berjalan secara efektif karena adanya kondisi yang mendukung. Berdasarkan hasil wawancara dan DKT diperoleh informasi tentang berbagai faktor yang pendukung tersebut.

Faktor dominan yang mendukung terlaksananya layanan pendidikan bagi PdKBA adalah adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan seluruh satuan pendidikan untuk menerima PdKBA dalam kondisi apa pun tanpa persyaratan administrasi dan kepedulian pemda terhadap keberlangsungan pendidikan warganya. Kebebasan memilih sekolah yang dituju oleh PdKBA ini juga bersamaan dengan kebebasan bagi PdKBA untuk kembali ke sekolah asal terutama apabila suasana sudah 'normal' kembali. Pada wawancara dengan unsur pimpinan dinas pendidikan diperoleh informasi bahwa saat terjadi bencana, aparat pemda melakukan pendataan dan mencari informasi tentang sekolah-sekolah yang dapat menjadi tujuan kepindahan PdKBA meskipun sudah ada kebebasan bagi PdKBA untuk menentukan sekolah masing-masing. Pemda melalui dinas pendidikan yang wilayahnya tidak terkena bencana alam secara cepat meminta sekolah untuk mendata PdKBA yang bersekolah di sana. Data-data ini selanjutnya dikirim ke dinas pendidikan asal PdKBA untuk dilakukan pencatatan di sana. Selain itu, pemda bekerjasama dengan kepala sekolah atau pendidik di sekolah melakukan pendataan seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah, tenaga tata usaha, dan guru. Kemudahan pendataan warga sekolah juga dipermudah dengan adanya Dapodik yang dapat diakses secara *on-line*. Faktor pendukung lainnya yang juga disampaikan oleh narasumber, yakni tunjangan khusus bagi guru yang terkena musibah bencana alam, kerjasama MKKS seluruh Indonesia, dan rasa empati dari masyarakat yang tidak terdampak bencana alam kepada PdKBA dan keluarganya.

Terdapat faktor pendukung terlaksananya layanan pendidikan bagi PdKBA yang secara spesifik hanya dinyatakan oleh narasumber berdasarkan lokasi sasaran pengumpulan data. Peserta DKT dari Mataram misalnya, menyatakan bahwa faktor pendukung tersebut adalah kemampuan kepala sekolah menggalang dana dan mencari bantuan dan adanya kerjasama yang baik antar-MKKS di seluruh Indonesia. Peserta DKT dari Denpasar menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung yang pertama adalah adanya kearifan lokal yaitu: 1) 'Trihita Karana' (tiga hubungan), 2) 'Nyame Selam' bahwa umat Muslim adalah saudara, 3) Kepercayaan atas hukum karma. Kearifan lokal ini yang menggerakkan seluruh warga untuk bahu membahu membantu korban termasuk PdKBA. Tidak hanya itu, perasaan sebagai sesama saudara membuat siswa yang tidak terdampak bencana dapat merasakan kesusahan temannya yang ikut bersekolah bersama mereka. Faktor yang kedua adalah kondisi geografis Pulau Bali yang memudahkan melakukan pendataan. Sedangkan faktor lainnya adalah kepedulian Pemda Bali, yang menurut peserta DKT diwujudkan dalam bentuk kebijakan *zero death*. Peserta DKT dari Makasar menyatakan bahwa faktor pendukung yakni: 1) Adanya program SRA (Sekolah Ramah Anak) menyebabkan siswa terbiasa berhubungan dan berkomunikasi dengan siswa lain yang menyebabkan PdKBA nyaman; dan 2) Pemberian layanan pendidikan inklusif kepada PdKBA membuat siswa nyaman.

5. Kendala Pemberian Layanan Pendidikan bagi PdKBA

Pemberian layanan bagi PdKBA dapat terlaksana karena adanya berbagai faktor pendukung. Meskipun demikian, berbagai kendala bisa saja terjadi sehingga pemberian layanan pendidikan ini menjadi terhambat. Informasi tentang kendala pelaksanaan layanan pendidikan bagi PdKBA disampaikan melalui wawancara dan DKT.

Kendala utama yang dapat menyebabkan terhambatnya aktivitas pembelajaran adalah rehabilitasi sekolah yang belum merata dan belum ditujukan pada seluruh fasilitas sekolah yang rusak. Dalam hal ini kebutuhan rehabilitasi SMK dan SMA seharusnya berbeda. Penyamaan komponen sekolah yang dibangun kembali untuk SMA dan SMK menyebabkan tarhambatnya aktivitas pembelajaran kejuruan di SMK.

Kendala lainnya adalah bahwa tunjangan khusus tidak diterima oleh seluruh guru terdampak bencana. Tidak meratanya pemberian tunjangan khusus kepada guru ini menyebabkan rasa iri bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus sehingga berpengaruh pada kinerjanya sebagai guru di sekolah. Menurut hasil wawancara dengan pimpinan dinas pendidikan, guru yang mendapatkan tunjangan khusus hanya guru yang mengajar di Lombok Barat dan Lombok Timur yang lokasinya paling terdampak oleh bencana alam tanpa mempertimbangkan bahwa guru yang terdampak gempa dapat bertempat tinggal di mana pun. Oleh karenanya diperlukan pendataan yang akurat dan menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.

Trauma healing hanya diberikan hanya kepada siswa dan tidak kepada guru, meskipun beberapa guru mengalami trauma juga. Kondisi guru yang demikian dapat menyebabkan kurang optimalnya pembelajaran yang dilakukan guru. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah guru tidak memiliki pengetahuan tentang kegempaan dan cara memperkecil resikonya. Kondisi ini menyebabkan guru dan siswa mengalami trauma berkepanjangan. Guru yang tidak memiliki pengetahuan tentang kegempaan menyebabkan guru mengalami hambatan ketika harus memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi PdKBA.

Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk tenda sementara/tenda darurat terkadang kurang mendukung keterlaksanaan layanan pendidikan bagi PdKBA, karena beberapa tenda darurat mudah rusak dan kurang ventilasi sehingga terasa pengap dan panas.

Peristiwa bencana alam adakalanya mendorong orangtua siswa dan keluarganya pindah ke tempat yang relatif lebih aman. Anak yang ikut orangtua melakukan eksodus, juga harus bersekolah di tempat barunya. Namun berpindahnya anak secara tidak berbarengan menyebabkan sekolah mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan. Kondisi ini bisa memperlambat PdKBA mengikuti pelajaran ke dalam kelas sesuai dengan waktunya.

Kondisi lain yang merupakan kendala bagi kelancaran layanan pendidikan bagi PdKBA, yakni belum tersedianya berbagai fasilitas yang seharusnya ada di setiap sekolah guna memperkecil jatuhnya korban (warga sekolah). Fasilitas dimaksud meliputi desain arsitek bangunan sekolah yang dapat mengurangi dampak bencana, perawatan gedung sekolah, pelatihan kebencanaan secara teratur, supervisi terhadap kekuatan konstruksi bangunan sekolah, perencanaan keberlanjutan pendidikan bagi PdKBA, dan integrasi serta infusi kurikulum formal saat terjadi bencana.

E. PENUTUP

Layanan pendidikan bagi PdKBA merupakan suatu keharusan demi mendukung pencapaian pemerataan kesempatan bagi seluruh anak usia sekolah dalam memperoleh pendidikan. Namun dalam proses pemberian layanan pendidikan tersebut masih dijumpai kendala. Berikut saran kami untuk pemberian layanan pendidikan bagi PdKBA agar berjalan tanpa hambatan.

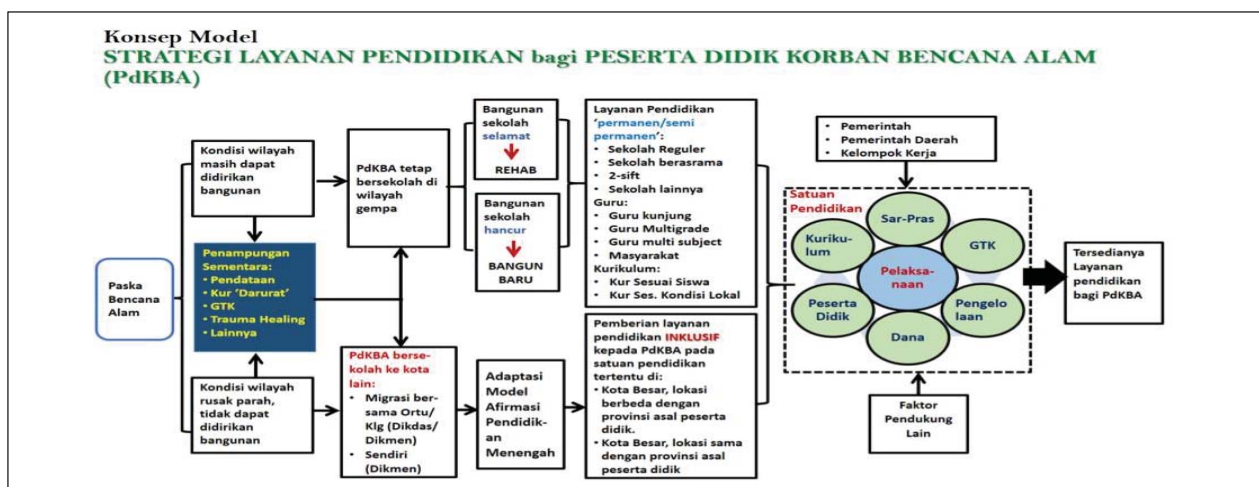
Pemerintah melalui kemendikbud sebaiknya menyiapkan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, mencakup 1) sosialisasi tentang kebencanaan dan mitigasi bencana, termasuk di daerah yang bebas bencana alam; 2) menyiapkan berbagai model sekolah, penyediaan guru, kurikulum yang berpihak kepada PdkBA dengan segala implikasinya; 3) membangun sistem yang terstruktur tentang layanan pendidikan bagi PdkBA; 4) berkoordinasi dengan berbagai institusi untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh PdkBA baik di lokasi yang terkena maupun yang tidak terkena bencana alam.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan sebaiknya 1) mendata secara lebih rinci seluruh sekolah yang terdampak oleh bencana alam; 2) mengelola berbagai bantuan dan mendistribusikan secara proposional ke sekolah terdampak; 3) mengatur rehabilitasi sekolah sampai pada penyediaan kembali sarana pembelajaran secara proporsional; serta 4) membangun sistem IT khusus untuk menerima PdkBA yang mendaftarkan diri dalam waktu yang berbeda-beda.

Sekolah sebaiknya melakukan langkah-langkah: 1) mengkaji aktivitas *trauma healing* bagi PdkBA untuk menghindari kebosanan; 2) memberdayakan peserta didik yang tidak terdampak bencana sebagai tutor teman sebaya bagi PdkBA; 3) menyiapkan pengadiministrasian secara fleksibel bagi PdkBA yang mendaftarkan diri di sekolah.

Secara umum saran yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan pemberian layanan pendidikan bagi PdkBA adalah terciptanya sistem yang menyeluruh dan saling bersinergi antar-institusi. Sistem dimaksud disajikan dalam bentuk diagram berikut.

Diagram 1. Konsep Model Strategi Pemberian Layanan Pendidikan bagi PdkBA



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/03/12242081/mendikbud-2736-gedung-sekolah-rusak-akibat-gempa-palu>.

Jurnal Dakwah, Vol.XI, No. 1 Tahun 2011

Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Paska Erupsi Merapi, di dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.9, No.2 Juli 2014.

<https://www.brookings.edu/on-the-record/natural-disasters-human-rights-and-the-role-of-national-human-rights-institutions/>

Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Bupati Sikka No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Rembang No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Pidie Jaya No.11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Billy Briggs, Safe School: getting children back into education after disaster strikes, <https://theirworld.org/>, 2018, diunduh 8 Mei 2019.

Krisna Puji Rahmawati, Public Service Delivery in a Conflict and Natural Disaster Region, International Journal of Administrative Science & Organization, January 2018

Kemendikbud 2017, Buku Pendidikan Tangguh Bencana

Kemendikbud 2018, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Situasi Darurat

Keputusan Mendikbud RI No. 234/P/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Penanggulangan Bencana Kemendikbud

Surat Edaran Mendikbud No. 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Korban Bencana Alam.

Anonym, 2019. *What is a Disaster?* University of Missouri System <https://www.umsystem.edu/ums/fa/management/records/disaster-guide-disaster>, diunduh 9 Juni 2019.

Editor, 2018. *Deretan bencana alam mematikan yang menerjang Indonesia sepanjang 2018*, BBC News Indonesia Online, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46691586>, unduh tanggal 15 Maret 2019).

Reily, M., 2018. *422 Sekolah Rusak Akibat Bencana Gempa dan Tsunami di Sulteng*, Katadata.co.id, diunduh dari <https://katadata.co.id/berita/2018/10/10/422-sekolah-rusak-akibat-bencana-gempa-dan-tsunami-di-sulteng>, pada tanggal 14 Maret 2019.

Editor, 2018. *Bencana Alam di Indonesia*, Indonesia Investment. Diunduh dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/bencana-alam>, pada tanggal 22 April 2019

Editor, 2018, *300 Pelajar korban gempa Palu di Makassar mulai bersekolah*, Merdeka.com, 9 Oktober 2018. Diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/300-pelajar-korban-gempa-palu-di-makassar-mulai-bersekolah.html>, pada tanggal 8 Mei 2019.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 2 Panel No:
Ruang	: Halimun
Waktu	: 10.15 – 12.30 WIB
Judul Penelitian	: 1. Kajian Evaluasi Kebijakan Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan, 2. Kajian Sinkronisasi Peraturan Terkait Sistem Zonasi Pendidikan, 3. Afirmasi Pendidikan di Wilayah Bencana
Penyaji	: 1. Sabar Budi Rahardjo, 2. Etty Sisdiana 3. Yufridawati,
Pembahas	: Nandang Kosasih Ananda, Ph.D.
Moderator	: Dr. Parwanto, MM.
Notulis	: Untung Tri Rahmadi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Sabar Budi Rahardjo UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5; “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, namun usaha tersebut masih belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan. Diantara kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan akses dan pemerataan mutu, pemerintah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejak TA 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) penerapan zonasi pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 2) kondisi ketersediaan guru dalam implementasi zonasi pendidikan, 3) kondisi ketersediaan sarana prasarana yang tersedia (ruang kelas rombel, perpustakaan, dan laboratorium), 4) dampak implementasi zonasi pendidikan. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi tata cara sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di peroleh dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, LPMP, pengawas sekolah satuan pendidikan dan perwakilan orang tua murid baru. Lokasi yang menjadi sampel penelitian ini ada lima (5) provinsi/kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Bandung, Kota Serang dan Kota Pontianak) yang merupakan sampel lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah daerah yang telah melaksanakan kebijakan zonasi pendidikan selama tiga tahun ini melalui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Adapun sekolah yang dipilih sebagai unit analisis di setiap sampel lokasi didasarkan pada pertimbangan 1) kategori luas zona dan radius yaitu kategori rendah dan sedang (PDSP; 2018).

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Hasil dan Pembahasan Penerapan Zonasi Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Pada tingkat implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi pemerintah daerah pada prinsipnya telah melaksanakan kebijakan tersebut, namun masih bervariasi dalam menyikapi kebijakan dari pusat. Dalam cara penerimaan kebijakan tersebut dapat dikategorikan menerima penuh kebijakan dan ada daerah yang belum menerima secara penuh kebijakan tersebut. Ketersediaan dan Ketercukupan Guru <i>Pertama</i> guru SMP di lima kota terdapat status guru honor antara 6,7% sampai dengan 37,8%. Kota yang paling rendah keberadaan guru honor pada Kota Surakarta dan Kota yang paling tinggi keberadaan guru honor di Kota Serang. Guru SMA di lima kota terdapat status guru honor antara 8, 6% sampai dengan 31%. Kota yang paling rendah keberadaan guru honor pada Kota Surakarta dan Kota yang paling tinggi keberadaan guru honor di Kota Serang. <i>Kedua</i>, keberadaan guru layak mengajar rata-rata dari sampel memiliki angka di sekitar 94,7% sampai dengan 99%, jadi masih ada sekitar 5,3% guru yang tidak layak. <i>Ketiga</i>, ketersediaan guru yang memiliki sertifikat berdasarkan data di SMA Negeri terdapat antara 61% sampai dengan 89%. Kota yang memiliki guru tersertifikasi yaitu Kota Serang dan Kota paling tinggi yang memiliki guru tersertifikasi yaitu Kota Surakarta. <i>Keempat</i>, rasio guru dan siswa secara keseluruhan, rasio guru siswa SMA antara 12 s. d 16, Kota Surakarta paling rendah rasio guru siswa dan Kota Surabaya paling tinggi. Tidak terpenuhinya ketentuan minimum (20) rasio guru-siswa, sepintas mengindikasikan adanya kelebihan guru Ketersediaan dan Kondisi Prasarana Sekolah <i>Pertama</i>, Jumlah rombel yang melebihi standar sebaiknya dilarang/dibatasi oleh dinas pendidikan provinsi, agar sekolah dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik oleh kepala sekolah. Sementara itu, di daerah yang sama masih terdapat sekolah yang memiliki rombel yang sedikit, dengan demikian seluruh anak usia SMA dapat ditampung di sekolah lain. <i>Kedua</i>, Jumlah siswa dalam satu rombel yang melebihi standar sebaiknya juga dilarang/dibatasi oleh dinas pendidikan provinsi, karena pada dasarnya pembatasan jumlah siswa per rombel dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antarsiswa dapat berlangsung dengan baik. <i>Ketiga</i>, Sanitasi khususnya WC (jamban) untuk siswa yang masih kurang harus segera diupayakan untuk dilengkapi. Jumlah minimal jamban yang harus disediakan sekolah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar, dimaksudkan untuk memfasilitasi kesehatan siswa. Kesehatan fisik siswa sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kompetensi lulusan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. <i>Keempat</i>, Meskipun secara umum SMA telah memiliki perpustakaan, namun perlu dilakukan upaya perbaikan perpustakaan, yakni perbaikan ringan, perbaikan sedang, dan perbaikan berat, sesuai tingkat kerusakan masing-masing perpustakaan. Di samping itu, perlu dipastikan bahwa perpustakaan memiliki koleksi buku yang lengkap serta dikelola dengan baik untuk mendukung pembelajaran siswa. <i>Kelima</i>, Kekurangan laboratorium IPA perlu segera dipenuhi, agar setiap hal yang dipelajari siswa secara teoretis dan memerlukan praktik dan percobaan dapat dilakukan di laboratorium IPA sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perlu

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		juga dipastikan bahwa jumlah laboratorium IPA di setiap sekolah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut. Dampak kebijakan PPDB berbasis zonasi Yakni tempat tinggal peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah yang berdampak pada kesiapan belajar peserta didik, kemudian selain dapat mengurangi stigma sekolah favorit, juga menjadi tantangan bagi guru karena harus siap mengajar peserta didik baru yang latar belakang secara sosial, ekonomi, dan kemampuan akademik yang beragam 2. Etty Sisdiana Berbagai jenis dan bentuk pendidikan telah dikembangkan untuk menjamin tidak ada lagi anak di usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Berbagai kondisi, salah satunya bencana membuat anak usia sekolah rentan atas kemungkinan tidak bersekolah. Kerusakan bangunan sekolah dan berbagai dampak bencana lain, dapat menyebabkan peserta didik terhambat mengikuti pendidikan di sekolah. Sebagai payung hukum, Pasal 32 ayat (2) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimuat bahwa pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Tujuan kajian ini yakni menghasilkan model strategi layanan pendidikan bagi peserta didik korban bencana alam (pdkba) berdasarkan hasil analisis tentang: 1) Peran pemerintah pusat dan pemda pada program layanan pendidikan bagi PdkBA, 2) Pelaksanaan layanan pendidikan bagi PdkBA, 3) Faktor pendukung layanan pendidikan di wilayah bencana, dan 4) Faktor penghambat layanan pendidikan di wilayah bencana. Sasaran kajian ini yakni pelaksanaan pemberian layanan pendidikan bagi PdkBA. Sedangkan ruang lingkup kajian ini yakni: lingkup pendidikan dasar dan menengah, lingkup wilayah yang mengalami bencana dan lingkup wilayah yang tidak mengalami bencana tetapi menerima PdkBA. Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik wawancara, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan studi literatur. Sumber data dan informasi pada kajian ini mencakup data primer dan data sekunder. Peran Pemerintah Pemerintah menunjukkan perannya pada setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Peran pemerintah tersebut berbentuk kebijakan, panduan, tindakan atau bantuan langsung maupun tindakan atau bantuan tidak langsung kepada daerah yang terkena bencana. Peran pemerintah dalam bentuk kebijakan yakni: 1) pembentukan Tim Satuan Istimewa Siaga Pendidikan melalui SK Dirjendikdasmen tahun 2017, 2) pembentukan Sekretariat Nasional Penanggulangan Bencana Kemendikbud (Kep. Mendikbud RI NO. 234/P/2018), 3) pemberian akses seluas-luasnya kepada pdkba untuk bersekolah dimanapun tanpa persyaratan ketat (Surat Edaran Mendikbud no 8 tahun 2018 tentang Penerimaan PdkBA). Peran pemerintah dalam bentuk panduan diwujudkan pada: 1) Buku Pendidikan Tangguh Bencana (Kemendikbud, 2017) dan 2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat (Kemendikbud, 2018).

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah yang terkena bencana terutama pada sekolah-sekolah terdampak bencana adalah tenda yang dimanfaatkan oleh sekolah sebagai tempat ruang belajar sementara. Berkenaan dengan pemenuhan ruang belajar, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sekolah yang rusak sedang dan rusak berat serta merehabilitasi sekolah yang rusak ringan. Selain bantuan terhadap penyediaan ruang kelas, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk program pengurangan trauma psiko-sosial pdkba. Peran Pemerintah Daerah Peran umum yang dilakukan oleh pemda adalah memberikan kesempatan kepada pdkba untuk bersekolah sesuai pilihannya tanpa adanya persyaratan administrasi. Kemudahan penerimaan pdkba ini menurut nara sumber karena memiliki dasar hukum yang kuat yakni Surat Edaran Mendikbud No. 8 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Korban Bencana Alam. Selain itu, dikatakan oleh nara sumber bahwa pemda membagikan tenda darurat terutama di lokasi yang terkena bencana dan memberikan layanan trauma healing kepada pdkba. 3. Yufridawati Dalam mencapai tujuannya, kebijakan zonasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Salah satu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010. Mengingat dalam PP ini terdapat beberapa pasal yang kurang selaras dengan kebijakan zonasi, maka tujuan kajian ini adalah mengevaluasi dan menganalisis materi muatan PP No.17/2010 yang terkait dengan sistem zonasi sebagai bahan masukan perubahan PP. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Kajian ini melibatkan stakeholder pendidikan sesuai substansi PP sebagai sumber data. Kajian didukung data sekunder yang diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian ini adalah: (i) Dinamika pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya perubahan pembagian kewenangan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sementara perkembangan penyelenggaraan pendidikan telah melahirkan strategi zonasi pendidikan dalam mencapai pemerataan pendidikan berkualitas dan berkeadilan; (ii) Dalam mengevaluasi PP No. 17/2010 ditemukan beberapa ketidakselarasan materi muatan dengan perubahan jaman, dinamika masyarakat, perkembangan kebijakan dan produk hukum lainnya, khususnya UN sebagai syarat utama dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; (iii) Dalam menganalisis materi muatan sebagai bahan masukan perubahan PP No. 17/2010 terkait zonasi pendidikan, diperlukan adanya penyesuaian ketentuan diantaranya: (a) pembagian kewenangan bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota; (b) penerimaan peserta didik, diantaranya UN yang menjadi syarat utama dalam seleksi penerimaan peserta didik; azas/prinsip dan jadwal penerimaan peserta didik.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
2.	Pembahas :	Nandang Kosasih Ananda, Ph.D. Tanggapan terhadap paparan Sabar Budi Rahardjo ✓ Studi evaluasi minimal 5 kali atau 5 tahun itu memang lebih bagus, agar data yang diperoleh bisa ajeg ✓ Saya masih terkacaukan antara zonasi pendidikan yang sangat luas, dengan zonasi pengelolaan pendidikan yang lebih spesifik ✓ Di hal 10 pada makalah pak Sabar mengenai persepsi peserta didik terhadap PPDB zonasi, ada data yang rancu karena disebutkan berulang tapi berbeda, yakni antara 80 dan 90 %, sebenarnya yang mana data yang benar ✓ Kemudian karena pertanyaannya tentang persepsi maka sangat dipengaruhi oleh perasaan, apakah data hasil lapangannya dapat benar-benar diandalkan. Apakah benar bahwa jarak yang dekat benar-benar memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran, karena pengalaman di kalangan mahasiswa yang tinggal di asrama, ternyata angka keterlambatan juga tetap ada. ✓ Terkait dengan jumlah guru honor yang disebutkan dalam paparan, jika memang rekrutmen sudah sesuai prosedur, pembinaan juga dilakukan, lantas apa masalahnya? ✓ Di hal 12 disebut tentang strategi pembelajaran oleh guru SMP, ada guru yang mengelompokkan siswa berkemampuan rendah, pertanyaannya bagaimana dengan siswa berkemampuan tinggi? Apakah penelitian ini juga merambah ke pertanyaan itu? ✓ Dikemukakan di simpulan, bahwa zonasi ini masih pada PPDB, sementara sebetulnya bisa lebih luas. Kira-kira apa yang bisa dijadikan rekomendasi terhadap zonasi yang lebih luas oleh penelitian ini yang tak hanya tentang PPDB? ✓ Mengenai daya tampung dan rasio guru-siswa yang menjadi persoalan. Jika daya tampung tidak memadai, namun rasio guru-siswa justru terlihat lebih dari cukup 1:16, dan dalam standar adalah 1:20. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan ini? ✓ Yang terkait dengan rekomendasi di pasal 18 memang terdapat informasi tentang keterangan2 palsu, solusinya apakah cukup dengan kartu keluarga, atau dengan apa? ✓ No. 2 disebutkan yang menjadi prioritas adalah nilai UN, pertanyaan saya mengapa ini tertinggi, mengapa bukan yang terendah? Jika peraih nilai tertinggi adalah anak2 orang kaya, bukankah bisa menjadi diskriminasi terhadap anak2 miskin yang tidak mampu meraih nilai UN tertinggi, ini solusinya terbaiknya seperti apa? ✓ Untuk no 4, melakukan daftar ulang maka sekolah dapat melakukan pemanggilan peserta didik untuk yang tidak diterima, pertanyaan saya mengapa urutan terakhir, bukan urutan teratas, mengapa harus begitu?

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		✓ Terkait dengan sarpra, tanpa terkena bencana saja sudah kurang memadai, bagaimana dengan setelah terjadi bencana? ✓ Terkait dengan rekomendasi terhadap dirjen, disana ada poin kelayakan itu bagaimana? ✓ Dalam kriteria rekrutmen, bagaimana dengan sehat jasmani dan rohani dan juga berkarakter, saya kira ini sangat perlu untuk dimasukkan, karena saya sering mendapat curhatan dari lapangan jika guru-guru kita lemah karakternya. Tanggapan terhadap paparan Yufridawati ✓ Untuk kajian bu Fitri masih terkait dengan PPDB, saya kira juga sudah bagus, dari manfaat, regulasi, tindaklanjut, dan harus dikawal, karena ini mengenai urusan bersama kita Tanggapan terhadap paparan Etty Sisdiana ✓ Negara kita memang rawan bencana, maka memang antisipasi itu penting, terutama kaitannya dengan pendidikan ✓ Mengenai aturan main sudah jelas, dalam UU 20/ 2003 sudah dibahas juga mengenai pendidikan layanan khusus, kemudian disusul dengan UU 24/ 2007, PP 21/ 2018 ada juga Kepmendikbud 2018 semua sudah lengkap, cuma masalahnya kemudian adalah pelaksanaannya dilapangan, saya dengar banyak penyimpangan, korupsi dsb, ini miris mengapa ini bisa terjadi? ✓ Jadi ancaman bencana ini memang mau tak mau kita harus siap, masyarakat juga harus melek tentang bagaimana bersikap jika terlanda bencana alam. ✓ Tim-tim di setiap jenjang daerah sudah terbentuk, cuma memang yang sulit adalah koordinasi, jika kaitannya dengan bencana, maka sejak belum terjadi bencana, lalu setelah terjadi bencana, bagaimana model-model koordinasi antar tim itu. ✓ Overall aturan sudah banyak, sudah lengkap, sudah bagus, cuma memang masalahnya implementasi dan penegakan hukumnya di lapangan.
3.	Diskusi/Tanya Jawab	: Prof. Anik Ghufon ✓ Terkait dengan zonasi, sepakat dengan pembahas, klo yang dibahas adalah zonasi untuk PPDB, maka itu sudah cukup, jangan ditambah pengelolaan pendidikan yang lebih luas ✓ Ada disebut dalam turunannya, yang saya ingin kutip mengenai sinkronisasi, apakah bukan malah justru dapat memunculkan masalah baru. ✓ Saya ingin tanya tentang PPDB, mengapa yang diatur hanya sekolah negeri, dan tidak dengan swasta, jadi seolah seperti ada diskriminasi, dan pada akhirnya akan berujung pada ketimpangan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sabar Budi Rahardjo ✓ Penelitian ini awalnya memang implementasi zonasi pendidikan, tapi praktiknya kita fokus pada zonasi PPDB, karena aturan zonasi pendidikan belum ada ✓ Mengenai persepsi siswa, kami menggunakan instrumen langsung kepada peserta didik, dan hasil riil data yang kami peroleh memang seperti itu ✓ Kemudian jarak yang dekat apakah memengaruhi kehadiran, data yang kami dapatkan memang seperti itu, bahwa adanya zonasi berdampak pada pengurangan keterlambatan dan ketidakhadiran. Kemudian ketidakhadiran siswa di sekolah sangat memudahkan guru piket untuk mengecek langsung ke rumah anak yang dekat dengan sekolah. ✓ Kemudian untuk guru honorer, memang disamping jumlahnya banyak, kompetensinya juga umumnya rendah, karena tidak ada yg mengontrol. Maka harus ada solusi entah peningkatan kompetensi, atau rekrutmen baru, jika tidak nanti semakin menjadi masalah dalam proses pendidikan. ✓ Tentang rasio guru secara statistik sudah ideal yakni 1:20, cuma dilihat secara satuan pendidikan memang tidak merata ✓ Mengenai pasal 18 tentang kartu keluarga memang tidak saya masukkan sebagai rekomendasi ✓ Kelayakan saya setuju karakter, tapi kalo kesehatan jasmani nanti bisa tidak adil pada guru yang berkeadaan disabel Yufriawati ✓ Kajian kami memang berkaitan dengan PPDB meski kajian akademik mengenai PP 17/ 2010, dan sudah digunakan oleh user, dan untuk perpres juga sudah dalam proses untuk disahkan ✓ Pertanyaan kenapa cuma untuk sekolah negeri, karena memang diskriminasi terjadi di negeri. Jadi zonasi sebagai sebuah kebijakan azasnya memang pelayanan oleh pemerintah. ✓ Untuk penyelenggaraan disebutkan seperti adanya eksklusifisme ✓ Terima kasih dari pak Nandang, ada UN sebagai alat seleksi ini sebagai salah satu syarat, meski bukan syarat utama ✓ Untuk pak Anik Ghufon, berdasar perpres yang sedang menunggu disahkan memang dibagi berdasar zona untuk memudahkan Etty ✓ Pak Nandang di awal tahap kajian sudah pernah memberi masukan, dan hari ini kami diberi tambahan masukan lagi, kami berterima kasih sekali Parwanto ✓ Sampel kita memang purposif jadi tidak bisa digeneralisasi

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		✓ Disabel itu bukan tidak sehat, hanya mereka tidak memiliki kelengkapan potensi anggota tubuh Kosasih ✓ Untuk pak Sabar terkait permendikbud, pasal 22 itu penjelasan dari ayat 21 ✓ Terkait evaluasi kebijakan apakah harus 5 tahun, saya berpendapat agak berbeda, setiap tahun sebenarnya juga bisa, ini juga disampaikan oleh beberapa teoritis ✓ Mengenai zonasi pendidikan, kita sudah punya gugus tugas, nanti akan dishare Indarjo ✓ Untuk bu Etty, saya tertarik dengan wilayah bencana, saya melihat ada yang krusial yakni peran keluarga, tapi tidak dikaji di laporan ini ✓ Untuk zonasi ada pertanyaan mengapa hanya negeri, karena memang ini mengenai hajatnya negara, maka pertama-tama yang jadi sasaran negeri dulu, nanti suatu saat akan juga melibatkan swasta Sabar Budi Rahardjo ✓ Zonasi PPDB sudah dijawab pak Indarto, memang prioritas kita sasar ke sekolah negeri, nanti suatu saat swasta juga akan kita libatkan ✓ Untuk evaluasi program memang ada perdebatan, ada memang yang menyebutkan 4-5 kali baru dilakukan ✓ Untuk judul yang digunakan Etty ✓ Memang kemarin kita tidak menasar ke keluarga, nanti kami akan mencoba melengkapi melalui kajian literatur Yufriawati ✓ Terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, karena memang di PP tersebut termaktub bahwa dasar seleksi itu adalah UN sementara dari Suyanto ✓ Tema-tema riset yang dilakukan sudah cukup baik, kami kemarin juga diminta oleh disdik untuk menjembatani antara disdik dengan masyarakat. Sebetulnya masalahnya adalah pada kualitas pendidikan yang belum merata. Maka yang menjadi start adalah pemerataan kualitas.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		✓ Yang kedua mengenai mitigasi bencana, kami juga tahun ini mengkaji secara nasional mengenai mitigasi bencana dari segi pendidikan
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul WIB. 12.45

PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN HOTS GURU DALAM WADAH MGMP

Iskandar Agung, Budiana Setiawan, Irna Trilestari, Linda Efaria, Mega Birlian
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan pembelajaran HOTS melalui wadah MGMP. Pada dasarnya Kurikulum 2013 (K-13) mencakup materi ajar bermuatan HOTS untuk membangun kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan kreatif dalam memecahkan permasalahan berbasis pengalaman nyata (empiris). Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang membangun kemampuan siswa melalui strategi pembelajaran yang sistematis dan terarah baik. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama oleh guru dengan merancang pembelajaran secara bersama dan disepakati bersama. Studi dilaksanakan di lima lokasi dengan pendekatan penelitian melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak guru yang belum memahami pembelajaran HOTS, jika ada pun, mengacu pada pembelajaran untuk memecahkan soal-soal sulit. Atas dasar itu, studi ini mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran HOTS dalam materi K-13 dengan menjabarkan ke dalam topik tertentu, kemudian mengaitkannya dengan pengalaman nyata yang harus diselesaikan oleh siswa melalui pendekatan saintifik. Studi juga telah mengembangkan seperangkat pedoman dan perlunya partisipasi sejumlah pihak dalam mendukung pengembangan dan penerapan pengelolaan pembelajaran. Namun, apa yang disajikan dalam penelitian masih bersifat konseptual, belum mengalami pengujian guna memperoleh pementapannya.

Kata kunci: strategi, pengelolaan, pembelajaran, HOTS, MGMP

A. PENDAHULUAN

Organisasi MGMP telah berjalan relatif lama sebagai wadah guru dalam melakukan pertukaran pengalaman, penulisan/pengimbasan pengetahuan, serta pemecahan masalah yang terkait dengan pembelajaran. Organisasi yang dibentuk melalui prinsip demokratis dari, oleh, dan untuk guru diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan mutu pendidikan, baik dalam lingkup sekolah, daerah, provinsi, maupun nasional. Namun, nyatanya sejauh ini wadah MGMP guru kerap kali belum menunjukkan hasil yang efektif, baik sebagai komunitas belajar, upaya meningkatkan kompetensi, maupun dalam membentuk komunitas profesional.

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan peran MGMP, salah satunya yang dilakukan oleh pihak Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan/Ditjen GTK pada tahun 2016 menerapkan Program Guru Pembelajar, tahun 2018 berganti nama menjadi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan tahun 2019 Program Pengelolaan Pembelajaran Berbasis PKB dan Zonasi. Khususnya yang disebut terakhir, pelaksanaan program diharapkan menghasilkan pembelajaran yang membentuk kemampuan berpikir level tinggi pada siswa.

Berkenaan dengan itulah penelitian ini diajukan, yakni bermaksud mengetahui pengelolaan pembelajaran HOTS yang dilaksanakan oleh guru, menganalisis, dan mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran HOTS melalui wadah MGMP. Sasaran penelitian ini adalah guru SMA sederajat.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik penyebaran kuesioner, wawancara, dan *focuss group discussion* (FGD). Khususnya penyebaran kuesioner dilakukan terhadap guru peserta FGD dengan masing-masing berjumlah 25 orang/lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di lima wilayah kota yang dipilih secara acak dengan kriteria dua berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tiga lainnya di wilayah Indonesia bagian timur. MGMP yang dipilih sebagai sampel adalah terkategori wadah cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan pertemuan. Kelima kota sampel penelitian dan MGMP sampel adalah Kota Jambi, Provinsi Jambi (mapel Bahasa Indonesia), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (mapel Fisika), Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (mapel IPS), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (mapel Ilmu Ekonomi), dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (mapel Matematika).

Analisis penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif terutama dilakukan terhadap data yang diperoleh dari instrumen kuesioner. Dalam pembahasan diperkaya dengan informasi yang bersifat kualitatif, baik yang bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, hasil diskusi, maupun sumber-sumber lain yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran HOTS yang Dilaksanakan oleh Guru

Keseluruhan guru yang diteliti menyatakan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran meski kebanyakan dilakukan bersama rekan guru di sekolah maupun di MGMP. Lebih dari separuh responden menyatakan kurang memahami pembelajaran HOTS. Guru yang menyatakan memahami pun masih mengacu pada pengertian soal-soal ujian yang terkategori sulit, misalnya: soal matematika yang memerlukan penjabaran dalam penyelesaiannya. Tabel di bawah ini mengemukakan pola pembelajaran yang dilaksanakan guru terkait dengan materi HOTS.

Tabel 1 Pola Pembelajaran HOTS (N=125)

No.	Butir Pernyataan	Jwbn (%)					Total
		TP	Jrg	Ckp	Srg	Slu	
1.	Penyiapan pembelajaran HOTS	41.6	7.6	15.0	21.0	14.8	100.0
2.	Pengelolaan kelas pembelajaran HOTS	44.8	19.2	16.0	10.4	9.6	100.0
3.	Pemanfaatan metode pembelajaran HOTS	40.0	17.6	-	22.4	20.0	100.0
4.	Pemanfaatan metode pembelajaran HOTS	65.6	6.4	4.0	12.0	12.0	100.0
5.	Pemberian tantangan pembelajaran HOTS	34.4	21.6	16.0	17.6	10.4	100.0
6.	Umpan balik/refleksi pembelajaran HOTS	80.0	4.0	4.8	6.4	4.8	100.0

Tegasnya guru masih memahami bahwa HOTS terkait dengan kemampuan siswa menjawab soal-soal sulit, tidak mengacu pada penalaran dan kemampuan memecahkan permasalahan (*problem solving*) melalui daya kreatif, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi pemikiran/gagasan. Meski pada kurikulum

terdapat materi yang dikategorikan bermuatan HOTS, masih banyak guru yang kurang memahami dan menjabarkannya dalam pembelajaran. Akibatnya, siswa pun kurang memahami pembelajaran HOTS yang membentuk kemampuan untuk memecahkan permasalahan, terutama pengalaman nyata yang dihadapi. Pembelajaran selama ini lebih bersifat teoretis meski ada unsur empiris lebih mengacu pada penguatan teoretis tersebut. Sebagai contoh, pembelajaran matematika untuk mengukur tinggi gedung atau pohon menggunakan rumus tertentu.

2. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Hots Melalui Wadah MGMP

a. Peran Pendidik/Guru

Dalam era pembangunan saat ini, terutama jika dihadapkan pada situasi kehidupan yang semakin mengglobal dan kompetitif, amat membutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi. Tanpa memiliki kemampuan SDM yang tinggi dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia, hanya akan membawa bangsa Indonesia pada posisi yang tidak atau kurang dapat memanfaatkan situasi yang ada, terutama guna mencapai kesejahteraan hidup. Untuk itu, berbagai pihak sepakat bahwa dunia pendidikan memegang peran utama dalam menyiapkan dan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut. Namun, salah satu isu yang banyak disoroti oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah rendahnya pencapaian hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Tudingan pun diarahkan kepada guru yang dianggap sebagai penyebab rendahnya kualitas hasil pendidikan. Tidak berlebihan mengingat kedudukan strategis guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Melalui guru berlangsung proses transformasi nilai ilmu pengetahuan dan lain-lainnya kepada peserta didik sehingga pencapaian hasilnya amat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam menjalankan tugas mengajarnya. Hasil studi kami tahun 2009 menunjukkan bahwa kinerja guru memengaruhi secara positif hasil belajar siswa. Sekolah dengan hasil belajar siswa yang baik didukung oleh kinerja guru yang baik pula dan sebaliknya. Implikasinya, peningkatan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya secara langsung akan mempengaruhi peningkatan terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik.

Kinerja sering dikaitkan dengan hasil dan perilaku dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Robbins (1997) mengemukakan bahwa keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja. Menurut Helfert (dalam Sucipto, 1997) -kinerja adalah suatu tampilan utuh hasil dan perilaku kerja staf/karyawan selama periode waktu tertentu. Dalam konteks guru, upaya yang masih perlu dilakukan bagaimana meningkatkan kinerja guru agar memiliki dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik? Dengan menyadari akan hal ini, Pemerintah telah menerbitkan peraturan atau kebijakan mengenai standar minimum kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang tertuang dalam Permendiknas No. 16/2007. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan (Permendiknas No. 16/2007). Peraturan atau kebijakan dalam Permendiknas mengenai standarisasi tersebut diharapkan mampu menjadi *entry point* dalam meningkatkan kinerja guru, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hasil pendidikan peserta didik.

Kompetensi bukan merupakan sesuatu yang datang atau sudah ada dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui proses belajar dari luar diri. Pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mengajar seorang guru diperoleh dari proses belajar, baik dari lembaga pendidikan maupun sumber lainnya, sehingga pembentukannya dipengaruhi oleh kemampuan faktor eksternal dalam mengintroduksi,

mengomunikasikan, dan membekali guru yang bersangkutan. Persoalannya, pelaksanaan tugas guru membutuhkan kompetensi tertentu yang bersifat dinamis. Artinya, berbagai lembaga pendidikan telah berupaya menanamkan dan membentuk kompetensi guru, tetapi kerap kali belum mampu mencapai seperti yang diharapkan. Keblumampuan itu bisa disebabkan oleh faktor kualitas lembaga pendidikan dalam membentuk guru, tetapi juga faktor guru sendiri. Kompetensi yang kurang memadai dimiliki oleh guru disinyalir menentukan kinerja guru yang rendah pula.

b. Peran MGMP

Salah satu wadah yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam membangun kompetensi, kinerja, dan kemampuan pembelajaran guru adalah organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui MGMP ini diharapkan terjadi penalaran, pengimbasan, tukar pengalaman pengetahuan, pemecahan masalah pembelajaran secara bersama, dan lain-lainnya sesama guru sehingga dapat dibawa kepada anak didik dalam meningkatkan hasil belajar.

Sebagai wadah pertemuan guru yang didasarkan atas prinsip dari, oleh, dan untuk guru, MGMP dinilai strategis dan vital sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme guru. Tepatlah apabila Pemerintah berupaya untuk memberdayakan wadah /MGMP agar dapat berperan dan berfungsi optimal. Disadari bahwa pekerjaan itu tidak mudah mengingat adanya disparitas kondisi dan situasi yang dihadapi guru, baik dari segi letak geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pihak Ditjen GTK memanfaatkan wadah MGMP ini untuk melaksanakan program guru pembelajar melalui penggunaan sistem modul dengan pendekatan tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya. Persoalannya adalah bagaimana menjadikan wadah MGMP sebagai organisasi guru yang profesional guna membangun komunitas yang profesional; dikelola sebagai pusat dan sumber pembelajaran; menjadi tempat guru meningkatkan kemampuan, mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan teknologi digital; menjadi tempat bagi guru untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penelitian tindakan kelas; menjadi tempat bagi guru mencari, mengevaluasi dan merefleksikan riset terbaru; mewadahi guru untuk berkontribusi kepada pembaruan profesi guru; serta memanfaatkan fasilitas MGMP untuk meningkatkan pembelajaran kepada siswa.

Kini muncul pertanyaan bagaimana melakukan revitalisasi terhadap wadah dan kegiatan yang dijalankan oleh MGMP. Secara harfiah *revitalisasi* bermakna sebagai suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya teberdaya. Kata *vital* mempunyai arti 'sangat penting' atau 'sangat diperlukan' untuk kehidupan atau pelaksanaan kegiatan. Bertolak dari pengertian revitalisasi, MGMP mengacu pada upaya untuk memberdayakan wadah ini karena dianggap vital dan diharapkan dapat menjadi *entry point* bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme kerja guru untuk menjawab tantangan perkembangan dan perubahan zaman, terutama guna membentuk peserta didik/siswa yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter tinggi.

Paling tidak revitalisasi bertujuan untuk (a) memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, rencana program pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya; (b) memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; (c) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru; (d) memberdayakan dan membantu guru dalam

melaksanakan tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar; (e) mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan; (f) meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tecermin dari peningkatan hasil belajar siswa dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan berkualitas; (g) mengembangkan kegiatan *mentoring* dari guru *senior* kepada guru *junior*; dan (h) meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran di kelas (Yahya, 2011).

c. Pembelajaran HOTS

Salah satu revitalisasi yang perlu dijalankan oleh MGMP adalah memberdayakan peran wadah ini dalam pembelajaran materi/bahan ajar HOTS. Fenomena yang muncul dalam pelaksanaan ujian nasional adalah banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal yang terkategori HOTS. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa guru masih belum menekankan pembelajaran HOTS secara terencana, sistematis, dan terarah. Sebaliknya, pembelajaran HOTS masih bergelut dengan pola pembelajaran yang lebih menekankan keterampilan rendah, seperti mengingat kembali, menghafal, mengulang, menirukan, dan lainnya, belum pada tahap analisis dan mencipta. Seperti yang dikemukakan Bloom *et.al* (1956) telah membagi ranah kognitif ke dalam enam dimensi.

Ranah kognitif kerap kali digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir seseorang/kelompok. Seseorang mewujudkan keterampilan berpikir tingkat rendah apabila berada pada ranah kognitif *remembering* (C-1), *understanding*, dan *applying*. Sebaliknya, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) jika memasuki ranah *analysing* (C-4), *evaluating* (C-5), dan *Creating* (C-6). Anderson & Krathwohl (2001) berupaya memetakan tingkat keterampilan berpikir dan deskripsi penggunaannya seperti berikut.

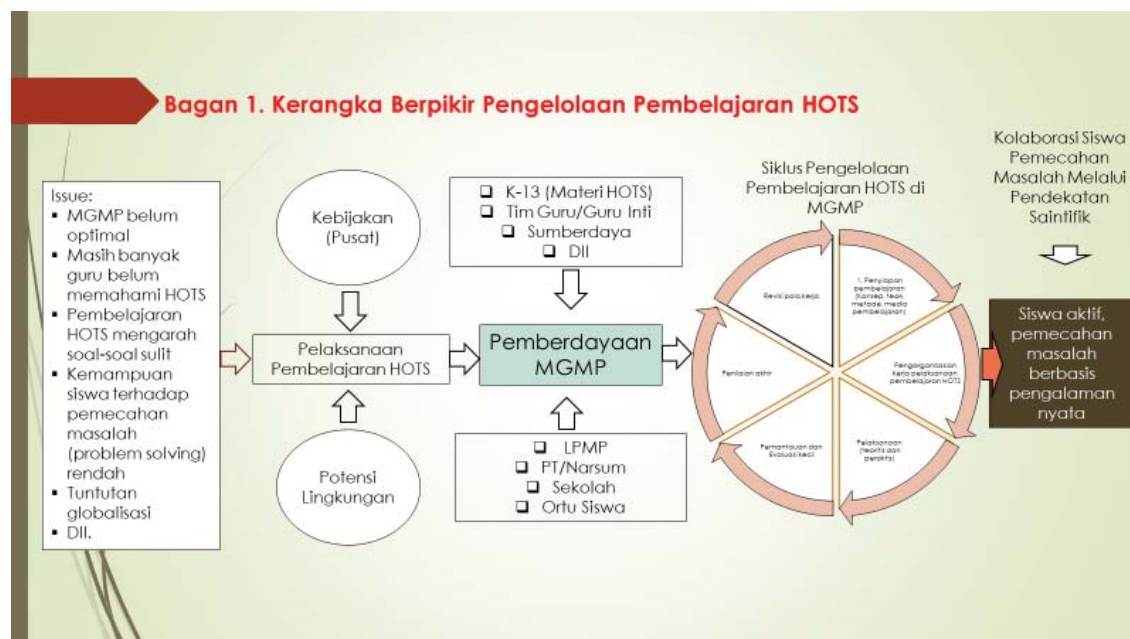
Matriks 1 Keterampilan Tingkat Berpikir

HOTS	Mencipta	• Mengkreasi ide/gagasan sendiri. • Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan.
	Evaluasi	• Mengambil keputusan sendiri. • Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung.
	Analisis	• Menspesifikasi aspek-aspek/ elemen. • Kata kerja: membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi, menguji.
MOTS	Aplikasi	• Menggunakan informasi pada domain berbeda • Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan.
LOTS	Pemahaman	• Menjelaskan ide/konsep. • Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan.
	Pengetahuan	• Mengingat kembali. • Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan.

d. Kerangka Berpikir Pengelolaan Pembelajaran HOTS

Peran wadah MGMP yang belum optimal menjadi alasan perlunya dikembangkan model pengelolaan pembelajaran HOTS. MGMP haruslah berdaya dalam meningkatkan penguasaan dan kemampuan guru terhadap pembelajaran HOTS, berfungsi sebagai wadah pelatihan dan pembelajaran dari, oleh, dan untuk guru secara bersama-sama dalam memberikan bekal mengelola pembelajaran HOTS. Meski demikian, dalam pemberian bekal pengelolaan pembelajaran tersebut, MGMP pun tidak terlepas dari pentingnya peran dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain, seperti kepala sekolah, pengawas, dan

narasumber. Di bawah ini dikemukakan pemikiran pengembangan model pengelolaan pembelajaran HOTS (Bagan 1).

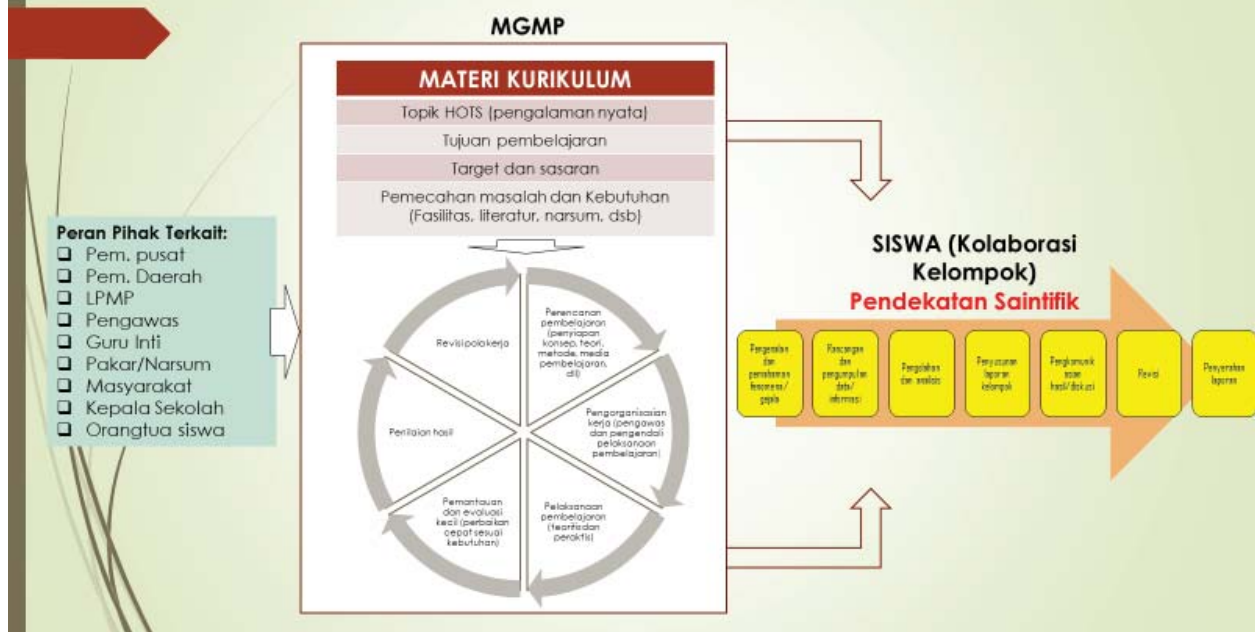


e. Strategi Pengelolaan Pembelajaran HOTS

Pengembangan model dinilai perlu dilakukan atas dasar isu kemampuan pembelajaran materi/bahan ajar HOTS oleh guru masih belum memuaskan, peran wadah MGMP yang belum optimal dalam membangun kemampuan pembelajaran HOTS, penguasaan materi/bahan ajar HOTS oleh siswa yang masih rendah dan kerap kali mengalami kesulitan dalam menjawab soal HOTS, dan sebagainya. Salah satu kebijakan Pusat adalah memberdayakan peran dan fungsi MGMP sebagai wadah pengembangan diri guru berkelanjutan, salah satunya adalah meningkatkan pengelolaan wadah guru ini.

Dalam konteks apa yang dikemukakan di atas tidak salah apabila MGMP berperan dalam meningkatkan penguasaan dan kemampuan guru terhadap materi/bahan ajar HOTS. MGMP menjadi wadah pelatihan dan pembelajaran dari, oleh, dan untuk guru secara bersama-sama dalam memberikan bekal mengelola pembelajaran materi/bahan ajar HOTS. Meski demikian, dalam pemberian bekal pengelolaan pembelajaran tersebut, MGMP pun tidak terlepas dari pentingnya peran dan dukungan pemangku kepentingan lain, seperti kepala sekolah, pengawas, dan narasumber. Strategi pengelolaan pembelajaran HOTS diperlihatkan dalam Bagan 2 berikut.

Bagan 2. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Topik HOTS Melalui MGMP Berbasis Zonasi



Contoh: Mata Pelajaran Ilmu Ekonomi

Kompetensi Dasar Kompetensi Inti: *Supply & Demand*

Topik

Pengembangan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Tradisional

Pendahuluan

(Pengenalan dan Pemahaman Fenomena)

Bentuk/Jenis Usaha Skala Besar, Menengah, Kecil

Kategori Pedagang di Pasar Tradisional

Besaran dan Sumber Permodalan

Jenis dan Sumber Barang Dagangan

Permasalahan: Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional

Kajian Pustaka (Penggunaan Konsep dan Teori)

Bentuk/Jenis Usaha

Konsep Pasar

Pasar Tradisional

Sejarah Pertumbuhan

Jenis dan Barang Diperdagangkan

Sumber Permodalan

Orientasi Konsumen

Supply & Demand

Elastisitas Supply & Demand

Metodologi/Pendekatan

Lokasi Studi

Sampel Pedagang

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Teknik Analisis

Temuan dan Pembahasan (Pengembangan Usaha)

Jumlah dan variasi jenis pedagang di pasar tradisional
Brand & trust dalam perdagangan pasar tradisional
Tingkat pendapatan (*profit & lost*)
Prospek kesejahteraan hidup
Hambatan penjualan
Upaya pengembangan

Kesimpulan dan Saran

Catatan:

Topik lain misalnya:

Pengembangan koperasi sekolah

Pembangunan kepariwisataan dihadapkan dengan potensi alam
Peluang dan penyerapan tenaga kerja.

2. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Paling sedikit terdapat tiga kategori pihak yang memiliki peran penting untuk turut berpartisipasi memberdayakan MGMP, yakni orang tua siswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Pusat. Secara sederhana, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang, kelompok orang, atau instansi/lembaga untuk mengupayakan keberhasilan suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Davis dan Newstrom, 2004).

a. Partisipasi Orangtua Siswa dan Masyarakat

Setidaknya ada empat bentuk partisipasi orang tua dalam administrasi pendidikan di sekolah, yaitu partisipasi keuangan untuk mendukung dan memfasilitasi pencapaian kebutuhan sekolah, partisipasi properti (misalnya bantuan komputer pribadi, laptop, alat peraga, dan pengadaan *wi-fi*), partisipasi dalam layanan fisik (misalnya membangun ruang kelas, dan menjaga keamanan lingkungan sekolah), dan partisipasi dalam keterampilan (misalnya sebagai narasumber, dan mencari ahli untuk memberikan panduan).

b. Partisipasi Pemerintah Daerah

Pemberdayaan MGMP selayaknya mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama untuk melancarkan kegiatan organisasi ini, baik berupa dana, fasilitas, maupun narasumber/pakar. Peran lain yang dibutuhkan dari unsur pemerintah daerah adalah partisipasi aktif dari pengawas dalam melakukan supervisi ke MGMP. Meski demikian, harus dihindarkan peran pengawas yang terlalu ikut campur ke dalam kegiatan MGMP, yang justru bisa menjadi penghambat. Peran pengawas hanyalah sebagai motivator dan supervisi agar kegiatan MGMP sesuai dengan tujuan dan Sasarannya, bukan sekadar wadah kongko-kongko yang kurang berguna.

c. Partisipasi Pemerintah

Pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru dengan melaksanakan program pelatihan agar guru menjadi kompeten dan profesional, terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan mampu menginspirasi siswa untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Lebih lanjut pelatihan diharapkan dapat membawa guru ke arah pengembangan profesi berkelanjutan, meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa/peserta didik. Namun, peran Pemerintah dalam pemanfaatan MGMP tidak bersifat sementara atau berhubungan dengan penerapan pelatihan kepada guru. Dorongan untuk memberdayakan organisasi guru ini harus dilakukan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat mandiri dan mampu menjadi pintu masuk

pengembangan kemampuan guru. Dalam hal ini, diharapkan partisipasi Pemerintah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan MGMP melaksanakan kegiatannya, baik berupa bantuan dana secara berkesinambungan maupun fasilitas lainnya berupa media, alat peraga, teknologi digital, ATK, sampai dengan narasumber/pakar (manajemen organisasi dan pendidikan).

D. PENUTUP

1. Simpulan

Organisasi guru MGMP sudah berdiri sejak lama sebagai wadah merawat dan meningkatkan kemampuan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk guru. Namun, sebagian besar mekanismenya belum mampu melibatkan partisipasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar.

Hasil studi ini menemukan bahwa guru masih belum mengenal dan memahami secara utuh tentang kategori berpikir level tinggi (HOTS). Bagi kebanyakan guru, kategori berpikir level tinggi mengacu pada soal-soal sulit, bukan suatu proses penalaran sebagai upaya pemecahan masalah (problem solving). Atas dasar itu, tulisan ini berusaha mengembangkan suatu model dan strategi pengelolaan pembelajaran oleh guru mengenai topik HOTS dengan bertumpu pada pemanfaatan MGMP sebagai wadah tumbunya kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Melalui MGMP guru mengkaji dan mengemas materi terkategori HOTS dalam topik tertentu. Topik menjadi bahan yang perlu dikembangkan oleh siswa. Peran guru dan pihak lain (internal dan eksternal sekolah) sebatas motivator, fasilitator, pembimbing, dan pengarah terhadap siswa/peserta didik.

2. Rekomendasi

- a) Upaya untuk menjadikan wadah MGMP berdaya agar dilakukan secara terprogram. dan berkesinambungan. Pemanfaatan MGMP hendaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi perlu didorong secara berkelanjutan. Salah satu usaha yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan dana dan fasilitas kegiatan yang diperlukan oleh MGMP agar dapat memotivasi dan mendorong gairah guru dalam meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus.
- b) Model dan strategi yang diajukan masih bersifat draf konseptual, belum diujicobakan untuk mendapatkan pemantapannya. Namun, model dan strategi bisa digunakan sebagai acuan oleh MGMP dalam mengembangkan pola pengelolaan pembelajaran berbasis topik HOTS dalam lingkup zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. 2014. "Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan Sosial terhadap Kinerja Guru". *Jurnal VISI*. 2014; Vol 1, Juni.
- Agung, I. 2017. "Guru yang Kompeten dan Profesional: Pidato Orasi Ilmiah Profesor Riset". Jakarta: Kemendikbud – LIPI.
- Ahmad N.A., S.A. Hassan, A.R Ahmad, L.N. Chua, dan N. Othman 2017). "Parental Involvement in Learning Environment, Social Interaction, Communication, and Support Towards Children Excellence at School". *Journal of Sustainable Development Education and Research*, Vol. 1 (1), 83 – 90. <http://dx.doi.org/10.17509/jsder.v1i1.6247>
- Alwi, M. 2009. "Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Profesional Guru Sains Sekolah Dasar di Kabupaten Suralaga". *Education Journal*, Vol. 4 (2), 101-117.

- Aminudin, A. 2017. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah terhadap Kinerja Guru dalam Mencapai Prestasi Belajar di Pendidikan Islam". *Pendidikan Universitas Garut Aminuddin* Vol. 11 (01), 88-96.
- Anderson, T. D. 1998. *Transforming Leadership*. New York Washington D.C: St. Lucie Press.
- Anderson, L., & D.A. Krathwohl. 2001. *Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Barge. S. 2010. *Principles of Problem and Project Based Learning: The Aalborg PBL Model*. USA: Aalborg
- Bloom, B.S., M.D. Engelhart, E.J. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl. 1956. *The Taxonomy of Educational Objectives the Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay.
- Botung, H. 2008, "Understanding and History of the establishment of the KKG". <http://www.ucokhsb.blogspot.com>.
- Chepy, A. 2016. "Peneliti Amerika Belajar KKG/MGMP Banjarnegara". <https://semarangpedia.com/peneliti-amerika-pelajari-kkg-mgmp-banjarnegara/>
- Canale, M. dan M. Swain. 2002. "Theoretical Bases of Communicative Approach to Second Language Teaching and Testing". *Applied Linguistics*. Oxford University Press.
-
- Davis, K. dan J. W Newstrom. 2004. *Organizational Behavior*. McGraw-Hill.
- De Graaf, E dan K. Anette 2003. "Characteristics of Problem-Based Learning". *The International Journal of Engineering Education*, Vol. 19 (5).
- Ditjen GTK. 2015. *Hasil Uji Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemendikbud
- Ditjen GTK. 2016. *Guru Pembelajar: Pedoman Program Peningkatan Kompetensi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2019. *Desain Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Đurišić, M. dan B. Mila. 2017. "Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education". *C.E.P.S Journal*, Vol. 7 (3), 137 – 153. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1156936.pdf>
- Gagne, R. M. dan L.J. Brigss 1997. *Principles of Instructional Design*. New York: Holt Rinehart & Winston.
- Gunadi, T. dan Yurianto. 2017. "The Effect of the Effectiveness of Geography Deliberation on Subject Teacher Management (MGMP) on Teacher Pedagogical Competencies in Improving Student Learning Achievement (Survey on High School Geography Teachers in Sumedang Regency)". *Coopetition*, Vol VIII (2), 113-111.
- Hair Jr. J. F., C. William, J. Black Ba, dan R.E.A. Babin . 2010. *Multivariate Data Analysis*. United States: Pearson
- Haryono, S. dan P. Wardoyo. 2017. *Structural Equation Modeling (SEM) for Management Research with AMOS 18.00*, Jakarta: Luxima Metro Media.
- Hidayati, A. N. 2014. "Teacher Professional Competency Development Through Work Group Empowerment (KKG/MGMP)". <https://pujiadilpmpjateng.wordpress.com/2014/05/>

16/pengembangan-kompetensi-profesional-guru-melalui-pemberdayaan-kelompok-kerja-kkgmgmp/.

Hmelo, C. E. dan Silver. 2004. *Problem Based Learning: What and How Do Student Learn?*, New Jersey: Educational Psychology Review, Vol. 16 (3), 235 – 248.

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/05/09/p8ez3c366-40-persen-siswa-sma-kesulitan-isi-soal-hots>.

Krulik, S. dan Rudnick. 1999. *Innovative Taks to Improve Critical and Creative Thinking Skills. Develoving Mathematical Raesoning in Grades K-12*. Reston: The National Council of teachers of Mathematics, Inc.

Kusnendi. 2008. *Structural Equation Models*. Bandung: Alfabeta.

Lambros, A. 2004. *Problem-Based Learning in Middle and High School Classrooms*, CA: Corwin Press.

Lidia, A. 2016. "Effects of Principal Leadership, Teacher Motivation and Participation in Economic Subject Teacher Training (MGMP) Activities on Professional Competence of High School Economics Teachers in Padang City". Teacher Training and Education Colleges (STKIP) PGRI West Sumatra.

Luthans, F. 2005. *Organizational Behavior*. New York: Mc. Graw-Hill.

Ma'rifataini, L. 2014. "Efektivitas MGMP dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Umum di MTs". *Pendidikan*, Vol. 12 (1), 70 - 82.

Mathis L. M. dan J. H. Jackson. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Muhajirin, Titi P. dan Y. Amin. 2017. "Pengaruh Pengawasan Akademik dan Partisipasi Guru terhadap MGMP Melalui Motivasi Kerja terhadap Profesionalisme Guru SMA / MA". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 6 (2), 170 - 177.

Mutmainah, N. 2011. *Peran Konsultasi Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sejarah di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Rembang pada Tahun Ajaran 2010/2011*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Semarang.

Noor, I. H. M. 2019. "Studi Manajemen MGMP, Laporan Penelitian". Pusat Penelitian - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nurlaeli. Y. dan S. Oyon. 2018. "Keefektifan Forum Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kinerja Pengajaran Guru Bahasa Inggris". *Jurnal Manajemen Pendidikan & Administrasi Indonesia*, Vol. 2 (2), 308 - 317.

Nanus, B. 2001. *Kepemimpinan Visioner*. Prenhallindo.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 tentang Pengumpulan Biaya Pendidikan dan Sumbangan untuk Unit Pendidikan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.

PISA. 2016. *Technical Report, Organisation for Economic Co-operation and Development Publications*.

- Pratiwi, R. H. W. 2018. *Upaya Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bendosari pada Tahun 2018* . IAIN Surakarta.
- Pearlman, B. 2006. *21st Century Learning in Schools – A Case Study of New Technology High School in Napa, CA*. New Directions for Youth Development.
- Priyastutiningrum, R. W. 2014. "The Effect of Principal Leadership and Teacher Participation in MGMP on the Performance of English Teachers in High Schools in Sleman Regency, Yogyakarta State University". <https://eprints.uny.ac.id/18867/1/RISKA%20WAHYU%20P.%2009101244019.pdf>.
- Rhem, J. 1998. "Problem-Based Learning: An Introduction, The National Teaching Learning" Forum, Vol. 8 (1).
- Richie. 2017. "Confirmatory Factor Analysis (CFA)". <https://www.mobilestatistik.com/analisis-faktor-konfirmatori-cfa/>
- Rogers, M.A. *The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada Jennifer Theule University of Toronto, Ontario, Canada Bruce A. Ryan Gerald R. Adams Leo Keating University of Guelph, Ontario, Canada*
- Rosenberg, M. J. 2001. *e-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sahbelrg, P. 2014. *Finnish Lessons: Mengajar Lebih Sedikit, Belajar Lebih Banyak ala Finlandia*. Penerjemah: Ahmad Muchlis. Bandung: Kaifa.
- Savery, J. R. & T. M. Duffy. 1995. "Problem Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework". *Educational Technology*. Vol. 35 (5), 31-37.
- Syamsudduha, St. 2017. "Parent Participation in Child Education in Schools at Al-Fityan SDIT, Gowa Regency". *Journal al-Kalam*, Vol. IX (2), 141 – 158.
- Savery, J. R. & T.M. Duffy. 1995. "Problem Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework". *Educational Technology*. 35 (5), 31-37
- Skinner, B. F. 2002. *Operant Conditioning*. New York: Mac Millan.
- Sugiyono. 2010. *Educational Research Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. 2009. "KKG and MGMP Pilot Activities BERMUTU Program Clears Chronic Disease After Teacher". *BERMUTU Bulletin*. 4, (1), 7.
- Sumedi. 2018. *The Principal's Strategy in Improving Teacher Quality in State Junior High Schools 1 Cawas ZKlaten in the 2016/2017 Academic Year*. IAIN Surakarta.
- Sutrisno, A. 2016. *Empowerment of Teacher Working Groups (KKG) in the Hasanudin Cluster in Karangrayung Sub-District, Grobogan District*. Muhammadiyah University, Surakarta.
- The Center for Teaching and Learning. 2001. "Problem Based Learning, Stanford University". *Winter*, Vol. 11 (1).
- The National Institute of Education. 2015. *A Teacher Education Model for 21st Century*, Singapore.
- USAID. 2009. *Teacher Education and Professional Development in Indonesia: A Gap Analysis*. Jakarta: United States Agency for International Development.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1408a/U/1984

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

Keputusan Bersama No. 2/P/SKB/2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat dan Daerah.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1961.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KAJIAN UMPAN BALIK GURU TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN SISWA

Etty Sofyatinigrum, Etty Sisdiana, Ikhyia Ulumuddin, Fransisca Nur'Aini

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan guru terkait umpan balik guru terhadap proses pembelajaran siswa pada jenjang SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuesioner, dan diskusi kelompok terpusat. Pengambilan sekolah sampel penelitian didasarkan pada rata-rata nilai UN mata pelajaran yang relatif tinggi dan mempunyai proses pembelajaran yang bermutu pada lima kabupaten/kota. Hasil kajian menunjukkan bahwa Persiapan guru dalam penerapan umpan balik pada proses pembelajaran masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena materi umpan balik dalam pelatihan Kurikulum 2013 belum tersedia secara eksplisit dan buku panduan pun belum dijabarkan. Pelaksanaan umpan balik guru terhadap proses pembelajaran siswa secara umum sudah dilaksanakan oleh guru, namun terdapat beberapa guru belum melakukan umpan balik dan melakukan umpan balik yang negatif. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah belum melihat kegiatan umpan balik yang dilakukan oleh guru.

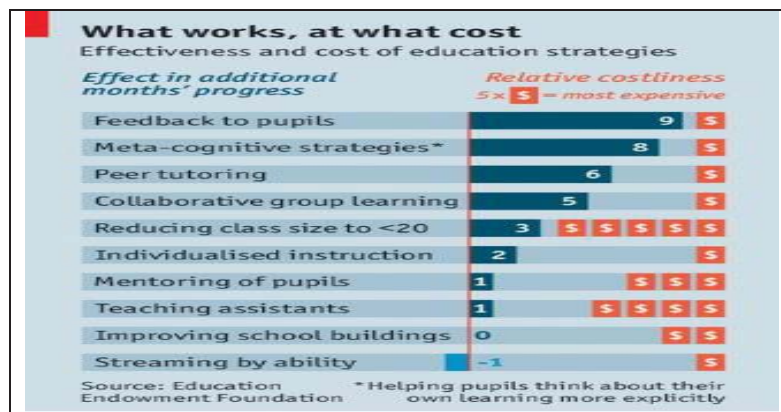
Kata kunci: umpan balik, motivasi, proses pembelajaran

A. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas). Konten pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan perlu diarahkan dan dikembangkan agar siswa lebih berdaya dalam kehidupannya. Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan potensi, minat, dan kecerdasan jamak siswa.

Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengembangkan potensi, minat, dan kecerdasan jamak siswa, yaitu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Penggunaan umpan balik merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk menerima masukan, mengkritisi pendapatnya sendiri, memperbaiki kesalahan pemahaman tanpa melukai harga dirinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hattie (2009) dari Lembaga *Education Endowment Foundation*. menunjukkan begitu besar pengaruh umpan balik terhadap capaian hasil pembelajaran walaupun dengan pembiayaan yang rendah. Hasil penelitian ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Pengaruh strategi pembelajaran terhadap perkembangan siswa

Penelitian yang dilakukan Hattie (2009) yang ditunjukkan pada Gambar 1. menunjukkan bahwa umpan balik kepada siswa mempunyai tingkat efektifitas yang paling tinggi (skor 9) dalam mempengaruhi capaian hasil belajar siswa. Selain itu, umpan balik merupakan faktor yang paling efektif dalam capaian belajar siswa namun mempunyai pembiayaan yang paling kecil. Umpan balik berkaitan langsung dengan pemberian motivasi kepada siswa. Bellen (2010) menyebutkan bahwa sembilan per sepuluh pendidikan adalah memberikan semangat dan dorongan (motivasi) kepada siswa dalam memahami suatu materi.

Untuk melihat pelayanan guru terkait umpan balik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa, perlu dilakukan pengkajian pada tahap persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan dan pembinaan guru dalam pembelajaran. Adapun tujuan pengkajian ini adalah mengkaji pelaksanaan umpan balik guru terhadap proses pembelajaran. Secara khusus, tujuan pengkajian ini yaitu (i) persiapan penerapan umpan balik dalam proses pembelajaran; (ii) pelaksanaan umpan balik dalam proses pembelajaran; dan (iii) pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan umpan balik.

Manfaat hasil kajian awal ini adalah dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk menetapkan kebijakan pada program peningkatan profesionalisme guru secara sistematis dan menyeluruh tentang bagaimana caranya agar guru-guru SMP melakukan umpan balik positif kepada siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna dan hasil belajar siswa lebih meningkat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa komponen yang mempengaruhi berjalannya suatu proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu: guru, siswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Faishal, tanpa tahun). Salah satu tindakan guru yang memotivasi keberhasilan siswa antara lain umpan balik yang dilakukan guru baik terhadap proses selama pembelajaran maupun pada hasil pembelajaran. Selanjutnya, dijelaskan mengenai umpan balik, proses pembelajaran dan hasil belajar serta konsep yang terkait dengan umpan balik.

Beberapa pengertian umpan balik, dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Menurut Slameto (1988), umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemampuannya ke arah pencapaian tujuan pengajaran. Informasi ini diberikan guru setelah guru mengamati proses dan hasil belajar siswa. Dalam artikel Febriyanti (2013) terdapat beberapa pengertian umpan balik. Diantaranya: (i) Menurut Arikunto umpan balik merupakan segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Transformasi di sini merupakan mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. (ii) Menurut Hostetter umpan balik sebagai pengulangan yang dibuat berdasarkan hasil yang diperoleh untuk dikembalikan pada prosesnya. Dengan kata lain, umpan balik merupakan informasi yang bersifat timbal balik antara pengajar dan peserta didik. (iii) Menurut Cole dan Chan umpan balik tiada lain merupakan

informasi yang diberikan kepada individu atas aksinya atau aktivitasnya yang berbentuk skor dari suatu hasil ujian, komentar dalam tugas, dan jawaban atas pertanyaan.

Menurut Schunk terdapat beberapa jenis umpan balik, yaitu 1) *performance feedback* yang difokuskan pada ketepatan kerja dan termasuk informasi yang bersifat menilai; 2) *motivational feedback* yang memberikan perbandingan kemampuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya; 3) *attributional feedback* mengaitkan antara performa siswa yang satu dengan lainnya dalam sebuah usaha untuk meningkatkan motivasi; dan 4) *strategy feedback* adalah umpan balik yang mengungkapkan kepada siswa bagaimana sebaiknya mereka mengaplikasikan sebuah cara atau strategi dan bagaimana cara tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mereka (Anggraini, 2015).

Ada lima fungsi umpan balik, yang dikemukakan oleh Buis bahwa umpan balik (*feedback*) memiliki fungsi sebagai a) Fungsi peringatan; bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar; b) Fungsi perbaikan strategi; bagi siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal, c) Fungsi informasional ;informasi dari guru kepada siswa mengenai hasil ulangan dan pemberitahuan mengenai jawaban yang benar; d) Fungsi komunikasi; merupakan proses sosial yang melibatkan komunikator yang saling mengirim berita sehingga satu pihak dapat belajar dari pihak lain; e) Fungsi motivasi; mendorong siswa untuk berusaha mencari jawaban yang benar atas kesalahan sebelumnya sesuai dengan petunjuk dari guru menguatkan (Windarsih, 2016).

Adapun prinsip pemberian umpan balik menurut Kulhavy & Stockmeliputi a) berikan umpan balik sesegera mungkin; b) berikan umpan balik yang spesifik; c) berikan umpan balik sesuai tingkat perkembangan anak; d) berikan penghargaan (*reward*) bersama umpan balik positif; e) bantulah siswa untuk tetap fokus pada proses, bukan pada hasil. Untuk menerapkan umpan balik yang bermakna, guru harus memperhatikan prinsip tersebut. Jika siswa melakukan kesalahan, saat itu juga hendaknya guru langsung bertindak, jangan ditunda, sehingga dapat langsung terkoreksi. Komentar atau memberi saran juga harus spesifik, misalnya komentar terhadap hasil ulangan “belajar lebih rajin lagi”, itu termasuk yang normatif; namun jika “pelajari tentang fungsi otak, karena kamu belum faham materi tersebut” pesan tersebut sudah spesifik, mudah diterima siswa (Lestariningsih, 2014).

Dari beberapa pengertian umpan balik diatas dapat disintesakan bahwa umpan balik adalah respon yang diberikan guru terhadap siswa tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa khususnya dalam kegiatan proses pembelajaran. Umpan balik dalam proses pembelajaran harus mengandung unsur motivasi, sehingga yang dibolehkan dalam kegiatan pembelajaran hanya umpan balik yang positif.

Penelitian terkait dengan guru memberikan umpan balik terhadap siswa dalam proses pembelajaran sudah sering dilakukan. Hasil penelitian tersebut dijelaskan secara singkat seperti berikut ini. Jumiaturun (2016) meneliti tentang “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Pemberian Tugas Terstruktur Disertai Umpan Balik pada Model Pembelajaran Langsung Peserta Didik Kelas VIIA SMP Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa”. Penelitian ini adalah upaya pemberian tugas terstruktur disertai umpan balik pada model pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran fisika peserta didik kelas VIIA SMP Negeri Negeri 1 Bontonompo. Fernando, F., Jatra, R & Reski (2017) yang berjudul “Upaya Pengembangan *Self-Esteem* siswa SMP melalui Pemberian Umpan Balik. Hasil penelitian menemukan bahwa, (1) Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian umpan balik positif, umpan balik netral dan umpan balik negatif terhadap perkembangan *self-esteem* yang sehat pada siswa SMP. (2) Pemberian umpan balik positif akan memberikan pengaruh paling baik dalam mengembangkan *self-esteem* yang sehat pada siswa kelas 1 SMP.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuesioner, dan diskusi kelompok terpumpun. Observasi dilakukan kepada guru matapelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kuesioner diberikan kepada seluruh guru pada sekolah sampel, selain itu juga diberikan kepada siswa di sekolah sampel sebanyak 40%. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilakukan kepada pengawas dan kepala sekolah.

Lokasi penelitian ditetapkan dengan kriteria sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum 2013, Sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013, sekolah yang mempunyai nilai UN tinggi, dan sekolah yang mempunyai proses pembelajarannya efektif. Kelima lokasi penelitiannya diantaranya Kota Yogyakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, Kota Makasar, dan Kabupaten Badung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan antara bulan Maret – September 2019.

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dapat berhubungan langsung dan berinteraksi dengan sumber data serta mampu memahami sumber data. Untuk membantu peneliti dibuat panduan observasi, kuesioner, dan pedoman diskusi kelompok terpumpun.

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur. Setelah itu melakukan triangulasi data dengan bersumber dari beberapa instrumen dan berbagai responden.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan kajian terdiri atas: (i) persiapan penerapan umpan balik dalam proses pembelajaran; (ii) pelaksanaan umpan balik dalam proses pembelajaran; dan (iii) pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan umpan balik.

1. Persiapan Penerapan Umpan Balik

Persiapan penerapan umpan balik dalam proses pembelajaran terdiri atas keikutsertaan pelatihan Kurikulum 2013, muatan pelatihan kurikulum 2013, dan pemahaman tentang umpan balik dari unsur penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yakni guru, kepala sekolah dan pengawas. Sumber informasi ini berasal dari diskusi kelompok terpumpun dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas pada lima daerah sampel.

Mayoritas guru tingkat SMP sudah melakukan pelatihan Kurikulum 2013. Walaupun masih terdapat beberapa guru yang belum sama sekali mengikuti pelatihan Kurikulum 2013, namun biasanya guru baru. Keikutsertaan guru dalam pelatihan Kurikulum 2013 biasanya diselenggarakan oleh Pusat yang bertempat di LPMP, P4TK dan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula guru yang melakukan pelatihan pada MGMP dan sekolah.

Mayoritas kepala sekolah telah melakukan pelatihan Kurikulum 2013 paling tidak sebanyak dua kali, bahkan ada kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan sebanyak sepuluh kali. Selain mengikuti pelatihan, beberapa kepala sekolah merupakan nara sumber pelatihan K-2013.

Pada umumnya pengawas telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak dua kali. Namun, pelatihan tersebut dilakukan belakangan setelah para guru mengikuti pelatihan. Menurut pengawas, seharusnya pelatihan kurikulum 2013 untuk pengawas dilakukan terlebih dahulu sebelum ke guru, sehingga pengawas dapat membantu menyebarkan dan mendampingi sekolah yang telah menjalankan kurikulum 2013.

Materi yang dilatihkan Kurikulum 2013 untuk guru, kepala sekolah dan pengawas di beberapa daerah pada umumnya sama. Materi pelatihan terdiri dari proses pembelajaran, penilaian, penyusunan RPP, pendidikan karakter, dan kepramukaan. Waktu pelaksanaan pelatihan pada umumnya lima hari. Materi terkait dengan umpan balik dalam pelatihan Kurikulum 2013 tidak ada secara eksplisit. Menurut guru, kepala sekolah, dan pengawas materi umpan balik terintegrasi dalam beberapa materi materi misalkan pada materi pembelajaran dan penilaian. Tidak eksplisitnya materi umpan balik sehingga luput dari perhatian peserta pelatihan, baik itu guru, kepala sekolah, maupun pengawas. Hal ini berdampak pada pemahaman guru, kepala sekolah dan pengawas tentang umpan balik yang kurang dan memberikan interpretasi tentang umpan balik bervariasi.

Beberapa guru mengartikan umpan balik adalah interaksi siswa dengan guru, beberapa guru lainnya mengartikan remedial dan pengayaan, ada juga yang mengartikan umpan balik sebagai kegiatan refleksi atau evaluasi. Dan juga ada yang menyebutkan umpan balik adalah memberikan motivasi. Demikian pula dengan pemahaman kepala sekolah tentang umpan balik. Sebagian besar kepala sekolah mengartikan proses pembelajaran yang terdapat penilaian kemudian dianalisis selanjutnya guru menentukan remedial dan pengayaan. Beberapa kepala sekolah lainnya berpendapat umpan balik merupakan motivasi dan pengontrol guru sejauh mana siswa memahami suatu materi.

Pengawas berpendapat bahwa umpan balik dapat dilakukan secara lisan dan tulisan diakhir pembelajaran. Pengawas lainnya mengartikan umpan balik berbentuk motivasi. Selain itu, memastikan materi pelajaran yang disampaikan guru sudah dikuasai oleh siswa.

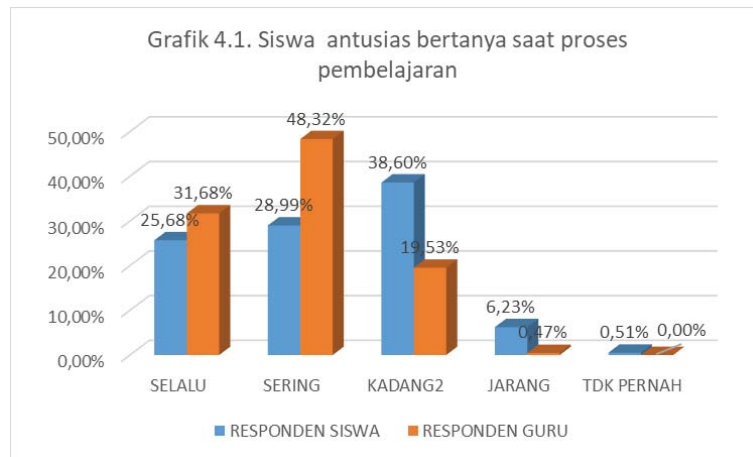
2. Pelaksanaan Umpan Balik

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh guru dan siswa di lima daerah sampel, diantaranya Kota Tangerang Selatan, Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung. Pada setiap daerah sampel masing-masing responden guru dan siswa sebanyak 6 sekolah, sehingga total sekolah sampel sebanyak 30 sekolah. Total pengisi kuesioner guru sebanyak 1.490 responden. Adapun pengisi kuesioner siswa yang berasal dari lima daerah sampel dan setiap daerah sampel diwakili oleh enam sekolah yang masing-masing sekolah respondennya sebanyak 40% dari jumlah siswa sekolah. Total pengisi kuesioner siswa sebanyak 9.483 responden

Penggunaan umpan balik positif dalam proses pembelajaran telah dilakukan oleh guru, namun guru tersebut belum memahami yang telah dilakukan merupakan kegiatan umpan balik positif ataupun negatif.

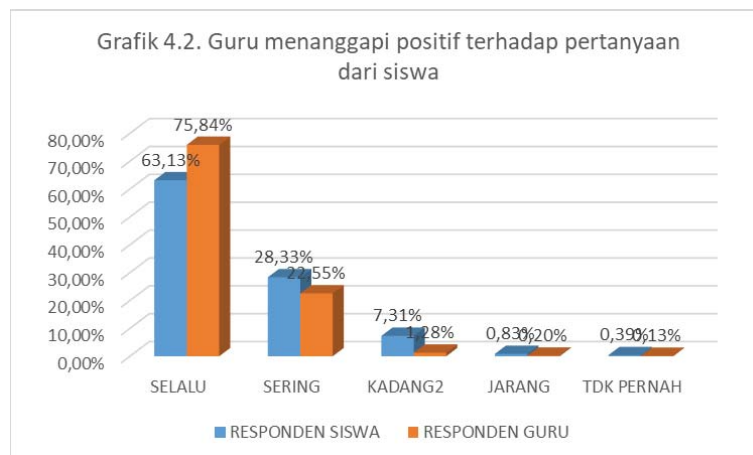
Berikut ini adalah hasil kuesioner dengan responden guru dan siswa tentang pelaksanaan umpan balik dalam proses pembelajaran, diantaranya: (i) antusias siswa bertanya saat proses pembelajaran, (ii) tanggapan positif guru terhadap pertanyaan dari siswa, (iii) ekspresi guru dalam menanggapi pertanyaan dari siswa, (iv) apresiasi guru terhadap siswa yang bertanya, (v) ekspresi siswa jika guru menjawab pertanyaannya, (vi) ekspresi guru dalam menanggapi jawaban dari siswa, (vii) Apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang benar, dan (viii) Apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang salah.

Antusias siswa untuk bertanya menunjukkan bahwa guru dapat memberikan umpan balik sehingga siswa dapat berani untuk bertanya dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan antusias siswa bertanya saat proses pembelajaran dengan responden kuesioner dari guru dan siswa.



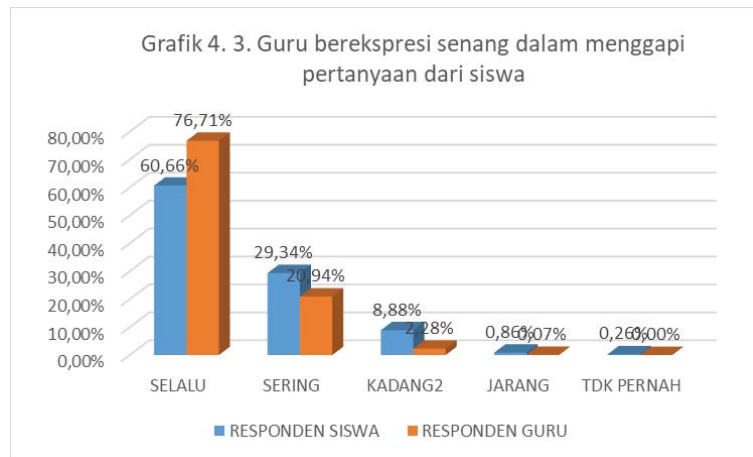
Dari tabel 4.1 terlihat bahwa siswa sudah mulai antusias bertanya saat proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari responden siswa yang menjawab selalu antusias sebanyak 25,68 % dan responden guru menjawab selalu sebanyak 31,68%. Selain itu, respondes siswa yang menjawab sering sebanyak 28,99% dan responden guru yang menjawab sering sebanyak 48,32%.

Tanggapan positif guru terhadap pertanyaan dari siswa menunjukkan bahwa guru telah menerapkan umpan balik. Dalam pembelajaran, guru hanya diperbolehkan memberikan tanggapan positif yang diberikan kepada siswa, walaupun pertanyaannya kurang sesuai atau kurang menarik. Berikut ini merupakan tanggapan positif guru terhadap pertanyaan dari siswa saat proses pembelajaran.



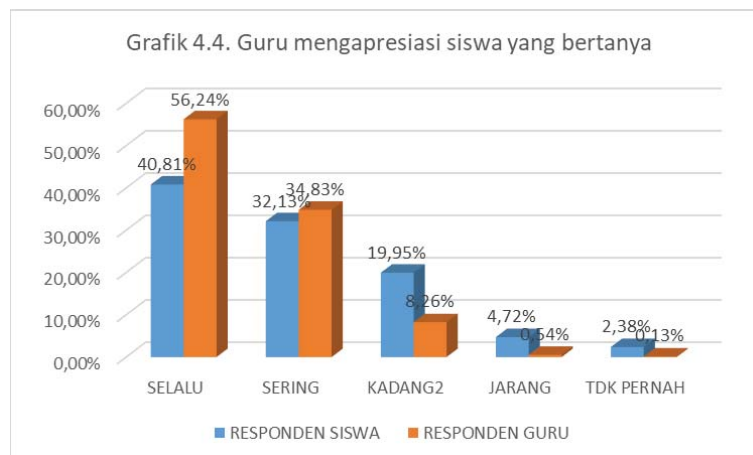
Dari tabel 4.2 terlihat bahwa guru telah menanggapi positif terhadap pertanyaan dari siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari responden siswa yang menjawab bahwa guru selalu menanggapi positif setiap pertanyaan yang diajukan oleh siswa yakni sebanyak 63,13 % dan responden guru menjawab selalu sebanyak 75,84%.

Eksresi guru dalam menanggapi pertanyaan dari siswa menunjukkan bahwa guru telah menerapkan umpan balik. Guru diharapkan dapat memberikan ekspresi senang sehingga dapat memotivasi siswa dalam menanggapi pertanyaan dari siswa dengan memberikan penghargaan baik secara verbal maupun non verbal. Berikut ini merupakan ekspresi guru dalam menanggapi pertanyaan dari siswa pada proses pembelajaran.



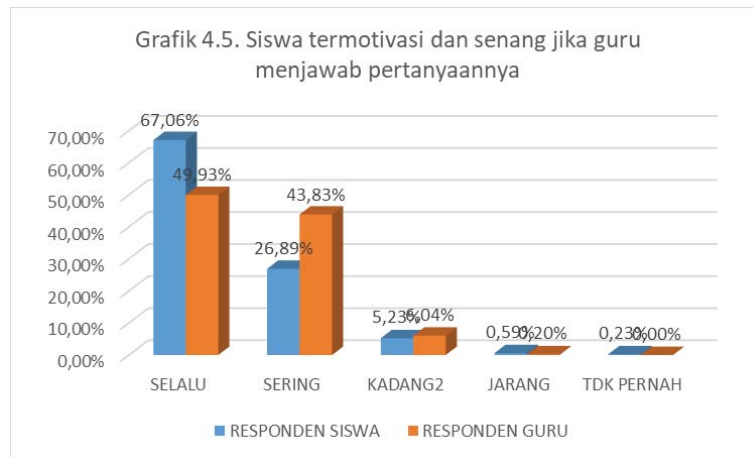
Dari tabel 4.3 terlihat bahwa mayoritas guru berekspresi senang dalam menanggapi pertanyaan dari siswa. Hal ini dapat dilihat dari responden siswa yang menjawab bahwa guru selalu guru berekspresi senang dalam menanggapi pertanyaan dari siswa yakni sebanyak 60,66 % dan responden guru menjawab selalu sebanyak 76,71%.

Apresiasi guru terhadap siswa yang bertanya harus selalu dilakukan. Apresiasi tersebut dapat berupa penghargaan baik verbal maupun non verbal, contoh penghargaan kepada siswa yang bertanya dalam kalimat verbal “bagus pertanyaannya”. Hal ini berdampak siswa akan semangat dalam bertanya jika kurang memahami suatu materi. Berikut ini hasil kuesioner apresiasi guru terhadap siswa yang bertanya.



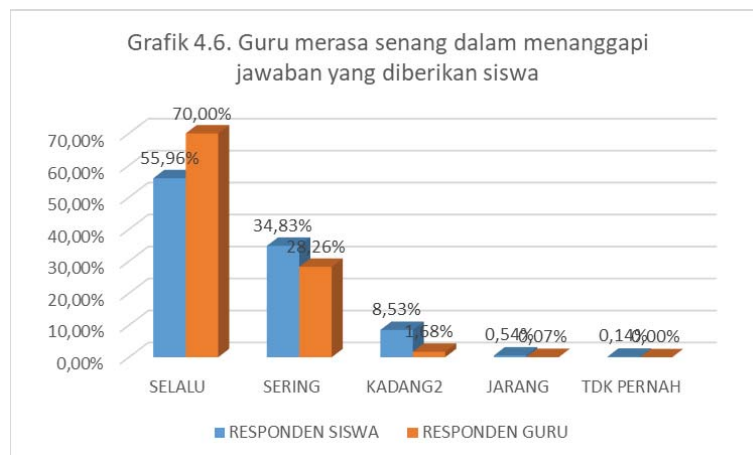
Dari tabel 4.4 terlihat bahwa mayoritas guru mengapresiasi siswa yang bertanya. Hal ini dapat dilihat dari responden siswa yang menjawab bahwa guru selalu mengapresiasi siswa yang bertanya dari jawaban siswa yakni sebanyak 40,81% dan jawaban guru sebanyak 56,24%.

Ekspresi siswa jika guru menjawab pertanyaannya menunjukkan kepuasan siswa atas jawaban yang telah diberikan oleh guru. Jika siswa merasa senang dengan jawaban yang diberikan oleh guru akan membuat siswa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Berikut ini hasil kuesioner apresiasi guru terhadap siswa yang bertanya.



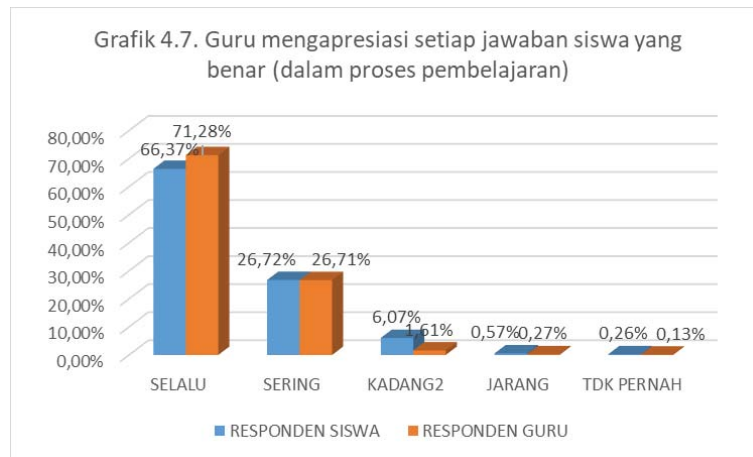
Dari tabel 4.5 terlihat bahwa mayoritas guru menjawab siswa terlihat termotivasi dan senang jika guru menjawab pertanyaannya. Hal ini dapat dilihat dari responden siswa yang menjawab bahwa siswa selalu termotivasi dan merasa senang jika guru menjawab pertanyaannya sebanyak 67,06% dan jawaban guru sebanyak 49,93%.

Eksresi guru dalam menanggapi jawaban dari siswa mempengaruhi semangat menjawab siswa. Seringkali guru bertanya namun siswa tidak ada yang menjawab pertanyaan guru, walaupun beberapa siswa telah mengetahui jawabannya. Untuk itu, guru harus menanggapi positif setiap jawaban yang diberikan oleh siswa, baik jawabannya itu benar maupun salah. Berikut ini hasil kuesioner ekspresi guru dalam menanggapi jawaban dari siswa mempengaruhi semangat menjawab siswa.



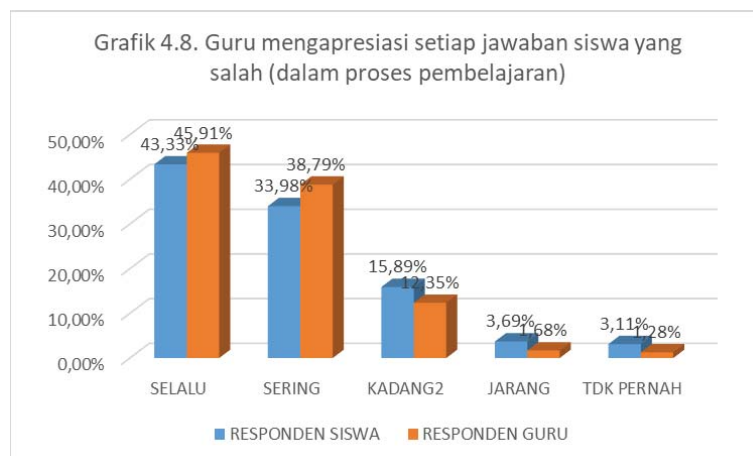
Dari tabel 4.6 terlihat bahwa lebih dari setengah guru yang menanggapi positif setiap jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Lebih dari setengah siswa menjawab bahwa guru selalu merasa senang dalam menanggapi jawaban yang diberikan oleh siswa. Sementara guru menjawab 70% selalu merasa senang menanggapi jawaban dari siswa.

Apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang benar merupakan salah satu bentuk umpan balik positif. Sering kali guru lupa untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab dengan benar. Apresiasi tersebut dapat dilakukan dengan bahasa verbal maupun non-verbal. Berikut ini hasil kuesioner apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang benar.



Dari tabel 4.7 terlihat bahwa mayoritas guru selalu mengapresiasi setiap jawaban siswa yang benar. Responden guru yang menjawab selalu mengapresiasi setiap jawaban siswa yang benar sebesar 71,28%, sedangkan responden siswa sebesar 66,37%. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah memberikan apresiasi kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran dengan benar.

Apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang salah merupakan bentuk umpan balik positif. Sering kali guru memberikan umpan balik yang negatif, seperti “jawabannya salah”. Selayaknya guru selalu memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab walaupun jawabannya salah. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang menjawab dengan salah tidak merasa kecil hati dan akan merasa malu untuk menjawab pertanyaan lagi yang diberikan oleh guru. Siswa akan memilih tidak menjawab dari pada mendapatkan umpan balik yang negatif. Berikut ini hasil kuesioner apresiasi guru terhadap jawaban siswa yang salah.



Dari tabel 4.8 terlihat bahwa kebanyakan guru selalu dan sering mengapresiasi setiap jawaban siswa yang salah. Responden guru yang menjawab selalu mengapresiasi setiap jawaban siswa yang salah sebesar 45,91,28%, sedangkan responden siswa sebesar 43,33%. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah memberikan apresiasi kepada siswa yang telah menjawab pertanyaan dengan salah. Walaupun lebih dari setengahnya masih belum selalu memberikan.

Hasil observasi kepada guru saat mengajar dikelas pada lima daerah sampel menemukan bahasa umpan balik yang dilakukan oleh guru, diantaranya umpan balik motivasi, penghargaan, tantangan, dan ada juga yang umpan balik negatif.

Pertama, Guru memberikan **motivasi** ke siswa diantaranya: (i) Jawaban siswa benar, guru memotivasi dengan mengatakan “Bagus, tingkatkan belajarnya”; (ii) guru melihat jawaban siswa, guru memotivasi

“Hampir benar, teruskan”; (iii) siswa belajar dengan baik, guru meninstruksikan “Tepuk tangan untuk kita semua”. (iv) menyemangati siswa untuk menjawab pertanyaan “Ayo siapa yang bisa menyebutkan, nanti dikasih coklat”.

Kedua, guru memberikan **penghargaan** kepada siswa: (i) siswa telah menjawab seluruh pertanyaan dari guru, guru mengatakan “hebat, semua telah belajar dengan baik”; (ii) siswa telah maju mengerjakan soal guru memberikan hadiah coklat dan memberikan tepuk tangan; (iii) Guru memberikan kata-kata yang baik kepada siswa yang telah menjawab atau bertanya, diantaranya mengatakan “hebat, great, very good, bagus, dan lain-lain”.

Ketiga, guru memberikan **tantangan** kepada siswa kepada siswa: guru memberikan tantangan kepada siswa diantaranya (i) dapatkan kamu memberikan contoh yang lain; (ii) what another example; (iii) ada yang lain yang dapat menjawabnya; (iv) apa lagi, dan lain-lain.

Keempat, guru memberikan umpan balik **negatif**, diantaranya: (i) menyalahkan jawaban siswa; (ii) membiarkan siswa yang berbuat salah, contohnya terlambat, bercanda, ngobrol, dan berlari-lari; (iii) mengatakan kalimat negatif “kok ngerjain lambat banget, nggak bisa yah, gitu saja tidak bisa”; (iv) menghukum siswa yang menjawab salah dengan disuruh berdiri; (v) tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang menjawab dengan benar.

3. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan proses pembelajaran di kelas dilakukan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah. Berikut ini adalah Hasil DKT dengan Pengawas dan kepala sekolah di Kota Tangerang dan Makassar.

Pengawas sekolah menyebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan kepada sekolah dan guru khususnya terkait standar nasional pendidikan. Selain pengawas mengawasi sekolah juga mempunyai tugas tambahan mengawasi kegiatan pembelajaran guru matapelajaran. Setiap pengawas mempunyai tugas pengawasan terdiri dari beberapa matapelajaran. Misalkan satu pengawas bertugas mengawasi guru matapelajaran IPS, PPKn, dan PABP dalam satu kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan pengawas tidak optimal dalam pengawasan terhadap guru matapelajaran karena satu pengawas mengawasi beberapa matapelajaran. Dalam melakukan pengawasan terhadap guru matapelajaran, selain pengawas melihat perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru juga terkadang melakukan supervisi ke dalam kelas. Namun, pengawasannya belum mengarah kepada pelaksanaan umpan balik di kelas.

Adapun Kepala sekolah rutin setiap hari melakukan pengawasan proses pembelajaran, terutama pada kedisiplinan. Selain itu, Kepala sekolah melakukan pengawasan pembelajaran dalam bentuk supervisi/observasi ke guru pada saat proses pembelajaran. Supervisi tersebut khususnya melihat cara dan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan RPP yang dibuat oleh guru. Kepala sekolah belum mencantumkan kegiatan umpan balik dalam instrumen penilaian supervisi.

Pembinaan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Pengawas melakukan binaan terhadap sekolah binaannya selain itu melakukan pembinaan pula terhadap guru matapelajaran binaannya. Contoh bentuk binaannya salah satunya sebagai narasumber dalam workshop atau pelatihan. Namun materi pembinaannya belum terkait dengan umpan balik. Sementara itu, kepala sekolah melakukan pembinaan biasanya dilakukan pada saat rapat dan setelah melakukan supervisi. Kepala sekolah memberikan pembinaan kepada guru yang telah disupervisinya, namun belum khusus kepada umpan balik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Persiapan guru dalam penerapan umpan balik pada proses pembelajaran masih belum optimal. Walaupun mayoritas guru sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, namun pengetahuan dan pemahaman guru terhadap pelaksanaan umpan balik masih minim bahkan salah. Misalkan para guru dan kepala sekolah menganggap bahwa umpan balik merupakan kegiatan refleksi, evaluasi, remedial, dan pengayaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena materi dan buku panduan dalam pelatihan tersebut belum memuat tentang materi umpan balik.
- b) Mayoritas guru sudah melakukan kegiatan umpan balik, namun ditemukan beberapa guru melakukan umpan balik negatif. seperti menyalahkan siswa yang telah berusaha menjawab, menyuruh berdiri siswa yang menjawab salah, mengatakan kalimat yang merendahkan “masa gitu saja tidak bisa”. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman guru masih rendah tentang umpan balik positif. Sehingga guru dalam mengajarnya memberikan umpan balik yang kurang tepat.
- c) Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan umpan balik telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun pengawasannya belum melihat kegiatan umpan balik yang dilakukan oleh guru. Hal ini mengakibatkan dalam pengawasan dan pembinaan belum memuat terkait umpan balik.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan diatas, untuk mengoptimalkan pelaksanaan umpan balik dalam proses pembelajaran dapat diberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Optimalisasi Persiapan Penerapan Umpan Balik dalam Proses Pembelajaran

- a. Pemerintah membuat buku panduan tentang penerapan umpan balik dalam proses dan hasil pembelajaran yang menjadi pegangan guru, kepala sekolah, dan pengawas.
- b. Pemerintah mengadakan pelatihan khusus tentang umpan balik atau mengintegrasikan pada pelatihan Kurikulum 2013. Pelatihan tersebut bukan hanya sekedar teori melainkan dilakukan praktek dalam melakukan umpan balik positif. Selain itu, instruktur dalam pelatihan tersebut harus benar-benar yang memahami umpan balik dan menerapkannya dalam pelatihan tersebut.
- c. Guru memunculkan kegiatan umpan balik pada RPP, sehingga dapat mengingatkan guru dalam melakukan umpan balik pada saat pembelajaran.

2. Penguatan Pelaksanaan Umpan Balik dalam Proses Pembelajaran melalui

- a. MGMP dapat melakukan kegiatan *lesson studi* untuk memastikan kegiatan umpan balik positif dilaksanakan oleh guru. Lesson study adalah suatu proses kolaboratif pada sekelompok guru ketika mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang suatu skenario pembelajaran (yang meliputi kegiatan mencari buku dan artikel mengenai topik yang akan diajarkan); membelajarkan peserta didik sesuai dengan skenario (salah seorang guru melaksanakan pembelajaran sedangkan yang lain mengamati), mengevaluasi dan merevisi skenario pembelajaran, membelajarkan lagi skenario pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi pembelajaran dan membagikan hasilnya dengan guru-guru lain (mendiseminaskannya).
- b. Guru dapat melakukan kegiatan umpan balik positif baik di dalam proses pembelajaran ataupun diluar proses pembelajaran.

3. Penguatan peran Pengawasan dan pembinaan dalam Pelaksanaan Umpan Balik

- a. Kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi menjadikan kegiatan umpan balik yang dilakukan oleh guru menjadi sebagai salah satu yang diamati dan dinilai dan hasilnya dapat menjadi dasar dalam melakukan pembinaan kepada guru tersebut.
- b. Pemerintah memberikan pelatihan umpan balik yang pertama kali dilakukan yakni kepada pengawas sekolah sebelum kepada guru. Sehingga pengawas sekolah dapat membantu dalam menyebarluaskan ke guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, wahyu., Hudiono, Bambang., Hamdani (2015). Pemberian Umpan Balik (Feedback) Terhadap Hasil Belajar Dan Self-Efficacy Matematis Siswa Kelas VII SMP. *Jurnal pendidikan dan pembelajaran khatulistiwa*. Volume 5 Nomor 9 hal 1 – 13.
- Bellen. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metoda Pembelajaran (Belajar Aktif)*. Jakarta, Pusat Kurikulum, Balitbang, Kemendikbud.
- Faishal, Ahmad. (2015). Pengembangan e-modul pembelajaran Pneumatik pada Mata Pelajaran Proses Dasar Kejuruan Mesin Di SMKN 3 Yogyakarta. *E-journal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Febriyanti, Chatarina. 2013. Pengaruh Bentuk Umpan Balik Dan Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Trigonometri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*. dalam jurnal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/125.
- Fernando, F., Jatra, R & Reski. 2017. Upaya Pengembangan *Self-Esteem* Siswa SMP melalui Pemberian Umpan Balik. *Journal Sport Area*. Volume 2, Nomor 2, hal 96 -104.
- Hattie, Jhon A.C (2009). *A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London and New York: Education Endowment Foundation.
- Jumiatun, Samad, A, & Ma'ruf. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Pemberian Tugas Terstruktur Disertai Umpan Balik pada Model Pembelajaran Langsung Peserta Didik Kelas VIIA SMP Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa. *Jurnal Pendidikan Fisika Unismuh*. Volume 4 Nomor 2. Hal 185 – 196.
- Lestariningsih. 2014. Evaluasi Hasil Belajar Siswa yang Diberi Umpan Balik Positif dan Negatif pada Pokok Bahasan Pecahan. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo*. Volume 2, Nomor 1.
- Slameto. 1988. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
- Windarsih, Chandra Asri. 2016. Aplikasi Teori Umpan Balik (Feedback) Dalam Pembelajaran Motorik Pada Anak Usia Dini. Bandung: PGPAUD STKIP. *Jurnal Tunas Siliwangi*. Volume 2, Nomor 1.

DIGITALISASI DAN PEMBELAJARAN BERKUALITAS YANG INKLUSIF: PEMANFAATAN *PLATFORM* PEMBELAJARAN DIGITAL OLEH GURU DAN SISWA

Irsyad Zamjani, Diyan Nur Rakhmah W, Siti Nur Azizah,

Hermanto Waruwu, Erni Hariyanti

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Masa depan pembelajaran pada era teknologi komunikasi sekarang ini adalah digital. Digitalisasi dalam bidang pendidikan ditanggapi dengan hadirnya berbagai sumber belajar berbasis daring untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di Indonesia *platform* pembelajaran digital semacam itu telah dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan sistem layanan *platform* pembelajaran, pemanfaatannya oleh siswa dan guru, jangkauan dan keterjangkauan layanan, dan dukungan pemerintah dalam memperluas akses yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan –teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok terpusat, wawancara, studi dokumen, dan survei daring. Hasil penelitian menunjukkan: 1) bentuk atau kemasan layanan suatu *platform* disesuaikan dengan karakteristik dari target penggunanya, baik – guru, siswa, – maupun keduanya; 2) *platform* dimanfaatkan oleh guru untuk mengorganisasi pembelajaran yang efektif, sedangkan oleh siswa digunakan untuk membantu lebih memahami pelajaran di sekolah; 3) kuantitas pengguna suatu *platform* tidak selalu ditentukan gratis atau berbayar, tetapi lebih oleh kualitas konten, kemasan materi, dan strategi promosi; dan 4) dukungan pemerintah bagi perluasan akses pembelajaran digital dalam bentuk penyediaan infrastruktur pembelajaran dan kerja sama dengan *platform* swasta. Penelitian ini merekomendasikan strategi perluasan akses pembelajaran digital yang berkualitas dan terjangkau melalui pemanfaatan dan optimalisasi layanan berbagai *platform* yang ada.

Kata kunci: digitalisasi, keterjangkauan, pembelajaran berkualitas, *platform* pembelajaran.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Akses pendidikan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan intervensi anggaran. Jenjang pendidikan dasar telah menikmati angka partisipasi murni yang mendekati universal sejak satu dekade yang lalu (SD: 93% dan SMP: 77%). Di jenjang menengah dan tinggi, angka partisipasi masing-masing masih 63,7% dan 33,4% (Kemendikbud, 2018). Akses bukan satu-satunya isu dalam pendidikan. Mutu pendidikan juga penting karena memiliki dampak lebih luas pada daya saing suatu bangsa (Sahlberg, 2006).

Peningkatan mutu pendidikan sudah terjadi, tetapi masih berjalan lambat (World Bank, 2018). Di Indonesia ukuran mutu pendidikan sering dikaitkan dengan data dalam survei hasil belajar siswa yang terlihat dalam berbagai tes internasional. Selama lima belas tahun berpartisipasi dalam *Programme for*

International Student Assessment (PISA), misalnya, posisi Indonesia tidak pernah beranjak dari strata bawah. Peningkatan mutu hasil belajar di Indonesia juga terkendala masalah pemerataan akses pendidikan itu sendiri. Ketimpangan mutu pendidikan masih ditemukan di berbagai wilayah dan sekolah. Permasalahan baru tergambar dari berbagai hasil analisis dari survei PISA yang menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas terjadi bukan antara individu di dalam sekolah, melainkan di antara sekolah yang berbeda.

Keterbatasan ruang kelas, guru, dan keterbatasan lain dalam pendidikan selayaknya tidak lagi menjadi hambatan dalam pencapaian pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran bermutu dapat dinikmati oleh setiap anak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital karena masa depan pembelajaran adalah digital (Warschauer, 2007). Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan pembelajaran yang bersifat interaktif dapat dikembangkan lebih intensif dan bebas diakses oleh siswa (Pranoto, 2019).

Gagasan tentang pengembangan lingkungan belajar yang memungkinkan anak untuk belajar secara swakelola, harus dapat mengatasi keterbatasan fasilitas dan sarana pendidikan yang selama ini menghambat penyediaan layanan pembelajaran yang lebih luas dan merata. Dalam konteks global, konsep pendidikan berbasis kemandirian siswa dengan memanfaatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan seperti program *Self Organized Learning Environment (SOLE)* telah lama diperkenalkan. Konsep ini mencoba mengoptimalkan keberadaan teknologi informasi sebagai perangkat pembelajaran siswa (startsole.org, 2019).

Penggunaan internet di lingkungan sekolah memberikan dampak pada pengembangan pembelajaran berbasis teknologi digital. Di Indonesia sebagian besar sekolah telah tersambung dengan internet walaupun masih ada kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 1 Presentase Sekolah Yang Menggunakan Fasilitas Internet Menurut Jenjang Pendidikan Dan Status Sekolah, 2018

Jenjang Pendidikan	Perkotaan dan Perdesaan		
	Status Sekolah		
	Negeri	Swasta	Negeri dan Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/dan sederajat	67,79	84,25	70,57
SMP/dan sederajat	71,63	88,01	81,12
SMA/dan sederajat	94,24	92,72	93,11
Seluruh Jenjang	69,93	88,48	76,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Selain penggunaan internet, revolusi digital dalam praktik pembelajaran salah satunya ditunjukkan melalui penggunaan perangkat digital di ruang kelas. Data survei Cambridge Assesment International Education¹ menunjukkan bahwa sebanyak 42% siswa menggunakan *smartphone* dalam pembelajaran mereka, dan 48%-nya menggunakan desktop (Cambridge Assesment International Education, 2018).

¹ Survey Cambridge Assesment International Education pada 2018 dilakukan pada sepuluh negara, yaitu Argentina, China, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat

Konsep pembelajaran kapan pun dan di mana pun direspons dengan bertumbuhnya perusahaan rintisan (*startup*) bidang pendidikan yang menawarkan *platform* pembelajaran digital melalui aplikasi yang dapat diakses oleh setiap orang. Keberadaan mereka tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran, tetapi juga berperan dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa, yang merupakan tuntutan dalam pencapaian kecakapan global. Pada beberapa contoh *platform* pembelajaran digital berhasil berekspansi memperluas perkembangannya di luar negara asalnya, seperti *Khan Academy*, *Geekie*, *Zenius*, dan *Ruangguru*,

Pendidikan pada saat ini tidak lagi menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Konsep *student centred learning* menempatkan siswa tidak sekadar menjadi objek, tetapi juga subjek pendidikan. Beberapa kajian menemukan bahwa “membalik” proses pendidikan menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya perbaikan mutu hasil belajar siswa (Rundle, 2015). Praktik baik ditemukan salah satunya pada *Geekie*, yaitu salah satu *platform* pembelajaran digital di Brazil yang berkembang menjadi *platform* pembelajaran adaptif. *Geekie* menawarkan teknologi sebagai instrumen untuk “membalik” proses pendidikan, dengan membantu siswa menemukan solusi secara individu untuk memecahkan suatu permasalahan pembelajaran yang dihadapi (Rundle, 2015). Upaya tersebut dinilai efektif karena memudahkan guru untuk menentukan intervensi yang tepat dalam pembelajaran (UNESCO, 2019).

Pasar pendidikan kemudian dihadapkan pada beragam pilihan *platform* pembelajaran digital yang dikembangkan, tidak hanya oleh swasta, tetapi juga instansi pemerintah. Kehadirannya di Indonesia bertumbuh sejak tahun 2007 dan tercepat sebesar 25% setiap tahunnya melebihi negara-negara Asia, bahkan seluruh dunia (Kompas, 2019). Di ranah Pemerintah pada tahun 2011 dikembangkan *platform* rumah belajar sebagai bagian dari pengejawantahan prinsip belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja (Kemendikbud, 2011). Peran *platform* pembelajaran digital dalam penyediaan materi pelajaran, bimbingan belajar berbasis daring, penyediaan tutor, hingga konsultasi manajemen pembelajaran untuk sekolah dan pemerintah daerah dirasa perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pemerluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi lebih banyak anak di Indonesia di luar kebijakan pendidikan yang sifatnya formal dan normatif.

Keberadaan *platform* pembelajaran digital tidak sekadar untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas layanan pendidikan. Materi pembelajaran disusun dan disajikan secara profesional dengan berlandaskan kebutuhan siswa. Keberadaan berbagai *platform* pembelajaran digital berpotensi mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, baik di level praktik maupun kebijakan, sehingga memungkinkan pembelajaran yang inklusif dengan berbagai keuntungan: murah, mudah diakses, dan fleksibel.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem layanan yang disediakan oleh *platform* pembelajaran digital di Indonesia, pemanfaatannya dalam pembelajaran, jangkauan dan keterjangkauan layanan terhadap peserta didik dan dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembelajaran yang lebih inklusif.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- a. sistem layanan yang disediakan oleh *platform* pembelajaran digital;
- b. pemanfaatan *platform* pembelajaran digital oleh siswa dan guru;
- c. jangkauan dan keterjangkauan layanan *platform* pembelajaran digital bagi peserta didik;
- d. dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembelajaran yang lebih inklusif.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi strategi pengembangan pembelajaran digital di Indonesia melalui pemanfaatan platform pembelajaran digital.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang platform pembelajaran digital sudah banyak dilakukan, yang di antaranya dirujuk dalam penelitian ini. Penelitian pertama adalah karya Daniel Krutka dan Michael Milton yang berjudul *The Enlightenment Meets Twitter; Using Social Media in the Social Studies Classroom* (2013). Penelitian ini merupakan pembuktian kontradiktif kebijakan pelarangan penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Simpulan penelitian ini menyarankan sekolah menggunakan media sosial karena bermanfaat memperluas penguasaan informasi dan pengalaman pembelajar secara keseluruhan serta membangun sikap kritis siswa.

Penelitian kedua adalah penelitian Michael Rundle yang berjudul *How Geekie's Adaptive Education Shattered 'Centuries' of Pain in Brazil* (2015) berfokus pada *Geekie*, yaitu *platform* pembelajaran digital di Brazil yang adaptif dan menawarkan teknologi sebagai instrumen untuk “membalik” proses pembelajaran. *Geekie* menjadi bagian dari ranah kebijakan pendidikan di Brazil karena dinilai membantu siswa menemukan solusi permasalahan pembelajaran secara individu dengan skala besar. Penelitian ini menyimpulkan konsep pendidikan yang tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada siswa (*student centred learning*).

Penelitian ketiga adalah karya Daniel P. Kelly dan Teomara Rutherford yang berjudul *Khan Academy as Supplemental Instruction: A Controlled Study of a Computer-Based Mathematics Intervention* (2017). Penelitian ini membahas penggunaan *Khan Academy* sebagai *platform* pembelajaran digital dengan mengujicobakannya untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 7 dalam mata pelajaran Matematika di North Carolina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Khan Academy* yang berbasis *open educational resources* memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kemampuan siswa menyelesaikan tugas sekolah dan pemahaman tentang topik dalam mata pelajaran tersebut.

2. Kerangka Teori

a. Pembelajaran Digital dan Inklusi Sosial

Pembelajaran digital merupakan cara untuk menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat dan inklusif (Devaux dkk. 2017). Pembelajaran digital mampu menciptakan fleksibilitas kehadiran siswa dalam pembelajaran. Namun, pembelajaran digital memiliki setidaknya dua tantangan. Pertama, soal kesenjangan digital (*digital divide*), yaitu kondisi - yang memperlihatkan bahwa akses pada teknologi tidak setara antarwilayah ataupun antarkelompok. Kedua, pembelajaran digital yang tersedia selama ini masih berjalan di ranah pendidikan nonformal dan menjadi pelengkap pendidikan formal. Akibatnya, pembelajaran digital ini lebih banyak dimanfaatkan oleh anak-anak yang bersekolah daripada yang belum bersekolah. *Platform* penyedia kursus massal yang berbasis daring (*massive open online courses/ MOOC*), misalnya, kebanyakan diikuti oleh para lulusan perguruan tinggi (Devaux, et al, 2017).

Platform pembelajaran digital mendorong peningkatan mutu pendidikan pada -sekolah formal karena tiga hal: 1) sasaran pembelajaran dari berbagai *platform* pembelajaran ini bukan hanya siswa, -melainkan juga guru dan manajemen sekolah; 2) materi pembelajaran disiapkan oleh para spesialis dan pakar pembelajaran di setiap bidang; dan 3) materi pembelajaran disusun atraktif dan dapat menjadi strategi pembelajaran yang inklusif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

b. Teori Konektivisme dalam Pendidikan

Terdapat dua asumsi mengenai bagaimana menempatkan teknologi dan pembelajaran pada era digital ini. Asumsi pertama adalah bahwa teknologi hanya menjadi alat untuk mendukung konsep, perspektif, dan tata cara mengajar dan belajar lama. Asumsi kedua adalah teknologi, yang merupakan agen perubahan yang mengubah konsepsi, perspektif, dan tata cara mengenai belajar. Teori lama tentang belajar, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, tidak lagi relevan untuk merespons perubahan sosial dan kultural yang diakibatkan oleh revolusi teknologi (Siemens, 2004). Dalam dunia yang saling terhubung dan dengan begitu banyaknya pengetahuan yang mudah diperoleh, tidak dapat lagi orang secara personal mendapatkan pembelajaran yang dibutuhkan. Siapa pun dapat membangun kompetensi dengan menciptakan koneksi. Pengetahuan yang melimpah ruah tersebut tidak mungkin dialami dan disimpan seluruhnya dalam diri seseorang. Konsep konektivisme muncul dengan gagasan bahwa manusia “menitipkan” berbagai pengetahuan pada orang lain sehingga mengumpulkan pengetahuan berarti mengumpulkan lebih banyak orang (Siemens, 2004).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Unit analisis penelitian adalah guru, siswa, dan orang tua yang anaknya menggunakan *platform* pembelajaran digital, serta manajemen *platform* pembelajaran digital milik pemerintah dan swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif, yang mencakup diskusi kelompok terpusat (DKT), wawancara mendalam, survei, dan studi dokumen. Survei dilakukan secara daring untuk mengetahui persepsi siswa dan guru tentang pemanfaatan *platform* pembelajaran digital melalui jaringan duta rumah belajar di Indonesia. Penelitian dilakukan di lima daerah, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Trenggalek, dan Kota Palembang dengan kriteria pengguna terbanyak *platform* rumah belajar dan daerah dengan pemerintah yang telah melakukan kerja sama dengan *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

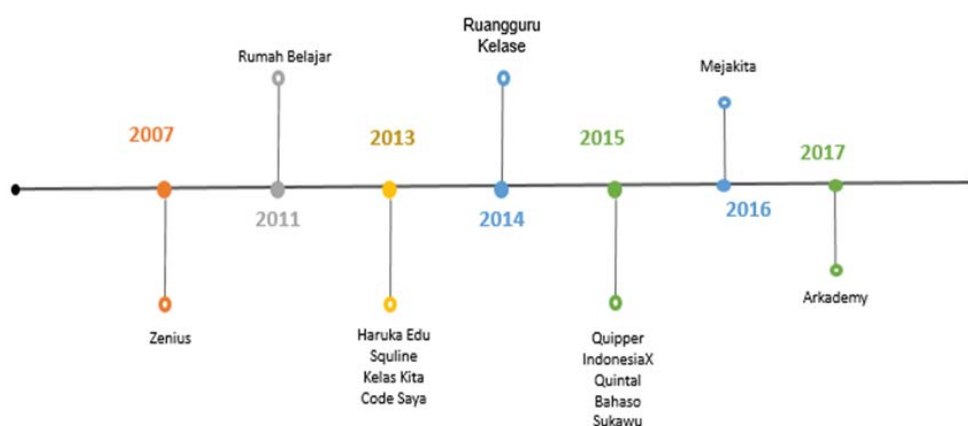
1. Sejarah Perkembangan Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis *web* atau digital, yang dinilai memiliki potensi pengembangan yang baik pada saat ini dan pada masa yang akan datang (Munir, 2017). Perkembangan teknologi pembelajaran digital diawali dengan pengembangan perangkat lunak (program aplikasi) yang dapat menunjang peningkatan mutu pembelajaran. Perangkat lunak tersebut memungkinkan para pengembang pembelajaran bekerja sama dengan ahli materi pembelajaran (*content specialists*) mengemas materi pembelajaran digital, yang kemudian dimasukkan ke dalam jaringan agar dapat diakses secara luas.

Platform pembelajaran digital di Indonesia tumbuh sejak pesatnya penggunaan internet sebagai media komunikasi dan informasi. Diawali pada 1990 era ketika *computer-based training (CBT)* mulai bermunculan dalam bentuk aplikasi *E-learning* berbasis *website*, kemudian diperkenalkan secara luas pada 1999 dan berkembang menjangkau lebih banyak pengguna. Aplikasi ini menggabungkan laman informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya beragam dengan perpaduan multimedia, *video streaming*, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil.

Di Indonesia *platform* pembelajaran digital mengambil peran dalam pengembangan *startup* di bidang pendidikan. *Platform-platform* tersebut tumbuh dalam beragam bentuk dengan pendekatan yang sama, yaitu untuk memberdayakan ekosistem pendidikan di Indonesia melalui perkembangan teknologi yang

mumpuni (Ali, 2018). Beberapa *platform* pembelajaran telah melakukan transformasi dalam rangka menarik pasar pendidikan Indonesia. Pengembangan dan transformasi layanan yang dilakukan oleh *platform* pembelajaran digital yang dikelola oleh swasta, terutama yang memiliki perusahaan induk di luar Indonesia dan bergerak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan siswa di negara tersebut. Umumnya *platform* pembelajaran digital yang ada di Indonesia merupakan bagian dari layanan utama perusahaan, yaitu *learning management system* (LMS) yang beroperasi secara berbeda di negara tempat ia berada. Layanan tersebut berkembang dengan menyediakan fasilitas bimbingan belajar, tutor daring, hingga info masuk perguruan tinggi. Keberagaman *platform* pembelajaran digital juga terletak pada dasar layanan yang diberikan oleh setiap *platform*. Beberapa *platform* dibangun pada konsep bimbingan belajar dan konsultasi belajar yang bersifat daring (*Quipper, Ruangguru, Zenius, dsb.*) serta berbasis komunitas siswa di media sosial (*Mejakita dsb.*).



Sumber : Olah Data Perkembangan Platform Pembelajaran Digital di Indonesia, 2019

Gambar 1 Perkembangan *platform* pembelajaran digital di Indonesia

Di ranah pemerintah perkembangan pembelajaran digital juga menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran melalui *platform* rumah belajar. Rumah belajar merupakan hasil pengembangan portal *edukasi.net*, yang diluncurkan pada 15 Juni 2011 berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK sebagai sumber media pembelajaran. rumah belajar dikembangkan sebagai salah satu bentuk respons pemerintah dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Kemdikbud, 2019).

2. Sistem Layanan *Platform* Pembelajaran Digital

a. Target Pengguna

Pada umumnya *platform* pembelajaran digital disediakan untuk pengguna yang berasal dari unsur siswa dan guru. Selain untuk pengguna dari kalangan tersebut, beberapa *platform* pembelajaran digital yang ada di luar negeri juga menyediakan layanan bagi orang tua agar dapat terlibat aktif dalam mengawasi perkembangan pembelajaran anak mereka seperti *Geekie*.

Pemahaman tentang profil calon pengguna penting dilakukan agar *platform* pembelajaran digital dapat diterima oleh pasar. Data perilaku pengguna internet (*user behavior data*) adalah aset gratis dan berharga yang dimiliki perusahaan digital (Zuboff dalam Sudibyo, 2019). Oleh karena itu, sangat penting memasukkan profil pengguna layanan dalam peta strategi bisnis sebuah layanan digital dan menjadi dasar penentuan strategi pemasaran kepada para calon pengguna. Hal yang sama juga dilakukan oleh rumah belajar yang menetapkan target layanan pada guru dan siswa. Dalam praktiknya materi di rumah belajar

juga dapat digunakan oleh pengguna lain, selain guru dan siswa, karena layanan yang tidak berbayar dan terbuka untuk diakses oleh publik.

Di rumah belajar, penentuan kembali target layanan agar menjadi lebih fokus perlu dilakukan. Jika rumah belajar menetapkan target layanan adalah guru dan siswa, Akan tetapi, dalam praktiknya target pengguna yang utama adalah guru sebagai fasilitator yang menjembatani siswa dan layanan rumah belajar. Pada umumnya materi yang disediakan oleh rumah belajar tidak dapat langsung dipahami dan digunakan oleh siswa. Siswa membutuhkan guru untuk mengarahkan pemanfaatan materi yang ada di rumah belajar. Hal ini yang membuat prinsip pengembangan rumah belajar berbeda dengan prinsip pengembangan layanan *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta. Pemberdayaan guru adalah yang utama. Rumah belajar pada umumnya lebih mengakomodasi kebutuhan guru dalam mengajar. Hampir di semua fitur di rumah belajar menempatkan peran penting guru. Hanya fitur sumber belajar yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh siswa.

Target pengguna yang lebih banyak menasar guru menjadikan beberapa program pemanfaatan rumah belajar dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mengoptimalkan keterlibatan guru dalam menghasilkan konten sumber belajar di rumah belajar. Secara berkala dilakukan pelatihan guru dalam pemanfaatan rumah belajar dan teknis pembuatan video pembelajaran melalui proses seleksi dapat menjadi konten dalam rumah belajar. Sejak 2017 juga dilakukan seleksi duta rumah belajar dalam memperluas informasi pemanfaatan rumah belajar di daerah.

Selain untuk memahami karakteristik dan kebutuhan calon pengguna layanan, penentuan target layanan juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik daerah yang akan menjadi target layanan. Hal ini merupakan bagian dari strategi pasar yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengembangan *platform* pembelajaran digital. Karakteristik setiap daerah akan memberikan referensi kepada pengelola *platform* pembelajaran digital untuk mengemasnya agar sesuai dengan kebutuhan calon penggunanya. Di Provinsi Bali, misalnya, karakteristik daerah yang unik menjadikan Pemerintah Provinsi melakukan modifikasi rumah belajar dalam kategorisasi *Jejak Bali*. Hal ini yang kemudian dapat memperluas cakupan penggunaan rumah belajar di provinsi tersebut yang akan diadaptasi oleh daerah lain.

b. Pengemasan Layanan

Pada *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta, bentuk layanannya dikemas menarik sesuai dengan selera pengguna layanan, khususnya kalangan siswa. Tampilan awal di beranda laman didesain dengan atraktif dan unik dengan kombinasi warna dominan yang menjadi ciri khas yang dimiliki oleh setiap *platform*. Tata letak (*lay out*) beranda dan tampilan awal *platform* menjadi kunci utama yang menentukan ketertarikan calon pengguna layanan untuk menggunakan fitur-fitur-di dalam *platform* tersebut. Berbagai tawaran paket berlangganan juga dikemas menarik. Penempatan *brand ambassador* yang dipilih dari *public figure* di laman beranda, juga menjadi salah satu strategi promosi yang dinilai efektif menarik minat calon pengguna layanan yang umumnya adalah siswa. Pemilihan *brand ambassador* dinilai memberikan efek positif dalam meningkatkan penggunaan *platform* oleh siswa. Pada *Quipper*, misalnya, penempatan lebih dari satu orang *brand ambassador*, efektif meningkatkan jumlah pengguna *quipper* pada beberapa tahun belakangan ini (Quipper, 2019).

Di rumah belajar penggunaan *brand ambassador* sudah lebih dulu direlevansikan dengan penggunaan duta rumah belajar di setiap provinsi walaupun dampaknya belum banyak meningkatkan jumlah penggunanya. Oleh karena itu, mengadaptasi strategi promosi yang lebih dulu dilakukan oleh *platform-platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta, *brand ambassador* mulai digunakan dalam strategi

promosi rumah belajar sejak tahun 2019, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penggunanya rumah belajar agar lebih baik.

Penilaian dalam bentuk pernyataan pengalaman menggunakan *platform* pembelajaran digital atau testimoni, juga dinilai memberikan efek pendorong dalam meningkatkan jumlah pengguna layanan *platform* pembelajaran digital. Pada hampir seluruh *platform* pembelajaran testimoni siswa atau guru pengguna diletakkan secara strategis di bagian beranda depan layanan mereka. Penempatan tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa kualitas layanan *platform* yang mereka berikan selama ini adalah yang terbaik dan memuaskan secara akademik.

Interaksi yang dibangun antara siswa dan guru secara langsung di ruang kelas masih dianggap penting dan tidak tergantikan oleh guru dan orang tua. Hal tersebut dipahami para *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta yang sudah menjadikan prinsip atraktif dan interaktif dalam layanan mereka. Prinsip interaktif tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk materi pembelajaran, tetapi pada pola komunikasi bagi pengguna layanan *platform* dalam memahami setiap fitur dan layanan yang ditawarkan. Fitur *chatroom* disediakan secara terbuka sebagai media informasi layanan dan substansi materi yang tersedia di *platform*. Hal ini yang belum dimiliki oleh rumah belajar.

Ketersediaan fitur yang ditawarkan juga menjadi daya tarik. Produk layanan dikelompokkan dalam kategori tertentu berbentuk fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, seperti berdasarkan jenjang kelas, mata pelajaran, dan jenis kurikulum. Di beberapa *platform*, fitur dibagi menjadi dua, fitur utama dan fitur tambahan, salah satunya di rumah belajar yang dikembangkan melalui empat konsep utama, yaitu 1) *profesional development*; 2) *quality and education*; 3) *community building*; dan 4) *open educational resources*.

Saran dan masukan serta perilaku pengguna layanan, menjadi dasar pengembangan *platform*, termasuk penentuan tentang perlu dan tidaknya fitur tertentu sebagai bagian dari layanan yang ditawarkan ke pengguna. Di *platform-platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta, evaluasi berkala dilakukan terhadap perubahan fitur seperti pengurangan ataupun penambahan fitur. Hal ini merupakan dinamika perkembangan perusahaan yang biasa terjadi dan menentukan eksistensi *platform* apakah sesuai dengan kebutuhan dan selera pengguna atau tidak.

c. Manajemen dan Pengelolaan Layanan

Terdapat perbedaan sistem manajemen dan pengelolaan layanan *platform* pembelajaran yang dikelola pemerintah dan swasta. Rumah belajar merupakan program kerja yang berada di bawah Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web. Pengembang teknologi pembelajaran (PTP) memegang peranan penting dalam pengelolaan rumah belajar. Tim manajemen mutu yang bertugas untuk menilai kelayakan sebuah konten dipublikasikan terdiri atas beragam unsur akademisi (guru dan dosen) dan PTP. Namun, pelaksanaan tugasnya lebih pada menilai kelayakan konten dari sisi pengemasannya. Sistem kerja tim review substansi materi tidak menjadi fokus perhatian karena konten materi pembelajaran yang berasal dari unit utama ataupun dari guru dinilai telah melewati proses review dan seleksi terlebih dahulu di unit kerja pengirim ataupun seleksi guru PembaTIK.

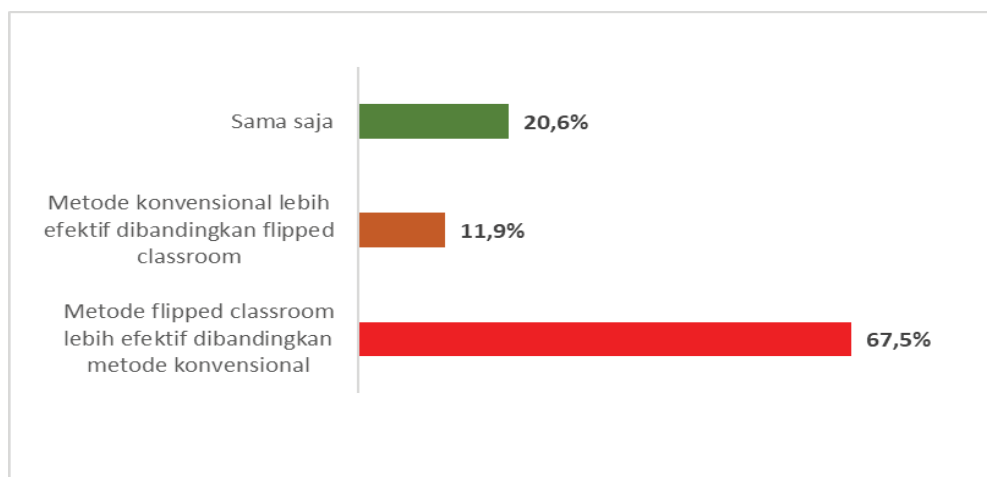
Di *platform* pembelajaran digital yang dikelola oleh swasta, struktur manajemen ditempati oleh sumber daya dengan latar belakang beragam. Di sini proses produksi materi pembelajaran dilakukan seperti menghasilkan produk perusahaan yang akan dijual ke publik. Pada proses produksi materi pembelajaran disusun oleh tim produksi terdiri atas unsur akademisi dan profesional yang menguasai bidang substansi pendidikan, sekaligus pengemasan materi pendidikan. Tim tersebut harus melalui proses seleksi yang

mempertimbangkan kemampuan penguasaan materi dan juga kemampuan mempresentasikan sesuatu di hadapan layar (*casting*). Proses seleksi ini dijalankan untuk menjamin kualitas materi layanan.

Strategi marketing merupakan bagian penting dari upaya promosi produk layanan *platform*. Strategi promosi yang dilakukan biasanya adalah: promosi media (media sosial, cetak dan elektronik), keragaman kemasan produk dan layanan yang diberikan, penawaran paket-paket berlangganan, testimoni pengguna, pemilihan *icon* layanan (*tagline/jargon, jingle* dan *Brand Ambassador*), dan pengemasan promosi lain, seperti menyelenggarakan kuis interaktif berhadiah dan melakukan kerja sama secara formal dengan pemerintah daerah.

3. Pemanfaatan Platform Pembelajaran Digital oleh Guru dan Siswa

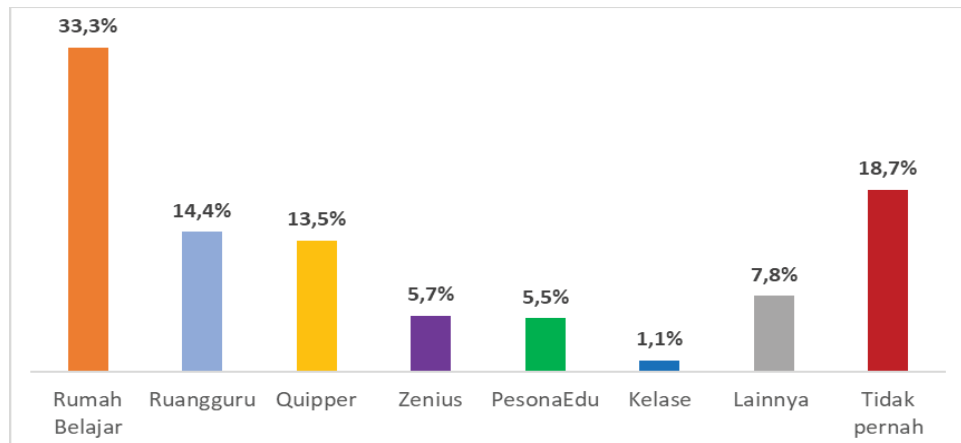
Metode *blended learning* sudah sering diterapkan guru dalam pembelajaran karena dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar pada siswa. *Blended learning* merupakan metode pembelajaran yang mengombinasikan tatap muka dan interaksi berbasis daring, memiliki konsep “membalik” praktik belajar di dalam kelas (*flipped-classroom*). Pada metode *flipped-classroom*, siswa diminta untuk mempelajari terlebih dulu bahan pelajaran yang didapatkan di internet untuk didiskusikan di kelas. Metode *flipped-classroom* dinilai lebih efektif dibandingkan metode belajar konvensional dengan tatap muka (Gambar 2).



Sumber : Survei Persepsi Guru tentang Penggunaan Platform Pembelajaran Digital, 2019

Gambar 2 Persepsi penerapan metode belajar konvensional dan *flipped-classroom*

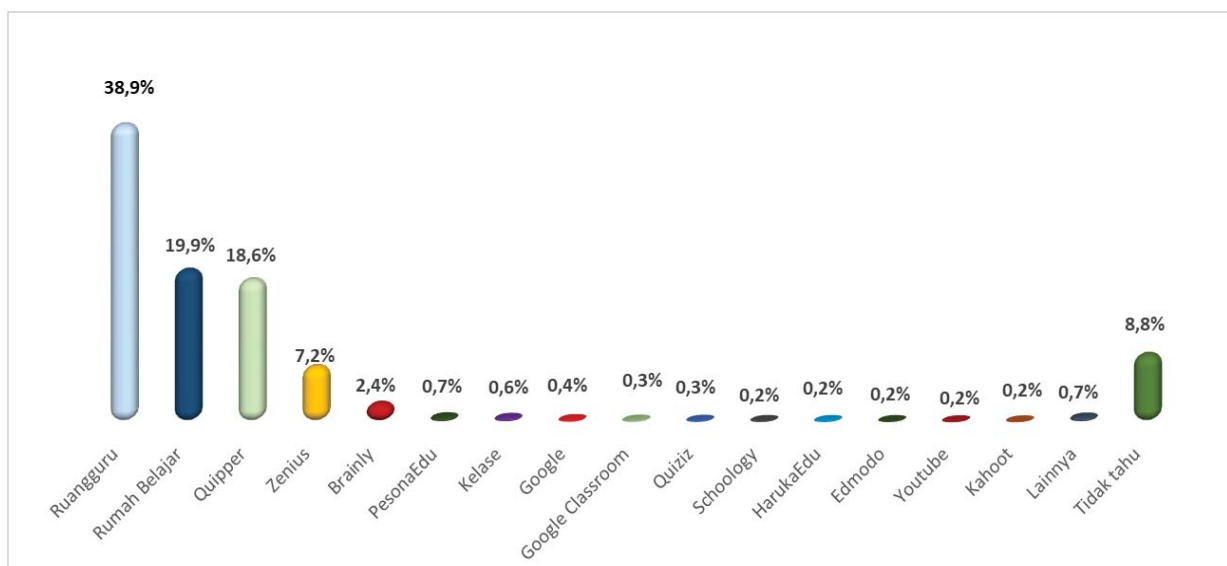
Platform pembelajaran digital digunakan guru untuk mencari bahan ajar dan juga melakukan penilaian pembelajaran. Selain menggunakan satu *platform*, guru juga ada yang menggunakan lebih dari satu *platform*. Rumah belajar menjadi *platform* pembelajaran yang lebih banyak dikenal oleh guru responden (33,3%) dibandingkan dengan *platform* pembelajaran lainnya (Gambar 3) walaupun data tersebut tidak menggambarkan intensitas dan keberlanjutan penggunaan rumah belajar oleh guru.



Sumber: Survei Persepsi Guru tentang Penggunaan Platform Pembelajaran Digital, 2019

Gambar 3 Platform pembelajaran digital yang pernah digunakan guru

Berbeda dengan guru, siswa lebih mengetahui *platform* Ruangguru dibandingkan *platform* pembelajaran digital lainnya (Gambar 4). Hal ini berkaitan dengan strategi promosi yang dilakukan Ruangguru di berbagai media dengan pengemasan materi layanan yang dinilai menarik oleh siswa pengguna. Selain penggunaan *platform* pembelajaran digital, siswa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung media pembelajaran melalui metode kuis dan permainan, seperti *Kahoot* dan *Quizizz*.



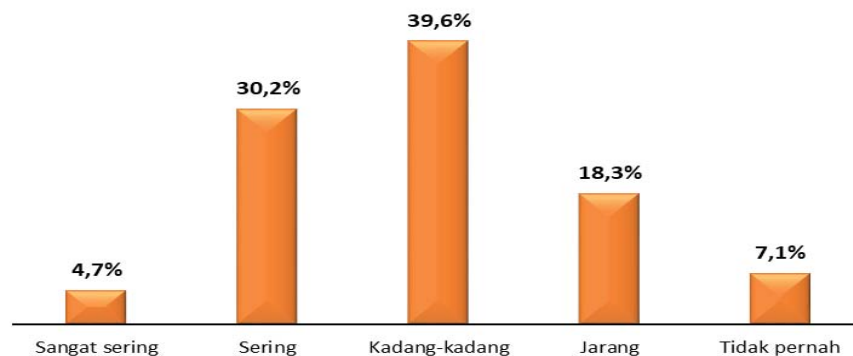
Sumber: Survei Persepsi Siswa tentang Penggunaan Platform Pembelajaran Digital, 2019

Gambar 4 Platform pembelajaran digital yang diketahui siswa

Penggunaan suatu *platform* pembelajaran digital oleh siswa didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu metode yang ada pada *platform* pembelajaran *online* lebih mampu membuat siswa paham (49,2%), penggunaan *platform* tersebut lebih disarankan oleh guru atau orang tuanya (20,0%), tampilan pada *platform* yang dianggap siswa menarik (15,1%), materi yang diberikan dianggap lebih *up to date* (9,3%), serta alasan lainnya (6,5%). Berbagai tujuan menjadi latarbelakang mengapa siswa merasa perlu memanfaatkan *platform* pembelajaran digital, yaitu untuk mencari cara agar lebih memahami pelajaran sekolah (44,0%), untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian (31,3%), dan mencari sumber belajar alternatif (21,8%). Dari sisi guru penggunaan *platform* pembelajaran *digital* memberikan manfaat untuk mengorganisasi proses pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan pemahaman materi yang akan

diajarkan guru. Pada beberapa kasus *platform* pembelajaran digital dinilai mampu membantu guru dalam memantau kemajuan belajar siswanya.

Pengenalan guru terhadap rumah belajar tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Sebagian besar guru mengaku hanya sesekali/kadang-kadang menggunakan rumah belajar (Gambar 5) karena beberapa hal, yaitu 1) pengemasan layanan yang belum menarik; 2) materi belajar yang belum tersedia lengkap; 3) materi tidak berkaitan dengan kurikulum yang berlaku; 4) video pembelajaran yang membosankan; 5) materi yang tidak runtut; dan 6) guru membutuhkan waktu cukup lama untuk masuk ke dalam sistem operasional rumah belajar.

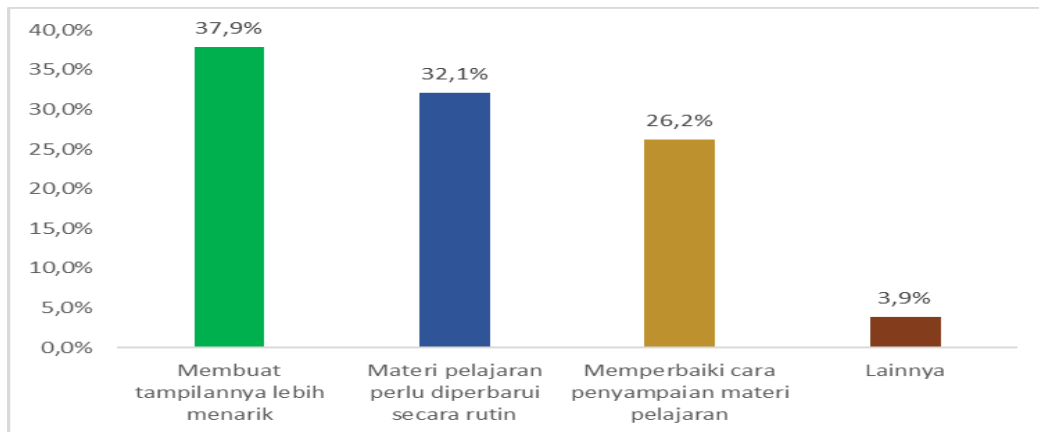


Sumber: Survei Persepsi Guru tentang Penggunaan Platform Pembelajaran Digital, 2019

Gambar 5 Intensitas penggunaan *platform* rumah belajar oleh guru

Pola interaksi yang dibangun rumah belajar juga masih bersifat satu arah, yang dalam hal ini rumah belajar hanya berfungsi sebagai tempat penyedia sumber belajar, bukan untuk layanan konsultasi belajar seperti *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta. Selain itu, belum adanya sistem *reward* dan apresiasi yang diberikan oleh rumah belajar, menyebabkan promosi rumah belajar kepada pengguna layanan semakin sulit bersaing dengan *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta. Kondisi ini yang menjadikan siswa lebih memilih menggunakan *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta dibandingkan rumah belajar walaupun bebas akses.

Ada tiga hal mendasar yang dipertimbangkan pengguna layanan *platform* pembelajaran digital, yaitu kemasan atau tampilan layanan, kebaruan materi pembelajaran, dan metode penyampaian materi (Gambar 6). Pengemasan materi belajar dalam bentuk video singkat, metode interaktif dan penggunaan sistem permainan (gamifikasi) menjadi beberapa pilihan agar sebuah *platform* pembelajaran digital dinilai menarik bagi penggunanya.



Sumber: Survei Persepsi Siswa tentang Penggunaan Platform Pembelajaran Digital, 2019

Gambar 6 Perbaikan rumah belajar

Orang tua memiliki pandangan beragam terkait dengan keberadaan *platform* pembelajaran *online* yang ada saat ini. Sebagian orang tua menilai *platform* pembelajaran *online* membantu anak-anak dalam memahami materi belajar yang didapatkan dari sekolah, dan menunjang tugas guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang merupakan kendala besar untuk menerapkan model pembelajaran digital yang ada saat ini. Ada dua hal mendasar yang menjadi pertimbangan orang tua memilihkan *platform* pembelajaran digital untuk anak-anak mereka, yaitu apakah *platform* tersebut menarik dan mampu membuat anak nyaman dalam belajar, dan apakah *platform* menyediakan materi belajar yang lengkap semua mata pelajaran. Secara umum persepsi orang tua bahwa *platform* pembelajaran digital sebagai tambahan bagi pembelajaran di sekolah, tetapi tidak dapat menggantikan metode belajar secara tatap muka.

4. Jangkauan dan Keterjangkauan Layanan Platform Pembelajaran Digital

Jangkauan rumah belajar berpotensi lebih luas karena layanannya bersifat tidak berbayar dan *open access*, berbeda dengan *platform* pembelajaran swasta dan bimbingan belajar konvensional yang berbayar. Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukkan hal sebaliknya. Jumlah pengguna *platform* pembelajaran yang dikelola swasta lebih banyak dibandingkan pengguna rumah belajar. Hal ini terjadi karena *platform* pembelajaran digital milik swasta lebih disukai dengan alasan layanannya dinilai lebih baik, menarik, dan lebih dikenal.

Data terakhir menunjukkan rumah belajar baru memiliki sekitar 485.000 siswa pengguna (Pustekkom, 2019). Jumlah ini jauh berbeda dengan *platform* swasta, seperti Ruangguru, dengan jumlah pengguna lebih dari 15.000.000 (*dailysocial.id*, 2019) ataupun Quipper dengan pengguna lebih dari 6.000.000 pengguna (*quipper.com*, 2019). Sedikitnya jumlah pengguna rumah belajar disebabkan oleh kualitas konten pembelajaran dan strategi promosi. Kualitas konten rumah belajar masih dinilai kurang menarik dan strategi promosi belum menjangkau banyak media. Pengguna, utamanya dari unsur siswa, banyak yang lebih mengenal *platform* pembelajaran milik swasta dibandingkan dengan rumah belajar.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendataan pengguna rumah belajar juga belum terekam dengan baik. Rumah belajar hanya mendaftarkan pengguna yang memiliki akun tanpa melihat intensitas akses layanan. Sifat layanan rumah belajar yang gratis dan *open access* sangat memungkinkan pengguna memanfaatkannya tanpa melakukan pendaftaran atau memiliki akun di rumah belajar. Hal ini yang menyebabkan jumlah pengguna rumah belajar jauh lebih banyak melebihi jumlah yang saat ini terdata oleh sistem di rumah belajar.

Keberagaman kemasan materi belajar di berbagai *platform*, yaitu audio, visual, dan *web* bertujuan agar materi dapat diakses oleh pengguna dari segala kalangan dan kemampuan fisik (disabilitas). Di rumah belajar beberapa materi berbentuk audio visual secara khusus disediakan oleh Balai Produksi Media Radio Pustekkom, Kemdikbud, yang biasanya menyediakan materi- belajar untuk siswa berkebutuhan khusus.

Dari sisi keterjangkauan, keberadaan *platform* pembelajaran digital memiliki potensi menjangkau lebih banyak pengguna dari beragam latar belakang ekonomi dibandingkan dengan bimbingan belajar konvensional dengan kualitas pembelajaran yang baik. Harga berlangganan yang ditawarkan *platform* pembelajaran digital lebih murah dibandingkan dengan bimbingan belajar konvensional (Tabel 2), apalagi *platform* pembelajaran digital yang berbayar memberikan potongan harga berlangganan sebagai bagian strategi promosi.

Tabel 2 Perbandingan Harga Platform Belajar Digital dan Bimbingan Belajar Konvensional

No	Nama Bimbingan	Jenis Layanan	Harga/Tahun (Rp)
1	Rumah Belajar	Daring	Gratis
2	Ruangguru	Daring	930.000
3	Quipper	Daring	790.000
4	Zenius	Daring	440.000
5	Nurul Fikri	Konvensional	4.000.000
6	Primagama	Konvensional	4.200.000

Sumber: Olah data dari berbagai sumber

5. Dukungan Pemerintah

Kebutuhan perkembangan pembelajaran berbasis digital diakomodasi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk penyediaan *platform* pembelajaran dan infrastruktur jaringan internet untuk pembelajaran. Dalam penyediaan infrastruktur Pemerintah menyediakan rumah belajar dengan memperluas penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 dan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar Dukungan infrastruktur berupa jaringan internet menjadi salah satu upaya solutif mengurangi keterbatasan infrastruktur. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan program Satelit Palapa Ring, USO (*Universal Service Obligation*), yaitu pembangunan infrastruktur akses internet di daerah 3T. Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK juga disediakan oleh Kemendikbud untuk sekolah garis depan dan/atau daerah 3T dan Program Satelit Multifungsi SATRIA, yaitu pemerataan konektivitas di wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T dan perbatasan .

Kemendikbud juga mendukung pembelajaran digital melalui kerja sama dengan *platform* pembelajaran lain yang dimiliki oleh pihak swasta. Kemendikbud bersama BAKTI Kominfo menyelenggarakan pelatihan Penggunaan Aplikasi *Bahaso* dengan sasaran peserta yang diprioritaskan pada daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) dan daerah tujuan wisata. Aplikasi *Bahaso* merupakan sebuah situs kursus belajar bahasa Inggris secara daring berbasis *web* dan android.

Di tingkat pemerintah daerah beberapa kabupaten/kota telah memfasilitasi pemanfaatan pembelajaran digital di wilayahnya. Salah satunya dengan penyediaan infrastruktur berupa jaringan internet dan *platform* pembelajaran digital yang sifatnya kontekstual daerah. Praktik ini terjadi di Kabupaten Badung dengan penyediaan akses internet secara gratis di semua sekolah di kabupaten, fasilitas laptop gratis bagi siswa di jenjang SD (kelas 5 dan 6) dan SMP (kelas 7) serta penyediaan *platform* Jejak Bali, sebagai bentuk replikasi dari rumah belajar yang kontekstual di wilayah Bali. Kerja sama pelaksanaan pembelajaran digital di daerah juga dilakukan dengan melibatkan *platform* pembelajaran digital milik swasta dengan Kabupaten Bantaeng. Sekolah-sekolah di daerah ini diberi akses pembelajaran yang disediakan oleh *Quipper* untuk mengimplementasikan penggunaan materi belajar di kelas. Namun, kerja sama tersebut terhenti setelah tiga tahun penerapannya karena perubahan kebijakan daerah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan lima hal sebagai berikut.

- a. Bentuk atau kemasan layanan suatu *platform* pembelajaran digital harus disesuaikan dengan karakteristik dari target penggunanya, baik guru, siswa, maupun keduanya.
- b. Pemanfaatan *platform* pembelajaran digital dalam proses pembelajaran ditentukan oleh preferensi dan karakteristik kebutuhan pengguna layanan. Pengguna *platform* biasanya mempertimbangkan kemasan layanan dan metode belajar yang menarik, kualitas materi yang ditawarkan serta memilih *platform* yang lebih banyak dikenal karena promosinya. Umumnya *platform* pembelajaran digital dimanfaatkan oleh guru untuk mengorganisasi pembelajaran yang efektif, sedangkan oleh siswa digunakan untuk membantu lebih memahami pelajaran di sekolah.
- c. *Platform* yang gratis tidak serta merta menarik lebih banyak pengguna dibandingkan *platform* yang berbayar. Kualitas dan kemasan materi yang diberikan lebih menentukan. Pengemasan materi belajar perlu juga diberagamkan bentuknya agar dapat diakses oleh pengguna dari segala kalangan dan kemampuan fisik.
- d. *Platform* pembelajaran digital berpotensi menjangkau lebih banyak pengguna dari beragam latar belakang ekonomi, dibandingkan dengan bimbingan belajar konvensional karena harga yang menawarkan harga yang lebih murah.
- e. Kebijakan pemerintah untuk mendukung pembelajaran digital di Indonesia mencakup penyediaan infrastruktur pembelajaran (komputer dan jaringan internet), pengembangan aplikasi pembelajaran sendiri, serta kerja sama dengan *platform* swasta.

2. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan tiga pilihan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka perluasan akses pembelajaran digital yang berkualitas dan terjangkau.

a. Perbaikan Rumah Belajar

Rekomendasi ini dapat dipilih jika Pemerintah masih tetap ingin berperan langsung dalam penyediaan *platform* pembelajaran digital di Indonesia. Perbaikan harus dilakukan di antaranya dengan menentukan target pengguna layanan secara jelas: guru, peserta didik, atau keduanya. Hal ini penting karena turut menentukan bentuk kemasan layanan dan model penyampaian layanan (*delivery system*) yang sesuai karakteristik dan kebutuhan pengguna. Kemasan dan penyampaian materi belajar dalam layanan rumah belajar harus dibuat lebih menarik, responsif dan adaptif agar dapat bersaing dengan *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta.

b. Rumah Belajar Fokus pada Layanan kepada Guru.

Rumah belajar dapat difungsikan sebagai media yang memfasilitasi dan mawadahi kebutuhan guru dalam pembelajaran dan peningkatan pengajarannya. Berbagai upaya pendukung layanan rumah belajar perlu dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru, misalnya dengan melaksanakan pelatihan TIK daring guru berskala nasional, pelatihan pemanfaatan rumah belajar di dalam kelas, dan upaya-upaya lain yang dapat mawadahi kreatifitas guru. Selama rumah belajar masih berfokus pada siswa, layanan yang diberikannya akan selalu diperbandingkan dengan layanan yang diberikan *platform* pembelajaran digital milik swasta.

c. Pemanfaatan Jasa Platform Pembelajaran Digital Swasta.

Ada tiga cara yang dapat dipilih tentang pemanfaatan jasa *platform* pembelajaran digital swasta:

- 1) Pemerintah dapat berperan sebagai regulator yang dapat mengakreditasi *platform* pembelajaran digital yang dikelola swasta, mengatur konten agar sesuai standar nasional pendidikan, dan mengendalikan pertumbuhannya agar tidak terlalu berorientasi pada kepentingan bisnis.
- 2) Pemerintah melakukan kerja sama secara langsung dengan *platform* pembelajaran digital milik swasta dengan cara dan syarat tertentu, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Brazil dan Geekie. Pemerintah dapat memilih *platform* yang dimasukkan dalam kerangka kebijakan pembelajaran digital di Indonesia.
- 3) Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi siswa, misalnya melalui penambahan komponen dalam BOS/BOSDA. Dengan cara itu, penentuan platform yang digunakan diserahkan kepada setiap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rahmat. 2018. "Ragam Jassa Layanan Edutech di Indonesia". *Jurnal Quipper*. Vol. 005/Mei 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Sektor Pendidikan*. Jakarta
- "Belajar untuk Semua". 2019. <https://belajar.kemdikbud.go.id>. Diakses pada Agustus 2019.
- Cambridge Assesment International Education. 2018. *Global Education Census Report*.
- Devaux, A., S.Grand-Clement, C. Manville, & J. Belanger. 2017. "Digital Learning's Role in Enabling Inclusive Skills Development for a Connected World". *Proceedings of EMOOCs*, 104–111. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1841/P03_125.pdf.
- Kemendikbud. 2018. "Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan." Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B_.pdf.
- Kelly, D.P & T. Rutherford. 2017. "Khan Academy as Supplemental Instruction: A Controlled Study of a Computer-Based Mathematics Intervention". *International Review of Research in Open and Distributed Learning* Volume 18, Number 4.
- Krutka, Daniel, & M.K. Milton. 2013. *The Enlightenment Meets Twitter; Using Social Media in The Social Studies Classroom*. USA: Ohio Social Studies Review.
- Munir. 2017. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta
- Nabila, Marsya. 2019. "Miliki 15 Juta Pengguna, Ruangguru Siapkan Debut Ekspansi ke Luar Negeri". Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

- Pranoto, Iwan. 2019. "Perbaikan Sekolah Dasar dan Menengah 2019-2024". **Kompas**. 6 April 2019, hlm. 6
- Rundle, Michael. 2015. "How Geekie's Adaptive Education Shattered 'Centuries' of pain in Brazil". <https://www.wired.co.uk/article/claudio-sasaki-wired-2015>. Diakses pada tanggal 06 Mei 2019
- Sahlberg, P. 2006. "Education Reform for Raising Economic Competitiveness. *Journal of Educational Change*", 7(4), 259–287. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-4884-6>
- Siemens, G. 2004. *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2, 3–10
- Simamora, Novita Sari. "Pengguna Quipper Indonesia Capai 6 Juta Pelajar". 2019. <https://teknologi.bisnis.com/read/20190715/280/1124052/pengguna-quipper-indonesia-capai-6-juta-pelajar>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.
- Sudibyo, Agus. 2019. *Jagad Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: Gramedia
- UNESCO. 2019. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development*. UNESCO: Paris
- Warschauer, M., M. Knobel, & L. Stone. 2004. *Technology and Schools Technology and Equity in Schooling: Deconstructing the Digital Divide*. *Educational Policy*, 18(4), 562–588. <https://doi.org/10.1177/0895904804266469>
- "What is The Future of Learning?". 2018. <https://startsole.org/about/>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2019
- World Bank. 2018. "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise". Washington DC. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/events/2018/02/01/world-development-report-2018-learning-to-realize-educations-promise>

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 2 Panel No: 1, 2, 3, 4
Ruang	: Ruang Padjadjaran 3
Waktu	: 10.15 – 12.30 WIB
Judul Penelitian	: 1. Kajian Umpan Balik Guru Terhadap Proses dan Hasil Pembelajaran Siswa 2. Digitalisasi dan Pembelajaran Berkualitas yang Inklusif: Pemanfaatan Platform Pembelajaran Digital oleh Guru dan Siswa 3. Kotak Hitam Pendidikan Indonesia Menelusuri Proses Belajar di Kelas 4. Strategi Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran HOTS Guru dalam Wadah MGMP
Penyaji	: 1. Etty Sofyatiningrum 2. Diyan Nur Rakhmah 3. Goldy Darmawan 4. Prof. Iskandar Agung
Pembahas	: 1. Dr. Syaikh Usman 2. Sri Hidayati
Moderator	: Fransisca Nur'aini Krisna
Notulis	: Imelda Widjaja

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Etty Sofyatiningrum Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam Permendikbud no. 22 tahun 2016. Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan hubungan pengaruh pembelajaran terhadap hasil belajar. Umpan balik akan berguna jika ada dukungan dari lingkungan. Rumusan masalah. Bagaimanakah yang sebaiknya diberikan kepada siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa? Pertanyaan penelitiannya yaitu (1) Bagaimana persiapan guru dalam rangka menerapkan umpan balik guru terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa? (2) Bagaimana bentuk umpan balik guru pada proses pembelajaran? (3) Bagaimana bentuk umpan balik guru terhadap hasil belajar siswa? (4) Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan kepada guru terkait umpan balik? (5) Apa saja faktor pendukung pelaksanaan umpan balik dalam pembelajaran? (6) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan umpan balik dalam pembelajaran? Secara khusus, tujuan pengkajian ini yaitu (1) mengkaji persiapan guru dalam rangka menerapkan umpan balik guru terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa; (2) mengkaji umpan balik guru terhadap siswa dalam

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		proses pembelajaran; (3) mengkaji umpan balik guru terhadap hasil pembelajaran siswa, (4) mengkaji bentuk pengawasan dan pembinaan guru terkait umpan balik (5) mengkaji faktor pendukung pelaksanaan umpan balik dalam pembelajaran; (6) mengkaji faktor penghambat pelaksanaan umpan balik dalam pembelajaran. Hasil dan Pembahasan Temuan pada saat pelatihan tidak disinggung sama sekali mengenai umpan balik. Walaupun trainer mengetahui tetapi tidak dijelaskan. Ada juga temuan umpan balik negatif yang diberikan oleh guru kepada siswa. - Persiapan guru dalam penerapan umpan balik pada proses dan hasil pembelajaran masih belum optimal, walaupun mayoritas guru sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena materi umpan balik tidak dibahas dalam pelatihan, juga tidak dicantumkan dalam panduan pelatihan K-2013, sehingga pengetahuan dan pemahaman guru terhadap konsep dan terapan pelaksanaan umpan balik masih minim. - Umumnya guru belum melakukan umpan balik positif secara optimal terhadap proses pembelajaran. Umpan balik yang teramati baru tahap 1 dan tahap 2, juga di akhir pembelajaran berupa refleksi; bahkan ada guru yang memberikan umpan balik negatif. - Umpan balik guru terhadap hasil belajar yang teramati dan melalui kuesioner sudah ada, namun masih tahap 1 dan tahap 2, yaitu, memberitahu mana yang betul mana yang salah (54%), untuk ke tahap berikutnya masih cukup jauh, yaitu memberitahu apa jawaban yang benar (35-42%) dan memberi penjelasan (32-41%). - Beberapa pendukung umpan balik guru terhadap proses dan hasil pembelajaran antara lain (a) ada instruksi secara formal dari pusat yang dijalankan dinas, pengawas, dan kepala sekolah; (b) guru yang inovatif dan kreatif; (c) adanya revitalisasi MGMP sebagai penunjang aktivitas guru; (d) adanya pedoman yang jelas tentang konsep dan terapan umpan balik, lebih baik jika ada pelatihan terfokus pada umpan balik; 2. Diyan Nur Rakhmah Pemerataan akses sudah sangat tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan pemerataan mutu pendidikan. Model-model pembelajaran di era industri 4.0 lebih banyak memanfaatkan teknologi dan digital. Di Indonesia platform digital dimulai dengan munculnya genius. Platform digital sudah jadi fokus pemerintah sejak tahun 2011 dengan adanya rumah belajar. Pertanyaan: bagaimana system layanan yang disediakan oleh platform pembelajaran Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui diskusi kelompok terpusat, wawancara, studi dokumen, dan survei daring. Lokasi penelitian kami ada 5 lokasi, yaitu dengan ketentuan pengguna terbanyak platform Rumah Belajar dan daerah dengan pemerintah yang telah melakukan kerjasama dengan platform pembelajaran digital yang dikelola swasta. Hasil penelitian menunjukkan: 1) bentuk atau kemasan layanan suatu platform disesuaikan dengan karakteristik dari target penggunanya, apakah

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		guru, siswa, atau keduanya; 2) platform dimanfaatkan oleh guru untuk mengorganisasi pembelajaran yang efektif, sedangkan oleh siswa digunakan untuk membantu lebih memahami pelajaran di sekolah; 3) kuantitas pengguna suatu platform tidak selalu ditentukan oleh apakah ia gratis atau berbayar, tetapi lebih oleh kualitas konten, kemasan materi, dan strategi promosi; dan 4) dukungan pemerintah bagi perluasan akses pembelajaran digital diberikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pembelajaran dan kerja sama dengan platform swasta. Penelitian ini merekomendasikan strategi perluasan akses pembelajaran digital yang berkualitas dan terjangkau melalui pemanfaatan dan optimalisasi layanan berbagai platform yang ada. Pengemasan layanan. Pada umumnya platform swasta lebih menarik dengan brand ambassador. Lebih menarik seperti ada chat room yang memungkinkan siswa berkomunikasi dengan guru dan pemilik platform. Temuan menunjukkan guru lebih banyak menggunakan rumah belajar sedangkan siswa lebih banyak menggunakan ruang guru. 3. Goldy Darmawan Proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen. Hasil yang ditemukan ditahun 2019. Ketika membuat instrumen. Instrumen kami menyesuaikan dengan konten kurikulum yang ada di Indonesia Pertanyaan: bagaimana praktik pembelajaran bindo dan mtk di kelas? Apakah proses pembelajaran meningkatkan kemampuan siswa? Pengumpulan data dilakukan di kelas 7 dan kelas 8 Hasil: proses pembelajaran itu harus terstruktur ada pembuka isi dan penutup. Manfaat dari pembelajaran itu sendiri. Ternyata yang membuka dan menutup hanya dibawah 50%. Metode interaksi di Yogya. Kira2 setengahnya tidak ada interaksi. Yang setengahnya yang ada interaksi hanya dalam bentuk interaksi satu arah. Guru-guru yang menanyakan pertanyaan terbuka cukup banyak. Tetapi muridnya banyak yang tidak menjawab dilanjutkan dengan memberikan tugas kelompok. Tetapi hanya setengah guru yang memberikan tugas kelompok. Temuan kami sebagian besar guru tidak menggunakan media pembelajaran. Jawaban dari pertanyaan penelitian kedua. Kemampuan awalnya rendah ada peningkatan lebih tinggi dibanding siswa yang kemampuan awalnya sudah tinggi. Yang kami standariza nilai perubahannya. Kemampuan awalnya rendah memperoleh pengetahuan lebih banyak. Guru di Yogya belum mampu memberikan pembelajarann yang diferensiasi. Pembelajarannya masih rendah dan intereksinya masih rendah serta guru belum mampu mengadakan pembelajaran yang terdiferensiasi. 4. Prof. Iskandar Agung KKG/MGMP belum mampu memberikan hasil maksimal. Sebagian besar guru belum mengerti mengenai proses pembelajaran HOTS. Bagaimana MGMP memberikan perberdayaan yg maksimal? Berkenaan dengan itulah penelitian ini diajukan, yakni bermaksud mengetahui pengelolaan pembelajaran HOTS yang dilaksanakan oleh guru, menganalisis dan mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran HOTS

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		melalui wadah MGMP. Sasaran penelitian ini adalah guru SMA sederajat. Studi dilaksanakan di lima lokasi dengan pendekatan penelitian melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan FGD. Sejak Juli Dirjen GTK menjalankan suatu program sebagai kelanjutan dari PKB. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak guru yang belum memahami pembelajaran HOTS, jika ada pun mengacu pada pembelajaran untuk memecahkan soal-soal sulit. Atas dasar itu studi ini mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran HOTS dalam materi K-13 dengan menjabarkan ke dalam topik tertentu, kemudian mengkaitkan dengan pengalaman nyata yang harus diselesaikan oleh siswa melalui pendekatan saintifik. Studi juga telah mengembangkan seperangkat pedoman dan perlunya partisipasi sejumlah pihak dalam mendukung pengembangan dan penerapan pengelolaan pembelajaran. Namun apayang disajikan dalam penelitian masih bersifat konseptual, belum mengalami pengujian guna memperoleh pematapannya. Organisasi guru MGMP sudah berdiri sejak lama, sebagai wadah merawat dan meningkatkan kemampuan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk guru. Namun sebagian besar mekanismenya belum mampu melibatkan partisipasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Hasil studi ini menemukan bahwa guru masih belum mengenal dan memahami secara utuh tentang kategori berpikir level tinggi (HOTS). Bagi kebanyakan guru, kategori berpikir level tinggi mengacu pada soal-soal sulit, bukan suatu proses penalaran sebagai upaya pemecahan masalah (problem solving). Atas dasar itu tulisan ini berusaha mengembangkan suatu model dan strategi pengelolaan pembelajaran oleh guru mengenai topik HOTS dengan bertumpu pada pemanfaatan MGMP sebagai wadah tumbunya kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Melalui MGMP guru mengkaji dan mengemas materi terkategori HOTS dalam topik tertentu. Topik menjadi bahan yang perlu dikembangkan oleh siswa. Peran Guru dan pihak lain (internal dan eksternal sekolah) sebatas motivator, fasilitator, pembimbing, dan pengarah terhadap siswa/peserta didik. Rekomendasi dalam riset ini masih bersifat konseptual dan belum di uji cobakan
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Pembahas: 1. Dr. Syaikh Usman Umpan Balik lebih kepada karakter guru. Kalau HOTS lebih kepada kemampuan guru. Umpan balik itu manfaatnya besar, kalau ini digabungkan antara umpan balik dan HOTS rekomendasinya akan sangat baik dan bisa bersaing dimana saja. Kalau karakter lebih banyak praktik daripada pelatihan. Umpan balik harus dilakukan baik itu umpan balik dari segi positif. Guru-guru kita tergolong cepat paham dengan membaca atau sosialisasi dengan peraturan bahwa umpan balik itu harus dipersiapkan dan harus dilakukan. Umpan balik pun harus dilakukan tidak hanya oleh guru tetapi juga orangtua harus memberikan umpan balik tetapi umpan balik yang diberikan tidak boleh dalam bentuk negatif walaupun anak tersebut tergolong nakal. Karena begitu

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		ada respon negatif dari orangtua kepada anak itu akan terekam sampai dia dewasa padahal kita ingin mempersiapkan anak untuk menjadi lebih baik ke depannya. 4 penelitian ini mempunyai keterkaitan, semuanya lebih kepada proses kegiatan di kelas. Untuk proses digitalisasi kelas masih kurang. Kita sepertinya bekerja sendiri. Padahal kemdikbud ini punya puspendik, pustekom. Khusus untuk penelitian Pak Iskandar, bisa menggunakan data sekunder yang ada yang di Puspendik. Sebenarnya bisa menggunakan data yang ada saja daripada mikir sendiri. Sepertinya penelitian ini tidak melakukan kerja sama dengan unit kerja lain Sebenarnya kalau kita melihat 5% guru tidak paham HOTS, kita sebenarnya juga tidak paham. Kita pikirkan ke LPTK, harus merujuk ke LPTK. Untuk melihat proses pelatihan guru. Yang kita lihat apa yang terjadi sekarang. Ada baiknya kebijakan yang kita pikirkan bisa berlanjut seumur hidup. serta harus dikembalika ke LPTK untuk mengevaluasi apa saja yang telah dikerjakan LPTK dalam HOTS, digitalisasi pendidikan, umpan balik dan interaksi guru dan murid. Jangan-jangan sampai sekatrang juga belum dipikirkan. Rekomendasi HOTS tentang HOTS masih sangat umum blum bisa jadi dasar kebijakan. Kita harus lebih focus dan lebih mendalam. Guna puslitjak untuk merumuskan kebijakan. Dan para pengambil kebijakan hanya akan membaca paling banyak dua halaman. Kita bukan mau mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori kita harus mempengaruhi kebijakan. Kalau tidak mampu merumuskan kebijakan berarti itu bukan studi puslitjak. HOTS dan umpan balik maanfaatnya sangat besar. Digitalisasi pembelajaran, bagaimana kita mendorong digitaliasasi kelas, karena anak-anak sekarang mayoritas pegang handphone, sedangkan beberapa kebijakan sekolah melarang penggunaan hp. Sehingga sebagian besar anak-anak menggunakan hp tanpa pengawasan, karena mereka lebih banyak menggunakan di rumah. Kita juga sudah melihat ada banyak kelas pilot untuk digitalisasi kelas, serta hasilnya cukup baik. Dengan ada penggunaan hp di kelas, guru lebih bisa mengawasi penggunaan hp tersebut. Anak-anak harus dipersiapkan dari sekarang pemanfaatan digital dengan sebaik-baiknya serta pengelolaan gawai dengan baik, karena kehidupan ke depannya adalah dalam bentuk digital. 2. Sri Hidayati Penelitian ini, penelitian bertahap. Harus ada gambaran besar tentang penelitian. Apakah sudah ada instrumennya atau baru akan memvalidasi instrument itu. Instrument ini untuk sapa?

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Apa dasar pengembangan ini dari proses atau dari pedagogi. Instrument harus dijelaskan memuat unsur-unsur apa. Kita memotret pembelajaran yang apa. Metode interaksi itu yang mana ada 100an lebih metode pembelajaran. Kemudian untuk membangun kompetensi yangmana apakah kompetensi atau ketiga-tiganya kompetensi yang dipotret. Apakah betul hasil belajar dipengaruhi oleh interaksi, dll. Guru memastikan ada proses journey of thinking. Sehingga hasil belajarnya menjadi menetap sedangkan sekarang hasil belajar yang diharapkan itu dampak dari proses belajar itu. Bagaimana penyampaian konsep dasarnya itu bagaimana. Yang ingin dituju proses belajar seperti apa. Model belajar yang mana itu berbeda-beda untuk membangun keterampilan dan pengetahuan. Makanya itu harus jelas. Proses belajar itu harusnya membangun estomologi.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Pak James • Kita belum beralih paradigma kita. Ini penting sekali Paradigma baru Pendidikan tentang competence based education kita bergeser perlahan-lahan kita kompetensi Pendidikan ada di Permendikbud No. 22. Kita perlu bergeser dari paradigma <i>knowledge prise</i> ke <i>competence price</i>. Penelitian ini masih ada pada era colonial, jadi penelitian ini harus di setting sehingga dapat berdampak pada kebijakan pada era disrupsi ini. • Aspek sikap pada aspek spiritual dan social penelitian ini hanya mengarah ke aspek pengetahuan dan ini bahaya. • Umpan balik itu sebenarnya berawal dari proses konseptual kemudian bergerak ke aspek factual. Sebagai obyek sebagai factual harus mampu menjelaskan kalau siswa juga mampu untuk menjelaskan apa yang telah diamatinya itu sudah proses umpan balik • Umpan balik yang ibu jelaskan itu proses umpan balik teori lama yang hanya berdasarkan pada guru yang berbusa-busa untuk menjelaskan. Kemudian siswa harus mampu mengonsep. Kemudian pada endingnya siswa akan mampu merefleksikan apa yang diamati. • Umpan balik itu sudah muncul dari awal. Bukan berdasarkan dari teori-teori. Umpan balik yang disampaikan tadi itu. Umpan balik teori lama bukan berdasarkan pada paradigma baru. Dimana siswa diminta untuk mampu menganalisis berdasarkan obyek-obyek faktual yang ada dilingkungan sekitar • Pembelajaran berbasis aktivitas, bukan lagi teaching tapi learning. LPTK kita tidak bergerak sama sekali untuk masuk ke dalam paradigma baru dan sebaiknya ditutup saja itu rekomendasi yang sebaiknya dimunculkan. • Di Umpan balik ibu bicara soal UN, tetapi tidak memunculkan soal bagaimana sikapnya. • Bu eti kompetensi siswa tidak dijelaskan. Serta seperti apa umpan balik yang pada zaman sekarang sebaiknya dilakukan. • Umpan balik yang dilakukan dalam riset ini, yang saya lihat hanya melihat aspek pengetahuan. Harusnya umpan balik kita memperhatikan 4 aspek yaitu aspek pengetahuan spiritual, keterampilan, dll. • Pembelajaran digital belum menggabungkan dengan paradigma baru kita dengan bagaimana dengan di daerah terpencil. Mendorong swasta untuk

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		terlibat misalnya menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Pemerintah tidak usah menjadi pemain. Cukup swasta yang menjadi pemain. Kita pemerintah cukup menjadi regulator. • Aspek sikap dan spritual dam ruang belajar dan rumah belajar itu mengarah kepada pengetahuan. Bagaimana kita mengarah ke 4 aspek kompetensi sekarang • Kita regulasikan swasta ,mengikuti kita. Rumah belajar khususnya melayani yang tidak terlayani oleh swasta dan diberikan akses secara cuma. • K13 kompetensi stage ada 4 kompetensi yang lebih kita munculkan sedangkan riset ini hanya mengarah ke pengetahuan semata. Aspek sikap pada aspek spiritual dan social untuk memperbaiki manusia kedepannya, dalam proses elaborasi pembelajaran dalam penelitian ini hanya mengarah ke aspek pengetahuan dan ini bahaya. • Dari pak Iskandar masih kurang proses pengimbangan metakognitif dan pengetahuan. 5M. guru harus menjaga siswa belajar dari objek-objek faktual sehingga anak akan berpikir kritis sendiri. • Dari proses 5M yang mulai dari mengamati masih kurang satu proses, yaitu kurang 1 proses pengimbangan indeks pendappat dari konstektual bergerak ke proses factual. dimensi proses pengetahuan • Pembelajaran berbasis aktivitas, bukan lagi teaching tapi learning. LPTK kita tidak bergerak sama sekali untuk masuk ke dalam paradigma baru dan sebaiknya ditutup saja itu rekomendasi yang sebaiknya dimunculkan. • Saran tolong diperhatikan jangan hanya pengetahuan. Bagaimana materi itu mengembangkan HOTS. Kompetensi kita ada 4 aspek tidak hanya pada aspek pengetahuan • Rekomendasi untuk MGMP harus benar-benar diperkuat. • Rekomendasinya dimunculkan kalau menulis kebijakan 2. Aziz PPIM UIN Jakarta Salah satu rekomendasi agar pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta. Saya belum melihat critical lens nya. Perlu diliat penggunaan teknologi di sekolah, sisi baik dan buruknya. 3. Lukman puslitjakdikbud Perkembangan industri sudah cukup baik. Dan ini disrupsi untuk tempat les yang konvensional. Tidak ada yang salah industri digital. Tapi masalahnya siapa yang mengakses platform digital itu? Dan kalangan mana saja? artinya yang tidak terlayani adalah masyarakat dari segi afirmasi. Kita membuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Rekomendasinya apa yang bisa ditindaklanjuti untuk masyarakat kelas bawa di 3t dan lain-lain Tanggapan dari penyaji Diyan Nur Rakhmah • Bagaimana gawai dapat berperan optimal dalam pembelajaran di era sekarang akses informasi sangat luas dan sulit terbandung. Mungkin

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		kerjasama antar kementerian seperti kerjasama dengan kominfo, bisa dibarengi dengan kerja sama dengan pengelolaan informasi di Internet. Temuan kami dilapangan guru juga menyadari dampak negatif dari gawai itu. Tetapi dampak positif dari gawai itu banyak juga. • Untuk pertanyaannya Pak Lukman. Tantangan digital pada infrastruktur. Setelah kami diskusi dengan Pustekom, Pustekom sudah memiliki kebijakan untuk mengurangi keterbatasan tersebut. Dengan cara menyebarluaskan secara offline di daerah terpencil yang sulit diakses internet. Tetapi masalahnya bagaimana dengan update materi ke daerah. Pustekom tidak ingin hanya sekedar mendistribusikan materi dan hanya stop disitu tanpa adanya update materi • Rekomendasi pertama kami, memperbaiki fitur rumah belajar dengan <i>open source</i>. Salah satu alasan kenapa rumah belajar tidak interaktif karena keterbatasan SDM. Serta fitur-fitur rumah belajar yang kurang interaktif. 4. Pak James Sebenarnya bukan hanya interaksi guru dan murid tetapi mulai dari 5M, untuk pembukaan dan penutup tidak penting sekarang. 5. Aziz PPIM UIN Jakarta: Tentang proses perekaman guru secara diam-diam itu bagaimana prosesnya? Kita perlu tahu di tahun-tahun politik rekrutmen guru itu meningkat sehingga input guru kurang berkualitas. Untuk Pak Iskandar setahu saya Dirjen GTK sedang menguncurkan dana untuk pelatihan guru di MGMP bisa dikolaborasikan dengan hasil penelitian. 6. Pak Tama: Tahun 2010 pernah ada kongres guru Indonesia yg mengadakan Samporna Foundation. Itu Bahkan lebih komparatif karena membandingkan dengan negara lain. Saran saya video pembelajaran itu dianalisis dengan sejauh mana guru-guru menganalisis dengan HOTS. Tanggapan dari Penyaji Goldy Darmawan Penelitian ini kami ingin mengevaluasi dampak zonasi pada 5 hal, yaitu teaching practice, learning outcome, di Yogyakarta. SLA digunakan dengan mengadopsi 5 item. Instrument SLA itu untuk tingkat dasar berbasis full basic education Aspek domain SLA kita melihat untuk HOTS. 3 komponen cognition. Yang mengacu pada taksonomi bloom. Kami tidak menaruh diam-diam kamera di kelas kami melakukan observasi secara random di kelas. Instrument kami, mengacu untuk mengatasi aspek kepura-puraan di kelas. Kalau dari 15 menit pertama memang guru tersebut masih bisa berpura-pura tetapi selanjutnya sudah tidak bisa Yang 2010 itu dilakukan secara diam-diam. Perbedaannya instrumennya bisa dilakukan di semua daerah. Instrumennya bisa digunakan untuk manual. Tanggapan dari Penyaji

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Prof Iskandar Agung Bukannya kami tidak memperhatikan data-data dari puspendik tapi hasilnya kita sudah tahu bersama. Data ini saya peroleh dari data GTK kalau kita melihat persoalan guru pasti larinya ke LPTK seolah-oleh LPTK yang tidak mampu meningkatkan kemampuan guru. Penelitian ini memang masih menghasilkan kontepsual untuk membangun model karena belum di ujicoba.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul WIB.

INDUSTRI KREATIF DAN KEBUDAYAAN

STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA KREATIF DI INDONESIA: PERSPEKTIF PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Ihya Ulumuddin, Sugih Biantoro, Damardjati Kun Marjanto, Khairur Raziqin,
Anggoro Yudo Mahendro

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kota kreatif di Indonesia. Penelitian ini juga merumuskan strategi pengembangan kota kreatif seiring dengan pemajuan kebudayaan. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terpusat. Empat kota yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Kota Pekalongan, Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Ambon. Empat lokasi tersebut merupakan kota yang telah diuji petik oleh Badan Ekonomi Kreatif sebagai kota kreatif melalui Penilaian Mandiri Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia (PMK3I). Dua kota pertama telah terdaftar dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN), sedangkan dua kota berikutnya sedang berproses ke UCCN. Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat pemerintah kota yang diteliti telah berusaha memahami dan memperjuangkan potensi lokalnya untuk masuk ke dalam UCCN dalam domain tertentu, seperti *Craft and Folk Arts* (Pekalongan) dan *Design* (Bandung). Kota Surakarta dan Kota Ambon sedang dalam proses agar masuk ke dalam kategori *Craft and Folk Arts* dan Kota Ambon dalam kategori *Music*. Semangat pemajuan kebudayaan yang menekankan prinsip penguatan komunitas penggiat kebudayaan selaras dengan konsep UCCN yang menempatkan budaya sebagai pusat strategi pengembangan kota berkelanjutan. Pemerintah kota masing-masing diketahui tengah melakukan penguatan terhadap ekosistem ini dengan melibatkan perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak terkait, baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Kata kunci: kota kreatif, UCCN, pemajuan kebudayaan, berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

UNESCO kini gencar mendorong kota kreatif di seluruh dunia yang dikenal dengan UCCN (UNESCO Creative Cities Network). Gagasan ini merupakan bagian dari program SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya mengenai kota yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjadikan kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan. Ide- ini terpengaruh oleh kajian perkotaan yang mengidentifikasi pentingnya komunitas kreatif untuk berperan dalam pembangunan perkotaan, seperti Manuel Castells (1982, 2000, 2010, 2016), Richard Florida (2004 dan 2006), dan Greffe (2011).

Dalam menyikapi hal tersebut sejak tahun 2011, ekonomi kreatif sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di Indonesia, bahkan pada 2015 telah dibentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berfungsi untuk mendorong industri kreatif di Indonesia. Bekraf mendefinisikan *ekonomi kreatif* sebagai ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan ide

yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi (2016). Menurut Bekraf, ada enam belas subsektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi dan pengembang game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; *fashion*; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Terkait dengan kota kreatif, Bekraf juga mendorong kerja sama aktif empat aktor, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Pada 2017, melalui laman portal resminya, Bekraf merilis sepuluh kota kreatif di Indonesia, yaitu Kota Padang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Banyuwangi, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Pekalongan, Kota Jakarta, dan Kota Denpasar. Penyusunan daftar kota kreatif ini disandarkan pada beberapa elemen, seperti sejarah, budaya, kreatifitas warga, dukungan pemerintah daerah/kota, infrastruktur, potensi kota, serta pengakuan internasional. Pada 2014 UNESCO menetapkan Kota Pekalongan sebagai kota kreatif bidang kriya dan seni tradisional. Pada tahun berikutnya Kota Bandung menyusul menjadi kota kreatif dunia bidang desain (<http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-1/>; <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-2/>).

Berdasarkan gambaran di atas, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kota kreatif dalam upaya menyejahterakan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian mengenai upaya strategis pengembangan kota kreatif dengan menggunakan konsep *cultural landscapes* yang dikembangkan oleh Greffe (2011). Konsep tersebut kemudian dioperasionalkan lebih jauh oleh Simsek (2017) untuk mendapatkan ukuran yang lebih mendetail. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sudah menerbitkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan penekanan pada pemerintah daerah untuk memainkan peran pembinaan terhadap pemajuan kebudayaan.

Pada saat ini sudah ada dua kota di Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia, yaitu Kota Pekalongan dan Kota Bandung. Penelitian ini akan mengkaji beberapa kota untuk menemukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan kota kreatif yang mendukung pemajuan kebudayaan. Ada beberapa hal yang akan ditekankan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah (kota) dalam mewujudkan dan memajukan kota kreatif yang selaras dengan tujuan pemajuan kebudayaan?

2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (a) mengetahui seberapa jauh peran pemerintah daerah (kota) dalam upaya untuk mewujudkan kota kreatif serta (b) merumuskan strategi pengembangan kota kreatif di Indonesia yang sesuai dengan tujuan pemajuan kebudayaan.

3. Sasaran

Sasaran kajian ini adalah pemerintah daerah yang mengembangkan kotanya sebagai kota kreatif, khususnya yang berbasis pada sektor kebudayaan. Selain pemerintah daerah, pemangku kepentingan yang terkait, seperti komunitas, pelaku bisnis, dan akademisi yang dapat menunjang terwujudnya kota kreatif di setiap wilayah juga merupakan objek penelitian.

4. Keluaran

Keluaran dari penelitian ini adalah beberapa alternatif atau opsi kebijakan bagi para pengambil keputusan di pemerintah daerah dalam menetapkan rencana strategis berkaitan dengan program UNESCO Creative Cities Network (UCCN), khususnya yang berbasis budaya. Selain untuk pemerintah daerah, juga sebagai alternatif kebijakan untuk mendukung pengembangan kota kreatif bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, termasuk Badan Ekonomi Kreatif, UCCN, dan bagi kota-kota yang akan mengembangkan diri sebagai kota kreatif.

5. Ruang Lingkup/Batasan

Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji empat kota di Indonesia, yaitu; Kota Pekalongan, Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Ambon. Keempat kota ini merupakan kota yang telah terdaftar dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO/UNESCO Creative Cities Network (UCCN), dan yang sedang diusulkan dalam Daftar UCCN. Kota-kota tersebut juga telah diuji petik oleh Bekraf melalui Penilaian Mandiri Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia (PMK3I) Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Keempat kota itu memiliki konteks budaya yang khas, baik dari sisi kultural maupun bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan. Diharapkan sebaran tersebut dapat menjadikan hasil penelitian ini cukup komprehensif untuk direfleksikan pada kota-kota yang lain, terutama yang akan mengembangkan diri ke dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Ekonomi Kreatif

Menurut Kementerian Perdagangan (2008, dalam Bekraf, 2016), ekonomi kreatif dimaknai sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dengan kreativitas dan iklim perekonomian yang berdaya saing serta memiliki sumber daya yang terbarukan. Selanjutnya, Bekraf melakukan perubahan definisi bahwa ekonomi kreatif adalah ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi (2016). Bekraf merumuskan empat elemen sumber daya manusia yang menjadi aktor aktif dalam mendorong kemajuan ekonomi kreatif; yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha yang disebut dengan *quadruple-helix*. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, Bekraf merumuskan ada enam belas subsektor dari industri kreatif yaitu; aplikasi dan pengembang *game*; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi, dan radio. Keenam belas subsektor ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Bekraf sesungguhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh UNESCO. Hal ini dapat dipahami karena memang Pemerintah Indonesia mereferensikan kerangka konseptual dan operasionalnya dari lembaga PBB tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa selain UNESCO, ada beberapa referensi lain yang menjelaskan subsektor ekonomi kreatif sebagaimana tergambar dalam tabel di berikut ini.

Figure 1.1 Different classification systems for the cultural and creative industries

1. DCMS Model	2. Symbolic Texts Model	3. Concentric Circles Model	
Advertising Architecture Art and antiques market Crafts Design Fashion Film and video Music Performing arts Publishing Software Television and radio Video and computer games	Core cultural industries Advertising Film Internet Music Publishing Television and radio Video and computer games Peripheral cultural industries Creative arts Borderline cultural industries Consumer electronics Fashion Software Sport	Core creative arts Literature Music Performing arts Visual arts Other core cultural industries Film Museums and libraries	Wider cultural industries Heritage services Publishing Sound recording Television and radio Video and computer games Related industries Advertising Architecture Design Fashion
4. WIPO Copyright Model	5. UNESCO Institute for Statistics Model	6. Americans for the Arts Model	
Core copyright industries Advertising Collecting societies Film and video Music Performing arts Publishing Software Television and radio Visual and graphic art Partial copyright industries Architecture Clothing, footwear Design Fashion Household goods Toys	Interdependent copyright industries Blank recording material Consumer electronics Musical instruments Paper Photocopiers, photographic equipment	Industries in core cultural domains Museums, galleries, libraries Performing arts Festivals Visual arts, crafts Design Publishing Television, radio Film and video Photography Interactive media Industries in expanded cultural domains Musical instruments Sound equipment Architecture Advertising Printing equipment Software Audiovisual hardware	Advertising Architecture Arts schools and services Design Film Museums, zoos Music Performing arts Publishing Television and radio Visual arts

Sumber: Puscasu (2016)

Ada beberapa sektor yang menjadi bagian dari rumpun ekonomi kreatif, yaitu bangunan seni dan budaya, media, aplikasi, musik, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan. Berdasarkan tabel di atas, UNESCO juga memberikan ruang pada kebudayaan tradisional masuk ke dalam kategori ekonomi kreatif. Ada satu subsektor yang belum masuk ke dalam bidang tersebut, yaitu gastronomi atau kuliner. Keragaman ini merupakan hal yang wajar karena setiap negara atau lembaga memiliki latar belakang sosial, kultural, serta potensi ekonomi yang berbeda-beda.

Dalam kajian ini pengertian *ekonomi kreatif* yang digunakan merujuk pada Puscasu (2016), yang mendefinisikan *ekonomi kreatif* segala sesuatu yang diproduksi secara artistik dan kreatif-ilmiah serta memiliki potensi ekonomi dan dampak positif terhadap pembangunan wilayah dan nasional. Dengan definisi tersebut diharapkan kajian ini tidak hanya berfokus pada ukuran yang diberikan oleh UNESCO, tetapi juga terhadap pembangunan wilayah dan nasional.

2. Kota Kreatif

Perkembangan konsep *kota kreatif* tidak lepas dari inisiatif UNESCO yang diluncurkan pada 2004 dengan nama UNESCO Creative Cities Network atau UCCN. Program ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SDG's yang salah satu poinnya adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuannya ialah "*strengthen cooperation with and among cities that have recognized creativity as a strategic factor*

of sustainable development as regards economic, social, cultural and environmental aspects". Dengan demikian, ada batasan konseptual antara ekonomi kreatif dan kota kreatif yang sama-sama dikembangkan oleh UNESCO. Dalam dokumen yang lain melalui portal resmi UNESCO, kota kreatif dimaknai dengan *"the principal breeding grounds for the emergence and development of cultural and creative industries"*.

Kota kreatif versi UCCN ditujukan untuk membangun kerja sama antarkota di dunia yang memiliki komitmen untuk mengembangkan pembangunan kota berkelanjutan dengan pendekatan kebudayaan. Jejaring tersebut diproyeksikan akan membentuk kerja sama untuk mempromosikan kreativitas dan industri kreatif serta penguatan elemen kultural dalam pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Dalam UCCN ada tujuh ranah kreatif yang diajukan, yaitu kriya dan kesenian tradisional, desain, film, kuliner, literatur, media kreatif, dan musik.

Dari sisi akademik, khususnya sosiologi, kajian kota kreatif sudah terlacak sejak tahun 80-an melalui kajian Manuel Castells. Melalui *City, Class, and Power* (1982), Castells mengkaji kota dengan perspektif kuasa, dalam hal ini yang dikembangkan ialah kuasa modal dan kuasa negara. Castells menekankan pentingnya perspektif ekologis yang tidak menafikan peran masyarakat dalam upaya pembangunan kota. Dalam kajian lain, Castells (2000, 2010, 2016) mulai menambahkan elemen jejaring dan komunikasi dalam konteks urban. Hal ini dipahami karena arus jejaring dan komunikasi semakin cepat dan mudah dilakukan antartempat di dunia, terutama melalui jaringan internet. Dengan demikian, globalisasi kini sudah menunjukkan wajah yang paling nyata.

Menurut Florida (2004 dan 2006), perubahan besar pascaperkembangan teknologi informasi, dalam bidang ekonomi akan bergantung pada kelompok kreatif. Dalam era teknologi informasi profesi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, akan menjadi inti dari pertumbuhan ekonomi. Profesi yang semata-mata bersandar pada ilmu pengetahuan hanya akan menjadi komponen sekunder yang memiliki fungsi penunjang.

<i>Creative City orientations →</i>	<i>Culture-centric</i>	<i>Econ-centric</i>
Creative City values	Central value = arts, culture, and community wellbeing, access and inclusion	Central value = urban economic sustainability and wellbeing through creative initiatives/industries
Definition of creative city	Place of diverse and inclusive arts and culture	Place of economic innovation, creative talent, and creative industries

Tabel di atas merupakan jabaran dari Smith dan Warfield (2008) tentang masalah problematika terkait dengan konsep kota kreatif. Dalam konteks UNESCO, lembaga tersebut mencoba memadukan kedua nilai, tetapi Florida menekankan sisi ekonomi. Belakangan diketahui bahwa konsepsi Florida yang mengedepankan sisi ekonomi banyak mendapat kritik karena bagi beberapa kota pandangan itu terbukti gagal. Akhirnya, pada 2017 Florida meluncurkan buku terbaru, *The New Urban Crisis* (tirto.id, 2017), yang merupakan bentuk permohonan maafnya terhadap kekeliruannya menganalisis pengertian *kota kreatif*. Oleh karena itu, dalam studi ini yang disebut dengan *kota kreatif* ialah perspektif UNESCO yang memadukan nilai kultural dan ekonomi dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

3. Lanskap Budaya

Secara umum *lanskap budaya* dimaknai dengan suatu bentang alam/bangunan khas yang terbentuk karena aktivitas manusia. Dalam pandangan Greffe (2011), lanskap budaya tidak hanya terkait dengan suatu wilayah yang bisa dinikmati secara visual. Dalam kajian tersebut, Greffe menawarkan konsep

lanskap budaya sebagai instrumen budaya dan politik. Dalam kajian sebelumnya, Greffe (2009) menjelaskan bagaimana lanskap budaya juga memiliki peran dalam memengaruhi pembangunan wilayah, khususnya dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, Simsek (2017) menjelaskan bahwa lanskap budaya dalam konteks kota kreatif memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosiokultural.

Simsek (2017) memaparkan pandangannya terhadap kajian Greffe dan Kakiuci (2015) tentang konsep lanskap budaya berdasarkan kajian empirik di beberapa kota di dunia. Setidaknya ada beberapa indikator dalam membangun kota kreatif dengan pendekatan lanskap budaya sebagaimana terlihat berikut ini.

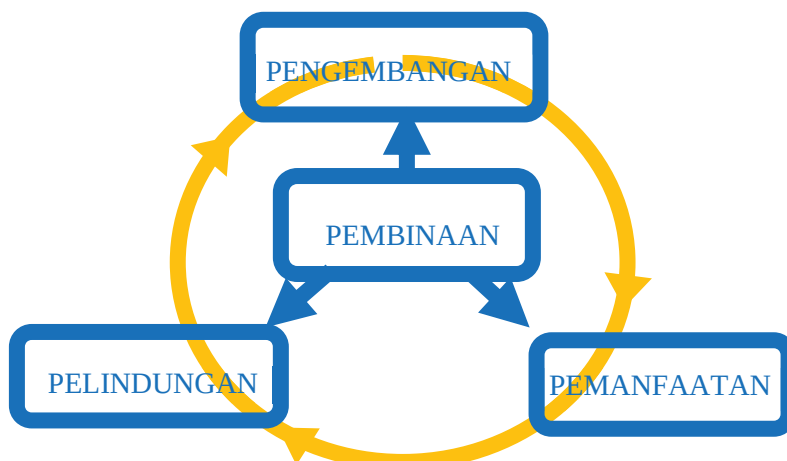
Grefee dan Kakiuci (2015)	Simsek (2017)
<i>The land – use dimension</i>	<i>Improving appearances of the cultural landscape through excavation and preservation activities</i>
<i>Coping with technological innovation</i>	<i>Capacity building for local development</i>
<i>Protecting intellectual property rights</i>	<i>Contributing to local planning policies</i>
<i>International openness</i>	<i>Developing network relations and collaboration</i>
<i>The transmission of know-how</i>	<i>Attracting exogenous investment</i>
<i>Business succession</i>	<i>Increase in the number of visitors and income generation</i>
	<i>Businesses growth in the service sector and supporting the development of entrepreneurs</i>

Tabel di atas memperlihatkan bagaimana perkembangan tentang konsepsi lanskap budaya. Ada perbedaan mendasar mengenai indikator yang dikembangkan dalam dua kajian di atas. Greffe dan Kakiuci (2015) lebih menekankan aspek budaya karena pendekatan yang dibangun merupakan revisi dari pendekatan ekonomi yang dikembangkan oleh Florida. Di sisi lain, Simsek (2017), karena mengambil lokasi studi di Ephesus sebagai yang lokasi pariwisata dunia dengan berbagai bangunan bersejarah, menekankan sisi kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar.

Kajian ini berusaha melihat kota kreatif dari kerangka tiga dimensi, yaitu dimensi pembangunan fasilitas/infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya. Tabel di atas dapat dijadikan panduan dalam melihat situasi di beberapa kota di Indonesia yang akan dikaji.

4. Kota Kreatif dalam Kerangka Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan dapat digunakan sebagai fondasi pengembangan ekosistem kota yang kemudian dapat diarahkan untuk pemajuan budaya dan pembangunan ekonomi kreatif. Kedua bagian tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sudah membuat strategi pemajuan dan pembangunan kebudayaan yang di dalamnya termasuk pemajuan dan pembangunan kota kreatif.



Pemajuan kebudayaan merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang berisikan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan”. Dalam dokumen tersebut, ada sepuluh objek kebudayaan, yaitu tradisi lisan; manuskrip; adat-istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan tradisional; dan olahraga tradisional. Dalam undang-undang itu diamanahkan agar pemerintah kabupaten/kota membuat pokok pikiran pemajuan kebudayaan dengan melibatkan ahli dalam bidang terkait. Pokok pikiran tersebut berisi identifikasi terkini dari kondisi objek pemajuan kebudayaan; identifikasi sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan; indentifikasi sarana dan prasarana kebudayaan; indentifikasi potensi dan masalah pemajuan kebudayaan; analisis dan rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan. Dokumen pokok pikiran tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi dan dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan dokumen “strategi kebudayaan”. Dengan demikian, melalui undang-undang ini, pemerintah ingin perumusan kebijakan kebudayaan berbasis keunggulan dan masalah yang ada pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-undang pemajuan kebudayaan juga menekankan Kemendikbud dan institusi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memainkan peran utama dalam hal pembinaan. Dengan demikian, Kemendikbud harus aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait, baik di tingkat Pusat maupun daerah dalam memastikan pemajuan kebudayaan berlangsung di setiap jenjang pemerintahan. Kemendikbud juga harus membangun hubungan dengan komponen dari pihak masyarakat sipil dan dunia usaha. Studi ini akan melihat beberapa kota di Indonesia yang sudah menjalankan upaya pemajuan kebudayaan. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa ada beberapa kota yang fokus pada satu objek kebudayaan, seperti Kota Pekalongan dengan pemajuan batiknya. Studi ini akan lebih diarahkan pada upaya pemajuan kebudayaan dengan tujuan untuk menguatkan kelembagaan kebudayaan pada tingkat nasional dan daerah, menguatkan kedudukan Indonesia di mata internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat gambaran secara holistik objek penelitian dalam menjelaskan fenomena sosial. Penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara memberi makna terhadap data yang diperoleh, juga menerjemahkannya atau menjadikannya mudah

dipahami (Neuman, 2013: 201). Pendekatan penelitian kualitatif ini menekankan proses dan makna serta peneliti lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial sehingga terjadi hubungan yang erat antara peneliti dan objek penelitian¹. Pendekatan ini dipandang tepat dalam memahami bagaimana peneliti dapat menyusun rencana strategis dari berbagai pandangan para pemangku kepentingan dan bagaimana membangun kota kreatif berbasis pemajuan kebudayaan.

Penelitian ini juga akan mengungkapkan program dan kegiatan yang dapat memperkuat penciptaan, produksi, distribusi, konsumsi produk, dan jasa budaya pada tingkat lokal; peningkatan akses dan partisipasi pada kehidupan berbudaya, termasuk apresiasi terhadap produk budaya; serta pengintegrasian industri kreatif dan budaya ke dalam strategi pengembangan lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi dan menyampaikannya dengan bahasa narasi, baik dimensi fasilitas/infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya. Menurut Neuman (1991; Lusiana, 2011), pendekatan ini memiliki tiga karakteristik, yaitu (a) perspektifnya nonpositivis (*a nonpositivist perspective*), maksudnya atau fokus pada makna subyektif, definisi simbol dan lainnya (b) logika disusun berdasarkan praktik; dan (c) bersifat nonlinear. Turunan dari pendekatan ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, seperti tulisan, perkataan, dan perilaku objek yang diteliti. Strategi yang digunakan dalam metode kualitatif ini adalah studi kasus untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake, 1995; Creswell, 2010:20).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah, komunitas kota kreatif, akademisi, dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Merekalah yang dapat mengungkapkan dan merumuskan usulan kebijakan yang dapat menjamin keberadaan dan pengembangan kota kreatif berbasis pemajuan kebudayaan di wilayah masing-masing. Sampel penelitian adalah pihak/orang yang mewakili unsur di atas, kalangan aparatur pemerintah daerah, komunitas kota kreatif, akademisi, dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

3. Fokus dan Lokus

Fokus kajian ini lebih pada substansi yang ingin diungkap, di antaranya beberapa hal yang dapat dijadikan program strategis dalam pengembangan kota kreatif, misalnya kondisi sosial, budaya, kreativitas warga, dukungan pemerintah daerah, infrastruktur, dan potensi kota sebagai kota kreatif yang mendukung pemajuan kebudayaan.

Lokus atau lokasi penelitian ini adalah empat kota di Indonesia, yaitu Kota Pekalongan, Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Ambon. Keempat kota ini merupakan kota yang telah terdaftar dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO/UNESCO Creative Cities Network (UCCN), dan yang sedang diusulkan dalam Daftar UCCN. Kota-kota tersebut juga telah diuji petik oleh Bekraf melalui Penilaian Mandiri Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia (PMK3I) Deputy Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Keempat kota itu memiliki konteks budaya yang khas, baik dari sisi kultural maupun bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan. Diharapkan sebaran tersebut dapat menjadikan hasil penelitian ini cukup komprehensif untuk direfleksikan pada kota-kota yang lain, terutama yang akan mengembangkan diri ke dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

¹ Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln, 2009; Lusiana, Christopheria Vera, 2011. hlm 31.

Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah berbagai tulisan atau artikel tentang objek penelitian untuk memperkaya wawasan peneliti, memperkuat teori dan model analisis yang akan digunakan.

b. Observasi/Pengamatan

Observasi/pengamatan dilakukan di lokasi penelitian, kemudian mencatat berbagai hal penting berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti kondisi geografi lokasi penelitian, demografis/kependudukan, serta masalah sosial budaya.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dan responden. Untuk itu, akan disiapkan pedoman wawancara berstruktur untuk memperoleh data dan informasi sesuai tujuan penelitian.

d. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT/FGD)

Diskusi kelompok terpumpun berupa pertemuan/diskusi dengan narasumber dan berbagai perwakilan aparaturnya pemerintah daerah, komunitas kota kreatif, akademisi, dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Diskusi ini dimaksudkan untuk memverifikasi data yang telah terkumpul.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tahapan pengodean terbuka (*open coding*), pengodean berporos (*axial coding*), dan pengodean terpilih (*selected coding*) (Strauss & Corbin, 2003; Suryati, 2009: 51). Analisis dilakukan selama langkah proses pengodean data berlangsung. Hal ini selaras dengan anjuran Moleong (2006; Suryati, 2009), yakni “bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Peneliti melihat keterkaitan berbagai tema dan konsep, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik setiap informan. Berikutnya peneliti menganalisis keterkaitan antara pertanyaan penelitian dengan data yang diperoleh serta konsep-konsep yang digunakan sebagai alat analisis. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai didapatkan kesimpulan akhir. Catatan dalam kesimpulan akhir itu akan memperlihatkan keterkaitan antara data dan konsep, data bisa memperkaya konsep, atau data bertentangan dengan konsep sehingga akan menghasilkan konsep yang baru (Neuman, 1991; Alamsyah, 2007: 49-50).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif dalam Bidang *Crafts and Folk Art* Berwawasan Pemajuan Kebudayaan

Kota Batik di Pekalongan, Bukan Jogja, Bukan Solo adalah salah satu lirik lagu Grup Slank untuk menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Industri batik di kota ini begitu superior, tak terkejar oleh kota lain. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui bahwa Kota Pekalongan sebagai pusat kota yang memproduksi kebutuhan batik nasional. Segala perlengkapan untuk membuat batik sangat mudah diperoleh sehingga pertumbuhan industri UMKM pun terus menggeliat. Dengan demikian, Kota Pekalongan dan wilayah penyangganya menjadi pusat industri batik yang menjanjikan.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya Kota Pekalongan sudah berkontribusi dalam meraih dua sertifikat UNESCO terkait dengan Batik dan Museum Batik. Batik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 ditetapkan dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO, hari penetapan tersebut kini diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Batik. Meskipun terdapat kontribusi kota lain dalam proses pendaftaran batik Indonesia ke UNESCO, peran Pemerintah Kota Pekalongan sangat menonjol. Hal ini ditambah lagi dengan terdaftarnya “Pendidikan dan Pelatihan Warisan Budaya Batik untuk Anak SD, SMP, SMA, SMK

dan Politeknik dalam kerja sama dengan Museum Batik di Pekalongan” dalam kategori *best practice* Pelestarian Warisan Budaya Takbenda pada tahun yang sama dengan penobatan batik dalam daftar ICH UNESCO.

Museum Batik didirikan pada 2005 atas inisiasi para pengusaha batik yang berhimpun di dalam Kadin (Kamar Dagang dan Industri) bersama dengan Yayasan Batik Indonesia. Di tengah persaingan usaha antarsesama pengusaha batik, beberapa bentuk sinergi juga terlihat dari lembaga keuangan yang kini menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele. Sejak awal kemerdekaan dibentuklah GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) yang hingga kini tetap eksis membantu permodalan bagi para pengusaha batik, bahkan merambah ke industri lainnya. Ada pula Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di Kota Pekalongan yang juga merambah ke daerah lain di sekitar Kota Pekalongan, bahkan hingga ibu kota negara dengan aset trilunan rupiah.

Di Pekalongan batik tidak hanya menarik dilihat dari kacamata ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial-budaya. Berbeda dengan batik di Kota Yogyakarta dan Kota Solo yang terkait dengan Kraton, di kota ini batik mengalami akulturasi budaya dengan negara lain, khususnya Belanda, Arab, dan Tiongkok. Dua kampung batik yang ada di Kota Pekalongan yang masih eksis hingga saat ini adalah Kampung Kauman dan Kampung Pesindon. Kedua kampung tersebut merupakan representasi secara historis bahwa ada kaitan erat batik dengan kelompok etnik Arab dan Tionghoa, dalam kaitan ini batik bukan hanya diproduksi oleh etnik Jawa. Hal ini menyebabkan motif dan warna batik Pekalongan lebih beragam.

Batik di Pekalongan juga masuk dalam pendidikan formal. Di tingkat sekolah menengah, ada SMK Negeri 3 Pekalongan memiliki jurusan batik. Untuk tingkat SD dan SMP pemerintah kota menerapkan mata pelajaran Batik sebagai muatan lokal yang diajarkan kepada semua siswa. Di tingkat perguruan tinggi ada beberapa perguruan tinggi yang membuka Program Studi Batik untuk jenjang Diploma 3, yaitu Unikal (Universitas Pekalongan) dan Politeknik Pusmanu. Kedua perguruan tinggi tersebut berkomitmen untuk mempertahankan Program Studi Teknik Batik. Di sisi pendidikan informal, Kota Pekalongan begitu banyak alternatif yang tersedia untuk peminat yang ingin menjadi perajin batik. Museum Batik, Paguyuban Kampung Batik, serta beberapa perajin batik membuka diri untuk mencetak perajin baru tidak hanya dari Kota Pekalongan dan sekitarnya, tetapi juga untuk warga negara asing. Hal ini peneliti lihat sendiri saat penelitian berlangsung, terdapat belasan mahasiswa Universiti Kelantan Malaysia yang sedang belajar batik kepada Zahir.

Tidak cukup dengan perannya dalam mendapatkan dua sertifikat UNESCO, pada tahun 2014 Kota Pekalongan ditetapkan sebagai Anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO atau yang dikenal dengan UCCN (UNESCO Creative Cities Network) dalam bidang *Crafts and Folk Art*. Pada saat pengajuan ke UCCN, Pemerintah Kota Pekalongan memainkan peranan utama. Salah satu pejabat di Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) Kota Pekalongan yang saat itu terlibat aktif dalam penyusunan proposal ke UCCN mengatakan, “Berbeda dengan Kota Bandung yang lebih terlibat aktif itu komunitasnya, kalau Kota Pekalongan itu Pemerintah Kotanya. Kita menyiapkan syarat administrasi dan lapangannya untuk mendukung komponen kota kreatif.”.

Selaras dengan pernyataan di atas, salah satu ASN (aparatur sipil negara) Kota Pekalongan lain yang juga terlibat dalam tim mengatakan, “Waktu itu kita kesulitan sekali untuk mendapatkan informasi, terutama terkait dengan kategorisasi sehingga dibentuklah tim khusus yang ditugaskan untuk menyiapkan proposal kota kreatif.” Sebelum memutuskan untuk masuk dalam kategori *Crafts and Folk Art*, awalnya tim memilih kategori *design*. Pemilihan *Crafts and Folk Art* ini berdasarkan kajian yang mendalam oleh tim khusus yang

terdiri atas ASN dan akademisi yang sebelumnya juga terlibat dalam pembuatan *dossier* Batik Indonesia dan Diklat Batik sebagai warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) UNESCO.

Mengisi formulir UCCN membutuhkan keahlian khusus dan kesabaran, terutama dalam memilih kategori kota kreatif. Komunikasi yang intensif dengan pihak UNESCO menjadi salah satu elemen penting yang menyebabkan Kota Pekalongan dapat bergabung dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO. Pada tahun tersebut format proposal yang dibuat UNESCO sempat ada perubahan. Kota Pekalongan dalam hal ini mengajak pihak akademisi dan ahli yang sebelumnya pernah juga menyusun *dossier* batik Indonesia dan diklat batik yang bekerja sama dengan Museum Batik di Pekalongan. Pengalaman tersebut memiliki arti penting sehingga proposal tersebut diterima oleh UNESCO.

“Batik itu DNA-nya Kota Pekalongan. Saya tahu betul janji-janji yang ada di dalam proposal kota kreatif. Dan saya tidak khawatir, kita tidur pun warga Pekalongan terus memproduksi batik,” kata salah seorang akademisi yang menjadi anggota tim ahli.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Kota Pekalongan merupakan penghasil batik terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Potensi ini dipahami dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang sejak tahun 2011 sudah mengenalkan diri sebagai *The World’s City of Batik* dan diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011.

Dalam proses pendaftaran Kota Pekalongan untuk menjadi anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO kurang melibatkan komunitas. Peran komunitas lebih menonjol dalam hal pelengkap urusan administratif. Pelibatan komunitas yang intensif dilakukan dua tahun setelah penetapan Kota Kreatif oleh UNESCO. Hal ini disebabkan oleh diperlukannya sebuah wadah komunitas yang mendukung program yang ada di dalam kota kreatif. Wadah tersebut diberi nama Forum Kota Kreatif Pekalongan atau Pekalongan Creative City Forum (PCCF). Sebagai wadah komunitas kreatif, PCCF terdiri atas berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, pengusaha, seniman, perajin batik, dan juga ASN.

Salah satu konsekuensi menjadi anggota UCCN ialah Kota Pekalongan harus terlibat aktif dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO di Dunia. Kini pihak Pemerintah Kota Pekalongan aktif mengirim delegasi dalam pertemuan tahunan dengan jejaring kota kreatif lainnya di dunia Pertemuan tahunan terakhir tahun 2019, perwakilan Pemerintah Kota Pekalongan hadir di Fabriano, Italia, untuk berbagi pengalaman dan juga menjadi bagian yang menyeleksi kandidat Jejaring Kota Kreatif UNESCO dalam domain *Crafts and Folk Art*. Di sisi lain, PCCF berafiliasi dengan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) untuk meningkatkan jumlah kota kreatif di Indonesia yang disebut juga dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring Kota Kabupaten Kreatif Indonesia. Selama ini PCCF terus mendorong penguatan ICCN agar mendekati standar kota kreatif yang dibuat oleh UNESCO (UCCN).

Sebagai kota pertama di Indonesia, bahkan di wilayah Asia Tenggara, yang menjadi anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN), Kota Pekalongan belajar keras untuk bisa menyesuaikan diri menyandang predikat prestisius tersebut. Dalam keterbatasan itu sudah ada beberapa prestasi yang sudah diraih. Pertama, laporan periodik yang dibuat oleh Kota Pekalongan dinilai sangat baik (*very satisfactory*) oleh UNESCO. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sudah menjalankan berbagai prasyarat yang harus dilakukan sebagai anggota UCCN. Kedua, Kota Pekalongan sudah membangun kerja sama dengan kota kreatif dunia lainnya di bidang literasi, Heidelberg, Jerman, untuk membuat produk hiasan yang memadukan puisi karya sastrawan Heidelberg dengan kain batik. Kerja sama ini berdampak pada pembelajaran bagi para perajin batik di Kota Pekalongan karena ada standar internasional yang harus dipenuhi, seperti ramah lingkungan dan tidak mempekerjakan anak, Dalam pertemuan tahunan UCCN

berikutnya, produk tersebut akan dipamerkan sebagai bentuk praktik batik sinergi antarkota kreatif UNESCO di dunia.

2. Bergabungnya Kota Bandung dengan UCCN (UNESCO Creative Cities Network) sebagai Kota Kreatif dalam Bidang Design

Paris van Java sebuah nama yang melekat pada Kota Bandung. Julukan tersebut sudah tersemat sejak awal abad ke-20, saat Indonesia masih menjadi bagian dari Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Ada dua hal yang setidaknya menjadi daya tarik Kota Bandung pada masa itu, yaitu desain arsitektur bangunan yang mirip dengan Paris atau yang dikenal dengan *art deco*. Kedua ialah terkait dengan barang fesyen asal Paris yang dijual di beberapa toko di Kota Bandung. Perpaduan tersebut menjadikan Bandung semakin lekat dengan kota Paris yang waktu itu menjadi pusat mode di dunia Barat.

Hubungan erat antara Bandung dan desain terus berlanjut. Semenjak tahun 1920, Bandung merupakan kota pertama di Hindia Belanda yang memiliki perguruan tinggi, yaitu Technische Hoogeschool te Bandoeng yang selanjutnya menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebagaimana diketahui, Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, adalah salah satu alumni dari perguruan tinggi tersebut. Kota Bandung terus menjadi kota mahasiswa karena jumlah perguruan tingginya terus bertambah. Hingga tahun 2018 ada sekitar 107 (BPS Jawa Barat), perguruan tinggi yang ada di Kota Kembang ini. Jumlah itu belum termasuk berbagai lembaga kursus dan keterampilan yang jumlahnya juga sangat banyak.

Dari ratusan jumlah perguruan tinggi tersebut, ada sekitar dua belas kampus yang memiliki jurusan yang terkait dengan desain, seperti ITB, Unisba, Itenas, ISBI, Universitas Telkom, Universitas Maranatha, ISBI, Unpas, dan Binus. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Bandung karena memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam bidang desain, terutama desain arsitektur, fesyen, produk, dan multimedia. Tentunya dengan melimpahnya sumber daya, Bandung semakin dikenal sebagai penghasil terbesar produk fesyen, makanan, dan seni.

Industri kreatif kontemporer terus berkembang di Kota Bandung, komunitasnya pun semakin melimpah seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang tinggal di sana. Dalam upaya menyinergikan komunitas tersebut, khususnya dalam menyelesaikan problematika sosial, maka dibentuklah Perkumpulan Kreatif Kota Bandung atau yang lebih dikenal dengan Bandung Creative City Forum (BCCF) pada 2008. BCCF kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang mewadahi aspirasi masyarakat kreatif Kota Bandung. Sinergi antarkelompok dan komunitas makin terpadu sehingga banyak kegiatan bersama yang dilakukan untuk mendorong perubahan di Kota Bandung.

Perlu diketahui bahwa keberadaan BCCF di Kota Bandung sudah lebih dulu jika dibandingkan dengan proses pengajuan Kota Bandung sebagai anggota UCCN (UNESCO Creative City Network). Dengan demikian, BCCF sudah memiliki konsep awal yang tidak merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh UNESCO. Selain itu, BCCF juga aktif dalam diskusi dan kajian dalam upaya melahirkan konsep ekonomi kreatif di tingkat nasional.

Anggota BCCF sebagian merupakan dosen yang mengajar di perguruan tinggi di Kota Bandung. Mereka aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk UNESCO. Berdasarkan informasi dari salah satu anggota komunitas, mereka memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota UCCN. Tahun 2013 Kota Bandung sempat mendaftarkan diri menjadi kota kreatif dalam bidang *Crafts and Folk Art*. Keterbatasan informasi dan adanya perubahan isian formulir pendaftaran menyebabkan Kota Bandung gagal menjadi anggota. Barulah pada akhir tahun 2015 Kota Bandung akhirnya terpilih menjadi salah satu anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO bidang Desain. Bahkan, dalam penetapan itu Kota Bandung juga dianggap memiliki kelebihan dari sisi praktik; desain sebagai sarana solusi atas masalah perkotaan dan

juga kolaborasi antarelelemen masyarakat yang juga dikenal dengan pentaheliks (pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media).

Dalam proses pengisian formulir UCCN, Pemerintah Kota Bandung berkerja sama dengan komunitas yang terdiri atas praktisi dan akademisi. Kendala terbesar dalam pengisian itu ialah ketiadaan data yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kini Kota Bandung terus bebenah untuk melakukan pendataan dari sisi pengembangan kreativitas. Mengenai hal ini salah satu anggota panitia yang terlibat dalam pendaftaran mengatakan:

“ *Nah, yang jadi masalah, kita waktu itu mengandalkan sensus BPS gitu ya, nah di BPS itu gak ada instrument yang bisa kita gunakan mengukur pengembangan potensi kreativitas, kecuali data primer yang standar, jumlah populasi, pertumbuhan ekonomi, dan sementara kalo kita ngukur pengembangan potensi kreativitas dan inovasi kan ngga ada*”.

Perlu diketahui bahwa pada masa pendaftaran Kota Bandung sebagai anggota UCCN yang menjabat sebagai wali kota adalah Ridwan Kamil (RK), yang tak lain ialah tokoh komunitas yang mendirikan BCCF. Dengan demikian, tentunya sinergi antarkomunitas dan Pemerintah Kota Bandung terjalin sangat erat. Komunitas kreatif di Kota Bandung mendapatkan dukungan yang besar untuk mengembangkan kreativitas, seperti perbaikan taman kota serta bantuan kredit lunak “melati” untuk para pengusaha.

Sebagai anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO, Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam forum-forum internasional. Sejauh ini, sudah ada beberapa perwakilan komunitas yang dilibatkan dalam forum-forum tersebut. Salah satu praktisi pernah dilibatkan dalam kegiatan pameran di George Town. Sayangnya, dalam beberapa kesempatan yang bergengsi, seperti London Design Biennial mereka tidak bisa berpartisipasi karena keterbatasan anggaran. Padahal, mereka sudah menyiapkan konsep yang matang untuk bisa membawa nama Kota Bandung dalam kegiatan tersebut.

Lebih jauh, komunitas yang tergabung dalam BCCF juga menginginkan dalam waktu dekat Kota Bandung dapat menjadi tuan rumah dalam kegiatan tahunan UCCN. Menurut mereka, dengan menjadi tuan rumah akan menjadi ajang promosi yang paling baik untuk mengenalkan Kota Bandung. Dengan reputasi Kota Bandung sebagai Ibu Kota Asia-Afrika tentunya prasyarat dari sisi sarana dan prasarana sudah memadai. Beberapa pihak swasta sudah menyatakan diri bersedia membantu dari sisi fasilitas. Namun, dari sisi anggaran jika hanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandung, mereka tidak akan sanggup. Untuk itu, perlu dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat, khususnya Bekraf dan Kemdikbud. Upaya sudah dilakukan, tetapi saat ini belum ada tanggapan positif dari Pemerintah Pusat.

BCCF, sebagai tonggak sinergitas komunitas kreatif Bandung, pada tahun yang sama dengan penominasian Kota Bandung menjadi kota kreatif Dunia melebarkan sayapnya bersama komunitas kreatif dari berbagai kota lainnya untuk membentuk ICCN (Indonesia Creative Cities Network). Belajar dari pengalaman, khususnya dalam sisi kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun kota kreatif, saat ini hampir setengah kota/kabupaten di Indonesia sudah tergabung dalam ICCN.

Kota Bandung memperoleh prestasi sebagai salah satu praktik baik dalam sisi kolaborasi antarstakeholders. Hal ini dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan karena memang mereka memiliki tradisi *nongkrong* atau dalam bahasa Sunda disebut dengan *ngariung* sembari membahas ide-ide baru serta solusi untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2017 sudah memiliki bidang ekonomi kreatif (ekraf) yang tergabung dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian, Kota Kembang itu bisa

mengembangkan bidang ekonomi kreatifnya secara lebih konprehensif. Ibu Tris, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kota Bandung, mengatakan:

“Ini merupakan bidang baru. Awalnya untuk ekonomi kreatif itu tersebar di lima bidang di bawah koordinasi Bidang Ekonomi di Sekda. Meskipun Kota Bandung belum memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi kita sudah memiliki bidang sendiri. Saat ini Raperda Ekraf Kota Bandung sudah masuk dalam Prolegda, Insya Allah tahun 2020 akan dibahas. Selama ini sandaran kita untuk Ekraf ada di RPJMD. Jawa Barat sudah ada Perda Ekrafnya, jadi kita rujukannya ke situ, ...”.

Salah satu tugas utama bidang ekraf ialah mengembangkan enam belas sektor ekonomi kreatif sebagaimana yang diperkenalkan oleh Bekraf. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendekatkan diri pada komunitas yang terkait. Melalui program Patra Komala, Ibu Tris dan jajarannya setiap minggu bertemu dengan komunitas. Di dalam forum itulah dirancang kegiatan bersama antara komunitas dan Pemerintah Kota. Pada saat ini lebih empat ratus kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kota Bandung terkait dengan ekonomi kreatif.

Selain mendorong kegiatan atau even, Pemerintah Kota juga membangun Bandung Creative Hub (BCH), sebuah gedung dengan perlengkapan penunjang ekonomi kreatif yang ditujukan bagi komunitas. Gedung dengan desain kontemporer ini menjadi simbol ekonomi kreatif di pusat Kota Bandung. Fungsi BCH ini sebagai pusat bagi para pemangku kepentingan dan pelaku industri kreatif pada tingkat nasional dan internasional untuk mendorong pertukaran dan pengalaman kreatif, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor. Selain itu, ada *co-working space* yang dibangun di beberapa kecamatan untuk pengembangan ekraf, juga sedang dibangun Bandung Creative Belt.

3. Kota Solo Menuju Kota Kreatif UCCN yang Berwawasan Pemajuan Kebudayaan

Solo merupakan salah satu pusat Kerajaan Mataram. Di kota ini terdapat dua istana, yaitu Keraton Pakualaman dan Keraton Mangkunegaran. Dengan demikian, Kota Solo merupakan salah satu lokasi penting kebudayaan Jawa yang napas utama kota ini, termasuk *crafts and performing art*.

Semenjak zaman Hindia-Belanda, Taman Sriwedari yang dibangun oleh Pakualaman merupakan tempat yang sangat penting bagi perkembangan seni pertunjukan rakyat, seperti wayang orang, wayang kulit, ketoprak, tarian, dan gamelan. Roh kesenian itu terus bertumbuh dan menguat dengan berdirinya beberapa institusi pendidikan khusus bidang seni di Kota Solo seperti; ISI Solo, SMK 8, SMK 9, dan beberapa jurusan seni di UNS.

Sebagai pusat sejarah dan kebudayaan Jawa, Kota Solo juga identik dengan batik dan keris. Dua jenis warisan budaya takbenda yang lekat dengan budaya Jawa. Batik dan keris saat ini masih digunakan dalam tradisi keraton, khususnya dalam agenda terkait dengan momen sakral. Di kota ini juga masih banyak terdapat peerajin batik dan keris, serta berbagai elemen penunjang kebudayaan Jawa, seperti blangkon dan wayang kulit.

Di Kota Solo juga banyak terdapat sanggar seni yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. “Menariknya dari sanggar-sanggar ini adalah pemasok terbesar even-even kebudayaan di Kota Solo,” kata Kinkin, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Solo.

Kota Solo tidak hanya menjadi tuan rumah dari kegiatan seni pertunjukan rakyat dalam skala lokal atau nasional, tetapi juga internasional. Salah satu di antaranya ialah International Gamelan Festival, yang pada tahun 2019 dimeriahkan oleh 670 peserta dari mancanegara. Hal ini menunjukan bahwa gamelan, sebagai sebuah instrumen tradisi khas Jawa, sangat digemari oleh masyarakat internasional. Dari sisi *performing*

art atau seni pertunjukan ada SIPA (Solo International Performing Art). Acara ini dilaksanakan setiap tahun di Benteng Vastenburg yang dimeriahkan oleh berbagai seniman lokal, nasional, dan mancanegara.

Dalam upaya meningkatkan kedatangan wisatawan Pemerintah Kota Solo juga membangun beberapa kampung tematik dalam bidang kesenian, seperti Kampung Seni Kemlayam atau kampung yang dihuni oleh seniman gamelan dan tari tradisional. Selain itu, juga dikembangkan kampung batik di Laweyan dan Kauman. Ada pula Kampung Blangkon di Potrojayan, Serangan, yang memiliki berbagai spot foto untuk memuaskan para wisatawan.

Pemerintah Kota Solo begitu bersemangat untuk bisa menyadangkan Kota Kreatif UCCN bagi Kota Solo, kota yang kaya akan atraksi budayanya. Tahun ini adalah tahun kesekian bagi Kota Solo mendaftarkan diri agar menjadi anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN). Pemerintah Kota Solo, khususnya Dinas Kebudayaan, aktif berkomunikasi dengan Bekraf, ICCN, dan pihak terkait lainnya agar terus berupaya menjadikan Kota Solo sebagai kota kreatif.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Sekda Solo, Ahyani, mengatakan bahwa Pemerintah Solo semenjak awal tahun 2019 sudah menyiapkan berbagai persyaratan mulai dari kelengkapan administrasi hingga kelembagaan. Pada sisi kelembagaan, Kota Solo kini sudah membuat komite yang bertugas khusus untuk mengurus pendaftaran ke UNESCO. Pemerintah Kota Solo juga aktif berkomunikasi dengan DPRD untuk menyiapkan regulasi yang mendukung Kota Solo sebagai Kota Kreatif UCCN.¹

Pada pendaftaran kali ini Kota Solo fokus pada sisi seni pertunjukan rakyat. Hal ini dirasa lebih sesuai dengan DNA Kota Solo sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Meskipun belum ada perda khusus mengenai kebudayaan, Dinas Kebudayaan begitu bersemangat untuk mendorong pemajuan seni pertunjukan rakyat dengan menggelar berbagai macam even, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, Pemerintah Kota juga memberikan bantuan perlengkapan pertunjukan kepada sanggar-sanggar yang aktif dalam bidang kesenian, khususnya seni pertunjukan rakyat.

Selain pemerintah, komunitas juga ikut mendorong agar Kota Solo menjadi bagian dari jejaring Kota Kreatif UNESCO yang merupakan bagian dari ICCN begitu aktif untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam membangun jejaring antarseniman, khususnya bidang seni pertunjukan rakyat.

Dinas Kebudayaan Kota Solo terus berupaya menyemarakkan seni pertunjukan rakyat dengan memberikan dukungan kepada seniman dan sanggar yang tersebar di Kota Bengawan tersebut. Bentuk bantuannya berupa gamelan, pelaksanaan *workshop*, dan pelatihan Pemerintah Kota juga mendorong sekolah di luar sekolah seni untuk bergeliat dalam bidang kesenian. Dinas Pendidikan juga telah menyusun buku yang terkait dengan kesenian.

Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana berjejaring serta menarik minat wisatawan asing sebanyak-banyaknya ke Kota Solo. Upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan even internasional, seperti SIPA dan International Gamelan Festival. Dalam kegiatan tersebut Dinas Kominfo bekerja keras mempromosikannya, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Dengan semakin semaraknya kegiatan internasional tersebut diharapkan Kota Solo semakin menguat menjadi Kota Seni Pertunjukan atau *performing art*.

¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pt3e8g368/solo-lengkapi-persyaratan-jaringan-kota-kreatif-unesco>

Tahun 2017 Dinas Pariwisata sudah memiliki program pengembangan ekonomi kreatif di Kota Solo, guna meningkatkan pendapatan kota. Bidang ini bertugas untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memadukan tradisi serta perkembangan teknologi informasi. Kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan pendampingan, *workshop*, serta promosi bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Solo. Bidang ini juga sedang melakukan kolaborasi antarelelemen *quadruple helix* yang dikembangkan oleh Bekraf.

4. Menguatkan Kota Ambon sebagai Kota Kreatif dalam Bidang Musik

Ambon merupakan kota yang memiliki garis pantai yang panjang dan sejumlah perbukitan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penunjang pengadaan pariwisata lokal. Warung-warung kecil hingga kafé dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Kota Ambon. Pinggir pantai juga digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi warga tarik suara dengan memainkan gitar akustik hingga media karaoke digital. Aktivitas bermusik ini umum dijumpai di sana setiap hari, bahkan sampai larut malam.

Dalam acara pesta ulang tahun dan pernikahan juga umum digelar acara nyanyi bersama. Tanda lain yang memperlihatkan begitu lekatnya musik dengan Kota Ambon ialah kendaraan angkot (angkutan kota) yang dilengkapi alat pemutar musik yang bergema cukup keras.

Menurut Ronny, Ketua AMO (Ambon Music Office), “Sembilan puluh persen masyarakat Kota Ambon memiliki DNA dan intuisi bermusik yang tinggi. Bagi warga Kota Ambon, musik masih dianggap sebatas hobi dan turunan secara alami dari generasi sebelumnya. Musik hanya sebagai pengisi waktu hingga ada ungkapan *biar miskin, tapi tau snangsa*. Itulah yang membuat Pemerintah Kota Ambon bersama dengan para pemangku kepentingan mencanangkan “Ambon City of Music” pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk menciptakan industri kreatif musik berbasis kreativitas masyarakat Kota Ambon yang bersemboyan *harmonis, religius, dan sejahtera* yang selaras dengan SDGs 2030 pada tujuan 1, 2, 3, 8, 9, dan 11.¹ Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan hadirnya berbagai tempat usaha dan ruang-ruang pertunjukan akan memperluas kesempatan kerja bagi warga masyarakat.

Pencanangan Wali Kota Ambon tentang Ambon City of Music semula mengalami berbagai kendala dan tantangan dari masyarakat. Musik sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Kota Ambon sehingga tidak dianggap sebagai hasil kreativitas atau inovasi. Musik bukan karya kreativitas dan memiliki nilai ekonomis. Musik adalah warisan turun-temurun yang alami. Selanjutnya, pada 2016 Pemerintah Kota Ambon bersama Bekraf melaksanakan terobosan untuk menyiapkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia pada 29 Oktober 2016. Dampaknya begitu keras, lalu berbagai aktivitas musik dikembangkan di Kota Ambon dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas musisi, akademisi musik, pebisnis musik, pemerintah kota, dan media massa.

Pada perkembangan berikutnya, Kota Ambon menjadi sentra musik di berbagai kepulauan bagian timur Indonesia. Kualitas suara yang mumpuni dan alunan melodi yang khas wilayah kepulauan menjadikan lagu-lagu Ambon digemari oleh masyarakat wilayah sekitarnya, seperti NTT, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Dengan demikian, wilayah timur Indonesia dipersatukan oleh musik

¹ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (1). *No poverty* (tanpa kemiskinan dalam bentuk apa pun di seluruh penjuru dunia); (2) *Zero hunger* (tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budi daya pertanian yang berkelanjutan); (3) *Good health and well-being* (menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur); (8) *Decent work and economic growth* (mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang); (9) *Industry, innovation and infrastructure* (membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi); (11) *Sustainable cities and communities* (membangun kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan).

yang sama, yaitu lagu-lagu dari Ambon. Lagu-lagu terus tercipta dan para penyanyi muda pun bermunculan.

Perihal lagu dan menyanyi sudah melekat lama dalam kehidupan warga Kota Ambon. Prof Dr. Mus Hulisean mengatakan, “Orang-orang tua menyampaikan pesan atau mengekspresikan perasaan dengan menyanyi. Nyanyian rakyat atau yang disebut *kapata* yang masih ada di beberapa desa menjadi bukti kebiasaan menyanyi itu sudah lama ada”.¹

Bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia, sudah tidak asing dengan penyanyi asal Ambon atau yang berdarah Maluku, seperti Danil Sahuleka, Broery Marantika, Melly Goeslaw, Glen Fredly, Harvey Maliholo, dan Andre Hehanusa. Dalam sebuah liputan media dikatakan bahwa di antara para seniman kondang tersebut memiliki hubungan darah langsung.²

Dengan menyadari akan potensi musik tersebut, setelah tahun 2011 Pemerintah Kota Ambon mencanangkan Kota Ambon sebagai kota musik (Ambon City of Music) dan Kota Ambon Menuju Kota Musik Dunia 2016, dilanjutkan dengan survei Penilaian Mandiri Kota-Kabupaten Kreatif se-Indonesia (PMK3I) oleh Bekraf hingga menetapkan Ambon sebagai Kota Kreatif berbasis Musik pada 27 Oktober 2017. Berikutnya, Pemerintah Kota Ambon menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik. Perda itu mengatur kewajiban tempat usaha untuk memberikan upah bagi pelaku usaha musik sesuai dengan standar presentasi atau perjanjian ketenagakerjaan dan keharusan tempat usaha menyediakan fasilitas. Selain itu, Wali Kota Ambon juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Ambon Music Office (AMO) untuk menggawangi berbagai hal yang berkaitan dengan Ambon Kota Musik, termasuk menyiapkan Ambon menjadi Kota Kreatif Berbasis Musik UCCN.

Pendirian AMO merupakan salah satu dari 25 rencana aksi yang ditetapkan menuju Ambon sebagai Kota Kreatif Dunia UCCN Bidang Musik. Direktur AMO Ronny Loppies, secara aktif menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Ada lima pilar penting yang menjadi kerangka kerja AMO bersama musisi dan komunitas, yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan musik, industri, sosial, dan budaya.

AMO sangat aktif melakukan konsolidasi, baik dengan pihak eksternal maupun internal, guna mendapatkan masukan dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi Kota Ambon sebagai kota kreatif dunia. Selain berkomunikasi dengan Bekraf, AMO juga membuka jejaring dengan Kemendikbud, ICCN, Museum Musik Indonesia, dan UNESCO. Dalam upaya mendapatkan masukan pada Mei 2019, AMO mengundang Direktur UCCN Bidang Musik Kota Mannheim, Jerman, untuk mengunjungi Ambon. Dengan demikian, AMO mendapatkan banyak masukan positif untuk mewujudkan Ambon sebagai kota musik.

Terkait dengan pendidikan musik, AMO melakukan komunikasi intensif dengan perguruan tinggi dan lembaga. Perlu diketahui bahwa IAKN (Institut Agama Kristen Negeri) di Kota Ambon memiliki jurusan seni musik sejak tahun 2000, Musik Gerejawi. Keberadaan program studi tersebut sangat penting sebagai lembaga yang mencetak musisi berlatar belakang akademis. Di sisi lain, IAIN Ambon masih berjuang membuka Program Studi Musik Islami

Dalam menunjang industri musik di Kota Ambon, pada 2018 Pemerintah Pusat melalui Bekraf, membantu pembangunan studio rekaman musik bertaraf internasional di Universitas Pattimura. Bekraf juga

¹ “Ambon (Teruslah) Menyanyi”. *Kompas.com*, 22 Oktober 2013.

² “Musisi-Musisi dari Ambonia”. *Tirto.id*, 07 September 2016.

membantu mendirikan Gedung Pertunjukan Musik Etnik di IAIN Ambon. Dengan kedua infrastruktur itu, Bekraf berharap dapat menunjang kegiatan seniman di Kota Ambon dan sekitarnya.

Selain institusi pendidikan formal, beberapa komunitas juga memiliki peran penting untuk menguatkan musik sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Salah satu komunitas yang sudah berdiri cukup lama ialah MBO (Molucca Bamboo Orchestra) yang menggunakan alat musik seruling bambu yang dimainkan bersama-sama. MBO sudah memiliki jadwal konser setiap tahun di Kota Ambon sejak tahun 2007, bahkan sudah sering mengisi acara bergengsi di ibu kota (Jakarta). Pada November 2019 MBO dijadwalkan berkolaborasi dengan musisi dari Amsterdam untuk melakukan konser bersama. “MBO awalnya untuk mempertahankan tradisi, tetapi sekarang kita sudah bisa melihat potensi MBO sebagai destinasi wisata Kota Ambon,” kata Rence, pendiri MBO dalam suatu diskusi kelompok terfokus.

Nilai tambah Kota Ambon untuk menjadi anggota jejaring kota kreatif dunia di bidang musik adalah fungsi musik sebagai sarana perdamaian. Sebagaimana diketahui, saat era reformasi bergulir, Ambon (Maluku) mengalami konflik agama yang dahsyat, wajah Kota Ambon terbelah antara komunitas Islam dan Kristen. Musik berperan sebagai wadah pemersatu dan penyembuh luka lama di antara dua komunitas tersebut.

Langkah untuk menjadikan musik sebagai elemen perekat masyarakat Kota Ambon yang memiliki keragaman agama, suku, dan ras berupa penyelenggaraan Ambonia Music Carnival pada September 2019 dalam rangkaian acara Hari Jadi Kota Ambon. Berbagai komunitas membentuk barisan panjang berkeliling Kota Ambon dengan membawa instrumen musik, baik tradisional maupun modern, sambil menyanyikan berbagai jenis lagu. Selain warga masyarakat, elemen pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kedinasan lain juga berpartisipasi dalam kegiatan itu.

Berdasarkan informasi di atas, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat lainnya sudah bersinergi untuk mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia UCCN. Jika dibandingkan dengan tiga kota sebelumnya (Kota Pekalongan, Kota Bandung, dan Kota Solo), kerja sama antarelemen di Ambon terkesan lebih terorganisasi. Hal ini membuktikan semangat yang besar juga diimplementasikan melalui rencana kerja yang sudah tersusun secara sistematis. Menjadi anggota jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN) tentu bukanlah menjadi tujuan akhir. Kerja sama yang baik ini perlu terus dijaga konsistensinya.

5. Strategi Pengembangan Kota Kreatif di Indonesia

Dalam pengembangan kota kreatif, potensi lokal di setiap daerah menjadi faktor penting sehingga konsep yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dan bisa ditindaklanjuti untuk tujuan pengembangan kota.

Pengalaman Kota Pekalongan ketika memutuskan menjadi kota kreatif sebagai arah pengembangan kota dimulai dari penentuan potensi yang paling menonjol, yaitu batik dan perikanan..Batik dipilih sebagai potensi unggulan karena dinilai dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Kota Pekalongan (Basyir, Profesional; Mantan Wali Kota Pekalongan 2005-2015; ICCN: 2017).

Pengembangan batik sebagai potensi unggulan dimulai sejak mengidentifikasi dan melengkapi ekosistem batik, lalu mengelaborasikannya dengan kebijakan kota. Pencantuman program kota kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga menjadi payung hukum penerbitan peraturan Walikota Pekalongan. Kota Pekalongan memperkuat penumbuhan budaya dan konservasi batik di antaranya dilakukan melalui program edukasi mengenai batik, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pemerintah Kota secara intensif melakukan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai aktor pembangunan kota kreatif, baik dengan akademisi, komunitas kreatif, maupun kalangan profesional, pelaku bisnis, dan media massa. Dengan melibatkan aktor tersebut, Pemerintah Kota bisa

membuat perencanaan matang terkait dengan program pengembangan kota kreatif sesuai dengan potensi lokal di setiap kota, seperti Kota Pekalongan yang sedang mengembangkan *crafts and folk art*, Kota Bandung yang sedang memperkuat bidang desainnya, Kota Surakarta yang sedang menyemarakkan *performing art*-nya, dan Kota Ambon yang sedang gigih-gigihnya mengembangkan diri sebagai kota musik.

Strategi pengembangan kota dan komunitas yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pengembangan kota kreatif dunia ala UCCN sama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam kaitan itu, menempatkan budaya dan kreativitas sebagai pusat strategi pengembangan kota yang berkelanjutan diperlukan jalinan kerja sama dengan komunitas penggiat budaya dan para pemangku kepentingan.

Gambaran mengenai kuatnya ikatan sosial antarkomunitas dapat kita lihat di Bandung yang menunjukkan adanya keseragaman pola pandang tentang desain sebagai salah sarana dan solusi berbagai permasalahan. Dengan demikian, muncullah istilah *design thinking* atau pola pikir desain yang menjadi fondasi kreativitas. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan berbagai komunitas membuat dan mengajarkan mata pelajaran muatan lokal dengan substansi *design thinking*.

Salah satu bentuk sinergisitas komunitas dalam mengembangkan ekonomi kreatif ialah pengembangan wilayah Gudang Selatan Kota Bandung. Gudang Selatan ini semula kompleks pergudangan milik TNI Angkatan Darat diubah menjadi pusat perkantoran dan *show room* atau ruang kreatif. Kini Gudang Selatan menjadi salah satu sentra industri kreatif baru di Kota Bandung yang hampir tidak pernah sepi pengunjung. Gudang Selatan ini pada tahun 2017 menjadi lokasi Bandung Design Biennale yang memiliki keunikan dari sisi desain arsitektur karena memadukan bangunan lama dengan desain kontemporer.

Poin penting untuk mengembangkan kota kreatif adalah menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain. Kota Solo, misalnya, telah mengembangkan seni pertunjukan bersma dengan SIPA. Dalam kaitan ini, SIPA memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa negara, seperti Korea Selatan, Filipina, Jepang, India, dan Selandia Baru SIPA sudah menjadi elemen diplomasi internasional melalui kebudayaan, khususnya seni pertunjukan. Selama sepuluh tahun, dari tahun ke tahun, Pemerintah Kota Solo sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesemarakkan acara *performing art*, misalnya dengan pelibatan berbagai SKPD untuk mendukung kegiatan SIPA. Selain itu, beberapa kegiatan telah dilaksanakan menjelang even yang diprakarsai SIPA selama tiga hari pada pertengahan September 2019. Dalam waktu tiga hari itu kegiatan pentas mulai pada pukul 19.00-- 23.00, pada siang harinya diadakan pasar rakyat yang menjual berbagai produk kesenian atau lazim disebut dengan SIPAMart.

Dalam konteks hubungan internasional, Kota Ambon juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa negara, khususnya pengembangan Kota Kreatif Dunia (UCCN), yaitu Adelaide, Daegu, dan Tongyeong, Hannover dan Liverpool, Mannheim, Katowice, Singapura dan Phuket. Dalam hal kebudayaan lain, Kota Ambon berhubungan baik dengan Darwin, Vlissingen, dan Kyoto.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Semangat undang-undang pemajuan kebudayaan yang menekankan prinsip penguatan komunitas penggiat kebudayaan dan kreativitas sesungguhnya senapas dengan program jejaring Kota Kreatif UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) yang menempatkan budaya sebagai pusat strategi pengembangan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pelibatan komunitas penggiat kebudayaan dan kreativitas untuk tetap berkontribusi dalam perencanaan dan implementasi program

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/kota. Dalam upaya pembinaan, perlindungan, dan pemanfaatan, khususnya pengembangan kebudayaan, dapat dilakukan dengan pelibatan komunitas, perguruan tinggi, dan elemen dunia usaha yang terkait dengan potensi lokal yang dimiliki setiap kota.

Keempat pemerintah kota yang diteliti, baik Kota Pekalongan dan Kota Bandung yang telah menjadi anggota UCCN maupun Kota Surakarta dan Kota Ambon yang sedang berproses ke UCCN telah berusaha memahami dan memperjuangkan potensi lokal setiap kota untuk masuk ke dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO dalam domain tertentu. Kota Pekalongan dalam kategori *craft and folk arts*, Kota Bandung dalam Design, Kota Surakarta sedang memperjuangkan diri dalam kategori *craft and folk arts*, dan Kota Ambon dalam bidang musik.

Keempat kota tersebut, jika ditarik dalam strategi pengembangan kota kreatif, menempatkan budaya dan kreativitas pada arus pengembangan di setiap kota. Dalam konteks ini, pemerintah kota melakukan penguatan ekosistem kota kreatif yang terus melibatkan para akademisi, komunitas kreatif, dan elemen profesional atau dunia usaha yang terkait dengan domain kota kreatif yang sedang dikembangkan. Keempat kota itu juga secara aktif menjalin komunikasi dan hubungan kerja sama, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian terhadap dua kota yang sudah masuk ke dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN) dan dua kota yang sedang dalam proses pendaftaran untuk masuk ke dalam jejaring,¹ ada beberapa hal yang sangat menentukan untuk menjadi anggota Kota Kreatif UCCN.

Pertama, diperlukan tim khusus untuk mengisi dan mengimplementasikan *dossier* UCCN. Tim ini, selain dapat memahami situasi dan kondisi kota tersebut, perlu mendapat dukungan dari pemerintah, baik Pusat maupun daerah, perguruan tinggi, dan komunitas serta melakukan hubungan kolaboratif yang kuat diantara mereka.

Kedua, sangat penting mengonsolidasi komunitas penggiat kebudayaan dan bertindak kreatif. Hal ini bertujuan untuk menguatkan mengingatkan pemerintah kota agar berkomitmen mendukung program pemajuan kebudayaan dan sebagai kota kreatif dunia. Apresiasi perlu diberikan kepada ICCN yang secara masif mendorong penguatan komunitas kreatif di kabupaten/kota di Indonesia. Peran ICCN sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kesadaran komunitas dalam pembangunan di setiap kota/kabupaten dengan memperhatikan akar budaya setiap daerah.

Ketiga, pentingnya pemerintah daerah melakukan upaya aktif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat daerah nasional, maupun internasional. Karena UCCN juga memiliki fungsi agar setiap pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitasnya dalam bekerja sama, diperlukan terobosan, baik melalui aturan formal atau regulasi maupun informal, yakni membangun pemerintahan yang kreatif dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam kancah internasional.

¹ UNESCO telah menetapkan Ambon masuk sebagai Anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO, lihat di <https://en.unesco.org/creative-cities/events/unesco-designates-66-new-creative-cities>; <https://travel.kompas.com/read/2019/10/31/151244827/ambon-dinobatkan-jadi-kota-musik-dunia-unesco>; <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4100053/unesco-tetapkan-ambon-sebagai-kota-musik-dunia-bersama-14-kota-lainnya>

Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bekraf, Kemdikbud, dan perwakilan UNESCO di Indonesia juga perlu melakukan koordinasi dalam mendukung pemerintahan kota, baik yang sudah terdaftar maupun yang sudah memiliki potensi untuk terdaftar pada masa yang akan datang.

Untuk memperkuat pengembangan kota kreatif, pemerintah kota perlu terus mengembangkan infrastruktur sosial, budaya, dan ekonomi terkait dengan domain kota kreatif yang sedang dikembangkan melakukan penguatan institusi dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai domain kota kreatif,

Kelompok atau pusat-pusat khusus dalam domain kota kreatif di setiap daerah perlu meningkatkan diri dan mempromosikannya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya, pemerintah kota juga perlu mempromosikan kota kreatif yang ramah lingkungan serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sektor dalam domain kota kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Andi Rahman, 2007. "Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan, Studi tentang Demokratisasi Serang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004--2006", Tesis. Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Castells, Manuel. 1982. *City, Class, and Power*. London: Palgrave.
- Castells, Manuel. 1996 (2000). *The Information Age: Economy, Society, and Culture*, Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford, UK: Blackwell.
- Creswell, John W., 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Florida, Ricard. 2004. *Cities and Creative Class*. New York: Routledge.
- Florida, Ricard. 2006. *The Fight of the Creative Class*. New York: Routledge.
- Grefe, Xavier. 2009. "Urban Cultural Landscapes: An Economic Approach. Dipartimento di Economia "S. Cogneetti de Martiis" International Centre for Research on the Economics of Culture, Institutions, and Creativity (EBLA) Centro Studi Silvia Santagata (CSS) Working paper No. 1/2010 Uniersita Turino.
- Grefe, Xavier. 2011. "Creativity: The Strategic Role of Cultural Landscape". Dalam *Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban Initiatives* Edited by Luigi Fusco Girard, Tüzün Baycan, Peter Nijkamp. Ashgate.
- Grefe, Xavier & Emiko Kakiuchi. 2015. "Creative Cities: The Cultural Issue". Dalam *Culture, Creativity and Cities*: SUIYO-SHA.
- <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-1/>.
- <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-2/>.
- <https://tirto.id/mempersoalkan-konsep-kota-kreatif-ala-richard-florida-czuR>.
- Lusiana, Christopheria Vera, 2011. "Peran Komunitas Kedaerahan dalam Memberikan Dukungan Sosial, Studi Kasus pada Komunitas Rukun Sulawesi Utara di Rumah Susun Sindang Koja Jakarta Utara", Tesis. Program Pascasarjana Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

- Neuman, W. Lawrence, 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th edition. Terjemahan Edina T. Sofia. Jakarta: PT Indeks.
- Puscasu, Violeta. 2016. "Cultural Landscape and Creative Practices – Some Usefull Notes for Regional Context". *Cross-Border Journal For International Studies* – No. 1/2016.
- Simsek, Gotce. 2017. "Examining the Role of Cultural Landscape in Regional Development: Defining Criteria and Looking at Ephesus" *International Journal of Architecture & Planning* Received 06 May 2017; Accepted 07 June 2017 Volume 5, Issue 1, pp: 42--65/Published 30 June 2017 DOI: 10.15320/ICONARP.2017.17 - E-ISSN: 2147-9380.
- Smith, Richard and Katie Warfield. 2008. *Creative Cities: the Matter of Value. Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development*. - Cheltenham [u.a.] : Elgar, - hlm. 287--312.
- Suryati, Evalien, 2009. "Pengembangan Kapasitas Perpustakaan Digital dalam Indonesia Higher Education Network (INHERENT): Studi kasus pada Perpustakaan di Lingkungan Universitas Indonesia". Tesis. Program Studi Ilmu Kepustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERFILMAN INDONESIA

Herlinawati, Ikhya Ulumudin, Siska Fujianita, Ferdi.W.Putra

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Tujuan kajian ini adalah untuk: 1) merumuskan indikator fungsi perfilman sebagai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi; 2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap film Indonesia dilihat dari fungsi budaya, pendidikan, hiburan, Informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner secara *online* dengan memanfaatkan laman *google form*. Hasil kajian menjelaskan bahwa: 1) Indikator fungsi film dilihat dari: 1) sisi Budaya yaitu: a) merepresentasikan budaya etnik/ suku bangsa/ kelompok masyarakat, b) merepresentasikan norma-norma yang ada di Indonesia; 2) Pendidikan: a) menampilkan unsur perilaku positif, b) Meningkatkan pengetahuan penonton; 3) Hiburan: a) kepuasan penonton terhadap film Indonesia menunjukkan ekspresi dan emosi yang diinginkan tercapai, b) menunjukkan kualitas yang baik/berkualitas; 4) Informasi, yaitu film Indonesia dapat menginformasikan sesuatu; 5) Pendorong Karya Kreatif a) mendorong daya kreatifitas/ide, b) mendorong kreatifitas industri perfilman meningkatkan pengetahuan penonton; 6) Ekonomi: a) meningkatkan perekonomian masyarakat, b) meningkatkan perekonomian pekerja perfilman.

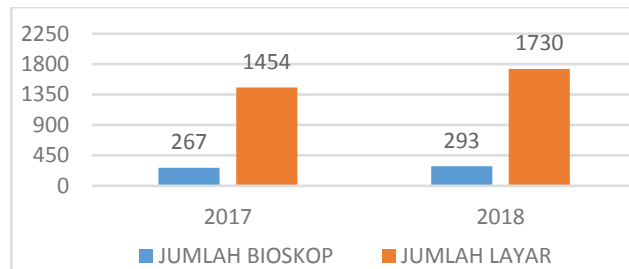
Kata kunci: persepsi, film Indonesia, indikator, fungsi film, menonton film

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Film sebagai hasil karya cipta seni budaya merupakan media hiburan massa dalam bentuk audio visual. Film bukanlah produk hiburan semata, tetapi juga produk budaya, karena film mencerminkan realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu secara tidak langsung film dapat menggambarkan watak atau identitas suatu bangsa. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan budaya bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan nasional. Pengertian film sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Secara historis film layar lebar pernah mengalami masa kejayaannya sekitar tahun 1970–1990-an dan setelah itu produksinya mulai menurun hingga akhirnya seperti mati suri. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah film yang diproduksi pada tahun 1990 dengan jumlah penontonnya di atas 100.000 hanya lima judul (filmindonesia.or.id). Hingga akhirnya tahun 2000 dianggap sebagai titik bangkit perfilman di Indonesia melalui film yang berjudul *Petualangan Sherina* yang disutradarai oleh Riri Riza. Kemudian pada tahun 2002 film yang berjudul *Ada Apa Dengan Cinta* yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo juga mendapatkan kesuksesan. Film ini dinilai oleh masyarakat merupakan film yang bermutu, sehingga mampu menarik minat masyarakat terhadap film Indonesia. Perkembangan perfilman Indonesia lima tahun belakangan ini semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya (i) peningkatan jumlah bioskop dan layar; (ii) peningkatan jumlah produksi film; (iii) peningkatan jumlah penonton film produksi Indonesia; dan (iv) peningkatan jumlah film yang masuk dalam *box office*.

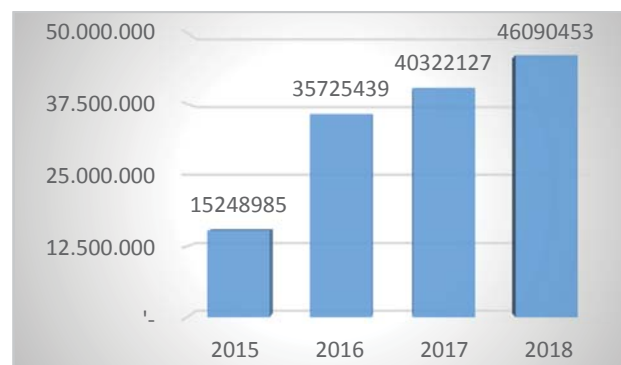


Gambar 1. Jumlah Bioskop dan Layar

Sumber: Pusbangfilm, 2019

Pada Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah bioskop pada 2017 sebanyak 267 dan pada 2018 sebanyak 293, artinya pertumbuhan jumlah bioskop tahun tersebut sebesar 10%. Sejalan dengan itu, pertumbuhan jumlah layar pun mengalami peningkatan. Pada 2017 sebanyak 1.454 layar, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 1730 layar, artinya tumbuh sebesar 19%. Dari gambar di atas dapat pula diketahui bahwa pada 2017, rata-rata bioskop mempunyai lima layar, sedangkan pada tahun 2018 rata-rata bioskop punya enam layar.

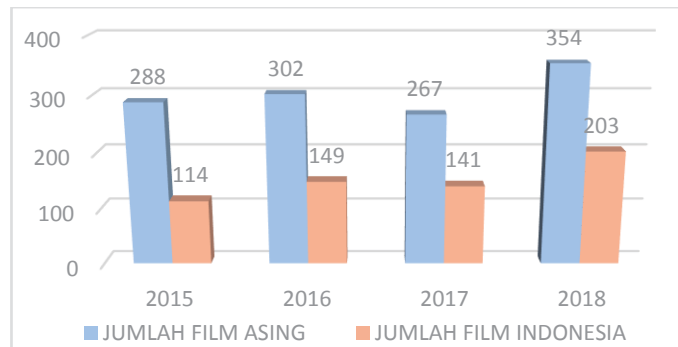
Jumlah produksi film Indonesia dari tahun ke tahun kecenderungannya terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah produksi film sebanyak 214 judul film kemudian tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 149 judul film. Pada tahun 2017 produksi film mengalami sedikit penurunan yakni menjadi 141 judul film, Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni sebanyak 203 judul film (Pusbangfilm, 2019). Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun jumlah penonton mengalami kenaikan.



Gambar 2. Jumlah Penonton Film Indonesia

Sumber: Pusbangfilm, 2019

Jumlah penonton film Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar yakni pada 2016, yakni lebih dari 10 ribu penonton. Pada tahun 2019 Kemendikbud menargetkan jumlah penonton film Indonesia sebanyak 58 juta (CNN Indonesia, 2019). Kenaikan jumlah penonton menurut Mediarta (2017) disebabkan beberapa hal, antara lain (i) adanya hal baru dan berbeda dalam bentuk dan karakteristik tema yang ditawarkan; (ii) adanya peningkatan kualitas dan nilai produksi film; (iii) strategi pemasaran, pendekatan menciptakan berita sensasi dan kontroversial sebagai perangkat promosi film sudah mulai ditinggalkan. Selain itu kenaikan jumlah penonton juga disebabkan karena adanya kebijakan penghapusan film dari daftar negatif investasi yang memungkinkan membangun bioskop-bioskop baru dengan dana investasi asing. Walaupun perkembangan perfilman Indonesia beberapa tahun ini berkembang pesat, tetapi jumlah judul film yang tayang di bioskop masih jauh di bawah film asing. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara film Indonesia dan film asing yang beredar di bioskop Indonesia.

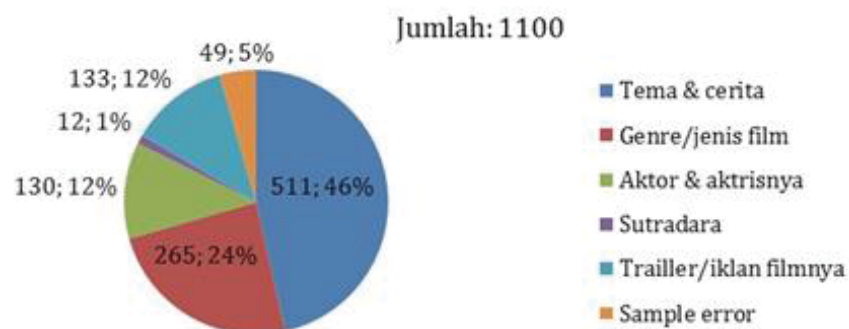


Gambar 3. Perbandingan Jumlah Film Indonesia dan Film Asing

Sumber: Pusbangfilm, 2019.

Pada tahun 2015 jumlah film Indonesia yang beredar di bioskop sebanyak 114 judul sedangkan film asing sebanyak 288 atau dengan perbandingan 28% : 72%, pada 2016 perbandingannya 33% : 67%, pada 2017 perbandingannya 35% : 65%, dan pada 2018 perbandingannya 36% : 64%. Jumlah film asing yang ditayangkan di bioskop Indonesia masih mendominasi, padahal pemerintah telah mengatur jumlah minimal penayangan di bioskop yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 32 yang berbunyi “Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut”. Peraturan terkait batas minimal 60% penayangan film Indonesia di bioskop belum diterapkan oleh pelaku usaha pertunjukan film.

Hasil penelitian terkait perfilman Indonesia yang dilakukan oleh Wibawa (2016), LP3M FF TV IKJ (Institut Kesenian Jakarta), pada bulan September–Oktober 2015 menemukan beberapa hal menarik tentang alasan utama menonton film Indonesia sebagai berikut. Pertama, dalam konteks nasional (1.100 responden dari 11 daerah tersurvei diantaranya Medan, tiga wilayah Jakarta (Jaksel, Jaktim, dan Jakbar), Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Ambon), penonton yang menonton film Indonesia karena tema dan cerita film, sebanyak 511 orang, karena genre/jenis film berjumlah 265 orang, karena trailer/iklan film berjumlah 133 orang, karena aktor dan aktrisnya berjumlah 130 orang, karena sutradara filmnya berjumlah 12 orang dan sisanya adalah *sampling error* berjumlah 49 orang (lihat gambar 4)



Gambar 4. Alasan menonton film Indonesia

Sumber: IKJ, 2015

Dari survei yang dilakukan, dapat dilihat bahwa penonton film Indonesia masih menganggap film sebagai bentuk hiburan yang dapat membawa kita memasuki dunia dan kisah lain sebagai pelepasan dari

kehidupan sehari-hari. Artinya cerita dan jenis-jenis film merupakan pertimbangan utama mereka dalam memilih film di bioskop. Sedangkan ide-ide film sebagai ekspresi artistik dari sutradara tidak menjadi pertimbangan yang terlalu menentukan. Bahkan berdasarkan survei, konsep *star system* yang menjadikan aktor-aktris tertentu menjadi alasan sebuah film dibuat tidak menjadi alasan utama penonton memilih menonton di bioskop. Meskipun masalah-masalah perfilman ini sudah diatasi melalui berbagai inisiatif seperti adanya komunitas film atau festival film yang dapat membantu memperluas keterlibatan publik dalam perfilman Indonesia, baik sebagai penonton, penikmat maupun pelaku, namun dibutuhkan variasi skema pengembangan perfilman Indonesia dari hasil analisis persepsi masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, terdapat 6 (enam) fungsi perfilman nasional, yaitu (i) fungsi budaya; (ii) pendidikan; (iii) hiburan; (iv) informasi; (v) pendorong karya kreatif; dan (vi) ekonomi. Hingga saat ini belum ada informasi tentang persepsi masyarakat terkait fungsi tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia sebagai data awal (*baseline data*) berkaitan dengan pencapaian amanat undang-undang tersebut.

2. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1) merumuskan indikator fungsi perfilman sebagai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi;
- 2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap film Indonesia dilihat dari fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Hakikat Perfilman Indonesia

Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film, yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang bersifat komersial. Nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku kegiatan dan komersial dilakukan oleh pelaku usaha. Semua itu melibatkan insan perfilman, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan (UU No.33/2009). Sedangkan film adalah satu dari sekian banyak bentuk media massa yang memiliki nilai hiburan bagi yang menyaksikannya. Film juga merupakan aktualisasi perkembangan kehidupan masyarakat pada masanya, baik dilihat dari teknologi maupun tema yang diangkatnya (Novianto, 2014). Perfilman Indonesia sempat mengalami pasang surut dari jumlah produksi film maupun jumlah penontonnya (Alkhajar, 2010). Diketahui masa terpuruknya perfilman Indonesia terjadi pada periode 1957–1968 dan periode 1992–2000. Pada periode 1957–1968, beberapa hal yang mempengaruhi kondisi perfilman Indonesia, antara lain stabilitas dan konstelasi politik Indonesia serta merajanya film-film asing yang diimpor ke Indonesia. Sedangkan faktor penyebab merosotnya industri film Indonesia pada periode tahun 1992–2000, yaitu (i) pesatnya kemajuan teknologi atau industri audio visual (*home entertainment*) sebagai media tontonan alternatif; (ii) membanjirnya film impor; (iii) perkembangan stasiun tv swasta; (iv) mutu film yang relatif rendah; dan (v) perubahan tuntutan pasar.

Tren positif terhadap film Indonesia kembali meningkat pada tiga tahun terakhir, ditunjukkan dari meningkatnya jumlah penonton dan jumlah judul film Indonesia yang terdata dalam kurun waktu 2016–2018 (“Tren Positif”, 19 Maret, 2019). Selain itu film Indonesia juga meningkat bukan hanya dari segi kuantitas yang dihasilkan setiap tahunnya, tetapi juga dari kualitasnya. Tren peningkatan penonton film Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak seperti kreator/pembuat film, tim produksi, pemangku kepentingan, dan pemerintah. (“Geliat Film Indonesia”, 2017, hlm. 5–6). Peningkatan jumlah

penonton bisa lebih ditingkatkan jika semua ibu kota kabupaten di Indonesia memiliki bioskop. Menurut Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin ("Tren Positif", 19 Maret, 2019) penyebaran layar bioskop masih tidak merata, sehingga mempersempit akses masyarakat untuk menonton film nasional. Senada dengan pernyataan Deputy Pemasaran Bekraf, Joshua Simanjuntak ("Geliat Film Indonesia", 2017, pp. 5-6) bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menambah jumlah layar. Dengan semakin banyak layar yang tersedia akan semakin banyak akses bagi masyarakat untuk menonton film. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Imanda (2015), bahwa

The statistic of merely a few hundred cinema screens for two hundred and forty million Indonesians can sum up the problem for the local industry. ... The focus on serving specific urban areas, shopping malls and markets creates discrimination against the vast rural or semi-rural populations spread out across the country. ... The 2014 general election brings this challenge to the next government: Indonesia needs a much more militant and critical new generation of filmmakers with no burden of the past, as well as a significant increase in the number of film screens in all regions, reaching out to the majority of people who live outside the urban areas.

Film merupakan fenomena kebudayaan atau karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya (UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2009).

Menurut UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2009 film memiliki fungsi:

- 1) Fungsi budaya. Sebagai fungsi budaya atau fenomena kebudayaan berarti film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Fungsi Pendidikan. Nilai pendidikan sebuah film diperoleh ketika film tersebut mengandung suatu makna atau pesan moral, yang jika semakin halus pembuatannya maka akan semakin baik, karena penonton tidak akan merasa digurui. (Sumarno, 1996 dalam Mudjiono 2011)
- 3) Fungsi hiburan. Film yang menyampaikan hal-hal menyenangkan guna memenuhi kepuasan batin.
- 4) Fungsi informasi. Film dapat dijadikan sebagai sumber informasi.
- 5) Fungsi pendorong karya kreatif. Film dapat meningkatkan karya kreatif.
- 6) Fungsi ekonomi. Sebagai fungsi ekonomi berarti film mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

2. Konsep Persepsi

Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa Inggris "perception" yang berarti pengamatan. Persepsi menurut Jalaluddin Rahkmat (Lestari, Hairunnisa, & Nurliah 2018) merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi merupakan pandangan, penelitian, dan tanggapan terhadap sesuatu. Lebih lanjut

dikatakan bahwa persepsi adalah suatu proses aktif di mana yang memegang peranan bukan hanya lingkungan atau objek tetapi juga manusia itu sendiri terhadap objek tersebut. Persepsi adalah proses di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan (Solomon 2002 dalam Susanto 2013). Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Supriatna (2011) persepsi dapat digambarkan sebagai pandangan kita melihat dunia sekitar. Perbedaan persepsi dimungkinkan terjadi pada dua individu yang menerima stimulus dan kondisi yang sama. Hal ini dapat terjadi karena setiap individu memiliki proses masing-masing dalam menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi stimulus yang diterima dipengaruhi oleh kebutuhan, nilai, dan harapan masing-masing individu tersebut.

Cara mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap (Azwar dalam Susanto 2013). Secara ilmiah, sikap dan persepsi dapat diukur, di mana sikap terhadap objek diterjemahkan dalam sistem angka, meskipun materi yang diukur bersifat abstrak. Terdapat dua metode pengukuran sikap yaitu *self-report* dan pengukuran *involuntary behavior*. *Self-report* adalah metode di mana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Kelemahannya adalah ketika individu tersebut tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Pengukuran *involuntary behavior* dapat dilakukan jika memungkinkan dan diinginkan oleh responden. Pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis tanpa disadari oleh individu yang diamati. Beberapa aspek fisiologis yang dapat diamati misalnya *facial reaction*, *tone* suara, bahasa tubuh, detak jantung, dll. Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan mendukung/memihak (*favorable*) dan tidak mendukung/tidak memihak (*unfavorable*) (Susanto, 2013).

3. Kerangka Berpikir

Hal-hal yang berhubungan dengan film Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2019. Salah satu pasal dalam undang-undang memuat tentang fungsi perfilman yang terbagi menjadi enam fungsi. Dari keenam fungsi perfilman tersebut akan dilihat persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia yang hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan perfilman Indonesia.



Gambar 5. Kerangka Pikir

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner. Instrumen penelitian terdiri dari panduan diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan kuesioner. DKT bertujuan untuk merumuskan indikator fungsi perfilman dengan narasumber berasal dari ahli/pakar di bidang budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Selain itu juga

dilakukan DKT dengan pihak lembaga sensor film (LSF). Sedangkan kuesioner bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap film Indonesia dengan responden berasal dari masyarakat penonton film Indonesia. Pengisian kuesioner dilakukan secara online dengan memanfaatkan laman *google form*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Fungsi Film

Proses penyusunan indikator fungsi film mempertimbangkan berbagai masukan dari narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing seperti pakar budaya, pakar pendidikan, pakar ekonomi, dan sebagainya. Selain itu juga dari dokumen yang ada, yaitu Undang-Undang nomor 33/2009 tentang perfilman, Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan juga dari berbagai kajian literatur yang relevan dengan kajian persepsi film ini.

Fungsi film dilihat dari sisi budaya mempunyai dua indikator yaitu: (i) *merepresentasikan budaya etnik/suku bangsa/kelompok masyarakat*. Indikator ini menggambarkan/menampilkan suku bangsa di Indonesia, adat dan/atau tradisi yang dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia, kelompok-kelompok kelas sosial-ekonomi yang berbeda di Indonesia, logat dan bahasa yang khas sejumlah daerah di Indonesia, makanan khas Indonesia, keragaman pakaian khas budaya Indonesia, mata pencaharian yang ada di Indonesia, pandangan khas orang Indonesia (contoh: kerukunan, gotong royong) dan juga kondisi geografis Indonesia; dan (ii) *merepresentasikan norma-norma yang ada di Indonesia*; Indikator ini yaitu menggambarkan/menampilkan norma agama yang ada di Indonesia, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang ada di Indonesia, dan juga norma hukum yang ada di Indonesia.

Fungsi film dilihat dari sisi pendidikan mencakup dua indikator yaitu (i) *menampilkan unsur perilaku positif*. Indikator ini ialah merepresentasikan/menampilkan perilaku religiusitas (religius, toleran), perilaku nasionalisme (semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai), perilaku kemandirian (mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca), perilaku gotong royong (demokratis, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial), perilaku integritas (jujur, disiplin, bekerja keras, menghargai prestasi, bertanggung jawab) dan tidak menampilkan unsur pornografi; (ii) *meningkatkan pengetahuan penonton*. Indikator ini ialah mampu menambah cara pandang penonton terhadap suatu hal/isu, membuat penonton berpikir kritis, dan membuka ruang diskusi antar penonton.

Fungsi film dilihat dari sisi hiburan mencakup dua Indikator, yaitu (i) indikator *kepuasan penonton terhadap film Indonesia yang menunjukkan ekspresi dan emosi yang diinginkan tercapai* ialah membuat penonton puas karena ekspresi dari emosi yang dia inginkan tercapai pada film, seperti film komedi, melodrama, drama romantis, laga, dsb; dan (ii) *menunjukkan kualitas yang baik/berkualitas* ialah memiliki kualitas penataan gambar, penataan suara, penyuntingan, penceritaan, akting, tata busana, dan tata artistik yang baik.

Fungsi film dilihat dari sisi informasi, memiliki indikator *menginformasikan sesuatu* ialah menggambarkan/mampu memberi informasi yang baru, mampu mengingatkan kepada penonton informasi tentang sesuatu yang sebelumnya diketahui tetapi terlupakan; mengingatkan kepada penonton informasi tentang sesuatu yang ada di sekitar namun tidak disadari sebelumnya; mengingatkan kepada penonton informasi tentang sesuatu atau sebuah proses yang sebelumnya tidak diketahui/dipahami.

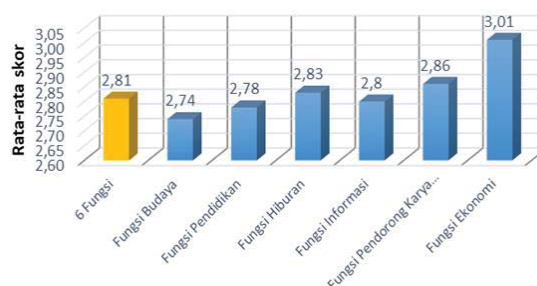
Fungsi film dilihat dari sisi pendorong karya kreatif mencakup dua indikator yaitu (i) *mendorong daya kreatifitas/ide* ialah mampu menginspirasi ide-ide baru, menginspirasi pengembangan ide-ide yang sudah ada menciptakan ide kreatif di masyarakat, menciptakan trend baru di masyarakat; dan (ii) *mendorong*

keaktivitas industri perfilman meningkatkan pengetahuan penonton ialah mampu mendorong kreativitas industri perfilman.

Fungsi film dilihat dari sisi ekonomi mencakup dua (i) *indikator meningkatkan perekonomian masyarakat* ialah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pembuatan film; mendorong penonton untuk mengonsumsi suatu produk atau jasa dalam negeri, mempromosikan pariwisata Indonesia; dan (ii) *indikator meningkatkan perekonomian pekerja perfilman* ialah mampu meningkatkan perekonomian pekerja perfilman

2. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia

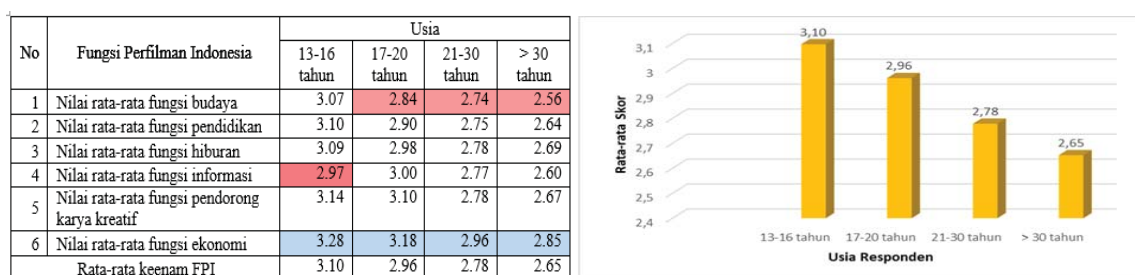
Masyarakat mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia lebih tinggi dibandingkan kelima fungsi lainnya hasil kajian menunjukkan bahwa nilai skor persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia mempunyai skor sebesar 2,81. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum perfilman di Indonesia sudah mengandung enam fungsi perfilman dengan katagori baik. Dari enam fungsi perfilman tersebut skor yang paling rendah adalah fungsi budaya dan skor tertinggi adalah fungsi ekonomi.



Gambar 6. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia

3. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Usia

Semakin muda usia penonton, persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman semakin tinggi. Skor Persepsi tertinggi terletak pada usia 13–16 tahun dengan nilai skor 310 dan skor persepsi terendah berada pada usia > 30 tahun dengan nilai skor 2,65.

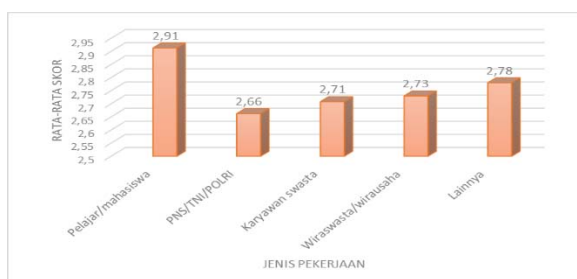


Gambar 7. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Berdasarkan Usia

Persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia berdasarkan usia mendapat nilai rata-rata tertinggi pada fungsi ekonomi di kelompok usia 13–16 tahun: 3.28. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada fungsi budaya di kelompok usia >30 tahun: 2.56. Dalam industri perfilman Indonesia nilai bisnis atau nilai ekonomi masih utama. Artinya fungsi perfilman dilihat dari sisi ekonomi mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi film yang lain.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Pekerjaan

Pelajar/mahasiswa mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman yang lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pelajar/mahasiswa lebih memandang film Indonesia mempunyai kriteria fungsi perfilman dibandingkan dengan kelompok lainnya.



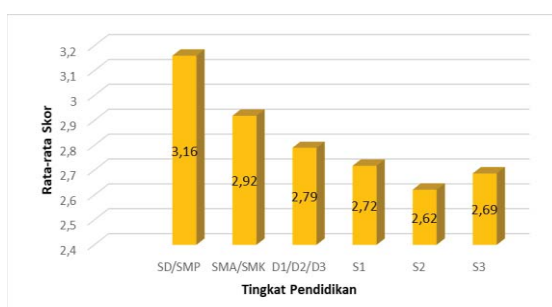
No	Fungsi Perfilman Indonesia	Pekerjaan				
		Pelajar/ mahasiswa	PNS/TNI/ POLRI	Karyawan swasta	Wiraswasta/ wirausaha	Lainnya
1	Nilai rata-rata fungsi budaya	2.82	2.58	2.62	2.71	2.79
2	Nilai rata-rata fungsi pendidikan	2.87	2.65	2.67	2.67	2.78
3	Nilai rata-rata fungsi hiburan	2.92	2.70	2.73	2.74	2.79
4	Nilai rata-rata fungsi informasi	2.92	2.62	2.68	2.68	2.73
5	Nilai rata-rata fungsi pendorong karya kreatif	3.00	2.67	2.75	2.72	2.69
6	Nilai rata-rata fungsi ekonomi	3.12	2.83	2.92	2.92	2.90
Rata-rata keenam FPI		2.91	2.66	2.71	2.73	2.78

Gambar 8. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Berdasarkan Pekerjaan

Dari masing-masing fungsi perfilman, persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia berdasarkan pekerjaan, fungsi ekonomi ternyata masih mendapat nilai rata-rata tertinggi. Dengan nilai rata-rata tertinggi untuk kelompok pelajar/mahasiswa: 3.12. Nilai rata-rata terendah terdapat pada fungsi budaya yaitu 2,58 di kelompok responden PNS/TNI/POLRI.

5. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan semakin tinggi, kecenderungan mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung 6 fungsi perfilman semakin menurun. Kecuali pada lulusan S3 yang mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan lulusan S2.



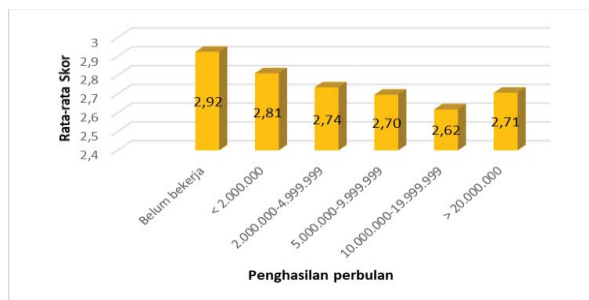
No	Fungsi Perfilman Indonesia	Pendidikan					
		SD/ SMP	SMA/ SMK	D1/D2 /D3	S1	S2	S3
1	Nilai rata-rata fungsi budaya	3.02	2.84	2.73	2.66	2.56	2.46
2	Nilai rata-rata fungsi pendidikan	3.06	2.88	2.79	2.71	2.54	2.67
3	Nilai rata-rata fungsi hiburan	3.22	2.93	2.79	2.72	2.67	2.79
4	Nilai rata-rata fungsi informasi	3.06	2.94	2.85	2.68	2.55	2.66
5	Nilai rata-rata fungsi pendorong karya kreatif	3.28	3.01	2.77	2.72	2.61	2.78
6	Nilai rata-rata fungsi ekonomi	3.50	3.09	2.92	2.91	2.91	2.92
Rata-rata keenam FPI		3.16	2.92	2.79	2.72	2.62	2.69

Gambar 9. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Berdasarkan Pendidikan

Hampir di semua tingkat pendidikan persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi, yaitu pada sisi fungsi ekonomi, dan nilai rata-rata tertinggi di tingkat SD/SMP, 3.50. Untuk tingkat pendidikan S2 nilai rata-rata terendah fungsi perfilman ada di fungsi pendidikan yaitu 2,54.

6. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Penghasilan

Jumlah masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (belum memperoleh penghasilan) memandang bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman adalah yang paling tinggi. Mayoritas responden yang belum mempunyai penghasilan adalah lulusan SMA atau mahasiswa. Hal ini berarti generasi muda memandang perfilman Indonesia mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Jika dilihat nilai rata-rata pada masing-masing fungsi perfilman, maka persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia berdasarkan penghasilan yang memperoleh nilai tertinggi yaitu fungsi ekonomi.



No	Fungsi Perfilman Indonesia	Penghasilan					
		Belum Bekerja	< 2.000.000	2.000.000 - 4.999.999	5.000.000 - 9.999.999	10.000.000 - 19.999.999	> 20.000.000
1	Nilai rata-rata fungsi budaya	2.83	2.72	2.74	2.58	2.51	2.57
2	Nilai rata-rata fungsi pendidikan	2.89	2.77	2.67	2.70	2.61	2.67
3	Nilai rata-rata fungsi hiburan	2.94	2.83	2.73	2.74	2.68	2.65
4	Nilai rata-rata fungsi informasi	2.94	2.80	2.69	2.62	2.57	2.84
5	Nilai rata-rata fungsi pendorong karya kreatif	3.01	2.84	2.70	2.75	2.60	2.76
6	Nilai rata-rata fungsi ekonomi	3.12	3.02	2.93	2.86	2.79	3.14
Rata-rata keenam FPI		2.92	2.81	2.74	2.70	2.62	2.71

Gambar 10. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Penghasilan

Berdasarkan kategori penghasilan, fungsi film yang mendapat nilai rata-rata tertinggi yaitu fungsi ekonomi pada kelompok penonton berpenghasilan >20juta perbulan, dengan nilai 3,14. dan nilai rata-rata terendah pada fungsi budaya: 2,51 dari kelompok penonton berpenghasilan 10juta-19 juta perbulan.

7. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Frekuensi Menonton

Persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia dilihat dari masing-masing fungsi perfilman berdasarkan frekuensi menonton, mendapatkan nilai rata-rata tertinggi pada fungsi ekonomi, yaitu 3,12 dengan frekuensi menonton sebanyak tiga kali dan enam kali dalam enam bulan terakhir. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada fungsi budaya. Hal ini semakin jelas bahwa semakin seringnya menonton film Indonesia menunjukkan semakin menentukannya fungsi perfilman mana yang lebih banyak tergambar di perfilman Indonesia. Berikut adalah hasil nilai rata-rata dari fungsi film.

No	Fungsi Perfilman Indonesia	Frekuensi menonton film Indonesia dalam 6 bulan terakhir							
		Tdk pernah	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali	5 kali	6 kali	> 6 kali
1	Nilai rata-rata fungsi budaya	2.42	2.61	2.73	2.75	2.83	2.64	2.84	2.85
2	Nilai rata-rata fungsi pendidikan	2.46	2.60	2.75	2.82	2.93	2.80	2.81	2.89
3	Nilai rata-rata fungsi hiburan	2.48	2.66	2.84	2.89	2.90	2.86	2.90	2.93
4	Nilai rata-rata fungsi informasi	2.45	2.64	2.79	2.77	2.89	2.78	2.84	2.98
5	Nilai rata-rata fungsi pendorong karya kreatif	2.48	2.71	2.76	2.93	2.93	2.85	2.97	3.02
6	Nilai rata-rata fungsi ekonomi	2.79	2.88	2.96	3.12	3.00	2.96	3.09	3.12
Rata-rata keenam FPI		2.49	2.66	2.80	2.86	2.90	2.79	2.89	2.93

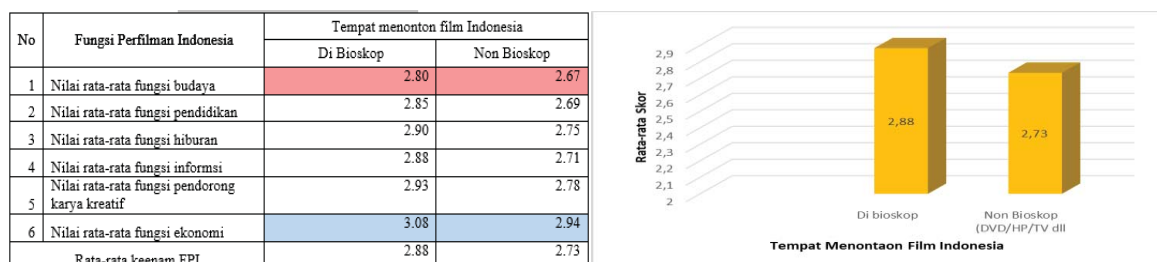


Gambar 11. Tabel Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Dilihat dari Masing-masing Fungsi Perfilman berdasarkan Frekuensi Menonton

Masyarakat yang dalam enam bulan terakhir tidak menonton film Indonesia mempunyai persepsi yang paling rendah. Sedangkan masyarakat yang dalam enam bulan terakhir menonton film Indonesia lebih dari enam kali mempunyai persepsi yang paling tinggi. Hal ini berarti bahwa orang yang suka menonton film Indonesia menganggap bahwa film Indonesia sudah berkualitas dan memenuhi enam fungsi perfilman, demikian pula sebaliknya masyarakat yang tidak menonton film Indonesia dalam enam bulan terakhir memandang film Indonesia belum berkualitas.

8. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Tempat Menonton Film

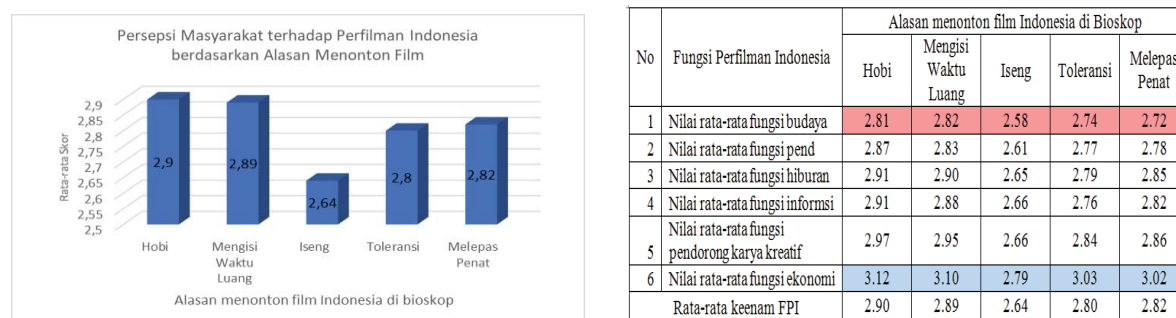
Dari Gambar 12 terlihat bahwa masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia melalui bioskop mempunyai persepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang nonbioskop. Hal ini berarti bahwa orang yang suka menonton film Indonesia melalui bioskop cenderung menganggap film Indonesia lebih memenuhi enam fungsi perfilman dibandingkan dengan masyarakat yang menonton melalui nonbioskop. Jika dilihat persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia dari sisi masing-masing fungsi film, maka fungsi film ekonomi yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi, baik menonton di bioskop (3,08) maupun nonbioskop (2,94). Sedangkan nilai terendah pada fungsi budaya yaitu 2,80 (di bioskop) dan 2,67 (nonbioskop). Secara rinci hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 12. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Dilihat dari Masing-masing Fungsi Perfilman Berdasarkan Tempat Menonton

9. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia berdasarkan Alasan Menonton Film di Bioskop

Masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia di bioskop dengan alasan hobi mempunyai skor yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan orang menonton film Indonesia karena hobi sudah merasa terhibur terhadap film Indonesia dan menganggap film Indonesia berkualitas. Sedangkan skor yang paling kecil adalah untuk alasan iseng. Hal ini karena orang yang menonton film Indonesia karena iseng menganggap bahwa ia belum merasa terhibur terhadap film Indonesia.



Gambar 13. Persepsi Masyarakat terhadap Perfilman Indonesia Berdasarkan Alasan Menonton Film Indonesia di Bioskop.

Nilai rata-rata tertinggi pada fungsi ekonomi dengan alasan menonton film Indonesia di bioskop karena hobi adalah 3,12, sedangkan yang terendah pada fungsi budaya dengan alasan menonton film Indonesia karena iseng (2,58).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Indikator fungsi perfilman indonesia yaitu:

Indikator fungsi film dilihat dari sisi: 1) **Budaya** mempunyai dua indikator yaitu a) merepresentasikan budaya etnik/suku bangsa/kelompok masyarakat, b) merepresentasikan norma-norma yang ada di Indonesia; 2) **Pendidikan** mencakup dua indikator yaitu a) menampilkan unsur perilaku positif, b) meningkatkan pengetahuan penonton. 3) **Hiburan** mencakup dua indikator yaitu a) kepuasan penonton terhadap film Indonesia yang menunjukkan ekspresi dan emosi yang dia inginkan tercapai, b) menunjukkan kualitas yang baik/berkualitas. 4). **Informasi**, yaitu film Indonesia dapat menginformasikan sesuatu. 5). **Pendorong Karya Kreatif** mencakup dua indikator a) mendorong daya kreativitas/ide, b) mendorong kreativitas industri perfilman meningkatkan pengetahuan penonton. 6). **Ekonomi** mencakup dua indikator yaitu: a) meningkatkan perekonomian masyarakat, b) meningkatkan perekonomian pekerja perfilman.

Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia yaitu:

1. Secara umum persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia berdasarkan fungsi perfilman yang mendapatkan skor tertinggi (3,01) adalah fungsi ekonomi dengan kategori baik dan skor terendah (2,74) pada fungsi budaya. Meskipun mendapatkan skor rendah, namun masih dalam kategori baik. Persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia berdasarkan kelompok usia mengandung enam fungsi perfilman lebih tinggi. Hal ini terlihat dari skor yang diperoleh bahwa yang mempunyai persepsi tertinggi yakni pada usia 13–16 tahun dengan skor 3,10 dan yang mempunyai persepsi terendah pada usia > 30 tahun dengan skor 2,65.
2. Pelajar/mahasiswa mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Pelajar/mahasiswa lebih memandang film Indonesia mempunyai kriteria fungsi perfilman dibandingkan dengan kelompok lainnya.
3. Tingkat pendidikan semakin tinggi, kecenderungan mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman semakin menurun. Kecuali pada lulusan S3 yang mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan lulusan S2.
4. Masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (belum memperoleh penghasilan) memandang bahwa perfilman Indonesia mengandung enam fungsi perfilman yang paling tinggi. Responden yang belum mempunyai penghasilan mayoritas lulusan SMA atau masih kuliah. Kelompok usia lulusan SMA memandang perfilman Indonesia mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
5. Masyarakat yang dalam 6 bulan terakhir tidak menonton film Indonesia mempunyai persepsi yang paling rendah. Sedangkan masyarakat yang dalam enam bulan terakhir menonton film Indonesia lebih dari enam kali mempunyai persepsi yang paling tinggi. Orang yang suka menonton film Indonesia menganggap bahwa film Indonesia sudah berkualitas dan memenuhi enam fungsi perfilman, demikian pula sebaliknya masyarakat yang tidak menonton film Indonesia dalam enam bulan terakhir memandang film Indonesia belum berkualitas.
6. Masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia melalui bioskop mempunyai persepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang nonbioskop. Orang yang suka menonton film Indonesia melalui bioskop cenderung menganggap film Indonesia lebih memenuhi enam fungsi perfilman dibandingkan dengan masyarakat yang menonton melalui non bioskop.
7. Masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia ke bioskop dengan alasan hobi mempunyai skor yang paling tinggi. Orang yang menonton film Indonesia karena hobi sudah merasa terhibur terhadap film Indonesia dan menganggap film Indonesia berkualitas. Sedangkan skor yang paling kecil adalah yang karena iseng. Orang yang menonton film Indonesia karena iseng menganggap bahwa belum merasa terhibur terhadap film Indonesia.

2. Rekomendasi

Perlu dilakukan penelitian lanjutan/ditindaklanjuti oleh Pusbangfilm, namun ada beberapa hal yang direkomendasikan;

1. Terkait dengan indikator fungsi film:
Indikator fungsi perfilman dapat digunakan sebagai dasar untuk: (i) seleksi film untuk kegiatan NOBAR yang diselenggarakan oleh Kemendikbud; (ii) memberikan bantuan/hibah terhadap produksi film Indonesia; (iii) Pemerintah dalam membuat film.
2. Terkait dengan persepsi:
 - a) Generasi muda Indonesia mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mempunyai enam fungsi perfilman. Selain itu, generasi muda juga sudah mulai menonton film produksi Indonesia. Hal ini menjadi peluang untuk dapat meningkatkan mutu perfilman Indonesia.

Untuk itu pemerintah hendaknya memberikan akses dalam pembuatan film Indonesia. Misalkan menyediakan tempat untuk membuat film, mempermudah perizinan dalam membuat film, memberikan penghargaan, memfasilitasi ruang multi media perfilman, dan lain-lain.

- b) Persepsi terendah pada usia > 30 tahun dengan skor 2,65; maka sebaiknya diberi peluang yang lebih banyak, misalnya menonton film Indonesia di Bioskop secara gratis, nobar di tingkat kelurahan, perkantoran, dsb., karena umumnya rentang usia di atas 30 tahun lebih mementingkan kebutuhan yang lebih prioritas, sehingga dana yang ada tidak digunakan untuk menonton di bioskop. Selain itu juga pemerintah dapat mengusulkan kepada para pengusaha bioskop untuk membuat promo-promo tiket, salah satunya dengan menerapkan sistem tiket berlangganan untuk satu tahun.
- c) Generasi muda memandang perfilman Indonesia mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Oleh karena itu disarankan responden memilih tontonan film Indonesia di layar lebar yang sesuai dengan usianya dan memberikan banyak pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan responden terhadap film Indonesia layar lebar sebaiknya responden melihat referensi dan resensi film yang akan ditonton di situs resmi film layar lebar.
- d) Usaha meningkatkan literasi masyarakat tentang perfilman salah satunya dapat dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukkan kegiatan membuat resensi film sebagai salah satu tugas pembelajaran yang termuat di dalam kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhajar, E.N.S. 2010. Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia: Studi Periode 1957–1968 dan 1992–2000. *Jurnal Komunikasi Massa*, 3(1), 1-19.
- CNN Indonesia. (2019). Kemendikbud Targetkan 58 Juta penonton film Indonesia di 2019. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190329184318-220-381870/kemendikbud-targetkan-58-juta-penonton-film-indonesia-di-2019>. Di unduh tanggal 06 Mei 2019.
- Danesi, M. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra
- Geliat Film Indonesia: Tuan Rumah di Negeri Sendiri, dan Siap Bersaing Secara Global*. 2017. *Retas*, 3, 5-6.
- Imanda, T. 2015. *The State, Market and the Indonesian Film Industry*. Bab Buku: "Small Cinemas in Global Markets: Genres, Identities, Narratives, Lenuta Giukin, Janina Falkowska, dan David Desser (Ed), London: Lexington Books.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kencana, I.N. 2014. *Rasisme dalam Film The Help: Analisis Semiotik Pendekatan Roland Barthes*. (Undergraduate Thesis). UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Lestari, A., Hairunnisa, & Nurliah. (2018). Persepsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Terhadap Film Dibalik 98 Mengenai Rasa Nasionalisme di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 226-237.
- Mayne, Judith. 1993. *Cinema and Spectatorship*, London: Routledge.
- Mediarta, Agus. 2017. *Kaleidoskop 2017: Mengukur detak jantung industri film Indonesia*. <http://filmindonesia.or.id/article/kaleidoskop-2017-mengukur-detak-jantung-industri-film-indonesia#.XM-qE44zaUm>, diunduh tanggal 6 Mei 2019.

- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjiono, Y. 2010. Kajian Semiotika dalam Film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125-138.
- Novianto, T.E. 2014. *Tindak Kejahatan dalam Film: Analisis Isi Pesan dalam Film Now You See Me Karya Louis Leterrier*. (Tesis). Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Nugroho, G., & Suwanto, D.H. 2015. *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Prayogo, W.A. 2009. *"Sekilas Perkembangan Perfilman di Indonesia": Kebijakan Pemerintahan Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1980*. (Bachelour's of History Tesis). Universitas Indonesia.
- Pusat Pengembangan Perfilman. 2019.
- Putra, E.C., & Muhammad, B.S. 2011. Analisis Psikografi Penonton Film Indonesia. *INSAN Media Psikologi*, 13(03), 193-202.
- Ruslan, R. 2012. *Manajemen public relations dan media komunikasi: konsep dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumarwan U. 2004. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Supriatna, M.D. 2011. *Analisis Model Sikap: Hubungan Persepsi, Afektif, dan Preferensi Terhadap Minat Beli Pakaian Batik*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Susanto, D.A. 2013. *Persepsi, Pengetahuan, dan Perilaku Menonton Film Layar Lebar Pada Siswa SMA Negeri 3 Kota Bogor*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suwanto, D.H. 2016. Analisis Segmentasi Penonton Bioskop Yogyakarta. *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*, 46(2), 215–222.
- Tren Positif Perfilman Indonesia*. (2019, 19 Maret). Diunduh pada 1 Mei 2019, <https://indonesia.go.id/ragam/seni/sosial/tren-positif-film-indonesia>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Wibawa, B. dkk. 2016. *Memahami Kepenontonan Film*

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 2 (dua) Panel No: 6 (enam)
Ruang	: Halimun
Waktu	: 10.15 – 12.30 WIB
Judul Penelitian :	1. Strategi Pengembangan Kota Kreatif Di Indonesia: Perspektif Pemajuan Kebudayaan (Studi Di Kota Pekalongan, Bandung, Surakarta & Ambon) 2. Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia <i>Study Of People's Perception Of Indonesian Films</i> 3.
Penyaji	: 1. Ihya Ulumuddin, M.S 2. Dr. Herlinawati
Pembahas	: Prof. Ahmad Sihabuddin, M.Si
Moderator	: Panca Waluyo, S.Si, MM
Notulis	: Linda Efaria

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	14. Ihya Ulumuddin, M.S. UNESCO kini gencar mendorong Kota Kreatif di seluruh dunia yang dikenal dengan UCCN (UNESCO Creative Cities Network). Ini merupakan bagian dari program SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>), khususnya mengenai kota yang berkelanjutan. Tujuannya, ialah menjadikan kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan. Ide-ide ini terpengaruh oleh kajian-kajian perkotaan yang mengidentifikasi pentingnya komunitas kreatif untuk berperan dalam pembangunan perkotaan, seperti Manuel Castells (1982, 2000, 2010, 2016), Richard Florida (2004 dan 2006), Greffe (2011) dan masih banyak lagi. Menanggapi hal ini, sejak tahun 2011, Ekonomi Kreatif sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2015, dibentuklah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berfungsi untuk mendorong industri kreatif di Indonesia. Bekraf mendefinisikan ekonomi kreatif yakni ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap permasalahan yang dihadapi (2016). Menurut Bekraf, ada 16 subsektor ekonomi kreatif yaitu, aplikasi dan pengembang game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Kemudian terkait kota kreatif, bekraf juga mendorong kerjasama aktif antar empat aktor yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha ekonomi kreatif.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Bekraf pada tahun 2017 melalui laman portal resminya merilis 10 kota kreatif di Indonesia antara lain; Padang, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Pekalongan, Jakarta, dan Bali. Penyusunan daftar kota kreatif ini disandarkan pada beberapa elemen, seperti sejarah, budaya, kreatifitas warga, dukungan pemerintah daerah/kota, infrastruktur, potensi kota, serta pengakuan internasional. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Pekalongan sebagai kota kreatif bidang kriya dan seni tradisional. Kemudian pada tahun berikutnya, Bandung menyusul menjadi kota kreatif dunia bidang disain (http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-1/; http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-2/). Berdasarkan gambaran di atas, diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kota kreatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat perkotaan. Oleh karenanya, akan dilakukan penelitian mengenai upaya strategis pengembangan kota kreatif dengan menggunakan konsep <i>Cultural Landscapes</i> yang dikembangkan oleh Greffe (2011). Konsep tersebut kemudian dioperasionalkan lebih jauh oleh Simsek (2017) untuk mendapatkan ukuran yang lebih mendetail. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sudah menerbitkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang memiliki tekanan kepada pemerintah daerah untuk memainkan peran pembinaan terhadap pemajuan kebudayaan. Saat ini sudah ada dua kota di Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif dunia, yaitu Pekalongan dan Bandung. Penelitian ini ingin mengkaji beberapa kota agar menghasilkan bahan kajian berupa langkah-langkah strategis dalam mengembangkan kota kreatif yang mendukung pemajuan kebudayaan. Terdapat beberapa hal yang akan ditekankan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti; Bagaimana peran pemerintah daerah (kota) dalam mewujudkan kota kreatif? Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah (kota) untuk memajukan kota kreatif yang selaras dengan tujuan pemajuan kebudayaan? Tujuan Tujuan penelitian ini antara lain: - Mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah (kota) dalam upaya untuk mewujudkan kota kreatif. - Merumuskan strategi pengembangan kota kreatif di Indonesia yang sesuai dengan tujuan pemajuan kebudayaan. Sasaran Sasaran kajian ini adalah Pemerintah Daerah yang mengembangkan kotanya sebagai kota kreatif, khususnya yang berbasis pada sektor kebudayaan. Selain Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan yang terkait seperti; komunitas, pelaku bisnis, dan akademisi yang dapat menunjang terwujudnya kota kreatif di masing-masing wilayah juga merupakan subjek penelitian. Keluaran Keluaran dari penelitian ini adalah beberapa alternatif atau opsi kebijakan bagi para pengambil keputusan di pemerintah daerah dalam menetapkan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		rencana strategis, yang berkaitan dengan program UNESCO Creative Cities Network (UCCN), khususnya yang berbasis budaya. Selain untuk pemerintah daerah, juga sebagai alternatif kebijakan untuk mendukung pengembangan kota kreatif, khususnya bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, termasuk untuk bahan kebijakan bagi para pengambil keputusan di Badan Ekonomi Kreatif. Ruang lingkup/batasan Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji empat kota di Indonesia, yaitu; Kota Pekalongan, Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Ambon. Empat kota ini merupakan kota yang telah terdaftar dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO/ UNESCO Creative Cities Network (UCCN), dan yang sedang diusulkan dalam Daftar UCCN. Kota-kota tersebut juga telah diuji petik oleh Bekraf melalui Penilaian Mandiri Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia (PMK3I) Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Keempat kota itu memiliki konteks budaya yang khas baik dari sisi kultural maupun bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan. Diharapkan dengan sebaran tersebut dapat menjadikan hasil penelitian ini cukup komprehensif untuk direfleksikan kepada kota-kota yang lain, terutama yang akan mengembangkan diri ke dalam Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Temuan di Lapangan Pekalongan; mencoba memahami/ mengungkapkan mereka layak dan pantas terdaftar menjadi kota kreatif di UNESCO, produk kreatif , membrand, industry kreatif banyak sentra batik,, pekalongan berkomitmen, mereka juga didukung oleh Temuan di Bandung; Temuan di Solo; Temuan di Ambon; “biar miskin tapi tau Snangsa” mulai dari Hobby Ambon City Of Music” dilaunching <u>Keberlanjutan</u> <u>Simpulan; semangat UU No. 5 tahun 2017 yang menekankan prinsip penguatan komunitas penggiat kebudayaan dan kreativitas sesungguhnya senafas dengan program jejaring Kota Kreatif UNESCO</u> <u>Rekomendasi: 1. Terus mengembangkan infrastruktur soasila, buday dan ekonomi</u> 15. Dr. Herlinawati Tujuan kajian ini adalah untuk:1) merumuskan indikator fungsi perfilman sebagai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi; 2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap film Indonesia dilihat dari fungsi budaya, pendidikan, hiburan, Informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner secara <i>online</i> dengan memanfaatkan laman <i>google form</i>. Hasil kajian menjelaskan bahwa: 1) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Budaya yaitu: a) merepresentasikan budaya etnik/ suku bangsa/ kelompok masyarakat, b) merepresentasikan norma-norma yang ada di Indonesia; 2) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Pendidikan yaitu: a) menampilkan unsur perilaku positif,

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		b) Meningkatkan pengetahuan penonton; 3) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Hiburan yaitu: a) kepuasan penonton terhadap film Indonesia yang menunjukkan ekspresi dan emosi yang dia inginkan tercapai, b) menunjukkan kualitas yang baik/berkualitas; 4) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Informasi, yaitu film Indonesia dapat menginformasikan sesuatu; 5) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Pendorong Karya Kreatif a) mendorong daya kreatifitas/ide, b) mendorong kreatifitas industri perfilman meningkatkan pengetahuan penonton; 6) Indikator fungsi film dilihat dari sisi Ekonomi yaitu: a) meningkatkan perekonomian masyarakat, b) meningkatkan perekonomian pekerja perfilman. Hasil kajian terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia dilihat berdasarkan: 1) kelompok usia; semakin muda usia penonton mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung 6 fungsi perfilman lebih tinggi. yaitu dari skor yang diperoleh bahwa yang mempunyai persepsi tertinggi yakni pada usia 13 – 16 tahun dengan skor 3,10 dan yang mempunyai persepsi terendah pada usia > 30 tahun dengan skor 265; 2) jenis pekerjaan; pelajar/mahasiswa mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung 6 fungsi perfilman lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Pelajar/mahasiswa lebih memandang film Indonesia mempunyai kriteria fungsi perfilman dibandingkan dengan kelompok lainnya; 3) tingkat pendidikan; tingkat pendidikan semakin tinggi, kecenderungan mempunyai persepsi bahwa perfilman Indonesia mengandung 6 fungsi perfilman semakin menurun, kecuali pada lulusan S3 yang mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan lulusan S2; 4) penghasilan; masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (belum memperoleh penghasilan) memandang bahwa perfilman Indonesia mengandung 6 fungsi perfilman yang paling tinggi. Responden yang belum mempunyai penghasilan mayoritas lulusan SMA atau masih kuliah. Kelompok usia lulusan SMA memandang perfilman Indonesia mempunyai persepsi lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya; 5) frekuensi menonton film Indonesia; masyarakat yang dalam 6 bulan terakhir tidak menonton film Indonesia mempunyai persepsi yang paling rendah, sedangkan masyarakat yang dalam 6 bulan terakhir menonton film Indonesia lebih dari 6 kali mempunyai persepsi yang paling tinggi. Orang yang suka menonton film Indonesia menganggap bahwa film Indonesia sudah berkualitas dan memenuhi 6 fungsi perfilman, demikian pula sebaliknya masyarakat yang tidak menonton film Indonesia dalam 6 bulan terakhir memandang film Indonesia belum berkualitas; 6) masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia melalui bioskop mempunyai persepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang non bioskop. Orang yang suka menonton film Indonesia melalui bioskop cenderung menganggap film Indonesia lebih memenuhi 6 fungsi perfilman dibandingkan dengan masyarakat yang menonton melalui non bioskop; 7) masyarakat yang terbiasa menonton film Indonesia ke bioskop dengan alasan hobi mempunyai skor yang paling tinggi, Orang menonton film Indonesia karena hobi sudah merasa terhibur terhadap film Indonesia dan menganggap film Indonesia berkualitas. Sedangkan skor yang paling kecil dengan alasan iseng. Hal ini karena orang yang menonton film Indonesia karena iseng menganggap bahwa belum merasa terhibur terhadap film Indonesia.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	1. Paling utama diminta adalah apa manfaat dari penelitian ini, harusnya dari slide yang ditampilkan ini ada data inventarisasi atau indentifikasi terkait dengan kearifan local atau apa saja dari daerah yang diteliti tersebut yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak kota. Tujuan penelitian ini juga termasuk ke pengembangan, harusnya makin banyak dikenali banyak ragam yang unik dari masing-masing daerah tersebut. Jangan hanya kepada yang terlihat saja. Umumnya kebudayaan itu sudah ada di dalam masyarakat, hanya saja ada yang mati suri, ada semangat UU pemajuan kebudayaan dan UU tentang otonomi daerah, sebenarnya dengan UU ini sudah dengan mendorong agar daerah lebih percaya diri dalam mengembangkan kebudayaannya. Kota-kota tempat yang dilakukan penelitian ini secara umum sudah mapan. Harusnya muncul relevansi kemanfaat yang sesuai dengan kekinian. Saya menawarkan hanya menawarkan dua konsep, yakni revitalisasi dan modifikasi. Terkait kota kreatif harus ada apermisi dari pemerintah (Pemda TK.II) masing-masing kota tersebut. 2. Hal yang mendorong orang menonton film karena Tema, manfaat penelitian ini lebih ke kurikulum. Perlu ada revilatisasi kurikulum dalam Bahasa, bagaimana siswa bisa menulis cerita. Terkait dengan perkembangan teknologi digital, ini bisa dimanfaatkan untuk siswa membuat film-film pendek. Menurut saya dalam kontek maanfaat kajian ini lebih mengembangkan ke kurikulum (SMK/Vokasi) pembuatan film, karena kita butuh SDM yang professional untuk membuat film, karena bagaimana harus menguasai Bahasa (membuat tema), teknologi.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Prof. Aus; untuk kota apermisi pemerintah, di pemerintah pusat ini ada Namanya intensif daerah (diatas 20M), ini perlu di dorong oleh pemerintah pusat, dan itu harus di apermisi ke daerah ke pelaku-pelakunya seperti kuliner, batik, dll. Prof. Aus; apakah film ini juga masuk kedalam literasi budaya? Sistem Pendidikan itu bisa kaitkan dengan literasi budaya, karena ada literasi numerik, literasi digital, dll. 2. Dizah dari KemenHumHam; untruk kota kreatif, sebenarnya ada UU hak cipta no. 28 tahun 2014, budaya ini sebenarnya dilindungi dalam rangka kekayaan komunal (Omnibus Law), usul saya perlu menyatukan data dari beberapa kementerian, karena data ini tersebar di beberapa kementerian, karena di kementerian kami kaitannya dengan pelindungannya.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 12.30 WIB.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

MODEL KLINIK PENDAMPINGAN UNTUK Mendukung PROGRAM KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) GURU

Anik Ghuftron, Suyanta, Pujiyanto, Esti Swastika Sari, Woro Sri Hastuti

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui desain program pendampingan efektif dalam melakukan pengembangan diri bagi guru; 2) mengetahui desain program pelatihan yang efektivitas untuk meningkatkan kompetensi menulis dan publikasi ilmiah bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 3) mengetahui desain program pelatihan efektif bagi guru sehingga mampu mengembangkan karya inovatif; dan 4) mengetahui efektivitas Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) hasil pengembangan yang ditunjukkan melalui peran aktif guru dalam kegiatan-kegiatan strategis pendukung profesionalisme guru. Penelitian dilakukan untuk mendukung pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan profesionalitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan desain pengembangan model R2D2 dari Willis. Model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu (1) penetapan, (2) desain dan pengembangan, dan (3) penyebarluasan. Subjek penelitian ini adalah guru SD, guru SMP, dan guru yang mengikuti PPG. Data diperoleh melalui implementasi aplikasi *online* berplatform Android dan dokumentasi karya/produk yang dihasilkan responden. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem pendampingan *offline* dan *online* yang dikembangkan Tim berupa aplikasi Klipengproberu telah membantu pengembangan diri para guru SD dan SMP; 2) Program pendampingan penulisan artikel ilmiah dengan cara mengembangkan laporan hasil pelaksanaan PTK menjadi artikel ilmiah salah satu program yang efektif untuk melatih keterampilan menulis guru; 3) Pembuatan karya inovatif sebagai bagian bentuk perangkat perbaikan kualitas pembelajaran dalam *setting* PTK efektif digunakan sebagai sarana melatih pembuatan karya Inovasi Pembelajaran (Inobel) bagi guru; dan 4) Program pendampingan telah membantu para guru menyusun karya inovatif sebagai persyaratan kriteria guru berprestasi. Aplikasi dan model yang dikembangkan dapat diterapkan dalam forum MGMP dan KKG.

Kata kunci: klinik, pendampingan, keprofesian berkelanjutan, guru

A. PENDAHULUAN

Pola perbaikan sistem dan tujuan pendidikan di setiap negara secara keseluruhan bermuara pada permasalahan bagaimana tingkat kualitas dan profesionalisme guru (Groothuijsen, dkk: 2018, Rhodes & Beneicke: 2006) Peningkatan kualitas (profesional dan pedagogis) guru dipengaruhi oleh banyak faktor khususnya faktor yang terkait dengan pola kebijakan yang dikembangkan pemerintah pada era kepemimpinan pemerintah yang sedang berjalan. Landasan hukum, sasaran utama program, penentuan pihak-pihak yang terlibat sebagai khalayak sasaran strategis, dan penentuan besarnya anggaran merupakan beberapa komponen yang seringkali menentukan arah kebijakan dan pola peningkatan kualitas profesionalisme guru di setiap negara termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis merupakan permasalahan tersendiri terkait penentuan pola sebaran ketersediaan guru pada semua jenjang pendidikan. Permasalahan ini diikuti beberapa permasalahan yang menyertainya yaitu model perekrutan guru (kesempatan mengabdikan bagi putra daerah), model pembelajaran di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran, standar kriteria kelulusan dan kualitas pembelajaran serta pola pembinaan bagi guru. Keseluruhan permasalahan tersebut tidak hanya menjadi persoalan bagi pemerintah khususnya Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) namun menjadi permasalahan seluruh komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).

Pemerintah telah berupaya melakukan serangkaian program-program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan termasuk peningkatan kualitas profesionalisme guru. Adanya program sertifikasi guru merupakan salah satu bentuk standarisasi kriteria kelayakan seorang guru untuk memiliki kewenangan mengajar sesuai kompetensi yang dimiliki sesuai kewenangan dan hak yang melekat pada sertifikat pendidik tersebut. Namun demikian, program sertifikasi guru yang dikenalkan mulai tahun 2007 belum menjangkau seluruh guru. Hal ini seperti diungkapkan Ditjen Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud bahwa hingga saat ini baru sekitar 3,1 juta guru di Indonesia memiliki sertifikat pendidik dan masih sekitar 570 ribu guru yang belum bersertifikat pendidik (www.merdeka.com). Pemerintah berupaya mengurangi permasalahan pemerataan sebaran guru di daerah 3T dengan program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T) yang diikuti dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG SM3T). Guru-guru di daerah khusus juga difasilitasi melalui program PPG Guru Daerah Khusus (PPG Gurdasus) yang sebelumnya diawali dengan pembekalan pra-PPG Gurdasus yang disebut Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK).

Program PGDK ini diikuti program Pengajar Pengganti (Jarti) sebagai solusi pemenuhan kebutuhan guru selama guru yang berwenang mengikuti PPG Gurdasus. Guru-guru yang sedang aktif menjabat pun difasilitasi melalui PPG dalam jabatan dan program daring (dalam jejaring). Pemerintah juga membuka program PPG bersubsidi untuk mewadahi calon guru profesional yang belum terjaring di antara beberapa program PPG yang telah dijalankan. Namun demikian, program-program tersebut belum efektif meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh angka partisipasi dan keikutsertaan guru dalam program pengembangan inovasi pembelajaran (Inobel) di tahun 2018 masih sangat rendah dilihat dari jumlah pendaftar. Inobel adalah ajang bergengsi tingkat nasional bagi para guru untuk saling menunjukkan inovasi pembelajarannya melalui perlombaan, berinteraksi dengan guru lain, dan juga para ahli di bidang pendidikan.

Kegiatan-kegiatan akademik berupa seminar, konferensi baik tingkat regional, nasional dan internasional juga masih sedikit yang digunakan guru sebagai sarana publikasi maupun srawung ilmiah dalam nuansa atmosfer akademik yang kondusif untuk menambah wawasan dan peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan temuan-temuan permasalahan seperti diuraikan di atas maka diperlukan upaya inovasi dalam bentuk Program Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang mampu berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme guru baik aspek kompetensi pedagogis maupun kompetensi profesional. PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya (Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009). Area PKB semakin berkembang di Skotlandia dan internasional (Kennedy: 2005). Eraut (1994) mengidentifikasi tiga konteks utama pengetahuan profesional diperoleh yaitu konteks akademik, diskusi kelembagaan kebijakan, dan praktik itu sendiri.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan dianggap sebagai proses pemerolehan informasi atau pengetahuan dalam rangka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pendidikan meliputi transfer pengetahuan, keterampilan dari satu orang ke orang lain dengan dan atau tanpa media perantara. Kemajuan teknologi baru-baru ini telah memengaruhi hampir setiap bidang kehidupan. Perkembangan teknologi tersebut menentukan bagaimana sistem komunikasi, yaitu cara berkomunikasi dengan orang lain, cara bekerja bersama, sistem belajar dan mengajar serta strategi pengelolaan pembelajaran tak terbatas ruang dan waktu.

Pembelajaran di era abad ke-21 merupakan perspektif yang berbeda. Pembelajaran dapat terjadi di mana saja, setiap saat, pada topik (tema) apa pun yang disadari atau pun tidak akan berpengaruh pada pembentukan gaya belajar. Peserta didik yang hebat adalah hasil kerja keras guru-guru hebat. Prestasi siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. *Influencer* yang paling penting adalah guru yang inspiratif dan memiliki akses informasi tak terbatas. Kondisi demikian merupakan salah satu ciri guru yang dibutuhkan di era abad ke-21.

Para guru di abad 21 harus mampu mempertimbangkan jenis kebutuhan peserta didik dan membekali serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagian guru menganggap tugas atau pekerjaan ini sangat rumit dan banyak tuntutan tanggung jawab. Keberadaan program pengembangan guru profesional yang berkualitas tinggi merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan guru untuk mempersiapkan tantangan pekerjaan tersebut. Program pengembangan harus menggabungkan penggunaan integrasi teknologi dalam pengajaran (Jan, 2017).

Tuntutan revolusi industri 4.0 dan keterampilan abad 21 menjadi pertimbangan guru dalam menentukan pola strategi, metode, dan atau model pembelajarannya di dalam atau di luar kelas. Peserta didik difasilitasi menggali kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dengan akses informasi sebanyak-banyaknya. Guru sebagai fasilitator mengarahkan peserta didik menentukan gaya belajar sesuai motivasi intrinsik yang dimilikinya sehingga informasi atau pengetahuan ditemukannya sendiri melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dirancang guru.

Era revolusi industri 4.0 memungkinkan peserta didik sebagai tuan rumah teknologi dan produsen konten digital. Peserta didik lebih ramah dan familiar dengan perkembangan teknologi baru dan terbaik meskipun jarang menggunakannya untuk keperluan komunikasi dengan teman, anggota keluarga, dan komunitasnya. Setiap peserta didik memiliki perangkat (*gadget*) berteknologi yang mampu digunakan untuk menghasilkan blog sebagai media komunikasi dengan dunia luar. Namun demikian, pada waktu pembelajaran di kelas yang tidak memerlukan bantuan *gadget*, guru diperkenankan untuk mengondisikan agar semua peserta didik mematikan semua jenis *gadget* dan fokus pada kemampuan berpikir kritis melalui forum diskusi antar teman sebaya. Aktivitas dapat dilanjutkan dengan strategi penugasan membuat blog kreatif yang mengulas cerita dan pendapatnya terhadap suatu topik yang sedang dibahas sehingga akan menumbuhkan rasa bangga dalam diri peserta didik ketika mampu berbagi informasi dengan orang lain. Kondisi demikian memungkinkan bagi guru profesional abad 21 dan era revolusi industri 4.0 sebagai agen perubahan (Badley, 2006).

Kebijakan pemerintah dan upaya terobosan perbaikan kualitas profesionalisme guru selalu mengalami perkembangan setiap tahun. Era pemerintahan dari pemimpin yang satu ke pemimpin berikutnya mengalami berbagai perubahan, penyempurnaan, dan peninjauan kembali ketercapaian hasil program-program yang telah dilaksanakan di era pemerintahan sebelumnya. Tahapan transisi perpindahan periode kepemimpinan sering berakibat (baik langsung maupun tidak langsung) timbulnya perubahan pola

pembinaan, jumlah alokasi anggaran dan target-target utama yang menjadi tujuan peningkatan kualitas profesionalisme guru di seluruh jenjang pendidikan.

Diberlakukannya Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2015 diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan melalui peninjauan kembali kriteria kualitas guru. Hal ini berdampak bahwa mengajar merupakan sebuah profesi sehingga hanya guru yang memenuhi kualifikasi profesional yang mendapatkan kewenangan mengajar yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang dikeluarkan pemerintah (lembaga yang berwenang). Guru yang belum memenuhi kualifikasi dianjurkan mengikuti kegiatan pelatihan terstruktur atau pendidikan profesi guru yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.

Paradigma peningkatan kualitas pendidikan diawali dengan pengenalan dan pemberlakuan Kurikulum 1975 pada tahun 1976. Tahap awal pemberlakuan kurikulum ini melibatkan 90.000 guru Sekolah Dasar (SD) melalui program pelatihan (*workshop*) selama tiga minggu dan pengenalan buku-buku teks sebagai pendukung pelaksanaan kurikulum. Program pelatihan ini melibatkan 12.000 nara sumber ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Program ini dilakukan di 120 provinsi secara bergantian dengan menggunakan sarana transportasi jalur darat. Program pelatihan ini disebarluaskan melalui program sosialisasi radio yang menjangkau 100.000 guru di Jawa Tengah dan diteruskan oleh sembilan stasiun radio amatir luar pulau dengan waktu *delay* 20 menit (Sumintono & Nanang, 2014).

Program peningkatan kualitas profesionalisme bagi guru jenjang sekolah menengah pada masa pemberlakuan Kurikulum 1975 ditempuh melalui penyelenggaraan kursus setara B-II dan pengenalan pendekatan pembelajaran oleh lembaga Pusat Pengembangan Pembinaan Guru atau PPPG. Pada tahun 1979 lembaga ini berkembang ditandai dengan dibentuknya pusat pengembangan professional Bahasa di Jakarta, pengembangan professional matematika di Yogyakarta dan pengembangan professional IPA di Bandung. Pusat-pusat pengembangan ini mengundang 18.000 guru dan melibatkan 150 nara sumber ahli di bidangnya (Thair & Treagust, 2003). Pada pengembangan berikutnya, pemerintah membentuk Balai Pendidikan Guru (BPG) di 14 provinsi dan selanjutnya disusul berdirinya BPG di 13 provinsi. Lembaga ini menyusun program Pemantapan Kinerja Guru (PKG) untuk meningkatkan kualitas professional guru di setiap provinsi. Hasil PKG adalah terpilihnya guru-guru yang akan menjadi instruktur pelatihan di daerahnya masing-masing melalui kegiatan. Khusus program pelatihan untuk guru IPA diselenggarakan di Penang Malaysia (Thair & Treagust, 2003). Pada perkembangannya, para instruktur merintis dibentuknya Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru sekolah dasar dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Pada era berikutnya, peningkatan profesionalisme guru mengalami perkembangan yang sangat pesat melalui dibukanya program Diploma 2 (D-II) bagi guru sekolah dasar yang sebelumnya merupakan lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Adapun program bagi guru sekolah menengah difasilitasi dengan pembukaan program D-III atau sarjana muda. (Thair & Treagust, 2003). Pada era tahun 1990-an, diberlakukannya program kelanjutan studi dari program diploma ke program sarjana (S1).

Proses perekrutan guru yang kompeten selanjutnya ditentukan dengan pemberlakuan prasyarat perekrutan guru yaitu sarjana yang memiliki akta mengajar (Akta IV). Sarjana ini merupakan lulusan institusi pencetak calon-calon guru profesional dalam bentuk lembaga Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Namun di era kemajuan sekarang ini, akta IV bukan menjadi prasyarat utama untuk perekrutan guru bahkan program ini telah dihapuskan dan diganti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pembinaan profesional guru dapat diselenggarakan dengan mengadopsi beberapa model yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan tujuan pembinaan. Model-model pembinaan yang dapat diadopsi antara lain: model pelatihan (*training*), model pembinaan bergelar, *coaching/mentoring*,

pembinaan berbasis standar, penelitian tindakan kelas (PTK), pembinaan berbasis komunitas praktis (Kennedy, 2005). Model pelatihan (*training*) merupakan salah satu model yang paling banyak diadopsi untuk pembinaan profesionalisme guru. Jenis pelatihan ini melibatkan narasumber sebagai tenaga ahli yang ditentukan berdasarkan bidang keahlian (kompetensi).

Jenis pembinaan profesionalisme guru dengan model pembinaan bergelar melibatkan peran validasi lembaga yang berwenang (universitas). Model ini memberlakukan penentuan kriteria awal (pengetahuan prasyarat) sehingga diketahui jenis kebutuhan atau materi pelatihan bergelar yang akan dipilih. Kelulusan program pembinaan melalui model ini ditentukan dengan standar kriteria kelulusan yang mempertimbangkan aspek-aspek penilaian ketercapaian program pembinaan (Kennedy, 2005).

Program pelatihan atau pembinaan profesionalisme guru sepenuhnya harus menanamkan pemikiran pada pribadi guru bahwa pembinaan tersebut merupakan kebutuhannya dan bukan sekedar program administrasi (Osamwonyi, 2016). Upaya untuk menumbuhkan timbulnya pemikiran kebutuhan peningkatan profesionalisme pada guru ini dapat disosialisasikan melalui forum seminar, konferensi, pertemuan guru mata pelajaran dan gelar produk hasil kinerja guru.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian pengembangan. Dalam penelitian ini, desain pengembangan yang digunakan adalah model R2D2 dari Willis (1995). Model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu (1) penetapan, (2) desain dan pengembangan, dan (3) penyebarluasan. Aktivitas penetapan difokuskan pada (a) menciptakan kerja sama tim, (b) solusi problem progresif, dan (c) pemahaman masalah secara kontekstual. Aktivitas desain dan pengembangan difokuskan pada usaha (a) mempelajari konteks pembelajaran, (b) memilih format dan media, (c) menentukan strategi evaluasi, dan (d) mendesain produk dan pengembangannya. Aktivitas penyebarluasan difokuskan pada (a) evaluasi autentik, (b) pembuatan paket akhir produk sesuai dengan konteks, (c) difusi, dan (d) adopsi.

Adapun prosedur yang dilakukan melalui tiga fokus atau langkah, yakni pendefinisian, perencanaan dan pengembangan, serta penyebarluasan. Fokus perencanaan dan pengembangan meliputi (a) program kelanjutan profesi yang dilakukan guru, rencana kerja guru, dan perangkat pembelajaran (b) pemilihan desain pengembangan prototype model, (c) penetapan prosedur evaluasi model, dan (d) pengembangan produk. Sementara itu, fokus penyebarluasan meliputi (a) sosialisasi produk dan (b) uji coba produk model.

Subjek penelitian ini adalah guru SD, guru SMP, dan guru yang mengikuti PPG. Keseluruhan subjek penelitian diambil dari daerah-daerah yang menjadi sasaran penelitian, yaitu seluruh kabupaten di DIY, satu kabupaten di Makasar dan di Padang. Uji produk dilakukan pada tiga kelompok, yakni (1) guru SD, (2) guru SMP, (3) guru yang mengikuti program PPG, dan pengampu kebijakan dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk mengetahui efektivitas produk, tahapan berikutnya yaitu uji lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yakni hasil angket, observasi, dan wawancara dalam proses uji ahli dan uji lapangan. Sementara itu, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang merupakan skor nilai hasil tes kompetensi profesional dan pedagogis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klinik PKB diarahkan pada keterampilan yang berfokus pada kemampuan penyusunan karya ilmiah, pelaksanaan perbaikan kualitas pembelajaran melalui PTK dan pembuatan karya inovasi pembelajaran (Inobel). Keseluruhan keterampilan tersebut disajikan per aspek yang menjadi permasalahan utama oleh pengguna klinik PKB (khususnya guru) dalam mengembangkan kompetensinya pada tiga hal yang ditawarkan oleh klinik PKB. Model ini secara prosedur dapat digambarkan sebagai berikut.

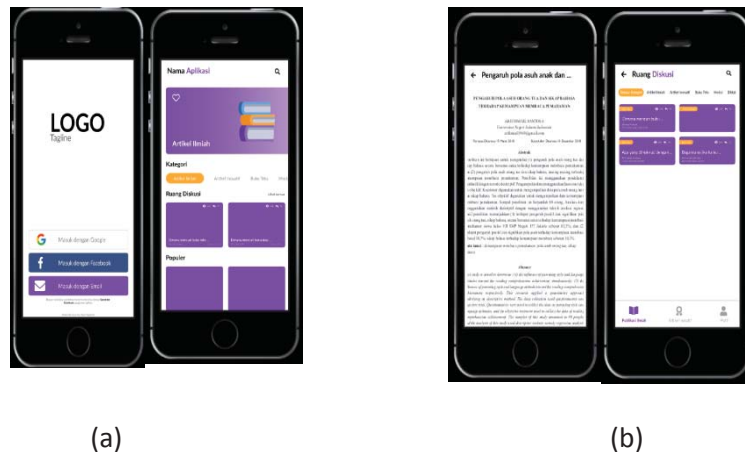


Gambar 1. Desain Model Klinik PKB berbasis IT

Tim pengembang menggunakan dasar penyelenggaraan program pendampingan yang merujuk pedoman-pedoman yang berlaku pada tahun berjalan. Pedoman penyelenggaraan PTK, pedoman penyusunan naskah jurnal ilmiah, dan pedoman penyelenggaraan lomba karya inovasi pembelajaran (Inobel) menjadi kriteria target yang harus dicapai oleh seluruh pengguna klinik PKB. Hal ini dilakukan mengingat ketiga pedoman tersebut yang selama ini digunakan oleh para guru di setiap jenjang pendidikan untuk menyusun karya yang harapannya dapat digunakan sebagai produk kinerja capaian yang telah dibuat menurut kompetensi profesional yang dimilikinya. Lebih lanjut, pedoman-pedoman tersebut selalu mengalami perbaikan-perbaikan setiap tahun penyelenggaraan sehingga Tim Pengembang Klinik PKB menyesuaikan perkembangan kebutuhan pengguna. Meski demikian, dasar pertimbangan pemberian program pendampingan tetap berdasarkan kebutuhan pengguna yang mengalami kendala dalam pengembangan kompetensi keprofesiannya.

Tingkat kebutuhan guru (pengguna klinik PKB) untuk mendapatkan informasi dan layanan yang selengkap mungkin tentang tiga hal utama (karya ilmiah, PTK dan Inobel) sangatlah beragam. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan menunjukkan bahwa pengguna klinik masih memiliki pemahaman dan keterampilan yang belum memadai dalam mengembangkan ketiga kompetensi yang ditawarkan klinik PKB. Namun demikian, tingkat rasa keingintahuan pengguna terhadap pengembangan kompetensi yang dimilikinya juga dapat diidentifikasi berdasarkan seberapa banyak informasi dan kebutuhan program pendampingan yang diperlukannya.

Tim pengembang klinik PKB memandang bahwa sebaran pengguna klinik PKB sangat luas dengan berbagai medan dan atmosfer akademik yang berbeda-beda. Pertimbangan inilah yang menjadi latar belakang dipilihnya model klinik PKB berbasis online. Aplikasi yang dikembangkan selanjutnya diberinama Klipengproberu yang merupakan kepanjangan Klinik Pengembangan Profesi Berkelanjutan bagi Guru. Aplikasi berbasis web ini dapat dinikmati pada gadget maupun menggunakan *personal computer* (PC).



Gambar 2. (a) Tampilan menu aplikasi model klinik PKB berbasis web dan android; (b) Sajian contoh-contoh produk setiap keterampilan yang ditawarkan Klipengproberu

Pengguna harus melakukan registrasi sebelum memanfaatkan klinik PKB dengan memberikan informasi *email* atau *account username* media sosialnya. Informasi identitas pengguna ini diperlukan tim untuk membuat database jumlah pengguna dan pelacakan kemajuan belajar (*progress report*) selama mengikuti program pendampingan. Data ini diperlukan untuk membuat peta kebutuhan yang diperlukan yang bersangkutan agar target yang diinginkannya tercapai.

Secara umum ada tiga menu kompetensi yang ditawarkan pada aplikasi Klipengproberu. Kompetensi pembuatan karya ilmiah, penyusunan proposal dan laporan PTK, dan karya inovasi pembelajaran (Inobel). Setiap kompetensi diberikan ulasan tentang ciri khusus masing-masing karya dan tahapan untuk dapat menghasilkan karya beserta kelengkapan contoh-contoh produk yang telah dibuat oleh para guru yang berprestasi dalam masing-masing kompetensi tersebut. Ketersediaan wahana untuk media diskusi membantu pengguna dan tim pendamping dari Klinik PKB untuk berdiskusi interaktif tentang topik yang menjadi isu permasalahan. Topik diskusi menyesuaikan hal-hal khusus apa sajakah yang dialami oleh pengguna selama mengembangkan kompetensi yang dilatihkan dalam klinik pengembangan profesi keberlanjutan ini. Hal-hal baru yang menjadi isu publik terkait karya ilmiah, PTK dan Inobel disajikan dalam menu khusus.



Gambar 3. Visualisasi menu ruang diskusi pada aplikasi Klipengproberu

Ruang diskusi tidak hanya memfasilitasi dialog interaktif antara pengguna dengan Tim Pendamping dari Klinik PKB. Namun demikian, dialog antar sesama pengguna juga dapat dilakukan dalam ruang diskusi. Hal ini dirancang agar memungkinkan bagi pengguna untuk saling bertukar pengalaman mengenai temuan

kendala dan bagaimana mengatasi kendala tersebut dalam mengembangkan setiap keterampilan yang dilatihkan.

Upaya untuk mengetahui seberapa efektif Klinik PKB yang dikembangkan oleh tim salah satunya adalah layanan pendampingan penyusunan proposal PTK dan pelaporannya. Namun demikian, uji coba layanan belum sampai pada tahap pelaporan hasil PTK. Bentuk layanan pendampingan masih terbatas pada penyusunan proposal PTK bagi guru-guru sekolah dasar (SD). Uji coba ini melibatkan 30 responden yang merupakan guru SD dengan pengalaman kerja yang beragam. Pemilihan responden ini didasarkan pada pertimbangan untuk melakukan pemetaan seberapa kontribusi pengalaman kerja membantu dan mendukung para guru dalam mengembangkan kompetensi keprofesiannya.

Upaya untuk mengetahui seberapa efektif Klinik PKB yang dikembangkan oleh tim, salah satunya adalah layanan pendampingan penyusunan proposal PTK dan pelaporannya. Namun demikian, uji coba layanan belum sampai pada tahap pelaporan hasil PTK. Bentuk layanan pendampingan masih terbatas pada penyusunan proposal PTK bagi guru-guru sekolah dasar (SD). Uji coba ini melibatkan 30 responden yang merupakan guru SD dengan pengalaman kerja yang beragam. Pemilihan responden ini didasarkan pada pertimbangan untuk melakukan pemetaan seberapa kontribusi pengalaman kerja membantu dan mendukung para guru dalam mengembangkan kompetensi keprofesiannya.

Rancangan atau draft proposal yang dibuat oleh responden melalui pemanfaatan Lembar Kerja (LK) kegiatan penyusunan proposal PTK dievaluasi berdasarkan pedoman penyusunan PTK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujicoba dilaksanakan pada penyusunan bagian pendahuluan hingga metode penelitian dalam bentuk draf proposal PTK (Bab I, Bab II, dan Bab III). Peserta diharapkan mampu menyajikan latar belakang mengapa dilakukan PTK pada kelas yang dipilihnya dengan dasar pertimbangan rasional yang logis dan didukung oleh data yang akurat. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukannya selama melaksanakan proses pembelajaran.

Layanan penyusunan karya ilmiah diarahkan kepada keterampilan para guru dalam mengemas hasil penelitian dan/atau *best practice* ke bentuk artikel ilmiah yang memenuhi kriteria persyaratan untuk publikasi. Informasi awal sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan pengguna layanan klinik dalam menyusun karya ilmiah. Kriteria penyusunan karya ilmiah (artikel ilmiah) disesuaikan dengan format yang dikehendaki beberapa jurnal, kegiatan seminar ilmiah atau keperluan publikasi dalam prosiding hasil penelitian.

Teknik pendampingan penyusunan artikel ilmiah difokuskan pada aspek substantif dan aspek teknis. Aspek substantif meliputi judul, afiliasi penulis, abstrak, dan kata kunci. Komponen-komponen substantif ini difokuskan pada abstrak artikel ilmiah karena pada umumnya salah satu penilaian seleksi di tahap awal untuk meloloskan artikel ilmiah pada kegiatan seminar ilmiah adalah seleksi abstrak. Aspek teknis ditekankan pada teknik penulisan dan teknik penyusunan batang tubuh artikel ilmiah, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan saran. Teknik penyusunan meliputi cara menulis kutipan, penyajian tabel dan gambar, penggunaan bahasa, dan penulisan daftar referensi (daftar pustaka). Hasil uji coba penggunaan aplikasi layanan klinik pengembangan profesionalisme berkelanjutan pada sub-artikel ilmiah diperoleh empat karya artikel ilmiah yang menghendaki bantuan pendampingan (tiga karya melalui aplikasi Klipengproberu dan 1 karya melalui email). Terbatasnya jumlah pengguna klinik layanan bimbingan penulisan artikel ilmiah ini dikarenakan sebagian besar pengguna klinik lebih menekankan pada upaya menyusun PTK. Hasil PTK yang telah dilakukan nantinya akan disusun dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan. Berikut deskripsi temuan hasil penyusunan artikel ilmiah yang telah mengikuti arahan klinik layanan penyusunan artikel ilmiah:

a. Aspek substantif

- Penulisan judul kurang memperhatikan anjuran jumlah kata yang disarankan dan belum menggambarkan isi artikel
- Afiliasi penulis dan alamat koresponden belum dituliskan
- Abstrak belum menggambarkan metode penelitian yang digunakan beserta teknik analisis datanya
- Kata kunci yang dipilih penulis bukan merupakan komponen utama yang dijadikan topik bahasan artikel

b. Aspek teknis

- Penggunaan kata depan dan kata sambung yang belum sesuai baik cara penulisan maupun peletakkannya dalam kalimat
- Pendahuluan dituliskan terlalu panjang sehingga melebihi 20% batang tubuh artikel
- Cara penulisan kutipan (buku, jurnal, dan pustaka online) tidak konsisten
- Gambar, dan tabel tidak disajikan sesuai kaidah penyajian gambar dan tabel pada artikel. Beberapa artikel masih ditemukan belum melengkapi judul atau keterangan gambar.
- Sajian data berbentuk gambar atau tabel tidak disinggung dalam pembahasan
- Rujukan pada gambar dan tabel tidak menggunakan penomoran ketika digunakan sebagai dukungan data pembahasan
- Sajian pembahasan hanya memindahkan laporan penelitian dan belum disesuaikan template artikel ilmiah

Keseluruhan kendala yang dialami penulis dalam mengembangkan artikel ilmiah yang berawal dari kegiatan PTK atau laporan best practice digunakan sebagai langkah awal pendampingan penulisan artikel. Contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal atau prosiding seminar hasil penelitian telah disediakan pada menu aplikasi Klipengproberu. Menu contoh artikel tersebut harapannya dapat digunakan pengguna layanan klinik pengembangan profesional, khususnya yang tertarik pada penulisan artikel ilmiah sehingga tidak mengalami kendala saat menyusun artikel ilmiah sebagai hasil PTK atau best practice.

Penyusunan karya inovasi pembelajaran merupakan jenis layanan bimbingan yang paling lama proses pendampingannya. Hal ini dikarenakan jenis karya inovasi harus digali berdasarkan pola pikir pengguna layanan dalam upaya memecahkan persoalan terkait pelaksanaan pembelajaran. Guru masih mengalami kesulitan menuangkan ide inovasinya ke bentuk karya implementatif. Karya Inovasi Pembelajaran (Inobel) akan ramai dibahas guru ketika ada tawaran lomba karya Inobel oleh Kemendikbud. Kondisi demikian ini menjadi pemicu sulitnya menanamkan upaya penggalan ide-ide inovatif terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah meskipun tidak ada tawaran lomba dari suatu lembaga/instansi.

Inobel belum dipandang sebagai bentuk solusi atas permasalahan pembelajaran yang implementatif selain PTK. Temuan selama pelaksanaan uji coba layanan inovasi pembelajaran adalah:

- a. Guru masih sulit membedakan antara pengulangan ide yang telah dibuat orang lain dan modifikasi karya yang telah ada
- b. Karya yang dikembangkan guru tidak berakar pada permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi saat ini (tidak *up to date*) dan telah ditemukan solusinya oleh orang lain
- c. Landasan teori yang mendukung karya Inobel tidak diuraikan dengan jelas
- d. Data pendukung yang menguatkan pentingnya karya Inobel yang sedang dikembangkan masih kurang.
- e. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat berjalan dengan baik apabila timbul kesadaran pada pribadi guru bahwa profesi mengajar dan mendidik merupakan aktivitas dinamis.

Pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan kebijakan-kebijakan strategis bidang pendidikan memunculkan fakta-fakta baru, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang memicu timbulnya persoalan yang harus segera ditemukan pemecahannya. Dalam pelaksanaan PTK, penulisan artikel ilmiah sebagai sarana publikasi temuan hasil penelitian, dan pembuatan karya inovasi pembelajaran menjadi bagian aktivitas keprofesian guru yang melekat karena aktivitasnya di sekolah. Hasil identifikasi pada tahap awal sosialisasi klinik pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru menunjukkan bahwa masih ditemukan guru-guru yang belum mampu menemukan permasalahan yang dialami ketika melaksanakan pembelajaran di kelas baik untuk guru kelas (jenjang SD) maupun guru mata pelajaran (jenjang menengah). Para guru baru menyadari bahwa apa yang dialaminya merupakan bagian dari permasalahan ketika proses pembelajaran tidak sesuai yang direncanakannya dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Fungsi guru sebagai agen perubahan akan muncul dalam kondisi demikian dengan selalu memperbaiki kualitas pembelajaran (Badley, 2006). Salah satunya adalah dengan melakukan PTK. Model pendampingan berupa klinik pengembangan keprofesian berkelanjutan (offline dan online) menjadi salah satu alternatif memberi gambaran kepada guru bahwa menemukan sumber permasalahan dalam proses pembelajaran dapat ditempuh melalui beberapa cara. Bentuk upaya melatih keterampilan identifikasi masalah ini disajikan dalam Lembar Kegiatan (LK).

Hasil uji coba pendampingan guru dalam menyusun PTK menunjukkan bahwa guru masih mengalami kendala pada upaya menemukan jenis tindakan sebagai solusi perbaikan kualitas pembelajaran yang sesuai. Pembuatan aplikasi *online* bukan satu-satunya cara mendampingi para guru dalam mengembangkan keterampilan menyusun PTK, menulis hasilnya sebagai artikel ilmiah, dan mengembangkan ide-ide inovatif sebagai bentuk karya Inobel. Digitalisasi bentuk layanan dimaksudkan agar jangkauan layanan lebih luas dan menjangkau guru-guru yang berada di berbagai wilayah pengabdian. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya penggabungan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran (Jan, 2017). Untuk guru daerah khusus dengan fasilitas akses jaringan listrik maupun internet sangat terbatas, upaya tersebut dapat ditempuh melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) per sub aspek yang dikembangkan pada Klinik Program Keprofesian Berkelanjutan. Program diklat dirancang secara bertahap, meliputi tahap penyusunan proposal PTK yang di dalamnya termasuk menentukan karya inovasi pembelajaran (Inobel) sebagai bagian proses perbaikan kualitas pembelajaran, pelaksanaan PTK, dan menyusun laporan PTK serta publikasi PTK dalam bentuk karya ilmiah. Guru dipandu menggunakan Lembar Kegiatan yang mengarah pada sub-sub keterampilan yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan PTK. Komunitas KKG dan MGMP dapat dilibatkan melalui kegiatan seminar hasil pelaksanaan PTK di sekolah-sekolah anggota KKG dan MGMP. Apabila kondisi demikian dapat dilaksanakan secara rutin per semester maka profesionalitas guru sebagai pendidik dan pengajar dapat berkembang secara terus menerus mengikuti kebutuhan dalam bidang pembelajaran.

E. PENUTUP

Model klinik PKB dirancang sebagai program yang membantu para guru khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dapat meningkatkan keprofesiannya dalam bidang penulisan karya ilmiah, pelaksanaan PTK, dan pembuatan inovasi pembelajaran (Inobel). Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan:

- a. Sistem pendampingan *offline* dan *online* yang dikembangkan Tim berupa aplikasi Klipengproberu telah membantu pengembangan diri para guru SD dan SMP;
- b. Program pendampingan penulisan artikel ilmiah dengan cara mengembangkan laporan hasil pelaksanaan PTK menjadi artikel ilmiah salah satu program yang efektif untuk melatih keterampilan menulis bagi guru;

- c. Pembuatan karya inovatif sebagai bagian bentuk perangkat perbaikan kualitas pembelajaran dalam setting PTK efektif digunakan sebagai sarana melatih pembuatan karya Inovasi Pembelajaran (Inobel) bagi guru;
- d. Program pendampingan telah membantu para guru menyusun karya inovatif sebagai persyaratan kriteria guru berprestasi.

Sistem yang dikembangkan oleh Tim akan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan melalui strategi berikut:

- a. Sosialisasi pada kegiatan MGMP dan KKG di beberapa wilayah sehingga dicapai standarisasi dan penyamaan persepsi tentang karya ilmiah, PTK, dan Inobel;
- b. Peran Dinas sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program pendampingan dalam klinik PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sunaryo. (2018, 20 November). 570 Guru di Indonesia Belum Bersertifikat. Diperoleh 10 Desember 2018, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/570-ribu-guru-di-indonesia-belum-bersertifikat.html>
- Badley, G. 2006. The Teacher as Change Agent. *Journal of In-service Education*. Vol. 12:3 p. 151-158. Doi: 10.1080/0305763860120305
- Groothuijsen, dkk., 2018. Towards an Empirical Substantiated Professional Development Programme to Train Led Teachers to Support Curriculum Inovations. *Journal of Professional Development*. DOI: 10.1080/19415257.2018.1510427
- Jan, H. 2017. Teacher of 21st Century: Characteristics and Development. *Journal of Research on Humanities and Social Sciences* Vol. 7 No. 9, 2017
- Kennedy, A. 2005. Models of Continuing Professional Development: a framework for Analysis. *Journal of In-service Education*, Vol. 31 No. 2, 2005
- Osamwonyi, E.F. 2016. In-services Education of Teachers: Overview, Problems, and The Way Forward. *Journal of Education and Practice*, Vol. 7 No. 26, 2016
- Roches, C. & Beneicke, S. Coaching, Mentoring and Peer Networking Challengers for The management of teacher professional development in schools. *Journal of In-service Education*. 28:2, 297-310
- Sumintono, B. & Nanang, B.S. 2014. Teacher In-service Training and Re-training in Indonesia. HM Studies and Publishing: Cyprus
- Thair & Treagust, D. A Brief History of A Science Teacher professional development initiative in Indonesia and the implications for centralized teacher development. *International Journal of Educational Development*, 23, 201-213
- Willis, J. 1995. A Recursive, Reflective Instructional Design Model Based on Constructivist-Interpretative Theory. *Educational Technology*, 1995, 35, (6), pp 5-23.

EVALUASI PENGELOLAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (Studi Kasus di 5 Kota)

C.D. Fajarini, Parwanto, Widodo, Dyah Suryawati

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan SKB setelah diberlakukannya Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Alih fungsi SKB ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran SKB sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Perubahan fungsi SKB mengakibatkan perubahan dalam pengelolaannya, yang semula berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), SKB merupakan UPT Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda berdasarkan kebijaksanaan teknis dari Direktur Jenderal Diklusepa (sekarang Ditjen PAUD dan Dikmas). Dalam hal ini SKB tidak menyelenggarakan pendidikan nonformal, melainkan hanya mengembangkan program-program pendidikan nonformal, untuk kemudian diimplementasikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan SKB sebagai penyelenggara satuan pendidikan nonformal. Metode evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar isian untuk data kuantitatif dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk data kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SKB sebagai satuan pendidikan memberi peluang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan baik akademik maupun non-akademik, terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta didik baik untuk program pendidikan kesetaraan maupun program pendidikan masyarakat. Bertambahnya jumlah program mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan pamong belajar, baik sebagai kepala SKB maupun pengajar/tutor. Kekurangan pamong belajar perlu dipenuhi dengan pengangkatan PNS baru khusus pamong. Perlu pula dipertegas sumber pendanaan SKB seperti layaknya sebuah satuan pendidikan. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang tegas mengenai pengelolaan SKB selanjutnya.

Kata kunci: sanggar kegiatan belajar, satuan pendidikan nonformal, pengelolaan

A. PENDAHULUAN

Efek sporadis dari fenomena globalisasi di Indonesia tidak dapat dihindari (Jakubik and Berazhny, 2017; Marniati and Wibawa, 2018; Saggaf *et al.*, 2018). Suatu negara atau bangsa selayaknya mempunyai kebijakan yang tepat untuk menghadapi dan memenangkan persaingan global. Oleh karenanya, sebuah negara berkembang harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas (Violante and Vezzetti, 2015; MayTruong, 2016; Krasnova, 2018). Penciptaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Secara tinjauan kompleks, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Keberagaman letak

geografis setiap wilayahnya menampakkan tingkat variasi dalam segala aspek (Irdianto and Putra, 2016; Mukhadis *et al.*, 2018; Putra *et al.*, 2018). Meskipun Indonesia memiliki kekayaan SDA dan SDM, namun tidak dipungkiri bahwa cukup banyak masyarakatnya yang masih mengapung pada garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2006 dari angka 17,75% yang berfluktuasi menjadi 9,82% pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan setiap tahunnya, jumlah kemiskinan (di perkotaan dan pedesaan) ternyata masih relatif cukup banyak. Secara rinci, ditunjukkan pada Grafik 1.



Grafik 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (BPS, 2018)

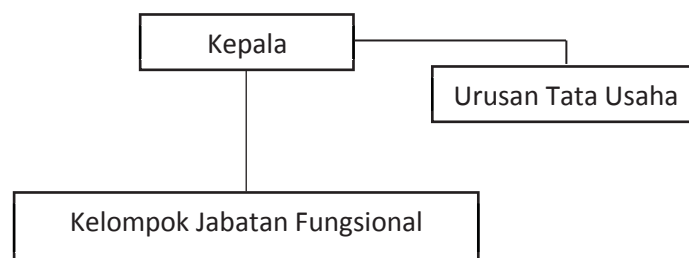
Kondisi kemiskinan ini bila dibiarkan dapat menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendidikan merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat, karena pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Namun, tidak semua warga Indonesia dapat mengakses pendidikan yang diakibatkan oleh beberapa kendala, misalnya harus bekerja untuk bertahan hidup dan tidak mampu membayar biaya pendidikan (faktor ekonomi), jarak tempat tinggal dengan lokasi penyelenggara pendidikan tidak terjangkau (faktor lokasi), serta berbagai kendala lainnya. Dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 disebutkan bahwa jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat dengan berbagai kendala dan keterbatasan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), bahwa SKB merupakan UPT Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Diklusepa (sekarang Ditjen PAUD dan Dikmas). SKB tidak menyelenggarakan pendidikan nonformal, tetapi hanya mengembangkan program-program pendidikan nonformal yang selanjutnya diimplementasikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Dalam rangka mengoptimalkan peran SKB, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 diterbitkan yang mengubah SKB menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang menyelenggarakan pendidikan

nonformal; melaksanakan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; serta melaksanakan administrasi SKB.

Program Pendidikan Nonformal (PNF) adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui: 1) pendidikan kecakapan hidup; 2) pendidikan anak usia dini; 3) pendidikan kepemudaan; 4) pendidikan pemberdayaan perempuan; 5) pendidikan keaksaraan; 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 7) pendidikan kesetaraan; 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis mempunyai hak antara lain, yaitu: (1) Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional; (2) Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; (3) Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; (4) Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan (5) Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas: (1) Kepala; (2) Urusan Tata Usaha; dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan. Sedangkan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya. Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis, terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKB (Permendikbud no. 4 Tahun 2016)

Berdasarkan kajian sementara, penyelenggaraan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis masih mengalami berbagai kendala, karena perubahan fungsi SKB mengakibatkan perubahan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan kegiatan penelitian untuk mengevaluasi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis di Indonesia guna menjawab tantangan layanan pendidikan nonformal sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kendala untuk memperoleh pendidikan.

Kajian Evaluasi sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis ini bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan data dan informasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi sesudah SKB menjadi Satuan Pendidikan
- b. Menganalisis kelebihan dan kekurangan pengelolaan SKB setelah SKB menjadi satuan pendidikan
- c. Menganalisis aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas PNF melalui SKB sebagai penyelenggara satuan pendidikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi dan partisipasi (Omeno and Sang, 2018; Xu, Li and Luo, 2018). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dengan memperoleh atau memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat (Gibson, 2017; F. Jennings, Nagarathnam and B. Lawrence, 2018; Tennant *et al.*, 2018).

Metode pemberdayaan masyarakat harus selalu mempertimbangkan waktu penyelenggaraan yang tidak terlalu mengganggu kegiatan atau pekerjaan pokok masyarakat (Franitasari, Wilson and Maemunaty, 2018; Kartika, Mustaqimah and Hardiyati, 2018; Setiawati, Astawa and Adnyani, 2018). Metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat atau masyarakat yang diberdayakan. Artinya, metode yang digunakan berbeda dengan pendidikan formal yang telah memiliki program yang dibakukan. Setiap kegiatan pendidikan nonformal atau kegiatan pemberdayaan masyarakat harus selalu menyesuaikan dengan penerima manfaatnya (Rizki, 2014; Laila Nursafitri, 2015; Darussalam and Aceh, 2016; Aimah, Anggani and Bharati, 2017; Siew Yin Chong *et al.*, 2017).

Proses merupakan sebuah rangkaian perjalanan yang terjadi dalam kejadian yang berlangsung dari awal kejadian dimulai tersebut hingga akhir (Møller *et al.*, 2017; Pandit *et al.*, 2017; Heidarinejad *et al.*, 2018; Strekalova *et al.*, 2018). Memberdayakan masyarakat sejatinya memerlukan waktu yang panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang panjang agar mereka menjadi lebih berdaya, dan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan berfungsi sebagai *power* dalam pencapaian tujuan, yaitu pengembangan diri dan kemandirian. Proses pemberdayaan setidaknya mencakup enam hal berikut:

- *Learning by doing*, artinya adanya proses belajar dan langsung diterapkan secara terus menerus.
- *Problem solving*, yaitu adanya proses terjadinya pemecahan masalah.
- *Self evaluating*, yaitu adanya proses melakukan evaluasi secara mandiri.
- *Self development and coordination*, yaitu adanya proses untuk mengembangkan diri dan berkoordinasi dengan pihak luar secara lebih luas.
- *Self selection*, yaitu mampu memilih dan menilai secara mandiri dalam menentukan langkah kedepan.
- *Self decisim*, pada proses adanya kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang di singkat menjadi 5P yaitu :

- **Pemungkinan**: menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang.
- **Penguatan**: adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- **Perlindungan**: adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari dari persaingan yang tidak seimbang.

- Penyokongan: artinya adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya.
- Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Februari 1997 maka Sanggar Kegiatan Belajar (selanjutnya di sebut SKB) merupakan UPT Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda berdasarkan kebijaksanaan teknis dari Direktur Jenderal Diklusepa (sekarang Ditjen PAUD dan Dikmas). Salah satu tugas pokok SKB adalah melaksanakan program-program percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka peran dan fungsi SKB berubah sesuai dengan karakteristik dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan nonformal, SKB diharapkan mampu mengakses banyak program pendidikan nonformal, SKB memiliki tanggung jawab menyelenggarakan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki SKB menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas maupun fungsinya (Franitasari, Wilson and Maemunaty, 2018; Kusumawati, 2018). SKB tidak menyelenggarakan pendidikan nonformal namun hanya mengembangkan program-program pendidikan nonformal. Dalam rangka mengoptimalkan peran SKB, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 diterbitkan. SKB diubah menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang menyelenggarakan pendidikan nonformal; melaksanakan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; serta melaksanakan administrasi SKB.

SKB sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis memiliki hak dan kewenangan untuk: 1) mengubah organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan sebagai satuan pendidikan, di antaranya kepala SKB adalah pejabat fungsional nonstruktural dan pamong belajar adalah pejabat fungsional yang khusus bertugas membentuk dan melaksanakan pembelajaran (guru nonformal); 2) menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah (PAUD dan Dikmas), yakni pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik; 3) memperoleh fasilitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta anggaran operasional yang memadai; dan 4) memperoleh pembinaan hingga dapat mencapai standar nasional pendidikan dan terakreditasi.

SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis di bawah dinas pendidikan kabupaten/kota. SKB secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan di kabupaten kota, dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di dinas pendidikan kabupaten/kota. Secara nasional SKB dibina oleh Ditjen PAUD dan Dikmas, sedangkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di SKB dibina oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. SKB dapat diakui sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis apabila minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) ditetapkan dengan SK bupati/wali kota atau peraturan daerah; 2) memiliki struktur organisasi SKB yang relevan sebagai satuan pendidikan; 3) memiliki tugas dan fungsi minimal, terdiri atas fungsi pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian; 4) mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Kemdikbud RI melalui dinas pendidikan kabupaten/kota setempat sebagai satuan pendidikan nonformal; 5) peserta didik SKB memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Kemdikbud RI melalui dinas pendidikan

kabupaten/kota setempat sebagai peserta didik di satuan pendidikan nonformal; 6) memiliki pamong belajar, sarana dan prasarana, serta anggaran rutin; dan 7) menyelenggarakan program PAUD dan Dikmas serta memiliki desa binaan. SKB yang telah memenuhi persyaratan minimal tersebut akan mendapat dukungan dari Ditjen PAUD dan Dikmas berupa fasilitasi, pendanaan program, dan pembinaan oleh UPT PAUD dan Dikmas untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP) agar memperoleh status terakreditasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan *mixed method*, yang terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif (Sugiyono 2014, Teakochi & Teddlie 2010, Creswell 2012). Pada penelitian ini, *mixed method* tersebut dilakukan dengan pendekatan *sequential exploratory strategy*. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kualitatif, kemudian diikuti dengan pengumpulan data kuantitatif (Creswell, 2012). Pada metode kualitatif digunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Data yang diperoleh dari metode kualitatif digunakan untuk melengkapi analisis data kuantitatif terkait dengan pengelolaan SKB dan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, PAUD, pendidikan keaksaraan, dan program pendidikan masyarakat atau pendidikan kecakapan hidup. Pada metode kuantitatif digunakan kuesioner yang diisi oleh Kepala SKB terkait dengan pengelolaan SKB serta program-program pendidikan yang diselenggarakan.

Lokasi penelitian Evaluasi Pengelolaan SKB sebagai Satuan Pendidikan dilaksanakan di seluruh SKB di setiap provinsi di Indonesia. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 (lima) kota di Indonesia yang dipilih secara *purposive* di lokasi yang memiliki keunikan dalam pengelolaan, baik praktik baik, maupun lokasi yang banyak masalah dalam pengelolaan dengan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal PAUD Dikmas dan Dapodik. Kelima kota tersebut adalah: (1) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; (2) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (3) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; (4) Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; dan (5) Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan responden untuk memperoleh data kualitatif, serta pengisian Daftar Isian oleh responden untuk data kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi dua tahap. Teknik analisis data pada tahap pertama (metode kualitatif) dilakukan dengan deskriptif kualitatif, melalui tabulasi data dan analisis interaktif, sementara pada tahap kedua (metode kuantitatif) dengan pengujian deskriptif kuantitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara nasional, sejak tahun 2017/2018 sampai 2019/2020 jumlah SKB sebagai satuan pendidikan di 34 provinsi terus meningkat. Pada tahun 2017/2018 semester genap sebesar 374 SKB, tahun 2018/2019 semester ganjil sebesar 401 SKB, tahun 2018/2019 semester genap sebesar 412 SKB, dan tahun 2019/2020 semester ganjil sebesar 419 SKB. Jumlah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2019 sebanyak 514 kabupaten/kota. Berdasarkan data terakhir dari data pokok pendidikan di Ditjen Pembinaan PAUD dan Dikmas, jumlah SKB pada semester ganjil tahun 2019/2020 sebanyak 419 SKB. Dengan demikian jumlah kabupaten/kota yang tidak memiliki SKB tahun 2020 minimal sebanyak $514 - 419 = 95$ kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota memiliki lebih dari satu SKB, misalnya Kota Balikpapan memiliki lima SKB dan Kota Makassar memiliki dua SKB. Kota DKI Jakarta dan luar negeri tidak memiliki SKB (nol lembaga). Keberadaan SKB terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah (33 SKB) dan Jawa Barat (26 SKB). Sedangkan yang memiliki SKB terkecil adalah Provinsi Kalimantan Utara (3 SKB). Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat sangat sadar pentingnya pendidikan sehingga dalam keterbatasan apa pun tetap berupaya untuk memperoleh pendidikan guna mencapai cita-citanya.

Program pendidikan nonformal sejenis yang diselenggarakan SKB meliputi: Program pendidikan kesetaraan, keaksaraan, PAUD, dan Dikmas. Penyelenggaraan Program Kesetaraan meliputi: Paket A, Paket B, dan Paket C. Secara nasional semua SKB menyelenggarakan program kesetaraan yang terus meningkat sejak tahun 2017/2018 semester genap sebanyak 792 program sampai dengan 1.036 program pada semester ganjil tahun 2019/2020. Program tersebut tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara itu, jumlah SKB yang menyelenggarakan program kursus berdasarkan level KKNI menunjukkan fluktuasi, yaitu tahun 2018/2019 semester ganjil sebanyak 129 program, tahun 2018/2019 semester genap sebanyak 220 program, dan tahun 2019/2020 semester ganjil turun menjadi 108 program.

Selanjutnya, SKB yang menyelenggarakan Program PAUD—yang meliputi TK, KB, TPA dan SPS—menunjukkan peningkatan. Sejak semester ganjil tahun 2018/2019 sebanyak 174 program, tahun 2018/2019 semester genap sebanyak 232 program, dan tahun 2019/2020 semester ganjil turun menjadi 247 program. Dari keempat program PAUD yang paling banyak diselenggarakan adalah Program Kelompok Bermain (KB) dengan kecenderungan terus meningkat setiap semesternya.

Sementara itu, SKB yang menyelenggarakan Program Keaksaraan, meliputi Keaksaraan Dasar, Usaha Mandiri, dan Multikeaksaraan. Penyelenggaraan program keaksaraan berfluktuasi sesuai kebutuhan masyarakat. Sejak semester ganjil tahun 2018/2019 sebanyak 85 program, pada tahun 2018/2019 semester genap sebanyak 107 program, dan pada tahun 2019/2020 semester ganjil turun menjadi 104 program. Penurunan ini terjadi pada program keaksaraan dasar, dari 63 program pada tahun 2018/2019 semester ganjil yang terus menurun menjadi tujuh program pada tahun 2019/2020 semester ganjil. Hal ini sejalan dengan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pendidikan sejak dini sehingga makin berkurang orang yang buta aksara (baca, tulis, hitung). Untuk program Keaksaraan yang menunjukkan tren peningkatan adalah program multi keaksaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan semakin meningkat untuk membekali diri guna mendapatkan pekerjaan.

Selanjutnya, perkembangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri atas pamong (PNS), guru tetap/tutor, honor daerah, honor sekolah, dan lainnya sejak SKB menjadi satuan pendidikan, pada 2017/2018 semester genap adalah 2.727 orang, pada 2018/2019 semester ganjil 3.384 orang, pada 2018/2019 semester genap 4.419 orang, dan meningkat drastis pada 2019/2020 semester ganjil sebanyak 13.084 orang. Secara nasional rasio pamong/peserta didik adalah 0,0148, artinya satu pamong melayani 148 jumlah siswa/peserta didik. Kondisi ini masih jauh dari cukup, karena kondisi ideal berdasarkan standar pendidikan, rasio pamong dengan peserta didik adalah 1:20.

Sejak SKB menjadi satuan pendidikan pada 2017, pemerintah pusat telah memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik untuk fisik dan nonfisik. DAK nonfisik berupa bantuan operasional sekolah sedangkan DAK fisik digunakan untuk membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang dimiliki SKB. Adapun total DAK SKB (Tanpa Kegiatan Penunjang)= Rp361.503.124.696 dan Dana Penunjang/Management= Rp.20.680.386.826. Rincian alokasi DAK meliputi:

1. Dana Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB, meliputi:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebesar Rp35.506.089.134 (Paket 1).
 - b. Rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya sebesar Rp30.189.151.684 (Paket 2).

- c. Rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya sebesar Rp7.579.098.992 (Paket 3).
2. Dana Pembangunan Prasarana Belajar SKB, meliputi:
 - a. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya sebesar Rp93.268.379.778 (Paket 1)
 - b. Pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya sebesar Rp68.179.984.204 (Paket 2)
 - c. Pembangunan jamban beserta sanitasinya sebesar Rp12.278.158.579 (Paket 3)
3. Dana Pengadaan Sarana Belajar SKB, meliputi:
 - a. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) sebesar Rp12.736.303.000 (Paket 1)
 - b. Pengadaan peralatan pendidikan sebesar Rp79.737.585.325 (Paket 2)
 - c. Pengadaan media pendidikan sebesar Rp22.028.374.000 (Paket 3)

Bantuan DAK yang paling banyak dialokasikan ke SKB untuk rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar SKB diberikan ke 122 SKB.

1. Perubahan yang terjadi sesudah SKB dijadikan sebagai Satuan Pendidikan

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari lima kota sampel, menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi sesudah SKB menjadi satuan pendidikan, meliputi berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi satuan pendidikan, sebagai berikut.

a. SKB memiliki status skreditasi dan perumusan visi & misi

Semua SKB sampel telah memiliki status terakreditasi dan telah memiliki NPSN. Keseluruhan SKB telah memiliki rumusan visi dan misi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

b. SKB memiliki kurikulum

Sebanyak 35% SKB telah memiliki kurikulum sebagai pedoman para tutor dan guru. Kurikulum ini sudah dan dikembangkan dengan mengadopsi kearifan lokal dan mempertimbangkan kebutuhan lokal. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengetahui apa yang diperlukan masyarakat dan keterampilan apa yang diminta masyarakat. Secara umum kurikulum dalam implementasinya disertai oleh RPP yang disusun oleh para pamong dan tutor SKB yang dilibatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 95% SKB memiliki dokumen kurikulum; 86% SKB memiliki program pengembangan kurikulum; 27% SKB memiliki kurikulum muatan lokal, dan 88% SKB memiliki RPP lengkap dan relevan.

c. SKB menyelenggarakan program pendidikan

Sebanyak 22 SKB sampel memiliki beragam program, yaitu: pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, paket C), pendidikan PAUD, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecantikan tata rambut dan tata kulit. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pada umumnya sudah memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masyarakat di sekitar SKB, dan kehidupan di masa yang akan datang. Program yang banyak dilaksanakan di SKB adalah program kesetaraan (paket A, B, dan C) dan program keterampilan. Berdasarkan hasil FGD Program kesetaraan dilaksanakan di seluruh SKB yang diteliti. Seluruh SKB yang diteliti juga melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan dan kewirausahaan. Berdasarkan data yang diperoleh, 47% SKB menyelenggarakan kursus Tata Busana dan kursus Tata Boga. Data ini diperkuat dengan hasil FGD, bahwa kursus keterampilan tersebut diselenggarakan karena tingginya permintaan masyarakat. Hampir semua SKB yang diteliti melaksanakan program keaksaraan, hanya pada SKB yang berlokasi di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah tidak melakukan program keaksaraan. Berkaitan dengan

program kewirausahaan hampir semua SKB yang dilibatkan mengaku ikut serta melaksanakan program kewirausahaan, yaitu di 3 SKB sampel. Khusus SKB Gowa tidak melaksanakan kegiatan kursus. Jenis keterampilan yang diminati peserta didik adalah keterampilan memproduksi barang dan keterampilan yang memberikan penghasilan. Program yang tidak selalu ada pada setiap SKB, yaitu Program Pendidikan Keluarga, Pendidikan kursus ketrampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan pemberdayaan perempuan dan gender.

d. SKB memiliki sarana dan prasarana

Sarana yang dimiliki SKB sebagai penunjang kegiatan sanggar berupa buku teks, buku bacaan wajib, modul pada program paket. Sarana tersebut semuanya tersedia guna mendukung program paket A, B, C, program PAUD, dan program keterampilan kejuruan seperti tata busana dan keterampilan tata boga, serta buku teks untuk mendukung program keaksaraan dasar. Melalui hasil diskusi dan pendataan yang diberikan pada petugas, jenis-jenis sarana yang sudah ada dan tersedia di SKB meliputi meja kursi siswa, meja kursi guru, papan tulis yang layak untuk digunakan, alat tulis, alat-alat peraga pembelajaran yang layak, (3 buah) almari penyimpanan dokumen dan perlengkapan olahraga. Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan SKB memiliki sedikitnya 1 (satu) buah perbengkelan. Jenis dan jumlah peralatan sarana khusus pembelajaran yang tersedia meliputi komputer peserta didik, peralatan tata busana, peralatan tata boga, peralatan perbengkelan, almari penyimpan peralatan, alat permainan edukasi (APE) dalam, dan APE Luar. Untuk alat permainan SKB memiliki minimal 47 unit Alat Permainan Edukasi Dalam (APE), dan sedikitnya memiliki 2 unit APE luar pada setiap SKB yang menyelenggarakan. Kondisi peralatan tersebut pada umumnya cukup layak untuk digunakan dan cukup menunjang proses pembelajaran. Sementara itu, prasarana penunjang kegiatan meliputi ruang belajar dengan luas lantai 140 m², ruang praktik seluas 70 m², dan ruang guru seluas 35 m². Beberapa SKB juga memiliki ruang tambahan, antara lain ruang staf administrasi, ruang pimpinan, ruang tamu, perpustakaan, ruang ibadah, ruang serbaguna, dan gudang. Ruang penunjang lain yang tercatat dari data lampiran pendukung didapatkan sedikitnya 10 sarana penunjang lain, sementara ada sedikitnya lima ruang belajar yang ada pada setiap SKB. Untuk ruang staf administrasi, setiap satu sanggar umumnya memiliki satu ruang administrasi dan satu ruang pimpinan. 11 % lahan SKB dimiliki oleh pemerintah daerah, 2% lahan SKB merupakan tanah wakaf, beberapa SKB (4%) dalam bentuk kontrak. Sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan oleh setiap program sesuai dengan aset yang dimiliki masing-masing SKB, walaupun belum semua sarana prasarana yang dibutuhkan tersedia di setiap SKB.

e. SKB memiliki tenaga pengajar

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, pada umumnya jumlah tutor dan pamong yang mengajar dan memberi pelatihan di sanggar belajar belum ideal. Selain itu, didapatkan hasil bahwa sedikit sekali terjadi penambahan jumlah pamong selama kegiatan sanggar berjalan, kecuali ada beberapa tutor dan pamong yang pensiun. Fenomena pindahnya pamong ke sanggar atau kantor lain menjadi masalah yang mencemaskan. Hal ini terjadi di SKB Badung dan SKB Tabanan. Pamong-pamong program paket A, paket B, paket C, dan tutor keterampilan tidak ideal, atau sangat kurang. Demikian juga pamong untuk program pemberdayaan perempuan, kepemudaan, kepramukaan, dan pendidikan nonformal yang lain pada umumnya masih kurang.

f. Anggaran SKB

Pada umumnya anggaran pelaksanaan SKB berasal dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa 85% SKB tidak mendapatkan dana dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi, dan sumber-sumber lain seperti lembaga swasta. Sejumlah dana yang diterima pada umumnya berasal dari pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan. Dana yang diterima oleh SKB

dari lembaga umumnya dikelola secara terbuka dan transparan. Terdapat lima SKB yang mendapatkan DAK fisik dan bantuan nonfisik. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk proses pembelajaran kesetaraan.

g. Pengembangan sarana prasarana, pendanaan, dan SDM

Pengembangan sarana dan prasarana pada 60% SKB digunakan untuk menunjang pelaksanaan program-programnya, yaitu penyelenggaraan program, pengembangan sarana pendukung, penyediaan bahan habis pakai, dan penempatan tenaga pengajar untuk mewadahi program-program yang dibuka. Dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran, beberapa SKB melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap pengajarnya, bahkan juga melakukan pelatihan lanjutan untuk para karyawannya. Pengembangan sarana dan prasarana, dilakukan melalui komite dengan sistem sumbangan sukarela dari orangtua siswa. Pengembangan potensi dan dukungan 20% SKB diberikan oleh pemerintah pusat, dan juga bantuan didapatkan dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk dana operasional. Bantuan dari pemerintah pusat pada umumnya dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memperlancar proses belajar di sanggar.

Sementara itu, untuk memperoleh peserta didik, SKB melakukan promosi melalui brosur, spanduk dan sosialisasi. Beberapa SKB melakukannya dengan spanduk, beberapa di antaranya hanya melakukan sosialisasi dari mulut ke mulut karena kekurangan dana untuk penyelenggaraan dan memang tidak tersedia pos untuk promosi, mengingat SKB adalah lembaga pemerintah dan dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat sekitar.

h. Dukungan dunia usaha/dunia industri

Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 11 SKB yang memiliki program magang atau MoU dengan DU/DI. Beberapa menyatakan belum memiliki kerjasama dengan DU/DI karena sulitnya menyatukan program SKB dengan program dari DU/DI, sehingga tidak terjadi sinkronisasi yang baik antara keduanya. Sebenarnya hampir seluruh SKB memiliki program penyaluran program layanan pendidikan dengan dunia kerja. Namun program tersebut tidak bisa berjalan optimal karena kekurangan sumber daya yang mampu dan kompeten. Terdapat hanya lima SKB saja yang memiliki program penyaluran, berjalan, dan berlanjut. Hasil penelitian menunjukkan belum ada perbedaan yang signifikan keterlibatan DU/DI sebelum dan sesudah SKB menjadi satuan PNF. Pengembangan SDM di sanggar juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Upaya pengembangan di beberapa SKB dilakukan melalui pengiriman pegawai SKB untuk mengikuti pelatihan dan *workshop* bidang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pengelolaan SKB Setelah SKB Menjadi Satuan Pendidikan

a. Kelebihan

SKB memiliki DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sendiri (anggaran tidak bergabung dengan DIPA Dinas Pendidikan) sehingga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhannya. SKB berperan sebagai penyelenggara program pendidikan, yaitu program PAUD dan Dikmas baik di dalam maupun di luar SKB, seperti di Pesantren, di rumah peserta didik, dan Lapas. Kepala SKB bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, baik dalam pengusulan anggaran, pengelolaannya, maupun pertanggungjawabannya.

Pembelajaran dilaksanakan secara reguler, menyerupai sekolah formal, peserta didik pada sekolah reguler adalah anak-anak usia sekolah. Selain itu, pembelajaran SKB bisa dilakukan secara *home schooling*, yakni kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah, selanjutnya Kepala SKB wajib mengawasi perkembangan peserta didik. Pembiayaan proses belajar-mengajar ditanggung oleh peserta didik *home schooling*. SKB yang baik pada umumnya memiliki tenaga pendidik di atas 24 orang, walaupun tidak semua SKB memiliki pamong sebagai tenaga tetap. Pengelolaan SKB dapat berjalan dengan baik dan berkembang, dengan

memberdayakan tutor sebagai pengajar pengganti pamong. Aspirasi pemerintah daerah terhadap keberadaan SKB yang baik cenderung mendorong dan berupaya memfasilitasi perkembangan SKB yang ada.

b. Kekurangan

Penganggaran di beberapa SKB sampel, DPA SKB masih menyatu dengan DIPA Dinas Pendidikan sehingga pengelolaannya sangat bergantung pada bidang PAUD & Dikmas di dinas pendidikan. Selain itu, Pemerintah daerah membatasi pengalokasian dana pembelajaran sehingga peserta didik harus membayar sendiri pelaksanaan proses belajar mengajar. Pembatasan ini termasuk pemberian dana operasional untuk pemeliharaan gedung sehingga kondisi bangunan yang ada kurang terpelihara. SKB sebagai satuan pendidikan berwenang menyelenggarakan program-program PAUD dan Dikmas baik di dalam maupun di luar SKB, tetapi Kepala SKB kurang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, baik dalam pengusulan anggaran, pengelolaannya, maupun pertanggungjawabannya.

Selain itu, sebagai persyaratan untuk mendapatkan NPSN, SKB atau PKBM perlu mendaftar dan sekurang-kurangnya memiliki 20 peserta didik. Hal ini menjadi permasalahan sendiri karena adanya keterbatasan dana. Dalam hal rumpun kursus ketrampilan, SKB punya rencana sendiri terhadap pembiayaannya berupa swadana (biaya sendiri). Jumlah SKB yang ada di Dapodik sebanyak 466 SKB, sementara yang sudah diakreditasi baru sekitar 90 SKB, karena kriteria sebagai persyaratan akreditasi belum bisa dipenuhi. Sementara itu, baru 390 SKB yang sudah mengunggah data jumlah peserta didiknya. Hal ini merupakan kendala dalam pemberian bantuan dana ke SKB dari Pusat (Direktorat PAUD dan Dikmas).

3. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas PNF melalui SKB sebagai satuan pendidikan

- a. Secara umum semua SKB kekurangan pamong belajar. Hal ini terjadi karena BKD tidak memprogramkan pengangkatan tenaga pamong. Oleh karena itu, SKB berharap dalam pengangkatan guru di wilayahnya, 10% dialokasikan untuk tenaga pamong.
- b. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bidang Perencanaan dan Pengendalian kebutuhan tenaga di Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas Ditjen GTK, Pemerintah (BKN) telah menyiapkan pengangkatan 2000 Pamong untuk tahun 2019 dengan syarat Pemda mengusulkan kebutuhan Pamong per tingkat jabatan. Hingga saat ini belum ada Pemda yang menyampaikan Data Kebutuhan Pamongnya. Untuk itu SKB perlu segera menyampaikan data kebutuhan Pamong.
- c. SKB perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan program-programnya. Upaya yang telah dilakukan berupa bantuan fisik melalui DAK perlu ditingkatkan untuk semua SKB.
 1. Untuk dapat NPSN, SKB atau PKBM perlu mendaftar dan sekurang-kurangnya memiliki 20 peserta didik.
 2. Keterbatasan dana membuat setiap SKB punya rencana sendiri dalam hal Program kursus, karena ketrampilan tersebut dibutuhkan masyarakat sebagai mata pencaharian sehingga mereka bersedia untuk membiayainya
 3. Jumlah SKB yang ada di Dapodik 466 SKB sementara yang sudah diakreditasi baru sekitar 90-an hal ini terjadi karena kriteria lainnya sebagai persyaratan akreditasi belum bisa dipenuhi. Dari 466 SKB baru 390 satuan yang sudah mengunggah data jumlah peserta didiknya. Hal ini merupakan kendala dalam pemberian bantuan dana ke SKB dari Pusat (Direktorat PAUD dan Dikmas).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data baik data kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa sejak SKB menjadi satuan pendidikan, terdapat perkembangan yang cukup baik, yaitu peningkatan penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal setiap tahunnya, baik jumlah kelompok belajar, maupun jumlah peserta didik. Dalam hal ini SKB menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki kendala/keterbatasan dalam memperoleh akses pendidikan.
2. PNF yang semula diperuntukkan bagi masyarakat bukan usia sekolah untuk mengakses pendidikan, saat ini sudah beralih pada masyarakat usia sekolah yang terkendala dalam mengakses pendidikan formal. Pada sebagian SKB peserta didik ini membayar iuran sekolah untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, sementara sesuai kebijakan Pemerintah anak miskin usia sekolah berhak memperoleh pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya.
3. Perkembangan jumlah program pendidikan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pamong belajar, baik sebagai pengajar maupun sebagai kepala SKB sehingga SKB kekurangan pamong/tutor.
4. Perangkat pengelolaan SKB sebagai satuan pendidikan belum sepenuhnya diberikan kepada SKB, khususnya dalam pengelolaan dana. Pendanaan SKB sebagai satuan pendidikan seharusnya mengacu pada pendanaan satuan pendidikan formal di mana sekolah memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanjanya (APBS) sesuai dengan kebutuhannya. Namun di beberapa kota sampel pendanaan SKB masih menginduk pada DIPA Dinas Pendidikan Kota sehingga SKB tersebut tidak dapat secara leluasa menyusun APBS-nya.
5. Kondisi sarana prasarana SKB di beberapa kota sampel terlihat kurang terawat. Hal ini terjadi karena sejak SKB menjadi satuan pendidikan tidak, semua kabupaten/kota mengalokasikan dananya untuk perawatan sarana dan prasarana di SKB. Hal ini terjadi pada SKB yang belum mandiri dalam penganggaran pendanaannya.

2. Rekomendasi

1. Keberlangsungan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal perlu dipertahankan/dilanjutkan bahkan didukung karena terbukti dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kendala atau keterbatasan. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dananya untuk membantu SKB mendanai biaya operasional sekolah (DAK untuk bantuan fisik) dan biaya operasional dalam bentuk BOS.
2. Peserta didik usia sekolah perlu mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya, bahkan dapat memperoleh beasiswa miskin (PIP) sebagaimana siswa di sekolah formal.
3. Perkembangan jumlah program pendidikan harus diimbangi dengan penambahan jumlah pamong belajar. Untuk itu Pemerintah harus segera mengangkat PNS Pamong untuk mengatasi kekurangan Pamong tersebut. Alokasi 2000 tenaga pamong oleh Direktorat GTK harus disambut oleh SKB dengan menyusun usulan kebutuhan tenaga pengajar dan disampaikan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kotanya, karena sampai saat ini belum ada kabupaten/kota yang melakukan usulan kebutuhan pamong belajar.
4. Dalam rangka memenuhi perangkat pengelolaan SKB sebagai satuan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan anggarannya, hendaknya seluruh SKB memiliki DIPAnya sendiri sehingga SKB leluasa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu hendaknya Pemerintah Daerah mengalokasikan dana operasional untuk merawat aset-aset yang dimiliki SKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, S., Anggani, D. dan Bharati, L. 2017. Building Teacher's Pedagogical Competence and Teaching Improvement through Lesson Study, *Arab World English Journal Arab World English Journal Arab World English Journal (AWEJ)*, 88(1), hlm. 66–78. doi: 10.24093/awej/vol8no1.6.
- Darussalam, N. dan Aceh, K. 2016. Implementasi Pembelajaran Berbasis Lesson Study terhadap Kompetensi Pedagogik dan Keterampilan Proses Sains Guru Biologi SMA Negeri 11 dan MA Negeri 3 Kota Banda Aceh, *Jurnal Biotik*, 4(1), hlm. 81–94.
- F. Jennings, D., Nagarathnam, B. dan B. Lawrence, F. 2018. Insights into a Graduate Degree in Industrial Distribution Offered by Distance Education, *Universal Journal of Management*, 6(3), hlm. 98–103. doi: 10.13189/ujm.2018.060303.
- Franitasari, M., Wilson and Maemunaty, T. 2018. Effectiveness Performance Tutor Program Equal Education Package C in Unitary Education Non Formal Sanggar Activity Learning Pekanbaru City, *Jom Fkip*, 5(2), hlm. 1–14. Tersedia di <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/viewFile/20784/20109>.
- Gibson, K. S. 2017. Student Teachers of Technology and Design : Can short periods of STEM-related industrial placement change student perceptions of engineering and technology?, *Design and Technology Education*, 17(1), hlm. 18–30. Tersedia di <https://libproxy.library.unt.edu:9443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ968193&scope=site>.
- Heidarinejad, M. dll. 2018. Personalized cooling as an energy efficiency technology for city energy footprint reduction, *Journal of Cleaner Production*. Elsevier Ltd, 171, hlm. 491–505. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.008.
- Hew, K. F., Qiao, C. dan Tang, Y. 2018. Understanding student engagement in large-scale open online courses: A machine learning facilitated analysis of student's reflections in 18 highly rated MOOCs, *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 19(3), hlm. 69–93. doi: 10.19173/irrodl.v19i3.3596.
- Irdianto, W. dan Putra, A. B. N. R. 2016. The Influence of Education and Economic Background Towards The Training Participants' Motivation and Study Result of UPT-PK Singosari Malang', in *AIP Conference Proceeding*, hlm. 1–7. doi: 10.1063/1.4965795.
- Jakubik, M. dan Berazhny, I. 2017. Rethinking Leadership and Its Practices in the Digital Era, in *Management International Conference*, hlm. 471–483.
- Kartika, S. G., Mustaqimah, U. dan Hardiyati. 2018. Penerapan Desain Inklusif pada Perancangan Sanggar Paud Inklusif di Yogyakarta, *Senthong*, 1(1), hlm. 1–9.
- Krasnova, H. 2018. *E-Learning as a Means of Social Inclusion : The Case of Syrian Refugees in Germany Abstract*, pada https://www.researchgate.net/publication/326185785_E-Learning, hlm. 1–9.
- Yakar, Z. dan Turgut, D. 2017. Effectiveness of Lesson Study Approach on Preservice Science Teachers' Beliefs, *International Education Studies*, 10(6), hlm. 36. doi: 10.5539/ies.v10n6p36.

MANAJEMEN SEKOLAH AMAN DAN MENYENANGKAN DALAM MENDUKUNG KUALITAS PEMBELAJARAN

Meni Handayani, Siswantari, Rahmah Astuti, Erni Hariyanti
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Tujuan kajian ini adalah untuk memetakan sekolah aman dan menyenangkan dan membuat konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Penelitian dilakukan di sekolah dasar yang sudah menjalankan sekolah menyenangkan. Berdasarkan temuan penelitian, dibuatlah konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan, lalu diuji oleh pakar pendidikan. Dasar dari konsep model ini adalah manajemen berbasis sekolah yang menyenangkan dengan berpegang pada tiga prinsip: 1) manajemen kepala sekolah, 2) peran serta orang tua dan masyarakat, dan 3) pembelajaran PAIKEM. Konsep model strategi manajemen Sekolah Aman dan Menyenangkan merupakan sekolah dengan pembelajaran yang holistik yang menerapkan sekolah yang aman bebas dari gangguan, hambatan ancaman dan bahaya, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak dengan memberikan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan untuk pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan siswa yang berkarakter, berprestasi, baik akademik maupun nonakademik. *Senang* diartikan sebagai anak senang belajar di sekolah dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan hati senang. Pembelajaran berpusat pada siswa dan menekankan pendidikan hati dan karakter untuk mengawali pendidikan pengetahuan. Ada konsep model strategi manajemen di sekolah besar, sekolah inklusi dan manajemen kelas besar, kecil serta kelas rendah dan kelas tinggi yang menyenangkan.

Kata kunci: manajemen, sekolah aman, sekolah menyenangkan, kualitas pembelajaran

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembelajaran yang menyenangkan membutuhkan persiapan lingkungan yang mendukung siswa merasa penting, aman, dan nyaman. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik dan psikis. Pengondisian ini, karena belajar akan efektif jika ada keamanan secara fisik dan emosional dalam diri anak. Lingkungan anak berarti segala situasi fisik yang diciptakan di sekitar ruang belajar yang meliputi penataan ruang kelas, aksesoris kelas, teman, musik, dan sebagainya. Pengondisian lingkungan fisik ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga melahirkan suasana lain bagi anak untuk belajar. Hal ini untuk memfasilitasi kebutuhan otak reptil manusia, yaitu komponen kecerdasan terendah dari spesies manusia yang bertanggung jawab atas fungsi motorik – sensorik – pengetahuan tentang realitas fisik yang berasal dari pancaindra (Bobby De Porter: 2000).

Menurut Novi Poespita Candra, sekolah harus mengubah fungsi dari institusi yang hanya mentransfer pengetahuan menjadi rumah kedua yang menciptakan ekosistem baru untuk penumbuhan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan. Inovasi pendidikan yang ditawarkan oleh GSM yang pertama adalah sistem pengembangan profesionalitas guru lebih inovatif. Hal yang kedua adalah pengelolaan sekolah yang

efektif, nyaman, dan menyenangkan. Tujuan kedua sistem tersebut adalah untuk melatih guru agar dapat mendidik siswanya memiliki keterampilan berpikir, bukan apa (materi) yang dipikirkan. Dengan demikian, orientasi belajarnya tidak hanya untuk meraih nilai akademik hafalan tinggi namun berubah untuk mengembangkan siswa yang cerdas, beretos kerja tinggi, bermoral, dan peduli lingkungan sosialnya.

Sekolah yang menyenangkan merupakan amanat yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Pasal 19 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil akreditasi BAN S/M tahun 2018, pencapaian standar PTK dan standar sarpras memiliki rata-rata skor paling rendah dibandingkan dengan enam standar lainnya. Penyebab rendahnya nilai PTK adalah kekurangan guru yang memiliki sertifikat pendidik (sebanyak 52,6% sekolah/madrasah memiliki guru yang bersertifikat hanya sebanyak 55%). Selain itu, guru mata pelajaran (seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga Kesehatan, dan Muatan Lokal) mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (sebanyak 36,1% sekolah/madrasah hanya memiliki 2 guru yang sesuai dan sebanyak 17,8% memiliki 1 guru yang sesuai) (BAN S/M 2018).

Rendahnya standar sarana prasarana akibat keterbatasan luas lahan sekolah (sebanyak 30,6% sekolah/madrasah memiliki lahan kurang dari sebanyak 80% dari ketentuan. Kekurangan prasarana yang lengkap dengan kondisi baik (sebanyak 22% sekolah/madrasah kekurangan prasarana yang lengkap dan baik).

Menurut Raharjo dkk. (2018), capaian mutu baik mutu yang berkaitan dengan proses pembelajaran, mutu tenaga pendidik, pengelolaan dan SKL di antara 33.664 SD. Variabel proses pembelajaran yang mewakili kualitas pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi lulusan yang merupakan hasil akhir. Artinya, standar kompetensi lulusan pada jenjang sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan proses pembelajaran dan peran guru melalui pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, kualitas pembelajaran perlu didukung oleh guru melalui manajemen yang baik. Manajemen yang baik berkaitan dengan sekolah aman dan menyenangkan merupakan salah cara untuk menghadapi era disrupsi. Menurut Muhammad Nur Rizal, *skill* yang dibutuhkan era disrupsi sudah tidak hanya *content skill* atau pengetahuan menjadi *life skill* seperti kemampuan memecahkan persoalan yang belum terdefinisi sebelumnya serta *social skill*, yaitu kemampuan bernegosiasi dan berkolaborasi. Kemampuan itu harus dilandasi oleh semangat empati terhadap lingkungan dan manusia lain. Hal itu dapat dilakukan dengan gerakan sekolah menyenangkan.

Konsep aman dan menyenangkan menumbuhkan karakter siswa pada pendidikan dasar. Hal ini akan membuka wawasan dan memotivasi siswa untuk belajar dengan karakter yang sehat, sehingga kualitas pembelajaran diharapkan dapat menjadi baik dengan berujung pada lulusan siswa yang berkompeten dan berkarakter. Untuk mewujudkan sekolah aman dan menyenangkan diperlukan manajemen sekolah yang menyeluruh berdasarkan manajemen sekolah untuk mendukung kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang timbul adalah: 1) Bagaimana peta SD berdasarkan indikator sekolah aman dan menyenangkan? 2)

Bagaimana strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan yang baik? 3) Bagaimana praktik baik metode mengajar yang menyenangkan? 4) Bagaimana konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan?

2. Tujuan

Berdasarkan permasalahan manajemen sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, maka tujuan penelitian adalah untuk:

- a) memetakan SD berdasarkan indikator sekolah aman dan menyenangkan;
- b) menganalisis strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan;
- c) menganalisis metode mengajar yang menyenangkan; serta
- d) membuat konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan abad ke-21

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam pelaksanaan pengelolaannya kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah (Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 51 ayat 1), dan komite sekolah merupakan instrumen kunci dalam pelaksanaannya.

MBS bertujuan untuk:

- a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif;
- b) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat;
- c) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah;
- d) meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah;
- e) memberdayakan potensi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas (Asep Suryana, 2018).

Dalam konsep MBS terdapat tiga hal penting yang menentukan pelaksanaan MBS, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dan peran serta orang tua dan masyarakat serta pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dijelaskan pada bagian kualitas pembelajaran.

2. Kepemimpinan Kepala sekolah

Salah satu bagian penting dari konsep MBS adalah manajemen personel sekolah, yang di dalamnya berkenaan dengan sumber daya manusia sekolah dan pola kepemimpinan kepala sekolah. Banyak kajian mengemukakan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif, tegas, dan berorientasi pada tujuan organisasi. Kriteria lain dari sekolah yang baik adalah keterampilan mengelola sekolah, selain kemampuan dan kemauan untuk memajukan sekolah tersebut.

Burns dalam Nurkolis (2003) mengemukakan kepemimpinan transformasional dalam konsep MBS. Kepemimpinan tipe ini hampir serupa dengan kepemimpinan terdistribusi yang digagas oleh Hallinger (2003). Pada konsep kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan kepala sekolah dicirikan dengan inisiatif untuk membangun komitmen bersama terhadap sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikutnya untuk berupaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Pemimpin dalam kepemimpinan pola ini akan mendorong kesadaran birokrasi untuk berbuat demi sasaran organisasi.

3. Peran Serta Masyarakat dan Orang Tua

Selain orang tua, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan juga sangat diperlukan. Uemura dalam tulisan Nurkolis, *Community Participation in Education*, menyatakan bahwa ada lima tujuan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga siswa biasa belajar lebih baik;
- b) keterbatasan sumber daya, khususnya pembiayaan dari pemerintah dalam pendidikan, sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan;
- c) upaya meningkatkan relevansi pendidikan karena perkembangan pendidikan selalu tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat;
- d) mendorong sistem pendidikan yang adil dengan menyediakan pendidikan inklusi (kaum tidak mampu, wanita, dan kaum adat);
- e) meningkatkan kerja sama sekolah dalam mengurangi potensi konflik yang terjadi di sekolah.

4. Pembelajaran yang Aman, Kreatif, Aktif, dan Menyenangkan

Sekolah yang aman dan menyenangkan juga bisa dilihat dari pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran bisa dilihat dari segi perencanaan dan pelaksanaan.

1) Perencanaan

Perencanaan pembelajaran berkaitan dengan penyiapan seluruh perangkat pembelajaran yang dirancang guru. Perangkat pembelajaran tersebut meliputi RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan alat penilaian, yang dibuat untuk mengakomodasi konsep pembelajaran yang menyenangkan. - Indikatornya adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan tujuan pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi dan potensi siswa yang bermakna
- b) Pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan berpusat pada siswa
- c) Pemilihan metode pembelajaran bervariasi dan mempertimbangkan karakteristik siswa dan materi
- d) Pemilihan media pembelajaran yang bermakna, yaitu memudahkan siswa memahami dan materi dan dapat menimbulkan rasa senang bagi siswa
- e) Pemilihan materi sesuai dengan pusat minat dan perkembangan siswa
- f) Perumusan kegiatan pembelajaran/langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan bagi siswa.

2) Pelaksanaan

Proses pembelajaran yang menyenangkan hendaknya menarik dan dapat memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga memungkinkan penguasaan yang optimal dan memberikan pengalaman yang berharga, baik bagi siswa maupun bagi guru. Untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang aman dan menyenangkan, Keller (2010) mengemukakan empat strategi yang perlu dilakukan guru, yaitu (1) mendorong dan memelihara perhatian siswa melalui *perceptual arousal*, *inquiry arousal*, dan *variability*; (2) membangun dan mendukung relevansi melalui *goal orientation*, *motive matching*, dan *familiarity*; (3) membangun keyakinan diri (*confidence*) siswa melalui *communicate learning requirements*, *success opportunity*, dan *personal control*; serta (4) mengelola hasil belajar yang mengacu pada kepuasan siswa melalui *intrinsic reinforcement*, *extinsic rewards*, dan *equity*. Dalam hal ini, siswa akan senang dan nyaman belajar apabila:

- a) guru mampu mengembangkan pengalaman belajar yang menarik dan memelihara perhatian siswa;
- b) siswa melihat kesesuaian antara pengalaman belajar dengan kebutuhan dan minat mereka;
- c) guru membantu meyakinkan siswa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk belajar serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang disajikan dalam proses pembelajaran; serta
- d) guru mampu mengembangkan proses pembelajaran yang membantu siswa untuk mencapai rasa puas atas penguasaan dengan memberikan balikan yang sesuai.
- e) Untuk dapat melaksanakan pembelajaran tersebut, guru hendaknya memilih metode dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai. Penggunaan media yang bervariasi dapat menyebabkan materi yang disajikan menjadi lebih menarik.

3) Penilaian

Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa.

- a) Guru menyampaikan kriteria penguasaan yang digunakan dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Selain itu, guru juga dapat menilai kemampuan dirinya sendiri.
- b) Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Siswa akan merasa lebih berkompeten apabila yang dinilai berhubungan dengan tujuan yang ingin mereka capai.
- c) Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan berbagai cara seperti tes tertulis, portofolio, unjuk kerja, unjuk tindak (berdikusi, berargumentasi, dan lain-lain), dan observasi,
- d) Guru perlu memberikan bukti bahwa yang menyebabkan perbedaan kemajuan belajar adalah usaha yang dilakukan siswa.
- e) Guru memberikan penghargaan terhadap siswa yang berhasil dalam melaksanakan tugas belajarnya. Siswa akan memandang dirinya mampu dalam bidang tertentu apabila mereka mendapat pengakuan akan keberhasilannya.
- f) Guru memberikan balikan terhadap hasil pekerjaan siswa. Balikan konstruktif dapat menurunkan perasaan ketidakberdayaan dan meningkatkan kemungkinan siswa untuk terus berusaha.

5. Sekolah Aman

Pengertian sekolah aman kebanyakan dihubungkan dengan keadaan bencana alam yang sering terjadi di suatu daerah dan berdampak pula terhadap sekolah. Pemahaman sekolah aman dalam tulisan ini lebih dikaitkan pada kondisi psikis anak, yaitu terhindar dari tindakan kekerasan. Tukidja dkk (2004) menjelaskan bahwa sekolah aman adalah suasana sekolah yang bebas dari gangguan, hambatan, ancaman, dan bahaya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik (sosial), yang secara langsung dapat memengaruhi proses belajar-mengajar pada khususnya dan proses pendidikan pada umumnya.

Faktor keamanan di sekolah lainnya yang tidak kalah penting adalah tersedianya makanan/jajanan yang aman di lingkungan sekolah. Mengonsumsi makanan/jajanan yang tidak sehat secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi kesehatan siswa, yang dalam jangka panjang akan berdampak tidak baik bagi kesehatan (Setyawan, 2014 dalam Iklima, 2017). Sekolah aman adalah aman secara fisik, (seperti struktur bangunan kukuh), aman bencana, amanm makanan sehat; serta aman secara psikis, yakni aman dari kekerasan, *bullying*, dan aman berekspresi.

6. Sekolah Nyaman dan Menyenangkan

Baharuddin (2007:27) menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkungan nonsosial (lingkungan fisik) sekolah menyenangkan adalah lingkungan alamiah yang memiliki kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu lemah/gelap, serta suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan fisik sekolah nyaman dan menyenangkan dalam pandangan Hardware memiliki alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, lapangan bermain, perpustakaan, buku yang sesuai dengan usia siswa dan judul yang bervariasi, toilet, ketercukupan sumber air, ruang UKS, dan kantin sehat. Kurikulum sekolah, peraturan sekolah, buku panduan, dan silabus juga harus tersedia. Semua lingkungan fisik ini harus dalam kondisi bersih, rapi, indah, dan sehat.

Saroni (2006:82) menjelaskan bahwa lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antarpersonal di lingkungan sekolah. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para siswa dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungannya, yaitu antarwarga, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan antarpersonal di sekolah. Siswa yang merasa dirinya bahagia biasanya kegiatan akademiknya lebih baik daripada siswa yang tidak bahagia. Siswa yang merasa puas dengan tempatnya belajar akan memperlihatkan prestasi akademik yang lebih baik daripada yang tidak puas.

Menurut Konu dan Rimpela (2002), yang dikutip oleh Kartasasmita, situasi tempat individu belajar yang sehat akan memberikan perasaan senang dan dapat membentuk sikap positif siswa. Perasaan senang dan puas dapat menurunkan tingkat stress siswa dan berdampak meningkatkan prestasi mereka. Kartasasmita dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada kecenderungan keterkaitan antara ruminasi dan *school wellbeing*.

Pengertian *school well-being*, Allardt dalam Yuanah, (2015) berkaitan dengan kesejahteraan atau keadaan yang memungkinkan individu dapat menemukan kepuasan kebutuhan dasarnya, baik material maupun nonmaterial. Konsep kesejahteraan, menurut Konu dan Rimpelä (dalam Yuanah, 2015) lebih menekankan kemampuan individu untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara positif, terutama tentang kualitas hubungan sosial sehingga merasa sejahtera dengan lingkungannya. Konsep *school well-being* yang dikembangkan oleh Konu dan Rimpelä terbagi atas empat kategori sebagai berikut.

a) Kondisi Sekolah

Kondisi kampus mencakup lingkungan fisik, baik di dalam maupun di sekitar kampus. Aspek lainnya adalah aspek lingkungan belajar yang mencakup kurikulum dan organisasi di kampus, jadwal pelajaran, hukuman, serta fasilitas yang tersedia, termasuk pelayanan sekolah. (Konu dan Rimpelä, 2002, h. 84).

b) Hubungan Sosial (*Loving*)

Loving di sini diartikan sebagai hubungan sosial mahasiswa yang meliputi iklim kampus, hubungan sosial antara mahasiswa dan pengajar, hubungan antarteman sebaya, dinamika kelompok, *bullying*, serta hubungan kampus dan rumah (orang tua) (Konu dan Rimpelä, 2002: 84).

c) Pemenuhan Diri (*Being*)

Being atau pemenuhan diri adalah rasa kebersamaan yang terjalin dalam kehidupan anggota/masyarakat kampus. Rasa hormat pada pengajar, orang tua, dan teman sebaya merupakan isu yang sangat penting dalam pergaulan dan kehidupan mahasiswa di kampus (O'Brien, 2008 : 137).

d) Status Kesehatan (*Health*)

Health atau status kesehatan mengacu pada gejala mental dan fisik. Dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial yang menyenangkan merupakan lingkungan pergaulan antarmanusia di sekolah, yang menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta didik serta orang lain yang terlibat dalam interaksi pendidikan.

Interaksi di sekolah adalah interaksi antarsiswa, antara siswa dan guru, serta antara siswa dan perangkat lainnya.

Lamanya peserta didik di sekolah mengharuskan sekolah menjadi tempat nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Senang di sini diartikan anak senang belajar dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan hati gembira, Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) merupakan gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri, dan menyenangkan di sekolah.

Tahapan upaya membangun sekolah yang menyenangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengubahan cara pandang bahwa sekolah adalah tempat yang nyaman bagi peserta didik dalam mengembangkan aktivitasnya untuk menciptakan semangat kebersamaan penciptaan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar.
- 2) Lingkungan fisik sekolah pada semua titik memberi ruang kepada peserta didik dalam menjaga eksistensi dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut dan rasa tidak enak lainnya.
- 3) Pembelajaran yang menyenangkan berlangsung secara dua arah dan memberi ruang kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- 4) Pelibatan orang tua/wali peserta didik dan komunitas lainnya dalam menyusun program pencapaian sekolah yang menyenangkan.

7. Kualitas Pembelajaran

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan meningkatkan motivasi intrinsik dengan pengelolaan yang benar. Menurut Eric Jensen (2008), ada tujuh belas hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi intrinsik: 1) memenuhi kebutuhan dan sasaran belajar; 2) memberikan rasa kontrol dan kesempatan pada siswa untuk berekspresi dan dihargai; 3) mendorong dan menanamkan ikatan sosial positif dalam diri siswa; 4) mendukung rasa ingin tahu siswa; 5) melibatkan emosi yang kuat dalam diri siswa; 6) mendukung asupan nutrisi yang layak; 7) menyertakan intelgensia ganda; 8) berbagi cerita sukses; 9) memberikan penghargaan; 10) meningkatkan frekuensi umpan balik; 11) mengelola kondisi psikologis; 12) memberikan harapan untuk sukses; 13) memberikan peran dan rasa senang untuk belajar, 14) menghargai kesuksesan dan capaian yang menggembirakan 15) memelihara pengalaman belajar yang aman secara fisik dan emosional; 16) menghargai gaya belajar individu 17) menanamkan keyakinan positif tentang kemampuan dalam memahami konteks.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif diawali dengan studi pustaka, kajian teori, penelitian empiris, dan model yang relevan dengan masalah penelitian. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis data sekunder dari data Penjaminan Mutu Pendidikan dari SD di seluruh Indonesia. Juga dilakukan diskusi serta wawancara dengan sekolah yang sudah melaksanakan gerakan sekolah menyenangkan dan sekolah yang sudah menerapkan program pendidikan karakter.

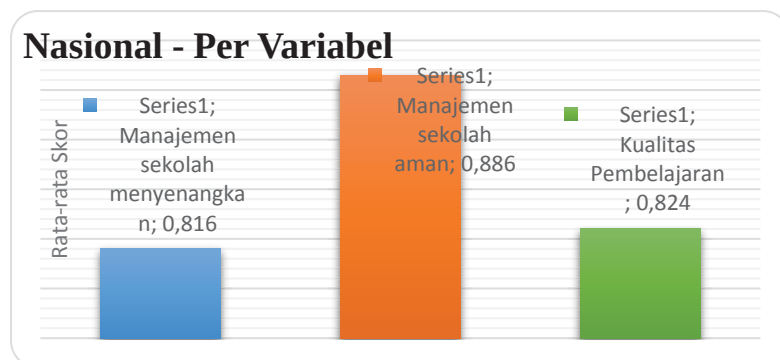
Penelitian tentang strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan terbukti dari kualitas pembelajarannya, baik prestasi akademik maupun nonakademik. Hal ini dilakukan untuk menemukan strategi manajemen dipadu dengan konsep *safer school* dan *joyfull learning* (pembelajaran yang menyenangkan). Berdasarkan hasil temuan, dibuatlah konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan, kemudian diuji oleh pakar pendidikan dari perguruan tinggi, terutama PGSD.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan FGD dan observasi kelas. Studi literatur serta hasil FGD dan observasi dianalisis untuk memperbaiki buram konsep model yang sudah dibuat.

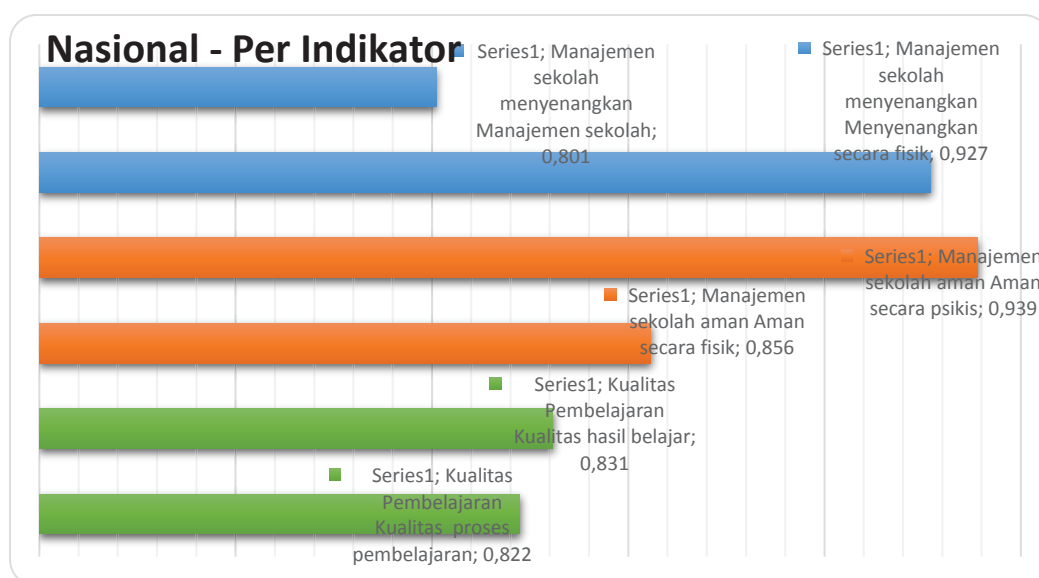
D. HASIL PEMBAHASAN

1. Peta SD Berdasarkan Indikator Sekolah Aman dan Menyenangkan

Berdasarkan indikator sekolah aman dan menyenangkan, dari 148.000 SD yang menjawab sekitar 122.000 – 123.000. Hal ini berarti SD selebihnya belum diketahui hasilnya. Secara nasional pencapaian sekolah aman dan menyenangkan adalah sebagai berikut:



Grafik 1 Pencapaian sekolah aman dan menyenangkan secara nasional



Grafik 2 pencapaian sekolah aman dan menyenangkan per indikator

Pada bagian kualitas pembelajaran terlihat subindikator paling tinggi dan paling rendah sebagaimana disebut dalam tabel di bawah ini.

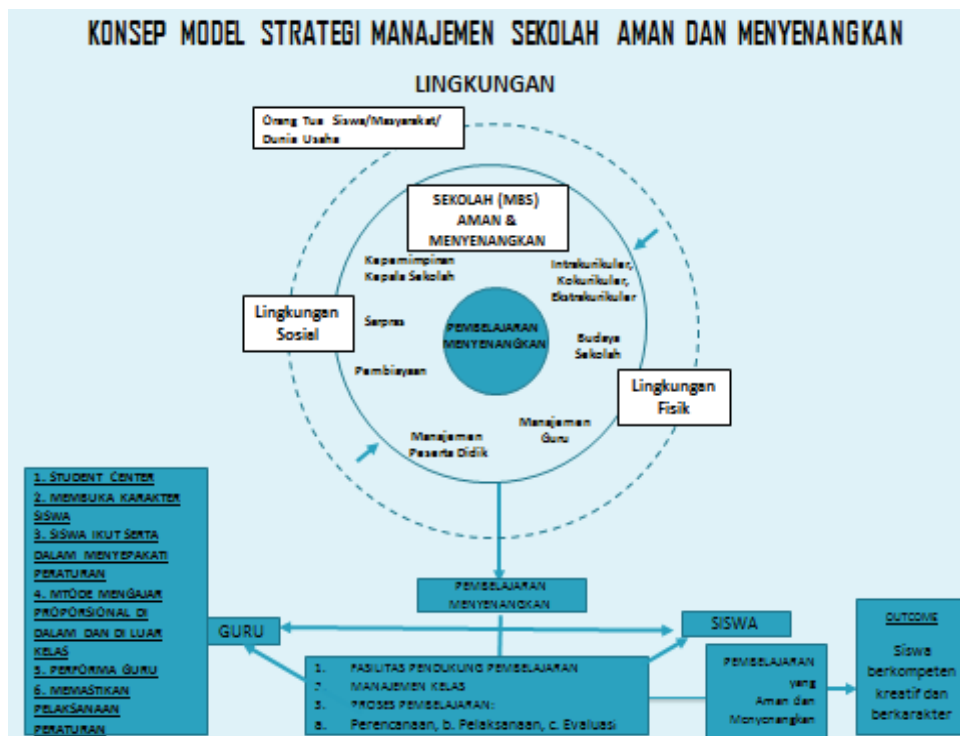
Tabel 1 Nilai Pencapaian Kualitas Proses Pembelajaran Per Indikator

Kualitas proses pembelajaran	1.	Manajemen kelas dilaksanakan secara professional, transparan, dan demokratis	0.93
	2.	Menutup pembelajaran	0.77
	3.	Penilaian otentik	0.62
	4.	Pemantauan proses pembelajaran	0.56
	5.	Supervisi proses pembelajaran kepada guru	0.80
	6.	Evaluasi proses pembelajaran	0.60
	8.	Penilaian pendidikan	0.87
	9.	Metode mengajar yang menyenangkan (ragam metode, media, dan sumber belajar)	0.75

Nilai terendah dalam kualitas proses pembelajaran adalah pemantauan, evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian otentik. Selain itu, metode mengajar yang menyenangkan (ragam metode, media, dan sumber belajar) pencapaiannya adalah 75% dari kurang lebih 123.000 SD. Hal ini belum termasuk sekolah yang tidak mengisi sehingga masih banyak sekolah selisih dari 148.000 SD yang belum diketahui keadaannya.

2. Konsep Model Strategi Manajemen Sekolah Aman dan Menyenangkan

Berdasarkan hasil analisis strategi sekolah aman dan menyenangkan dan metode pembelajaran menyenangkan, konsep model yang sudah tersusun disesuaikan dengan strategi sekolah yang bernilai “baik” dan telah melaksanakan prinsip sekolah aman dan menyenangkan.



Gambar 1 Konsep Model Strategi Manajemen Sekolah aman dan menyenangkan

Sekolah aman dan menyenangkan dikelola berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang semestinya memperhatikan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Artinya, sekolah aman, baik secara fisik maupun psikis, dan sekolah menyenangkan, baik secara fisik maupun psikis. Sekolah dan pembelajaran yang menyenangkan disukai oleh guru dengan prinsip 1) student center; 2) membuka karakter siswa; 3) mengikutsertakan siswa dalam menyepakati peraturan; 4) metode mengajar proporsional di dalam dan di luar kelas; 5) performa guru: kompetensi, cara berbicara, penampilan, tempo, dinamik, kemampuan entertainment; dan 6) memastikan terlaksananya peraturan. pembelajaran aman dan menyenangkan yang membutuhkan a) fasilitas pendukung pembelajaran; b) manajemen kelas; serta c) proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Sekolah aman dan menyenangkan adalah sekolah yang aman dan bebas dari gangguan, ancaman dan bahaya, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak. Karena lingkungan belajar menyenangkan dan berkualitas, sekolah akan menghasilkan siswa berkarakter, berprestasi, baik akademik maupun nonakademik. Kondisi senang di sini dapat diartikan bahwa anak senang belajar dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan hati senang.

Tujuan manajemen sekolah aman dan menyenangkan adalah menciptakan sekolah yang aman secara fisik dan psikis, nyaman, bersih, sejuk, asri, dan indah. Dalam hal ini, siswa menyukai pembelajaran yang menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri dan menyenangkan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Hasil belajar siswa tidak hanya bertumpu pada segi kognitif, tetapi juga sikap, karakter, dan keterampilan.

Indikator sekolah aman secara fisik terlihat melalui 1) struktur bangunan, lokasi, dan akses 2) makanan aman, bersih, dan sehat; serta 3) fasilitas ramah anak. Indikator sekolah aman secara psikis ditandai oleh 1) aman dari *bullying*, rasa takut, dan, sentimen SARA dan 2) aman berekspresi dan aman dari pencurian

Indikator sekolah menyenangkan secara fisik tampak melalui 1) lingkungan sekolah nyaman, bersih, indah, tidak bising, udara segar, pencahayaan cukup, dan ada fasilitas siswa beraktivitas; 2) ketercukupan fasilitas belajar; serta 3) ketersediaan sarana prasarana pendukung. Indikator sekolah menyenangkan secara psikis dapat dilihat dari 1) metode belajar menyenangkan; 2) hubungan sosial guru-siswa, guru-guru, siswa-siswa, dan orang tua-warga sekolah secara harmonis; 3) program sekolah mendukung dan mengembangkan potensi siswa; serta 4) pendidikan karakter terintegrasi

Perlu diketahui bahwa ada lima belas indikator pembelajaran yang menyenangkan:

- 1) metode, media, dan sumber belajar bervariasi;
- 2) *performance* guru: kompetensi, kemampuan variasi (suara, interaksi, dan posisi);
- 3) menciptakan dekorasi ruangan yang berbeda;
- 4) memotivasi siswa (menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat);
- 5) mengikutsertakan siswa dalam menyepakati peraturan;
- 6) mengutamakan pendidikan hati dan karakter untuk mengawali pendidikan pengetahuan;
- 7) pemastian dilaksanakannya peraturan;
- 8) *student center*;
- 9) proporsi belajar di dalam dan luar kelas (kelas inspirasi);
- 10) kegiatan intrasekolah dan ektrasekola saling mendukung;
- 11) beban guru (jumlah siswa /rombel) jumlah siswa per rombel yang sesuai dengan luas kelas dan nyaman;
- 12) mengatur posisi tempat duduk secara berkala;
- 13) memberikan perhatian yang sama pada semua siswa;
- 14) memperhatikan perbedaan karakteristik siswa;
- 15) memperhatikan gerak motorik siswa.

3. Strategi Implementasi konsep model manajemen sekolah aman dan menyenangkan mencakup hal berikut

a. Perencanaan dan Persiapan

- 1) Analisis kebutuhan: SDM (termasuk kompetensi dan paradigma yang dianut)
- 2) Sekolah menyenangkan diawali dengan menggerakkan dan menyadarkan hati guru untuk menciptakan proses belajar-mengajar kreatif, aktif, dan menyenangkan. Kasus di SD Muhammadiyah Macanan, Kabupaten Sleman, kepala sekolah sebagai agen perubahan dibantu oleh narasumber yang kompeten agar guru memahami metode pembelajaran yang dapat membuat siswa senang belajar. Pengawasan kepala sekolah adalah kunci utama untuk perbaikan proses pembelajaran dengan cara membicarakannya secara bersama-sama dengan guru dan narasumber atau ahli.

- 3) Visi misi: berkarakter, mengutamakan proses pembelajaran yang disukai oleh siswa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, menciptakan suasana sekolah nyaman dan aman, serta menciptakan kepedulian terhadap lingkungan
- 4) Program sekolah yang mengembangkan kompetensi minat dan bakat siswa serta karakter siswa.
- 5) Pelibatan secara penuh orang tua/wali peserta didik dan komunitas dalam penyusunan program sekolah
- 6) Penciptaan lingkungan belajar dan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan
- 7) Promosi dan membangun kesadaran guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun sekolah sebagai tempat yang menyenangkan
- 8) Perubahan cara pandang peserta didik bahwa sekolah itu merangkul dan menyertai aktivitas peserta didik, dengan mengundang para ahli sebagai narasumber yang dapat mencerahkan.
- 9) Lingkungan fisik yang positif memberi ruang kepada peserta didik dalam mengembangkan potensinya tanpa rasa takut.
- 10) Penyediaan fasilitas dalam pengembangan gerak motorik siswa
- 11) Pembelajaran yang menyenangkan berlangsung dua arah dan memberi ruang kepada peserta didik turut serta mencapai tujuan pembelajaran.

b. Pelaksanaan

Tiga hal yang penting dalam pelaksanaan model sekolah aman dan menyenangkan yang berpijak pada MBS adalah kepemimpinan kepala sekolah, dan orang tua, dan masyarakat atau peran pemerinatah daerah.

1) Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah seyogianya dapat menciptakan a) semua warga sekolah memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah; b) hubungan antarsiswa akrab dan hangat; c) hubungan dengan warga sekolah akrab dan hangat; d) hubungan dengan orang tua siswa baik; e) adanya rasa nyaman, saling menghargai dan saling menghormati. Sebagai agen perubahan, kepala sekolah harus inovatif untuk perbaikan sekolah dengan cara kerja yang bervariasi dan mudah dilaksanakan oleh guru dan siswa. Inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, seperti “PR Kreatif Abad Ke-21”. Banyak hal yang sifatnya tematik dapat dilakukan oleh siswa di rumah sebagai PR. Contohnya mengamati suasana di pasar dapat dikaitkan dengan tema menghitung, berkomunikasi, dan pendidikan moral. Dalam hal ini, anak terlatih melakukan pengamatan, berpikir, dan bertindak.

2) Peran Serta Orang Tua dan Masyarakat

Trisentra pendidikan berbasis kelas (orang tua, guru, dan siswa) memperlihatkan bahwa .pembelajaran di sekolah, kelas, dan rumah saling mendukung. Artinya, partisipasi orang tua dalam membimbing siswa belajar di rumah menjadi sesuatu yang penting.

Berdasarkan pengalaman Kepala SD Macanan Sleman, di Australia, ada *volunteer* orang tua siswa yang mengajar anak yang lamban belajar. Orang tua yang anaknya bersekolah di Australia dapat menceritakan keadaan anaknya di sekolah, begitu juga dengan anaknya boleh menceritakan apa yang dia rasakan di sekolah. Artinya, ada komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa. Komunikasi sekolah dengan orang tua dilakukan dua bulan sekali. Orang tua berkonsultasi dengan wali kelas. Selain itu, ada juga komunikasi antara orang tua dan anak (parenting). Jadi, pihak orang tua berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan sekolah, seperti dukungan dana, pemikiran, barang, tenaga, keamanan, atau sebagai narasumber. Hal yang sama dapat juga dilakukan oleh komite sekolah.

3) Peran Serta Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Manajemen kepala sekolah akan lebih maksimal hasilnya jika didukung oleh pemerintah daerah setempat. Seperti halnya di Kota Surabaya, Pemerintah Kota mendukung pelaksanaan sekolah bersih, sehat, dan menyenangkan. Walaupun tidak berupa slogan, kegiatan itu dilakukan secara nyata. Contoh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang sekolah aman dan menyenangkan adalah:

- 1) Pemerintah Kota Surabaya memberikan bendera hitam kepada sekolah yang tidak menjaga kebersihan dan kerapian.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemeliharaan dan perbaikan gedung sekolah berdasarkan laporan kepala sekolah tentang sarana gedung yang harus diperbaiki.
- 3) Kepala sekolah melakukan pemeliharaan dan perbaikan ringan gedung sekolah dengan menggunakan dana BOS.
- 4) Psikolog melakukan tes tingkat kestresan bagi guru. Jika terdeteksi stress, guru disuruh istirahatkan dan dilakukan perawatan hingga sehat dan dapat mengajar kembali.. Pihak puskesmas melakukan kunjungan ke sekolah secara berkala paling sedikit seminggu sekali
- 5) Adanya program LOT dan LOS untuk memberikan edukasi kepada orang tua siswa sebelum siswa masuk sekolah. Bagi orang tua yang putra-putrinya baru masuk sekolah dasar biasanya sangat protektif sehingga diberikan pengertian oleh sekolah bahwa semua anak adalah anak kita.
- 6) Pihak perpustakaan dari pemerintah kota melakukan pendampingan petugas perpustakaan sekolah dalam merapikan administrasi perpustakaan dan melatih tenaga perpustakawan sekolah tiga kali dalam seminggu.
- 7) Pihak kepolisian secara berkala mendatangi sekolah untuk memberikan arahan tentang bahaya narkoba, kedisiplinan, dan ketertiban.
- 8) Sekolah yang memiliki jumlah siswanya sedikit digabung dengan sekolah lain sehingga manajemen sekolah menjadi lebih ramping dan lebih mudah mengaturnya.

4) Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari kualitas proses dan hasil pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran indikatornya adalah:

- a) manajemen kelas dilaksanakan secara professional, transparan, dan demokratis dengan cara:
 - (1) membuat rencana pembelajaran;
 - (2) mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran dengan cara:
 - (a) melakukan kegiatan positif secara rutin sesuai dengan potensi dan hobi - siswa;
 - (b) melakukan olah fisik sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu bersama siswa;
 - (c) menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan;
 - (d) menyesuaikan pengaturan tempat duduk siswa dan sumber daya lain yang sesuai;
 - (e) menyampaikan garis besar cakupan materi.
 - (3) melaksanakan proses pembelajaran;
 - (4) menutup pembelajaran;
 - (5) melakukan penilaian otentik;
 - (6) melakukan pemantauan hasil pembelajaran;
 - (7) melakukan supervisi;
 - (8) menindaklanjuti hasil pengawasan.

- b) menggunakan metode mengajar yang menyenangkan (ragam metode, media, sumber belajar), memberikan pembelajaran yang tidak berorientasi pada hasil “nilai” (tetapi kompetensi dan pengembangan potensi siswa), serta memiliki kemampuan memotivasi).
- c) memperlihatkan *performance* guru (kepribadian dan sosial), suara yang jelas, dan interaksi yang baik.
- d) memiliki kegiatan intrasekolah dan ektrasekolah yang saling mendukung.
- e) memiliki pendidikan karakter.
- f) memperhatikan beban guru tentang keseimbangan jumlah siswa, ruang kelas, dan kenyamanan.

Kualitas hasil belajar dapat dilihat dari hasil prestasi siswa, baik akademik maupun nonakademik. Kualitas hasil belajar tidak hanya difokuskan pada aspek akademik, tetapi juga sikap dan keterampilan serta motorik.

Menyampaikan pengetahuan dengan memelihara kreativitas siswa adalah bagian dari metode pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, siswa diberi kesempatan berekspresi tanpa rasa takut. Siswa belajar dengan kesadaran tinggi dan mandiri dan dapat menentukan sendiri apa yang terbaik bagi mereka. Belajar bagi siswa tidak merupakan beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Evaluasi berupa pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dibantu oleh guru senior. Bagi sekolah dengan jumlah siswa lebih dari tujuh ratus orang dapat dibentuk tim yang terdiri tiga lingkaran. Lingkaran pertama terdiri atas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Lingkaran kedua adalah koordinator jenjang, yaitu koordinator guru kelas 1 sampai kelas 6. Lingkaran ketiga adalah pelaksana, yaitu guru dan tenaga kependidikan.

- 1) Kepala sekolah melakukan pertemuan rutin setiap minggu untuk mengevaluasi masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan program sekolah.
- 2) Setiap guru melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan di kelas
- 3) Kepala sekolah meminta pendapat kepada guru lain agar ikut memberikan masukan
- 4) Kepala sekolah memutuskan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang ditemukan di kelas

Ada tiga macam konsep model strategi manajemen sekolah, yaitu strategi manajemen sekolah besar, strategi manajemen sekolah multikultural, dan strategi manajemen sekolah inklusi.

1) Strategi Manajemen Sekolah Besar (Rombongan Belajar di Atas 28)

- a) Manajemen sekolah dengan jumlah rombongan sesuai dengan jumlah ruang kelas dan jumlah guru: Kepala sekolah membentuk tim, seperti wakil kepala sekolah bidang sarana, kurikulum, dan kesiswaan.
- b) Manajemen sekolah dengan jumlah rombongan sesuai dengan jumlah guru, tetapi jumlah ruang kelasnya kurang: Jika sekolah yang diselenggarakan pagi dan siang hari, kepala sekolah harus berada di sekolah sampai sore dan menunjuk satu orang guru untuk koordinator pada siang hari.
- c) Manajemen sekolah besar sebagai akibat penggabungan (*regrouping*) membutuhkan kemampuan tersendiri. Sekolah menjadi besar karena menggabungkan beberapa guru dari sekolah yang berbeda-beda. Untuk itu, kepala sekolah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap yang sabar, dan bisa mencairkan perbedaan hingga suasana sekolah kondusif dan tujuan pembelajaran tercapai.

2) Strategi Manajemen Sekolah Multikultural

Sekolah yang siswanya berasal dari berbagai suku dan agama perlu difasilitasi dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa perlu dibekali semangat kebersamaan, nasionalisme, toleransi, dan satu dalam keragaman. Sekolah negeri sebagian besar sudah menyelenggarakan pendidikan multikultural dan multiagama, tetapi belum seluruhnya dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan sarana seperti ruangan belajar sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa. Sekolah yang dapat ditiru penyelenggaraan sekolah multikultural SD Dharma Karya UT di Tangerang Selatan. Misi sekolah tersebut adalah “menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing dalam pembelajaran intra dan ekstra kurikuler”. Sekolah menyediakan ruang agama bagi sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa, yaitu: ruang agama Kristen, ruang agama Hindu, ruang agama Khatolik, dan musala.

3) Manajemen Sekolah Inklusi

Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi dan menciptakan komunitas ramah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah inklusi membutuhkan tiga guru pendamping (*shadow teacher*), satu orang untuk siswa yang kurang pintar, satu orang untuk siswa yang pintar, dan satu orang untuk siswa yang reguler. Manajemen sekolah inklusi dibagi menjadi manajemen kesiswaan, manajemen proses, manajemen kurikulum, dan manajemen guru. Pembelajaran di Kelas Rendah (Kelas 1, 2, dan 3) secara umum dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Pendidikan karakter dilakukan dengan berintegrasi pada kegiatan lainnya sesuai dengan tingkat kelas, misalnya siswa kelas 3 anak tidak dilepas menuju kolam renang. Dengan mengacu pada teori perkembangan kognitif Piaget bahwa anak yang duduk di kelas rendah berada pada tahap konkret operasional. Siswa yang di kelas yang lebih tinggi berada pada tahap formal operasional.
- 2) Untuk kelas dengan jumlah siswa 25 ke bawah, pengaturan tempat duduk dapat bersifat informal, misalnya bangku dan tempat lesehan di lantai. Rancangan kelas ini memungkinkan siswa belajar dengan gaya masing-masing. Setiap kelas dan setiap kegiatan pembelajaran adalah unik. Untuk itu, guru merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan kekhasan dan kebutuhan kelas. Tugas yang diberikan kepada siswa sifat dan tingkat kecerdasan dan keunikan mereka.
- 3) Pembelajaran calistung (membaca, menulis, dan berhitung) diutamakan sebagai dasar untuk memahami materi pembelajaran tahap berikut. Siswa dipastikan sudah dapat membaca pada kelas awal. Pembelajaran membaca dapat dibantu dengan lebih dahulu mengajarkan vokal dan konsonan yang sering digunakan. Penggunaan bahasa yang familiar bagi siswa dapat digunakan oleh guru dalam mengajar.

Pembelajaran di kelas tinggi (kelas 4, 5, dan 6) dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

- 1) Kelas atas, misalnya kelas 5, sudah dapat melakukan semacam penelitian secara berkelompok dan eksperimen di luar kelas. Setiap tahun siswa memiliki enam unit penelitian yang harus dikerjakan atau semacam tugas akhir dalam bentuk laporan/ karya tulis
- 2) Pendidikan karakter dilakukan dengan berintegrasi pada kegiatan lainnya. Semakin tinggi tingkat kelas anak, penumbuhan sikap mandiri lebih ditekankan.
- 3) Pengaturan tempat duduk sudah lebih formal, lebih disiplin dan tertata, juga dapat tugas siswa dapat dikerjakan di lantai untuk mata pelajaran tertentu.
- 4) Pengadaan program peer mediator bagi siswa yang mengalami konflik antarteman. Mereka terdiri atas siswa kelas 3 sampai kelas 5 yang sudah diseleksi secara ketat dan atas persetujuan orang tua siswa. Kelompok peer mediator harus menunjukkan perilaku yang baik karena merupakan contoh/teladan bagi siswa lain.

- 5) Pembelajaran sebaiknya menekankan *inquisitory* (mencari, lalu menemukan) melalui keterampilan proses. Aspek kognitif yang lebih tinggi perlu dikembangkan, seperti aspek analisis, sintesis, dan evaluasi. Oleh karena itu, pengajaran yang kreatif sangat dianjurkan untuk menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis. Dengan pendekatan ini siswa belajar mencari permasalahan sederhana yang terjadi di sekitar sekolah, kemudian mereka mencari solusinya. Untuk itu, siswa dituntut untuk harus banyak mengeksplorasi, membaca, menulis, mengajukan pertanyaan, membuat paparan, dan berdiskusi.

E. PENUTUP

- 1) Pencapaian tujuan sekolah berdasarkan indikator sekolah aman dan menyenangkan pada aspek kualitas pembelajaran nilai terendah dalam proses pembelajaran adalah pemantauan, evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian otentik. Selain itu, metode mengajar yang menyenangkan (ragam metode, media, dan sumber belajar) pencapaiannya adalah 75% dari kurang lebih 123.000 SD. Hal ini belum termasuk sekolah yang tidak mengisi, sehingga masih banyak sekolah selisih dari 148.000 SD yang belum diketahui keadaannya.
- 2) Berdasarkan analisis di atas terbentuklah konsep model strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan.
- 3) Konsep model strategi tersebut berupa definisi, tujuan, dan indikator sekolah aman dan menyenangkan. Manajemennya dibagi atas tiga komponen, yakni: kepemimpinan kepala sekolah, peran serta orang tua dan masyarakat, serta pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.
- 4) Konsep model mengemukakan manajemen di tingkat sekolah, manajemen kelas, serta pembelajaran di kelas rendah dan di kelas tinggi.
- 5) Strategi manajemen sekolah terdiri atas manajemen sekolah besar, manajemen sekolah multikultural, dan manajemen sekolah inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Suryana.2018. Suryana/”Manajemen Berbasis_Sekolah”. [http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur_Administrasi pendidikan_/197203211999031asep_](http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur_Administrasi_pendidikan_/197203211999031asep_) Diunduh 4 Mei 2018.
- Badan Akreditasi Nasional S/M. “Ringkasan Eksekutif: Capaian dan Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Hasil Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2018”
- Bobbi De Porter. 2000. *Quantum Teaching*.Bandung : Kaifa,, 19.
- Jensen Eric. 2008. *Brain Based Learning: Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak, Cara Baru dalam Pengajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallinger, Philip. 2003. “Leading Educational Change: Reflections on the Practice of Instructional and Transformational Leadership.” *Cambridge Journal of Education* 33 (3):329–52.
- Iklima, Nurul. 2017. “Gambaran Pemilihan Makanan Jajanan pada Anak Usia Sekolah Dasar”. *Jurnal Keperawatan BSI*, Vol.5 No.1 April 2017. Bandung.
- Kartasasmita, Sandi. “Hubungan Antara School Well-being dengan Rumination. Maret 2017”. Conference Paper. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, Jakarta
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo
- Rahardjo Sabar Budi dan Meni Handayani. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balitbang Kemdikbud.

Tukidja, Johanes, Siswo Wiratno, Yenny Dahliani, dan Idris H.M. Noor. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Membangun Sekolah Lebih Aman, Nyaman, dan Menyenangkan (Safer School) SMP dan SMA*. Edisi Perbaikan. Jakarta: Pusat Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 3	Panel No: 1,2, 3
Ruang	: Pajajaran 2	
Waktu	: 14.26 –14.50	WIB
Judul Penelitian	:	
	1. Manajemen Sekolah Aman dan Menyenangkan Dalam Mendukung Kualitas Pembelajaran.	
	2. Evaluasi Pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Formal.	
	3. Model Klinik Pendampingan Untuk Mendukung Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru	
Penyaji	:	
	1. Meni Handayani, SS., M.Pd.	
	2. Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si.	
	3. Prof. Anik Ghufroon, M.Pd.	
Pembahas	: Bahrul Hayat, P.hD.	
Moderator	: Rahmah Astuti, S.Psi. M.Pd.	
Notulis	: Lisna Sulinar Sari	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Meni Handayani Tuntutan kemampuan siswa abad 21: problem solving, collaboration, critical thinking, communication creativity dan innovation. Tuntutan industry 4.0 disrupsi pasar kerja yg sekarang banyak pekerja yang akan diganti-kan oleh mesin, oleh sebab itu perlu pembe-lajaran yang berbeda untuk tetap kualitas belajar, siswa diharapkan memiliki soft skill dan hard skill. Yang menjadi penting dalam kehidupan, yaitu empati terhadap lingkungan dan manusia lain, bermoral, disiplin serta etos kerja tinggi. Pembelajaran motorik di SD berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan para siswa. Realitasnya kualifikasi proses pembelajaran: standar proses yang sudah sesuai SNP sebesar 44%, standar isi, pendidik, sarana prasarana dan pengelolaan belum ada yang sesuai SNP, metode mengajar belum memenuhi prinsip menyenangkan bagi siswa, kasus bullying, siswa mengulang kelas. K2013 sudah mengakomodasi tapi pelaksana-naannya belum optimal. Metode RnD. Melihat sekolah-sekolah yang mnyelenggara-kan sekolah yang menyenangkan dan melihat praktik baiknya dan dibuat model strategi sekolah yang aman dan menyenangkan. Tujuan: - Memetakan SD berdasarkan indikator sekolah aman dan menyenangkan - Menganalisis strategi manajemen sekolah aman dan menyenangkan sesuai dengan tuntutan abad 21

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		c. Menganalisis metode mengajar yang menyenangkan oleh guru. Mengambil juga data sekunder dari system penjaminan mutu pendidikan dari Direktorat SD. Sampel 122.000 SD yang menjawab manajemen sekolah menyenangkan 0,816, manajemen sekolah aman 0,886 dan kualitas pembelajaran 0,824. Indikator dari manajemen sekolah aman dan menyenangkan terdiri dari: manajemen sekolah, menyenangkan secara fisik, aman secara psikis, aman secara fisik, kualitas hasil belajar dan kualitas proses pembelajaran. Dalam kualitas pembelajaran di proses keterampilannya baru 30%, artinya pembelajarannya belum kreatif tugas individu paling tinggi, 96% dan yang rendah metode pementasan karya seni. Manajemen sekolah yang menyenangkan sudah dicapai oleh Bali, Jabar, DIY, dan Papua. Pencapaian sekolah aman: Rata-rata sekolah menyatakan bahwa sekolahnya aman. Siswa berani berpendapat, tersedia makanan sehat dan bergizi di kantin, kualitas pembelajaran yg rendah ada di Banten, Babel dan Sulut. Proses belajar PAKEM karena melihat evaluasi diri sekolah metode pementasn karya seni. Melakukan wawancara, diskusi, observasi dari buram yang sudah dibuat dan dibawa ke daerah sampel. Menggunakan Manajemen berbasis Sekolah (MBS) turun menjadi manajemen kelas berkaitan dgn fisik dan psikisnya (social). Melihat manajemen kelas bagaimana guru melayani siswa, membuka karakter siswa kejujuran, moral, berbuat baik, disusun oleh guru baru dimasukan pengetahuan di SD. Sudah ada di Kurikulum dan harusnya dilaksanakan dgn benar. Siswa diajak berperan sehingga siswa merasa senang. Pembelajaran di luar kelas sekarang jarang dilakukan. Misalnya ingin mengetahui pembuatan tahu maka pergi ke pabrik tahu. Performa guru, jika ada guru dari Sumut anak akan tertarik bgt juga jika ada guru yg dari jawa yg bahasanya masih medok, memastikan pelaksanaan peraturan, siswa tidak takut utk mengikuti peraturan. Implementasi di sekolah harus tahu dulu apa yang kurang dari sekolah, analisis kebutuhan, metode pembelajaran yg digunakan, visi misi sekolah. Jika ada guru yg masih mengajar secara konvensional bisa mengambil narsum dari PT atau dari luar negeri. Manajemen sekolah dibagi menjadi: manajemen sekolah besar, inklusi, Inovasi kepala sekolah penting yang kemudian diturunkn kepada guru-gurunya. 2. Catur Dyah Fajarini a. Berdasarkan data BPS, Persentase penduduk miskin di Indonesia 17,75% pada tahun 2006 yang berfluktuasi menjadi 9,82% pada Tahun 2018 . b. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan. c. Tidak semua warga Indonesia dapat mengakses pendidikan yang diakibatkan oleh beberapa kendala, seperti: harus bekerja untuk mempertahankan hidup dan tidak mampu membayar biaya pendidikan (factor ekonomi), jarak tempat tinggal dengan lokasi diselenggarakannya pendidikan tidak terjangkau (factor lokasi), serta berbagai kendala lainnya. d. Dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 disebutkan bahwa Jalur pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat dengan berbagai kendala dan keterbatasan tersebut.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		e. Berdasarkan SK Mendikbud Nomor 023/O/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), bahwa SKB merupakan UPT Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di tingkat Kabupaten/ Kota, yang bertugas melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, berdasarkan kebijaksanaan teknis dari Direktur Jenderal Diklusepa (sekarang Ditjen PAUD dan Dikmas). SKB tidak menyelenggarakan pendidikan nonformal namun hanya mengembangkan program-program pendidikan nonformal. f. Dalam rangka mengoptimalkan peran SKB, dikeluarkan Permendikbud RI No. 4 Th 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, sehingga SKB dapat menyelenggarakan Pendidikan non formal. g. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Tugas SKB menjadi mengembangkan program2 non Formal skarang menjadi mengembangkan sekolah nonformal berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini, maka ingin mengetahui: - Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi sesudah SKB dijadikan sebagai Satuan Pendidikan - Menganalisis Kelebihan dan Kekurangan setelah SKB menjadi satuan pendidikan - Menganalisis aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas PNF melalui SKB sebagai satuan pendidikan. Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder dan primer. Sampel pada pene-litian ini yaitu sebanyak 5(lima) wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih secara purposive di lokasi yang memiliki keunikan dalam pengelolaan, baik praktik baik, maupun lokasi yang banyak masalah dalam pengelolaan; dengan informasi yang bersumber dari Ditjen PAUD Dikmas dan Dapodik. Dilakukan pengumpulan data melalui Daftar Isian Kepala SKB yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen Pendukung. Dilakukan FGD untuk menggali informasi terkait permasalahan yang terjadi setelah SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal. Sampel melihat lima lokasi yg ada praktik baik atau tidak, info dari ditjen Dikmas. Info mengenai permasalahan yg terjadi. Setelah menjadi satuan pendidikan menjadi bervariasi tergantung pada dinas masing2. Setiap tahun SKB meningkat termasuk yg menyelenggarakan program paket dan kursus, juga PAUD. SKB yg menyelenggarakan keaksaraan dasar menunjukan penurunan artinya masyarakat Indonesia sudah paham tentang pendidikan, sehingga sudah memasukan anaknya sejak usia dini. PTK SKB meningkat, guru honor sekolah meningkat cukup tinggi, namun masih banyak kekurangan adalah pamong belajar. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan rehabilitasi prasaena belajar dan sarana belajara. Papling banyak rehabilitasikan prasarana belajar. Artinya pemerintah sudah banyak memberikan bantuan kepada SKB Sebanyak 122 SKB yg mendapat bantuan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana belajar. SKB awalnya:

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		a. SKB bertugas mengembangkan percontohan program pendidikan non formal dengan sasaran utama masyarakat yang memiliki hambatan dalam mengikuti pendidikan karena faktor-faktor tertentu. b. SKB bertujuan mendorong masyarakat gemar belajar, berkarya. dan usaha mandiri (berswadaya) c. Tidak ada akreditasi d. Sarana dan prasarana disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota e. Kepala SKB pejabat struktural yang diangkat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan tidak harus berasal dari pamong belajar. Setelah SKB menjadi sekolah nonformal: a. SKB bertugas menyelenggarakan program pendidikan non formal sejenis b. Semua SKB telah memiliki NPSN c. Memiliki visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten /kota d. Diakreditasi, walaupun belum semua SKB terakreditasi e. Memiliki kurikulum yang sudah dikembangkan dengan mengadopsi kearifan lokal, dan mempertimbangkan kebutuhan lokal. f. Sarana prasarana bersumber dari Pusat via DAK dan Pemda setempat dan lahan g. Kepala SKB adalah Pamong belajar . h. Program yang banyak dilakukan di sanggar adalah program paket dan program keterampilan. i. Program paket A, program paket B, program paket C, dan PAUD dilaksanakan di seluruh SKB sampel (100%). j. Program Keaksaraan Dasar 60%; k. Program Kewirausahaan 40% ; l. Program Kursus lainnya (Tata Busana, Tata Kecantikan dan Tata Boga) 47%. Jenis-jenis sarana yang sudah ada dan tersedia di SKB meliputi meja kursi siswa, meja kursi guru, papan tulis yang layak untuk digunakan, alat tulis, alat-alat peraga pembelajaran yang layak, (3 buah) almari penyimpanan dokumen dan perlengkapan olahraga, sarana pembelajaran berupa buku teks, buku bacaan wajib, modul pada program paket A, B, C dan buku teks untuk program PAUD, program keterampilan kejuruan (tata busana & keterampilan tata boga), dan program keaksaraan dasar. Sarana kegiatan pelatihan keterampilan adalah sedikitnya 1 (satu) buah perbengkelan di satu SKB. a. Sebagian besar SKB memiliki prasarana penunjang kegiatan yaitu ruang belajar dengan luas lantai ± 140 m², ruang praktik seluas ± 70 m² dan ruang guru seluas ± 35 m². b. Beberapa SKB memiliki ruang tambahan, seperti ruang staf administrasi, ruang pimpinan, ruang tamu, perpustakaan, ruang ibadah, ruang serbaguna, dan gudang. c. Sarana prasarana telah digunakan sesuai dengan kebutuhan warga belajar walaupun belum terpenuhi semuanya. d. Pengadaan sarana dan prasarana diberikan oleh pemerintah pusat melalui DAK dan iuran komite dari orangtua siswa e. 22% tidak memiliki program <i>preventive maintenance</i>.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		f. Kepala SKB harus seorang pamong belajar tetapi saat ini tidak semua SKB memiliki pamong belajar. g. Belum ada peraturan tentang tunjangan pamong belajar sebagai Kepala SKB. h. Kepala SKB dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha dan langsung membawahi tenaga fungsional pamong dan tutor (pengajar honorer) SK yg kurang baik: Ketersediaan Hanya ada satu SKB di satu kota/kabupaten. Walaupun sebelumnya ada beberapa namun oleh dinas pendidikan dialihfungsikan menjadi lembaga lain yaitu badan diklat daerah. Penganggaran DPA SKB masih menyatu dengan DIPA Dinas Pendidikan sehingga pengelolaannya sangat bergantung pada bidang PAUD & Dikmas di dinas pendidikan. Pemerintah daerah membatasi pengalokasian dana pembelajaran sehingga peserta didik harus membayar (kurang mendukung). Pemda tidak memberikan dana operasional untuk pemeliharaan gedung sehingga kondisi bangunan yang ada kurang terpelihara. SKB yang Baik: Ketersediaan SKB didirikan di setiap kecamatan sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, contoh di Kota Balikpapan memiliki 5 SKB, yaitu: (1) SKB Balikpapan Timur, (2) SKB Balikpapan Tengah, (3) SKB Balikpapan Selatan, (4) SKB Balikpapan Barat, dan (5) SKB Balikpapan Utara. Penganggaran SKB memiliki DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sendiri (anggaran tidak bergabung dengan DIPA Dinas Pendidikan) sehingga memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhannya. Penyelenggaraan Program SKB sebagai satuan pendidikan berwenang menyelenggarakan program-program PAUD dan Dikmas baik di dalam maupun di luar SKB, antara lain di Pesantren, di rumah peserta didik, di Lapas. Kepala SKB bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas, baik dalam pengusulan anggaran, pengelolaannya, maupun pertanggungjawabannya. Pembelajaran Pendekatan pembelajaran bervariasi, antara lain: Secara reguler, mirip sekolah formal, peserta didik pada sekolah reguler adalah anak-anak usia sekolah. Kerjasama dengan Pesantren, pembelajaran dilakukan di pesantren, tutor dari pesantren, peserta didik datang ke SKB untuk ujian mid semester dan ujian akhir semester. Proses ujian dengan perangkat komputer. Sekolah ratas, kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi maupun perangkat mobile. Model ini hanya di SKB Balikpapan Timur, peserta didik wajib datang ke SKB saat mid semester dan semester. Home schooling, kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah, SKB wajib mensupervisi perkembangan peserta didik. Tutor dan pembiayaan ditanggung oleh peserta didik yang melakukan home schooling.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Penyelenggaraan Program Paket A, B, dan C untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum (di Lapas). Saat ujian mereka wajib datang ke SKB dengan dikawal oleh petugas Lapas. Pendidik Jumlah tenaga pendidik di atas 24 orang walau-pun tidak semua SKB memiliki pamong sebagai tenaga tetap, tetapi pengelolaan SKB dapat berjalan dengan baik dan berkembang, dengan memberdayakan tutor sebagai pengajar pengganti pamong. Untuk itu diharapkan agar kuota yang diberikan untuk pengangkatan guru baru di kabupaten/Kota (khususnya Kota Balikpapan), 10 % dialokasikan untuk tenaga pamong. Pengembangan SKB diberikan kebebasan oleh dinas pendidikan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga apa pun yang dianggap dapat membantu mengembangkan SKB. Kesimpulan: - Data secara nasional menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan non formal melalui SKB sebagai satuan pendidikan terus meningkat sejak SKB beralih fungsi sebagai penyelenggara satuan pendidikan non formal sejenis - Secara umum semua SKB kekurangan pamong belajar. Hal ini terjadi karena BKD tidak memprogramkan pengangkatan tenaga pamong. Oleh karena itu SKB berharap dalam pengangkatan guru 10 % dialokasikan untuk tenaga pamong. - Berdasarkan hasil diskusi dengan Bidang Perencanaan dan Pengendalian kebutuhan tenaga di Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas Ditjen GTK diperoleh informasi bahwa Pemerintah (BKN) telah menyiapkan pengangkatan 2000 Pamong untuk tahun 2019 dengan syarat Pemda mengusulkan kebutuhan Pamong per tingkat jabatan. Hingga saat ini belum ada Pemda yang menyampaikan Data Kebutuhan Pamongnya. - SKB perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggara-raan program-programnya. Upaya yang telah dilakukan berupa bantuan fisik melalui DAK perlu ditingkatkan untuk semua SKB. Rekomendasi: - Keberlangsungan SKB sebagai satuan pendidikan non formal perlu dipertahankan/dilanjutkan bahkan didukung karena terbukti dapat menjadi solusi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kendala atau keterbatasan. Pemerintah Pusat tetap terus mengalokasikan dan meningkatkan jumlah dana untuk membantu SKB mendanai biaya operasional sekolah (DAK untuk bantuan fisik) dan biaya operasional dalam bentuk BOS sesuai jumlah siswa. - Perkembangan jumlah program pendidikan non formal harus diimbangi dengan penambahan jumlah pamong belajar. Untuk itu, Pemerintah harus segera mengangkat PNS Pamong untuk mengatasi kekurangan Pamong tersebut. Alokasi 2000 tenaga pamong oleh Direktorat GTK, harus disambut oleh Pemda dengan sesegera mungkin memetakan kebutuhan dan distribusi Pamong agar BKN dapat mengalokasikan kuota sesuai dengan kebutuhan daerah. Sampai saat ini belum ada kabupaten/kota yang melakukan usulan kebutuhan pamong belajar sehingga alokasi 2000 Pamong belum terdistribusi.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		c. Dalam rangka memenuhi perangkat pengelolaan SKB sebagai satuan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan anggarannya, hendaknya seluruh SKB memiliki DIPAny sendiri sehingga SKB leluasa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, hendaknya Pemerintah Daerah mengalokasikan dana operasional untuk merawat asset-asset yang dimiliki SKB. 3. Prof. Anik Gufron Model klinik ini dibuat untuk membantu guru dalam karya ilmiah di program PPG untuk apresiasi diri dalam penulisan karya tulis ilmiah A. Latar belakang masalah 1. Peningkatan kualitas (pro-fessional dan pedagogik) guru dipengaruhi oleh banyak faktor khususnya faktor yang terkait dengan pola kebijakan yang dikem-bangkan pemerintah pada era kepemimpinan pemerin-tah yang sedang berjalan. 2. Pemerintah telah melakukan standarisasi criteria layanan profesionalisme guru melalui program sertifikasi pendidik (PPG). Program ini berpindah kewenangan dari Kemdikbud ke Kemenristekdikti sekarang kembali ke Kemdikbud lagi. • Belum semua guru memiliki sertifikasi pendidik. • Sekitar 570.000 guru belum sertifikasi pendidik dan belum lulus PPG. 3. Program-program pemerintah (PPG, SM3T, PPG Gusdarsus, pelatihan guru daerah khusus (PGDK) belum efektif meningkatkan profesionalisme guru. • Angka partisipasi dan keikutsertaan guru dalam program inovasi pembelajaran (inobel) tahun 2018 masih rendah. • Rendahnya partisipasi guru dalam kegiatan-kegiatan akademik (seminar, konferensi, sympo-sium) untuk publikasi nasional dan internasional ilmiah baik tingkat regional. Ini disebabkan tugas guru yg banyak membuat jenjang karir guru terhambat karena memikirkan RPP dll. Ada beda antara guru dan dosen, dosen ilmuan kalau guru ada masalah harus menyelesaikan sendiri permasalahannya. B. Fokus permasalahan: 1. Bagaimana desain program pendampingan yang efektif dalam melakukan pengembangan diri bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah? 2. Bagaimana desain program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi menulis dan publikasi ilmiah bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ 3. Bagaimana desain program pelatihan yang efektif bagi guru sehingga mampu mengembangkan karya inovatif? 4. Bagaimana efektivitas Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) hasil pengembangan yang ditunjukkan melalui peran aktif guru dalam kegiatan-kegiatan strategis pendukung profesionalisme guru? C. Tujuan Penelitian

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		1. Menyusun dan mengembangkan desain program pendampingan yang efektif dalam melakukan pengembangan diri bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2. Menyusun dan mengembangkan desain program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi menulis dan publikasi ilmiah bagi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Menyusun dan mengembangkan desain program pelatihan yang efektif bagi guru sehingga mampu mengembangkan karya inovatif. 4. Menganalisis efektivitas Program Keprofesional Berkelanjutan (PKB) hasil pengembangan yang ditunjukkan melalui peran aktif guru dalam kegiatan-kegiatan strategis pendukung profesionalisme guru. D. Sasaran dan Luaran Hasil Penelitian 1. Sasaran: meningkatkan peran aktif guru dalam kegiatan-kegiatan penunjang profesionalisme guru sebagai dampak PKB dan peningkatan kompetensi profesionalisme guru (pedagogic dan professional) yang ditunjukkan oleh dukungan hasil kinerja guru. 2. Luaran Hasil Penelitian: Model PKB berbasis pada program pre-service dan in-service training sebagai wujud peran LPTK dan artikel ilmiah/temuan hasil penelitian. E. Ruang Lingkup Penelitian Perbaikan kualitas profesionalisme guru melalui PKB dalam bentuk: 1. Pendampingan pengembangan diri 2. Pendampingan pelatihan peningkatan kompetensi menulis dan publikasi ilmiah. 3. Pendampingan pengembangan karya inovatif bagi guru-guru jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 5 kabupaten/kota, satu kabupaten di Makassar dan Padang. F. Metode Penelitian Disain pengembangan Model R2D2 (Wilis, 1995) yang memiliki 3 komponen, yaitu: 1. Penetapan: a. Menciptakan kerjasama tim b. Solusi problem progresif, dan c. Pemahaman masalah secara kontekstual. 2. Disain dan Pengembangan a. Mempelajari konteks pembelajaran b. Memilih format dan media c. Menentukan strategi evaluasi, dan d. Mendesain produk dan pengembangannya. 3. Penyebarluasan: a. Evaluasi autentik. b. Pembuatan paket akhir produk sesuai dengan konteks. c. Difusi, dan d. Adopsi G. Ujicoba Produk

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Subjek penelitian, yaitu: • Guru SD dan SMP, pengawas SD dan SMP, serta kepala sekolah SD dan SMP. Keseluruhan subjek penelitian diambil dari daerah-daerah yang menjadi sasaaran penelitian. Desain ujicoba Uji produk akan dilakukan pada 3 kelompok, yaitu: • Guru SD dan SMP • Kepala SD dan SMP • Pengawas SD dan SMP, dan pengampu kebijakan dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Instrumen Analisis Data, Teknik Analisis Data, Gambaran umum pelaksanaan Penelitian saya lewati saja. Hasil dan Temuan Penelitian ini akan dijabarkan oleh pak Puji. Silahkan pak Puji. Pak Puji Program klinis dalam bentuk offline maupun online dalam membantu guru dalam karya tulis ilmiah. Online karena banyak guru yang berada di lokasi di luar pulau jawa seperti Makassar dan Padang. Kalau offline bentuknya bimtek, biaya lebih besar, untuk yang online dikembangkan aplikasinya untuk guru-guru yang tidak bisa ikut offline. Nama aplikasinya klipengproberu. Untk menggunakan aplikasi ini harus registerasi untuk data base guru untuk konsultasi yang tidak hanya sekali dan tidak lanjut setelah guru memberikan artikelnya untuk diberikan pendampingan dan melihat hasil yang dilakukan guru. Aplikasinya bisa masuk dalam laman www.screenmirrorapp.com Di aplikasi ini bisa untuk chating juga, karya bisa masuk melalui email atau aplikasi ini, antar pengguna juga bisa saling chating. Sudah ada kepala sekolah yang berhasil mendapatkan juara penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional setelah mendapatkan klinik, biar dapat berhasil harus mengikuti aturan yang ada di klinik. Jika ada karya yang masuk bisa dilihat oleh pengguna yang lain agar yang lain mengetahui letak kesalahannya dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Misalnya masuk Bab 1, nanti disebelahnya ada komentar dari tim klinik dan disimpan sebagai history dan menjadi tindak lanjut untuk selanjutnya, apakah guru/kepala sekolah sudah memperbaiki apa yang sudah dibeikan masukkan. Semakin banyak pengguna maka semakin besar data base yang harus dipersiapkan karena semakin banyak pengguna memori yang digunakan semakin besar dan perlu ada operator, sementara SDM yang ada di kampus tidak mencukupi. Dalam klinik ada beberapa ahli seperti ahli bahasa, metodologi, pedagogic, dll. Jadi artikel yang masuk dikomentari oleh ahlinya.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Inovasi pembelajaran disampaikan pada moment-momen ada lomba saja. Demikian yang dapat saya sampaikan.
2.	Pembahas : (Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)	Pembahas: Bahrul Hayat - Menurut saya menarik sekali kajian ini dan ini pernah dilakukan oleh Unesco, menurut unesco ada poaring school. Di Australia paling banyak memberikan konsep sekolah menyenangkan tetapi malah ditambahkan apakah anak ini sejahtera, tidak hanya menyenangkan tapi mensejahterakan (wellbeing school). Konsep baru dari Psikologi, yaitu Positif education, siswa bukan hanya bahagia tapi menyenangkan. Ke depan laporan kalau lima saja yg dipotret sepserti apa? Kalau dipotret saja jika ada perbedaan dimana letak bedanya? Konseptual frame worknya lihat konsep yg baru tadi, baik aspek fisik maupun sosialnya nanti dicobakan. Tapi pertama memotret lima, adakah perbedaan manajerial kalau ada perbedaan pakai R dan B untuk mengembangkan sekolah wellbeing, dll. Saya menyarankan buat panduan secara detail untuk pengelolaan sekolah yang menyenangkan, karena dengan adanya panduan sekolah dapat mengembangkan sekolah yang aman dan menyenangkan. Tanggapan: Kami sudah membuat laporan dari setiap daerah dan memang kami pada tahun ini membuat konsepnya dulu baru tahun depan akan dilanjutkan - SKB menjadi satuan kelihatannya pemerintah ingin menjadikan PKB negeri karena selama ini swasta, peningkatan model layanan pemerintah ingin SKB menjadi negeri. Dari lima daerah data pernting untuk melihat konsen dari pemda, adakah sassaran mereka, Adakah lingkup sasaran bukan lagi kabupaten tapi masyarakat lingkup dari kecamatan bagaimana? Tidak mungkin ada anak ingin belajar jarak nya 50 km tidak mungkin, harus dilihat sasarannya berapa km jarak dari siswanya, itu bisa menjadi rekemondasi. - SDM persis samakah apa ada yg beda termasuk pendanaan apakah ststusnya pendanaan pemda menadi satuan kalau negeri pendanaan pemda, ini jadi rekomendasi. Manajemen di lima lokasi berbeda, adakah hal yg berbeda bisa dipotret dari program, SDM, pengelola, kalau sudah negeri harusnya punya dipanya sendiri tp sampai sekarang pemda belum memberikan dipa untuk sekolah negeri dan SKB, jd kalau sekolah butuh kapur tidak perlu ke kabupaten. Jika SKB sebagai layanan harus mirip sekolah negeri maka dimanapun ada layanan harus diberi bantuan, mengapa saya tanyakan sasaran karena paket A, B,C dapat mengover seleuruh siswa yg tidak terikat. Jika paket A, BC diisi usia sekolah berarti SKB tidak melayani pendidikan nonformal, lalu kemana SMP terbuka, nah itu saran2 kebijakan yg bisa didalami. Tanggapan: SKB ini memang menjadi layanan, tapi kami tidak melihat sasaran dari radius, tapi di Balikpapan memang harus dilihat, Yg Tidak ada pamong, kepala SKB sendiri menjadi pamong. Memang ada perbedaan manajemen antara SKB di Balikpapan dan Malang, memang yg amasuk di SKB usia sekolah yg harus membantu orang tuanya dan msuk ke situ. Pak Bahrul Kalau memang begitu harus dituliskan dan menjadi saran kebijakan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Tanggapan: Terima kasih atas masukannya pak, memang saat ini akan dikembangkan, kalau konsumennya sampai 1.000 memang perlu aplikasi yang besar. Memang kami ingin mengembangkan guru yang inovatif dan ini menjadi pendukung penulisan ilmiah, bisa menjadi alat. Bagaimana akan menjadi milik siapa? Ini akan kami tanyakan pada sponsor biar disosialisasikan dan dikembangkan lagi, semoga sponsor memberikan dana lagi untuk mengembangkan lebih lanjut.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	Pak Idris: Saya tambahkan utk bu Meni saja, jadi severscholl ini kita pernah membuat tahun 2003/2004 adalah bagaimana manajemen sekolah aman, menyenangkan, yg dibuat secara keseluruhan. Sekolah aman dan menyenangkan jika semua warga sekolah, dan masyarakat bergabung saling membantu untuk menimbulkan lingkungan yg kondusif akan membuat lingkungan yg aman dan menyenangkan. Kalau aman dan menyenangkan di kelas saja tidak menyeluruh hanya di satu kelas saja. Kalau bisa tahun depan bisa dilihat secara menyeluruh lingkungan sekitar baru ke se sekolah dan kelas. Bu Meni Memang lingkungan sekitar berperan dan kita masukan dalam MBS, peran serta orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran akan menyenangkan dan aman. Lingkungan sekitar sekolah juga kalau jajanannya tidak sehat akan berdampak kesehatan pada siswa, sekolah juga menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar utk menjamin keamanan sekolah. Hanik Nurlaila Kepsek SDN 02 Depok Ada sedikit curhat latar belakang sekolah kami sekolah ramah anak, beberapa hal sudah kami lakukan. Ketika menyelenggarakan sekolah aman dan menyenangkan apakah disentuh juga guru disentuh juga, tapi terkadang bersentuhan dengan HAM, bagaimana menurut Ibu. Bu Meni Sekolah besar kepala sekolahnya kerepotan karena harus mengelola manajemen yang besar, sekarang mereka punya koordinator sarana, humas dan kesiswaan. Ada peraturan dengan siswa yang harus disepakati bersama, oleh sebab itu harus ada kesepakatan dgn siswa jika siswa melanggar aturan maka akan ada funishmen, sehingga jika ada yg melanggar bahkan ada temannya yg akan mengingatkan. Rahma Ada kerjasama dengan orang tua ketika saat tahun ajaran baru disitu dibicarakan program sekolah. Bu Etty Sisdiana Kalau kita memulai sekolah ramah anak, mengapa karena di SD bullying itu sudah terjadi sepeerti di sekolah anak saya. Tapi menurut pak bahrur perlu ada panduan. Menurut saya perlu ada sekolah piloting karena beda pimpinan maka akan beda kebijakan. Bisa tidak ya di SD sama dengan di SMP seperti

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		kelompok teman yang sifatnya menolong teman untuk membantu siswa-siswa baru, ada yang sakit dll. Bu Meni Terima kasih bus Etty Mmg sekarang sudah ada kelompok sebaya tp baru hanya berbagi dalam makanan ketika istirahat, berbagi dalam makanan. Terima kasih Simon Ada masukan utk b u rini, mereka punya PAUD dan Paket tinggal di asrama bekebun, bercocok tanam, di SKB juga ada siswa diluar usia sekolah, mereka harus bayar. Jadi perlu ada perbedaan. Bu Rini Ini lebih pada masukan karena yg usia diluar usia sekolah masuk/ikut Paket untuk mendapatkan kepentingan seperti ljasah, tapi memang ada bantuan BOS/BOP Pak Bahrus Bukan beasiswa tp KIP
4.	Penutupan	: Paparan seminar selesai pukul 15.35 WIB.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PEMBELAJARAN



EVALUASI KURIKULUM MULOK UNTUK PENGUATAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR JAWA TIMUR & KALIMANTAN

Sa'dun Akbar, Arda Purnama Putra, Titis Angga Rini, Muh. Arafik, Eny Nur Aisyah, Nafi Isbandrianingtyas, Lenita Puspitasari, Dessy Farantika, Nur Fidayat
Universitas Negeri Malang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Penelitian dilaksanakan di dua daerah, di Jawa Timur dan Kalimantan, dengan melibatkan dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru muatan lokal di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan angket terbuka, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran muatan lokal cenderung seragam dari tiap daerah, berupa bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Madura, dan Banjar. Pemilihan muatan lokal tersebut terkendala dari keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran muatan lokal masih belum memenuhi standar untuk pengenalan potensi daerah berbasis kearifan lokal dalam penguatan karakter peserta didik.

Kata kunci : muatan lokal, evaluasi, penguatan karakter, kearifan lokal

A. PENDAHULUAN

Muatan lokal merupakan salah satu muatan wajib yang diajarkan secara berjenjang mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Muatan lokal dalam PP Nomor 20 Tahun 2013, dijelaskan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Lebih lanjut, muatan lokal ditujukan untuk mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan (Arieta, 2010). Selain pendayagunaan potensi daerah, muatan lokal juga ditujukan untuk pewarisan nilai-nilai budaya setempat bagi peserta didik. Muatan lokal memuat nilai-nilai kearifan lokal yang syarat akan nilai untuk menekankan transfer dan penguatan penguasaan pengetahuan atau *established knowledge* (Musanna, 2010).

Standarnya, muatan lokal dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Muatan lokal yang dipilih dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan menambahkan beban belajar muatan lokal paling banyak 2 jam/minggu. Pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, dijelaskan bahwa muatan lokal dapat berupa seni budaya, prakarya (hasil karya), pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa, atau teknologi. Setiap jenjang pendidikan dapat menentukan jenis muatan lokal yang dibelajarkan sesuai dengan potensi dan konteks lingkungan alam, sosial, atau budaya daerahnya.

Muatan lokal dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Pemahaman terhadap daerah ini yang diharapkan dapat membekali peserta didik untuk cerdas dalam melestarikan dan mengembangkan potensi daerah dalam berbagai bidang kehidupan (Undri dan Femmy, 2014). Selaras dengan tujuan tersebut, pembelajaran muatan lokal dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi abad 21 dalam bidang pendidikan, yaitu untuk menghasilkan generasi yang kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. Peserta didik diharapkan dapat melestarikan dan mengembangkan potensi dan keunikan daerah dengan menghasilkan dan pemanfaatan berbagai jenis produk lokal sebagai keunggulan dan kearifan daerahnya (Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014).

Khususnya di Indonesia yang multikultural, muatan lokal menjadi sarana potensial yang khas untuk menunjang pembangunan nasional di berbagai bidang secara global. Namun faktanya, berdasarkan studi awal melalui penelusuran berbagai literatur cetak maupun non cetak diketahui bahwa terdapat fenomena yang menunjukkan rendahnya keberminatan generasi muda terhadap hal-hal yang bersifat lokal. Rendahnya keberminatan ini ditunjukkan mulai dari ketertarikan terhadap makanan, pakaian, budaya dan produk asing lainnya yang dianggap lebih bergengsi dibanding dengan produk lokal. Hal ini memunculkan kecenderungan generasi muda yang kurang menyukai dan kurang menghargai hasil karya daerah yang bersifat lokal sebagai kebudayaan leluhurnya yang syarat akan nilai-nilai karakter bermuatan kearifan lokal.

Munculnya fenomena ini tentu tidak selaras dengan visi dan misi pembelajaran muatan lokal khususnya dalam hal pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (Akbar, 2011, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal yang sedang berjalan di sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap pelaksanaan muatan lokal di sekolah dasar sebagai media pembelajaran untuk penguatan karakter berbasis kearifan lokal.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perkembangan Kurikulum Indonesia

Kurikulum menurut Sukmadinata (2004:27, 2008) mengandung tiga konsep sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi dari hasil kajian para ahli untuk pengembangan ilmu dan sistemnya. Perubahan kurikulum dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Abong, 2015). Berkaitan dengan peran dan konsep kurikulum, Indonesia sebelumnya telah mengalami sebelas kali pergantian kurikulum mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013. Pergantian kurikulum dalam mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan yang telah dikaji oleh para ahli dari masa ke masa (Machali, 2014). Perkembangan kurikulum di Indonesia diorientasikan pada pemenuhan *life skill* yang diwujudkan dalam pencapaian kompetensi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini membawa salah satu perubahan yang mendasar pada pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia adalah pada peran guru yang dituntut untuk mengembangkan komponen pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekitar secara optimal (Alawiyah, 2013).

2. Kearifan Lokal

Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar berkaitan dengan kebijakan perubahan kurikulum terbaru selama masa reformasi mulai dari KBK, KTSP 2006 hingga Kurikulum 2013 yang berorientasi pada kompetensi (*competence based*). Pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan multistrategi dan multimedia dengan prinsip *alam takambang jadi guru* yaitu, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, contoh, dan teladan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal diintegrasikan sebagai elemen budaya yang penting dalam penguatan pondasi jatidiri bangsa khususnya dalam penggalian dan revitalisasi nilai (Brata, 2016). Revitalisasi kearifan lokal diupayakan dengan implementasi kebijakan negara misalnya dalam kebijakan pendidikan dan perekonomian sebagai nilai yang universal (Fajarini, 2014, Sauqi, 2011:122). Kearifan lokal ini efektif diintegrasikan dalam materi pokok pembelajaran karena memiliki kedekatan hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman siswa di lingkungan sekitarnya (Nadlir, 2014). Kearifan lokal yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran diwujudkan dalam kompetensi mata pelajaran muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan.

3. Muatan Lokal

Muatan lokal diwujudkan dalam pembelajaran keterampilan khas seperti bahasa daerah untuk setiap wilayah. Muatan lokal dalam pembelajaran Kurikulum 2006 lebih lanjut termuat dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa muatan lokal merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 77N, menjelaskan bahwa (1) muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal dan (2) muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Mata pelajaran muatan lokal ini harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai budaya, dan permasalahan sosial dan lingkungan (Arieta, 2010). Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya (Muktadir, 2014). Khusus pada era industri di abad 4.0 ini, muatan lokal menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan dalam pengembangan karir peserta didik setelah jenjang pendidikan. Pengembangan potensi tersebut dapat berupa pengembangan potensi kebudayaan dalam arti luas sebagai suatu cipta, karsa, dan rasa manusia (Koentjaraningrat, 2015). Lebih lanjut dijabarkan oleh Koentjaraningrat (2015) bahwa wujud kebudayaan ada 3 macam yaitu ide, aktivitas, dan artefak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan teknik deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan muatan lokal di sekolah dasar. Penelitian dilaksanakan di dua daerah, Jawa Timur dan Kalimantan, dengan melibatkan dinas kependidikan setempat, pengawas, kepala sekolah, dan guru muatan lokal dengan rincian sebagai berikut.

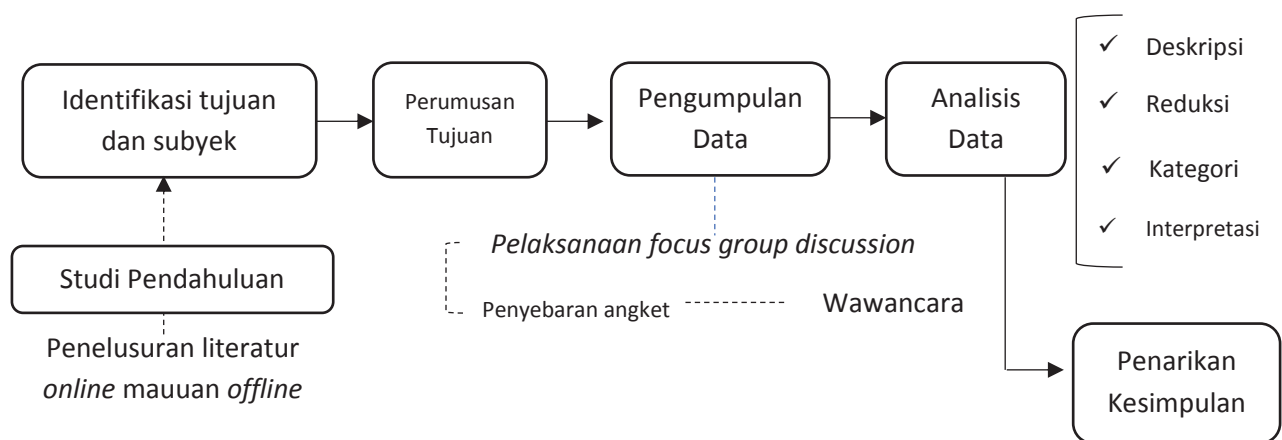
Tabel 1.1 Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Lokasi	Kadis	Pengawas	Kepsek	Guru SD	Total
Kota Malang	1	1	2	2	6
Kota Kediri	1	1	1	1	4
Kab Ponorogo	1	1	2	2	6
Kab Lamongan	1	1	1	1	4
Kab Bangkalan	1	1	1	1	4
Kab Jember	1	1	1	1	4

Lokasi	Kadis	Pengawas	Kepsek	Guru SD	Total
Kota Banjarmasin	1	1	4	4	10
Jumlah	7	8	12	12	38

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikumpulkan melalui angket terbuka, kemudian didalami melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun (DKT). Dari pengumpulan data tersebut diperoleh data yang terdiri atas (1) deskripsi muatan lokal yang berjalan dan capainnya, (2) kendala dalam pembelajaran muatan lokal dan upaya untuk mengatasinya, serta (3) opsi kebijakan yang digunakan dalam pembelajaran muatan lokal. Data hasil penelitian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan rangkaian proses deskripsi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data. Dari hasil analisis, data disajikan dan dideskripsikan per kabupaten atau kota untuk disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini alur penelitian evaluasi kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah dasar.



Gambar 1.1 Alur Penelitian Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a) Kota Malang, Jawa Timur

Muatan lokal yang telah diterapkan di Kota Malang adalah bahasa jawa. Capaian muatan lokal yang telah dilaksanakan adalah menjadikan siswa mampu berpidato dengan bahasa jawa, membuat *geguritan jula juli*, menggunakan bahasa jawa dengan baik, memahami serta menerapkan tata krama dalam pergaulan sehari-hari dengan lebih baik. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga guru yang sesuai bidang keahlian, media, buku ajar, sarana prasarana, biaya pelaksanaan serta kurangnya waktu belajar bahasa jawa secara luas dan maksimal. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengikutsertakan guru dalam pelatihan bahasa jawa, serta melakukan KKG mini yang terpusat pada pengembangan pengetahuan bahasa jawa, mengadakan perlombaan berbasis bahasa jawa, dan pemantauan proses pembelajaran guru muatan lokal. Langkah kebijakan yang dilaksanakan adalah mengangkat pendidik sesuai kualifikasi dan kompetensi pengajaran bahasa jawa, menguatkan anggaran untuk pengembangan buku ajar dan sarana belajar untuk muatan lokal bahasa jawa.

b) Kota Kediri, Jawa Timur

Muatan lokal yang telah dilaksanakan di Kota Kediri adalah bahasa jawa dan tata krama atau unggguh unggguh. Capaian muatan lokal yang telah dilaksanakan adalah permainan tembang dolanan, pentas karawitan, dan pidato bahasa jawa. Kendala yang dihadapi dalam pembelajarannya adalah guru belum memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian, keterbatasan dana pengembangan dan sumber belajar, media

pembelajaran bahasa jawa yang terbatas, sedikitnya kegiatan pagelaran budaya di lingkungan sekolah. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pelatihan dan Kelompok Kerja Guru (KKG), program belajar melalui karya wisata yang mengajak guru lebih kompeten dan kreatif serta inovatif dalam mengajar. Langkah kebijakan yang telah dilakukan adalah fasilitasi peningkatan kompetensi guru, payung hukum untuk pembiayaan sumber belajar, dan kerjasama dengan pihak terkait yang dibiayai pemerintah.

c) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Muatan lokal yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo adalah mata pelajaran bahasa Jawa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan muatan lokal bahasa jawa adalah keterbatasan tenaga guru yang memiliki kompetensi mumpuni, juga pemanfaatan sumber dan media pembelajaran. Kendala mengenai anggapan sinis yang disematkan kepada mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa juga sangat dirasakan baik guru maupun siswa. Upaya dalam mengatasi permasalahan dan langkah kebijakan yang diambil adalah kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dibidang materi bagi guru muatan lokal.

d) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Muatan lokal yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lamongan adalah bahasa jawa. Capaian muatan lokal yang telah dilaksanakan adalah menjadikan siswa terampil berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran muatan lokal bahasa jawa adalah tidak banyak guru yang memiliki kompetensi mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa, keterbatasan sumber dan media belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Luaran yang diinginkan dari mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa belum tercapai secara optimal. Upaya untuk mengatasi persoalan tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa adalah mengikutsertakan guru mengikuti diklat, pelatihan, seminar untuk menambah wawasan dan kompetensinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga memberikan alokasi dana untuk guru-guru muatan lokal bahasa jawa melakukan kegiatan peningkatan kompetensi berbasis KKG. Langkah kebijakan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan pengawas, kepala sekolah dan guru adalah dengan pembiasaan berkomunikasi dengan bahasa jawa di sekolah, keluarga dan lingkungan tempat tinggal, pengadaan sumber, bahan dan media pembelajaran.

e) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Muatan lokal yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan adalah bahasa madura untuk menanamkan nilai kearifan lokal madura. Capaian muatan lokal yang telah dilaksanakan adalah menjadikan siswa terampil berkomunikasi dengan bahasa jawa dan madura. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran muatan lokal adalah terbatasnya pengetahuan guru tentang bahasa madura, media belum memadai, buku ajar terbatas, pembiayaan yang terbatas, tidak adanya dukungan belajar bahasa madura dari orang tua kurang menarik produk yang dihasilkan. Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengadakan lomba-lomba yang memuat nilai kearifan lokal madura, seperti lomba bercerita dengan bahasa madura. Langkah kebijakan yang diusulkan untuk meningkatkan muatan lokal yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang muatan lokal sesuai dengan potensi yang ada di daerah madura, mengoptimalkan budayawan yang ada di daerah, pengangkatan guru bahasa madura sesuai keahlian akademik.

f) Kabupaten Jember, Jawa Timur

Muatan lokal yang dilaksanakan di Jember adalah bahasa jawa dan madura sebagai muatan lokal wajib. Selain itu juga ada kesenian membantik dan membuat topeng. Pada bahasa jawa, muatan lokal diwujudkan dalam bentuk tata bahasa krama, tembang macapat dan kesenian campursari, sedangkan muatan lokal bahasa madura diwujudkan dalam bentuk seni pandalungan. Kendala yang muncul antara lain terbatasnya keahlian guru yang mumpuni, terbatasnya sumber dan media belajar, kurangnya alokasi

waktu pembelajaran yang masih dibagi dengan SBdP, minimnya pembiayaan dan peminat produk dari hasil pembelajaran muatan lokal. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan guru untuk mengikuti diklat pendidikan muatan lokal yang berkelanjutan. Langkah kebijakan telah diambil dalam pelaksanaan muatan lokal adalah mengusahakan bantuan dari pemerintah berupa media dan sarana pembelajaran lainnya, diadakannya diklat untuk melatih guru kelas sebagai guru inti bahasa jawa yang akan mengimbaskan keterampilannya di lingkungan sekolah dan mewajibkan muatan lokal membantik dan seni pandalungan dengan bekerjasama bersama Dinas Pendidikan untuk memasarkan kesenian di semua jenjang SD hingga SMA.

g) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Muatan lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarmasin adalah bahasa banjar. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan muatan lokal bahasa banjar adalah kemampuan SDM yakni guru yang benar-benar memiliki kompetensi bahasa banjar yang mumpuni. Hasil dari wawancara dan FGD menemukan bahwa perguruan tinggi yang ada dilingkup wilayah Kabupaten Banjarmasin tidak membuka program studi guru bahasa banjar, minimnya sumber dan media pembelajaran. Minimnya sumber dan media pembelajaran muatan lokal bahasa banjar salah satunya disebabkan oleh kurangnya guru yang berkompeten dibidang bahasa banjar. Persoalan tersebut saling memiliki keterkaitan yang erat. Solusi yang diambil untuk mengatasi problem kekurangan guru yang memiliki kompetensi dibidang kelimuan bahasa banjar salah satunya adalah dengan mengadakan diklat, pelatihan dan seminar yang dilaksanakan oleh KKG dan MGMP. Langkah strategis lain yang diambil selain mengadakan diklat, pelatihan dan seminar adalah usulan kepada pihak perguruan tinggi yakni Universitas Lambung Mangkurat untuk sesegera mungkin membuka program studi pendidikan guru bahasa banjar. Program studi pendidikan guru bahasa banjar akan dijadikan satu dengan jurusan pendidikan guru bahasa indonesia dan daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarmasin akan gencar melakukan inovasi peengadaan dan pengembangan sumber dan media pembelajaran bahasa banjar melalui kegiatan lomba, penelitian dan pengembangan model-model pembelajaran.

Dari pemaparan data hasil penelitian ini, secara umum ditemukan dua poin utama yaitu (1) ditemukan kurangnya pemahaman konseptual tentang kurikulum muatan lokal oleh para pemimpin daerah dan kepala dinas kab/kota, sehingga terjadi kekurangsesuaian penempatan program pembelajaran pada ranah kurikulum muatan lokal, institusional, atau pun nasional, dan (2) terjadi kekurangtepatan interpretasi guru terhadap dokumen yang tertulis dalam kurikulum muatan lokal berakibat terhadap penguasaan materi yang akan diajarkan dan implementasi muatan lokal yang berjalan.

2. Pembahasan

Dari hasil analisis data, diketahui bahwa pembelajaran muatan lokal yang dilaksanakan cenderung menggunakan bahasa daerah seperti bahasa jawa, madura, dan banjar. Pemilihan muatan lokal bahasa daerah ini selaras dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Pelaksanaan muatan lokal wajib tersebut sudah berjalan sekitar empat belas tahun semenjak SK Gubernur diberlakukan. Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/188/KPTS/013/2005, tanggal 11 Juli 2005, menyatakan bahwa kurikulum mata pelajaran bahasa jawa untuk jenjang SD/SDLB/MI baik negeri dan swasta Propinsi Jawa Timur wajib diajarkan mulai tahun pelajaran 2005/2006. Muatan lokal bahasa jawa ini ditujukan sebagai untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bahasa serta sikap positif terhadap bahasa jawa itu sendiri. Hal serupa juga menjadi latar belakang pemilihan bahasa daerah sebagai muatan lokal.

Pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal, cenderung terkendala terbatasnya kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran. Kendala ini menjadi

problematika yang umum dihadapi dalam penyelenggaraan muatan lokal bahasa daerah mulai dari kompetensi guru, ketersediaan sumber dan media belajar, sampai dengan guru merasa kekurangan waktu untuk membelajarkan keempat keterampilan berbahasa daerah (Kurniati, 2015: 107). Kendala ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah kurang optimal karena guru maupun sarana dan prasarana pendukung berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Pemusatan keputusan pemilihan bahasa daerah ini juga didasarkan pada desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan daerah yang bersangkutan (Arikunto dan Said, 1998).

Peningkatan kompetensi guru dan pengadaan sarana prasarana menjadi upaya penyelesaian kendala pembelajaran muatan lokal. Upaya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti wali murid, dinas pendidikan setempat, hingga masyarakat sekitar. Pengoptimalan ini hakikatnya mengarah pada esensi kurikulum muatan lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, berdasarkan pendekatan monolitik sehingga kedudukan muatan lokal sejajar dengan muatan pembelajaran lain. Peningkatan kompetensi ini juga harusnya sesuai dengan tuntutan dalam pembelajaran muatan lokal sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan perkembangan daerah. Tuntutan ini harusnya dapat menjadi solusi dalam pembelajaran muatan lokal bahasa daerah karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

Solusi ini akan mengarah pada penentuan dan pelaksanaan opsi kebijakan yang tepat sesuai dengan visi kurikulum muatan lokal untuk pewarisan nilai-nilai budaya dalam arti luas dan mengembangkan potensi daerah. Pada satu sisi sudut pandang adanya keseragaman muatan lokal bahasa daerah sebagai muatan lokal dapat melestarikan budaya berbahasa namun kurang sesuai dengan kebutuhan potensi daerah. Keberadaan kurikulum muatan lokal berpijak pada pandangan mengenai interrelasi pendidikan dan budaya. Dengan demikian, ketika dikaitkan dengan budaya menurut pandangan Taba (1962:18) pendidikan mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai *"preservation and transmission of cultural heritage, instrument for transforming culture, and as the means for individual development."* Artinya, sekolah sebagai institusi penting dalam masyarakat modern dituntut perannya dalam mempersiapkan peserta didik yang mampu berperan dalam pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya tidak hanya dalam berbahasa. Khususnya dalam budaya multikultural di Indonesia yang secara konstitusional telah mempunyai pijakan yang kokoh (Luthan, 2009; Hidayati, 2009: 116-17).

Muatan lokal dapat dikembangkan sesuai dengan standar pembelajaran muatan lokal, pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa muatan lokal dapat berupa seni budaya, prakarya (hasil karya), pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa, atau teknologi. Berbagai jenis muatan lokal dapat dikembangkan dalam pengembangan karir peserta didik setelah jenjang pendidikan khususnya di era 4.0 ini sesuai keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya (Muktadir, 2014, Arieta, 2010). Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan yang telah dikaji oleh para ahli dari masa ke masa (Machali, 2014).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada penelitian evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan keseragaman pada pembelajaran muatan lokal dengan bahasa daerah di berbagai daerah. Keseragaman tersebut berdampak pada adanya masalah-masalah keterbatasan guru bahasa sebagai pengajar mata pelajaran muatan lokal, keterbatasan sumber dan media pembelajaran, dan asesmen autentik dalam pembelajaran. Pembelajaran muatan lokal ini belum memenuhi esensi dari tuntutan dan tujuan muatan lokal sebagai

saran pewarisan nilai-nilai budaya untuk penguatan pembentukan karakter peserta didik yang menghargai kearifan lokal daerahnya. Pembentukan karakter ini ditunjukkan dalam rangka pengembangan potensi daerah sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan pada lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual setiap daerah.

2. Saran

Berpijak dari hasil penelitian ini, maka direkomendasikan untuk mengembangkan kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal yang sedang berlaku. Kebijakan difokuskan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal yang berbasis produk sebagai media penguatan karakter peserta didik melalui proses pembelajaran muatan lokal berbasis produk bernilai kearifan lokal, berbasis kelas, budaya sekolah, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abong, R. 2015. Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal At-Turats*, 9(2), 37-47. DOI: 10.24260/at-turats.v9i2.314.
- Akbar, Sa'dun. 2011. *Revitalisasi Pendidikan Karakter Sekolah Dasar, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Akbar, Sa'dun, dkk. 2018. *Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Alawiyah, F. 2013. The Role of Teacher in Curiculum 2013. *Jurnal Aspirasi: P3DI*, 4(1), 65-74. DOI: 10.22212/aspirasi.v4i1.480.
- Arieta, S. 2010. Community Based Tourism Pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Dinamika Maritim*, 2(1), 71-79. Dari: <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/7-jurnal-revisi-ARIETA-FISIP-UMRAH.pdf>
- Arikunto, S. & Said, A. 2002. *Pengembangan Program Muatan Lokal*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brata, I.B. 2016. Kearifal Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 5(1), ISSN: 2088-2149. Dari: <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/Bakti/article/view/226>.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. 2011. *Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter melalui Pengembangan Budaya Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah DasarDirektur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio-Didaktika*, 1(2), 123-130. DOI: <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Hidayati, I. 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Luthan, R. 2009. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah: Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung: Angkasa
- Kemendikbud. 2017. *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi (cet 10)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kurniati, E. 2015. *Implementasi Pembelajaran Bahasa Jawa SD yang Integratif Komunikatif Berbasis Folklore Lisan Sebagai Wujud Konservasi Budaya*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32(2).
- Machali, I. 2014. Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71-94. DOI: 10.14421/jpi.2014.31.71-94.
- Muktadir, A. 2014. Pengembangan Model Mata Pelajaran Muatan Lokal Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Karakter Di Sekolah Dasar Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(3), 318-331. DOI: 10.21831/jpk.v0i3.5636.
- Musanna, A. 2010. Revitalisasi Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Karakter melalui Evaluasi Responsif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(9), 245-255. DOI: 10.24832/2Fjpnk.v16i9.516.
- Nadlir, M. 2014. Urgensi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 309-330. DOI: 10.15642/jpai.2014.2.2.299-330.
- Permendikbud, 2014. Muatan Lokal Dalam Kurikulum 2013 Nomor 79. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia.
- Permendikbud. 2018. *Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia.
- Permendiknas. 2006. *Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.
- Sauqi, A, dkk. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sukmadinata, N.S. 2004. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. 2008. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Cet. Ke-10. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taba, H. 1962. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace&World Inc.
- Undri dan Femmy. 2014. *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.

EVALUASI PELAKSANAAN GERAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KOTABARU

Muhammad Rahmattullah, Suratno
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru. Penelitian evaluatif ini dilaksanakan pada sepuluh sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas lima sekolah dasar dan lima sekolah menengah pertama pada beberapa kecamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru. Sampel penelitian diambil sebanyak sepuluh sekolah, yakni masing-masing lima SD dan SMP di beberapa kecamatan. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan pertimbangan lokasi sekolah, yakni daerah pusat dan pinggiran kota. Pada sepuluh sekolah yang menjadi sampel penelitian digali informasi dari beberapa sumber, yakni perwakilan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah atau orang tua. Teknik pengumpulan data yang dipakai wawancara, kuesioner, dan observasi langsung serta instrumen asesmen awal Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Kemdikbud. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gerakan PPK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru belum mencapai keberhasilan yang maksimal. Praktik-praktik kegiatan PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah sudah berusaha untuk mengembangkan PPK, tetapi belum menjadi kebiasaan atau budaya sekolah. Dari sepuluh komponen pembentuk keberhasilan PPK, terdapat empat komponen yang masih perlu mendapat perhatian, yakni-sosialisasi PPK, desain kebijakan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi PPK.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, pendidikan karakter, pendidikan dasar

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persoalan pembinaan karakter bangsa menjadi persoalan bangsa hingga sekarang ini. Tidak hanya kaum awam, bahkan yang memiliki pendidikan tinggi dan para pejabat pun banyak yang tidak lagi memiliki karakter yang seharusnya menjadi teladan. Karakter yang tidak terpuji pada diri seseorang terlihat dalam bentuk kenakalan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau pada masa transisi anak-anak ke dewasa. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Mengingat pentingnya pendidikan karakter, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab melalui proses pembelajaran.

Perihal pembinaan karakter anak bangsa ini, Pemerintah kini melancarkan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti

pengajaran sejarah pembentukan watak bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, serta semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum

Kurikulum 2013 (K-13) hadir dalam upaya pembentukan karakter, mengedepankan perlunya membangun karakter bangsa dan membimbing siswa agar bersifat positif terhadap segala hal untuk kebaikan masa depan mereka sendiri. Pendidikan karakter diharapkan agar diterapkan oleh semua satuan pendidikan secara terintegrasi dalam pembelajaran di kelas dan kultur sekolah. Senada dengan itu, Koesoema (2010: 116) menegaskan bahwa pendidikan karakter bisa menjadi salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan. Peran pendidikan karakter bukan saja bersifat integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual subjek didik, melainkan juga bersifat kuratif, baik secara personal maupun sosial, yang bisa menjadi salah satu sarana penyembuh penyakit sosial.

Penerapan K-13 diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, pada saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis. Tim Pengembang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Provinsi tanggal 14 Maret 2017 ada tiga hal penting yang menjadi agenda atau fokus dalam implementasi K-13, yaitu (1) penguatan pendidikan karakter, (2) penguatan literasi, dan (3) pembelajaran abad ke-21 (Kompasiana, 2017). Oleh karena itu, karakter merupakan fondasi dalam implementasi K-13, sehingga perlu benar-benar diinternalisasikan dalam pembelajaran, yang dalam hal ini guru adalah sosok kunci yang menjadi ujung tombak dalam implementasinya.

Prinsip dasar implementasi kurikulum terletak pada kemampuan guru, dukungan semua pihak, serta sarana dan prasarana sekolah. Guru adalah faktor penentu keberhasilan kurikulum melalui proses pembelajaran. Hal yang paling penting ketika guru melaksanakan proses pembelajaran adalah hasil pembelajaran sesuai dengan harapan. Untuk itu, pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari standar kompetensi setiap guru.

Pembelajaran yang efektif mencerminkan keberhasilan kurikulum, tidak hanya terletak pada kualifikasi akademik guru, tetapi dukungan berbagai pihak. Dukungan berbagai pihak yang dimaksud disini adalah dukungan warga internal dan eksternal sekolah yang berada di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Namun, pada kenyataannya di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan masih terlihat belum maksimalnya dukungan dari oleh lingkungan warga sekolah Implementasi K-13 di Kabupaten Kotabaru masih belum terlaksana secara merata dan efisien di semua sekolah.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi tonggak penguatan karakter peserta didik melalui penerapan K-13 di sekolah. Gerakan PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat Pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014—2019 berlandaskan Nawacita. Oleh sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental, sekaligus bagian integral Nawacita. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional, sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2017).

Penggalian informasi terkait dengan pelaksanaan PPK, khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru, perlu pula diketahui seberapa jauh sekolah telah membudayakan pengembangan budaya karakter sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga menjadi

warga negara yang memiliki karakter kuat, mencintai bangsanya, dan mampu menjawab tantangan era global.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan Gerakan PPK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan PPK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menjangkau berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan Gerakan PPK yang sudah berlangsung pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru. Informasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bappeda Kabupaten Kotabaru untuk bersinergi, khususnya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, untuk merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini kebijakan dapat dirumuskan terkait dengan pengembangan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kotabaru.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Kemdikbud (2017) menyebutkan bahwa PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat penancangan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014—2019 berlandaskan Nawacita. Oleh sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental, sekaligus bagian integral Nawacita. Sebagai pengejawantahan Gerakan Nasional Revolusi Mental, sekaligus bagian integral Nawacita, Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah.

Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); serta pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelibatan secara serempak dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan penyesuaian tugas pokok guru, manajemen berbasis sekolah, dan fungsi komite sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Baik pada masa sekarang maupun masa akan datang, pengintegrasian, pendalaman, perluasan, dan penyelarasan program dan kegiatan pendidikan karakter tersebut perlu diabdikan untuk mewujudkan revolusi mental atau revolusi karakter bangsa. Dengan demikian, Gerakan PPK merupakan inti kegiatan pendidikan yang berujung pada terciptanya revolusi perwujudan Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Ada tiga struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa Pertama, struktur program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru. Kedua, struktur kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi yang mampu

mensinergikan empat dimensi pengolahan karakter dari Ki Hadjar Dewantara (olah raga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati).

2. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Satuan pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan memiliki jenjang yang telah ditentukan. Perjenjangan satuan pendidikan itu adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang masuk pada kategori pendidikan formal. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1 menyatakan bahwa:

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.

Sekolah dasar adalah satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya karena tanpa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di sekolah menengah pertama. Sekolah dasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Di Indonesia penyelenggaraan sekolah dasar berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis. Ada tiga komponen perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis penyelenggaraan sekolah dasar, baik sebagai satuan pendidikan maupun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, yaitu UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Maju mundurnya pendidikan dasar dapat dilihat dari seberapa besar dukungan masyarakat. Hasil penelitian Aikara (2011: 186) menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dipandang sebagai proses dengan tujuan yang sama dengan melibatkan berbagai elemen dalam memberikan pelayanan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar dukungan masyarakat, sekolah semakin mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Semua komponen yang dimiliki oleh sekolah dasar merupakan masukan (*input*) dalam mendukung proses pembelajaran. Bafadal (2003: 7) mengklasifikasikan komponen sekolah dasar, yaitu masukan atau dukungan dari sumber daya manusia (SDM), material, lingkungan dan siswa.

Warga sekolah merupakan anggota sekolah sebagai komponen hidup yang dapat berupa masukan sumber daya manusia lingkungan, dan mentah (*raw input*). Dengan kata lain, warga sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu warga sekolah eksternal dan warga sekolah internal, yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, komite sekolah, pengawas sekolah (dalam hal ini dinas pendidikan), serta siswa. Dukungan dinas pendidikan dan kebudayaan sangat diperlukan dalam pelaksanaan gerakan pendidikan karakter, misalnya dalam bentuk pelatihan, penilaian kesiapan komponen yang ada di sekolah, dan melaksanakan kurikulum (yang terbaru).

Dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar lingkungan sekolah juga diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. Untuk itu, sekolah hendaknya membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan dukungan atau bantuan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Menurut Hagman (Sudrajat, 2010: 10), tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk 1) memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat; 2) memajukan program pendidikan; dan 3)

mengembangkan kebersamaan dan kerja sama dalam memajukan pendidikan melalui komite sekolah, penyusunan rencana sekolah, termasuk dukungan tenaga dan dana serta kenyamanan sekolah.

3. Evaluasi

Dalam pandangan Widoyoko (2009: 6), evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu sebagai dasar membuat keputusan, kebijakan, dan/atau program Menurut Mardapi (2012: 4), “Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya”.

Fitzpatrick et. al (2004: 5) mendefinisikan *evaluasi* sebagai kegiatan untuk menentukan suatu nilai objek (berharga atau pantas diterima) dengan melakukan identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi dengan -kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. Menurut Mardapi (2012: 28), jika dilihat dari cakupannya *evaluasi* dapat dibedakan atas evaluasi makro dan evaluasi mikro. Sasaran evaluasi makro adalah program pendidikan, program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan, sedangkan sasaran evaluasi mikro menyangkut kegiatan yang terjadi di dalam kelas yang penanggung jawabnya adalah guru. Dengan demikian, jika dilihat dari cakupannya, sasaran evaluasi sangat berpengaruh terhadap proses pemerolehan informasi atau data yang digunakan untuk melakukan penilaian.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang sangat kompleks untuk mengetahui suatu proses dan hasil pelaksanaan suatu program mulai dari pengumpulan data, perencanaan, proses, dan pelaksanaannya dengan menggunakan metode tertentu.

Menurut Weiss (1972: 4), tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dampak dari suatu program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap data atau informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan atau kebijakan berkenaan dengan program yang sedang dan akan berlangsung. Informasi tersebut dapat mengenai dampak atau hasil yang dicapai, proses, efisiensi atau pemanfaatan pendayagunaan sumber daya. Hasil dari suatu evaluasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu program layak dilanjutkan, dihentikan, atau disempurnakan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi (*evaluative research*). Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi awal terkait dengan pengembangan pendidikan karakter melalui Gerakan PPK.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada sepuluh sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas lima sekolah dasar dan lima sekolah menengah pertama pada beberapa kecamatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari – November 2019.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru. Sampel penelitian sebanyak sepuluh sekolah, yakni masing-masing lima SD dan SMP dari beberapa Kecamatan. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan pertimbangan lokasi sekolah, yakni daerah pusat dan pinggiran kota.

Dalam penelitian ini ada sepuluh sekolah yang datanya layak dianalisis lebih lanjut, yakni SDN 1 Dirgahayu, SDN 7 Dirgahayu, SDN Teluk Gosong, SDN Teluk Tamiang, SDN 2 Lontar Selatan, SMPN 1 Kotabaru, SMPN

2 Kotabaru, SMPN 1 Pulau Laut Tengah, SMPN 1 Pulau Laut Barat, dan SMPN 2 Pulau Laut Tengah. Pada setiap sekolah, kesepuluh sampel penelitian digali informasi dari beberapa sumber, yakni perwakilan kepala sekolah, guru, komite sekolah/atau orang tua, dan siswa.

4. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter. Variabel ini didefinisikan sebagai evaluasi terkait dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan Gerakan PPK pada satuan pendidikan yang diukur dari aspek a) asesmen awal, b) sosialisasi PPK kepada para pemangku kepentingan pendidikan, c) visi, misi, dan perumusan, d) desain kebijakan PPK, e) desain program, f) PPK berbasis kelas, g) pengembangan budaya sekolah, h) partisipasi masyarakat, i) implementasi nilai-nilai utama, dan e) evaluasi PPK.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui instrumen asesmen awal Gerakan (Kemdikbud, 2017). Instrumen diisi oleh kepala sekolah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk memvalidasi hasil isian dilakukan wawancara langsung dan observasi pada sekolah yang menjadi sampel penelitian. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru untuk memperoleh umpan balik, sekaligus sebagai triangulasi data sesuai dengan temuan penelitian dari/sekolah responden.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif untuk menganalisis variabel pelaksanaan pendidikan karakter mengacu pada *Panduan Penilaian Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Kemdikbud, 2017) dengan langkah:

- a) memberi skor pada instrumen indikator keberhasilan PPK di sekolah dengan mempergunakan panduan rubrikasi penilaian;
- b) mengisi hasil skor dalam tabel rekapitulasi penilaian PPK;
- c) cara menilai rerata adalah jumlah total seluruh item dalam satu indikator penilaian yang sama dibagi dengan jumlah item;
- d) menghitung skor akhir.

Kualitas keberhasilan pelaksanaan PPK di sekolah dinilai berdasarkan perhitungan skor seluruh indikator yang ada. Skor PPK sebuah sekolah berkisar antara 0 – 4. Cara membaca hasil skor PPK adalah:

1)	0 – 0,99 (E)	: Banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengembangan PPK di Sekolah
2)	1 – 1,99 (D)	: Sudah mulai ada usaha mengembangkan PPK di sekolah
3)	2 – 2,99 (C)	: Praksis PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah
4)	3,0 – 3,5 (B)	: Praksis PPK di sekolah sudah menjadi kebiasaan
5)	3,6 - 4,0 (A)	: Praksis PPK sudah sangat istimewa dan menjadi budaya sekolah

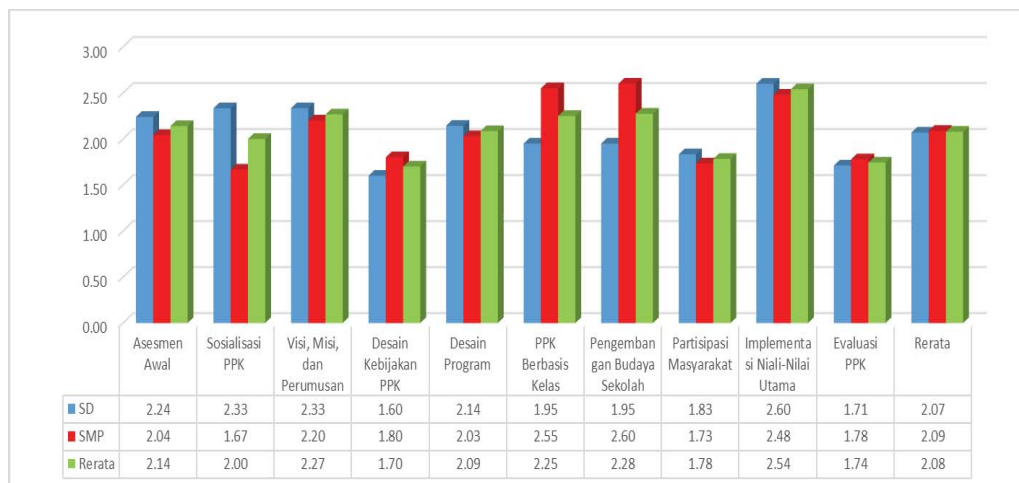
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PPK yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari program *Full Day School* pada berbagai satuan dan jenjang pendidikan, khususnya di Kabupaten Kotabaru, belum menjadi program yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru pada sekolah di berbagai jenjang dan satuan pendidikan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan sekolah responden dalam praktiknya pendidikan karakter telah menjadi bagian dari kegiatan sekolah dalam format dan bentuk yang beragam.

Sehubungan dengan telah dibudayakannya pengembangan karakter pada sekolah, telah dilakukan asesmen awal sebagai bagian dari penelitian ini. Dari data yang dikumpulkan diperoleh temuan utama sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Keberhasilan Pelaksanaan PPK di Sekolah

Secara umum keberhasilan pelaksanaan PPK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dalam Bagan 1 berikut:



Bagan 1 Keberhasilan Pelaksanaan PPK pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kotabaru

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 1 dapat disimpulkan kualitas keberhasilan pelaksanaan PPK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru berada pada *kategori C* dengan rata-rata skor sebesar 2,08. Hal ini menunjukkan praktik-praktik kegiatan PPK *sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah*. Kondisi ini bisa diartikan bahwa sekolah-sekolah sebenarnya sudah berusaha mengembangkan PPK, tetapi belum menjadi kebiasaan dan budaya sekolah. Dari sepuluh komponen pembentuk keberhasilan PPK, terdapat empat komponen berada di bawah rata-rata, yakni komponen Sosialisasi PPK (2,00), Desain Kebijakan (1,70), Partisipasi Masyarakat (1,78), dan Evaluasi PPK (1,74).

Hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru pada sekolah sampel menunjukkan sebenarnya sekolah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari pengembangan karakter baik. Setiap sekolah memiliki kegiatan pengembangan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan dan berbagai kondisi, baik internal maupun eksternal sekolah.

Beberapa kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam bentuk kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, keterampilan, dan berbagai bentuk aktivitas pengembangan karakter lainnya. Contoh riil dari aktivitas tersebut, antara lain kegiatan zikir dan pengajian agama, kegiatan infak siswa, pramuka, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIKR), gotong-royong, ekstrakurikuler olahraga, kegiatan kewarganegaraan (upacara, baris-berbaris), UKS, keterampilan berbahasa asing, dan keterampilan yang mengasah kreativitas dan jiwa wirausaha anak, yakni prakarya anak yang ditampilkan pada pameran, yang juga bernilai ekonomis (diperjualbelikan).

Bagan.1 juga menunjukkan keberhasilan pelaksanaan PPK di jenjang SMP sedikit lebih baik daripada jenjang SD walaupun keduanya masih berada pada *kategori C*. Pada jenjang SMP terdapat enam komponen yang masih berada di bawah rata-rata, yakni komponen Asesmen Awal (2,04),-Sosialisasi PPK (1,67), Desain Kebijakan PPK (1,80), Desain Program (2,03),-Partisipasi Masyarakat (1,73), dan Evaluasi

PPK (1,78). Pada jenjang SD terdapat lima komponen yang berada di bawah rata-rata, yakni komponen Desain Kebijakan PPK (1,60), PPK Berbasis Kelas (1,95), Pengembangan Budaya Sekolah (1,95), Partisipasi Masyarakat (1,83), dan Evaluasi PPK (1,71).

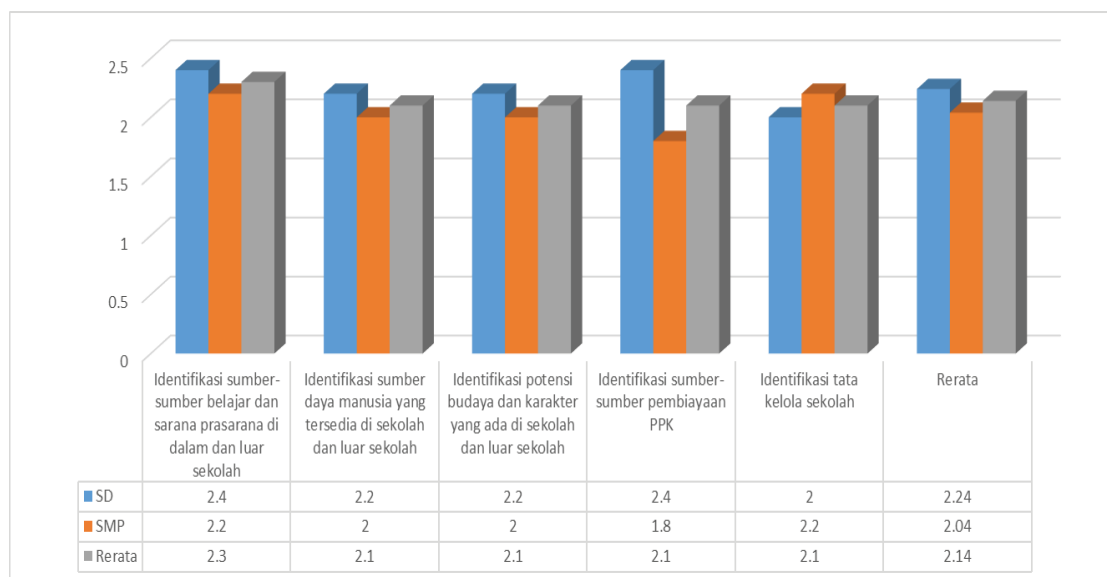
Temuan menarik yang bisa dilihat dari Bagan 1 adanya beberapa komponen yang pencapaiannya masih di bawah rata-rata, baik pada jenjang SD maupun SMP, yakni komponen Desain Kebijakan PPK, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi PPK. Komponen yang pencapaiannya sudah sama-sama di atas rata-rata, yakni komponen Visi, Misi, serta Perumusan dan Implementasi Nilai-Nilai Utama PPK.

2. Keberhasilan Pelaksanaan PPK Berdasarkan Komponen

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan PPK dari komponen pembentuknya secara terperinci dipaparkan pada bagian berikut:

a. Asesmen Awal

Komponen asesmen awal merupakan kegiatan awal dari pelaksanaan PPK di sekolah. Komponen ini ditandai dengan kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi berbagai aspek yang menjadi pondasi awal pelaksanaan PPK di sekolah. Gambaran pencapaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru pada komponen asesmen awal dapat dilihat dalam Bagan 2 berikut:



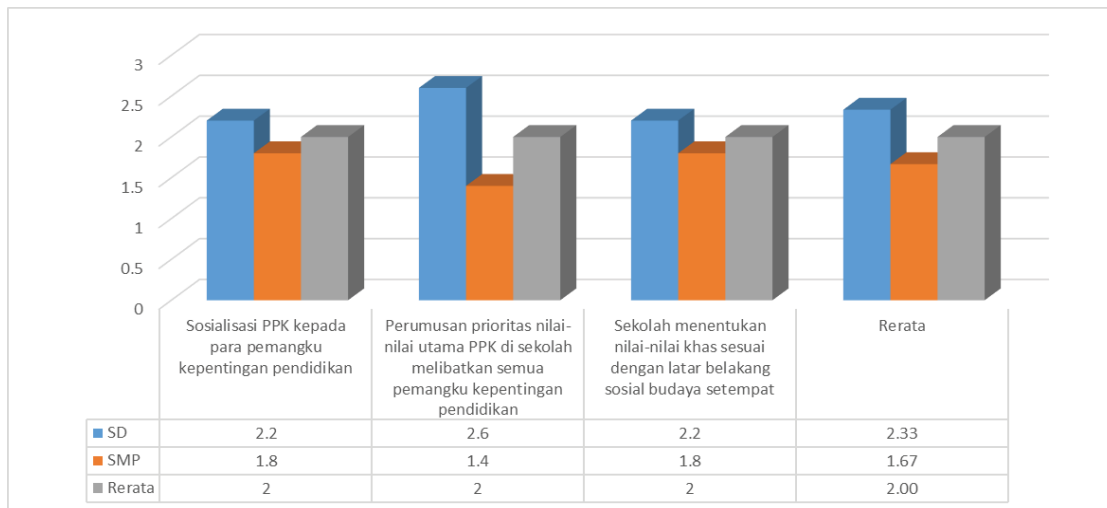
Bagan 2 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Asesmen Awal

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 2 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Asesmen Awal adalah 2,14. Hal ini menunjukkan bahwa praxis PPK pada komponen Asesmen Awal sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

b. Sosialisasi PPK kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan

Komponen Sosialisasi PPK merupakan kegiatan lanjutan setelah asesmen awal pelaksanaan PPK di sekolah. Komponen ini ditandai dengan kemampuan sekolah dalam melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, merumuskan prioritas nilai-nilai utama PPK, dan menentukan nilai-nilai khas sesuai dengan latar belakang sekolah. Gambaran pencapaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru pada komponen Sosialisasi PPK dapat dilihat dalam Bagan 3 berikut:



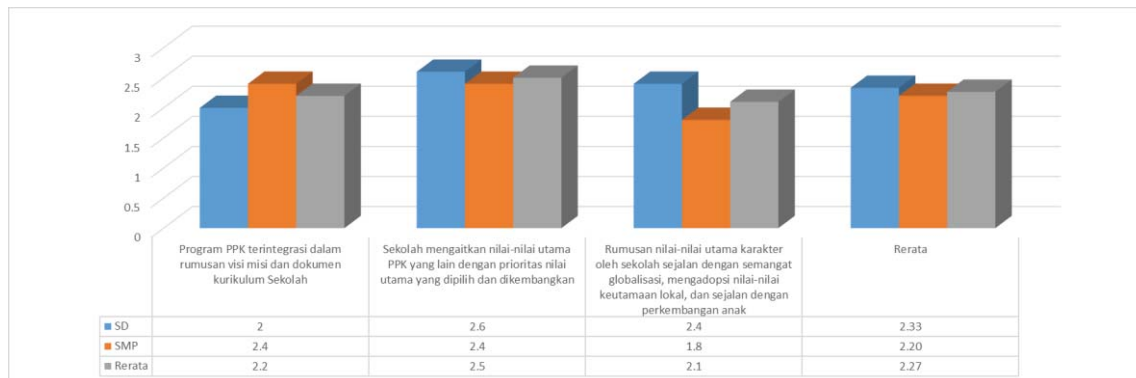
Bagian 3 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Sosialisasi PPK

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagian 3 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Sosialisasi PPK adalah 2,00. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Sosialisasi PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

c. Visi, Misi, dan Perumusan

Komponen Visi, Misi, dan Perumusan merupakan kemampuan sekolah dalam mengintegrasikan program PPK ke dalam rumusan visi, misi, dan, dokumen kurikulum sekolah, serta mengaitkannya dengan prioritas nilai utama yang sejalan dengan semangat globalisasi, berlandaskan budaya lokal, dan sejalan dengan perkembangan anak. Gambaran pencapaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru pada komponen Visi, Misi, dan Perumusan dapat dilihat dalam Bagian 4 berikut:



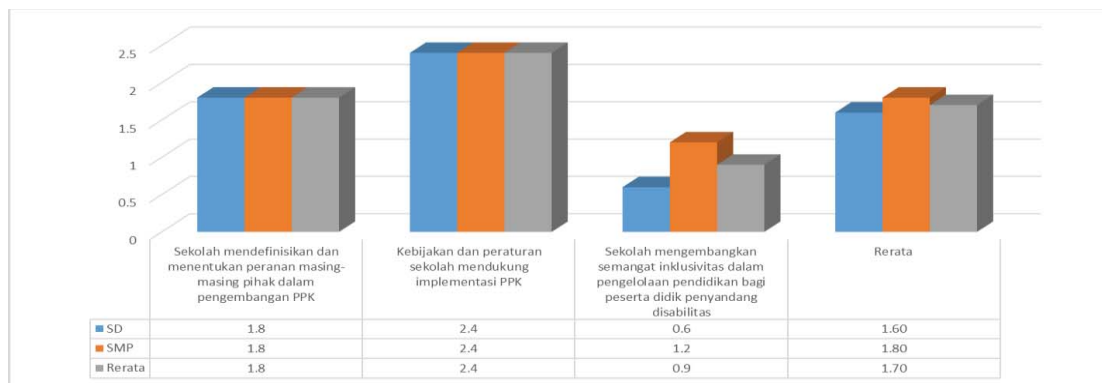
Bagian 4 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Visi, Misi, dan Perumusan

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagian 4 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Visi, Misi, dan Perumusan adalah 2,27. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Visi, Misi, dan Perumusan sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

d. Desain Kebijakan PPK

Komponen Desain Kebijakan PPK terkait dengan kemampuan sekolah dalam mendefinisikan dan menentukan peran berbagai pihak dalam pengembangan PPK serta menyusun berbagai kebijakan mendukung dan memiliki semangat inklusivitas. Gambaran pencapaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru pada komponen Desain Kebijakan PPK dapat dilihat dalam Bagian 5 berikut:



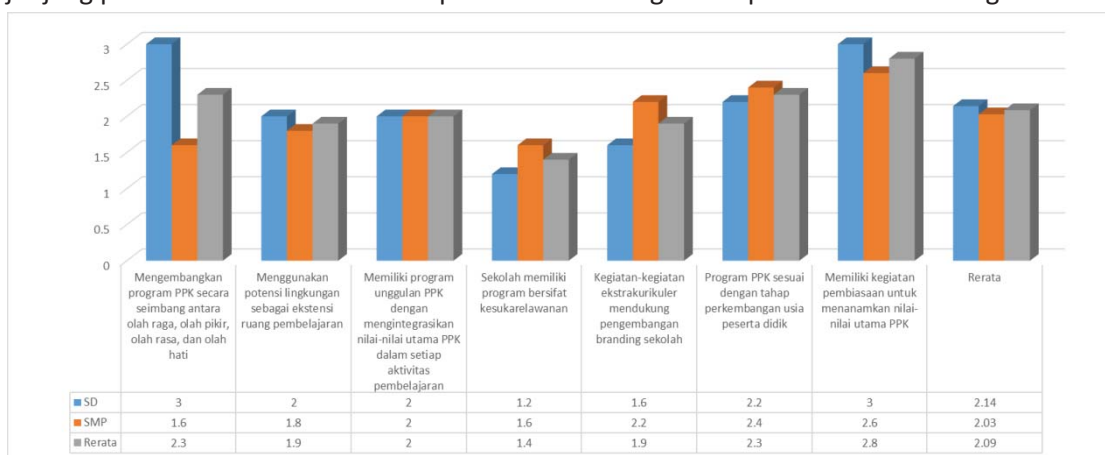
Bagan 5 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Desain Kebijakan PPK

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 5 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Desain Kebijakan PPK adalah 1,70. Hal ini menunjukkan bahwa rakis PPK pada komponen Desain Kebijakan PPK baru pada usaha pengembangan dan belum mulai terlihat di lingkungan sekolah.

e. Desain Program

Komponen Desain Program terkait dengan kemampuan sekolah dalam mengembangkan berbagai program PPK terlihat efisien dan efektif serta memperhatikan potensi lingkungan. Gambaran pencapaian sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk komponen Desain Program dapat dilihat dalam Bagan 6 berikut:



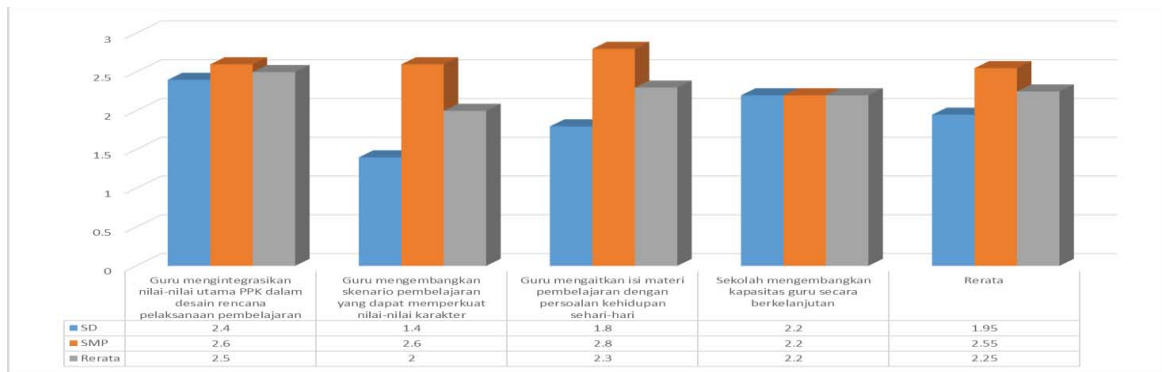
Bagan 6 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Desain Program

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 6 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Desain Program adalah 2,09. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Desain Program sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

f. PPK Berbasis Kelas

Komponen PPK Berbasis Kelas mengidentifikasi kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK dalam pembelajaran dan upaya sekolah dalam mengembangkan kapasitas guru. Gambaran pencapaian sekolah untuk komponen PPK Berbasis Kelas dapat dilihat dalam Bagan 7 berikut:



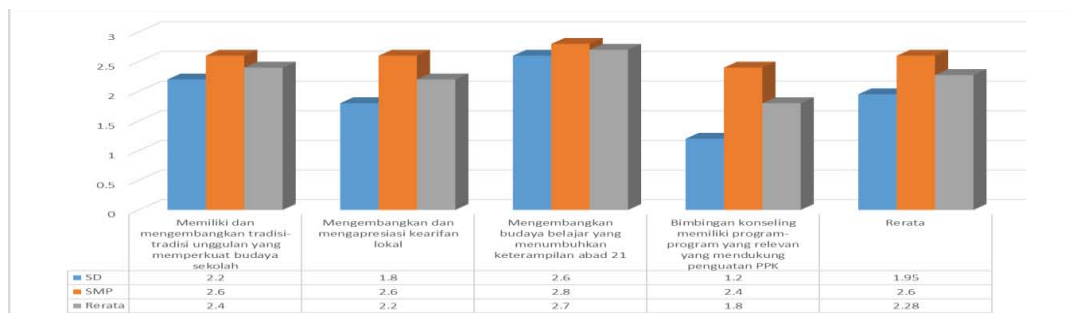
Bagan 7 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen PPK Berbasis Kelas

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 7 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen PPK Berbasis Kelas adalah 2,25. Hal ini menunjukkan bahwa Praksis PPK pada komponen PPK Berbasis Kelas sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

g. Pengembangan Budaya Sekolah

Komponen Pengembangan Budaya Sekolah terkait dengan kemampuan sekolah dalam mengembangkan tradisi unggulan memperkuat budaya sekolah serta apresiasi terhadap kearifan lokal dan pengembangan budaya belajar abad ke-21 disertai dengan efektivitas program bimbingan konseling. Gambaran pencapaian sekolah untuk komponen Pengembangan Budaya Sekolah dapat dilihat dalam Bagan 8 berikut:



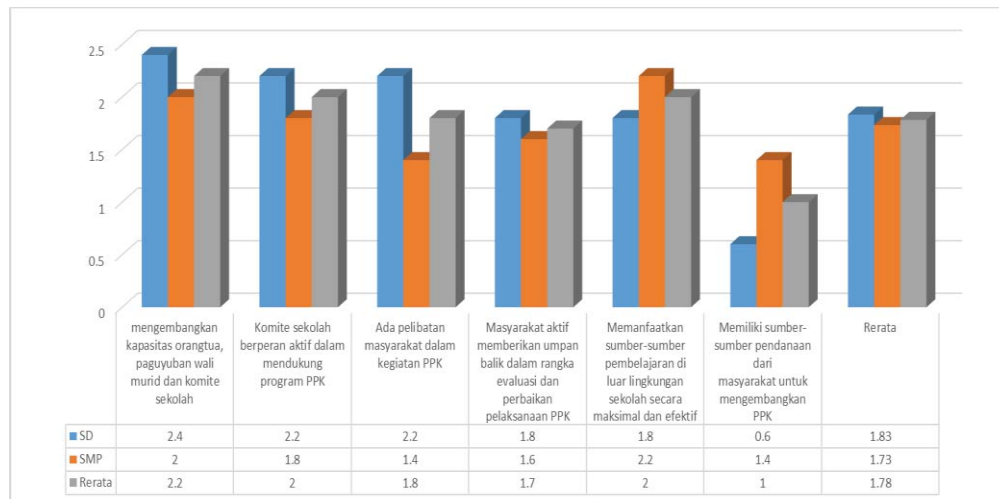
Bagan 8 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Pengembangan Budaya Sekolah

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 8 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Pengembangan Budaya Sekolah adalah 2,28. Hal ini menunjukkan bahwa Praksis PPK pada komponen Pengembangan Budaya Sekolah sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

h. Partisipasi Masyarakat

Komponen Partisipasi Masyarakat terkait dengan kemampuan sekolah dalam mengembangkan kapasitas dan pelibatan berbagai pihak untuk pengembangan PPK serta kemampuan dalam menggali sumber dana untuk kegiatan PPK. Gambaran pencapaian sekolah untuk komponen Partisipasi Masyarakat dapat dilihat dalam Bagan 9 berikut:

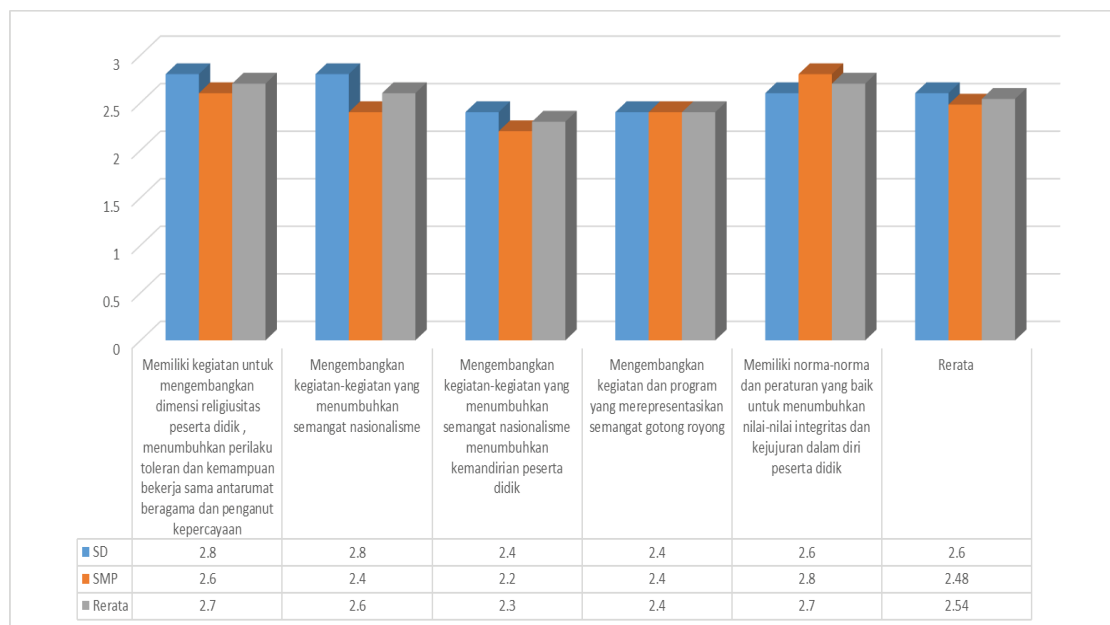


Bagan 9 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Partisipasi Masyarakat
Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 9 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Partisipasi Masyarakat adalah 1,78. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Partisipasi Masyarakat Baru pada usaha pengembangan dan belum mulai terlihat di lingkungan sekolah.

i. Implementasi Nilai-Nilai Utama

Komponen Implementasi Nilai-Nilai Utama terkait dengan kemampuan sekolah dalam mengembangkan berbagai kegiatan berdimensi religiusitas dan menumbuhkan nasionalisme, kemandirian, semangat gotong-royong dan integritas. Gambaran pencapaian sekolah untuk komponen Implementasi Nilai-Nilai Utama dapat dilihat dalam \Bagan 10 berikut:

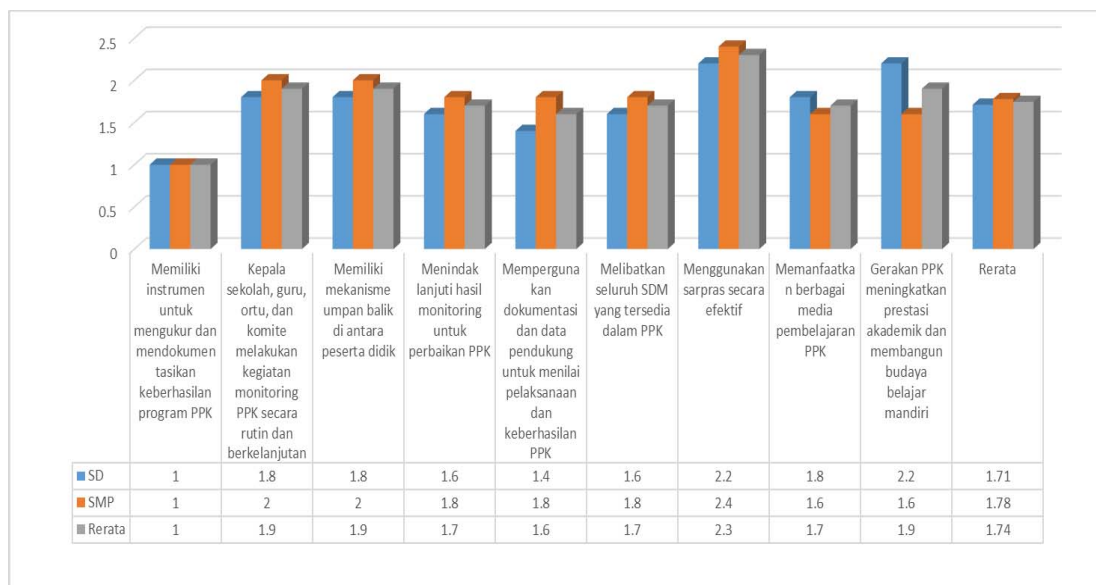


Bagan 10 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Implementasi Nilai-Nilai Utama
Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 10 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Implementasi Nilai-Nilai Utama adalah 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Implementasi Nilai-Nilai Utama sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah.

j. Evaluasi PPK

Komponen terakhir dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan PPK di sekolah adalah Evaluasi PPK. Komponen ini terkait dengan keberadaan instrument dan proses evaluasi serta umpan balik yang baik dari berbagai pihak khususnya pihak sekolah serta kemampuan sekolah untuk menindak lanjuti hasil evaluasi yang dibuat. Gambaran pencapaian sekolah untuk komponen Evaluasi PPK dapat dilihat dalam Bagan 11 berikut:



Bagan 11 Keberhasilan Pelaksanaan PPK Komponen Evaluasi PPK

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2019.

Dari Bagan 11 terlihat bahwa rerata skor untuk komponen Evaluasi PPK adalah 1,74. Hal ini menunjukkan bahwa praksis PPK pada komponen Evaluasi PPK baru pada usaha pengembangan dan belum mulai terlihat di lingkungan sekolah.

Uraian keberhasilan pelaksanaan PPK di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru, baik secara umum maupun khusus, menunjukkan bahwa penyelenggaraan PPK di sekolah belum benar-benar terprogram dengan baik dan cenderung hanya menyesuakannya dengan kebutuhan sekolah. Rendahnya skor pencapaian terutama pada komponen Desain Kebijakan PPK, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi PPK mengindikasikan perlu dikembangkannya program PPK yang benar, terencana, terorganisasi, serta diimplementasikan dan dievaluasi secara profesional.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kotabaru memperkuat temuan penelitian ini. Masih rendahnya tingkat keberhasilan PPK dengan tolok ukur instrument resmi yang dibuat oleh Kemendikbud disebabkan oleh program PPK, khususnya di Kabupaten Kotabaru, belum diatur secara resmi dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keseragaman dan kesepahaman arah pendidikan karakter yang harus dikembangkan berbasis kondisi dan kebutuhan di wilayah kerja Kabupaten Kotabaru. Selama ini sekolah-sekolah hanya mengikuti program-program pengembangan karakter yang direkomendasikan melalui kebijakan pemerintah secara nasional, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kementerian lain yang diadopsi dan diimplementasikan di sekolah.

Perlu dipertimbangkan segera untuk melakukan evaluasi secara komprehensif sebagai langkah awal penyusunan kerangka dasar kebijakan dan acuan program PPK sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya di Kabupaten Kotabaru. Pelaksanaanya tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah konkret dalam membudayakan nilai-nilai utama karakter bangsa, menumbuhkan semangat belajar mengoptimalkan potensi peserta didik menjadi warga negara yang memiliki karakter tangguh dan cinta bangsa, serta mampu menjawab tantangan era global.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Pelaksanaan Gerakan PKK pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kotabaru belum mencapai keberhasilan yang maksimal. Praktik kegiatan PPK sudah mulai terlihat di lingkungan sekolah. Sekolah sudah memiliki usaha untuk mengembangkan PPK, tetapi belum menjadi kebiasaan dan budaya sekolah. Dari sepuluh komponen pembentuk keberhasilan PPK ada empat komponen yang masih perlu mendapat perhatian, yakni komponen Sosialisasi PPK, Desain Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi PPK.

2. Rekomendasi

- a. Pihak Bappeda Kabupaten Kotabaru perlu segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, untuk menerbitkan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kotabaru. Peraturan daerah ini akan menjadi payung hukum, terutama dalam penyusunan anggaran kegiatan untuk pengembangan pendidikan karakter pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kotabaru. Peraturan daerah yang dimaksud jugamakan membantu, baik Bappeda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, untuk melaksanakan kegiatan, antara lain:
 - 1) melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan pendidikan;
 - 2) melakukan sinergi dan implementasi kebijakan Gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - 3) memberikan dukungan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan;
 - 4) memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK pada satuan pendidikan;
 - 5) memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan; dan
 - 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK di satuan pendidikan.
- b. Perlunya penguatan peran kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan PPK di sekolah. Penguatan peran ini hendaknya dilakukan melalui:
 - 6) pelatihan penguatan kemampuan manajerial bagi kepala sekolah dalam melaksanakan program PPK di tingkat sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;
 - 7) peningkatan kompetensi pedagogik guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK dalam membangun karakter siswa melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikara, J. (2011). "Decentralisation of Elementary Education and Community Participation in Kerala". *Rajagiri Journal of Social Development*. Volume 2, Number 2.
- Azwar, S. (2014). *Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar* Edisi II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bafadal, I. (2003). *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Baharuddin. (2010). *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Doni Koesoema A. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Fernandes, H.J.X. (1984). *Evaluation Educational of Program*. Jakarta: National Education Planning Evaluation and Curriculum Development.
- Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., & Worthen, B.R. (2004). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines (3nd ed)*. Boston, MA: Pearson Educational, Inc.
- Idris Apandi. (2017). <http://www.kompasiana.com/idrisapandi/tiga-agenda-penting-implementasi-kurikulum-2013>.
- Kemdikbud. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mardapi, D. (2012). *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (1985). *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Sudrajat, A (2010). "Manajemen Partisipasi Masyarakat di Sekolah". Diakses pada tanggal 20 Mei 2017 di <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/10/konsep-dasar-manajemen-peran-serta-masyarakat>.
- Weiss, C.H. (1972). *Evaluation Research: Methods of Assessing Program Effectiveness*. Englewood Cliffs, NJ, NJ: Prentice Hall, Inc.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

KESESUAIAN BUKU TEKS SEKOLAH DASAR DENGAN KURIKULUM MATEMATIKA, BAHASA, DAN IPA

Sri Hidayati, Teguh Supriyadi, Lisna Sulinar Sari

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data empirik tentang 1) model pengembangan tematik terpadu dan 2) kesesuaian buku teks SD dengan kurikulum mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia (B. Indonesia), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Matematika sesuai dengan kehidupan abad ke-21. Penelitian dilakukan terhadap referensi dan regulasi *Tematik Terpadu, Buku Teks SD Kelas IV* Edisi 2017 dan empat buku teks Matematika yang dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Temuan menunjukkan model pengembangan tematik terpadu belum spesifik. Secara umum untuk tiga mapel: masih ditemukan pembelajaran dan pilihan kata yang sulit, ilustrasi kurang tepat, salah konsep dan kurang akurat, melatih berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan inventif belum tertata rapi. Secara khusus ditemukan KD 3.8 dan 4.8 B. Indonesia tidak dijabarkan, distribusi tidak sama dalam subtema, tidak mengajarkan membaca nyaring, pembelajaran keterampilan reseptif dan produktif yang belum kuat, ada percobaan IPA sulit dilakukan. Matematika ditemukan: KD yang tidak lengkap, dijabarkan ulang, konsep yang tidak tepat, kurang contoh riil, dan penyajian yang membosankan.

Kata kunci: buku teks, kurikulum, kesesuaian, tematik

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini sudah enam tahun Kurikulum 2013 diimplementasikan dan diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah sekolah di Indonesia secara keseluruhan: SD: 148.244 sekolah, SMP: 38.960 sekolah, SMA:13.495 sekolah dan SMK: 13.710 sekolah. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum hasil perbaikan Kurikulum 2006 (K-2006) sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang harus dilakukan dalam periode 2010 – 2014.

Kurikulum dirancang untuk tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kemudian diturunkan menjadi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat 8 SNP, minimal empat standar yang dijadikan rujukan dalam kurikulum, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), dan Standar Penilaian (SPI). Kurikulum diturunkan dari Standar tersebut (Republik Indonesia, 2013).

Kurikulum 2013 dirancang dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan dalam konteks bonus demografi. Pada tahun 2025 yang akan datang jumlah penduduk Indonesia akan lebih banyak usia produktif daripada usia tidak produktif. Hal ini dapat menjadikan jumlah usia produktif sebagai modal pembangunan bangsa jika sejak awal mereka disiapkan dengan baik sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang. Jika hal ini tidak disiapkan, jumlah penduduk produktif yang banyak dapat menjadi bencana bagi pembangunan.

Kurikulum 2013 secara konseptual mengamanahkan adanya perubahan pada aspek pembelajaran. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode II Tahun 2010 – 2014. Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), tetapi pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, dan kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum (Republik Indonesia, 2010)

Sebagai manifestasi arah pembangunan, konsep pengembangan Kurikulum 2013 yang tertuang dalam Naskah Akademik/Peta Jalan Kurikulum 2013 diharapkan bahwa Kurikulum 2013 harus dapat mengembangkan kecakapan abad ke-21 bagi siswa untuk menyiapkan generasi emas. Kecakapan yang harus dikuasai oleh siswa melalui implementasi Kurikulum 2013, baik dilakukan melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*) maupun tidak langsung (*indirect teaching*), terdiri atas tiga hal, yaitu Kualitas Karakter, Kecakapan 4C, dan Literasi Dasar.

Ide kurikulum sebagai manifestasi amanah pembangunan tersebut disusun dalam sebuah dokumen kebijakan, yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta SMK/MAK, serta permendikbud lainnya yang mendukung kebijakan dan implementasi Kurikulum 2013

Dimensi implementasi kurikulum dilaksanakan pada satuan pendidikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber utama pembelajaran. Sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kebijakan kurikulum SD, buku teks pelajaran di SD juga dikembangkan dengan model tematik terpadu. Guru mengajar berdasarkan isi buku teks. Buku Teks dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran.

Implementasi kurikulum diharapkan sejalan dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan dampak dari kurikulum yang telah diimplementasikan melalui berbagai pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Pembelajaran tersebut memerlukan bahan ajar yang disebut dengan *buku teks*.

Buku teks pelajaran dikembangkan berdasarkan kurikulum dengan mengelaborasi kompetensi dasar (KD) tiap mata pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan acuan utama bagi guru dalam mengajar. Buku teks pelajaran di SD disusun sesuai dengan pendekatan tematik (Permendikbud No. 57/2014; Kemdikbud, 2014). Siswa mempelajari konsep dasar mata pelajaran dengan menggunakan sumber utama buku teks pelajaran tersebut. Dengan menggunakan buku teks pelajaran sebagai bahan utama belajar ditambah dengan sumber dan bahan yang ada di lingkungan setempat sebagai konteks pelajaran, diharapkan siswa mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan, yaitu siswa yang berpengetahuan, berakarakter, memiliki kecakapan 4C, dan menguasai literasi dasar. Meskipun demikian, menurut laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu kumpulan negara maju yang melakukan studi literasi bagi siswa seluruh dunia usia lima belas tahun. Indonesia menjadi salah satu *partner* dalam studi tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi anak Indonesia masih sangat jauh di bawah rerata negara maju. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis pencapaian nilai Programme for International Student Assessment (PISA), pada hari Selasa, 6 Desember 2016, di Jakarta. Rilis ini dilakukan bersama dengan 72 negara peserta survei PISA. Hasil survei tahun 2015 yang di rilis hari ini menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia yang signifikan, yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid

dibandingkan hasil survei sebelumnya pada tahun 2012, dari 72 negara yang mengikuti tes PISA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengungkapkan, “Peningkatan capaian anak-anak kita patut diapresiasi dan membangkitkan optimisme nasional, tetapi jangan lupa masih banyak PR untuk terus meningkatkan mutu pendidikan karena capaian masih di bawah rerata negara-negara OECD.”

Penyebab belum optimalnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya proses pembelajaran. Buku teks pelajaran merupakan sumber utama pembelajaran, seperti apa buku tematik di SD menuangkan jabaran KD mata pelajaran. Sampai saat ini belum ada rujukan untuk menyusun kebijakan pengembangan buku tematik SD yang mengembangkan kemampuan literasi melalui penguasaan konsep dasar yang benar.

Hasan (dalam Susilana dkk., 2006: – 6) menjelaskan bahwa kurikulum memiliki empat dimensi: a) kurikulum sebagai ide, yakni buah pikiran manusia tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu pendidikan bagi anak didik itu direncanakan dan dilakukan; b) kurikulum sebagai rencana tertulis (*written document*), yaitu perwujudan ide yang dicatat dan disusun dalam suatu dokumen atau rencana tertulis; c) kurikulum sebagai realita, yakni implementasi rencana tertulis yang berwujud suatu kegiatan pembelajaran; serta d) kurikulum sebagai hasil yang dicapai, yaitu konsekuensi implementasi pembelajaran yang menghasilkan keluaran berupa perubahan perilaku anak didik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum mengamanahkan bahwa evaluasi kurikulum juga harus melihat kesesuaian antardimensi kurikulum.

Evaluasi kurikulum tentang kesesuaian antara buku teks pelajaran sebagai bahan utama pembelajaran perlu dikaji untuk melihat kekuatan dan kelemahannya dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan, terutama pada pendidikan dasar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) model pengembangan pembelajaran tematik terpadu dan (2) kesesuaian buku teks tematik sekolah dasar dengan kurikulum IPA dan Bahasa Indonesia, dan buku teks matematika dengan kurikulum Matematika. Temuan penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi 1) pengembangan kurikulum dan pembelajaran terpadu dalam menetapkan model kurikulum dan pembelajaran dan 2) pengembangan buku teks SD dalam pengembangan buku selanjutnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kurikulum dan Mutu Pembelajaran

Kurikulum 2013 dikembangkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang tidak hanya sekadar lulus ujian, tetapi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan sosial, watak, budi pekerti, dan kecintaan terhadap budaya-bahasa (RPJMN 2010 – 2014). Ide dasar kurikulum tersebut diwujudkan dalam desain Kurikulum 2013 yang terdiri atas aspek sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan.

Kurikulum, sesuai dengan aksioma yang dijabarkan oleh Tyler, merupakan produk waktu dan merefleksikan kapan kurikulum tersebut dikembangkan (Tyler, 1975). Kurikulum 2013 merefleksikan kondisi masyarakat abad ke-21, yang dalam dunia pekerjaan bukan hanya pengetahuan yang harus dikuasai, melainkan juga keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tahun 2010 Partnership For 21 Century mengusulkan kepada Pemerintah Amerika untuk memperbaiki pendidikan dasar dan menengah karena kehidupan masa depan memerlukan keterampilan berpikir kritis, menguasai teknologi informasi, sehat, kolaborasi, kreatif dan inovatif, serta tanggung jawab finansial pribadi.

Konsep pengembangan Kurikulum 2013 menekankan kecakapan abad ke-21 yang terdiri atas lima karakter utama, yaitu religius, integritas, mandiri, nasionalis, dan gotong-royong; Keterampilan 4C atau 4K, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. Selain itu, literasi dasar yang harus dikuasai

siswa adalah literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya dan kewargaan. Menurut Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud, Ananto Kusuma Seta, penguasaan enam literasi dasar yang disepakati oleh *World Economic Forum* pada 2015 menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Enam literasi dasar tersebut mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, budaya, dan literasi kewargaan (Okezone, 2019).

Kurikulum 2013 didasari oleh teori pendidikan interaksional yang dilandasi oleh filsafat *pragmatisme*. Kurikulum rekonstruksi sosial menekankan masa lalu dan masa sekarang dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pembelajarannya menekankan pemecahan masalah di masyarakat dan tujuan pendidikannya adalah membentuk masyarakat yang bermartabat. Dalam implementasinya kurikulum harus dapat memengaruhi perubahan pada masyarakat sebagai dampak dari kurikulum. Dampak kurikulum merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran berupa perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya (Permendikbud No. 159/2014; Kemdikbud, 2014a)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” Dalam hal ini, salah satu sumber belajar adalah buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang baik memiliki kesamaan dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum (Republik Indonesia, 2003)

2. Model Pembelajaran Terpadu

Fogarty (1991:14) menyatakan bahwa ada sepuluh model integrasi pembelajaran, yaitu model *fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked*. Model itu merentang dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, mulai dari *separated subject* sampai eksplorasi kepaduan antaraspek dalam satu bidang studi (model *fragmented, connected nested*), model yang memperpadukan antarbidang studi (model *sequenced, shared, webbed, threaded, dan intergrated*) hingga memperpadukannya dalam diri pembelajar sendiri dan lintas pembelajar (model *immersed dan network*).

Model keterpaduan menggunakan pendekatan antarbidang studi. Diupayakan penggabungan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Model ini sulit di laksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester dan sangat membutuhkan keterampilan guru yang cukup tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Menurut Susilana (2007:71), pembelajaran yang mungkin digunakan dalam pendekatan terpadu adalah pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit (*unit teaching*), inkuiri, diskoveri, dan pembelajaran tematik yang dilakukan dalam kelompok ataupun perseorangan. Dari penjelasan ini tampak bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan dalam menerapkan pendekatan terpadu.

3. Pengembangan Buku Teks

Buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan buku nonteks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.

Pengembangan buku teks dilakukan melalui proses penyusunan dan penilaian kelayakan buku. Buku teks utama disusun oleh Kemendikbud, sedangkan buku teks pendamping disusun oleh penerbit swasta yang dinilai kelayakan buku melalui mekanisme penilaian buku. Penilaian buku dilakukan melalui prosedur penilaian buku teks pelajaran dengan menggunakan instrument penilaian. Instrument penilaian sesuai dengan aspek yang akan dinilai dari sebuah buku teks.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis evaluatif. Analisis evaluatif dilakukan untuk menentukan desain dan prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat (Sukmadinata, 2012). Nilai atau manfaat didasarkan atas pengukuran dan pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu. Data yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria tertentu, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian dilakukan dengan cara analisis evaluatif menggunakan kajian isi dokumen secara kualitatif dengan cara pencatatan materi IPA dan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan KD, yaitu pada aspek pengetahuan yang akan diajarkan/konsep dasar yang akan diajarkan, *skill* abad ke-21, serta *higher order thinking skills* (HOTS) yang terdapat di dalam buku tematik terpadu Kurikulum 2013. Data yang dicatat adalah data yang berhubungan dengan indikator kesesuaian buku teks berdasarkan Kurikulum 2013. Aspek analisis buku pada kurikulum ini adalah aspek ke sesuai dengan kompetensi inti (KI), kesesuaian materi dengan kompetensi dasar (KD), yang ditinjau dari ketercakupan kesesuaian materi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesamaan dan perbedaannya dalam hal tujuan, konten, konstruksi unit, pengajaran bahasa, penampilan tata bahasa dan kosakata dan jumlah kata yang digunakan dalam buku teks, serta untuk memperoleh pengetahuan bahasa Inggris dasar (huruf, kosakata dasar, tata bahasa dan pola kalimat dasar,—serta pemahaman bacaan dasar).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kesesuaian buku sebagai berikut:

1. Buku dinyatakan layak apabila memenuhi kriteria penilaian dari BSNP
2. Permendikbud No.57 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, tidak jelas penggunaan Terpadu dalam Pengembangan Kurikulum atau dalam Pembelajaran. Dikenal model integrasi: intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Pedoman Mata Pelajaran (Lampiran Permendikbud No. 57/2014, tetapi sudah dicabut,; lalu diganti menjadi Permendikbud No 24/2016), dikenal model integrasi: integrasi intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner, tetapi tidak ada keterangan bagaimana integrasi dalam pembelajaran. Akan tetapi, dalam permendikbud tersebut dinyatakan dalam keterangan mata pelajaran bahwa ada muatan nasional dan muatan daerah.
3. Pedoman pengembangan tema masih bersifat umum. Tema pembelajaran memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik, yaitu:
 - a. dari yang termudah menuju yang sulit;
 - b. dari yang sederhana menuju yang kompleks;
 - c. dari yang konkret menuju ke yang abstrak;
 - d. memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik;
 - e. ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya.
4. Tidak ada pedoman khusus bagi penulis dalam pengembangan buku tematik terpadu di SD.

Kelas IV memiliki sembilan tema, yaitu: Tema 1: Indahnya Kebersamaan, Tema 2: Selalu Berhemat Energi, Tema 3: Peduli terhadap Makhluk Hidup, Tema 4: Berbagai Pekerjaan, Tema 5: Pahlawanku, Tema 6: Cita-

citaku, Tema 7: Indahnya Keragaman di Negeriku, Tema 8: Daerah Tempat Tinggalku, dan Tema 9: Karya Negeriku. Hasil analisis evaluasi dari kesembilan tema tersebut dilihat dari mata pelajaran yang di-USBN-kan, yaitu IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Matematika

Mata pelajaran Matematika mengevaluasi empat buku yang berasal dari swasta, yaitu Buku 1 terbitan Bumi Aksara, Buku 2 terbitan Tiga Serangkai, Buku 3 terbitan Jatra Graphics, dan Buku 4 terbitan Sarana Pancakarya Nusa. Secara umum dari empat buku yang dievaluasi hasilnya sebagai berikut.

Bumi Aksara	Tiga Serangkai	Jatra Graphics	Sarana Pancakarya Nusa
Pada buku ini konsep diberikan dengan ringkas, tetapi cukup jelas. Pada beberapa bagian juga diberikan kotak “Ingat” yang berisi informasi singkat untuk membantu siswa mengingat kesimpulan atau konsep yang telah dipelajari. Salah satu contohnya terdapat pada di hlm. 21. Penulis sebelum mem-perkenalkan materi baru, mengingatkan siswa materi apa yang sudah mereka pelajari di kelas III atau pada bab sebelumnya terkait dengan materi yang dibahas. Salah satu contohnya terdapat pada hlm, 35. Sebelum memperkenalkan taksiran hasil operasi hitung dua pecahan, penulis mengingatkan bahwa di kelas I, II, dan III, siswa sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan cacah.	Secara umum buku ini sudah cukup baik. Akan tetapi, dapat terlihat bahwa penulis buku terdiri atas beberapa orang, yang masing-masing membuat bab yang berbeda. Hal ini mengakibatkan ada ketidakkonsistenan dalam penulisan dan bahan yang disertakan. Sebagai contoh pada Bab Pecahan, penulis menambahkan <i>link</i> ke <i>web</i> yang dapat memperkaya anak-anak untuk mencoba soal (<i>web surfing</i>). Akan tetapi, di bab selanjutnya tidak disediakan <i>link</i> tersebut. Bab 1 menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci, - tetapi pada bab selanjutnya lebih ringkas.	Penyusunan buku tampak bertujuan untuk memenuhi tuntutan kurikulum, yakni menghadirkan <i>skill</i> abad ke-21 (4C dan karakter) dalam setiap bab yang ada melalui bagian: Ayo Diskusi, Ayo Bereksplorasi, Ayo Lakukan, Proyek Matematika, Ayo Renungkan, Ayo Peduli, Rich Problem, dan Reflek -si. Namun, tidak semua tepat sasaran (terkesan hanya sebagai ‘tempelan’ saja pada beberapa bagian). Tentu saja hal ini sangat bergantung pada guru yang akan mengim-plementasikannya di kelas. Di sisi lain, buku ini selalu mengawali bab dengan Soal Prasyarat yang bertujuan mengingatkan siswa dengan materi terkait yang sudah dipelajari di tingkat sebelumnya. Uraian materi diberikan sesuai dengan tuntutan KD dan cenderung luas & dalam, bahkan disajikan pula	Penyajian buku secara umum cukup menarik karena dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik atau bahkan ‘komik singkat’. Namun, hal ini tidak konsisten ada pada setiap topik yang dibahas. Pembahasan materi pada setiap bab diawali dengan aktivitas siswa. Hal ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Pada setiap bab juga disajikan informasi terkait tokoh matematika atau info menarik terkait dengan topik yang dibahas yang dapat menambah wawasan siswa.

Bumi Aksara	Tiga Serangkai	Jatra Graphics	Sarana Pancakarya Nusa
		pemanfaatan teknologi pada beberapa topik. Namun, -beberapa bagian uraian materi tidak sesuai dengan kemampuan prasyarat yang dimiliki siswa.	

Secara lebih terperinci hasil evaluasi menunjukkan sebagai berikut:

Dari keempat buku tersebut, semua KD dijabarkan, kecuali pada buku 4, mestinya penaksiran, menyelesaikan penaksiran dari operasi dua bilangan cacah, desimal, atau pecahan. Penaksiran bilangan cacah dan pecahan tidak dijabarkan

- a. Uraian sesuai, kecuali buku 4. KD 3.7 dan 4.7 mengulang jabaran materi 3.3 dan 4.3.
- b. Keluasan dan kedalaman keempat buku itu berbeda-beda.
 - 1) Buku 1: kedalamannya cukup, hanya diperkaya dengan satuan baku yang dipakai dunia.
 - 2) Buku 2: kedalamannya cukup.
 - 3) Buku 3: terdapat materi yang terlalu sulit.
 - 4) Buku 4: memberi pertanyaan yang menggugah siswa.
- c. Kebenaran konsep: dalam keempat buku ditemukan konsep yang tidak sesuai dengan konsep keilmuan, antara lain konsep pecahan, konsep geometri dalam penggunaan kata *garis* dan *ruas/segmen garis*. Kesalahan menjelaskan segi banyak tak beraturan.
- d. Ditemukan beberapa ilustrasi yang tidak sesuai dengan jabaran materi.
- e. Pemilihan kosakata yang terlalu sulit, misalnya *kurva tertutup sederhana*
- f. Pilihan kalimat yang terlalu panjang sehingga membingungkan.
- g. Ditemukan penyajian yang kurang memperhatikan prasyarat keilmuan.
- h. Kurangnya pembahasan dengan contoh kehidupan sehari-hari.
- i. Aspek seni pemilihan warna yang monoton membuat siswa jenuh.

2. IPA

- a. Masih ditemukan kesalahan konsep sehingga perlu dilakukan perbaikan pada konsep yang salah.
- b. Cara penyajian yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa, diharapkan buku dilakukan telaah dan direvisi dengan penyederhanaan kalimat.
- c. Ilustrasi gambar tidak sesuai dengan konten materi.
- d. Tidak ada gambar yang sesuai dengan materi.
- e. Ada contoh gambar, tetapi kurang tajam dan akurat, serta ada pula gambar yang kurang sinkron dengan konten materi dan pertanyaan.
- f. Terdapat materi yang tidak akurat, ada gambar tanpa keterangan sehingga materi kurang dapat dipahami.
- g. Pada materi “Indra Pendengaran”, “Materi Percobaan Pemantulan”, dan “Penyerapan Bunyi” tidak diawali dengan penjelasan konsep.
- h. Terdapat tahapan percobaan yang tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan.
- i. Ditemukan banyak ilustrasi gambar yang tidak sesuai dengan konten material sehingga membingungkan.
- j. Beberapa uraian menunjuk pada gambar, tetapi tidak ada gambarnya.
- k. Ditemukan materi yang terlalu sulit, seperti penjelasan sifat cahaya dan cermin kurang akurat.
- l. Ditemukan KD yang tidak diuraikan dengan komprehensif sehingga capaian materi kurang.
- m. Uraian penjelasan dengan kalimat yang susah dipahami.
- n. Uraian KD kurang tepat, yaitu antara gaya listrik dan energi listrik, gaya magnet tidak mencantumkan sifat-sifat magnet, materi aplikasi tentang sifat magnet tetapi diuraikan sebagai gaya magnet.

- o. Pemberian contoh kurnag tepat dalam menguraikan konsep gaya listrik dan energi listrik.
- p. Materi gaya listrik, tetapi uraiannya tentang energi listrik.

3. Bahasa Indonesia

- a. Bahasa Indonesia terdiri atas 10 KD Pengetahuan dan 10 KD Keterampilan, tetapi tidak ditemukan 1 KD, yaitu KD 3.8 dan 4.8 dalam buku Kelas IV.
- b. Sebaran KD tidak merata, ada yang sebagian muncul pada beberapa tema, tetapi ada hanya satu kali muncul.
- c. Masih ditemukan kalimat yang panjang (Tema 8 dan 9). Pada halaman 156: 1 kalimat terdiri atas 25 kata, memuat 6 informasi, kata-kata baru: kekayaan, khasanah, masyarakat, beragam, nilai, keunikan, keindahan, tersendiri, wisatawan, mancanegara, keragaman. Afiks ke-...-an membentuk makna abstrak yang seharusnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak (Chall, 1983 dalam Gleason dan Ratner, 2009)
- d. Setiap kegiatan yang tercantum dalam silabus tersebar dalam tema dan subtema yang berbeda.
- e. Kebenaran konsep
- f. Pengejaan vokal dan konsonan tidak dilatihkan.
- g. Tidak ada kegiatan membaca nyaring
- h. Pilihan kata yang sulit sehingga tidak semua siswa/anak di seluruh Indonesia memahaminya.
- i. Konteks keindonesiaan sebagai bagian dari perspektif NKRI belum ada pedomannya.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Buku yang layak adalah buku yang telah melalui tahap penilaian. Namun, pada kenyataannya Buku Teks Kelas IV SD yang terdiri atas sembilan tema dilihat dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika masih banyak ketidaksesuaiannya dengan kurikulum, padahal buku-buku ini telah melewati tahap penilaian. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh tidak adanya pedoman khusus bagi penulis, sehingga muncul kesalahan, seperti salah konsep, gambar dengan penjelasan tidak sesuai, uraian dalam penjelasan susah dipahami, tidak ada penjelasan dalam gambar, uraian dalam penjelasan tidak sesuai dengan materi, kurang KD, penggunaan kata yang, dan sebaran KD yang tidak merata. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penulis belum memahami benar kurikulum dan bagaimana membuat buku tematik yang baik dan benar. Selain itu, ada kemungkinan latar belakang pendidikan penulis tidak sesuai dengan buku yang dibuat sehingga kurang menguasai mata pelajaran lainnya.

2. Opsi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan dalam mengevaluasi buku Kelas IV SD untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, opsi kebijakannya dapat dibedakan atas dua bagian:

a. Pengembangan

- 1) Perlu adanya koordinasi antara penulis dan pembuat kurikulum pada setiap mata pelajaran dengan unit utama implementasi, guru, dan pengguna agar buku yang disusun sesuai dengan kurikulum
- 2) Perlu adanya pelatihan bagi penulis secara mendetail tentang konsep tematik dan model pengembangan yang dipilih dan hal khusus lain – untuk setiap karakteristik mata pelajaran agar, setiap penulis memiliki konsep yang sama.
- 3) Perlu dilakukan pelatihan tentang karakteristik kurikulum untuk setiap mata pelajaran.
- 4) Perlu dilakukan pengendalian isi buku pada setiap proses dan pengendalian mekanisme penunjukan penulis (proses seleksi).
- 5) Pedoman penilaian sudah ada dalam pengendalian mutu buku, tetapi masih perlu dioptimalkan.
- 6) Perlu dibuat pedoman penulisan buku.

- 7) Harus ada keselarasan antara instrumen penilaian dan pedoman pengembangan buku yang digunakan sebelum dikembangkan atau sebagai bahan pelatihan.

b. Penilaian (*Review*)

- 1) Penulis dan pereview buku teks harus memiliki latar belakang akademik yang sesuai.
- 2) Penulisan buku tematik setiap tema disusun oleh ahli dari berbagai ilmu yang relevan.
- 3) Penulis buku harus diberi waktu yang cukup dalam menyusun bukunya.
- 4) Buku siswa sebaiknya disiapkan dua jenis: (i) buku induk/buku babon yang berisi konsep keilmuan secara utuh karena dalam perubahan kurikulum tidak mengubah konsep esensial; (ii) buku berbasis aktivitas yang digunakan sebagai buku penunjang proses pembelajaran selaras dengan kurikulum dan dapat bersifat habis pakai.
- 5) Buku guru sebaiknya tidak hanya berisi panduan skenario pembelajaran, tetapi juga berisi konsep esensial sebagai tujuan pembelajaran melalui proses berpikir.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia opsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran bahasa sebagai dasar literasi membaca tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran di kelas awal. Pengenalan terhadap huruf dalam bahasa Indonesia harus diperkenalkan dengan baik dan lengkap. Sejauh ini, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia memperkenalkan huruf atau abjad latin, bukan abjad bahasa Indonesia. Akibatnya, murid diperkenalkan pada huruf *q* dan *x*. Kedua huruf itu tidak ada dalam bunyi bahasa Indonesia. Bunyi /*q*/ dalam bahasa Indonesia diganti dengan bunyi /*k*/, seperti *taqwa* menjadi *takwa*, *qalam* menjadi *kalam*. Hanya *quran* masih ditulis dengan huruf *q*. Dalam bahasa Indonesia bunyi /*x*/ akan ditulis dengan gabungan konsonan *ks*, misalnya *taxi* menjadi *taksi*, *complex* menjadi *kompleks*. Buku-buku pelajaran tidak memperkenalkan bunyi dalam bahasa Indonesia, seperti bunyi /*ng*/ dalam kata *yang*, *ganggu*, dan *dengung*; bunyi /*ny*/ dalam kata *nyamuk* dan *nyanyi*; bunyi /*kh*/ dalam kata *khazanah*, *khianat*, dan *khotbah*; bunyi /*sy*/ dalam kata *syahdu*, *syair*, dan *syarat*.
- b. Sebaiknya bahasa Indonesia tidak diajarkan sebagai bahasa pertama, tetapi sebagai bahasa kedua. Dengan demikian, siswa akan belajar melafalkan kata dengan benar dan berintonasi dengan tepat dalam bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua akan membuat kita waspada pada panjang kalimat, pilihan kata, dan intonasi. Persyaratan pengajaran bahasa kedua adalah mengajarkan bahasa mulai dari bunyi bahasanya. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa bunyi /*e*/ yang membedakan makna, misalnya Saya dari Tebet akan ke Senen melalui Menteng. Pelafalan bunyi /*e*/ akan sangat berarti bagi ketepatan penyampaian makna.
- c. Berkaitan dengan pengajaran bahasa kedua, hal yang harus diajarkan adalah membaca dengan suara keras. Kegiatan ini tidak lagi ditemukan dalam buku teks pelajaran tematik terpadu kelas 4. Terlebih lagi jika siswa membaca teks eksposisi dengan muatan ilmu lain. Siswa harus membaca teks itu dengan intonasi yang tepat agar dapat menangkap dengan tepat makna dalam kalimat atau teks tersebut. Membaca keras tidak dianggap penting lagi, padahal untuk kepentingan literasi, membaca dengan tepat sangat penting.
- d. Buku teks pelajaran tematik terpadu untuk sekolah dasar seharusnya ditulis dengan memperhatikan perkembangan kemampuan berbahasa anak. Penulis buku hendaknya mempertimbangkan usia siswa yang akan membacanya. Dalam buku teks pelajaran tematik terpadu kelas 4 ini, buku Tema 8 dan Tema 9 sudah menggunakan kalimat dan pilihan kata yang sulit. Untuk itu, harus ada penelitian yang lebih serius mengenai kemampuan siswa membaca dan

menulis kalimat. Selain itu, harus ada penelitian mengenai penjenjangan pilihan kata dan jumlah kata yang dikuasai oleh siswa pada usia tertentu.

- e. Atas pertimbangan bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan beraneka budaya, perlu dipikirkan bahwa penyusunan buku tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang tinggal di kota besar, tetapi juga yang berada di daerah terpencil dan terisolasi. Kemampuan siswa yang sangat beragam di Indonesia juga memerlukan perhatian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2018. *Potret Pendidikan Indonesia*. Statistik Pendidikan 2018. Jakarta: BPS.
- Fogarty, Robin. (1991). *The Mindful School: How to Integrated the Curricula*. Palatine, IL: Skylight Publishing.
- Isjoni. (2006). *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 24.
- Gleason, Jean Berko, Ratner, Nan Bernstein, 2009. *The Development of Language. Seven Edition*. Boston: Pearson Education.
- Kemdikbud. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Kemenhumham.
- Kemdikbud. 2014a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum, Jakarta: Kemenhumham.
- Kemdikbud. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemenhumham.
- Kemdikbud. 2016. "Peringkat dan Capaian PISA Indonesia Mengalami Peningkatan", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan>, Diakses 11 November 2019.
- OECD, 2016. "Programme for International Student Assessment (PISA) Result from PISA 2015", <https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Indonesia.pdf>, Diakses 11 November 2019.
- Okezone. 2019. "Masyarakat Diminta Pahami 6 Jenis Literasi", <https://nasional.okezone.com/read/2019/03/14/337/2029875/masyarakat-diminta-pahami-6-jenis-literasi>, Diakses 1 Desember 2019.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Skretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. *Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Bidang Hukum.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.

- Susilana, Rudi. dkk, 2006. *Kurikulum Pembelajaran*. Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI, hal. 6.
- Susilana. 2007. *Pengertian Media Powerpoint*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tyler, Ralph W. 1975. *Basic Prinsiples of Curriculum and Instruction*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 3 Panel No: 1,2,3
Ruang	: Ruang Padjadjaran 3
Waktu	: 13.15 – 15.30WIB
Judul Penelitian	: 1. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Produk Bernilai Kearifan Lokal untuk Penguatan Pendidikan Karakter 2. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kotabaru 3. Kesesuaian Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar dengan Kurikulum IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia
Penyaji	: 1. Prof. Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd. 2. Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd 3. Sri Hidayati, M.Si
Pembahas	: 1. Dr. Eka Dewi Nuraeni
Moderator	: Nur Listiwati, SS, M.Ed
Notulis	: Hermanto Waruwu, S.Pd

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	Prof. Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd - Idealnya visi kurikulum mulok adalah untuk pengembangan potensi daerah terutama untuk prioritas pembangunan daerah. Muatan mulok dalam Kurikulum 2013 kiranya disahkan oleh gubernur seperti di kota Banjarmasin yang muloknya adalah bahasa Banjar disahkan oleh gubernur. - Pentingnya mulok untuk pewarisan nilai-nilai budaya dalam arti luas. Maksudnya bisa dihadirkan unsur-unsur budaya terutama budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal bisa dihadirkan dari seluruh unsur budaya - Pembelajaran mulok berorientasi menghasilkan produk bernilai lokal. Seperti yang dikehendaki Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik dengan berbagai model. Hal itu untuk menghasilkan generasi masa depan yang kritis dan produktif. - Ketika bahasa dikembangkan problem terbesar adalah guru. Di jawa timur, guru bahasa jawa sangat langka. Di universitas Lambungmangkurat tidak ada diajarkan guru untuk Bahasa Banjar, sehingga akhirnya gurunya seadanya. - Dalam FGD yang kami selenggarakan, banyak Kepala Daerah dan Kepala Dinas belum memahami struktur kurikulum. Mereka belum mengetahui bahwa muatan lokal dikembangkan berdasarkan potensi daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang berpotensi ekonomi. - Perlu dikembangkan muatan mulok alternatif yang berbasis kebudayaan setempat sehingga mulok tidak diseragamkan antar daerah tetapi dapat dikembangkan pada level sekolah sesuai dengan produk-produk kearifan lokal.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Nilai-nilai dapat diintergrasikan di dalam kelas melalui pembelajaran di kelas, budaya sekolah dan partisipasi masyarakat Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd - Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan mengenai <i>fullday</i> karena <i>fullday school</i> menjadi perdebatan mengingat daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari beberapa pulau. <i>Fullday school</i> kemudian diarahkan ke pendidikan karakter. - Sejak tahun 2017 belum ada dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan PPK terutama di Kabupaten Kotabaru. Kita masih menyentuh pembelajaran dan belum menyentuh aspek holistic dalam PPK Kotabaru. - Kotabaru terdiri atas dua kepulauan, satu lebih dekat ke Surabaya dan satu lagi lebih dekat ke Sulawesi. Kotabaru ini juga daerah yang sangat multikultural. Kondisi ini merupakan fenomena unik yang menjadikan ini sampel bagi penelitian kami - Variabelnya mengacu pada asesmen yang dilakukan Kemendikbud dengan 10 variabel dalam penelitian. - Pelaksanaan PPK di Kotabaru masih termasuk dalam kategori di C. PPK sudah dilaksanakan tetapi belum menjadi kebiasaan. Pengembangan karakter bermacam-macam sesuai dengan kondisi sekolah. Di daerah pinggiran didominasi oleh orang Mandar, sehingga pendidikan karakter sesuai dengan orang-orang Mandar. - Pendidikan karakter belum secara jelas dilakukan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan visi misi. Ada beberapa sekolah yang melaksanakan tetapi belum mampu melakukan asesmen awal - Dari awal sekolah tidak memiliki kemampuan menganalisis apa yang cocok bagi mereka hal ini berdampak pada aspek-aspek lainnya. - Faktor di kelas guru juga tidak mampu mengembangkan potensi siswa. Bahkan ada yang baru lulus SMA dan menjadi guru karena tidak ada yang mau menjadi guru di sana. Bahkan guru-guru yang berstatus PNS berani melepas status mereka sebagai guru karena kondisi yang sangat jauh. - Orangtua di sana mulai bergeser ke arah pendidikan-pendidikan Islam. Orangtua di sana lebih aktif karena masih ada hubungan keluarga dengan gurunya. Hal ini membantu kemandirian pengembangan PPK di sekolah - Implementasi nilai-nilai karakter terutama moral dan akhlak banyak dikembangkan. Pada guru-guru senior lebih dirasakan dampak dibandingkan guru-guru muda yang mulai bergeser dalam mengajar - Belum ada Perda untuk mengembangkan pendidikan karakter. Ketika melakukan kegiatan, sekolah membutuhkan dana dan setiap mengajukan selalu diminta dasar program yang dilaksanakan. Disarankan adanya Perda sebagai payung hukum untuk mengembangkan pendidikan karakter - Peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru menurut analisis kami memegang peran penting untuk menunjang pendidikan karakter di daerah. Sri Hidayati, M.Si

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Kurikulum 2013 disusun berdasarkan konteks kekinian karena saat pengembangan kurikulum harus relevan dengan waktu kurikulum tersebut dikembangkan. Di mana saat ini memasuki era disrupsi dan revolusi industri 4.0. - Implementasi selain dipengaruhi kebijakan kurikulum secara keseluruhan, juga dipengaruhi kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana serta termasuk buku teks. - Buku teks yang dikembangkan oleh BSNP memiliki aspek isi, bahasa dan kegrafikaan. - Pendekatan tematik saat ini banyak sekali persoalan, tetapi kami lebih melihat seperti apa buku teks itu, dan apakah menunjang hasil belajar yang optimal. - Kita ingin menghasilkan opsi kebijakan untuk pengembangan model kurikulumnya dan opsi-opsi apa saja untuk mengembangkan model tersebut. - Kami menggunakan Permendikbud No.79 sebagai dimensi kami. Diharapkan setiap dimensi itu mengalir itu yang kita sebut dengan aligment atau kesesuaian. - Di dalam Permendikbud ada muatan nasional tetapi di dalam pengembangan buku misalnya Bahasa Indonesia sangat beragam. Tidak ditemukan bagaimana materi yang berisi muatan nasional. Tidak ada pedoman khusus dalam pembuatan tematik terpadu. - Untuk 3 mata pelajaran yang dikaji masih ditemukan beberapa muatan yang salah konsep. Kami kira hal ini tidak boleh terjadi karena kesalahan tersebut dapat menjadi turun temurun. - Pada buku ada pembelajaran dengan pilihan kata sulit dan beberapa ilustrasi kurang tepat - Melatihkan berpikir logis, kritis, inovatif, dan inventif dalam buku belum tertata rapi. - Setelah adanya temuan dari penelitian ini, hal ini mungkin akan membingungkan untuk penulis dan penerbit buku. Mungkin perlu mengklarifikasi lagi tentang penilaian buku. - Perspektif tentang NKRI belum ada temuannya. Belum ada capaian lebih jauh sampai mana siswa memahami kebangsaan - Guru-guru SMA sangat sulit mengajar karena konsep-konsep yang masih belum dipahami - Buku yang monoton kurang menarik sehingga mengurangi motivasi membaca siswa. - Bahasa Indonesia bukan bahasa pertama yang dikenal tetapi bahasa Ibu. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua yang dikenal
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Dra Eka Dewi Nuraeni - Mungkin ada 2 penyebab kenapa mulok cenderung diarahkan kepada bahasa daerah. Pertama, mungkin pemahaman pemerintah daerah ke level bawahnya masih terlampau sempit yang mengartikan mulok sebagai bahasa daerah. Kedua, bisa saja pemerintah sudah memahami apa itu mulok, tetapi bahasa tetap dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Saya berpendapat mulok bahasa daerah itu tetap dipertahankan. Menurut saya hal ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mungkin bagaimana ini bisa diperhatikan. Bisa dilakukan seperti pelatihan untuk menambah kemampuan yang sudah ada. - Dari LPTK yang memiliki program bahasa daerah masih cukup terbatas padahal begitu banyak bahasa daerah yang kita miliki. Mungkin dari Kemendikbud harus ada penekanan kepada LPTK bagaimana mulok di LPTK membuka jurusan bahasa daerah setempat. Sayang sekali potensi bahasa daerah hanya diperhatikan beberapa bahasa daerah saja. - Dari guru hingga kepala daerah harus memahami bahwa mulok tidak hanya bahasa daerah saja dan dapat dikembangkan terintegrasi dengan pembelajaran. Untuk mengintegrasikannya harus ada kebijakan teknis bagaimana menjadikan konsep menjadi kegiatan operasional yang diterapkan di masing-masing sekolah - Terkait implementasi PPK, ternyata dari kajiannya ada 10 komponen kemudian masing-masing komponen ada aspek-aspeknya. Yang saya lihat untuk SD skor yang diperoleh minimal 0,6 sampai 2,3; untuk SMP diperoleh skor minimal 0,6 sampai 2,2. Aspeknya adalah sekolah melaksanakan inklusifitas bagi penyandang disabilitas. Hal yang menarik adalah di jenjang SD hal ini sangat rendah. Diharapkan adanya integrasi sekolah seperti sekolah inklusi. Dengan sekolah inklusi secara otomatis meningkatkan PPK. - Aspek-aspeknya lebih banyak mengarah ke tugas kepala sekolah. Mungkin diperlukan satu kebijakan teknis untuk kepala sekolah terutama bagaimana kepala sekolah mampu membuat rancangan implementasi PPK ini. - Buku sendiri belum terorganisir sehingga banyak buku yang digunakan kualitasnya masih belum memenuhi. Jika di tingkat Kemendikbud saja masih tidak mampu, bagaimana di tingkat implementator
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	Bapak James (Staf Ahli Menteri) - Dalam kurikulum 2013 mulok diberikan 2 jam struktur. Sekarang ini ada perubahan TIK di mana hal tersebut dapat dibuat menjadi mulok. - Pilihan mulok ini sering diartikan sebagai kegiatan bahasa daerah. Seharusnya mulok harus dimulai dari analisis konteks kurikulum terlebih dahulu. Analisis konteks harus dimulai dari 4 kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013 dan kompetensi dasar lainnya. Kompetensi inti karena sangat general tidak menjadi masalah. Kurikulum 2013 meminta pelaksanaan kontekstualnya, sifatnya tidak mendirikan pembelajaran tunggal yang berdiri sendiri tetapi mengintegrasikan pelajarannya antara satu dengan yang lainnya. - Analisis konteks sekolah dalam masyarakat harus dilihat apakah memberikan dampak atau tidak. Produk pendidikan karakter dengan kearifan lokal masuk melalui kompetensi-kompetensi dasar. Dia tidak masuk dari mata pelajaran yang berdiri sendiri.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Kita melihat paradigma Kurikulum 2013 bahwa sumber-sumber belajar sangat luas, buku salah satu sumbernya. Di SD, guru sangat bergantung kepada buku. Produk kita guru S1 harus mampu mengelaborasi pelajaran dalam buku. Paradigma buku yang kita bangun selama ini adalah paradigma lama di mana buku sebagai konten. Kita harus bergerak dari konten, menjadi berbasis aktivitas. Artinya kita tidak harus bertitik tolak dari buku, siswa bertolak dari 5M dan mengalami proses pembelajarannya. Guru harus memahami hal tersebut itu, jika tidak kita terjebak dengan ketergantungan kepada buku. - Mulok harus dimulai dengan analisis konteks yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi dasar. Bahasa lokal sesuai dengan UU Sisdiknas bisa menggunakan bahasa daerah. Jika bahasa daerah terancam punah, dapat dilakukan dengan Perda untuk melaksanakan pembelajaran dengan bahasa daerah yang dimulai dari kelas awal. - Pendidikan karakter di sekolah seolah-olah menjadi program berdiri sendiri padahal pendidikan karakter tidak diajarkan. Kurikulum 2013 menyediakan alur untuk menjalankan pendidikan karakter. Saya menyarankan kata mengajar dihapus dari pendidikan karena dia menindas kemampuan berpikir anak. Orientasi kita dari <i>knowledge based</i> berpindah menjadi <i>competency based</i>. Tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan potensi peserta didik. Yang kita kembangkan bukan pengetahuan siswa saja, tetapi seluruh potensi yang dimiliki siswa - Mata pelajaran dapat dilaksanakan terpadu satu dengan yang lainnya dengan kata lain intradisiplin. Dengan begitu tanpa diajarkan karakter akan bertumbuh. Kearifan lokal dapat kita gunakan dalam hal ini, bukan agama. Agama itu sangat inklusif. - Kita sudah masuk pembelajaran 21, guru tidak lagi memberi tahu siswa melainkan guru membimbing anak untuk mencari tahu. Ibu Mulyati (SMAN 1 Bogor) - Muatan lokal dengan bahasa daerah sangat perlu di SD karena tersebut lebih mudah kepada siswa. Mungkin tidak hanya bahasa daerah tetapi juga bisa tari-tarian atau musik daerah. Untuk SMP dan SMA bisa dengan sifatnya bersifat produk seperti kuliner atau tata boga, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. - Pengembangan mulok yang diserahkan kepada masing-masing sekolah dapat mengakibatkan kebingungan terhadap PAGUnya sesuai dengan kearifan lokal. - Saya mendapat buku dari sekolah, kemudian 2 tahun lagi buku ditarik dan kemudian diberikan buku yang baru. Menurut saya hal tersebut mubazir. Mungkin buku guru saja yang diganti, sehingga mengetahui bagian mana

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		yang dirubah, sehingga guru mengetahui konteks yang dirubah dalam buku pelajaran Bapak Iskandar Agung - Ada 9 indikator, pertanyaan saya dari mana muncul 9 indikator tersebut karena sebelumnya ada 18 karakter yang dikembangkan kemudian dibuat menjadi 5. - Solusi untuk menguatkan karakter ini apa? Pendidikan karakter di kota, apakah konteksnya akan sama dengan di pedesaan, sesuai atau tidak. - Bukan berarti bahasa daerah itu tidak penting, akan tetapi harus sesuai dengan daerahnya. Pengembangan muatan lokal harus sesuai dengan potensi daerah, dengan begitu orang akan terdorong untuk mengembangkan berbagai hal. - Perlu dihasilkan suatu pedoman, mungkin akan lebih bagus jika dihasilkan satu pedoman yang sudah dilakukan. Muatan lokal itu bermacam-macam, tetapi jika tidak dibuat pedomannya maka daerah akan kebingungan. Bapak Kosasih (PASKA) - Apakah Kurikulum 2013 sesuai dengan zaman sekarang? Paradigma sumber belajar bukan hanya buku saja. - Terkait dengan blended learnig, apakah mulok harus bersifat bahasa daerah atau bisa jadi sesuatu yang akan datang? - Yang kita hadapi saat ini adalah generasi Z, ada namanya manajemen berbasis sekolah. Hal ini menjadi point penting dalam penelitian ini. Mungkin dengan manajemen sekolah, semua hal dapat terselesaikan karena ada perubahan paradgima dari guru dan kepala sekolah. Prof. Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd. - Sebenarnya mulok bahasa daerah tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah apabila semua mulok adalah bahasa daerah padahal ada potensi-potensi daerah di situ. - Yang saya pegang adalah pewarisan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan potensi-potensi daerah. Pembelajaran sekrang dikembangkan untuk menciptakan generasi produktif yang menjual. Jadi generasi kita ke depan berorientasi kepada produk. Pelajar kalau bisa tidak hanya mengembangkan bahasa daerah, tetapi juga mengembangkan produknya seperi cipta bahasa jawa, kaligrafi bahasa jawa yang dapat menjadi souvenir. Sedapat mungkin tidak hanya menghadirkan nilai-nilai dari budaya lokal tetapi diarahkan kepada suatu produk yang menempel pada hal tersebut dan dapat dijual. - Saya berpikir mulok bukan mata pelajaran yang asal dimasukkan tetapi dia dapat diintegrasikan dan berorientasi kepada produk.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- TIK menurut saya terkait dengan literasi, yang mungkin dapat menjadi <i>general education</i> sama seperti bahasa tetapi tidak masuk di mulok. - Saya melihat eksekusi mata pelajaran mulok kacau di masyarakat. Potensi apa yang dapat dikembangkan jika tidak diarahkan kepada produk. - Anak-anak dapat menghasilkan produk sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dari kecil saya kira dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing. Sehingga nanti HOTS bagi anak yang masih kecil tidak menjadi masalah. - Mungkin nanti perlu dilakukan piloting bagaimana pedoman mengembangkan mulok. Salah satu yang kami hasilkan adalah silabus yang dihasilkan guru-guru yang didampingi oleh pengawas dan kepala sekolah. Di Banjarmasin ada tafaq quran, hal itu bagus tetapi jangan diposisikan sebagai mulok. - Menurut saya Kurikulum 2013 secara konseptual sudah bagus, tetapi pelaksanaannya yang belum optimal. Mungkin kecenderungannya yang belum sesuai dengan zaman di mana anak-anak dikembangkan dengan konstruktivis. - Pengembangan Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, saya melihat kompetensi yang ada tidak memunculkan semua kompetensi yang kemudian terwujud dalam satu perilaku atau produk yang ada. Semua perilaku tidak mewujudkan kompetensi. Kompetensi itu ada unsur pengetahuannya, sikapnya dan perilakunya. - Pendekatan saintifik itu belum muncul, hanya dituliskan saja. Padahal sintaks itu sangat penting. Hal itu dapat disokong oleh model-model untuk pendekatan saintifik. Teknologi adalah salah satu cara yang memudahkan orang untuk belajar. - Saya kira bahasa daerah menjadi bahasa pengantar menjadi lebih efektif. Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd - Salah satu kelemahan sekolah adalah menafsirkan karakter itu seperti apa. Di tingkat sekolah yang jauh dari pusat kota, informasi itu tidak sampai. Bahkan pola pikirnya tidak berani mengambil satu inisiatif untuk melakukan penganggaran. Dengan adanya perpres diharapkan dapat memberikan dorongan kepada Pemda, karena sekolah-sekolah tidak berani mengambil kebijakan. Perlu adanya landasan hukum sehingga bisa diberikan kepada Pemda. Sri Hidayati, M.Si - Buku memang bukan satu-satunya, tetapi sayangnya di dalam Undang-Undang ada kata wajib. - Saya setuju buku guru saja yang diperbaiki, dari segi efisiensi dapat lebih menghemat anggaran.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Penelitian ini bagian dari amanat Permendikbud yaitu evaluasi Kurikulum. Evaluasi kurikulum ada dimensi ide, implementasi, dan dampak. Ini merupakan evaluasi kurikulum dalam dimensi implementasi - Kita perlu melihat ketika mengevaluasi kurikulum apakah dimensi ide itu masih relevan atau tidak. Kemudian ke bawahnya. Bisa saja dari segi KI, KD tidak cocok lagi. Mungkin saja kita perlu menyederhanakan regulasi. - Sangat banyak masalah di implementasi, implementasi tidak sesuai dengan ide kurikulum yang katanya industri 4.0. - Kurikulum tidak boleh dilihat secara terkotak-kota, tidak hanya mata pelajarannya saja. Kita harus mengenal komponen yang terdapat dalam kurikulum menjadi satu kesatuan. - Kita sudah <i>living</i> kurikulum di mana perubahan itu tidak harus mayor tetapi bisa bersifat minor. Kita juga mulai membaca pandangan Menteri yang baru mengenai coding, industri 4.0.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 15.35 WIB.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PENGARUH PENDAFTARAN TIGA GENRE TARI TRADISI BALI KE DALAM DAFTAR ICH UNESCO TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI

Damardjati Kun Marjanto, Herman Hendrik, Ihya Ulumuddin,

Kaisar Julizar, Imelda Widjaja

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) implementasi rencana tindak tiga genre tari tradisi Bali serta 2) untuk mengetahui pengaruh pendaftaran tiga genre tari tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan sosial dan ekonomi komunitas budaya. Penelitian ini menggunakan *fix method*, yaitu pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan diskusi kelompok terpusat (DKT) kemudian analisis data deskriptif. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data serta analisis *Structural Equation Modelling- Partial Least Square* (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan rencana tindak telah berjalan dengan baik walaupun sebagian besar masih didominasi oleh pemerintah, sementara komunitas budaya belum terlibat sepenuhnya. Terdapat pengaruh yang signifikan semenjak pendaftaran tiga genre tari tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya. Rencana tindak tari tradisi Bali juga berdampak positif terhadap sosial dan ekonomi kehidupan penari Bali.

Kata kunci: pengaruh, pendaftaran, tiga genre tari Bali, ICH UNESCO

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 pada tanggal 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 (Perpres No. 78/2007). Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai tindakan atau upaya dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda (WBTB). Pelindungan WBTB tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan, penetapan, penelitian, revitalisasi, konservasi serta pelibatan komunitas, kelompok sosial dan penggiat budaya. Konvensi 2003 Pasal 11 dan 12 juga menyebutkan kewajiban negara pihak konvensi untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala.

Sampai saat ini Indonesia telah berhasil mendaftarkan sembilan WBTB ke dalam daftar ICH UNESCO, yaitu: (1) keris, yang terdaftar pada tahun 2005 dalam daftar *Representative List*; (2) wayang, yang terdaftar pada tahun 2008 dalam daftar *Representative List*; (3) batik, yang terdaftar pada tahun 2009 dalam daftar *Representative List*; (4) pendidikan dan pelatihan Batik Pekalongan, yang terdaftar pada tahun 2009 dalam daftar *Best Practices*; (5) angklung, yang terdaftar pada tahun 2010 dalam daftar *Representative List*; (6) Tari Saman, yang terdaftar pada tahun 2011 dalam daftar *Urgent Safeguarding*; (7) noken, yang terdaftar pada tahun 2012 dalam daftar *Urgent Safeguarding*; (8) tari tradisi Bali, yang terdaftar pada tahun 2015 dalam daftar *Representative List*; (9) Pinisi, seni pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, yang terdaftar pada tahun 2017 dalam daftar *Representative List* (Marjanto, 2017).

Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola warisan dan diplomasi budaya dan juga melestarikan nilai budaya. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan WBTB Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO. Manfaat pendaftaran WBTB Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO yaitu: (1) menarik perhatian dunia pada mata budaya yang terinskripsi dan daerah asalnya, hal ini dapat terjadi karena ketika WBTB Indonesia masuk ke dalam daftar ICH UNESCO, maka UNESCO turut serta dalam mempromosikan warisan budaya Indonesia melalui website-nya, dan lain-lain; (2) memperkuat kesadaran identitas budaya lokal; (3) meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara tentang warisan budaya yang bersangkutan, termasuk kesadaran untuk melestarikannya melalui transmisi budaya dari generasi ke generasi, serta meningkatkan dan memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara akan budaya lokal yang ada di Indonesia.

Hal-hal tersebut penting karena seiring berjalannya waktu, budaya lokal Indonesia mulai terkikis dan terancam punah oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Sebagai contoh, karena pengaruh globalisasi, tiga genre tari tradisi Bali yang seharusnya diiringi oleh alat musik gamelan untuk menjaga kesakralan tari tersebut, sekarang sebagian besar diiringi oleh alunan musik dari *tape recorder*.

Dalam setiap formulir pendaftaran WBTB Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO terdapat beberapa rencana tindak (*action plan*) yang nantinya akan menjadi acuan negara pihak dalam pelaksanaan upaya perlindungan ketika WBTB tersebut sudah berhasil masuk dalam daftar ICH UNESCO. Sekretariat ICH UNESCO mewajibkan negara pengusul melaporkan secara berkala implementasi rencana tindak tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi rencana tindak yang telah dilakukan, dapat dilihat pengaruh implementasi rencana tindak tersebut terhadap kehidupan komunitas budaya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pengaruh pendaftaran WBTB Indonesia ke dalam ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya, yang dalam hal ini berarti pelaku budaya, perajin, dan sanggar-sanggar budaya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui implementasi rencana tindak yang sudah disusun ketika mendaftarkan Tari Tradisi Bali ke daftar ICH UNESCO; (2) untuk mengetahui pengaruh pendaftaran WBTB Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya dalam bidang sosial dan ekonomi di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Karangasem, Jembrana dan Buleleng.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tiga Genre Tari Tradisi Bali

Wali merupakan kategori tari sakral yang hanya bisa dipentaskan di halaman dalam pura (mandala utama) sebagai bagian dari upacara keagamaan/adat, antara lain Rejang, Sanghyang, dan Baris Upacara.

Bebali merupakan kategori tari yang biasanya dipentaskan di halaman tengah pura (madya mandala), antara lain Topeng Sidhakarya, Dramatari Gambuh, dan Dramatari Wayang Wong.

Bali-balihan merupakan kategori tari pertunjukan yang berfungsi sebagai tari pergaulan atau hiburan yang biasanya ditampilkan di luar pura atau tempat-tempat pertunjukan lainnya, antara lain Joged Bumbung, Legong Kraton, dan Barong Ket Kuntisraya.

2. Rencana Tindak

Ketika tiga genre tari tradisi Bali didaftarkan kedalam ICH UNESCO, pemerintah telah menyusun rencana tindak untuk melestarikan tari tradisi Bali ini yaitu sebagai berikut (UNESCO, 2015):

a. Inventarisasi Tiga Genre Tari Tradisi Bali

Tujuan rencak tindak ini untuk menginventarisasi Tiga Genre Tari Tradisi Bali, dalam format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah inventarisasi lengkap Tiga Genre Tari Tradisi Bali, sebagai dasar upaya pengamanan. Organisasi Pelaksana: BPNB Bali, NTB, dan NTT.

b. Penyusunan bahan ajar tari tradisi Bali dalam bentuk buku dan video.

Tujuan rencana tindak ini untuk menyusun bahan ajar tari tradisi Bali dalam bentuk buku dan video termasuk gerakan tari standar dan nilai-nilai budaya. Kegiatan utama dalam rencana tindak ini yaitu bahan ajar yang harus dipersiapkan dengan baik berdasarkan masukan dari penari dan ahli. Video tarian yang direkam berasal dari pertunjukan oleh penari terbaik, dengan iringan standar. Buku akan dicetak dan video akan digandakan.

c. Tari tradisi Bali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler.

Tujuan rencana tindak ini adalah agar tari tradisi Bali sebagai bagian dari warisan budaya Bali dimasukkan ke dalam kurikulum berbagai tingkat pendidikan formal sebagai bagian dari mata pelajaran seni dan juga mata pelajaran lain seperti sejarah dan bahasa. Kegiatan utama rencana tindak ini adalah penerbitan surat rekomendasi oleh dinas pendidikan provinsi yang isinya menyatakan tari tradisi Bali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal atau aktivitas ekstrakurikuler. Bahan ajar yang digunakan dalam kurikulum sekolah sesuai dengan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan poin a di atas.

d. Workshop dan pelatihan bagi pelatih tari tradisional Bali.

Tujuan rencana tindak ini untuk meningkatkan keterampilan pelatih dalam tarian tradisional Bali. Kegiatan utama rencana tindak ini adalah pemusatan latihan. Peserta pelatihan tari dikumpulkan bersama dan diberikan pelatihan oleh guru/pelatih/dosen tari, dan dilengkapi dengan bahan ajar yang disiapkan seperti diuraikan dalam poin a di atas.

e. Melanjutkan pertunjukan tarian tradisional Bali di pekan olahraga dan seni tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan di Festival Seni Bali.

Tujuan rencana tindak ini adalah untuk menyajikan berbagai tarian tradisional Bali dari tingkat desa dan kecamatan di tingkat kabupaten/kota, dan kemudian di Festival Seni Bali. Kegiatan utama dari rencana tindak ini adalah komunitas di Indonesia dan di seluruh dunia telah menyaksikan tarian tradisional Bali selama beberapa dekade.

3. Komunitas Budaya

Menurut Konvensi 2003 ICH Unesco yang dimaksud dengan komunitas adalah orang-orang yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam praktik dan/atau transmisi (melalui Pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan oleh komunitas) unsur warisan budaya takbenda (atau sekumpulan unsur) dan/atau yang mempertimbangkan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Konvensi tidak membedakan 'komunitas' dengan 'kelompok.' Beberapa penafsiran mengartikan 'kelompok' sebagai jejaring orang (seperti praktisi, pelindung, atau penerus tradisi) di dalam komunitas, atau di seluruh komunitas yang memiliki pengetahuan khusus tentang unsur warisan budaya takbenda tertentu, atau yang mempunyai peran khusus dalam transmisi atau penggunaan atau praktik warisan budaya takbenda (UNESCO, 2018). Menurut Konvensi 2003 Pasal 162 dijelaskan bahwa negara Pihak harus memberikan perhatian khusus pada peran masyarakat dan melaporkan status terkini dari WBTD, termasuk:

- a) fungsi sosial dan budayanya;
- b) studi kelayakan dan resiko saat ini yang dihadapi;
- c) dampak dari upaya menjaga dan melestarikan WBTB terutama pelaksanaan rencana tindak yang diajukan pada saat didaftarkan;
- d) pembaruan dari rencana pelestarian termasuk dalam file nominasi atau dalam laporan sebelumnya;
- e) partisipasi masyarakat, komunitas, kelompok dan individu serta organisasi nonpemerintah yang relevan dalam menjaga dan melestarikan WBTB dan komitmen mereka yang berkelanjutan untuk pelestarian lebih lanjut.

4. Structural Equation Modelling- Partial Least Square (SEM-PLS)

Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Wold untuk penciptaan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi (Hair, 2017). PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi, artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif SEM yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan di antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya kecil (30 sampai 100) (Lantu, 2016).

SEM-PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua, yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya (Akter, 2011).

Kelebihan Analisis SEM-PLS (Anuraga, 2013):

1. Data tidak harus berdistribusi normal multivariat.
2. Dapat digunakan dengan jumlah sampel yang kecil (minimal 30 data).
3. SEM-PLS selain dapat digunakan untuk mengonfirmasikan teori, dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.
4. SEM-PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif
5. SEM-PLS mampu mengestimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator.

C. METODE PENELITIAN

1. Metode dan Pengumpulan Data

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi rencana tindak tiga genre tari tradisi Bali dan mengetahui pengaruh pendaftaran WBTB Indonesia, dalam hal ini tiga genre tari tradisi Bali, terhadap kehidupan komunitas budaya khususnya penari Bali. Dalam rangka memenuhi kedua tujuan itu, penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui implementasi rencana tindak tiga genre tari tradisi Bali, sementara metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pendaftaran tiga genre tari tradisi Bali terhadap kehidupan komunitas budaya khususnya penari Bali. Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara:

- a) Pengamatan

b) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak, yaitu: (1) para perwakilan dinas yang mengurus kebudayaan dan/atau pendidikan dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi; (2) perwakilan pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, dan NTT; dan (3) para pelaku budaya tari tradisi Bali.

c) Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT, atau *Focused Group Discussion*)

Pihak-pihak yang dihadirkan dalam DKT yaitu: (1) para perwakilan dinas yang mengurus kebudayaan dan/atau pendidikan dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi; (2) perwakilan pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, dan NTT; (3) para pelaku budaya tari tradisi Bali; dan (4) para pengamat tari tradisi Bali. Kegiatan tersebut dilakukan di lima lokasi, yaitu di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng.

d) Studi pustaka

Sementara itu, pengumpulan data dengan metode kuantitatif dilakukan melalui kegiatan survei dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner tersebut menyangkut karakteristik demografis, fakta, dan pendapat responden mengenai pengaruh implementasi rencana tindak dari tiga genre tari tradisi Bali yang didaftarkan ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya khususnya penari Bali. Adapun kuesioner yang digunakan pada penelitian ini sebagian besar berisi pertanyaan tertutup (sajikan dalam lampiran), di mana responden diminta menjawab pertanyaan dengan cara memilih dari sejumlah alternatif.

2. Populasi dan Sampel

Sampel untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pelaku budaya, lebih khususnya para penari tari tradisi Bali yang berada di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng. Dengan usia responden yaitu 12 – 70 tahun. Responden terpilih dianggap mampu berkomunikasi. Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling method*.

3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendaftaran tiga genre tari tradisi Bali terhadap kehidupan komunitas budaya, adalah sebagai berikut:

a. Variabel bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel ini adalah variabel yang memengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi rencana tindak pendaftaran tari tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO, yaitu berupa upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali, upaya peningkatan keterampilan, dan upaya apresiasi. Ketiga variabel bebas tersebut diuraikan ke dalam beberapa indikator agar dapat diukur pelaksanaannya, indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan ajar tentang tiga genre tari tradisi Bali.
2. Muatan lokal tiga genre tari tradisi Bali di sekolah
3. Ekstrakurikuler tiga genre tari tradisi Bali.
4. *Workshop* pelatih tiga genre tari tradisi Bali.
5. Pesta Kesenian Bali

b. Variabel terikat (Y)

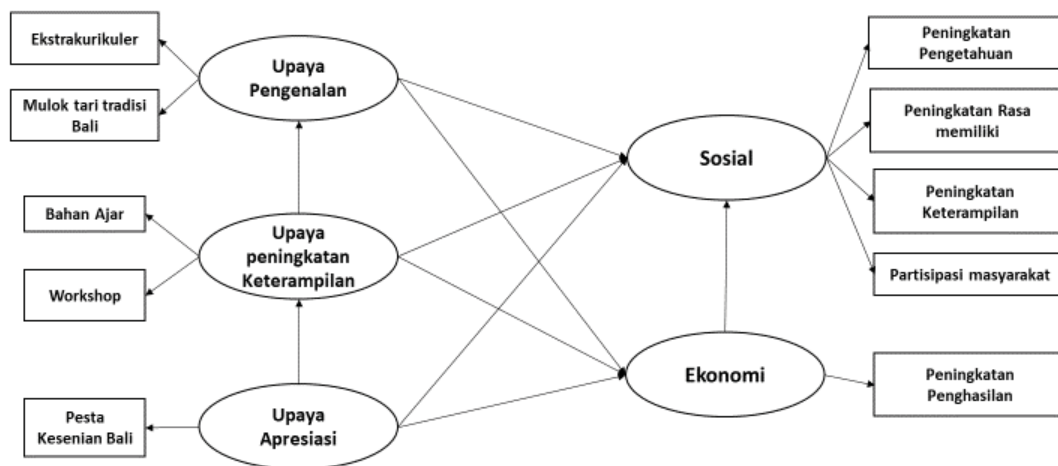
Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang variasi nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kehidupan komunitas budaya berupa bidang ekonomi dan sosial. Variabel sosial dan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa

indikator agar dapat diukur pengaruhnya di kehidupan komunitas budaya. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tiga genre tari tradisi Bali
2. Rasa memiliki tiga genre tari tradisi Bali
3. Penghasilan penari tiga genre tari tradisi Bali
4. Keterampilan penari tiga genre tari tradisi Bali
5. Partisipasi masyarakat terkait tiga genre tari tradisi Bali

4. Kerangka pikir penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat pengaruh pendaftaran Tiga Genre Tari Tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya bidang sosial dan ekonomi secara langsung dan tidak langsung.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian

5. Analisis Data

Pertama, teknik analisis deskriptif kualitatif dijalankan dengan mengklasifikasi data yang terkumpul, dirangkai, dan dijelaskan menggunakan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk melukiskan secara sistematis implementasi rencana tindak tari tradisi Bali. Kedua, teknik analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan SEM-PLS, disertai dengan uji kesesuaian model (*goodness of fit*) pada persamaan struktural. Teknik analisis menggunakan SEM-PLS dipilih karena teknik analisis ini mampu menjelaskan pengaruh antar variabelnya serta seberapa besar pengaruh yang diberikan setiap variabel terhadap variabel lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Rencana Tindak 3 Genre Tari Bali

Pada saat tiga genre tari tradisi Bali didaftarkan ke dalam *Daftar Intangible Cultural Heritage* (ICH), pemerintah telah menyusun rencana tindak sebagai acuan dalam pelestarian Tari Tradisi Bali, yaitu: (1) inventarisasi tari tradisi Bali; (2) penyusunan bahan ajar Tari Tradisi Bali dalam bentuk buku dan video; (3) memasukkan tari tradisi Bali ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler; (4) workshop dan pelatihan bagi pelatih Tari Tradisi Bali; dan (5) Pertunjukan Tari Tradisi Bali pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Pekan Kesenian Bali (PKB). Secara umum

dapat dinyatakan bahwa sebagian besar rencana tindak tersebut telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah (lihat tabel 1).

Pelaksana Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>)	Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>)				
	Inventarisasi	Penyusunan bahan ajar: buku dan video	Muatan lokal dan ekstrakurikuler	Workshop dan TOT	Pertunjukan tari tradisi Bali dalam Porseni dan PKB
Dit. Warisan & Diplomasi Budaya	√	√	-	√	-
BPNB Bali	-	√	-	-	-
Pemprov Bali	√	√	√	√	√
ISI Denpasar	√	√	-	√	-
Kota Denpasar	√	√	√	√	√
Kab. Gianyar	√	-	√	√	√
Kab. Karangasem	√	-	√	√	√
Kab. Jembrana	√	√	√	√	√
Kab. Buleleng	√	-	√	√	√

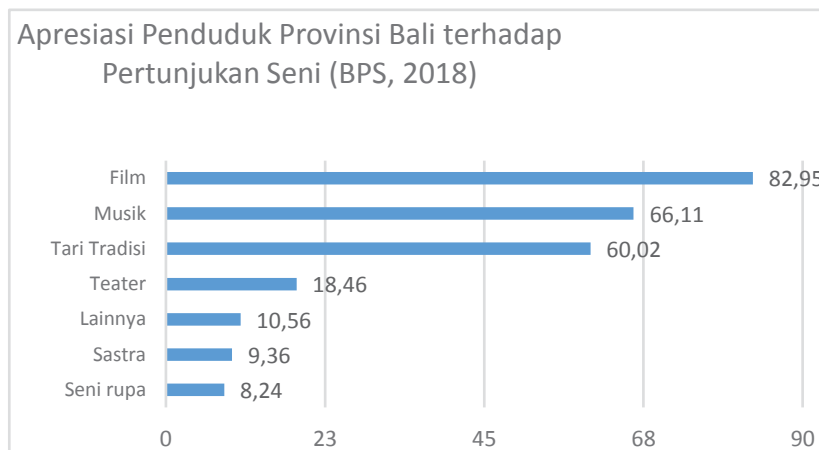
Meskipun demikian, dari analisis terhadap pelaksanaan rencana tindak di atas dapat diuraikan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Sosialisasi rencana tindak belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian besar pemangku kepentingan di daerah tidak mengetahui adanya rencana tindak yang terdapat dalam berkas penominasian Tiga Genre Tari Tradisi Bali.
2. Masing-masing pemangku kepentingan di tingkat daerah telah melaksanakan hampir semua butir yang tercantum dalam rencana tindak, bukan atas dasar pengetahuan mengenai adanya rencana tindak namun sebagai bagian dari kegiatan rutin mereka.
3. Akibatnya, pelaksanaan butir-butir dalam rencana tindak tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh ICH UNESCO, di antaranya:
 - Pelaksanaan inventarisasi Tiga Genre Tari Tradisi Bali belum diperbaharui secara berkala.
 - Bahan ajar, muatan lokal, dan ekstrakurikuler masih bersifat umum, belum secara spesifik memuat materi tentang Tiga Genre Tari Tradisi Bali.
 - Belum terdapat kegiatan *workshop* dan TOT yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan keterampilan pelatih Tiga Genre Tari Tradisi Bali. Kegiatan *workshop* dan TOT selama ini dilaksanakan secara sporadis dan reaktif, misalnya untuk mempersiapkan Pesta Kesenian Bali (PKB) dan merespon keresahan masyarakat tentang fenomena penyimpangan pertunjukan Jaged Bumbung.
 - Pada tahun 2019, Tiga Genre Tari Tradisi Bali tidak ditampilkan dalam kegiatan perlombaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) karena ajang tersebut diganti menjadi Pekan

Olahraga Pelajar (Porjar) yang tidak memasukkan perlombaan seni. Namun demikian, pertunjukan Tiga Genre Tari Tradisi Bali tetap ditampilkan dalam PKB.

2. Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Komunitas Budaya

Tari tradisi Bali merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bali. Hal ini membuat apresiasi masyarakat Bali terhadap tari tradisi mereka masih cukup tinggi. Ini terbukti dalam survey BPS pada 2018 yang menunjukkan bahwa sebanyak 60% masyarakat Bali masih menonton pertunjukan tari tradisi mereka. Apresiasi terhadap seni tradisional ini memang tidak setinggi apresiasi terhadap kesenian populer modern seperti film dan musik. Namun, jika dibandingkan secara nasional, apresiasi terhadap tari tradisi Bali di kalangan masyarakat Bali ini jauh di atas rata-rata apresiasi masyarakat terhadap tari tradisi di seluruh provinsi (21%).

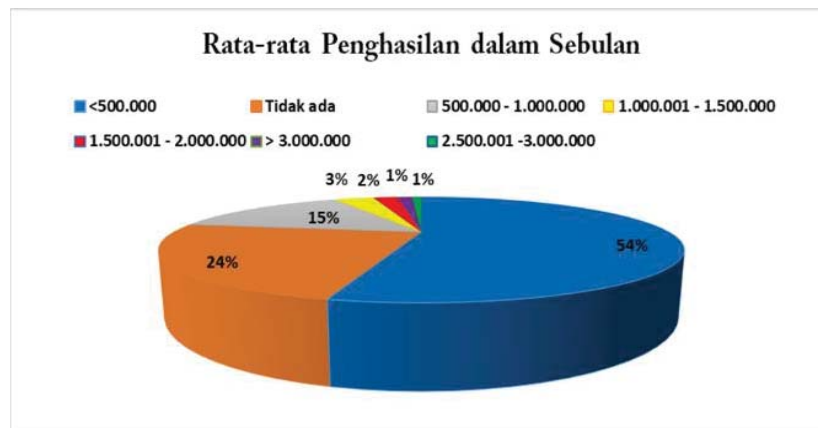


Apresiasi terhadap tari Bali yang tinggi selaras dengan motivasi para penari Bali itu sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 51% responden beralasan menjadi penari karena ingin melestarikan Tari Tradisi Bali, sehingga pewarisan budaya masih akan tetap terjaga. Sementara itu 43% responden menyatakan alasan mereka menjadi penari karena hobi. Tidak ada responden yang menjadi penari karena semata-mata ingin mendapatkan penghasilan atau karena faktor ekonomi.



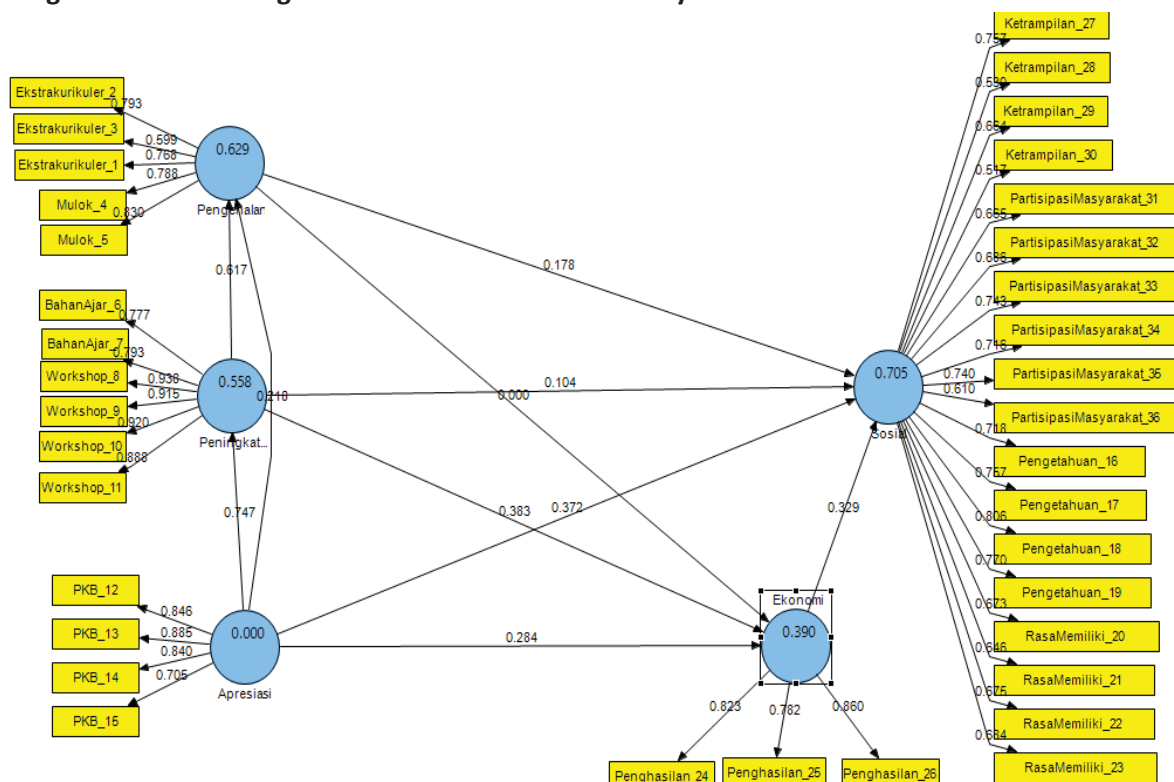
Meskipun demikian di antara tiga genre tari tradisi, jenis Balih-balihan adalah yang paling populer. Berdasarkan hasil wawancara dan DKT diperoleh informasi bahwa semakin sedikit generasi muda yang berminat mempelajari tarian sakral dan semi sakral. Hal itu disebabkan karena tingkat kesulitan dari tarian tersebut. Menyikapi hal itu, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan rekonstruksi/revitalisasi tarian sakral yang hampir punah, misalnya tari Sanghyang di Kabupaten Karangasem, Dramatari Gambuh di Kabupaten Gianyar, dan Dramatari Wayang Wong di Kabupaten Buleleng.

Karena rendahnya motif ekonomi, tari tradisi tidak menjadi ladang penghasilan utama para penari. Sebanyak 54% responden memiliki rata-rata penghasilan berada di bawah Rp 500.000. Bahkan, ada juga yang tidak memperoleh penghasilan dari menari. Filosofi ngayah masih mengakar kuat dalam budaya masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, menari merupakan persembahan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa semuanya akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Namun demikian, tentu saja terdapat para penari profesional yang memperoleh pendapatan cukup besar dari aktivitas menari. Salah satu responden mengaku berpendapatan sebesar 15 juta rupiah per bulan.



Untuk menguji seberapa besar pengaruh sosial ekonomi dari pendaftaran Tiga Genre Tari Bali tersebut, kami menggunakan metode statistik Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS). Enam butir rencana tindak menjadi indikator bagi variabel-variabel laten yang terdiri dari upaya pengenalan, upaya peningkatan keterampilan, dan upaya apresiasi. Variabel-variabel tersebut menjadi variabel bebas. Sedangkan variabel sosial dan ekonomi merupakan variabel bergantung. Variabel sosial diturunkan ke dalam indikator-indikator peningkatan keterampilan, partisipasi masyarakat, pengetahuan, dan rasa memiliki. Sementara variabel ekonomi diturunkan ke dalam indikator peningkatan penghasilan. Model yang dihasilkan adalah sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.

Diagram 1. Model Pengaruh Sosial Ekonomi Terdaftar 3 Genre Tari Tradisi Bali dalam ICH UNESCO



Berdasarkan model di atas diketahui bahwa upaya pengenalan, upaya peningkatan keterampilan, dan upaya apresiasi yang merupakan tindak lanjut dari pendaftaran Tiga Genre Tari Bali dalam ICH UNESCO secara bersama-sama memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penari. Jika ditelaah lebih jauh, upaya apresiasi melalui pelaksanaan PKB merupakan yang paling besar pengaruhnya secara sosial. PKB menjadi ajang bagi para seniman tari tradisi Bali untuk mengekspresikan diri. Sementara itu, secara ekonomi, upaya peningkatan keterampilan melalui kegiatan workshop memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan penghasilan para penari. Workshop bukan hanya menjadi ajang bagi para penari untuk menjadi semakin mahir sehingga meningkatkan gengsi sosial ekonomi mereka, namun juga menjadikan jaringan mereka lebih luas sehingga mereka terekspos terhadap peluang-peluang baru secara ekonomi.

3. Persamaan Struktural

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software SmartPLS 2.0 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Sosial} = 0,178\text{UpayaPengenalan} + 0,104\text{UpayaPeningkatanKeterampilan} + 0,372\text{UpayaApresiasi} + 0,329\text{Ekonomi}; R^2 = 0,705 \quad (1)$$

$$\text{Ekonomi} = 0,383\text{UpayaPeningkatanKeterampilan} + 0,284\text{UpayaApresiasi}; R^2 = 0,390 \quad (2)$$

$$\text{UpayaPengenalan} = 0,617\text{UpayaPeningkatanKeterampilan} + 0,21\text{UpayaApresiasi}; R^2 = 0,629 \quad (3)$$

$$\text{UpayaPeningkatanKeterampilan} = 0,747\text{UpayaApresiasi}; R^2 = 0,558 \quad (4)$$

Persamaan 1 menunjukkan tingkat kepercayaan 95% terhadap upaya peningkatan keterampilan tiga genre tari tradisi Bali, upaya apresiasi terhadap tiga genre tari tradisi Bali serta kehidupan penari bidang ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan penari bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik ketiga variabel lebih besar dari 1,96. Sedangkan untuk variabel upaya pengenalan tiga

genre tari tradisi Bali tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan penari bidang sosial, dilihat dari nilai t-statistik variabel upaya pengenalan yang lebih kecil dari 1,96. Tanda koefisien jalur pada setiap variabel menunjukkan arah hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogennya. Koefisien jalur yang bernilai positif pada upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali menunjukkan bahwa semakin baik upaya pengenalan yang dilakukan, maka kehidupan penari bidang sosial semakin positif pula. Begitu juga dengan nilai positif pada upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi terhadap tiga genre tari tradisi Bali menunjukkan bahwa semakin baik upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi yang dilakukan, maka kehidupan sosial penari semakin baik pula. Sedangkan koefisien jalur kehidupan ekonomi penari yang bernilai positif menunjukkan bahwa jika kehidupan ekonomi penari bidang ekonomi, maka kehidupan sosial penari semakin baik pula.

Nilai R^2 sebesar 0,705 menunjukkan besar kontribusi keragaman data kehidupan penari bidang sosial yang dapat dijelaskan oleh upaya pengenalan, upaya peningkatan keterampilan, upaya apresiasi serta kehidupan penari bidang ekonomi. Artinya, variabel upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali, upaya peningkatan keterampilan penari, upaya apresiasi dan kehidupan penari bidang ekonomi mampu menjelaskan 70,5% keragaman kehidupan penari bidang sosial sisanya sebesar 29,5% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang telah dibangun.

Sama halnya untuk persamaan 2 yang menunjukkan upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan penari bidang ekonomi. Sedangkan variabel upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan penari bidang ekonomi, terlihat dari t-statistik variabel upaya pengenalan yang lebih kecil dari 1,96 serta koefisien jalur variabel upaya pengenalan yang bernilai 0. Koefisien jalur variabel upaya peningkatan keterampilan dan upaya apresiasi bernilai positif yang berarti semakin baik upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi yang dilakukan, maka kehidupan penari bidang ekonomi semakin baik pula.

Nilai R^2 sebesar 0,390 berarti besar kontribusi keragaman data kehidupan penari bidang ekonomi yang dapat dijelaskan oleh upaya peningkatan keterampilan dan upaya apresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel upaya peningkatan keterampilan dan upaya apresiasi mampu menjelaskan 39% keragaman kehidupan penari bidang ekonomi sisanya sebesar 61% lainnya dijelaskan oleh variabel lain.

Persamaan 3 menjelaskan bahwa upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali, hal ini terlihat dari nilai t-statistik kedua variabel lebih besar dari pada 1,96. Koefisien jalur variabel upaya peningkatan keterampilan dan upaya apresiasi bernilai positif, yang bermakna bahwa semakin baik upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi terhadap tiga genre tari tradisi Bali maka semakin baik atau meningkat juga upaya pengenalan tiga genre tari tradisi Bali di kalangan masyarakat Bali. Nilai R^2 sebesar 0,629 menunjukkan besar kontribusi variabel upaya pengenalan yang dapat dijelaskan oleh upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi, yang bermakna bahwa variabel upaya peningkatan keterampilan penari dan upaya apresiasi mampu menjelaskan 62,9% variansi atau keragaman variabel upaya pengenalan.

Persamaan 4 menjelaskan upaya apresiasi memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan keterampilan penari. Koefisien jalur variabel upaya apresiasi bernilai positif yang bermakna bahwa semakin baik upaya apresiasi yang dilakukan maka upaya peningkatan keterampilan penari pun akan semakin baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi rencana tindak Tiga Genre Tari Tradisi Bali telah terlaksana baik. Meskipun beberapa pemangku kepentingan tidak mengetahui adanya rencana tindak, namun berbagai program dan kegiatan selaras dengan rencana tindak tersebut. Rencana tindak kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga rencana tindak tersebut tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan UNESCO, misalnya:
 - Inventarisasi belum diperbaharui secara berkala.
 - Bahan ajar dan mulok masih bersifat umum, belum spesifik memuat tiga genre tari tradisi Bali.
 - Workshop dan TOT masih bersifat sporadis dan reaktif, hanya sebatas persiapan ajang PKB dan respons terhadap penyimpangan pertunjukan Joged Bumbung.
 - Pada tahun 2019, bidang seni tidak diikutsertakan dalam Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar), hanya bidang olahraga saja (Porjar), sehingga 3 genre tari tradisi Bali tidak ditampilkan. Namun 3 genre tari tersebut ada dalam ajang PKB.
- b. Terdapat pengaruh pendaftaran Tiga Genre Tari Tradisi Bali terhadap kehidupan sosial dan ekonomi penari tari tradisi Bali.
 - Upaya pengenalan, peningkatan keterampilan, dan apresiasi secara bersama-sama memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penari.
 - Kehidupan sosial penari paling besar dipengaruhi oleh upaya apresiasi melalui ajang Pesta Kesenian Bali (PKB).
 - Kehidupan ekonomi paling besar dipengaruhi oleh upaya peningkatan keterampilan melalui kegiatan workshop.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini mengajukan sejumlah catatan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan tari tradisi Bali. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Pusat perlu melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada para pemangku kepentingan, khususnya di daerah, mengenai rencana tindak pelestarian Tiga Genre Tari Tradisi Bali yang tercantum dalam formulir pendaftaran ICH UNESCO.
- 2) Pemerintah Pusat perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala terhadap pelaksanaan rencana tindak yang tercantum dalam formulir pendaftaran ICH UNESCO.
- 3) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan data secara berkala terkait perkembangan Tiga Genre Tari Tradisi Bali.
- 4) Pemerintah Pusat perlu mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun bahan ajar yang secara spesifik membahas mengenai Tiga Genre Tari Tradisi Bali.
- 5) Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan terkait kurikulum muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bahan ajar Tiga Genre Tari Tradisi Bali.
- 6) Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu menyelenggarakan *workshop* dan TOT secara terencana, berkala, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan keterampilan penari.
- 7) Pemerintah daerah perlu mengembalikan adanya ajang Porsenijar dan mengikutsertakan tiga genre tari tradisi Bali dalam ajang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, S., D' Ambra, J.& Ray, P. 2011. *An evaluation of PLS based complex models; the roles of power analysis, predictive relevance and GoF index*. Proceeding of the 17th Americas Conference on Information Systems (AMCIS2011) (pp.1-7). Detroit, USA; Association for Information Systems.
- Anuraga, Gangga & Otok, Bambang Widjanarko. 2013. *Pemodelan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Structural Equation Modelling-Partial Least Square*. Jurnal Statistika, Vol 1, No. 2, November 2013.
- Hair, Joseph F., etc. 2017. *A Primer on Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) Second Edition*. SAGE Publications, Inc. United States of America.
- Irwan & Adam, Khaeryna. 2015. *Metode Partial Least Square (PLS) dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone)*. Jurnal Teknosains, Volume 9 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 53 – 68.
- Lantu, dkk. 2016. *Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model*. Jurnal Manajemen Teknologi, Volume 15 Nomor 1, 2016, hlm. 77 – 93.
- Marjanto, Damardjati Kun, dkk. 2017. *Dampak Penetapan WBTB Indonesia dalam Daftar ICH UNESCO*. Laporan Penelitian. Jakarta. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Balitbang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya TakBenda Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya TakBenda).
- UNESCO. 2018. *Basic Texts of the 2003 Convention for Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*. France.
- UNESCO. 2015. *National Inventory of Three Genre of Balinese Dance*.
- UNESCO. 2015. *Nomination File No. 00617 For Inscription in 2015 On the Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity Tenth Session*. Original English.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

INDEKS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

¹Sugih Biantoro, Kaisar Julizar, Imelda Widjaja, Ihya Ulumuddin,

²Niken Rarasati, Yudi Fajar, Jimmy Daniel B

¹Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

²The SMERU Research Institute

Abstrak. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. IPK yang terdiri dari 7 dimensi dan 31 indikator ternyata belum didasarkan pada konseptual yang jelas, begitu juga dengan definisi kebudayaan yang digunakan. Indikator untuk setiap dimensi yang dipilih lebih berdasarkan pertimbangan pragmatis, yaitu ketersediaan data di dalam sejumlah hasil sensus BPS. Tujuan dari kajian ini adalah menemukan dimensi dan indikator yang lebih representatif untuk digunakan dalam penghitungan IPK. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara. Hasil dari kajian ini adalah pengurangan 7 dimensi IPK hanya ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan partisipasi sosial.

Kata kunci: Indeks, Pembangunan, Kebudayaan

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, peran kebudayaan dalam pembangunan semakin diperhatikan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 13 Undang-Undang tersebut, mengatur tugas pemerintah untuk menyusun Strategi Kebudayaan yang menjabarkan arah pemajuan kebudayaan dalam 20 tahun mendatang. Penjabaran Strategi Kebudayaan lantas diturunkan lebih perinci ke dalam bentuk Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Dokumen inilah yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan melalui koordinasi secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka mendukung implementasi RIPK, pemerintah merancang untuk membuat mekanisme pengukuran tingkat pemajuan kebudayaan pada 2019. Sebetulnya sejak 2010 (kebudayaan saat itu masih bergabung dengan Pariwisata), Direktorat Jenderal Kebudayaan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah merancang Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), namun indeks tersebut belum sejalan dengan RIPK. Pada Oktober 2019, pemerintah melaunching IPK dengan pendekatan baru yang dianggap mampu mengakomodir RIPK sekaligus menjadi tolak ukur dalam RPJMN bidang Kebudayaan. Posisi kajian ini adalah meninjau dokumen IPK apakah memang sudah mampu merepresentasikan tingkat pembangunan kebudayaan di Indonesia.

B. KAJIAN KONSEPTUAL

Salah satu rujukan yang digunakan pemerintah selama ini dalam merancang IPK adalah *Culture for Development Indicators Suite* (CDIS) yang disusun oleh UNESCO dengan dukungan Badan Kerjasama Internasional Spanyol. CDIS digunakan sebagai alat metodologi pragmatis dan efektif dalam mendukung

pembangunan melalui analisis berbagai indikator di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Konsep ini menawarkan kesempatan untuk memperkuat inklusi budaya dalam strategi pembangunan, karena memberikan demonstrasi empiris tentang kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial. Dalam CDIS, terdapat tujuh dimensi sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, pendidikan, pemerintahan, partisipasi sosial, gender, komunikasi, dan warisan budaya (UNESCO, 2014). Ketujuh dimensi diturunkan ke dalam bentuk indikator, dimana masing-masing dimensi memiliki satu hingga lima indikator. UNESCO mengklaim bahwa CDIS menghasilkan fakta adanya kontribusi multidimensi budaya terhadap pembangunan di tingkat nasional. Sebagai contoh, di Ekuador, CDIS mengilhami dialog antar-institusi yang melibatkan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Nasional; di Kamboja, pemerintah nasional menggunakan indikator CDIS untuk menyusun Kebijakan Nasional Kebudayaan yang diadopsi pada 2014.

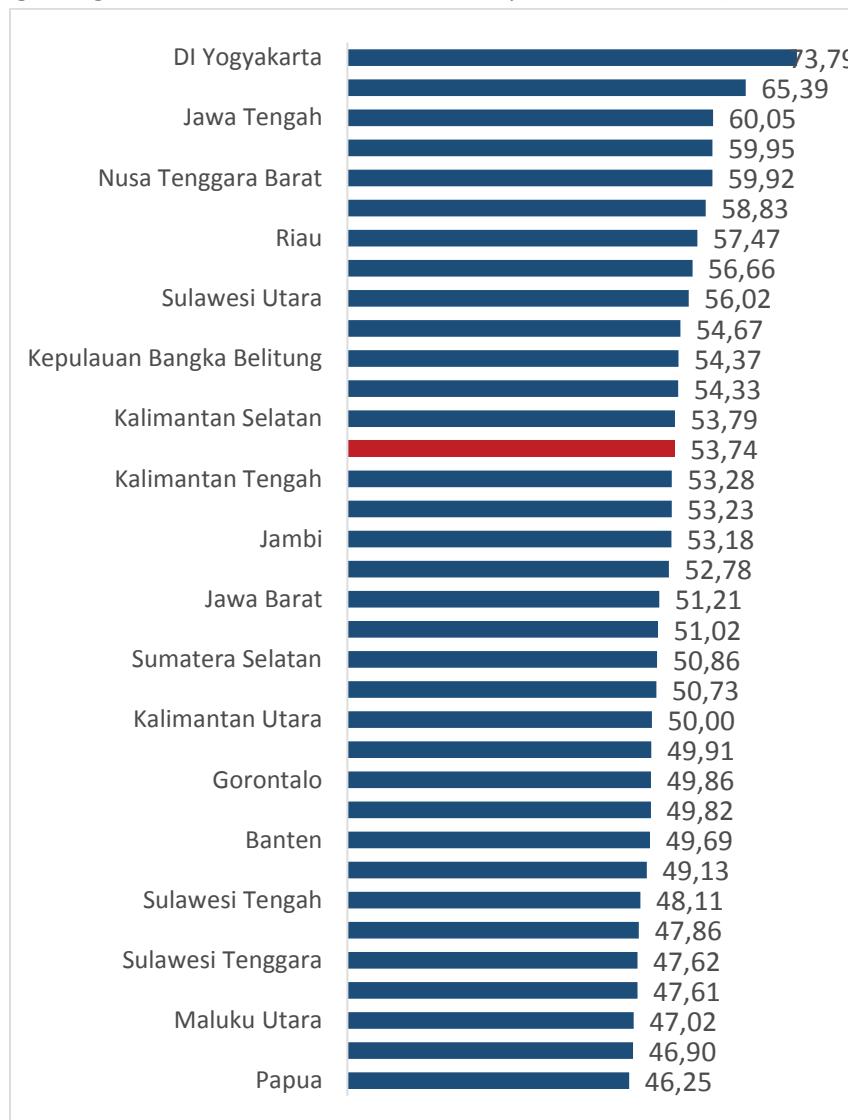
Apakah konsep CDIS dapat diadopsi dalam IPK di Indonesia? CDIS dan Indeks Pembangunan Kebudayaan jika diselidik memiliki konsep yang berbeda. CDIS bertujuan mengukur kontribusi budaya terhadap pembangunan, sedangkan IPK adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan. Dalam arti lain, IPK, dapat juga diartikan sebagai sebuah “upaya” pengelolaan kebudayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun partisipasi setiap orang atau masyarakat. Namun, dua tujuan tersebut pada prinsipnya saling berhubungan.

Tabel berikut merupakan jabaran dari dimensi, indikator, serta sumber data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

DIMENSI	VAR	INDIKATOR	SUMBER DATA
Ekonomi Budaya	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Susenas MSBP
Pendidikan	X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas	Susenas KOR
	X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Susenas KOR
	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Susenas KOR
	X2.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya	Kemendikbud (DAPODIK)
	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	Susenas KOR
	X2.6	Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin	Susenas KOR
Ketahanan Sosial Budaya	X3.1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP
	X3.2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP
	X3.3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	Susenas MSBP
	X3.4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	Susenas MSBP

DIMENSI	VAR	INDIKATOR	SUMBER DATA
	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP
	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	Susenas MSBP
	X3.7	Persentase rumah tangga yang tidak merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	Susenas Hansos
	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal	Susenas Hansos
Warisan Budaya	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud
	X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud
	X4.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Susenas MSBP
	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Susenas MSBP
	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun	Susenas MSBP
	X4.6	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	Susenas MSBP
Kebebasan Ekspresi Budaya	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	Susenas MSBP
	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	Susenas MSBP
	X5.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Susenas MSBP
	X5.4	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	Susenas MSBP
Budaya Literasi	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	Susenas Kor
	X6.2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	Susenas Kor
	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Susenas MSBP
Gender	X7.1	Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	Sakernas
	X7.2	Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat	Susenas KOR
	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	KPU; BPS

Berdasarkan penghitungan dimensi dan indikator, maka diperoleh IPK (2019) berikut ini:



DI Yogyakarta mendapatkan nilai indeks tertinggi (73,79), dan Papua mendapatkan nilai indeks terendah (46,25). Dimensi dan indikator IPK ditetapkan dengan menggunakan proxy yang mayoritas berasal dari data BPS. Namun, hasil dari penghitungan IPK terdapat dua kelemahan besar, yaitu:

1. Problem konseptual yang berkaitan dengan kerangka konsep dimensi dan indikator. Tidak ada definisi kebudayaan yang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan 7 (tujuh) dimensi kebudayaan yang digunakan dalam IPK.
2. Indikator untuk setiap dimensi dipilih lebih berdasarkan pertimbangan pragmatis, yaitu ketersediaan data di dalam sejumlah hasil sensus BPS. Hal itu dapat dimengerti, namun demikian tidak ada tinjauan yang cukup kritis tentang: a) seberapa signifikan indikator yang ada merepresentasikan dimensi tertentu, dan b) apa implikasi keterbatasan bagi hasil IPK, terutama dalam kaitannya dengan implikasi bagi kebijakan dan program.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Terhadap Dimensi IPK (Ekonomi Budaya): Pendekatan Empiris

Dalam indeks ini, pengertian dimensi ekonomi budaya diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Indikator dalam dimensi ini hanya satu, yaitu: persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas). Padahal sektor industri budaya saat ini cepat berkembang untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi. "The creative and cultural industries are one of the most dynamic and rapidly expanding sectors in the global economy, with a growth rate of 17.6% in the Middle East, 13.9% in Africa, 11.9% in Latin America, 9.7% in Asia, 6.9% in Oceania, and 4.3% in North and Central America" (CDIS UNESCO, 2014; Media and Entertainment Outlook. 2008. PricewaterhouseCoopers).

Selain itu, pariwisata budaya juga tumbuh dan memengaruhi penghasilan ekonomi masyarakat sekitar. Antara tahun 1900 sampai 2005, kunjungan internasional ke negara-negara berkembang tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, dan salah satunya berhubungan secara langsung dengan situs bersejarah sebagai sumber daya tarik wisata. Sebagai catatan, sekitar 60 persen Situs Warisan Dunia UNESCO berlokasi di negara berkembang (Dallen J Timothy dan Gyan P Nyaupane. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. London and New York: Routledge, hlm. 42).

Artinya, banyak indikator lain yang dapat diperhitungkan dalam dimensi ekonomi budaya. Tentunya, definisi dimensi harus jelas sehingga dapat diturunkan dalam indikator-indikator yang lebih tepat sebagai alat ukur. Misalnya dari kajian literatur di atas, memunculkan beberapa indikator yang mungkin dapat digunakan dalam dimensi ekonomi budaya, yaitu (1) Jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari sektor pariwisata budaya, (2) Jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari sektor ekonomi kreatif berbasis budaya, (3) Presentase aktivitas budaya (pelaku/pendukung) yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, dan (4) Presentase aktivitas ekonomi masyarakat yang memanfaatkan destinasi wisata budaya.

2. Tinjauan Terhadap Dimensi IPK: Pendekatan Kebijakan

Dalam kaitannya dengan penentuan dimensi dan indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dapat juga dikaitkan dengan kebijakan tentang kebudayaan. Saat ini, terdapat Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang menjadi landasan dalam pembangunan kebudayaan di Indonesia. Maka, dua dokumen kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan dimensi dan indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Berikut adalah poin penting dari strategi kebudayaan:

Misi 1: Kebudayaan yang inklusif

Misi 2: Melestarikan dan mengekspresikan budaya tradisional untuk menguatkan budaya nasional

Misi 3: Memperkuat budaya Indonesia di dunia internasional

Misi 4: Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

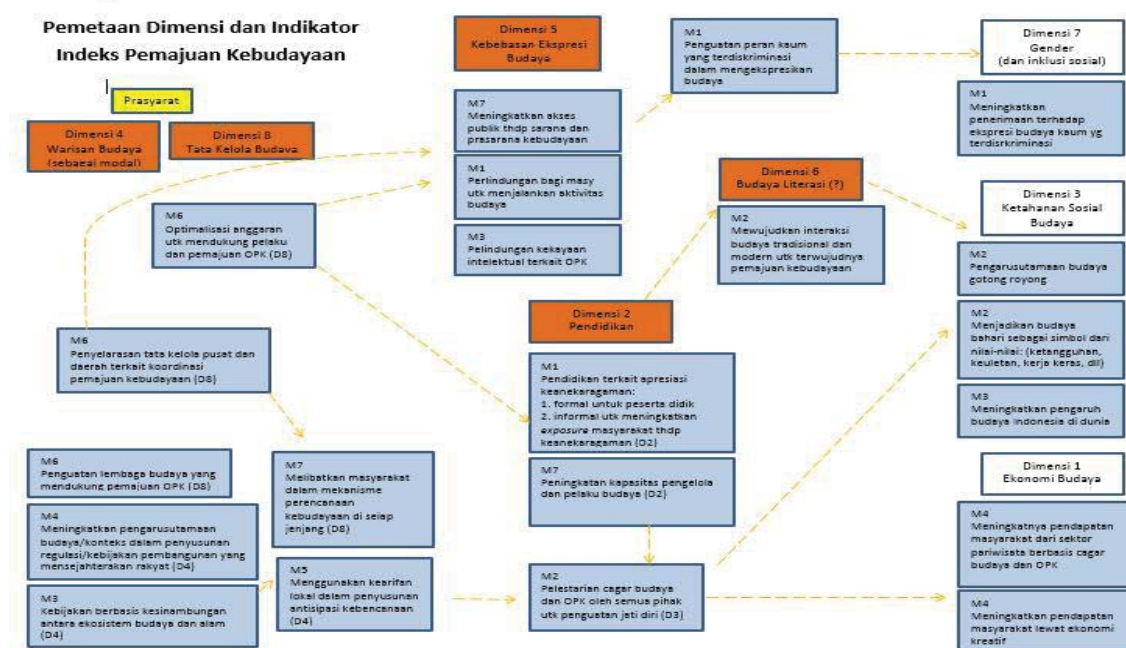
Misi 5: Kebudayaan untuk kelestarian lingkungan alam dan mitigasi bencana

Misi 6: Kelembagaan dan penganggaran

Misi 7: Pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan

Misi-misi dalam Strategi Kebudayaan ini kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang kemudian disebut sebagai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Kajian ini mencoba mengkolaborasikan antara CDIS, strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

untuk merumuskan kembali definisi operasional dari dimensi IPK sehingga ketika diturunkan ke dalam indikator dapat representatif dalam mengukur pembangunan kebudayaan di Indonesia.



Dari pemetaan didapatkan beberapa alternatif definisi dari dimensi-dimensi yang sudah ada dalam IPK, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi Budaya

Definisi operasional: Pendapatan masyarakat yang bersumber dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis budaya.

Definisi ini lahir dari Misi 4: Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui cagar budaya dan OPK melalui Sektor pariwisata dan Sektor ekonomi kreatif.

2. Dimensi Pendidikan

Definisi operasional: Upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya melalui proses internalisasi (pembelajaran) formal dan non-formal

Definisi ini lahir dari Misi 1: Pendidikan terkait apresiasi keanekaragaman melalui pendidikan Formal: untuk peserta didik dan Non-formal: Meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap keberagaman. Juga dari Misi 7: Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaku budaya.

3. Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya

Definisi operasional: Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar kelompok/golongan.

Definisi ini lahir dari Misi 2: Pengarusutamaan budaya gotong royong dan Menjadikan budaya bahari sebagai simbol nilai-nilai bangsa (ketangguhan, adaptif, kerja keras, terbuka/ toleransi, dsb), juga Misi 3: Meningkatkan pengaruh budaya Indonesia di kancah dunia.

4. Dimensi Warisan Budaya

Definisi operasional: Kemampuan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar kelompok/golongan.

Definisi ini lahir dari Misi 4: Meningkatkan pengarusutamaan budaya/ konteks dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang mensejahterakan, Misi 5: Kebijakan berbasis kesinambungan antara

ekosistem alam dan budaya, dan Misi 5: Menggunakan kearifan lokal dalam penyusunan antisipasi kebencanaan.

5. Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya

Definisi operasional: Jaminan akses dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas budaya.

Definisi ini lahir dari Misi 1: Pelindungan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas budaya, Misi 3: Pelindungan kekayaan intelektual terkait OPK, dan Misi 7: Meningkatkan akses publik pada sarana dan pra-sarana kebudayaan.

6. Dimensi Budaya Literasi (Literasi Budaya)

Definisi operasional: Kecakapan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi terkait keragaman budaya.

Definisi ini lahir dari Misi 2: Mewujudkan interaksi budaya tradisional dan modern untuk terwujudnya pemajuan kebudayaan dan Misi 1: Meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap keberagaman budaya.

7. Dimensi Gender

Definisi operasional: Penerimaan masyarakat dan jaminan perlindungan terhadap ekspresi budaya dari kaum yang terdiskriminasi.

Definisi ini lahir dari Misi 1: Penguatan kaum yang terdiskriminasi dalam mengekspresikan budaya, dan Meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap ekspresi budaya dari kaum yang terdiskriminasi.

8. Dimensi Tata kelola

Definisi operasional: Optimalisasi dan penyelarasan lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat, yang berperan dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Definisi ini lahir dari Misi 6: Optimalisasi anggaran untuk mendukung pelaku dan pemajuan OPK, Penyelarasan tata kelola pusat dan daerah terkait koordinasi pemajuan kebudayaan, dan Penguatan Lembaga budaya yang mendukung pemajuan OPK, serta Misi 7: Melibatkan masyarakat dalam mekanisme perencanaan kebudayaan di setiap jenjang.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dalam pemetaan menjelaskan bahwa dimensi-dimensi tersebut pada dasarnya merupakan sebuah proses (pembangunan) kebudayaan di Indonesia, dari tahap awal yang banyak melibatkan peran dari pemerintah (dimensi tata kelola dan dimensi warisan budaya) dan pada tahap proses yang melibatkan masyarakat (dimensi pendidikan, kebebasan ekspresi, dan budaya literasi (literasi budaya)), hingga tercapai tujuan dari pembangunan kebudayaan yang bermuara kepada 3 aspek (dimensi): gender (partisipasi/ inklusi sosial), ketahanan sosial budaya, dan ekonomi budaya.

Untuk dimensi gender, hasil kajian menyarankan agar dimensi gender diubah menjadi partisipasi /inklusi sosial. Untuk jumlah dimensi dalam IPK yang berjumlah tujuh, dianggap terlalu banyak, sehingga cukup tiga dimensi sebagai output yang paling penting dalam IPK, yaitu: 1) Dimensi Ekonomi Budaya, 2) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, dan 3) Dimensi Partisipasi/Inklusi Sosial. Sedangkan untuk indikator, masih terus dikaji.

2. Rekomendasi: Kebutuhan dalam Ketersediaan Data Kebudayaan

Kebudayaan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen yang menentukan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sehingga nantinya IPK tidak hanya mengukur “upaya”

pengelolaan kebudayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun partisipasi setiap orang atau masyarakat, namun juga kontribusi budaya terhadap pembangunan nasional. Tentu indeks yang akurat, tidak hanya ditentukan dari dimensi dan indikator yang representatif sebagai tolak ukur, namun juga sejauhmana pemerintah menyediakan data terkait kebudayaan.

Dalam menentukan indikator-indikator dalam dimensi IPK, data begitu penting. Selain data dari Ditjen Kebudayaan, dapat diperkirakan bahwa indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan banyak mengacu pada data BPS, yang selama ini banyak melakukan penghitungan statistik di bidang sosial budaya. Terkait ketersediaan data, menjadi tugas pemerintah untuk membuat platform data base kebudayaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Indikator-indikator pembangunan kebudayaan harus melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu merepresentasikan kondisi kebudayaan yang sesungguhnya.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 3	Panel No: 9
Ruang	: Padjajaran 4	
Waktu	: 13.15 – 15.30 WIB	
Judul Penelitian	: 1. Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Pengaruh Pendaftaran WBTB Indonesia dalam daftar ICH UNESCO Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Komunitas Budaya 3.	
Penyaji	: 1. Sugih Biantoro, M. Hum. 2. Damardjati Kun Marjanto, S. Sos 3.	
Pembahas	: Dr. Ali Akbar	
Moderator	: Dra. Irna Tri Lestari, M. Hum.	
Notulis	: Khairur Raziqiin, M. E.	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Sugih Biantoro, M.Hum. Di Indonesia, peran kebudayaan dalam pembangunan semakin diperhatikan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 13 Undang-Undang tersebut, mengatur tugas pemerintah untuk menyusun Strategi Kebudayaan yang menjabarkan arah pemajuan kebudayaan dalam 20 tahun mendatang. Penjabaran Strategi Kebudayaan lantas diturunkan lebih perinci ke dalam bentuk Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Dokumen inilah yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan melalui koordinasi secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendukung implementasi RIPK, pemerintah merancang untuk membuat mekanisme pengukuran tingkat pemajuan kebudayaan pada 2019. Sebetulnya sejak 2010 (kebudayaan saat itu masih bergabung dengan Pariwisata), Direktorat Jenderal Kebudayaan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah merancang Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), namun indeks tersebut belum sejalan dengan RIPK. Pada Oktober 2019, pemerintah melaunching IPK dengan pendekatan baru yang dianggap mampu mengakomodir RIPK sekaligus menjadi tolak ukur dalam RPJMN bidang Kebudayaan. Posisi kajian ini adalah meninjau dokumen IPK apakah memang sudah mampu merepresentasikan tingkat pembangunan kebudayaan di Indonesia. 2. Damardjati Kun Marjanto, S. Sos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi rencana tindak tiga genre tari tradisi Bali serta 2) untuk mengetahui pengaruh pendaftaran tiga genre tari tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		komunitas budaya, khususnya penari di bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode <i>fix method</i>, yaitu pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) kemudian analisis data deskriptif sedangkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data serta analisis <i>Structural Equation Modelling- Partial Least Square</i> (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan rencana tindak telah berjalan dengan baik meskipun apa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tersebut merupakan program rutin sehari-hari tidak merujuk kepada rencana tindak. Terdapat pengaruh yang signifikan semenjak pendaftar tiga genre tari tradisi Bali ke dalam daftar ICH UNESCO terhadap kehidupan komunitas budaya, serta rencana tindak tari tradisi bali berdampak positif terhadap kehidupan penari Bali di bidang sosial dan ekonomi. 3.
2.	Pembahas (Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)	Pembahas: Dr. Ali Akbar Manfaat IPK belum banyak dibahas. Apa arti dari indeks IPK dan tindak lanjut dari score IPK. Mengukur kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, dicari bagaimana peranan BAPPENAS terhadap output IPK. Belum ada pernyataan berapa periodisasi pelaporan IPK. Belum ada pernyataan upaya pengelolaan kebudayaan, untuk memunculkan rekomendasi bagi pengambil keputusan, sehingga perlu memunculkan subjek. Perlu ada persentasi masing – masing poin dalam indeks pemajuan kebudayaan. Sumber data sudah tersedia, namun tidak dilakukan kritik yang memadai terhadap data. Misalnya pendidikan, indikatornya rata- rata lama sekolah, tidak ada kaitan langsung dengan budaya. Sehingga indicator kalau dibahas satu persatu banyak yang kurang representative. Perlu tinjauan kritis terhadap masing – masing poin budaya. Ketika melakukan revisi instrument, peneliti akan menahan diri dari mempertahankan variable. Indeks ini terlepas dari kelebihan dan kekurangan harus tetap dipakai, untuk menunjukkan progress. Pakai yang lama namun tetap dimodifikasi. Ada yang tidak terakomodir dalam indeks lama, bisa dibuat indeks yang baru, yang menggambarkan dampak kebudayaan terhadap pembangunan. Angka indeks kemajuan kebudayaan yang kecil pada Indonesia, maka perlu diadakan pengelolaan ulang terhadap pemajuan kebudayaan. Dari pemetaan didapat beberapa alternative definisi kebudayaan sesuai dengan strategi pemajuan kebudayaan. Pada rekomendasi dan tindak lanjut. Indeks ini dipakai untuk apa perlu dijelaskan, mana yang lemah maka harus diperkuat. Revisi indeks yang sifatnya moderat harus ditambahkan. Membuat indeks baru dengan dimensi yang berbeda. Membuat indeks baru yang terkait dengan pembangunan. Pimpinan akan melihat rekomendasi mana yang akan diambil. Tanggapan penyaji Yang dikaji tim, mencoba untuk tidak melakukan banyak perubahan, namun tim menguatkan dari sisi teori terhadap indeks yang sudah ada. Secara kerangka teori dan konsep sudah disajikan Butuh waktu yang lebih banyak untuk penguatan konsep indeksasi kebudayaan. Manfaat dari indeks, belum disajikan secara lebih komprehensif, indeks akan diperbarui setiap tiga tahun sekali. Pemerintah akan berperan pada indeks – indeks yang bernilai kecil.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Kajian lebih sifatnya mengkritisi. Pendimensian mengacu pada CDS. Untuk menguatkan IPK sudah ada dokumen yang lain. Ada dua tujuan implementasi rencana tindak, yang kedua mengetahui pengaruh pendaftaran khususnya penari dibidang social dan ekonomi. Dari dokumen tidak terlalu jelas antara inventarisasi dan bahan ajar, harus ada pembeda antar dokumen. Buku dan idiom. Harus ada penjabaran dari tahapan rencana tindak, agar tidak tertukar dengan inventarisasi atau sebaliknya. Populasi dan sampel. Dalam KTI banyak kekurangan, dilengkapi dengan PPT, sebaiknya dilengkapi untuk keduanya. Harus ada penyebutan sumber, seperti yang telah dilakukan pada proposal. Kategori pada siswa belum disebutkan apakah sebagai penari atau lainnya. Pada kesimpulan, statement yang disampaikan masih kurang tajam, misalnya pemerintah mungkin belum pernah melakukan sosialisasi. Perlu dilengkapi dalam wawancara. Karakter setiap tari harus dijabarkan. Desa harap mengaktifkan pementasan, harus dimasukkan dalam kesimpulan dan saran. Yang dibahas harus lebih diarahkan untuk sesuai judul. Kesimpulan dan tujuan harus sinkron, kesimpulan sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan penelitian. Pada rekomendasi, ada 11 poin dalam karya ilmiah, namun dalam ppt hanya 7 poin. Rekomendasi dibagi menjadi dua sesuai dengan kesimpulan dan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan seminar, era disrupsi dimana semua serba praktis, maka sebisa mungkin laporan penelitian lebih singkat namun padat. Tanggapan penyaji : Manfaat penelitian dari rekomendasi kebijakan Hasil penelitian dikemas sekian rupa sehingga menjadi KTI KTI dibuat dengan cukup tergesa-gesa. Dalam pustaka diketahui ada ketentuan untuk pustaka, sehingga akan dibenahi Terkait action plan secara konseptual berbeda, namun seringkali dimaksudkan untuk bahan ajar namun untuk inventarisasi, bahan ajar ada kurikulum, namun yang ditemu bukan itu, namun didefinisikan oleh pelaku berupa pengayaan, sebagai bahan ajar. Tantangan era disrupsi, bahan akan lebih disederhanakan. Ada semacam pesimisme dalam pengelolaan kebudayaan.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang</i>	Panca Waluyo Memasukkan gender ke indeks, menjadi rancu, harus diperjelas, karena banyak isu terkait gender. Mana gender yang akan dipakai. Sementara gender sendiri memiliki indeks sendiri. Tanggapan penyaji

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
	<i>bertanya dan hasil diskusinya)</i>	Lebih kepada partisipasi social, tim mengacu pada data BPS yang digunakan. Definisi gender yang diambil sangat sederhana sesuai dengan definisi CDIS. Tim menyarankan agar gender diganti dengan partisipasi social.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 14.45 WIB.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN VOKASI YANG BERMUTU PADA SMK BIDANG PARIWISATA DALAM RANGKA PEREKAYASAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJASAMA INDUSTRI

Agung Purwadi, Untung Tri Rahmadi, Fadila Dharma
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kegiatan ini ditujukan untuk menggali potensi kerjasama para pemangku kepentingan memenuhi tiga jenis sumberdaya utama, yaitu instruktur berkompeten, praktik menggunakan peralatan dan mesin sesuai dengan yang digunakan di industri, dan biaya operasional untuk mengadakan bahan dan alat praktik habis pakai. Kegiatan ini mempunyai peran penting terkait upaya menjadikan Sektor Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar mulai 2045, dan pembnagunan SDM melalui diklat vokasi dengan strategi kerjasama. Penelitian ini menggunakan pedekatan studi kasus, Temuan menunjukkan bahwa instruktur berkompeten memerlukan pengalaman industri yang intensif sejak kuliah pada perguruan tinggi program Diploma III yang dosennya kebanyakan juga datang dari kalangan industri. Kebutuhan peralatan praktik harian dapat dipenuhi dengan kerjasama dengan industri terkait, sepanjang industri tersebut berada dalam jarak ulang-alik harian dan prakerin yang dilaksanakan secara intensif tanpa gangguan kepada siswa dengan tugas-tugas pembelajaran teori melalui modul. Dukungan pelaksanaan praktik hanya dapat dipenuhi oleh sangat sedikit pemprov, orang tua yang sadar bahwa pembiayaan pendidikan anak di SMK merupakan tanggung jawab orangtua. Pemenuhan ini sulit dilakukan melalui unit usaha sekolah seperti hotel-pendidikan (edutel) karena pemasukan bagi SMK negeri merupakan PNBPN yang harus disetor ke pemerintah. Opsi pembentukan BLUD sedang diujicoba apakah memang SMK dapat menghasilkan dana mencukupi untuk mmembiayai kebutuhan sekolah setelah status masa transisi tiga tahun terlampaui. Dukungan individu dan perusahaan filantroph dan kerjasama dengan asosiasi industri atau asosiasi profesi menjadi harapan. Namun, sampa isaat ini sekolah dan disdikprov belum aktif mengupayakan peluang ini. Kerjasama dengan asosiasi yang ada masih terjadi karena inisiatif asosiasi, bukan sekolah atau pemprov.

Kata kunci: pendidikan vokasi, pariwisata, sumber daya, instruktur, praktikum, biaya operasional

A. PENDAHULUAN

Terdapat dua rasional dari penelitian dan pengembangan SMK ini, sisi perekonomian nasional dan misi Presiden 2020-2024. Dari sisi pertama, Pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan sebagai penyumbang devisa terbesar pada tahun 2045. Sumbangan devisa ditunjukkan oleh besarnya penerimaan dari kedatangan wisman. Jumlah kedatangan dan besar penerimaan dari wisman yang datang ke Indonesia adalah yang terendah di antara negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kelemahan Indonesia adalah kekalahan bersaing SDM dari ketiga negara tetangganya. Indonesia hanya unggul dalam aspek visi Pemerintah dan berbagai hal terkait dengan warisan masa lalu dan nilai tukar uang yang rendah, dan dalam 1 indikator upaya dan kemampuan SDM yakni keamanan dan keselamatan,

namun kalah dalam 9 indikator lainnya dalam aspek DM dan hal-hal yang dipengaruhinya (UN-WTO, 2017).

Sisi ke dua, salah satu **misi Presiden** adalah “Membangun SDM dengan meningkatkan *vocational training, vocational school*”, termasuk SMK, dengan salah satu **strateginya berupa** “peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi”. Misi ini seakan menjawab masalah pada upaya pencapaian pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar yang menemui kendala pada kompetensi SDM pariwisata, yakni kerjasama.

Masalah utama SMK adalah kurangberhasilan menyiapkan lulusannya untuk bekerja, karena ternyata justru menghasilkan tingkat pengangguran lulusan tertinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran ini adalah kurangnya kompetensi lulusan SMK, termasuk SMK Pariwisata, yang berakar dari kekurangan sumberdaya utama pendidikan vokasi, yakni instruktur kompeten berpengalaman industri, fasilitas praktik, dan biaya operasional.

Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi pemenuhan kebutuhan sumberdaya utama SMK Pariwisata melalui kerjasama atau gotong royong dengan para pemangku kepentingan sekolah, yakni pemma, orang tua, dan pelaku industri pariwisata.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat dua landasan utama yang membangun kerangka kerjasama penelitian dan pengembangan pemenuhan sumberdaya utama SMK Pariwisata ini. Keduanya adalah teori kerjasama dan teori jenis pelatihan.

Landasan kerjasama antara dua pihak atau lebih adalah adanya manfaat yang diperoleh dari melaksanakan kerjasama. Kerjasama antar-organisasi sebenarnya memiliki beberapa aspek, namun salah satu diantaranya yang langsung berkaitan dengan kegiatan ini adalah aspek koordinasi dan pengontrolan sumber daya (Wevers, 2007, Rossignoli dan Ricciardi, 2015, Pouwels dan Koster, 2017). Teori-teori yang mendasari koordinasi dan pengontrolan sumber daya adalah Teori Biaya Transaksi (Williamson, 2007), Teori Keagenan (Panda dan Leepsa, 2017), dan Teori Ketergantungan Sumberdaya (Delke, 2015). Ketiga teori tersebut bertitik tolak dari asumsi-asumsi antropologi yang sama, yakni, pertama, sifat manusia terbentuk berdasarkan kemanfaatan yang diperoleh masing-masing pihak (*opportunism*). Ke dua, kerjasama harus dikordinasikan dan dikontrol secara ketat agar asas kemanfaatan yang dilakukan oleh mitra-kerjasama tidak merugikan karena kesempatan justru terambil oleh mitra kerjasama atau pihak lain yang tidak ikut bekerjasama.

Dari sisi jenisnya *training*, atau pendidikan dan pelatihan vokasi, terdiri dari *specific training* dan *general training*. *Training* (termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi) dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni *general training* dan *specific training*. *General training* adalah pendidikan dan pelatihan vokasi yang manfaatnya, berupa lulusan yang kompeten, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, perusahaan mana saja. Sebaliknya, *specific training* adalah pendidikan dan pelatihan vokasi yang manfaatnya, berupa lulusan yang kompeten, hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu saja, tidak sembarang perusahaan dapat memanfaatkannya (Acemoglu, 2011, Eherberg dan Smith, 2015, <https://www.inc.com/>).

Dengan demikian kerjasama pemenuhan sumber daya SMK Pariwisata dengan para pemangku kepentingan tergantung dari dihasilkannya lulusan berkompeten di bidang pariwisata itu dinikmati oleh siapa, oleh pihak mana? Keberadaan lulusan SMK Pariwisata yang berkompeten, yang pengadaan ketiga input utamanya berasal dari kerjasama dengan Hotel A, Perusahaan Garmen B, Salon C hanya akan bermanfaat bagi perusahaan A, B, dan C? Lulusan SMK Pariwisata dibekali dengan kompetensi yang dapat

dimanfaatkan di industri pariwisata mana saja sesuai dengan kompetensi keahliannya, bukan secara khusus hanya dapat digunakan di industri tertentu. Berdasarkan itu kerjasama dengan pelaku industri pariwisata semestinya dilakukan dengan asosiasi-asosiasi, bukan dengan individu, industri dan profesi pariwisata.

Kerjasama pemenuhan sumber daya dengan pemprov dan orang tua memiliki sudut pandang tersendiri. Pemprov adalah penanggung jawab operasional penyelenggaraan SMK sedangkan Pemerintah hanya memiliki kewenangan penetapan standar dan norma, walaupun kenyataannya Pemerintah melalui Dit. PSMK masih mengirim berbagai jenis *block grant* ke SMK (Purwadi, 2017). Seharusnya dukungan pemprov kepada penyelenggaraan SMK Pariwisata (dan semua satuan pendidikan menengah lainnya) tidak dalam konteks kerjasama. Inpres 6/2019 nampaknya belum menjadikan semua pemprov menyediakan dukungan sumberdaya bagi penyelenggaraan SMK Pariwisata. Apabila pemberian dukungan kepada SMK Pariwisata didasari pada peran penyiapan SDM pariwisata terhadap perekonomian daerah, apakah memang provinsi-provinsi pemilik daerah tujuan wisata (DTW) berskala nasional sudah memberikan dukungan itu? Adakah kekhawatiran provinsi bukan-DTW akan aliran lulusan SMK Pariwisata daerahnya (*brain-drain*) ke provinsi DTW? Kerjasama pemenuhan sumber daya SMK pariwisata dengan orang tua memiliki sudut yang lain. Peraturan perundangan menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua juga, tidak hanya Pemerintah dan pemda. Oleh sebab itu menjadi *absurd* ketika orangtua dibatasi keikutsertaannya dengan larangan pungutan kepada orang tua yang kemudian sumbanganpun diartikan sebagai pungutan terselubung?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus yang membatasi jumlah daerah verifikasi dan Validasi (verval) sebanyak 5 daerah. Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan konsep, verval lapangan terhadap konsep, dan penyusunan opsi kebijakan operasional. Konsep dikembangkan melalui kajian literatur dan empirik serta diskusi intensif dengan perwakilan pelaku-pelaku industri.

Lokus verval ditetapkan dengan mempertimbangan 2 aspek, yakni kecenderungan kedatangan wisman 5 tahun terakhir dan status pembangunan pariwisata. Provinsi yang kecenderungan kedatangan wismanya meningkat sekaligus berstatus super-prioritas atau unggulan teratas pengembangan pariwisata adalah: Sumut, DIY, NTB, dan Sulut, dan yang menurun sekaligus bukan daerah unggulan adalah Kaltim yang menjadi perwakilan upaya pengembangan pariwisata bagi daerah bukan unggulan. Verval dilaksanakan dengan minimal 2 Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di masing-masing lokasi, yakni kelompok eksekutif dan pendidik profesional. DKT kelompok eksekutif utamanya diikuti oleh pimpinan BPD/DPD asosiasi profesi dan asosiasi industri ditambah perwakilan disdikprov dan disparprov atau disbudparprov. DKT kelompok pendidik profesional diikuti oleh perwakilan para guru mapel produktif profesional alumni lembaga pendidikan pariwisata ternama.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi guru mapel produktif¹ dan pengkiniannya

a. Kekurangan kompetensi sebagian dari guru mapel produktif yang ada

Pada kasus GMP Laundry (Perdirjen Dikdasmen 7/2018) pada KK Perhotelan di sebuah SMK Pariwisata di salah satu provinsi ditemukan bahwa guru tidak memberikan keterampilan mencuci menggunakan mesin

¹ Instruktur

cuci yang disediakan oleh hotel sekolah dengan menggunakan deterjen khusus. Walhasil, siswa tidak melaksanakan praktik mencuci dengan menggunakan mesin cuci.

Pada kasus GMP Pengolahan dan Penyajian Makanan (PPM, Perdirjen Dikdasmen 7/2018) di sebuah SMK di suatu provinsi GMP tidak melakukan penanaman sikap kerja dengan benar. Ini ditunjukkan oleh dua hal, pertama, pada jam praktik siswa bergantian di suruh pergi ke luar sekolah untuk membeli bahan praktik, misalnya ke pasar beli terigu. Ke dua, GMP memakai sandal jepit ketika membimbing praktik siswa di dapur sekolah, sedangkan prosedur bakunya adalah memakai safety shoes.

GMP tidak melakukan penanaman sikap yang seharusnya dilakukannya dan GMP Laundry tidak melaksanakan praktik karena ia sendiri tidak memiliki pengalaman kerja di industri. Apabila GMP tidak mempunyai pengalaman industri, bagaimana ia dapat mencetak lulusan yang akan bekerja di industri? Temuan tersebut mengindikasikan bahwa GMP/instruktur kurang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menyiapkan lulusannya agar memiliki keterampilan kerja. Kasus pertama mengindikasikan adanya kekurangan keterampilan kerja. Alternatifnya adalah perekrutan pelaku industri pariwisata level supervisor ke atas yang berminat untuk alih profesi menjadi instruktur SMK sebagaimana telah dilakukan bagi perekrutan instruktur politeknik (Permenristek dan Dikti no. 26 th. 2017, Purwadi, 2018b).

b. Pengkinian dan peningkatan kompetensi GMP yang ada

Kekurangan kompetensi atau kadaluwarsanya kompetensi GMP yang ketika awal bertugas sudah kompeten, dalam melaksanakan fungsi pembimbing instruktur praktik siswa inilah yang menjadi salah satu masalah umum pendidikan vokasi. Karena industri pariwisata berkembang terus, termasuk penggunaan teknologinya, maka agar GMP mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, maka kompetensinya harus selalu dikinikan sesuai dengan perkembangan industri pariwisata.

Pihak industri pariwisata di Sumut dan NTB menyatakan bahwa pengkinian kompetensi GMP sebaiknya dilaksanakan dua kali per tahun. Namun salah satu GMP menyatakan bahwa pengkinian kompetensi berikutnya adalah 10 tahun y.l. Pengkinian tersebut tidak memperhitungkan pelatihan-pelatihan teoritis yang pernah berikutnya selama ini, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan pihak-pihak lain dengan biaya GMP itu sendiri.

Selain itu, GMP setidaknya perlu memiliki kompetensi dalam bahasa internasional secara aktif, setidaknya bahasa Inggris, ditambah dengan bahasa internasional ke dua. Bahasa Inggris diperlukan karena peristilahan dalam kepariwisataan umumnya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, bahasa internasional ke dua diperlukan mengingat pengembangan sektor pariwisata dikaitkan dengan pemerolehan devisa dari wisatawan mancanegara, maka dunia pariwisata erat juga hubungannya dengan bahasa internasional ke dua sesuai dengan mayoritas wisman yang datang ke provinsi yang bersangkutan.

2. Kesempatan siswa praktik dengan peralatan dan mesin yang sesuai dengan yang digunakan di industri

Pengalaman menggunakan peralatan dan mesin sebagaimana yang digunakan di industri merupakan modal yang sangat berharga karena lulusan menurut SKKNI dirancang untuk memiliki kompetensi pada Level 2, yakni operator. Keterampilan ini merupakan akumulasi dari praktik harian di sekolah dan praktik kerja di industri (prakerin) selama 3 atau 6 bulan. Praktik harian di sekolah dirancang untuk memberikan keterampilan dasar dan prakerin untuk memberikan keterampilan lanjutan, sehingga di akhir prakerin siswa sudah memiliki keterampilan yang memadai sebagai pekerja baru.

Akumulasi keterampilan akan optimal apabila sebelum mengikuti prakerin siswa sudah memiliki keterampilan dasar dengan memadai sehingga tinggal melanjutkan dengan berlatih untuk menguasai keterampilan lanjutan di industri. Akumulasi tidak optimal karena setidaknya tiga faktor, yakni faktor-faktor kualitas pelatihan di sekolah dan kualitas pelaksanaan pelatihan ketika prakerin, dan keberadaan industri yang sesuai tempat pelaksanaan prakerin dalam jarak jangkauan yang dapat diterima. Masing-masing faktor akan dianalisis sebagai berikut.

a. Pelaksanaan pelatihan dasar atau pelatihan harian di sekolah

1) Kuantitas dan kualitas pelaksanaan praktik harian

Faktor yang berpengaruh pelaksanaan pelatihan di sekolah setidaknya terdiri dari kemampuan GMP menjadi instruktur pembimbing praktik harian siswa, serta keterlaksanaan praktik menggunakan peralatan dan mesin yang sesuai dengan peralatan dan mesin yang digunakan di industri. Pelaksanaan praktik harian di sekolah adalah antara ada dan tiada, kalau ada pun di beberapa sekolah kecenderungannya dilaksanakan secara kurang memadai. Alasan kurang memadainya praktik ini adalah kurang tersedianya biaya pengadaan bahan praktik siswa dari dana BOS. Sangat kurangnya biaya pengadaan bahan praktik dari dana BOS ini dikeluhkan di semua SMK Pariwisata yang menjadi peserta FGD dalam langkah verval.

Beberapa KK disejumlah SMK di provinsi yang berbeda tidak atau menyelenggarakan praktik harian dengan frekuensi yang sangat kurang. Lulusan KK Tata Boga di salah satu sekolah di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa selama ia bersekolah di sana sekolah itu tidak pernah menyelenggarakan praktik Tata Boga. Hal serupa dinyatakan oleh siswa KK Perhotelan di Provinsi NTB. Siswa menyatakan tidak ada pelajaran praktik di sekolah itu. Satu-satunya acara yang dinilai sebagai praktik adalah praktik *Table Manner* di sebuah hotel di pulau tetangganya, yaitu Bali, dengan biaya Rp 1 juta dari orang tua siswa.

Beberapa KK lain di SMK lain di provinsi yang berbeda menyatakan bahwa mereka menyelenggarakan praktik harian namun dalam kualitas dan kuantitas yang kurang memadai. Untuk KK UPW di salah satu SMK di Provinsi Sulawesi Utara GMP-nya menyatakan mengadakan praktik harian dengan frekuensi dan kualitas yang kurang memadai karena tidak memiliki sarana praktik berupa perangkat lunak reservasi hotel dan tiket sebagaimana digunakan di BPW dan hotel modern. Namun demikian, kaprodi di beberapa sekolah lain menyatakan bahwa kepemilikan alat canggih di sekolah tidak mutlak, sepanjang terdapat peralatan manual, karena dua sebab: keterampilan yang ditanamkan adalah sama, yang berbeda hanyalah secara manual dan menggunakan TIK, dan (ii) keterampilan menggunakan peralatan canggih ini dapat diperoleh sewaktu prakerin. Kekurangan kuantitas praktik harian ini juga dinyatakan oleh siswa-siswa SMKN di Provinsi NTB. Pelaksanaan praktik harian hanya antara 3 sampai 4 kali pada semester yang ada mapel produktif (Kelas XI). Sementara itu guru menyatakan bahwa anggaran pembelian bahan praktik dari dana BOS yang sangat kurangnya penyebabnya.

Di sisi lain, semua KK di salah satu SMK di Provinsi Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta menyelenggarakan praktik harian dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Untuk Kalimantan Timur, KK Perhotelan mengadakan praktik harian dengan dana pembelian bahan praktik dari BOS. KK Tata Boga, KK Tata Busana, dan KK Tata Kecantikan mengadakan praktik harian dengan dukungan biaya pengadaan bahan praktik dari 2 sumber, yaitu BOS dan orang tua. Demikian juga semua KK dari SMK Pariwisata di Provinsi DI Yogyakarta, yang biaya total operasionalisasi sekolahnya mencapai 262,5 persen dari BOS.

Selain itu sebenarnya terdapat kendala lain, yakni daya listrik yang tidak memadai untuk praktik karena peralatan praktik yang mengonsumsi daya listrik sangat tinggi. Masalah ini dinyatakan oleh SMK di beberapa provinsi, termasuk Kalimantan Timur.

2) Kendala pembelajaran praktik secara efektif dari aspek kalender pendidikan

Pembelajaran di SMK Pariwisata yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun atau 6 semester, dari Kelas X s.d. Kelas XII, kenyataannya hanya dilaksanakan dalam 5 ½ semester. Pengurangan waktu pembelajaran tersebut terjadi karena jadwal-jadwal kegiatan besar sekolah, yakni Prakerin serta ujian-ujian akhir (UN, US, dan UKK) dan persiapannya. Prakerin untuk KK Perhotelan misalnya, dilaksanakan selama 6 bulan dan kegiatan ini dilaksanakan pada 3 bulan terakhir Semester 4 (April s.d. Juni) dilanjutkan 3 bulan pertama Semester 5 (Juli s.d. September). Sedangkan UN, US, dan UKK pada tahun 2019 dilaksanakan mulai bulan Maret, atau bulan ke tiga Semester 6.

Prakerin yang merupakan kesempatan siswa mengikuti praktik atau pelatihan lanjutan, memerlukan persiapan agar keterampilan dasar (berupa praktik harian di sekolah) serta pengetahuan dan sikapnya memenuhi persyaratan minimal keterampilan serta pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat menangkap esensi pelatihan lanjutan tersebut. Persiapan khusus ini harus selesai pada bulan ke-3 Semester 4. Dengan demikian waktu pembelajaran praktik harian di sekolah harus digeser ke semester-semester sebelumnya untuk dilaksanakan sejak semester 1 selama 3 ½ semester. Dengan demikian jam pembelajaran siswa pada semester 1 dan 2 menjadi 55 jampel/minggu atau 11 jampel per hari.

b. Faktor pelaksanaan pelatihan lanjutan di industri

Pelaksanaan pelatihan lanjutan ketika siswa melaksanakan praktik di industri setidaknya menemukan tiga kendala berikut. Kendala pertama adalah keterampilan dasar siswa tidak memadai untuk melaksanakan praktik di industri. Ini dicontohkan oleh KK Kecantikan dari SMKN di sudut Jateng yang melaksanakan prakerin di salon milik pengurus DPP asosiasi profesi di Jakarta. Akibatnya 5 dari 6 bulan waktu prakerin digunakan untuk pembekalan ulang, teori maupun praktik, atas biaya salon. Kendala kedua, anggapan salah yang mengasumsikan siswa adalah manusia super: sambil secara sungguh belajar bekerja di industri yang harus menghasilkan produk siap jual dia belajar teori melalui modul atau bentuk tugas lain dari sekolah. Akibatnya pada rentang waktu kerja di industri, siswa meninggalkan peralatan dan mesin untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah.

c. Faktor keberadaan industri yang sesuai teknologi untuk pelaksanaan pelatihan lanjut melalui prakerin

Kendala ke tiga adalah tidak adanya industri yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk prakerin di lokasi yang sama. Kasus ini dicontohkan oleh KK Tata Busana di sebuah SMK di Kalimantan Timur. Siswa KK ini tidak memperoleh tempat prakerin yang sesuai karena ketiadaan industri pakaian besar di kota yang sama atau kota tetangga. Industri pakaian yang ada di kota ini hanyalah usaha penjahitan individu dan industri pembuatan sarung yang hanya memerlukan keterampilan menjahit lurus. Satu-satunya industri garment skala besar di provinsi ini hanyalah CV Trisula Citra Perdana di Balikpapan. Perusahaan ini hanya dapat menampung siswa prakerin dari SMK-SMK Pariwisata di kota Balikpapan yang berjarak 100 km. dari Samarinda.

3. Ketersediaan biaya operasional untuk praktik: pengadaan alat dan bahan habis pakai

a. Pencarian dukungan dari pemda

Dukungan pemprov terhadap penyediaan bahan dan alat habis pakai baru ditunjukkan oleh DIY. Pemprov DIY menyediakan dana pendukung BOS sebesar 162,5 persen sehingga besar keseluruhannya menjadi Rp

4,2 juta/siswa/tahun. Sampai saat ini belum ditemukan pemprov lain yang mendukung pembiayaan dimaksud (Purwadi, 2018a).

b. Penggalangan dukungan dari orangtua

penggalangan dana dari orang tua beragam. Di Kalimantan Timur, SMKN 3 Samarinda berhasil meyakinkan orang tua untuk membantu penyelenggaraan praktik pada KK Kuliner. Caranya adalah secara berkelompok siswa membawanya dari rumah dan hasil praktiknya dibawa siswa pulang ke rumah untuk diketahui orangtuanya. Sedangkan untuk praktik *table manner* pada KK Perhotelan dan Jasa Perjalanan Wisata, orang tua siswa SMKN 3 ini membayar biaya pelaksanaan praktik anaknya di hotel dalam Kota Samarinda. Ketua dan wakil ketua kelas yang mengumpulkan uang tersebut dan menyerahkannya sendiri ke hotel tempat praktik didampingi oleh guru dan hotel menyerahkan kuitansi tanda terima pembayaran kepada ketua dan wakil ketua kelas. Hal yang serupa terjadi di SMKN 4 Mataram yang orangtuanya membiayai praktik serupa, namun pembayaran diserahkan kepada guru koordinator praktik.

Namun demikian hal itu tidak terjadi di provinsi lain karena kepala sekolah khawatir terhadap tuduhan pungli. Walaupun ketika merencanakan pemberian kesempatan kepada orang tua untuk berperan serta secara finansial dalam pendidikan anaknya sudah dilaksanakan melalui rapat komite sekolah dengan semua orang tua, namun ketika ada orang tua yang tidak setuju biasanya ia tidak memberikan pendapat, namun secara diam-diam ia akan melapor kepada Ombudsman, Tim Buser Pungli, atau DPR dan mengadukannya sebagai pungli oleh sekolah.

c. Individu sekolah berusaha sendiri mencari penghasilan

1) Pendirian hotel, salon, dan kafe pendidikan

Pemanfaatan fasilitas praktik berupa “hotel-pendidikan” (KK Perhotelan dan Jasa Wisata), “salon pendidikan” (Tata Kecantikan), “kafe pendidikan” (Kuliner), dan “Kios Penjahitan” (Tata Busana) dengan konsep praktik pada tiruan usaha dan melaksanakan bisnis dan menerima pemasukan untuk menambah biaya operasional sekolah untuk mengadakan bahan dan alat praktik habis pakai. Namun demikian, penerimaan dana oleh sekolah dalam simulasi usaha sebagai bentuk praktik siswa ini oleh pemda dianggap sebagai pemasukan yang harus dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan harus disetorkan ke Kas Negara, sehingga tujuan sekolah dalam memperoleh tambahan biaya operasional tidak tercapai.

Masalah edutel ini nampaknya adalah pada tahap pengembangan konsep di Dit. PSMK. Konsep penerimaan uang dari pemberian layanan jasa pada saat itu tidak dibahas dengan Kementerian Keuangan. Sehingga ketika SMK negeri – yang biaya modal dan biaya operasionalnya dibayar oleh pemerintah (pusat dan daerah) – menjadi wajar apabila ada pemasukan maka dananya harus disetor ke pemerintah.

Penyetoran penerimaan dari hasil pembuatan produk barang atau jasa di SMK ini adalah masalah lama. Pada tahun 1984 sudah diketahui adanya sikap tidak rela dari sebuah SMIK Negeri untuk menyetorkan hasil penjualan mebel ukir hasil praktik siswa (Purwadi, 1985). Sekolah membiarkan mebel hasil praktik menumpuk di gudang sekolah daripada kalau dijual dananya harus disetor ke Pemerintah.

2) Pembentukan badan layanan usaha daerah

Upaya lain dalam memperoleh tambahan biaya operasional sekolah adalah pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai badan layanan umum, sekolah dapat mengelola sendiri penerimaan dananya untuk keperluan sekolah, dengan catatan setelah masa pendewasaan (*masa tenggang, grace*

period) selama 3 tahun terlampaui, sekolah harus memenuhi keperluan pembiayaannya dari penghasilan sendiri.

Provinsi Jawa Timur tengah menguji coba penggunaan pola BLUD ini di 20 SMK. Perkembangan ujicoba ini diamati betul apakah SMK mampu membiayai kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan kemampuannya membuat produk barang dan/atau jasa dan menerima hasil penjualannya. Ada informasi bahwa di SMK-SMK tersebut yang di-BLUD-kan hanya unit-unit usahanya, bukan sekolahnya. Namun demikian dalam SK Gubernur tegas-tegas dinyatakan bahwa sekolah-lah yang di-BLUD-kan.

3) Penggalangan dana dari donatur

Donatur berupa filantroph, baik atas nama individu maupun perusahaan, sudah terlaksana untuk SMK, termasuk SMK Pariwisata. Contoh filantroph untuk SMK Pariwisata adalah Panorama Group, induk perusahaan Biro Perjalanan Wisata *Panorama Tours*, memberikan dukungan berupa pendirian SMK Pariwisata yang dikelola Sekolah Kesatuan Bogor pada 14 Juli 2017. SMK ini menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Perhotelan dan Jasa Perjalanan Wisata (<http://www.panorama-sentrawisata.com/panorama-group>).

4. Kerjasama yang ada antara SMK dan pelaku industri pariwisata

Provinsi yang telah memiliki kerjasama dengan asosiasi profesi adalah Kaltim dan Yogyakarta. Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan IHGMA dan ICA. Kerjasama yang terjadi dilaksanakan atas inisiatif kedua asosiasi tersebut langsung dengan sekolah. Kerjasama IHGMA dilaksanakan atas dasar Program Kemenpar-IHGMA yang bernama One GM One SMK. Kerjasama ICA dilaksanakan atas dasar Program ICA yang bernama ICA Goes to School. Masing-masing asosiasi ini mengadakan pendekatan langsung ke individu SMK Pariwisata di kotanya atau kota tetangga.

Provinsi-provinsi Sulut dan NTB belum memiliki kerjasama. Disdikprov NTB menyatakan bahwa kerjasama tersebut telah direncanakan, namun rapat persiapannya pun belum dilaksanakan sampai dengan saat penulisan laporan ini, apalagi penandatanganan akad kerjasamanya. Untuk Sulut, sebenarnya sudah ada tawaran kerjasama dari BPD ASITA, berupa pemanfaatan alat-alat kerja di salah satu BPW anggota ASITA Sulut untuk digunakan pada praktik harian mata pelajaran Jasa Perjalanan Wisata pada KK Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Namun demikian sampai dengan konsep laporan ini ditulis, pihak SMK Pariwisata tetap belum menghubungi ASITA. Nampaknya SMK lebih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat daripada bekerjasama dengan asosiasi setempat.

Kerjasama sudah ada di Provinsi Sumatera Utara sudah ditandatangani MoU-nya, namun s.d. saat ini belum ditindaklanjuti. Secara individu asosiasi profesi, IHGMA dan ICA, juga belum ada kerjasama. Keraguan akan manfaat yang diterima oleh industri pariwisata terhadap dukungan yang mereka berikan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah baru terjawab secara konseptual oleh peraturan perundangan yang baru yang menjanjikan penghitungan sebesar dua kali lipat dari pengeluaran untuk mendukung diklat, termasuk di SMK Pariwisata, sebagai nilai pengurang bagi pendapatan bruto kena pajak.

E. PENUTUP

1. Pemenuhan kebutuhan instruktur (guru mapel produktif) berpengalaman industri

a) Kesimpulan

Pemenuhan kebutuhan instruktur berpengalaman industri dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi jangka waktu, pemenuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi pemenuhan jangka panjang

dan mendesak jangka pendek. Dari sisi status guru yakni tetap dan tidak tetap. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru tetap dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek dilakukan melalui perekrutan guru tidak tetap dan *reskilling* guru yang ada.

b) Opsi kebijakan

1) Pemenuhan guru tetap dalam jangka panjang melalui pendidikan khusus calon guru baru

Karakteristik programnya adalah Diploma IV, yakni muatan D-III kepariwisataan ditambah muatan pedagogi 1 tahun. Untuk guru KK Perhotelan dan UPW dilaksanakan melalui kerjasama 3 Poltek/Sekolah Tinggi Pariwisata Kemenpar dan 3 LPTK untuk memastikan terbentuknya kompetensi sebagai instruktur praktik. Untuk ketiga KK lainnya dilaksanakan oleh LPTK terpilih, a.l. UNJ, UNY, dan UPI. Apabila masing-masing menyiapkan 30 guru per tahun, maka dihasilkan 180 guru mapel produktif yang berkompeten per tahun. Perkiraan mulai bertugas ke-180 guru ini tahun **2025** (apabila memulai kuliah pada bulan Juli 2020) dan akan berada di profesinya s.d. tahun 2060-an¹.

2) Pemenuhan guru tetap dalam jangka pendek dilaksanakan melalui program *reskilling* guru Mapel Adaptif (mapel Kelompok B) yang ada melalui Program Keahlian Ganda (PKG) yang disempurnakan

Peserta: program diikuti oleh guru yang masih memungkinkan untuk menerima kompetensi baru yang jauh berbeda, yakni dari sisi usia tidak lebih dari 45 tahun, menandatangani perjanjian akan mengajar mapel produktif, dan keikutsertaan disertai dengan kesadaran untuk menghemat pengeluaran negara namun tidak atas tunjukkan tanpa penyadaran. Penyusunan materi dilakukan melalui kerjasama dengan asosiasi industri dan asosiasi profesi kepariwisataan yang sesuai. Misalnya (i) materi perhotelan bersama PHRI, IHGMA, IHGM, dan IHKA, UPW bersama ASITA, HPI, dll.; (ii) Tata Boga bersama ICA, IPA, PCPI, PHRI; (iii) Tata Kecantikan bersama Tiara Kusuma, IPB Kartini dll; dan (iv) Tata Busana bersama IPM, dll. Waktu penyelenggaraan: 6 bulan, 80 persen diantaranya untuk praktik. Untuk KK Perhotelan, praktik dilaksanakan meliputi ke-3 shift kerja di hotel. Pelaksana: sama dengan butir a.

3) Pemenuhan guru tidak tetap dalam jangka pendek namun dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang melalui program guru tamu dan kelas alumni

Pengadaan guru yang mengombinasikan kebutuhan jangka panjang serta kemendesakan kebutuhan jangka pendek adalah guru tamu dari industri. Terdapat dua contoh program guru tamu yang sudah berjalan, yakni dari asosiasi profesi IHGMA dan ICA, masing-masing secara berurutan untuk KK Perhotelan dan Jasa Pariwisata dan KK Kuliner. Guru tamu IHGMA merupakan program bersama Kemenpar bertajuk *One GM- One SMK*. Melalui program ini GM hotel diharapkan melakukan penyegaran wawasan dan pengetahuan siswa dan GMP melalui pengisian pembelajaran. Keterbatasan program ini meliputi, pertama belum meratanya keberadaan asosiasi ini di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, dan ke dua, kedatangan GM ke sekolah yang transportnya harus dibayar oleh sekolah.

Contoh ke dua adalah guru tamu dari asosiasi *chef* ICA dalam program *ICA Goes to School*. Melalui program para *chef* melakukan dua jenis pengkinian, yakni kurikulum serta praktik yang tentu saja diperkaya dengan pengetahuan terkini. Dalam melaksanakan dukungannya terhadap SMK, guru tamu dari ICA ini tidak dibiayai kedatangannya oleh sekolah.

¹ Asumsi mulai bertugas umur 23 tahun

Penyempurnaan yang perlu dilakukan adalah penjadwalan kedatangan guru tamu secara terjadwal tahunan. Dengan adanya jadwal ini maka materi dan waktu pembelajaran dapat diatur secara lebih efektif.

2. Peningkatan dan pengkinian kompetensi (quality assurance, QA) Guru Mapel Produktif SMK Pariwisata

a) Kesimpulan

GMP SMK Pariwisata dituntut untuk selalu menguasai kompetensi yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang diterapkan di industri pariwisata. Walaupun GMP sudah memiliki kompetensi yang memadai ketika lulus dari PT, namun seiring dengan berkembangnya teknologi serta situasi dan kondisi lainnya, mungkin kompetensi yang dikuasai tersebut menjadi kadaluwarsa setelah sekian tahun bertugas.

b) Opsi kebijakan

Pengkinian kompetensi GMP secara berkelanjutan dilakukan menggunakan pendekatan gotong royong antar-unit kerja di lingkungan Kemdikbud, serta Kemdikbud dengan Kemenpar, pelaku industri pariwisata, pemerintah provinsi selaku pengelola pendidikan menengah. Gotong royong di lingkungan Kemdikbud dilaksanakan antara Ditjen GTK, P4TK Bispar¹ dan 34 LPMP provinsi. Upaya pengkinian ini dilaksanakan dalam tiga aspek: pembekalan sebelum magang ke industri dilaksanakan secara berjenjang, pertama tim nasional membekali tim provinsi, dan tim provinsi membekali guru di provinsinya.

3. Kesempatan siswa praktik dengan peralatan dan mesin yang sesuai dengan yang digunakan di industri

a) Kesimpulan

Sebagai lembaga pendidikan yang tidak dikelola di bawah satu organisasi juga mengelola industri pariwisata, SMK Pariwisata tidak mungkin selalu memiliki peralatan dan mesin yang selalu dikiatkan mengikuti kemajuan teknologi yang digunakan oleh industri pariwisata.

Upaya terobosan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan peralatan dan mesin tanpa harus memilikinya, yaitu melakukan praktik harian pada individu usaha pelaku industri pariwisata dan mengefektifkan prakerin. Kemungkinan ini dicontohkan dengan tawaran BPP ASITA Prov. Sulawesi Utara kepada SMK Pariwisata. Efektifitas prakerin dicapai apabila tidak ada kesenjangan kompetensi siswa terhadap kompetensi minimal yang diperlukan untuk melaksanakan prakerin. Potensi kesenjangan ini dihilangkan melalui praktik harian pada individu usaha pelaku industri pariwisata.

b) Opsi kebijakan

- 1) Meminta sekolah untuk aktif mencari peluang praktik harian di perusahaan dan apabila ada tawaran agar selalu dimanfaatkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh BPD ASITA Sulut.
- 2) Pemprov, yang berkewenangan mengelola SMK, mendukung pemberian kesempatan oleh industri pariwisata, baik melalui asosiasi industri maupun asosiasi profesi, berupa berbagai kemudahan. Sesuai dengan prinsip kerjasama, dukungan pelaku industri pariwisata. Prinsip kerjasama adalah saling mendukung: dukungan pelaku industri kepada SMK perlu diberi diimbangi dengan dukungan pemprov kepada pelaku tersebut, misalnya berupa kemudahan-kemudahan.

¹ Bisnis Manajemen dan Pariwisata

- 3) Pemprov menyebarluaskan informasi keringanan pajak berupa pengurangan senilai 200 persen dari pengeluaran untuk mendukung diklat vokasi terhadap pendapatan kotor perusahaan kena pajak (PP no. 45 th. 2019).

4. Ketersediaan biaya operasional untuk pembelian bahan dan alat habis pakai

a) Kesimpulan

Pembelajaran praktik di SMK Pariwisata, meliputi praktik harian sampai uji kompetensi keahlian (UKK) memerlukan biaya besar. Pembiayaan praktik harian, setidaknya meliputi tiga jenis pengeluaran, yakni pembelian bahan dan alat praktik (bahan dan alat habis pakai) dan biaya daya. Kekurangan biaya UKK dicontohkan oleh penguji UKK dari industri yang menyatakan bahwa materi UKK salah satu SMK Negeri tidak pernah berubah dari soto ayam selama sepuluh tahun.

b) Opsi kebijakan

Pemenuhan kebutuhan biaya operasional SMK Pariwisata bagi provinsi yang tidak berkemampuan finansial tinggi memerlukan langkah menyeluruh. Langkah tersebut adalah penghematan dana BOS yang dilakukan bersamaan dengan penggalian dukungan pengadaan bahan praktik siswa dari dengan pemberian bahan praktik dari rumah atau patungan antarsiswa untuk membeli bahan praktik, tidak berupa uang, dan upaya-upaya lain.

- 1) Dukungan orang tua terhadap pelaksanaan pembelajaran praktik anaknya
- 2) Pemprov yang tidak memberlakukan pendidikan menengah gratis seharusnya melegalkan partisipasi orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya, sehingga tidak dianggap pungli. Namun tentu saja penghitungan kebutuhan aktual sekolah akan biaya operasional SMK pariwisata untuk masing-masing KK dan biaya operasional gabungan seluruh KK harus dilakukan dengan supervisi pemprov dibantu pakar pembiayaan pendidikan yang ada di provinsi. Di sisi lain, sekolah perlu mengganti bentuk sumbangan dari orang tua dengan bahan praktik siswa, dan selanjutnya hasil praktiknya diunggah ke laman sekolah setiap minggu dan difoto siswa untuk ditunjukkan ke orang tuanya, dan hasil praktik yang berupa makanan dibawa pulang siswa untuk ditunjukkan kepada orang tuanya.
- 3) Pemprov harus memimpin penggalangan dana pendukung pembiayaan operasional SMK pariwisata dari seluruh pelaku industri dan filantroph provinsinya. Pemprov perlu meniru cara Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas umum yang tidak terbiayai oleh APBD, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membangun jembatan penyeberangan sebagai kompensasi atas pelanggaran syarat-syarat tertentu sepanjang tidak membahayakan atau merugikan rakyat.

5. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan dengan pelaku industri pariwisata

a) Kesimpulan

Terdapat dua karakteristik kerjasama SMK Pariwisata. Pertama, kerjasama dimaknai sekedar bantuan pemerolehan tempat prakerin siswa dan penyelarasan kurikulum¹. Ke dua, dalam konteks dukungan pemenuhan sumberdaya utama, SMK cenderung pasif, karena faktor-faktor jarak dan kendala psikologis sekolah terhadap asosiasi pariwisata, dan kerangka mental (mindset) terkait pemenuhan kebutuhan sumberdaya yang cenderung mengandalkan permintaan ke

¹ Merupakan langkah yang diminta oleh Dit. PSMK

pusat¹. Aspek kerjasama lainnya adalah magang guru/instruktur praktik untuk meningkatkan wawasan dan keahlian kejuruannya, namun ini masih merupakan bidang yang diurusi oleh Pemerintah, bukan sekolah.

b) Opsi kebijakan

Kerjasama SMK pariwisata dengan pelaku industry pariwisata di tingkat nasional antara dirjen atau menteri dengan para ketua DPP asosiasi atau di tingkat provinsi antara gubernur atau kadisdikprov dengan para ketua BPD/DPD asosiasi dengan penandatanganan naskah kerjasama (MoU). MoU perlu memuat lingkup, butir-butir langkah tindaklanjut, dan penanggungjawab langkah. Penandatanganan MoU harus segera ditindaklanjuti pada pelaksanaan, dan inisiatif mengadakan pertemuan lanjutan adalah pada disdikprov.

DAFTAR PUSTAKA

- Inpres no. 6 th. 2019 tentang Revitalisasi SMK
- PP. no. 45 th. 2019 tentang Perubahan atas PP no. 94 th. 2010 tentang penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Permenristek dan Dikti no. 26 th. 2017 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 7 th. 2018 tentang Kurikulum SMK dan MAK.
- Acemoglu, Daaron (2011). Bahan kuliah Labor Economics 14.661, MIT 29 Nov dan 1 Des .
<https://economics.mit.edu/files/7408> diunduh 10 Juni 2019
- Delke, V (2015). *The Resource Dependence Theory: Assessment and Evaluation as a Contributing Theory for Supply Management*. Bachelor degree thesis. Univesity of Twente, the Netherland.
- Eherberg, RG dan Smith, RS (2015). *Modern Labor Economics*. Edisi 12. Pearson Ed.
- Panda, B, dan Leepsa, M (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives dalam *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 Issue 1, 2017.
- Purwadi, A (2017). *Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pariwisata*. Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan FISIP UNJ dalam rangka Dies Natalies UNJ tahun 2017.
- (2018a). *Model Kerjasama Penyelenggaraan SMK dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Kerja*. Jakarta: Puslitjak Dikbud.
- (2018b). *Pengadaan Instruktur SMK Kemaritiman Berpengalaman Industri, Kerjasama Ditjen GTK Kemdikbud, Dunia Usaha & Industri dan Kementerian Lain: Usulan Kebijakan Hasil Pengembangan Model Kerjasama Penyelenggaraan SMK Kemaritiman*. Jakarta, 19 Desember 2018.
- Pouwels, I dan Koster, J (2017). Inter-organizational Cooperation and Organizational Innovativeness. *Dalam International Journal of Innovation Science* · February.
- Rossignoli, C dan Ricciardi, F (2015). Theories Explaining Inter-Organizational Relationships in Terms of Coordination and Control Needs dalam *Contributions to Management Science*. Disunting oleh C. Rossignoli. Switzerland: Springer.
- UNWTO (2017). *Travel and Tourism Competitiveness Report 2016*. Geneve: World Economic Forum.

¹ Mengindikasikan kurang dimilikinay smeangat kewirausahaan yang menjadi salah satu syarata jabatan kepala sekolah.

Wevers, R (2007). *Inter-Organizational Cooperation and Innovation: An Empirical Analysis of Partner Characteristics and Innovation Based on CIS Data*. Master's Thesis Delft University of Technology.

Williamson, OE (2007) Transaction Cost Economics: An Introduction. Dalam Jurnal *Economic Discussion Paper* 2007-3, 1 Maret

Sumber internet

Training and Development <https://www.inc.com/encyclopedia/training-and-development.html> diunduh 10 Juni 2019

KESESUAIAN KURIKULUM SMK DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DUNIA KERJA (TATA BOGA PARIWISATA)

Subijanto, Darmawan Sumantri, Ika Asri Dwi Martini,

Tatik Soroeida, Iwan Mustari

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 1) keselarasan kurikulum SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian (KK) Tata Boga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja; 2) kondisi pendidik, 3) kondisi sarana dan prasarana; 4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 5) pelaksanaan prakerin siswa; 6) pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi) siswa; dan 7) pola mekanisme penyelarasan kurikulum SMK Pariwisata KK tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif melalui metaanalisis untuk memetakan unit kompetensi dalam Skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Level II KK Tata Boga yang diadopsi ke dalam kurikulum, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan lembar kerja/praktik. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kasus sekolah sampel untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada tingkat mata pelajaran dan/atau pada tingkat KI-KD setiap kelompok mata pelajaran dasar program keahlian (C2) dan kompetensi keahlian (C3), pelaksanaan prakerin, dan proses sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Kurikulum SMK Pariwisata KK Tata Boga telah selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja berdasarkan SKKNI Level II KK Tata Boga tahun 2018 yang telah mengadopsi *Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC); 2) Guru menguasai materi dan metode pembelajaran, tetapi kurang tuntas dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok; 3) Sebesar 92,6% kualifikasi pendidikan guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 adalah lulusan S-1/D-4 dan mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidangnya minimal selama 20 tahun, berstatus PNS dan sisanya guru honorer; 4) Ditemukan adanya *droping* sarpras pembelajaran yang tidak sesuai dengan usulan sekolah dan umumnya sekolah memiliki jumlah dan jenis sarpras pembelajaran yang kurang memadai; 5) Prakerin dilaksanakan selama 3--6 bulan sesuai dengan kompetensi keahlian siswa, tetapi kurang efektif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasinya; 6) Pelaksanaan uji kompetensi siswa dilakukan di LSP-1 setiap sekolah dan dilakukan oleh Asesor lintas sekolah dari asosiasi profesi atau mitra kerja industri, yang dilakukan di kelas XII; dan 7) Belum ada acuan legal formal pola mekanisme penyelarasan kurikulum. Namun, hal tersebut dilakukan secara insidental manakala guru menyusun RPP, pertemuan dengan mitra kerja industri, pertemuan dengan alumni yang bekerja di industri, dan pada waktu melakukan monitoring dan evaluasi prakerin siswa.

Kata kunci: kurikulum, SMK Pariwisata, kompetensi keahlian, dunia kerja

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15, dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu

(Depdiknas, 2003). Berkaitan dengan penyelenggaraan SMK, hasil studi Slamet (2013), antara lain mengindikasikan bahwa belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja. Direktorat Pembina SMK, Ditjen Dikdasmen, menegaskan bahwa secara empirik penyelenggaraan proses pembelajaran SMK masih mengalami permasalahan utama, di antaranya belum semua kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya (Dit. PSMK, 2016). Salah satu dampak dari kondisi tersebut ditunjukkan dengan data BPS tahun 2019 bahwa lulusan SMK merupakan pengangguran terbuka tertinggi (10,42%) dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya.

Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan Kemendikbud harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia, telah diamanatkan kepada 11 menteri Kabinet Kerja, 34 gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan instruksi tersebut. Khusus kepada Mendikbud, Presiden Joko Widodo memberikan enam instruksi. Salah satu instruksi tersebut adalah “menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*)”.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Seperti apa kompetensi lulusan SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian (KK) Tata Boga yang dibutuhkan oleh dunia kerja?
- b. Bagaimana mekanisme penyelarasan Kurikulum SMK Pariwisata KK Tata Boga agar kompetensi lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja?

3. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyusun usulan kebijakan tentang kesesuaian kurikulum SMK Pariwisata KK Tata Boga dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, dan secara lebih operasional (khusus) kajian ini dimaksudkan untuk menghasilkan bahan kebijakan tentang:

- a. Kompetensi lulusan SMK Pariwisata KK Tata Boga yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Mekanisme penyelarasan Kurikulum SMK Pariwisata KK Tata Boga yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesesuaian Pendidikan

Prinsip utama kesesuaian pendidikan adalah adanya keterkaitan atau kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan dunia kerja (DU/DI). Relevansi keduanya mampu meningkatkan kompetensi lulusan SMK sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kondisi dan realitas tersebut dikemukakan oleh Stevenson (2003) bahwa “*the purpose of vocational education is to meet the needs of industry, meaning that the ‘client’ or ‘customer’ is industry and that industrial standards for work activity should be used as the primary (even exclusive) basis for curricular statements and teaching*”.

Kebijakan strategis dalam peningkatan kompetensi/keterampilan sumber daya manusia SMK, baik siswa maupun guru, bertujuan agar lulusan SMK mampu melakukan pekerjaan dalam bidang industri. Dengan adanya kebijakan tersebut, tindakan yang harus dilakukan oleh SMK adalah menyinkronkan kurikulum yang dipergunakan di sekolah dengan kompetensi yang diperlukan industri.

2. Kompetensi

Kompetensi menjadi hal penting dalam dunia kerja karena adanya anggapan "karakteristik dasar seseorang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja" (Spencer & Spencer, 1993). Sashkin dan Kisser (1993) mengemukakan "Jika seorang lulusan memasuki dunia kerja, kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi yang mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja perusahaan dalam era globalisasi mengacu pada produktivitas untuk dapat memenangkan persaingan".

Dalam memahami kompetensi yang diharapkan oleh pengguna, penelitian ini mengacu pada pendapat Harjono (1990) yang menyatakan bahwa pengguna mengharapkan adanya kompetensi akademik yang relevan dengan pengalaman praktik untuk menemukan harapan organisasi dan dunia kerja. Selanjutnya, Waugh dan Kartasasmita (2004) menyebutkan harapan pengusaha pada lulusan untuk memasuki dunia kerja, antar lain memiliki spesifikasi keahlian, terutama keahlian pada pasar dan spesifikasi pengetahuan.

Pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai leading sector karena industri jasa ini menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Spektrum Keahlian SMK Bidang Keahlian Pariwisata telah dikembangkan menjadi tempat program keahlian dan sembilan kompetensi keahlian. Program keahlian tersebut terdiri atas 1) perhotelan dan jasa pariwisata, dengan kompetensi keahlian (a) usaha perjalanan wisata; (b) perhotelan; (c) wisata bahari dan ekowisata; dan (d) hotel dan restoran; 2) kuliner dengan kompetensi keahlian tata boga; 3) tata kecantikan dengan kompetensi (a) tata kecantikan kulit dan rambut; (b) spa dan beauty; dan 4) tata busana dengan kompetensi keahlian (a) tata busana dan (b) desain fesyen (Peraturan Ditjen Dikdasmen No. 06/D.D5/KK/2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah metode metaanalisis untuk memetakan unit kompetensi dalam SKKNI Level II KK Tata Boga yang diadopsi ke dalam kurikulum dan selanjutnya dituangkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP, silabus, dan lembar kerja/praktik). Pendekatan kualitatif menggunakan metode kasus untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada tingkat mata pelajaran dan/atau pada tingkat KI-KD setiap mata pelajaran, pelaksanaan prakerin, dan proses sertifikasi. Selain itu, akan dideskripsikan pula kesesuaian PTK dan sarana prasarana, antara yang dimiliki (faktual) dan tuntutan kebutuhan (ideal).

Populasi penelitian ini meliputi seluruh SMK negeri bidang pariwisata yang menyelenggarakan kompetensi keahlian tata boga di Indonesia. SMK yang menjadi sampel penelitian adalah SMK negeri yang menggunakan Kurikulum 2013 (K-13), baik yang sudah maupun yang belum mengadopsi Kurikulum CATC di lima kota/kabupaten di empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatra Selatan). Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling (sampling bertujuan), sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengadopsian SKKNI ke dalam Kurikulum dan Pelaksanaan Kurikulum

SKKNI untuk bidang pariwisata, termasuk untuk kompetensi keahlian tata boga, sedang direvisi terkait dengan pengadopsian CATC (Common ASEAN Tourism Curriculum). Draf revisi SKKNI Level II Kompetensi Keahlian Tata Boga direncanakan diuji coba (dirintis) pada 21 SMK penyelenggara KK Tata Boga. Perbedaan SKKNI Level II Tata Boga Tahun 2018 dengan SKKNI Level II Tata Boga Tahun 2017 pada pokoknya

adalah pengurangan jumlah dan jenis unit kompetensi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1 Pencapaian Kompetensi untuk Mendapatkan Kualifikasi (Sertifikat)

Kompetensi	SKKNI 2017	SKKNI 2018	Perubahan Unit Kompetensi
Umum dan Inti	15	13	• Dihapus 8 unit: D1.HRS.CL.1.02, D1.HRS.CL.1.05, D1.HRS.CL.1.06, D1.HRS.CL.1.08, D1.HRS.CL.1.14, D1.HRS.CL.1.17, D1.HRS.CL.1.19, D1.HCC.CL.2.11 • Ditambah 6 unit: D1.HRS.CL.1.09, D1.HRS.CL.1.10, D1.HCC.CL.2.19, D1.HBS.CL.5.02, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.08
Pilihan/Fungsional	32	25	• Dihapus 7 unit: D1.HBS.CL.5.01, D1.HBS.CL.5.02, D1.HBS.CL.5.05, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.09, D1.HCC.CL.2.03, D1.HCC.CL.2.14

Tabel 2 Klasterisasi, Jumlah, dan Perincian Unit Kompetensi

SKKNI	Jumlah Klaster	Rincian dan Jumlah Unit/Klaster
2017	6	• Pelayanan Makan dan Minum (13) • Pembuatan Minuman Non Alkohol (7) • Pembuatan Makanan Indonesia (12) • Pembuatan Makanan Kontinental (12) • Pembuatan Produk Pastry (8) • Pembuatan Produk Pastry (7) (59)
2018	5	• Pembuatan Makanan Kontinental (18) • Pembuatan Makanan Indonesia (17) • Pembuatan Produk Pastry (13) • Pembuatan Produk Bakery (12) • Pelayanan Makan dan Minum (15) (75)

Meski sudah mengalami revisi, kalangan sekolah, DU/DI, dan asosiasi profesi Chef menilai beberapa butir KI/KD dalam struktur kurikulum masih terlalu berat/dalam untuk dipelajari pada tingkat SMK. Hal itu disebabkan oleh dalam penilaian mereka teknologi peralatan yang ada di sekolah masih belum memadai, juga kompetensi gurunya, dan tingkat kedalaman yang dipelajari kurang relevan dengan keprofesiannya. KI/KD yang dimaksud tersebut adalah:

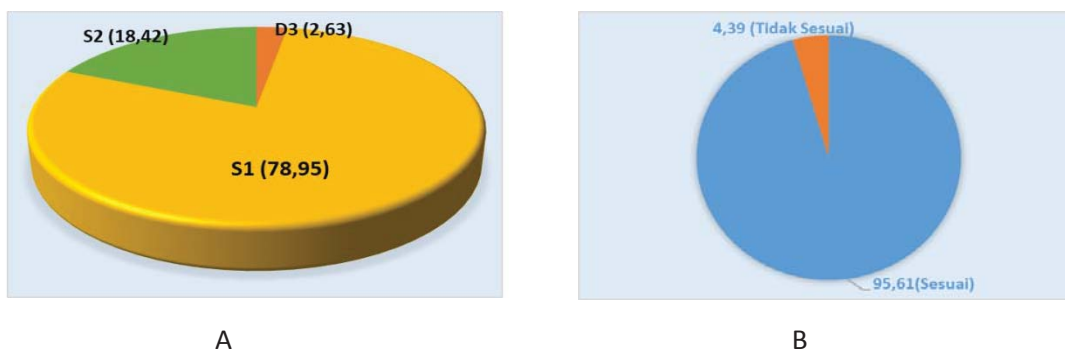
- mengevaluasi *fusion food* (KD 3.24), membuat hidangan *fusion food* (KD 4.24), menerapkan *food gastronomy molecular* (KD 3.25), dan membuat makanan dengan prinsip *food gastronomy molecular* (KD 4.25), keempatnya terdapat dalam mata pelajaran Pengolahan dan Penyajian Makanan; dan
- menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD 3.1), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD 4.1), menganalisis zat gizi sumber

zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD 3.2), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD 4.2), menganalisis zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 3.3), dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 4.3), kesemuanya dalam mata pelajaran Ilmu Gizi.

Secara umum pengertian fusion food adalah pembuatan jenis makanan dengan teknik memadukan dua unsur kuliner tradisional berbeda, yang tidak dikategorikan berdasarkan salah satu jenis masakan tertentu (indogastronomi.wordpress.com, 2015). Sedangkan *Food gastronomy moleculer* adalah ilmu yang mempelajari transformasi fisio-kimiawi dari bahan makanan selama proses memasak serta fenomena sensasi saat dikonsumsi (Ellora, 2017). Pada saat ini komposisi materi tentang jenis makanan yang dipelajari dalam struktur Kurikulum SMK KK Tata Boga adalah makanan/masakan kontinental 50%, makanan oriental 30%, dan makanan lokal hanya 20%. Dengan peningkatan tren permintaan terhadap jenis-jenis makanan lokal, maka komposisi materi pembelajaran tentang jenis-jenis makanan harus dibuat menjadi 50% makanan lokal, 30% makanan kontinental, dan 20% makanan oriental.

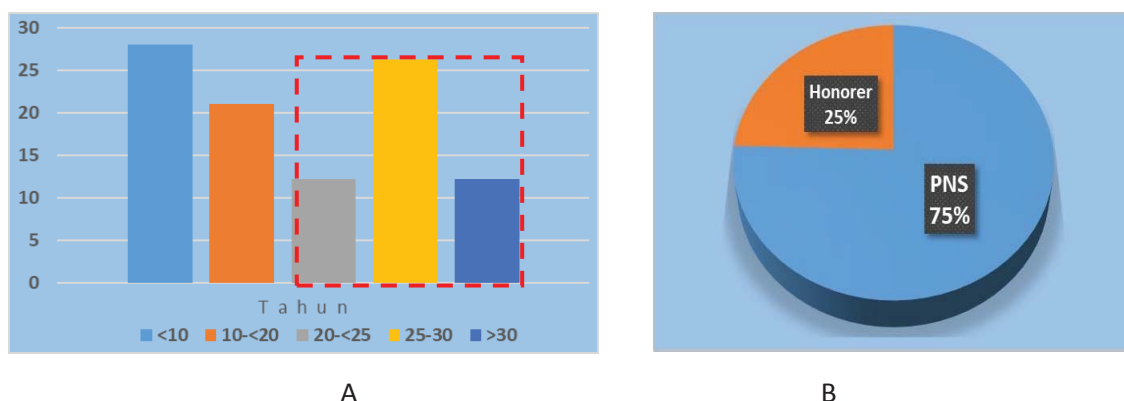
2. Performa Guru, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Sarana Prasarana

Performa guru dalam konteks ini dilihat dari kualifikasi dan kesesuaian, keikutsertaan dalam pelatihan di bidangnya, dan pengalaman magang di industri (DU/DI) dari guru-guru kelompok mata pelajaran C2 (program keahlian) dan C3 (kompetensi keahlian), yang dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 berikut ini.



Gambar 1 Kualifikasi dan kesesuaian guru kelompok Mapel C2 dan C3

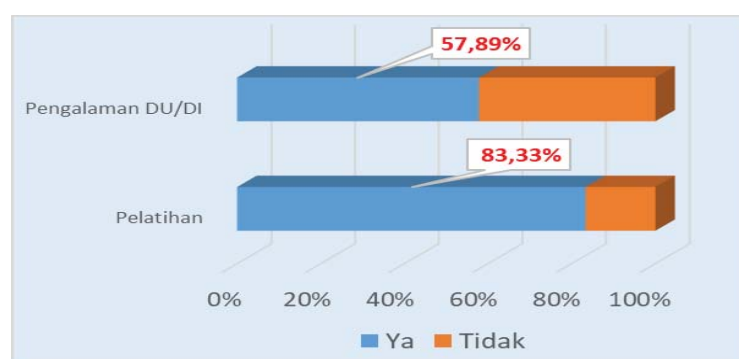
Sebagian besar guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sudah bermasa kerja minimal 20 tahun, bahkan cukup banyak yang lebih dari 30 tahun (Gambar 2A), dan sebagian lainnya masih berstatus honorer (Gambar 2B). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan cukup banyak guru-guru dari kelompok mata pelajaran C2 dan C3 yang akan memasuki masa pensiun.



Gambar 2 Masa kerja dan status guru kelompok Mapel C2 dan C3

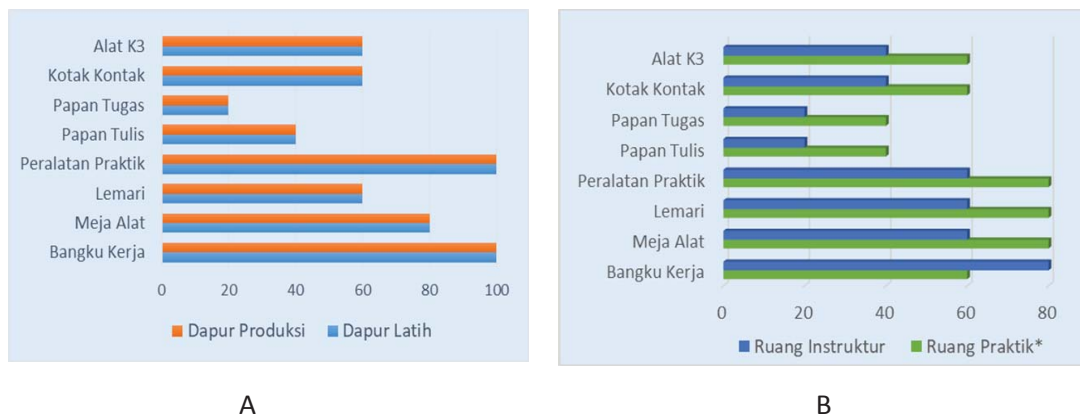
Belum semua guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 berkesempatan mengikuti pelatihan dalam bidang keahliannya atau mata pelajaran yang diampunya. Namun, yang lebih memprihatinkan ternyata hampir separuh guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 belum mempunyai pengalaman magang di industri (Gambar 3).

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum guru sudah menguasai materi dan menggunakan metode yang sesuai, tetapi penerapan pendekatan dan model pembelajaran masih kurang tepat. Selain itu, untuk dimensi keterampilan (KI-4) kadang juga masih didapati kurangnya guru menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang spesifik sebagaimana diuraikan dalam KI-4, terutama dalam hal penggunaan alat. Terkait dengan pengalaman praktis para guru, penggunaan metode team teaching sangat dibutuhkan, terutama dalam pembelajaran praktik baik di kelas, apalagi di dapur-dapur latih untuk produksi dan penyajian makanan. Sayangnya, penelitian ini mendapatkan fakta bahwa penggunaan metode team teaching hanya diakui di beberapa atau sebagian daerah (provinsi) saja, tidak berlaku secara nasional.



Gambar 3 Keikutsertaan guru dalam pelatihan dan magang di DU/DI

Gambar 4A menunjukkan keberadaan perlengkapan praktik dengan kondisi baik yang terdapat dalam dapur produksi dan dapur latih. Termasuk ke dalam peralatan praktik adalah (i) peralatan kecil (utensils) untuk mengolah makanan/masakan, seperti alat potong dan panci untuk merebus/menggoreng dan (ii) peralatan besar (equipment) yang membuat ruangan berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan/masakan, seperti kompor, oven, dan freezer. Gambar 4B menunjukkan keberadaan perlengkapan praktik dengan kondisi baik yang terdapat dalam ruang instruktur dan ruang praktik. Pengertian ruang praktik adalah sarana berupa ruangan yang didesain sebagai restoran atau café. Secara umum hal yang dapat disimpulkan dari kondisi perlengkapan praktik adalah peralatan praktik (baik peralatan kecil maupun besar), meja alat, lemari, bangku kerja, kotak kontak, dan peralatan K3 sebagian besar (minimal 60%) dalam keadaan baik untuk digunakan dalam pembelajaran praktik di dapur produksi, dapur latih, dan ruang praktik. Sebagian besar perlengkapan, seperti papan tugas dan papan tulis, dalam kondisi rusak.



Gambar 4 Keberadaan sarana dan perlengkapan praktik dengan kondisi baik

3. Prakerin

Jenis-jenis kompetensi hingga elemen-elemen yang dipelajari/dipraktikan dalam prakerin sesuai dengan Kurikulum SMK Tahun 2017 yang mengacu pada SKKNI Level II untuk KK Tata Boga tahun 2017 dan sesuai dengan Kurikulum SMK Tahun 2018 yang mengacu pada SKKNI Level II untuk KK Tata Boga Tahun 2018 bagi SMK yang sudah merintis penerapannya (draft) sejak tahun 2016. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kompetensi hingga elemen-elemen yang dipelajari di sekolah konsisten ditindaklanjuti dalam tahap prakerin. Dengan demikian, sampai tahapan ini konteks keselarasan sudah terlaksana dengan baik. Namun, terkait waktu pelaksanaan, prakerin yang dilaksanakan pada kelas XI sebenarnya dinilai kurang tepat karena pada kelas XI belum semua mata pelajaran kejuruan/keahliannya selesai atau rampung diajarkan di sekolah. Meskipun demikian, berbagai pihak juga memahami kesulitan untuk mengatasi permasalahan ini, terutama ketumpangtindihan waktu dengan masa persiapan dan pelaksanaan ujian nasional (UN).

4. Sertifikasi

Proses sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada skema dan unit-unit kompetensi dalam SKKNI Level II. Jika dikaitkan dengan tahap prakerin, kompetensi-kompetensi yang diujikan juga, antara lain menguji kompetensi-kompetensi yang dipelajari/dipraktikan oleh para siswa saat melaksanakan prakerin di DU/DI. Sampai pada tahapan ini, kompetensi-kompetensi yang dipelajari di sekolah konsisten ditindaklanjuti pada tahap prakerin dan diuji pada saat proses sertifikasi. Meskipun demikian, keseluruhan proses uji kompetensi umumnya masih dilaksanakan, sekaligus pada tahun atau kelas akhir. Hal tersebut disebabkan oleh kompetensi-kompetensi yang akan diuji dalam rangka sertifikasi kebanyakan baru dipelajari pada kelas/tahun ketiga. Jadi, siswa pada umumnya akan mulai melaksanakan uji kompetensi pada kelas/tahun ketiga. Sehubungan dengan akan diberlakukan dan digunakannya SKKNI Level II 2018 yang sudah mengadopsi CATC sebagai acuan penyelenggaraan KK Tata Boga di SMK mulai tahun ajaran 2020/2021, maka semua LSP-P1 yang ada di SMK perlu untuk segera diverifikasi oleh BNSP.

5. Mekanisme Penyelarasan

Kegiatan penyelarasan kurikulum dilakukan dalam kesempatan sinkronisasi pada awal tahun pelajaran dan pada saat monev (monitoring dan evaluasi) bersama dengan mitra DU/DI dalam program prakerin. Pada saat monev dalam kegiatan prakerin, proses penyelarasan hanya melibatkan pihak sekolah dengan DU/DI mitranya saja. Pada saat kegiatan sinkronisasi biasanya diundang DU/DI-DU/DI mitra sekolah, komite sekolah, dan pihak lain terkait, seperti SKPD (dinas-dinas) yang mengelola sektor/bidang pariwisata. Penyelarasan sudah mencakup dari proses persiapan hingga tahapan implementasi

pembelajaran. Meskipun demikian, belum semua sekolah mengaitkannya dengan literasi sekolah, pengenalan terhadap revolusi industri 4.0, dan penguatan pendidikan karakter. Padahal, sebagaimana yang diuraikan di atas, pendidikan karakter merupakan bagian terpenting dalam rangka membentuk softskills siswa seperti yang “dituntut” oleh kalangan DU/DI. Terkait dengan hal ini, sejak diberlakukan PPDB berbasis on-line SMK lebih banyak dirugikan karena sekolah tidak dapat lagi melakukan seleksi calon siswanya berdasarkan persyaratan khusus yang sebenarnya sangat diperlukan, seperti postur tubuh, attitude, dan komitmen terhadap profesi.

Masih banyak tefa (teaching factory) yang belum diberdayakan sebagai replikasi DU/DI di dalam sekolah karena tidak mempunyai DU/DI mitra sebagai pembina. Padahal, tefa juga dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan penyalarsan. Sekolah cenderung menginginkan pengelolaan sekolah dengan konsep badan layanan umum daerah (BLUD), agar memiliki keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan tefa dan unit-unit usahanya. Meskipun demikian, dalam proses menuju penerapan konsep BLUD tersebut terhadap sekolah juga perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas sekolah agar siap berpindah dari sekadar mengelola sebuah sekolah menjadi mengelola sebuah BLUD.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengadopsian SKKNI ke dalam Kurikulum, Kondisi Guru, dan Sarana Prasarana

- 1) Semua unit kompetensi (13 unit kompetensi umum/inti, dan 25 unit kompetensi pilihan) yang terdapat dalam SKKNI Level II KK Tata Boga Tahun 2018 telah diadopsi ke dalam struktur Kurikulum SMK KK Tata Boga Tahun 2018. Namun, beberapa butir KI/KD dalam struktur kurikulum terlalu berat/dalam untuk tingkat SMK Tata Boga karena teknologi peralatan yang ada di sekolah masih belum memadai, demikian juga dengan kompetensi gurunya.
- 2) Jenis-jenis makanan/masakan olahan yang dipelajari masih didominasi oleh jenis-jenis makanan kontinental dan oriental.
- 3) *Softskills* siswa dalam hal disiplin, etos kerja (karakter), dan kemampuan berbahasa asing (minimal bahasa Inggris) masih kurang.
- 4) Kualifikasi dan kesesuaian guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sudah baik. Namun, guru kelompok mapel C2 dan C3 sebagian besar sudah bermasa kerja minimal 20 tahun, bahkan cukup banyak yang lebih dari 30 tahun, dan sebagian lainnya masih berstatus honorer.
- 5) Sebagian guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 belum mempunyai pengalaman magang di industri. Sebagai akibat belum pernah memiliki pengalaman terlibat secara langsung di DU/DI, sebagian guru tersebut tidak mengerti proses yang berlangsung di DU/DI.
- 6) Sekolah menginginkan diperbolehkan melakukan pembelajaran dengan metode team teaching. Namun, di sebagian daerah (provinsi) mengajar dengan metode team teaching tidak dapat diakui (dimasukan) dalam penghitungan jam mengajar minimal.
- 7) Masih terdapat peralatan dan sarana pelatihan/praktik yang belum dimiliki sekolah, rusak, dan teknologinya tertinggal dibandingkan dengan yang digunakan oleh DU/DI.

b. Prakerin

- 1) Jenis-jenis kompetensi hingga elemen-elemen yang dipelajari/dipraktikan dalam prakerin sesuai dengan Kurikulum SMK Tahun 2017 yang mengacu pada SKKNI Level II KK Tata Boga Tahun

2017 dan sesuai dengan Kurikulum SMK Tahun 2018 yang mengacu pada SKKNI Level II KK Tata Boga Tahun 2018 bagi SMK yang sudah merintis penerapannya (draft) sejak tahun 2016.

- 2) Untuk menjalani prakerin (dan juga kelak memasuki dunia kerja) kalangan DU/DI meminta sekolah mampu menyiapkan softskills siswa sebaik-baiknya sebagai “modal” utama, terutama dalam hal disiplin, jujur, loyal, mau terus belajar, dan berkarakter kuat. Dengan demikian, DU/DI tinggal membentuk/mengasah skill-nya saja.
- 3) Prakerin yang dilaksanakan pada kelas XI sebenarnya kurang tepat karena pada kelas XI belum semua mata pelajaran kejuruan/keahliannya selesai atau rampung diajarkan di sekolah.

c. Sertifikasi

- 1) Proses sertifikasi dilaksanakan oleh LSP-P1 yang dimiliki oleh setiap sekolah dengan melakukan persilangan asesor yang menguji asesi (siswa yang diuji). Proses sertifikasi dilaksanakan sesuai/mengacu kepada skema, klaster/paket, dan unit-unit kompetensi dalam SKKNI Level II.
- 2) Meskipun uji kompetensi sudah menggunakan sistem klaster/paket, proses sertifikasi umumnya masih dilakukan sekaligus pada tahun atau kelas akhir. Hal ini memberatkan beban siswa yang pada tahun/tingkat terakhir juga sedang menghadapi ujian akhir sekolah, ujian nasional, dan kegiatan lain yang terkait dengan kelulusan.
- 3) Sehubungan dengan akan diberlakukan dan digunakannya SKKNI Level II Tahun 2018 yang sudah mengadopsi CATC, LSP-P1 di SMK belum diverifikasi LSP oleh BNSP, kecuali LSP-P1 di SMK yang telah merintis Kurikulum SMK 2018 yang sudah mengadopsi CATC.

d. Mekanisme Penyelarasan

- 1) Penyelarasan kurikulum dilakukan dalam kesempatan sinkronisasi pada awal tahun pelajaran dan pada saat monev bersama dengan mitra DU/DI dalam program prakerin. Penyelarasan sudah dilakukan mulai dari proses persiapan hingga tahapan implementasi pembelajaran dikaitkan dengan silabus, bahan ajar, dan bentuk atau teknik penilaian.
- 2) Pada dasarnya SMK adalah pendidikan keprofesian yang menuntut persyaratan khusus bagi calon siswanya. Sejak diberlakukan PPDB berbasis online, SMK lebih banyak dirugikan karena sekolah tidak dapat lagi melakukan seleksi calon siswanya berdasarkan persyaratan khusus yang sebenarnya sangat diperlukan, seperti postur tubuh, attitude, dan komitmen terhadap profesi.
- 3) Masih banyak tefa yang belum diberdayakan sebagai replikasi DU/DI di dalam sekolah karena tidak mempunyai DU/DI mitra sebagai pembina. Padahal, tefa juga dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan penyelarasan.

2. Opsi Kebijakan

a. Penyelarasan dan Pelaksanaan Kurikulum (Pembelajaran), dan Kondisi Guru

- 1) Direktorat PSMK dan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran direkomendasi hal-hal berikut.
 - (a) Penghapusan beberapa butir KI/KD, yaitu tentang penyiapan dan pembuatan hidangan fusion food, dan food gastronomy molecular. Namun, bagi siswa dan sekolah yang berminat mempelajarinya dapat menyelenggarakannya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dengan bantuan DU/DI mitra di bidangnya sebagai fasilitator/ tenaga pengajar.
 - (b) Kedalaman kompetensi yang diajarkan pada mata pelajaran Ilmu Gizi tidak perlu sampai menganalisis dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi, cukup sampai dengan membuat/mengolah dan menyajikan makanan/minuman sesuai dengan kebutuhan gizi ideal dengan mengacu pada DKBM (daftar komposisi bahan makanan), baik nasional maupun internasional.

- (c) Pengurangan jenis-jenis makanan/masakan kontinental dan oriental yang dipelajari dan memperbanyak pembelajaran jenis-jenis makanan/masakan lokal atau khas Indonesia. Komposisi yang ideal untuk pembelajaran jenis-jenis makanan/masakan adalah 50% untuk lokal/nasional, 30% untuk kontinental, dan 20% oriental.
- 2) Untuk peran/fungsi keberadaan dan kompetensi guru dalam pelaksanaan kurikulum (pembelajaran), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (khususnya Direktorat PSMK), Direktorat Jenderal GTK (khususnya Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah), dan pemerintah provinsi (khususnya dinas pendidikan provinsi) direkomendasi hal-hal berikut.
- (a) Kebijakan pembelajaran dengan model *team teaching* perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan lagi secara nasional, terutama untuk pembelajaran praktik. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan seperti mangkir mengajar atau praktik-praktik yang menyalahi aturan oleh guru-guru yang melaksanakan *team teaching*, dapat dilakukan alternatif-alternatif berikut:
- 1) Menerapkan sanksi yang cukup keras terhadap guru yang menyalahgunakan pelaksanaan *team teaching* seperti pengurangan tunjangan kinerja, memperhitungkan penyalahgunaan kedalam penilaian SKP, hingga penundaan kenaikan pangkat;
 - 2) Melibatkan siswa “senior” untuk mendampingi/membantu guru pada pembelajaran praktik. Kategori siswa senior dapat menggunakan ukuran siswa yang baru selesai melaksanakan prakerin atau siswa kelas akhir (3) yang memiliki nilai rapor untuk mata pelajaran terkait dengan prestasi sangat baik. Siswa yang bersedia dan mampu menjadi pendamping guru mengajar diberi penghargaan (*reward*) seperti sertifikat dan dicalonkan mewakili sekolah pada ajang LKS dan/atau *skill competition* tingkat nasional maupun internasional;
 - 3) Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di bidang keahlian tata boga (pariwisata) untuk memanfaatkan mahasiswa tingkat akhir yang menempuh jalur nonskripsi untuk melakukan *teaching project* (praktik mengajar) sebagai pendamping guru.
- (b) Perlu upaya penyesuaian/penyamaan pemahaman antara guru dan pengawas dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada DU/DI. Oleh karena itu, dalam konteks mekanisme penyelarasan kurikulum unsur pengawas juga harus dilibatkan.
- (c) Harus segera diantisipasi dua hal terkait dengan ketersediaan guru kelompok mata pelajaran C2 (dasar program keahlian) dan C3 (kompetensi keahlian), yaitu:
- (1) Sebagian guru akan memasuki masa pensiun diantisipasi dengan melakukan hal berikut.
 - a) Secara bertahap mulai melakukan rekrutmen guru kelompok mata pelajaran C2 dan guru kelompok mata pelajaran C3 untuk mulai menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun.
 - b) Mulai merekrut guru dari kalangan DU/DI, baik sebagai pengajar/guru tamu maupun pengajar/guru tetap, dengan status kontrak. Rekrutmen guru dalam konteks ini juga dengan menerapkan beberapa persyaratan khusus, seperti tidak mutlak harus berkualifikasi pendidikan minimal S-1 sebab yang diutamakan adalah kompeten pada bidang keahlian yang dibutuhkan.
 - (2) Sebagian guru belum berpengalaman industri diantisipasi dengan melakukan kerja sama dengan sektor (kementerian) terkait sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2016, ditambah sektor lain seperti pertanian dan pariwisata, untuk:

- a) Meningkatkan kapasitas (intensifikasi) penyelenggaraan program magang guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 ke DU/DI agar guru-guru tersebut memiliki pengalaman industri yang relatif sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di DU/DI;
- b) Meningkatkan pembentukan tefa atau technopark yang “ideal” sebagai perwujudan DU/DI dalam sekolah. Penekanan istilah ideal dalam hal ini adalah mutlak adanya keberadaan dan peran optimal DU/DI mitra sekolah sebagai pembina tefa dan *technopark*.

b. Prakerin

Direktorat PSMK, pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi, dan SMK (sekolah) direkomendasi hal-hal berikut:

- 1) Prakerin idealnya dilaksanakan pada kelas XII. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan karena persiapan menghadapi UN perlu dipertimbangkan kewajiban mengikuti UN hanya bagi siswa-siswa SMK yang berniat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, sedangkan yang ingin bekerja setelah lulus tidak perlu mengikuti UN.
- 2) Sekolah harus benar-benar mampu menyiapkan *softskills* siswa dalam hal *attitude* (disiplin, rajin, jujur, mau terus belajar) dan karakter yang baik dan tangguh. Dengan demikian, DU/DI akan mudah untuk bertanggung jawab menanamkan budaya kerja yang baik dan keterampilan yang andal.

c. Sertifikasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (khususnya Direktorat PSMK) dan BNSP direkomendasi hal-hal berikut:

- 1) LSP-P1 di sekolah-sekolah harus segera diverifikasi oleh BNSP agar dapat menggunakan skema-skema sertifikasi pada SKKNI Level II Tahun 2018 yang telah mengacu pada CATC.
- 2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait harus diperkuat agar berupaya keras menyusun SKKNI Level II untuk seluruh kompetensi keahlian sebagai acuan untuk pembelajaran dan sertifikasi (sesuai dengan Inpres 9/2016), mendapatkan respons yang benar-benar baik dari kalangan DU/DI.

d. Mekanisme Penyelarasan Kurikulum

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Direktorat PSMK), pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi), dan SMK (sekolah) direkomendasi hal-hal berikut:

- 1) Penyelarasan kurikulum dapat dilakukan kapan saja jika ada perkembangan baru yang dianggap cukup penting terkait dengan pengembangan produk dan teknologi/metode yang digunakan oleh DU/DI mitra sekolah.
- 2) Penyelarasan dapat dalam bentuk penyelenggaraan kelas industri, bahkan model kelas industri harus dijadikan program utama dalam memperkuat (merevitalisasi) SMK. Setidaknya, walaupun setelah lulus nanti, belum tentu langsung direkrut oleh DU/DI mitra dalam penyelenggaraan kelas industri, pengalaman sebagai peserta didik dalam kelas industri akan memperkuat aspek profesional dan praktikal siswa.
- 3) Penyelarasan dapat juga dilakukan dengan memberdayakan keterlibatan alumni, terutama yang sudah mempunyai karir/pengalaman dan/atau “kedudukan” yang baik di DU/DI. Keterlibatan alumni dalam proses pembelajaran ini dapat terus dikembangkan menjadi program alumni mengajar atau kelas alumni dan ke depan sebagai cikal-bakal penyelenggaraan kelas industri.
- 4) Sekolah perlu diberi kembali kewenangan untuk menerapkan persyaratan khusus dalam penerimaan siswa baru. Untuk profesi di bidang tata boga pada praktiknya memang dituntut

persyaratan khusus, seperti postur, tinggi badan, dan komitmen yang tinggi dalam hal pelayanan untuk kepuasan pelanggan yang bisa didapatkan melalui tes penelusuran minat dan bakat.

- 5) Kecenderungan sekolah menginginkan pengelolaan dengan konsep BLUD agar memiliki keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan unit-unit usahanya (*teaching factory*), harus difasilitasi dengan penguatan dan pendampingan dari instansi/SKPD yang terkait/relevan. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman beberapa SMK yang sudah “berstatus” BLUD ternyata sangat tidak mudah, baik ketika tahap proses pengajuan, penilaian hingga pelaksanaannya. SKPD yang dimaksud, antara lain Bappeda, BPKD, dan BKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. “Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2018”. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka>) diakses tanggal 31 Juli 2018
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2018. *Skema Sertifikasi KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Tata Boga*. BNSP. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016. *Keselaran Kurikulum 2013 dengan Kebutuhan Dunia Kerja*. Jakarta: Dikmenjur
- Ellora, D. 2017. “Mengenal Molecular Gastronomy, Pengalaman Makan Ajaib Dengan Ilmu Fisika yang Tidak akan Anda Lupakan Seumur Hidup!” <https://journal.sociolla.com/lifestyle/molecular-gastronomy>.
- Harjono. (1990). “Kesiapan Memasuki Dunia Kerja”. <http://wakhinuddin.wordpress.com/2010/05/15/-kesiapan-memasuki-dunia-kerja-warga-belajar-kursus-para-profesi-mekanik-otomotif/>.
- <https://indogastronomi.wordpress.com/2015/11/12/pengertian-fusion-food/> “Fusion Food Pengertian Fusion Food” Posted on November 12, 2015 by indogastronomi in Fusion Food
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
- Peraturan Ditjen Dikdasmen No 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
- Sashkin, Marshal dan Kisser. 1993. *Putting Total Quality Management to Work*. San Francisco: Berret – Kohler Publishe. hlm. 75
- Slamet PH. 2013. “Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Cakrawala Pendidikan”. UNY: *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, hlm. 301--331.
- Spencer, L. M and Spencer, S. M. 1993. *Competence At Work*. John Wiley & Son. Canada
- Stevenson. J. (ed.). 2003. *Developing Vocational Expertise. Principles and Issues in Vocational Education*. Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest 2065 Australia.
- Waugh, Toni & Kartasasmita. 2004. *Higher Education in Indonesia*;

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN MUTU SMK SWASTA

Widodo, Sudiyono, Asri Ika Dwi Martini

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Mendikbud merencanakan untuk menutup sekolah menengah kejuruan (SMK) kecil yang siswanya kurang dari seratus orang. Karena jumlah sekolahnya terlalu banyak, perlu dicari jumlah alternatif yang seharusnya ditutup. Tujuan umum kajian adalah untuk menata kelembagaan dan meningkatkan mutu SMKS kecil, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memetakan SMKS yang siswanya kurang dari seratus; menganalisis hasil UN Kompetensi SMKS kecil; menganalisis jumlah guru produktif berdasarkan jumlah peserta UN Kompetensi; dan membuat deskripsi upaya peningkatan mutu di SMKS kecil. Kajian ini menggunakan *mix-method*. Data kuantitatif berupa SMKS dengan siswa <100 diambil dari Dapodik tahun 2018 dan hasil UN Kompetensi tahun 2018 di Pulau Jawa, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui FGD yang diikuti oleh guru, praktisi, pakar, dan pengelola SMKS dari Pusat, Jakarta, dan Bekasi. Hasil: SMKS yang jumlah siswanya <100 terdapat di setiap provinsi di Pulau Jawa yang menyebar di hampir seluruh kabupaten/kota; SMKS kecil cenderung memiliki hasil UN Kompetensi yang rendah; SMKS kecil tidak memiliki guru produktif; dan peningkatan mutu di SMKS kecil tidak dapat berlangsung dan sangat sulit dilakukan. Rekomendasi: menutup atau menggabungkan SMKS kecil secara bertahap; tahap pertama adalah SMKS yang siswanya <45, tahap kedua <60, dan tahap ketiga tidak perlu dilakukan untuk SMKS yang siswanya <100; dinas pendidikan provinsi segera membentuk tim evaluasi penataan atau penggabungan; Kemendikbud agar membentuk tim pengawas terhadap komitmen SMKS; dan agar pengelola BOS tetap memberikan bantuan kepada SMKS yang siswanya 45 atau lebih selama masa penutupan dan penggabungan.

Kata kunci: penataan, SMKS, peningkatan mutu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peran masyarakat dalam pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK) sangat mendukung target pencapaian program pemerintah, yaitu Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Hingga tahun 2018 telah berdiri sekolah menengah kejuruan swasta (SMKS) sebanyak 10.632 sekolah atau 74,78 persen dengan siswa mencapai 2.823.737 atau 56,24 persen. (Dapodik SMK, 2018 <http://portal.ditpsmk.net/datapokok>). Permasalahan utama yang dihadapi sekolah menengah kejuruan swasta (SMKS) adalah ketika jumlah siswa terlalu kecil sebab iuran bulanan siswa tidak mencukupi untuk biaya operasional yang berdampak rendahnya pencapaian mutu. Secara nasional terdapat 3.951 SMKS yang siswanya kurang dari 100 yang dihuni oleh 221.109 siswa. Artinya, ada 56 siswa per sekolah atau 14 orang per rombongan belajar). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan SMKS tidak efisien sebab biaya operasional pendidikan tidak mencukupi kebutuhan (Data Dapodik SMK, 2018 <http://portal.ditpsmk.net/datapokok>). Selain itu, masih banyak siswa yang bersekolah di SMK dengan status “Tidak Terakreditasi”; di SMK Negeri (SMKN) terdapat 1.172.958 siswa yang tersebar di 2.277 sekolah dan di SMKS terdapat 1.398.263 siswa yang tersebar di 6.214 sekolah. Jika diambil rata-rata, terdapat 515 siswa per SMK negeri dan 225 siswa per SMKS (Data Dapodik SMK 2018 <http://portal.ditpsmk.net/datapokok>).

Dengan kondisi seperti itu wajar jika SMK masih menyumbang pengangguran yang cukup besar, yaitu sebesar 8,92 persen. (BPS, 2018). Salah satu solusi yang direncanakan Kemendikbud terhadap SMK yang memiliki siswa kurang dari seratus adalah dengan menutup. Alasannya, SMK tersebut memiliki sarana prasana yang tidak memadai serta fasilitas dan gurunya kurang (pernyataan Dirjen PSMK yang ditulis Awaliyah-Gumanti & Yolanda-Friska, 2019).

2. Masalah

Permasalahan utama di dalam kajian ini menyangkut adalah masalah kelembagaan SMKS, yaitu berkaitan dengan banyaknya SMKS kecil yang pengelolaannya SMK ini dinilai tidak efisien dalam sehingga mutu lulusannya rendah. Masalah/Pertanyaan Penelitian Jadi, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah jawaban pertanyaan sebagai berikut.

- a) Berapa jumlah siswa SMKS kecil di Pulau Jawa?
- b) Seberapa besar perbedaan nilai UN Kompetensi siswa SMKS berdasarkan jumlah peserta UN Kompetensi?
- c) Berapa guru produktif di SMKS berdasarkan jumlah siswa yang ada?
- d) Upaya apa yang dilakukan dalam peningkatan mutu?

3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum: Menata kelembagaan dan meningkatkan mutu SMKS kecil.
2. Tujuan Khusus: (a) memetakan SMKS yang siswanya kurang dari 100; (b) menganalisis hasil UN Kompetensi Siswa SMKS; (c) menganalisis jumlah guru produktif berdasarkan jumlah peserta UN; (d) membuat deskripsi upaya peningkatan mutu SMKS kecil.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penataan Kelembagaan SMKS

Mutiul Alim (2019) menulis bahwa Pemerintah akan menempuh kebijakan penggabungan bagi SMK yang memiliki kurang dari seratus siswa. Upaya ini bertujuan untuk menjaga mutu sekolah dan lulusan SMK. Penggabungan beberapa SMK tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung sekaligus, tetapi butuh waktu satu hingga dua tahun. Penggabungan menjadi salah satu strategi dalam merevitalisasi SMK dengan harapan dapat menata SMK swasta kecil.

Direktur PSMK mengakui bahwa Pemerintah memiliki keterbatasan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Keterlibatan swasta sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui SMKS. Hal tersebut sejalan dengan program Presiden Joko Widodo tahun 2019, yakni fokus pada pembangunan sumber daya manusia (Intan Yunelia, 2019).

Sandra Desi (2018) menuliskan, mulai tahun ajaran baru 2018 Pemerintah menerapkan regulasi baru dengan pembatasan pagu (daya tampung) sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Aturan ini berlaku bagi SMK akreditasi A dengan jumlah siswa lebih dari seribu pada setiap angkatan dan dipangkas menjadi 872 siswa atau hanya 24 rombongan belajar dan 36 siswa setiap rombongan belajar. Penurunan rombongan belajar ini diarahkan untuk menjadikan mutu sekolah lebih baik; demikian menurut Kabid Pembinaan SMK Provinsi Jawa Timur, Hudiono. Regulasi penurunan pagu dapat menjadi peluang bagi SMKS untuk mendapatkan siswa.

Beberapa bidang keahlian dan kompetensi keahlian (KK) dinyatakan “kurang selaras” dengan kebutuhan dunia kerja sebab tingkat keterserapan kurang dari 50 persen, dan beberapa KK lainnya lulusannya “agak selaras” dengan kebutuhan dunia kerja sebab keterserapannya 50–60 persen. Selain itu telah ditentukan kompetensi keahlian yang selaras dengan dunia kerja dan tingkat keterserapan lulusan bidang keahlian atau kompetensi keahlian dalam dunia kerja (Puslitjardikbud, 2017).

Di dalam Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Pemerintah akan menutup SMK yang jumlah siswanya kurang dari seratus. Sampai saat ini rencana tersebut belum dilakukan dan telah berubah menjadi enam puluh siswa; SMK yang memiliki siswa kurang dari enam puluh akan ditutup dengan alasan akan mengalami kesulitan dalam mengelolanya (Syaifullah Muh., 2019).

2. Peningkatan Mutu SMK Swasta

a. Peningkatan Mutu dan Pembiayaan

Indriyani (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan SMKS dalam bersaing dengan SMKN disebabkan oleh SMKS telah mengimplementasikan manajemen pengembangan mutu, diberikan muatan agama, kerja sama tim yang solid, manajemen yang tertata dalam setiap hal, SDM andal, hubungan yang baik, kebijakan yang matang, menjalankan tanggung jawab dan wewenang dengan baik, penetapan standar kerja, dan berbasis keunggulan lokal dan global.

Arikunto (2013) menuliskan bahwa untuk mencapai SMK yang bermutu, SMK harus: 1) memiliki lingkungan belajar yang sesuai dengan tempat mereka bekerja kelak; 2) memberikan tugas dalam latihan yang memiliki kesamaan operasional, peralatan, dan mesin sesuai dengan calon tempat kerja; 3) memberikan pelatihan secara langsung dan spesifik di dalam pemikiran, perhatian, minat, dan integrasi intrinsik; 4) membiasakan perilaku yang akan ditunjukkan dalam pekerjaannya kelak; 5) memberikan pelatihan kejuruan yang efektif untuk semua profesi dan hanya diberikan kepada kelompok terpilih yang memerlukan, menginginkan, dan sanggup memanfaatkannya; 6) memberikan pengalaman khusus secara berulang-ulang hingga diperoleh penguasaan yang tepat guna; 7) memiliki guru yang berpengalaman dalam menerapkan kemampuan dan keterampilannya di dalam mengajar; 8) mengenal kondisi kerja dan memenuhi harapan “pasar”; 9) memberikan materi yang erat hubungannya dengan pekerjaan; 10) fleksibel dalam menjalankan administrasi pada pendidikan.

Upaya peningkatan mutu SMK tidak terlepas dari pembiayaan dan sumber dana meskipun hal itu tidak mutlak, misalnya meningkatkan kualitas watak dan kepribadian siswa. Permendikbud No. 34 Tahun 2018 Lampiran VIII menjelaskan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan biaya operasi. Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis Martin (2014) bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara peningkatan mutu dan pembiayaan. Pembiayaan sampai dengan titik tertentu akan memengaruhi mutu pendidikan yang harus ditanggung oleh Pemerintah dan masyarakat/orang tua.

b. Upaya Peningkatan Mutu SMKS

1. Peningkatan mutu SMK telah dicontohkan oleh Pemda Kudus, Jawa Tengah. Daerah ini telah berhasil membangun sinergi dengan pihak swasta dalam mengembangkan sekolah kejuruan. Empat SMK unggulan telah menjadi lembaga pendidikan bergengsi, yaitu SMK Maritim Wisuda Karya, sekolah kuliner SMK 1 Kudus, sekolah *fashion* SMK NU Banat, dan sekolah animasi SMK Raden Umar Said (Yuli Setiawan, 2018).
2. Kemendikbud telah melaksanakan sertifikasi keahlian bagi guru produktif dan tenaga kependidikan, seperti laboran, teknisi, dan kepala bengkel di SMK. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Supriano, telah disusun skema sertifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) Level 4 untuk 58 kompetensi keahlian dan telah disahkan pada 23 Agustus 2017. Pada tahap dua telah disusun 81 skema sertifikasi kompetensi keahlian untuk guru dan 38 skema sertifikasi untuk

tenaga kependidikan melalui proses validasi dan verifikasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP (Yohanes Enggar Harususilo, 2018).

3. Peningkatan mutu SMKS dapat juga dalam bentuk akreditasi sekolah sebab masih banyak yang belum terakreditasi dan walaupun sudah diakreditasi masih dalam status “tidak terakreditasi”. Oleh karena itu, dapat ditempuh akreditasi mandiri seperti yang disarankan Widodo dkk. (2017) di dalam penelitiannya. Selain itu, peningkatan mutu juga dilakukan dalam bentuk perbaikan ruang kelas sebab hanya 50,91 persen ruang kelas dengan kondisi baik (Dapodik SMK, 2018). Peningkatan mutu dalam pembelajaran dengan metode *teaching factory* sangat diperlukan sebab metode ini memberikan pengalaman praktik bagi siswa dan juga dapat menambah pemasukan bagi sekolah (Depdiknas, 2009). Namun, bagi SMKS kecil hal ini sangat sulit dilakukan terkait dengan keterbatasan dana.

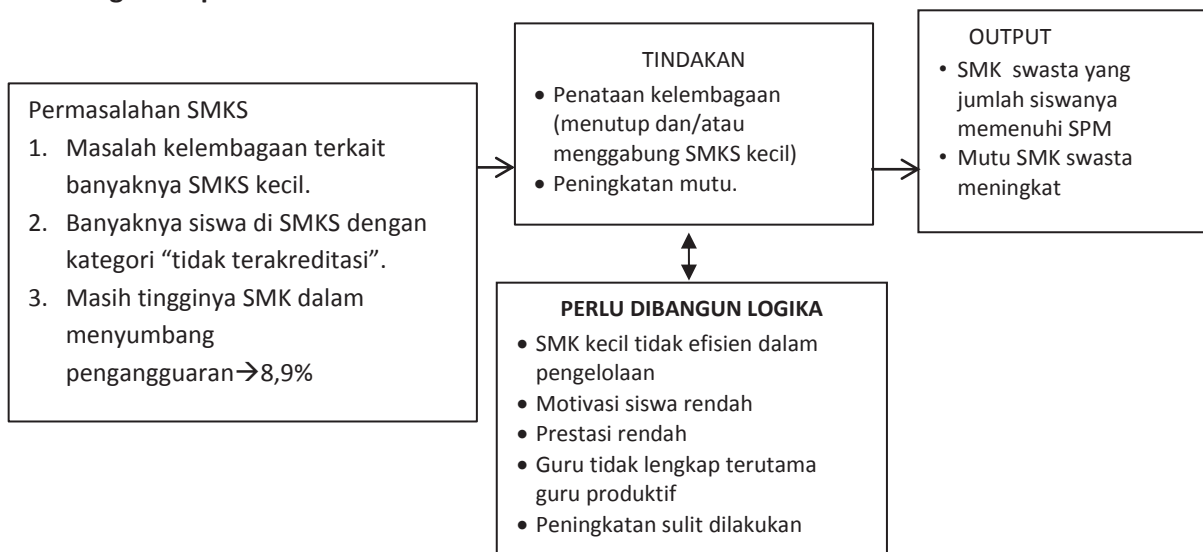
c. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Mutu SMKS

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga berpengaruh terhadap sekolah dalam mendapatkan peserta didik. Oebaidillah (2016) menulis bahwa menurut praktisi pendidikan abad ke-21, Indra Charismiadi, banyak sekolah swasta tutup disebabkan oleh kegagalan mereka mendapatkan siswa. Kegagalan mereka mendapatkan siswa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 1) belum adanya aturan yang tegas dalam membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri; 2) kurangnya sarana dan prasarana di sekolah swasta; dan 3) sumber daya manusia yang rendah. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap SMKS karena masih diskriminatif dalam pembiayaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

James Tooley (2013) menyatakan bahwa sekolah swasta itu mungkin berada di dalam bangunan yang sangat kurang dan memiliki guru yang kurang terdidik. Namun, hal ini tampaknya tidak relevan. Guru yang terdidik dan digaji tinggi tidak menyebabkan semakin tingginya komitmen guru dan justru yang terjadi sebaliknya. Tooley, profesor kebijakan pendidikan di Newcastle University, ini menyimpulkan bahwa pendidikan swasta telah menjadi sebuah norma di banyak negara sebelum kekuatan Barat memaksakan sistem mereka. Sistem pendidikan negeri yang terpusat bukanlah model yang sesuai secara kultural bagi masyarakat Asia dan Afrika sub-Sahara dewasa ini.

Sistem PPDB 2018 tidak menguntungkan bagi SMKS dan banyak calon siswa mendaftar di sekolah negeri meski jaraknya jauh. Sistem PPDB yang baru/tahun 2019 diharapkan dapat diterapkan di setiap daerah sehingga terjadi pemerataan penyebaran siswa, baik di SMKN maupun SMKS. Keuntungan PPDB 2019 adalah 1) tidak perlu mobilisasi tinggi dari para siswa sebab proses pendaftaran telah dilakukan sejak dari sekolah asal (sebelum lulus); 2) sekolah swasta lebih diuntungkan untuk mendapatkan calon siswa dengan kualifikasi yang relatif tinggi karena SMKN tidak lagi menerima siswa dengan kualifikasi baik dalam jumlah banyak; 3) kualifikasi distribusi siswa di sekolah negeri dan swasta lebih merata; 4) sekolah swasta lebih memiliki peran dalam proses pendidikan dari sebelumnya, karena ruang gerak sekolah negeri telah dibatasi dengan "skema zonasi" (<https://www.change.org/p/mendikbud-konsep-zonasi-2019-akan-lebih-berpihak-ada-sekolah-swasta>).

3. Kerangka Berpikir



C. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data Dapodik untuk mengetahui jumlah siswa, hasil UN Kompetensi pada tahun 2017/2018, dan jumlah guru produktif di enam provinsi di Pulau Jawa yang diperkuat dengan data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan program SPSS untuk mengetahui jumlah siswa setiap sekolah, rerata dan perbedaan hasil UN sesuai dengan jumlah siswa, dan rerata jumlah guru produktif per jumlah peserta. Data kualitatif yang diperoleh melalui diskusi dengan praktisi, ahli, dan birokrasi dalam bidang SMK, dianalisis dengan teknik deskriptif melalui proses pengkodean, klasifikasi, dan reduksi hingga sampai pada pembuatan kesimpulan untuk setiap tema.

D. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Hasil Kajian

a. Jumlah SMKS dengan Siswa <100

Setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki SMKS yang jumlah siswanya kurang dari 100, jumlah terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah sekolah sebanyak 744 SMKS. Urutan kedua adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sekolah 737 SMKS. Urutan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sekolah 344 SMKS. Urutan keempat Provinsi Banten dengan 177 SMKS. Urutan ke lima Provinsi DKI Jakarta dengan 104 SMKS dan urutan terakhir Provinsi DI Yogyakarta dengan 57 SMKS.

b. Mutu Lulusan Berdasarkan Hasil UN Kompetensi

UN Kompetensi SMKS tahun 2018 di enam provinsi di Pulau Jawa yang diikuti oleh 6.345 sekolah dan 624.347 siswa didapatkan rerata nilai sebesar 40.39, nilai terendah 15,00, dan tertinggi 92,39 (Grafik 1). Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan hal berikut.

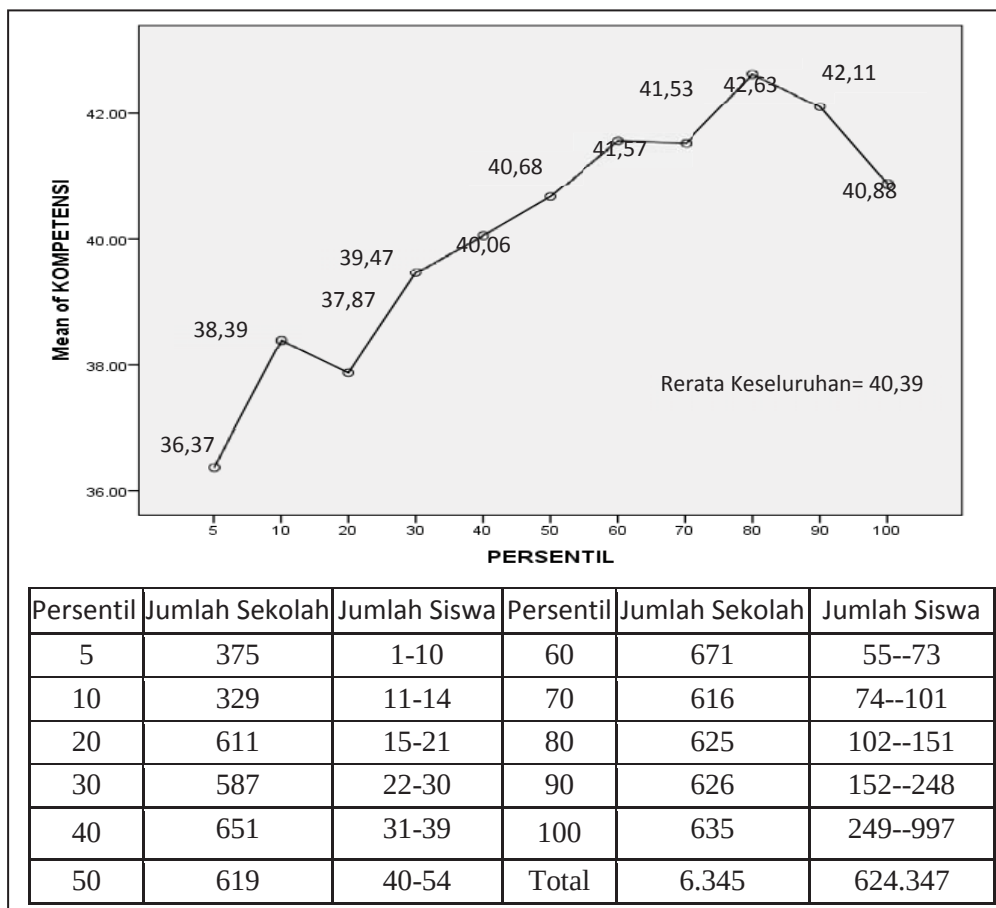
- 1) SMK yang jumlah siswanya kecil (P5) mempunyai rerata UN Kompetensi lebih rendah dan hasil tertinggi yang diraih lebih rendah dari kelompok lainnya.
- 2) Varian kompetensi antarkelompok secara signifikan tidak homogen. Uji homogenitas menghasilkan angka Levene Statistic sebesar 10.685 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.
- 3) Pengujian signifikansi lebih lanjut menghasilkan informasi bahwa peserta UN Kompetensi P50 dapat dikelompokkan dengan P60--P100, dan P40 dapat dikelompokkan dengan P5--P30. Kesimpulannya,

peserta UN Kompetensi yang hanya diikuti oleh 1--39 siswa per sekolah mempunyai nilai UN Kompetensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pesertanya 40--997siswa.

- 4) Hasil analisis setiap provinsi menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil gabungan.

Grafik 1 Hasil Ujian Nasional Kompetensi SMK Tahun 2017/2018

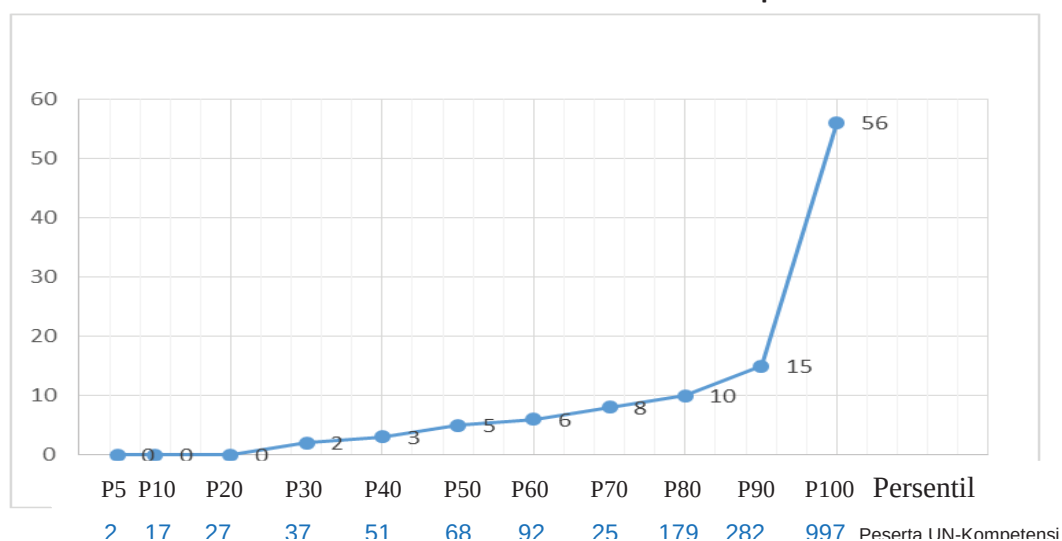
Berdasarkan Persentil Jumlah Siswa di Enam Provinsi Pulau Jawa



c. Guru Produktif di SMKS dengan Siswa < 100

Grafik 2 Ketersediaan Guru Produktif per Sekolah

Berdasarkan Jumlah Peserta UN Kompetensi



Hasil analisis menunjukkan bahwa guru produktif di sekolah yang jumlah peserta UN Kompetensinya berada pada persentil 20 (jumlahnya kecil dengan peserta 27 orang) tidak memiliki guru produktif. Guru produktif ada setelah memasuki persentil 30 dengan peserta 37 siswa. Artinya, peserta UN Kompetensi SMKS yang jumlah siswa 27 orang ke bawah (persentil 20 ke bawah) tidak diajar oleh guru produktif yang profesional sesuai dengan keahliannya.

d. Peningkatan Mutu di SMKS dengan Siswa < 100

Rencana penyusunan peraturan pemerintah tentang penjaminan mutu sedang dipetakan oleh LPMP. Untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan hal berikut: 1) melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk pelaksanaan progres pembelajaran; 2) menyelaraskan kurikulum, yang dalam hal ini pelajaran yang ada di sekolah harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI; 3) merevitalisasi sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan; serta 4) melakukan zonasi mata pelajaran, yang dalam hal ini pelajaran yang hasilnya kurang baik perlu dilakukan zonasi.

SMK masih diperbolehkan menerima BOS meskipun siswanya kurang dari enam puluh, untuk yang akan datang harus memiliki siswa enam puluh sesuai dengan juknis BOS 2019. Meskipun demikian, aturan masih menjadi perdebatan bagi daerah yang memiliki sekolah dengan jumlah siswa sedikit. Di dalam pertemuan yang dilakukan oleh Direktorat ada kesepakatan bahwa BOS diberikan kepada sekolah sesuai dengan jumlah siswa. Hal ini dikuatkan bahwa pemberian BOS harus disesuaikan dengan jumlah minimal siswa yang telah ditentukan. Apabila jumlah siswa tidak memenuhi batas minimal, BOS tidak diberikan kepada sekolah.

2. Pembahasan

a. Penataan Kelembagaan SMKS

Penataan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penutupan dan/atau penggabungan beberapa SMKS menjadi satu sekolah sehingga siswanya menjadi besar atau minimal berjumlah enam puluh orang. Yang dimaksud dengan SMKS kecil adalah SMKS yang jumlah siswanya kurang dari enam puluh dan istilah ini sengaja digunakan untuk memudahkan penyebutan.

Penutupan dan/atau penggabungan SMKS bukan pekerjaan mudah sebab tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses hanya mensyaratkan jumlah rombel sebanyak 3--72, dan jumlah maksimal peserta didik per rombel 36. Permendikbud RI No. 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 8 ayat (7) huruf a, juga menjelaskan bahwa pendirian SMK harus memenuhi komitmen berupa menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) program keahlian. Peraturan ini juga tidak menyebutkan jumlah siswa, hanya syarat minimal jumlah program keahlian dan kompetensi keahlian.

Peraturan lain yang terkait dengan jumlah siswa adalah Permendikbud RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang diundangkan pada 28 Mei 2019 pada Bab III, poin A, huruf k. Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan sekolah yang selama tiga tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari enam puluh dengan peserta didik sekolah sederajat terdekat, kecuali sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS Reguler.

Perlu dibangun logika bahwa sedikitnya jumlah peserta didik di SMKS akan berdampak pada pelayanan secara keseluruhan mulai dari pelayanan pembelajaran/proses hingga pelayanan penilaian yang akhirnya

berakibat rendahnya mutu lulusan. Uang hasil iuran bulanan yang terkumpul dari siswa tidak mencukupi kebutuhan biaya operasional pendidikan. Hasil kajian membuktikan adanya kecenderungan prestasi rendah bagi siswa yang berada di SMKS kecil dan di SMK tersebut tidak memiliki guru produktif yang menjadi andalan dalam peningkatan keterampilan siswa. Dalam kondisi seperti ini, penutupan dan/atau penggabungan sekolah adalah cara terbaik yang perlu dilakukan.

1) Menutup dan/atau Menggabungkan SMKS dengan Jumlah Siswa < 100

Pada saat Rembugnas 2019, Kemendikbud ingin menutup SMK yang siswanya kurang dari 100. Cukup banyak SMKS yang memiliki siswa kurang dari 100, di Pulau Jawa saja terdapat 2.163 SMKS. Jika hal ini dilakukan, dampaknya sangat besar sebab banyak penyelenggara SMKS akan mengalami keresahan. Selain itu, Pemerintah tidak mempunyai dasar atau alasan yang kuat untuk menutupnya. Pembahasan dengan jumlah siswa kurang 100 tidak dilanjutkan sebab dalam perkembangannya Pemerintah telah beralih ke angka 60.

2) Menutup dan/atau Menggabungkan SMKS dengan Siswa < 60

Penutupan dan/atau penggabungan dapat dilakukan terhadap SMK yang siswanya kurang dari 60. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Selain itu, Permendikbud No. 18 Tahun 2019 seperti yang ditulis di atas juga menyebutkan perlunya penggabungan sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang memiliki peserta didik kurang dari 60 agar mendapatkan dana BOS Reguler. Dengan penutupan dan/atau penggabungan ini, akan ada 1.097 SMKS di Pulau Jawa yang terkena dampaknya. Sekolah dengan jumlah siswa <60 dan tidak mendapat dana bantuan dari Pemerintah akan membuat SMKS ini semakin berat untuk mempertahankan mutu.

3) Menutup dan/atau Menggabungkan SMKS dengan Siswa < 45

Penutupan dapat juga dilakukan terhadap SMKS yang siswanya kurang dari 45 orang. Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh informasi bahwa terjadi kecenderungan pada SMKS yang siswanya sedikit (persentil ke-5) memiliki hasil UN Kompetensi yang rendah dan tidak mempunyai guru produktif. Hasil kunjungan ke lapangan di SMKS di Jabodetabek menunjukkan bahwa siswa 45 ini termasuk paling rawan bagi SMKS untuk meningkatkan mutu. SMK tersebut sudah benar-benar kritis dalam membiayai dirinya sendiri sehingga peningkatan mutu tidak dapat berlangsung. Untuk menutup dan/atau menggabung, batas jumlah siswa 45 cenderung aman, artinya tidak banyak mendapat pertentangan dari penyelenggara.

b. Strategi Penutupan Sekolah

Penutupan dan/atau penggabungan SMKS tidak bisa dilakukan hanya berpedoman pada sedikitnya jumlah siswa. Para penyelenggara akan menentang dan melawannya. Oleh karena itu, harus ada pengecualian untuk daerah 3T, berbasis pesantren, dapat mempertahankan prestasi, mengembangkan keahlian khusus, dapat membiayai biaya operasional, dan dari segi geografis keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian halnya dengan membiarkan SMKS kecil ini mati dengan sendirinya. Langkah ini dinilai tidak bijak sebab di sekolah tersebut terdapat hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Pemerintah harus bertindak dengan tegas dan cepat.

c. Teknis Penutupan

Permendikbud RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur penutupan satuan pendidikan. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila: (a) satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau (b) satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran (Pasal 15 ayat 1).

Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usul badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas (Pasal 15 ayat 3).

Penutupan harus diikuti dengan langkah penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama (Pasal 15 ayat 4 poin a) dan penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat (Pasal 15 ayat 4 poin c dan d).

Di dalam Permendikbud RI No. 25 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (7) huruf a dinyatakan bahwa pendirian SMK harus memenuhi komitmen berupa menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) program keahlian sesuai dengan program dan kompetensi keahlian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Komitmen tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin usaha sesuai dengan ayat (8).

Bagi SMKS yang sudah berdiri sebelum permendikbud ini berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 24 ayat (3), yaitu izin usaha dan/atau izin operasional yang telah diperoleh masih berlaku sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatannya dan harus didaftarkan di lembaga OSS. Setelah itu, berlaku sistem pengawasan sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kementerian dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas (a) pemenuhan komitmen; (b) pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau (c) usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pengawasan Kemendikbud dapat bekerja sama dengan lembaga profesi/pemerintah daerah (ayat 2). Jika dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kementerian dan/atau pemerintah daerah mengambil tindakan berupa: (a) peringatan; (b) penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau (c) pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4). Kegiatan berusaha yang telah diberhentikan sementara selama 1 (satu) bulan dan tidak diindahkan, maka akan dilakukan pencabutan Perizinan Berusaha (ayat 7). Semua tindakan tersebut dilakukan melalui sistem OSS oleh Kementerian dan/atau pemerintah daerah kepada Lembaga OSS (ayat 8). Lembaga OSS berdasarkan laporan Kementerian dan/atau pemerintah daerah melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha (ayat 9).

d. Alternatif Penataan Kelembagaan SMKS

Selain penutupan yang sudah dijelaskan di atas, ada alternatif lain di dalam penataan SMKS kecil seperti yang disampaikan oleh Waluyo Hadi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu melalui konsorsium. Dalam hal ini, sekolah akan digabung dalam satu manajemen tunggal, tetapi tetap dengan nama yayasan yang berbeda. Dapat juga dilakukan dengan mutasi, yaitu sekolah akan diubah menjadi lembaga pendidikan khusus (LPK) dan dikelola oleh masyarakat penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

3. Peningkatan Mutu SMKS Kecil

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK masih terkendala dengan kualitas yang masih rendah. Rendahnya kualitas SMKS diakibatkan oleh mutu dan rasio yang tidak sesuai dengan peraturan pendirian yang ditetapkan. SMKS banyak menghasilkan lulusan yang tidak dapat bersaing karena tidak dibekali dengan ilmu praktikum yang cukup (Maria F.B., 2015).

Bagi SMKS kecil, biaya operasional, baik personel maupun nonpersonel, semuanya bersumber dari bantuan BOS dan KIP sehingga peningkatan mutu secara mandiri oleh sekolah hampir tidak ada.

Peningkatan mutu dari melalui Pemerintah juga sangat sedikit atau tidak ada sebab setiap kesempatan selalu diambil oleh SMKS besar. *Teaching factory* yang menjadi andalan dalam pembelajaran di SMK juga tidak dilaksanakan oleh SMKS kecil karena terbatasnya dana, jangankan untuk *teaching factory*, untuk membayar gaji guru pun masih kurang.

Ani Nursalikah (2018) menulis bahwa kendala utama di SMK masih pada persoalan kompetensi guru. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikbud melakukan berbagai terobosan, seperti program keahlian ganda (PKG), guru multisubjek, dan perekrutan tenaga profesional. Mendikbud akan merekrut tenaga profesional untuk mengatasi persoalan kekurangan guru produktif sebanyak 50.000, dan akan melanjutkan PKG untuk membentuk guru mata pelajaran menjadi guru yang bisa mengajar mata pelajaran produktif setelah mengikuti pelatihan selama satu tahun.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penataan Kelembagaan SMKS

SMKS yang jumlah siswanya kurang dari 100 terdapat di setiap provinsi di Pulau Jawa, jumlah terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 744 sekolah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Urutan kedua Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 737 sekolah dan urutan ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 344 sekolah. Urutan keempat Provinsi Banten dengan jumlah 177 sekolah, diikuti Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 104 sekolah, dan terakhir Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 57 sekolah. Jumlah keseluruhan di Pulau Jawa adalah 2.163 sekolah.

Siswa di SMKS kecil cenderung mencapai prestasi UN Kompetensi rendah dan tidak memiliki guru produktif. Dalam kondisi seperti ini, penutupan dan/atau penggabungan merupakan cara terbaik yang harus ditempuh meskipun pelaksanaannya merupakan hal yang tidak mudah dan tidak mengenakan bagi sekolah yang bersangkutan. Pada dasarnya setiap sekolah menolak untuk ditutup dan/atau digabung. Oleh karena itu, penutupan dan/atau penggabungan harus dengan pengecualian untuk daerah 3T berbasis pesantren dapat mempertahankan prestasi, mengembangkan keahlian khusus, dapat membiayai biaya operasional, dan dari segi geografis keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penutupan dan/atau penggabungan juga harus dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama dilakukan terhadap SMKS yang siswanya kurang dari 45 orang. Alasannya adalah (1) SMKS yang siswanya sedikit (persentil ke-5) memiliki hasil UN Kompetensi yang rendah; (2) jumlah siswa <45 mempunyai tingkat paling rawan dan sudah benar-benar kritis dalam membiayai dirinya sendiri serta peningkatan mutu sulit untuk dilakukan; (3) penutupan dan/atau penggabungan terhadap sekolah yang siswanya <45 cenderung aman, artinya tidak banyak mendapat pertentangan dari penyelenggara; (4) penutupan tahap pertama ini telah cukup banyak SMKS yang ditutup, yaitu sebanyak 688 SMK di Pulau Jawa. Pada tahap kedua dilakukan penutupan dan/atau penggabungan terhadap SMKS yang siswanya <60, yang waktu pelaksanaannya menunggu tahap pertama selesai dan berdasarkan evaluasi terhadap tahap pertama. Tahap ketiga penutupan dan/atau penggabungan terhadap SMKS yang siswanya <100, yang dalam kajian ini tidak direkomendasikan sebab tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar.

Teknis penutupan dan/atau penggabungan dapat dilakukan sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 36 Tahun 2014 dan juga dapat menggunakan Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018 sebagai pedoman, salah satunya meminta komitmen pihak penyelenggara. Komitmen yang telah disanggupi sebelumnya harus ditepati, seperti menyelenggarakan paling sedikit satu program keahlian dengan dua kompetensi keahlian dan memenuhi komitmen tersebut dalam waktu maksimal satu tahun.

b. Peningkatan Mutu SMKS Kecil

Selain penutupan dan/atau penggabungan, ada cara lain yang lebih dapat diterima oleh pihak sekolah, yaitu peningkatan mutu. Peningkatan mutu memerlukan biaya operasional SMKS kecil, yang mengandalkan iuran bulanan dari siswa, padahal para siswa mengandalkan KIP (kartu Indonesia pintar) atau KJP (kartu Jakarta pintar) untuk Jakarta, selain mengandalkan dana BOS.

Peningkatan mutu yang datangnya dari Pemerintah sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada, demikian juga yang dari yayasan. *Teaching factory* yang menjadi andalan dalam pembelajaran di SMK tidak dilaksanakan oleh SMKS kecil. Kemendikbud telah melakukan terobosan berupa program keahlian ganda (PKG), guru multisubjek, dan perekrutan tenaga profesional untuk menjadi guru SMK. Para profesional yang kaya pengalaman akan diberi pelatihan, mengikuti ujian standar kompetensi, dan diberi sertifikat mengajar untuk mengatasi persoalan kekurangan guru produktif.

2. Rekomendasi

a. Penataan Kelembagaan

- 1) Dinas pendidikan provinsi agar segera membentuk tim evaluasi sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 3, antara lain, sebagai berikut.
 - a) Tim evaluasi dan/atau badan penyelenggara satuan pendidikan mengusulkan kepada dinas pendidikan untuk menutup sekolah tersebut.
 - b) SK penutupan SMKS ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atas usulan tim evaluasi dan/atau badan penyelenggara satuan pendidikan.
- 2) Penutupan harus disertai dengan solusi pemecahan masalah, antara lain mengenai penyaluran/pemindahan peserta didik (Pasal 15 ayat 4 poin a), dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat (Pasal 15 ayat 4 poin c dan d).
- 3) Pada tahap pertama penutupan dan/atau penggabungan terhadap SMKS yang jumlah siswanya <45 orang dengan beberapa pengecualian. Pada tahap tersebut dilakukan penutupan terhadap 688 SMKS Pulau Jawa: 263 SMKS di Provinsi Jawa Timur, 22 SMKS di Provinsi DI Yogyakarta, 120 SMKS di Provinsi Jawa Tengah, 198 SMKS di Provinsi Jawa Barat, 25 SMKS di Provinsi DKI Jakarta, dan 60 di Provinsi Banten. Tahap II dengan jumlah siswa <60 di 419 SMKS di Pulau Jawa menunggu saat yang tepat.
 - a) Kemendikbud agar membentuk tim pengawas yang bertugas mengevaluasi kepatuhan SMKS terhadap komitmen dan mengusulkan penutupan ke lembaga OSS jika ditemukan SMKS tidak berkomitmen sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018.
 - b) Dinas pendidikan provinsi juga dapat melakukan penataan melalui konsorsium. Dalam hal ini, dimana sekolah akan digabung dalam satu manajemen tunggal, tetapi namun tetap dengan nama masing-masing. Alternatif lainnya adalah melalui mutasi, yaitu sekolah diubah menjadi lembaga pendidikan kursus (LPK) yang dikelola oleh masyarakat penyelenggara pendidikan.

b. Peningkatan Mutu

- 1) Dinas pendidikan provinsi dan Kemendikbud harus tetap melakukan peningkatan mutu di SMKS yang jumlah siswanya <60 atau <100 pada saat dilakukan penutupan SMKS yang siswanya <45. Peningkatan mutu yang dilakukan terlebih kepada tenaga pendidik, proses, dan evaluasi sebab ketiga unsur tersebut tidak akan pernah hilang meskipun akhirnya sekolah harus ditutup.
- 2) Pengelola BOS harus tetap memberikan dana bantuan BOS kepada semua sekolah sambil menunggu proses penutupan dan/atau penggabungan; bukan malah sebaliknya tidak mendapatkan bantuan BOS sebelum penutupan dan/atau penggabungan dilakukan.

- 3) Pemerintah harus memastikan bahwa program yang direncanakan, seperti program keahlian ganda (PKG), guru multisubjek, dan perekrutan tenaga profesional bisa mengena pada SMKS kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alip Moch. 2014 "Biaya Operasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kategori SBI/RSBI di Yogyakarta". Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Biaya Operasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri-(57--71) Vol 18, No 1 (2014) . DOI: <https://doi.org/10.21831/pep.v18i1.2124>.
- Ani Nursalikah. 2018. "Kompetensi Guru, Persoalan Utama SMK Tingkatkan Mutu". Sabtu 03 Maret 2018 <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/03/03/p4zox5366-kompetensi-guru-persoalan-utama-smk-tingkatkan-mutu>.
- Arikunto, S. 2013. Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 256
- Awaliyah-Gumanti & Yolanda-Friska. 2019. "Jumlah Siswa Kurang dari 100, SMK akan Dipenggabungan". [https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/Selasa 12 Feb 2019](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/Selasa%2012%20Feb%202019)
- BPS. 2018. "Update Terakhir: 23 Jan 2019" <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986--2018.html>
- Data Dapodik SMK 2018 (<http://portal.ditpsmk.net/datapokok>)
- Indriani,T. 2018. "Kemendikbud Tertarik Rekrut Tenaga Profesional Jadi Guru". <https://jogja.antaranews.com/berita/353059/kemdikbud-akan-merekrut-tenaga-profesional-menjadi-guru-smk>. Senin, 26 Februari 2018.
- James, Tooley.2013. *Sekolah untuk Kaum Miskin: Pelajaran Menakjubkan dari Masyarakat Paling Miskin di Dunia. Tangerang Selatan, Banten*. Pustaka Alvabet-
- Maria, F.B. 2015. <https://www.beritasatu.com/pendidikan/309289-kemdikbud-nilai-kualitas-smk-swasta-masih-rendah.html> Rabu, 23 September
- Martin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutiul, Alim. 2019. "SMK Minim Siswa Bakal Digabungkan" <http://www.jurnas.com/artikel/48131/SMK-Minim-Siswa-Bakal-Digabungkan/> Selasa, 12/02/2019.
- Oebaidillah, S. 2016. "Seminar Tantangan Sekolah Swasta dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Samsung Indonesia di Kemendikbud, Jakarta. 24 Mei 2016.
- Puslitjakdikbud. 2017. "Kajian Isu Aktual".
- Sandra Desi. 2018. "Regulasi Baru, SMK Dibatasi Hanya Terima 872 Siswa Alasan Mutu, Larang Terima Ribuan Murid". *Kompas.com*, 7 May 2018
- Syaifullah Muh. 2019 "Pemerintah akan Tutup 2.000 SMK dengan Murid Kurang dari 60"
- Permendikbud RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, 2018.
- "Permendikbud RI No. 34 Tahun 2018 ILampiran VIII tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Standar Biaya Operasi" jdih.kemdikbud.go.id.

- Permendikbud RI No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Permendikbud RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Widodo dkk. 2017. "Percepatan Akreditasi Sekolah Melalui Pembiayaan Mandiri. Laporan Teknis". Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud.
- Yanita Petriella. 2018. "Kurangi Pengangguran Lulusan SMK, Jumlah Guru Produktif Harus Ditambah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia Membutuhkan 87.000 Hingga 90.000 Guru Produktif untuk Dapat Mengurangi Angka Pengangguran Lulusan Sekolah Vokasi". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181206/12/866977/kurangi-pengangguran-lulusan-smk-jumlah-guru-produktif-harus-ditambah>
- Yohanes Enggar Harususilo.2018. "Kemendikbud akan Adakan Sertifikasi Guru SMK" <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/20/17074411/kemendikbud-akan-adakan-sertifikasi-guru-smk>
- Yuli Setiawan .2018. "Kudus Miliki SMK Bergengsi Hasil Kolaborasi Pemerintah-Swasta" <https://www.antaranews.com>. Jumat, 12 Januari 2018.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 4	Panel No: 1
Ruang	: Padjadjaran 2	
Waktu	: 15.45 – 17.30 WIB	
Judul Penelitian	: 1. Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Kepariwisata 2. Kesesuaian Kurikulum SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Boga dengan Kebutuhan Kompetensi Dunia Kerja 3. Kajian Penataan Kelembagaan dan Mutu SMK Swasta	
Penyaji	: . 1. Dr. Agung Purwadi, M.Eng. 2. Dr. Subijanto, MA. 3. Widodo M.Pd.	
Pembahas	: Hendarman, Ph.D.	
Moderator	: Bambang Suwardi Joko, MM.	
Notulis	: Dyah Suryawati	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : <i>(Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)</i>	1. Dr. Agung Purwadi, M.Eng. Terdapat dua rasional dari upaya penelitian dan pengembangan ini, yakni dari sisi perekonomian nasional dan misi Presiden 2020-2024. Dari sisi perekonomian nasional, Pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan sebagai penyumbang devisa terbesar pada tahun 2045, namun untuk mencapai itu nampaknya masih ada tantangan SDM yang perlu diatasi. Sumbangan devisa ditunjukkan oleh besarnya penerimaan dari kedatangan wisman. Besarnya penerimaan dari wisman yang datang ke Indonesia ternyata merupakan yang terendah di antara negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, dan Thailand. Demikian juga jumlah kedatangan wisman. Tantangan utama yang dihadapi sektor Pariwisata adalah kekalahan bersaing Indonesia dari ketiga negara tetangganya dalam kompetensi SDM Pariwisata. Berdasarkan pada temuan studi dua-tahunan UN-WTO dalam tiga aspek daya saing pariwisata ditemukan bahwa Indonesia unggul dalam aspek visi Pemerintah dan berbagai hal terkait dengan warisan masa lalu dan nilai tukar uang yang rendah. Indonesia unggul dalam 1 indikator pada aspek upaya dan kemampuan SDM yakni keamanan dan keselamatan dibanding 2 negara tetangganya, namun kalah dalam 9 indikator lainnya dari ketiga negara tetangga dalam aspek yang sama. Selanjutnya dari aspek misi Presiden 2020-2024 , dinyatakan bahwa salah satu dari keempat misinya adalah: “Membangun SDM dengan meningkatkan vocational training, vocational school. Salah satu beberapa strategi untuk mencapai misi ini adalah “peningkatan peran dan kerjasama industri dalam

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		pendidikan dan pelatihan vokasi”. Misi ini bertepatan dengan masalah yang dihadapi yang dikemukakan pada upaya pencapaian pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar yang menemui kendala pada kompetensi SDM pariwisata, termasuk yang dihasilkan melalui SMK. Salah satu fungsi utama SMK adalah untuk menyiapkan lulusannya untuk bekerja, namun kenyataannya tingkat pengangguran lulusan SMK justru merupakan yang tertinggi di antara seluruh satuan pendidikan yang ada. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran ini adalah kurangnya kompetensi lulusan SMK. Kompetensi yang tidak memadai lulusan SMK Pariwisata ini terjadi karena masalah klasik pendidikan vokasi, yang juga terjadi di SMK pariwisata, yakni kekurangan sumberdaya utama pendidikan vokasi, yakni instruktur kompeten berpengalaman industri, fasilitas praktik, dan biaya operasional. Tujuan penelitian ini adalah menggali kemungkinan pemenuhan kebutuhan sumberdaya utama SMK Pariwisata ini melalui kerjasama atau gotong royong dengan para pemangku kepentingan sekolah ini, yakni pemda, orang tua, dan pelaku industri pariwisata. 2. Dr. Subijanto, MA. Peran masyarakat dalam pendirian SMK sangat mendukung target pencapaian program pemerintah, yaitu Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Hingga tahun 2018 telah berdiri SMKS (SMKS) sebanyak 10.632 sekolah atau 74,78 persen dengan siswa mencapai 2.823.737 atau 56,24 persen. (Dapodik SMK, 2018 http://portal.ditpsmk.net/datapokok) Permasalahan utama yang dihadapi SMKS adalah ketika jumlah siswa terlalu kecil, sebab iuran bulanan siswa tidak mencukupi untuk biaya operasional yang berdampak rendahnya pada pencapaian mutu. Secara Nasional terdapat 3.951 SMKS yang siswanya kurang dari 100 yang dihuni oleh 221.109 siswa. Artinya, ada 56 siswa per sekolah atau 14 orang per rombel. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan SMKS tidak efisien, sebab biaya operasional pendidikan tidak mencukupi kebutuhan. (Data Dapodik SMK, 2018 http://portal.ditpsmk.net/datapokok). Selain itu, masih banyak siswa yang bersekolah di SMK dengan status “Tidak Terakreditasi”; di SMK Negeri terdapat 1.172.958 siswa yang tersebar di 2.277 sekolah dan di SMKS terdapat 1.398.263 siswa yang tersebar di 6.214 sekolah. Jika diambil rata-rata terdapat 515 siswa per SMK Negeri dan 225 siswa per SMKS. Sumber: (Data Dapodik SMK 2018 http://portal.ditpsmk.net/datapokok). Dengan kondisi seperti itu wajar jika SMK masih menyumbang pengangguran yang cukup besar yaitu sebesar 8,92 persen. (BPS, 2018; https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--). Salah satu solusi yang direncanakan Kemendikbud terhadap SMK yang memiliki siswa kurang dari 100 adalah dengan menutup. Alasannya, SMK tersebut memiliki sarana prasana yang tidak memadai serta fasilitas dan gurunya kurang (pernyataan Dirjen PSMK yang ditulis Awaliyah-Gumanti & Yolanda-Friska, 2019) 3. Widodo M.Pd. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15 dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu (Depdiknas, 2003). Berkaitan dengan penyelenggaraan SMK, hasil studi Slamet (2013) antara lain mengindikasikan bahwa belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Direktorat Pembina SMK Ditjen Dikdasmen menegaskan bahwa secara empirik, penyelenggaraan proses pembelajaran SMK masih mengalami permasalahan utama, diantaranya belum semua kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya (Dit. PSMK, 2016). Salah satu dampak dari kondisi tersebut, ditunjukkan oleh data BPS tahun 2019 yang menunjukkan lulusan SMK merupakan pengangguran terbuka tertinggi (10,42 persen) dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan Kemendikbud harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah <i>demand driven</i>. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia, telah diamanatkan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan instruksi tersebut. Khusus kepada Mendikbud, Presiden Jokowi memberikan enam instruksi. Salah satu instruksi tersebut yaitu 2) <i>menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match)</i>.
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Nama Pembahas : Hendarman, Ph.D. ✓ Secepatnya hasil-hasil penelitian ini diajukan kepada pimpinan ✓ Mendikbud masih “listening & learning”, belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbud sekarang termasuk kebijakan tentang SMK. Kebijakan untuk SMK masih menggunakan Inpres No. 9 Tahun 2016. ✓ Ada 13 kementerian yang terkait dengan Inpres No. 9 Tahun 2016. Baru 2 provinsi (DKI & DIY) yang sudah menindaklanjuti mengeluarkan peraturan Gubernur tentang SMK. ✓ Sekarang pada tahap Percepatan Pembangunan SDM untuk tahun 2020-2024. ✓ Semua penelitian yang disajikan harus berani diformulasikan. ✓ Penelitian Pak Agung Purwadi sudah sesuai dengan kebijakan pendidikan vokasi di Kemendikbud ✓ Pengambilan sampel sebaiknya mengikuti daerah-daerah yang akan dikembangkan pariwisatanya ✓ Kekurangan guru kejuruan menjadi masalah utama SMK ✓ Kebutuhan guru produktif mencapai 52 ribuan orang pada 5000 SMK yang mendapatkan Paket Program Revitalisasi SMK. ✓ Perlu diteliti SMK-SMK yang sudah diberi bantuan revitalisasi bagaimana kondisinya sebelum dan sesudah menerima bantuan tersebut? ✓ Untuk usulan misalnya mantan kapten kapal menjadi guru, sudah diperhitungkan pendanaannya dan sosialnya? ✓ Pertanyaan penelitian tidak harus banyak, cukup dua saja ✓ Hasil penelitian bisa dijadikan <i>best practice</i> (acuan) bagi SMK-SMK yang belum

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		✓ Semua penelitian yang disajikan perlu dicari bagaimana cara merumuskannya. Selain itu dapat diajukan untuk diterbitkan ke jurnal ✓ Pendapat di atas sebagai masukan, sehingga dapat dimasukkan atau pun tidak ke dalam tulisan.
3.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 17.30 WIB.

PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

KAJIAN MENGULANG KELAS DAN PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

Siswantari, Darmawan Sumantri, Dyah Suryawati

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menyusun bahan dalam memformulasikan kebijakan tentang upaya mengatasi mengulang kelas (AU) dan putus sekolah (DO) di SD dengan cara menganalisis penyebab, solusi, dan capaiannya yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dan dinas pendidikan kabupaten. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data sekunder memperlihatkan DO cenderung disebabkan oleh AU, korelasi memperlihatkan hubungan yang signifikan. Hasil analisis memperlihatkan sepuluh variabel lain berkorelasi signifikan dengan AU, tujuh di antaranya juga signifikan dengan DO. Hasil DKT memperlihatkan penyebab AU dan DO dapat dikelompokkan menjadi dua, internal (di sekolah) dan eksternal (di luar sekolah). Penyebab internal adalah: 1) kurangnya kualifikasi dan kompetensi guru; 2) banyaknya guru honorer; dan 3) keterbatasan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, sumber air yang cukup, dan toilet. Penyebab eksternal mencakup: a) rendahnya status sosial ekonomi orang tua siswa dengan indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Rendahnya pendidikan mengakibatkan persepsi terhadap pendidikan juga rendah; b) faktor budaya, menikah muda untuk perempuan di tiga kabupaten sampel. Di dua kabupaten lain ditemukan budaya Mauludan dan pesta kematian; c) sulitnya akses menuju sekolah untuk daerah yang terpencil. Upaya yang telah dilakukan, terutama oleh sekolah, di antaranya adalah melakukan pendekatan ke orang tua siswa dan memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang rawan mengulang kelas dan DO.

Kata kunci: mengulang kelas/AU, DO, SD.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa sejalan dengan dimulainya penerapan Kurikulum 2013, tidak ada lagi siswa SD yang tinggal kelas/tidak naik kelas/mengulang kelas (AU). Meskipun demikian, sekolah tetap melakukan evaluasi akhir kenaikan kelas, dan yang memperoleh nilai di bawah standar tetap mengikuti ujian ulangan atau remidi. Kemendikbud hanya menetapkan aturan tidak ada AU secara garis besar saja. Kebijakan teknisnya, termasuk jenis dan sistem remidinya, diserahkan kepada setiap guru atau SD (Hidayatullah, 2013).

Terkait dengan putus sekolah (DO), Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Ketetapan dalam undang-undang tersebut sering dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang merupakan hak setiap warga negara usia 7 s.d 15 tahun yang memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Mengingat hal itu, terjadinya DO pada siswa SD bertolak belakang dengan ketetapan undang-undang Sisdiknas tersebut (Perhati dkk., 2017). Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada anak usia 7 s.d 15 tahun yang tidak bersekolah. Meskipun demikian, data dan fakta hingga kini memperlihatkan masih cukup

banyak siswa SD yang AU dan DO. Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah siswa AU dan DO di SD secara nasional dari tahun 2014/2015 s.d. 2018/2019.



Gambar 1 Grafik Jumlah Siswa SD Mengulang Kelas dan DO Tahun 2014 s.d. 2018

Sebagaimana tampak dalam Gambar 1, jumlah siswa mengulang kelas SD secara nasional dari tahun ajaran 2014/2015 s.d. tahun 2018/2019 berfluktuasi. Jumlah siswa DO cenderung menurun terus dan meningkat dari tahun pelajaran 2017/2018-- 2018/2019. Meskipun kebijakan penghapusan tinggal kelas bertujuan baik, yaitu agar siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya, praktiknya di lapangan membingungkan para guru. Hal tersebut terjadi terutama ketika mereka menghadapi kenyataan siswa tetap saja tidak mampu membaca dan menulis meskipun sudah berkali-kali diberikan remidi. Perihal itu, *Kompas.com* (Desember 2013) merangkum berbagai tanggapan dari kalangan dinas pendidikan dan guru SD di beberapa kabupaten/kota, yang intinya berberatan terhadap kebijakan penghapusan tinggal kelas. “Pemaksaan” menaikkan anak ke tingkat kelas berikutnya, padahal kemampuannya masih belum mencukupi, akan semakin menyulitkan anak untuk mengikuti proses pembelajaran karena materi pembelajaran di tingkat kelas berikutnya semakin sulit.

Dampak lanjutan dari AU adalah terjadinya kasus DO. Dalam hubungan itu, Wicaksono (2018) dalam penelitiannya, antara lain, bahwa anak yang pernah tinggal kelas memiliki kecenderungan tidak melanjutkan pendidikannya. Alih-alih kebijakan tinggal kelas bertujuan mempersiapkan siswa supaya lebih baik dan lebih siap saat mengenyam pembelajaran di kelas selanjutnya, faktanya tidak ada data yang dapat menunjukkan hal tersebut. Efek tinggal kelas justru memiliki dampak jangka panjang yang negatif terhadap peluang melanjutkan sekolah.

Permasalahan terkait dengan AU, yaitu pemaksaan anak yang belum siap belajar di kelas berikutnya karena kemampuannya belum mencukupi, mempersulit anak mengikuti pembelajaran. Efek tinggal kelas memiliki dampak jangka panjang yang negatif terhadap peluang melanjutkan sekolah, artinya jumlah siswa tinggal kelas yang tinggi sebagaimana diperlihatkan oleh data memberi peluang tingginya DO. Tingginya AU dan DO memperlihatkan rendahnya kinerja pendidikan dan tingginya pemborosan.

2. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan terjadinya AU dan DO di SD. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya AU dan DO; dan (b) mengidentifikasi upaya penanggulangan AU dan DO yang telah dilakukan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), angka mengulang (AU) adalah perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai dengan tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. (PDSPK, 2019)

Rumus AU:

$$AU_{jt} = \frac{\text{Mengulang}_{jt}}{\text{Siswa}_{jt-1}} \times 100$$

Catatan:

j adalah jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SM); t adalah tahun

Sumber: PDSPK, Kemdikbud

Semakin kecil AU, semakin banyak siswa yang dapat mengikuti pembelajaran di kelasnya dengan baik sehingga naik kelas. Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilai AU, berarti kinerja pendidikan semakin baik. Siswa AU merupakan pemborosan, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi, karena mengurangi kapasitas anak-anak lain masuk sekolah, menurunkan efisiensi internal (*input-output ratio*), dan menaikkan biaya pendidikan bagi pemerintah (PDSPK, 2016).

AU erat kaitannya dengan kesiapan anak belajar di SD, terutama secara psikologis, yang dapat ditanggulangi, misalnya dengan belajar di PAUD. Menurut para ahli, ada tujuh alasan perlunya PAUD. Salah satunya, berdasarkan hasil penelitian Save the Children (2000) di Nepal, tingkat kenaikan kelas di kelas 1 pada anak yang mendapatkan pendidikan usia dini dua kali lipat lebih tinggi dari anak-anak yang tidak mendapatkannya. Sebaliknya, jumlah kasus anak yang AU dan DO jauh lebih tinggi terjadi pada anak yang tidak mendapatkan layanan PAUD. Sejalan dengan kajian ini, alasan ketujuh perlunya PAUD adalah penyelenggaraan dan fasilitasi anak usia dini secara holistik berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik-motorik; kognitif, bahasa, dan kehidupan sosialnya sehingga lebih siap mengikuti pendidikan di SD.

Menurut Wahab (2019), penyebab masih banyaknya anak SD yang tidak naik kelas adalah murni kesalahan guru karena tidak mengenali setiap muridnya secara baik. Guru yang profesional akan berupaya keras mengenali setiap muridnya dengan baik. Menurut Danim (2002: 30-31), ada dua perspektif dalam melihat guru yang profesional, yaitu dari latar belakang pendidikan, penguasaan terhadap materi bahan ajar, pengelolaan pembelajaran dan siswa, dan pelaksanaan tugas pembimbingan.

Penguasaan terhadap materi bahan ajar dan pengelolaan siswa dapat dikoreksi dan diperbaiki dengan pengalaman guru. Hal itu sejalan dengan pendapat Christina (1991: 15-16) bahwa salah satu dari lima keuntungan yang diperoleh guru dari pengalaman mengajarnya adalah responsif terhadap masalah pengajaran.

DO adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari lembaga pendidikan tempatnya belajar atau terlantarnya anak dari lembaga pendidikan formal. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiqon, 2007). DO menurut Ahmad (2011) adalah “berhenti belajarnya murid baik di tengah-tengah atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya berhenti sekolah”.

Nurhidayat (2007) mengungkapkan beberapa hal yang memengaruhi AU adalah (i) lemahnya motivasi orang tua; (ii) rendahnya pendidikan orang tua; (iii) tingkat kemiskinan; (iv) rendahnya pelayanan keadilan bagi siswa, dan (v) lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan.

Lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan berhubungan dengan berbagai hal, di antaranya kebutuhan dasar dan sanitasi sekolah. Rick Johnson, peneliti utama WHO, menyatakan bahwa pembangunan lingkungan sekolah yang berkualitas tidak dapat dilakukan jika kebutuhan dasar tentang sanitasi sekolah, yaitu toilet dan air bersih, tidak tercukupi. (<https://www.cnnindonesia.com>, 2018). Astari (2013) dan Purbasari (2014) menyatakan bahwa yang memengaruhi DO secara signifikan adalah (i) rasio siswa terhadap sekolah; (ii) rasio siswa terhadap guru; (iii) jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir ayah SD atau SMP; (iv) angka buta huruf; (v) angka partisipasi sekolah; (vi) rata-rata jumlah anggota keluarga; (vii) PDRB per kapita; (viii) indeks pembangunan manusia (IPM); (ix) persentase tingkat kesempatan kerja; dan (x) rasio guru/murid.

AU dan DO merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Salah satu di antaranya melalui *problem driven iterative adaptation* (PDIA). Tahapan kerjanya diawali dengan mencari akar penyebab terjadinya permasalahan, mengidentifikasi titik masuk terjadinya permasalahan, mencari solusi pemecahan masalah, mengambil tindakan, merefleksikan apa yang telah dipelajari, beradaptasi, kemudian bertindak lagi. (<https://bsc.cid.harvard.edu/PDIAtoolkit>). Menurut Inovasi ada sembilan tahap inti PDIA, yaitu i) eksplorasi; ii) sintesis; iii) perancangan; iv) kaji ulang dan iterasi; v) rintisan; vi) evaluasi; vii) evaluasi; iix) berbagi; dan ix) penyebarluasan.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method). Pendekatan kualitatif dalam verifikasi dan validasi data dilakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT). Pendekatan kuantitatif ditandai dengan teknik penyebaran angket/kuesioner. Materi DKT adalah gambaran jumlah anak AU dan DO, penyebabnya, hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan sekolah dan dinas pendidikan kabupaten. Data jumlah siswa AU dan DO yang dari kelas I--VI tahun 2017/2018 dikumpulkan dengan cara mengisi kuesioner yang sudah disiapkan.

2. Sampel Kabupaten

Populasi penelitian ini adalah seluruh SD negeri dan swasta di Indonesia. Sampel kabupaten lokasi verifikasi dan validasi data ditentukan secara purposif, yaitu yang memiliki jumlah siswa AU dan DO yang tinggi adalah Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Bangkalan (Jawa Timur), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur). Keterwakilan kecamatan lokasi SD pun dijadikan pertimbangan.

3. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini ialah dinas pendidikan kabupaten (kepala dinas, kabid SD, kepala seksi kurikulum, dan pengawas), sekolah (kepala sekolah dan guru) dan komite sekolah, yang semuanya berjumlah empat belas orang sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Perincian Peserta DKT di Tiga Kabupaten Sampel

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Peserta DKT (orang)			
		Dinas Pendidikan/ Pengawas	Kepala SD	Guru SD	Komite Sekolah
1.	Kabupaten Bogor	5	5	3	1
2.	Kabupaten Bangkalan	4	6	3	1
3.	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	6	3	-

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Kajian ini diawali dengan analisis data sekunder yang berasal dari PDSPK dan Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga secara menyeluruh kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data sekunder dilakukan dengan mengorelasikan data AU dan DO tahun 2016/2017 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan beberapa variabel hasil penelitian sebelumnya. Variabel yang dianalisis juga dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder terbaru dari BPS. Tahun 2016/2017 dipilih sebagai tahun yang dianalisis karena pada tahun itu, AU dan DO cukup tinggi.

Pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan dari DKT dilakukan dengan mengelompokkan data dan informasi sejenis, lalu dianalisis dengan membandingkannya dengan data dan informasi hasil kajian sebelumnya. Tahap akhir adalah merumuskan solusi dalam mengatasi berbagai hambatan dalam menanggulangi permasalahan AU dan DO.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Sekunder

Korelasi AU dan Angka DO (APS) tahun 2016/2017 memperlihatkan bahwa keduanya berkorelasi positif sebesar 0,099 dan signifikan. Artinya, kenaikan AU sebesar 0,099 poin akan meningkatkan DO sebesar 1 poin sehingga AU perlu segera ditanggulangi supaya siswa tidak sampai DO. Hasil analisis data sekunder korelasi AU dan APS dengan variabel lain dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Korelasi AU, APS, dan Variabel Lain pada Tahun 2016/2017

No.	Variabel Lain	AU			APS		
		Nilai Korelasi Pearson	Signifi- kan	N	Nilai Korelasi Pearson	Signif- ikan	N
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-0,438**	√	512	-0,247**	√	511
2.	Persentase Siswa Kelas Awal Non-TK	0,286**	√	514	0,166**	√	513
3.	Persentase Kepala Sekolah dan Guru Belum S-1	0,340**	√	514	0,336**	√	513
4.	Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan Masa Kerja ≥ 20 Tahun	-0,299**	√	514	-0,143**	√	513

No.	Variabel Lain	AU			APS		
		Nilai Korelasi Pearson	Signifikan	N	Nilai Korelasi Pearson	Signifikan	N
5.	Persentase SD Memiliki Sumber Air dan Cukup	-0,289**	√	514	-0,159**	√	513
6.	Persentase SD Memiliki Toilet	-0,263**	√	514	-0,412**	√	513
7.	Proporsi SD Penyelenggaraan Kombinasi (Pagi & Siang)	-0,143**	√	514	0,215**	√	513
8.	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari	0,443**	√	34	0,103	-	34
9.	Persentase Penduduk Miskin 2017	0,523**	√	34	0,104	-	34
10.	Angka Melek Huruf 2016	-0,353**	√	34	0,306	-	34

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, kesepuluh variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan AU, baik secara langsung maupun tidak, berkorelasi secara signifikan dan konsisten. Demikian pula halnya dengan ketujuh variabel dengan APS. Konsisten dalam hal ini diartikan bahwa kesepuluh variabel tersebut berkorelasi sesuai. Contohnya, AU dan DO berkorelasi negatif secara signifikan dengan IPM, artinya semakin tinggi IPM akan semakin rendah AU dan DO.

2. Data Primer

a. Faktor Penyebab

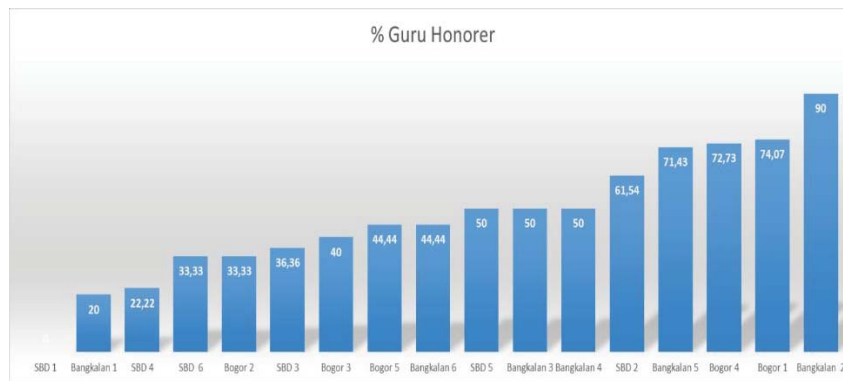
Penyebab AU dan DO, baik secara internal maupun eksternal, di tiga lokasi verifikasi dan validasi data adalah sama.

1. Faktor Internal

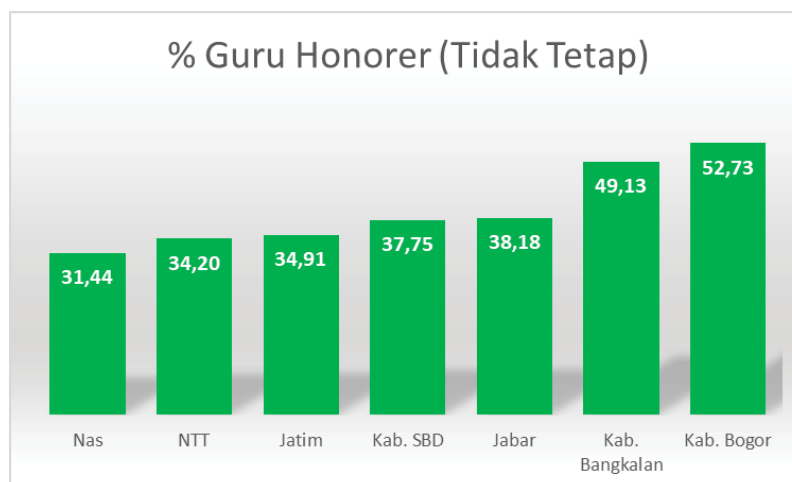
Faktor internal meliputi guru dan prasarana pendidikan.

a) Guru

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah penyebab yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Faktor internal adalah guru yang belum memenuhi kualifikasi, kompetensi mengajar dan substansinya belum cukup, dan banyaknya guru honorer. Guru honorer cenderung membebani sekolah dan membuat kepala sekolah “kurang berwibawa”. Artinya, jika kepala sekolah dinilai kurang mampu menyejahterakan mereka, kebijakan kepala sekolah kurang dipatuhi. Dalam Gambar 2 terlihat persentase guru honorer di SD sampel cukup tinggi, yang tertinggi mencapai 90% di Kabupaten Bangkalan. Jika dibandingkan dengan rerata kabupaten, provinsi dan nasional (Gambar 3) juga lebih tinggi



Gambar 2. Persentase Guru Honorer di SD Sampel



Gambar 3 Persentase Guru Honorer di Tiga Kabupaten Sampel, Provinsi, dan Nasional

b) Prasarana Pendidikan

- 1) Prasarana, terutama jumlah ruang kelas, yang minimal sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Sekolah yang diselenggarakan pagi dan siang (kombinasi) cenderung disebabkan oleh kurangnya ruang kelas. Di Kabupaten Bogor ada SD yang menyelenggarakan pendidikan kombinasi/gabungan hingga siswanya bisa mencapai lebih lima puluh orang. Penggabungan kelas dilakukan karena ada sekolah yang kekurangan ruang kelas. Ada juga penggabungan kelas/sekolah (masuk pada pagi hari) dilakukan karena siswa di suatu sekolah pada siang dan sore hari takut tertimpa oleh batu galian.
- 2) Prasarana lainnya yang penting untuk meningkatkan kenyamanan belajar siswa adalah ketersediaan sumber air yang cukup dan toilet.

2. Faktor Eksternal

a) Rendahnya Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa

Penyebab eksternal adalah rendahnya status sosial ekonomi orang tua siswa dengan indikator rendahnya tingkat kesejahteraan dan rendahnya persepsinya terhadap pendidikan. Kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya, bahkan pindah tempat kerja, hingga tidak sempat memikirkan pentingnya pendidikan anaknya. Di Bangkalan, misalnya, banyak orang tua siswa harus pindah ke kota lain, termasuk ke Kalimantan untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

b) Budaya

Banyak orang tua yang tidak melanjutkan sekolah anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi menyuruhnya mencari pekerjaan atau membantu orang tuanya bekerja. Terkait dengan budaya adalah menikah muda untuk perempuan yang terjadi di tiga lokasi sampel. Budaya lainnya yang memengaruhi AU dan DO adalah hari pasaran. Di Bangkalan, hari pasaran adalah hari yang menggembirakan anak-anak sehingga lebih senang ikut orang tuanya ke pasar daripada ke sekolah. Budaya Mauludan atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW juga lebih menarik perhatian anak-anak daripada pergi ke sekolah.

Upacara kematian juga memengaruhi kehadiran siswa di sekolah sebagaimana terlihat di Sumba Barat Daya. Upacara kematian adakalanya dilakukan selama satu minggu, bahkan lebih, dan selama itu pula anak-anak bolos ke sekolah. Dapat dibayangkan jika terjadi upacara kematian secara berturut-turut, sekolah anak-anak akan terbengkalai.

c) Lokasi Sulit

Di Kabupaten Sumba Barat Daya ada desa atau tempat permukiman siswa, selain jauh dari sekolah, sarana transportasi juga menjadi kendala sehingga anak-anak enggan ke sekolah dan akhirnya menjadi DO.

b. Hubungan mengulang kelas AU dan DO

AU dengan DO mempunyai hubungan yang erat. Setelah AU, siswa tidak termotivasi untuk terus bersekolah, merasa malu pada teman sekolahnya, dan kurangnya perhatian orang tua/keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak memilih membantu orang tuanya dari bersekolah.

c. Upaya Menanggulangi mengulang kelas AU dan DO

1. Dinas Pendidikan Kabupaten

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah/dinas pendidikan di tiga lokasi sampel penelitian adalah meminta sekolah untuk:

- a) memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang berpotensi tidak naik kelas untuk mencegah terjadinya siswa yang AU;
- b) melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk memotivasi siswa dan orang tuanya agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikannya (bersekolah).

2. Sekolah

Sesuai dengan arahan dinas pendidikan kabupaten, hampir semua SD sampel melakukan kedua kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi nyata di lokasi masing-masing. Di Kabupaten Bogor, misalnya, orang tua siswa diminta mengganti biaya BOS yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah sebesar Rp300.000,00 x ... bulan). Upaya tersebut berhasil sehingga jumlah siswa DO berkurang. Cara lain, dewan guru dan komite sekolah menyosialisasikan pentingnya menyelesaikan pendidikan formal saat pertemuan-pertemuan dengan orangtua/wali murid. Namun demikian ditemukan pula SD yang masih merencanakan, berarti belum berupaya menanggulangi mengulang kelas dan DO. Kepala sekolah menyatakan baru merencanakan memberikan konseling atau membimbing siswa yang rawan mengulang kelas dan sekolah merencanakan kegiatan rohani siswa pada tahun ajaran baru guna mendukung kesehatan mental siswa dengan melibatkan orang tua siswa, guru, komite sekolah dan pemerintah setempat.

E. ANALISIS DATA SEKUNDER DAN DATA PRIMER

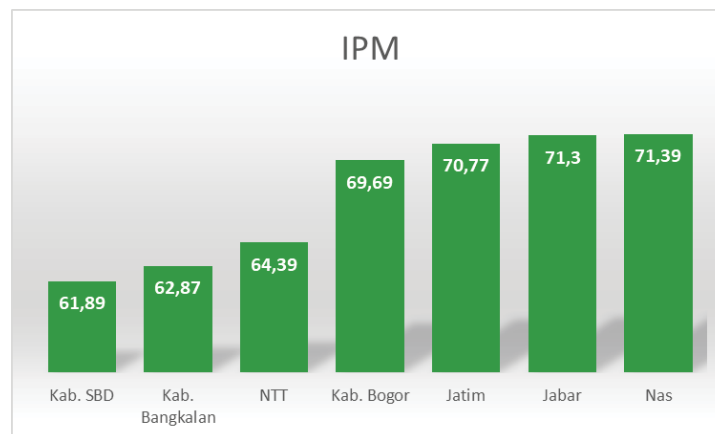
1. Faktor yang Berhubungan dengan AU dan DO

Hasil analisis data sekunder dan hasil DKT memperlihatkan AU dan DO memiliki hubungan yang cukup erat.

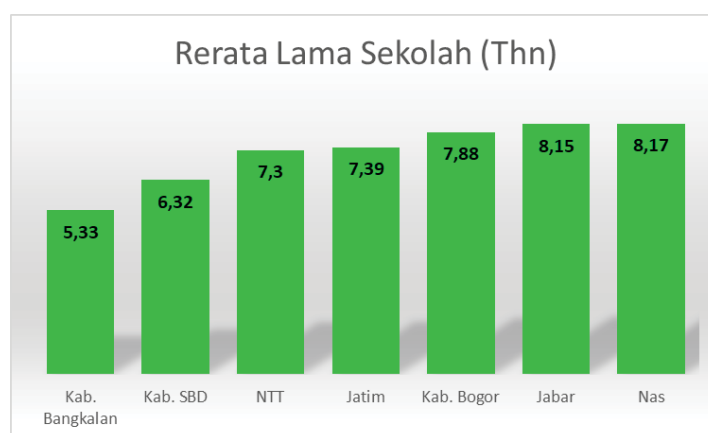
a) Faktor Eksternal

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya, tampak bahwa kesepuluh variabel yang dikorelasikan dengan AU dan DO sejalan. Nurhidayat menyatakan bahwa di antara beberapa variabel yang memengaruhi AU adalah i) lemahnya motivasi orang tua; ii) rendahnya pendidikan orang tua; dan iii) tingkat kemiskinan. Hal itu diperkuat hasil penelitian Astari dan Purbasari bahwa di antara faktor yang memengaruhi DO adalah i) jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir SD atau SMP; ii) angka buta huruf; iii) PDRB per kapita; iv) IPM; dan v) persentase tingkat kesempatan kerja.

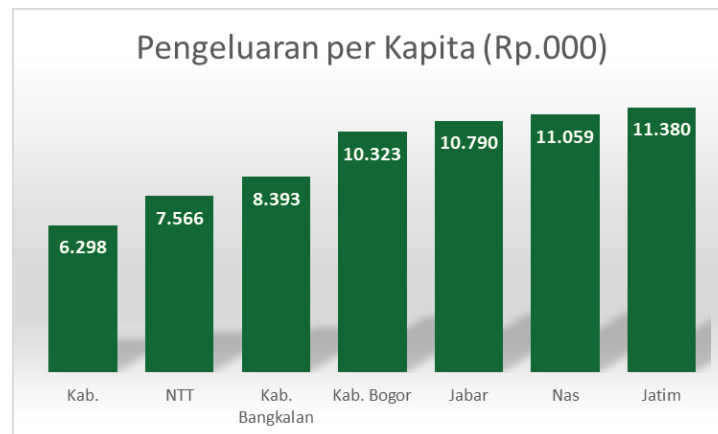
Variabel faktor eksternal yang pertama dikorelasikan adalah IPM (lihat Gambar 4). Tiga indikator IPM adalah i) rata-rata lama sekolah (lihat Gambar 5); ii) angka harapan lama sekolah; dan iii) produk nasional bruto (PNB) per kapita yang menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat dan orang tua siswa. PNB per kapita juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan/kemiskinan masyarakat (lihat Gambar 6). Dalam Gambar 4, 5, dan 6 terlihat bahwa kondisi tiga kabupaten sampel kurang menggembirakan dibandingkan rerata nasional dan provinsi masing-masing.



Gambar 4 IPM di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional



Gambar 5 Rerata Lama Sekolah di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional



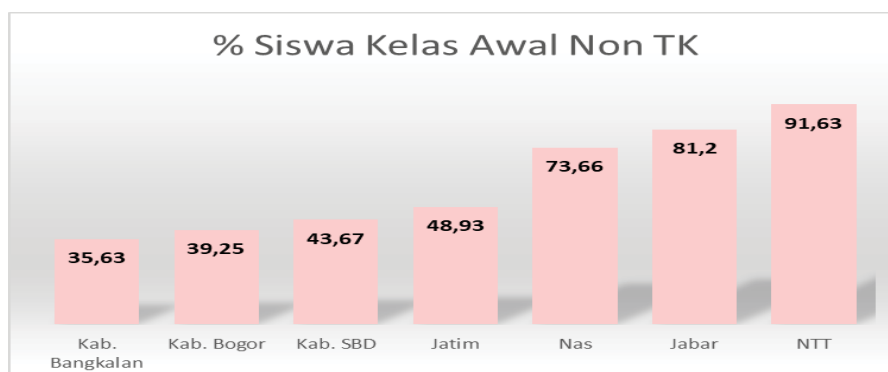
Gambar 6 Rerata Pengeluaran per Kapita di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional

Jumlah kepala keluarga dengan pendidikan terakhir ayah SD atau SMP menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga persepsi mereka terhadap pendidikan juga rendah. Anak-anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tetapi yang terpenting bisa bekerja mencari uang. Sehubungan dengan itu, persentase tingkat kesempatan kerja tampak jelas kaitannya dengan tingkat pendidikan orang tua dan faktor kemiskinan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimal di bawah 1.400 Kkal/kapita/hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan demikian, hasil analisis data sekunder dan hasil DKT menguatkan dugaan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor yang berhubungan dengan AU dan DO. Terkait dengan budaya, upaya melibatkan tokoh masyarakat/adat/budaya/agama belum dilaksanakan, tetapi baru direncanakan. Cara mengatasi permasalahan budaya perlu dilakukan melalui pendekatan budaya pula.

b) Faktor Internal

1) Persentase Siswa Kelas Awal Non-TK

Hasil korelasi memperlihatkan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD yang dapat diperoleh melalui TK, satuan PAUD sejenis, kelompok belajar dan bentuk pendidikan anak usia dini lainnya. Hal itu sejalan dengan pendapat ahli bahwa anak-anak yang tidak mengikuti PAUD sebelum SD berpeluang AU dua kali lipat dibandingkan anak-anak yang sudah mengikuti PAUD sebelum SD.



Gambar 7 Persentase Kelas Awal non TK di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

Tampak dalam Gambar 7 persentase siswa kelas awal non-TK tahun 2018/2019 di tiga kabupaten sampel masih lebih rendah dibandingkan rerata nasional dan provinsinya masing-masing.

2) Persentase Kepala Sekolah dan Guru Belum S-1

Korelasi memperlihatkan pentingnya guru dan kepala sekolah memiliki pendidikan yang memadai agar dapat mengajar dengan baik sehingga siswa tidak AU.

Dalam Gambar 8 tampak bahwa SD sampel menghadapi masalah bahwa ada yang mencapai 64% kepala sekolah dan guru belum berpendidikan S-1.



Gambar 8 Persentase Kepala Sekolah dan Guru Belum S-1 di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada tahun 2018/2019

Dalam DKT, terutama di Sumba Barat Daya, masih ditemukan guru yang belum S-1, dan menurut kepala sekolah, kompetensi pedagogiknya belum memadai. Dengan demikian, meningkatkan kualifikasi guru dan kepala sekolah termasuk yang harus segera dilakukan.

3. Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan Masa Kerja ≥ 20 tahun



Gambar 9 Persentase Kepala Sekolah dan Guru dengan Masa Kerja ≥ 20 tahun di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

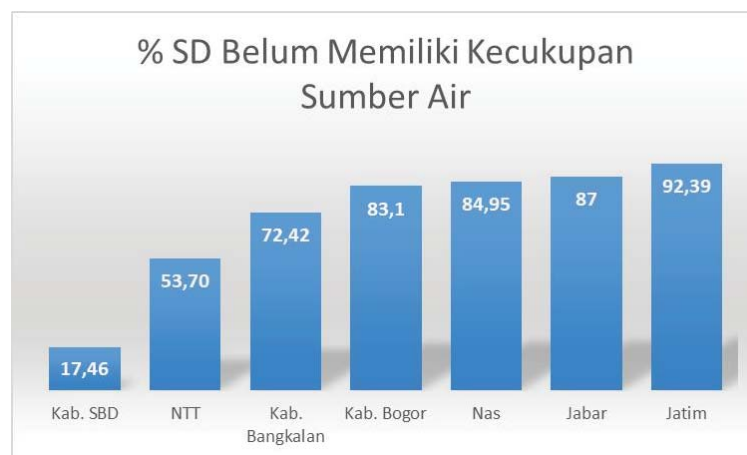
Tampak dalam Gambar 9 beberapa SD di tiga lokasi sampel memiliki persentase kepala sekolah dan guru dengan masa kerja lebih dari 20 tahun, tetapi mutunya rendah. Guru dan kepala sekolah yang berpengalaman tentu memiliki kemampuan mengajar dengan metode yang baik, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh siswa-siswa SD. Hal ini dapat

dijadikan pertimbangan agar guru senior mengajar anak-anak di kelas rendah. Untuk itu, alangkah baiknya jika Kementerian Dikbud membuat kebijakan “guru senior mengajar kelas rendah”.

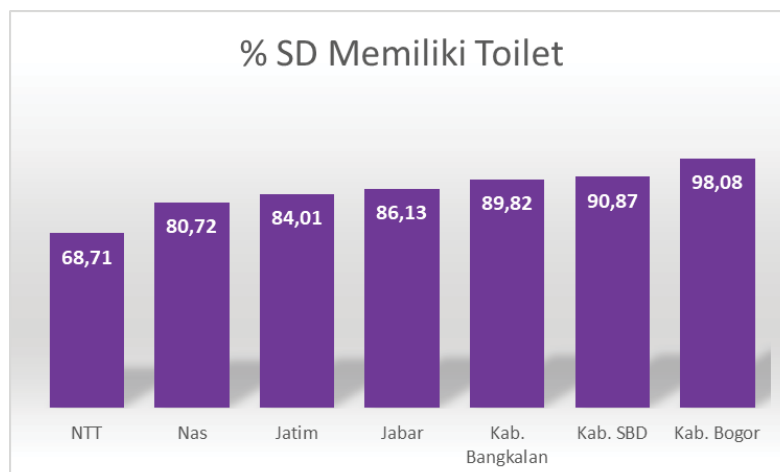
4. Persentase SD Memiliki Kecukupan Sumber Air dan Toilet

Hasil korelasi data sekunder memperlihatkan kecukupan sumber air dan toilet memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan. Hal itu sesuai dengan pernyataan Rick Johnson bahwa sanitasi sekolah merupakan kebutuhan dasar. Sejalan dengan itu, menurut Nurhidayat, salah satu variabel yang memengaruhi AU adalah lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan. Kecukupan sumber air dan toilet juga merupakan indikator sekolah yang menyenangkan.

Masih banyak SD yang belum memiliki kecukupan sumber air (lihat Gambar 10) dan toilet (lihat Gambar 11). Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan perhatian khusus agar tidak ada lagi SD di wilayah kerjanya yang tidak memiliki kecukupan sumber air dan toilet.



Gambar 10 Persentase SD Belum Memiliki Kecukupan Sumber Air di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

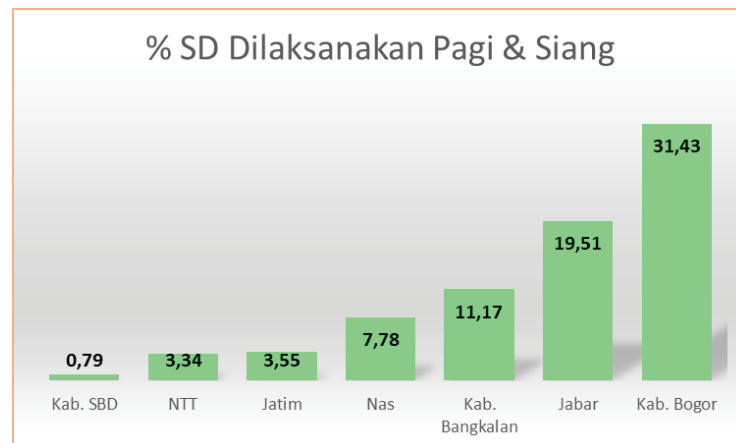


Gambar 11 Persentase SD yang Memiliki Toilet di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

5. Proporsi SD Penyelenggaraan Kombinasi

Variabel ini berkorelasi negatif secara signifikan dengan AU dan berkorelasi positif secara signifikan dengan DO. Semakin tinggi proporsi sekolah kombinasi, AU akan semakin tinggi, sebaliknya DO akan

semakin rendah. Keduanya bisa diterima dengan pertimbangan bahwa anak-anak yang bekerja (umumnya di sektor informal) waktu kerjanya bisa pagi, siang, atau sore hari.



Gambar 12 Persentase SD yang Diselenggarakan Kombinasi di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

Gambar 12 memperlihatkan persentase SD sampel kombinasi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dari rerata provinsi masing-masing dan rerata nasional. Untuk mengurangi AU berarti proporsi sekolah kombinasi harus dikurangi. Tanpa mempertimbangkan anak-anak yang harus bekerja pada pagi hari, kekurangan ruang kelas harus diatasi. Pertimbangannya, sekolah kombinasi diselenggarakan karena jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah ruang kelas. Dikatakan demikian karena Pemerintah sudah sejak lama meniadakan sekolah kombinasi. Dari hasil DKT juga ditemukan sekolah yang kekurangan ruang kelas dan guru. Namun, dengan alasan keamanan (kalau menyelenggarakan pendidikan siang khawatir tertimpa barang galian), mereka menyelenggarakan pendidikan pagi hari saja. Karena jumlah ruang kelas tidak mencukupi, ada dua rombongan belajar yang digabung menjadi satu kelas hingga jumlah siswa mencapai 50 orang. Dalam Gambar 13 tampak persentase kekurangan ruang kelas yang dialami oleh SD sampel di Kabupaten Bogor, bahkan ada yang mencapai 50%.



Gambar 13 Persentase SD yang Kekurangan Ruang Kelas di Tiga Lokasi Sampel, Provinsinya dan Nasional pada Tahun 2018/2019

Jika dikaitkan dengan APS, meningkatkan jumlah sekolah kombinasi berarti akan meningkatkan DO karena waktu anak-anak bekerja tidak sama dengan waktu mereka harus ke sekolah. Mereka harus belajar siang, padahal siang harus bekerja.

2. Penanggulangan

Secara umum baik, dinas pendidikan kabupaten maupun sekolah, sudah berupaya menanggulangi AU dan DO dengan mengingatkan orang tua siswa yang anaknya rawan AU dan DO. Namun, upaya tersebut belum berhasil karena pendekatan yang dilakukan baru bersifat eksternal, yang bersifat internal belum diwujudkan. Untuk mengasai permasalahan itu perlu dilakukan oleh pemerintah daerah/sekolah/guru melalui pendekatan PDIA dengan sembilan tahapan: i) eksplorasi; ii) sintesis; iii) perancangan; iv) kaji ulang dan iterasi; v) rintisan; vi) evaluasi; vii) evaluasi; iix) berbagi; dan ix) penyebarluasan.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Faktor terjadinya AU dan DO dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berkorelasi dengan AU dan DO mencakup: i) persentase siswa kelas awal non-TK; ii) persentase kepala sekolah dan guru belum S-1; iii) persentase kepala sekolah dan guru dengan masa kerja ≥ 20 tahun; iv) persentase SD memiliki sumber air dan cukup; v) persentase SD memiliki toilet; dan vi) proporsi SD penyelenggaraan kombinasi (pagi dan siang). Faktor eksternal adalah IPM.

Berdasarkan hasil DKT, faktor internal meliputi i) kekurangan guru; ii) banyaknya guru honorer; iii) kompetensi mengajar dan substansi belum mencukupi; dan iv) kekurangan ruang kelas. Faktor eksternal mencakup i) status sosial ekonomi orang tua yang meliputi kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua; ii) budaya; dan iii) akses menuju ke sekolah.

Upaya penanggulangan sudah dilakukan, baik oleh dinas pendidikan kabupaten maupun hampir semua sekolah, tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Penyebabnya adalah upaya yang belum menyeluruh dan belum melakukan pendekatan pemecahan masalah yang akurat.

2. Rekomendasi

a. Penyebab Internal

1) Guru

- a) Untuk mengatasi masalah banyaknya guru honorer yang memberatkan beban sekolah dan menyebabkan kepala sekolah dalam posisi “kurang berwibawa” perlu pengadaan guru sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- b) Mengingat rekrutmen guru melalui jalur pengangkatan PNS tidak mampu memenuhi kebutuhan, Direktorat Jenderal GTK agar meningkatkan pemenuhan kebutuhan guru SD melalui jalur pengangkatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), terutama bagi daerah pedesaan (terpencil) dan 3T. Pengangkatan PPPK didasarkan pada kebutuhan riil dan atas usul dari institusi/daerah yang memang benar-benar membutuhkannya.
- c) Program guru garis depan (GGD) hendaknya tidak terlalu cepat dihentikan, tetapi sebaiknya tetap dilanjutkan dengan beberapa perbaikan/penyesuaian. Perbaikan ditekankan agar guru yang telah menandatangani “kontrak” dalam program GGD tidak dapat mengajukan pindah tempat penugasan dalam kurun waktu minimal sepuluh tahun.
- d) Untuk mengatasi banyaknya guru honorer diperlukan distribusi guru, termasuk ke daerah pedesaan dan 3T. Rencana kebijakan rotasi penugasan guru bersatus PNS ke daerah pedesaan dan 3T agar segera diberlakukan setelah pemutakhiran Dapodik terkait dengan data kebutuhan dan distribusi guru.

- e) Untuk mengatasi masalah guru yang belum memenuhi kualifikasi, dinas pendidikan perlu mengupayakan/mencarikan beasiswa agar guru yang belum memenuhi kualifikasi bisa melanjutkan pendidikannya minimal S-1/D-IV. Program yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka/sejenisnya termasuk salah satu pilihan rasional. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang pendidikannya sudah sesuai dengan kualifikasi, tetapi masih belum berkompeten agar diikutsertakan dalam program pelatihan.
- f) Perlu diprioritaskan pelatihan guru yang berada di daerah pedesaan (terpencil) dan 3T untuk meningkatkan kompetensi substansi dan kompetensi mengajar.
- g) Perlu didorong peningkatan kapasitas dan aktivitas kelompok kerja guru (KKG), terutama di daerah pedesaan dan 3T dengan melakukan pembinaan/pendampingan dari LPTK terdekat dan pemberian insentif pendanaan.
- h) Murid SD, terutama kelas rendah, agar dididik oleh guru-guru yang memiliki pengalaman mengajar Akan lebih baik jika ajuran tersebut dijadikan kebijakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- i) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah hendaknya menjadikan kebijakan perihal penyelenggaraan PAUD minimal satu tahun sebelum memasuki SD.

2) Prasarana dan Sarana

- a) Pengadaan dan perbaikan (renovasi) prasarana dan sarana sekolah agar memprioritaskan daerah pedesaan (terpencil) dan 3T. Hal ini mengingat untuk daerah lainnya termasuk daerah urban (pinggiran kota) pembiayaan pengadaan atau perbaikan prasarana dan sarana sekolah masih jauh lebih besar kemungkinannya dari kontribusi orangtua atau masyarakat, tentu saja dengan pendampingan dan pengawasan bersama dari unsur pemerintah daerah/dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat.
- b) Dinas pendidikan perlu mengupayakan pengadaan prasarana pendidikan dan ruang kelas agar mayoritas SD dapat menyelenggarakan pendidikan pada pagi hari, meskipun ada daerah/ SD masuk pada siang hari karena “terpaksa” bekerja (membantu orang tua) pada pagi hari.
- c) Prasarana lainnya yang perlu tersedia di setiap SD adalah sumber air yang cukup dan toilet agar anak-anak nyaman berada di sekolah

b. Penyebab Eksternal

- 1) Penyebab eksternal terutama adalah rendahnya tingkat status sosial ekonomi yang ditandai oleh rendahnya kesejahteraan masyarakat dan perhatian terhadap pendidikan. Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan institusi lain di wilayahnya, khususnya terkait dengan faktor penyebab AU dan DO.
- 2) Dinas sosial, dinas pertanian, dinas tenaga kerja, dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) agar meningkatkan keterampilan orang tua berbasis unggulan daerah/kearifan lokal dalam memperbaiki penghasilan keluarga.
- 3) Dinas sosial, kantor kementerian agama kabupaten/kota, dinas pariwisata dan budaya dinas pendidikan kabupaten/kota, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan lembaga atau komiunitas yang relevan agar memberikan pemahaman

kepada orang tua/masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia 7--15 tahun dan belum saatnya bekerja, dinikahkan, termasuk keinginan anak lebih mendahulukan hajatan adat/budaya daripada bersekolah.

- 4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata dan Budaya untuk memberikan pemahaman/kesadaran kepada orangtua/masyarakat agar memahami pentingnya pendidikan umum disamping pendidikan keagamaan, dan agar sedapat mungkin jangan terlalu banyak melibatkan atau mengikutsertakan anak-anak rentang usia pendidikan dasar dalam acara-acara peringatan keagamaan dan/atau perayaan adat budaya. Upaya ini dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, dalam hal ini melibatkan tokoh masyarakat/adat/budaya/agama yang biasa berpengaruh di masyarakat.
- 5) Pemerintah daerah hendaknya segera membangun jalan penghubung antara permukiman dan sekolah serta sarana transportasi, khususnya di daerah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N.S. 2011. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Astari, G. A. 2013. "Pemodelan Jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Bali dengan Pendekatan Semi Parametric Geographycally Weighted Poisson Regression". Universitas Udayana Bali: Jurusan Matematika FMIPA
- Badan Pusat Statistik. 2019. ([https://sirusa.bps.go.id/index.php?r= indikator/view&id=8](https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=8)) Diakses 14 Maret 2019
- BPS.go.id <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, (unduh 31 Okt 2019 Jam 13:10 WIB)
- Christina. 1991. *Pengalaman Sebagai suatu Proses*. Bandung. Rosda Karya
- Danim, S. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hidayatullah, F. <https://www.solopos.com/kebijakan-tidak-naik-kelas-siswa-sd-dihapus-470558>, 2 Desember 2013 (Diakses 3 Oktober 2019 jam 11:55 WIB)
- <https://bsc.cid.harvard.edu/PDIAtoolkit> diunduh 12 November 2019
- https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B_.pdf diakses 14 Maret 2019
- <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/14/Cenderung-berdampak-negatif-bagi-anak-kebijakan-tinggal-kelas-perlu-dikaji>, 14 November 2018 (Diakses 29 Juli 2019 jam 09:25 WIB)
- <https://www.sekolahdasar.net/2016/10/Anak-tidak-naik-kelas-murni-karena-kesalahan-guru.html?m=0>. Diakses 12 November 2019.
- Kompas, 2013. <https://edukasi.kompas.com/read/2013/12/03/1223398/Kebijakan.Tak.Boleh.Tinggal.Kelas.Masih.Bingungkan.Guru>.
- Musfiqon. 2007. *Mengenai Putus Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nurhidayat, H. <https://www.kompasiana.com/www.hida.nurhidayat.com/59dbb54e4b0a685470131d93/strategi-mencegah-dan-menanggulangi-tinggal-kelas-dan-putus-sekolah-di-sekolah-dasar?page=all> diakses 10 November 2019
- Para ahli. <https://www.paud.id/2015/03/7-alasan-pentingnya-pendidikan-anak-paud-menurut-para-ahli.html>. diakses 4 Desember 2019
- Perhati, Tina Aris, Indahwati, Susetyo, Budi. 2017." Identifikasi Karakteristik Anak Putus Sekolah di Jawa Barat dengan Regresi Logistik". *Indonesian Journal of Statistics and Applications*, Vol 1 No 1 (2017), 56 – 65
- Purbasari, D. A. 2014. "Tugas Akhir : Pemodelan Angka Putus Sekolah tingkat SLTP dan Sederajat di Jawa Timur Tahun 2012 dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik Ordinal". ITS Surabaya: Jurusan Statistika FMIPA
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Data Pendidikan 2014/2015*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2016. "Ikhtisar Data Pendidikan 2015/2016". Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan". http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_78103EAF-0C22-4306-9451-4FD5E77FBA67_.pdf diakses 14 Maret 2019
- Republik Indonesia. 2017. "Ikhtisar Data Pendidikan 2016/2017". Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_FC1DCA36-A9D8-4688-8E5F-0FB5ED1DE869_.pdf diakses 14 Maret 2019
- Republik Indonesia. 2018. *Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan. 2017/2018*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. 2019. *Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan. 2018/2019*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.ndonesia.
- Shaleh, N.A. 2011. *Pendidikan dan Masyarakat*. Yogyakarta. Sabda Media.
- WHO. 2018. "Separuh Sekolah di Dunia Tak Punya Toilet dan Air Bersih"
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180827152218-134-325221/who-separuh-sekolah-di-dunia-tak-punya-toilet-dan-air-bersih> diakses 31 Okt 2019
- Wicaksono, T. Y. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/14/cenderung-berdampak-negatif-bagi-anak-kebijakan-tinggal-kelas-perlu-dikaji>, 14 November 2018 (Diakses 3 Oktober 2019 jam 14:35 WIB)

PENGUATAN RANAH PSIKOMOTORIK SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR

Lucia H. Winingsih, Erni Heryanti, Lisna Sulinar Sari

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Dalam pertumbuhan dan perkembangan setiap anak ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, dalam proses pembelajaran sering terjadi perhatian lebih banyak tertuju pada aspek kognitif, kemudian pada aspek afektif, dan yang terakhir aspek psikomotorik. Kajian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan yang terkait dengan aspek psikomotorik anak serta mengidentifikasi bentuk kegiatan psikomotorik di sekolah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan *desk study* dan *focus group discussion* (FGD) dalam pengumpulan data, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari regulasi yang ada, yaitu Permendikbud Nomor 24/2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/MI, Permendikbud Nomor 20/2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 21/2014 tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 22/2014 tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 37/2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar menunjukkan bahwa unsur pembelajaran yang mengandung aspek psikomotorik terkandung dalam regulasi tersebut, baik tersirat maupun tersurat. Ada juga bentuk pembelajaran sehubungan dengan pengembangan dan penguatan aspek psikomotorik anak, yaitu melalui jalur pendidikan jasmani dan olahraga, jalur kegiatan ekstra kurikuler, dan pengembangan atau penguatan yang dilakukan atas inisiatif guru. Namun, walaupun secara regulasi disebutkan pentingnya aspek psikomotorik anak dan banyak kegiatan terkait dengan aspek psikomotorik di tingkat sekolah, tetapi belum ada ukuran yang jelas tentang capaian aspek ini pada siswa.

Kata kunci: psikomotorik, siswa, SD

A. PENDAHULUAN

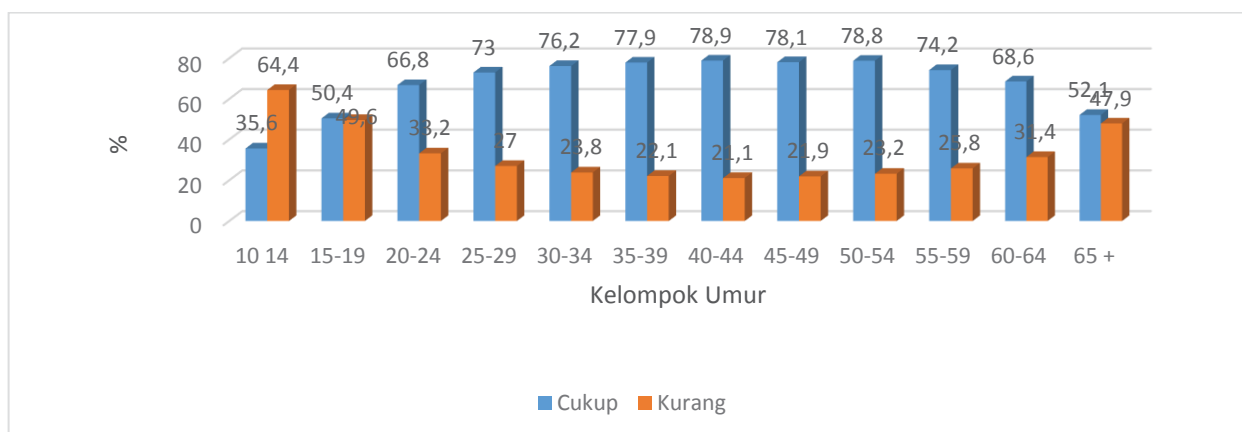
Dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir menuju dewasa, fase anak-anak (anak usia dini 0--6 tahun) memiliki keistimewaan yang disebut dengan masa keemasan atau *golden age*. Masa ini merupakan masa terbentuknya pondasi sikap, perilaku, mental, serta kecerdasan (spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, seni, dan sosial). Pada masa ini potensi anak mulai bisa dimaksimalkan melalui berbagai cara. Sesuai dengan Standar PAUD Nasional, tingkat capaian perkembangan anak usia 0--6 tahun yang harus dikembangkan adalah agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam *Developmental Psychology* (1980), fase perkembangan manusia sejak lahir hingga meninggal terbagi dalam sepuluh periodisasi. Pada periodisasi kelima, yaitu masa pertengahan dan akhir anak-anak (*middle and late childhood*), rentang usia 6—11 tahun. Periode ini biasa disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Pada masa ini keterampilan fundamental, seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan

pengendalian diri mulai meningkat.¹ Dapat disimpulkan bahwa pada anak usia 6--11 tahun pembelajaran sudah mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Fenomena yang banyak dijumpai di sekitar kita, dari berbagai kecerdasan yang ada, guru dan orang tua cenderung lebih fokus pada kecerdasan intelektual. Jika merasa intensitas dan kualitas pendidikan anak di sekolah masih kurang, orang tua akan menambahkan les privat atau bimbingan belajar. Paradigma ini memberikan kesan bahwa keberhasilan anak sangat ditentukan oleh kecerdasan intelektual yang mengarah ke ranah kognitif dan tes intelegensi (Haryadi, 2015). Hal ini diperkuat dengan kebijakan pada banyak sekolah di Indonesia yang masih menerapkan sistem pendidikan konvensional dengan kurikulum yang menitikberatkan sebagian besar pada ranah kognitif. Kecerdasan afektif melalui Kurikulum 2013 (K-2013) saat ini sudah mulai mendapat perhatian khusus melalui program Pendidikan Peningkatan Karakter (PPK). Di pihak lain, ranah kecerdasan yang masih kurang optimal dikembangkan adalah kecerdasan psikomotorik. Ada beberapa alasan mengapa penguatan ranah psikomotorik sangat penting dan perlu dilakukan. Secara umum aktivitas yang terkait dengan aspek psikomotorik tidak mendapat perhatian cukup. Hal ini terlihat pada rendahnya aktivitas fisik di banyak penduduk di Indonesia, rendahnya kebugaran anak, belum tercapainya target WHO terhadap penduduk dengan *sedentary* (tidak banyak bergerak) tinggi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa untuk menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan sumber daya manusia yang sehat dan bugar sehingga mempersiapkan sumber ini merupakan tantangan yang harus dihadapi.

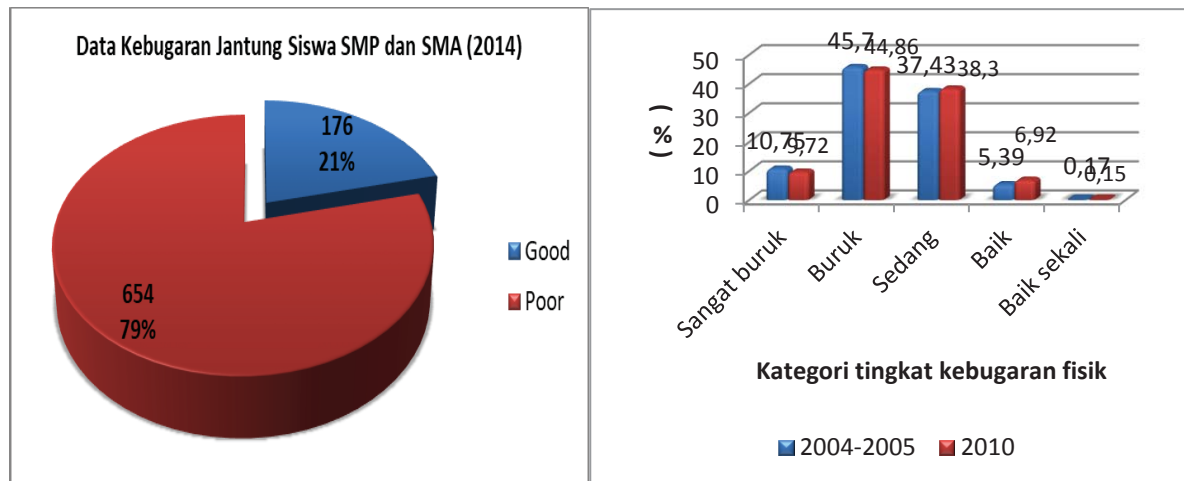
Grafik 1 menunjukkan proporsi aktivitas fisik berdasarkan kelompok umur. Di sini terlihat penduduk usia 10--14 tahun, yang merupakan anak usia pendidikan dasar, sekitar 64% kurang dalam aktivitas fisiknya. Padahal, anak usia sekolah seharusnya mempunyai aktivitas fisik yang tinggi. Namun, dari grafik tersebut terlihat bahwa semakin tinggi usia semakin cukup aktivitas fisiknya. Anak pada umur 10--14 tahun masih membutuhkan stimulasi atau rangsangan untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Menurut UNESCO, anak harus bergerak setiap hari selama 60 menit (1 jam). Gerakan merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Jika banyak bergerak, anak akan semakin banyak memperoleh manfaat, terampil menguasai gerakan motorik halus dan motorik kasar, yang keduanya berfungsi sebagai rangsangan dalam pengembangan integensia dan kesehatan.



Grafik 1 Aktivitas Fisik berdasarkan Kelompok Umur (N=1.2 Juta)
Sumber: Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, Balitbang, Kemenkes 2019.

¹ <https://rhenniyhanasj.wordpress.com/2014/05/25/fase-fase-perkembangan-manusia/>, diakses 19 April 2019

Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2005 dan 2010, sebagian besar siswa SMP masih menunjukkan tingkat kebugaran yang berada pada kondisi buruk (48%) dan sedang (37-38%). Kondisi kebugaran jantung siswa SMP dan SMA sebagian besar menunjukkan kondisi buruk atau kurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurang olahraga atau aktivitas fisik.



**Grafik 2 Tingkat Kebugaran Fisik Siswa dan Kebugaran Jantung
Siswa SMP dan SMP**

Sumber: Kemendikbud, 2014.

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai misi menciptakan manusia yang lebih aktif untuk mencapai masyarakat dunia yang lebih sehat. SDGs juga mempunyai misi agar seluruh manusia memiliki akses terhadap lingkungan yang aman dan memungkinkan aktif secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jika telah tercapai kesehatan individu dan komunitas, setiap orang bisa berkontribusi pada pembangunan sosial budaya dan ekonomi seluruh bangsa di dunia. Target SDGs ini dimaksudkan untuk mengurangi prevalensi global dari tidak aktifnya secara fisik orang dewasa dan remaja yang pada tahun 2030 mengalami penurunan di angka 15%. Oleh karena itu, setiap negara diharapkan berusaha mengurangi tingkat *physical inactivity* dan *sedentary behavior* (WHO, 2018)

Tidak kalah penting bahwa Era Industri 4.0 yang sedang berkembang pesat memberikan kesempatan yang besar bagi abad ini, tetapi sekaligus merupakan tantangan besar bagi generasi muda khususnya. Kemajuan teknologi digital membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara belajar, bekerja, dan gaya hidup. Selain informasi mudah didapat, bekerja, berbelanja, berkomunikasi, bahkan belajar bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus bergerak. Kesempatan yang sangat luas tersebut sekaligus menjadi tantangan karena aktivitas fisik menjadi tidak efektif. Hal itu sejalan dengan SDGs bahwa secara medis *physical inactivity* menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan stres. Sebagai contoh, hasil penelitian Kemenkes menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk dengan obesitas meningkat secara signifikan, yaitu 14,8% (2013), 20, (2016), dan 21,8% pada tahun 2018, demikian jumlah penduduk yang menderita hipertensi meningkat dari 24,3% (2013) dan 32,4% (2016) menjadi 34,1% pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat perlu memperhatikan aspek psikomotorik atau aktivitas dimulai sedini mungkin. Pada saat ini secara umum dalam sistem pendidikan dan pembelajaran kita belum menekankan aspek *myelin* (psikomotor), tetapi masih lebih menekankan kognisi dan afeksi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru dan orang tua akan pentingnya intervensi ranah

psikomotorik. Intervensi ranah psikomotorik diserahkan sepenuhnya pada guru Olahraga dan Pendidikan Jasmani yang biasanya hanya satu orang di setiap SD dan hanya dua jam pelajaran per minggu. Tumbuh kembangnya psikomotorik sifatnya individual dengan alokasi waktu pelajaran yang diberikan, guru Olahraga dan Pendidik dan Jasmani tidak cukup waktu dan tenaga untuk mengamati dan mencatat pertumbuhan dan perkembangan motorik setiap siswa. Padahal, keoptimalan pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik merupakan aspek yang sangat penting dalam diri anak usia 5 – 8 tahun atau usia anak SD kelas awal. Dampak pertumbuhan dan perkembangan motorik yang tidak optimal pada tahapan ini dapat berakibat kurang baik pada kesehatan dan keterampilan anak pada masa dewasa. Oleh karena itu, pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana sistem pembelajaran di sekolah dalam mendukung atau merangsang pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik siswa.

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk memberikan saran kebijakan terkait dengan penguatan ranah psikomotorik (kemampuan *myelin*) anak SD. Secara lebih khusus, studi ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan memetakan kebijakan pendidikan yang terkait dengan penguatan aspek psikomotorik anak serta (2) mengidentifikasi bentuk intervensi terhadap pertumbuhan dan perkembangan aspek psikomotorik yang dilakukan oleh guru di sekolah

Kajian dilakukan di tingkat SD karena pendidikan dasar merupakan tahap yang sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan, baik yang meliputi kognisi, afeksi, maupun psikomotorik. Kajian ini hanya melihat aspek psikomotorik anak dalam kegiatan pendidikan di sekolah, terutama mengenai kebijakan yang terkait dengan aspek psikomotorik.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Taksonomi Bloom

Konsep tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik dikenal dengan istilah *taksonomi Bloom* (Benjamin Bloom, 1956), yaitu konsep mengenai tiga model hierarki untuk mengklasifikasi perkembangan pendidikan anak. *Pertama*, aspek kognitif merupakan aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolok ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif memiliki arti pengenalan, baik terhadap proses mengetahui maupun terhadap pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Aspek kognitif berhubungan erat dengan aspek: a) pengetahuan (*knowledge*); 2) pemahaman (*comprehension*); 3) penerapan (*application*); 4) analisis (*analysis*). 5) sintesis (*synthesis*); dan 6) evaluasi (*evaluation*). Aspek kognitif adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal.

Kedua, Aspek afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Menurut Bloom, tahap afeksi meliputi: 1) penerimaan (*receiving/attending*); 2) responsif (*responsive*); 3) penilaian (*value*); 3) organisasi (*organization*); dan 4) karakterisasi (*characterization*). Acuan domain ini adalah karakter dan daya hidup seseorang yang tecermin dalam tingkah laku (pribadi, sosial, dan emosi).

Ketiga, Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani serta keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan akan berkembang jika sering dipraktikkan dan dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotorik terdapat tujuh kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi: 1) peniruan; 2) kesiapan; 3) imitasi; 4) mekanisme; 5) respons; 6) adaptasi; dan 7) penciptaan.

Ketiga aspek yang dikemukakan di atas secara bersamaan digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, selama ini pembelajaran lebih banyak menekankan aspek kognitif dan seringkali mengabaikan aspek yang lain. Padahal, setiap anak tidak hanya mempunyai pengetahuan yang tinggi, tetapi juga pemahaman lain yang meliputi aspek afeksi dan psikomotorik. Oleh karena itu, ketiga aspek atau domain ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga aspek ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran anak mengevaluasi seberapa jauh materi pendidikan dapat diserap. Setiap aspek memiliki fungsi yang berbeda untuk mengetahui kemajuan proses belajar, kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh. Ketiga aspek atau domain ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebelum sampai pada aspek psikomotorik, anak akan mengalami tahap kognitif dan afektif. Pada tahap penerimaan, anak terlebih dahulu memiliki perhatian dalam memahami materi pembelajaran.

2. Psikomotorik Kasar dan Psikomotorik Halus

Ranah psikomotorik adalah ranah yang menitikberatkan kemampuan fisik dan kerja otot. Ranah ini membedakan antara ranah motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antaranggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar dari sebagian atau seluruh anggota tubuh. Gerakan ini dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan fisik anak. Gerakan yang menggunakan motorik kasar, antara lain berlari, melompat, dan menendang.

Motorik halus berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan rangsangan secara rutin, seperti bermain *puzzle*, menyusun balok, dan memasukkan benda ke dalam lubang sesuai dengan bentuknya. Kemampuan motorik halus setiap anak berbeda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatan. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh pembawaan dan stimulus yang didapatkan anak.

3. Perlakuan Ranah Psikomotorik di Beberapa Negara

Berbagai negara menggunakan cara berbeda dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik anak. Sebagai contoh, sistem pendidikan di Jepang, selain adanya pendidikan jasmani dan olahraga, juga mensyaratkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan membersihkan sekolah, misalnya menyapu kelas, mengelap meja dan kursi, membersihkan toilet dan kamar mandi, serta mengepel lantai. Kegiatan ini dilakukan setelah kelas selesai dan sebelum masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan *cleaning* ini melibatkan seluruh siswa dan guru dan dilakukan setiap hari secara berkelompok. Kegiatan ini tidak saja menyebabkan mereka bergerak dan menggunakan fisik mereka, tetapi juga mendidik anak untuk bisa saling bekerja sama dan menghargai pekerjaan sendiri dan pekerjaan orang lain. Contoh lain, seperti di SD di Australia, pada pembelajaran jam pertama diberi waktu pada anak untuk bergerak bebas di lingkungan sekolah. Untuk itu, di sekolah telah disiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menyalurkan energi gerak siswa, seperti memanjat, bergantung, dan belajar keseimbangan. Semua peralatan yang diperlukan telah disiapkan di berbagai sudut lingkungan sekolah. Kedua negara tersebut memberikan perhatian khusus pada perkembangan motorik siswanya. Pemerintah Singapura menerapkan penguatan aspek psikomotorik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Seluruh siswa diminta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, musik, dan seni. Di samping itu, Pemerintah Singapura juga memberikan perhatian yang besar kepada siswa yang mempunyai bakat olahraga dan mendorongnya agar berprestasi dan menjadi juara olahraga. Finlandia memberi perhatian khusus dengan membuat gerakan *The Finish School on the Move* pada tahun 2010–2012, yang berdampak pada pengurangan obesitas di kalangan remaja. Di Indonesia ditengarai bahwa pemberian kesempatan

terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik siswa, terutama siswa SD (dan SMP), kurang mendapatkan porsi yang cukup memadai. Ada mata pelajaran Olahraga, tetapi waktu yang disediakan hanya dua jam per minggu per kelas. Hal ini tentu kurang atau tidak bisa merangsang psikomotorik atau aspek *myelin* anak secara maksimal.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian *desk study*. Verifikasi dan validasi data dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan di Jakarta. Verifikasi data juga dilakukan di tingkat sekolah dengan teknik pengumpulan data dengan penyebaran angket kepada guru SD. Sampel sekolah hanya sekolah di Jakarta Pusat sebanyak 12 SD dengan kategori *baik* dan *sedang*. Pengumpulan data di tingkat sekolah dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan bentuk psikomotorik yang dilakukan di tingkat sekolah.

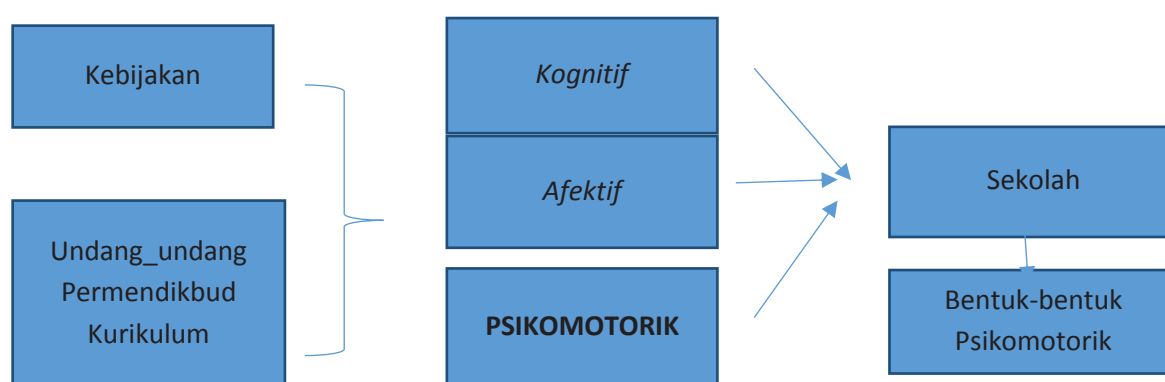


Diagram 1 Kerangka Berpikir

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil kajian, yang terdiri dari 2 bagian yaitu pertama, kajian terkait dengan regulasi yang terkait dengan aspek psikomotorik yang ada, baik yang secara implisit maupun secara eksplisit menyebutkan hal tersebut. Kedua, temuan di tingkat sekolah mengenai bagaimana guru mengimplementasikan bentuk-bentuk kegiatan dalam aktivitas pembelajarannya terkait dengan aspek psikomotorik.

1. Regulasi Terkait dengan Aspek Psikomotorik

Dari segi regulasi dan peraturan perundang-undangan, hasil kajian ini menemukan bahwa peraturan perundangan berikut yang menyebutkan

No.	Aspek	Temuan
1.	Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Bab IV Pasal 9 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah	Keselaran antara tubuh dan perkembangan jiwa merupakan usaha untuk membuat bangsa Indoensia sehat lahir dan batin
2.	Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minta, standar SKL, Kurikulum. Kurikulum wajib memuat ketrampilan/kejuruan, pendidikan jasmani dan olah raga.
3.	Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud	Kompetensi Inti 4 (Keterampilan), kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa SD sudah mencakup psikomotorik, namun tidak dijelaskan secara implisit. Contoh, siswa Kelas 1 KD nya

No.	Aspek	Temuan
	Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.	mempraktikkan, melafalkan, menyampaikan, mengemukakan, menggunakan, dan melisankan puisi. Untuk siswa Kelas 2 , KD meliputi: menirukan, melaporkan, menyajikan, membacakan, menyampaikan, menulis, mencerita-kan. Untuk siswa Kelas 3 , KD mencakup: menyaji-kan, meringkas, menjelaskan, dan memeragakan. Siswa Kelas 4 KD terdiri dari: menata, menyajikan, melaporkan, mengomunikasikan, melisankan, dan menyampaikan. Siswa Kelas 5 , KD yaitu: menyaji-kan (hasil identifikasi, klasifikasi informasi, ringkas-an dan konsep-konsep), memeragakan, memaparkan, melisankan pantun, dan membuat surat undangan. Sementara siswa Kelas 6 , KD nya meliputi: menyaji-kan (simpulan, hasil penggalian informasi, haasil pengaitan peristiwa), menyampai-kan (pidato, informasi, hasil membandingkan dan penjelasan), memaparkan informasi, mengubah teks puisi, dan mengisi teks formulir,
2.	Permendikbud Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SD/MI	Kompetensi Inti 4 (Keterampilan), KD-nya lebih banyak pada praktik yang masuk dalam ranah psikomotorik. KD untuk siswa Kelas 1, yaitu mempraktikkan gerak dasar lokomotorik, nonlokomotor, pola gerak dasar manipulatif, sikap tubuh, berbagai pola gerak dominan, berbagai pengenalan aktivitas air), dan menceritakan bagian tubuh. Siswa Kelas 2, KD-nya meliputi: mempraktikkan (variasi gerak dasar lokomotorik, nonlokomotorik, manipulatif, prosedur bergerak secara seimbang, pola gerak dominan, penggunaan variasi gerak dasar lokomotorik dan nonlokomotorik), menceritakan manfaat (pemanasan dan pendinginan, cara menjaga kebersihan lingkungan). Siswa Kelas 3, KD-nya terdiri atas: mempraktikkan (gerak kombinasi dasar lokomotorik, kombinasi nonlokomotorik, bergerak secara seimbang, kombinasi berbagai pola gerak dominan, penggunaan kombinsi gerak dasar semuanya, gerak dasar mengambang), menceritakan bentuk dan manfaat istirahat, perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. KD siswa Kelas 4 mencakup: mempraktikkan (variasi gerak dasar, variasi pola dasar jalan, lari, lompat dan lempar melalui permainan/olah raga, berbagai aktivitas kebugaran jasmani, variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan, variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan, gerak dasar satu gaya renang), mendemonstrasikan (cara menanggulangi jenis cedera, perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari). KD untuk siswa Kelas 5 meliputi: mempraktikkan kombinasi gerak, mempraktikkan (kombinasi gerak, gerak dasar, kombinasi gerak dasar jalan, lari, melompat dan lempar, variasi gerak dasar, aktivitas latihan, kombinasi pola gerak dominan, penggunaan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan, salah satu gaya renang), menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain, serta memaparkan bahaya merokok. KD siswa Kelas 6 terdiri atas: mempraktikkan (variasi dan kombinasi gerak, variasi dan kombinasi gerak dasar, gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar, latihan

No.	Aspek	Temuan
		kebugaran jasmani, rangkaian tiga pola gerak dominan, penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar, keterampilan salah satu gaya renang), dan memaparkan perlunya pemeliharaan kebersihan.
3.	Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
4.	Permendikbud Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Isi	Standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5.	Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Proses	Sikap: aktivitasnya mencakup: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan: aktivitasnya meliputi: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Keterampilan: aktivitasnya mencakup: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. Keterampilan aktivitas yang mengarah ke psikomotorik tidak terlihat jelas.
6.	Silabus	Silabus untuk Kelas 1, 2, dan 3 ada 8 tema yang terbagi dalam 2 semester. Kelas 4, 5, dan 6 ada 9 tema yang terbagi dalam 2 semester. Semester 1 ada 5 Tema dan semester 2 ada 4 tema. Dalam silabus terdapat mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, materi pelajaran, dan kegiatan pelajaran. Pada kegiatan pembelajaran sudah banyak kegiatan yang mengakomodasi psikomotorik, tetapi tidak dijelaskan secara implisit.
7.	(Contoh) KTSP SDS Muhammadiyah Pandes 2011/2012	Prinsip pengembangan kurikulum a. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; b. beragam dan terpadu; c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; d. relevan dengan kebutuhan kehidupan; e. menyeluruh dan berkesinambungan; f. belajar sepanjang hayat; g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum SD Muhammadiyah Pandes: 1. peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia; 2. pengembangan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;

No.	Aspek	Temuan
		3. keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; 4. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 5. tuntutan dunia kerja; 6. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks); 7. agama; 8. dinamika perkembangan global 9. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 10. kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 11. kesetaraan jender; 12. karakteristik satuan pendidikan Dijelaskan dalam KTSP standar kompetensi per kelas dan aktivitasnya terlihat mengarah ke psikomotorik, khususnya yang praktik.

Berdasarkan regulasi dan peraturan perundangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi siswa/lulusan yang diharapkan adalah 1) domain sikap, yaitu bahwa lulusan/siswa memiliki perilaku yang mencerminkan orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitar, baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain; 2) domain pengetahuan bahwa lulusan/siswa memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain; dan 3) ketrampilan, bahwa lulusan/siswa memiliki kemampuan dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan.

Berdasarkan tataran kebijakan, kompetensi siswa yang harus dimiliki adalah: 1) kompetensi inti sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya; 2) kompetensi inti sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara; 3) kompetensi inti pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar; serta 4) dalam kompetensi inti ketrampilan bahwa lulusan/siswa menunjukkan ketrampilan berpikir dan bertindak, yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif, dan dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.

2. Bentuk Kegiatan terkait dengan Ranah Psikomotorik

Bagian ini menguraikan implementasi kebijakan/regulasi terkait dengan ranah psikomotorik yang dilakukan di tingkat sekolah SD. Temuan pada bagian ini diawali dengan pemahaman guru mengenai psikomotorik, penerapan atau implementasi guru dalam menjalankan kegiatan terkait psikomotorik, penguatan ranah psikomotorik yang dilakukan oleh guru SD, serta bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru SD sampel.

a. Pemahaman Guru mengenai Ranah Psikomotorik

Tabel di bawah ini memperlihatkan pemahaman guru mengenai aspek psikomotorik yang berbeda, tetapi pada dasarnya secara prinsip memperlihatkan pemahaman guru berkaitan dengan aktivitas fisik (32%), keterampilan (14%), kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik (7%), berhubungan dengan perilaku gerak dan koordinasi jasmani (7,3), dan kemampuan bertindak siswa (6%).

Tabel Pemahaman Guru mengenai Aspek Psikomotorik Anak (N=164)

No.	Pemahaman	Frekuensi	%
1.	Kegiatan yang menekankan olah/aktivitas fisik	53	32,3
2.	Berhubungan dengan keterampilan	24	14,6
3.	Ketrampilan motorik	7	4,3
4.	Berhubungan dengan aktivitas fisik	12	7,3
5.	Kemampuan bertindak	10	6,1
6.	Berkaitan dengan aktivitas anak sehari	3	1,8
7.	Berkaitan dengan perilaku gerak dan koordinasi jasmani	12	7,3
8.	Keterampilan anak dalam menerima pelajaran	9	5,4
9.	Lain-lain	6	3,6

b. Pelaksanaan/Implementasi terkait dengan Ranah Psikomotorik

Guru dalam mengimplementasikan ranah kegiatan psikomotorik juga menunjukkan jenis yang bervariasi, tetapi secara umum mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan fisik. Kegiatan yang dilakukan guru terkait dengan psikomotorik adalah bahwa guru menggunakan berbagai cara/model untuk aktivitas psikomotorik pada waktu pembelajaran di kelas, langsung dipraktikkan secara terintegrasi (13%), sebagian guru (13%) melakukan kegiatan seni tari, menggambar, dan membuat pola, sebagian guru (11%) mengintegrasikannya dalam praktikum, diskusi kelompok dan membuat atau menghasilkan produk tertentu, dan banyak guru lain melakukan aktivitas, seperti baris-berbaris, piket, gerak lagu, dan membuat yel-yel (10%).

No.	Pelaksanaan	Frekuensi	%
1.	Berbagai model dalam pembelajaran	28	17,1
2.	Aktivitas fisik (seni, tari, pola, gambar)	21	12,8
3.	Praktikum, diskusi/tugas kelompok, membuat produk	19	11,6
4.	Pelajaran berhubungan dengan kegiatan/ketrampilan motorik atau fisik	9	5,5
5.	Olahraga/gerak tubuh/jasmani	14	8,5
6.	Kegiatan kreatif dengan gerak fisik	3	1,8
7.	Ice breaking, baris, piket, gerak lagu, tepuk	10	6,1
8.	Pengamatan/observasi kelas	8	4,9
9.	Belajar sambil bermain	8	12,5
10.	Lain-lain	15	9,2

c. Bentuk Penguatan Ranah Psikomotorik

No.	Penguatan	Frekuensi	%
1.	Memberi pujian kepada siswa	40	
2.	Olah tubuh dengan gerakan	15	
3.	Mengajak siswa aktif bergerak	8	

No.	Penguatan	Frekuensi	%
4.	Peragaan/contoh berulang baru praktik bersama	20	
5.	Menumbuhkan rasa percaya diri	5	
6.	Melalui aktivitas fisik beragam (gembira)	4	
7.	Memberi tugas ketrampilan dan latihan	16	
8.	Kegiatan di luar sekolah	5	
9.	Mendorong anak ikut ekstrakurikuler	4	
10.	Lainnya	20	

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil/temuan, ada beberapa hal yang menjadi simpulan kajian ini.

- Di tingkat regulasi/peraturan perundangan yang ada menunjukkan bahwa, baik SKL, SI, maupun KI-KD, yang termuat di dalam kurikulum telah tampak secara implisit dan eksplisit penerapan dan pengembangan aspek psikomotorik anak, tetapi tingkat implementasi tidak selalu diperhatikan secara tegas atau menjadi prioritas sehingga seringkali terabaikan.
- Di tingkat sekolah implementasi dari kebijakan/peraturan perundangan terlihat jelas. Dari pemahaman guru mengenai aspek psikomotorik, pelaksanaannya dalam kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, juga penguatan yang dilakukan di kelas dan sekolah menunjukkan bahwa sekolah berusaha untuk mencapai terpenuhinya ranah ini. Namun, kajian ini belum menunjukkan seberapa besar upaya ini dilakukan oleh guru dan seberapa besar kontribusinya pada kesehatan/kebugaran siswa.
- Lokasi sekolah dan sarana sekolah juga memengaruhi aspek psikomotorik siswa dalam kegiatan/aktivitas fisik sekolah.

2. Rekomendasi

Berikut ini beberapa opsi atau saran kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk penguatan ranah psikomotorik siswa SD.

- Di tingkat regulasi perlu diperlihatkan penekanan untuk memperjelas bahwa yang dimaksudkan adalah ranah psikomotorik.
- Perlu kebijakan yang menghidupkan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin di tingkat sekolah, seperti senam SKJ, sehingga menjadi gerakan yang dilakukan secara serentak dan sistematis.
- Perlu kebijakan yang memperlakukan kegiatan psikomotorik sama pentingnya dengan mata pelajaran. Selain itu, perlu dilakukan penambahan sarpras, misalnya ketersediaan alat atau fasilitas olahraga, misalnya tersedianya balok titian, siku gantung tekuk, dan bak pasir yang juga menjadi bahan pertimbangan penilaian akreditasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Kemenkes, 2019. *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Jakarta: Balitbang, Kemenkes.

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, olahraga, dan Kesehatan SD/MI

Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Isi

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Proses

Silabus Contoh KTSP SDS Muhammadiyah Pandes 2011/2012

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Bab IV Pasal 9 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

WHO, 2018. *Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030: More Active People For a Healthier World.*

ANALISIS HUBUNGAN ROMBONGAN BELAJAR DAN SISWA PER ROMBEL DENGAN MUTU LULUSAN

Novrian Satria Perdana, Meni Handayani, Joko Purnama
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Adanya ketentuan terkait dengan batasan jumlah rombongan belajar (rombel) dan siswa per rombel menyebabkan beberapa daerah mengajukan permohonan kelonggaran pengaturan jumlah rombel dan siswa per rombel. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak pengaturan rombel dan siswa per rombel terhadap mutu lulusan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis korelasi rombel dan siswa per rombel dengan mutu lulusan; (2) menganalisis titik optimum rombel dan siswa per rombel dikaitkan dengan mutu lulusan; dan (3) menganalisis capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) terhadap jumlah siswa per rombel. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini meliputi seluruh SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri dan swasta, di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain (1) korelasi yang tertinggi untuk jenjang SMP diperoleh pada jumlah rombel sesuai dengan ketentuan dan siswa per rombel lebih dari ketentuan permendikbud. Untuk jenjang SMA, IPA, IPS, dan Bahasa, dan SMK nilai korelasi tertinggi diperoleh pada jumlah rombel dan siswa per rombel sesuai dengan ketentuan permendikbud; (2) titik optimum jumlah rombel SMP adalah 30 dengan jumlah siswa per rombel adalah 36, untuk jenjang SMA titik optimum jumlah rombel sebesar 33 dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 36 siswa, dan titik optimum rombel SMK adalah 54 dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 35 siswa; (3) capaian skor akreditasi capaian 8 standar lebih tinggi pada sekolah yang jumlah siswa per rombel lebih dari 32 siswa di SMP dan lebih dari 36 siswa di SMA.

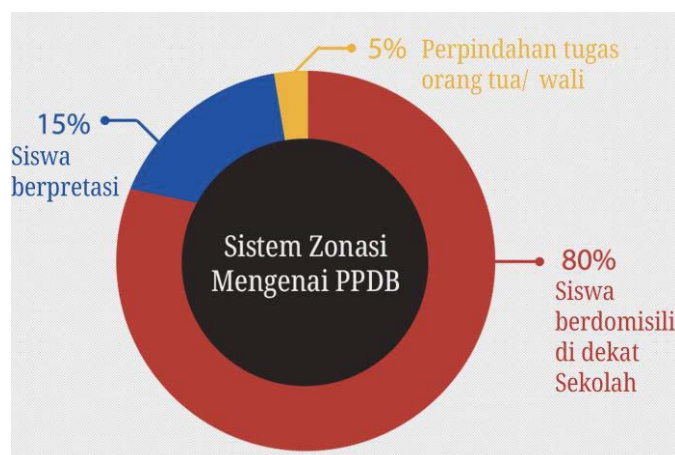
Kata kunci: siswa per rombel, jumlah rombel, mutu lulusan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah terus mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk peningkatan akses layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 (setelah amandemen) ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka membangun pemerataan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah kebijakan zonasi pendidikan. Zonasi pendidikan diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, peraturan PPDB zonasi

diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan kini telah diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik.



Gambar 1 Persentase PPDB Sistem Zonasi

Sumber: Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 80% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombel pada setiap sekolah. Meskipun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 15% dan paling banyak 5% karena alasan khusus (lihat Gambar 1).

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga mengatur rasio jumlah peserta didik dalam satu rombel. Kebijakan pengaturan jumlah peserta didik terutama bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ketentuan baru ini telah selaras dengan Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Di dalam permendikbud tersebut juga ditetapkan batasan jumlah rombel pada setiap satuan pendidikan. Selengkapnya, ketentuan tersebut dinyatakan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Ketentuan Jumlah Rombel dan Siswa per Rombel

Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah Maksimal Siswa per Rombel	Jumlah Minimal Siswa per Rombel
SD/ MI	6 – 24	28	20
SMP/ MTs	3 – 33	32	20
SMA/ MA	3 - 36	36	20
SMK	3 – 72	36	15
SDLB	6	5	-
SMPLB	3	8	-
SMALB	3	8	-

Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Adanya pemberlakuan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, dan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menyebabkan beberapa daerah mengajukan permohonan kelonggaran pengaturan jumlah rombel dan siswa per rombel. Daerah yang mengajukan kelonggaran di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Timur, Kota Bekasi, Makassar, Bitung, Kab. Badung, dan

Kab. Tangerang. Beberapa daerah yang mengirimkan surat permohonan kelonggaran tersebut sebagian besar terjadi karena belum meratanya pembangunan sekolah di daerahnya sehingga berdampak pada kuota siswa yang diterima di sekolah. Kebijakan zonasi pendidikan melalui PPDB zonasi sebenarnya sudah menitikberatkan pendekatan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Banyaknya daerah yang mengajukan permohonan kelonggaran rombongan melebihi Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengindikasikan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Hal ini terjadi karena sebaran sekolah yang belum merata dan masih adanya stigma masyarakat tentang sekolah favorit. Jika hal ini terus dibiarkan, akan terjadi penumpukan siswa pada suatu sekolah dan berujung pada penutupan beberapa sekolah karena kekurangan siswa. Selain itu, banyaknya siswa per rombongan dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan berujung pada hasil belajar. Untuk menindaklanjuti hal ini perlu dilakukan kajian tentang ukuran rombongan dan siswa per rombongan serta dampaknya terhadap hasil belajar, capaian akreditasi sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengaturan ukuran rombongan dan siswa per rombongan dalam upaya peningkatan mutu lulusan dalam suatu sistem zonasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis korelasi rombongan dan siswa per rombongan dengan mutu lulusan;
2. menganalisis titik optimum rombongan dan siswa per rombongan dikaitkan dengan mutu lulusan;
3. menganalisis capaian delapan SNP terhadap jumlah siswa per rombongan.

B.KAJIAN PUSTAKA

1. Zonasi Pendidikan

Istilah *zonasi* mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, dan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Pada dasarnya zonasi itu merupakan pengembangan dari rayonisasi ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan. Zonasi lebih menekankan pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi pendidikan fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan pendidikan di Indonesia.

McCulloch dan Crook (2008) menyatakan bahwa zonasi sekolah merupakan proses mengidentifikasi wilayah geografis untuk tujuan penempatan anak usia sekolah yang tinggal di daerah itu (daerah sekitar lokasi sekolah) ke sekolah umum dengan beberapa tujuan sosial yang didukung kekuatan elit dan politik. Dengan demikian, penerapan zonasi sekolah merupakan pilihan politik untuk mengatur anak usia sekolah yang tinggal di suatu wilayah harus dan dapat bersekolah di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

2. Rombongan Belajar dan Siswa per Rombongan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Mengenai rombongan, beberapa pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) masih menjadikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kab./Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 sebagai acuan penetapan standar rasio peserta didik

per rombel. Padahal, ketentuan mengenai rasio jumlah peserta didik/rombel ini telah mengalami perubahan. Pada 2017 telah diterbitkan Permendikbud Nomor 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya juga mengatur rasio jumlah peserta didik dalam satu rombel. Ketentuan baru ini selaras dengan Lampiran Permendikbud Nomor 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penelitian mengenai jumlah siswa per rombel pernah dilakukan di Amerika Serikat. Suatu eksperimen dibuat dengan membandingkan kelas kecil dan kelas regular, yang rerata jumlah siswanya adalah 15 orang dan 22 orang per rombel kelas dengan pengajar masing-masing berjumlah satu orang guru. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pengurangan jumlah siswa per rombel dapat meningkatkan prestasi siswa setara dengan menambahkan tiga bulan sekolah pada masa empat tahun ke depan (STAR, 2002 dalam Whitehurst dan Chingos, 2011). Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi AS untuk mengurangi jumlah siswanya per rombel dan menerbitkan kebijakan pengurangan jumlah siswa per kelas (class size reduction/CSR).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mathew (2011) juga melihat adanya faktor positif dalam ukuran rombel yang kecil. Ia menyatakan bahwa jumlah rombel yang lebih sedikit akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar. Penelitian lain yang dilakukan Koca (2014) mengenai jumlah rasio siswa dan kelas juga menemukan tiadanya dampak signifikan terhadap prestasi siswa. Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa banyak faktor yang menentukan prestasi siswa dan yang paling utama adalah jumlah guru yang mengajar pada suatu kelas. Apabila jumlah guru masih sama, sedangkan jumlah siswa dikurangi, artinya guru harus mengajar di kelas dua kali lebih banyak dan akan menyebabkan guru kelelahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian disampaikan dengan cara deskriptif untuk data tipologi sekolah dan analisis kuadran berdasarkan jumlah rombel, siswa dalam rombel, UNBK dan capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Acuan mutu lainnya seperti capaian setiap standar pada SNP dan UNBK 2019 dihubungkan dengan jumlah siswa dalam rombel. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampling jenuh. Penarikan sampling jenuh adalah dimana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Seluruh SMP, SMA, dan SMK diambil datanya untuk diketahui tipologi sekolahnya berdasarkan jumlah rombel dan indikator mutu, antara lain nilai UNBK dan nilai delapan standar pada SNP. Setelah itu, dicari hubungan antara jumlah rombel dan indikator mutunya.

Penelitian ini dilanjutkan dengan analisis untuk mengetahui hubungan antara jumlah rombel dan siswa per rombel dengan mutu lulusan (UNBK 2019) menggunakan analisis korelasi pearson. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk menemukan titik optimum pada jumlah rombel dan siswa per rombel yang dikaitkan dengan mutu lulusan. Yang terakhir, analisis korelasi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara siswa per rombel dan capaian setiap standar pada SNP.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi Rombongan Belajar dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan

a. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 2 Korelasi Rombel dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan SMP

KUADRAN		Jumlah Rombel		
		< 3	3 - 33	> 33
Rasio Siswa/Rombel	>32	n/a	r = 0.439	r = -0.006
			sig. = 0.000	sig. = 0.946
			n = 3,642	n = 118
	20 - 32	r = 0.274	r = 0.268	r = -0.190
		sig. = 0.322	sig. = 0.000	sig. = 0.116
		n = 15	n = 16,701	n = 70
	<20	r = -0.148	r = 0.253	n/a
		sig. = 0.135	sig. = 0.000	
		n = 103	n = 3,669	

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sekolah dengan rasio siswa per rombel lebih dari 32 dan jumlah rombel sesuai dengan ketentuan permendikbud memiliki korelasi yang signifikan terhadap UNBK 2019 dengan nilai r tertinggi, yaitu 0,439. Artinya, sebanyak 3.642 SMP pada kategori tersebut memiliki korelasi yang tinggi terhadap hasil UNBK yang diraih saat itu. Untuk capaian sekolah yang terbanyak dengan korelasi yang signifikan diperoleh oleh sekolah dengan jumlah rombel dan siswa per rombel sesuai dengan ketentuan ($r=0,268$).

b. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

1) Jurusan IPA

Tabel 3 Korelasi Rombel dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan SMA IPA

KUADRAN		Jumlah Rombel		
		< 3	3 - 36	> 36
Rasio Siswa/Rombel	< 20	r = -0.043	r = -0.087	n/a
		sig. = 0.840	sig. = 0.001	
		n = 25	n = 1511	
	20 - 36	r = -0.356	r = 0.245	r = 0.318
		sig. = 0.557	sig. = 0.000	sig. = 0.002
		n = 5	n = 8426	n = 96
	> 36	n/a	r = -0.171	r = -0.041
			sig. = 0.001	sig. = 0.754
			n = 369	n = 62

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat korelasi yang signifikan antara rasio siswa/rombel sesuai dengan ketentuan (20--36) dan jumlah rombel yang sesuai dengan (3--36) hasil UNBK. Yang memiliki nilai korelasi $r=0,245$.

2) Jurusan IPS

Tabel 4 Korelasi Rombel dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan SMA IPS

KUADRAN		Jumlah Rombel		
		< 3	3 - 36	> 36
Rasio Siswa/Rombel	< 20	r = -0.179	r = -0.075	n/a
		sig. = 0.217	sig. = 0.001	
		n = 49	n = 1880	
	20 - 36	r = -0.415	r = 0.247	r = 0.305
		sig. = 0.354	sig. = 0.000	sig. = 0.002
		n = 7	n = 8812	n = 98
	> 36	n/a	r = -0.193	r = -0.020
			sig. = 0.000	sig. = 0.878
			n = 416	n = 62

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat korelasi yang signifikan antara rasio siswa/rombel sesuai dengan ketentuan (20--36) dan jumlah rombel yang sesuai (3--36) dengan hasil UNBK. Yang memiliki nilai korelasi $r=0,247$.

3) Jurusan Bahasa

Tabel 5 Korelasi Rombel dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan SMA Bahasa

KUADRAN		Jumlah Rombel		
		< 3	3 - 36	> 36
Rasio Siswa/Rombel	< 20	n/a	r = 0.024	n/a
			sig. = 0.866	
			n = 50	
	20 - 36	n/a	r = 0.379	r = 0.020
			sig. = 0.000	sig. = 0.903
			n = 662	n = 41
	> 36	n/a	r = 0.294	r = -0.382
			sig. = 0.073	sig. = 0.096
			n = 38	n = 20

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat korelasi yang signifikan antara rasio siswa/rombel sesuai dengan ketentuan (20--36) dan jumlah rombel yang sesuai (3--36) dengan hasil UNBK. Yang memiliki nilai korelasi $r=0,379$.

c. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Tabel 6 Korelasi Rombel dan Siswa per Rombel dengan Mutu Lulusan SMK

KUADRAN		Jumlah Rombel		
		< 3	3 - 72	> 72
Rasio Siswa/Rombel	>36	n/a	r = -0.210 sig. = 0.000 n = 405	r = -0.660 sig. = 0.340 n = 4
	15 - 36	r = -0.159 sig. = 0.302 n = 44	r = 0.236 sig. = 0.000 n = 11,017	r = 0.014 sig. = 0.948 n = 24
	<15	r = -0.033 sig. = 0.748 n = 99	r = 0.017 sig. = 0.448 n = 1,888	n/a

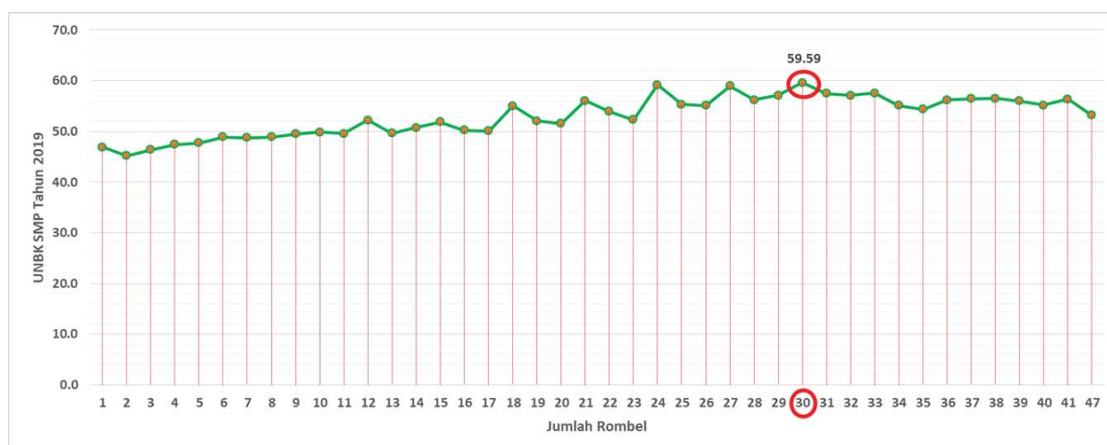
Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019), Puspendik (2018), PDSPK (2019)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat korelasi yang signifikan antara rasio siswa/rombel sesuai dengan ketentuan (15--36) dan jumlah rombel yang sesuai (3--72) dengan hasil UNBK. Yang memiliki nilai korelasi $r=0,236$.

2. Titik Optimum Jumlah Rombel dan Siswa/Rombel Dikaitkan dengan Mutu Lulusan

Bagian ini membahas titik optimum jumlah rombel dan siswa/rombel dikaitkan dengan mutu lulusan (UNBK tahun 2019) untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk jenjang SD tidak dianalisis karena belum ada data mutu lulusan yang berskala nasional.

a. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

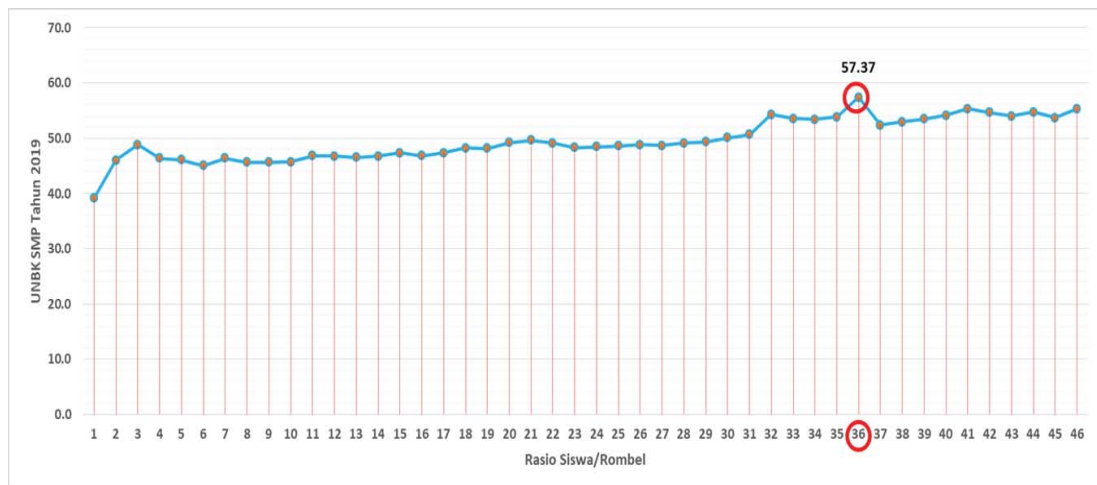


Gambar 2 Titik Optimum Jumlah Rombel terhadap UNBK, SMP Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 13 di atas, untuk rata-rata rombel pada kondisi mutu lulusan SMP yang tertinggi (rata-rata UNBK) diperoleh jumlah rombel sebesar 30 dengan nilai UNBK sebesar 59,59. Untuk jumlah siswa/rombel diperoleh nilai optimum sebesar 36 siswa per rombel dengan nilai UNBK sebesar 57,37 (Gambar 14). Berdasarkan Gambar 13 dan 14, titik optimum terletak pada ukuran rombel sesuai dengan ketentuan permendikbud, tetapi untuk jumlah siswa/rombel tidak sesuai dengan ketentuan dalam permendikbud. Hal ini disebabkan oleh pada kuadran 1 dengan jumlah siswa/rombel dan jumlah rombel

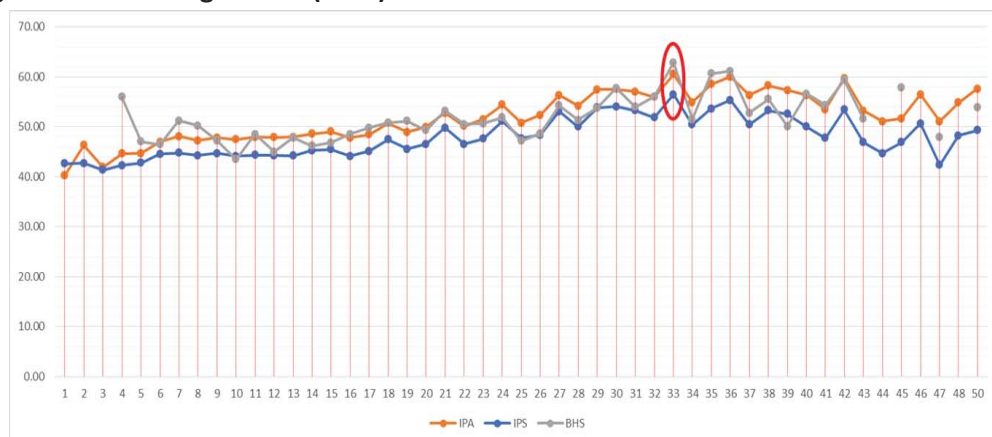
di atas ketentuan dalam permendikbud memiliki hasil rata-rata UNBK tertinggi (SMP negeri=57 dan SMP swasta=56,1) dibandingkan dengan kuadran lainnya.



Gambar 3 Titik Optimum Jumlah Siswa per Rombel terhadap UNBK, SMP Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

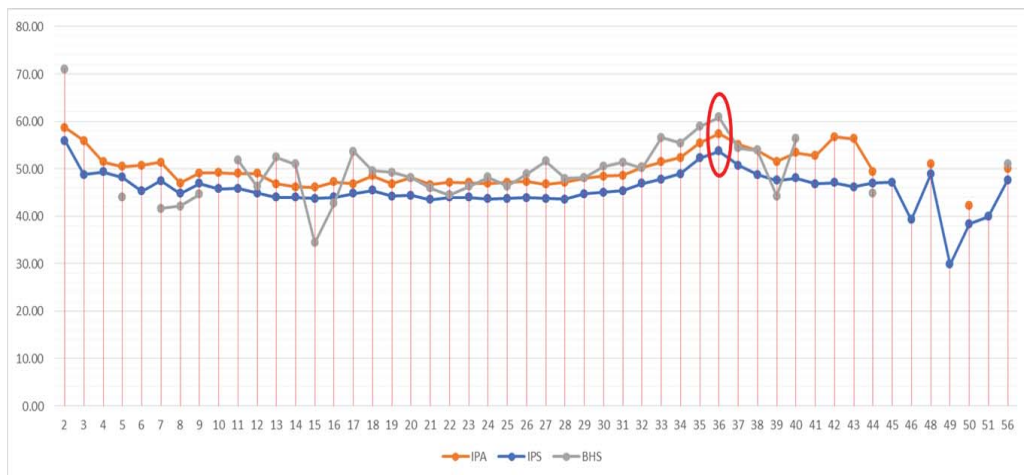
b. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)



Gambar 4 Titik Optimum Jumlah Rombel terhadap UNBK, Tingkat SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 15 di atas, untuk rata-rata rombongan pada kondisi mutu lulusan SMA yang tertinggi (rata-rata UNBK) diperoleh jumlah rombongan sebesar 33. Untuk jumlah siswa/rombongan (Gambar 16) diperoleh nilai optimum sebesar 36 siswa per rombongan. Sama halnya dengan SMP, titik optimum terletak pada ukuran rombongan dan siswa/rombongan melebihi ketentuan dalam permendikbud disebabkan oleh pada kuadran 1 dengan jumlah siswa/rombongan dan jumlah rombongan di atas ketentuan dalam permendikbud memiliki hasil rata-rata UNBK tertinggi (SMA IPA=58,97; SMA IPS=53,13; dan SMA Bahasa= 55,04) dibandingkan dengan kuadran lainnya. Berdasarkan analisis hasil akreditasi, kuadran 1 memiliki rata-rata nilai akreditasi total yang tertinggi (93,79) dibandingkan dengan kuadran lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jepsen (2015) yang menyimpulkan jumlah siswa per rombongan dan jumlah rombongan yang tidak banyak dapat menghasilkan kualitas lulusan lebih baik.

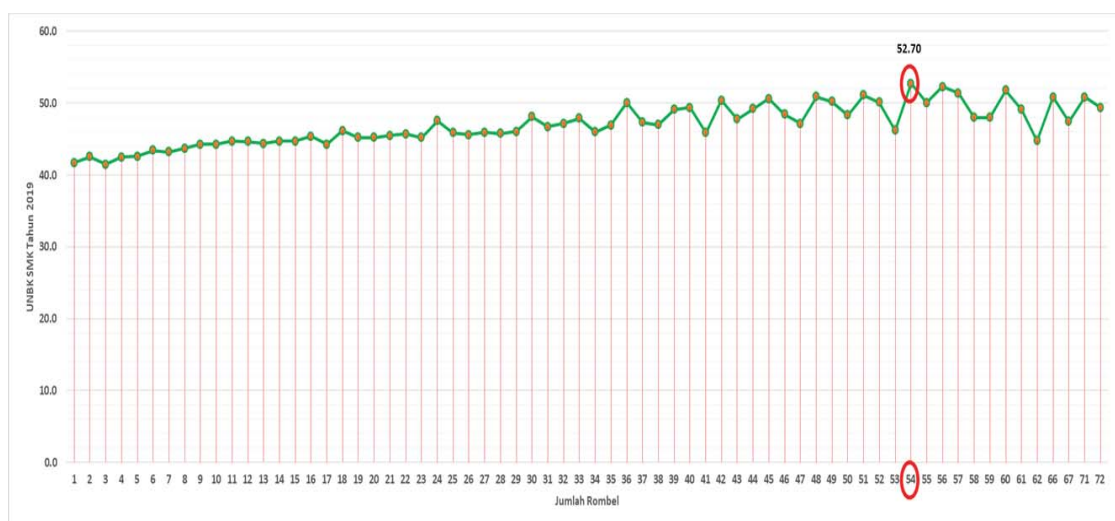


Gambar 5 Titik Optimum Jumlah Siswa per Rombel terhadap UNBK, Tingkat SMA (IPA, IPS, Bahasa) Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

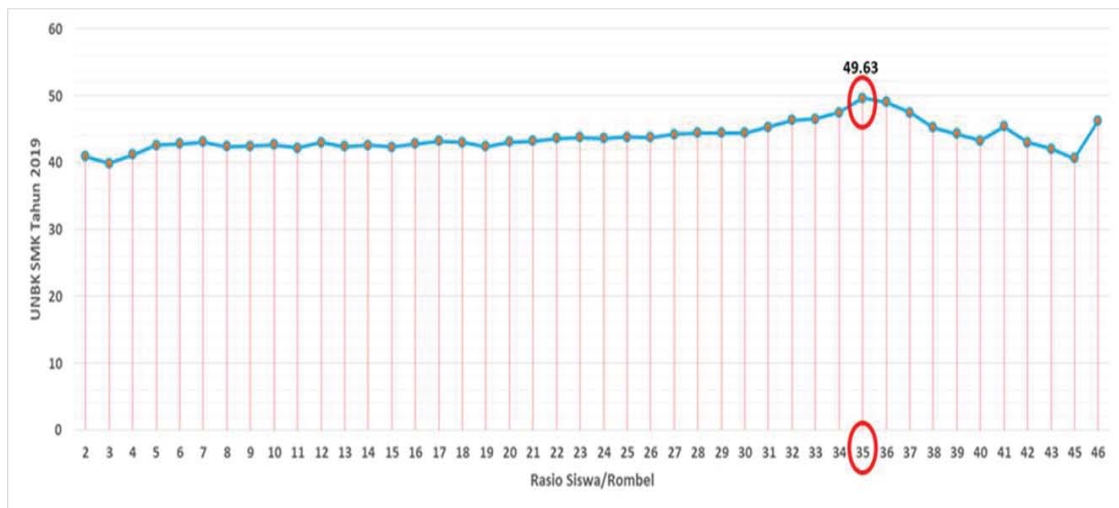
c. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Berdasarkan Gambar 17 di bawah, untuk rata-rata rombongan belajar pada kondisi mutu lulusan SMK yang tertinggi (rata-rata UNBK) diperoleh jumlah rombongan belajar sebesar 54 dengan nilai UNBK sebesar 52,70. Untuk jumlah siswa/rombongan belajar diperoleh nilai optimum sebesar 35 siswa per rombongan belajar dengan nilai UNBK sebesar 49,63 (Gambar 18). Berdasarkan Gambar 17 dan 18, titik optimum terletak pada ukuran rombongan belajar dan jumlah siswa/rombongan belajar telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.



Gambar 6 Titik Optimum Jumlah Rombel terhadap UNBK, Tingkat SMK Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)



Gambar 7 Titik Optimum Jumlah Siswa per Rombel terhadap UNBK, Tingkat SMK Tahun 2019

Sumber: Dapodikdasmen dan UNBK, 2019 (diolah)

Temuan mengenai titik optimum siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyimpulkan pada kelas yang berisi siswa banyak dapat menimbulkan masalah kebisingan jika siswa tidak terkendali. Berdasarkan penelitian Yusuf dkk. (2016), kebisingan yang berlebihan adalah sikap perilaku paling umum yang terkait dengan kelas besar. Bukan tidak terduga bahwa perhatian atau konsentrasi siswa akan terganggu di ruang kelas besar yang kebisingannya merupakan kejadian biasa. Ini adalah fakta yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Finn dan Achilles (1999) dalam Yusuf dkk. (2016) bahwa kelas kecil meningkatkan perilaku belajar serta menghasilkan lebih sedikit gangguan kelas dan masalah disiplin. Ukuran kelas memengaruhi pembelajaran siswa, perilaku, dan sikap umum di sekolah menengah di Abeokuta, Ogun, Nigeria, yang memiliki dampak signifikan pada variasi sikap siswa terhadap studi. Hal ini memengaruhi perhatian siswa paling kuat, kemudian ketepatan waktu, motivasi, dan partisipasi, tetapi tidak pada tingkat partisipasi dan menanyakan. Jika rombongan belajar ditambah, otomatis menambah jumlah guru yang berefek pada biaya. Menurut Chingos (2012), dengan meningkatkan gaji guru dalam jumlah besar akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan. Artinya, peningkatan jumlah rombongan belajar sangat berpengaruh terhadap peningkatan biaya pendidikan.

3. Capaian Jumlah Siswa/Rombongan Belajar dengan Pencapaian Delapan SNP

Setelah dilakukan pengujian korelasi, dapat diketahui seberapa erat hubungan antara rasio siswa/rombongan belajar dengan pencapaian SNP pada satuan pendidikan SMA. Secara umum tanpa mengelompokkan rasio siswa/rombongan belajar menurut standar yang ditetapkan, rasio siswa/rombongan belajar berkorelasi positif dan signifikan terhadap pencapaian delapan SNP. Hal ini menunjukkan, semakin besar rasio siswa/rombongan belajar akan diikuti dengan meningkatkan capaian terhadap delapan SNP.

a. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tabel 7 Perbandingan Skor Delapan SNP Hasil Akreditasi Menurut Siswa/Rombel, SMP 2019

Standar	Rasio Siswa/Rombel	N	Mean	St.Dev
Isi	≤ 32	24,153	84.31	11.33
	> 32	2,872	89.89	8.55
Proses	≤ 32	24,153	82.24	11.53
	> 32	2,872	87.68	8.83
SKL	≤ 32	24,153	79.11	12.62
	> 32	2,872	86.41	10.24
PTK	≤ 32	24,153	75.40	12.40
	> 32	2,872	82.55	10.91
Sarpras	≤ 32	24,153	78.24	13.17
	> 32	2,872	85.49	11.01
Pengelolaan	≤ 32	24,153	82.20	11.63
	> 32	2,872	88.54	9.02
Pembiayaan	≤ 32	24,153	86.57	10.49
	> 32	2,872	91.05	8.20
Penilaian	≤ 32	24,153	83.53	10.65
	> 32	2,872	88.92	8.25

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019) dan BAN S/M (2019)

Untuk tingkat SMP rata-rata nilai akreditasi per delapan SNP, capaian nilai mean pada rasio siswa per rombel di atas ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (> 32) memiliki capaian delapan SNP yang lebih baik dibandingkan yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, untuk capaian standar deviasi yang tertinggi (13,17) diperoleh pada standar sarana dan prasarana dengan kondisi jumlah siswa per rombel sesuai dengan ketentuan. Artinya, komponen sarana dan prasarana sangat berperan besar dalam menunjang proses pembelajaran di SMP.

b. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tabel 8 Perbandingan Skor Delapan SNP Hasil Akreditasi Menurut Siswa/Rombel, SMA 2019

Standar	Rasio Siswa/Rombel	N	Mean	St.Dev
Isi	≤ 36	9,930	86.95	10.90
	> 36	410	90.68	10.21
Proses	≤ 36	9,930	84.98	11.19
	> 36	410	88.63	9.70
SKL	≤ 36	9,930	83.48	11.95
	> 36	410	89.24	10.82
PTK	≤ 36	9,930	79.77	11.51
	> 36	410	85.07	10.76
Sarpras	≤ 36	9,930	79.33	14.27
	> 36	410	85.33	13.09
Pengelolaan	≤ 36	9,930	85.08	11.82
	> 36	410	89.70	10.69
Pembiayaan	≤ 36	9,930	87.81	10.72
	> 36	410	91.65	8.43
Penilaian	≤ 36	9,930	86.53	10.25
	> 36	410	90.40	8.90

Sumber: Diolah dari Dapodikdasmen (2019) dan BAN S/M (2019)

Ketika dibagi menurut kesesuaian dengan standar rasio siswa/rombel, satuan pendidikan SMA yang memiliki rasio siswa/rombel sesuai dengan standar (≤ 36) memiliki korelasi positif dan signifikan dengan capaian kedelapan SNP. Hal ini menunjukkan, semakin besar rasio siswa/rombel akan diikuti dengan meningkatkan capaian delapan SNP. Hal sebaliknya terjadi pada satuan pendidikan SMA yang memiliki rasio siswa/rombel di atas standar (> 36), yang seluruhnya berkorelasi negatif dan signifikan dengan capaian kedelapan SNP. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMA yang memiliki rasio siswa/rombel di atas standar, semakin besar rasio siswa/rombelnya akan diikuti dengan menurunnya capaian delapan SNP. Untuk tingkat SMA rata-rata nilai akreditasi per delapan SNP, capaian nilai *mean* pada rasio siswa per rombel di atas ketentuan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (> 32) memiliki capaian delapan SNP yang lebih baik dibandingkan yang sesuai dengan ketentuan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sekunder, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dari korelasi rombel dan siswa/rombel terhadap mutu lulusan, korelasi positif terjadi pada semua jenjang dan semua jurusan pada sekolah dengan kategori jumlah rombel dan rasio siswa/rombel sesuai dengan ketentuan permendikbud dengan nilai r sebesar 0.268 (SMP), 0.245 (SMA IPA), 0.247 (SMA IPS), 0.379 (SMA Bahasa), dan 0.236 (SMK). Dapat dikatakan bahwa sekolah pada kategori ini kemungkinan besar adalah sekolah yang telah memenuhi SNP dengan standar proses yang baik dan akreditasi tinggi.
- Titik optimum jumlah rombel terhadap mutu lulusan jenjang SMP adalah 30 dan titik optimum untuk jumlah siswa/rombel adalah 36. Untuk jenjang SMA titik optimum jumlah rombel sebesar 33 dan siswa per rombel sebanyak 36 orang. Untuk titik optimum rombel SMK adalah 54 dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 35 orang.
- Capaian skor akreditasi capaian delapan standar lebih tinggi pada sekolah yang jumlah siswa per rombelnya > 32 di SMP dan > 36 di SMA. Kemungkinan sekolah tersebut adalah sekolah terbaik di daerahnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- Sekolah dapat menambah siswa dalam ruang kelas dengan memperhatikan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar (kapasitas ruang gerak ± 2 m²/siswa) dan memiliki guru yang berkualitas (capaian standar PTK tinggi) di sekolah tersebut
- Penambahan jumlah siswa/rombel dapat dilakukan pada sekolah yang memiliki hasil belajar di atas rata-rata nasional dan memiliki jumlah ruang kelas dan guru yang mencukupi.
- Untuk sekolah yang jumlah ruang kelasnya terbatas dibandingkan dengan jumlah rombel, untuk sementara dapat dilakukan belajar double shift dengan jumlah siswa sesuai dengan standar per rombel dengan kuantitas dan kualitas guru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. 2019. *Data Standar Nasional Pendidikan tahun 2014—2018*.

Christopher Jepsen 2015. *Class Size: Does It Matter for Student Achievement?* University College Dublin, Ireland, and IZA, Germany.

Chingos, M.M. 2012. "Class Size and Student Outcomes: Research and Policy Implications". *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(2):411–438.

- Glass Gene, V., Smith Mary Lee, and University of Colorado. 1980. "Meta-Analysis of Research on Class Size and Its Relationship to Attitudes and Instruction". *American Educational Research Journal Winter*. Vol. 17, No. 4.
- In-Soo Shin & Jae Young Chung. 2009. "Class Size and Student Achievement in the United States: A Metaanalysis". *KEDI Journal of Educational Policy*. pp. 3-19.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. *Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018*.
- McCulloch, G., & D. Crook. 2008. *The Routledge International Encyclopedia of Education*
- Owoeye, Joseph Sunday & Yara, dan Philias Olatunde. 2011. "Class Size and Academic Achievement of Secondary School in Ekiti State, Nigeria". *Asian Social Science Journal*. Vol. 7, No. 6; June 2011.
- Pusat Penilaian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *UNBK 2019*
- Pusat Penilaian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Indeks Integritas Ujian Nasional Tahun 2018*
- Rivkin, S. G., E.A. Hanushek, and J. F. Kain. 2005. "Teachers, Schools, and Academic Achievement". *Econometrica*, Vol. 73, No. 2 (March, 2005), 417–458
- Stroub, K., & M. Richards 2013. "From Resegregation to Reintegration Trends in the Racial/Ethnic Segregation of Metropolitan Public Schools, 1993--2009". *American Educational Research Journal*. Diakses dari <http://aer.sagepub.eom/content/50/3/497.short>
- Savasci, Havva Sebile & Ekber Tomul 2013. "The Relationship between Educational Resources of School and Academic Achievement". *International Education Studies*, Vol. 6, No. 4; 2013.
- Stroub, K., & M. Richards 2013. "From resegregation to reintegration trends in the racial/ethnic segregation of metropolitan public schools, 1993--2009". *American Educational Research Journal*. <http://aer.sagepub.eom/content/50/3/497.short>
- Yusuf, Taofeek Ayotunde; C.A. Onifade, and O.S. Bello. 2016. "Impact of Class Size on Learning, Behavioral and General Attitudes of Students in Secondary Schools in Abeokuta, Ogun State Nigeria," *Journal of Research Initiatives*: Vol. 2: Iss. 1, Article 12. Available at:<http://digitalcommons.uncfsu.edu/jri/vol2/iss1/12>

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019	
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 4	Panel No: 1, 2, 3
Ruang	: Padjadjaran 3	
Waktu	: 16.00 – 17.45 WIB	
Judul Penelitian	:	
	1. Kajian Mengulang di SD Kelas Awal	
	2. Penguatan Ranah Psikomotorik Siswa Sekolah Dasar	
	3. Analisis Hubungan Rombongan Belajar dan Rasio Siswa/Rombongan Belajar dengan Mutu Kelulusan	
Penyaji	:	
	1. Ir. Siswantari, M. Sc	
	2. Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D	
	3. Novrian S. Perdana, ME	
Pembahas	: Dr. Ir. Budi Susetyo, MS	
Moderator	: Irawan Santoso Suryo Basuki, M. Sc	
Notulis	: Ika Hijriani, S. Psi	

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	1. Ir. Siswantari, M. Sc Tingginya jumlah siswa yang mengulang kelas dan DO di SD mengakibatkan kurang efisiennya pengelolaan pendidikan dan menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran. Anak yang tinggal kelas kecenderungan melanjutkan pendidikannya turun drastis (kajian data IFLS dikombinasikan dengan data Podes) Tujuan penelitian: Untuk memformulasikan kebijakan tentang upaya mengatasi mengulang kelas dan putus sekolah (DO) di SD dengan cara menganalisis penyebab, solusi dan capaiannya yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dan dinas pendidikan kabupaten. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data: DKT, wawancara dan studi dokumen. Analisis data sekunder memperlihatkan putus sekolah cenderung disebabkan oleh mengulang kelas, korelasi memperlihatkan hubungan yang signifikan. Hasil analisis memperlihatkan 10 variabel lain berkorelasi signifikan dengan mengulang kelas, 7 di antaranya juga signifikan dengan DO. Hasil DKT memperlihatkan, penyebab mengulang kelas dan DO dapat dikelompokkan menjadi 2 dua, internal (di sekolah) dan eksternal (di luar sekolah). Penyebab internal: - kurangnya kualifikasi dan kompetensi guru - rendahnya pendidikan guru dan banyaknya guru honorer - keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, sumber air yang cukup dan toilet. Penyebab eksternal:

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		a. rendahnya status sosial ekonomi orangtua siswa dengan indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Rendahnya pendidikan mengakibatkan persepsi terhadap pendidikan juga rendah; b. faktor budaya, menikah muda untuk perempuan di 3 kabupaten sampel. Di 2 kabupaten lain ditemukan budaya Mauludan dan Pesta Kematian c. sulitnya akses menuju sekolah, untuk daerah yang terpencil. Temuan: a. Setelah mengulang kelas, siswa tidak tertarik lagi untuk bersekolah b. Orangtua/keluarga kurang perhatian c. Upaya yang telah dilakukan terutama oleh sekolah di antaranya adalah melakukan pendekatan ke orangtua siswa dan memberikan pelajaran tambahan, untuk siswa yang rawan mengulang kelas dan putus sekolah. Rekomendasi: a. Guru: - guru yang belum sesuai kualifikasi, hendaknya dinas kab/kota menyediakan beasiswa untuk meningkatkan pendidikan. - Yang belum sesuai kualifikasi diberikan pelatihan substansi dan metode mengajar - Kekurangan guru: pengadaan melalui P3K, program GGD jangan terlalu cepat diputus b. Eksternal: - menyediakan pendidikan keluarga c. Internal dan Eksternal: Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui pendekatan PDIA yang diadopsi dari INOVASI. 2. Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D Dalam tumbuh kembang anak, ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun dalam proses pembelajaran, sering terjadi perhatian lebih banyak diberikan pada aspek kognitif, dan kemudian pada aspek afektif; dan yang terakhir aspek psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah segala hal yang membutuhkan gerakan otot. (Bloom) Aspek psikomotorik ini cukup penting khususnya di kalangan usia anak-anak, karena: a. Aktivitas fisik anak masih rendah (terutama kalangan usia 10-14 tahun) b. Tingkat kebugaran anak masih rendah (data Kemendikbud) c. Pemenuhan target SDGs masih jauh → kurangnya aktivitas fisik menyebabkan tingginya timbulnya penyakit. d. Revolusi Industri 4.0: gaya hidup yang serba <i>digitalized</i> menyebabkan kurangnya aktivitas fisik. Tujuan dari kajian ini adalah: a. Menganalisis kebijakan terkait aspek psikomotorik b. Mengidentifikasi bentuk intervensi tumbuh kembang aspek psikomotorik yang dilakukan guru di sekolah. c. Mengetahui kondisi psikomotorik siswa di SD Metode dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan <i>desk study</i> dan <i>focus group discussion</i> (FGD) dalam pengumpulan data, dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan ranah kebijakan:

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		a. UU Sisdiknas: setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai bakat, minat, standar SKL, Kurikulum. b. Tidak ada pedoman secara khusus untuk mencapai standar KD (yang umumnya berupa aktivitas/kata kerja). Hasil kajian menunjukkan bahwa, dari regulasi yang ada, menunjukkan bahwa unsur pembelajaran yang mengandung aspek psikomotorik terkandung dalam regulasi tersebut, baik tersirat maupun tersurat secara jelas. Beberapa bentuk pembelajaran terkait pengembangan dan penguatan aspek psikomotorik anak, yaitu melalui jalur pendidikan jasmani dan olah raga, jalur kegiatan ekstra kurikuler, dan pengembangan atau penguatan yang dilakukan karena inisiatif guru. Ada banyak kegiatan terkait aspek psikomotorik di tingkat sekolah, namun belum ada ukuran yang jelas tentang capaian aspek ini pada siswa. Saran kebijakan: a. Membuat pedoman yang jelas untuk menerjemahkan aturan perundang-undangan. b. Menghidupkan kegiatan SKJ c. Memperlakukan kegiatan psikomotorik sama dengan mapel yang lain d. Diperlukan sistem penilaian khusus tentang aspek ini e. Pemerintah perlu melengkapi fasilitas sekolah f. Dibangun pusat keguatan jasmani Semakin bagus sekolah, semakin banyak aktivitas fisiknya. 3. Novrian S. Perdana, ME Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan adalah kebijakan zonasi pendidikan dan kebijakan pengaturan jumlah rombel dan siswa per rombel. Adanya ketentuan terkait batasan jumlah rombel dan siswa per rombel menyebabkan beberapa daerah mengajukan permohonan kelonggaran pengaturan jumlah rombongan belajar dan siswa per rombel. Banyak sekolah yang melanggar aturan rombel, bahkan ada yang memberlakukan <i>double shift</i>. Aturan jumlah rombel diatur pada Permendikbud No 22 Tahun 2016. Tujuan umum penelitian: memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengaturan ukuran rombongan belajar dan siswa per rombel dalam upaya peningkatan mutu lulusan. Tujuan khusus penelitian: a. menganalisis korelasi rombel dan siswa per rombel dengan mutu lulusan b. menganalisis titik optimum rombel dan siswa per rombel dikaitkan dengan mutu lulusan c. menganalisis capaian 8 Standar Nasional Pendidikan terhadap jumlah siswa per rombel. Berdasarkan temuan pada penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa semakin kecil ukuran rombel maka akan semakin baik. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini meliputi seluruh SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Pada tingkat SMP, SMA, dan SMK dilakukan analisis tipologi dan korelasi dengan mutu (UNBK dan 8 SNP). Sedangkan pada tingkat SD hanya dilakukan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		analisis tipologi siswa/rombel dan jumlah rombel karena belum ada indikator mutu lulusan secara nasional. Tingkat SD, terdapat 68% pencapaian sekolah dengan jumlah rombel dan rasio siswa/rombel yang sesuai dengan SNP. Tingkat SMP, terdapat 65,8% pencapaian sekolah dengan jumlah rombel dan rasio siswa/rombel yang sesuai dengan SNP. Tingkat SMA, terdapat 76,14% pencapaian sekolah dengan jumlah rombel dan rasio siswa/rombel yang sesuai dengan SNP. Tingkat SMP, terdapat 80% pencapaian sekolah dengan jumlah rombel dan rasio siswa/rombel yang sesuai dengan SNP. Kesimpulan: - korelasi yang tertinggi untuk jenjang SMP diperoleh pada jumlah rombel sesuai ketentuan dan siswa per rombel lebih dari ketentuan Permendikbud. Untuk jenjang SMA IPA, IPS, dan Bahasa, dan SMK nilai korelasi tertinggi diperoleh pada jumlah rombel dan siswa per rombel sesuai ketentuan Permendikbud. - titik optimum jumlah rombel SMP adalah 30 dengan jumlah siswa per rombel adalah 36, untuk jenjang SMA titik optimum jumlah rombel sebesar 33 dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 36 siswa, dan titik optimum rombel SMK adalah 54 dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 35 siswa, - Capaian skor akreditasi capaian 8 standar lebih tinggi pada sekolah yang jumlah siswa per rombel nya lebih dari 32 siswa di SMP dan lebih dari 36 siswa di SMA. Hal ini kemungkinan sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah terbaik di daerahnya. Opsi kebijakan: - Sekolah dapat menambah siswa dalam ruang kelas dan menambah jumlah guru. - Penambahan jumlah siswa per rombel dapat dilakukan pada sekolah dengan memperhatikan capaian mutu sekolah
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Dr. Ir. Budi Susetyo, MS - Latar belakang: motivasi penelitian ini. Isu DO dan mengulang adalah isu lama. Setelah krisis 1998 banyak fenomena DO dan mengulang kelas, sehingga banyak terobosan-terobosan dari pemerintah, misalnya pemberian bantuan dana BOS, dll. Apakah angka tadi yang disajikan bahwa ada sekitar 342 ribu (2018-2019) siswa mengulang dan sekitar 33 ribu siswa DO di jenjang SD, jika dikonversi ke persentase, akan masih sangat kecil. Ternyata isu ini masih ada. - Dengan terobosan dari kebijakan dana BOS, ternyata masih ada putus sekolah. Untuk siswa mengulang semestinya tidak terjadi, karena masih ada remedial, tetapi masih tetap terjadi. - Asumsi saya, variabel-variabel angka DO dan mengulang lebih kepada variabel mikro di tingkat rumah tangga dan sekolah. - Tapi kalau variabel makro yang diambil, mungkin ada korelasinya, namun yang menjadi bahan pembahasan saya, apakah betul siswa DO dan mengulang ada hubungan dengan ketersediaan toilet.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		• Dari korelasi variabel-variabel ini mungkin ada yang signifikan, namun sulit diinterpretasikan. Misal angka korelasi yang negatif, seperti Kepsek yang berpengalaman lebih dari 20 tahun, seperti apa menerjemahkannya? • Interpretasi angka mengulang (0.09) akan mengurangi angka putus sekolah sebesar 1 poin. Penjelasan ini tidak bisa dibenarkan karena koefisien korelasi hanya menjelaskan keeratan hubungan, bukan pengaruh. • Aspek budaya tidak ditarik dari general, namun dari yang bersangkutan. Sehingga tidak ditebak-tebak. • Upaya menanggulangi lebih menekankan pada faktor eksternal, barangkali harus dipilah yang kira-kira memang relevan dengan angka putus sekolah dan mengulang. • Untuk faktor internal, perlu hati-hati, perlu ada referensi, memang benar ada korelasi misalnya dengan tingkat pendidikan kepala sekolah. • Variabel yang diambil lebih banyak menjelaskan ke mutu, yang menyebabkan mengulang dan putus sekolah, bukan kepada akses pendidikan. • Rekomendasi yang terkait isu mengulang dan putus sekolah, misalnya tentang guru honorer dan kualifikasi, apakah memang relevan dengan angka mengulang dan putus sekolah. • Banyak terkait peraturan, sehingga saya tidak bisa banyak berkomentar. Tidak ada data yang bisa dikomentari. Permasalahannya hanya di aspek implementasi. • Hasil penelitian Mas Novrian adalah penelitian fenomena, bukan berbentuk desain. Jika dilakukan desain penelitian secara eksperimental misal dengan input yang sama (mutu guru dan sarpras sama) namun dengan perbedaan jumlah siswa/rombel, maka benar bisa menjawab bahwa rombel mempengaruhi lulusan. • Kelemahan penelitian sejenis ini jika tidak dilakukan dengan eksperimental, maka kita tidak bisa mengendalikan variabel-variabel lainnya yang tidak berhubungan. Akan tetapi, dengan melakukan analisis secara kuadran, bisa lebih mengurangi bias. Tanggapan Mas Novrian: • Pada pengolahan data tadinya kami juga ingin melihat secara kualitas guru yang sama misalnya, namun kami agak sulit mengeneralisir ke unit sekolah. • Kami akan menindaklanjuti melalui penelitian lanjutan Tanggapan Bu Sis :

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Ketika kami memilih kabupaten, memang diambil kabupaten yang termasuk angka DO dan mengulanginya tinggi. Demikian pula dengan pemilihan sekolah. - Ketika FGD mengundang Kepsek dan guru sekolah. Kami meminta data tambahan dari sekolah ybs selain dari data Dapodik. Data di lapangan dan data Dapodik memang tidak selalu cocok. Namun memang menggambarkan angka mengulang dan putus sekolah yang tinggi. Kami memang memiliki keterbatasan untuk mengundang orangtua murid. - Kami akan mempelajari kembali masukannya untuk perbaikan laporan kami. <i>Closing Statement Pembahas:</i> - Analisis kualitatif sebaiknya ditambahkan, mudah-mudahan jawaban dari sekolah memang betul-betul menjadi penyebab siswa mengulang dan putus sekolah. - Lebih dipertajam, peraturan mana yang harus ada, yang mungkin belum ada. - Perlu menjelaskan analisa bahwa mutu guru di kota besar sudah bagus, sehingga jumlah siswa/rombel yang tinggi bisa menghasilkan mutu lulusan yang baik.
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	1. Ibu Rasita: - Terkait dnegan pertanyaan pembahas mengenai korelasi toilet dengan angka mengulang dan putus sekolah, untuk kawasan di Sumba, hal itu sangat relevan, karena kondisi siswa yang memang sulit air, sehingga harus membawa air dari rumah. Belum lagi untuk anak perempuan yang baru dapat haid, yang malu jika harus ke sekolah dan kekurangan air. - Jika menggunakan pendekatan PDIA harus bisa menyentuh akar permasalahannya apa, apakah benar harus menambah guru. - Di NTT, ada <i>concern</i> tentang akurasi data Dapodik, misal di salah satu kabupaten di Sumba, ada perbedaan jumlah siswa yang sangat jauh sekali. - Bagaimana pihak seperti kami (INOVASI) bisa mengakses data Dapodik untuk dapat dicocokkan dengan data di lapangan. - Pertanyaan mengenai anak DO, tidak cukup ke Kepsek dan guru, tetapi juga ke anak itu sendiri, ternyata konsep menstruasi yang pertama bisa jadi sangat berbeda untuk komunitas tertentu yang menyebabkan orangtua menjadi sangat protektif sehingga menyebabkan siswa DO. Tanggapan Bu Sis: - Menambah jumlah guru itu hasil dari data DKT, karena ada guru yang harus mengajar rangkap sementara siswanya banyak. Oleh karena itu saya menyarankan untuk menambah jumlah guru sesuai jumlah rombel.

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		- Sumber air dan toilet, dari salah satu referensi yang saya baca, penyebab DO itu diantaranya adalah faktor sekolah yang menyenangkan. Salah satu indikator sekolah yang menyenangkan diantaranya adalah kecukupan sumber air dan toilet. 2. Ibu Etty Sof: • Terkait menemui orangtua dan ada pelajaran tambahan, saya belum membayangkan mekanismenya seperti apa. Karena perlu usaha dan biaya dari sekolah. • Mungkin faktor lainnya yang menyulitkan anak sehingga harus mengulang atau putus sekolah diantaranya kesulitan pelajaran Calistung. Tanggapan Bu Sis: • Terkait Calistung, awalnya isunya tentang mengulang kelas di SD kelas awal. Putus sekolah itu ada kaitannya dengan mengulang kelas. Mengulang kelas di kelas awal salah satunya kesulitan di Calistung. • Karena banyaknya orangtua siswa yang secara ekonomi tergolong kurang, sehingga harus pihak sekolah yang mendatangi orangtua ke rumah. Pada saat FGD, tidak pihak sekolah tidak mengeluhkan soal biaya. 3. Ibu Etty Sof: Bolehkah kita tidak melarang anak TK belajar Calistung, sedangkan di SD nya tuntutan pelajarannya tinggi di SD? Tanggapan Bu Sis: Mestinya cara mengajar Calistung di TK tidak seperti anak-anak SD 4. Ibu Etty Sof: Bagaimana rekomendasinya? Apakah akan mempertajam Penjas atau bagaimana? Tanggapan Ibu Ning: • Pada tahap ini kami hanya mefokuskan pada kebijakan. • Terkait saran, kebijakan yang dilihat sebagian besar dari kurikulumnya. Kami memang memilih peraturan-peraturan yang memang ada kaitannya dengan psikomotorik. • Ketika menyusun rekomendasi, tidak mungkin menyarankan untuk merubah kurikulum, sehingga sarannya terkait pedoman yang lebih rinci. Implementasi di tingkat sekolah sangat bervariasi, sehingga dalam rekomendasi, kami memberi saran untuk diadakan kegiatan yang dilakukan secara serentak di sekolah-sekolah (misalnya seperti SKJ). • Ini hanya kajian literatur, sehingga tim tidak turun ke lapangan. Namun cukup sulit, jika tim tidak melakukan observasi, sehingga kami hanya melihat di sekolah-sekolah kawasan Jakarta. 5. Ibu Rasita: Apakah diperlukan kebijakan yang sangat <i>rigid</i> di tingkat nasional terkait jumlah rombongan belajar yang ideal? Di studi <i>multigrade</i> yang kami lakukan, satu sekolah kurang dari 60 siswa. Sekolah-sekolah seperti ini seringkali terbentur

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		denegan dana BOS, karena berhubungan dengan jumlah siswa. Bagaimana konteks rombel ini bisa lebih fleksibel di tingkat lokal. Tanggapan Mas Novrian: • Pemerintah perlu menetapkan batasan siswa/rombel untuk efektifitas proses pembelajaran. • Saran kami, mengenai batas minimal siswa/rombel sarannya mengikuti kondisi di daerah masing-masing. 6. Ibu Etty Sof: Bisakah saya mengatakan bahwa jika jumlah siswa/rombel maka mutu lulusan semakin baik, itu adalah hipotesis negatif? Dalam penelitian saya, mengurangi jumlah siswa/kelas ini sangat sedikit pengaruhnya terhadap mutu hasil pembelajaran. Tanggapan Mas Novrian: Hipotesis kami: dengan kondisi rombel dan siswa/rombel yang sesuai Permendikbud akan berdampak positif terhadap mutu lulusan.
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 18.00 WIB.

PENDIDIKAN MULTIKULTUR

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Mikka Wildha Nurrochsyam, Genardi Atmadiredja, Irawan Santoso Suryo Basuki
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi dua dari lima karakter utama PPK (Penguatan Pendidikan Karakter), yaitu religiositas dan nasionalis dalam kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan dalam masyarakat multikultur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter religiositas dan nasionalis belum menjadi kesadaran sebagai sikap yang memadai bagi PPK dalam masyarakat multikultur. Karakter religiositas diimplementasikan secara simbolik, belum menyentuh spirit agama untuk membangun semangat kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta upaya untuk membangun peradaban manusia yang maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakter nasionalis yang diimplementasikan cenderung bersifat normatif-simbolik berupa praktik cinta negara dengan melaksanakan hapalan Pancasila, baris-berbaris, upacara bendera, dan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Implementasi karakter nasionalis belum membangun spirit patriotisme yang dapat meningkatkan keterampilan untuk menghadapi tantangan abad ke-21 dalam mempersiapkan peserta didik ke ranah persaingan global.

Kata kunci: pendidikan, karakter, multikultur, etika

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multi-etnik, multi-aksara, dan multi-bahasa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 1028 etnik yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia ada sekitar 746 bahasa daerah (Mu’jizah, 2014). Dalam situasi masyarakat yang plural tersebut pendidikan diperlukan sebagai proses pembentukan pribadi karena pendidikan berfungsi sebagai kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pendidikan juga mempunyai peran menyiapkan secara terencana pembekalan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki sikap menghargai hak-hak sosial (budaya) dan politik warga lain yang berbeda etnik, agama, dan ras. Pendidikan juga bisa memperkuat kepribadian peserta didik dan memiliki *civic virtue* atau disebut sebagai moral kemasyarakatan dan *civic culture* (budaya kemasyarakatan) (Gabriel Almond, Sidney Verba, 1963). Kemajemukan, selain merupakan berkah, tetapi juga sekaligus berpeluang menimbulkan berbagai persoalan jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi negara Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang menimbulkan persoalan dalam hubungan sosial. Religiositas tidak hanya dimaknai sebatas kesalehan dalam beribadah, tetapi ideologi untuk mengeksklusi dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok dengan aliran keagamaan yang berbeda (Pamungkas, 2015).

Azyumardi Azra mengatakan bahwa konflik sosial bernuansa agama dapat merebak, tidak hanya antarkelompok agama, tetapi juga intraagama (Azra, 2015). Religiositas yang menjadi ideologis akan sulit

menerima pandangan lain di luarnya, sehingga sering terjadi benturan ideologi atas nama agama dan kepercayaan yang kemudian bisa memicu konflik dalam masyarakat. Situasi sosial dan budaya dalam masyarakat multikultur akan memengaruhi pertimbangan keputusan untuk implementasi pendidikan karakter peserta didik.

Dalam masyarakat majemuk nilai nasionalisme menjadi sangat penting karena menjadi perekat keberagaman. Nasionalisme menjadi kekuatan integrasi sebuah masyarakat dalam negara, tanpa nasionalisme relasi sosial akan menjadi renggang. Nasionalisme menimbulkan spirit cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Suatu bangsa tanpa nasionalisme sudah pasti akan runtuh.

Nasionalisme pada era globalisasi saat ini menghadapi tantangan. Dalam masyarakat global terdapat dua hal yang bersifat paradoks. Di satu sisi globalisasi ditandai dengan menguatnya nilai-nilai lokal yang heterogen dan melemahnya identitas nasional. Menguatnya nilai-nilai lokal memperkuat identitas kelompok tertentu dan mengancam identitas kelompok yang lain. Menguatnya nilai-nilai lokal ini seringkali menimbulkan konflik, berbagai bentuk kekerasan antaetnik seringkali dipicu oleh problem suku bangsa, seperti konflik Sambas antara etnik Madura dan Dayak serta konflik Mesuji antara etnik Bali dan penduduk lokal.

Di sisi lain, globalisasi telah mengakibatkan homogenisasi budaya karena nilai-nilai global menjadi acuan untuk mengatur tata kehidupan. Globalisasi telah memunculkan warga negara kosmopolitan yang digambarkan sebagai model ekspresi dari orang-orang yang bersifat multikulturalis pascanasional dari komunitas politik, yang mempertahankan lokus nasional dan juga memfasilitasi lokus global, regional, dan perkotaan dari status hukum dan keanggotaan politik (Horvath, 2009). Dalam masyarakat global, jika problem sosial budaya diselesaikan dengan berorientasi pada kesatuan nasional, apakah masih relevan?

Dalam masyarakat multikultur setiap orang dituntut untuk bersikap sesuai dengan etika tentang tingkah laku yang baik. Situasi masyarakat Indonesia yang plural memerlukan nilai karakter utama, seperti komunikatif, solidaritas, kerukunan, persaudaraan keadilan nilai-nilai lain yang menyatukan, sehingga keutuhan masyarakat Indonesia menjadi solid. Transformasi nilai-nilai karakter utama dalam masyarakat multikultur itu akan menjadi efektif kalau dilaksanakan melalui pendidikan. Permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah menerapkan karakter utama religiusitas dan nasionalis dalam masyarakat multikultur melalui program penguatan pendidikan karakter (PPK) di satuan pendidikan?

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi dua dari lima karakter utama PPK, religiusitas dan nasionalis, dalam kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan dalam masyarakat multikultur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk materi dan implementasi pendidikan karakter yang efektif dalam pembelajaran yang didasarkan atas kondisi sosial dan budaya masyarakat yang plural serta menguatkan karakter peserta didik dalam masyarakat multikultur melalui tematik pengajaran agama dan sains. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi model bagi pembelajaran pendidikan karakter dalam masyarakat plural dengan intensitas relasi sosial yang cenderung disharmonis di beberapa wilayah Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter mempunyai pengertian sebagai gerakan

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dinyatakan lebih lanjut bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan penjabaran dari perwujudan dari lima nilai utama yang saling berkaitan, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong-royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Kalau dicermati lebih lanjut, nilai PPK itu merupakan nilai-nilai etis yang diperlukan untuk membangun karakter generasi muda. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dimaksudkan untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini akan dilihat nilai karakter dalam perspektif etika. *Etika* merupakan salah satu cabang filsafat yang mempertanyakan persoalan baik dan buruknya suatu perbuatan. Etika berbeda dengan ajaran moral yang mengacu pada ajaran, -wejangan, -khotbah, patokan, himpunan peraturan, dan ketentuan, baik lisan maupun tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia berakhlak baik. Menurut Franz Magnis-Suseno, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Ajaran moral mengajarkan bagaimana kita harus hidup, sedangkan etika berkaitan dengan mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimanakah kita bisa mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Magnis-Suseno F., 1987). Penelitian ini memperlihatkan bagaimana etika itu diterapkan dalam hubungan sosial dalam masyarakat yang plural. Dengan perkataan lain, bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat yang plural.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam masyarakat multikultur perlu dipilih secara cermat dan seimbang. Nilai karakter itu tidak hitam putih, tetapi bersifat netral, tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Nilai-nilai pendidikan karakter tidak bersifat monologal terlepas dari konteks etika masyarakat multikultur, tetapi selalu melekat pada konteks masyarakatnya. Tanpa acuan etika, sikap nasionalisme dapat mengarah pada ideologi yang ekstrem. Salah satu contoh adalah ultranasionalisme yang ditunjukkan oleh Nazisme di Jerman. Nazisme melakukan semacam pendidikan yang dinamakan *Hitler Youth*, yakni sebuah organisasi yang dirancang oleh Adolf Hitler untuk pendidikan dan pelatihan untuk anak laki-laki di dalam menyampaikan prinsip Nazi yang visinya mengenai ras unggul. Hal ini memunculkan ultranasionalisme hingga Nazi melakukan tindak kejahatan di luar batas kemanusiaan dengan melakukan *holocaust* terhadap orang Yahudi yang kekejamannya mengguncang jiwa.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966--1998), Indonesia juga pernah mengalami nasionalisme ekstrem. Pada waktu itu penguasa mengangkat kembali paham integralistik yang digulirkan oleh Mr. Supomo pada 29 Mei 1945. Paham integralistik ini telah membuka peluang untuk memberikan kekuasaan yang besar pada penguasa negara. Pada dasarnya paham ini bersifat totaliter. Dalam praktiknya setiap

upaya warga masyarakat yang mengkritisi kebijakan pemerintah selalu dipandang dengan kecurigaan dan dianggap melawan negara. Pancasila sebagai dasar negara seringkali menjadi dasar untuk membungkam suara kritis warganya. Setiap orang yang bersikap kritis dianggap anti-Pancasila. Pada masa itu timbul pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap Pancasila, sehingga bertentangan dengan rasionalitas.

Demikian pula pilihan nilai religiositas akan menjadi dilema ketika diterapkan secara monologal, yang tidak melihat konteks etika sosial dan budaya masyarakat multikultur. Nilai religiositas yang diajarkan secara fundamental dan tekstual dapat mengakibatkan intoleransi. Seperti peristiwa yang berkembang pada saat ini, adanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang menginginkan pencantuman ungkapan *dengan menjalankan syariat Islam* pada sila pertama Pancasila dan *sistem khilafah* di Indonesia. Tuntutan ini jelas bertentangan dengan sikap dan etika dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Pemahaman rasionalitas terhadap religiositas, sebagaimana pemikiran Jurgen Habermas (dalam Borradori, 2003) tentang problem kekerasan fundamentalisme ideologis, kekerasan merupakan kendala komunikasi. Hubungan antara fundamentalisme dan terorisme dimediasi oleh kekerasan sebagai patologi komunikasi. Dalam hal ini, solusi atas terorisme tampaknya dapat diatasi dengan jalan komunikasi karena dalam komunikasi akan terjadi dialog rasional. Oleh karena itu, religiositas harus diikuti oleh nalar, tanpa rasionalitas akan menghasilkan teror dan kekerasan. Sebagaimana kondisi sosial masyarakat kita, fundamentalisme religiositas seringkali memunculkan teror dan kekerasan. Berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan fundamentalisme agama seyogianya dapat menjadi pelajaran berharga dalam pendidikan karakter, yaitu bahwa implementasi nilai religiositas kepada peserta didik harus seimbang dengan implementasi nilai komunikasi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoretis, **pertama** adalah pendekatan kesadaran moral dari Lawrence Kohlberg (1927–1987) dan teori Jurgen Habermas tentang etika diskursus. Kohlberg adalah seorang filsuf moral dan pakar psikologi moral dari Amerika, dikenal dengan teorinya tentang tahap perkembangan moral yang disebut dengan “teori kognitif developmental”. Kohlberg membuat struktur dan bentuk umum pemikiran moral yang dapat didefinisikan secara sendiri-sendiri, terlepas dari isi khas keputusan tindakan moral tertentu. Struktur itu berisi tiga tingkat pemikiran moral yang berbeda dan setiap tingkat dibedakan lagi atas dua tahap yang saling berkaitan.

Tingkat pertama adalah prakonvensional yang terdiri atas dua tahap: Tahap 1 adalah orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tidak dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Tahap 2 adalah perbuatan yang benar yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Tingkat kedua adalah tingkat konvensional yang terdiri atas dua tahap: Tahap 3 merupakan orientasi “anak manis”, yakni perilaku yang baik dan menyenangkan atau yang membantu orang lain. Tahap 4 adalah orientasi pada otoritas, yakni peraturan yang pasti dan pemeliharaan tata aturan sosial. Tingkat ketiga, adalah tingkat pascakonvensional yang terdiri atas dua tahap: Tahap 5 merupakan orientasi kontrak sosial, yakni perbuatan yang benar, yakni hak bersama dan ukuran yang telah diuji secara kritis dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Tahap 6 adalah tahap orientasi, yakni keputusan suara hati dan prinsip etis yang dipilih sendiri dan mengacu pada pemahaman logis, menyeluruh, universalitas, dan konsistensi.

Penelitian ini menggunakan teori perkembangan kesadaran Lawrence untuk mengetahui pertimbangan moral peserta didik terhadap dilema nilai-nilai karakter nasionalisme, kemandirian, dan religiositas dalam konteks sosial dan budaya masyarakat multikultur. Jawaban dari peserta didik itu ditempatkan ke dalam struktur tingkat kesadaran moral dan berada pada level keberapa dari enam level kesadaran moral. Hasil

pemeringkatan pilihan moral peserta didik akan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan karakter dalam masyarakat yang plural.

Teori kedua adalah teori etika diskursus dari Jurgen Habermas. Etika diskursus merupakan prosedur yang mempersoalkan "apa yang adil". Etika diskursus pendasaran etika yang dapat memberikan jawaban yang siap pakai atas pertanyaan moral yang diajukan, tetapi cara untuk memastikan kembalinya arti norma moral yang menjadi pertanyaan (Magnis-Suseno F., 2004). Etika diskursus hendak menjawab persoalan "apa yang adil" karena keadilan mempunyai sifat universal. Etika diskursus tidak berhenti pada tahap berlakunya norma universal, tetapi keadilan perlu dijustifikasi dalam diskursus rasional di antara partisipan dengan saling pengertian untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Habermas, ada dua prinsip dalam etika diskursus. Prinsip pertama adalah universalitas (U), "*All affected can accept the consequences and the side effect its general observance can be anticipated to have for the satisfaction of everyone's interest.*" Prinsip ini menyatakan bahwa pertimbangan moral yang saya kehendaki akan berlaku benar kalau dikehendaki oleh semua orang.

Kedua adalah prinsip diskursus (D): "*Only those norms can claim to be valid that meet (or could meet) with the approval of all affected in their capacity as participants in a practical discourse*" (Habermas, 2007). Etika diskursus tidak berhenti pada tahap (U), tetapi kebenaran universal, lalu didiskusikan untuk mencapai konsensus atau saling pengertian. Dengan demikian, hanya norma yang telah dipastikan dalam diskursus praktis dan semua yang bersangkutan terlibat dan dipastikan kebenarannya

Dalam penelitian ini teori etika diskursus Jurgen Habermas akan digunakan untuk menjembatani persoalan yang sifatnya dilematis terhadap problem yang terkait dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang multikultur. Dalam etika diskursus peran dialog atau komunikasi sangat penting karena kebenaran suatu nilai tidak ditentukan secara subjektif oleh pemikiran seseorang atau kelompok saja, tetapi kebenaran itu ditemukan ketika dilakukan dalam dialog.

Ketiga, pendekatan multikulturalisme. Budaya yang beragam sering disebut dengan istilah *keragaman budaya*, *pluralitas budaya*, atau *multikultur*. Dalam *Ensiklopedi Encarta*, *multikultural* adalah: "*of more than one culture relating to, consisting of, or participating in the cultures of different countries, ethnic groups, or religions*". Artinya, lebih dari satu budaya berhubungan dengan berbagai budaya di negara lain, kelompok etnik, atau agama yang berbeda. Tampak jelas bahwa masyarakat multikultural berasal dari terminologi masyarakat Barat, yaitu terkait dengan masyarakat multietnik dari negara yang berbeda-beda dan tinggal dalam suatu negara.

Bhiku Parekh dalam *Rethinking Multiculturalism* menggambarkan masyarakat multikultural sebagai keanekaragaman budaya dalam masyarakat modern yang terbagi atas beberapa bentuk. *Pertama*, keanekaragaman subkultural, yang masyarakatnya memiliki satu budaya umum yang luas, tetapi memberi ruang untuk gaya hidup yang berbeda. *Kedua*, keanekaragaman perspektif, yang anggota masyarakatnya seringkali menentang budaya dominan. *Ketiga*, masyarakat modern yang terdiri atas aneka macam komunitas yang terorganisasi dengan baik dan menjalankan hidup dengan keyakinan dan praktik yang berlainan (Parekh, 2008)

Multikulturalisme adalah suatu paham, pemikiran, atau kajian yang muncul atas respons terhadap budaya masyarakat yang plural atau multikultur. Multikulturalisme pertama kali muncul ketika aliran liberalisme dikoreksi karena meninggalkan unsur penting, yaitu kebudayaan. Liberalisme menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan kemerdekaan individual. Menurut paham ini, negara menjamin kebebasan

dan hak-hak individu dalam masyarakat. Aliran ini mendapat koreksi karena dalam menjamin hak-hak individu terabaikan unsur kebudayaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian adalah implementasi karakter utama masyarakat multikultur ke dalam penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Data kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para guru di setiap sekolah yang mengampu mata pelajaran Agama, PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), dan Seni dan Budaya; *focus group discussion* (FGD); serta observasi di sekolah sasaran. Data kuantitatif diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner *online* kepada para guru dan kepala sekolah. Fokus penelitian ini, adalah sekolah di wilayah yang pernah terjadi persoalan etnisitas secara serius, yaitu di Kalimantan Barat (Pontianak dan Sambas) dan di Sulawesi Tengah (Poso dan Palu).

Data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner diolah dengan SPSS dengan melakukan analisis deskriptif. Data kualitatif digunakan untuk mengafirmasi, menjelaskan, atau menyangkal temuan dari hasil analisis data kuantitatif. Untuk menguji apakah sebuah premis benar atau salah digunakan teknis triangulasi, yaitu melalui pembuktian benar atau tidaknya pernyataan itu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam FGD dan hasil wawancara mendalam dengan para guru.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif atas data yang terkumpul dari responden di Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak sejumlah 114 orang yang terdiri atas guru dan kepala sekolah di tingkat SMP; dan di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya serta Kabupaten Poso sejumlah 75 responden. Hasil analisis statistik deskriptif dipertegas dengan analisis kualitatif yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para guru Agama, PKn, dan Seni Budaya di SMPN 2 Sambas; SMPN 7 Pontianak; SMPN 1 Palu; SMPN 1 Poso dan hasil FGD dengan para narasumber di empat lokasi penelitian. Di samping itu, hasil analisis statistik juga dipertegas dengan hasil observasi lapangan di sekolah yang menjadi sasaran pengamatan.

1. Karakter Utama Religiositas dalam Masyarakat Multikultur

Berdasarkan analisis statistik deskripsi, pengajaran guru dan kepala sekolah mengenai persoalan “halal” dan “haram” sangat intens: responden menjawab sering 47% dan yang menjawab sangat sering 31% (lihat Diagram 1). Hal yang sama seperti yang terjadi di Palu dan Kabupaten sekitarnya serta Kabupaten Poso memperlihatkan responden yang menjawab sering 52% dan yang menjawab sangat sering sebesar 29% (lihat Diagram 1). Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru Agama di SMP Palu, persoalan “halal” dan “haram” ini biasanya terkait dengan pengalaman peserta didik ketika berinteraksi dengan masyarakat yang plural, misalnya mengenai masalah masakan Cina:

“Pada saat mereka di luar, biasanya anak-anak itu kan nanya. Bu, bagaimana misalnya kami jajan di tempat orang Cina, boleh atau tidak?” (Sarnastri, 2019).

Diagram 1 Mengajarkan persoalan secara halal dan haram (Sambas dan Pontianak)

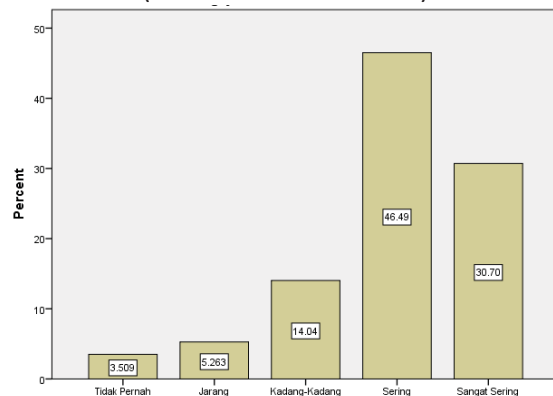
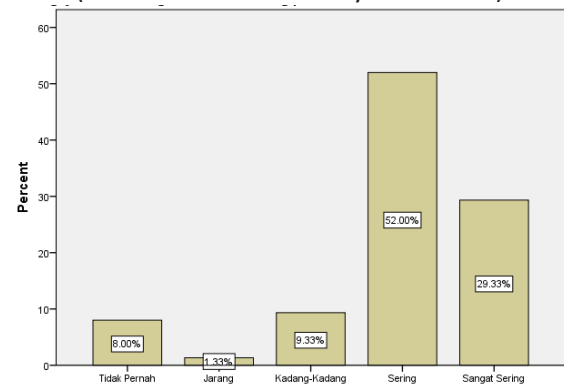


Diagram 2 Mengajarkan persoalan secara halal dan haram (Kota Palu dan Sekitarnya dan Poso)



Pemahaman agama secara “halal” dan “haram” ini terkait dengan pemahaman agama secara tekstual, tetapi juga pembentukan identitas dalam masyarakat plural. Sehubungan dengan pengajaran agama secara tekstual, hasil analisis data kualitatif menjelaskan bahwa para guru mengajarkan agama secara tekstual karena terdapat kebijakan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan program membaca kitab suci 5--10 menit sebelum kegiatan proses belajar-mengajar dan berlaku bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya.

Meskipun pengajaran agama secara tekstual cukup intens, juga diimbangi dengan pengajaran agama secara kontekstual. Berdasarkan hasil analisis kualitatif, pengajaran secara kontekstual ini bergantung pada kearifan pendidik dalam menyampaikan ajaran agama sebagaimana dikatakan informan di Poso.

“... jangan sampai saya salah menjelaskan sehingga anak-anak nanti ini, ya saya pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi secara kontekstual segala sesuatu berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat yang ada. Tetapi, saya perlu juga “kearifan” tidak boleh saya itu fanatik terhadap apa yang saya pegang, karena saya sebagai seorang pendidik yang saya didik ini kan anak yang dari latar belakang berbeda-beda.. (Mistardianto, 2019)”.

Dalam analisis statistik diperlihatkan bahwa sikap yang sangat penting dalam masyarakat multikultur adalah pemahaman agama secara kritis dan rasional. Agama tidak hanya dipahami sebagai persoalan fikih yang menekankan persoalan halal dan haram, tetapi juga tidak hanya memandang agama secara simbolik sebagai rutinas ritual. Substansi agama yang penting dan harus dipahami dalam dimensi spirit agama, semangat kepedulian sosial dan kemanusiaan serta menjalankan agama melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemahaman rasionalitas atas agama itu masih belum menjadi prioritas utama dalam pengajaran PPK. Hal itu terlihat melalui jawaban responden di Sambas dan Pontianak yang menjawab tidak pernah sebesar 9%, yang menjawab jarang 7%, dan yang menjawab kadang-kadang 22% (lihat Diagram 3). Di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Poso yang menjawab sering 8%, yang menjawab sangat sering 3%, dan yang menjawab kadang-kadang 20% (lihat Diagram 4).

Diagram 3 Mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama (Pontianak dan Sambas)

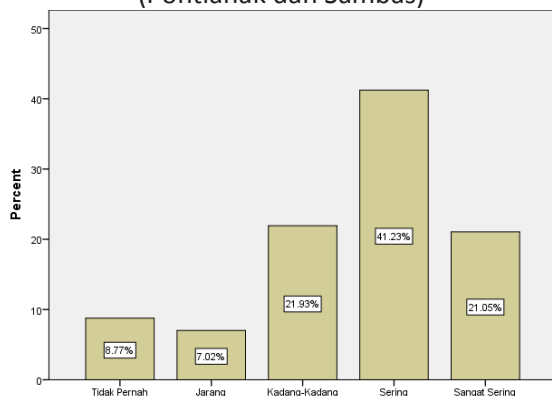
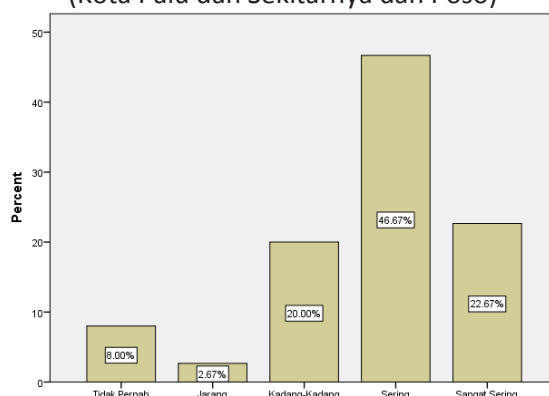


Diagram 4 Mengajarkan sikap kritis dan rasional dalam beragama (Kota Palu dan Sekitarnya dan Poso)



Pengajaran mengenai sikap kritis dan rasional terhadap agama ini menjadi penting untuk menghindari sikap fundamentalisme dan sikap yang diakibatkan oleh pemahaman sempit terhadap agama. Habermas (dalam Kieser, 2004) mengatakan bahwa “agama bubar jika tidak bercampur dengan nalar”.

Analisis kuantitatif menunjukkan hal yang mencolok mengenai pengajaran guru dan kepala sekolah, yaitu mengenai pengajaran sikap toleransi terhadap penganut agama lain serta sikap hidup rukun dan damai antapemeluk agama yang berbeda. Dari data kuantitatif terlihat bahwa, baik di Kalimantan Barat maupun di Sulawesi Tengah, tidak ada satu responden yang menjawab *tidak pernah* dan *jarang*, responden dominan memilih jawaban *sering* dan *sangat sering* (lihat Diagram 5 dan 6). Hal ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah sangat intensif mengajarkan dan mengimplementasikan sikap toleransi dan sikap hidup rukun dan damai kepada peserta didik.

Diagram 5 Mengajarkan sikap toleransi dalam beragama (Pontianak dan Sambas)

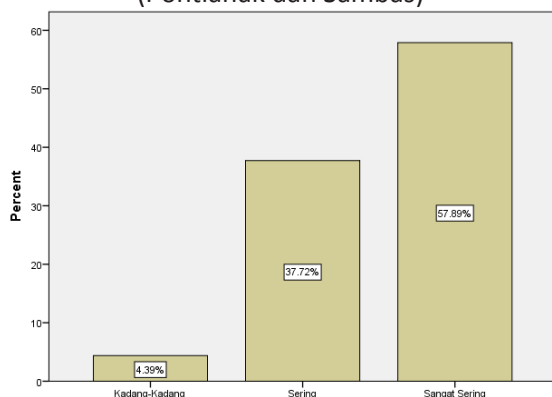
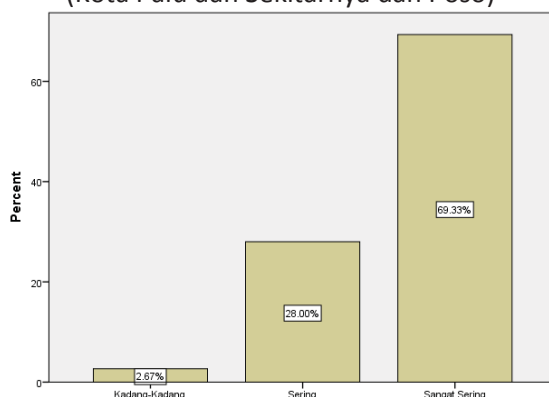


Diagram 6 Mengajarkan sikap toleransi dalam beragama (Kota Palu dan Sekitarnya dan Poso)



2. Karakter Utama Nasionalis dalam Masyarakat Multikultur

Ada beberapa sikap yang perlu dicermati dari karakter utama nasionalis dalam masyarakat multikultur. Berikut ini adalah pengajaran karakter utama nasionalis yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah kepada peserta didik.

a. Mengajarkan Sikap Cinta Kepada Tanah Air

Cinta terhadap tanah air adalah salah satu aspek dari nasionalisme. Jumlah total 86% responden guru dan kepala sekolah di Pontianak dan Sambas yang menyatakan sering (37%) dan sangat sering (49%) mengajarkan sikap cinta tanah air kepada siswa dibandingkan dengan 84% responden kepala sekolah dan

guru di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Poso yang menyatakan sering 44% dan sangat sering 52% (lihat Diagram 7 dan 8).

Diagram 7 Mengajarkan sikap toleransi dalam beragama (Pontianak dan Sambas)

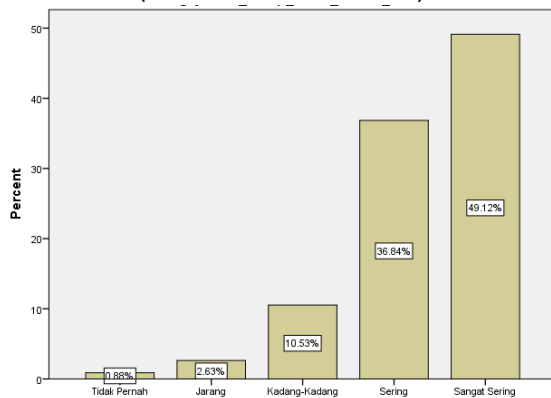
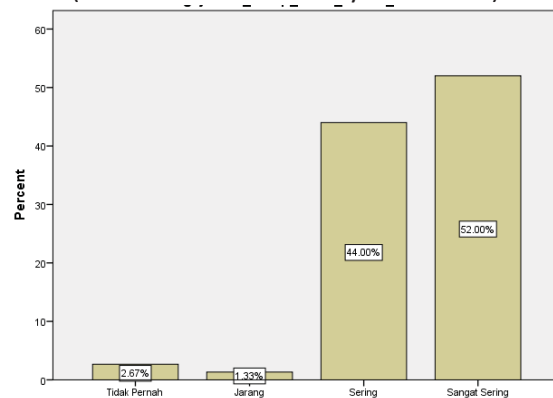


Diagram 8 Mengajarkan sikap toleransi dalam beragama (Kota Palu dan Sekitarnya dan Poso)



Berkaitan dengan pengajaran sikap cinta terhadap tanah air, hasil analisis data kualitatif dapat dipertegas bahwa para guru mengajarkan sikap cinta kepada tanah air melalui aktivitas, seperti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dan menghafal lima sila dari Pancasila. Implementasi cinta tanah air pada umumnya dilaksanakan secara formalisme simbolik.

b. Mengajarkan Sikap Menghargai Keragaman

Nasionalisme dapat dibangun dengan baik jika warganya menghargai keberagaman. Responden guru dan kepala sekolah di Kota Pontianak dan Kota Sambas dalam mengajarkan sikap menghargai keberagaman: yang menjawab sering sebesar 30%, yang menjawab sangat sering 63% (lihat Diagram 9). Di Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya dan Kabupaten Poso: yang menjawab sering 39% dan yang menjawab sangat sering 58% (lihat Diagram 10).

Berkaitan dengan pengajaran sikap menghargai keragaman, hasil analisis data kualitatif bahwa implementasi sikap menghargai keragaman adalah melalui keharusan memakai pakaian adat daerah setiap hari Kamis sebagaimana dikatakan oleh Yabidi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu:

“ di sekolah nilai-nilai budaya itu masuk, kita di setiap hari Kamis diwajibkan memakai lambang-lambang adat kedaerahan kita masing-masing tanpa membedakan dia dari etnis mana pun, kalau memang saya umpamanya dari Jawa memakai blangkon, temen-temen dari Bali mungkin memakai "udeng". (Yabidi, 2019).

Diagram 9 Mengajarkan sikap menghargai keragaman

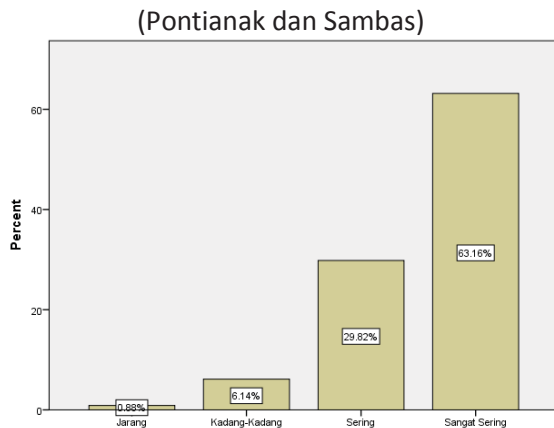
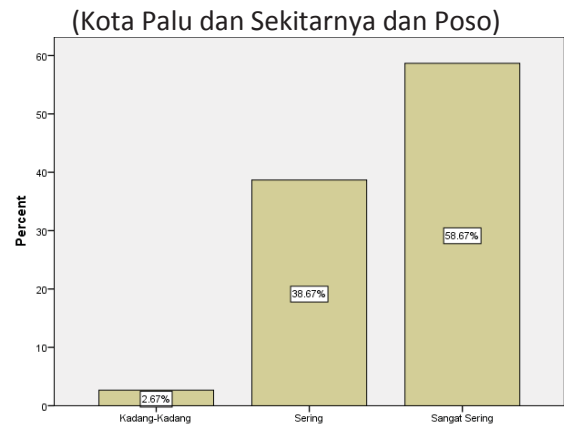


Diagram 10 Menghargai sikap menghargai keragaman



c. Mengajarkan Sikap Taat kepada Hukum

Sikap taat terhadap hukum merupakan salah satu sikap yang menunjukkan rasa nasionalisme. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan bersama. Orang yang mempunyai rasa nasionalisme akan bersikap taat terhadap hukum. Diagram 11 menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah di Pontianak dan Sambas sangat intens mengajarkan sikap taat terhadap hukum sebagaimana terlihat dari jawaban yang menjawab sering 35% dan menjawab sangat sering 47%, total semuanya 93%. Di Kota Palu dan kabupaten sekitarnya yang menjawab sering 39% dan yang menjawab sangat sering 45%, total 84% (lihat Diagram 12).

Diagram 11 Mengajarkan sikap menghargai keragaman

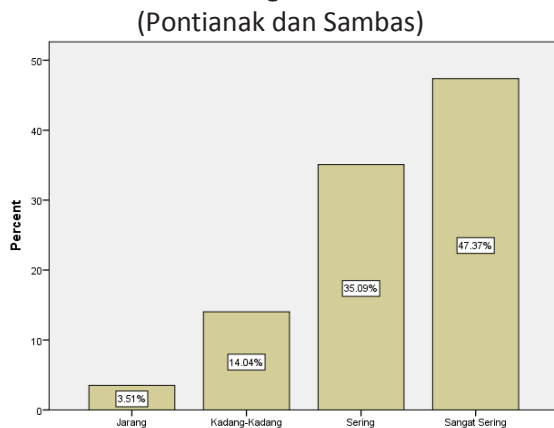
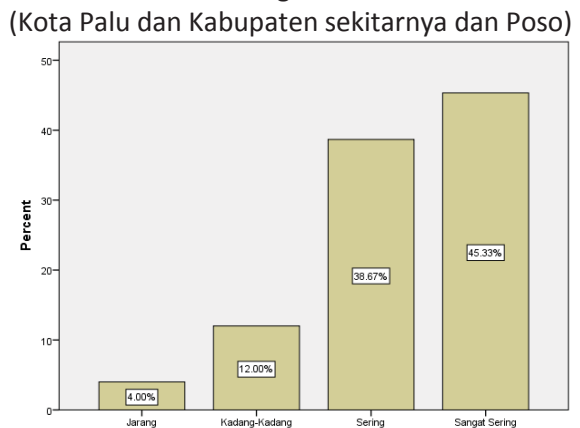


Diagram 12. Mengajarkan sikap menghargai keragaman



Berkaitan dengan pengajaran sikap taat terhadap hukum, hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa para guru mengimplementasikan sikap taat hukum melalui kebiasaan sekolah, seperti mematuhi tata tertib sekolah dan peraturan kelas yang telah disepakati bersama.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Problem dalam masyarakat multikultur di Indonesia ke depan dimungkinkan terus bergulir, baik persoalan antaretnik dan antarpemeluk agama yang berbeda, serta persoalan kelompok dan golongan, termasuk persoalan dalam menghadapi persaingan global. Persoalan agama dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan sikap kritis dan rasional kepada peserta didik, sedangkan persoalan etnisitas dapat

diselesaikan dengan peningkatan sikap nasionalisme dan kebangsaan. Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan.

- a) Karakter utama religiositas dalam PPK masih cenderung diimplementasikan secara simbolik melalui pemahaman agama secara “halal” dan “haram” dan pemahaman agama secara tekstual cenderung dominan. Meskipun responden di semua wilayah penelitian juga menunjukkan implementasi pemahaman agama secara kontekstual cukup dominan, tetapi hal itu belum menyentuh bagaimana membangkitkan spirit agama dengan membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta upaya untuk membangun peradaban manusia yang maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Karakter nasionalis dalam PPK masih cenderung diimplementasikan secara normatif-simbolik berupa praktik cinta negara dengan melaksanakan hapalan teks Pancasila, upacara bendera, dan baris-berbaris serta menyanyikan lagu “Indonesia Raya” belum menyentuh sikap patriotisme yang memberikan spirit untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi persaingan global abad ke-21.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah rekomendasi kebijakan untuk mengimplementasikan sikap multikultur kepada peserta didik yang dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sekolah, dan orang tua.

- a) Karakter utama religiositas sebagai dasar atau fundamen dalam PPK tetap perlu dijalankan sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah di setiap sekolah dengan implementasi karakter utama religiositas yang menekankan semangat dan spirit agama untuk membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan serta upaya untuk membangun peradaban manusia yang maju melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 1) Perlu menyelipkan sikap religiositas ke dalam mata pelajaran yang terkait, seperti Biologi, Kimia, Fisika, dan mata pelajaran lain, seperti IPA dan IPS, yang dapat menyampaikan pesan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, religiositas tidak hanya dipahami sebatas ritual dan tekstual, tetapi juga dipahami penerapannya dalam ilmu pengetahuan.
 - 2) Perlu implementasi karakter utama religiositas melalui budaya riset, misalnya melakukan aktivitas KIR (karya ilmiah remaja) dan mendorong peserta didik melakukan aktivitas yang bersifat ilmiah berdasarkan spirit religiositas.
 - 3) Perlu mempertimbangkan kebijakan implementasi sikap karakter religiositas melalui aktivitas di luar sekolah, seperti kunjungan ke rumah jompo atau yatim piatu untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial, aktivitas yang menumbuhkan nilai toleransi, seperti kerja bakti di rumah ibadah, atau kegiatan di luar sekolah lainnya yang dapat menumbuhkan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai religiositas.
 - 4) Perlu memberikan fasilitasi dan dukungan berupa penyediaan buku untuk literasi yang memuat tokoh atau pakar agama, termasuk tokoh atau ilmuwan Barat yang berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dalam kaitannya dengan religiositas.
- b) Implementasi karakter utama nasionalis perlu mempertimbangkan implementasi sikap nasionalisme dengan menekankan peningkatan keterampilan peserta didik dalam abad ke-21 dan kesiapan menghadapi persaingan global.

- 1) Perlu menyelipkan sikap nasionalisme itu ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti PPKn, Bahasa dan Sastra, serta mata pelajaran lain yang dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya karakter utama nasionalis yang berkemanusiaan.
 - 2) Perlu memberdayakan seni dan budaya daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme melalui berbagai kegiatan penting di sekolah.
 - 3) Perlu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam persaingan global melalui kemampuan penguasaan teknologi digital dan bahasa asing (internasional).
 - 4) Perlu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam meraih prestasi seperti olimpiade sains dan teknologi di ranah internasional.
- c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah, serta masyarakat dan keluarga tentang pentingnya nilai-nilai multikultur dalam PPK melalui jejaring internet.
- d) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengalokasikan dana khusus untuk program kegiatan PPK yang bermuatan nilai-nilai multikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2015. "Akar Konflik Keragaman, *Scaling Up* Kebudayaan dan Penguatan Dialog". *Seminar Nasional Kebudayaan Membingkai Kebhinekaan, Merayakan Persatuan, Kebijakan Kebudayaan dalam Mengelola Keragaman 2015* hlm.17--26. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and DBorradori, G. 2003. Philosophy in a Time of Teror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- emocracy in Five Nations*. English: SAGE Publications.
- Franz, Magnis-Suseno. 2004,. "75 Tahun Jurgen Habermas. *Basis Menembus Fakta*". *Basis Menembus Fakta* , November--Desember,.
- Franz, Magnis-Suseno . 2004, "Edisi 75 Tahun Jurgen Habermas". *Basis Menembus Fakta* November-Desember., hlm.. 5.
- Franz,Magnis-Suseno . 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gellner, E. 1983. *Nation and Nationalism, New Perspective on The Past*. England: Basil Blackwell.
- Habermas, J. 2007. *Moral Consciousness and Communicative Action*. UK: Polity Press.
- Horvath, D. 2009. "Tracing Cosmopolitan Strands in EU Citizenship". Retrieved from <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p14661/mobile/ch02.html>.
- Kieser, B. 2004, "Agama Bubar Jika Tidak Bercampur Nalar: Being Religious ala Habermas". *Basis Menembus Fakta* , November--Desember, hlm. 23.
- Mistardianto. 2019. "Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur". (M. W. Nurrochsyam, Interviewer)
- Mu'jizah. 2014. *Mencari Jejak Menelusuri Sejarah*. Yogyakarta: Elmatara Publishing.

- Nurrochsyam, Mikka Wildha,. 2018. *Kajian Pemanfaatan Permainan Tradisional sebagai Wahana Pendidikan Karakter*. Jakarata: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud.
- Pamungkas, C. 2015. "Religious Identification and Social Distance Between Religious Groups in Yogyakarta". *Humaniora* , 141--155.
- Parekh, B. 2008. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sarnastri. 2019. Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur. (M. W. Nurrochsyam, Interviewer)
- Setiadi, Riswanda, dkk. 2017. *Evaluasi Penyelenggaraan Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Piloting*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Susanto, B. H. 2017. Pengembangan Permainan Tradisional Untuk Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN* , VOL.2, NO.2,, hlm.. 117--130.
- Theresiana Ani Larasati, E. S. 2014. *Kajian Awal Implementasi Karakter Berbasis Budaya pada Tingkat Sekolah Dasar di Daerah Istimiwa Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.
- Yabidi. 2019. Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur. (M. W. Nurrochsyam, Interviewer)

PERJUMPAAN UNTUK MEMPERKUAT IKATAN KEBINEKAAN: STUDI PADA TIGA SMA NEGERI DI JAKARTA

Anggi Afriansyah

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak. Sekolah negeri adalah lembaga atau ruang pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, yakni tempat perjumpaan peserta didik yang memiliki latar belakang beragam, baik latar belakang sosial, budaya, agama, maupun ekonomi. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk memperkuat kebinekaan. Namun, dari hasil kajian di tiga SMA negeri di Jakarta potensi sekolah sebagai ruang perjumpaan yang dapat memperkuat ikatan kebinekaan antarsiswa yang beragam belum optimal dipraktikkan. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tiga hal: pertama, problematika sekolah negeri dalam memperkuat ikatan kebinekaan; kedua, bagaimana mengoptimalkan ruang perjumpaan di sekolah sebagai bagian penting memperkuat ikatan kebinekaan; serta ketiga, paradigma pendidikan yang membangun ikatan kebinekaan. Penelitian dilakukan di tiga SMA negeri di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Kata kunci: sekolah negeri, kebinekaan, ruang perjumpaan, pendidikan multikultural

A. PENDAHULUAN

Sekolah negeri memiliki komposisi, baik guru maupun siswa, yang lebih heterogen dibanding dengan sekolah swasta. Menurut Harjatanaya & Hoon (2018) sekolah yang memiliki komposisi siswa yang heterogen lebih banyak potensi untuk memberdayakan budaya sekolah multikultural dibandingkan dengan sekolah swasta. Tidak optimalnya pengelolaan heterogenitas di sekolah negeri dapat berakibat minimnya pemahaman siswa tentang makna keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus tertentu sekolah negeri telah menjadi arena yang kurang menggembirakan bagi pengembangan paham intoleransi dan radikalisme.

Dalam survei nasional yang bertajuk “Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Perguruan Tinggi di Indonesia” (PPIM, 2017), sikap yang mengengaskan di kalangan siswa terjadi disebabkan oleh pemahaman yang minim dari pihak sekolah tentang nilai-nilai kemajemukan dan adanya bacaan dan kegiatan sekolah yang bernuansa infiltrasi intoleransi dan radikalisme. Selain itu, minimnya pengawasan sekolah terhadap beragam program, seperti ekstrakurikuler dan bacaan siswa yang kurang mendidik. Demikian juga-hasil survei PPIM 2018 “Pelita yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru Indonesia” (2018) memperlihatkan alarm atau tanda bahaya bahwa ada sejumlah guru di Indonesia mulai dari TK/RA hingga SMA/MA terindikasi intoleran dan berperilaku radikal yang tinggi. Hasil studi Infid (2016) yang berjudul “Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia Juni 2016 Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro, dan Kupang” juga mengungkapkan adanya indikasi penyebaran paham intoleran di kalangan siswa sekolah menengah umum dan perguruan tinggi negeri dengan cara menyamakan gerakan mereka sebagai kelompok studi yang mendorong pemurnian agama. Dengan merebaknya isu intoleransi di sekolah menyebabkan banyak kalangan yang menginginkan agar makna dan hakikat

keberagaman dijamin di sekolah (*kompas.com*, 15/11/2019). Dalam kaitan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengakui bahwa munculnya sikap atau pola pikir intoleransi serta radikalisme di satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga atas pada saat ini sedang dalam proses penanganan (*tirto.id*, 2/5/2019).

Kondisi pendidikan, sebagaimana diutarakan di atas tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pasal 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) menyebut bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penghargaan terhadap nilai agama, kultural, dan kemajemukan bangsa adalah landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, sekolah negeri sepatutnya menjadi ruang tempat perjumpaan anak yang memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang berbeda. Perjumpaan antarkelompok yang berbeda mestinya menjadi potensi untuk memperkuat kebinekaan. Hal itu juga termasuk bagian dari salah satu agenda prioritas Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Nawacita bertujuan untuk memperteguh pendidikan kebinekaan memperkuat restorasi sosial, dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Namun, dalam kenyataannya perjumpaan tersebut belum atau tidak tampak operasionalnya, termasuk sekolah negeri masih banyak yang belum berperan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga hal: (1) problematika sekolah negeri dalam memperkuat ikatan kebinekaan; (2) bagaimana mengoptimalkan ruang perjumpaan di sekolah sebagai bagian penting memperkuat ikatan kebinekaan; dan (3) paradigma pendidikan yang membangun ikatan kebinekaan.

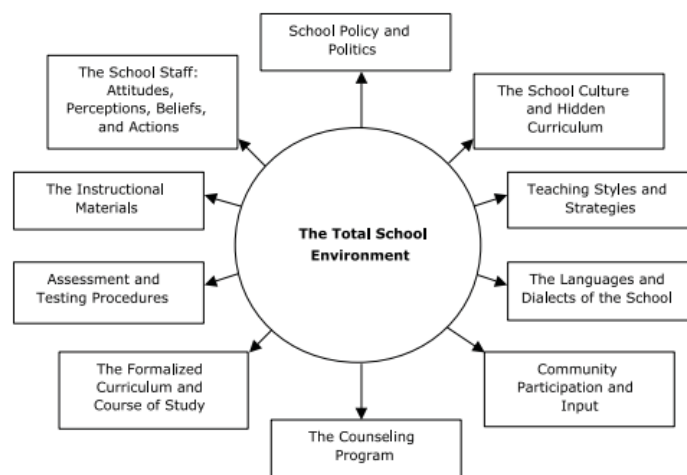
B. KAJIAN PUSTAKA

Perjumpaan untuk memperkuat kebinekaan merupakan bagian penting dalam membangun Indonesia yang begitu beragam. Dalam konteks sekolah, kondisi tersebut akan terjadi dalam lingkup pendidikan yang menghargai beragam kelompok. Operasionalisasinya hanya mungkin dilakukan melalui implementasi pendidikan multikultural. Dalam tulisan ini konsep pendidikan multikultural merujuk pada pendapat James A. Banks. Teori Banks digunakan sebagai rujukan untuk membedah tiga isu utama yang dikaji. Banks (2010) menyebut bahwa pendidikan multikultural setidaknya memiliki tiga aspek, yaitu ide atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Pendidikan multikultural menggandengkan gagasan bahwa semua siswa, terlepas dari gender, kelas sosial, dan karakteristik etnik, ras, atau budaya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Pendidikan multikultural melibatkan perubahan total sekolah atau lingkungan pendidikan, tidak terbatas pada perubahan kurikulum (Banks, 2009; Banks & Banks, 2004).

Dalam pandangan Banks (2010), agar implementasi pendidikan multikultural berhasil, sekolah perlu diposisikan sebagai sistem sosial dan semua variabel utamanya saling terkait erat. Untuk menempatkan sekolah sebagai sistem sosial harus ada upaya untuk merumuskan dan memulai strategi perubahan dengan mereformasi total lingkungan sekolah melalui pendidikan multikultural. Menurut Banks, bahan ajar multikultural menjadi sesuatu yang sensitif tidak efektif bagi guru yang memiliki sikap negatif terhadap kelompok ras, etnik, dan budaya yang berbeda. Guru akan jarang menggunakan bahan ajar yang sensitif terhadap isu multikultural atau cenderung menggunakannya justeru merugikan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, para guru dan anggota staf sekolah lainnya perlu diberi pemahaman dan pengetahuan tentang sikap dan nilai-nilai demokratis dalam mengimplementasikan program multikultural di sekolah.

Dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, pihak sekolah harus melihat kembali bagaimana interaksi verbal antara guru dan siswa, budaya, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sikap siswa dan guru terhadap bahasa minoritas (Romaine, 2009 dalam Banks, 2010), program pengujian, dan praktik pengelompokan. Selain itu, menurut Banks, norma institusional sekolah, struktur sosial, nilai-nilai, dan tujuan harus diubah dan direkonstruksi. Perhatian utama harus difokuskan pada kurikulum tersembunyi sekolah dan norma serta nilai-nilai implisitnya. Artinya, sekolah harus memiliki kurikulum manifes tersembunyi, yaitu panduan, buku teks, papan buletin, dan rencana pelajaran. Aspek lingkungan sekolah ini penting dan harus direformasi untuk menciptakan budaya sekolah yang mempromosikan sikap positif terhadap beragam kelompok budaya dan membantu siswa agar berhasil secara akademis. Namun, kurikulum tersembunyi atau laten sekolah seringkali lebih penting daripada kurikulum manifes atau terbuka.

Banks (2009) membangun konsep bahwa pendidikan multikultural hanya dapat dilakukan melalui pendidikan dalam program sekolah secara menyeluruh. Lingkungan sekolah yang menyeluruh terdiri atas kebijakan sekolah, budaya sekolah dan kurikulum tersembunyi, pola dan strategi pengajaran, bahasa dan dialek yang ada di sekolah, partisipasi komunitas, program konseling, kurikulum, penilaian, materi, dan persepsi, kepercayaan, sikap, dan praktik yang dilakukan oleh para aktor di sekolah. Secara lebih detail hal itu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Lingkungan Sekolah (James Banks, 2009)

Pendidikan adalah perbuatan fundamental untuk menyentuh akar hidup manusia sehingga dapat mengubah dan menentukan arah atau tujuan hidupnya (Driyarkara, 2006). Pendidikan bukan semata-mata ide, melainkan juga suatu realitas. Realitas adalah sebuah dinamika dan aktivitas. Siswa dihadapkan pada realita keseharian dan dinamika yang beragam dalam bermasyarakat.

Dalam suatu penelitian (Tim PGRI, 2014) disebutkan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu memberikan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan perbedaan di satu sisi dan persatuan di sisi lain. Untuk masa yang panjang politik segregasi telah mengantarkan Indonesia sebagai masyarakat yang plural terkunci dalam situasi “plural monokulturalisme. *Political correctness* dituntut untuk mentransformasikan situasi plural monokulturalisme menuju multikulturalisme lewat berbagai kebijakan yang mendorong penyerbukan silang budaya (*cross culture fertilization*). Untuk itu, harus ada upaya bagaimana mencegah munculnya pemaksaan hegemoni budaya mayoritas atas minoritas.

Situasi perjumpaan yang membentuk anak-anak yang mampu menghargai beragam perbedaan perlu diciptakan oleh sekolah. Dalam konteks ini, Bennet (2003) dalam Tilaar (2009) menyebut kerangka

pendidikan multikultural menjadi bagian penting dalam ruang-ruang pendidikan. Kerangka pendidikan multikultural diwujudkan melalui reformasi kurikulum, pengajaran keadilan sosial, pedagogi kesetaraan, dan kompetensi multikultural. Artinya, melalui pembelajaran di dalam kelas yang berdasarkan kurikulum yang ramah terhadap beragam budaya, aksi sosial yang nyata sebagai bagian praktik mewujudkan keadilan sosial untuk menepis beragam prasangka yang ada di masyarakat, dan memosisikan beragam kelompok dalam posisi yang setara.

Pada prinsipnya sekolah melebihi lembaga publik lainnya dalam menghasilkan warga negara yang baik dan berakhlak terpuji. Sekolah mestinya memiliki kurikulum kewarganegaraan dan pedagogi demokratik mengenai lingkungan, pengabdian masyarakat, hak konstitusional, tujuan pemerintahan, dan menyediakan ruang dialog yang saling menghormati dan konstruktif dalam membangun pemahaman tentang pemerintahan dan demokrasi (Merry, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di tiga SMA negeri di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dalam tulisan ini merupakan bagian dari penelitian prioritas nasional, yaitu “Kajian Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia” yang dilakukan oleh Kedeputian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan LIPI tahun 2018.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika dan Upaya Pengoptimalan Ruang Perjumpaan di Sekolah

Penguatan ikatan kebinekaan di sekolah menjadi sangat penting dan strategis dalam memperkuat ikatan antarsiswa yang memiliki beragam latar belakang. Berbagai program sudah dilakukan oleh beberapa sekolah untuk membangun ruang perjumpaan siswa untuk tempat berdiskusi dan saling mengenal dengan beragam kalangan. Untuk itu, ruang perjumpaan tersebut perlu didesain sedemikian rupa. Ada tiga sekolah yang tidak memiliki ruang perjumpaan yang belum didesain sehingga siswa tidak dapat saling mengenal secara mendalam.

Paradigma persekolahan yang lebih mengedepankan pencapaian akademik semestinya menjadi ciri khas sekolah negeri di Indonesia. Demikian pula dengan dua sekolah negeri yang menjadi lokus penelitian. Kesadaran untuk membangun ruang perjumpaan antarguru di sekolah sangat minim, yang juga tidak hanya terjadi di tiga sekolah yang menjadi tempat penelitian. Kondisi ini terjadi karena guru sibuk menyelesaikan tugas administrasi dan mengajar. Padahal, tugas utama guru tidak hanya menyelesaikan beban administrasi, tetapi juga mampu membimbing dan mencerahkan peserta didik, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang multikultural. Beban administratif guru membuat mereka kehilangan ruang untuk mengaktualisasikan visi pendidikan yang humanis. Guru menjadi cenderung sebagai administrator dibanding sosok visioner.

Di salah satu sekolah ditemukan kelompok keagamaan Islam atau organisasi rohani islam (rohis) memiliki pandangan yang eksklusif bahwa mereka tidak boleh memilih kepala OSIS yang beragama non-Islam dan kepala OSIS perempuan. Pemikiran seperti ini disampaikan oleh salah satu anggota rohis yang mendapatkan wawasan dari kajian keislaman mengikuti rohis. Pendapat seperti itu memang bukan sesuatu yang baru sebab dalam konteks yang lebih luas penolakan terhadap pemimpin nonmuslim dan pemimpin perempuan juga mengemuka di sebagian umat muslim. Anak-anak yang diwawancara juga menyatakan bahwa sekolah tidak memiliki program yang dirancang agar mereka saling mengenal. Mereka lebih terfokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru agar dapat lulus dengan nilai baik.

Ada temuan menarik di salah satu sekolah yang memiliki kesejarahan dan mayoritas siswanya beretnik Tionghoa. Sekolah ini adalah sekolah asing yang kemudian dinasionalisasi. Latar sejarah tersebut membuat sekolah ini memiliki budaya sekolah yang unik. Dari hasil wawancara dengan siswa, mereka yang masuk ke sekolah ini adalah siswa yang berasal dari sekolah swasta berbasis agama. Mereka memilih sekolah negeri karena merasa memiliki kesempatan besar masuk ke perguruan tinggi negeri. Pengalaman mereka di sekolah negeri minim, karena sebelumnya lebih banyak di sekolah swasta yang monokultur dari segi etnisitas ataupun agama. Mereka memiliki keterbatasan interaksi dengan siswa yang berbeda agama, budaya, dan kelas sosial, demikian juga dengan interaksi di masyarakat atau lingkungan rumah dan keluarga. Di sekolah ini mereka sesungguhnya memiliki interaksi yang terbatas dengan beragam kalangan meskipun juga bertemu dengan beragam guru. Pengalaman mereka berinteraksi dengan berbagai kalangan memang sangat minim. Interaksi yang minim membuat mereka memiliki keterbatasan dalam memahami perbedaan yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, sisi positifnya OSIS sekolah berupaya mengakomodasi keberagaman yang ada di sekolah. Pada struktur organisasi OSIS terdapat Seksi Ketakwaan kepada Tuhan YME yang anggotanya terdiri atas perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Ada juga Seksi Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial. Dua seksi pada struktur OSIS ini menjadi gambaran sekolah dalam membangun kebersamaan antarsiswa yang beragam agamanya. Meskipun perangkat ini belum dioptimalkan dalam membangun perjumpaan yang memungkinkan dialog secara intensif, OSIS lebih terfokus untuk menyelesaikan beragam program kerjanya. Program-program kerja mereka pun tidak atau belum dilandasi oleh semangat untuk mempertemukan beragam elemen, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Peran Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas pemerintah agar tercipta sinergitas antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan belum optimal di sekolah, terutama untuk membangun kebersamaan dalam bingkai keberagaman. Dalam konteks pembelajaran mata ajar PPKN, Sosiologi, dan Sejarah memang sudah memberikan pemahaman konseptual mengenai kondisi Indonesia yang beragam. Pemahaman konseptual ini menjadi bagian penting bagi anak-anak dalam memahami kondisi faktual yang ada di Indonesia. Melalui pembelajaran di kelas, anak-anak dibangun rasa cintanya terhadap keberagaman di Indonesia. Akan tetapi, pemahaman konseptual saja tidak cukup untuk memperkuat ikatan kebinekaan. Praktik nyata dalam kondisi keseharian menjadi sangat penting. Sekolah terlihat belum memahami secara komprehensif tentang pentingnya membangun perjumpaan-perjumpaan substantif, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan di sekolah. Perjumpaan substantif memungkinkan anak-anak untuk menyelami beragam perbedaan di masyarakat. Dari situ dapat dibangun sikap saling percaya antarkelompok yang berbeda. Desain sekolah dalam membangun situasi bahwa anak-anak dapat saling menghargai, toleran, juga mau bekerja sama untuk membangun bangsa menjadi sangat penting.

Guru perlu memiliki kemampuan untuk membangun program yang konstruktif bagi pemahaman keberagaman dan mengajak anak-anak untuk mengalami secara langsung perbedaan yang ada pada masyarakat. Di tiga sekolah upaya itu memang sudah ada, tetapi sangat minim dan tidak secara strategis dilakukan, baik di ruang kelas/pembelajaran, ruang keseharian, maupun di ruang perjumpaan dengan sekolah lain. Program yang membuat siswa bertemu dengan beragam kalangan memang sudah ada melalui kunjungan antarsekolah, kompetisi atau perlombaan, dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, belum secara optimal dirancang untuk membentuk pertemuan yang membangun ikatan kebinekaan. Pertemuan yang ada hanya sebatas bagian dari rutinitas pelaksanaan program sekolah. Diskusi serius dan intensif antarsekolah yang beragam belum tampak dalam program sekolah. Di sekolah lain, seperti Kolese Kanisius, Kolese Gonzaga, dan SMAI Al Izhari, ada beberapa program seperti pluralisme yang

mempertemukan anak-anak yang berbeda kalangan (khususnya dari segi agama) untuk bertemu dan berdialog. Hal ini tidak ditemukan dalam program yang ada di tiga sekolah negeri dan kecenderungan yang sama ditemui di beragam sekolah negeri lainnya. Perjumpaan intens antarsekolah yang memiliki latar agama yang berbeda ini menepis prasangka yang selama ini hadir. Kecurigaan yang dibangun melalui sentimen perbedaa dikikis melalui dialog intensif antarsiswa yang beragam latar belakang. Program seperti itu yang menjadi penting dihadirkan sebagai ikhtiar membangun Indonesia yang beragam. Anak-anak yang berhadapan dengan pihak yang berbeda akan memiliki pengalaman untuk selalu toleran dalam menyikapi beragam situasi.

2. Paradigma Pendidikan yang Membangun Ikatan Kebinekaan

Paradigma pendidikan yang mampu membangun ikatan kebinekaan hendaknya dilakukan melalui perspektif pendidikan multikultural. Dalam konteks Indonesia, melalui studi di enam sekolah yang berbeda latar belakang sosial, yaitu tiga sekolah Islam dan satu sekolah Katolik, satu sekolah negeri, dan satu SMK, Raihani (2017) menemukan ketidakkonsistenan antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan multikultural di sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan eksplisit dan keterbatasan, baik dari pembuat keputusan maupun kapabilitas guru dalam membangun pendidikan multikultural di sekolah. Banks (2019) menyebut bahwa keberagaman di masyarakat telah menghadirkan tantangan dan peluang bagi negara, sekolah, dan guru. Tujuan penting dari pendidikan multikultural adalah untuk membantu pendidik meminimalkan masalah yang berkaitan dengan keberagaman di masyarakat dan memaksimalkan potensi pendidikan dalam membangun pemahaman anak tentang kondisi tersebut. Untuk merespons secara kreatif dan efektif keberagaman, guru dan administrator membutuhkan pemahaman yang luas tentang konsep, prinsip, teori, dan praktik dalam pendidikan multikultural. Mereka perlu terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis untuk bekerja secara efektif dengan siswa dari beragam ras, etnik, budaya, jenis kelamin, kelas sosial, dan kelompok agama.

Dengan mengacu pada pandangan Banks (2010), pendidikan multikultural merupakan konsep luas dengan beberapa dimensi berbeda. Praktik pendidikan multikultural menjadi panduan penting untuk menjadi bagian dari indikator apakah pendidikan di sekolah sudah didasarkan pada paradigma untuk membangun perjumpaan yang dapat membangun kebinekaan. Menurut Banks (2010), dimensi tersebut adalah (1) integrasi konten, (2) proses konstruksi pengetahuan, (3) pengurangan prasangka, (4) pedagogi kesetaraan, dan (5) pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Jika merujuk pada dimensi tersebut, perjumpaan antarberagam kelompok di sekolah negeri dapat dibangun melalui berbagai strategi mulai dari konten kurikulum, pembelajaran, ataupun budaya sekolah yang berbasis pada hidden curriculum untuk memperkuat ikatan kebinekaan. Pada level pembelajaran, misalnya, becermine pada Korea Selatan, Shen (2019) menyebut Korea Selatan berupaya untuk mengajarkan pendidikan multikultural melalui pendidikan Geografi. Pendidikan Geografi tidak hanya mencerminkan kekayaan keragaman budaya Korea yang terus tumbuh, tetapi juga memberikan sifat fleksibel dan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan kohesi sosial dan inklusi. Dalam konteks ini, pemahaman multikultural diberikan melalui mata pelajaran yang memungkinkan anak-anak mendapatkan perspektif yang luas tentang beragamnya negara yang mereka tinggali.

Pembelajaran dan kegiatan harian di sekolah perlu difokuskan pada penguatan jalinan kebersamaan di antara beragam pihak di sekolah. Paradigma ini perlu dikukuhkan di dalam berbagai aktivitas harian di sekolah. Dengan mencermati hasil riset Raihani (2017), sisi leadership kepala sekolah menjadi sesuatu yang penting. Aspek penting lainnya adalah mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah adalah visi sekolah dan kebijakannya, kurikulum dan instruksinya, kepemimpinan dan manajemen, kapasitas dan

budaya, aktivisme siswa, dan kolaborasi dengan komunitas yang beragam. Di sini beragam program dibuat dan diimplementasikan untuk melakukan perjumpaan yang substantif dalam memperkuat semangat kebinekaan.

Paradigma pendidikan multicultural perihal keberagaman di masyarakat perlu dilatihkan di ruang-ruang pendidikan di sekolah. Aspek perjumpaan antara beragam kalangan menjadi bagian penting untuk memperkuat ikatan kebinekaan di Indonesia. Melalui perjumpaan-perjumpaan antaranak/siswa, mereka dapat belajar secara langsung dengan beragam pihak. Pembelajaran ini menjadi bagian penting dalam pendewasaan sikap dalam menghadapi setiap perbedaan yang ada. Perbedaan menjadi titik tolak untuk membangun kerja sama dalam masyarakat demokratis. Perjumpaan-perjumpaan substantif memungkinkan anak untuk menjadi pribadi yang memiliki toleransi dan penghormatan memadai bagi setiap perbedaan. Mereka tidak mudah terhasut oleh beragam tindakan yang memecah belah bangsa. Dari ruang-ruang pendidikan fundamen pemahaman dan praktik dalam menyikapi perbedaan menjadi sangat penting diinternalisasikan.

E. PENUTUP

Tiga sekolah negeri yang dijadikan objek penelitian belum menjadi arena perjumpaan yang dirancang, dipraktikan, dan dioptimalkan. Kekayaan latar belakang dari ketiga sekolah tersebut sesungguhnya merupakan cerminan Indonesia yang bineka. Namun, tidak ada program spesifik yang membuat ruang-ruang perjumpaan secara intens yang dapat memperkuat rajutan kebinekaan. Perjumpaan alamiah memang terjadi dalam pergaulan keseharian di kelas dan dalam kegiatan di sekolah. Akan tetapi, pihak sekolah belum memiliki paradigma yang memadai untuk membuat rancang bangun sehingga perjumpaan tersebut tidak hanya sekadar fisik, tetapi emosi. Perjumpaan yang memungkinkan anak-anak bangsa dapat berdialog dengan intensif saling mengenal dan memperkenalkan budaya masing-masing. Pada titik tersebut sekolah telah memerankan fungsinya sebagai ruang perjumpaan. Perjumpaan di sekolah akan membuat mereka terbiasa dalam menghadapi beragam perbedaan yang ditemui di masyarakat. Intensifnya perjumpaan antarindividu yang berbeda menjadi sarana pelatihan dalam menghadapi situasi masyarakat yang beragam. Posisi sekolah negeri yang memiliki keberagaman siswa harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka membangun masyarakat demokratis yang memperlihatkan dan menyadari bahwa setiap individu berbeda. Operasionalisasi hal tersebut dimungkinkan dalam tiga area.

Pertama, pada ruang pembelajaran di kelas. Dalam penentuan kelas perlu diperhatikan keragaman dari segi akademik, kelas sosial dan ekonomi, budaya, dan agama. Kelas yang beragam memungkinkan perjumpaan menjadi lebih intensif. Guru yang menjadi wali kelas perlu diberi pemahaman yang memadai dalam mengelola kelas multikultural. Perjumpaan harian secara alamiah menjadi penting agar anak-anak dihadapkan pada perbedaan di dalam situasi harian. Dalam proses pembelajaran, guru perlu memberikan kesempatan kepada mereka bekerja sama dalam mengerjakan beragam tugas. Kelompok-kelompok yang dibuat harus berbasis pada keberagaman di kelas tersebut. Pada pelajaran PPKn, Sosiologi, Agama, anak-anak harus diberi ruang untuk saling berdiskusi di setiap sesi. Mereka diminta untuk mengemukakan pandangan pada setiap diskusi. Debat-debat akademik dengan menghadirkan situasi keseharian menjadi sangat penting untuk dilakukan. Guru harus menjadi fasilitator yang dapat menghadirkan pembelajaran yang membuka ruang untuk membangun pemikiran kritis, sehingga siswa terbiasa untuk saling mengeluarkan ide yang berbeda, tetapi tetap bertanggung jawab pada setiap apa yang disampaikan ketika berdiskusi.

Kedua, pada ruang-ruang pertemuan di dalam wilayah sekolah. Pada bagian ini program-program di sekolah, seperti kegiatan ekstra dan intra, dapat dijadikan ruang pembelajaran untuk mengoptimalkan

perjumpaan yang memperkuat kebinekaan. Organisasi di sekolah harus dilatih untuk saling bergotong-royong dalam mengerjakan berbagai program yang dirancang selama setahun. Mereka harus dilatih bekerja sama dengan anak-anak yang beragam. Pembimbing OSIS harus memiliki wawasan multikultural sehingga dapat merancang program yang membuat anak-anak dapat saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Organisasi rohani Islam harus memiliki program yang lebih terbuka dengan beragam kalangan. Program-program yang dirancang tidak hanya semata eksklusif bagi anggotanya yang beragama Islam, tetapi memungkinkan mereka berjumpa dengan beragam kalangan siswa. Kerja sama antara berbagai organisasi di sekolah harus dalam payung kebersamaan.

Ketiga, pada ruang eksternal yang memungkinkan anak-anak berjumpa dengan para siswa di sekolah lain. Berbagai kegiatan yang sudah ada, seperti perkemahan, pertandingan olahraga, kompetisi ilmiah, dan pentas seni budaya atau pentas musik dapat menjadi ajang untuk memperkuat persahabatan antarsekolah. Secara rutin sekolah perlu mengadakan pertemuan dengan sekolah lain yang memiliki latar belakang berbeda. Tidak hanya dengan sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Selain itu, pertemuan-pertemuan yang memungkinkan anak-anak dapat berdialog sencara intensif dengan pihak yang berbeda yang akan membuat perspektif mereka menjadi lebih luas dalam menyikapi perbedaan.

Dalam program di atas tiga pilar pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat berkolaborasi untuk memperkuat pendidikan yang mampu mengoptimalkan perjumpaan anak-anak dengan beragam kalangan. Perjumpaan-perjumpaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kebinekaan. Dalam PPK juga keragaman budaya menjadi salah satu bagian penting yang menjadi landasan pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sudiarja, SJ, dkk (Editor). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Gramedia.
- Banks, James A. (Editor). 2009. *The Routledge International Companion to Multicultural Education*. New York: Routledge.
- Banks, James A. & McGee Banks, Seattle CHERRY A. 2010. *Multicultural Education Issues and Perspectives SEVENTH EDITION*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Banks, James A. 2019. *An Introduction to Multicultural Education Sixth Edition*. New York: Pearson.
- Infid. 2016. *Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia Juni 2016 Pembelajaran dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*. Jakarta: INFID
- MAARIF Institute for Culture and Humanity. 2018. *Policy Brief Series: Menolak Radikalisme dalam Pendidikan, Mencipta Sekolah Inklusif-Kebinekaan*. Issue 4. Vol. 1. 2018. Jakarta: CONVEY Indonesia.
- Kompas.com. "Cegah Intoleransi BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah". <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/15/22252581/cegah-intoleransi-bpip-minta-materi-keberagaman-diajarkan-di-sekolah?page=all>. Diakses pada 16 November 2018 pukul 8.24 WIB.
- Merry, Michael S. 2018. *Can Schools Teach Citizenship? Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, DOI: 10.1080/01596306.2018.1488242.

- PPIM UIN Jakarta. 2018. *Policy Brief: Ancaman Radikalisme di Sekolah*. Policy Brief Series, Issue 4 Vol. 1 2018. Jakarta: Convey, PPIM UIN Jakarta, & UNDP.
- PPIM UIN Jakarta. 2018. *HASIL SURVEI PPIM 2018 Pelita yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru Indonesia*. Jakarta: Convey & PPIM UIN Jakarta.
- R. Raihani. 2018. *Education for multicultural citizens in Indonesia: policies and practices*. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 48:6, 992-1009, DOI: 10.1080/03057925.2017.1399250.
- Shawn Shen. 2019. *Teaching 'Multiculturally': Geography as a Basis for Multicultural Education in Korea*. Multicultural Education Review, 11:1, 37-58, DOI: 10.1080/2005615X.2019.1567092.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Citra.
- Tim PGRI. 2014. *Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Tirto.id. *Kemendikbud Akui Intoleransi dan Radikalisme Masih Ada di Sekolah*. <https://tirto.id/dnu3>. Diakses pada 16 November 2018 pukul 8.24 WIB.
- Tracey Yani Harjatanaya & Chang-Yau Hoon. 2018. *Politics of Multicultural Education in Post-Suharto Indonesia: A Study of the Chinese Minority*. Compare: A Journal of Comparative and International Education. DOI: 10.1080/03057925.2018.1493573.

SIKAP KEBERAGAMAAN SISWA (GEN Z) DAN GURU: HASIL DUA SURVEI NASIONAL YANG MENCEMASKAN?

Aziz Awaludin, Dani

PPIM UIN Syarif Hidayatullah

Abstrak. Penelitian tentang cara pandang dan/atau sikap keberagamaan telah beberapa kali dilakukan—termasuk dengan metode survei dan memiliki cakupan nasional seperti Wahid dan LSI (2016) dan SMRC (2016), memiliki hasil yang menarik dan perlu menjadi perhatian kita bersama. Namun, survei nasional serupa yang khusus untuk kalangan pendidikan Indonesia yang multikultural belum pernah dilakukan. Padahal, isu ini memiliki dampak yang strategis bagi kebijakan. Berdasar latar belakang tersebut, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah melakukan dua kali survei nasional, dengan target utama siswa (generasi Z) pada 2017 dan guru pada 2018. Dua survei nasional ini menggunakan metode random sampling, dengan cakupan seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.552 siswa muslim dan 2.237 guru muslim. Kedua survei yang telah dirilis ke publik hasilnya ini, menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan seperti tercermin dari masing-masing judul hasil penelitian “Api Dalam Sekam” dan “Pelita yang Meredup.” Hasil mengkhawatirkan ini baik dari dua konsep besar yang dipakai untuk dalam penelitian ini, intoleransi dan radikalisme. Namun, hasil penelitian ini seringkali disalahpahami bahkan ditolak, tanpa usaha lebih untuk membedah hasil penelitian ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan membedah temuan hasil penelitian dari dua perspektif utama yakni metodologi dan teori yang dikembangkan. Di akhir bagian, beberapa rekomendasi kebijakan terutama yang terkait pendidikan akan diberikan.

Kata kunci: Survei, Radikalisme, Intoleransi, Pendidikan, Multikultural, Guru, Siswa

A. PENDAHULUAN

Masalah intoleransi, radikalisme hingga ekstremisme berkekerasan adalah masalah yang mendera negara multikultural ini sejak lama, di balik segala kebinekaan dan tantangan menyelaraskan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk melihat permasalahan ini lebih dalam (*sophisticated*) dan lebih mutakhir (*updated*) untuk dapat menggambarkan dengan lebih tepat apa yang telah, sedang dan akan terjadi serta rekomendasi solusinya yang potensial dilakukan – termasuk kebijakan yang dapat diambil. Salah satu jenis penelitian yang banyak digunakan akhir-akhir ini adalah penelitian kuantitatif – survei nasional. Mengambil sampel dalam jumlah yang relative kecil dengan metodologi tertentu (biasanya random sampling), penelitian ini diharapkan dapat menangkap fenomena yang sedang terjadi di seluruh populasi yang sangat besar jumlahnya. Berangkat dari tradisi survei politik khususnya dalam dinamika elektoral di Indonesia pada masa reformasi, beberapa survei nasional dilakukan untuk memotret masalah intoleransi, radikalisme hingga ekstremisme berkekerasan.

Misalnya, pada 2016 Wahid Institute bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia, melakukan survei nasional tentang “Potensi Intoleransi dan Radikalisme: Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia.” Survei ini mengambil 1.520 responden dari 34 provinsi di Indonesia, dengan metode multi-stage random

sampling – margin of error 2,6% dan tingkat kepercayaan 96 %. Sebelumnya, pada 2013 Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan – Kementerian Agama telah melakukan Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dengan 3,300 responden dari 33 provinsi. Serta, Lembaga Survei Indonesia melakukan Survei Nasional “Dukungan dan Penolakan terhadap Radikalisme Islam” pada 2005 dengan metode multistage random sampling dan jumlah responden 1,173 orang – margin of error 2,9 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Hasil penelitian-penelitian ini menjadi landasan bagi Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) untuk melakukan dan mengembangkan dua survei nasional yang berfokus pada konteks pendidikan. Posisi fundamental dan strategis pendidikan menjadi pertimbangan utama fokus survei nasional ini, disamping relevansi dan signifikansi isu.

B. LANDASAN TEORI DAN KONSEP

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang disarikan dari berbagai literatur. *Religious intolerance* adalah ketidaksediaan untuk mempersilakan pemeluk agama lain mengekspresikan ide/kepentingan yang berbeda (Sullivan et al. 1982). Radikalisasi mengacu pada adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik (Mohammed Hafez, 2015); serta menggunakan cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik (O’Ashour, 2009). Pada survei ini digunakan Two Pyramid Model Theory (McCauley & Moskalenko, 2017), yang menyatakan bahwa radikalisasi bisa berada dalam tahapan opini dan juga tahapan aksi. Namun demikian, tidak semua opini radikal akan menghasilkan aksi radikal. Konsep pandangan Islamis dalam survei ini, mengacu pada pandangan Islam absolut, yang cenderung bersifat tertutup, *inward looking*, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai “bukan bersifat/bersumber Islam” (Harris, 2008 & Ruthven 2004).

Peran guru dibutuhkan untuk mengonter paham-paham keagamaan yang intoleran dan radikal. Guru yang memiliki pandangan keagamaan yang moderat, toleran, dan memiliki wawasan kebangsaan dan demokrasi yang kuatlah yang bisa menjauhkan anak didiknya dari ideologi yang dapat merusak kerukunan bangsa. Untuk itu, mengetahui kondisi keberagamaan guru dan siswa di Indonesia saat ini menjadi penting. Survei PPIM UIN Jakarta pada 2018 yang berjudul “Api dalam Sekam” dan pada 2019 yang berjudul “Pelita yang Meredup” ini hendak menjawab pertanyaan: *Seberapa intoleran dan radikal guru sekolah/madrasah dan siswa di Indonesia, serta faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberagamaan mereka?*

C. TEMUAN STUDI: TELAAH DUA SURVEI NASIONAL

1. Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z

Survei nasional “Api dalam Sekam” (2018) mengkaji sikap dan perilaku keberagamaan siswa sebagai generasi Z serta faktor-faktor yang ikut mempengaruhinya. Sampel yang digunakan sebanyak 1.522 siswa dengan Margin of Error (MoE) sebesar $\pm 2,3\%$. Metode penarikan sampel yaitu Multistage Sampling (Three Stage Stratified Sampling) dengan strata kabupaten dan kota. Tujuan dari studi ini adalah ingin melihat lebih mendalam dan komprehensif tingkat radikalisme dan intoleransi siswa Muslim saat ini. Survei ini menggunakan dua alat ukur untuk mengukur tingkat intoleransi dan radikalisme. Pertama, Implicit Association Test (IAT) digunakan sebagai instrumen untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme secara implisit. Alat ukur implisit ini digunakan mengingat topik penelitian ini relatif sensitif. Sehingga, instrumen ini bisa digunakan sebagai media pengecekan akan akurasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala dan kuesioner. Kedua, survei ini memakai kuesioner *self-report* untuk menilai tingkat intoleransi dan radikalisme serta faktor-faktor yang memengaruhi intoleransi dan radikalisme.

Beberapa tema yang dijadikan variabel yang mempengaruhi tingkat radikalisme dan intoleransi diklasifikasi menjadi dua level, yaitu level personal (demografi, makna hidup, dan religiusitas) dan level lingkungan (kedekatan dengan ormas, keluarga, internet/media sosial, Islamisme, dan kinerja pemerintah). Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa pada level sikap/opini siswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal (58,5%) dan intoleran (51,1% intoleransi internal, dan 34,3% intoleransi eksternal). Sementara pada level perilaku/aksi, sebagian besar mereka berperilaku moderat (74,2%). Namun, ada perbedaan signifikan dalam hal perilaku toleransi, mereka cenderung lebih toleran secara eksternal (62,9%) daripada secara internal (33,2%). Artinya siswa lebih toleran terhadap pemeluk agama lain ketimbang terhadap perbedaan di dalam umat Islam, terutama terhadap kelompok, aliran, atau paham yang dianggap menyimpang atau sesat. Faktor yang berpengaruh terhadap sikap intoleran adalah ketika perbedaan internal umat Islam itu diasosiasikan dengan Ahmadiyah dan Syiah.

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi paham keagamaan siswa dan mahasiswa sebagai Generasi Z:

- a) Guru dan model pembelajaran PAI. Sebanyak 48,95% siswa dan mahasiswa merasa bahwa pendidikan agama memiliki porsi besar dalam mempengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Sedangkan mereka yang merasa bahwa pendidikan agama sama sekali tidak mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain hanya 23,08%.
- b) Akses internet untuk sumber pengetahuan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya radikalisme dan intoleransi. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Padahal mereka yang memiliki akses internet sangat besar yaitu sebanyak 84,94%, dan hanya 15,06% sisanya yang tidak memiliki akses internet.
- c) Persepsi tentang Demokrasi, NKRI, dan kinerja pemerintah. Walaupun siswa dan mahasiswa merasa belum puas dengan kinerja pemerintah, penerimaan mereka terhadap prinsip-prinsip dasar negara—Pancasila, NKRI, dan demokrasi—tetap tinggi. Sebanyak 52,29% menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini parah dan sangat parah, terutama dalam hal kesenjangan ekonomi. Kemudian 43,46% menyatakan kondisi ekonomi cukup parah. Dari aspek penegakan hukum, sebanyak 69,80% menyatakan penegakan Evaluasi negatif terhadap kinerja pemerintah tidak berbanding lurus dengan penerimaan mereka terhadap NKRI dan demokrasi. Mereka umumnya masih meyakini bahwa bentuk negara NKRI dan sistem politik demokrasi adalah terbaik untuk Indonesia. 90,16% setuju bahwa pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebanyak 85% setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Kemudian sebanyak 80,74% tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah kafir dan thaghut.

2. Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia

Selanjutnya, dalam survei nasional “Pelita yang Meredup” (2019), penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan serta sikap keberagamaan guru sekolah/madrasah (TK sampai dengan SMA) di Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 2.237 orang yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia, dimana pada setiap provinsi dipilih kabupaten/kota secara acak (*random*) berdasarkan teknik Probability Proporsional to Size (PPS) pada jumlah guru yang ada di tiap provinsi, baik yang di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenag. Sama seperti survei nasional sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan dua alat ukur untuk mengukur tingkat intoleransi dan radikalisme. Pertama, alat ukur Implicit Association Test (IAT) digunakan untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme secara implisit. Kedua, penelitian menggunakan

kuesioner *self-report* dalam menilai intoleransi dan radikalisme serta faktor-faktor yang memengaruhi intoleransi dan radikalisme.

Skor opini toleransi guru, dengan menggunakan alat IAT yang implisit, mencapai 63,07% guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain, serta, dengan menggunakan alat ukur eksplisit, sebesar 56,90% guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain. Bila dilihat skor opini radikal guru baik dari alat ukur implisit (IAT) maupun alat ukur eksplisit (kuesioner), hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat ukur implisit (IAT), sebesar 14,28% guru memiliki opini yang sangat radikal dan radikal. Sedangkan dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang eksplisit, guru memiliki opini yang sangat radikal dan radikal sebesar 46,09%. Selain opini radikal, survei ini juga melihat intensi-aksi radikal guru yang mencapai sekitar 40%.

Ada tiga hal yang dapat dikaitkan dengan intoleransi dan radikalisme guru. Pertama adalah pandangan Islamis. Kedua, aspek demografis, dan Ketiga, adalah peran ormas dan sumber pengetahuan ke-Islam-an. Berikut ini penjelasan masing-masing faktor terkait Intoleransi dan radikalisme guru.

3. Pandangan Islamis

Faktor Islamisme menjadi satu variabel yang penting terkait intoleransi dan radikalisme guru. Pandangan ke-Islaman guru mengacu pada aspek bagaimana syariat Islam diterapkan dalam semua ranah politik, memperlihatkan corak yang disebut sebagai Pemahaman Islamis-radikal menekankan pentingnya syariat dijadikan sumber referensi utama dalam semua aspek kehidupan.

Berikut ini gambaran Islamisme guru Indonesia:

- a) Sebanyak 40.36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat.
- b) Sebanyak 82.77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.
- c) Sebanyak 62.22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini.
- d) Sebanyak 75.98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya.
- e) Sebanyak 79.72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam.
- f) Sebanyak 23.42% Guru setuju bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut karena telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.
- g) Sebanyak 64.23% Guru setuju bahwa non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi Presiden di Indonesia.

Guru yang setuju bahwa umat Islam tidak perlu lagi mempelajari sumber-sumber pengetahuan dari Barat mencapai 40.36%. Jumlah yang cukup besar. Pandangan guru ini dapat ditafsirkan sebagai keyakinan mereka tentang Islam yang absolut. Sebab, Islam dipahami sebagai “paling sempurna dan mencakup semuanya” sehingga harus menjadi satu-satunya sumber rujukan dalam memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pengetahuan.

Cara pandang absolut demikian merupakan salah satu ciri penting dalam fundamentalisme keagamaan (Harris, 2008 dan Ruthven 2004). Karena pandangannya yang demikian, para penganutnya cenderung

bersifat tertutup, inward looking, dan eksklusif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang diidentifikasi sebagai “bukan bersifat/ bersumber Islam”.

4. Aspek Demografis

Berbagai aspek demografis dapat dikaitkan dengan intoleransi dan radikalisme guru. Aspek demografis yang dilihat dalam survei PPIM 2018 ini adalah jenis kelamin, sekolah versus madrasah, negeri versus swasta, mata pelajaran yang diampu guru, penghasilan, jenjang pendidikan, dan usia guru. Berikut ini temuan-temuannya:

- a) Guru perempuan ($M=46,53$) memiliki opini intoleran yang lebih tinggi pada pemeluk agama lain dibandingkan dengan guru laki-laki ($48,05$).
- b) Guru perempuan ($M=48,08$; $M=50,08$) memiliki opini dan intensi- aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki ($M=55,1$; $M=56,3$)
- c) Guru madrasah ($M=44,66$) lebih intoleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru sekolah ($M=47,79$).
- d) Perbedaan signifikan hanya terjadi pada opini toleransi eksternal ($t=4.030$, $p= 0.000$), guru sekolah lebih toleran pada pemeluk agama lain dibandingkan guru madrasah.
- e) Bila didasarkan pada status guru negeri vs guru sekolah swasta, perbedaan signifikan terjadi pada opini dan intensi-aksi toleransi pada pemeluk agama lain ($t=2.043$, $p=0.041$; $t=2.954$, $p=0.003$) serta radikalisme ($t=2.150$, $p=0.032$; $t= 2.855$, $p=0.004$) Guru sekolah/madrasah swasta lebih intoleran dibandingkan guru sekolah/ madrasah negeri. Guru sekolah/madrasah swasta lebih radikal dibandingkan guru sekolah/madrasah negeri.
- f) Perbedaan signifikan hanya terjadi pada toleransi pada pemeluk agama lain, opini radikal ($F=2.494$, $p=0.008$) dan Intensi Aksi Radikal ($F=3.701$, $p=0.000$) bila didasarkan pada mata pelajaran yang diampu. Bila dilihat dari mean, hasilnya menunjukkan bahwa guru-guru mata pelajaran Bahasa (Arab, Indonesia dan Inggris), Olahraga & Kesenian, Bahasa Daerah, memiliki intoleransi, opini dan intensi-aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru mata pelajaran lainnya.
- g) Semakin rendah penghasilan semakin tinggi opini ($F=3,390$, $p=0,009$) dan intensi-aksi radikal ($F=10,481$, $p=0,000$).
- h) Guru TK/RA memiliki opini intoleran ($F=4,339$; $p=0,005$) terhadap pemeluk agama lain yang lebih tinggi dibandingkan guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- i) Semakin tinggi usia guru semakin tinggi opini toleransi eksternalnya, makin rendah opini dan intensi aksi radikalnya ($M=40,55$; $F=20,037$; $p=0,000$; $R^2=9\%$).

5. Ormas dan Sumber Pengetahuan Keislaman

Bagaimana dengan peran Ormas Islam terhadap intoleransi dan radikalisme guru? Studi Infied (2016) tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia (Penelitian di 4 daerah: Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang). Temuannya: pertarungan pengaruh antara Ormas Islam ikut berperan menghasilkan kecenderungan konservatif dan gejala intoleran bahkan radikalisme (Kasus, Tasikmalaya). Hasil survey PPIM 2018 menunjukkan bahwa:

- a) Guru merasa paling dekat dengan lima organisasi masyarakat Islam berikut: NU, Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Majelis Tafsir AlQuran dan Front Pembela Islam.
- b) Hanya 33,65% Guru sangat aktif/aktif. Sisanya 66,35% guru tidak aktif/sangat tidak aktif dalam ormas keislaman.
- c) Ada pengaruh kedekatan dengan Ormas Keislaman terhadap toleransi eksternal ($F=2.001$, $p=0.007$; $F=2.240$, $p=0.002$) baik opininya maupun intensi aksinya. Pengalamannya aktif dalam

organisasi kemahasiswaan juga berpengaruh pada opini dan intensi radikal guru ($F=4.458$, $p=0.000$; $F=4.778$, $p=0.000$).

- d) Ada pengaruh kedekatan guru dengan Ormas Keislaman terhadap opini dan intensi-aksi intoleran. Ada pengaruh pengalaman guru aktif dalam organisasi kemahasiswaan terhadap toleransi eksternal ($F=2.353$, $p=0.016$; $F=2.252$, $p=0.021$) baik opininya maupun intensi aksinya. Pengalamannya aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga berpengaruh pada opini dan intensi radikal guru ($F=2.385$, $p=0.015$; $F=3.012$, $p=0.002$).

Ustadz yang dijadikan panutan oleh guru adalah Ustadz Abdus Shomad (29.31%), Aa' Gym (11.63%), Mama Dedeh (9.66%), Prof. Dr. Quraish Shihab (5.41%), Ustadz Adi Hidayat (3.58%), Ustadz Maulana (3.46%), dan KH. Mustofa Bisri (2.91%)

Ada pengaruh tokoh panutan agama terhadap toleransi pada pemeluk agama lain ($F=3.572$, $p=0.000$; $F=2.451$, $p=0.000$), radikalisme ($F=5.210$, $p=0.000$; $F=5.149$, $p=0.000$) baik pada level opininya maupun intensi aksinya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Akhirnya, temuan dari kedua survei nasional ini menjadi alarm dan peringatan yang sangat keras bagi Pemerintah dan kita semua bahwa benih-benih intoleransi dan radikalisme ternyata juga tumbuh subur di ruang kelas. Beberapa studi lainnya juga sudah mengkonfirmasi perkembangan tersebut. Di Indonesia, agama dan pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Memisahkan keduanya, setidaknya untuk saat ini, merupakan suatu yang mustahil. Pendidikan agama mempunyai sejarah panjang dan telah melekat bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, Indonesia, sebagai negara multikultural, berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif.

2. Rekomendasi

1. Pengenalan studi-studi agama dan kepercayaan perlu diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam.
 - a. Terkait materi: Dalam pengajaran PAI, perlu mengembangkan literasi keagamaan (religious literacy) dan pendidikan lintas iman (interfaith education).
 - b. Perlu memberikan banyak praktik pengalaman keberagaman dan pengalaman mengatasi masalah bersama antar siswa lintas iman, seperti siswa-siswi yang berbeda agama bisa menceritakan pengalaman mereka merayakan hari besar agamanya, dan berbagi kisah tentang nilai-nilai agama yang menjunjung harkat kemanusiaan.
 - c. Penggunaan berbagai macam metode pendidikan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakter pembelajar generasi Milenial, seperti audio visual, infografis dan media sosial.
 - d. Reformasi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Guru.
2. Negara berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif. Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertegas dan memperdalam materi toleransi dalam buku ajar PAI. Selain itu untuk memastikan buku ajar PAI tidak tersusupi ideologi radikalisme dan intoleransi, dibutuhkan lajnah pentashih buku ajar PAI. Institusi ini memiliki otoritas untuk mengawasi proses pembuatan dan penerbitan buku PAI. Tujuannya untuk memastikan agar buku ajar PAI bebas dari muatan radikal dan intoleran, serta sejalan dengan nilai-nilai kewargaan dan kebangsaan.
3. Pemerintah membuka peluang lebih besar pada guru-guru untuk mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan dalam sebuah program yang sistematis.

Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas guru dan dosen dalam menyampaikan materi toleransi dan keberagaman. Pelatihan ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran guru bahwa tujuan PAI tidak hanya mendidik siswa agar taat beragama, tapi juga menyiapkan siswa agar menjadi warga negara yang baik, yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai kewargaan (toleransi, keberagaman, dan kebebasan) dan kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi).

4. Pemerintah perlu melakukan literasi media, khususnya media sosial di tingkat sekolah dan universitas, meliputi: pembelajaran cross-check terhadap pemberitaan hoax, menyebarkan konten positif di media sosial, dan mengedepankan sikap kritis dalam menyaring dan memproduksi konten. Narasi alternatif yang sesuai dengan karakteristik generasi Milenial perlu diperbanyak, misalnya dengan memproduksi dan mengampanyekan konten-konten yang mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman dan perdamaian di sekolah dan universitas.
5. Ormas Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu lebih aktif memproduksi dan mengampanyekan konten-konten Islami yang memuat pesan perdamaian dan nilai-nilai toleransi dengan kemasan yang lebih populer.

LITERASI KEAGAMAAN MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI JAWA BARAT DAN BANTEN

Mahmudah Nur, Muhamad Rosadi, Saeful Bahri, dan Eva Dwi Kumala Sari
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Abstrak. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai pemahaman terhadap literasi keagamaan Islam dan pemahaman keagamaan Islam mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Jawa Barat dan Banten. Kajian kuantitatif dengan rancangan *sequential explanatory* ini menggunakan angket sebagai instrumen yang berisi 38 pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang keseluruhnya merupakan mahasiswa semester enam Jurusan PAI. Hasil kajian ini menemukan bahwa pemahaman literasi keagamaan Islam mahasiswa di empat PTKIN terkategori baik. Sumber-sumber literasi keagamaan tersebut mencakup media televisi, internet, buku-buku keagamaan, baik untuk menambah wawasan maupun menunjang tugas mata kuliah. Selain merujuk pada berbagai sumber literatur keagamaan, para mahasiswa juga mengikuti berbagai kajian dari beragam pendakwah.

Kata kunci: literasi keagamaan, mahasiswa, perguruan tinggi keagamaan Islam, pendidikan agama Islam

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gerakan literasi merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia. Gerakan ini dimulai sejak tahun 2016 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinamai dengan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri atas Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) (Solihin dkk., 2019: 2). Literasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Literasi>) diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Secara sederhana, literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, literasi merupakan kemampuan memperoleh informasi dan menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat (Abidin & M. Taufik Ismail, 2017: 151).

Dengan merujuk pada laporan Forum Ekonomi Dunia 2015 (Nugrahini, 2016: 5), ada enam komponen literasi dasar yang harus dimiliki setiap orang, yaitu kemampuan baca-tulis-berhitung, sains, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Namun, saat ini, menurut Abidin dan M. Taufik Ismail (2017: 151). Buku pelajaran tidak lagi menjadi teman setia pelajar masa kini. Budaya membaca, menulis, dan berdiskusi tidak lagi menjadi ciri khas pelajar. Padahal, ada pepatah yang mengungkapkan bahwa buku adalah “gudang” ilmu dan membaca adalah “kunci”-nya. Yang perlu dipertanyakan kemudian adalah bagaimana dengan perkembangan literasi keagamaan saat ini, khususnya

literasi agama Islam? Apakah lembaga pendidikan keagamaan turut andil dalam menyukseskan program pemerintah?

Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyebutkan bahwa; pertama, pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Kedua, pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Artinya kemampuan literasi tidak hanya terbatas kepada melek huruf saja, tetapi juga bisa digunakan dalam konteks pendidikan agama agar masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, juga melek agama. Seperti yang dikemukakan Dinham dan Jones (2010) bahwa literasi agama sangat penting untuk menangkal stereotip dan membangun relasi yang baik di atas perbedaan yang ada.

Moore (2015: 27) mengatakan bahwa literasi keagamaan adalah kemampuan untuk membedakan dan menganalisis titik temu antara agama dan kehidupan sosial serta politik dan budaya dari berbagai sudut pandang. Dikatakannya juga bahwa orang yang melek agama akan memiliki, pertama, pemahaman dasar tentang sejarah, teks-teks sentral seperti Alquran dan hadis, kepercayaan, praktik dan manifestasi kontemporer dari beberapa tradisi keagamaan dunia yang muncul dan terbentuk dari konteks sosial, historis, dan budaya tertentu. Kedua, kemampuan untuk membedakan dan menganalisis dimensi agama dengan politik dan budaya.

Menurut Baedowi (2012: 79), dalam kasus kehidupan keberagamaan pada saat ini banyak berpikiran dangkal yang mengakibatkan munculnya sikap radikal dan kekerasan atas nama agama. Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak sekali mahasiswa mengakses wawasan keagamaan dengan mudah. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi para dosen untuk mengawasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), dalam mencari sumber keagamaan serta memilah dan memilih dengan bijak sumber pengetahuan keagamaan. Mahasiswa PAI, calon guru agama di sekolah, penting untuk mengetahui dengan benar sumber pengetahuan keagamaan. Wibowo (2014:292) mengatakan bahwa merekalah guru PAI yang menanamkan nilai-nilai karakter melalui standar kompetensi, kompetensi inti, indikator pelajaran, dan tujuan pembelajaran kepada para siswa di sekolah.

Mahasiswa mempunyai peran yang sangat strategis dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya terkait dengan literasi keagamaan. Oleh karena itu, sebaiknya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebagai wadah penyiapan tenaga pendidik dalam bidang agama perlu membekali mahasiswanya tentang kemampuan literasi keagamaan yang baik. Mahasiswa yang mempunyai kemampuan literasi keagamaan yang baik akan menunjang bagaimana berpikir dan berwawasan moderat. Sayangnya, survei yang dilakukan Alvira (Juni, 2018) menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa terindikasi kuat terpapar ajaran intoleran dan radikalisme yang ditopang dengan fanatisme agama. Adanya deklarasi dukungan khilafah oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Januari 2017 menjadi salah satu bukti nyata masuknya ajaran radikalisme di kalangan mahasiswa. Temuan PPIM (2017) menunjukkan bahwa 69,3% mayoritas guru PAI memiliki sikap dan aksi intoleran.

Kondisi demikian senada dengan pendapat Maulana (2017) bahwa ajaran intoleransi dan radikalisme telah masuk di sekolah umum melalui guru agama yang menyebarkan paham eksklusivisme kepada anak didiknya. Bahkan, radikalisme ditengarai telah masuk secara masif di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren (Zada, 2009: 14). Zada (2009) menyimpulkan ada beberapa faktor yang

menyebabkan munculnya proses radikalisi umat Islam Indonesia, antara lain sikap literal yang sangat kaku dalam memahami teks agama yang harus sesuai atau sama dengan kondisi pada zaman Nabi Muhammad Saw.

2. Tujuan, Batasan, dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman literasi keagamaan dilihat dari sumber informasi keagamaan Islam dan pemahaman keagamaan Islam mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di PTKIN. Pengetahuan terhadap literasi keagamaan yang dimiliki mahasiswa PAI di empat PTKIN di Jawa Barat dan Banten dapat menjadi dasar program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Fokus literasi keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemahaman dan sumber pengetahuan agama yang diperoleh mahasiswa, baik dari buku keagamaan, koran, penceramah, televisi, radio, internet, maupun media sosial. Kajian mengenai literasi keagamaan di kalangan mahasiswa PAI menjadi penting guna terwujudnya guru yang kompeten dalam pengetahuan agama. Upaya tersebut sebagai bagian dari mendukung rencana dan strategi nasional Kementerian Agama (Renstra) 2015--2019, yakni (1) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama sehingga agama dapat berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan; (2) meningkatkan kerukunan umat beragama; serta (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama.

Kajian ini mengasumsikan bahwa rendahnya akses sumber informasi, baik online maupun offline, dan kemampuan mahasiswa jurusan PAI dalam memaknai agama secara komprehensif berdampak rendahnya literasi keagamaan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya budaya literasi mahasiswa jurusan PAI untuk memperkaya khazanah pengetahuan terkait dengan pendidikan agama Islam.

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pemahaman literasi keagamaan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di empat PTKIN di Jawa Barat dan Banten?

PTKIN yang menjadi locus penelitian adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa kampus yang terpilih ini merepresentasikan beberapa kampus di bawah naungan Kementerian Agama dan menjadi bagian wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta. Adapun alasan pemilihan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya jurusan PAI adalah bahwa lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK) menghasilkan lulusan (output dan outcome) yang beriman, bertakwa, bermoral (akhlakul karimah), berwawasan luas, dan dapat berperan serta dalam membina kehidupan rohani masyarakat.

Obyek penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI, semester enam. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian ini dapat mengukur keberhasilan pembelajaran materi PAI yang nantinya akan diajarkan kepada anak didik dilihat dari sumber pengetahuan mereka, baik media cetak, audio-visual, maupun digital. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Kementerian Agama, dalam menyusun dan menggalakkan program literasi keagamaan moderat bagi mahasiswa dan dosen di PTKIN.

3. Kerangka Teori

Istilah literasi pada umumnya mengacu pada kemampuan menulis dan membaca, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Menurut kamus online (Merriam-Webster), literasi berarti 'kemampuan melek huruf/aksara' yang meliputi kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga mencakup melek visual, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami ide yang disampaikan secara visual (adekan, video,

gambar) atau having knowledge or competence (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/literate>).

Pengertian literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara (Retnaningdyah, 2016: 2). Menurut Ma'mur (2010: 111), literasi mengacu pada keterampilan membaca dan menulis, artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasai keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa. Namun, menurutnya juga, literasi tidak diartikan dalam konteks yang sempit, yakni hanya membaca dengan membawa buku. Akan tetapi, literasi juga mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan gemar membaca dan memberikan pemahaman tentang pentingnya membaca.

Konsep literasi yang diajukan oleh Kirsch dan Jungeblut (1993: 3) adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks pendidikan, literasi menjadi kunci utama sebab pendidikan sejatinya adalah untuk meningkatkan literasi seseorang di berbagai bidang (Iswanto dkk., 2017: 7).

Konsep keagamaan dalam kajian ini, mengacu pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keagamaan>), yakni segala sesuatu mengenai agama. Dalam penelitian ini sumber literasi keagamaan adalah bacaan keagamaan Islam, baik buku, majalah, maupun buletin yang berisi tentang teks-keagamaan Islam. Isinya mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982 yang dapat disesuaikan dengan perkembangan (Saefullah, 2008: 32) yang bermuara pada Alquran dan hadis, hukum Islam dan pranata sosial, dakwah dan komunikasi, sejarah peradaban Islam, bahasa dan sastra Arab/sastra umum, pemikiran Islam, perkembangan modern dalam Islam, sains dan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami apa yang dibaca dan ditulis. Dalam pandangan Moore (2006) melalui studinya di beberapa negara, termasuk Indonesia, India, Pakistan, dan Amerika Serikat bahwa kualitas literasi keagamaan berpengaruh terhadap perilaku keagamaan penganutnya. Moore mendefinisikan *literasi keagamaan* sebagai suatu kemampuan memahami ajaran agama, bukan hanya doktrin normatifnya, melainkan juga bagaimana penerapan agama itu dalam kehidupan sosial (Jahroni dan Bakar, 2019: 3). Artinya literasi keagamaan dalam bentuk kemampuan memahami ajaran agama diperoleh melalui pengajaran agama, sedangkan kemampuan memahami melaksanakannya diperoleh melalui belajar tentang agama.

Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Al-Syami (2018). Ia membedakannya atas dua kategori, yaitu *fiqh al-din*, yang mengacu pada kemampuan memahami doktrin ideal agama dalam kitab suci dan *fiqh al-tadayyun*, yaitu kemampuan memahami tentang bagaimana doktrin ideal agama tersebut diterapkan dalam konteks sosial-historis yang berubah. Berbeda dengan Al-Syam, Prothero (2007: 12) menyebut literasi keagamaan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan tradisi keagamaan, baik berupa istilah kunci, simbol, doktrin, praksis, ucapan, karakter, maupun narasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep literasi keagamaan dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami ajaran agama Islam, tidak bagaimana mempraktikkan apa yang dibaca, ditulis, dan dipahami.

Terkait dengan sumber pengetahuan yang dipakai oleh mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan keagamaannya dalam penelitian ini tidak terbatas pada media cetak, tetapi juga audio-visual dan digital.

Media cetak adalah barang cetakan sebagai sarana penyampaian pesan, seperti majalah, surat kabar, buku, dan berbagai bentuk barang cetakan (Suranto, 2010: 228). Media audio-visual adalah sarana informasi yang bisa didengar dan dilihat, seperti siaran televisi dan radio. Media digital adalah sumber pengetahuan yang mengandung informasi keagamaan melalui media internet, seperti *you tube*, *instagram*, *line*, dan *website*. Tingkat literasi keagamaan dalam kajian ini diukur dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada sumber bahan pembelajaran PAI jenjang SMA yang mencakup Alquran, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

Hasan (2018) pernah melakukan pemetaan literatur keislaman yang beredar di kalangan siswa SMA dan mahasiswa. Ia melihat tingkat keberterimaan literatur keislaman yang beraneka ragam dalam orientasi ideologis, *genre*, dan kecenderungan pendekatan. Latief (2010) juga pernah memetakan literatur keislaman yang tersebar di kalangan mahasiswa di lima universitas di Yogyakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa literatur keislaman di kalangan mahasiswa dapat dibedakan dalam tiga arus utama, yaitu literatur Salafi Puritan, literatur keislaman umum, dan literatur keislaman yang berorientasi ideologi politik.

Kajian tentang potret sistem produksi guru Agama Islam di Indonesia juga telah dilakukan oleh Center for the Study of Islam and Social Transformation (CIS *Form*), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yang didukung oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019: v-vi). Kajian ini dilakukan terhadap sembilan belas perguruan tinggi keagamaan Islam di delapan wilayah di Indonesia. Terdapat beberapa titik kelemahan dalam prodi PAI untuk mencetak guru PAI yang perlu dibenahi, seperti *input* dan *rekrutmen* mahasiswa, kurikulum, kompetensi dosen, proses KBM, dan lingkungan kampus. Indikator tersebut berkontribusi terhadap pembentukan pengetahuan dan sikap keagamaan mahasiswa prodi PAI. Di samping itu, kajian ini juga menyarankan bahwa program yang mengakomodasi lokalitas menjadi cara untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan mahasiswa prodi PAI sebagai calon guru PAI. Selanjutnya, prodi PAI diharapkan tidak sekadar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme negara dalam mengarusutamakan Islam moderat.

Kajian literasi keagamaan yang sementara ini ditemukan adalah kajian Center for Study of Religion and Culture/Pusat Kajian Agama dan Budaya (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keagamaan di masjid masih berkisar pada masalah ibadah, akidah, dan akhlak. Literasi keagamaan *takmir* atau *marbot* masjid belum menyentuh persoalan sosial kemanusiaan (Jahroni & Bakar, 2019). Penelitian itu merujuk pada pendapat Diane L. Moore (2006) bahwa literasi keagamaan adalah kemampuan memahami ajaran agama, bukan hanya pada doktrin normatifnya, melainkan juga bagaimana penerapannya dalam kenyataan sosial. Literasi keagamaan yang pertama diperoleh melalui pengajaran agama (*religious learning*), sedangkan yang kedua melalui belajar tentang agama (*learning about religion*). Pendapat Al-Syami (2018) juga dirujuk, terutama dalam membahas *fiqh al-tadayyun*, dan membuka wawasan dan inspirasi tentang bagaimana agama diamalkan dalam konteks sosial-historisnya.

Skerrett (2013) menjelaskan bahwa literasi keagamaan yang dilakukan di ruang kelas mampu meredakan ketegangan. Mahasiswa dan dosen saling berbagi nilai empati kemanusiaan, juga pada komunitas kelas. Menurut Nurzakiyah (2018: 29), literasi agama dapat dijadikan sebagai alternatif pendidikan moral di sekolah. Literasi agama yang baik akan menumbuhkan minat baca juga melatih peserta didik untuk mengkritisi sumber ilmu, baik dalam bentuk teks (buku), lisan, visual, maupun digital. Jika siswa mempunyai pemahaman mendalam terhadap sumber ilmu tersebut, mereka dapat memilih berbagai

alternatif nilai yang ada dan mengaplikasikannya sebagai wujud aktualisasi diri. Ihsan (2018: 188-189) dalam kajiannya juga menunjukkan bahwa konsep penguatan berbasis literasi pesantren menjadi salah satu upaya penguatan untuk mengatasi stigma bahwa PAI tidak lebih hanya sebagai suplemen kegiatan pembelajaran.

Saidah (2018) menyatakan bahwa budaya literasi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan literasi dengan baik tentu akan mendapat pengalaman belajar. Dalam skripsi ini dibahas mengenai materi yang harus dipahami peserta didik berdasarkan kegiatan literasi yang telah mereka lakukan. Bukti adanya peningkatan pemahaman peserta didik dilihat dari keaktifan ketika berdiskusi. Menurut Kusmana (2017), literasi dimaknai sebagai kemampuan baca-tulis atau kemelekwancaan. Dalam penggunaannya, literasi dimaknai sebagai kemampuan integral antara menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir. Literasi juga dimaknai sebagai piranti kemampuan yang menunjang keberhasilan dalam lingkungan akademik dan sosial. Dalam perkembangannya, konsep literasi dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan manusia sehingga muncul terminologi, seperti literasi sains, literasi teknologi, literasi sosial, dan literasi keagamaan.

Jones (2015) berpendapat bahwa lembaga pendidikan tinggi atau universitas mempunyai potensi dan peran penting dalam memperbaiki diskusi publik mengenai agama dan kepercayaan. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa universitas merupakan tempat bertukar informasi dan pengetahuan serta tempat terjadinya kontak antarmahasiswa yang berbeda status sosial dan kepercayaan. Dalam tulisannya, Jones membahas, antara lain kondisi agama di berbagai universitas saat ini, prioritas, dan tantangan literasi keagamaan di lembaga pendidikan tinggi.

Pemetaan perilaku remaja dalam mencari sumber informasi dan mengembangkan pemahaman keislaman melalui media internet sangatlah penting (Halim, 2015). Dalam penelitiannya, Halim menemukan bahwa jaringan internet memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir remaja. Media internet menentukan dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap informasi yang diperoleh. Remaja yang mempunyai kepribadian yang baik dan tangguh tidak mudah diarahkan oleh media informasi, mereka dapat menentukan sendiri pandangan dan pemahaman yang mereka terima. Pengetahuan dasar, pendidikan akhlak, dan kepribadian yang baik menjadi modal bagi remaja dalam mengembangkan pengetahuan mereka melalui pemanfaatan jaringan internet.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ada kecenderungan meningkatnya pemahaman agama yang radikal dan tindakan intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Kecenderungan negatif tersebut diasumsikan merupakan dampak dari pemahaman keagamaan yang keliru dan dangkal. Oleh karena itu, studi ini ingin mengetahui bagaimana literasi keagamaan mahasiswa jurusan PAI yang akan menjadi sumber pembelajaran agama pada masa yang akan datang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *mix model* dengan model *sequential explanatory*. Cirinya adalah melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu pada saat pengumpulan dan analisis data, kemudian diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif (Cresswell, 2009: 299). Metode *mix model* adalah perpaduan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif atau lebih dikenal sebagai *mix method research*. Tashakkori dan Teddlie (2010: 14) mengemukakan bahwa metode penelitian kombinasi adalah penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Cresswell (2009: 299), metode ini dikenal sebagai *multimethods* (multimetode) atau *convergence* (dua metode bermuara ke satu metode).

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi (prodi) PAI di empat PTKIN di Jawa Barat (UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dan Banten (UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin) yang berjumlah 666 mahasiswa yang terdiri atas tiga 3 rombel dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 120 mahasiswa, 6 rombel dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjumlah 239 mahasiswa, 5 rombel dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin berjumlah 172 mahasiswa dan 4 rombel dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon berjumlah 137.

Teknik penentuan sampel menggunakan *cluster random sampling* dengan menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan individu secara terpisah. Individu yang mempunyai karakteristik yang sama dikategorikan dalam satu kelompok. Biasanya pengambilan sampel dilakukan berdasarkan wilayah dan letak geografis (Edward L, 1983) agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi yang ada dan juga dapat menggambarkan populasi yang ada di Indonesia wilayah barat. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kepercayaan sebesar 95%, maka tingkat kesalahan margin eror 5%. Rumus Slovin adalah sebagai berikut;

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

$$n = 666 (1 + 666 .0.05^2)$$

$$n = 399.400 \text{ atau dibulatkan menjadi } 400 \text{ mahasiswa.}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

E = Batas Toleransi Error

(Barlett, 2001: 43-50).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket tentang pemahaman dan sumber informasi dan wawancara mendalam dengan beberapa sivitas akademika terkait literasi keagamaan. Tahap awal menggunakan angket sebagai instrumen yang berisi 38 pertanyaan, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis. Selanjutnya, tahap kualitatif melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dan analisis dokumen. Untuk mengetahui keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Analisis data dilakukan berdasarkan bahan dari lapangan berupa hasil wawancara terbuka dan studi pustaka. Analisis isi dilakukan dengan mencermati judul buku, nama pengarang, bidang kajian, penceramah yang disukai, dan media sebagai sumber informasi keagamaan, seperti internet, televisi, dan radio. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis substansi literatur kajian. Pengertian *wacana* di sini adalah komunikasi tulisan (unit bahasa yang lebih besar dari kalimat) yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya. Pengertian *kepercayaan* di sini sesuai dengan pendapat Fowler (dalam Eriyanto, 2009: 2) adalah perwakilan pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Literatur yang ada diidentifikasi, diinventarisasi, dan dianalisis untuk mengetahui karakteristik, kecenderungan, arah, dan ideologi atau pemikirannya.

Validitas data penelitian ini menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis/CFA*) dengan *software M- Plus* untuk menentukan butir yang valid dan butir mana yang akan dibuang (Umar, 2012). Prosedur kerja CFA adalah: (a) menguji hipotesis apakah semua butir mengukur satu konstruk yang didefinisikan (model dikatakan fit jika data dan teori tidak berbeda); (b) menguji hipotesis apakah setiap butir menghasilkan informasi secara signifikan tentang konstruk yang diukur. Butir yang tergolong baik terbagi atas tiga kategori: (1) jika $t < 1.96$, maka butir harus dibuang dan jika $t > 1.96$, maka butir tersebut valid; (2) melihat positif atau negatifnya muatan faktor dan jika muatan faktornya negatif, butir harus

dibuang dan *jika* muatan faktor positif, butir diterima; (3) melihat korelasi parsial atau kesalahan pengukuran butir dengan kesalahan pengukuran butir lainnya. Jika lebih besar dari tiga kesalahan pengukuran pada *theta-delta*, maka butir tersebut dibuang karena mengukur hal yang lain (*multidimensional*). (Umar, 2012).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden Penelitian

Penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan data awal pemahaman literasi keagamaan dan sumber literasi keagamaan. Wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kepala jurusan (kajur) PAI di empat PTKIN, sekretaris jurusan (sekjur) PAI, dan beberapa mahasiswa yang menjadi responden.

Berdasarkan data absensi, mahasiswa jurusan PAI semester enam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, berjumlah 120 orang dari 3 rombel yang terdiri atas 36% laki-laki dan 64% perempuan. Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten semester enam berjumlah 172 orang dari 4 rombel terdiri atas 64% perempuan dan 36% laki-laki. UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjumlah 239 mahasiswa dari 6 rombel terdiri atas 43% laki-laki dan 57% perempuan. IAIN Syekh Nurjati Cirebon berjumlah 142 mahasiswa dari 4 rombel yang terdiri atas 60% perempuan dan 40% laki-laki. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yang menandakan bahwa profesi guru PAI lebih diminati oleh perempuan. Berdasarkan riwayat pendidikan, responden dari 4 PTKIN dari Madrasah Aliyah (MA), yaitu 59.5% lebih banyak dibandingkan pendidikan terakhir lainnya, sedangkan lainnya berlatar belakang SMA (31.75%), SMK (7.5%), SMAIT (1.5%), dan pondok pesantren (0.5%).

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Asal Kampus	Laki-Laki	Perempuan n	SMA	SMK	MA	SMAIT	Pondok Pesantren n	JML
1. UIN Jakarta	36	64	21	7	69	2	1	100
2. UIN Banten	36	64	29	7	63	-	-	100
3. UIN Bandung	43	57	34	6	60	-	-	100
4. IAIN Cirebon	40	60	43	10	46	1	-	100
Jumlah	155	245	127	30	238	3	1	400
	38.75%	61.25%	31.75 %	7.5%	59.5%	1.5%	0.5%	100%

2. Pemahaman Literasi Keagamaan Mahasiswa PAI

Pemahaman keagamaan merupakan salah satu dimensi literasi keagamaan yang diukur dalam kajian penelitian ini. Aspek yang ditanyakan meliputi materi PAI: Alquran, akidah, akhlak, fikih, dan SKI sebanyak sepuluh item pertanyaan. Penafsiran hasil penilaian menggunakan model kategorisasi jenjang dengan menempatkan mahasiswa dalam tiga tingkatan pemahaman literasi, yaitu pemahaman literasi tinggi, sedang, dan rendah dengan patokan rata-rata teoretis (μ) dan simpangan baku teoretis (σ), dengan perincian:

$X < (\mu - 1\sigma)$: Mahasiswa memiliki pemahaman literasi rendah

$(\mu - 1\sigma) \leq X < (\mu + 1\sigma)$: Mahasiswa memiliki pemahaman literasi sedang

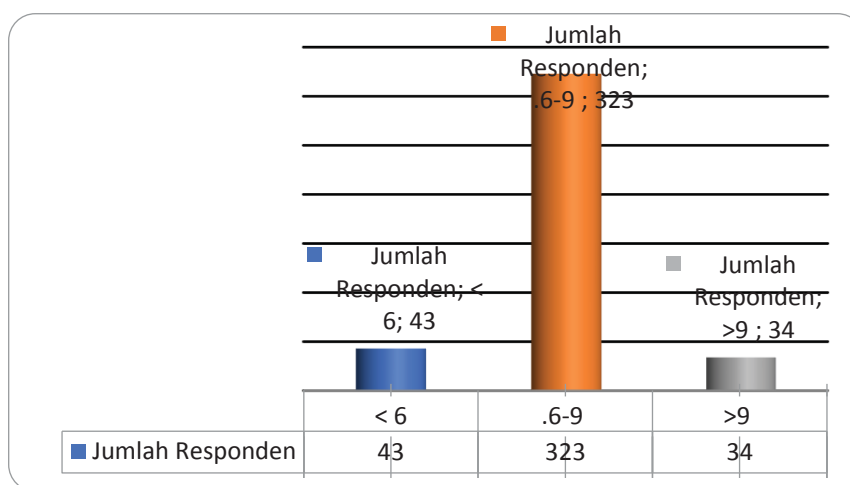
$X \geq (\mu + 1\sigma)$: Mahasiswa memiliki pemahaman literasi tinggi

Instrumen pemahaman literasi mahasiswa di PTKIN terdiri atas 10 butir dengan skor terendah = 1 dan skor tertinggi = 10, maka luas jarak sebaran menjadi $10 - 1 = 9$, sehingga besar σ (simpangan baku) = 1.504 dan μ (rata-rata teoretis) = 7.64. Untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil penilaian pemahaman literasi dilakukan dengan menggunakan instrumen dengan rentang hasil penilaian etika profesi sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Rentang Nilai Pemahaman Literasi di Empat PTKIN

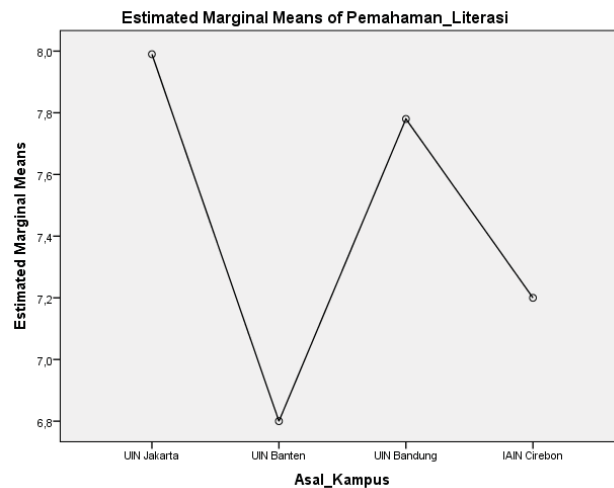
Skor dan Rentang Penilaian	Penafsiran Hasil Penilaian
1. Mahasiswa dengan skor < 6	Mahasiswa memiliki pemahaman literasi keagamaan Rendah
2. Mahasiswa dengan skor $6 \leq 9$	Mahasiswa memiliki pemahaman literasi keagamaan Sedang
3. Mahasiswa dengan skor ≥ 9	Mahasiswa memiliki pemahaman literasi keagamaan Tinggi

Tingkat pemahaman keagamaan dari 400 responden yang dikategorikan rendah sebesar 10.75%, kategori sedang sebesar 80.75%, dan kategori tinggi sebesar 8.5% sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 di bawah ini. Dapat dikatakan bahwa 400 responden mempunyai kemampuan pemahaman literasi yang baik. Responden yang memiliki skor kategori tinggi jumlahnya paling sedikit dibandingkan dua kategori lainnya.



Gambar 1 Pemahaman Literasi Keagamaan di Empat PTKIN

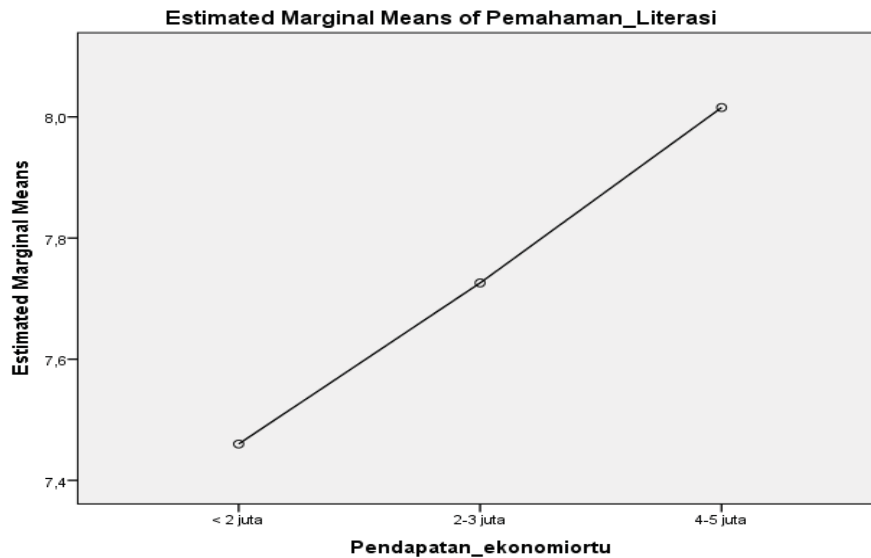
Berdasarkan asal kampus, pemahaman responden literasi keagamaan menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai pemahaman literasi tertinggi berasal dari UIN Jakarta, kemudian diikuti UIN Bandung, IAIN Cirebon, dan UIN Banten sebagaimana terlihat dalam Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Perbandingan Pemahaman Literasi Keagamaan Berdasarkan Asal Kampus

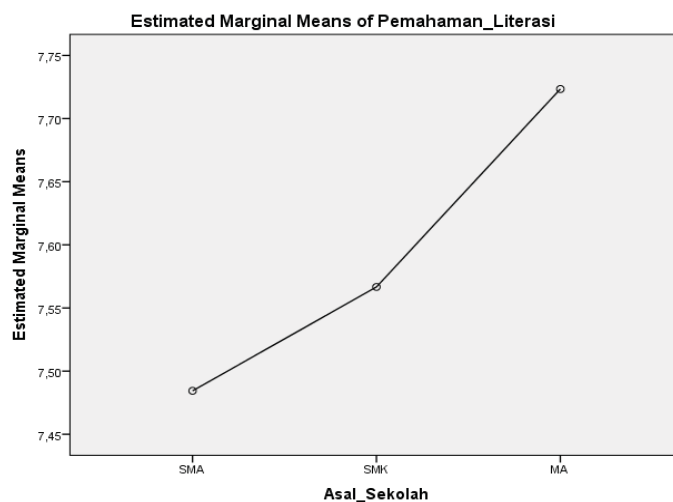
Tingginya tingkat pemahaman responden yang berasal dari UIN Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama* berdasarkan hasil daftar pemeringkatan Dirjen Pendis diketahui bahwa UIN Jakarta menempati peringkat pertama dalam kinerja perguruan tinggi. Selain itu, ditunjang oleh kinerja karyawan dan dosen yang baik, sehingga bisa melahirkan *output* mahasiswa yang berkualitas. *Kedua*, karena sistem seleksi di UIN Jakarta sangat ketat, sehingga hanya calon mahasiswa yang unggul saja yang bisa lulus. Tidak ditemukannya responden UIN Banten yang memiliki pemahaman literasi keagamaan terkategori tinggi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman literasi keagamaan di antara keempat PTKIN tersebut. Jika dilihat dari latar belakang riwayat pendidikan, beberapa responden UIN Banten terkategori rendah merupakan lulusan SMA, sedangkan responden yang terkategori sedang merupakan lulusan MA. Hal ini membuktikan bahwa materi PAI masih minim didapatkan para pelajar di sekolah umum.

Temuan menarik berikutnya adalah semakin tinggi pendapatan orang tua, semakin tinggi tingkat pemahaman literasi keagamaan responden sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 di bawah ini. Pendapatan ekonomi orang tuanya kurang dari dua juta, maka tingkat pemahaman literasi responden rendah. Hal ini disebabkan oleh fasilitas belajar yang diberikan orang tua dalam mendukung proses belajar, seperti pemenuhan pembelian buku, laptop, dan fasilitas kendaraan yang mendukung kelancaran aktivitas perkuliahan.



Gambar 3 Pemahaman Literasi Keagamaan Berdasarkan Pendapatan Orang Tua

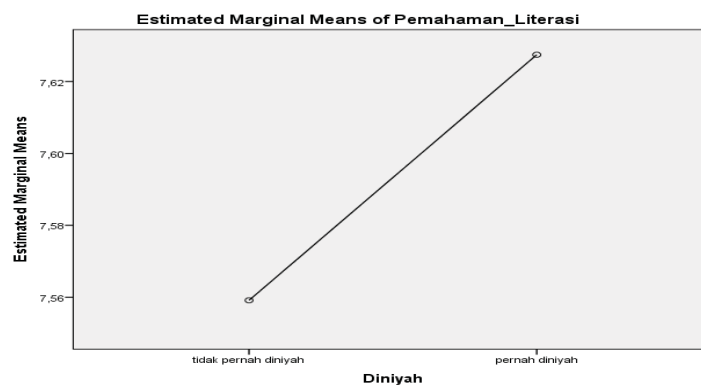
Jika dilihat berdasarkan asal sekolah, responden yang berasal dari MA lebih tinggi tingkat pemahaman literasi keagamaannya dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA. Minimnya pengetahuan agama yang didapat responden berlatar belakang sekolah umum menyebabkan rendahnya pemahaman literasi keagamaan. Responden yang berlatar belakang MA lebih banyak mendapatkan materi keagamaan, sehingga mereka lebih menguasai PAI sebagaimana terlihat dalam Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 Pemahaman Literasi Keagamaan Berdasarkan Asal Sekolah

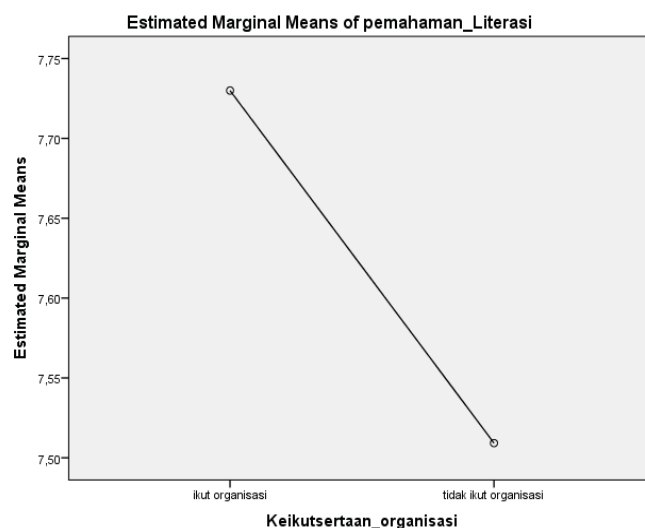
Hasil yang sama juga diperoleh dari responden yang telah mengenyam pendidikan madrasah diniyah. Responden yang pernah belajar di MD lebih tinggi tingkat pemahaman literasi keagamaannya dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak pernah belajar di MD. Hal tersebut terlihat dalam Gambar 5 di bawah ini. MD merupakan salah satu lembaga pendidikan agama di bawah naungan Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan PAI kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah umum (Departemen Agama RI, 2000: 7). Materi yang diajarkan pada MD adalah mata pelajaran ilmu-ilmu

agama, seperti fikih, tafsir, tauhid, dan ilmu-agama lainnya (Amin dan El Saha, 2004: 39). Oleh karena itu, MD bisa menjadi pilihan yang tepat bagi orang tua agar peserta didik yang sedikit mendapatkan materi PAI di sekolah umum dapat menambah wawasan keagamaannya.



Gambar 5 Pemahaman Literasi Keagamaan Berdasarkan Madrasah Diniyah

Responden yang mengikuti organisasi keagamaan, baik internal maupun eksternal kampus, memiliki tingkat pemahaman literasi keagamaan lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi keagamaan. Hal ini bisa menjadi rekomendasi kepada pihak fakultas untuk membuat kebijakan kampus agar mahasiswa aktif mengikuti kegiatan organisasi keagamaan, seperti HMI, PMII, dan IMM atau mengikuti kegiatan remaja masjid di sekitar lingkungan tempat tinggal mahasiswa sebagaimana terlihat dalam Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6 Pemahaman Literasi Keagamaan Berdasarkan Keikutsertaan Organisasi

Sumber: Literasi Keagamaan Mahasiswa PAI

Weber (2001: 102) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap teks atau sumber literatur yang berisi ajaran agama dapat menentukan pembentukan sikap dan perilaku sosial seseorang. Teks dan pemahaman atas dua sumber utama, yaitu Alquran dan hadis, adalah bagian yang terpenting dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam (Iswanto, 2015: 388). Adanya interpretasi dan pemikiran

terhadap kedua sumber tersebut memungkinkan munculnya teks-teks lanjutan berupa tafsir dan lain-lain. Literatur keagamaan, selain ceramah dan pendidikan keagamaan, juga menjadi salah satu sumber pengetahuan agama (Alam, dkk, 2007: 3).

Peneliti juga menanyakan beberapa sumber yang digunakan oleh responden sebagai pengayaan untuk memperdalam pengetahuan agama, baik di dalam maupun di luar kampus sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Persentase Sumber Literasi Keagamaan

No.	Indikator Sumber Literasi Keagamaan	Presentase
1.	Saya membaca buku keagamaan untuk menambah wawasan keagamaan.	87.35%
2.	Saya membaca buku keagamaan yang diwajibkan oleh dosen.	75.6%
3.	Saya membaca buku-buku keagamaan lain di luar bacaan kuliah.	76.15%
4.	Saya membaca berita- berita keagamaan dari koran.	57%
5.	Berita- berita keislaman yang ada di majalah sangat menarik untuk dibaca.	66.3%
6.	Saya merujuk kitab kuning dalam menjawab persoalan keagamaan.	70.65%
7.	Saya selalu mengikuti pengajian di masjid sekitar tempat tinggal.	73.05%
8.	Saya rutin mengikuti halaqah atau liqa' yang diadakan di kampus maupun di luar kampus.	63.05%
9.	Saya menggunakan internet untuk mencari informasi tentang keagamaan.	80.1%
10.	Saya menggunakan media sosial (facebook, whatsapp, instagram, line, youtube) untuk mendapatkan informasi keagamaan.	77.95%
11.	Saya mendapatkan informasi keagamaan dari orang tua.	84.7%
12.	Saya mendapatkan informasi keagamaan dari kyai/ulama.	90.9%

Penafsiran hasil penilaian dilakukan menggunakan skala *Likert* yang menempatkan mahasiswa dalam lima tingkatan pemahaman literasi: sangat buruk (20%), 40% (buruk), 60% (cukup baik), 80% (baik), dan 100% (sangat baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa responden keempat PTKIN itu terkategori baik dalam mencari sumber literasi keagamaan, baik melalui media *off line* maupun *online*. Hasilnya rentang nilai yang terdapat dalam Tabel 4 yang berada pada posisi cukup baik (60%) dan baik (80%).

Skor terendah terdapat pada indikator no.4 dengan 57%, yaitu sumber literasi keagamaan dari koran. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan mudah dan perubahan industri dari cetak ke digital menjadi penyebab menurunnya minat baca responden terhadap koran. Nilai tertinggi terdapat pada indikator no.12 dengan 90,9%, yaitu mendapatkan informasi keagamaan dari kiai atau ulama. Kiai/ulama yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengetahuan keagamaan responden adalah para kiai/ulama yang memberikan ceramah keagamaan, baik melalui tatap muka maupun media internet.

Responden lebih sering mendengarkan/menonton video ceramah melalui media internet. Abdul Somad dan Adi Hidayat menjadi penceramah yang paling diminati oleh para responden di empat PTKIN. Berbeda dengan IAIN Cirebon, Buya Yahya mempunyai tempat teratas setelah Abdul Somad dengan 21% sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Daftar Kiai Populer di Kalangan Mahasiswa di Empat PTKIN

Kiai	UIN Jakarta	UIN Banten	UIN Bandung	IAIN Cirebon
1. Abdul Somad	42%	32%	38%	23%

	Kiai	UIN Jakarta	UIN Banten	UIN Bandung	IAIN Cirebon
2.	Adi Hidayat	17%	25%	30%	12%
3.	Aa Gym	6%	1%	8%	-
4.	Habib Rizieq Shihab	5%	8%	13%	5%
5.	Buya Yahya	3%	1%	-	21%

Keberadaan internet saat ini memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai konten dan situs yang diminati. Hal tersebut juga berkaitan dengan penceramah yang diminati oleh responden dan lebih sering mendengarkan penceramah, baik secara *offline* maupun *online*, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Buya Yahya. Ketiga penceramah tersebut adalah simbol penceramah masa kini yang menggunakan konten *youtube* dan *instagram*. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan responden (17 Mei 2019) bahwa mahasiswa lebih tertarik mencari wawasan keagamaan melalui para penceramah atau ustadz *online* karena lebih mudah dipahami. Para ustadz yang digandrungi oleh para mahasiswa di antaranya adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Kholid Basalamah, dan Aa Gym.

Di samping kiai/ulama, buku keagamaan juga dikonsumsi oleh responden untuk meningkatkan literasi keagamaannya, seperti hadis, fikih, sejarah, dan tasawuf. Buku keagamaan yang banyak dibaca oleh mahasiswa berdasarkan disiplin keilmuan disajikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Buku Keagamaan yang Dibaca Mahasiswa di Empat PTKIN

	Buku	UIN Jakarta	UIN Banten	UIN Bandung	IAIN Cirebon
1.	Hadis	30%	4%	-	-
2.	Fiqih	-	24%	23%	28%
3.	Sejarah	-	8%	12%	53%
4.	Tasawuf	-	-	24%	13%

Berdasarkan tabel diatas, responden dari UIN Jakarta lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan hadis sebesar 30%, sedangkan responden UIN Banten lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan fikih sebesar 24%. Responden UIN Bandung lebih suka membaca buku bertemakan tasawuf sebesar 24%. Responden IAIN Cirebon lebih banyak membaca buku yang bertemakan sejarah sebesar 53%.

Media televisi yang banyak diakses oleh mahasiswa sebagai sumber literasi keagamaan terlihat dalam tabel di bawah ini. Stasiun televisi yang banyak ditonton oleh mahasiswa adalah TVOne dengan program “Damailah Indonesiaku”. Acara ini disukai oleh mahasiswa karena ditayangkan pada hari libur, penceramah yang beragam dari berbagai kelompok ormas, dan tema yang disampaikan aktual dan tidak mengandung unsur SARA. Stasiun televisi lain yang banyak ditonton oleh mahasiswa adalah program “Mamah dan AA” karena bahasa yang digunakan dan materi yang disampaikan mudah dipahami dan banyak memuat nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Stasiun televisi berikutnya adalah Trans TV dengan program “Islam Itu Indah” karena dibawakan dengan santai dan mengundang artis sebagai bintang tamu, dan berbeda dengan stasiun televisi yang lain.

Tabel 7 Program Televisi yang Banyak Disaksikan Mahasiswa di Empat PTKIN

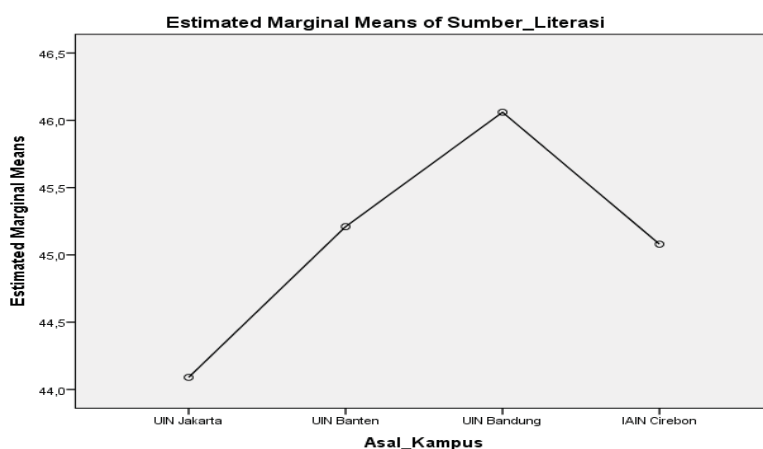
TV	UIN Jakarta	UIN Banten	UIN Bandung	IAIN Cirebon
TV One	38%	25%	21%	12%
Indosiar	21%	26%	35%	39%
Trans TV	17%	21%	11%	18%

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa banyak sekali situs yang diakses oleh responden. Selain itu, kebanyakan responden tidak menyebutkan nama konten secara lebih detail, tetapi hanya menyebut secara umum, misalnya *youtube* dan *instagram*. Konten yang sering diakses oleh mahasiswa adalah “Tafaquh Online” sebesar 42% dari empat PTKIN. Konten “Tafaquh Online” berisi ceramah Ustadz Abdul Somad. Konten berikutnya adalah Akhyar TV sebesar 57% dari empat PTKIN. Konten ini juga berisi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat.

Tabel 8 Website Paling Banyak Diakses Mahasiswa di Empat PTKIN

WEB/MEDSOS	UIN Jakarta	UIN Banten	UIN Bandung	IAIN Cirebon
1. Tafaquh Online	15%	7%	14%	6%
2. Akhyar TV	10%	11%	32%	4%
3. Rodja TV	10%	5%	14%	-
4. Shif Media	10%	-	-	-
5. Narasi TV	10%	-	-	-
6. NU Online	10%	-	-	-
7. Yufid Tv	5%	3%		
8. Al Bahjah	4%			
9. youtube	16%	35%	20%	55%
10. Instagram	10%	39%	20%	35%

Dengan membandingkan sumber literasi keagamaan dari keempat PTKIN (lihat Gambar 7), akses sumber literasi keagamaan mahasiswa UIN Bandung lebih tinggi, lalu diikuti oleh UIN Banten dan IAIN Cirebon. UIN Jakarta memiliki akses sumber literasi yang paling rendah dari kampus yang lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Asosiasi Penyedia Jasa Layanan Internet (APJI) bahwa Bandung menempati posisi kedua dalam peta gerakan literasi digital di Indonesia setelah Kota Yogyakarta.



Gambar 7 Perbandingan Sumber Literasi Berdasarkan Asal Kampus

Semakin banyak sumber literasi yang diakses mahasiswa, semakin tinggi pula tingkat pemahaman literasinya. Hal ini terbukti melalui analisis dengan menggunakan regresi sederhana.

Model	Sum Squares	of df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7,195	1	7,195	4,388	,037 ^b
1 Residual	557,425	340	1,639		
Total	564,620	341			
a. <i>Dependent Variable:</i> Tingkat_Pemahaman Literasi					
b. <i>Predictors:</i> (Constant), Sumber_Literasi					

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai *sig/p-value* $0.037 < 0.05$, maka H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa ada pengaruh signifikan antara sumber literasi terhadap tingkat pemahaman literasi keagamaan mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak sumber literasi yang diakses oleh mahasiswa, semakin tinggi pula tingkat pemahaman mereka terhadap literasi.

E. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman literasi keagamaan mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di PTKIN di Jawa Barat dan Banten terkategori *baik*. Pemahaman mereka dianggap *baik* terlihat dari kemampuan mereka menjawab materi PAI tentang materi Alquran, akidah, akhlak, fikih, SKI, dan sumber literasi keagamaan yang sering diakses.

Berdasarkan asal kampus, pemahaman responden literasi keagamaan dari keempat PTKIN tersebut bahwa mahasiswa yang mempunyai pemahaman literasi tertinggi berasal dari UIN Jakarta, kemudian diikuti UIN Bandung, IAIN Cirebon, dan UIN Banten.

Tingginya tingkat pemahaman responden yang berasal dari UIN Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor: *Pertama*, berdasarkan hasil daftar pemeringkatan Dirjen Pendis, UIN Jakarta menempati peringkat pertama dalam kinerja perguruan tinggi. Kinerja karyawan dan dosen yang baik juga faktor penting dalam melahirkan *output* mahasiswa yang berkualitas. *Kedua*, sistem seleksi di UIN Jakarta sangat ketat, sehingga hanya calon mahasiswa yang unggul/pintar yang bisa lulus. Tidak ditemukannya responden UIN Banten yang memiliki pemahaman literasi keagamaan terkategori tinggi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman literasi keagamaan mereka di antara keempat PTKIN tersebut. Dilihat dari latar belakang riwayat pendidikan beberapa responden UIN Banten terkategori rendah adalah lulusan SMA, sedangkan responden yang terkategori sedang adalah lulusan MA. Hal ini membuktikan bahwa materi PAI masih minim didapatkan oleh para siswa di sekolah umum.

Mahasiswa lebih suka mendapatkan informasi keagamaan dari kiai/ulama, baik melalui *online* maupun *offline*. Keberadaan internet saat ini memudahkan setiap orang untuk mengakses konten dan situs yang diminati. Hal tersebut berkaitan dengan penceramah yang diminati oleh responden, yang lebih sering mendengarkan penceramah, baik secara *offline* maupun *online*, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Buya Yahya. Ketiga penceramah tersebut adalah simbol penceramah masa kini melalui konten *youtube* dan *instagram*.

Sumber literasi yang kurang diminati oleh mahasiswa adalah koran. Perkembangan teknologi informasi dari media cetak ke digital menjadi penyebab utama menurunnya minat baca responden terhadap koran.

Untuk meningkatkan pemahaman literasi keagamaan mahasiswa, penelitian ini merekomendasikan agar sivitas akademika PTKIN membuat kebijakan yang menekankan bahwa mahasiswa prodi keagamaan diutamakan berasal dari lulusan madrasah aliyah dan pesantren. Mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi untuk pendalaman pemahaman keagamaan. Pihak FITK juga perlu membuat kebijakan yang mewajibkan mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan agar dapat mengetahui fenomena keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal dan M. Taufik Ismail. 2017. "Indeks Budaya Literasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2017". Jurnal SUHUF, Vol. 29, No. 2, November 2017.
- Al-Syami, Abdul Raqib Sholeh. 2018. *Fiqh al-Din wa al-Tadayyun*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alam, Rudy Harisyah, dkk. 2007. *Akses Literatur Keagamaan pada Masyarakat Muslim*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Alvara Research Center, 2017. *Radicalism Rising Among Educated People?* Jakarta: Alvara Research Center.
- Amin, Haedar dan El-Saha Isham. 2004. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Antoro, Billy. 2017. *Gerakan Literasi Sekolah: Dari Pucuk Hingga Akar Sebuah Refleksi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Baedowi, Ahmad. 2012. *Calak Edu 1: Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*. Jakarta: Alvabet.
- Creswell, John W. 2016. *Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2000. *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Departemen Agama.
- Dinham, Adam dan Stephen H Jones. 2010. *Religious Literacy Leadership in Higher Education: An Analysis of Challenges of Religious Faith, and Resources for Meeting Them, for University Leader*. York St John University Lord Mayor's Walk: Religious Literacy Leadership In Higher Education Programme.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Halim, Nurdin Abdul. 2015. "Penggunaan Media Internet di Kalangan Remaja untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman" *Jurnal RISALAH* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Vol.26 No.3.
- Hasan, Noorhaidi. 2010. *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Literasi> "Literasi". Diunduh pada 29 April 2019
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keagamaan>. "Keagamaan" diunduh pada 29 April 2019
- Ihsan. 2018. "Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Berbasis Literasi Pesantren". *Libraria*, Vol. 6, No. 1, Juni 2018.

- Iswanto, Agus dkk. 2017. *Tingkat Literasi Al-Quran Siswa SMP di Jawa Timur dan DI Yogyakarta*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.
- _____. 2018. *Praktik Literasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- _____. 2015. "Literatur Keagamaan Aktivis Rohani Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA): Studi Kasus di Kota Serang Propinsi Banten". *Jurnal Edukasi*, Vol. 13, No. 3, Desember 2015.
- Jahroni, Jajang dan Irfan Abubakar. 2019. *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Jones, Stephen H., 2015. "Religious Literacy in Higher Education" dalam Adam Dinham & Matthew Francis, *Religious Literacy in Policy and Practice*. Bristol: Policy Press, 2015, h.187.
- Kirsch, Irwin S, dan Ann Jungeblut. 1993. *Literacy: Profile of America's Young Adult*. Princeton: Educational Testing Service.
- Kusmana, Suherli, 2017. "Pengembangan Budaya Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia" Makalah Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Latief, Hilman. 2010. "Youth, Mosques and Islamic Activism: Islamic Source Books in University Based Halaqah" *Kultur*, Vol.5 No.1.
- Ma'mur, Lizamudin. 2010. *Membangun Budaya Literasi*. Jakarta: Diadit Media.
- Maulana, Dirga. 2017. "The Exclusivism of Religion Teachers: Intolerance and Radicalism in Indonesian Public Schools". *Studia Islamika*, Vol.24, No.2.
- Moore, Diane L. 2006. *Overcoming Religious Illiteracy: A Cultural Studies Approach*. World History Connected 4, No. 1.
- Nugrahini, Eka dkk. 2016. "Gerakan Literasi untuk Tumbuhkan Budaya Literasi". Media Komunikasi dan Inspirasi: JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan, VI/ Oktober, 2016.
- Nurzakiyah, Cucu. 2018. "Literasi Agama sebagai Alternatif Pendidikan Moral". JPA, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Prothero, Stephen. 2007. *Religious Literacy: What Every American Needs to Know – and Doesn't*, Harper Collins E-books.
- Retnaningdyah, Pratiwi. 2016. *Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saefullah, Asep. 2008. "Peta Lektur Keagamaan pada Kelompok Keagamaan di IPB: Benang Merah Gerakan Islam Asasi." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 6 No. 1.
- Saidah, Zakiyatus, 2018. "Pengembangan Budaya Literasi dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu, Skripsi Jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Skerrett, Allison. *Religious Literacies in a Secular Literacy Classroom*. International Literacy Association and Wiley, <https://www.jstor.org/stable/43497631>Page Count: 18.

- Solihin, Lukman, dkk. 2019. *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Propinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suranto, AW. 2010. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010. *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Jahja. 2012. "Peran Pengukuran dan Analisis Statistika dalam Penelitian Psikologi". *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, Vol 1, No. 1, Januari 2012.
- Weber, Max. 2001. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Terbit pertama kali 1930. Diterjemahkan oleh Talcott Parsons. London: Routledge Classics.
- Wibowo, A.M. 2014. "Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Melalui Mata Pelajaran PAI pada SMA Eks RSBI di Pekalongan". *Jurnal Analisa: Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol. 21 No. 02 Desember, Balai Litbang Agama Semarang.
- Wildan, Muhammad. 2019. *Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CISFormUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zada, Khamami. 2009. "Radikalisme di Jantung Pendidikan Islam". *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Penda, Vol. VII.

NOTULA

Hari/Tanggal	: Selasa/19 November 2019
Jadwal Paparan	: Sesi ke: 4 Panel No: 12
Ruang	: Pajajaran 4
Waktu	: 15.45–17.45 WIB
Judul Penelitian	: 1. Penguatan Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Multikultur 2. Perjumpaan untuk Memperkuat Kebhinekaan: Studi pada 3 SMA Negeri di DKI Jakarta 3. Sikap Keberagaman Siswa (Gen Z) dan Guru 4. Literasi Keagamaan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Barat dan Banten
Penyaji	: 1. Mikka Wildha Nurrochsyam, SS, M.Hum 2. Anggi Afriansyah, M.Si 3. Aziz Awaludin, S.Ag., M.Ed. 4. Mahmudah Nur, S.Pd.I
Pembahas	: 1. Cahyo Pamungkas, Ph.D 2. Dr. Widodo Supraha
Moderator	: Ferdi Widiputera, S.E., M.E
Notulis	: Ais Irmawati, M.Si

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
1.	Penyaji/Pemakalah : (Berisi hasil pemaparan dari pemakalah/penyaji)	16. Latar Belakang Dalam masyarakat multikultur setiap orang dituntut untuk bersikap sesuai dengan etika tentang tingkah laku yang baik. Situasi masyarakat Indonesia yang plural memerlukan nilai karakter utama seperti komunikatif, solidaritas, kerukunan, persaudaraan keadilan nilai-nilai lainnya yang menyatukan sehingga keutuhan masyarakat Indonesia menjadi solid. Transformasi nilai-nilai karakter utama dalam masyarakat multikultur itu akan menjadi efektif kalau dilaksanakan melalui pendidikan. Permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah menerapkan karakter utama religiositas dan nasionalis dalam masyarakat multikultur dalam program Penguatan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan? Hasil a. Karakter Utama Religiositas dalam Masyarakat Multikultur masih cenderung diimplementasikan secara simbolik, melalui pemahaman agama secara “halal” dan “haram” dan pemahaman agama secara tekstual cenderung dominan. tetapi belum menyentuh pelaksanaan untuk membangkitkan spirit agama, b. Karakter Utama Nasionalis dalam Masyarakat Multikultur masih cenderung diimplementasikan secara normatif-simbolik berupa praktik-praktik cinta negara dengan melaksanakan hapalan Pancasila, upacara bendera, baris-berbaris dan menyanyikan lagu Indonesia raya, belum menyentuh sikap patriotisme yang memberikan spirit untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi persaingan global abad 21

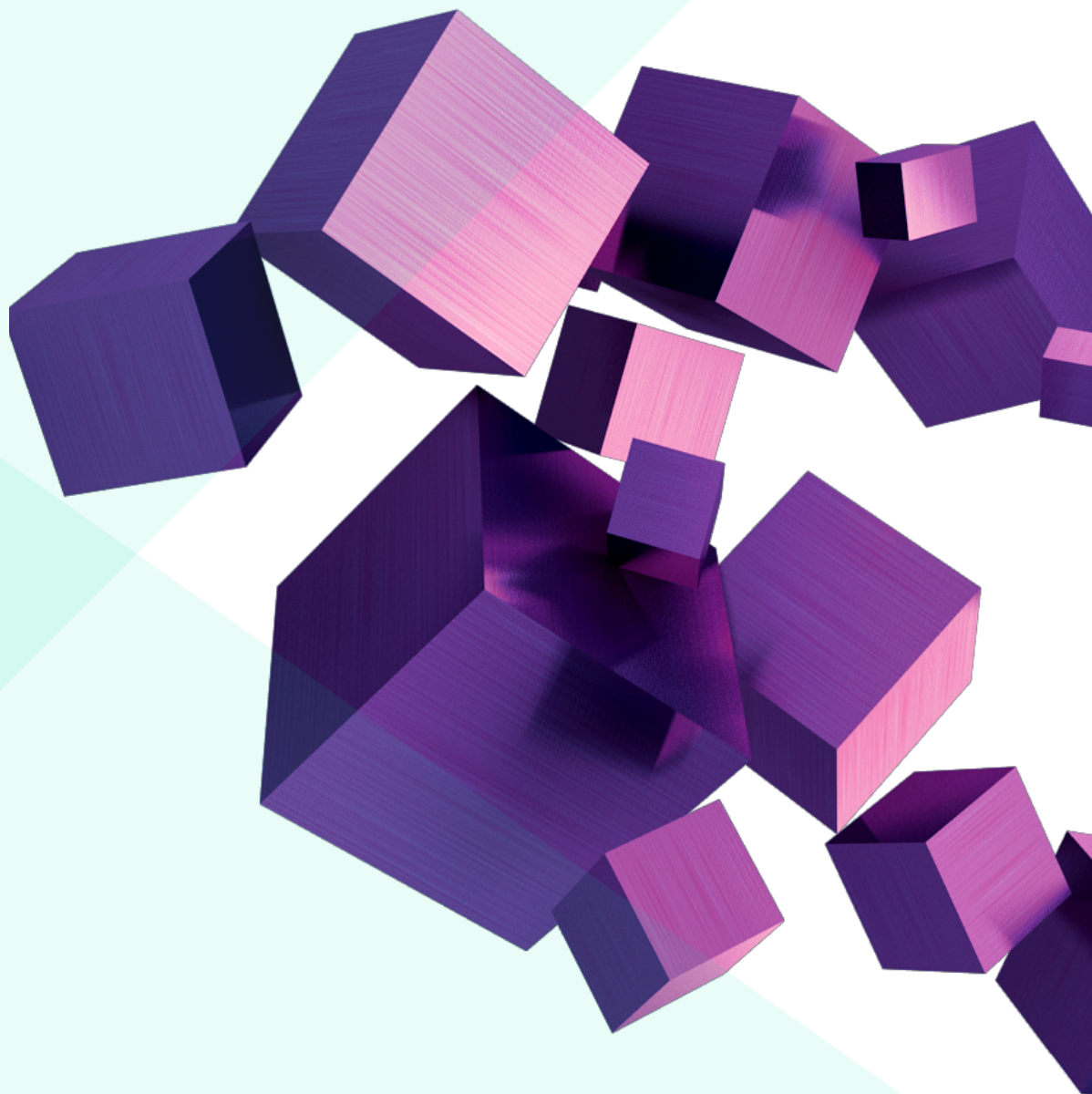
NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		2. Sekolah negeri menjadi ruang dimana beragam anak yang memiliki latar sosial, budaya, agama, maupun ekonomi yang berbeda berjumpa. Namun, dari hasil kajian di tiga SMA Negeri di Jakarta potensi sekolah sebagai ruang perjumpaan yang dapat memperkuat ikatan kebinekaan di antara para siswa pada tiga arena, yaitu: 1) di ruang pembelajaran di kelas, 2) pada ruang-ruang pertemuan di dalam wilayah sekolah, 3), pada ruang eksternal yang memungkinkan anak-anak berjumpa dengan para siswa di sekolah lain. 3. Masalah intoleransi, radikalisme hingga ekstremisme berkekerasan adalah masalah yang mendera negara multikultural ini sejak lama, di balik segala kebinekaan dan tantangan menyelaraskan perbedaan yang ada. Berbagai penelitian telah dilakukan dapat menangkap fenomena yang sedang terjadi. Hasilnya adalah benih-benih intoleransi dan radikalisme ternyata juga tumbuh subur di ruang kelas, untuk itu Indonesia, sebagai negara multicultural, berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif. 4. Hasil kajian ini menemukan bahwa pemahaman literasi keagamaan Islam mahasiswa di empat PTKIN terkategori baik yang diacu dari sumber yang beragam. Sumber-sumber literasi keagamaan tersebut mencakup media televisi, internet, buku-buku keagamaan baik untuk menambah wawasan atau menunjang tugas mata kuliah. Selain merujuk pada berbagai sumber literatur keagamaan, para mahasiswa juga mengikuti berbagai kajian dari beragam pendakwah.
2.	Pembahas : <i>(Berisi pembahasan hasil penelitian oleh pembahas)</i>	Nama Pembahas 1. Cahyo Pamungkas, Ph.D Mikka Wildha Penelitian ini sudah mengalami perbedaan dari waktu dibaca dulu. Beberapa catatan 1. penelitian ini penting untuk akademik dan kebijakan, karena terbentuknya penguatan peserta didik 2. Memperkuat kepribadian, sebagai moral kemasyarakatan bagi peserta didik 3. Argumentasi penelitian ini dari kemajemukan yang tidak secara otomatis mendorong ketegangan social, 4. Religiusitas tidak hanya keagamaan tapi juga ideologis, religiucentris. Agama lain positif dan agama orang lain negative. 5. Konflik ambon, poso, tolikara, tidak sepenuhnya berasal dari agama tapi perubahan elit yang merasa terancam, yang lebih tepat mendukung gagasan ini adalah sunni-syiah. 6. Dari 5 karakter utama, ada dua karakter religiusitas dan nasionalisme yang penting 7. Tinjauan pustakanya bagus, ada etika diskursus Habermas, kalau tinjauan pustakanya dibahas, bisa masuk ke jurnal internasional

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		8. Konsep negara integralistis, yang telah dikritik adnan buyung nasution. 9. Bagaimana etika diskursus bias dituliskan menjadi implikasi teori. 10. Etika diskursus kalua diletakkan di arena kekuasaan, bias menjadi masalah 11. Panduan agama halal dan haram, ekspresi identitas muncul pada agama yang plural. 12. Batasan rasional dan tidak rasional, perlu ditambahkan, dan dieksplorasi lebih lanjut. Anggi Tugas Mas Anggi menyelesaikan tulisan ini yang belum selesai. Tolong ditambah mengapa di sekolah negeri yang seharusnya terjadi heterogenitas, tidak terjadi. Mungkin bias ditambahkan dengan tulisan Ibu... karena mas Anggi menyampaikan di sekolah negeri tidak heterogenitas. Tolong jelaskan ada berapa tingkatan intoleransi dan radikalisma? Bagaimana paradigma Pendidikan yang terkait dengan keberagamaan? Tipe ideal bagaimana sekolah itu menjadi system social? Belum melihat praktiknya/implementasi tipe ideal lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Ruang pertemuan, seperti ikatan kekeluargaan mendorong kohesi social, mengurugi prasangka. Sekolah bukan entitas otonom yang terpisah dari konteks social, segregasi pemukiman, mahasiswa di kampus, dan sekolah, misalnya di ambon, siswa di rumah lingkungan islam, akan sekolah ke arah sekolah islam Pak Aziz dan Ibu Dani Implikasi hasil penelitian, di halaman terakhir, dituliskan ada 4 hal terkait intoleransi dan radikalisma. Semakin miskin semakin intoleran. Guru tk lebih intoleran dibanding lainnya, guru perempuan lbh intoleran dibanding guru laki, guru madrasah lebih intoleran daripada guru lain. Orientasi keagamaan berubah, tingkat toleransi tidak berubah sejak tahun 2016. Tapi sejak tahun 2016 intoleransi semakin bertambah, sebenarnya bukan masalah kesedihan, tapi religious entreupreuneur yg menjadi determinan yang signifikan dalam ekstasi. Ibu Mahmudah Nur

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Sequential exploratory. Belum terbaca hasil penelitian kualitatif. Apa ada temuan kualitatif yang tidak mendukung temuan kuantitatif. Apa ada tiranggulasi. Sumber literasi, kenapa tidak dimasukkan indikator kategoris? Perlu ditambah narasi kualitatif. 2. Dr. Wido Supraha Terkait isu berulang terhadap intoleransi dan radikal terhadap agama Islam, sehingga Islam terkesan sebagai agama intoleran. Jangan sampai kita menimbulkan paradigma agama yg toleran tapi tidak memahami agamanya Mikka Ada kritik pengajaran agama masih simbolik, sehingga masih masuk agama fiqih, harus dipahami dari struktur agama Islam, yaitu aqidah, iman, dan akhlak. Jadi kalau Pendidikan multi kultur pada social kemanusiaan, terkait dengan akhlak. Jangan sampai anak menjadi toleran tapi tidak kenal halal haram, yang membuat menjadi agnostic. Bagaimana menyadari beragama baik, tapi toleran Ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat Islam menjadi berbahaya. Halaman 2, religiusitas kearah ideologis, agak rentan melahirkan dampak yang kurang baik. Ada buku Franz Magnis Suseno menjadi pengikut Kristus sejati, menjadi toleran. Religiusitas searah dengan nalar, searah dengan ibu mahmudah Kebenaran akan nilai ditemukan dalam dialog, agak menjadi tanda tanya Ada konsep liberalisme terjadi karena meninggalkan kebudayaan, seharusnya meninggalkan agama. Apresiasi rekomendasi menyelipkan ayat2 dalam literasi yang baik dalam pelajaran sains. Ada dikotomi antara tokoh agama dan tokoh sains. Seharusnya bagaimana meningkatkan tokoh agama menjadi tokoh sains. Anggi Pengkondisian sekolah ujung akhirnya ujian nasional, maka akan menguatkan semangat individualism. Bagaimana kalau lebih banyak menanamkan anak sekolah kearah lebih banyak ekspornya drpd impornya, negara menjadi maju kalau ekspornya lebih banyak, dipasarkan pada pasar Bersama. Perjumpaan, perlu dikaitkan dengan perjumpaan dengan gurunya dulu. Bagaimana muncul fakta bahwa di sekolah negeri guru agamanya sedikit. Padahal harusnya gurunya juga bermacam2, harusnya melahirkan guru agama yg lebih banyak, agar anak2 lebih paham agamanya. Perjumpaan

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		dgn guru agama lebih banyak, lebih baik. Karena kalau siswanya heterogen, sementara gurunya belum paham kan percuma Hak asasi mendahului nilai agama, harusnya dibalik. Agama dulu baru hak asasi Azis Belum melihat sesuatu yang baru, karena ingin menguji kembali yang sebelumnya mendapat penolakan. Masukan itu jadi hilang, Penelitian ini mengulang kembali, dan sisi kritisnya belum ketemu. Contohnya ada kabar baik, dan kabar tidak baik. Ini baik untuk siapa dan tidak baik untuk siapa? Jenis variable, apakah tidak toleran, kalau tidak bilang selamat natal. Jangan2 peneliti tidak toleran terhadap toleransi. Misalnya tentang rumah ibadah, padahal ada SKB tiga Menteri. Yang tidak tertuang pada tulisan. Ada kualitas jenis sampel, kualitas jenis judul, apakah memberi aura negative? Ibu Mahmudah Hasilnya sangat lengkap dan detil. Paparannya sistematis, konsisten, rekomendasinya sangat baik. Jawaban Penyaji Mikka Pemahaman rasional adalah pemahaman yang berdasarkan kemanusiaan. Misalnya kafir boleh dibunuh, atau salam dari non muslim tidak boleh dijawab, itu artinya tidak mengenakan kemanusiaan Religiusitas perlu diperbaiki lagi Anggi 1) Tulisan ini masih banyak perlu perbaikan termasuk elaborasi teori dan temuan 2) Banyak hal yang dapat mendiagnosis permasalahan Pendidikan 3) guru agama perlu dibangun perjumpaannya, ada keterbatasan penyediaan guru, kalau murid agamanya Cuma dua, masa gurunya harus diperbanyak Azis Penelitian sebelumnya, terkait unit analisis yang ditemukan. Dimana hanya berfokus pada Pendidikan, siswa. Temuan terkait sekolah swasta dan sekolah negeri adalah homogen dan heterogen Tanggapan terhadap Pak Wido

NO.	ASPEK	URAIAN PEMBAHASAN
		Tidak ada yang baru. Panitia meminta mempresentasikan lagi, kita menggabung, bukannya tidak mendengar masukan dari Bappenas. Tp tetap menjunjung tinggi keagamaan Mahmudah Hasil penelitiannya sudah dimixed, tapi mungkin kualitatif belum dielaborasi, jadi bias dielaborasi
3.	Diskusi/Tanya Jawab : <i>(Berisi hasil tanya jawab oleh peserta seminar, silakan buat per poin tiap pertanyaan dan tuliskan nama peserta yang bertanya dan hasil diskusinya)</i>	----
4.	Penutupan :	Paparan seminar selesai pukul 18.05 WIB.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

 <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

 [puslitjak.kemdikbud](https://www.instagram.com/puslitjak.kemdikbud)

 021-5736365, 5713827

ISBN 978-602-0792-61-3



9 786020 792613